REPUBLIK INDONESIA

DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

DAERAH ISTIMEWA
JOGJAKARTA

*Tjandi **Prambanan** merupakan salah satu kemegahan bagi daerah Jogiakarta.*

REPUBLIK INDONESIA

DAERAH ISTIMEWA

JOGJAKARTA

KEMENTERIAN PENERANGAN

REP. INDONESIA
JOGJAKARTA
KARESIDENAN-SURAKARTA
GUNUNG-KIDUL
PATUK
NGLIPAR
SEMIN
PLAJEN
KARANGMODJO
WONOSARI
PONDJONG
SEMANU
PALIJAN
PANGGANG
RONGKOP
TEPUS
INDIA
KALASAN
PRAMBANAN
BERBAH
PIJUNGAN

DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
MENURUT PROKLAMASI 17 AUG 1945
(HINDIA BELANDA DULU)
KOTARADJA
MEDAN
SIBOLGA
SUMATERA
BUKIT-TINGGI
PADANG
DJAMBI
PALEMBANG
BENGKULEN
TELUKBETUNG
TANDJUNG-PINANG
PANGKAL PINANG
DJAKARTA
BANDUNG
DJAWA
SEMARANG
SURABAJA
JOGJAKARTA
KALIMANTAN
PONTIANAK
BANDJARMASIN
SULAWESI
MAKASSAR
MENADO
TERNATE
AMBON
KUPANG
IRIAN

DAERAH
REP. INDONESIA
MENURUT PERSETUDJUAN
LINGGADJATI
25 MARET 1947
KUTARADJA
MEDAN
SIBOLGA
SUMATERA
BUKIT-TINGGI
PADANG
DJAMBI
PANGKALPINANG
PALEMBANG
BENGKULEN
TELUKBETUNG
TANDJUNG PINANG
KALIMANTAN
PONTIANAK
BANDJARMASIN
DJAKARTA
BANDUNG
SEMARANG
SURABAJA
JOGJAKARTA
DJAWA
IBU KOTA REPUBLIK INDONESIA
SULAWESI
MENADO
TERNATE
MAKASSAR
AMBON
KUPANG
IRIAN
MERAUKE

DAERAH
REP. INDONESIA
MENURUT PERSETUDJUAN
RENVILLE
17 DJANUARI 1948
KUTARADJA
MEDAN
SIBOLGA
SUMATERA
PADANG
DJAMBI
PANGKALPINANG
PALEMBANG
BENGKULEN
TELUKBETUNG
DJAKARTA
BANDUNG
DJAWA
SEMARANG
SURABAJA
JOGJAKARTA
KALIMANTAN
PONTIANAK
BANDJARMASIN
SULAWESI
MENADO
MAKASSAR
AMBON
IRIA
MERAU
KUPANG
IBU KOTA REPUBLIK INDONESIA

Djokjakarta mendjadi termasjhur oleh karena djiwa-kemerdekaannja. Hidupkanlah terus djiwa-kemerdekaan itu!

Soekarno.—

VII TAHUN
DAERAH ISTIMEWA
JOGJAKARTA

ISI BUKU

Halaman

Halaman

Halaman

Halaman

* *
*

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Halaman

Halaman

* *
*

KATA - PENGANTAR

PENERBITAN ini sesuai dengan instruksi Kementerian Penerangan, diusahakan untuk bisa didjadikan sumber bagi angkatan dimasa datang jang hendak menengok kebelakang dengan sedapat-dapatnja dikumpulkan dokumentasi jang tjermat dan bertanggung djawab, mengenai peristiwa-peristiwanja dan kebenaran dalam rangkaiannja satu sama lain. Dalam pada itu diakui pula, bahwa tjara menindjau dan menghubungkan satu sama lain tentu berbeda dari pada tiap golongan ataupun orang seorang. Hal ini tergantung kepada pendapat masing-masing. Walaupun demikian selalu diingat untuk menghidangkan segala sesuatunja dengan sewadjarnja. Lebih djelas lagi bolehlah dikatakan, bahwa dalam menjusun isinja diambil sikap: menempatkan diri diatas segala kepentingan golongan. Selalu berpedoman kepada PANTJA SILA PENERANGAN. Untuk dapat mendekati antjer-antjer jang digariskan itu, maka pengumpulan ini antaranja dilakukan dengan mendatangi djawatan-djawatan atau pihak jang langsung berhubungan dengan soal-soal jang dikerdjakan seharihari. Dalam buku ini dimuat diantaranja: sumbangan-sumbangan dari Kantor Kewarga-Negaraan Daerah-Istimewa Jogja, Djawatan Sosial Kotapradja, Kepala Djawatan Transmigrasi, Kepala Kantor B.R.N. Jogja, Bag. Pendidikan/penghubung Masjarakat B. R. N., Wakil Kepala Djawatan Sosial Bag. Kesehatan, dan lainnja, djuga kutipan-kutipan dari beberapa Madjalah dan Harian-harian di Jogja. Untuk segala bantuan berupa apa sadja, baik dari instansi, maupun organisasi ataupun perseorangan kami mengutjapkan terima kasih sebanjak-banjaknja. Tapi, bagaimanapun besarnja bantuan dari semua golongan itu, masih djuga terdapat kekurangan. Banjak dokumentasi jang berharga hilang tertjetjer karena berpindah-pindahnja tempat perdjuangan. Dan terutama sekali disebabkan oleh serangan Belanda sampai dua kali. Ada bahan-bahan jang penting untuk sedjarah terpaksa ditinggalkan karena tak sempat untuk diamankan. Ada pula jang terpaksa harus dibakar atau dihantjurkan, jang lebih terkenal dengan istilah „dibumi-hanguskan". Selain tjatatan-tjatatan banjak jang hilang, pun dokumentasi foto tak sedikit jang tiada diketahui dimana sisanja. Begitu pula „sumber dokumentasi hidup" tidak lengkap karena banjak orang-orang jang berdjuang selama revolusi, telah lebih dulu meninggalkan kita, terutama jang mengalami naik-turunnja perdjuangan dimasa sulit itu dengan serta merta.

Apa jang dihidangkan ini menggambarkan suka-duka tiap warga negara dan golongan-golongan jang berdjuang, jang terdiri dari bermatjam-matjam kejakinan dan kepertjajaan, warna dan tjorak. Kalau kita suka merenungkan sebentar dalam membatjanja, sambil memedjamkan mata sedjenak, — akan terdengarlah titik-titik tetesan darah, — akan terbajang lagi mereka luka-luka parah, — akan menjintuh anak telinga kembali suara merintih mengandung pedih, — dan disampingnja itu menjela gelak gembira, jang merupakan irama surut-pasangnja perdjuangan raksasa jang maha hebat.

Adapun systematik dan komposisi seluruhnja, disana-sini diadakan perubahan pada bahan-bahan jang masuk, dengan tak menghilangkan ma'na. Ini hanjalah

sekedar oleh keharusan mentjari hubungan satu dan lainnja, supaja isi dan bentuk seluruhnja dapat berimbang. Supaja djanganlah satu bagian mendjadi terlepas daripada jang lainnja seperti pasir kering. Komposisi memang memerlukan semen penjambungnja, hingga — andaikata orang mendirikan gedung — merupakan suatu bangunan jang harmonis. Sebuah gedung batu atau marmer kalau dilihat bagian-bagiannja satu persatu, akan nampak bahwa ada pasir, batu, kaju, paku, katja, genteng, kapur, tjat. Masing-masing mempunjai sifat, tempat dan „tugas" sendiri, jang dalam hubungan satu dan lainnja merupakan SATU gedung indah megah. Laras dan keindahannja djustru terletak dalam terkumpulnja bagian-bagian jang berdjenis-djenis itu mendjadi satu bentuk jang bulat. Namanja sudah mendjadi gedung atau mahligai atau mesdjid. Bukan lagi bernama batu, semen, kaju, paku, tjat jang sendiri-sendiri. Dalam keanekawarnaan jang mendjadi SATU paduan itulah letak larasnja. In de eenheid der verscheidenheid ligt de schoonheid.

Pun isi buku ini seperti djenis-djenis bagian gedung tadi ada jang mengenai ekonomi, pendidikan, agama, pekerdjaan umum, perhubungan, kesenian, kebudajaan, ketentaraan, dan lain-lainnja. Inilah jang merupakan bagian-bagian dari pada masjarakat manusia jang hidup dalam satu bagian daripada Negara Republik Indonesia jang besar. Tiap bagian itulah mengandung unsur hidup manusia dilapangan ekonomi, sosial, pendidikan, agama, lalu lintas, dan lain sebagainja. Tiap bagian ini bukan berdiri sendiri, tapi semuanja merupakan suatu integriteit jang tiada terpisah-pisah. Satu sama lain butuh membutuhkan. Tiap hasil usaha orang dilapangan ekonomi pasti dipetik oleh dan diperuntukkan kepada mereka jang bekerdja misalnja dilapangan pendidikan. Hasil usaha kaum pendidik pasti diperlukan oleh dan diperuntukkan djuga kepada militer, polisi, organisasi atau pun lingkungan kepegawaian. Begitulah timbal-balik dalam masjarakat tadi. Disini pula letak keindahan atau keselarasan dari keanekawarnaan jang terkumpul mendjadi satu dalam masjarakat dan negara. Memang hakekat manusia baru berarti dalam hidupnja bermasjarakat. Pribadinja pun tumbuh pula dalam masjarakat, bukan dalam hidupnja menjendiri.

Demikian pentingnja penerbitan buku ini sebagai pengumpulan-pengumpulan sedjarah-perdjuangan dan perkembangan masjarakat di Daerah Istimewa Jogjakarta, dapat kita batja pula kata-kata sambutan dari Sri Paku Alam ke - VIII dan Komandan Resimen Inf. 13/S. T. 13 dalam buku ini.

Hidangan Daerah Istimewa Jogjakarta ini merupakan bagian lagi daripada negara kita jang besar, bersama-sama dengan lain-lain wilajah Indonesia. (— Negara kita Republik Indonesia pun selandjutnja merupakan satu bagian pula dari masjarakat bangsa-bangsa didunia luas, jang satu sama lain butuh membutuhkan, hidup menghidupi dan kerdjasama —). Maka dalam hubungan inilah Daerah Istimewa Jogjakarta dengan apa jang disadjikannja, mengharap bisa mengimbangi kebutuhan dan kemadjuan serempak daripada segala bagian negara kita. Untuk kita jang sekarang masih hidup dan untuk angkatan jang menjusul.

Jogjakarta, 17 Agustus 1953

DJAWATAN PENERANGAN
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

KATA - SAMBUTAN

ORANG buta huruf, terutama dimasa dulu-dulu, biasanja kuat dan teliti ingatannja. Segala kedjadian terpaku dalam-dalam pada pikirannja. Angkatan jang menjusul kemudian menerima kedjadian-kedjadian dalam sedjarah itu dari mulut kemulut. Maka tjeritera bersambung jang tiada tjatatannja tertulis itu merupakan dongeng. Orang Belanda menamakannja „overlevering". Ada dongeng jang dikurangi disana-sini, ataupun ditambah dengan fantasi.

Tapi masjarakat jang telah dapat menulis dan mentjatat kedjadian-kedjadian itu lambat laun semakin kurang kekuatan untuk mengingat tadi. Sebab mereka dapat menggantungkan diri pada tjatatannja. Sewaktu-waktu dapat dibuka kembali. Ketjakapan menulis, mentjatat dan mentjetak setidak-tidaknja menggantikan kekuatan untuk mengingat tadi, lagi pula hasilnja lebih dapat dipertjaja dari pada tjeritera-tjeritera lisan.

Hampir semua peristiwa diwaktu sekarang ditulis, dilukis, ditjetak. Tjatatan sehari-hari kita lihat disuratkabar. Pikiran-pikiran jang usianja bisa melewati batas tahun dan zaman, kita tjetak mendjadi buku. Untuk kemudian hari dapat dibuka-buka kembali, dibatja dibandingkan dengan perkembangan masjarakat nanti. Disitu ditjari dan dilihat ataupun diselidiki tali persambungan jang tiada putu atau berhenti sedetikpun.

Apa jang kita kerdjakan sekarang adalah petundjuk bagi generasi-generasi jang akan datang, bukan hanja bagi satu generasi sadja, melainkan bagi generasi jang beruntun-runtun menjusul. Kalau diantara kita sekarang ini tidak ada lagi ditengah-tengah masjarakat, penerbitan-penerbitan itulah jang mendjadi penundjuk djalan bagi angkatan baru nanti untuk menengok balik kezaman lampau, dalam menindjau segala peri kehidupannja. Benar, bahwa penindjauan kebelakang tadi tidak bisa sampai mendalam kebagian-bagian jang seketjil-ketjilnja. Jang mungkin hanja dalam garis besar sadja.

Begitu pula apa jang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan berhubung dengan „Satu Windu Kemerdekaan Indonesia". Semua provinsi akan mengemukakan apa jang dialami dan dikerdjakan dan ditjapai selama itu.

Daerah Istimewa Jogjakarta jang pernah mendjadi Pusat Pemerintahan R.I. dizaman pergolakan dari Djanuari 1946 — Desember 1949, menjumbangkan kenang-kenangan jang tertulis djuga. Mengenai fase perdjuangan, pembangunan dalam artian jang luas. Apa jang tertulis dengan disertai angka-angka statistik sudah barang tentu hanja tjermin belaka. Hanja sanggup mendekati hakekatnja. Namun usaha Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan bantuan segala pihak, adalah suatu hasrat untuk menjerahkan hasil-hasil itu

kepada generasi jang akan datang. Hasil-hasil inilah bagi mereka nanti akan mendjadi tangga pandjatan guna memperbaiki apa-apa jang masih serba kurang, dengan sutu paradox: sambil menengok kebelakang, memandang kedepan.

Moga-moga apa jang disadjikan ini dapat memenuhi kebutuhan.

Jogjakarta, 17 Agustus 1953
Wakil Kepala Daerah Istimewa
Jogjakarta

PAKU ALAM - VIII.

DELAPAN TAHUN MERDEKA

17 AGUSTUS 1953 ini adalah untuk kedelapan kalinja kita peringati sebagai hari kemerdekaan kita. Dengan demikian maka 17 Agustus tahun ini genaplah delapan tahun atau „sewindu" bangsa kita mendjadi bangsa merdeka.

Apa sadja jang terdjadi selama ini, baik atau buruk, menjenangkan atau tidak, njatanja telah bersama-sama kita djalani dan rasakan disamping bersama-sama pula berusaha menjempurnakan jang kurang dan memperbaiki jang dipandang buruk.

Bahwa belum seluruh tjita-tjita dan harapan bangsa kita tertjapai sepenuhnja, bahkan tidak sedikit jang merasa ketjewa dengan hasil kemerdekaan kita sekarang, kiranja hal ini telah sama-sama kita ketahui.

Akan tetapi betapa sadja ketjilnja orang meng-artikan hasil proklamasi 17 Agustus itu, namun hasil inilah jang sekarang mendjadi milik kita, milik jang besar sekali harganja, karena besarnja pengorbanan untuk mentjapai hasil itu.

Andaikata kita toch harus menjesali hasil jang dirasanja belum memuaskan itu, baiklah kita bertanja kepada diri kita sendiri, kepada siapa penjesalan itu seharusnja ditudjukan. Tjobalah dengan terus terang dan djudjur kita akui bahwa semangat bekerdja dikalangan kita sekarang, jang sebenarnja dapat memberi kemungkinan untuk memperbaiki nasib kita sendiri, pada umumnja kurang memuaskan. Meskipun kesemuanja mengakui bahwa hanja dengan kegiatan bekerdjalah kemerdekaan ini baru berarti bagi kita semua.

Memang kesukaran masih banjak, kemerdekaan jang kita tjapai belum lagi memberi kepuasan dan kemakmuran rakjat seluruhnja bahkan dibeberapa tempat tak sedikit djumlah penduduk jang selalu hidup dalam kechawatiran dan kegelisahan berhubung gangguan keamanan ditempat itu.

Adalah kewadjiban kita bangsa Indonesia mengatasi segala kesukaran itu dengan bekerdja giat sebagai jang pernah kita perlihatkan pada permulaan revolusi ditahun-tahun jang lalu.

Patut kiranja pada saat-saat seperti sekarang dimana kesukaran-kesukaran bertambah banjak, kembali kita mengenangkan masa gemilang dalam sedjarah bersatu-padunja semua tenaga dan kekuatan kita jang pantang mengeluh mendjalankan setiap kewadjiban dilapangan masing-masing.

Mudah-mudahan mendjelang usia „sewindu" dari kemerdekaan negara kita ini dapat memperingatkan kita semua kembali bersatu padu menjampingkan jang bisa menimbulkan perpetjahan antara kita dengan kita.

Mari kita hadapi masa datang kita dengan ketabahan dan giat bekerdja disemua lapangan dan untuk itu dibutuhkan persatuan jang ichlas dari segala lapisan dalam masjarakat.

Tetap Merdeka!

KOMD. RES. INF. 13/S.T. 13.

BAB I :

PERKEMBANGAN POLITIK

Sedjarah Pemerintahan Daerah

1. PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN KASULTANAN DAN PAKU ALAMAN

UNTUK memberi gambaran tentang perubahan-perubahan pemerintahan Kasultanan dan Paku Alaman, sedjak djaman Belanda, Djepang sampai kepada djaman Republik Indonesia, maka dibawah ini diterakan setjara singkat susunan kedua pemerintahan tersebut didalam djaman Belanda dan Djepang.

Susunan Pemerintah Kasultanan dan Paku Alaman di djaman Belanda, Djepang.

A. Didjaman Belanda Susunan Pemerintahan Kasultanan seperti dibawah ini :

S. P. Kangdjeng Sultan

↓

Pepatih Dalem (Rijksbestuurder)

↓

Bupati Patih Kepatihan (1e Sekretaris)
Bupati Prentah (2e Sekretaris)

↓

Kabupaten - Kabupaten

↓

Kawedanan - Kawedanan

↓

Kapanewon - Kapanewon

↓

Kalurahan - Kalurahan.
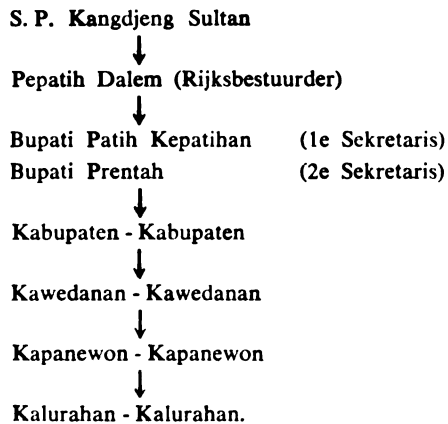
Di Paku Alaman Susunan itu seperti berikut :

S. P. Kangdjeng Gusti Paku Alam

↓

Bupati Patih
Assisten-Wedana Kota, merangkap Sekretaris

↓

Kabupaten (Adikarta)

↓

Kapanewon - Kapanewon

↓

Kalurahan - Kalurahan.
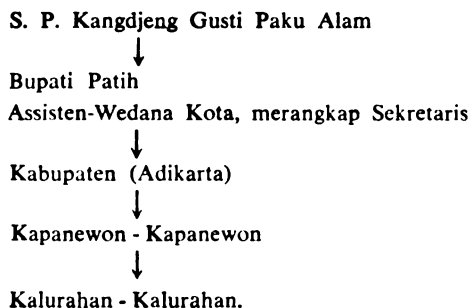
Jang tersebut diatas adalah susunan Pamong Pradja (Bestuur) jang dulu lazim disebut Pangreh Pradja.

Ketjuali I. **Pangreh Pradja,** Peperintahan Pusat djuga mempunjai lain-lain bagian jaitu:

II. **Pengadilan Darah Dalem** jang dihapuskan pada djaman Kemerdekaan (th. 1947), karena tidak adanja klassejustitie.

III. **Keuangan** jang dibagi lagi mendjadi:
a. dinas akontan
b. urusan begrooting
c. urusan padjak.

IV. **Perguruan-perguruan:** Pada djaman Belanda jang diurus oleh Kasultanan (dan Paku Alaman) hanja sekolah desa sadja. Pada djaman Djepang Sekolah-sekolah Rakjat dan Menengah diserahkan pada Kasultanan.

V. **Kesehatan Rakjat:** Pada djaman Belanda pemimpinnja dari Gupermen, hal mana dilandjutkan dalam djaman Djepang djuga.

VI. **Kemakmuran:** a. Pertanian, b. Kechewanan, c. Keradjinan dan d. Kehutanan, adalah dinas Gupermen Belanda jang djuga diteruskan semuanja oleh Pemerintahan Djepang.

VII. **Pekerdjaan Umum:** Sifatnja lokaal, Gupermen hanja menguruskan bangunan-bangunan kepunjaannja sendiri, dengan dipimpin oleh seorang Hoofdopzichter.

VIII. **Penghatsilan Negeri:** a. Air Leiding, b. Pasar dan c. Perusahaan tanah, tetap sampai sekarang.

Pendjelasan: Pada djaman Belanda Status Kasultanan Jogjakarta diatur dengan politik-contract.

Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Rijksbestuurder (Pepatih Dalem) atas nama Sri Sultan.

Rijksbestuurder tersebut diangkat oleh Radja, tetapi harus dengan persetudjuan Belanda, dan sebelum memangku djabatannja, Rijksbestuurder itu harus bersumpah pada Belanda, bahwa djika timbul conflict antara Belanda dan Radja, Rijksbestuurder harus memihak pada Belanda.

B. Perubahan-perubahan penting dalam djaman Djepang.

April 1945 Kawedanan dihapuskan, di Pusat diadakan **Paniradyapati,** 6 djumlahnja jaitu:

1. Sanapanitra (Sekretariaat).
2. Wijatapradja (Pendidikan).
3. Ratjana Pantjarwara (Perentjana Penerangan).
4. Ajahan Umum (sekarang mendjadi Djawatan Pemerintahan Umum).
5. Ekonomi.
6. Jajasan Umum.

Tanggal 1 Agustus 1945 Pepatih Dalem (Rijksbestuurder) lowok dan tidak diisi lagi. S.P. Sultan memegang pimpinan sendiri. Diadakan Utaradyapati, sebagian pekerdjaan jang terlalu besar untuk dimasukkan dalam paniradyapati, akan tetapi ketjil untuk didjadikan paniradyapati sendiri. Tiga Utaradya jang diadakan jalah:

1. Urusan Pegawai.
2. Pemeriksa Keuangan.
3. Sridarmajukti (pengadilan Darah Dalem).

PIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH JOGJAKARTA

S.P. Sultan Hamengku Buwono IX

S. P. Paku Alam VIII

Pelemparan pakaian jang pernah dipakai oleh S. P. Sultan kelaut Selatan pada upatjara „Labuh".

Perlombaan panahan di Aloon-Aloon Utara pada hari peringatan 201 tahun berdirinja Jogjakarta tanggal 18 Maret 1950.

Gedung Agung Jogjakarta pernah mendjadi Istana Presiden R.I.
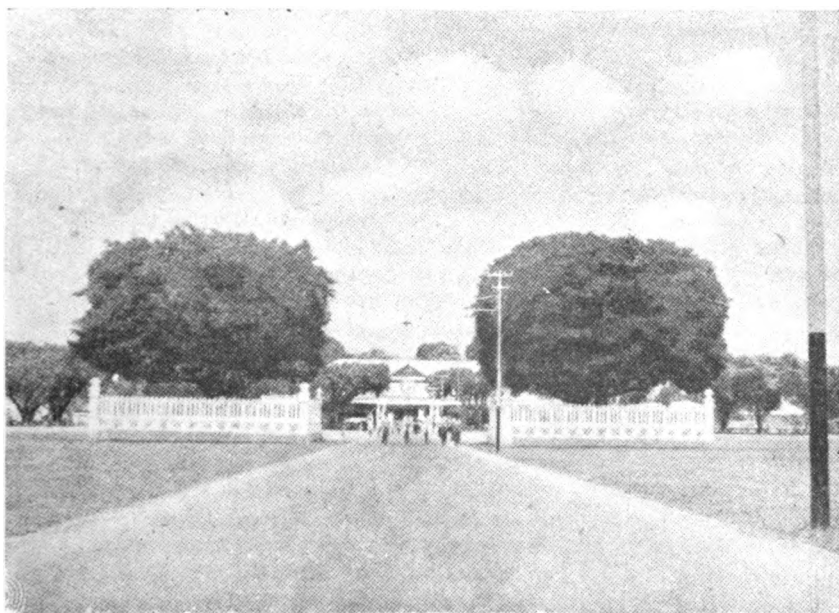
Kraton S.P. Sultan di-Jogjakarta dilihat dari muka (Aloon-Aloon Utara).

2. PROKLAMASI INDONESIA MERDEKA

PADA tanggal 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Bangsa Indonesia diproklamasikan, berarti bahwa belenggu pendjadjahan telah diputuskan. Proklamasi menjalakan api revolusi diseluruh Indonesia.

Rakjat bergerak, tua muda dibawah pandji Sang Merah Putih. Semangat pemuda menggelora, menggerakkan roda revolusi.

Pun di Jogjakarta tak luput dari keadaan seperti tersebut diatas.

Rakjat bersiap, menjesuaikan diri dengan suasana baru, alam kemerdekaan. Sisa-sisa kolonial harus dibersihkan. Berita tentang Proklamasi Kemerdekaan itu oleh masjarakat Jogjakarta agak terlambat diterima. Harian Sinar Matahari jang terbit di Jogjakarta, baru memberitakan Proklamasi tersebut dalam penerbitannja jang keluar pada tanggal 19 Agustus 1945, bersama Undang-Undang Dasar jang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dimana Presiden dan Wakil Presiden dipilih.

Maka segera setelah tersiar berita tentang Kemerdekaan Indonesia, S.P. Sultan Hamengku Buwono IX dan S.P. Paku Alam VIII pada tanggal 19 Agustus 1945 berkenan mengirimkan kawat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta jang berisi utjapan selamat atas terbangunnja Negara Republik Indonesia dan terpilihnja beliau-beliau tersebut mendjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Disamping itu S. P. Sultan berkenan pula memberi sambutan atas pernjataan Kemerdekaan Indonesia seperti jang kita djumpai dalam harian Sinar Matahari tanggal 20 Agustus 1945 jang isinja antara lain sebagai berikut :

„Sekarang Kemerdekaan telah berada ditangan kita, telah kita genggam, nasib nusa dan bangsa adalah ditangan kita pula, tergantung pada kita sendiri.

Kita harus menginsjafi, bahwa lahirnja Indonesia Merdeka itu dalam masa kegentingan. Maka semua, tiada ketjualinja, harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing, untuk kepentingan kita bersama, jalah mendjaga, memelihara dan membela Kemerdekaan nusa dan bangsa.

Sekarang bukan waktunja mengemukakan dan memperbesar segala pertentangan dan perselisihan faham. Tiap-tiap golongan harus sanggup menjampingkan kepentingannja, sanggup untuk mentjapai persatuan jang baru dan kokoh sehingga bangsa Indonesia mendapatkan sendjata untuk memperdjuangkan Kemerdekaannja, buat menjelesaikan tanggung djawabnja terhadap angkatan-angkatan Bangsa Indonesia jang akan datang dan membikin sedjarah jang gemilang".

Pada tanggal 19 - 8 djuga Jogjakarta Kooti Hookookai mengadakan sidang istimewa untuk menjambut pengumuman Kemerdekaan Indonesia bertempat di gedung Sono Budojo.

Sidang ini mengambil keputusan :

1. Melahirkan rasa gembira dan sukur kehadapan Tuhan Jang Maha Esa atas lahirnja Negara Republik Indonesia.

2. Menjatakan dengan kejakinan seteguh-teguhnja kepada Pemerintah Indonesia akan mengikut dan tunduk pada tiap-tiap langkah dan perintahnja.
3. Mohon kepada Illahi agar Negara Indonesia berdiri kokoh teguh dan abadi.

Untuk serta mengisi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan untuk mendjadikan kenjataan Negara Republik Indonesia jang didirikan dengan bentuk U.U.D. jang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan pasal 18 Undang Undang Dasar tersebut pada tanggal 5 Oktober 1945 S. P. Sultan dan S. P. Paku Alam VIII mengeluarkan amanat seperti tertera dibawah :

A M A N A T
SRI PADUKA INGKANG SINUWUN KANDJENG SULTAN

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogyakarta Hadiningrat menjatakan :

1. Bahwa Negeri Ngajogyakarta Hadiningrat jang bersifat Keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnja.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan kami bertanggung djawab atas Negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogyakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat kami ini.

Ngajogyakarta Hadiningrat,
28 Puasa Ehe 1876.
atau 5 - 9 - 1945.
HAMENGKU BUWONO IX.

A M A N A T
SRI PADUKA KANGDJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM

Kami Paku Alam VIII Kepala Negeri Paku Alaman, Negeri Ngajogyakarta Hadiningrat, menjatakan :

1. Bahwa Negeri Paku Alaman, jang bersifat Keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan Pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnja.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung djawab atas Negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan Amanat kami ini.

Paku Alaman, 28 Puasa Ehe 1876.
atau 5 - 9 - 1945.
PAKU ALAM VIII.

Dengan amanat-amanat tadi S.P. Sultan dan S.P. Paku Alam VIII bermaksud mengisi Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mendjadikan kenjataan, bahwa semua kekuasaan Pemerintah adalah ditangan bangsa sendiri.

Kedua Sri Paduka telah merebut kekuasaan Pemerintah Balatentara Djepang. Dan sedjak itu tidak ada lagi Pemerintahan jang dualistis, asing dan nasional, melainkan hanja ada satu kekuasaan Pemerintah Nasional jang dipimpin oleh kedua Sri Paduka.

Tindakan kedua Sri Paduka tersebut sangat sesuai dan tepat dengan djiwa Piagam dari Presiden Soekarno.

Perebutan kekuasaan setjara de jure telah dimulai oleh kedua Sri Paduka.

Demikianlah pada tanggal 6 - 9 - 1945 utusan Presiden Republik Indonesia jalah Menteri-menteri Negara Mr. Sartono dan Mr. Maramis tiba di Jogjakarta untuk menjampaikan „Piagam Kedudukan kedua Sri Paduka".

Piagam kedudukan S. P. Sultan bunjinja sebagai berikut :

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan :

INGKANG SINUWUN KANGDJENG SULTAN HAMENGKU BUWONO, SENOPATI ING NGALOGO, ABDULRACHMAN SAJIDIN PANOTOGOMO, KALIFATULLAH INGKANG KAPING IX ING NGAJOGYOKARTO HADININGRAT PADA KEDUDUKANNJA, DENGAN KEPERTJAJAAN, BAHWA SERI PADUKA KANGDJENG SULTAN AKAN MENTJURAHKAN SEGALA FIKIRAN, TENAGA, DJIWA DAN RAGA UNTUK KESELAMATAN DAERAH JOGJAKARTA SEBAGAI BAGIAN DARI PADA REPUBLIK INDONESIA.

Djakarta, 19 Agustus 1945.
Presiden Republik Indonesia
ttd. SOEKARNO
(Ir. SOEKARNO).

Piagam Kedudukan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII.

Kami, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENETAPKAN :

KANGDJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM INGKANG KAPING VIII PADA KEDUDUKANNJA, DENGAN KEPERTJAJAAN, BAHWA SERI PADUKA KANGDJENG GUSTI AKAN MENTJURAHKAN SEGALA PIKIRAN, TENAGA, DJIWA DAN RAGA UNTUK KESELAMATAN DAERAH PAKU ALAMAN SEBAGAI BAGIAN DARI PADA REPUBLIK INDONESIA.

Djakarta, 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia.
Ir. SOEKARNO.

3. MEREBUT KEKUASAAN

SEKALIPUN pembesar - pembesar Djepang jang berkuasa di Jogjakarta sudah tahu tentang Proklamasi Indonesia Merdeka, dan sekalipun mereka tahu djuga tentang rakjat Indonesia di Jogjakarta jang bagaikan tertekan, kini melontjat bersemangat merdeka, namun mereka enggan memberikan segala kekuasaan kepada rakjat Indonesia. Dan kalau dengan djalan damai kekuasaan itu tidak bisa didapat, pilihan lain tidak ada, ketjuali dengan setengah kekerasan atau kekerasan jang bulat. Djalan apa sadja harus ditempuh, dan kekuasaan asing itu harus direbut oleh rakjat Indonesia.

Segenap pegawai kantor-kantor, baik kantor-kantor negeri maupun partikelir, perusahaan-perusahaan dan paberik-paberik seluruh Jogjakarta pada tanggal 26 - 9 - 1945 mulai djam 10 pagi mendjalankan aksi serentak untuk mengambil oper kekuasaan atau pimpinan jang hingga saat itu masih ditangan bangsa lain.

Aksi serentak itu didjalankan dengan kemauan bulat dari segenap pegawai mulai dari jang rendah serendah-rendahnja hingga jang paling tinggi. Pada djam 10 pagi itu sebagian besar pimpinan perusahaan dan paberik-paberik berpuluh-puluh paberik dan perusahaan timbul pemogokan pegawai seluruhnja. Aksi pemogokan ini mendapat bantuan sepenuhnja dari barisan rakjat, pemuda-pemuda dan B.K.R. jang teratur rapi mengepung masing-masing tempat jang perlu.

Dengan kekuatan jang teratur rapi dan pimpinan K.N.I. jang bidjaksana, maka mereka mendesak dengan keras supaja pimpinan dan kekuasaan diserahan kepada pegawai Indonesia.

Hingga djam 8 malam pimpinan disemua kantor telah ada ditangan bangsa Indonesia. Hasilnja memuaskan dan walaupun dibeberapa tempat terdjadi bentrokan agak keras, tetapi kedjadian jang tidak diinginkan dapat tertjegah.

Adapun paberik-paberik dan perusahaan-perusahaan jang pada saat itu telah dapat dioper kekuasaannja dan jang dilaporkan kepada K.N.I. jalah : 1. Pusat Nanyo Kohatsu Jogjakarta dan tjabang-tjabangnja, 2. Djawatan Kehutanan, 3. Daiken Sangyo, 4. Paberik-paberik Gula Tandjungtirto, 5. Padokan, 6. Beran, 7. Tjebongan, 8. Gondanglipuro, 9. Plered, 10. Gesikan, 11. Rewulu. 12. Medari, 13. Pundong, 14. Sewugalur, dan 15 Paberik Salakan.

Selandjutnja keesokan harinja tanggal 27 - 9 - 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah Jogjakarta mengeluarkan pengumuman, kepada segenap penduduk Jogjakarta bahwa pada tanggal 26 - 9 - 1945 kekuasaan Pemerintah Daerah Jogjakarta seluruhnja telah ada ditangan bangsa Indonesia.

Aksi serentak jang didjalankan tg. 26 - 9 mulai djam 10 pagi oleh segenap pegawai kantor-kantor negeri, djawatan-djawatan, paberik-paberik, dan perusahaan-perusahaan untuk mengambil oper kekuasaan jang hingga saat itu masih ditangan bangsa lain, telah selesai semuanja dan tidak terdjadi sesuatu apa jang

tidak kita inginkan. Tidak ada sebuah kantor atau lainnja jang ketinggalan tidak mendjalankan aksi tersebut dan semua hasilnja memuaskan.

Semua kekuasaan kini telah ditangan bangsa Indonesia.

Selandjutnja diberitahukan, bahwa mulai dari tgl. 26 - 9 itu kekuasaan Pemerintah daerah telah ada ditangan kedua Seri Paduka dan Komite Nasional.

Mudah dimengerti, bahwa aksi penduduk dalam mengadakan perebutan kekuasaan itu, menimbulkan kegelisahan dikalangan penduduk bangsa asing di Jogjakarta.

Untuk itu oleh Komite Nasional Daerah dikeluarkan pengumuman guna mendjamin keselamatan penduduk bangsa asing di Jogjakarta jang isinja lengkapnja sebagai berikut :

Dipermaklumkan kepada segenap penduduk Jogjakarta, bahwa Komite Nasional bersama-sama rakjat Indonesia mendjamin keselamatan penduduk bangsa-bangsa lain jang ada disini. Pertanggungan djawab atas djaminan itu tidak lain ialah djika bangsa-bangsa lain jang bertempat tinggal disini mengindahkan, menghormati dan tunduk pada segala peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia serta merasa pula bahwa mereka berada dinegeri bangsa lain jang sudah merdeka. Djuga dengan djalan saling hormat dan saling menghormati antara bangsa-bangsa dapatlah keselamatan terdjamin serta keamanan umum terdjaga, demikian pengumuman itu.

Jang sangat menggembirakan masjarakat Jogjakarta pada waktu itu jalah dengan terbitnja surat kabar harian Kedaulatan Rakjat pada tanggal 27 - 9 - '45. Dengan itu, segala peristiwa dan pengumuman-pengumuman penting segera dapat disampaikan kepada rakjat. Soal-soal maklumat, amanat dari para pemimpin, berita hasil perdjuangan jang menggembirakan, penerangan kepada rakjat dengan pidato, dengan ‚bisik-bisik", dengan poster-poster, dengan slogan-slogan jang ditulis ditembok rumah atau toko, didinding kereta api atau mobil, itu semua memperhebat semangat perdjuangan rakjat.

Selandjutnja guna menjempurnakan pendjagaan keamanan, maka pada tanggal 28 - 9 - '45 atas perkenan S. P. Sultan Hamengku Buwono IX dengan maksud untuk lebih tertib dan kuatnja pendjagaan keamanan dibawah satu pimpinan, maka Pusat Pimpinan Keamanan jang berkantor di Kepatihan diserahkan kepada K.N.I., dan dibawah pimpinan S. P. Sultan.

Dalam usahanja menghilangkan kekuasaan asing di Jogjakarta, maka pada tanggal 5 - 10 - 1945 Barisan Pendjaga Umum dari K.N.I. dengan bersendjata lengkap dapat menduduki rumah bekas Tyokan Jogjakarta.

Setelah bekas Tyokan dilutjuti dan meninggalkan rumah itu pada hari itu djuga gedung tersebut ditempati sebagai gedung K.N.I. (Jang semula menempati bekas Gedung Hokokai di djalan Ngabean No. 4), dan selandjutnja diberi nama „Gedung Nasional".

Guna menjempurnakan organisasi pemerintahan maka pada tanggal 5 - 10 - 1945 oleh Pemerintah Daerah dikeluarkan maklumat No. 1 tentang Badan Sensur. Adapun susunannja dibentuk dari pelbagai instansi dan organisasi, jaitu wakil-wakil dari Kasultanan, Paku Alaman, K.N.I. daerah, Pusat Kepolisian R. I. daerah Jogjakarta, Kantor Polisi kota, B.K.R., B.P.U., Pers, Radio, P.T.T., P.O.S.I., dan P.P.P.I. Adapun tugas Badan Sensur tersebut adalah : menjensur segala matjam penerbitan, siaran, pertjetakan, potret, sembojan, tjeritera, klise, gambar, lakon wajang (wajang orang, ketoprak, sandiwara), surat-surat dengan perantaraan pos dan kawat dan pembitjaraan-pembitjaraan dengan perantaraan telpon.

Demikianlah usaha pemerintah Daerah dalam mendjamin keamanan di mulai dari sedikit demi sedikit.

Seperti halnja dilain-lain tempat, banjak mengalir pernjataan taat dari Rakiat kepada Pemerintah Republik Indonesia, maka di Jogjakarta pun terdapat kedjadian-kedjadian ini.

Pada tanggal 27 - 9 - 1945 para pemuda pegawai Kasultanan mengadjukan Mosi jang isinja sebagai berikut :

Mosi P.E.K.I.K. (Pemuda Kita Kasultanan)

Dipersembahkan Kehadapan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan.

Rapat dari Angkatan Muda Pegawai Kasultanan, dengan singkat dinamakan P.E.K.I.K. (Pemuda Kita Kasultanan) telah dilangsungkan pada hari Kemis tgl. 27-9-'45 di Bale Harsono Kepatihan jang dikundjungi oleh segenap pegawai Kasultanan tua muda kurang lebih 400 orang.

Dengan suara bulat telah memutuskan Mosi terhundjuk kehadapan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan, sebagai Kepala Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Angkatan Muda dari pegawai Kasultanan selalu berdiri dibelakang Sri Paduka Kangdjeng Sultan, siap sedia mendjalankan segala perintah dan petundjuknja.
2. Berdjandji, djika ada kekuasaan asing jang hendak memerintah dan mendjadjah Indonesia atas titah Sri Paduka, hamba sekalian sanggup serentak meletakkan djabatan.
3. Berdjandji akan memelihara dan mempertahankan tetapnja Kemerdekaan Indonesia sampai diachir zaman.
   Demikian mosi itu, dan ditanda tangani oleh Suprodjo Samsi sebagai ketua.

Demikian pula para pegawai dari Paku Alaman mengirimkan Mosi jang isinja sebagai berikut :

Mosi para abdi dalem pradja Paku Alaman Jogjakarta

Kami, para abdi Dalem Pradja Paku Alaman Jogjakarta, Daerah Istimewa Republik Indonesia, pada rapatnja jang dilangsungkan pada hari bulan tanggal 13-10-1945 telah memutuskan :

Mendirikan Persatuan para Abdi Dalem Pradja Paku Alaman seluruhnja, dan mengambil putusan sbb.:

1. Bahwa dengan berdirinja Negara Republik Indonesia „Merdeka", akan memberi keadilan, kemakmuran dan kesedjahteraan kepada masjarakat umumnja.
2. Bahwa dengan kembalinja pemerintah Belanda, berarti pendjadjahan jang akan membawa penindasan kesengsaraan penduduk Indonesia.
3. Bahwa sekarang makin njata gentingnja suasana, jang dibuktikan oleh kedjadian-kedjadian jang sangat menghina negara Republik Indonesia.
4. Bahwa Pradja Paku Alaman telah diakui oleh P.J.M. Presiden Republik Indonesia, sebagai Daerah Istimewa, jang mendapat kepertjajaan sepenuhnja dari P.J.M. Presiden Republik Indonesia.

M e m u t u s k a n:

1. Bahwa para Abdi Dalem Pradja Paku Alaman harus teguh bersatu padu dalam lingkungan Negara Republik Indonesia Merdeka, tetap mentjurahkan segala tenaga, djiwa dan raga membela Indonesia merdeka.

2. Tetap setia dan berdiri dibelakang Sri Paduka Ngarsa Dalem Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Arjo Paku Alam VIII jang telah mendapat penuh kepertjajaan dari P.J.M. Presiden Republik Indonesia.
3. Serentak meletakkan djabatannja, djika bangsa lain memerintah Indonesia.

Jogjakarta, 13 - 10 - 1945
Persatuan Para Abdi Dalem Pradja Paku Alaman
Ketua
GONDODIPRODJO.

Sesuai dengan keadaan negara kita jang telah merdeka, jang seharusnja bersih dari pengaruh pemerintah asing maka oleh Pemerintah Daerah dikeluarkan Maklumat No. 3 sebagai berikut :

1. Dengan ini Kami berdua, Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX, dan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, memerintahkan kepada segenap penduduk dari segala bangsa (golongan dan lapisan) dalam daerah Kami berdua, supaja selambat-lambatnja pada tang gal 31 bulan 10 ini menjerahkan kepada Pangreh Pradja jang terdekat barang-barang seperti dibawah ini :
   a. Lambang Kebaktian.
   b. Surat pudjian.
   c. Vaandel.
   d. Tanda-tanda penghargaan lain jang asalnja dari Djepang.
   e. Tanda-tanda djabatan matjam apa sadja jang asalnja dari Djepang.
2. Buat dalam kota barang-barang tersebut diatas harus diserahkan kepada Mantri Pangreh Pradja, buat diluar Kota kepada Lurah Desa atau Panewu Pangreh Pradja.
3. Pangreh Pradja jang bersangkutan supaja selekas-lekasnja menjerahkan barang-barang tadi dengan perantaraan Bupati Pangreh Pradja jang membawahkan kepada Paniradya Ajahan Umum.
4. Maklumat ini mulai berlaku semendjak diumumkan, jaitu tanggal 18 - 10 - 1945.
   Itulah isi maklumat, jang melutjuti semua orang dari tanda djasa dan kebesaran dari pemerintah Djepang. Ini memang penting, agar djangan sampai orang terganggu keamanannja, hanja karena dirumahnja terdapat benda-benda tersebut.

Jogja memuaskan, kata Suroso

Pada tgl. 13-10-1945 telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia R. P. Suroso, dulu Gubernur Djawa Tengah diangkat mendjadi Wakil Pemerintah (Rijks-Commisaris) didaerah Jogjakarta dan Surakarta.

Berhubung dengan pengangkatan ini maka pada tanggal 22-10-1945 beliau dengan disertai barisan pengawal dan sementara pembesar dari djurusan Surakarta menudju ke Jogjakarta dan diterima oleh kedua Sri Paduka di Kepatihan. Dalam pertemuan tersebut oleh R. P. Suroso diterangkan kedudukan beliau sebagai Komisaris Tinggi dan karena segala peristiwa jang terdjadi di Jogjakarta telah mempuaskan, maka oleh beliau ditegaskan, bahwa madjelis Komisaris Tinggi berkedudukan di Solo dan tidak perlu mengadakan Sub Komisariaat di Jogjakarta.

Badan Pekerdja K.N.I. Daerah Jogjakarta dibentuk

Sesuai dengan funksi K.N.I. jang baru, maka pada tanggal 29 - 10 - 1945 telah dilakukan pembentukan Badan Pekerdja K.N.I. Daerah Jogjakarta sebagai berikut:
Ketua: Sdr. Moh. Saleh, Wakil Ketua Sdr2. S. Josodiningrat dan Ki Bagus H. Hadikusumo dan 16 orang pembantu jalah: Sdr2. K.R.T. Honggowongso, Marlan, H. Faried Ma'ruf, H. Hadjid, Mr. Manu, Mr. Surjotjokro, Wijono, S. Parman, Sardjono, Ir. Dipokusumo, Djalaludin, Mr. S. Purwokusumo, Dr. Samsudin, Murdjodo, Umar Djoy dan Dr. Sutjipto.

Berhubung dengan terbentuknja Badan Pekerdja K.N.I. daerah Jogjakarta maka pada tanggal 30 Oktober 1945 kedua S. P. berkenan memberikan amanat jang isi selengkapnja seperti dibawah ini:

M e n g i n g a t:

1. dasar-dasar jang diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ialah kedaulatan rakjat dan keadilan sosial.
2. amanat Kami berdua pada tanggal 28 Puasa Ehe 1876 atau 5 - 9 - 1945.
3. bahwa kekuasaan-kekuasaan jang dahulu dipegang oleh Pemerintah djadjahan (dalam djaman Belanda didjalankan oleh Gubernur dengan kantornja, dalam djaman Djepang oleh Koti Zimu Kyoku Tyokan dengan kantornja), telah direbut oleh rakjat dan diserahkan kembali pada Kami berdua.
4. bahwa Paduka Tuan Komisaris Tinggi pada tanggal 22 - 10 - 1945 di Kepatihan Jogjakarta dihadapan Kami berdua dengan disaksikan oleh para Pembesar dan para Pemimpin telah menjatakan tidak perlunja akan adanja Subcommissariaat dalam Daerah Kami berdua.
5. bahwa pada tanggal 29 - 10 - 1945 oleh Komite Nasional Daerah Jogjakarta telah dibentuk suatu Badan Pekerdja jang dipilih dari antara anggauta-anggautanja, atas kehendak rakjat dan panggilan masa, jang diserahi untuk mendjadi Badan Legislatief (Badan Pembikin Undang-undang) serta turut menentukan haluan djalannja Pemerintah Daerah dan bertanggung djawab kepada Komite Nasional Daerah Jogjakarta, maka Kami Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Badan Pekerdja Komite Nasional Daerah Jogjakarta, dengan ini menjatakan:
   Supaja djalannja Pemerintahan dalam Daerah Kami berdua dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Badan Pekerdja tersebut adalah suatu Badan Legislatief (Badan Pembikin Undang-undang) jang dapat dianggap sebagai wakil rakjat dalam Daerah Kami berdua untuk membikin Undang-undang dan menentukan haluan djalannja Pemerintahan dalam Daerah Kami berdua jang sesuai dengan kehendak rakjat.
   Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dari segala bangsa dalam daerah Kami berdua mengindahkan Amanat Kami ini.
   Demikian amanat itu.

Dan dengan disahkannja Kabinet Sjahrir jang pertama pada tanggal 14 Nopember 1945 serta mengingat suasana jang sangat kritis itu K.N.I. Jogjakarta telah mengirimkan kawat kepada P.M. Sutan Sjahrir jang berbunji: Rapat Badan Pekerdja Komite Nasional Daerah Jogjakarta pada tanggal 16 Bulan 11 Memutuskan:

Mendesak kepada Kabinet baru, supaja Pemerintah djangan mengadakan perundingan dengan djalan apapun djuga, dengan negara manapun djuga jang

berkehendak akan mendjadjah Indonesia. Boleh djuga perundingan itu dilakukan, asal sadja pihak penjerang suka menghentikan serangannja dan mendjamin, bahwa serangan matjam apa dan dimanapun djuga di Indonesia ini, dan tentara pedudukan itu selekas mungkin harus meninggalkan Indonesia, sehingga serangan itu tak mungkin terulang lagi. Tegasnja Kabinet baru sekali-kali djangan bersifat dan bersikap Kompromistis.

Kawat tersebut ditanda tangani oleh Ketua K.N.I. Moh. Saleh.

Jogjakarta di bombardeer

Demikian pula pada tanggal 25 - 11 - 1945 K.N.I. Daerah Jogjakarta dengan ditanda tangani oleh Sdr. Moh. Saleh atas nama S. P. Sultan, S. P. Paku Alam dan rakjat Jogjakarta mengirim kawat lagi kepada Pres. Soekarno dan P. M. Sjahrir berhubung dengan pengeboman pesawat pembom R.A.F. atas gedung R.R.I. Jogjakarta, jang berbunji sbb.: Djam 8.15 menit pagi ini, ada kapal terbang musuh mendjatuhkan surat-surat sebaran, tidak diteken, bermaksud akan membom setasiun radio, digedung Nillmy Jogjakarta dan Balapan Solo, karena siaran radio itu dituduh telah menghasut rakjat supaja berontak. Mulai djam delapan tiga puluh menit hingga djam sembilan lebih datang dua bombers Inggeris dan mendjatuhkan bom-bom enam kali mengenai gedung Nillmy dan Sonobudojo dan menembak dengan mitraljur di sekitar paberik Watson, hingga menimbulkan korban tudjuh orang tewas dan puluhan luka-luka. Diantara korban-korban itu terdapat banjak perempuan dan anak-anak. Penduduk tidak sempat berlindung dan tidak ada persediaan perlindungan, tentera dan rakjat kita sengadja tidak mengadakan perlawanan. Rakjat memprotes keras terhadap perbuatan musuh jang melanggar peri kemanusiaan dan membabi buta berkedok alasan-alasan kosong. Hal ini diharapkan Presiden dan Perdana Menteri meneruskan kepada dunia Internasional terutama Rusia dan Tjungking, supaja mengetahui bahwa Inggeris tidak dapat mendjalankan kewadjibannja Polisi Internasional, supaja segera datang Rusia, Tjungking dan Amerika.

Mungkin dengan tindakannja pada tgl. 25-11-1945 itu Inggeris belum puas, ternjata bahwa 2 hari kemudian jalah tanggal 27 - 11 - 1945 djam 13.00 mereka mengulangi lagi perbuatannja jang kedjam itu atas kota Jogja.

Dan sebelumnja pengeboman atas Jogja itu dikerdjakan, terlebih dulu mereka menjiarkan pamflet-pamflet di kota Jogjakarta. Isi pamflet itu antaranja:

Pengeboman kami terhadap setasiun radio Jogjakarta pada pagi-pagi hari tanggal 25 Nopember jang baru lalu ini, kami tidak menghantjurkan setasiun radio itu dengan setjukupnja.

Berhubung dengan alasan-alasan jang telah kami siarkan lebih dulu, maka kami akan menghantjurkan setasiun itu kembali.

Kami tidak akan mentjilakakan tuan-tuan sama sekali; kami hanja akan menjempurnakan penghantjuran setasiun itu sadja.

Tuan-tuan sekalian sudah diperingatkan adanja.

Demikianlah isi pamflet jang mereka sebarkan dan tidak lama kemudian, pada djam 13.30 datanglah 4 buah bomber dan 1 pemburu mengadakan pemboman dan memitraljur dengan sewenang - wenang selama satu djam. Akibatnja Balai Mataram hangus dan banjak korban djatuh.

Berhubung dengan kedjadian-kedjadian itu maka S. P. Sultan mengirimkan kawat kepada Presiden Soekarno, jang isi selengkapnja adalah sebagai berikut :

P. J. M. Presiden Rep. Indonesia Djakarta.

Selasa 27 - 11 djam 1 sehingga djam 2.40 siang beberapa kapal terbang Inggeris membom kota Jogja. Balai Mataram dan Sonobudojo hantjur,

kantor telpon dan gedung C.H.T.H. dan beberapa rumah penduduk rusak sehingga menimbulkan korban diantara mereka. Memakai bom rocket dan torpedo, menjendjata dengan kanon dan mitraljur dimana-mana. Harapan kami memprotes sekeras-kerasnja dengan mengambil tindakan seperlunja.

Merdeka

HAMENGKU BUWONO

Pertempuran dengan Belanda telah meluas diseluruh Indonesia. Dimana-mana serdadu Belanda melakukan perbuatan jang bertentangan dengan kewadjiban tentara pendudukan Serikat. Mereka merampok, membunuh, membakar rumah dan membuat kekatjauan di Indonesia.

Rupa-rupanja Serdadu-serdadu Belanda mengira dirinja sudah kuat sekali dengan mendapat bantuan tentara Inggeris, maka tentara Belanda di Djakarta bertambah nekat.

Demikianlah pada tgl. 26-12-1945, bertepatan dengan perajaan Natal Nabi Isa hari kedua, beberapa orang serdadu Belanda mentjoba membunuh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Dengan djarak 2 m. mereka melepaskan tembakan pestol. Tetapi untungnja pestolnja matjet hingga P.M. Sjahrir terluput dari bahaja maut.

Berhubung dengan kedjadian tersebut diatas, maka kedua S. P. telah mengirimkan kawat kepada beliau jang berbunji s.b.b. :

Paduka Perdana Menteri Sutan Sjahrir Djakarta.

Berhubung dengan terhindarnja P.T. dari bahaja jang mengantjam kami menghaturkan turut bergirang dan mendo'a P.T. selamat sedjahtera seterusnja

HAMENGKU BUWONO IX.

P.J.M. P. M. Sjahrir.
Sangat terharu akan perbuatan-perbuatan jang kedji terhadap Paduka, sjukur alhamdulilah selamat.

PAKU ALAM VIII

Djuga K.N.I. Jogjakarta mengirim kawat jang isinja s.b.b. :

Pemerintah Rep. Indonesia Djakarta.

K. N. I. Jogjakarta mendesak kepada Pem. supaja mengambil tindakan jang tegas dan tepat atas penembakan pada dirinja P. M. Sutan Sjahrir. Kedjahatan itu sangat menimbulkan kemarahan rakjat, jang hingga kini ternjata dapat menahan hawa nafsunja, walaupun rakjat mempunjai kesempatan sepenuhnja untuk berbuat sematjam itu misalnja terhadap van Mook, van der Plas dan lain-lainnja.

K. N. I. JOGJAKARTA.

Pada waktu berkobarnja revolusi poster ini besar pengaruhnja.

Para korban waktu pertempuran pertama melutjuti Balatentara Djepang di Kotabaru Jogjakarta pada tahun 1945 — pahlawan kusuma bangsa itu disembahjangkan di - Rumah Sakit Pusat Jogja, dengan disaksikan oleh para wartawan dan para djururawat.
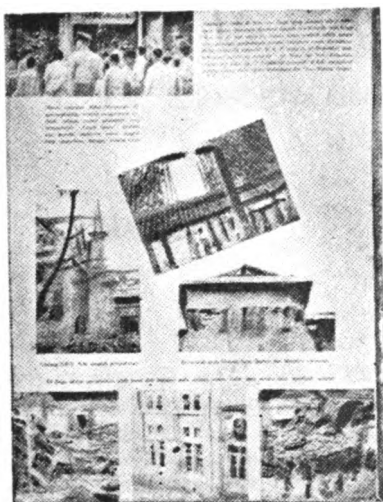
Akibat pemboman pesawat terbang Inggeris atas kota Jogja. Membawa korban dan kerusakan-kerusakan.

Boekti keboeasan moesoeh.

Wartawan2 Loear Negeri menjaksikan keboeasan Inggeris membom Balai Mataram di Jogja.

4. DEMOKRATISERING PEMERINTAHAN KALURAHAN

SEKALIPUN rakjat pada umumnja tidak begitu mendalam tentang soal tata - negara, namun mereka merasakan, apa akibatnja pemerintahan Belanda itu, jang hanja merupakan seperempat pemerintahan demokrasi. Orang boleh bitjara, tapi disediakan kekangan kiri-kanan. Pemerintah Djepang seratus persen dictatuur, membungkem rakjat dalam segala bahasa. Mendorong rakjat dalam kerdja-paksa sebagai romusha, melutjuti rakjat dari kekajaannja, habislah padi, mas-intan, kuda dan kerbau sapinja, pendek kata ekonomi rakjat didjungkir-balikkan tidak karuan.

Kini bangkit Negara Republik Indonesia dengan sila Demokrasi, dengan pemerintahan rakjat. Tidak heran, bahwa hasrat rakjat amat besar untuk melaksanakannja. Mereka bosan kepada Ketidak-adilan pemerintah Djepang.

Mengingat hasrat rakjat dalam daerah Jogjakarta untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakjat di Kalurahan-Kalurahan sebagai pendjelmaan dari azas kedaulatan rakjat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia maka Sri Sultan dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah - istimewa : Negara Republik Indonesia, dengan persetudjuan Badan-Pekerdja Komite Nasional Daerah Istimewa Jogjakarta, memerintahkan supaja ditiap-tiap Kalurahan dibentuk Dewan Perwakilan Rakjat Kalurahan.

Pokok peraturannja jang diatur dengan maklumat no 7 dan dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 1945 sebagai berikut :

a. Dewan Perwakilan Rakjat Kalurahan (selandjutnja disebut Dewan Kalurahan) ini mewakili terus seluruh rakjat didalam daerah-perwakilannja untuk membitjarakan rumah tangga daerah perwakilan itu dan membikin aturan-aturannja.

b. Anggauta Dewan Kalurahan dipilih oleh Warga Negara, baikpun laki-laki maupun perempuan jang telah berumur 18 tahun keatas, jang sehat pikirannja dan jang sudah 6 bulan mendjadi penduduk daerah perwakilannja.

c. Jang berhak dipilih djadi anggauta Dewan Kalurahan ialah Warga Negara jang berumur 20 tahun keatas, sehat pikirannja, baik laki-laki maupun perempuan dan sudah 6 bulan mendjadi penduduk daerah perwakilan itu.

d. Banjaknja anggauta Dewan Kalurahan menurut sedikit banjaknja djiwa orang di Kalurahan. Djumlah anggauta Dewan Kalurahan paling sedikit 10 dan paling banjak 30 orang untuk tiap Dewan Kalurahan dengan mengambil dasar tiap 100 djiwa orang diwakili oleh seorang anggauta.

e. Keputusan-keputusan Dewan Kalurahan diserahkan kepada Pemerintahan Kalurahan untuk didjalankan.

f. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kalurahan dipilih oleh dan dari antara anggauta-anggautanja.

g. Sidang Dewan Kalurahan diakui sah djika dikundjungi oleh lebih dari separoh dari banjaknja anggauta.
h. Dewan Kalurahan dipilih buat tiga tahun lamanja, sedang anggauta lama boleh dipilih lagi.
i. Pemilihan anggauta Dewan Kalurahan harus didjalankan dengan tjara teratur dan adil jang akan ditetapkan dalam aturan chusus tentang pemilihan.
j. Anggauta berhenti oleh karena:
   1. meninggal dunia,
   2. pindah keluar daerah perwakilan,
   3. mengundurkan diri,
   4. dipetjat oleh rapat.
k. Dewan Kalurahan dapat diganti apabila tidak disetudjui oleh sedikitnja 2/3 djumlah Warga Negara dalam daerah perwakilan jang dimaksud dalam sub b.
l. Dewan Kalurahan dibeajai oleh Kas Desa.

Sesudah terbentuknja Dewan Kalurahan ini, Komite Nasional di Kalurahan-kalurahan harus dibubarkan.

Demikian antaranja isi maklumat itu.

Selandjutnja pada tanggal 11 - 4 - 1946 dikeluarkan Maklumat No. 15, 16 dan 17 tentang Pemilihan Pamong Kalurahan, tentang susunan Pamong Kalurahan dan perubahan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Kalurahan.

Agar supaja azas kerakjatan dalam daerah Jogjakarta, terutama di Kalurahan-kalurahan (desa-desa) jang djadi sendi kekuatan Negara dapat lebih sempurna didjalankan, maka diadakan aturan pemilihan Pamong Kalurahan, jang memberi ketegasan kedudukan badan-badan tersebut.

Maklumat itu memuat ketentuan-ketentuan antaranja:

Hak memilih :

Jang berhak memilih Lurah Desa dan prabot-prabot desa (Pamong Kalurahan) ialah segenap Kepala somah warga negara baik laki-laki maupun perempuan berumur 18 tahun keatas, sehat fikirannja, dan telah 6 bulan djadi penduduk kalurahan itu.

Djalannja pemilihan :

1. Pemilihan dapat berlangsung djika jang hadlir lebih dari separoh dan segala keputusan diambil dengan suara terbanjak.
2. Pemilihan didjalankan setjara langsung oleh Komisi Pemilihan jang terdiri dari Badan Executief Kapanewon (sementara K.N.I. Kapanewon bersama-sama dengan Panewu P. P.) dibawah pimpinan Bupati jang bersangkutan atau wakilnja.
3. Lurah dan Prabot desa jang telah dipilih, selandjutnja ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Hak dipilih :

1. Jang berhak dipilih djadi Pamong Kalurahan ialah Warga Negara lelaki, telah berumur 20 tahun keatas, sehat fikirannja, baik budi pekertinja, dapat membatja dan menulis huruf latin dan telah 6 bulan djadi penduduk Kalurahan itu.
2. Pamong Kalurahan dipilih untuk 3 tahun lamanja, dan sesudah itu dapat dipilih lagi.
3. Pembantu-pembantu Pamong Kalurahan dipilih, ditetapkan dan diperhentikan oleh rapat Dewan Kalurahan dan Pamong Kalurahan menurut suara jang terbanjak.

MAKLUMAT No. : 16
TENTANG SUSUNAN PAMONG KALURAHAN

Untuk menjempurnakan djalannja pemerintahan Kalurahan, dan supaja azas kerakjatan dapat didjalankan dengan penuh tanggung djawab, maka diadakan aturan-aturan, jang antara lain seperti berikut :

I. Susunan Pamong Kalurahan:

Pamong Kalurahan terdiri dari seorang Lurah, seorang Kami Tua, seorang Tjarik dan 3 orang Prabot Desa lainnja.

II. Tugas Pamong Kalurahan :

1. Pamong Kalurahan adalah Badan Executief, mengerdjakan putusan-putusan Dewan Kalurahan dan semua urusan rumah tangga Kalurahan.
2. Pamong Kalurahan bertanggung djawab sepenuhnja kepada Dewan Kalurahan.
3. Pamong Kalurahan harus mengadakan pembagian pekerdjaan antara anggauta-anggautanja, jang masing-masing harus bertanggung djawab sepenuhnja tentang pekerdjaannja untuk seluruh Daerah Kalurahan kepada Lurah desa sebagai Ketua Pamong Kalurahan dan Kepala Daerah Kalurahan.

III. Pamong Kalurahan tidak boleh merangkap :

1. Pamong Kalurahan tidak boleh mendjadi anggauta Dewan Kalurahan.
2. Lurah Desa tidak boleh merangkap djabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Madjelis Desa.

IV. Pembagian pekerdjaan pemerintahan Kalurahan :

1. Bagian Sosial diketuai oleh Kami Tua merangkap sebagai Wakil Lurah Desa.
2. Bagian Kemakmuran diketuai oleh Ulu-ulu.
3. Bagian Keamanan diketuai oleh Djagabaja.
4. Bagian Agama diketuai oleh Kaum.
5. Bagian administrasi dan lain2 pekerdjaan jang tidak termasuk dalam bagian-bagian tersebut diatas, dikerdjakan oleh Tjarik Desa.

V. Djaminan Pamong Kalurahan :

1. Pamong Kalurahan dan pembantu-pembantunja diberi lungguh.
2. Banjaknja lungguh untuk masing-masing ditetapkan oleh Dewan Kalurahan jang harus disahkan oleh Madjelis Desa.

VI. Beaja Kalurahan :

1. Tiap Kalurahan harus dapat mentjukupi kebutuhannja sendiri.
2. Djika ternjata ada Kalurahan ta' dapat mentjukupi kebutuhannja sendiri maka harus digabungkan dengan Kalurahan lain.
3. Atas kehendak rakjat dapat diadakan gabungan beberapa Kalurahan, walaupun masing-masing telah dapat mentjukupi kebutuhannja sendiri2.

Untuk menjesuaikan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Kalurahan (selandjutnja disebut Dewan Kalurahan) dengan pemilihan Pamong Kalurahan, pula mengingat akan sukarnja mengumpulkan segenap atau sebagian besar dari pada Warga Negara jang mempunjai hak memilih dalam suatu Kalurahan, diadakan beberapa perubahan dalam Maklumat No.: 7.

Tentang pemilih :

Anggauta Dewan Kalurahan dipilih oleh **Kepala somah Warga Negara,** baikpun laki-laki maupun perempuan, jang telah berumur 18 tahun keatas, jang sehat fikirannja dan jang sudah 6 bulan mendjadi penduduk daerah perwakilannja.

Pemilihan dapat berlangsung, djika jang hadlir lebih dari separoh dan segala keputusan diambil dengan suara terbanjak.

Tentang anggauta Dewan Kalurahan :

Jang berhak dipilih djadi anggauta Dewan Kalurahan ialah Warga Negara jang berumur 20 tahun keatas, baik budi pekertinja, sehat fikirannja, baik laki-laki maupun perempuan dan jang sudah 6 bulan mendjadi penduduk daerah perwakilan itu.

Dewan Kalurahan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta jang telah dipilih sebelum berlakunja perubahan itu dianggap absah.

Dalam pada itu mengingat bahwa pada waktu itu di tiap-tiap Kalurahan ada 3 badan agar djalannja pemerintahan di Kalurahan-Kalurahan dapat teratur, maka perlu diadakan peraturan chusus jang dalam hal ini diatur dengan Maklumat No. 14.

Mengingat, bahwa pada waktu ini di tiap-tiap Kalurahan ada 3 badan ialah rapat Desa, rapat Rukun Desa (dulu Rapat Aza) dan Dewan Perwakilan Rakjat (selandjutnja disebut Dewan Kalurahan) dan untuk badan - badan itu masih perlu diadakan aturan-aturan, sehingga djalannja pemerintahan di - Kalurahan-kalurahan dapat teratur dan menudju kearah kesempurnaan, maka diadakan aturan-aturan untuk itu seperti dibawah ini. :

1. **Badan-badan jang dihapuskan :**

   Dengan dibentuknja Dewan Kalurahan, maka rapat Desa dihapuskan, dan semua hak, kewadjiban dan pekerdjaannja djatuh pada Dewan Kalurahan.

   Rukun Desa dan Rukun Tetangga (Aza dan Tonarikumi diluar kota) dihapuskan seluruhnja sedang semua pekerdjaannja dikerdjakan oleh Lurah Desa beserta prabot-prabot desa dan pembantunja, ketjuali djika ada hal-hal jang diurus menurut ketetapan lain.

2. **Batas kewadjiban Dewan Kalurahan :**

   Dewan Kalurahan membuat aturan-aturan tentang rumah tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintahan daerah jang lebih luas dari padanja.

3. **Madjelis Desa :**

   Sebelum bentuk dan pekerdjaan Dewan Kalurahan sempurna adanja, dibentuk pula Madjelis Permusjawaratan Desa (selandjutnja disebut Madjelis Desa).

   Madjelis Desa terdiri dari semua Kepala Somah Warga Negara jang berumur 18 tahun keatas dan jang sedikitnja sudah 6 bulan bertempat tinggal didesa itu, ditambah dengan anggauta-anggauta Dewan Kalurahan dan Pamong Kalurahan.

4. **Rapat Madjelis Desa :**

   Madjelis Desa mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam waktu 3 bulan atau setiap waktu djikalau dipandang perlu oleh Dewan Kalurahan dan/atau Pamong Kalurahan.

   Rapat Madjelis Desa memilih seorang Ketua, Wakil Ketua dan seorang Panitera buat setahun lamanja.

Ketua dan Wakil Ketua Madjelis Desa tidak boleh merangkap djabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kalurahan atau Lurah Desa.

5. **Kewadjiban Madjelis Desa :**

Mendorong Dewan Kalurahan kearah perwakilan jang sempurna.

Mengamat-amati peraturan dan pekerdjaan Dewan Kalurahan agar kesemuanja tadi tidak bertentangan dengan kepentingan umum didesa ataupun tidak melalui batas tersebut bab 2.

Mengabsahkan rantjangan anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran jang dibuat oleh Dewan Kalurahan.

Mengabsahkan peraturan-peraturan tentang hak tanah jang dibuat oleh Dewan Kalurahan dan mengabsahkan putusan Dewan Kalurahan tentang perselisihan tanah.

6. **Pengawasan :**

Agar ada persaudaraan (kordinasi) antara Dewan-dewan Kalurahan itu didalam mendjalankan kewadjibannja masing-masing maka Badan executief Kapanewon (sementara K.N.I. Kapanewon bersama-sama dengan Panewu P.P.) berkewadjiban mengawasi pekerdjaan Dewan-dewan Kalurahan didalam daerahnja.

7. **Kalau ada perselisihan :**

Segala perselisihan antara Dewan Kalurahan dengan Pamong Kalurahan diselesaikan oleh Madjelis Desanja. Djika putusan ini belum memuaskan, maka perselisihan itu akan diselesaikan oleh Dewan Kabupaten (sementara Badan Pekerdja K. N. I. Kabupaten) bersama-sama dengan Bupati dengan perantaraan dan pertimbangan Badan Executief Kapanewon (sementara K. N. I. Kapanewon bersama-sama dengan Panewu P.P.) jang bersangkutan.

Demikianlah peraturan-peraturan itu, jang maksudnja sedikit demi sedikit menanam sendi-sendi demokrasi di pemerintahan kalurahan. Walaupun dalam prakteknja ada djuga timbul kesalah pahaman, terutama pada mulanja, namun paham demokrasi jang mendjadi salah satu sila dari Pantja-Sila, dari Preambule Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah ditegakkan di kalurahan didaerah Istimewa Jogjakarta.

* *
*

5. MENJESUAIKAN PEMERINTAH KAPANEWON DENGAN SUASANA BARU

GUNA menghadapi segala muslihat dari musuh, maka bukan sadja barisan penggempur mempunjai organisasi jang rapi, tetapi djuga alat-alat pemerintahan sipil lainnja, terutama Pamong-Pradja, diatur serapi-rapinja.

Mana sadja jang terdengar atau terasa djanggal segera disesuaikan dengan suasana revolusi.

Dalam permulaan tahun 1946 itu djalan jang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, ialah mengadakan perubahan nama dan daerah Kap. di Kab. Sleman, dengan maksud untuk memudahkan dan menjempurnakan djalannja Pamong Pradja berhubung dengan keadaan jang genting.

Perubahan-perubahan itu diatur dengan Maklumat No. 9 jang dikeluarkan pada tanggal 9-1-1946 seperti tersebut dibawah ini:

1. Untuk memudahkan dan menjempurnakan djalannja Pamong Pradja terutama berhubung dengan keadaan genting pada waktu ini, maka sedjak tanggal 1 bulan 1 tahun 1946 diadakan perubahan nama dan daerah beberapa Kapanewon di Kabupaten Sleman.
2. Nama Kapanewon-kapanewon Kenaran dan Prambanan (lama) dihapuskan dan diganti masing-masing dengan nama Kapanewon-kapanewon Prambanan (baru) dan Kalasan.
3. Kedudukan Kapanewon Prambanan (baru) di Kalurahan Prambanan dan kedudukan Kapanewon Kalasan di Kalasan (Kalurahan Glondong).
4. Kalurahan-kalurahan jang dahulu masuk dalam daerah Kapanewon Kenaran semuanja dimasukkan dalam daerah Kapanewon Prambanan (baru), ditambah dengan 1 Kalurahan jang dahulu masuk dalam daerah Kapanewon Prambanan (lama) ialah Kalurahan Prambanan.
5. Semua Kalurahan jang dahulu masuk dalam daerah Kapanewon Prambanan (lama) dimasukkan dalam daerah Kapanewon Kalasan ketjuali Kalurahan Prambanan.
6. Kalurahan-kalurahan jang masuk dalam daerah Kapanewon Prambanan (baru) adalah sebagai berikut:

1.	Kalurahan Prambanan	No. :	111.
2.	„ Grojokan	No. :	163.
3.	„ Djobohan	No. :	164.
4.	„ Kebondalem	No. :	165.
5.	„ Redjodani	No. :	166.
6.	„ Demangan	No. :	167.
7.	„ Kenaran	No. :	168.
8.	„ Gajam	No. :	169.
9.	„ Losari	No. :	170.

10.	,,	Klerohardjo	No. :	171.
11.	,,	Krapjak	No. :	172.
12.	,,	Totogan	No. :	173.
13.	,,	Marangan	No. :	174.

Djadi semua sedjumlah 13 Kalurahan.

7. Kalurahan-kalurahan jang masuk dalam daerah Kapanewon Kalasan adalah sebagai berikut :

1.	,,	Ringinsari	No. :	105.
2.	,,	Krendosari	No. :	106.
3.	,,	Poelesari	No. :	107.
4.	,,	Toendjoengsari	No. :	108.
5.	,,	Tlatasari	No. :	109.
6.	,,	Poetjoengsari	No. :	110.
7.	,,	Bogem	No. :	111.
8.	,,	Tamanan	No. :	112.
9.	,,	Tegalredjo	No. :	113.
10.	,,	Geneng	No. :	114.
11.	,,	Kalimati	No. :	115.
12.	,,	Temanggal	No. :	116.
13.	,,	Koedjonsari	No. :	117.
14.	,,	Babadan	No. :	118.
15.	,,	Glondong	No. :	119.
16.	,,	Kalibening	No. :	120.

Tak lama kemudian dikeluarkan Maklumat tentang perubahan nama Pangreh Pradja mendjadi Pamong Pradja, karena didasarkan bahwa nama Pangreh Pradja itu dikalangan rakjat mengingatkan pada djaman pendjadjahan.

Perubahan ini diatur dengan maklumat : No. 10/1946.

M e n g i n g a t :

1. bahwa nama Pangreh Pradja dikalangan rakjat mempunjai arti jang mengingatkan pada djaman pendjadjahan.
2. bahwa disana sini untuk memenuhi kehendak rakjat dengan tidak setjara resmi nama itu atjapkali diganti dengan Pamong Pradja.

M e n i m b a n g :

1. bahwa kedudukan dan kewadjiban Pangreh Pradja dalam Negara jang telah merdeka lain dengan tatkala dalam djaman pendjadjahan.
2. bahwa nama Pamong Pradja sesuai dengan kedudukan dan kewadjiban Pangreh Pradja masa ini.

maka Kami berdua, Seri Paduka Ingkeng Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Seri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Arjo Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia semufakat dengan Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakata.

M e m u t u s k a n :

bahwa nama Pangreh Pradja dalam daerah Kami berdua untuk selandjutnja diganti dengan nama Pamong Pradja, dan

m e m e r i n t a h k a n:

kepada segenap pegawai Pamong Pradja, supaja mereka berpendirian, bersikap dan bertindak jang sesuai dengan kedudukan dan kewadjiban mereka dalam Negara jang merdeka, agar perubahan nama ini djuga berarti perubahan sifat dan djiwa Pamong-Pradja jang harus bekerdja bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin rakjat jang djadi tanggungannja kearah kesempurnaan,

m e n g h a r a p:

kepada pemimpin-pemimpin dan rakjat supaja membantu usaha Pamong Pradja dengan tenaga dan pikirannja dan dengan mempertebal rasa pertjaja mempertjajai, untuk melaksanakan kewadjiban jang dipikulkan pada Pamong Pradja itu.

Maklumat ini mulai berlaku semendjak diumumkan.

Ngajogjakarta, 11 Mulud Djimawal 1877
atau, 13 - 2 - 1946.
HAMENGKU BUWONO IX.
PAKU ALAM VIII
MOH. SALEH.

Penghapusan Dewan Pemerintah Kapanewon dan Pembentukan Badan Penghubung Kapanewon

Dengan maklumat Daerah No. 18 tahun 1946 maka Pemerintah Daerah, Kabupaten dan Kalurahan diberi bentuk jang demokratis, rakjat diberi hak mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnja masing-masing dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakjat jang mempunjai tugas legislatief.

Akan tetapi, walaupun daerah Kapanewon hanja merupakan suatu daerah administratief belaka dan Maklumat No. 18 itu tidak memberi otonomi kepada Kapanewon, hanja maklumat tadi pasal VI menetapkan terbentuknja Dewan Pemerintah di tiap-tiap Kapanewon. Karena di Kapanewon tidak ada Perwakilan Rakjat, maka diadakan suatu instansi. Instansi itu jalah Rapat Gabungan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Kalurahan-kalurahan di seluruh Kapanewon.

Maksud jang tidak termuat dalam Maklumat No. 18/1946 tadi sebetulnja, supaja di Kapanewon ada badan kordinator jang terdiri dari wakil-wakil rakjat, dan dapat mengkordinasi usaha-usaha pemerintahan kalurahan-kalurahan di daerah tiap-tiap Kapanewon.

Maka berdasarkan atas alasan-alasan itu, Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta memadjukan usul kepada Dewan Daerah untuk menghapuskan Dewan Pemerintah Kapanewon diseluruh Daerah.

Berhubung dengan itu, kemudian pada tanggal 2 September 1948 telah di keluarkan Maklumat No. 10/1948 tentang penghapusan Dewan Pemerintah Kapanewon dan pembentukan Badan Penghubung di Kapanewon.

Udjud Badan Penghubung tersebut, seperti tertera dalam pasal 3 jalah terdiri dari Panewu sebagai Ketua dan Ketua D.P.R. Kalurahan-Kalurahan di daerah Kapanewon sebagai anggauta.

Didalam pendjelasannja diterangkan, bahwa „Badan Penghubung" ini bukan badan legislatief Kapanewon dan djuga bukan badan executief, akan tetapi mempunjai tugas merembug kepentingan bersama (gemeenschappelijke belangen) dari Kalurahan-kalurahan didaerah satu Kapanewon, misalnja soal pengairan, mendirikan sekolah, rumah sakit, pasar, koperasi desa dan lain sebagainja.

Pada umumnja, jang perlu dirembug didalam „Badan Penghubung" itu jalah kepentingan bersama Kalurahan-Kalurahan didaerah satu Kapanewon jang masuk rumah tangga Kalurahan dan perlu diatur dengan peraturan Kalurahan atau akan memberatkan keuangan Kalurahan.

Putusan-putusan Badan Penghubung itu tidak dengan sendirinja mengikat kepada masing-masing Kalurahan, akan tetapi harus dimadjukan kepada D.P.R. Kalurahan masing-masing untuk dibitjarakan dan diputuskan.

* *
*

6. PEMERINTAH DAERAH DAN KABUPATEN DALAM PERKEMBANGAN SELANDJUTNJA

SEKALIPUN Pemerintah Daerah dan Kabupaten jang ada sudah dapat berdjalan, namun perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan selalu diadakan, agar segala sesuatunja dapat membantu kebutuhan rakjat jang berdjuang.

Dan mengingat akan berlakunja Undang-undang Pokok Daerah Istimewa Jogjakarta, maka segala urusan pemerintahan daerah jang bersifat executief jang dahulu didirikan oleh K.N.I. atau jang didjalankan oleh bekas Koti Zimu Kyoku, harus dimasukkan dalam Djawatan-djawatan Pemerintah Daerah. Hal pembubaran - penjerahan badan - badan executief ini diatur dalam Maklumat No. 11 sebagai berikut :

MAKLUMAT No. 11

Pasal 1.

Mengingat keputusan Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta pada tanggal 13 dan 29 bulan Djanuari tahun 1946, bahwa sebagai aturan sementara dan aturan peralihan (persiapan) pada akan berlakunja Undang-Undang Pokok Daerah Istimewa Jogjakarta, dibentuk Seksi-seksi jang mendjalankan pemerintahan dalam daerah Kami berdua dan berhubung dengan itu segala urusan pemerintahan daerah jang bersifat executief harus dimasukkan dalam Djawatan-djawatan Pemerintah Daerah, untuk sementara Paniradya-Paniradya, maka kami berdua, Seri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Seri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Arjo Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta, memutuskan bahwa segala urusan pemerintahan daerah jang bersifat executief jang dahulu didjalankan oleh bekas Koti Zimu Kyoku dan badan-badan jang didirikan oleh Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta harus dimasukkan dalam Djawatan-Djawatan Pemerintah Daerah (untuk sementara Paniradya-Paniradya).

Pasal 2.

1. Pembubaran/penjerahan resmi dari badan-badan tersebut dalam pasal 1 akan segera didjalankan oleh Ketua-ketua Seksi, bersama-sama dengan Paniradya-pati2 dan Pemimpin atau Pengurus Badan-badan jang bersangkutan.
2. a. Sebelum diadakan pembubaran/penjerahan resmi itu badan-badan tersebut harus mendjalankan pekerdjaannja terus sebagaimana biasa.
   b. Pembubaran dan penjerahan resmi itu untuk masing-masing badan akan diumumkan.

c. Segala aturan jang dibuat oleh badan-badan itu, djikalau tidak/belum ditjabut, diganti atau dirubah, masih berlaku terus.

Pasal 3.

Untuk mendjaga djangan sampai timbul kebingungan dan kekatjauan lagi diantara rakjat, oleh karena adanja beberapa matjam badan executief untuk satu uraian (dualisme dalam pemerintahan daerah), maka untuk selandjutnja badan-badan jang hendak mendjalankan usaha-usaha executief jang mengenai urusan pemerintahan daerah, harus lebih dahulu minta pengabsahan dari Djawatan (Paniradya) jang bersangkutan dan hanja dapat mendjalankannja dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.

Ngajogyakarta, 14 Mulud Djimawal 1877.
atau 16 - 2 - 1946.

HAMENGKU BUWONO IX
PAKU ALAM VIII
MOH. SALEH.

Pada tgl. 18 Mei 1946 oleh Pemerintah Daerah dikeluarkan Maklumat No. 18 jang maksudnja membentuk Dewan Perwakilan Rakjat di Daerah Istimewa Jogjakarta, di Kota dan di Kabupaten-Kabupaten. D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta bersama kedua S.P. berhak membikin peraturan-peraturan untuk mengatur Daerah Istimewa Jogjakarta (mendjalankan legislatief) sedang oleh dan dari D.P.R. dipilih beberapa anggauta jang bersama dengan dan diketuai oleh kedua S.P. mendjalankan pemerintahan sehari-hari.

Adapun Maklumat No. 18 tersebut selengkapnja seperti berikut :

MAKLUMAT No. 18
TENTANG DEWAN - DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DI DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA (KASULTANAN DAN PAKU ALAMAN)

Mengingat putusan-putusan sidang pleno Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta pada tanggal 24-4-1946 jang menetapkan antara lain, supaja Badan Pekerdja mewudjudkan putusan-putusan tentang bentuk Dewan-dewan Perwakilan di Daerah Istimewa Jogjakarta didalam suatu maklumat.

Mengingat pula, bahwa masih akan ada Undang - Undang jang akan mengatur susunan pemerintahan buat daerah-daerah jang bersifat istimewa ialah jang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18.

Maka sambil menanti Undang-undang tersebut Kami berdua Seri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Seri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Arjo Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, dengan persetudjuan Badan Pekerdja Dewan Daerah Jogjakarta, mengadakan peraturan tentang djalannja kekuasaan mengatur dan memerintah (legislatief dan executief) dalam daerah Kami berdua seperti berikut:

I. Didalam Daerah Istimewa Jogjakarta diadakan Dewan Perwakilan Rakjat.
   a. Dewan Perwakilan Rakjat daerah Jogjakarta, disingkat Dewan Daerah, buat seluruh daerah Jogjakarta, berkedudukan di ibu kota Jogjakarta.
   b. Dewan Perwakilan Rakjat Jogjakarta Kota, disingkat Dewan Kota, buat ibu Kota Jogjakarta.

c. Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten, disingkat Dewan Kabupaten, buat tiap-tiap Kabupaten, berkedudukan di ibu Kota Kabupaten.
d. Dewan Perwakilan Rakjat Kalurahan, disingkat Dewan Kalurahan, sebagaimana tersebut dalam Maklumat No. 7, 14 dan 17.

II. Tiap-tiap Dewan Perwakilan bersama-sama dengan Kepala Daerah masing-masing membuat peraturan-peraturan tentang Daerahnja masing-masing, jang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan daerah jang lebih luas dari pada daerahnja masing-masing, jaitu :

a. Dewan Daerah dengan Seri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan dan Seri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Arjo Paku Alam.
b. Dewan Kota dengan Bupati Kota Kasultanan dan Bupati Kota Paku-Alaman.
c. Dewan Kabupaten dengan Bupati Pamong Pradja.

III. Oleh dan dari Dewan Daerah dibentuk Badan Pekerdja jang sehari-hari mendjalankan pekerdjaan legislatief.

IV. 1. Oleh dan dari Dewan Perwakilan dibentuk Dewan Pemerintah (badan executief) terdiri dari beberapa anggauta, jang bersama-sama dengan dan diketuai oleh Kepala-kepala Daerah tersebut dalam pasal II sub. a, b dan c mendjalankan pemerintahan sehari-hari.
2. Dewan Pemerintah baik seluruhnja, maupun seorang-seorang, bertanggung djawab kepada Dewan Perwakilan jang bersangkutan.
3. Kedua Seri Paduka tersebut bebas dari tanggung djawab.

V. Semua putusan dalam sidang Dewan-Dewan Perwakilan dan dalam sidang Dewan-Dewan Pemerintah diambil dengan suara jang terbanjak. Di dalam hal ini kedua Kepala Kota tersebut dalam pasal II sub b. bersama-sama, hanja mempunjai satu suara.

VI. 1. Di Kapanewon tidak diadakan Dewan Perwakilan Rakjat hanja diadakan Dewan Pemerintah, terdiri dari beberapa orang anggauta, jang bersama-sama dengan dan diketuai oleh Panewu mendjalankan pemerintahan sehari-hari.
2. Anggauta Dewan Pemerintah Kapanewon dipilih oleh rapat gabungan Ketua dan wakil Ketua Dewan-Dewan Kalurahan dilingkungan Kapanewon jang bersangkutan.
3. Dewan Pemerintah Kapanewon, baik seluruhnja maupun seorang-seorang bertanggung djawab kepada rapat gabungan Ketua dan wakil Ketua Dewan-Dewan Kalurahan dalam lingkungan Kapanewon jang bersangkutan.

VII. Dengan terbentuknja Dewan-Dewan Perwakilan, seluruh susunan Komite Nasional Indonesia didaerah Istimewa Jogjakarta dihapuskan dan pekerdjaannja jang selaras dengan pekerdjaan Dewan Perwakilan dilandjutkan oleh Dewan Perwakilan jang bersangkutan.

VIII. Maklumat ini berlaku sedjak diumumkan.

Jogjakarta, 11 Djumadilakir Djimawal 1877.
Atau, 18 Mei 1946.
HAMENGKU BUWONO IX
PAKU ALAM VIII
MARLAN.

Mengingat Maklumat No. 18 tentang pembentukan Dewan-Dewan Perwakilan Rakjat di Daerah Istimewa Jogjakarta, maka Badan Pekerdja Dewan Daerah Jogjakarta mengumumkan :

1. Sedjak Maklumat No. 18 diumumkan, K.N.I. Kabupaten-Kabupaten supaja bersidang untuk membubarkan dan membentuk Dewan Kabupaten, sesuai dengan pembentukan Dewan Daerah.
2. Tjabang partai-partai dalam Kota Jogjakarta, supaja mengadakan panitya Pembentukan Dewan Kota, dan selandjutnja membentuk Dewan Kota sesuai dengan pembentukan Dewan Daerah.
3. Sebelum K.N.I. Kapanewon dibubarkan, supaja pengurusnja mengadakan Sidang Ketua dan Wakil Ketua Dewan-Dewan Kalurahan untuk membentuk Dewan Pemerintahan, dipilih oleh, tetapi tidak perlu dari Ketua atau Wakil Ketua Dewan-Dewan Kalurahan, supaja dipentingkan kesedaran politik dan ketjakapannja orang-orang jang dipilih.
4. Anggauta Dewan Pemerintah tidak boleh merangkap djabatan lain.
5. Dewan Kota sebanjak-banjaknja beranggauta 25 orang. Dewan Kabupaten Bantul sebanjak-banjaknja 30 orang. Dewan Kabupaten Sleman sebanjak-banjaknja 30 orang. Dewan Kabupaten Gunung Kidul sebanjak-banjaknja 30 orang. Dewan Kabupaten Kulon Progo sebanjak-banjaknja 23 orang. Dewan Kabupaten Adikarta 15 orang.

Keterangan :

Ketetapan djumlah anggauta itu dengan dasar tiap-tiap ± 10.000 penduduk mempunjai wakil 1 orang dengan djumlah paling sedikit 15 orang dan paling banjak 30 orang anggauta.

6. Keanggautaan Dewan Perwakilan seperti telah diputuskan berdasarkan perwakilan partai-partai politik ditambah dengan beberapa Badan-Badan lainnja, sebagai koreksi jang memenuhi sjarat-sjarat sebagai : organisasi-organisasi jang tetap adanja dan karena kedudukannja amat penting untuk kenegaraan.
7. K.N.I. Kemantren-Kemantren dan Kapanewon-Kapanewon supaja bersidang dan mengadakan verslag lengkap tentang usaha-usahanja dan harta bendanja, sesudahnja itu K.N.I. dibubarkan.

Sebagai pelaksanaan dari pada Maklumat No. 11 tentang Pembubaran/ Penjerahan Badan-Badan Executief Pemerintah Daerah jang didirikan oleh Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta dan Bekas Koti Zimu Kyoku dahulu, maka pada tanggal 22 - 5 - 1946 di Kepatihan diadakan pertemuan resmi antara Pemimpin-pemimpin Djawatan, Paniradya-Pati, dengan Kantor Kasultanan dan Paku Alaman, Polisi, Bupati-Bupati Pamong Pradja dengan segenap anggauta Badan Pekerdja Dewan Daerah, dipimpin oleh S.P. Sultan.

Dalam pertemuan tersebut diumumkan putusan-putusan tentang penjesuaian Djawatan-Djawatan dengan Paniradya-Paniradya sebagai berikut :

I. **Djawatan Umum** menerima dari :

1. Budya Pratiwa (urusan Pegawai) seluruhnja.
2. Pariharta (Keuangan) seluruhnja.
3. Jajasan Umum (Bangun-bangunan) seluruhnja.
4. Sri Darma Jekti (Pengadilan Darah Dalem), Pangadilan, Pendjara.
5. Kapanitran, Pegawai Kehutanan, Alat-alat Kantor (Bunen Banikarti), Mobil, Tilpon.
6. Prentah Luhur, Penerangan.

II. **Djawatan Sosial** menerima dari :

1. Kapanitran, Agama, Bale Harsono, Perpustakaan.
2. Wijata Pradja (Pengadjaran) seluruhnja.
3. Ajahan Umum, Sosial, Kesehatan.

III. **Djawatan Kemakmuran** menerima dari :

1. Ekonomi seluruhnja.
2. Kapanitran, Prahento.

IV. **Djawatan Pradja** menerima dari :

1. Ajahan Umum, Pamong Pradja, Pentjatatan djiwa, Urusan Tanah, Administrasi Laskar Rakjat.

V. **Djawatan Keamanan** menerima dari :

1. Keamanan, Pertahanan, Polisi, Tentara Lasjkar, Penjelidikan Masjarakat, Perhubungan (Lalu-lintas, P.T.T., Listrik dan Bangun-bangunan).

VI. **Pemerintah Luhur** menerima dari :

Kapanitran Archief Umum (Radya Kintaka), Urusan Darah Dalem, Perhubungan dengan Kraton, Upatjara, Rumah tangga Kepatihan.

Pada tanggal 12 - 6 - 1946 Kantor Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta mengeluarkan pengumuman jang isinja antara lain, bahwa :

Penerangan K.N.I. Daerah Istimewa Jogjakarta jang telah digabungkan dengan Penerangan Kasultanan dan Paku Alaman dan diberi nama „Kantor Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta", mulai hari Kemis tanggal 13 - 6 - 1946 kantornja di Kepatihan.

Seperti diketahui, bahwa semula kantor Penerangan K.N.I. itu kantornja mendjadi satu dengan K.N.I. di Malioboro.

Rapat pleno jang ke II dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta telah diadakan pada tanggal 14 - 6 - 1946 di Gedung Nasional dan mendapat kundjungan pula dari wakil berbagai badan dan organisasi. Pokok perundingan dalam rapat tersebut ialah membentuk susunan Dewan Pertahanan Daerah jang akan diadjukan kepada Kepala Daerah. Seperti termaktub dalam pasal 4 a dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. I tahun 1946 tentang susunan Dewan Pertahanan Daerah buat Daerah Istimewa, maka telah ditetapkan sebagai berikut :

Ketua : S. P. Sultan.

Wakil Ketua I : S. P. Paku Alam.

Untuk memenuhi apa jang dimaksudkan dalam sub d dan e dalam pasal itu, maka setelah diadjukan pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul rapat dengan suara bulat menetapkan, bagi sub d.- Djawatan-djawatan Kemakmuran dan Keamanan dari Badan Executief D.P.R.

Sub. c.- Dewan Pemuda, Dewan Perdjuangan Rakjat Indonesia dan Gasbi (3 wk. organisasi Rakjat).

7. MEMPERLENGKAP DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH JOGJAKARTA

BERHUBUNG dengan adanja beberapa anggauta D. P. R. tak dapat melakukan kewadjiban, karena keadaan jang memaksa, maka dalam rapat pleno pada tanggal 15 - 7 - 1946 bertempat di Gedung Nasional, untuk dapat tetap melandjutkan djalannja organisasi, D.P.R. Daerah mengambil tindakan sementara sebagai berikut:

Karena terhalangnja Ketua Dewan, maka segala pimpinan dan tanggung djawab Dewan diserahkan kepada Sdr-Sdr. Mr. Tandiono Manu dan H. Abd. Hamid selaku Wakil Ketua I dan II.

Ditetapkan mendjadi Wakil Djawatan Umum, Sdr. Mr. R.A. Kasmat.

Karena keluarnja Sdr.Sdr. Surjobroto dan Danuhusodo dari anggauta Badan Pekerdja, ditetapkan sebagai gantinja, Sdr.-Sdr. Iskak dan Surjosupadmo.
Buat sementara waktu, Badan Pekerdja beranggauta 13 orang.

Berhubung dengan ditariknja kembali Sdr.-Sdr. Ki Bagus H. Hadikusumo, Djatmiko, Surjobroto dan Danuhusodo, masing-masing dari Masjumi, P.N.I. P.B.I. dan G.A.S.B.I., maka ditetapkan sebagai gantinja jalah Sdr.-Sdr Prodjonimpuno, Prawirowinarno, Sumedi dan Budi.

Panitya perumahan

Selandjutnja dapat dikemukakan disini, bahwa, berhubung dengan kepindahannja Kementerian-Kementerian dari Djakarta ke Jogjakarta, hingga dirasa perlu diatur oleh sebuah Panitya, maka pada tanggal 6 Agustus 1946 Dewan Pertahanan Daerah Jogjakarta mengeluarkan pengumuman tentang pembentukan „Panitya Perumahan" seperti berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendjamin agar supaja Djawatan - Djawatan jang berkantor di Daerah Jogjakarta dapat gedung jang diperlukannja dan lagi untuk kepentingan kediaman para pengungsi, perlu dibentuk suatu Panitya jang di beri kewadjiban menjediakan gedung-gedung dan rumah-rumah untuk keperluan tersebut diatas.

Mengingat Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 2 (pasal 3) dan No. 3 (pasal 2).

Menetapkan:

Pasal 1.

Membentuk Panitya jang diwadjibkan menjediakan gedung-gedung dan rumah-rumah guna kepentingan-kepentingan djawatan-djawatan jang berkantor di Daerah Jogjakarta dan untuk tempat kediaman para pengungsi.

Pasal 2.

(1) Menundjuk sebagai anggauta dari Panitya tersebut dalam pasal 1:
a. seorang wakil dari Tentara Republik Indonesia.

b. seorang wakil dari Polisi Negara.
c. seorang wakil dari Djawatan Pekerdjaan Umum.
d. seorang wakil dari Kantor Harta Benda.

(2) Panitya ini bekerdja langsung dibawah pimpinan Dewan Pertahanan Daerah Jogjakarta.

Pasal 3.

(1) Panitya jang dimaksudkan dalam peraturan ini dinamakan „Panitya Perumahan".

(2) Panitya Perumahan berkantor di Kepatihan Jogjakarta.

(3) Peraturan ini mulai berlaku sedjak hari diumumkannja.

Peraturan tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 1946 dan ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pertahanan Daerah Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

PENETAPAN PEMERINTAH No. 17/SD TAHUN 1946 TENTANG PIMPINAN POLISI NEGARA DIDAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

Pada tanggal 9 - 8 - 1946 telah dikeluarkan Penetapan Pemerintah No. 17/SD tahun 1946 jang menjatakan, bahwa Sri Sultan diserahi pimpinan Polisi Negara di Daerah Istimewa Jogjakarta.
Adapun penetapan tersebut sebagai berikut :

Kami, Presiden Republik Indonesia.

Menimbang:

perlu untuk sementara waktu mengadakan perubahan susunan Pimpinan Polisi Negara di Daerah Istimewa Jogjakarta,

Mendengar:

Menteri Dalam Negeri dan Kepala Djawatan Kepolisian Negara,

Memutuskan:

Menetapkan jang berikut :

I. S.P. Sultan Jogjakarta diserahi Pimpinan Polisi Negara di Daerah Istimewa Jogjakarta dan diberi hak serta kewadjiban jang dilakukan oleh Residen-Residen di Djawa dan Madura, diluar Daerah Istimewa Jogjakarta dengan perbedaan bahwa tentang hal ini S. P. langsung dibawah pimpinan Pemerintah Pusat.

II. Penetapan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta tanggal 9 - 8 - 1946.
Wakil Presiden Republik Indonesia.
(MOH. HATTA)

Diumumkan pada bulan Agustus 1946.
Sekretaris Negara.
(A.G. PRINGGODIGDO)

Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 17/SD tahun 1946, maka pada tanggal 23 - 9 - 1946 di Kepatihan Jogjakarta telah dilakukan upatjara penjerahan urusan kepolisian oleh Gubernur Djawa Tengah kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta. Upatjara tersebut dihadliri oleh para pemimpin polisi daerah Jogjakarta dan wakil-wakil badan-badan serta partai-partai.

Mr. Wongsonegoro dalam pidatonja menerangkan, tentang kewadjiban polisi pada masa ini, jaitu selain mendjaga tata tertib umum harus pula berusaha djangan sampai Nica dapat memasukkan kaki tangannja dikalangan masjarakat. Kewadjiban tersebut tidak boleh dikatakan ringan, terutama djika mengingat bahwa tiap-tiap revolusi itu selalu bersama-sama dengan keadaan-keadaan jang membikin kegaduhan.

Wakil Djawatan Kepolisian Djawa Tengah dalam sambutannja menjatakan, bahwa polisi dialam kemerdekaan haruslah berubah sifatnja. Sifat-sifat jang sesuai dengan keadaan sekarang.

Setelah S. P. Sultan menerima penjerahan itu maka dalam pidatonja beliau membentangkan, bahwa diwaktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, maka perasaan rakjat masih sadja diliputi oleh suasana „tidak senang" terhadap polisi. Hal ini tidaklah mengherankan oleh karena taktik kolonial Belanda memang mendjauhkan polisi dari masjarakat.

Rasa itu hendaknja dilenjapkan dan mulai sekarang polisi haruslah berdiri diatas masjarakat sebagai pelindung rakjat, demikian S. P. Sultan.

S. P. Paku Alam berkantor di Kepatihan

Berhubung dengan kewadjiban S. P. Sultan sebagai Menteri Negara dan sebagai Pembantu Keuangan Negara dan lain-lainnja jang mungkin sekali kerap meninggalkan kantor pimpinan, maka untuk melantjarkan djalannja pimpinan Pemerintahan Daerah dan Dewan Pertahanan Daerah, S. P. Paku Alam sebagai wakilnja, mulai tanggal 8 - 10 - 1946 berkantor djuga mendjadi satu tempat dengan S. P. Sultan di Kepatihan.

Berita Daerah

Atas usaha Pemerintah Daerah, bersama-sama dengan Kantor Penerangan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, maka mulai tanggal satu Djanuari 1947 dikeluarkan madjallah ½ bulanan „Berita Daerah Istimewa Jogjakarta Negara Republik Indonesia", dengan memuat berita-berita resmi tidak hanja dari Pemerintah Daerah sadja, tapi djuga dari badan-badan Pemerintah Negara Republik Indonesia jang berkepentingan.

Redaksi Berita Daerah ini ada ditangan Kantor Penerangan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, sedangkan tata usahanja diurus oleh Djawatan Pradja. Dan sedjak tanggal 1 Mei 1947, madjallah tersebut digabungkan dengan madjallah Ekonomi dari Djawatan Kemakmuran dan namanja diganti mendjadi „Madjallah Daerah".

Panitya Personalia Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta

Pada permulaan bulan Djanuari 1947 oleh Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta telah dibentuk sebuah Panitya jang berkewadjiban menempatkan tenaga jang tepat pada Djawatan-Djawatan serta membaharui susunan kantor-kantor Pemerintah Daerah.

Kedudukan Panitya Personalia Pemerintah Daerah Jogjakarta, demikian nama Panitya tersebut, jaitu merupakan suatu badan penasehat untuk memadjukan usul-usul kepada Dewan Pemerintah. Hak sepenuhnja untuk menetapkan pegawai dan lain sebagainja tetap ditangan Dewan Pemerintah.

Maksud Panitya ialah :

a. Menudju kearah pembangunan sesuai dengan keuangan Pemerintah.
b. Menetapkan tenaga jang tepat, berdasar atas kepandaian, ketjakapan, kedjudjuran dan semangat.
c. Merubah serta memperbaiki susunan kantor-kantor Pemerintah Daerah. Jang penting diperkuat dan djika perlu menghapuskan jang kurang penting (digabungkan dan sebagainja).

Panitya tersebut berkewadjiban djuga memperhatikan tenaga-tenaga jang mestinja sudah mendapat pensiun. Panitya wadjib memperhatikan adanja pemindahan tenaga-tenaga untuk memperkuat otonom Kabupaten-Kabupaten. Antara abdidalem dan pegawai negeri harus ada garis jang terang. Demikianlah sebagian dari pada beban kewadjiban Panitya tersebut.

Adapun susunan Panitya sebagai berikut :

Ketua : Sdr. Marzuki ; Penulis : Sdr. Hudoro ; Pembantu-pembantu : Sdr. K.R.T. Pringgokusumo, Mr. K.R.T. D. Gondokusumo, K.R.T. Purbonegoro, R.T. Djojodipuro, Prodjolalito, Mangkusuparto, Kartoseputro, Darmowisastro, Karnen, Daris Tamim, Sukirdjo, Nj. Sulami, Mr. K. R. T. Kertonegoro, K. R. T. Honggowongso.

* *
*

8. MARKAS PERTAHANAN

BERHUBUNG dengan gentingnja suasana pada pertengahan tahun 1947, maka perlu Tentara, Pemerintah dan Rakjat ditiap-tiap Kabupaten/ Kalurahan, Kemantren dipersatukan seperti tersebut dalam Dewan Pertahanan Daerah. Dengan demikian dapatlah terdjamin adanja Kesatuan Komando dan tiap-tiap daerah, djika putus hubungannja dengan daerah-daerah lainnja, akan dapat mengurus dirinja sendiri.

Adapun usaha tersebut diatas diatur oleh Dewan Pertahanan Daerah dengan peraturannja No. 1 tahun 1947 jang berbunji selengkapnja sebagai berikut :

Pembentukan Markas-Markas Pertahanan diseluruh daerah Jogjakarta (termasuk Haminte Jogjakarta, enclave-enclave Daerah Solo di Kota Gede, Imogiri dan Ngawen).

Dewan Pertahanan Daerah Jogjakarta,

Mengingat:

1. gentingnja suasana dewasa ini.
2. pentingnja daerah Jogjakarta berhubung Pemerintah Pusat berkedudukan didaerah Jogjakarta.

Mempertimbangkan:

1. Usul-usul dari pihak Tentara, Biro Perdjuangan Daerah, Dewan Kelasjkaran Daerah, Polisi Negara, Polisi Tentara, Polisi Tentara Laut, Dewan Pemerintah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Jogjakarta, pada tanggal 18 dan 21, bulan 6 tahun 1947.
2. Usul-usul pembentukan Markas Pertahanan Kota oleh Komando Ketentaraan Kota.

Mengingat:

1. Undang-Undang Keadaan Bahaja tahun 1946 (UU No. 6 tanggal 6-6-1946).
2. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 19 ttg 19 - 9 - 1946, pasal-pasal 6 dan 7 tentang Lasjkar dan Barisan.
3. Peraturan D.P.N. tentang P.B.O. No. 6 tanggal 18 - 7 - 1946.
4. Peraturan D. P. N. No. 30 tanggal 31 - 1 - 1947 tentang Daerah Militer jang dirubah dalam Peraturan D. P. N. No. 32 tanggal 20 - 6 - 1947.

Menimbang:

Bahwa ditiap-tiap Kabupaten/Kalurahan/Kemantren diseluruh Daerah Jogjakarta (termasuk Haminte Jogjakarta, enclave-enclave daerah Solo di Kota Gede, Imogiri dan Ngawen) perlu dibentuk Markas Pertahanan :

1. untuk mempersatukan Pemerintah, Tentara dan Rakjat diseluruh daerah Jogjakarta,
2. untuk mendjamin adanja kesatuan Komando,
3. agar tiap-tiap daerah Kabupaten/Kalurahan/Kemantren dapat mengurus diri sendiri, djika berhubung dengan gentingnja keadaan, putus perhubungannja dengan daerah lainnja.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

BAB I.

Tentang Markas Pertahanan Kota.

Pasal 1.

1. Mengabsahkan susunan Markas Pertahanan Kota jang dibentuk oleh Komando Ketentaraan Kota dengan segenap bagian-bagiannja.
2. Batas kekuasaan Markas Pertahanan Kota meliputi seluruh Kota dengan daerah jang melingkungi diluarnja dalam djarak 5 km terhitung dari batas kota.
3. Markas Pertahanan Kota mempunjai 7 bagian :
   a. Bagian pertempuran jang terdiri dari pada Tentara dan barisan.
   b. Bagian Keamanan jang terdiri dari pada : Polisi Tentara, Polisi Negara, Polisi Tentara Laut, Djawatan Keamanan, Barisan2 Pemuda.
   c. Bagian Perhubungan jang terdiri dari pada : Panitya Angkutan Darat, Panitya P. T. T.
   d. Bagian Penerangan jang terdiri dari pada : Kantor Penerangan, Pepolit P. P., Barisan-barisan Pemuda.
   e. Bagian Sosial jang terdiri dari pada : Djawatan Sosial, P. P. G. I., Barisan Wanita.
   f. Bagian Kesehatan jang terdiri dari pada : Kantor Kesehatan Tentara, P. M. I., Kantor Kesehatan Rakjat, Rumah Sakit.
   g. Bagian P. B. O. jang terdiri dari pada : Polisi Negara, P. P., Barisan-barisan Pemuda, Djawatan Pek. Umum, Gabungan Rukun Kampung.

BAB II.

Tentang Markas-Markas Pertahanan Kabupaten, Kalurahan, Kemantren.

Pasal 2.

Di-tiap-tiap Kabupaten, Kalurahan, dan Kemantren-Kemantren dibentuk Markas Pertahanan jang mempunjai bagian-bagian seperti dalam pasal 1 dengan disesuaikan kepada keadaan di-masing-masing tempat.

Pasal 3.

1. Pimpinan Markas Pertahanan Kabupaten - Kabupaten terdiri dari pada :
   a. Kepala Daerah
   b. Komandan Tentara
   c. Kepala Inspektorat Biro Perdjuangan
   d. Kepala Polisi Negara
   e. Kepala Djawatan Keamanan
   f. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten
   g. Wakil Pemuda

2. a. Dalam keadaan biasa Kepala Daerah memegang Pimpinan Umum.
   b. Dalam keadaan genting Pimpinan Umum didjalankan oleh Komandan Tentara.
   c. Djika Komandan Tentara harus meninggalkan tempat, maka Pimpinan dilakukan oleh Kepala Inspektorat Biro Perdjuangan.

Pasal 4.

1. Pimpinan Markas Pertahanan Kalurahan-Kalurahan terdiri dari pada :
   a. Kepala Daerah
   b. Pemimpin Barisan
   c. Kepala Djawatan Keamanan
   d. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Kalurahan
   e. Wakil Pemuda
2. a. Dalam keadaan biasa Kepala Daerah memegang Pimpinan Umum.
   b. Dalam keadaan genting Pimpinan Umum didjalankan oleh Pemimpin Barisan.

Pasal 5.

1. Pimpinan Markas Pertahanan Kemantren-Kemantren terdiri dari pada :
   a. Kepala Daerah Kemantren
   b. Pemimpin Barisan
   c. Ketua Gabungan Rukun Kampung Kemantren
   d. Ketua Gabungan Djawatan-djawatan Keamanan R. K.
   e. Wakil Pemuda
2. a. Dalam keadaan biasa Kepala Daerah Kemantren memegang Pimpinan Umum.
   b. Dalam keadaan genting Pimpinan Umum didjalankan oleh Pemimpin Barisan.

BAB III.

Tentang Kordinator di Kapanewon.

Pasal 6.

1. Di-tiap-tiap Kapanewon tidak diadakan Markas Pertahanan, hanja diadakan Kordinator untuk mengkordinasi Markas-Markas Pertahanan di Kalurahan-kalurahan dalam daerahnja.
2. Kordinator itu terdiri dari pada :
   a. Kepala Daerah Kapanewon
   b. Kepala Inspektorat Biro Perdjuangan
   c. Kepala Polisi Negara
   d. Kepala Djawatan Keamanan
   e. Wakil Pemuda.

BAB IV.

Tentang Pembentukan Markas Pertahanan beajanja.

Pasal 7.

1. Pembentukan Markas-Markas Pertahanan diseluruh Daerah Jogjakarta (termasuk Haminte Jogjakarta, enclave-enclave daerah-daerah Solo di Kota Gede Imogiri dan Ngawen), diselenggarakan oleh Djawatan Pradja Daerah Jogjakarta.
2. Markas Pertahanan itu untuk sementara waktu dibeajai oleh Daerah-Daerah Otonom jang bersangkutan menurut beleid Kepala Djawatan Pradja Daerah Jogjakarta.

BAB V.

Tentang Pimpinan terhadap Markas-Markas Pertahanan.

Pasal 8.

1. Markas-Markas Pertahanan seluruh Daerah Jogjakarta itu berada dibawah Pimpinan Dewan Pertahanan Daerah Jogjakarta.
2. Dalam keadaan genting pimpinan itu dipegang oleh Territoriaal Komandan Tentara Daerah Jogjakarta.

Pasal 9.

1. Markas Pertahanan Kota memimpin Pertahanan disegenap Kemantren-Kemantren, Kalurahan-Kalurahan dalam daerah kekuasaannja.

Pasal 10.

1. Markas-Markas Pertahanan Kabupaten memimpin Markas-Markas Pertahanan Kalurahan-Kalurahan dalam daerahnja masing-masing.
2. Dalam keadaan genting pimpinan itu dipegang oleh Komandan Tentara di tiap-tiap Kabupaten jang bersangkutan.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku untuk seluruh Daerah Jogjakarta, termasuk Haminte Jogjakarta, enclave-enclave Solo di Kota Gede, Imogiri dan Ngawen.

Pasal 12

1. Peraturan ini disebut Peraturan tentang Pembentukan Markas-Markas Pertahanan diseluruh Daerah Jogjakarta.
2. Peraturan ini mulai berlaku sedjak diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta, 24 - 6 - 1947.
Dewan Pertahanan Daerah Jogjakarta
Ketua,
tt. PAKUALAM.

Diumumkan Jogjakarta 27 - 6 - 1947.
Dewan Pertahanan Daerah Jogjakarta
Sekretaris,
Poerwokusumo.

Djam malam di Jogjakarta

Berhubung dengan dimulainja agresi Belanda, maka Markas Pertahanan Kota Jogjakarta mengumumkan, bahwa dikota Jogjakarta mulai tanggal 22 - 7 - 1947 diadakan djam malam mulai djam 22.00 sampai djam 5 pagi.

Selandjutnja oleh Dewan Pertahanan Daerah Jogjakarta diandjurkan supaja penduduk menjalakan lampu-lampunja setjara penerangan terbatas. Toko-toko rumah-rumah makan dan warung supaja buka terus mendjual barang dagangannja seperti biasa dan tak menaikkan harga.

Pemerintah Daerah bersiap.

Sedjak tanggal 22 Djuli guna mendjaga segala sesuatu, Pemerintah Daerah mengadakan pendjagaan siang dan malam setjara giliran, jaitu diambilkan dari pegawai-pegawai tiap-tiap Djawatan seorang, dan pendjagaan dipusatkan di Djawatan Pradja.

Daerah Jogja dipertahankan mati-matian.

Dalam sidang Kabinet pada tanggal 1 Agustus 1947, antara lain diputuskan untuk mempertahankan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan mati-matian.

Berhubung dengan itu, maka daerah Jogjakarta didjadikan Daerah Militer Istimewa dibawah pimpinan Letnan Djenderal Urip Sumohardjo dengan pangkat Gubernur Militer Jogjakarta.

Kepadanja diperbantukan :

1. Sri Sultan Hamengku Buwono IX
2. Djend. Major Suwardi
3. Bung Tomo
4. Letn. Kol. Pramudji
5. Letn. Kol. Suharto
6. Letn. Kol. Selo Ali
7. Letn. Kol. Sumadi
8. Komodor Muda Wirjosaputro
9. Djend. Major Katamhadi
10. Seorang wakil dari golongan Islam

Masih dalam keadaan perang
Pidato Sri Sultan Hamengku Buwono IX

SETELAH lebih kurang 2 minggu Belanda mengadakan perang kolonial terhadap kita, maka Dewan Keamanan U.N.O. mengeluarkan perintah, baik kepada Belanda maupun kepada kita, untuk menghentikan permusuhan, demikian Sri Sultan mulai pidatonja jang diutjapkan pada tanggal 19 Agustus 1947 dimuka tjorong radio.

Perlu ditegaskan disini, bahwa perintah menghentikan permusuhan itu tidak berarti, bahwa kita sekarang didalam keadaan damai.

Walaupun ada perintah menghentikan permusuhan kita toch tetap didalam keadaan perang.

Oleh karena itu kita harus siap sedia.

Penjelenggaraan pertahanan rakjat totaal harus tetap kita langsungkan dan rentjana-rentjana atau perintah-perintah jang telah disampaikan atau jang akan disampaikan kepada Saudara-Saudara sekalian harus dikerdjakan sebaik-baiknja. Didalam hal ini kita djangan bimbang, djangan ragu-ragu. Kita harus insjaf, bahwa keadaan masih keadaan perang.

Pelanggaran-pelanggaran dari pihak Belanda djuga memaksa kita untuk menjempurnakan pertahanan kita dengan alat-alat dan apa sadja jang ada pada kita, supaja kita telah siap djika musuh menjerang kita.

Sekali lagi kami tegaskan disini, bahwa keadaan masih keadaan perang dan semua perintah harus dikerdjakan : djangan lengah, djangan ragu-ragu tentang hal ini. Andai kata ada orang jang bilang, bahwa kita sekarang telah didalam keadaan damai, tangkaplah orang itu.

Lain dari pada apa jang telah kami terangkan diatas tadi, maka menurut laporan-laporan jang kami terima, musuh telah mempergunakan alat pengatjauannja didaerah Jogjakarta. Salah satu alat pengatjauan ialah menjiarkan kabar-kabar jang tidak benar dengan maksud mengeruhkan suasana dan membingungkan rakjat. Oleh karena itu kepada rakjat umumnja kami minta supaja tetap tenang djanganlah pertjaja kepada kabar-kabar, djika kabar itu tidak dari jang berwadjib. Djika ada kabar apa sadja, mintalah keterangan kepada badan resmi jang berdekatan. Tentang segala matjam tindakan jang diambil oleh Dewan Pertahanan Daerah, siapapun djuga dapat minta pendjelasan dari badan tsb. Kepada pemimpin-pemimpin rakjat kami serukan, bantulah pemerintah

didalam usahanja menenteramkan hati rakjat dan turut memimpin pertahanan rakjat totaal ini. Djanganlah bingung sendiri, sebab djika pemimpin-pemimpin sudah mulai gelisah, nistjaja rakjat akan turut gelisah.

Lain dari pada menjiarkan kabar-kabar tidak benar, musuh akan berusaha untuk mengatjaukan perekonomian kita. Maka dari itu kami serukan kepada bakul-bakul dan pedagang-pedagang baik jang ketjil maupun jang besar, baik dari bangsa Indonesia maupun dari bangsa lain, bukalah tokomu, bukalah warungmu dan djuallah barang-barang perdaganganmu seperti biasa, djangan sekali menaikkan harga dan menimbun. Disamping itu Dewan Pertahanan Daerah dibantu oleh beberapa badan-badan berusaha se-kuat-kuatnja untuk memperkokoh perekonomian kita dan rakjat telah mengetjap buah usaha ini, walaupun sedikit demi sedikit.

Marilah kita bersatu membulatkan tekad dan menebalkan semangat kita untuk melandjutkan perdjuangan kita.

Marilah kita tetap menjelenggarakan pertahanan rakjat se-baik-baiknja, agar supaja musuh sama sekali tidak dapat menginfiltreer dengan tjara bagaimanapun djuga didalam pertahanan kita.

Marilah kita bekerdja se-kuat-kuatnja dengan sedikit bitjara tetapi dengan bukti-bukti jang njata.

Kita datang menempuh suatu djalan jang amat berat, jang akan meminta korban besar sekali, baik jang berupa djiwa, maupun jang berupa harta benda, akan tetapi kita harus berdjalan terus dengan ketabahan hati dan dengan iman jang teguh.

Pertjajalah Tuhan beserta kita.

Satu kekuatan melawan Pendjadjah.

Rakjat harus dapat menangkis provokasi dan infiltrasi musuh

PADA tanggal 21 Agustus Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengutjapkan pidato lagi sebagai berikut:

Dengan mengindjak tahun kemerdekaan ketiga ini, maka kita harus tidak boleh melupakan kenjataan, bahwa setiap saat Belanda mungkin akan mengadakan serangan-serangan lagi terhadap kita. Nampaknja Belanda masih berkeras kepala untuk melandjutkan niatnja mendjadjah kita kembali.

Mereka mentjari - tjari alasan untuk menghalalkan perbuatan mereka, se-olah-olah mereka hanja mengadakan „politionele maatregel" dengan serangan-serangannja jang memakai sendjata modern dan kedji itu.

Belanda belum mau diinsjafkan, bahwa tentaranja tidak mungkin dapat mendatangkan keamanan di Indonesia. Belanda mengira masih dapat mengabui mata dunia dalam abad 20 ini, dalam djaman mana dunia telah mendjadi terlalu ketjil, sehingga keadaan disuatu bagian dunia tidak mungkin tertutup lagi bagi dunia luar. Dunia tjukup tahu, bahwa hanja dengan penarikan tentara Belanda dari seluruh tumpah darah Indonesia, daerah ini dapat diamankan. Selama masih ada tentara Belanda di Indonesia, ini berarti, bahwa Belanda masih tetap mempunjai niat untuk mendjadjah kita kembali. Sebab tentara Belanda bagi kita tidak mungkin mendjadi symbool „pendjaga keamanan", melainkan se-mata-mata mendjadi „lambang pendjadjahan" sebagai symbool „penindas kemerdekaan".

Terang, bahwa kita setiap saat masih tetap harus siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Maka untuk dapat mewudjudkan kekuatan jang bulat, kita harus dapat menangkis segala matjam provokasi dan infiltrasi jang dilakukan musuh terhadap kita.

Perbuatan tuduh menuduh jang dapat menimbulkan perpetjahan antara kita sama kita harus kita hindarkan se-djauh-djauhnja.

Dalam menghadapi api pendjadjahan Belanda segenap tenaga perdjuangan anti pendjadjahan dari golongan, lapisan, aliran, isme apapun djuga, harus dihimpun mendjadi satu kekuatan untuk melawan pendjadjahan itu.

Bagi kita hanja ada dua golongan, ialah **patriot Indonesia** dan **kaki tangan musuh.** Siapa jang mendjadi kaki tangan musuh dari golongan, lapisan, aliran atau isme apa pun djuga, adalah musuh kemerdekaan kita, oleh karena membantu pendjadjah Belanda. Kalau ada alasan-alasan jang kuat untuk mentjurigai suatu orang, zonder memandang bulu, tangkaplah orang itu dan serahkanlah pada jang berwadjib. Dan adakanlah kontrole jang se-kuat-kuatnja terhadap penduduk di kampung dan desa.

Diseluruh daerah Jogjakarta Markas-markas Pertahanan sudah mulai bekerdja dengan giat. Didalam kota segenap Markas-markas, baru-baru ini telah mengadakan latihan serang-serangan. Latihan jang pertama kali ini masih dapat disempurnakan. Dan kami jakin, bahwa dengan mengulangi latihan-latihan itu dengan mengadakan kordinasi jang sempurna antara markas-markas satu sama lainnja, pasti akan dapat tertjapai hasil jang lebih memuaskan, sehingga djika datang saatnja latihan itu mendjadi kenjataan, rakjat seluruhnja akan mengadakan perlawanan serentak terhadap Belanda.

Disini kami andjurkan kepada semua badan-badan jang duduk dalam pimpinan tiap-tiap Markas Pertahanan supaja ber-sama-sama menjempurnakan organisasi Markas masing-masing, sehingga dapat ditjapai bekerdja bersama dan samen-spel jang se-baik-baiknja antara satu sama lainnja. Sebab pimpinan Markas Pertahananlah jang bertanggung djawab sepenuhnja tentang pertahanan dan perlawanan rakjat totaal didaerahnja masing-masing. Pertanggungan djawab ini tidak hanja djadi tugas kewadjiban Pamong Pradja, melainkan dari segenap anggauta wakil-wakil Badan-badan dalam pimpinan Markas itu ber-sama-sama. Sebab P.P. hanja merupakan bagian dari pimpinan Markas itu. Segenap badan-badan jang penting di-tiap-tiap daerah mendjadi anggauta pimpinan Markas itu seperti P. P., wakil-wakil Tentara, Polisi, D. P. R., Badan-badan Perdjuangan, Pemuda dan Djawatan Keamanan, semua inilah jang ber-sama-sama harus dapat menggerakkan rakjat, sehingga di-tiap-tiap daerah dapat mewudjudkan pertahanan dan perlawanan rakjat totaal untuk melawan agresi Belanda.

Sebagai penutup Kami serukan, bahwa kemerdekaan hanja dapat ditjapai dengan perdjuangan. Tuhan beserta dan melindungi kita.

A m i e n ! !

Harian Pagi „M e t a r a m"

DALAM penindjauannja Pemerintah Daerah ke Kabupaten-Kabupaten/Kapanewon - Kapanewon selama bulan Agustus 1947, jaitu berhubung dengan adanja agressi militer Belanda, maka ternjata bahwa rakjat dipelosok-pelosok terasa akan kebutuhan penerangan-penerangan dan berita-berita penting jang dapat tjepat diterima. Walaupun di Jogja telah ada beberapa harian ialah Kedaulatan Rakjat, Nasional, Buruh, Al Djihat, Patriot, tapi harian-harian tersebut tak dapat diterima pada hari terbitnja oleh Kalurahan-Kalurahan jang sedikit djauh letaknja dari kota Jogjakarta.

Berhubung dengan kebutuhan tersebut diatas, maka oleh Pemerintah Daerah selandjutnja diambil langkah-langkah untuk mentjukupi keinginan tersebut, jalah dengan djalan menerbitkan harian pagi jang pada hari terbitnja sudah dapat diterima oleh Kalurahan-Kalurahan sekalipun jang djauh letaknja dari kota Jogjakarta. Berhubung dengan maksud ini, maka „Madjallah Daerah" jang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan madjallah „Ekonomi" jang diterbitkan oleh Djawatan Kemakmuran Daerah jang telah disatukan, perlu dirubah sifatnja mendjadi suatu harian pagi.

Demikanlah atas kerdja sama antara Pemerintah Daerah, Dewan Pertahanan Daerah serta Kantor Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta sedjak tanggal 26 Agustus 1947 dapat diterbitkan suatu harian pagi berbahasa Daerah dengan nama : „Metaram"; adapun tenaga-tenaga jang menjelenggarakan sehari-harinja ialah : Pimpinan Redaksi Sdr. Atmodarminto. Staf Redaksi : Sdr. Padmopuspito dan Tukidjo Handojo (Sekr. Redaksi) kesemuanja dari Penerangan, dan para wartawan di Jogjakarta, jang turut aktief sehari-harinja ialah : Sdr. Darmosugito, Sutomo,Wardojo (Pak Besut) dan Pitojo Ds. Tata Usahanja di pegang oleh Sekretariaat Dewan Daerah, sedangkan distribusinja diselenggarakan oleh Djawatan Pradja. Harian Metaram dibagi-bagikan kepada Kalurahan-Kalurahan dan rakjat umum setjara gratis.

Adapun tjara pembagiannja ialah : setiap pagi supaja Kabupaten-Kabupaten mengirimkan koeriernja ke Djawatan Pradja untuk mengambil harian tersebut. Sedatangnja di Kabupaten-Kabupaten, telah siap menunggu koerier dari Kapanewon - Kapanewon jang kemudian membagikan ke Kalurahan - Kalurahan. Dengan tjara demikian, maka harian Metaram pada hari terbitnja telah dapat dibatja oleh Kalurahan-Kalurahan sekalipun jang djauh letaknja dari Kota.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX Gubernur Militer Jogjakarta

Berhubung dengan kewadjiban militer, maka Letn. Djend. Urip Sumohardjo mulai tanggal 4 September 1947 dibebaskan dari pekerdjaan Gubernur Militer Jogjakarta dan sebagai gantinja oleh Panglima Tertinggi Republik Indonesia dan Perdana Menteri ditetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan di bantu oleh Djend. Maj. Susalit, Panglima Div. III sebagai wakilnja.

Rakjat bersatu sanggup memetjahkan segala rintangan
Pidato S.P. Sultan Hamengku Buwono IX

TEPAT dua tahun jang lalu, pada tanggal 6 malam 7 bulan Oktober 1945 rakjat Jogjakarta dipelopori oleh pemudanja berhasil merebut kekuasaan tentara Djepang jang berada diasrama Kotabaru, demikian Sri Sultan sebagai Ketua Dewan Pertahanan Daerah mengutjapkan pidatonja dalam memperingati 2 tahun pertempuran merebut kekuasaan tentara Djepang di Kota Baru.

Dengan memperingati 2 tahun pertempuran di Kota Baru itu, maka disini pada tempatnja kami atas nama rakjat seluruh daerah Jogjakarta mengutjapkan „Selamat" kepada pahlawan-pahlawan kusuma Bangsa, jang djatuh dalam pertempuran.

Dua tahun jang lalu rakjat Indonesia walaupun belum tersusun dalam suatu tentara atau barisan dan belum bersendjata, toch berhasil menghadapi tentara Djepang dan merebut kekuasaannja, oleh karena rakjat Indonesia pada waktu itu memang mewudjudkan persatuan jang bulat. Rakjat bersatu tekad dan bersatu dalam perbuatannja oleh karena terikat oleh satu keinginan jalah ingin tetap merdeka. Karena menghadapi satu lawan jalah „musuh kemerdekaannja", maka rakjat bulat melaksanakan kehendaknja jalah tetap merdeka, pun bulat melaksanakan perdjuangannja melawan siapapun djuga jang merintangi dan menghalang-halangi kemerdekaannja.

Dan dalam riwajat dinegara manapun djuga jalah terbukti, bahwa perdjuangan rakjat jang demikian itu sanggup mematahkan segala rintangan-rintangan jang dihadapinja, dan kekuatan apapun djuga tidak dapat membendung perdjuangan rakjat itu. Disinilah letak kekuatan perdjuangan kita.

Maka hendaknja hal itu tetap mendjadi tjermin bagi kita jang tetap hendak melandjutkan perdjuangan jang dimulai oleh pahlawan-pahlawan kita jang telah gugur itu.

Persatuan jang telah dapat kita miliki kembali sedjak petjahnja perang kolonial ini, harus kita pelihara sebaik-baiknja dan harus kita djaga djangan sampai kena dipropokasi oleh musuh dan kaki tangannja.

Banjaknja kurban jang harus kita berikan dalam pertempuran di Kota Baru itu dan jang hingga sekarang masih dapat disaksikan oleh siapapun djuga di- „Makam Pahlawan", adalah bukti jang senjata-njatanja, bahwa Kemerdekaan jang telah kita miliki dua tahun ini sekali-kali tidak kita dapat sebagai hadiah dari Djepang. Melainkan harus kita beli dengan mengurbankan banjak pemuda-pemuda kusuma bangsa kita.

Dengan kenjataan ini, tuduhan pihak musuh, bahwa kemerdekaan kita hanja merupakan suatu hadiah belaka dengan sendirinja dan dengan sekali gus dapat dibatalkan. Sedjak dulu senantiasa ichlas dan sanggup berkurban untuk kemerdekaannja. Pemberontakan-pemberontakan Pangeran Diponegoro, Imam Bondjol, pahlawan-pahlawan jang telah gugur dimedan-medan pertempuran Semarang, Surabaja, Gombong dan sebagainja menundjukkan hal itu dengan setegas-tegasnja.

Bagaimana djuga musuh itu hendak mengabui mata dunia, kita sanggup dan dapat membuktikan sebaliknja dengan kenjataan-kenjataan jang sewaktu-waktu dapat disaksikan sendiri oleh utusan-utusan dari dunia internasional itu.

Perintah S.P. Paku Alam

Sementara itu atas nama Dewan Pertahanan Daerah, S. P. Paku Alam telah memberi perintah kepada rakjat Jogjakarta supaja djangan mengungsi dan di andjurkan supaja tetap tinggal ditempatnja masing-masing. Diandjurkan djuga supaja rakjat membantu perdjuangan para pemuda untuk mempertahankan Republik Indonesia.

Djika nanti pihak musuh melakukan serangan didaerah Jogjakarta, kata perintah itu lebih djauh, rakjat harus tetap mempertahankan diri. Jang berkenaan dengan pembumi hangusan pendirian-pendirian penting diserahkan kepada pihak jang berwadjib.

* *
*

9. PINDJAMAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

DALAM pertengahan tahun 1948, perekonomian rakjat didaerah Istimewa Jogjakarta seperti djuga di daerah - daerah lain amat berat dirasakan oleh rakjat pada umumnja, terutama karena amat tingginja harga bahan makan. Salah suatu sebab daripada keadaan itu ialah karena bahan makan didaerah-daerah jang kelebihan tidak dapat diangkut ke daerah-daerah jang kekurangan.

Untuk menjehatkan dan memperkuat perekonomian rakjat itu, perlu Pemerintah membeli bahan makan dan djuga lain-lain kebutuhan rakjat, di daerah-daerah jang kelebihan untuk diangkut dan dibagi didaerah-daerah jang kekurangan. Dalam usaha ini ada suatu rintangan besar jang dialami oleh Pemerintah Daerah jaitu kekurangan uang. Oleh karena usaha tersebut tidak dapat dibeajai dengan keuangan Daerah jang ada pada waktu itu, maka Pemerintah Daerah menganggap perlu berusaha mentjari pindjaman dari rakjat, jang pada umumnja mempunjai uang lebih banjak daripada dizaman biasa. Tentang hal ini Badan Pekerdja Dewan Daerah pernah menjetudjui suatu rentjana Maklumat tentang „Pengerahan Uang di Daerah Istimewa Jogjakarta", rentjana mana pada tanggal 10 Agustus 1947 disetudjui djuga oleh S. P. Kepala Daerah, akan tetapi jang terlaksananja ditunda menunggu saat jang lebih memerlukan. Pada pertengahan tahun 1948 inilah oleh Dewan Pemerintah Daerah dianggap sudah tiba. Maka dari itu bersandarkan atas rentjana Maklumat tadi Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta mengadakan Peraturan Dewan Pemerintah tentang pindjaman Daerah Istimewa Jogjakarta tahun 1948 jang pada prinsipnja dan dalam garis-garis besarnja sama dengan rentjana pengerahan uang tadi dan jang hanja berbeda dalam beberapa soal detail sadja karena perlu dilaraskan dengan keadaan dan kebutuhan pada waktu itu. Adapun pindjaman tersebut diatur dalam Peraturan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta No. 4/1948, dan besarnja pindjaman adalah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh djuta rupiah). Dan untuk keperluan itu Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta mengeluarkan surat tanda pindjaman sebanjak :

6000 lembar a Rp. 1.000	Rp. 6.000.000
1600 lembar a Rp. 2.500	Rp. 4.000.000

Untuk keperluan ini, maka para Bupati Pamong Pradja Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Adikarto ditundjuk mendjadi Pemegang Persediaan surat Tanda Pindjaman buat Kabupatennja masing-masing.

Pindjaman tersebut akan dibajar kembali dengan perantaraan para Pemegang Persediaan surat Tanda Pindjaman selambat-lambatnja tanggal 1 Desember 1949 dengan ditambah bunga 1% tiap-tiap bulan.

Demikianlah usaha Pemerintah Daerah dalam menjehatkan dan memperkuat perekonomian rakjat.

Ketjuali hal-hal jang menjebabkan dikeluarkan peraturan seperti tersebut diatas, maka pada waktu itu di Daerah Istimewa Jogjakarta dirasa djuga kesukaran-kesukaran karena kurangnja beredar uang ketjil.

Maka berhubung dengan hal jang demikian ini, sedjak tanggal 10 Nopember 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta mengeluarkan dan mengedarkan „Surat Tanda penerimaan uang" jang dapat digunakan untuk pembajaran diseluruh Daerah Istimewa Jogjakarta, ketjuali untuk pembajaran kepada Kas Negara, kas Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta dan kas-kas lain jang dilarang menerimanja oleh Menteri Keuangan.

Surat-surat tanda penerimaan tersebut berdjumlah nominal Rp. 2.000.000 (dua djuta rupiah) dan terdiri atas:

100.000 lembar dari djenis Rp. 10.—	— Rp. 1.000.000
100.000 lembar dari djenis Rp. 5,—	— Rp. 500.000
200.000 lembar dari djenis Rp. 2,50	— Rp. 500.000

Dan untuk keperluan ini, kantor-kantor Haminte Kota Jogjakarta, Kapanewon-Kapanewon dan Kemantren Pamong Pradja di Daerah Istimewa Jogjakarta di tundjuk mendjadi „Kantor Penukaran" jang berkewadjiban menukar uang sah dengan surat tanda penerimaan uang dan sebaliknja surat tanda penerimaan uang dengan uang sah.

Tentang pengeluaran dan peredaran surat tanda penerimaan uang seperti tersebut diatas diatur dengan Peraturan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta No. 5/1948, jang diumumkan pada tanggal 9 Nopember 1948.

Pembentukan Haminte Kota Jogjakarta

KEADAAN pergolakan politik di Surakarta, pada pertengahan tahun 1947 sangat mempengaruhi keadaan politik di Jogjakarta, karena selain letak daerahnja berdekatan djuga mempunjai bentuk pemerintahan dan sedjarah jang hampir bersamaan.

Sesudah proklamasi kemerdekaan, dan sesudah pertempuran-pertempuran antara rakjat melawan Djepang berhenti, kemudian timbullah perasaan kurang senang dari rakjat terhadap diri kedua Sri Paduka di Surakarta, jalah Sri Susuhunan dan Sri Paduka Mangkunegoro. Kedua bangsawan itu dianggap sama sekali tidak menundjukkan activiteitnja maupun sekedar bantuannja terhadap gerakan rakjat selama revolusi bergelora. Seribu satu matjam sentimen dan dendam keluar meluap terhadap sistim feodalisme jang dulu-dulu, dan bangkit kembali amarahnja, berkobar dikalangan rakjat, sehingga menimbulkan bermatjam-matjam akibat.

Dari puntjak pergolakan politik jang begitu hebat, achirnja kekuasaan Kedua Sri Paduka di Surakarta tersebut tidak diakui lagi oleh rakjat.

Melihat kedjadian-kedjadian seperti tersebut diatas ini Pemerintah Pusat lalu mengambil langkah-langkah jang tertentu. Untuk mendjaga vacumnja pemerintah di Surakarta tadi, maka Pemerintah Pusat pada bulan Djanuari tahun 1946 mengangkat R. P. Suroso mendjadi Komisaris Tinggi, sebagai wakil dari Pemerintah Pusat, dan jang selandjutnja berturut-turut diganti oleh Residen Mr. R. P. Iskaq Tjokroadisurjo (disrobot), Residen Sutardjo Kartohadikusumo (didaulat), kemudian Residen Sudiro sampai dipindahnja ke Madiun dan diganti oleh Residen Salamun.

Meskipun begitu keadaannja djuga masih belum seperti jang diharapkan. Maka untuk mengatasi suasana jang begitu keruh, oleh Pemerintah Pusat jang djuga telah disetudjui oleh B.P. KNIP (jang sesudah Sidang KNIP pleno di Malang dalam bulan Pebruari 1947 berkedudukan di Kota Jogjakarta), pada tanggal 5 Djuni 1947 diputuskan untuk mengeluarkan Undang-Undang No. 16 tahun 1947.

Undang-Undang tersebut dikeluarkan dengan maksud untuk membentuk lebih njata Kota Surakarta sebagai Kota Haminte jang lepas dari kekuasaan

Kasunanan dan Mangkunegaran, akan tetapi langsung berhubungan dan bertanggung djawab terhadap Pemerintah Pusat (Kem. Dalam Negeri).

Adapun kekuasaan Residen tidak mengenai dalam Kota, akan tetapi mengenai luar Kota jang meliputi daerah Kasunanan dan Mangkunegaran. Kekuasaan Sri Susuhunan dan Sri Paduka Mangkunegoro semendjak itu baik didalam maupun diluar Kota sudah tidak ada lagi.

Sekarang djelaslah, bahwa Kota Surakarta telah terbentuk dengan status Haminte dengan adanja Undang-Undang No. 16 tahun 1947, dan pada waktu itu Sjamsuridjal diangkat mendjadi Wali Kota di Surakarta.

Langkah-langkah dari Pemerintah Pusat seperti tersebut diatas tidak terbatas hanja didaerah Surakarta sadja, akan tetapi mengingat kedjadian-kedjadian itu, dan untuk mendjaga djangan sampai kerusuhan-kerusuhan politik tersebut timbul djuga di Jogjakarta, maka dengan mendahului kemungkinan-kemungkinan pada tanggal 7 Djuni 1947 (dua hari sesudah mengeluarkan Undang-Undang tentang pembentukan Haminte Kota Surakarta) Pemerintah Pusat djuga mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1947, dengan maksud jang sama jaitu membentuk Kota Jogjakarta jang mempunjai status Haminte, sebagai pemerintahan otonom jang terpisah dengan pemerintah Daerah Jogjakarta, dan berhubungan serta bertanggung djawab langsung pada Pemerintah Pusat seperti halnja dengan Haminte Kota Surakarta tersebut diatas.

Dengan terbentuknja Haminte Kota Jogjakarta dalam bulan Djuni 1947 itu, maka jang diangkat sebagai Wali Kota jalah Moch. Enoch, dan Haminte Kota ini tidak lagi mempunjai anggauta Dewan Perwakilan Rakjat 25 orang akan tetapi 50 orang. Selandjutnja Kepala Kota Jogjakarta tidak lagi Bupati, akan tetapi Wali Kota.

K. R. T. Hardjodiningrat sebagai Bupati Kota jang dulunja bertanggung djawab atas Pemerintah Kota, kemudian atas permintaannja sendiri berhenti dengan hormat.

Pada permulaan bulan Djuli 1947 Kabinet Amir Sjarifuddin terbentuk, dan dalam Kabinet ini Moch Enoch diangkat mendjadi Menteri Pekerdjaan Umum sehingga pekerdjaan Wali Kota dirangkap.

Saudara Mardisisworo sebagai Ketua Dewan Kota kemudian ditundjuk oleh Wali Kota sebagai wakilnja.

Pada tanggal 21 Djuli, terdjadilah clash Belanda jang pertama. Pada sore harinja Kabinet mengadakan sidang jang antara lain mengambil keputusan bahwa Presiden supaja pindah ke Gunung Wilis dengan disertai sementara Menteri. Diantara Menteri-menteri jang akan mengikuti Presiden itu termasuk djuga Moch. Enoch. Dengan demikian maka djabatan Wali Kota akan mendjadi lowong. Kemudian didalam soal ini Kabinet menjerahkan pentjalonan djabatan Wali Kota tersebut kepada Sri Sultan jang selandjutnja Sri Sultan mengadjukan kandidat Wali Kota ialah Mr. Sudarisman Purwokusumo jang pada waktu itu mendjabat Sekretaris Dewan Pertahanan Daerah merangkap Kepala Djawatan Penerangan Daerah Jogjakarta.

Sidang Kabinet pada hari itu berlangsung sampai djam 4 pagi kemudian pentjalonan itu disetudjui oleh Kabinet dan selandjutnja pada tanggal 22 Djuli 1947, Mr. Sudarisman Purwokusumo diangkat mendjadi Wali Kota Haminte Kota Jogjakarta dengan mendapat tiga besluit, pertama besluit dari Presiden, kedua dari Menteri Dalam Negeri dan jang ketiga dari Sri Sultan sendiri.

Akibat Undang - Undang No. 17 Tahun 1947

Sekarang Kota Jogjakarta telah mengalami dua kali perubahan susunan pemerintahan semendjak proklamasi kemerdekaan. Pertama pemerintahan Kota dibentuk dengan Maklumat Kepala Daerah No. 18 tahun 1946 jang disetudjui

oleh Dewan Perwakilan Daerah, jang sifatnja pemerintahan collegiaal dan tetap berhubungan dengan pemerintah Daerah, akan tetapi jang kedua jalah pemerintah Kota Jogjakarta dibentuk dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1947, jang susunan pemerintahannja lalu berubah, Kepala pemerintahan Kota tidak lagi Bupati akan tetapi Wali Kota dengan dibantu oleh dua orang Bupati, dengan 50 orang anggauta DPR termasuk 6 orang anggauta Dewan Pemerintah dan lepas dari Pemerintah Daerah, tetapi berhubungan langsung dengan Pemerintan Pusat.

Dengan begini maka pembentukan Haminte Kota Jogjakarta itu. tepat disamakan dengan pembentukan Haminte Kota Surakarta.

Akan tetapi akibatnja bahwa Pemerintahan Haminte Kota Jogjakarta jang dibentuk dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1947 itu tidak dapat berdjalan sebagaimana mestinja. Banjak soal-soal jang kandas ditengah djalan.

Adapun sebab-sebabnja bila ditjari disini dapat dinjatakan bahwa kedjadian-kedjadian di Surakarta dengan segala seluk beluknja adalah mempunjai background politik jang berlainan dengan apa jang terdjadi di Jogjakarta. Di Surakarta terdjadi insiden-insiden politik dengan sebab-sebab jang telah lama mengeram didalam rongga masjarakat, sehingga dengan setjara spontaan rakjat ingin merombak struktur pemerintahan lama diganti dengan sistim baru.

Di Jogjakarta tidak begitu halnja. Pertama insiden politik seperti apa jang terdjadi di Surakarta itu tidak terdjadi di Jogjakarta. Ketjuali itu figuur Sri Sultan adalah masih acceptable dimata rakjat, sehingga kedudukan Haminte Kota Jogjakarta jang terpisah dengan Pemerintah Daerah menghadapi banjak rintangan.

Tidak kelantjaran djalannja pemerintahan ini dapat dilihat dari putusan-putusan jang diambil oleh sidang-sidang DPR Kota Jogjakarta.

Semendjak terbentuknja DPR Haminte Kota Jogjakarta pada tanggal 4 September 1947, dan dalam bulan itu djuga DPR Haminte Kota Jogjakarta mengadakan sidangnja jang pertama kali, dan mengambil keputusan untuk mengadjukan mosi kepada Pemerintah Pusat, agar Undang-Undang No. 17 tahun 1947, (Undang-Undang pembentukan Haminte Kota Jogjakarta) ditindjau kembali. Selandjutnja dalam sidangnja jang ke 3 jang telah dilangsungkan pada bulan Maret 1948 telah mengambil satu resolusi jang isinja selain mendesak lagi supaja Undang-Undang No. 17 tahun 1947 ditindjau kembali, djuga mendesak supaja diadakan hubungan antara Haminte Kota dengan Pemerintah Daerah Jogjakarta.

Pada tanggal 10 Djuli 1948, oleh Pemerintah Pusat dikeluarkan Undang-Undang Pokok No. 22 tahun 1948, jaitu Undang-Undang Pokok untuk membentuk Pemerintahan di Daerah-daerah diseluruh Indonesia, jang menetapkan bahwa daerah Indonesia dibagi mendjadi tiga tingkatan, jaitu: 1. Pemerintahan Provinsi, 2. Pemerintahan Kabupaten/Kota Besar dan 3. Pemerintahan Desa/Kota Ketjil, jang semuanja bersifat otonom.

Dengan keluarnja Undang-Undang pokok jang telah ditunggu-tunggu oleh kalangan di Jogjakarta ini, diharapkan bahwa pembentukan pemerintahan terutama untuk daerah Jogjakarta akan lebih sempurna lagi.

Didalam pasal 1 — 2 dari Undang-Undang Pokok No. 22 tahun 1948 itu dinjatakan bahwa daerah jang sebelum Republik telah mempunjai pemerintahan sendiri (Zelfbestuur) jang bersifat istimewa, dapat ditetapkan sebagai daerah Istimewa jang setingkat dengan Provinsi.Dengan pasal-pasal ini maka dengan sendirinja Daerah Jogjakarta jang sesuai dengan jang dimaksudkan dalam Undang-Undang tadi, mendjadi daerah istimewa jang setingkat dengan Provinsi.

Sekarang tinggal menunggu Undang-Undang pembentukannja.

Atas desakan serta perdjuangan D.P.R. Kotapradja Jogjakarta, pada permulaan bulan Desember 1948 telah disetudjui adanja Undang-Undang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, oleh Kementerian Dalam Negeri dan BP

KNIP. Tinggal satu kekurangannja, ialah belum dimintakan tanda tangan Presiden, kemudian datanglah rintangan jang sangat besar ialah clash Belanda ke II pada achir tahun 1948.

Sesudah tentara Belanda ditarik mundur dari Kota Jogjakarta, maka pada tanggal 29 Djuni segera dibentuk Pemerintahan Militer Kota, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1949.

Berhubung dengan adanja Pemerintahan Militer, maka tidak mungkin DPR Kota mengadakan sidang. Akan tetapi berkat kerdja sama jang baik antara Pemerintah Militer dengan Dewan Pemerintah Kota, maka Dewan Pemerintah Kota dapat turut aktief dalam pemerintahan Militer, turut berunding serta turut memutuskan dalam sidang-sidang pemerintahan Militer Kota.

Sesudah kekuasaan pemerintahan Militer pada bulan Agustus 1950 dihapuskan dan kembali kepada pemerintahan Sipil, untuk melaksanakan Undang-Undang Pokok No. 22 tahun 1948 tadi, maka rentjana Undang-Undang tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta jang telah disetudjui oleh BP. KNIP dan Kementerian Dalam Negeri sebelum clash Belanda ke II dulu, sekarang dapat disahkan dan berwudjud Undang-Undang No. 3 jo. 19 tahun 1950 jang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 1950.

Mulai saat itulah Daerah Istimewa Jogjakarta mendjadi resmi.

Bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1950 tersebut diatas, Pemerintah Pusat jang djuga dengan persetudjuan BP KNIP mengeluarkan Undang-Undang No. 16 tahun 1950, jang bermaksud untuk mengganti susunan pemerintahan Kota Jogjakarta jang telah dibentuk dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1947, dan menetapkan Kota Jogjakarta mendjadi Kota Besar.

Sidang DPR Kota Jogjakarta pada bulan Desember 1950 menetapkan mengganti nama Haminte Kota Jogjakarta mendjadi Kotapradja Jogjakarta.

Dengan adanja Undang-Undang No. 16 tahun 1950 ini dengan sendirinja dua pemerintahan Kasultanan dan Paku Alaman jang ada didalam Kota tidak ada lagi, meskipun prakteknja sudah berdjalan semendjak Kota Jogjakarta dirubah mempunjai status Haminte dulu.

Dengan dasar Undang-Undang No. 16 tahun 1950 itu kemudian status Kotapradja Jogjakarta kembali lagi kepada Daerah Istimewa Jogjakarta, tidak lagi berhubungan dan bertanggung djawab langsung dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian apa jang mendjadi tuntutan DPR Haminte Kota Jogjakarta pada tahun 1947 dan tahun 1948 setjara indirect telah terlaksana. Kota pradja Jogjakarta mendjadi daerah otonom dibawah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Selain itu djumlah anggauta DPR menurut Undang-Undang No. 16 tahun 1950 itu tidak lagi 50 orang, akan tetapi hanja 20 orang dan tidak lagi hanja diadjukan oleh partai-partai dan organisasi-organisasi seperti jang sudah, melainkan harus dipilih oleh rakjat.

Oleh karena pemilihan umum anggauta DPR Kotapradja Jogjakarta sampai ini waktu belum dapat dilaksanakan, maka anggauta DPR Kotapradja sekarang ini masih tetap seperti jang sudah jaitu dari wakil-wakil partai dan organisasi jang belum dipilih oleh rakjat, dan berdjumlah 50 orang.

Penjerahan otonomi

Sesuai dengan hak otonomi dari Kotapradja Jogjakarta, jang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok No. 22 tahun 1948 dan Undang-Undang No. 16 tahun 1950, maka penjerahan otonomi dari Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta kepada Pemerintah Kotapradja berdasarkan surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 16 Djanuari 1951, No. 1/D. Pem. D/U. Penjerahan, telah berlangsung demi sedikit dengan ketentuan telah dapat selesai dilaksanakan paling kasep tanggal 31 Desember 1951.

Seperti diketahui bahwa sampai saat ini penjerahan tersebut masih dalam tingkat penjelesaian.

10. RIWAJAT R. R. I. JOGJAKARTA

PADA tanggal 17 Agustus 1945 djam 12 siang terdengar kabar dari kantor berita Djepang „Domei" tjabang Jogjakarta bahwa di Djakarta pada djam 10.00 telah disiarkan melalui radio „Proklamasi Kemerdekaan Indonesia".

Pada waktu itu Djepang di Hosokyoku Jogja dan dikantor Domei masih berkuasa sehingga berita-berita tersebut tak dapat dengan langsung diterima oleh masjarakat Indonesia di Jogjakarta. Kemudian dengan sekonjong-konjong Djepang memerintahkan atas komando Tentara Serikat menutup seluruh pemantjar Hosokyoku dan nantinja dengan alat-alat lainnja diserahkan kepada Tentara Serikat.

Disamping kesibukan itu segenap pegawai Indonesia lalu mengadakan pertemuan untuk memikirkan siasat guna menghadapi kemungkinan selandjutnja. Rapat memutuskan segera menjingkirkan alat-alat radio jang penting ketempat lain agar alat-alat tersebut tidak dapat dibawa lari oleh Djepang. Tidak lama kemudian oleh K.N.I. Jogjakarta jang pada waktu itu diketuai oleh Sdr. Moch. Saleh diperintahkan supaja seluruh Djawatan dan Kantor-kantor direbut dari kekuasaan Djepang. Dalam usaha ini pegawai Indonesia Hosokyoku Jogja turut serta bertindak akan tetapi belum djuga dapat menghidupkan kembali pemantjar-pemantjarnja, karena masih didjaga oleh Djepang jang bersendjata lengkap dan berkedudukan di Kido Butai Kotabaru. Setelah Djawatan-djawatan dan Kantor-kantor djatuh ditangan bangsa Indonesia, berkibarlah Sang Dwi Warna dengan megahnja diatas gedung-gedung tersebut, ketjuali di Kido Butai Kotabaru dan Kempeitai di Setjodiningratan jang masih menggunakan bendera hinomaru. Melihat keadaan jang gandjil ini rakjat merasa tidak puas. Karenanja segera mendesak kepada K.N.I. supaja selekas mungkin dikedua tempat tersebut dapat dikibarkan bendera merah putih serta pula seluruh sendjatanja diserahkan kepada rakjat.

Diplomasi antara Ketua K.N.I. dengan komandan Kido Butai gagal, jang mengakibatkan pertempuran hebat antara rakjat jang bersendjatakan bambu-runtjing dengan anggauta Kido Butai jang serba lengkap sendjatanja, ringan dan berat. Dipihak rakjat ikut serta bertempur anggauta-anggauta dari Polisi Istimewa jang dapat mempertjepat berachirnja pertempuran jang berdjalan lebih kurang 5 djam.

Dengan berachirnja perebutan sendjata itu maka seluruh Jogjakarta djatuh ditangan bangsa Indonesia dan segenap tentara Djepang ditawan dipendjara Wirogunan. Tak lama kemudian K.N.I. memberi perintah agar supaja Radio Jogja segera membuka siarannja. Meskipun Radio Jogja tidak mempunjai fonds jang tjukup untuk membeajai siaran-siaran, tetapi atas kegiatan dan beleid para pegawai jang masih suka mentjurahkan tenaganja pada siaran radio, penjiaran-penjiaran dapat dilaksanakan sebagaimana biasa berdasarkan atas gotong-rojong.

Pada tanggal 11 September 1945 seluruh anggauta pimpinan dari kantor-kantor penjiaran radio diseluruh Djawa berkumpul di Djakarta untuk mengada-

kan rapat. Sidang tersebut memutuskan mendirikan sebuah organisasi dengan nama **RADIO REPUBLIK INDONESIA** untuk seluruh Negara Republik Indonesia. Disamping organisasi tersebut dibentuk pula sebuah Panitya Penghubung jang diketuai oleh almarhum Dokter Abdurachman Saleh jang menundjuk sebuah delegasi untuk merundingkan berbagai-bagai soal dengan Pemerintah Republik Indonesia jang pada waktu itu berkantor digedung „Raad van Indie" di Djakarta. Semendjak itu Radio Republik Indonesia berdjuang sebagai penjiaran radio nasional, mempunjai siaran keluar dan kedalam negeri jang diurus dan dikemudikan oleh bangsa sendiri.

Oleh karena siaran-siaran dari Jogjakarta semendjak itu semakin populer dan terkenal, terutama siaran-siaran penjebar dan penebal semangat dari Bung Tomo dan Bung Tardjo, maka pihak Serikat mentjari-tjari alasan menuduh Radio Jogja sebagai penghasut dan sarang extremis.

Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 1945 pagi-pagi djam 08.00 berlajang-lajanglah dua pesawat pengebom Serikat diatas kota Jogjakarta dengan menjebar surat selebaran berisikan tuduhan dan antjaman pemboman gedung radio. Pegawai-pegawai jang bertugas pada pagi itu tak menghiraukan akan surat-surat selebaran itu dan bekerdja terus seperti ta' ada bahaja jang mengantjam djiwanja. Kemudian setelah seperempat djam terbanglah kembali pesawat-pesawat diatas gedung radio dan mengebomnja sekehendak sendiri berulang-ulang. Untunglah para pegawai jang berada didalam segera menjelamatkan diri dengan bersembunji didalam lubang perlindungan. Pada saat itu setasiun Radio Solopun mendjadi sasaran pula dari bomber-bomber tersebut.

Dalam pemboman tadi hanja gedung-gedungnja jang hantjur, sedang pemantjar-pemantjar semua selamat. Peristiwa ini tidak melemahkan semangat para pegawai bahkan tambah berkobar kehendaknja dengan menjiapkan alat-alat jang masih dapat digunakan untuk melandjutkan siaran-siaran seperti sebelum ada pengeboman. Pada malam harinja Radio Jogja memperdengarkan suaranja diangkasa raja. Mendengar akan hal ini, tentara Pendudukan Serikat merasa amat djengkel dan pada hari Selasa pagi tanggal 27 Oktober 1945 mereka mengebom lagi untuk kedua kalinja gedung Radio Jogjakarta. Dengan adanja pengeboman kedua jang agak dahsjat dan lama itu maka Radio Jogja banjak kehilangan alat-alat studio dan alat-alat radio penerima serta menderita kerusakan alat-alat kantor, sehingga memakan beberapa waktu guna menjiapkan siaran selandjutnja. Kawan-kawan pegawai ta' berputus asa dan bekerdja giat untuk menjelamatkan dan menjingkirkan alat-alat jang masih utuh kelain tempat, ada jang dititipkan di Puro Paku Aiaman, diasrama C.P.M. Gondolaju, di-rumah-rumah pemantjar Terban Taman dan Patangpuluhan serta disimpan dirumah Ngadinegaran, dimana terdapat djuga pemantjar besar dengan kekuatan 3½ Kw. untuk siaran luar negeri.

Setelah suasana reda kembali, siaran-siaran segera dibuka dengan mempergunakan studio darurat dirumah pemantjar Terban Taman 35. Disamping mengadakan siaran-siaran itu, beberapa pegawai tetap mentjari rumah jang sekiranja dapat dipakai sebagai Studio dan Kantor. Atas dasar kerdja sama jang erat, maka ta' lama kemudian Radio Jogja dipindjami oleh pihak ketentaraan kompleks rumah-rumah no. 6, 8 dan 10 didjalan Setjodiningratan guna kepentingan siaran dan kantor radio. Segera dibangun ditempat jang baru itu sebuah studio untuk siaran dan kamar omroep beserta kamar operator (kontrol) dirumah no. 8. Sedang rumah no. 6 untuk kantor dan no. 10 digunakan sebagai mess bagi para pegawai jang membutuhkan tempat tinggal dan kemudian guna kepentingan siaran luar negeri.

Untuk menjempurnakan organisasi radio jang terbentuk pada tanggal 11 September 1945, maka pada tgl. 12 dan 13 Djanuari 1946, R.R.I. mengadakan kongres jang pertama dikota Solo. Kongres tsb. memutuskan antara lain:

1. R.R.I. masuk dalam Kementerian Penerangan sebagai Djawatan otonom.

2. menentukan garis-garis besar dalam pekerdjaan sehari-hari.

Kongres ke II dilangsungkan di Purwokerto pada tgl. 26 dan 27 Djanuari 1946 dengan mengambil putusan:

1. Membentuk suatu Pusat Pimpinan jang diberi hak untuk memimpin seluruh tjabang-tjabang R.R.I. dalam segala urusan penjiaran radio, baik mengenai organisasi tata-usaha, tehnik, maupun siaran.
2. memilih diantara anggauta-anggauta pimpinan dan pegawai-pegawai R.R.I. seluruh Djawa untuk duduk dalam pimpinan pusat tsb.

Selandjutnja kongres ke III dan jang terachir diadakan di Hotel Selecta Malang pada tgl. 22 dan 23 Maret 1946, dengan menetapkan rentjana siaran untuk luar dan dalam negeri.

Mula-mula pusat penjiaran berada di Solo, akan tetapi karena pusat Pemerintahan berkedudukan di Jogjakarta, maka untuk memudahkan perhubungan dengan Pemerintah, siaran-siaran baik dalam maupun untuk luar negeri dipusatkan di Jogjakarta. Dengan sendirinja R.R.I. Jogjakarta mempunjai status istimewa karena melajani kepentingan Pemerintah jang harus diikuti oleh daerah-daerah. Walaupun pada waktu itu kekuatan pemantjar-pemantjar Jogjakarta hanja ± ¼ Kw. untuk siaran dalam negeri dan ± 3½ Kw. untuk siaran luar negeri, tetapi siaran-siarannja dapat diterima dengan terang oleh pendengar-pendengar dibeberapa tempat di Indonesia dan diluar negeri. Untuk lebih melantjarkan pekerdjaan sehari-hari, maka Pusat R.R.I. jang pada masa itu berkedudukan di Solo, memutuskan membuka Pusat Tjabang di Jogjakarta jang terdiri atas bagian-bagian Siaran dan Tehnik; bagian Siaran berkantor di Setjodiningratan dan bagian Tehnik di Reksobajan 8.

Pada awal bulan Oktober 1948 diadakan pula reorganisasi mempersatukan R.R.I. Jogjakarta dengan Pusat Tjabang Jogjakarta siaran dalam dan luar negeri. Belum nampak dalam reorganisasi tsb. hasil-hasil jang njata, datanglah kemudian penjerbuan Belanda atas Jogjakarta pada tgl. 19 Desember 1948.

Oleh karena rentjana kita memang belum selesai, dan penjerbuan datangnja sekonjong-konjong, maka dengan mudah Belanda dapat menguasai R.R.I. Jogjakarta. Meskipun demikian, usaha untuk mempertahankan Djawatan masih selalu dipelihara oleh para pegawai. Beberapa pegawai segera meninggalkan kota dan menudju ke Plajen daerah Wonosari (daerah Jogja tenggara) guna melaksanakan rentjana semula dimana telah tersedia sebuah pemantjar lengkap dengan alat-alat radio dan agregrat sebagai pengganti dan pengoper pekerdjaan penjiaran dari kota, bilamana pemantjarnja tidak berdaja lagi karena serangan musuh. Tadi telah dikatakan bahwa karena persiapan-persiapan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan pertempuran belum selesai, maka tidak mengherankan kalau rentjana pekerdjaan R.R.I. jang berada didaerah Wonosari itu djuga tidak dapat mengatasi serangan-serangan Belanda jang ta' tersangka-sangka dalam sekedjap mata telah merata disegenap pelosok dalam daerah Jogjakarta. Alat-alat di Plajen hanja pemantjarlah jang dapat diselamatkan, tetapi karena tak ada apparatnja untuk menghidupkannja, maka zender itu tidak dapat dipergunakan. Motor-agregrat telah diangkut dan semua alat-alat radio penerima dirusak oleh Belanda-Belanda jang berkeliaran didaerah Gunung Kidul. Adapun para pegawai jang berada diluar hampir semuanja menggabungkan diri dengan instansi-instansi militer, polisi dan pamong pradja untuk melandjutkan tugasnja dengan perdjuangan gerilja hingga sampai pada saat pengembalian Republik Jogjakarta.

Pada tanggal 30 Mei 1949 lebih kurang sebulan sebelum Jogja kembali, atas perintah Kementerian Penerangan dibentuk sebuah panitya radio jang bertugas nanti menerima penjerahan kembali kantor radio dari tangan Belanda. Adapun sebagai ketua telah ditundjuk oleh Sekdjen: Sdr. Sulaiman dari Kempen, sedang anggauta-anggautanja terdiri atas pimpinan R. R. I. Jogjakarta, ja'ni

saudara-saudara : Sumarmadi, Sunarjo, Budiman, Hadisukanto, Saleh Hadiwirjono, Sumartono dan Agus Marah Sutan. Oleh karena pada waktu itu sdr. Sumarmadi masih mempunjai tugas diluar, maka keanggautaannja diwakilkan kepada sdr. Sastrohardjo. Setelah panitya tersebut mengoper pekerdjaan dari Belanda, segera para anggauta meneliti keadaan di Studio Setjodiningratan dan rumah pemantjar di Terban Taman jang terbukti tak pernah dipelihara oleh Belanda.

Alat-alat pemantjar dan radio serta pengeras jang diterima dari tentara Belanda hanja tjukup untuk mengadakan siaran seperlunja, sedang alat-alat pengganti kalau ada kerusakan ta' disediakan. Sesudah lebih kurang sebulan, maka panitya dilebur mendjadi pimpinan R. R. I. Jogjakarta dengan sebagai Kepala Umum sementara sdr. Sunarjo jang kemudian pada tanggal 31 Agustus 1949 dipindahkan ke Pusat Tehnik dan digantikan sdr. Sumarmadi.

Pada terbentuknja Negara R. I. S. tanggal 27 Desember 1949 maka R.R.I. Jogjakarta mengalami sedikit perubahan dalam organisasinja dan administratif masuk Kempen R. I. di Jogjakarta sedang Pimpinan Pusat mendjelma mendjadi Radio R. I. S. jang berkedudukan di Djakarta. Setelah Negara Kesatuan pada tanggal 15 Agustus 1950 tertjipta, maka organisasi Djawatan Radio utuh kembali dan tetap memakai nama Radio Republik Indonesia berpusat di Djakarta.

Oleh karena formasi pegawai di Pusat masih belum sempurna keadaannja, dan karenanja masih banjak membutuhkan tenaga jang tjakap serta berpengalaman, maka dari segenap tjabang R.R.I. diseluruh Nusantara dipindahkan beberapa puluh pegawainja ke Pusat Djawatan Radio di Djakarta, sedang Kepala Studio Jogjakarta sdr. Sumarmadi diangkat oleh Kepala Djawatan sebagai Kepala Bagian Siaran menggantikan sdr. Surjodipuro jang telah ditundjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai Sekretaris Kedutaan di Vatican (Roma). Sebagai pengganti sdr. Sumarmadi, maka diangkat oleh Pusat Djawatan sdr. Hadisukanto selaku Kepala Studio R.R.I. Jogjakarta dan timbang terima dilakukan pada tanggal 20 Desember 1950.

Setelah pusat Djawatan R.R.I. berkedudukan di Djakarta maka pusat siaran baik dalam, maupun luar negeri dipusatkan di Ibu Kota Republik Indonesia pula, sedang Studio Jogjakarta mempunjai status regional jang meliputi daerah-daerah Jogjakarta, Kedu dan Banjumas.

Mengingat akan kepentingan Negara dalam penjiaran radio, Djawatan Radio R.I. sebagai suatu djawatan dari Kementerian Penerangan jang mempunjai tugas mengadakan usaha-usaha untuk mengembangkan kebudajaan dan memadjukan radio nasional serta pula mendekatkan masjarakat dengan dunia radio, baik di dalam maupun diluar negeri, maka dalam menghadapi masa pembangunan ini Djawatan berangsur-angsur memperlengkapi segenap tjabang-tjabang radio di seluruh Nusantara dengan alat-alat jang serba modern dengan mengingat akan status stasiun-stasiun itu, misalnja berstatus Nasional, Kepulauan, Regional, Lokal atau stasiun relay.

Berkenaan dengan tindakan tersebut, maka R.R.I. Jogjakarta pada tanggal 1 Djanuari 1951 menerima sebuah pemantjar buatan P.T.T. Bandung dengan kekuatan 3 Kw. jang pada tanggal 30 Djanuari 1951 telah berada diudara. Mulai pada waktu itu Studio Jogja mempunjai 3 pemantjar dengan gelombang dan kekuatan masing-masing 42,25 m — 1 Kw. ; 59,29 m — 3 Kw. dan 122,4 m — 0.300 Kw. Disamping itu alat-alat tehnik seperti magnetofoon tape-recorder, draaitafel lengkap dengan safier, microfoon matjam-matjam model, versterker besar ketjil tidak ketinggalan serta masih banjak lainnja. Pendek kata Pemerintah benar-benar memperhatikan akan kepentingan masjarakat dalam hal ke „radio" an.

Kendaraan-kendaraan bermotor jang pada mulanja hanja sepeda motor dan sebuah pick-up pindjaman dari Kementerian Keuangan sadja, bertambah pula dengan 1 pick-up, 1 station-wagon dan 1 mobil sedan kelas B. jang kesemuanja itu untuk melantjarkan djalannja pekerdjaan sehari-hari.

Keadaan siaran tambah hari tambah madju dan baik, disebabkan dari adanja perlengkapan alat-alat kesenian seperti : gamelan, wajang kulit, piano dan lain sebagainja jang kesemuanja itu merupakan inti dari siaran hiburan dengan ditambah pula para pemain-pemain jang mahir, seperti anggauta-anggauta kerawitan Studio, Orkes Studio, Ketoprak, Dagelan dan lain-lainnja jang bekerdja dengan kontrak pada Djawatan.

R. R. I. Jogjakarta dalam tempo jang ta' lama lagi mengharapkan sebuah Gedung Studio lengkap dengan komplex ruangan untuk kantor dan siaran pertundjukan (schouwburg) jang lajak. Sedang rumah pemantjar baru untuk pemantjar-pemantjar telah berdiri di Demangan jang dihias dengan beberapa tiang antenne. Dalam rentjana lima tahun jang sudah berdjalan sedjak tahun 1950, maka R. R. I. Jogjakarta akan memiliki sebuah pemantjar kepulauan jang berkekuatan 25 Kw. dengan diberi nama pemantjar kepulauan Djawa jang akan di pergunakan djuga oleh stasiun-stasiun regional diseluruh Djawa, sedang di Medan untuk Sumatera dan di Makasar untuk Indonesia Timur.

Itulah beberapa usaha dari Djawatan Radio sebagai tjontoh jang njata dari langkah-langkahnja guna memadjukan dan menjempurnakan segala lapangan pekerdjaan R.R.I. diseluruh Nusantara dalam melakukan tugasnja sebagai alat siaran dari bangsa Indonesia jang berdaulat dan merdeka.

Radio zonder gelombang

Guna menambah lantjarnja pekabaran-pekabaran penting dan penerangan kepada rakjat di pelosok-pelosok, ketjuali diadakan surat kabar harian Metaram seperti tersebut dimuka, maka atas inisiatief dan usaha bersama dari Sri Paduka Gubernur Militer dan R. R. I., Dewan Pertahanan Daerah serta Djawatan Penerangan, mulai bulan 10 - 1947 diadakan pula berita dengan perantaraan telpon dari pusat Daerah Jogjakarta ke luar kota.

Pemberitaan dilakukan saban hari satu djam lamanja (dari djam 17.00—18.00) dan selama itu semua telpon distrik-distrik jang dari kota menudju kepesawat telpon Manbor Kabupaten dan Kapanewon melulu buat keperluan menjampaikan berita telpon. Mendjadi pesawat-pesawat telpon tersebut, pada waktu jang ditentukan itu tidak boleh dipergunakan buat keperluan lain.

Sebelum pertjobaan pemberitaan dimulai, maka pesawat-pesawat telpon tersebut dipersiapkan dulu oleh R. R. I. dan P. T. T. dan sesudah persiapan tehnik selesai maka apabila berita mulai berdjalan, kalau telpon itu diangkat, berita bisa didengar oleh tiga atau empat orang. Berita tersebut, di Kabupaten diperbanjak kemudian disiarkan.

Adapun tempat dimana berita tersebut dipantjarkan jalah bertempat distudio R. R. I. Perdjuangan Djawa Barat di Kepatihan dan tenaga-tenaga penjiar dan penjusun berita adalah dari Djawatan Penerangan Daerah Jogjakarta.

* *
*

Studio R.R.I. Jogjakarta adalah medan perdjuangan jang tidak kalah pentingnja dari pada medan juda.

Siaran murid-murid didepan tjorong R.R.I. Jogjakarta.

11. DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA WAKTU PENDUDUKAN BELANDA

TANGGAL 19 DESEMBER 1948 SAMPAI TANGGAL 30 DJUNI 1949

BULAN Nopember 1948 sudah mulai menundjukkan suasana tidak baik antara perundingan Indonesia — Belanda.

Kaliurang sebagai tempat perundingan jang bersedjarah ini, memperingatkan kita buat bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, jang akan meminta korban sebesar-besarnja kepada kita. Kita mendapat udjian perdjuangan kemerdekaan jang akibatnja akan mengagumkan dunia.

Akan adanja latihan pertahanan besar-besaran telah diumumkan oleh Panglima Besar Letn. Djend. Sudirman tanggal 18 Desember 1948 djam 20.00.

Pada waktu itu Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Negara kordinator Keamanan, sedang gering. Beberapa minggu sudahlah beliau tidak masuk Kantor, tetapi tetap didalam Kraton.

Hari Minggu Legi tanggal 19 Desember 1948 dibuka dengan pendengaran suara kapal terbang diatas Kota Jogjakarta pada kira-kira djam 5.30 pagi.

Seluruh Jogjakarta mendengar dan melihat diudara dan mengira bahwa latihan pertahanan besar-besaran jang ditentukan pada hari itu djuga, dimulai. Hati berdebar tidak ada sama sekali, oleh karena tidak ada dugaan, bahwa musuhlah jang datang. Orang-orang jang bertugas dan tanggung djawab dalam latihan-latihan pertahanan pergi ketempatnja masing-masing. Dari Pemerintahan Daerah Istimewa Jogjakarta beberapa petugas djuga lalu siap berada di Kepatihan, Kantor Pusatnja Pemerintah Daerah. Orang mulai berfikir apakah Belanda berani menjerang dimana K. T. N. sebagai Wakil Dunia Internasional sedang berada di Kaliurang ?

Kapal terbang mulai mendjatuhkan tentara pajung palsu. Kepatihan mendapat lapuran tilpon dan koerier. Bom-bom didjatuhkan dari kapal terbang. Rakjat belum mengira bahwa itulah perbuatan musuh. Masih dikirakan latihan. Lama-lama kapal terbang makin bertambah (hingga ± 75) dan tembakan mitraljur dari atas dan pendaratan tentara pajung dimulai disekitar lapangan terbang Maguwo.

Antara djam 10.00 R.R.I. mengumumkan pengumuman Angkatan Perang, bahwa tentara Belanda sedjak tanggal 18 Desember malam mulai menjerang daerah jang dikuasai Republik. Kurang lebih djam 10.30 Benteng Vredeburg diserang bom dari udara.

Tentara kita mulai insjaf atas kedatangan musuh dan mempertahankan sambil mendjalankan siasatnja.

Pokok pertahanan diundurkan keluar Kota dan consolidatie pertahanan diatur sebaik-baiknja.

Rakjat bingung, keadaan katjau, paniek terdjadi. Umumnja sama mengungsikan diri keluar Kota. Kota Jogjakarta sepi.

Mulai pagi (tanggal 19 Desember 1948) Mr. Purwokusumo Wali Kota Jogjakarta dengan sementara orang stafnja dan Staf Djawatan Pradja Daerah (jang sudah beberapa hari berhubung keadaan suasana membuka Kantor siang dan malam (24 djam) bersama-sama sementara pegawai dari lain Djawatan Pemerintah Daerah) sudah ada di Kantor Kepatihan. Begitu djuga Sri Paduka Paku-Alam.

± Djam 9 pagi S.P. Sultan Hamengku Buwono IX, dengan naik auto Buick hidjau (Cabriolet) No. HB, 2 sekonjong-konjong datang di Kepatihan bersama-sama Sutan Sjahrir. Turun dari auto masih kelihatan gering, berdjalan pelahan-lahan dan agak pintjang.

Sebentar di Kepatihan pertama kali memberikan tahu, bahwa Belanda menjerang Jogjakarta, Memerintahkan supaja Honggowongso menjiapkan Gunung-Kidul buat memindahkan Pemerintahan Pusat, dan Sri Sultan akan ke Kaliurang menemui Bung Hatta jang masih berada disana.

Meskipun suara mitraljur dari udara terus-menerus berdjalan, Sri Sultan berangkat ke Kaliurang. Kebetulan berdjumpa dengan Bung Hatta didjalan Pakem (dalam Kota) lalu bersama-sama ke Istana Presiden buat berapat. Dalam rapat Kabinet antara lain diputuskan memberi perintah kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Dr. Soedarsono, Palar dan Mr. A. A. Maramis, jang isinja sebagai berikut:

MANDAAT PRESIDEN KEPADA
MR. SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA

Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 - 12 - 1948, djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja ke Ibu Kota Jogjakarta.

Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintah Republik Darurat di Sumatera.

Presiden :
SOEKARNO.

Jogjakarta, 19 Desember 1948.
Wakil Presiden :
MOH. HATTA.

Pro. Dr. Sudarsono — Palar — Mr. Maramis New Delhi,

Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 - 12 - 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu Kota Jogjakarta.

Djika ichtiar Sjafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera tidak berhasil kepada saudara-saudara dikuasakan untuk membentuk exile Government Republik Indonesia di India,

Harap dalam hal ini berhubungan dengan Sjafrudin di Sumatera.

Djika hubungan tidak mungkin harap diambil tindakan-tindakan seperlunja.

Jogjakarta, 19 Desember 1948.
Wakil Presiden :
MOH. HATTA.

Menteri Luar Negeri
AGUS SALIM.

Pendaratan tentara Belanda

Djam 11 siang, tentara Belanda sudah mendarat di Maguwo dan mulai bergerak ke Kota ± djam 1.30 siang masuk Kota.

Instruksi Pamong Pradja jang pertama disampaikan dengan tilpon (pagi itu tilpon masih sambung) jalah:

a. S. P. Sultan + Sri Paduka Paku - Alam + Staf Djawatan Pradja Daerah tetap di Kota Jogjakarta.

b. Apabila tempat diduduki tentara Belanda, Pamong Pradja supaja berusaha djangan sampai djatuh ditangan Belanda.

c. Pamong Pradja termasuk Pamong Desa harus tetap berada didalam wilajahnja masing-masing memimpin dan melindungi rakjatnja (djangan meninggalkan rakjatnja) dengan tjara bagaimanapun djuga menetapi instruksi b. diatas.

d. Perhubungan dengan pimpinan Daerah S. P. Sultan dan S. P. Paku Alam harus sebanjak-banjaknja diadakan dan diatur setjara illegaal.

e. Djawatan Pradja memberikan codenja dan Kabupaten begitu djuga.

f. Koerier (penghubung) tidak boleh membawa surat. Semua lapuran dan instruksi disampaikan oleh koerier dari Djawatan Pradja dan Kabupaten mondeling dengan menjampaikan code buat legimitasi.

g. Djawatan Pradja ialah penghubung Kepala Daerah dan Kabupaten dan Kapanewon dan tentara, polisi badan-badan perdjuangan dan Kementerian-Kementerian semua itu dengan djalan illegaal.

h. Kantor Kepatihan/Pemerintah Daerah semua tutup, sampai ada perintah dari Sri Sultan.

Djawatan Pradja sebagai Pusat Pemerintahan Daerah illegaal dalam Kota dan penghubung dari pada Kepala Daerah. Sri Sultan dan S.P. Paku-Alam berkantor dan berapat illegaal berpindah-pindah tempat dalam Kota. Hampir tiap-tiap rapat H.A. Hamid Ketua D.P.R. Daerah Jogjakarta pun selalu mengikutinja.

Pada hari itu Belanda masuk Kota dan menduduki Kota Jogjakarta. Hari pertama Belanda masuk Kota, sebagian rakjat Kota jang berdjumlah beribu-ribu didalam kebingungannja menudju ke Kraton mohon perlindungan. Bangsal Keben dan Magangan diperbolehkan oleh Sri Sultan buat pengungsian —; rakjat berterima kasih dan merasa tenteram disitu.

Malam harinja seorang Kapitein Nix dari tentara pendudukan Belanda akan masuk Kraton, minta bertemu dengan Sri Sultan tidak diperkenankan. Begitu djuga di Pura Paku-Alaman. Oleh karena itu hanja menjampaikan pesan kepada pegawai pendjaga regol, bahwa tentara Belanda menduduki Kota Jogjakarta, dan mulai itu malam diadakan djam malam mulai djam 18.00 sampai djam 06.00. Begitu djuga diberikan tahu bahwa lingkungan Kraton, Pura Paku Alaman dan Kepatihan didjadikan daerah jang immuun jalah daerah jang tidak akan diadakan tembak-menembak dan tentara Belanda dilarang masuk.

Tentara Belanda masuk Kota, Pemerintah Pendudukan akan diadakan bersama-sama Pemerintah Daerah.

Residen Belanda Stock dan pembantunja dari Djakarta jalah Purbosudibjo mentjoba memikat pegawai-pegawai daerah. Pertama menemui K. R. T. Honggowongso dirumah dan di Kepatihan diminta bantuannja. Akan tetapi didjawab bahwa sebagai pegawai dari Sri Sultan akan suka membantu siapapun djuga, apabila jang memerintahkan jalah Sri Sultan.

Mentjoba menemui pegawai Pemerintah Daerah lainnja sama sadja djawaban jang diterimanja. Tentang hal ini seterusnja K. R. T. Honggowongso-lah jang senantiasa mendjadi sasaran.

Minta membuka sekolahan mendatangi dan minta bantuan, akan tetapi dimana-mana terdengar djawab sama sadja, jalah menunggu perintah Sri Sultan. Semua permintaan pertolongan kepada Honggowongso senantiasa djuga didjawab dengan term satu jalah tunggu perintah Sri Sultan.

Belanda gelisah dan mentjoba mendatangkan pegawai dari Semarang dan sebagainja. Rukun Kampung pengurusnja ditjoba dengan rupa-rupa djalan buat membantunja, akan tetapi djawaban jalah sama sadja dengan djawaban dari semua pegawai.

Djalan dengan pembagian pakaian dan lain-lain ditjoba buat pengaruhi R.K. dan R.T. Pakaian d.s.b. diterima, tetapi pada umumnja bantuan lainnja jang menguntungkan Belanda nihil. Hal ini diperkuat oleh gerakan fluistercampagne jang dibikin oleh Pemerintah Daerah illegaal, bahwa siapa membantu Belanda akan dibunuh atau ditjulik oleh anak-anak kita sendiri. Dan kalau kita di tjari Belanda, bisa mengumpet diantara kita. Tetapi kalau memusuhi kita dimanamana tentu ketemu kita.

Menghadapi keadaan sematjam itu Belanda gelisah dan mentjoba menemui Sri Sultan dengan rupa-rupa djalan. Generaal Meyer dan Reçomba Angenent, Sultan Hamid, Husain Djajadiningrat d.s.h. mentjoba minta bertemu dengan Sri Sultan, akan tetapi tiada seorangpun jang diterima.

Semua apa jang ditjobakan kepada Sri Sultan djuga ditjobakan kepada Sri Paduka Paku-Alam. Akan tetapi senantiasa didjawabnja oleh Sri Paduka Paku-Alam, bahwa beliau sebagai Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta tidak dapat dan tidak akan berbuat apa-apa sebelum ada keputusan atau perintah dari Kepala Daerah, jalah Sri Sultan.

Hubungan illegaal Kota dan luar Kota baik sekali. Tentara, Polisi, Pamong-Pradja, badan-badan perdjuangan dan pemimpin rakjat dengan rakjatnja belum pernah hubungannja begitu baik seperti waktu Belanda menduduki Jogjakarta.

Oleh karena itu Jogjakarta tetap kuat dan semua seolah-olah hanja tunduk kepada pimpinan satu jalah Sri Sultan dan wakilnja Sri Paduka Paku-Alam.

Belanda mentjoba memetjah belah kita sama kita dengan seribu satu djalan. Didalam hal ini ada sementara dari fihak kita Republikeinen jang oleh karena ketakutan dan kekurangannja penghidupan d.l.l. jang dengan siasat atau tida dengan siasat ikut bekerdja kepada Belanda.

Pada tanggal 1 Djanuari 1949 Sri Sultan dan Sri Paduka Paku-Alam memerintahkan kepada Honggowongso supaja menjampaikan kepada pemerintah pendudukan, bahwa kedua Sri Paduka sangat marah terhadap tentara pendudukan, oleh karena mereka memaksa dengan sendjata kepada para pegawai dari Perusahaan Waterleiding dsb. buat bekerdja dan membuka kembali perusahaan kepunjaan Pemerintah Daerah, semua itu tidak dengan pengetahuan dari Sri Paduka.

Oleh karena itu mulai tanggal 1 Djanuari 1949 kedua Sri Paduka meletakkan djabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jogjakarta, jang berarti bahwa selandjutnja semua kekatjauan dan tidak amannja rakjat adalah bukan tanggung djawab dari pada kedua Sri Paduka.

Adapun Kedua Sri Paduka hanjalah sanggup terus memimpin rakjatnja sebagai „pemimpin rakjat Mataram" apabila beliau diminta oleh rakjatnja.

Ini adalah suatu siasat dari Kedua beliau jang djitu dan menambah sukarnja Belanda dan mempertjepat perginja Belanda dari Jogjakarta.

Sesudah kehendak Kedua Sri Paduka oleh K.R.T. Honggowongso disampaikan kepada Residen Stock, maka dengan djalan fluistercampagne hal ini disampaikan kepada rakjat didalam dan diluar kota.

Akibat dari pada tindakan ini maka dengan K. R. T. Honggowongso dimana-mana orang berdjumpa, dibandjiri oleh permintaan dari pegawai Pemerintah Daerah dari segala Djawatan buat menjatakan dirinja meletakkan djabatannja sebagai tindakan mengikuti djedjak dari Sri Paduka. Disampingnja

itu maka mereka tersebut menjatakan bahwa Kedua Sri Paduka jalah Pemimpin Rakjat Mataram. Lain dari pada itu dengan djalan illegaal oleh R.K. didalam Kota diadakan resolusi rakjat jang minta Kedua Sri Paduka tetap mendjadi „Pemimpin Rakjat Mataram".

Beratus-ratus surat-surat resolusi jang ditanda-tangani oleh ratusan rakjat dari dalam dan diluar Kota disampaikan kepada Sri Sultan liwat Honggowongso dan/atau disisipkan di pintu gerbang Kraton.

Pernjataan ini didjawab oleh Sri Sultan liwat Djawatan Pradja setjara illegaal dengan instruksi-instruksi antara mana:

a. Belanda tentu akan pergi dari Jogjakarta. Hal ini dapat dipertjepat dengan ketabahan hati rakjat dan kesatuan jang kekal antara Rakjat, Polisi, Tentara, Pamong Pradja dan badan-badan perdjuangan dan lain-lainnja didalam perdjuangan mengusir pendjadjah.
b. Dimana diluar Kota ada tempat jang diduduki Belanda supaja tempat itu dengan tjara bagaimana sadja ditinggalkan oleh rakjat sehingga tempat itu dengan gampang diserbunja.
c. Apabila ditempat jang diduduki Belanda, ada penetapan Lurah, Ass Wedana d.l.l. oleh Belanda, supaja Pamong Pradja d.l.l. menghalang-halanginja. Kalau perlu harus ditjulik atau .... hal ini supaja didalam tempo jang pendek sekali diselesaikan.
d. Didalam Kota supaja diperintahkan agar supaja rakjat dan semua instansi perdjuangan menolak beredarnja uang federal dan ambil tindakan dimana perlu. Sebaiknja uang ORI harus dipakai sebagai suatu mata uang jang berlaku dan harus dihargai.
e. Kota djangan diblokkeer pemasukan makanan rakjat, supaja Kota kuat dalam perdjuangannja.
Hanja bahan makanan jang dibutuhkan sekali oleh Belanda supaja diblokkeer, seperti sajur-sajuran, telur dan sebagainja. Hal ini Pemerintah luar Kota supaja mengaturnja dengan baik.
f. Supaja diambil tindakan jang keras terhadap pengatjau perdjuangan, seperti penggedor dan sebagainja.
Apabila perlu supaja diambil tindakan jang terachir ialah tembak mati di tempat.
g. Pemerintah diluar Kota supaja dengan didudukinja Kota (Pusat Pemerintahan Daerah) sama berdiri otonom, artinja djangan menggantungkan diri kepada keuangan daerah dan sebagainja, sesudah dalam bulan Djanuari 1949 kepada semua pegawai Pemerintah Daerah didalam dan diluar Kota di berikan gadjih 4 bulan diambilkan dari restan uang di Kas Pemerintah Daerah (berdjalan illegaal).
h. Oleh karena S. P. Sultan + S. P. Paku-Alam meletakkan djabatannja sebagai Kepala Daerah, maka diluar kota jang belum diduduki Belanda oleh Pemerintah Militer dengan persetudjuan Sri Paduka, K.R.T. Prodjodiningrat Bupati Sleman ditundjuk sebagai wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta diluar kota.

Disamping itu gerilja terus bergerak. Hasil gerilja ini demikan besarnja hingga keberaniannjapun makin bertambah. Dari malam pindah ke sore, pagi dan achirnja siang haripun diadakan serangan. Jeep hantjur, truck terguling karena melanggar randjau darat bukan soal jang luar biasa.

Setelah dirasa bahwa gerilja sangat mendjadi, maka gerakan pembersihan dilakukan. Kampung demi kampung diadakan pembersihan, orang lelaki dikumpulkan, jang ditjurigai terus dibawa ke I.V.G. — M.I.D. — M.P. atau ke A.P. untuk diperiksa lebih landjut atau ditawan. Aksi ini tidak dapat memadamkan keberanian rakjat terbukti dengan terbunuhnja kolaborator Salamun, jang terkenal Wedana P.I.D. dalam zaman Hindia Belanda dulu.

Pada tanggal 21 Pebruari Prof. Husain Djajadiningrat Wakil H.V.K. selama Dr. Beel berada di Nederland, memberi surat kepada S.P. Sultan Hamengku Buwono IX dan S.P. Paku-Alam VIII, jang antara lain menjatakan, apakah Sri Sultan dan K. G. Paku-Alam djika diundang oleh Wakil Tinggi Mahkota nanti suka mengirimkan paling sedikitnja 3 orang utusan ke Djakarta sebagai wakilnja ?

Menurut kabar, undangan itu oleh Kedua beliau ditolaknja.

Rupanja karena penolakan itu, maka sehari kemudian jalah pada tanggal 22 Pebruari Kantor-Kantor Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta di Kepatihan jang telah didjadikan daerah immuun digrebeg.

Pembersihan Kepatihan ini dipimpin sendiri oleh Komandan I.V.G. dan Residen Stock. Barang-barang milik Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta diangkut keluar Kepatihan, sedang para pegawai kita jang sedang bertugas di Kepatihan, diangkat ke I.V.G. dan terus dimasukkan pendjara.

Dalam pembersihan Kepatihan itu telah terdjadi satu hal jang sangat melukai perasaan Bangsa Indonesia. Tidak hanja Sang Merah Putih dirobek-robek, tetapi Sang Merah Putih disarungkan kepada seekor andjing.

Didalam orang mendjalankan instruksi-instruksi dari S.P. Sultan, Belandapun tidak ketinggalan djuga membikin siasatnja dimana mungkin dengan para kaki-tangannja jang diselundupkan ditengah-tengah kita dan berkedok mendjalankan perintah dari Sri Sultan, tetapi pada hakekatnja mendjalankan siasat-siasat sebaliknja dari siasat Sri Sultan. Tentang hal siasat liwat persurat kabaran Belanda ada lebih giat dan lebih leluasa dan lebih berhasil dari pada siasat lainnja.

Oleh karena itu banjak sekali Belanda dapat mengabui mata dunia tentang hal Jogjakarta liwat persurat kabaran, sehingga para Republikein di Djakarta dan lain-lainnja kelihatan ada perasaan agak ragu-ragu terhadap perdjuangan di Jogjakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia jang ditinggalkan Pemerintahan oleh karena ditawan Belanda.

Keadaan ini mendorong kepada Sri Sultan pergi ke Djakarta bertemu dengan Republikeinen di Djakarta buat menerangkan perdjuangan sewadjarnja di Jogjakarta jang sangat bertentangan dengan kabar jang dibatja dari surat kabar Belanda atau disiarkan oleh Belanda dengan djalan fluister-campagne-nja jang sangat pinter mempraktikkannja.

Sri Sultan utusan menemui U.N.C.I. di Jogjakarta minta Kapal terbang buat ke Djakarta, akan tetapi dengan permintaan apabila mungkin hanja dengan kapal terbang kepunjaan U.N.C.I. dan hanja bersama-sama U.N.C.I. dan sama sekali tidak dengan minta tolong atau perhubungan dengan Belanda djuga tidak dengan dikawal Belanda.

Permintaan itu dikabulkan oleh U.N.C.I. Sri Sultan pergi ke Djakarta didjemput oleh U.N.C.I. dengan Jeep U.N.C.I. dikawal U.N.C.I. dan hingga kembali ke Kraton didjemput dan diantarkan oleh U.N.C.I.

Di Djakarta Sri Sultan bertemu dengan para pemimpin Republikeinen dan mendjelaskan keadaan di Jogjakarta. Oleh karena itu suasana di Djakarta djernih kembali dan kepertjajaan kepada perdjuangan Jogjakartta tetap tebal.

Sekembalinja Sri Sultan dari Djakarta, Belanda tambah giat didalam mendjalankan siasat mengurangi kepertjajaan rakjat dan dunia terhadap Sri Sultan dan perdjuangan Jogjakarta pada umumnja. Dengan tjara bagaimana kita semua sudah mengetahui.

Penggedoran di Kota Jogjakarta meradjalela sehingga hampir semua rumah orang jang kaja tidak terhindar dari penggedoran. Harta benda Kota menghadapi siasat pembersihan. Djiwa orangpun tidak aman. Pembunuhan dengan rupa-rupa tjara, siasat menakut-nakuti berdjalan dengan leluasa, Pembakaran rumah tidak asing lagi di Kota dan lain-lainnja. Pengosongan Jogjakarta dimulai oleh Belanda.

Orang-orang dan barang-barang jang penting diangkut keluar Jogjakarta. Saban hari convooi dari berpuluh-puluh truck menudju keluar Jogjakarta, sehingga disini tampaklah siasat Belanda mengosongkan Jogjakarta.

Sebagian besar penduduk Tionghoa oleh karena pertjaja kepada budjukan Belanda dan takut pada antjaman sendjata Belanda sama pergi keluar Daerah Jogjakarta dengan convooi Belanda. Siasat pengosongan oleh Belanda ini dipertjepat pada waktu terdjadinja persetudjuan Rum-Royen pada tanggal 7 Mei 1949.

Bangsa Indonesia jang kurang kuat pendiriannja pun djuga ikut ber-convooi, meskipun Sri Sultan sebagai Menteri Negara Kordinator keamanan telah mengumumkan bahwa keamanan akan didjaminnja.

Sesudah ada persetudjuan Rum - Royen, maka mula-mula oleh Sri Sultan diadakan persiapan illegaal dengan perdjuangan luar Kota. Dengan membawa rentjana persiapan pengunduran tentara Belanda, Sri Sultan terbang ke Djakarta dan Bangka.

Dalam bulan Mei (16 Mei) 1949, Komisi Indonesia — Belanda datang di Jogjakarta ; berunding di Kepatihan, dan tanggal 21 Djuni 1949 Sri Sultan buat penghabisan kali terbang ke Djakarta. Tanggal 23 Djuni 1949 Sri Sultan kembali ke Jogjakarta pagi hari dan memerintahkan supaja disiapkan pengunduran Belanda dimulai dari Wonosari.

Pada tanggal 24 Djuni 1949 supaja Tentara, Polisi dan Pamong-Pradja siap disuatu tempat diluar Kota Wonosari pada djam 10 pagi, menunggu panggilan dari Sri Sultan.

Djawatan Pradja djam 5 siang mengirimkan 2 Wedana koerier berdjalan nonstop ke Gunung Kidul menjampaikan instruksi kilat ini kepada Tentara, Polisi dan Pamong Pradja. Djam 7 pagi kedua koerier ini dapat selesai menjampaikan instruksi ini kepada semua instansi.

Tanggal 24 Djuni 1949 djam 7 pagi Sri Sultan, Sri Paduka Paku-Alam, K.R.T. Honggowongso, Wedana Soemardjan dan 2 orang dari Polisi Akademi + U.N.C.I. naik kapal terbang U.N.C.I. dari Maguwo ke Gunung Kidul, turun dilapangan terbang Gading (Gunung Kidul).

Mulai hari itu pengunduran dimulai berturut-turut hingga pada tanggal 30 Djuni 1949 tentara Belanda habis keluar dari seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta.

* *
*

SESUDAH PENARIKAN TENTARA BELANDA DAN PEMERINTAHAN R. I. KEMBALI DI JOGJAKARTA

Sri Sultan mendjawab beberapa pertanjaan K. T. N.

Berbaris masuk kota sesudah ber-gerilja waktu pendudukan.

Mr. Abd. Wahab, K.R.T. Honggowongso, Komisaris Besar Djen. Mohammad dan Kepala Reserse Sosrodanukusumo bertemu kembali setelah Belanda pergi.

S.P. Paku Alam VIII dengan disertai wakil-wakil K.T.N. menindjau desa.

Kembali ke Jogjakarta.
Kedatangan Presiden Soekarno dengan rombongannja dari Bangka disambut oleh rakjat dengan gembira.

Setelah tiba kembali di Jogjakarta
Presiden menjampaikan amanat kepada rakjat.

Karena sakitnja berat, maka P.B. Soedirman perlu ditandu menudju kota, sesudah Jogja kembali ditangan kita.

Bertemu kembali. Panglima Tertinggi memeluk Panglima Besar setelah bertemu kembali.

Dari kiri: T.B. Simatupang, P.B. Soedirman, Presiden Soekarno dan Wk. Presiden Hatta.
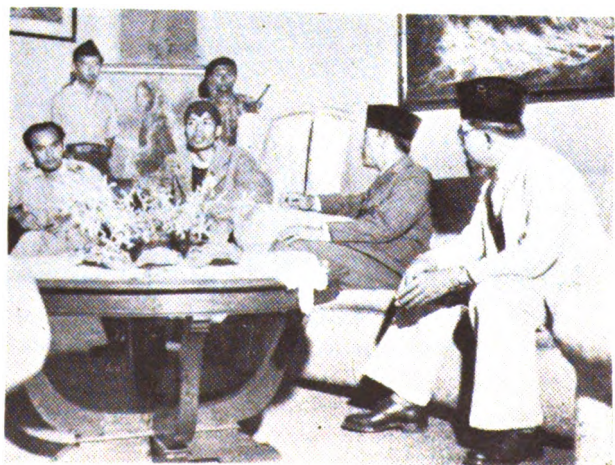
Mr. Susanto Tirtoprodjo dengan rombongannja masuk kota dari daerah gerilja.
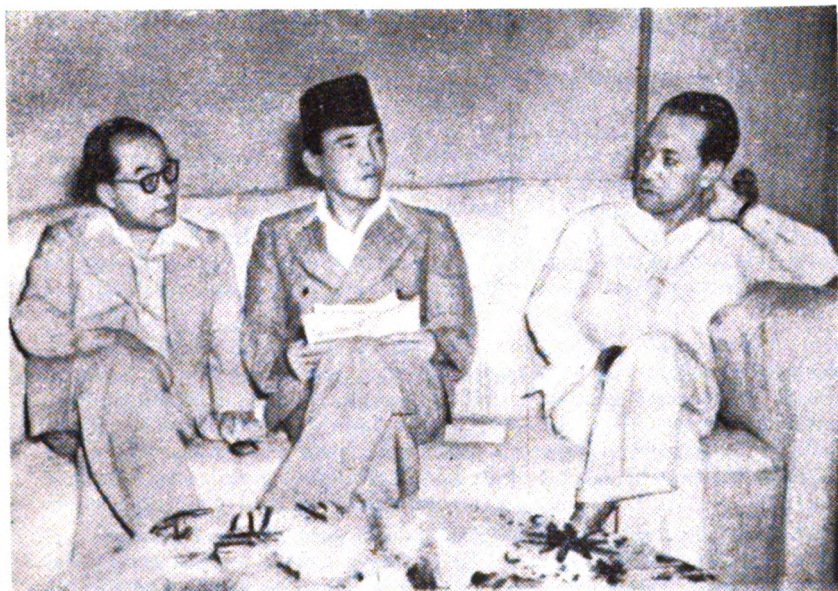
Setelah Belanda mundur dari Jogjakarta Bung Hatta, Bung Karno dan Sri Sultan dapat pula bertindak leluasa.

12. PERDJUANGAN DILUAR IBU KOTA

KEADAAN diluar kota pada tanggal 19 Desember 1948 itu sama djuga halnja dengan diibu kota Jogjakarta. Rakjat sama sekali tidak menduga bahwa pada hari itu mulai menghadapi perang jang sesungguhnja. Baik di Bantul, Sleman, Kulon Progo, Adikarto maupun Gunung Kidul dapat jakin bahwa Belanda mulai menjerang setelah dibandjiri pengungsi.

Bantul :

Latihan............ demikianlah djawab Sdr. Sastrowerdojo, Pemimpin Djawatan Penerangan Kabupaten Bantul kepada pertanjaan kawan-kawan dalam suatu rapat pada tg. 19 Desember 1948. Akan tetapi sesudah ratusan pengungsi sampai ke Bantul dengan membawa berita-berita jang bisa diterima akal, barulah orang pertjaja bahwa sungguh-sungguh Jogja dimasuki tentara Belanda.

Pada hari itu djuga Pemerintah sipil segera mendjadi Pemerintah Militer. Pertahanan rakjat segera berudjud. Dari tentara, pemuda jang memanggul sendjata sampai bagian dapur umum telah bersiap-siap. Akan tetapi karena perbandingan alat sendjata tidak sepadan dengan musuh, maka diduga ta' lama lagi Belanda akan dapat menduduki Bantul.

Dibawah pimpinan Bupati Bantul K. R. T. Tirtodiningrat pembagian tenaga mulai diatur, alat jang diperlukan dipindah ketempat jang agak aman. Pada tg. 23 Desember 1948 dimulailah aksi bumihangus. Gerakan ini dilakukan tiap hari dengan berturut-turut. Gedung Kabupaten, Kapanewon, Kantor pos/tilpon, Pegadaian, Gudang garam, sekolahan-sekolahan d.l.l. gedung milik Pemerintah mendjadi hangus karenanja, dengan maksud agar djangan dapat dipergunakan oleh musuh. Paberik-paberik gula-pun tidak luput djadi sasaran api. Kantor Kabupaten Bantul pertama pindah didesa Mandingan dan selalu pindah mengikuti keadaan: Sungguh merasa bahagia djika orang melihat persatuan rakjat dikala itu.

Dari segala lapisan rakjat, dari semua organisasi, baik politik, sosial, ekonomi maupun lainnja bersatu padu mengerahkan satu tudjuan jalah menentang pendjadjahan. Oleh karenanja, walaupun Belanda belum mengindjakkan kakinja dikota Bantul, namun pedjuang-pedjuang sudah mengalami pertempuran, jalah pada waktu malam mengadakan serangan gerilja kekota Jogjakarta. Ketjuali Tentara resmi, Angkatan Perang Sabil, B.P.R.I. d.l.l. badan kelasjkaran merupakan lawan jang berbahaja bagi pasukan musuh.

Beberapa kali pertjobaan Belanda terhadap Bantul selalu dilakukan, namun serangannja selalu menemui kesulitan. Oleh karena itu, pada tg. 19 Djanuari 1949 djam 6 sampai 15 Bantul diserang dari darat dan udara. Beberapa pesawat terbang ganti-berganti mendjatuhkan granat dan mitraljurnja memuntahkan peluru. Korban serangan ini tidak sedikit, terutama di Imogiri dimana ribuan pengungsi sedang berlindung disana.

Selama pendudukan 6 bulan daerah Bantul jang belum pernah diindjak kaki serdadu Belanda jalah Kapanewon-Kapanewon Srandakan dan Sanden, namun selalu bersiap-siap djuga, karena pesawat udara pengintip selalu mengundjungi diatasnja.

Kulon - Progo :

Didaerah Kabupaten Kulonprogo ini walaupun tidak mendapat serangan seberat Bantul djuga menderita kerusakan besar, karena daerah ini terdapat djalan besar antara Purworedjo dan Jogjakarta. Gedung-gedung Kabupaten. Stasiun Sentolo dan sekitarnja pada tanggal 25 Desember 1948 dibumi hanguskan, setelah ada provokasi dari pengatjau jang mengatakan bahwa 200 serdadu Belanda telah mendarat dipantai Brosot. Akibat provokasi itu, maka pada tanggal 27 Desember 1948 djembatan Bantar diatas sungai Progo dapat direbut oleh Belanda dengan mudah.

Dengan menggunakan djembatan ini, Belanda mendapat pangkalan jang dapat menghubungkan Jogja — Purworedjo. Tetapi selalu tidak aman karena serangan gerilja didjalan, Djembatan Kereta api Progo tidak demikian halnja. Djembatan ini dapat diputuskan hingga tidak dapat dipergunakan lagi. Daerah inipun mengalami serangan udara jang banjak membawa korban, jalah Kapanewon-Kapanewon Nanggulan, Kenteng dan Samigaluh.

Usaha penerangan K.D.M. V

Serbuan tentara Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 setjara mendadak dikota Jogjakarta menimbulkan paniek dikalangan barisan rakjat. Baru sekarang orang Jogjakarta mengalami serbuan njata dari udara dan darat. Korban serbuan tidak diutarakan disini. Beberapa hari tidak terdengar perlawanan terhadap tentara pendudukan. Pihak lawan seolah-olah diberi kesempatan untuk bergerak dan bertindak setjara leluasa.

Tapi dua minggu lagi barisan rakjat dibawah pimpinan T. N. I. mulai menggempur pertahanan musuh. Diwaktu malam terdengar dentuman meriam dan mortir tak terhingga.

Dalam pada itu timbul pertanjaan pada kita, kemana barisan rakjat selama dua minggu itu ? Mereka mundur teratur. Mundur untuk mengatur siasat menghadapi serdadu Belanda dalam lang termijn.

Keadaan tempat daerah Kabupaten Kulon-Progo sebelah Utara menguntungkan bagi fihak kita. Tempat-tempat jang dulu tersohor strategis diwaktu djaman perang Djawa (Diponegaran) sekarang teringat lagi. Komando Distrik Militer V Kulon-Progo memperhatikan djuga pada tempat strategis itu Mula-mula K.D.M. V berkantor di Nanggulan, tapi karena serangan udara kantor terpaksa dipindahkan ketempat jang lebih aman, jaitu di Sribit dan kemudian di Giripurwa.

K.D.M. V mula-mula tidak dapat bergerak dengan penerangannja. Sedjak bulan Pebruari 1949 Sdr. Dwidjosugondo, pegawai Kempen, ditundjuk mendjadi kepala Bagian Penerangan K.D.M. Dengan bantuan para pemuda pedjuang olehnja dapat diselenggarakan sandiwara keliling, mengadakan pertundjukan dimana-mana, dengan disertai gamelan. Maksud dari penerangan keliling jalah mengobarkan semangat perdjuangan rakjat melawan Belanda. Untuk andjuran itu di ambil lakon jang sesuai, jaitu lakon „Guntur Surabaja". Dimana-mana sandiwara itu mendapat sambutan hangat dari rakjat.

Disamping itu bagian Penerangan K.D.M. V mengutip berita-berita radio untuk disampaikan kepada rakjat. Dengan demikian rakjat Kulon-Progo dapat selalu mengikuti berita-berita jang hangat.

Sandiwara ini pada bulan Djuli 1949 dibubarkan.

Adikarto :

Pada tanggal 19 - 12 - 1948 (diwaktu Jogjakarta diserang Belanda), suasana Wates dan Adikarto umumnja terdapat tenang (biasa). Tetapi pada sore harinja dan seterusnja sampai ± 2 minggu banjaklah pengungsi dari Jogja mengalir kebarat, hingga sangat memilukan pemandangan. Pemerintahan/kantor-kantor di Wates, masih bekerdja seperti biasa, hanjalah pegawai-pegawainja banjak jang bermuka asam. Tetapi serenta tanggal 27 - 12 - 1948 Wates kedatangan patroli Belanda (jang ke I), pula mendapat serangan dari udara, maka pemerintahan mendjadi kalang kabut, namun arsip-arsip/barang-barang jang penting dapat dihindarkan dari serangan musuh, serta pegawai-pegawainja pergi keluar kota. Selandjutnja pemerintahan berdjalan (diatur) setjara siasat gerilja, sedang jang bertanggung djawab ialah Mr. K.R.T. Brotodiningrat Bupati Adikarto dan Komandan K.D.M. IV. Pada tanggal 13 - 1 - 1949 di Adikarto dapat dibentuk Pemerintah otonomi. Partai-partai Masjumi dan lain-lainnja berdjuang menudju kearah pertahanan. Hukum Militer telah didjalankan pada hari Djum'at Wage, bulan 2 - 1949, ja'ni terhadap 4 orang perampok. Karena tindakan ini keamanan jang semula terganggu dapat terpelihara.

Setelah Wates kedatangan patroli Belanda ke I tersebut diatas (dengan kekuatan 2 tank dan sementara pantserwagen, serta 1 kompi ketjil ada diluar kota, berserta pula serangan dari udara), bangunan-bangunan pemerintah, rumah-rumah sekolah dibumi hanguskan, diantaranja kantor Kabupaten beserta rumah Bupati, rumah Kawedanan, kantor dan tangsi polisi, rumah pendjara, kantor minjak (K.P.T.M.N.), pekerdjaan umum, kantor pos/telpon, rumah gade, stasiun dan bangunan-bangunan kereta api, kantor pengadilan Negeri/pertanian, bekas gedung kontrolir, Panti Harsono, djembatan-djembatan, sek. S.M.P. dan beberapa sekolah rakjat. Didaerah Kapanewon Temon (Adikarto) bangunan jang dibumi hanguskan ialah kantor Kapanewon Temon, Stasiun Kedundang + bangunan-bangunan kereta api, poliklinik dan rumah gade, beberapa rumah sekolah rakjat, bekas paberik kapur Kedundang dan pesanggrahan Glagah. Rumah sekolah jang rusak ada ± 16 buah, sedang djembatan ± 14 buah.

Dengan pimpinan Pamong Pradja rakjat giat merusak djalan-djalan besar (memperkuat berikade dan membuat tank-vallen), menebang kaju jang besar-besar untuk rintangan. Djalan-djalan didesa-desapun merupakan djalan tertutup. Pertahanan jang belum teratur, sewaktu kedatangan patroli Belanda ke I dan keduanja tanggal 10 - 2 - 1949 (kekuatan Belanda ± 1 seksi ketjil dengan darat) terdapat sangat katjau sehingga kepertjajaan rakjat djuga gontjang. Kemudian dapat ditindjau dan disusun kembali, serta diadakan koordinasi antara bagian-bagian tersebut, maka pada waktu datang patroli Belanda jang ke III di Wates (tanggal 24 - 5 - 1949), dapat diserang setjara gerilja jang dapat membikin musuh hingga kotjar-katjir. Mulai dari saat ini kepertjajaan rakjat terhadap pertahanan timbul kembali.

Wates mendapat serangan patroli Belanda 3 kali, serangan udara 3 kali, sedang daerah Adikarto lainnja Djangkaran (Kapanewon Temon) patroli dua kali. Karangwuluh patroli 2 kali dan serangan udara sekali. Akibat serangan-serangan Belanda ini di Wates terdapat korban 6 orang gugur (Tentara/penduduk dan seorang bangsa Tionghoa dan 2 orang luka. Sedang didaerah Kapanewon Temon terdapat 4 orang gugur (penduduk/Tentara/dan dua orang luka.

Diwaktu patroli jang ke III Belanda membakar rumah-rumah penduduk diantaranja rumah anggota Djapen Adikarto dan mengangkut barang-barang serta beberapa orang, diantaranja terdapat Dokter Wates dan Kepala Pekerdjaan Umum, beserta keluarganja.

Sleman :

Setelah tanggal 19 Desember 1948 tentara Belanda menduduki Ibu Kota Jogjakarta, pada tanggal 20 sore hari tentara Belanda sudah menduduki Beran,

Sleman dan Medari.

Meskipun pada waktu itu semua pegawai Pemerintah baik jang tua, maupun jang muda sudah pergi, Sleman belum pernah mengalami kekosongan pemerintahan. Hanja pemerintahan itu tidak dapat berdjalan dengan sempurna, sedang perhubungan dengan pemerintah Daerahpun telah putus.

Akan tetapi hal jang demikian tidaklah lama.

Sebab sebentar kemudian terbentuklah Pemerintah Militer jang tersusun rapi, sedjak dari Kabupaten dan Kapanewon sampai kepada Kalurahan-kalurahan.

Sedjak waktu itu pemuda jang kuat-kuat menggabungkan diri dalam pasukan-pasukan gerilja. Mereka aktif baik didalam mengadang musuh maupun di dalam menjerang markas musuh jang terletak dibekas-bekas paberik-paberik Medari, Beran dan Tjebongan.

Markas2 musuh jang terletak di Tempel, Pakem dan Kaliurangpun sedjak waktu itu tidak putus-putus mendapat serangan-serangan hebat dari gerilja dan tentara kita.

Sebagaimana jang dilakukan ditempat - tempat lain, disamping menggunakan sendjata, oleh Belanda djuga dilakukan bermatjam tjara untuk membudjuk rakjat supaja mau membantu dia. Tetapi budjukan-budjukan itu tidak membawa hasil sebagaimana jang diharapkan.

Hingga karena putus asa barangkali, pada suatu hari musuh melakukan serangan besar-besaran di Sleman Tengah jang terkenal dengan nama „serangan Djum'at Kliwon" (sebab serangan itu dilakukan oleh Belanda pada hari Djum'at Kliwon), dimana Belanda menggunakan sendjata-sendjata berat untuk menjerang daerah itu. Akibatnja, beberapa orang gugur dan beberapa buah rumah hantjur.

Tetapi djandji rakjat dengan keganasan Belanda jang melewati batas itu tidak lain ketjuali : balas, balas..................

Pembumi hangusan, pembongkaran rel-rel kereta api, pengadangan dan serangan serta sergapan terhadap tentara musuh tidak makin kendor, sebaliknja, malah makin bertambah hebat.

Keamanan daerah Sleman terdjamin, sebab alat-alat kepolisian kita masih tetap utuh.

Sedang pekerdjaan-pekerdjaan sosialpun djuga dapat berdjalan dengan baik. Disana sini pengungsi-pengungsi mendapat pertolongan jang lajak, sedang ditempat-tempat jang agak terdjamin keamanannja dari gangguan-gangguan tentara Belanda dibuka tempat-tempat pengobatan dan sekolah-sekolah darurat jang mendapat perhatian sangat memuaskan dari pihak rakjat.

Adapun pekerdjaan penerangan, karena keadaan dan suasana maka dilakukan setjara gerilja pula. Dimana-mana kepada rakjat diandjurkan untuk tetap berdjuang bersama tentara mempertahankan kemerdekaan negara, tidak sadja dengan mengorbankan harta bendanja, tetapi kalau perlu dengan njawanja djuga Dan hasilnja, didaerah Sleman tentara Belanda tidak dapat memetik hasil usahanja untuk menarik penduduk supaja suka membantunja, meski seorang sekalipun.

Daerah Sleman tidak mengalami kekurangan makanan. Sebab bapak-bapak tani tetap dapat menanam padi disawahnja. Hanja perekonomian agak katjau akibat peredaran uang merah jang sudah mulai masuk kedesa-kedesa, pula akibat perampasan-perampasan Uang Republik Indonesia oleh Belanda di djalan - djalan djurusan kota.

Akan tetapi hal demikian sama sekali tidak berpengaruh atas semangat rakjat untuk tetap berdjuang mempertahankan kemerdekaan negaranja.

Gunung Kidul :

Setelah diketahui bahwa ibu kota Jogjakarta diduduki tentara Belanda, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul segera dirubah mendjadi Pemerintah

Militer. Dengan mengatasi beberapa kesulitan, Pusat Pemerintahan tetap di Wonosari. Terhadap daerah ini terasa, bahwa Belanda sangat berhati - hati. Sehingga sesudah 3 bulan menduduki Jogjakarta barulah mengadakan serangan besar-besaran terhadap Wonosari.

Pada tanggal 10-3-1949, kurang lebih djam 6 pagi, menderung - derunglah berpuluh-puluh kapal udara diatas daerah Gunung Kidul terutama diatas lapangan terbang Gading dan kota Wonosari serta diatas kota-kota Kapanewon jang dekat seperti Karangmodjo, Semanu, Nglipar Ngawen d.l.l Tidak dilupakan pula pemuntahan pelurunja dan bom-bomnja.

Pada waktu itu tidak sedikit orang jang mendjadi korban keganasan serangan kapal udara. Pengeboman itu berdjalan sampai setengah djam lamanja, kemudian turunlah pada djam 7.30 sampai djam 8.30 beratus-ratus tentara pajung dilapangan terbang Gading dan disekitar kota Wonosari.

Kemudian pasukan jang ada dilapangan terbang Gading disusul gerakan tentara Belanda dari dua djurusan jalah dari Jogja melalui Pijungan, terus ke Bunder, dan Gading (melalui djalan besar), dan disusul djuga tentara Belanda dari Jogja melalui Terong (Imogiri) terus ke Gading (melalui djalan ketjil). Sesudah itu tentara Belanda jang ada di Gading bergerak menudju Kapanewon Plajen selandjutnja menudju Palijan. Dan dari Gading ada jang bergerak menudju kota Wonosari. Dan tentara Belanda jang dari Pijungan menudju ke Gading tersebut, di Bunder mengadakan post pendjagaan.

Lagi pula untuk penjerangan kota Wonosari diperkuat djuga dari djurusan Timur (Pratjimantoro), jang sesudah sampai di pertengahan (Bedojo) pasukannja dibagi 2, jang satu menudju Kapanewon Pondjong terus berhenti di Kapanewon Karangmodjo, dan jang satu menudju ke Semanu untuk meneruskan ke Wonosari.

Pada waktu Belanda mengadakan serangan jang sebesar-besarnja didaerah Gunung Kidul itu, tentara kita terpaksa tidak dapat mengadakan pembalasan (perlawanan), karena perimbangan kekuatan tentara kita sangat kurang memadainja. Tetapi kemudian oleh pasukan tentara Mobil dan K.O.D.M. dibantu dari pasukan polisi Negara dan rakjat, pemuda, tentara kita segera mengadakan serangan gerilja diwaktu malam dan mengadakan pengadangan-pengadangan dan lain-lain jang tidak sedikit pula hasilnja.

Biar dengan bagaimana sukarnja semua bangun-bangunan negara didaerah Gunung Kidul dapat dibumi hanguskan, begitu pula rumah penduduk jang berupa gedung djuga ada sebagian jang dibumi hanguskan seperti di Semanu dan Rongkop. Tidak lupa pula seluruh djembatan jang dipandang strategis dapat dibumi hanguskan. Hanja sadja rumah-rumah ditepi djalan dalam kota Wonosari terpaksa tidak dapat dibumi hanguskan.

Akibat agresi Belanda jang kedua di kota Wonosari, maka bubarlah Pemerintahan di Gunung Kidul; seluruh stafnja kotjar-katjir tak karuan tempatnja, semuanja menjingkir untuk menjelamatkan dirinja. Kemudian setelah Pemerintah dapat mengadakan consolidasi lagi pusat Pemerintahan bertempat di desa Kaligesing (Kapanewon Patuk).

Kabupaten (Pradja) dibawah pimpinan K. R. T. Surjaningrat bertempat di Kalurahan Pladjon (Kapanewon Palijan), Penerangan mendjadi satu dengan Pradja di Gading.

Oleh karena perhubungan Pemerintah pada waktu itu sangat sukarnja, maka untuk memudahkannja, terbagilah daerah Gunung Kidul dalam 3 Sektor, jang dipimpin oleh seorang militer dan sipil, jalah :

1. Sektor Selatan (I). Major Danuwasito dan Wedono Prodjopuspito.
2. Sektor Tengah (II) Kapten Sudardi dan Prodjomurtjito.
3. Sektor Utara (III) Letnan Hardiman dan Wedono Prodjowinarso.

Adapun Djawatan Penerangan djuga tidak ketinggalan, berusaha dengan tjara bagaimana untuk menunaikan tugasnja dalam pembagian sektornja.

Partai-partai politik / gerakan-gerakan non actief, hanja orang-oranja actief membantu Pemerintahan dan pertahanan. Dan bangsa Tionghoa jang dilindungi pada waktu itu dilepaskan, dan kebanjakan terus kembali dikota Wonosari, banjak jang ikut / membantu Belanda, tetapi ada satu dua djuga jang tetap mengikuti Pemerintah Republik.

Selama Wonosari dalam pendudukan, Pemerintah Militer Gunung Kidul pun selalu mendapat perubahan, untuk menudju kearah kesempurnaan dalam melaksanakan perlawanan mati-matian dengan Belanda.

Dan biar bagaimana usaha Belanda, untuk membentuk Pemerintahan dalam daerah pendudukannja, tetapi sukar sekali untuk mentjari orang-orang sebagai alatnja, hanja dapat mempengaruhi seorang bekas lurah desa di Wonosari untuk didjadikan lurah desa dikota Wonosari. Sering terdjadi budjukan-budjukan / adjakan-adjakan dari lurah Belanda kota Wonosari, atau kaki tangannja mengadjak kepada rakjat untuk membantu / mengikuti Belanda, tetapi ta' ada jang memperdulikannja.

Kerugian jang diderita oleh penduduk Daerah Istimewa Jogjakarta selama pendudukan tentara Belanda tanggal 19 - 12 - 1948 sampai 30 - 6 - 1949.

	Tempat	Mati	Luka-2	Hilang		Benda
1.	Haminte Kota Jogja	519	119	90	R.	72.443.552,—
2.	Kabupaten Bantul	1055	160	221	„	67.391.209,—
3.	Kabupaten Sleman	923	399	224	„	181.868.414,—
4.	Kabupaten Gn. Kidul	157	30	1	„	8.400.765,—
5.	Kabupaten Kl. Progo	57	24	3	„	1.775.530,—
6.	Kabupaten Adikarto	7	4	—	„	804.980,—
	Djumlah:	2718	736	539	R.	252.684.430,—

* *
*

13. PIDATO RADIO SRI SULTAN SETELAH BELANDA MUNDUR DARI JOGJA

6½ bulan Radio Jogjakarta tidak mengumandang diudara. Barulah setelah militer Belanda mundur dari Jogjakarta siaran radio dapat diatur kembali. Pada tanggal 30 Djuni 1949 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan perantaraan radio berkenan menjatakan penghargaannja akan keuletan perdjuangan rakjat.

PJ. M. Presiden telah mempertjajakan kepada saja untuk sementara waktu menjelesaikan keberesan pekerdjaan negara dimasa peralihan sekarang. Bersama - sama itu djuga saja utjapkan selamat kepada Saudara-saudara sekalian atas peristiwa jang penting ini. Jogjakarta dapat kembali. adalah berkah keuletan Saudara-Saudara sekarang baik jang bersendjata maupun jang tidak, dalam menghadapi segala kesulitan hidup sekian lamanja itu. Dan penderitaan itu Saudara-Saudara sanggup alami, karena terdorong oleh tjita-tjita kita jang sutji, tjita-tjita mentjapai keadilan dan kesempurnaan hidup, jang sudah barang tentu mendapat lindungan Jang Maha Esa.

Saja tahu bahwa dalam perdjuangan ini banjak keluarga jang kehilangan ajahnja, kehilangan pemudanja jang gagah perwira, atau bertjatjad untuk selama hidupnja ; saja tahu pula, bahwa banjak keluarga besar jang beberapa hari hanja makan 1 kali. Saja tahu, bahwa banjak djas dan kemedja telah habis didjual untuk keperluan hidup, sekedar untuk mengabdi pada tjita-tjita. Saja tahu djuga, bahwa tidak sedikit Sdr-sdr jang mendapat tawaran untuk mendjabat djabatan tinggi dengan gadji besar, jang berarti terdjamin hidupnja. Tetapi karena lebih tinggi penghargaan Sdr-sdr kepada tjita-tjita dari pada terhadap kemewahan lahir sadja, Sdr pilih hidup jang sederhana dan menderita. Tidak sedikit kaum tjerdik pandai jang berdjualan di pasar, pemimpin-pemimpin jang membuka warung dan sebagainja. Walaupun begitu, mereka itu tetap sabar dan tawakal dengan menunggu kembalinja Jogja ditangan kita.

Sekarang, apa jang Sdr tunggu-tunggu itu terbukti.

Sdr-sdr, apakah artinja kembalinja Jogjakarta ditangan Republik lagi ? Ini berarti, bahwa perdjuangan kita bangsa Indonesia harus dilandjutkan. Bertimbun-timbunlah pekerdjaan jang kita hadapi. Sudah barang tentu dari tiap-tiap warga negara diharapkan iuran dan sumbangannja jang sebesar-besarnja untuk menjempurnakan pekerdjaan kita itu.

Saja katakan, bahwa pekerdjaan bertimbun-timbun, oleh sebab kembalinja Republik ke Jogjakarta, adalah merupakan suatu tingkatan perdjuangan jang besar jang mengenai perdjuangan seluruh rakjat Indonesia.

Republik jang daerahnja sekarang baru dapat kembali sebagian sadja, harus melandjutkan perdjuangannja bersama-sama dengan rakjat di Pasundan, N. I.T., di Kalimantan, Sumatera dan lain-lain daerah, sehingga tjita-tjita bersama dapat tertjapai.

Dalam mengetahui, bahwa perdjuangan kita harus kita landjutkan bersama-sama dengan sdr.2 dilain-lain kepulauan, berarti, bahwa persatuan diantara kita sama kita harus lebih-lebih kita tanamkan didalam diri kita masing-masing. Terutama diantara kita jang sekarang sudah masuk dalam lindungan bendera Sang Merah Putih, daerab jang dikuasai oleh Pemerintah Republik. Kita masih ingat, bahwa tenaga kita dimasa jang lampau terlalu terpetjah belah dan terbuang-buang, karena ada sebagian dari kita jang lupa kepada kepentingan negara jang seharusnja ditaruh diatas kepentingan golongan atau partai. Makin lebar djurang jang terbentang antara kita sama kita, makin gembiralah pihak jang menghendaki keruntuhan negara kita.

Oleh karena itu, dalam melihat kelemahan-kelemahan dimasa lalu itu, dapatlah kita bertjermin kepadanja, sambil melihat djauh kedepan, seraja menjusun perdjuangan j.a.d. Diwaktu ini djustru soal persatuan harus kita utamakan, kalau kita tidak hendak mengulangi sedjarah jang mengandung kepedihan itu.

Negara kita mendjamin adanja hak demokrasi, dimana tiap warga negara masing-masing mempunjai hak untuk mengeluarkan suara, menentang apa jang tidak disetudjui. Tapi semuanja itu haruslah disalurkan melalui djalan-djalan jang sah, dengan tidak perlu mempertaruhkan keamanan negara untuk kepentingan golongan sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, sedjak kembalinja Jogjakarta ketangan Pemerintah Republik, tjara bekerdja dan tjara berpikir harus dirubah.

Selandjutnja, untuk kepentingan keamanan negara, soal komando satuan-satuan jang bersendjata, harus dipusatkan dibawah komando Tentara Nasional. Dengan ini kita mendjaga djangan terdjadi terbuangnja tenaga dengan pertjuma karena salah paham satu sama lain, dan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan provokasi jang tiap waktu akan datang mengantjam. Lagi pula, haruslah diketahui oleh Sdr, bahwa dalam negara jang teratur, pimpinan satuan-satuan bersendjata hanjalah terletak disatu tangan jang dikuasakan oleh Pemerintah.

Tapi dalam pada itu, masih kurang lengkap rasanja, bilamana komando jang sudah dipusatkan itu, tidak dibantu oleh seluruh lapisan masjarakat. Oleh karena itu rakjat seluruhnja dapat merjempurnakan penjelenggaraan keamanan dengan mengusahakan pendjagaan dikampung-kampung sebagai jang biasa kita djalankan dimasa jang lalu.

Sekarang haruslah kita lebih awas dan waspada dari pada jang sudah-sudah. Perlu djuga disini saja tegaskan lagi, bahwa barang siapa mulai saat ini masih mau mengatjau, saja tidak segan-segan untuk mengambil tindakan jang setimpal. Teranglah, bahwa kewadjiban masing-masing sebagai warga negara Republik masih berat. Tapi soal jang berat ini akan terasa ringan, kalau dikerdjakan bersama-sama. Pun pengorbanan-pengorbanan jang rasanja tidak terpikul lagi, akan mendjadi enteng, kalau kita ingat bahwa bukan hanja kita jang mengalami kesulitan, tapi seluruh bangsa merasakannja. Dan lekas atau lambat berachirnja penderitaan itu, hanja tergantung kepada kemauan dan tekad kita sendiri. Marilah kita pertjepat usaha untuk mentjapai kesempurnaan dan kebahagiaan bersama itu. Selamat berdjuang!

Sekali Merdeka, tetap Merdeka!

* *
*

Djembatan sisa bumi hangus.

Sisa bumi hangus.

Selalu siap sedia!
Bagi tentara gerilja sepatu dan pakaian lainnja tidak penting, asal sendjata ditangannja.
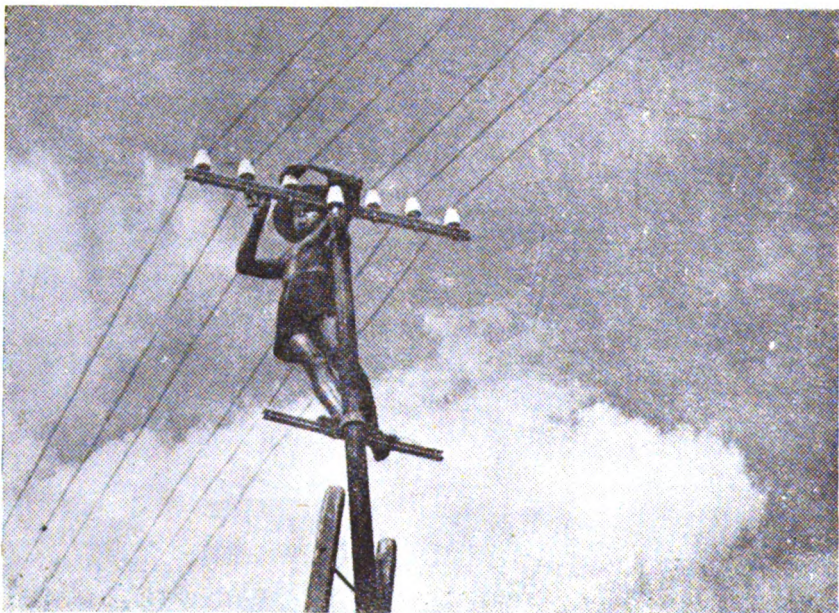
Setelah militer Belanda pergi saluran-saluran telpon disambung kembali.

Pasukan gerilja siap menerima perintah masuk kota Jogjakarta.

Dengan teratur angkatan bersendjata masuk kota.

14. PEMBENTUKAN D. P. R. DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA DENGAN DJALAN PEMILIHAN UMUM

SESUDAH adanja peristiwa Madiun pada bulan September 1948 maka keadaan D. P. R. Daerah Istimewa Jogjakarta dibekukan.

Setelah clash ke 2 dan Belanda menarik tentaranja dari Jogjakarta, maka berlakulah Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 — 1949 jang membentuk Pemerintahan Militer di Jogjakarta, jang dipimpin oleh S. P. Gubernur Militer Paku Alam ke VIII. D.P.R. tetap dibekukan dan Dewan Pemerintah hanja merupakan penasehatnja Gubernur Militer sadja. Dan seperti dimuka telah disebutkan, maka sebagai dasar untuk membangunkan daerah-daerah otonom dari propinsi, Kabupaten dan Kota Besar, pada tgl. 10 Djuli 1948 telah dikeluarkan Undang-Undang Pokok No. 22 — 1948. Berdasarkan Undang - Undang Pokok itu dikeluarkan Undang - Undang No. 3 jo. No. 19 -- 1950 pada tanggal 15 Agustus 1950 jang membentuk Kasultanan dan Paku Alaman mendjadi daerah otonom setingkat propinsi.

Dalam pasal 1 — 2 U. U. Pokok tsb. dinjatakan bahwa Pemerintahan Daerah terdiri dari pada D. P. R. dan Dewan Pemerintah (DPD). D.P.D. ini merupakan collegiaal bestuur jang dipimpin oleh kedua S. P.

Maka dengan tidak adanja D. P. R. Daerah makin lama makin terasa. bukan sadja dikalangan rakjat, tetapi, djuga dikalangan Pemerintah Daerah. Keadaan makin lama makin mendesak supaja D.P.R. Daerah segera dibentuk kembali. Tetapi bagaimana tjaranja untuk membentuk lagi D. P. R. Daerah.

Tjara seperti jang tsb. dalam Maklumat Daerah No. 18 th. 1946 sudah tidak sesuai lagi dengan pikiran dan keadaan sekarang.

Peraturan Pemerintah No. 39 th. 1950 jalah peraturan jang mendjadi dasar pembentukan D.P.R.2 di luar Jogjakarta, Pemerintah Daerah dan rakjat di daerah Jogjakarta tidak suka memakainja, karena pada waktu itu sudah dapat dibajangkan, bahwa D. P. R.2 jang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 buahnja tak akan dapat memuaskan kepada rakjat.

Karena desakan keras dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat agar pembentukan D.P.R. Daerah dipergunakan Undang-Undang Pemilihan No. 7 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1950, maka pada bulan Djanuari 1951 keluarlah keputusan dari Menteri Dalam Negeri, bahwa Jogjakarta diidzinkan untuk mendjadi pertjobaan buat mendjalankan Pemilihan Umum bertingkat untuk memilih anggauta-anggauta D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta berdasarkan Undang-Undang Pemilihan No. 7 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1950. Dan menurut Undang-Undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950 ditetapkan, bahwa D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta beranggauta 40.

Demikianlah, Pemilihan Umum untuk memilih anggauta-angauta D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta dapat dilangsungkan sedjak tanggal 16 Djuli 1951 sampai 9 Nopember 1951 telah berhasil dengan memuaskan dengan pengertian bahwa sebagai suatu experiment dan baru pertama kali dilakukan dalam sedjarah parlementer Negara kita. Maka setelah diadakan perhitungan penduduk dan pilihan Pemilih, maka djumlah Pemilih ada 7268 orang, tapi jang dianggap sah suaranja jalah sebanjak 6807 suara, dan berhubung dengan itu maka kiesquotientnja ditetapkan sebesar 170 suara (6807 : 40).

Menurut suara-suara Pemilih jang masuk, maka Masjumi mendapapt 2753 suara, mendapat 18 kursi, Persatuan Pamong Desa Indonesia (P.P.D.I.) 1115 suara atau 7 kursi, Panitya Kesatuan Aksi Buruh Tani (P.K.A.B.T.) 878 suara atau 5 kursi, P.N.I. 659 suara atau 4 kursi, Partai Katholiek 354 suara atau 2 kursi, Sarekat Sekerdja Pamong Pradja (S.S.P.P.) 314 suara atau 2 kursi dan P.I.R. 313 suara atau 2 kursi.

Keempat puluh orang jang terpilih tersebut pada tanggal 24 - 12 - 1951 telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo digedung D.P.R. Malioboro sebagai anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta. Dari 40 orang anggauta D.P.R. Istimewa Jogjakarta itu dipilih jang 5 orang sebagai anggauta Dewan Pemerintah Daerah jalah 2 orang dari Masjumi Sdr.sdr Mr. H.A. Kasmat dan Moh. Mawardi, seorang dari P.N.I. Sdr. Dr. Sahir Nitihardjo, seorang dari P.P.D.I. Sdr. Sugijopranoto dan seorang dari fraksi Buruh dan Tani Sdr. Susanto. Pimpinan D.P.R.D. Istimewa Jogjakarta sebagai Ketua jalah Sdr. Wiwoho Purbohadidjojo (Masjumi), Wk. Ketua I Sdr. Karkono (P.N.I.), Wk. Ketua II Sdr. Notosudarmo (P.P.D.I.).

Penggabungan Kabupaten - Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto

Pada tanggal 12 Oktober 1951 telah dikeluarkan Undang-Undang No. 18 tahun 1951 jang menjatakan, bahwa Kabupaten2 Kulon Progo dan Adikarto digabungkan mendjadi satu Kabupaten jang diberi nama Kabupaten Kulon Progo dengan Ibu Kota Kabupaten Wates.

Adapun proces penggabungan ini sudah lama diperbintjangkan dan selandjutnja dibitjarakan dalam pertemuan resmi antara Kedua Sri Paduka, pembesar-pembesar dari Daerah dan kedua Kabupaten tersebut jang dilangsungkan pada tanggal 3 - 7 - 1951.

Maka berhubung dengan telah dikeluarkan Undang-Undang No. 18 tahun 1951 itu kemudian pada tanggal 27 Desember 1951 S. P. Paku Alam berkenan meresmikan penggabungan kedua kabupaten tersebut. Dengan tergabungnja ke dua Kabupaten tersebut, maka berachirlah pemisahan daerah jang ditelorkan oleh kaum imperialis sedjak tahun 1813.

Soal daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen

GUNA mengemukakan soal daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen, maka baiklah dibawah ini dikemukakan tulisan K. R. T. Brataningrat jang kita ambil dari Buku peringatan ulang tahun ke I D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta jang antara lain sebagai berikut :

1. „Enclave" (Lat : inclavare) merupakan satu daerah jang terdjepit atau terselip dalam daerah lain. Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta terdapat 3 buah daerah serupa itu, ialah :
   a. Kota Gede Surakarta,
   b. Imogiri Surakarta,
   c. Ngawen dari Mangkunegaran,

a. dan b. masuk Kabupaten Bantul, sedang c. masuk Kabupaten Gunungkidul. Dalam surat-surat resmi disebut nama-nama Kota Gede dan Imogiri Surakarta — tidak dengan mempergunakan perkataan „enclave" — disamping nama-nama daerah dari Daerah Istimewa Jogjakarta jang sama, ialah Kota Gede Jogjakarta dan Imogiri Jogjakarta. Adapun nama „Ngawen" tidak akan menimbulkan kesalah fahaman, sebab dalam Daerah Istimewa Jogjakarta tidak terdapat nama itu buat daerah-daerah lainnja.

2. Imogiri (Ska), walaupun resmi merupakan daerah Kawedanan, keadaannja tidak lebih besar dari Kapanewon-Kapanewon (Ketjamatan) dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, begitu pula Kota Gede (Ska) dengan statusnja Assistenan dan lebih ketjil : Ngawen sebagai Kapanewon (Ketjamatan). Berhubung dalam Daerah Istimewa Jogjakarta tidak ada lagi daerah Kawedanan atau district dan onderdistrict, maka daerah-daerah enclave tersebut dalam peperintahan sehari-hari diperlakukan sama dengan daerah-daerah Kapanewon (Ketjamatan). Perlu ditjatat disini bahwa Kawedanan Imogiri (Ska) hanja meliputi daerah sebesar Ketjamatan itu.

3. Sedjak lama telah terasa oleh pihak Pemerintah dan penduduk, bahwa djalannja peperintahan dalam tiga daerah enclave itu tidak seperti jang diharap-harapkan berhubung dengan tidak tegasnja status daerah-daerah tersebut. Banjaknja kesukaran-kesukaran jang harus dihadapinja selalu meningkat dan tak dapat dibiarkan begitu sadja. Hal itu diinsjafi benar-benar oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta dan D.P.R.D.S. Djawa Tengah, jang kesemuanja itu memasukkan soal enclave tersebut dalam atjara sidangnja masing-masing dan dalam keputusannja memperhatikan setjara chusus soal itu dengan membentuk panitya-panitya. Bagi para pembatja jang tidak kesempatan mengikuti djalannja perundingan-perundingan dalam sidang-sidang D.P.R.D.S. Djawa Tengah atau D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta dibawah ini saja sadjikan I. kutipan dari Pidato Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah dalam rapat D.P.R.D.S. Propinsi Djawa Tengah tanggal 29 - 7 - 1952 dan II Nota usul penegasan status daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen dari tangan Penulis ini, diikuti dengan usul Mosi anggauta-anggauta D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta saudara Brataningrat, Hammam Hasjim dan S. Purwosudirdjo jang diterima tanggal 24 September 1952, dengan perubahan :

Ad I. Visie dari Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah mengenai adanja enclave - enclave itu antara lain seperti berikut :

„Dengan senang hati saja memenuhi pengharapan saudara untuk memberi sedikit uraian tentang adanja 3 enclave daerah Karesidenan Surakarta jang terletak didalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

Jaitu :

Kawedanan Imogiri,
Ketjamatan Kota Gede dan
. . . . Ngawen.

Sebagai diketahui, maka dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Djuli 1950 No. G 30/1/5 ditetapkan, bahwa pemerintahan didalam 3 enclave termaksud, mulai tanggal 1 Agustus 1950, untuk sementara didjalankan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta (Kabupaten Bantul).

Sebelum saat itu, pemerintahan di 3 enclave itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Karesidenan Surakarta (Kabupaten Klaten).

Menurut bunjinja considerans surat keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan keputusan itu tidak ada perubahan dalam status 3 enclave itu. Dengan perkataan lain, 3 daerah itu staatkundig masih turut Surakarta, akan tetapi pemerintahannja dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.

Adapun tindakan itu, berhubung letaknja 3 enclave didalam Daerah Istimewa Jogjakarta, beralasan pertimbangan - pertimbangan praktis, dipandang perlu supaja disana dilakukan peraturan - peraturan jang sama. Baik dalam lapangan pemerintahan, maupun dalam soal Kepegawaian dan Keuangan.

Adalah buat Saudara bukan hal jang asing lagi, bahwa 3 daerah itu sebagai enclave dalam sedjarahnja mempunjai arti jang penting karena hubungannja dengan keluarga Radja-Radja, sebagai tempat-tempat jang dimuliakan.

Sepandjang telah dilakukan penjelidikan di 3 tempat tersebut, hatsil-hatsil penjelidikan mengenai kemungkinan diserahkannja atau digabungkannja kepada Daerah Istimewa Jogjakarta, menjatakan, bahwa rakjat maupun para pegawai tidak menaruh keberatan, djika status daerah itu beralih mendjadi wilajah Daerah Istimewa Jogjakarta.

Sementara dapatlah ditjatat, bahwa, walaupun kemungkinan diberikannja rehabilitasi kepada Swapradja Surakarta sangat ketjil, sementara masih ada hubungannja dengan itu. Jang terang ialah, bahwa sementara privileges dari Kraton Kasunanan dan Dalam Mangkunegaran terhadap objek-objek jang bersifat makam dengan hubungan-hubungannja, sedjauh sesuai dengan zaman sekarang, perlu tetap dihormati".

Ad II. Dengan terbentuknja Daerah Istimewa Jogjakarta setingkat dengan Propinsi (U. U. No. 3 juncto 19 tahun 1950) dan Propinsi Djawa Tengah (U.U. No. 10/1950) maka soal-soal psychologis jang terbawa oleh sedjarah dalam usaha penjelesaian soal status enclave itu dapat disalurkan kearah sebaik-baiknja, sebab soalnja lalu beralih kepada Propinsi dengan Propinsi. Satu hal jang perlu ditjatat disini ialah : bahwa dalam pemilihan umum untuk membentuk D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta, rakjat dalam daerah - daerah enclave itu ikut mengeluarkan suaranja dengan rahasia dan bebas, bahkan dapat menghatsilkan menempatkan seorang penduduk dari daerah itu dalam D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta sekarang ini.

Selandjutnja oleh K.R.T. Brataningrat diuraikan tentang nota usul penegasan status Daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen, dengan tjatatan, bahwa bahan-bahan jang mengenai sedjarah diambil antara lain dari buku „Vorstenlanden" karangan G. P. Rouffaer.

Achirnja oleh K.R.T. Brataningrat ditjantumkan usul mosi jang telah diterima oleh D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta jang antara lain dalam bagian „Memutuskan" memuat :

Mendesak kepada Menteri Dalam Negeri supaja :

1. Peperintahan daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen dimasukkan 100% dalam daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Menindjau kembali status daerah-daerah itu dengan penuh kebidjaksanaan. Rapat Pleno D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta, pada rapatnja tanggal 24 September 1952 merubah usul putusan itu mendjadi :
   „Mendesak kepada Menteri Dalam Negeri supaja daerah-daerah enclave Imogiri Kota Gede dan Ngawen dimasukkan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta".

Demikianlah uraian K.R.T. Brataningrat mengenai soal daerah-daerah enclave, dan sampai pada karangan ini kita ambil, perkembangan selandjutnja belum ada.

* *
*

Poster untuk pemilihan umum di Jogjakarta.

Pimpinan D. P. R. Daerah Istimewa Jogjakarta.
Duduk dari kiri kekanan: D. D. Susanto, Sekretaris II; Ketua D. P. R. Wiwoho dan Wakil Ketua I Karkono.

Gedung D. P. R. Daerah Istimewa Jogjakarta dulu sebagai Gedung K. N. I. P.
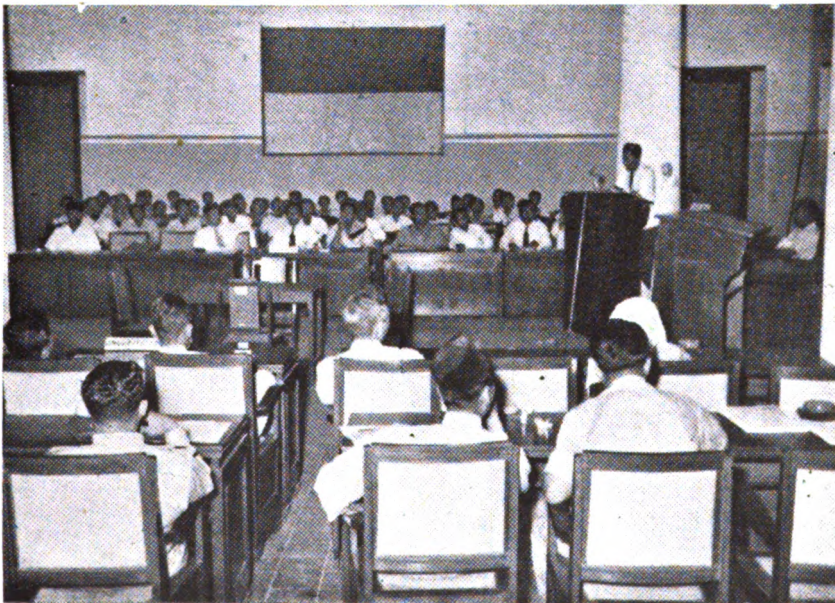
Pemandangan dalam sidang D. P. R. Daerah Istimewa Jogjakarta.

BAB II :

PERUNDINGAN INDONESIA — BELANDA

1. PEMERINTAH R. I. PINDAH KE JOGJAKARTA

BERHUBUNG dengan gentingnja suasana di Djakarta, maka sedjak tanggal 4 - 1 - 1946 Presiden dan Wakil Presiden telah pindah dari Djakarta ke Jogjakarta.

Bergandengan dengan kepindahan kedua Kepala Negara tersebut, malamnja Wakil Menteri Penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo mengutjapkan pidato radio didepan tjorong R.R.I. Jogjakarta seperti berikut :

Sebelum kami menjiarkan beberapa pengumuman resmi, maka lebih dahulu kami menjampaikan salam nasional kita :
Merdeka !

Sdr.-Sdr. pertama kami atas nama Pemerintah mengumumkan dengan resmi, bahwa mulai pagi ini tanggal 4 - 1 - 1946 sebagian dari Pemerintah Agung buat sementara dipindahkan dari Djakarta ke Jogjakarta. Dari sebab itu mulai hari ini Presiden kita Bung Karno dan Wakil Presiden Bung Hatta buat sementara waktu berkedudukan dikota Mataram.

Lain dari pada itu pun Menteri Keamanan mulai sekarang berkedudukan dan berkantor di Jogja djuga.

Adapun Kementerian Penerangan hanja sebagian jang dipindahkan ke Mataram, jaitu bagian Politik Dalam Negeri, jang dikepalai oleh pembitjara sendiri dan bagian Pers dan Publikasi, jang di kepalai oleh Sdr. M. Tabrani.

Lain dari pada itu perlu diumumkan disini pula beberapa perubahan didalam susunan Pemerintah Agung sebagai berikut :

Didalam susunan Pemerintah Agung diadakan Kementerian baru, jalah Kementerian Agama, jang dipimpin oleh Saudara H. Rasjidi sebagai Menteri. Sebagai umum telah mengetahui P.T.H. Rasjidi tamat Sekolah Tinggi Islam di Cairo dan salah seorang pemimpin dari Partai Masjumi. Beliau adalah Guru Besar dari Sekolah Tinggi Islam di Djakarta dan ketika kabinet Sjahrir dibentuk beliau diangkat mendjadi Menteri Negara. Beliau adalah seorang ahli filsafat Islam jang terkenal.

Sebagai gantinja Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin, diangkat P. T. Moh. Natsir anggauta Partai Masjumi jang sekarang duduk sebagai anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat. Beliau dahulu mendjabat Guru Sekolah Islam dan Pemimpin Persis Bandung. Beliau dipilih sebagai anggauta B.P.K.N.I. Pusat sebagai wakil dari Partai Masjumi.

Ada lagi suatu perubahan jang harus diumumkan.

Pemerintah telah membentuk suatu Badan baru jaitu Balai Pemuda jang di tempatkan dibawah kekuasaan Kementerian Sosial. Sebagai kepala dari Balai itu telah diangkat Sdr. Supeno, Pemimpin dari Fonds Kemerdekaan. Sebagai umum telah mengetahui Sdr. Supeno sampai sekarang mendjabat djuga Ketua Sementara dari Badan Pekerdja K.N.I. Pusat.

Beliau dulu adalah peladjar dari Sekolah Kehakiman Tinggi di Djakarta dan terkenal sebagai Pemimpin Indonesia Muda dan kemudian P.P.P.I. dan

Baperpi. Lain dari pada itu beliau mendjadi anggauta Pengurus Besar Partai Sosialis jang baru-baru ini didirikan.

Demikianlah pengumuman-pengumuman resmi, jang perlu diketahui oleh Rakjat kita diseluruh Indonesia.

Berhubung dengan pemindahan sebagian dari Pemerintah Agung ke Jogjakarta ini perlu agaknja diterangkan disini, bahwa hal itu tidak usah menggontjangkan hati kita.

Pemindahan ini tidak mendjadi sebab untuk merubah pendirian Pemerintah terhadap luar maupun dalam Negeri. Pemindahan sementara ini beralasan dalam hal :

1. Keadaan tidak aman jang terdapat di Djakarta.
2. Untuk menjempurnakan Organisasi dalam Negeri.

Bahwa Kota Djakarta pada masa ini makin lama makin tidak aman buat rakjat Indonesia umumnja dan buat Pemimpin-Pemimpin Negara chususnja, tidak perlu kami tjeritakan pandjang lebar lagi. Tjukuplah kiranja kami peringatkan tentang pertjobaan pembunuhan atas diri P.M. Sjahrir dan terhadap Sdr. Mr. Sjarifuddin jang Sdr.-Sdr. tentu sudah maklum.

Siapakah jang menjebabkan tidak aman itu, tidak perlu kami terangkan lagi. Meskipun dari pihak Serikat katanja telah diambil tindakan untuk mengendalikan terrorisme Belanda, njatalah bahwa keamanan pemimpin-pemimpin kita tidak dapat didjamin lagi.

Akan tetapi sebetulnja lebih pentinglah alasan jang tersebut kedua tadi untuk memindahkan buat sementara kedudukan Pemerintah Agung.

Alasan itu pada hakekatnja mengenai bagian jang terpenting daripada perdjuangan kita, bahkan dari revolusi rakjat Indonesia pada masa ini. Sebab Pemerintah Agung mulai sekarang dari kedudukannja jang baru, jalah Kota Mataram akan dapat melangsungkan dengan lebih tepat dan tjepat segala pimpinan dan usaha untuk menjempurnakan organisasi pemerintahan di daerah-daerah. Bahwa penjempurnaan organisasi-organisasi itu senantiasa dilakukan, terbuktilah dari perubahan-perubahan dalam susunan Pemerintah Agung jang kami umumkan tadi.

Sekarang tinggallah penjelenggaraan hubungan jang erat dan teratur antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jang harus diperhatikan lebih dari pada jang sudah-sudah.

Dengan demikian maka kordinasi jang tersusun, jang mendjadi sjarat mutlak untuk berputarnja roda pemerintahan dengan litjin, akan lekas tertjapai.

Sekianlah pengumuman kami.

Merdeka.

Pusat Pemerintah di Jogja

Seperti tertera diatas, Presiden dan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian telah berada di Jogjakarta, maka dengan demikian kegiatan politik boleh dikata dikemudikan dari Jogja.

Sebagai pelaksanaan apa jang telah di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka tahun 1946 adalah tahun pembangunan, usaha mengisi, mengatur dan mengkonsolidasi pemerintahan dan alat-alat negara dan masjarakat sebagai negara merdeka, kedalam dan keluar.

Dengan status kemerdekaan itu, kita hidup dalam masjarakat dunia, diantara negara-negara jang merdeka. Kemerdekaan itu meletakkan kewadjiban di bahu kita disamping hak-hak terhadap dunia internasional. Kita harus pandai membawa diri dalam pergaulan masjarakat dunia. Kita harus hidup me-

nurut sjarat-sjarat dunia supaja kita djangan hidup terpentjil dari negara-negara lain. Pun letak jang istimewa dari negara kita, disimpang empat, diantara dua lautan dan dua benua, meminta diri kita, supaja lebih pandai membawa diri kita dalam pergaulan tersebut.

Pemerintah Indonesia mempunjai kekuasaan jang de facto ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia, sedangkan Belanda datang kesini mau melakukan pemerintahan de jurenja. Untuk memetjahkan soal jang sulit ini, Belanda terpaksa datang pada Pemerintah kita dan Pemerintah kita bertindak seperti jang pantas bagi bangsa jang merdeka. Pemerintah berusaha mentjari penjelesaian setjara biasa diantara negara jang berselisih jaitu dengan djalan permusjawaratan. Dengan tjara jang demikian ini kita menundjukkan, bahwa kita djuga tahu akan adat-istiadat internasional dan kita sanggup mempraktekkannja sebagai bangsa jang merdeka. Dengan ini kita membuktikan kepada dunia, bahwa kita lahir dan bathin telah masak untuk merdeka.

Atas permintaannja kita berunding dengan Belanda, tetapi karena Belanda selalu mendasarkan tuntutan atas keterangannja Ratu Wilhelmina 1942 ditambah dengan keterangan-keterangan Menteri Daerah Seberang Lautan Belanda Logeman pada bulan Nopember 1945 jang maksudnja mengakui hak menentukan nasib sendiri tetapi didalam lingkungan keradjaan Belanda, padahal kita telah merdeka dan ingin merdeka, perundingan menemui impase.

Dalam pada itu Belanda berusaha pula memblokir Indonesia dari mata internasional. Tetapi kita dengan usaha dan ketjakapan jang ada pada kita memakai segala kemungkinan membuka djalan keluar, menghubungkan perdjuangan kita dengan dunia internasional.

Demikianlah didalam pertjaturan di Dewan Keamanan pada tanggal 21-1-1946, Wakil Ukraina Manouilsky berpendapat bahwa keadaan di Indonesia membahajakan perdamaian dan keamanan dunia. Ia minta kepada Dewan Keamanan supaja mengambil tindakan berdasarkan pasal 35 Piagam P.B.B.

Begitu djuga dalam sidangnja tanggal 7 - 2 - 1946 waktu membitjarakan soal Indonesia, Manouilsky memberi keterangan, bahwa pendaratan tentara Inggeris di Indonesia menjebabkan adanja suasana perang di Indonesia.

Tetapi usul Ukraina ini ditolak oleh sidang Dewan Keamanan pada tanggal 13 - 2 - 1946. Demikian pula ditolak usul Resolusi Mesir, jang mendesak, supaja pasukan-pasukan Inggeris di tarik kembali selekas mungkin, sesudah kewadjibannja selesai. Dalam pada itu Belandapun, melihat ketjakapan kita lambat laun berubah sikapnja. Inggeris jang ingin supaja soal-soal Indonesia lekas selesai, mengirimkan duta istimewa Sir Archibald Clark Kerr (duta Inggeris di Moskou) ke Indonesia.

Dalam pertemuan antara Sir A. Clark Kerr, van Mook dan P. M. Sutan Sjahrir pada tanggal 10-2-1946, Dr. van Mook menjampaikan keterangan resmi Pemerintah Belanda tentang kedudukan Indonesia dikemudian hari, antara lain :

a. Akan diadakan Gemenebest Indonesia, sekutu dalam keradjaan, tersusun dari negeri-negeri jang mempunjai hak memerintah diri sendiri dengan tingkatan jang berlainan satu dengan lainnja.

b. Akan diadakan kewargaan negara Indonesia untuk semua orang jang dilahirkan di Indonesia.

c. Soal-soal dalam negeri dari Gemenebest Indonesia akan diurus oleh badan Indonesia sendiri dengan merdeka. Untuk Gemenebest seluruhnja di tjiptakan suatu badan Perwakilan Rakjat dan seorang wakil mahkota sebagai Kepala Pemerintah.

Lain dari pada itu, kesediaan Pemerintah Sjahrir untuk berunding dengan pihak Serikat dan Belanda jang dianggap perlu untuk politik negara, ditentang setjara tadjam oleh Persatuan Perdjuangan jang dipimpin oleh Tan Malaka. Perlu diketahui, bahwa pada tanggal 4 Djanuari 1946 dengan Tan Malaka

sebagai promotor, telah dilangsungkan sebuah konperensi di Purwokerto jang achirnja dapat menghasilkan terbentuknja Persatuan Perdjuangan dengan 143 organisasi sebagai anggauta. Dalam permusjawaratannja di Solo tanggal 15 Djanuari 1946, Persatuan Perdjuangan berhasil membuat minimum program sebagai berikut :

1. Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%.
2. Pemerintah Rakjat.
3. Tentara Rakjat.
4. Melutjuti sendjata Djepang.
5. Mengurus tawanan bangsa Eropa.
6. Mensita dan menjelenggarakan pertanian (perkebunan).
7. Mensita dan menjelenggarakan perindustrian.

Persatuan Perdjuanganlah merupakan opposisi terhadap Kabinet Sjahrir.

Akibat opposisi dalam negeri jang sangat tadjam itu kabinet Sjahrir mengundurkan diri. Pada permulaan bulan Maret 1946 dalam sidang K.N.I.P. di Solo, Presiden menundjuk lagi Sutan Sjahrir untuk membentuk Kabinet baru dengan pokok program sebagai berikut :

1. Berunding atas dasar pengakuan Republik Indonesia Merdeka (100%).
2. Mempersiapkan rakjat Negara disegala lapangan politik, ketentaraan, ekonomi dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
3. Menjusun Pemerintahan Pusat dan Daerah jang demokratis.
4. Berusaha segiat-giatnja untuk menjempurnakan pembagian makanan dan pakaian.
5. Tentang perusahaan dan perkebunan hendaknja diambil tindakan-tindakan oleh Pemerintah seperlunja, hingga memenuhi maksud sebagai termaktub dalam Undang-Undang Dasar pasal 33.

Selandjutnja Kabinet terbentuk pada tanggal 12 - 3 - 1946 dan merupakan Kabinet ke III, jang disusun sebagai berikut :

1.	Perdana Menteri	Sutan Sjahrir
2.	Menteri Dalam Negeri	Dr. Sudarsono
	„ Muda Dalam Negeri	Samadikun
3.	Menteri Luar Negeri	Sutan Sjahrir
	„ Muda Luar Negeri	H. Agus Salim
4.	Menteri Kesehatan	Dr. Darmasetiawan
	„ Muda Kesehatan	Dr. J. Leimena
5.	Menteri Keuangan	Ir. R. P. Surachman
	„ Muda Keuangan	Mr. Safrudin Prawiranegara
6.	Menteri Pertanian dan Persediaan	Ir. Rasad *)
	„ Muda Pertanian dan Persediaan	Ir. Saksono *)
7.	Menteri Perdagangan dan Industri	Dr. Darmawan Mangunkusumo
8.	Menteri Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan	Mohamad Sjafei
	„ Muda Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan	Mr. Dr. T. G. Mulia

PERINGATAN : *) Kemudian Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, dan Kementerian Pertanian dan Persediaan digabungkan mendjadi satu Kementerian : Kementerian Kemakmuran Menteri Kemakmuran : Ir. Darmawan Mangunkusumo, Menteri Muda Kemakmuran : Ir. Saksono.

9. Menteri Kehakiman	Mr. R. Suwandi
„ Muda Kehakiman	Mr. Hadi
10. Menteri Pertahanan	Mr. Amir Sjarifuddin
„ Muda Pertahanan	Arudji Kartawinata
11. Menteri Penerangan	Mohamad Natsir
12. Menteri Sosial	Nj. Mr. Maria Ulfah Santosa
„ Muda Sosial	Mr. Abdulmadjid Djojoadhiningrat
13. Menteri Agama	H. Rasjidi B. A. (ad interim)
14. Menteri Perhubungan	Ir. Abdulkarim
„ Muda Perhubungan	Ir. Djuanda
15. Menteri Pekerdjaan Umum	Ir. Putuhena
„ Muda Pekerdjaan Umum	Ir. Laoh
16. Menteri Negara	Wikana

Dengan terbentuknja kabinet tersebut, maka pada tanggal 15 - 3 - 1946 diadakan pertemuan lagi antara Sir A. Clark Kerr, v. Mook dan P.M. Sutan Sjahrir. Walaupun menghadapi opposisi jang hebat, usaha-usaha menjelesaikan segala soal dengan Belanda dengan djalan perundingan tetap didjalankan.

Dalam perundingan itu Sir A. Clark Kerr mengandjurkan supaja phase terachir djangan dulu dibitjarakan, soal souvereiniteit djangan dulu digugat prinsipieel untuk menghindarkan djalan buntu lagi. Kita melihat keadaan jang njata dan pembitjaraan didasarkan atas kenjataan kekuasaan kedua belah pihak. Njata sudah, bahwa Sumatera, Djawa dan Madura kekuasaan Republik itu ada. Clark Kerr mendesak supaja diakui oleh Pemerintah Belanda dan di daerah-daerah lain jang belum njata kekuasaan itu nanti diadakan pemungutan suara.

Belanda tetap mengakui integriteit daerah Indonesia adalah Hindia Belanda dulu, artinja Indonesia tak dapat dipisah-pisah.

Dalam perundingan itu njata, bahwa Dr. v. Mook perlu pergi ke Negeri Belanda untuk berunding dengan Pemerintahnja bersama-sama dengan Sir Archibald Clark Kerr. P.M. Sjahrir kemudian menundjuk perutusan Republik jang terdiri atas Mr. Suwandi, Dr. Sudarsono dan Mr. A. K. Pringgodigdo untuk mewakili dalam perundingan dinegeri Belanda. Perundingan Indonesia - Inggeris-Belanda tentang soal susunan ketata negaraan jang dilakukan di Hoge Veluwe pada tanggal 23 — 24 April 1946 ternjata gagal.

Mr. Suwandi cs. kemudian pada tanggal 25 April 1946 kembali di Indonesia. Ikut serta dalam rombongan itu Maruto Darusman dan Setiadjid. Dalam pada itu Pemerintah Belanda memadjukan usul-usul baru sebagai berikut :

1. Mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari Common-wealth Indonesia jang berbentuk federal (Serikat).
2. Common-wealth Indonesia Serikat disatu pihak dengan Nederland, Gujama dan Antillen dilain pihak akan merupakan bagian-bagian dari keradjaan Belanda.
3. Pemerintah Belanda akan mengakui Republik Indonesia de facto, mengenai seluruh Djawa, Madura dan Sumatera, ketjuali daerah jang sudah diduduki oleh Inggeris dan Belanda.

Demikian van Mook kembali dari negeri Belanda dengan membawa usul-usul jang lebih rendah dari pada usul-usul semula, lebih rendah dari usulnja atau pertimbangan duta istimewa Inggeris Sir A. Clark Kerr. Usul-usul pertimbangan Clark Kerr jang disodorkan oleh v. Mook di Negeri Belanda sebagaimana diatas diuraikan, ditolak oleh Madjelis rendah Belanda.

Sikap Belanda telah ditegaskan, van Mook telah membawa sikap Belanda jang terachir dan telah djuga disampaikan kepada P.M. Sjahrir.

Atas usul-usul dari pihak Belanda tersebut dapat diwartakan bahwa Pemerintah Indonesia tak dapat menerima usul-usul Belanda tersebut dan P.M. Sjahrir telah menerima mandaat dari Kabinet dan Presiden untuk menjusun usul-usul balasan Pemerintah Indonesia kepada Belanda.

Demikianlah usaha disamping penjelesaian dengan pihak Belanda dilakukan setjara diplomasi, tentara Belanda kian hari makin meluaskan daerahnja dan menduduki kota-kota dalam daerah Republik Indonesia. Ketjuali itu pun Belanda mendapat kesempatan seluas-luasnja, dengan di serahkannja oleh pihak Inggeris kota-kota besar sepertinja Djakarta, Bandung, Surabaja dan Semarang. Karena tindakan-tindakan militer Belanda jang sewenang-wenang itu, sudah tentu dapat mempengaruhi penjelesaian dilapang diplomasi.

Berhubung dengan penolakan atas usul-usul pemerintah Belanda tsb. maka keadaan Udara politik mendjadi genting.

Dalam pada itu, ketjuali perhubungan dengan pihak Belanda mendjadi genting, ditambah lagi suasana keruh jang dialami oleh Kota Solo.

Berhubung dengan itu maka Presiden menjatakan, bahwa Daerah Kasunanan dan Mangkunegaran mulai tgl. 6 Djuni 1946 ada didalam Keadaan Bahaja, dan diumumkan pula Undang-Undang no. 6 tahun 1946 tentang Keadaan Bahaja.

Karena didalam Undang - Undang Keadaan Bahaja tsb. belum diadakan peraturan tentang susunan Dewan Pertahanan Daerah buat Daerah Istimewa di Djawa dan peraturan susunan itu harus segera ditetapkan, maka keesokan harinja pada tgl. 7 Djuni 1946 diumumkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 tahun 1946.

Ketjuali itu pun pada tgl. tsb. seluruh Djawa dan Madura dinjatakan dalam Keadaan Bahaja.

Keadaan dalam negeri suasananja makin lama mendjadi sulit dan tambah genting. Ketjuali tidak putus-putusnja menghadapi serangan, ketjuali dari luar, pun pula dari dalam. Dari luar, jaitu dari Belanda hendak mengembalikan pendjadjahannja atas Republik Indonesia. Dari dalam, jalah dengan timbulnja gerakan jang hendak memetjah, melemahkan dan merobohkan kekuasaan.

Demikianlah pada tgl. 27 — 28 Djuni 1946, terdjadilah pentjulikan oleh suatu gerombolan atas Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangunkusumo, Major Djenderal Sudibjo, Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan beberapa orang militer lainnja, waktu mereka berada di Solo. Segera kemudian Presiden Soekarno menjatakan seluruh Indonesia dalam Keadaan Bahaja dan dengan persetudjuan Kabinet pada tgl. 28 Djuni 1946 Presiden Republik mengambil kekuasaan Pemerintah sepenuh-penuhnja untuk sementara waktu.

Dalam pidato radio pada tgl. 30 Djuni 1946, Presiden Soekarno menjerukan agar supaja P.M. Sjahrir dan lain-lainnja di kembalikan dalam keadaan selamat. Atas seruan Presiden ini maka keesokan harinja djam 4 pagi P.M. Sjahrir cs. dengan selamat telah kembali di Jogjakarta.

2. PERISTIWA 3 DJULI 1946

SELANDJUTNJA pada tanggal 3 Djuli 1946 datanglah gerombolan orang - orang ke Presidenan untuk memaksa Presiden menanda tangani daftar susunan kabinet baru.

Berhubung dengan peristiwa ini, maka dalam harian Kedaulatan Rakjat tgl. 6 Djuli 1946 nomer 244 ada dimuat pengumuman jang isi selengkapnja seperti dibawah ini :

Pengumuman resmi Pemerintah Republik Indonesia
Perihal komplot untuk merebut kekuasaan negara

Sekarang telah ternjata seterang - terangnja, bahwa pentjulikan Perdana Menteri cs. di Solo tanggal 27 masuk 28 Djuni malam adalah suatu permulaan dari pada aksi Tan Malaka, Mr. Subardjo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Sukarni, Mr. Mohammad Yamin dll. untuk merebut kekuasaan negara dengan perkosa.

Komplotan mereka itu sudah lama diketahui oleh Pemerintah, dan inilah sebabnja maka beberapa bulan jang lalu Pemerintah menangkap Tan Malaka, Mohammad Yamin, Abikusno, Sukarni, Chairul Saleh dan Sajuti Melik. Berdasar atas pengetahuan itu, dan pula untuk mengetahui lebih landjut gerak-gerik mereka seterusnja, maka Pemerintah tidak mengumumkan alasan penangkapan tersebut.

Dalam pada itu mereka dalam tahanannja di Tawangmangu memperoleh kemerdekaan bergerak, sehingga mereka djuga dapat berhubungan dengan komplotan mereka seperti Mr. Subardjo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan lain-lainnja dan merantjang coup d'etat mereka.

Menarik partai-partai lain masuk komplotan

Mr. Subardjo dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri mengerdjakan perhubungan dengan lain-lain tempat. Mereka djuga mentjoba-tjoba menarik partai-partai lain masuk komplotan mereka dan mentjoba mempengaruhi tentera dan pasukan-pasukan rakjat dengan menggambarkan jang bukan-bukan tentang Kabinet Sjahrir. Dengan mempergunakan berita-berita penghasut dalam surat kabar „Het Dagblad" surat kabar jang diterbitkan oleh Nica di Djakarta, ditanamnja ratjun didalam kalbu beberapa pemimpin pasukan supaja pertjaja, bahwa Kabinet Sjahrir telah mendjual Indonesia kepada Belanda, telah menerima pendjadjahan Belanda katanja. Kekatjauan-kekatjauan didaerah Solo adalah djuga usaha mereka dari belakang lajar.

Diantara opsir tentera jang dapat dibudjuknja ialah bekas kepala divisi Jogja Sudarsono, jang sekarang telah disekores. Sesungguhnja Sudarsono ini telah lama ditjurigai, maupun dari pihak tentera ataupun dari pihak rakjat.

Penangkapan besar-besaran dokumen-dokumen dibeslag

Coup d'etat, jaitu serobotan kekuasaan oleh mereka dapat didahului oleh Pemerintah, dengan mengadakan penangkapan besar-besaran.

Surat-surat dan dokumen jang dapat dibeslag, menjatakan bahwa mereka telah siap dengan susunan pemerintahannja. Tanggal 3 Djuli Presiden Republik Indonesia akan dipaksa memberhentikan apa jang disebut mereka „Kementerian Negara Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin" dan serentak dengan itu dipaksa Presiden menanda tangani daftar susunan „Dewan Pimpinan Politik" dan susunan „Kementerian Negara baru".

Rol Kepala Divisi Sudarsono

Rupanja bekas kepala divisi Jogja, Sudarsono diserahi dengan melakukan tindakan itu. Dengan mentjatut nama Panglima Besar, dia pada tgl. 3 Djuli itu, datang di Kepresidenan dengan membawa gerombolannja jang akan mempersaksikan coup d'etatnja. Kebanjakan mereka jang dibawanja itu ialah orang-orang jang telah ditangkap oleh Pemerintah, jang pagi itu dilepaskannja dari tahanan. Diantara mereka terdapat beberapa tjalon „Menteri baru". Dan pagi itu ada pertjobaan untuk mentjulik Menteri Pertahanan, Mr. Amir Sjarifuddin. Sjukurlah Mr. Amir Sjarifuddin dapat meloloskan diri. Tetapi dengan masgul kita menerangkan disini, bahwa dua orang pemuda kita jang mendjaga keselamatan Menteri Pertahanan telah tewas dalam mendjalankan kewadjibannja. Dengan penuh hormat kita memperingati arwah pahlawan-pahlawan ini.

Presiden tidak dapat digertak

Sudarsono dilutjuti sendjatanja, dan dia dengan pengikut - pengikutnja ditahan.

Komplotan Tan Malaka cs. ini akan melakukan perampasan kekuasaan Negara dengan sebulat-bulatnja dalam dua tingkat. Tudjuannja jang terachir ialah menjingkirkan Bung Karno.

Dalam tindakan pertama akan menjingkirkan pemimpin-pemimpin negara dari mulai Wakil Presiden kebawah. Presiden dan Panglima Besar akan mereka pergunakan sementara waktu. Kalau mereka merasa sudah tjukup kuat, lalu disingkirkan pula Bung Karno dan Panglima Besar. Maka dengan itu bulatlah segala kekuasaan di tangan Tan Malaka — Subardjo — Iwa Kusuma Sumantri — Moh Yamin — Sukarni dan kawan-kawannja.

Daftar „Dewan Pimpinan Politik" dan „Kementerian Negara baru" jang akan dipaksakan kepada Presiden menandatangani adalah seperti berikut :

I. DEWAN PIMPINAN POLITIK :

1. Buntaran Martoatmodjo.
2. Budhyarto Martoatmodjo.
3. Chairul Saleh.
4. Gatot.
5. Iwa Kusuma Sumantri.
6. Mohammad Yamin.
7. Subardjo.
8. Sunarjo.
9. Tan Malaka.
10. Wahid Hasjim.

II. KEMENTERIAN NEGARA:

1.	Menteri Dalam Negeri	:	Budhyarto.
2.	Menteri Luar Negeri	:	Subardjo.
3.	Menteri Pertahanan	:	akan disiarkan.
4.	Menteri Kehakiman	:	Supomo.
5.	Menteri Kemakmuran	:	Tan Malaka.
6.	Menteri Agama	:	Wahid Hasjim.
7.	Menteri Sosial	:	Iwa Kusuma Sumantri.
8.	Menteri Bangunan Umum	:	Abikusno Tjokrosujoso.
9.	Menteri Keuangan	:	A. A. Maramis.
10.	Menteri Kesehatan	:	Buntaran Martoatmodjo.
11.	Menteri Pengadjaran	:	Ki Hadjar Dewantara.
12.	Menteri Penerangan dan Pengadjaran	:	Mohammad Yamin.
13.	Menteri Perhubungan	:	Roosseno.

MENTERI NEGARA:

1. Chairul Saleh.
2. Faturrachman.
3. Gatot.
4. Kartono.
5. Patty.
6. Sukiman.
7. Sunarjo.
8. Sartono.
9. Samsu H. Udaja.
10. Sukarni Kartodiwirjo.
11. Djody.
12. Moh. Saleh.

Pemerintah jakin, bahwa beberapa orang jang ditaruh namanja dalam daftar Kementerian diatas, belum tahu menahu bahwa nama mereka dipakai untuk keperluan suatu komplotan merobohkan Pemerintah. Tetapi daftar itu tjukup memberi gambaran, betapa luasnja komplotan mereka. Pemerintah tidak ingin menghukum orang jang tidak bersalah, tetapi djika perlu Pemerintah akan meminta keterangan kepada mereka jang namanja tersebut dalam daftar Kementerian tersebut.

Dimulai sedjak 31 - 10 - 1945

Komplotan untuk mendudukkan „Presiden Tan Malaka" mendadi kepala Negara Republik Indonesia telah bermula sedjak tanggal 31 Oktober 1945 sedjak Sukarni datang kepada Wakil Presiden mengusulkan supaja Bung Karno diganti sadja dengan Tan Malaka, sebab menurut anggapannja, djiwa Tan Malaka lebih tjotjok dengan revolusi Indonesia sekarang.

„Persatuan Perdjuangan" didirikan

Karena maksudnja itu tidak berhasil, maka didirikan „Persatuan Perdjuangan" dengan udjud memobilisasi segala partai-partai dan badan-badan perdjuangan rakjat terhadap Pemerintah. Partai-partai jang tergabung diikat dengan disiplinnja „minimum-program" jang tudjuh pasal.

Sedjak lahirnja „Persatuan Perdjuangan" ini pada tanggal 4 Djanuari 1946 di Purwokerto, maka timbullah perpetjahan. Persatuan jang bulat antara Pemerintah dan Rakjat dadi petjah rupanja. Hal ini menguntungkan kepada Nica, merugikan kepada Republik Indonesia. Partai-partai besar dihasut untuk mengerojok Pemerintah.

Pada sidang K.N.I. Pusat di Solo pada penghabisan bulan Pebruari, dalang-dalang Persatuan Perdjuangan ini telah bersedia untuk mengadakan „staatsgreep". Usaha itu gagal karena keawasan Pemerintah, dan djuga karena diantara partai-partai „Persatuan Perdjuangan" itu sendiri tidak didapat kesesuaian.

Kebiasaan Internasional

Sudah menurut kebiasaan internasional, bahwa tiap-tiap perundingan dilakukan antara negara dengan negara tidak diumumkan, sebelum tertjapai hasilnja.

Hasil itu mendjadi „verdrag", jakni perdjandjian atau kosong sama sekali, jaitu tidak mendapat persetudjuan.

Kalau hasil perundingan mendjadi rantjangan „verdrag" maka „verdrag" itu diumumkan oleh kedua belah pihak, supaja diketahui oleh rakjat kedua belah negara, supaja rakjat mereka itu dapat membanding dan menimbang.

Sebelum „verdrag" itu diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat — pada kita sekarang K.N.I. Pusat — dan sebelumnja ditanda tangani oleh Kepala Negara, „verdrag" itu belum lagi mendjadi perdjandjian jang mengikat negara.

Djika sebaliknja permusjawaratan itu tidak berhasil, maka kedua belah pihak biasanja mengeluarkan suatu buku keterangan Pemerintah untuk diumumkan, jang didalamnja diterangkan djalan permusjawaratan dengan menjatakan apa sebab gagalnja.

Digunakan sebagai alat agitasi

Perundingan tentang Kemerdekaan Indonesia jang dilakukan oleh Pemerintah kita di Djakarta tak lain sifatnja.

Semuanja ini diketahui oleh Tan Malaka cs. Tetapi tjara dan adat berunding internasional itulah jang dipergunakan mereka sebagai alat agitasi untuk mendjatuhkan Pemerintah. Dengan setjara hasutan dalam surat kabar dan dari mulut kemulut dikatakan, bahwa perundingan dirahasiakan karena Perdana Menteri Sutan Sjahrir mau „mendjual rakjat Indonesia" kepada Belanda, mau menerima kembali pendjadjahan, katanja.

Seorang jang telah berani menebus tjita-tjita kemerdekaan Indonesia sampai dibui dan dibuang ke Digul, dituduh pengchianat oleh segerombolan orang sebagai Mr. Subardjo, Mr. Budhyarto, Dr Buntaran, Mr. Gatot jang sampai sekarang hanja ternjata sebagai „salonpoliticus" belaka.

Bersedia menerima „Trusteeship"

Malahan sebagai Menteri Luar Negeri Mr. Subardjo dalam bulan Oktober 1945 telah bersedia menerima „Trusteeship" internasional, tetapi dapat ditjegah oleh Wakil Presiden dan Hadji Agus Salim.

Djuga Tan Malaka sendiri pada satu pertemuan dirumah Mr. Subardjo dalam bulan September 1945 telah menjatakan kerelaannja dengan „Trusteeship" itu.

Belanda menghasut

Surat kabar dan radio Belanda melantingkan kabar untuk menghasut kita dan memetjah kita. Dikatakan, bahwa Pemerintah kita dalam kontra-usulnja

hanja meminta pengakuan tentang kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Djawa dan Sumatera.

Kabar bohong ini dipergunakan mereka sebagai alat menghasut rakjat terhadap Pemerintah.

Buku keterangan Pemerintah

Pemerintah nanti akan mengeluarkan buku Keterangan Pemerintah tentang djalannja perundingan dengan Belanda.

Untuk sementara waktu tjukuplah djika diterangkan sebagai berikut:

Kita mengusulkan supaja Belanda menjetudjui Negara Indonesia jang merdeka, jang batasnja meliputi seluruh batas Hindia Belanda dahulu. Kalau itu disetudjui maka dimulai dengan mengakui kekuasaan jang njata, daripada Republik Indonesia atas Djawa dan Sumatera. Selandjutnja Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda bekerdja bersama-sama memasukkan daerah jang lainnja itu kedalam Republik Indonesia.

Antara Negara Republik Indonesia jang merdeka dan Nederland jang merdeka akan diadakan suatu perdjandjian bersahabat.

Kontra usul itu tetap didasarkan atas Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 Nopember 1945 dan tetap menuntut kemerdekaan Indonesia jang sepenuh-penuhnja.

Demikianlah supaja rakjat dapat mengetahui tipu muslihat Tan Malaka cs. untuk merebut kekuasaan Negara. Tidak ada djalan jang kedji bagi mereka.

Rakjat insjaflah!

Pemerintah akan bertindak terus, mempergunakan segala kekuasaan jang ada padanja, untuk membasmi aliran perusak dan kontra revolusioner ini dengan akar-akarnja.

Dengan mengingat seruan Presiden kita dalam pidato radionja tanggal 30 Djuni 1946, berhubung dengan pentjulikan Perdana Menteri, maka kepada seluruh rakjat diharapkan membantu Pemerintah dalam hal ini.

Kalau ada nanti seruan Pemerintah untuk menundjukkan tempat orang jang ditjari, haraplah menolong mentjari dan menundjukkan.

*

K.N.I.P. setudju

Dalam sidangnja tgl. 8 Djuli 1946, rapat pleno K.N.I.P. menjetudjui seluruh kekuasaan kembali ditangan Presiden, selama keadaan biasa belum kembali.

Oleh karena keadaan dalam negeri telah kembali sebagai biasa, maka Presiden Soekarno dalam sidang kabinet pada tgl. 14 - 8 - 1946 menundjuk Sdr. Sjahrir sebagai formatir kabinet nasional.

Gentjatan sendjata dibitjarakan

DEMIKIANLAH pada tanggal 25 - 8 - 1946 telah tiba di Jogjakarta, Lord Killearn dengan diiringi oleh beberapa orang dari Foreign Office, diantaranja Mr. Tichner dan Mr. Murray.

Kedatangan beliau disambut oleh Wakil Presiden, Menteri L. N. Sutan Sjahrir dan para Menteri lainnja.

Tentang pertemuan Sjahrir — Killearn, Dr. Subandrio dan Murray dari Kementerian Luar Negeri Inggeris, mengeluarkan kominike bersama sbb.:

Dalam perundingan tersebut kedua pihak telah menundjukkan kemauannja (goodwill), sedang keterangan-keterangan jang diperlukan oleh kedua pihak pun sudah djelas. Adapun pokok perundingan jang mungkin dikemudian hari dapat dibitjarakan lebih landjut jalah:

1. **Tentang gerakan militer dari kedua pihak.** Beberapa opsir T.R.I. akan dikirimkan ke Djakarta untuk membitjarakan „technische details" dengan Markas Besar Serikat. Lord Killearn sanggup membitjarakan hal ini dengan pihak jang bersangkutan.
2. **Tentang pengangkutan Apwi,** Sjahrir sanggup mendjamin terlaksananja dan 3 orang opsir T.R.I. selekas mungkin akan dikirimkan untuk membitjarakannja dengan pihak Inggeris.
3. **Tentang perhubungan kita dengan bangsa India dan Tionghoa.** Sjahrir menjatakan tetap akan melindungi sepenuhnja penduduk bangsa India dan Tionghoa di Indonesia.

Pada tgl. 15 - 9 - 1946 Dr. Koets, Kepala Kabinet Gubernur Djenderal „Hindia Belanda" beserta Van der Meer wakil Internatio, Dr. Honig pegawai tinggi „Economische Zaken", Teunissen wakil Javasche Bank, van Goudoever, pegawai tinggi R.V.D. dan prof. de Langen, Ketua Nooduniversiteit telah datang di Jogjakarta dan menghadap Wakil Presiden di Istana Presiden.

Dalam suatu pertemuan Dr. Koets kepala rombongan menerangkan, bahwa kedatangannja di Jogja ini tidak bersifat resmi. Dia telah menjampaikan kepada wakil Presiden hasil perundingan antara Dr. van Mook dan wakil-wakil Pemerintah Republlk Indonesia jang diadakan di Djakarta pada tgl. 11 - 9. Dalam perundingan tersebut telah dibitjarakan tentang tjara-tjara untuk memudahkan landjutan perundingan Indonesia — Belanda sesudah kedatangan Komisi Djenderal.

Lebih djauh Dr. Koets menerangkan bahwa kundjungannja itu djuga bermaksud menindjau serta melihat keadaan daerah Republik dengan mata sendiri.

Pembitjaraan tentang gentjatan perang jang diadakan di Djakarta, antara Markas Besar Serikat dan delegasi Indonesia jang dikepalai oleh Djenderal Major Sudibjo menemui djalan buntu setelah dua kali diadakan jaitu pada tanggal 20 dan 26 bulan September 1946. Seperti diketahui gentjatan perang tersebut adalah sebagai pendahuluan bagi perundingan Indonesia — Belanda. Perundingan antara kedua delegasi itu gagal karena kedua belah pihak tidak mendapat persetudjuan tentang hal-hal mana jang mengenai militer dan mana jang mengenai politik.

Utusan Indonesia memadjukan sjarat-sjarat seperti tersebut dibawah ini sebagai dasar gentjatan perang:

1. Gentjatan perang berlaku untuk seluruh Indonesia, baik didarat, dilaut maupun diudara;
2. Penghentian pemasukan tentara Serikat dan/atau Belanda ke - Indonesia selama gentjatan perang berlaku;
3. Djaminan dari Serikat, bahwa tidak ada penjerahan sendjata oleh Serikat kepada pihak Belanda, baik setjara langsung maupun setjara tidak langsung;
4. Pembukaan dan kebebasan memakai segala djalan lalu-lintas, baik didarat, dilaut maupun diudara;
5. Penjingkiran orang-orang bangsa Djepang, baik militer maupun sipil, dari seluruh Indonesia;

Ketika pertemuan pertama pada tanggal 20 September, utusan Serikat menolak pembitjaraan 5 pasal jang dimadjukan oleh pihak Indonesia, karena pihak Serikat berpendapat, bahwa hal-hal itu mengenai politik, bukan militer. Pertemuan ditunda dan Djenderal Major Sudibjo menjampaikan pendapat Serikat ini kepada Pemerintah Indonesia di Jogjakarta.

Djenderal Major Sudibjo dikatakan supaja tetap memegang instruksi bermula dan beliau mendjelaskan hal ini kepada Markas Besar Serikat didalam pertemuan kedua jang diadakan pada tanggal 26 September 1946. Sebuah nota

jang diberikan pada waktu itu oleh delegasi Indonesia mendjelaskan pendirian Republik Indonesia ini. Isi nota tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kewadjiban jang diserahkan kepada utusan militer ialah : mentjapai perdjandjian truce dengan pihak Sekutu, supaja suasana baik untuk melandjutkan perundingan dengan Belanda dapat diperoleh.

Menurut anggapan utusan militer Indonesia maka truce jang sedemikian hanja dapat tertjapai, kalau segala hal jang dapat menimbulkan dan menambah perasaan permusuhan disingkirkan.

Dalam pada itu kedua belah pihak mesti berhak mengusulkan usul-usul jang benar-benar berarti perhentian pertempuran disertai garansi (djaminan) tidak ada hal lagi jang dari sudut militer menimbulkan perasaan permusuhan serta pula segala hal jang dapat mendjamin security (keamanan) lasjkar-lasjkar jang bersangkutan.

2. Walaupun utusan militer Indonesia faham sekali bahwa kaum militer tidak boleh tjampur dengan hal politik, maka toch utusan militer Indonesia kurang mengerti apa sebabnja dari pihak Sekutu beberapa dasar dari truce jang dimadjukan oleh kita dianggap semata-mata soal politik. Jang mengherankan kepada utusan militer Indonesia ialah sjarat jang dikemukakan tentang pemasukan tentara Belanda baru.

Hal itu disebut politik, sedangkan tiap-tiap orang akan mengerti bahwa satu truce tidak dapat didjalankan, kalau tidak ditetapkan dahulu, bahwa dari kedua belah pihak tidak akan ada peraturan jang memungkinkan serangan setjara besar-besaran. Kami minta malahan perhatian pihak Sekutu tentang pasal c paragraf 2 dari nota truce jang diserahkan kepada kita.

3. Alasan bahwa mendatangkan tentara Belanda baru adalah replacement biasa sebagai ditegaskan oleh Serikat tidak masuk akal sama sekali. Sebab tentara Sekutu (c.q. Inggeris) jang mengundurkan diri itu dan jang akan diganti oleh Belanda, jalah mengundurkan diri sebab kewadjibannja sudah selesai, jaitu menjelesaikan akibat perang di Indonesia ini. Dan mengherankan sekali kalau kewadjiban jang sudah habis mesti memerlukan tentara baru lagi : Alasan kami ini bukan alasan politik, tetapi militer semata-mata.

4. Mungkin sekali ada akan dikemukakan tentara itu perlu untuk mendjaga keamanan umum. Perlu diterangkan disini bahwa jang sedemikian memang berarti politik tetapi pun alasan itu dapat dibantah. Pertama : Kalau tentara Sekutu jang ada kewadjiban istimewa itu berangkat, maka tentara Belanda jang datang kemari itu mendjalankan kewadjiban lepas dari pada segala kewadjiban jang diserahkan Sekutu dan kedua : kalau demikian kami boleh bertanja : Apa perlunja Belanda mendatangkan tentara begitu besar — lebih daripada dizaman dahulu — kalau tidak untuk mengadakan perang setjara besar-besaran ?

5. Utusan militer Indonesia pun mengemukakan soal kebebasan lalu lintas didarat, dilaut dan diudara. Hal jang demikian bukan berarti politik semata-mata. Tindakan Belanda dilaut pada waktu belakangan ini sudah mengenai pengiriman barang Pemerintah kami ; mengenai makanan jang perlu dikirim kebagian tentara Indonesia jang ada di Madura, persiapan barang jang perlu untuk rakjat dan Pemerintah ! Beberapa tjontoh dapat kami lampirkan disini. Pertama kali : Segala tindakan demikian itu kami anggap sebagai tindakan permusuhan, jang kalau diperbolehkan terus tidak akan menimbulkan suasana jang dikehendaki untuk meneruskan perundingan. Kedua : kalau tindakan demikian diteruskan bukanlah principe bahwa maintenance of normal relief dan normal supplying tidak diakui buat pihak Indonesia dan diakui buat Sekutu c. q. Belanda ?

6. Jang mendjadi soal pula ialah bahwa dari pihak kami dimadjukan truce itu berlaku buat seluruh Indonesia. Utusan militer Indonesia mengetahui bahwa formeel Sekutu dibeberapa daerah luar kepulauan Djawa dan Madura tidak mempunjai apparaat militer. Tetapi keberatan jang formeel itu mesti disingkirkan kalau dikemukakan bahwa jang mendjadi persoalan ialah : menghentikan pertempuran antara bangsa Indonesia dan Belanda, supaja perundingan politik boleh berdjalan terus. Dapatkah diungkiri bahwa di Bali masih ada pertempuran bahwa di Sulawesi Selatan ada pertempuran dan bahwa pertempuran itu adalah antara Belanda dan Indonesia ? Ataukah kita dipaksa bermain sandiwara sadja dengan berunding dengan Belanda untuk mentjapai agreement dengan tidak mau mengetahui realiteit jang benar ? Oleh sebab itu utusan militer Indonesia berpendapat, bahwa berlakunja truce buat seluruh Indonesia adalah dasar perlu sekali.

7. Jang sangat mengherankan utusan militer Indonesia ialah pendapatan pihak Sekutu tentang adanja Djepang di Indonesia. Utusan militer Indonesia meminta sebagai sjarat gentjatan perang supaja mereka dikeluarkan dari Indonesia. Bahwa masih ada ratusan Djepang jang masih bersendjata di Indonesia ini tidak dapat diungkiri oleh siapapun djuga. Sesungguhnja tidak pada tempatnja utusan militer Indonesia meminta penjingkiran Djepang itu oleh Sekutu selekas mungkin, sebab dari permulaan berkali-kali diterangkan oleh Sekutu sendiri bahwa salah satu kewadjiban Sekutu ialah menjingkirkan Djepang dari Indonesia. Tambah lagi keheranan utusan militer Indonesia kalau dipertimbangkan bahwa kewadjiban jang diserahkan kepada Tentara Indonesia untuk menjingkirkan Djepang dari Djawa Tengah dan Djawa Timur sudah berbulan-bulan selesai.

Alasan bahwa Djepang masih perlu dipakai buat kuli tidak berharga: pekerdjaan mereka sebagai kuli mungkin berarti buat kepentingan militer, seperti pekerdjaan membuat benteng-benteng, perhubungan militer dan sebagainja. Dan kalau didaerah Djawa Barat, jang penduduknja begitu padat Sekutu masih membutuhkan tenaga Djepang maka dengan sesungguhnja orang ramai bertanja : Apakah bukan buat keperluan istimewa mereka ditahan disini ?

8. Segala hal ini dikemukakan oleh utusan militer Indonesia dengan satu kehendak : mentjapai satu truce jang sungguh menjehatkan suasana antara Belanda dan Indonesia. Mungkin menurut pendapat pihak militer Sekutu tjara kami bekerdja tidak tjotjok dengan tjara bekerdja Sekutu, jang selalu hendak memisah soal politik dan militer. Oleh sebab itu kami djelaskan pendirian kami dan seterusnja sudah kami sampaikan keberatan pihak Sekutu kepada Menteri Luar Negeri, jang akan mengadakan perhubungan langsung dengan pembesar jang bersangkutan. Sebab kami ingin truce itu tertjapai walaupun melalui djalan jang lain.

Demikianlah nota jang disampaikan oleh delegasi Indonesia kepada Markas Besar Serikat. Menteri Pertahanan berkejakinan teguh, bahwa djika lima pasal jang dikemukakan oleh pihak Indonesia tidak diterima sebagai sjarat minimum, maka gentjatan perang jang tertjapai akan merugikan Republik dan menguntungkan Belanda.

Sekedar memberi tjontoh : mengapakah tawanan Djepang dipersendjatai dan dipergunakan terang-terangan oleh Serikat terhadap Indonesia 1 tahun 1 bulan dan 16 hari sesudah Djepang menjerah ? Dan apakah sebabnja Markas Besar Serikat jang katanja datang ke Indonesia melutjuti dan menjingkirkan semua tawanan Djepang memberi kesempatan untuk itu kepada Belanda ? Tetapi walaupun demikian tentara Republik Indonesia jang mentjintai perdamaian akan menundjukkan goodwillnja supaja perselisihan politik diselesaikan setjara damai dalam perundingan.

*

Maklumat Presiden No. 2 Tahun 1946

OLEH karena dalam Negeri telah kembali biasa sehingga Kabinet dan lain-lain Badan resmi dapat bekerdja sebagaimana mestinja, maka dengan ini Maklumat Presiden No. 1 tahun 1946 kami tjabut.

Jogjakarta, djam 11.00
Tanggal 2 Oktober 1946
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEKARNO.

Kabinet nasional jang disusun oleh Sutan Sjahrir telah selesai dibentuk dan diumumkan tanggal 2 Oktober 1946. Seperti diatas telah ditjantumkan, pada tanggal 14-8-1946 Presiden telah menundjuk Sutan Sjahrir sebagai formatir Kabinet nasional. Satu setengah bulan lamanja Sutan Sjahrir berusaha membentuk Kabinet itu dan 1½ bulan pula rakjat merasa agak gelisah menunggu-nunggu bentukan kabinet itu, adapun kegelisahan rakjat itu tak dapat disalahkan, sebab keadaan politik dinegeri kita pada waktu itu makin lama makin hangat, apalagi berhubung akan dilangsungkannja perundingan dengan pihak Belanda.

Sutan Sjahrir selama 1½ bulan telah membanting tulang agar dapat membentuk kabinet jang kuat sesuai dengan keinginan rakjat dan tjotjok pula dengan suasana politik pada waktu itu. Usaha Sjahrir boleh dikata berhasil dan dengan Maklumat Presiden No. 3 tahun 1946 Kabinet Sjahrir ke 3 diumumkan jang susunannja sebagai berikut:

1.	Perdana Menteri	Sutan Sjahrir	Sosialis
2.	Menteri Luar Negeri	Sutan Sjahrir	Sosialis
3.	„ Muda Luar Negeri	H. A. Salim	Masjumi
4.	Menteri Dalam Negeri	Mr. Moh. Rum	Masjumi
5.	„ Muda Dalam Negeri	Wijono	B. T. I.
6.	Menteri Kehakiman	Mr. Susanto Tirtoprodjo	P. N. I.
7.	„ Muda Kehakiman	Mr. Hadi	
8.	Menteri Keuangan	Mr. Safrudin Prawiranegara	Masjumi
9.	„ Muda Keuangan	Mr. Lukman Hakim	P. N. I.
10.	Menteri Kemakmuran	Dr. A. K. Gani	P. N. I.
11.	„ Muda Kemakmuran	Mr. Jusuf Wibisono	Masjumi
12.	Menteri Kesehatan	Dr. Darmasetiawan	—
13.	„ Muda Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
14.	Menteri Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan	Mr. Suwandi	—
15.	Menteri Muda Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan	Ir. Gunarso	—
16.	Menteri Sosial	Nj. Mr. Maria Ulfah Santosa	Perwari + P.N.I.
17.	„ Muda Sosial	Mr. Abdulmadjid Djojoadhiningrat	Sosialis
18.	Menteri Agama	H. Faturrachman	Masjumi
19.	Menteri Pertahanan	Mr. Amir Sjarifuddin	Sosialis
20.	„ Muda Pertahanan	Harsono Tjokroaminoto	Masjumi
21.	Menteri Penerangan	Moh. Natsir	Masjumi
22.	„ Muda Penerangan	A. R. Baswedan	—

23.	Menteri Perhubungan	Ir. Djuanda	—
24.	„ Muda Perhubungan	Setiadjid	P. B. I.
25.	Menteri Pekerdjaan Umum	Ir. Putuhena	Parkindo
26.	„ Muda Pekerdjaan Umum	Ir. Laoh	P. N. I.
27.	Menteri Negara	S. P. Hamengku Buwono IX	—
28.	„ „	Wachid Hasjim	Masjumi
29.	„ „	Wikana	Pesindo
30.	„ „	Dr. Sudarsono	Sosialis
31.	„ „	Mr. Tan Po Gwan	—

Lebih landjut dapat dikemukakan, bahwa pelantikan dan sidang pertama kabinet baru itu dilangsungkan pada tanggal 5 - 10 - 1946 malam ditempat kediaman Residen Tjirebon dan pelantikan dilakukan oleh Presiden Soekarno.

Dalam rapat jang pertama setelah kabinet baru dilantik pada tanggal 5 - 10 - 1946 djam 20.00 Presiden Soekarno telah menundjuk Perdana Menteri Sutan Sjahrir sebagai ketua Delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Komisi Djenderal Belanda.

Susunan Delegasi tersebut adalah sebagai berikut :

Ketua : Sutan Sjahrir, Anggauta : Mr. Moh. Rum, Dr. A. K. Gani dan Mr. Susanto Tirtoprodjo.

Sedangkan anggauta tjadangan jalah: Mr. Amir Sjarifuddin, Dr. Sudarsono dan Dr. Leimena.

Adapun sebagai dasar jang diambil untuk pokok perundingan jalah politik program Pemerintah jang terdiri atas 5 pasal.

* *
*

3. KONPERENSI INDONESIA — TIONGHOA

DALAM tahun kedua dari Negara Republik Indonesia dimana Pemerintah mengadakan konsolidasi didalam segala lapangan, maka perhatian Pemerintah dengan segera ditudjukan kepada soal bangsa asing, jang hidup ditanah air kita. Bukanlah Rakjat Indonesia berani memproklamasikan kemerdekaan, berarti djuga bahwa Pemerintah jang dipilih oleh rakjatnja dapat memperlakukan segala bangsa asing jang ada ditanah air kita menurut dasar-dasar jang termaktub didalam Undang-Undang kita dan politik manifest dari Pemerintah pada tanggal 1 Nopember 1945.

Dalam tahun pertama segala fikiran dan tenaga dari rakjat dan Pemerintah ditudjukan kepada: merebut kekuasaan dari Djepang, menanam dasar-dasar dari negara Republik Indonesia dan membentuk pertahanan tanah air terhadap agresi dari luar. Dapat dikatakan, bahwa Pemerintah dapat mendjamin keselamatan bangsa asing.

Disana-sini memang ada kedjadian-kedjadian jang tidak menjenangkan, akan tetapi segala kesusahan ini tidak hanja mengenai bangsa asing, banjak dari kalangan bangsa Indonesia djuga mendjadi korban didalam revolusi ini.

Peristiwa jang menjedihkan seperti di Tanggerang jang disesalkan oleh Pemerintah dan rakjat Indonesia didjaga djangan sampai dapat terulang, bagaimana djuga besarnja provokasi jang didjalankan oleh Belanda. Negara Republik Indonesia telah mendjadi kenjataan tidak hanja untuk rakjatnja sendiri, tetapi djuga untuk dunia luar. Pun Pemerintah Belanda, meskipun selalu terlambat, mengakui adanja Republik Indonesia sebagai sesuatu realiteit jang dengan begitu sadja tak dapat diabaikan.

Meskipun masih banjak rintangan-rintangan teristimewa dari luar, Pemerintah terus berusaha untuk mendjalankan kewadjibannja sebagai negara jang merdeka terhadap bangsa asing. Didalam kalangan bangsa asing, maka penduduk Tionghoa mempunjai tempat jang luas dan penting sekali.

Luas dalam arti banjak djumlahnja, dan penting berhubung dengan kedudukan mereka sebagai pedagang dan pemilik perusahaan, baik ketjil maupun besar.

Maka berhubung dengan itu oleh Pemerintah dikandung maksud mengadakan konperensi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Tionghoa. Didalam konperensi tersebut soal-soal jang dibitjarakan jalah: perekonomian, kesosialan (pengungsian), pengadjaran, keamanan.

Dengan dada terbuka segala fikiran dikemukakan oleh karena hanja dengan djalan demikian Pemerintah dapat mengambil tindakan jang tjepat dan tepat untuk manfaatnja bangsa Tionghoa chususnja dan Negara Republik Indonesia umumnja. Sebagai penjelenggara konperensi telah dipilih Saudara: Tji Sam Kong (Ketua C. H. T. H.) sebagai Ketua, dan Sdr. Harjoto dari Kempen sebagai Wakil Ketua.

Konperensi pendahuluan Indonesia — Tionghoa

Demikianlah, di Jogjakarta sedjak tanggal 16 — 17 - 9 - 1946 sebelum konperensi resmi Indonesia — Tionghoa dilangsungkan, terlebih dahulu diadakan konperensi pendahuluan didua tempat, ialah digedung C.H.T.H. untuk bangsa Tionghoa dan di Kepatihan untuk bangsa Indonesia.

Seluruh daerah mengirimkan wakilnja, baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak Tionghoa.

Dalam konperensi pendahuluan ini diperbintjangkan praeadvies-praeadvies tentang pendidikan, keamanan, perekonomian, sosial dan lain-lainnja untuk bahan perundingan dalam konperensi.

Indonesia — Tionghoa bahu - membahu

Setelah diadakan konperensi pendahuluan dari kedua belah pihak sendiri-sendiri pada tanggal 16 dan 17 September, konperensi Indonesia — Tionghoa dimulai pada tanggal 17 - 9 malam bertempat dipendopo Kepatihan. Resepsi sebagai pendahuluan konperensi dihadliri oleh Wakil Presiden, para Menteri, Panglima Besar Sudirman, Ketua D. P. A. Wiranata Kusumah, para Gubernur, S. P. Sultan, S. P. Paku Alam dan Wakil-wakil Badan-badan.

Setelah dinjanjikan lagu kebangsaan Indonesia dan Tionghoa rapat dibuka oleh Ketua Panitya Sdr, Tjie Sam Kong. Pimpinan rapat selandjutnja diserahkan kepada Kementerian Penerangan sebagai Wakil Pemerintah.

Sdr. Tabrani jang memimpin sidang itu seterusnja menjatakan, bahwa memang telah mendjadi kewadjiban Pemerintah untuk mengabulkan permintaan, jang timbul dari kedua belah pihak itu. Pada tahun pertama setelah dimulainja revolusi nasional pada tanggal 17 - 8 - 1945 Pemerintah belum mendapat kesempatan untuk memikirkan hal-hal jang mengenai pembangunan dan kedudukan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Baru dalam tahun kedua, setelah keadaan masjarakat agak teratur, dapatlah dimulai memperhatikan kedudukan bangsa asing disini. Golongan Tionghoa sedjak dahulu mempunjai kedudukan jang terutama, dibandingkan dengan kedudukan golongan-golongan lainnja, oleh karena mereka turut djuga menentukan djalannja perekonomian dan lain-lainnja. Dengan golongan itulah harus terlebih dahulu ditentukan garis-garisnja jang menudju kearah kerdja bersama sesuai dengan tjita-tjita segenap bangsa Indonesia, seperti telah termaktub dalam Undang-undangnja.

Amanat wakil Presiden Moh. Hatta

Wakil Presiden Moh. Hatta dalam amanatnja menjatakan, bahwa kedudukan bangsa Tionghoa di Indonesia memang menimbulkan berbagai-bagai kesukaran, jang harus dihadapi oleh Pemerintah dan oleh golongan Tionghoa sendiri. Kesukaran-kesukaran itu timbul dalam sedjarah jang lampau, bersangkut-paut dengan politik djadjahan Belanda dahulu. Pemerintah Republik Indonesia sekarang, jang menerima warisan jang tidak baik itu, hendak menjelesaikan segalanja menurut tjita-tjitanja jang mendjadi dasar pemerintahan Negara kita.

Dalam usahanja untuk menjelesaikan soal-soal tersebut diatas itu sering-sering menemui kesukaran-kesukaran jang ditimbulkan oleh sebagian golongan Tionghoa, hingga bangsa Tionghoa disini banjak mengalami keadaan jang tidak enak, sebagai akibat dari pada masa jang lampau.

Dalam masa pendjadjahan Belanda, golongan Tionghoa boleh dikatakan mendjadi golongan perantara antara golongan jang mendjadjah dan golongan jang terdjadjah. Golongan Tionghoa jang mendjadi golongan „middenstand" dan oleh karena mendjadi ulasan kapitalisme asing kedalam masjarakat Indonesia itu, dalam perdjuangan politik antara siterdjadjah dengan sipendjadjah bersifat netral, dengan menundjukkan minatnja kepada mentjari keuntungan bagi dirinja sendiri.

Orang Tionghoa disini pada umumnja dagang, dan dalam stelsel ekonomi kapitalisme, orang dagang tudjuannja ialah mentjari keuntungan jang sebesar-besarnja. Dan oleh karena orang dagang Tionghoa dirasakan oleh rakjat sebagai ulasan kapitalis asing kedalam masjarakat Indonesia, dan merasai tindasannja jang sangat hebatnja, maka timbullah perasaan jang tidak senang terhadap golongan Tionghoa.

Pun dalam masa kekuasaan Djepang, kelihatan orang Tionghoa selalu duduk diatas. Orang Djepang jang mau menguasai segala-galanja mempergunakan orang Tionghoa sebagai alatnja. Maka dari itu perasaan tidak senang terhadap orang Tionghoa semakin mendalam, hingga sering menimbulkan permusuhan antara orang Indonesia dengan orang Tionghoa. Dalam masa aman dan damai permusuhan itu sudah dapat dipadamkan. Dan sedjak kemerdekaan Indonesia, Pemerintah telah berusaha segiat-giatnja untuk menanam rasa persahabatan antara kedua bangsa. Mula-mula berhasil, akan tetapi setelah Belanda datang dan terdjadi pertempuran sedangkan golongan Tionghoa dipergunakan sebagai polisi dan orang dagang, kemarahan terhadap orang Tionghoa timbul lagi hingga terdjadi keadaan jang sangat disesalkan. Dengan demikian perhubungan antara orang Tionghoa dan Indonesia mendjadi kusut lagi.

Sekarang kita menghadapi stelsel ekonomi harus jang didasarkan kepada kesedjahteraan sosial. Perekonomian tidak lagi dikemudikan oleh pengusaha-pengusaha partikelir dengan semau-maunja, melainkan Pemerintah akan mengadakan susunan jang teratur dan mendapat kekuasaan jang tertentu dalam pimpinan produksi dan distribusi. Apabila golongan Tionghoa disini dapat menjesuaikan dirinja dengan semangat ekonomi baru, jang mendjadi dasar perekonomian Republik Indonesia, nistjaja kedudukannja terhadap ekonomi bangsa Indonesia berlainan dari pada dahulu. Tenaga ekonominja akan dikordinasi dengan tenaga ekonomi Indonesia. Dari lawan ia akan mendjadi kawan dan dengan sendirinja hilanglah „soal Tionghoa".

Sambutan S. P. Sultan

„Perhubungan antara Indonesia Tionghoa, setelah konperensi, pasti akan tambah dipererat dan disempurnakan, oleh karena satu sama lain memang saling butuh membutuhkan. Dunia internasional akan mengetahui sendiri dan membedakan konperensi Jogjakarta dan konperensi Pangkalpinang (oleh Belanda).

Konperensi Jogjakarta tentu akan dikupas oleh dunia internasional dan dibandingkan dengan konperensi jang diadakan oleh Nica di Pangkalpinang.

Adapun keputusan-keputusan jang akan menambah eratnja kerdja sama antara kedua bangsa itu semata-mata tergantung dari kedua belah pihak dan kita pertjaja hal itu akan dapat diselesaikan dengan memuaskan oleh karena kedua-duanja memang butuh-membutuhkan. Hal ini telah diinsjafi, baik oleh pihak Tionghoa maupun oleh pihak Indonesia. Goodwill dari kedua-duanja pun telah ada. Maka nistjajalah konperensi ini akan bermanfaat bagi kedua belah pihak".

Sebagai pembitjara terachir, berbitjara Sdr. Alimin jang telah banjak pengalamannja dinegeri Tiongkok dan membawa kesan-kesan dari sana jang menjatakan, hendaknja orang Tionghoa di Indonesia dapat bekerdja bersama-sama.

Setelah Wakil Presiden dan tamu-tamu lainnja meninggalkan sidang, konperensi dilandjutkan untuk membitjarakan praeadvies-praeadvies jang mengenai ekonomi dan keamanan.

Pada malam itu dapatlah dibentuk dua panitya ketjil untuk menetapkan keputusan-keputusan terhadap soal tersebut.

Hasil konperensi

Pada tanggal 18 September malam dengan bertempat diruangan Balai Pradjurit Ngabean, dilangsungkan pertemuan ramah-tamah sebagai penutup konperensi Indonesia — Tionghoa. Hadir djuga Kepala Negara dan orang-orang terkemuka dari golongan Indonesia — Tionghoa.

Pidato pembukaan oleh Sdr. Tabrani antara lain dinjatakan kepuasan hati seluruh anggauta konperensi, karena melihat djalannja perundingan konperensi itu dapat djuga menimbulkan djiwa persatuan jang lebih erat diantara kedua bangsa tersebut.

Kemudian sesudah dibatjakan keputusan-keputusan konperensi, dipertundjukkan tari-njanjian dari golongan Tionghoa, permainan anak-anak oleh murid Taman - Siswa dan lain-lainnja dan setelah diadakan sambutan-sambutan, malam perpisahan diachiri.

Putusan - putusan

I. SOSIAL :

Mendengar:

pembitjaraan selama konperensi, baik dari pihak Pemerintah maupun dari golongan Tionghoa ;

Memutuskan:

dengan berdasarkan ketaatan dari penduduk Tionghoa terhadap Pemerintah Republik Indonesia.

Menetapkan:

buah-buah pembitjaraan sebagai berikut :

A. Pengungsian : Berdasarkan atas peraturan jang telah ada, pengungsian akan diusahakan sebaik-baiknja dengan mengingat siasat perdjuangan dengan meminta bantuan dari organisasi-organisasi jang berkepentingan, mitsalnja C.H.T.H.

B. Gezinshereeniging: Tentang hal ini penduduk Tionghoa taat kepada keputusan Pemerintah dan pendjelasan-pendjelasan dari pihak Tionghoa, sangat diperhatikan oleh Pemerintah.

C. Penggeledahan dan Penangkapan : Sesudah mendengar pendjelasan-pendjelasan dari pihak Tionghoa, Pemerintah memperhatikan hal-hal ini dan masih merantjangkan peraturan untuk segenap penduduk jang mengenai penggeledahan dan penangkapan jang mempertinggi „rechtszekerheid" dari penduduk.

D. Pengesahan C.H.T.H. : Pemerintah mengakui adanja perkumpulan C.H.T.H. sebagai organisasi jang memperhatikan kepentingan penduduk Tionghoa.

E. Badan Penghubung : Hal ini telah diusahakan di Kementerian Dalam Negeri dan kemudian hari djuga dimasing-masing daerah.

F. Panitya Indonesia — Tionghoa : Hal ini telah termasuk dalam hal badan penghubung.

II. EKONOMI :

Setelah mempeladjari prae-advies-prae-advies tentang ekonomi dari pihak Tionghoa serta mendengar kesimpulan usul-usul wakil Tionghoa dan sambutan wakil Kementerian Kemakmuran dan Keuangan.

Mengetahui:

bahwa keinginan dan kesimpulan usul-usul golongan Tionghoa itu sebagian besar dimana mungkin telah sedang dan akan diusahakan oleh Pemerintah.

Berpendapat;

1. Bahwa kesulitan-kesulitan jang diadjukan oleh golongan Tionghoa dalam perekonomian sebagian besar akibat dari masa sesudah peperangan serta dari pergolakan politik antara Indonesia — Belanda dan hal ini tidak mengenai golongan Tionghoa sadja.
2. Bahwa Pemerintah, jang mengandjurkan supaja golongan Tionghoa dengan perantaraan organisasinja selalu berhubungan dengan Pemerintah, telah melihatkan kemauan untuk bekerdja bersama-sama.
3. bahwa berhubung dengan kedudukan golongan Tionghoa jang telah berabad-abad lamanja di Indonesia, dirasa perlu membaharui dan melangsungkan perhubungan jang kekal itu, antara lain dalam lapangan perdagangan mitsalnja export dan import, dimana tenaga Indonesia dan Tionghoa dapat melihatkan kerdja bersama-sama.

III. PENGADJARAN :

Setelah mendengarkan pelaporan-pelaporan tentang peladjaran dan pendidikan serta mendengar kesimpulan usul-usul dari Wakil Tionghoa dan sambutan dari Wakil Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan.

Berpendapat:

1. Pada umumnja, Pemerintah tak berkeberatan bangsa Tionghoa memberi pendidikan dan pengadjaran di Perguruan-Perguruan Tionghoa, asal tidak mengganggu ketenteraman umum dan membahajakan tetap berdirinja Republik Indonesia.
2. Pemerintah sedapat mungkin membantu meringankan kesukaran-kesukaran tentang perumahan dan alat-alat peladjaran untuk sekolah-sekolah Tionghoa.

IV. PENERANGAN :

Mendengar:

1. Prae-advies Mr Ko Siok Hie.
2. Uraian-uraian Wakil Kementerian Penerangan.

Berpendapat:

Bahwa, dunia internasional sekarang dengan tegas beranggapan sistim pendjadjahan ada merupakan satu hal tidak teringin ;

bahwa, penduduk Tionghoa di Djawa dan Madura tidak ingin lihat kembalinja pendjadjah ;

bahwa, perhubungan Indonesia — Tionghoa pada masa ini belum sempurna.

Menimbang:

Bahwa, pergolakan bangsa Indonesia dimasa sekarang ini ialah menentang pendjadjahan, jang dapat disetudjui oleh bangsa Tionghoa dari seluruh Djawa dan Madura serta perlu memperbaiki perhubungan Indonesia — Tionghoa.

Menjatakan:

bahwa, bangsa Tionghoa sebagai bangsa Asia jang mempunjai San Min Chu I, harus membantu gerakan bangsa Indonesia,

bahwa, kerenggangan perhubungan Indonesia — Tionghoa itu antara lain adalah lantaran *kekurangan penerangan* jang sering berakibat menimbulkan salah paham dan kurangnja bangsa Indonesia dan Tionghoa bersama-sama mengusahakan segala sesuatu.

Memutuskan:

1. Memperhebat penerangan agar bangsa Tionghoa dapat mengerti isi djiwa revolusi bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia mengerti jang bangsa Tionghoa bukan musuh bangsa Indonesia, bahkan sanggup membantu gerakan kebangsaan bangsa Indonesia digaris belakang dengan djalan siaran radio dalam bahasa Indonesia dan Tionghoa dan didaerah Indonesia jang tidak diduduki oleh Serikat atau Belanda diterbitkan surat kabar Tionghoa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa.

Susunan Panitya Ketjil Keamanan

I. Membentuk Panitya Ketjil tentang „Keamanan" dengan susunannja jang saksama terdiri dari Wakil-wakil Pemerintah dan Wakil-wakil Tionghoa:

Ketua	: Arudji Kartawinata Menteri Muda Pertahanan.
Wakil Ketua I	: Mr. Tirtawinata, Djaksa Agung Tentara.
Wakil Ketua II	: Lie Tong Liang.
Penulis I	: Setepu (Kementerian Negara).
Penulis II	: Mr. Tan Po Goan.
Anggauta-anggauta	: Imam (Kementerian Negara), Tjugito (Idem), Suprapto (Sekretaris Kementerian Pertahanan), Sukono Djojopratignjo (Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan), R.S. Sukanto Tjokrodiatmodjo (Kepala Djawatan Kepolisian Republik Indonesia), Mr. Kasman Singodimedjo (Ketua Kehakiman Tentara), Dr. Tong Khing Long (Kempen), Ir. Tan Bun An.

II. Sebagai badan perantara jang mendapat kepertjajaan penuh dari pihak Pemerintah dan golongan Tionghoa umumnja, maka Panitya Ketjil menerima tugas kewadjibannja untuk:

a. memeriksa dan mempeladjari lebih dalam dan lebih djauh pokok-pokok usul jang dimadjukan oleh pihak Tionghoa kepada Pemerintah.

b. berdasarkan resolusi tersebut memadjukan usul-usul jang konkrit kepada Pemerintah.

III. Menetapkan rapat perundingannja jang lebih leluasa dan setjara effectief pada hari Minggu pertama bulan Oktober 1946 mulai djam 9 pagi di Jogjakarta.

Putusan Panitya Keamanan Indonesia — Tionghoa

Panitya ketjil bagian keamanan dari konperensi Indonesia - Tionghoa di Jogjakarta tgl. 17 dan 18 - 9 - '46 jang bersidang pada tgl. 18 September dan 6 Oktober 1946 memutuskan sbb.:

Mengusulkan kepada Pemerintah supaja hal jang tersebut dibawah ini tetap mendjadi perhatiannja Pemerintah sepenuhnja:

a. Mempertjepat terhapusnja perbuatan-perbuatan jang tidak sesuai dengan kedudukan Negara Merdeka jang berdaulat mutlak.

b. Mempertjepat usaha pembersihan anasir-anasir buruk disegala lapangan jang merupakan sisa-sisa akibat sistim pendjadjahan.

c. Memperkuat dan menjempurnakan alat-alat kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia.

d. Mendorong akan teraturnja susunan badan-badan jang mempunjai lasjkar, hingga mentjapai disiplin, dimana Putjuk Pimpinannja masing-masing harus bertanggung djawab atas segala-galanja.

e. Menindas anarcho-syndicalisme.

f. Untuk pembangunan Negara dikerahkan segenap tenaga Tionghoa dalam segala lapangan dan dengan tjara jang setepat-tepatnja.

g. Mengusahakan tindakan-tindakan jang tepat agar bangsa Tionghoa merasa aman dan tenteram tinggal didaerah Pemerintah Republik Indonesia.

* *
*

4. MENGHADAPI PERUNDINGAN

PADA tanggal 7 Oktober 1946 djam 10 pagi ditempat kediaman Konsul Djenderal Inggeris di Djakarta diadakan perundingan antara utusan Indonesia dan Belanda diketuai oleh Lord Killearn jang diiringi oleh Michael Wright dan Mackerath, Konsul Djenderal Inggeris.

Utusan Belanda terdiri atas anggauta Komisi Djenderal dibawah pimpinan Prof. Schermerhorn. Mereka diiringi oleh penasehat dan anggauta stafnja.

Utusan Indonesia terdiri atas Sutan Sjahrir (ketua), Mr. Moh. Rum, Mr. Susanto Tirtoprodjo dan Dr. Sudarsono.

Mereka diiringi oleh penasehat-penasehatnja. Setelah pertemuan dibuka, ketua masing-masing utusan memberi keterangan sendiri-sendiri.

Sesudah itu diadakan rapat tertutup. Atjara pertama jalah membitjarakan djalan perundingan. Persetudjuan telah terdapat untuk mengadakan pertemuan jang lengkap pada tgl. 14 Oktober dan dalam pada itu utusan Belanda dan Indonesia akan mengadakan pembitjaraan ber-sama-sama. Sesudah itu dibitjarakan soal gentjatan sendjata dan terdapat persetudjuan untuk mengadakan komisi terdiri dari Ketua dari masing-masing utusan, jaitu Dr. v. Mook atau wakilnja Dr. Idenburg pada pihak Belanda, dan Dr. Sudarsono pada pihak Indonesia. Komisi ini diketuai oleh Lord Killearn jang akan berusaha supaja soal ini selekas-lekasnja selesai. Komisi tersebut akan bertemu pada tanggal 9 Oktober.

Sesudah Ketua pertemuan dan Ketua utusan menentukan orang jang akan duduk dalam sekretariat, pertemuan kemudian ditutup.

I. Perundingan gentjatan perang tanggal 14 Oktober 1946

Komite gentjatan sendjata jang diangkat tanggal 7 Oktober 1946, pada pertemuan pleno perundingan delegasi Belanda — Indonesia tanggal 9 Oktober 1946 bertempat dikediaman Konsul Djenderal Inggeris, diketuai oleh Lord Killearn.

Lord Killearn diiringi oleh Mr. Michael Wright dan Dj. Maj. Foreman,

Prof. Schermerhorn dan Dr. Idenburg diiringi oleh Lt. Djenderal Spoor dan Kapten Willingge.

P. M. Sutan Sjahrir dan Dr. Sudarsono diiringi oleh Dj. Maj. Sudibjo, Kol. Simbolon dan Lt. Kol. Kartawirana.

Demikianlah pada tgl. 14 Oktober 1946 Panglima Besar Tentara Republik Indonesia menerima kawat dari Ketua Delegasi Indonesia Sutan Sjahrir, tentang hatsil perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda jang dilangsungkan pada hari tersebut. Berita hatsil perundingan ini merupakan sebuah komunike, jang pada djam 20.30 oleh Panglima-panglima Besar Tentara Republik Indonesia, Belanda dan Inggeris diumumkan kepada tentaranja masing-masing, jang berbunji sebagai berikut :

Kami Panglima Besar Tentara, memberi-tahukan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa dalam perundingan lengkap antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda jang dilangsungkan di Djakarta dan diketuai oleh Lord Killearn, telah didapat persetudjuan tentang Gentjatan Sendjata antara Tentara Serikat dan Tentara Indonesia jang akan dimulai setjepat mungkin. bilamana dapat diselenggarakan.

Perintah lebih landjut akan diberikan kepada saudara-saudara selekas mungkin. Dalam waktu ini segala sesuatu harap diusahakan untuk mentjegah pertempuran. Harap diperhatikan seperlunja.

a. Persetudjuan gentjatan perang

Tentang **persetudjuan gentjatan perang** jang telah tertjapai didalam perundingan antara Delegasi Indonesia dan Belanda dengan pimpinan pihak Inggeris di Djakarta dari tgl. 9 - 14 Oktober itu telah diambil keputusan bersama sebagai berikut :

1. Para Delegasi Indonesia, Belanda dan wakil-wakil Inggeris dengan suara bulat setudju untuk mengadakan gentjatan perang atas dasar kedudukan militer pada waktu ini dan atas dasar djumlah kekuatan militer Serikat dan Indonesia. Saling memberikan keterangan tentang djumlah kekuatan tentara Serikat dan Indonesia dan diterima oleh segala pihak jang bersangkutan.

2. Para Delegasi Indonesia, Belanda dan wakil-wakil Inggeris menjetudjui dengan suara bulat membentuk Komisi Gentjatan Besama jang sempurna untuk memberi pimpinan atas penjelenggaraan tehnis dari gentjatan perang seperti jang disetudjui dalam pasal 1. Komisi ini akan berkewadjiban menimbang dan memutuskan segala kesukaran jang mungkin timbul pada penjelenggaraan gentjatan perang ini serta segala pengaduan terhadap pelanggaran terhadapnja. Komisi tersebut sampai tanggal 30 Nopember jang akan datang tersusun sebagai berikut :

Dari pihak Inggeris Mr. Wright (Ketua), Letnan Djenderal Mansergh, Kapten Cooper, Aircommodore Stevens, Major Djenderal Foreman.

Dari pihak Indonesia Dr. Sudarsono, Djenderal Sudirman, Laksamana Muda Nazir dan Aircommodore Suriadarma.

Dari pihak Belanda Dr. Idenburg, Letnan Djenderal Spoor, Laksamana Pinke dan Djenderal Major Kengen.

Sesudah tgl. 30 Nopember jang akan datang, djika semua tentera Inggeris sudah meninggalkan Indonesia, dengan sendirinja pihak Inggeris berhenti dari keanggautaan komisi tersebut. Kalau sebelum tanggal tersebut terdjadi perselisihan faham antara para anggauta Komisi jang tak dapat diselesaikan dengan lain tjara, para anggauta akan tunduk kepada keputusan ketua.

Kalau sesudah tgl. 30 - 11 ada perselisihan faham, Komisi akan menjerahkan hal itu kepada Panglima Besar Angkatan Darat Inggeris di Asia Tenggara dan Komisi akan tunduk kepada keputusannja.

3. Para Delegasi Indonesia, Belanda dan wakil-wakil Inggeris dengan suara bulat menjetudjui, bahwa Komisi Bersama itu harus membentuk satu „technische sub-commissie" jang susunannja, bentuknja dan kewadjibannja akan ditentukan lebih landjut.

Lebih djauh Komisi gentjatan perang mentjatat beberapa maklumat bersama dari Delegasi Indonesia dan Belanda sebagai berikut :

Karena kedua pihak ingin supaja gentjatan perang ini mendjadi langkah pertama kepada penjelesaian pertikaian politik sekarang ini, maka njatalah kekuatan militer kedua pihak pada saat ini harus dipandang sebagai kekuatan maximum jang akan dikurangkan, bila mana gentjatan perang ini berhasil dan keadaan politik mendjadi terang.

Karena sebagian besar dari tentara Hindia Belanda terdiri dari para milisi jang sudah lama dimobilisasi, maka perlulah pula dilekaskan satu penjelesaian dengan damai, sehingga kemudian mereka itu dapat didemobilisasi. Hal ini akan meringankan beban jang terletak di atas bahu tentara Indonesia, termasuk djuga lasjkar-lasjkarnja.

Kedua pihak akan saling memberi tahukan segala aturan jang dipertimbangkan jang diambil dalam hal ini, sedang Komisi Gentjatan Bersama berhak memberi andjuran-andjuran.

b. Peraturan untuk technische sub-commissie

Mengenai „technische sub-commissie" tersebut diatas tertjapai persesuaian sebagai berikut:

I. Bentuknja: Sub-commissie tersebut akan terdiri atas para Kepala staf militer Inggeris, Indonesia dan Belanda, ditambah dengan tidak boleh lebih dari 3 orang opsir lainnja dari tiap-tiap pihak, Ketua sub-commissie tersebut adalah Kepala Generale Staf AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies).

II. Kewadjiban sub-commissie ialah selekas-lekasnja bersidang supaja:

a. dapat selekas-lekasnja memberi perintah menghentikan pertempuran.
b. menjusun instruksi jang luas jang akan didjadikan pedoman tentang angkatan laut dan udara setempat-tempat dari pihak Serikat dan Indonesia tentang soal gentjatan perang. Instruksi itu akan menentukan garis-garis besar guna:
   1. pembentukan badan-badan guna mengurangkan kemungkinan-kemungkinan jang dapat menimbulkan pertempuran dan
   2. untuk mengawasi pengangkutan orang-orang dan persediaan didaerah masing-masing.

II. Perundingan politik

Disamping perimbangan tentang kekuatan militer, jang diutamakan oleh delegasi dalam membuat perdjandjian Gentjatan Sendjata itu jalah suasana politik. Delegasi berkejakinan, bahwa hanja dengan penjelesaian pertikaian politik akan selesai djuga pertikaian dilapangan militer.

Soal jang dihadapi delegasi dalam perundingan jalah penarikan kembali tentara Inggeris pada tgl. 30 Nopember 1946.

Disamping kesulitan-kesulitan militer jang tentu akan timbul berhubung dengan penarikan tentara Inggeris itu, tentu akan timbul pula kesulitan dilapangan urusan sipil. Sedjak pemerintah militer Inggeris mengambil kekuasaan didalam beberapa daerah Negara kita, urusan sipil djuga ada didalam tangan pembesar Inggeris. Soal, bagaimana urusan sipil harus diatur sesudah tentara Inggeris ditarik kembali, perlu djuga diselesaikan bersama dengan penjelesaian soal politik. Sebagai dasar urusan sipil ini ditetapkan, bahwa segala aturan-aturan jang berlaku selama pendudukan tentara Inggeris tetap berlaku. Untuk melaksanakan segala urusan sipil itu dibentuk suatu komisi dimana pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Sjarifuddin dan Dr. A. K. Gani.

Soal jang djuga perlu diselesaikan bersama dengan penjelesaian soal politik jalah soal pengungsi, soal tawanan politik dan soal publikasi.

Untuk memetjahkan soal-soal itu, didirikan suatu komisi jang dinamakan Komisi Gentjatan Perang dalam lapangan politik, terdiri dari Mr. Moh. Rum, Mr. Susanto dan Mr. Tamzil.

Dengan tidak menunggu pemetjahan ketiga soal tersebut diatas, maka perundingan soal politik dilandjutkan, 4 kali di Djakarta dan selandjutnja mulai tgl. 11 Nopember 1946 tidak lagi dilangsungkan di Djakarta, melainkan di Linggadjati, jaitu suatu tempat jang letaknja ± 22 km dari Tjirebon.

Berhubung dengan itu, maka pada tgl. 10 Nopember 1946, Presiden Soekarno, Wk. Pres. Moh. Hatta bersama dengan Delegasi Indonesia bertolak ke Linggadjati, perlu menindjau perundingan.

Disana Presiden dan Wk. Presiden berkenan menerima kundjungan Lord Killearn dan para anggauta Delegasi Belanda.

Mereka datang pada tgl. 11 pagi dengan pesawat terbang air (Catalina) djadi tidak dengan kapal seperti direntjanakan semula. Kedatangan mereka dipelabuhan Tjirebon didjemput dengan kapal A. L. R. I. jaitu oleh Mr. Makmun Bupati Tjirebon dan Mr. Suparman sedangkan Mr. Amir Sjarifuddin, Dr. A.K. Gani, Lord Killearn dan Michael Wright menunggu mereka di Pelabuhan. Selain kapal terbang jang membawa Komisi Djenderal dan Delegasi Belanda, tampak pula kapal torpedo Belanda „Bancaert" dan sebuah motorboot.

Patut ditjatat suatu perselisihan jang terdjadi, karena pihak Belanda tidak mau didjemput dengan motorboot A.L.R.I. dan hanja mau menumpang motorboot mereka sendiri, padahal menurut perintah, A.L.R.I. tidak mengidzinkan motorboot Belanda masuk pelabuhan. Untuk menjelesaikan soal tersebut Dr. Koets dan van Goudoever menudju kepelabuhan dengan menumpang motorboot A.L.R.I., untuk berembug dengan Mr. Amir Sjarifuddin, supaja motorboot diidzinkan masuk pelabuhan.

Baru setelah mendapat idzin Menteri Pertahanan segenap anggauta Komisi Djenderal mendarat dan terus menudju ke - Linggadjati.

Perundingan politik antara Delegasi-delegasi Indonesia dan Belanda dimulai pada tanggal 11 Nopember 1946. Pada hari itu 4 pasal dari 17 pasal dapat dipetjahkan. Pada hari kedua perundingan dilandjutkan. Sampai pada saat itu pembitjaraan berdjalan dengan lantjar. Dan pada hari jang ke - 4 jaitu pada tanggal 14 perundingan di Linggadjati diachiri.

Adapun jang mendjadi pokok pembitjaraan dalam sidang tersebut jalah susunan Republik Indonesia mengenai seluruh daerah Hindia - Belanda dulu dan isi dari pengakuan „de facto" terhadap Pemerintahan Republik di - Djawa, Madura dan Sumatera sebagai pangkal permulaan untuk menjusun Negara Indonesia. Pada tanggal 14 sore para anggauta Delegasi menudju kembali ke Djakarta.

Keesokan harinja pada tanggal 15 Nopember djam 10.00 hingga djam 13.00 pertemuan Delegasi Indonesia — Belanda dilangsungkan lagi untuk memeriksa kembali naskah dasar persetudjuan jang telah tertjapai selama perundingan di - Linggadjati, bertempat digedung Komisi Djenderal, diketuai oleh P. M. Sjahrir.

Sore harinja djam 18.10 dalam persidangannja jang ke - 10 ditempat kediaman Perdana Menteri Sutan Sjahrir, serta diketuai oleh Prof. Schermerhorn, naskah rentjana persetudjuan dibubuhi parap oleh kedua belah pihak.

Berhubung dengan telah tertjapainja persetudjuan, maka Komisi Djenderal perlu bertolak kenegeri Belanda untuk memberikan laporan kepada pemerintah Belanda dan memberikan penerangan-penerangan dan pendjelasan-pendjelasan kepada partai-partai politik disana.

Demikian pula pada tanggal 16 Nopember djam 9 pagi telah tiba di Jogjakarta Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin, Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Rum, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo untuk memberi laporan lengkap kepada Presiden tentang hatsil perundingan Indonesia — Belanda jang telah tertjapai.

Berhubung dengan akan berangkatnja Presiden Soekarno ke Djawa Barat dengan kereta api istimewa pada djam 10.00, sehingga tak banjak waktu lagi, maka terpaksa Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin turut serta dengan Presiden sampai ke - Kutoardjo untuk memberikan laporan didalam kereta api.

Delegasi-delegasi pihak Belanda dan pihak Indonesia, dalam persidangannja pada tanggal 15 Nopember 1946, telah semufakat tentang rentjana persetudjuan jang berikut :

a. Naskah Persetudjuan Linggadjati

PEMERINTAH BELANDA,
DALAM HAL INI BERWAKILKAN KOMISI DJENDERAL,
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DALAM HAL INI BERWAKILKAN DELEGASI INDONESIA,

Oleh karena mengandung keinginan jang ichlas hendak menetapkan perhubungan jang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan tjara dan bentuk bangun jang baru, bagi kerdja-bersama dengan suka rela, jang merupakan djaminan sebaik-baiknja bagi kemadjuan jang bagus, serta dengan kokoh-teguhnja dari pada kedua negeri itu, didalam masa datang, dan jang membukakan djalan kepada kedua bangsa itu untuk mendasarkan perhubungan antara kedua belah pihak atas dasar-dasar jang baru, menetapkan mufakat seperti berikut, dengan ketentuan akan mengandjurkan persetudjuan ini selekas-lekasnja untuk memperoleh kebenaran dari pada madjelis-madjelis perwakilan rakjatnja masing-masing :

Pasal 1.

Pemerintah Belanda mengakui kenjataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Djawa, Madura dan Sumatera.

Adapun daerah-daerah jang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerdja bersama antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula kedalam Daerah Republik. Untuk menjelenggarakan jang demikian itu, maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan jang perlu-perlu, supaja, selambatnja pada waktu jang disebutkan dalam pasal 12, termasuknja daerah-daerah jang tersebut itu telah selesai.

Pasal 2.

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menjelenggarakan segera berdirinja sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi, jang berdasarkan perserikatan dan dinamai Negara Indonesia Serikat.

Pasal 3.

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnja, dengan ketentuan, bahwa, djika kaum penduduk dari pada sesuatu bagian daerah, setelah dimusjawaratkan dengan lain-lain bagian daerah pun djuga, menjatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk kedalam perikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu bolehlah diwudjudkan sematjam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu dan terhadap Keradjaan Belanda.

Pasal 4.

(1) Adapun negara-negara jang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Borneo, dan Timur Besar, jaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk dari pada sesuatu bagian daerah, untuk menjatakan kehendaknja, menurut aturan demokratis, supaja kedudukannja dalam Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan tjara lain.

(2) Dengan tidak menjalahi ketentuan didalam pasal 3 tadi dan didalam ajat ke (1) pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinja.

Pasal 5.

(1) Undang-Undang Dasar dari pada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentuk negara, jang akan didirikan daripada wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu lain-lain jang akan termasuk kelak dalam Negara Indonesia Serikat itu, jang wakil-wakil itu ditundjukkan dengan djalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ajat jang berikut dalam pasal ini.

(2) Kedua belah pihak akan bermusjawarat tentang tjara turut-tjampurnja dalam persidangan pembentuk negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daerah-daerah jang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan-golongan penduduk jang tidak ada atau tidak tjukup perwakilannja, segala itu dengan mengingat tanggung djawab daripada Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing.

Pasal 6.

(1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan bersama daripada Negeri Belanda dan Indonesia, akan bekerdja bersama untuk membentuk Persekutuan Belanda — Indonesia, jang dengan terbentuknja itu Keradjaan Belanda, jang meliputi Negeri Belanda, Hindia-Belanda, Suriname dan Curaçao ditukar sifatnja mendjadi persekutuan itu, jang terdiri pada satu pihak daripada Keradjaan Belanda, jang meliputi Negeri Belanda, Suriname dan Curaçao dan pada pihak lainnja daripada Negara Indonesia Serikat.

(2) Jang tersebut diatas ini tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian, berkenaan dengan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curaçao satu dengan lainnja.

Pasal 7.

(1) Untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan jang tersebut didalam pasal diatas ini, Persekutuan Belanda — Indonesia itu akan mempunjai alat-alat kelengkapan sendiri.

(2) Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Negara Indonesia Serikat; mungkin djuga oleh madjelis-madjelis perwakilan rakjat negara-negara itu.

(3) Adapun jang akan dianggap kepentingan-kepentingan bersama ialah kerdja bersama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan dan seberapa perlu keuangan, serta djuga hal-hal ekonomi dan kebudajaan.

Pasal 8.

Di putjuk Persekutuan Belanda — Indonesia itu duduklah Radja Belanda. Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan Persekutuan itu atas nama Baginda Radja.

Pasal 9.

Untuk membela - pelihara kepentingan - kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negeri Belanda, dan kepentingan - kepentingan Keradjaan Belanda di - Indonesia maka Pemerintah masing-masing kelak mengangkat Komisaris Luhur.

Pasal 10.

Anggar-anggar Persekutuan Belanda — Indonesia itu antara lain akan mengandung djuga ketentuan-ketentuan tentang:

a. pertanggungan hak-hak kedua belah pihak jang satu terhadap jang lain dan djaminan-djaminan kepastian kedua belah pihak menetapi kewadjiban-kewadjiban jang satu kepada jang lain;

b. hal kewarga-negaraan untuk warga negara Belanda dan warga negara Indonesia, masing-masing didaerah lainnja ;
c. aturan tjara bagaimana menjelesaikannja, apabila dalam alat-alat kelengkapan Persekutuan itu tidak dapat ditjapai semufakat ;
d. aturan tjara bagaimana dan dengan sjarat-sjarat apa alat-alat kelengkapan Keradjaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak atau kurang tjukup mempunjai alat-alat kelengkapan sendiri ;
e. Pertanggungan dalam kedua bagian Persekutuan itu akan ketentuan hak-hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan jang dimaksudkan djuga oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 11.

(1) Anggar-anggar itu akan direntjanakan kelak oleh suatu permusjawaratan antara wakil-wakil Keradjaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat jang hendak dibentuk itu.

(2) Anggar-anggar itu terus berlaku, setelah dibenarkan oleh madjelis-madjelis perwakilan rakjat kedua belah pihak masing-masingnja.

Pasal 12.

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaja berwudjudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda — Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 Djanuari 1949.

Pasal 13.

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan-tindakan, agar supaja setelah terbentuknja Persekutuan Belanda — Indonesia itu, dapatlah Negara Indonesia Serikat diterima mendjadi anggauta didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 14.

Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak orang-orang bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak-hak mereka jang dilakukan dan di kembalikan barang-barang milik mereka, jang lagi berada didalam daerah kekuasaannja de facto. Sebuah panitya bersama akan dibentuk untuk menjelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

Pasal 15.

Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia, sehingga susunannja dan tjara bekerdjanja seboleh-bolehnja sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk susunan menurut hukum negara, jang direkakan itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan, supaja dengan segera dilakukan aturan-aturan undang-undang, akan supaja, sementara menantikan berwudjudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda — Indonesia itu, kedudukan Keradjaan Belanda dalam hukum negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Pasal 16.

Dengan segera setelah persetudjuan ini mendjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan angkatan bala-tentaranja masing-masing. Kedua belah pihak akan bermusjawarat tentang sampai seberapa dan lambat-tjepatnja melakukan pengurangan itu, demikian djuga tentang kerdja-bersama dalam hal ketentaraan.

Pasal 17.

(1) Untuk kerdja bersama jang dimaksudkan dalam persetudjuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, hendak diwu-

djudkan sebuah badan, jang terdiri daripada delegasi-delegasi jang ditundjukkan oleh tiap-tiap pemerintah itu masing-masingnja, dengan sebuah sekretariat bersama.

(2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetudjuan ini, jang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi jang tersebut itu, maka menjerahkan keputusan kepada arbitrage. Dalam hal itu persidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan suara memutuskan, jang diangkat dengan semufakat antara dua pihak delegasi itu, atau djika tidak berhasil semufakat itu, diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan Internasional.

Pasal penutup

Persetudjuan ini dikarangkan dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua-dua naskah itu sama kekuatannja.

Djakarta, 15 Nopember 1946.

Pidato P.M. Sutan Sjahrir

Berhubung dengan telah diparapnja Rentjana Persetudjuan Linggadjati, maka pada tanggal 19 Nopember 1946, P. M. Sutan Sjahrir mengutjapkan pidato radio sebagai berikut:

Pendengar-pendengar jang terhormat,

Pada tanggal 15 Nopember jang lalu, ditempat kediaman saja, diparap oleh delegasi kita dan delegasi Belanda sebuah rantjangan perdjandjian antara Republik Indonesia dan Keradjaan Belanda. Kedjadian ini menutup rangkaian perundingan jang terachir dengan pihak Belanda jang kita mulai setelah terbentuknja kabinet baru kita pada bulan Oktober jang sudah.

Lebih dari sebulan lamanja kita dan pihak Belanda membanding pendirian dan mengukur kemungkinan dengan berpedoman kepentingan dan kehormatan bangsa kita masing-masing. Jang mendjadi tudjuan kedua pihak tak lain dari suatu persetudjuan jang akan dapat menjelamatkan serta mendjamin kepentingan serta kehormatan bangsa-bangsa jang kita wakilkan. Dengan sadar atau tidak, usaha kami itu tidak lain dari pada usaha untuk turut membentuk dasar-dasar jang baru bagi sedjarah bangsa-bangsa jang kita wakilkan.

Usaha jang kita mulai dari pendirian-pendirian jang berlainan jang kadang-kadang bertentangan itu, tentu sadja banjak kali merupakan bentrokan, persengketaan perdjuangan pendirian serta faham, jang tidak sadja memaksa tenaga urat sjaraf, akan tetapi terutama di - Djakarta tak kurang pula mengalirkan keringat. Akan tetapi didalam itu harga-menghargai satu dengan lain serta pendirian masing-masing pun timbul demikan pula pengertian tentang soal serta kesulitan satu dengan lain. Selama perundingan ini suasana antara pihak-pihak jang berunding sesuai dengan deradjat kemanusiaan jang sebenarnja, meskipun kadang-kadang badan serta otak letih, sehingga orang tidak lagi merasa diri.

Hasil perundingan ini sekarang telah diumumkan untuk diketahui dan ditimbang oleh chalajak umum. Bagi jang turut membentuknja dengan susah pajah tentu baji ini lain artinja dari pada bagi chalajak jang sekonjong-konjong dihadapkan dengannja. Chalajak berhadapan dengannja seperti dengan hal baru serta asing. Chalajak berhadapan dengan naskah perdjandjian ini seolah-olah dengan kuntji rahasia untuk harapan dan keinginan diri sendiri. Inikah djawab atau putusan atas harapan, keinginan, kebingungan masing-masing. Apa artinja djawab ini ? Apa hendaknja sikap kita terhadapnja ? Bagaimanakah harus kita menghargainja ?

Ada barangkali jang merasa lega, oleh karena mereka mendapat pedoman, atau sedikitnja melihat menara api didalam gelap kesangsian. Ada pula barang-

kali jang ragu-ragu, oleh karena merasa asing sama sekali terhadap hal jang dihadapinja ini, ada pula barangkali jang merasa ketjewa, oleh karena bertemu dengan hal-hal didalam naskah ini jang tiada dikehendakinja. Malah ada pula barangkali jang gusar serta marah, oleh karena apa jang dihadapkan padanja asing serta kurang dari pada jang diingininja, dan terbajang didalam pikiran serta anggapannja.

Segala-galanja ini dapat dimengerti, lumrah sebagai sifat kemanusiaan. Kita selain berhadapan dengan hal ini dengan perasaan, fikiran keinsjafan kita masing-masing, setjara orang-seorang kita.

Akan tetapi naskah seperti jang dihadapkan kepada chalajak umum itu, bukanlah djawaban atau obat bagi soal atau sedjarah orang-seorang, melainkan dihadapkan kepada bangsa kita sebagai kesatuan jang dapat membanding kepentingan, sedjarahnja, serta tahu memilih djalan untuk tempo jang akan datang.

Naskah ini adalah suatu kedjadian didalam sedjarah kebangsaan kita, jang harus kita bandingkan serta hargakan dengan kepentingan kehormatan serta tempo jang akan datang bagi bangsa kita.

Dapatkah kita mengatakan, bahwa kepentingan, keingingan orang-seorang sama seluruhnja dengan kepentingan, keinginan bangsa kita ? Antara dua orang sadja telah ada perbedaan itu, apa lagi diantara 70 djuta rakjat Indonesia satu dengan lainnja.

Tidak sebagai orang seorang harus berhadapan dengan naskah ini, melainkan sebagai anggauta dari pada bangsa kita, bangsa Indonesia.

Didalam pengakuan, bahwa kita bahagian dari kesatuan jang lebih luhur, ialah bangsa kita itu, terkandung kewadjiban untuk membatas, menempatkan kalau perlu menghilangkan kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan bangsa, kewadjiban untuk sanggup membedakan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan bangsa, kewadjiban untuk mengetahui apa jang mendjadi kepentingan bangsa, terkandung pula pembatasan pada keinginan diri sendiri jang tiada boleh bebas hingga bertentangan dengan kepentingan serta arah sedjarah kebangsaan jang tertentu.

Kita 70 djuta dan rakjat bangsa Indonesia tiap-tiap orang dengan perasaan, fikiran, perbuatan, perdjuangannja masing-masing, akan tetapi bersama-sama membentuk sedjarah kita. Apa bahagian kita masing-masing dalam pembentukan itu, besar atau ketjil artinja bukan bagi kita sendiri untuk menghargakannja, melainkan bagi sedjarah jang telah berlaku beratus abad, serta akan berlangsung demikian ratus abad lagi.

Didalam pembatasan pada penghargaan diri sendiri didalam menjelami serta membuat sedjarah, terletak kuntji pengertian pada tiap kedjadian sedjarah, apa lagi bagi sedjarah jang sedang berlaku.

Perbuatan kita berarti untuk sedjarah, akan tetapi bukan kita seorang diri dengan pengetahuan, perasaan, keinginan kita sendiri jang membuat sedjarah. Sedjarah bangsa kita dibuat tidak sadja oleh 70 djuta bangsa kita dengan berbagai djalan, melainkan djuga oleh perasaan keinginan, perbuatan lain-lain bangsa didunia. Sedjarah kita turut ditentukan langsung atau tidak langsung, oleh seluruh kemanusiaan. Berapa besar artinja usaha kita masing-masing didalam usaha kemanusiaan umumnja ini ?

Seluruh tenaga dan djiwa kita, kita letakkan pada perdjuangan bangsa kita pada pembentukan sedjarah bangsa jang harum dan tjemerlang, akan tetapi djanganlah kita takbur didalam itu, seolah-olah hanja kita dan faham atau perbuatan kita sendiri meskipun itu berarti pengorbanan djiwa kita, jang menentukan nasib atau sedjarah bangsa kita.

Kita satu dari pada 70 djuta bangsa Indonesia, satu dari pada 2000 djuta bangsa manusia. Apa arti kita didalam sedjarah bangsa kita jang telah berpuluh abad ini, apa arti kita didalam sedjarah kemanusiaan jang beratus abad ini.

Sebagai kedjadian sedjarah, naskah inipun akan mempunjai nasib sesuai dengan itu. Djika ia akan disahkan oleh perwakilan bangsa kita, serta perwakilan bangsa Belanda, ia akan mendapat kehidupan didalam sedjarah, djika tidak, iapun telah djuga mendjalankan pekerdjaannja didalam sedjarah, meskipun sebagai naskah sadja. Ia akan dapat hidup sebagai perdjandjian antara bangsa kita dengan bangsa Belanda, atau tidak dapat didjadikan perdjandjian. Bagaimana djuga ia sebagai tiap kedjadian didalam sedjarah akan berlalu setelah mendjalankan kewadjibannja, meninggalkan akibat jang harus menjambung perdjalanan sedjarah.

Demikianlah hendaknja sikap serta pengertian kita didalam berhadapan dengan naskah perdjandjian jang kita hadapi ini. Apa jang tertulis didalamnja penting artinja, apa lagi djika nanti diterima oleh kedua perwakilan rakjat dinegeri kita ini dan dinegeri Belanda, akan tetapi lebih penting lagi, adalah lakon serta pengaruhnja bagi sedjarah dan perdjuangan bangsa kita selandjutnja.

Ia penting, akan tetapi mendjadi perdjandjian atau tidak, ia hanja suatu ketika sadja didalam perdjalanan sedjarah bangsa kita jang menghitung dengan abad.

Apakah arti ketika ini untuk sedjarah bangsa kita jang akan datang? Artinja adalah, bahwa ketika ini dapat kita pastikan sebagai tanda djauh, sebagai pal batu jang menundjukkan angka kilometer bagi bangsa kita didalam perdjalanannja mentjari tjita-tjita jang seluhur-luhurnja, jaitu kesempurnaan djasmani dan rochani, tidak sadja bagi bangsa kita, akan tetapi djuga untuk seluruh kemanusiaan.

Sebagai ketika didalam sedjarah, naskah ini tentu tiada dapat dibandingkan dengan Indjil, Qur'an ataupun Traktat Versailles, akan tetapi bagi sedjarah bangsa kita, demikianlah arah pengaruhnja. Demikian pula untuk bangsa Belanda.

Bagi kita sekarang untuk berusaha supaja pengaruh ketika ini akan bermanfa'at bagi bangsa kita.

MERDEKA.

Pidato Mr. Moh. Rum

Begitu pula Mr. Moh. Rum pada tgl. 24 Nopember 1946 mengutjapkan djuga pidato radio sebagai berikut :

Assalamoe'alaikoem w. w.

Pendengar - pendengar Jth.

Sudah satu minggu Rentjana Persetudjuan antara delegasi Belanda dan Indonesia diumumkan, dihadapkan kepada rakjatnja masing-masing untuk mendjadi perhatian.

Rakjat Indonesia, jang telah lebih satu tahun menjatakan kemerdekaannja dan menuntut pengakuannja dari dunia Internasional, benar-benar menundjukkan sifat jang njata dalam menghadapi soal jang penting ini.

Rentjana Persetudjuan ini mendjadi perhatian jang hangat disegala golongan dan lapisan rakjat umumnja, sepadan dengan kedudukan rakjat jang mendjundjung tinggi dasar-dasar demokrasi, dengan menjatakan pendapatnja dengan perantaraan pimimpin-pemimpinnja. Disamping itu njata pula, bahwa dikalangan rakjat penuh kepertjajaan kepada Pemerintahnja. Sebab pendapat-pendapat jang telah dikeluarkan itu hanja bersifat sementara, sambil menunggu dengan hati terbuka kepada pendjelasan-pendjelasan jang masih akan diberikan, supaja arti dan isi Persetudjuan itu dapat dipahamkan dengan seluas-luasnja dan sedalam-dalamnja. Sebab njatalah, bahwa Rentjana Persetudjuan jang me-

ngatur pengakuan kemerdekaan sesuatu Negara dan kerdja bersama dengan Negara lain dalam 17 pasal, tidak dapat dipahamkan dengan tidak mendapat pendjelasan jang tjukup dan terang.

Pendengar-pendengar jang terhormat,

Djika kita hendak menindjau hasil perundingan dari dua pihak jang bertentangan, maka kita tidak akan dapat mengerti dan menghargai hasil perundingan itu djika tidak mengetahui lebih dulu apakah jang mendjadi dasar dari masing-masing pihak dalam perundingan itu. Maka dalam perundingan ini amat djauhlah perbedaan antara dasar bermula dari pihak Belanda dan dasar pihak Indonesia. Dasar pihak Belanda jang mendudukkan diri atas kedaulatan terhadap Indonesia. sebagaimana jang berlaku sebelum perang, berhadapan dengan dasar pihak Indonesia jang mendasarkan kepada kedaulatan Negara sendiri di Indonesia, sedjak memproklamirkan Negaranja sendiri. Djika dasar permulaan jang satu sama jang lain begitu djauh itu, dapat didekatkan dalam suatu Rentjana Persetudjuan, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa terang sekalilah bahwa kenjataan pada pihak jang satu telah memaksa pihak jang lain untuk mengakuinja. Lagu pula tidak boleh kita lupakan, bahwa sedjak kita menjatakan kemerdekaan Negara kita, seluruh dunia senantiasa memperhatikan dengan minat jang besar kedudukan dan kemadjuan Negara kita.

Perhatian dunia Internasional terhadap kita itu, tidak hanja kita minta dan ingini, tetapi Negara kita ini memang mendjadi Negara jang patut diperhatikan oleh lain-lain Negara. Karena itu perlu pulalah perundingan itu dipandang dalam suasana dunia Internasional pada tingkatan pergolakan sekarang ini, jang memandang telah sampai sa'atnja soal Indonesia — Belanda diselesaikan, menurut dasar-dasar lazim dalam masa sekarang ini. Maka karena itu delegasi Indonesia merasa telah mentjapai apa jang diwadjibkan kepadanja dengan penuh rasa tanggung-djawab. Persetudjuan ini adalah langkah jang penting untuk mempertjepat dan mendekatkan kita kepada tjita-tjita jang tetap kita pegang teguh.

Kenjataan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Djawa, Madura dan Sumatera, jang sedjak diadakan perundingan antara Belanda dan Indonesia dipegang teguh oleh pihak kita, diakui dengan tiada tawaran lagi. Hanja sadja akan diadakan kerdja bersama tentang kota-kota jang sekarang diduduki oleh Serikat atau Belanda, supaja berangsur-angsur kembali mendjadi daerah Republik.

Untuk keperluan itu dengan segera akan diambil tindakan-tindakan jang perlu-perlu. Disamping itu maka dalam pasal 15 ditentukan, bahwa Pemerintah Belanda akan mengusahakan supaja dengan segera dilakukan aturan-aturan undang-undang agar supaja kedudukan Keradjaan Belanda dalam hukum Negara bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu. Maka dengan itu, dipandang dari sudut Keradjaan Belanda, jang sebelum ada persetudjuan ini, segala sesuatu jang mengenai Republik ini bersifat melanggar hukum, Republik akan mempunjai dasar dalam hukum Negara dan hukum bangsa-bangsa. Ini berarti bahwa dalam perhubungan Internasional Republik mendapat tempat jang tidak melanggar hukum, dan karena itu dapat mempunjai perhubungan dengan luar negeri.

Maka dengan itu Republik jang telah njata kekuasaannja kedalam sebagai Negara jang merdeka, keluar akan djuga menjatakan kekuasaan seperti Negara-negara merdeka umumnja, sebagai Negara jang berdaulat dan berdemokrasi, jang meliputi seluruh daerah Indonesia, bekas „Hindia Belanda" dalam tempo dua tahun. Dengan ini maka ternjata, bahwa delegasi tidak melepaskan tjita-tjita persatuan Indonesia, malah dengan ini hendak melaksanakan tjita-tjita itu.

Undang-undang dasar daripada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan oleh sebuah persidangan pembentuk negara, jang terdiri dari wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu-sekutu lain, dengan djalan demokrasi.

Dalam pasal-pasal jang mengenai pembentukan Negara Indonesia Serikat itu, maka terpeliharalah dasar-dasar, bahwa seluruh bangsa Indonesia jang mem-

punjai tjita-tjita mendjadi satu negara, tapi sekarang karena adanja pergolakan terpisah perhubungannja, dalam tempo jang singkat dengan tjara jang demokratisch akan memberi bentuk kepada negaranja jang satu dan tidak terpisah-pisah.

Sesudah Negara Indonesia Serikat terbentuk, maka antara Negara itu dengan Keradjaan Belanda akan diadakan Persekutuan. Isi persekutuan itu memelihara kepentingan bersama antara kedua pihak, dengan dasar duduk sama rendah tegak sama tinggi. Kepentingan bersama dalam pasal 7 ajat 3 diterangkan sebagai kerdja-bersama dalam perhubungan luar negeri, pertahanan, dan seberapa perlu keuangan dan sebagainja. Bukan isi persetudjuan itu pertahanan atau perhubungan luar negeri, tapi kerdja bersama dalam hal-hal itu. Djadi tiap-tiap anggauta dari persekutuan itu mempunjai pertahanan dan perhubungan luar negeri sendiri-sendiri. Adapun kerdja-bersama itu adalah soal jang dihari kemudian akan diberi isinja. Sementara itu Republik kita diakui dan dapat meneruskan usaha pembangunannja negara jang merdeka kedalam dan keluar.

Kerdja bersama adalah suatu hal jang negara itu akan djundjung tinggi, tidak hanja dengan Nederland sadja, tapi djuga dengan negara-negara lain. Maka adalah mendjadi sifat dari tiap-tiap kerdja-bersama, bahwa hal itu akan rapat dan luas, djika masing-masing pihak mendapat guna.

Kerdja-bersama dalam persekutuan itu akan didjalankan oleh alat-alat perlengkapan persekutuan jang terdiri dari pada wakil-wakil pemerintah masing-masing atau mungkin djuga dari wakil-wakil madjelis perwakilan, atas dasar jang sama. Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat perlengkapan itu atas nama Baginda Radja. Demikianlah arti pasal 8, jang rupanja, djika hanja mendengar perkataannja sadja, dirasakan berat bagi pihak Indonesia.

Maka njatalah bahwa, perkataan „atas nama Baginda Radja" itu hanja perkataan belaka, sebagai symbool, dan demikian pula perkataan „diputjuk Persekutuan Belanda-Indonesia duduklah Radja Belanda".

Negara Indonesia Serikat dan Keradjaan Belanda akan berdiri sama deradjatnja, masing-masing merdeka, souverein, tidak ada kekuasaan jang ada diatasnja.

Lain-lain hal jang akan mendjadi desar dari Persekutan itu akan ditentukan nanti, sebagai tersebut dalam pasal 10. Dalam hal ini kedua pihak, Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia akan bekerdja bersama dengan dasar-dasar jang sama. Maka djika dalam hal itu ada perselisihan, maka jang akan memutuskan bukan Radja Belanda, tapi menurut pasal 17, sebuah arbitrage Internasional, sebagai lazim dalam perdjandjian-perdjandjian antara negara-negara jang merdeka.

Djika persetudjuan ini dapat pengesahan dari madjelis perwakilan dari masing-masing pihak, maka terbukalah djalan jang luas sekali untuk meneruskan usaha pembangunan Negara. Disamping kerdja bersama mendirikan Negara Indonesia Serikat jang berdaulat dan berdemokrasi, maka lapang usaha untuk Republik kedalam dan keluar akan pula menghadapi kemungkinan-kemungkinan jang berarti bagi bangsa kita.

Mudah-mudahan hal ini akan tjukup diinsjafkan oleh tiap-tiap kita.

M e r d e k a.

b. Reaksi didalam dan diluar negeri

Sajap Kiri menerima

Sajap Kiri pada tgl. 14 Desember 1946 mengeluarkan sebuah manifes jang memuat alasan-alasan mengapa Sajap Kiri pro Naskah rentjana Persetudjuan Indonesia - Belanda. Dibawah ini adalah kutipan dari manifes itu :

Badan-badan jang tergabung dalam Sajap Kiri, jaitu Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia dan Pemuda Sosialis Indonesia disokong oleh Lasjkar Rakjat dan Gerakan Republik Indonesia, telah mengumumkan sikapnja terhadap rentjana Persetudjuan Indonesia - Belanda. Rentjana itu diterima dengan disertai alasan-alasan jang telah diumumkan pula.

Sajap Kiri merasa perlu menjatakan sikapnja bersama, jaitu menerima rentjana Persetudjuan itu sebagai sjarat untuk mentjapai tjita-tjita sosialisme dan demokrasi.

Selandjutnja Sajap Kiri mengandjurkan, supaja orang-orang jang setudju atau menolak Naskah tetap memelihara persatuan. Dalam mengemukakan sikapnja masing-masing hendaknja mereka djangan mempergunakan kekerasan, antjaman, pentjulikan dsb.nja. Antjaman-antjaman atau sindiran-sindiran jang sudah diutjapkan, sangat merugikan kesatuan bangsa Indonesia.

Kita - demikian Sajap Kiri - menerima Naskah, bukan karena kita puas dengan isinja. Tidak ! Menerima Naskah itu berarti : menggunakan kesempatan-kesempatan baru untuk melandjutkan perdjuangan kita dengan mendapat hatsil jang lebih banjak.

Sajap Kiri berpendapat, bahwa dalam menghadapi suasana politik internasional, djelaslah, bahwa sehabis peperangan dunia II kekuatan imperialis dan reaksioner tetap bertentangan dengan kekuatan sosialis dan progressief diseluruh dunia. Negara Republik Indonesia merupakan sebagian kekuatan dari tenaga sosialis dan progressief itu.

Dengan mentjapai perdamaian (persetudjuan) sekarang ini agressi imperialis Belanda dapat ditjegah dan bangsa Indonesia pun mendapat kesempatan untuk menjusun kembali tenaganja guna meneruskan perdjuangannja.

Mengingat pula keadaan dalam negeri jang mau tidak mau kita ketahui, jalah kurang sempurnanja dalam hal : pimpinan, pertahanan dan ekonomi jang menghadapi beberapa matjam kesukaran untuk melandjutkan revolusi kearah tingkat jang lebih tinggi, maka perlu rakjat Indonesia dengan adanja kesempatan untuk menjempurnakan kekurangan-kekurangan tadi serta mengkonsolidasi kemenangan-kemenangan perdjuangan kita dewasa ini.

Dengan terudjutnja rentjana persetudjuan, maka kedudukan Indonesia akan berubah. Dengan segera negara Republik Indonesia jang diakui de facto di Djawa, Madura dan Sumatera dapat menerobos blokkade Belanda. Negara Indonesia mendapat kedudukan jang sama dengan Negara-negara lain menurut hukum internasional, dapat mengirim wakil-wakil Indonesia keluar negeri, dapat mendatangkan bahan-bahan jang kita perlukan guna pembangunan negara dan guna kebutuhan rakjat se-hari-hari. Pun pula dengan adanja persetudjuan itu kita dapat memperkuat perdjuangan kita didaerah-daerah diluar Djawa, Madura dan Sumatera, sehingga dasar-dasar Negara kita dapat meliputi seluruh kepulauan Indonesia. Untuk mendjamin supaja kesempatan menjusun kembali tenaga dapat dipergunakan sebaik-baiknja maka harus dipenuhi sjarat-sjarat seperti berikut :

1. Dilapangan ekonomi. Tjabang-tjabang produksi terpenting untuk hadjat hidup orang banjak harus dikuasai oleh negara. Bank-bank besar demikian pula.
2. Dilapangan pertahanan. Tentara Indonesia harus diperlengkapi dan dilatih setjara modern, dididik dengan haluan demokrasi dan anti pendjadjahan dan membuang segala sisa dan tjara fasis didalamnja. Tentara Belanda selekas mungkin harus meninggalkan seluruh daerah kepulauan Indonesia.
3. Untuk mewudjudkan sjarat-sjarat tadi, maka perlulah Pemerintah Negara dan alat-alatnja terdiri dari orang-orang jang berhaluan revolusioner dan progressief, terutama djabatan-djabatan jang penting dikalangan Pamong Pradja dan kemakmuran.

4. Dengan tidak mengurangi apa jang termaktub dalam rentjana persetudjuan, maka harus diichtiarkan supaja bentuk Negara Indonesia Serikat tidak bertentangan dengan azas kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam U.U.D. Ini berarti bahwa Pemerintah Negara Indonesia Serikat harus merupakan suatu pemerintah jang kuat dengan memberikan kesempatan jang seluas-luasnja kepada daerah-daerah buat mempunjai aturan-aturan sendiri jang sesuai dengan keadaan daerah jang bersangkutan. Selain daripada itu dan untuk memenuhi sjarat-sjarat tersebut factor-factor jang terpenting jalah :
   I. Menaruh kepertjajaan kepada kekuatan Rakjat djelata sebagai sumber untuk menjusun tenaga Rakjat diseluruh lapangan buat meneruskan revolusi kita.
   II. Adanja partai jang memberi pimpinan kepada revolusi itu, partai jang tidak bimbang melawan imperialisme dan fasisme dan anti haluan lebih kiri dari pada kiri.

Menolak rentjana Persetudjuan Indonesia - Belanda berarti bahwa kita memperbesar kemungkinan-kemungkinan dari pihak kaum imperialis dan reaksioner baik dari luar maupun dari dalam untuk memukul revolusi kita kembali.

Keadaan pada dewasa ini membuktikan bahwa dengan djalan halus atau kasar mereka akan menggunakan setiap kelemahan revolusi kita. Djadi teranglah bahwa sjarat-sjarat jang telah dikemukakan tadi hanja dapat dilaksanakan kalau kita menerima rentjana Persetudjuan.

Keterangan bersama oleh para Menteri Warga Masjumi

Berhubung dengan rentjana Masjumi dan G.P.I.I. berkenaan dengan sikapnja terhadap Naskah, diantara mana dinjatakan pula sikapnja terhadap para Menteri warga Masjumi, sebagaimana tertera dalam pasal 5 dari rentjana tersebut dan diumumkan tgl. 6 - 12 - 1946 jakni :

„Mengharapkan kepada anggauta Masjumi didalam Kabinet jang sekarang, supaja berichlas hati menjesuaikan dirinja dengan keputusan penolakan partai terhadap Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda", dst.nja.

Maka Menteri-menteri warga Masjumi memberi keterangan sbb.:

I. Kabinet sekarang ini adalah Kabinet Nasional, bukan Kabinet Koalisi. Maka menurut tata tertib parlementer dan adat politik, tidak seharusnja suatu partai menentukan suatu sikap politik terhadap anggautanja jang mendjadi menteri dalam kabinet jang demikian sifatnja.

II. Oleh karena itu Menteri-menteri warga Masjumi kini sedang menjelesaikan dengan Putjuk Pimpinan Masjumi soal-soal jang berkenaan dengan keputusan-keputusan dan tjaranja mengambil keputusan dalam konperensi kilat Masjumi di Solo jang baru lalu.

Ditanda tangani .

K. H. A. Salim	(Menteri Muda Luar Negeri).
K. Fatchurrachman	(Menteri Agama).
Mr. Moh. Rum	(Menteri Dalam Negeri).
Harsono Tjokroaminoto	(Menteri Muda Pertahanan).
Wachid Hasjim	(Menteri Negara).
Mr. Sjafruddin Prawiranegara	(Menteri Keuangan).
Mr. Jusuf Wibisono	(Menteri Muda Kemakmuran).
Moh. Natsir	(Menteri Penerangan).

Purwokerto 28 - 12 - 1946.
Sesuai dengan Keputusan Konperensi
para Menteri warga Masjumi di
Purwokerto 28 - 12 - 1946.
(tt) Moh. Natsir.

c. Menerima persetudjuan Linggadjati

Sementara itu setelah membitjarakan Naskah Persetudjuan Linggadjati, dalam sidangnja pada tanggal 10 Desember, Kabinet Belanda menjetudjui Naskah Persetudjuan Belanda — Indonesia.

Pada hari itu djuga Menteri Djadjahan Belanda Mr. Jonkman membatjakan Memorie van Toelichting dihadapan Tweede Kamer tentang Persetudjuan tersebut jang disusun dari keterangan-keterangan jang didapat dari Komisi Djenderal.

*

Suara Partai-Partai dan Organisasi-Organisasi Rakjat

Angkatan Komunis Muda menolak

Jogja, 20 - 11 - 1946.

Sekretariat **P.P. Angkatan Komunis Muda** mengumumkan :

Putjuk Pimpinan Angkatan Komunis Muda dengan mewakili seluruh Tjabang-tjabangnja setelah mempeladjari putusan-putusan sementara dari perundingan Indonesia — Belanda jang sudah ditanda tangani baru-baru ini, menjatakan tidak setudju 100% terhadap putusan-putusan jang telah diambil oleh Delegasi kita itu, dengan alasan : Bahwa segala tindakan jang telah diambil dari mulai pertama perundingan sampai achirnja mengambil putusan tersebut, bukan sadja merugikan pihak kita dengan setjara besar-besaran, tapi djuga melanggar kedaulatan Undang-Undang Negara R. I. dengan setjara terang-terangan.

*

Parkindo menerima

Jogja, 20 - 11 - 1946.

Pengurus Besar Partai Keristen Indonesia mengumumkan :

Naskah Persetudjuan antara Delegasi Pemerintah kita dan Komisi Djenderal Belanda adalah hatsil perdjuangan Pemerintah kita jang kita dapat terima berdasarkan atas kenjataan, bahwa dalam Naskah itu kedaulatan Negara kita tidak tersinggung.

Hanja sadja terletak pada kita untuk bekerdja segiat-giatnja memberi isi kepadanja, sehingga terudjudlah negara Indonesia Merdeka sepenuh-penuhnja jang sedjak dahulu mendjadi idam-idaman kita.

*

Lasjkar Rakjat Djawa Barat menolak

Krawang, 26 - 11 - 1946.

Lasjkar Rakjat seluruh Djawa Barat jang mengachiri konperensinja di Krawang dengan rapat Raksasa di aloon-aloon tanggal 24 - 11 - 1946 telah mengambil resolusi berkepala : Sikap dan tuntutan Rakjat Murba, menentang dan menuntut batalnja perundingan antara Delegasi Indonesia dan Belanda serta memutuskan perundingan dengan Belanda.

1. Menjatakan tidak pertjaja kepada Kabinet Sjahrir dan menuntut bubarnja.
2. Menuntut terbentuknja kabinet jang radikal revolusioner untuk mempertahankan dan memperteguh kemerdekaan 100% serta memperdjuangkan kebahagiaan hidup rakjat murba.

3. Menuntut Kemerdekaannja tawanan - tawanan politik jang ditahan oleh Kepolisian Republik jang sudah memperdjuangkan kemerdekaan tanah air 100%.

*

Barisan Banteng menolak

Solo, 26 - 11 - 1946.

Konperensi Barisan Banteng Indonesia pada tanggal 23/24 - 11 - 1946 di Solo jang diwakili kurang lebih 300 orang anggauta tetap, setelah mempeladjari rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda memutuskan, bahwa konperensi Barisan Banteng Indonesia menolak rentjana Persetudjuan itu.

*

Sarekat Buruh Minjak setudju

Jogja, 25 - 11 - 1946.

Setelah mendengarkan pendjelasan-pendjelasan Rentjana Persetudjuan dan membitjarakannja masak-masak, wakil-wakil Sarekat Buruh Minjak jang mewakili lebih kurang 20.000 kaum buruh, dalam Konperensinja tanggal 22 Nopember 1946 berpendapat bahwa dengan Naskah tersebut perdjuangan rakjat dan negara Indonesia Merdeka menempuh tingkat baru, teristimewa kaum buruhnja.

Berhubung dengan itu Sarekat Buruh Minjak menjatakan sikapnja menjetudjui Naskah tersebut dan siap menghadapi keadaan baru ini dengan segala konsekwensi sebagai organisasi buruh perusahaan jang sangat penting.

*

Sarekat Buruh Gula

Terhadap pasal 14 naskah persetudjuan.

Jogja, 26 - 11 - 1946.

Pengurus Besar Sarekat Buruh Gula jang berkedudukan di Jogjakarta di bawah pimpinan Drs. Danuhusodo mengumumkan sikapnja berkenaan dengan pasal 14 dari Naskah rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda tentang perusahaan-perusahaan bekas milik bangsa asing.

Kepada seluruh buruh gula terutama, diandjurkannja untuk tetap tenang dan tidak mengambil tindakan apa-apa pun sebelum ada putusan jang terachir dari K. N. I. Pusat dan sebelum menerima perintah langsung dari P. B.

*

P. N. I. menolak

Jogja, 27 - 11 - 1946.

Dalam sidangnja pada tanggal 26 - 11 - 1946 di Jogjakarta Dewan Partai Pleno Partai Nasional Indonesia sambil menunggu keputusan Partai seluruhnja jang pasti, telah mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Tidak menjetudjui Rentjana Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda, karena bunji dan makna Naskah dan pendjelasan-pendjelasan disertai bahan-bahan lain jang didapat hingga tgl. 26 - 11 - 1946 tidak dapat memberi kejakinan bahwa akan terdjamin hidupnja Republik Indonesia sebagai Negara jang dalam arti politis ekonomis.

2. Membentuk suatu Panitya jang akan menjusun usul-usul perubahan dan sebagainja terhadap Naskah tadi untuk mendjamin hidupnja Republik Indonesia sebagai Negara jang berdaulat jang akan dimadjukan kepada Kongres luar biasa.
3. Akan mengadakan selekas mungkin Kongres luar biasa itu untuk menetapkan sikap Partai seluruhnja terhadap Naskah Persetudjuan tadi.
4. Menjetudjui bahwa Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda itu akan dimintakan pengesahan (ratifikasi) kepada Komite Nasional Pusat Pleno (pasal 11 U. U. D.).
   Partai Nasional Indonesia akan tunduk kepada keputusan K. N. I. Pusat tadi.

*

Muhammadijah menolak

Muhammadijah dalam pertemuan silaturachmi dengan utusan-utusan tjabang dan rantingnja seluruh Djawa dan Madura di Jogjakarta pada tgl. 24/26-11-'46 dengan suara bulat tidak setudju naskah rentjana persetudjuan Indonesia — Belanda.

*

P. K. R. I. menjetudjui

Solo, 26 - 11 - 1946.

P. B. Partai Katholiek Republik Indonesia dalam sidangnja pleno pada tanggal 23 - 11 - 1946 di Surakarta pertjaja :

1. bahwa Delegasi Indonesia dalam perundingannja dengan Komisi Djenderal Belanda mendasarkan segala putusannja pada keadaan senjatanja dengan menghitungkan semua kekuatan kita didalam dan diluar negeri dibandingkan dengan kekuatan pihak-pihak lain ;
2. bahwa Naskah rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda dengan mengingati keadaan senjatanja, sebagaimana kita hadapi pada waktu itu merupakan hatsil setinggi-tingginja jang sekarang dapat tertjapai.

Menimbang : bahwa susunan negara seperti terlukis dalam rentjana naskah persetudjuan tersebut tidak bertentangan, bahwa amat mendekati tudjuan kita ialah terbentuknja Negara Indonesia Merdeka jang berdaulat sepenuh-penuhnja dengan meliputi seluruh Indonesia sebagai djaminan jang terkuat untuk mentjapai sebesar-besarnja kebahagiaan umum.

Menetapkan pendiriannja sebagai berikut :

Pengurus Besar P. K. R. I. dapat menerima rentjana naskah persetudjuan Indonesia — Belanda dengan memadjukan andjuran, supaja disampingnja diadakan protokol tambahan (additionies protokol) dengan memuatkan keterangan-keterangan jang dapat menambah kepuasan dikalangan rakjat.

*

B.P.R.I. menolak

Malang, 27 - 11 - 1946.

Konperensi Barisan Pemberontakan Rakjat Indonesia (B.P.R.I.) seluruh Djawa dan Madura pada tanggal 15, 19 dan 23 - 11 - 1946 (Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Djawa Timur) memutuskan, menolak rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda.

G. P. I. I. tidak setudju

Jogja, 28 - 11 - 1946.

Putjuk Pimpinan G. P. I. I. dalam sidang plenonja pada tanggal 18 - 19 / 11 1946 dan tanggal 27 — 28 / 11 di Jogjakarta, sambil menunggu keputusan G.P.I.I. seluruhnja, telah menuntut pendiriannja sebagai berikut:

1. tidak menjetudjui rentjana Naskah persetudjuan Indonesia — Belanda, karena isi pendjelasan dan bahan-bahan lainnja tidak dapat mejakinkan bahwa hidupnja negara kesatuan Republik Indonesia Merdeka akan dapat terdjamin, baik politisch maupun ekonomisch.
2. mengadakan konperensi G.P.I.I. pada tanggal 4 — 5 Desember 1946 di Solo.

*

Putjuk Pimpinan K.R.I.S. tidak setudju

Jogja, 30 - 11 - 1946.

Putjuk Pimpinan Kebaktian Rakjat Indonesia Sulawesi (KRIS) dalam rapat plenonja pada tanggal 26 — 28 - 11 - 1945 di Jogjakarta, sambil menunggu keputusan konperensi K.R.I.S. seluruhnja, telah menentukan sikap tidak menjetudjui rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda dengan alasan:

1. Rentjana tersebut tidak memberikan isi kepada djiwa persatuan seluruh rakjat Indonesia dan mengakibatkan perbedaan nasib golongan-golongan rakjat.
2. Akibat-akibat tersebut diatas menghambat perdjuangan mentjapai kesatuan Negara Indonesia.

*

Ikatan Pemuda Kalimantan menjerah

Solo, 28 - 11 - 1946.

Rapat konperensi kilat Ikatan Pemuda Kalimantan seluruh Djawa dan Madura di Surakarta pada tanggal 26 dan 27 Nopember 1946 berpendapat:

1. Bahwa dengan adanja naskah persetudjuan antara Delegasi Indonesia dan Komisi Djenderal Belanda itu, Belanda akan dapat mengambil untuk mendjalankan tipu muslihatnja guna mempengaruhi Kesatuan Negara dan masjarakat Indonesia.
2. Bahwa keadaan jang njata dalam dan luar negeri sangat mempengaruhi djalannja perundingan Delegasi Indonesia dan Komisi Djenderal Belanda itu.

M e m u t u s k a n:

Menjerahkan kepada Badan Perwakilan Rakjat, diterima atau ditolaknja Naskah Persetudjuan itu, dengan penuh keinsjafan bahwa perdjuangan diteruskan sehingga terlaksana Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*

P. B. Partai Rakjat tidak setudju

Solo, 29 - 11 - 1946.

Dalam rapatnja P. B. Partai Rakjat pada tanggal 28 - 11 - 1946 di Surakarta, P. B. Partai Rakjat berpendapat tidak menjetudjui Naskah rentjana tersebut, karena rentjana Naskah tersebut tidak tjotjok dengan isi maksud proklamasi

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, jang telah disetudjui dan dibela oleh rakjat menurut hasrat pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti dalam U. U. D. negara kita dan bertentangan dengan tudjuan Partai Rakjat, jalah:

Partai Rakjat memperkokoh tegaknja dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia kearah masjarakat jang berdasar sosialistisch. Rapat tersebut memutuskan akan mengirim nota kepada K. N. I. Pusat sebagai Badan Perwakilan Rakjat jang berhak memutuskan nasib Negara Republik dengan rakjatnja jang dalam Badan Perwakilan mana Partai Rakjat belum mempunjai wakilnja.

*

P. A. R. P. I. M. setudju

Pusat Pimpinan „Parpim" dalam sidangnja pada tanggal 29/30 - 11 - 1946 memutuskan setudju dengan rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda.

Keputusan ini berdasar perhitungan laba dan rugi, jang berachir pendapatan, bahwa penerimaan Rentjana Persetudjuan akan menguntungkan.

Persetudjuan ini bukan berarti selesainja perdjuangan, akan tetapi hanjalah perpindahan langkah kemuka untuk seterusnja dengan memakai alat itu, melandjutkan perdjuangan, sehingga tertjapai tjita-tjita rakjat Indonesia seluruhnja, jang luhur dan mulia.

*

P. B. Masjumi menolak naskah persetudjuan

Jogja, 3 - 12 - 1946.

Dewan Penerangan P. B. Masjumi mengumumkan: Sidang lengkap P. B. Masjumi jang dilangsungkan pada tanggal 21 — 22 Nopember 1946 di Jogjakarta telah mengambil kebulatan hati: menolak Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda. Putusan itu diambil sesudah mempeladjari isi Naskah itu dari segala djurusan dan sesudah mendengarkan pertimbangan dan pemandangan dari kepala-kepala bagian, jaitu: bahagian Pemuda (P.P.G.P.I.I.), bahagian Wanita (P.P. Muslimat), bahagian Pembelaan (Markas Tertinggi Sabilillah) Hisbullah dan sesudah mendengarkan advies dan pertimbangan dari pimpinan Madjelis Sjura.

Pertimbangan dan pemandangan djuga diberikan oleh wakil-wakil anggauta-anggauta istimewa jaitu: P. B. Muhammadijah, P.B.N.U. dan P.B.P.O.I.

*

Barisan Buruh Listrik dan Gas setudju

Jogja, 3 - 12 - 1946.

Barisan Buruh Djawatan Listrik dan Gas Indonesia dalam konperensi kilat pada tanggal 30 - 11 - 1946 — 1 - 12 - 1946 di Jogjakarta, dihadliri oleh Tjabang-tjabang dan Pusat Djawatan dengan stafnja, sesudah mempeladjari, memahamkan dan mempertimbangkan Naskah Rentjana Persetudjuan sedalam-dalamnja mengambil putusan sebagai berikut: menerima Naskah Rentjana Persetudjuan.

P. B. I. setudju

Jogja, 3 - 12 - 1946.

Pimpinan Pusat P. B. I. Jogjakarta mengumumkan sikap pimpinan Pusat P.B.I. terhadap Naskah Rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda sebagai berikut: Pertemuan pleno Pimpinan Pusat P.B.I. di Jogjakarta telah memutuskan: menerima Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda sebagai satu sjarat perdjuangan jang perlu diambil sesuai dengan suasana politik didalam dan diluar negeri dimasa ini untuk mendapatkan dasar perdjuangan baru dalam menjelesaikan Revolusi nasional dan membuka djalan untuk mempertinggi tingkatan perdjuangan, dimana kaum buruh dapat mendjadi faktor kekuasaan jang aktief dan menentukan.

*

Pesindo menerima naskah persetudjuan

Jogja, 6 - 11 - 1946.

Setelah mengadakan konperensi lengkap dengan utusan komisaris daerah dan tjabang serta Dewan Pusat Pimpinan pada tanggal 4 — 5 bulan Desember 1946 di Madiun, Pesindo mengambil keputusan tentang Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda sebagai berikut:

Setelah menerima pendjelasan setegas-tegasnja serta mempersoalkan isi Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda seluas-luasnja, maka Pesindo dalam rapat Dewan Pusat Pleno tanggal 28/30 11 - 1946 dan disahkan oleh Konperensi kilat Pesindo dan dihadliri Komisaris daerah dan tjabang tanggal 4 - 12 - 1946 di Madiun menetapkan:

Mengingat bahwa perdjuangan kita harus diperhitungkan atas dasar-dasar jang njata dengan mengingat perimbangan-perimbangan kekuatan didalam dan diluar negeri pada dewasa ini.

Menimbang untuk meneruskan revolusi serta mentjapai kemenangan dalam memperdjuangkan tjita-tjita dan kebahagiaan rakjat.

Memutuskan Pesindo seluruhnja menerima Naskah Rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda dengan disertai tuntutan:

1. Pemerintahan dengan segala alat-alatnja dan
2. anggauta-anggauta perlengkapan penjelenggaraan pekerdjaan berkenaan dengan Naskah rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda harus terdiri dari orang-orang jang revolusioner dan progresief.

Sikap ini tidak mengurangi keputusan-keputusan kongres Pesindo kedua.

*

Pimpinan Pusat Wanita Rakjat menolak

Jogja, 7 - 12 - 1946.

Setelah menjelidiki Naskah Persutudjuan Indonesia — Belanda dalam rapat pimpinan pusat pada tanggal 3 - 12 - 1946 maka Pimpinan Pusat Wanita Rakjat memutuskan:

a. Pimpinan Pusat Wanita Rakjat menolak bulat-bulat Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda.
b. Meneruskan perdjuangan kemerdekaan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan itu, sampai Indonesia bebas Merdeka 100%.
c. Mengadjak kepada seluruh kaum Ibu Indonesia, supaja menetapi kewadjibannja sebagai Ibu Bangsa dan Ibu Negara jang seluhur-luhur dan sesutji-sutjinja, untuk memerdekakan tanah-tumpah darahnja, agar dapat turut melaksanakan perdamaian dunia jang kekal dan abadi.
d. Mengadakan konperensi pada tanggal 10 - 12 - 1946 di Jogja.

Masjumi dan G. P. I. I. tidak setudju

Solo, 5 - 12 - 1946.

Dalam konperensi Masjumi dan G.P.I.I. pada tanggal 4 dan 5 Desember 1946 di Surakarta jang dikundjungi oleh Pengurus Besar dan utusan-utusan dari seluruh daerah: antaranja tampak Mr. Rum, Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Moh. Natsir, Wali Alfatah, Harsono Tjokroaminoto dan Anwar Tjokroaminoto.

Konperensi tersebut mengambil keputusan dengan dipertimbangkan masak-masak, ialah tidak setudju dengan Naskah Rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda.

*

Partai Sosialis menerima

Jogja, 7 - 12 - 1946.

Konperensi Dewan Partai Partai Sosialis jang dilangsungkan pada tanggal 6 Desember 1946 untuk merundingkan tentang Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda.

M e m u t u s k a n :

a. Menerima rentjana Persetudjuan sebagai dasar untuk melandjutkan perdjuangan keluar dan menjelesaikan revolusi Nasional kedalam.

b. Mengandjurkan kepada seluruh rakjat untuk menerimanja sambil memperkuat persatuan rakjat serta menjusun segenap tenaga supaja persetudjuan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan dan mengokohkan seluruh Negara Indonesia Merdeka.

c. Menjampaikan pesan kepada Pemerintah jang merupakan bahan baginja dalam membuat peraturan-peraturan berkenaan dengan segala sesuatu jang termaktub dalam Naskah Persetudjuan tersebut.

*

Partai Komunis Indonesia setudju

Solo, 9 - 12 - 1946.

Untuk menentukan sikap jang tegas terhadap Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda, maka Partai Komunis Indonesia pada tanggal 4 dan 5 Desember telah melangsungkan konperensinja di Solo jang dikundjungi oleh seluruh tjabang-tjabangnja di Djawa dan Madura.

Setelah dipeladjari dengan seksama isi Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda dan pemandangan dari sudut politik, ekonomi dan lain-lainnja, maka P.K.I. memandang perlu menerima Naskah itu sebagai suatu sjarat jang baik untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan jang akan datang.

Pula sebagai sikap jang taktis jang terdapat dari tindjauan hukum-hukum, sjarat dan pengalaman revolusi jang sudah njata dan tegas.

*

Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia dan Naskah

Jogja, 18 - 12 - 1946.

Rapat Dewan Pimpinan Pusat Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, sebagai badan Gabungan (federatief) tidak menentukan sikap terhadap Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda.

Tiap-tiap organisasi jang tergabung didalamnja menentukan sikap sendiri-sendiri. Sekalipun demikian berpendapat:

a. Bahwa ditolak atau diterimanja Naskah Rentjana Persetudjuan itu, adalah siasat belaka dalam perdjuangan bangsa Indonesia.
b. Bahwa ditolak atau diterimanja Naskah tersebut tidaklah dapat didjadikan alasan untuk mengadakan perpetjahan dikalangan bangsa kita.
c. Bahwa ditolak atau diterimanja Naskah tersebut mungkin nanti ada perasaan keketjewaan dikalangan sebagian dari bangsa kita.

M e n i m b a n g :

Pentingnja memelihara persatuan, sungguhpun berlainan sikap terhadap Naskah.

M e m u t u s k a n :

Dengan berbagai-bagai djalan, usaha dan pengeluaran pamflet-pamflet dan siaran-siaran jang berisi andjuran kepada rakjat umumnja, terutama Pemuda agar tetap bersatu dan senantiasa siap sedia menghadapi segala kemungkinan.

*

Markas Besar A. M. K. R. I. menerima

Jogja, 11 - 12 - 1946.

Sidang istimewa Markas Besar A.M.K.R.I. pada tanggal 29/11 dan 4/12 1946 di Jogjakarta memutuskan:

a. Menerima putusan perundingan delegasi Indonesia — Belanda di Linggadjati tentang: Naskah Rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda.
b. Mendesak Pemerintah menerangkan Naskah rentjana ini sedemikian rupa, hingga seluruh angkatan muda pada chususnja dan seluruh rakjat djelata umumnja, dapat menghargai pekerdjaan Delegasi kita.
c. Supaja Pemerintah dalam mendjalankannja persetudjuan itu membuat perdjandjian tambahan untuk mentjegah timbulnja salah faham.

*

Partai Tani setudju

Solo, 9 - 12 - 1946.

Konperensi Partai Tani telah dilangsungkan pada tanggal 8 - 12 - 1946 di Surakarta jang telah dikundjungi oleh seluruh Tjabang-tjabangnja perlu untuk memperbintjangkan Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda.

Setelah mempeladjari semasak-masaknja, maka konperensi memutuskan bahwa Partai Tani menjetudjuinja.

Selandjutnja akan tunduk pada putusan K. N. I. Pusat dan sanggup melaksanakan konsekwensinja.

*

Wanita Rakjat menolak

Setelah menjelidiki isi Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda bersandarkan kepada bahan hidup, Wanita Rakjat jang termaktub dalam azas dan tudjuan dengan diperkuat tindjauan politisch - ekonomisch, maka konperensi „Wanita Rakjat" pada tanggal 10 - 12 - 1946 memutuskan:

1. Konperensi Wanita Rakjat menolak bulat-bulat Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda.
2. Meneruskan perdjuangan Kemerdekaan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan itu, sampai Indonesia bebas merdeka 100%.
3. Mengadjak kepada seluruh kaum Ibu Indonesia, supaja menetapi kewadjibannja sebagai Ibu Bangsa, „Ibu Negara" jang seluhur dan sesutji-sutjinja untuk memerdekakan Tanah tumpah darah, agar dapat turut melaksanakan Perdamaian dunia jang kekal dan abadi.

*

Partai Rakjat Djelata menolak

Solo, 11 - 12 - 1946.

Dalam rapatnja pada tanggal 4 - 12 - 1946 di Solo, Pengurus Besar Partai Rakjat Djelata memutuskan, menolak Rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda.

*

Pusat G. R. I. Sunda Ketjil menjetudjui

Jogja, 9 - 12 - 1946.

Untuk dapat meluaskan perdjuangan ke Seberang terutama kedaerah Sunda Ketjil dengan tetap memegang dasar Kesatuan Negara Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat Pengurus Pusat Gerakan Rakjat Indonesia Sunda Ketjil dalam rapatnja pada tanggal 7 - 12 - 1946 menjetudjui Naskah Rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda.

Selandjutnja untuk menentukan sikap Gerakan seluruhnja akan diadakan konperensi pada tanggal 15 - 12 - 1946.

*

P. P. K. I. setudju

Solo, 12 - 12 - 1946.

Dalam rapatnja pada tanggal 23 Nopember 1946 di Solo, Pengurus Besar Persatuan Pemuda Kristen Indonesia dengan Wakil-wakil dari daerah-daerah memutuskan, menerima Naskah Rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda

Dengan konsekwensi :

1. P.P.K.I. mengadjak Badan Kongres Pemuda dan golongan progressief untuk memperhebat kadervorming guna mengisi Naskah Persetudjuan supaja menguntungkan perdjuangan kita bersama.
2. P.P.K.I. berdjuang terus menjusun tenaganja serapi-rapinja diseluruh Indonesia (djadi djuga jang diluar Djawa dan Sumatera) untuk menghadapi segala provokasi, jang bersifat melemahkan semangat perdjuangan dan semangat persatuan Rakjat Indonesia.

Memperkuat desakan Badan Kongres Pemuda dan mendesak golongan progressief dan ikut serta dalam pembersihan terhadap bureaukraten, corrupteurs dan orang orang jang bersemangat kolonial, untuk diganti dengan orang-orang jang berdjiwa revolusioner dan jang mempunjai rasa penuh tanggung djawab terhadap kelandjutan revolusi Indonesia kemasjarakat jang bahagia adil dan makmur bagi rakjat murba.

Sarekat Mahasiswa Indonesia setudju

Solo, 13 - 12 - 1946.

Setelah mendengar pendapat serta pemungutan suara seluruh anggauta Sarekat Mahasiswa Indonesia, maka Pusat Sarekat Mahasiswa Indonesia menerima naskah Rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda.

Mengingat akan :

1. Keadaan dalam negeri kita pada masa tingkatan revolusi dewasa ini.
2. Masih banjak tenaga jang belum dapat dipergunakan serapi-rapinja untuk keperluan perdjuangan kita.
3. Kekuatan imbangan antara Negara kita dengan dunia internasional.

Menimbang bahwa, untuk keperluan perdjuangan kita seterusnja :

1. Perlu akan timbulnja suasana dalam mana kita dapat mengerahkan segala kekuatan daripada seluruh rakjat Indonesia serasioneel-rasioneelnja.
2. Perlu adanja imbangan kekuatan negara Indonesia baik didalam maupun diluar negeri.

Maka memutuskan menerima rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda sebagai suatu siasat perdjuangan politik didalam menjempurnakan kemerdekaan negara kita.

*

Mahasiswa Jogjakarta menerima

Jogja, 14 - 12 - 1946.

Seluruh Mahasiswa Jogjakarta didalam rapatnja pada tanggal 11 - 12 - 1946 setelah menindjau dari segala sudut dan mempeladjari isi Naskah Rentjana Persetudjuan Belanda — Indonesia sedalam-dalamnja menetapkan pendiriannja terhadap Naskah Rentjana Persetudjuan sebagai berikut :

Menerima Rentjana Persetudjuan Belanda — Indonesia sebagai suatu siasat dalam fase perdjuangan Rakjat Indonesia dalam menuntut, memperdjuangkan negara Indonesia Merdeka, jang berdaulat keluar dan kedalam, melingkungi daerah Hindia Belanda dulu.

Menuntut beberapa perubahan dalam beberapa pasal.

Dalam instansi jang penghabisan tunduk kepada keputusan K.N.I. Pusat.

*

Benteng Republik Indonesia

Berhubung dengan adanja sikap Pro dan Contra terhadap Naskah Persetudjuan Indonesia – Belanda, maka Partai/Organisasi jang menjatakan tidak setudju terhadap Naskah tersebut telah bersatu dalam satu ikatan jang bernama Benteng Republik Indonesia. Dasar ikatan Benteng Republik Indonesia jalah mempertahankan kemerdekaan 100% Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tudjuan daripada gerakan tersebut jalah berdjuang, supaja Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda ditolak oleh rakjat dengan mengatur pertanggungan djawab serta akibat-akibatnja. Bentuk ikatan disusun dalam organisasi jang terdiri dari :

1. Dewan Pimpinan :

   Ketua Dewan Pimpinan B.P.R.I., anggauta-anggauta : 1. Masjumi, 2. P.N.I., 3. Angkatan Muda Guru, 4............
2. Dewan Politik terdiri dari : P.N.I., Masjumi, Partai Wanita Rakjat, KRIS dan Partai Rakjat.
3. Dewan Pembelaan terdiri dari Dewan mobilisasi Pemuda Islam, Barisan Banteng, BPRI, Lasjkar Rakjat Djawa Barat, KRIS.

Dewan Pimpinan dan Dewan Pembelaan berkedudukan di Malang sedangkan Dewan Politik di Jogjakarta.

Program perdjuangan sebagai berikut :

1. Menginsjafkan seluruh ranting untuk menolak Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda dengan mengadakan penerangan seluas-luasnja.
2. Menuntut adanja Dewan Perwakilan Rakjat jang mentjerminkan kehendak seluruh Rakjat.
3. Mengatur persiapan konsekwensi penolakan Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda.
4. Menuntut lekasnja pemeriksaan tahanan politik supaja jang ternjata tidak bersalah segera dimerdekakan.
5. Berusaha supaja segala orang jang menolak Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda berorganisasi.

*

Sarekat Buruh Gula menerima

Solo, 10 - 12 - 1946.

Konperensi Sarekat Buruh Gula seluruh Djawa dan Madura, di Solo mulai tanggal 13 — 15 bulan 12 telah mengambil beberapa keputusan diantaranja sebagai berikut :

1. Terhadap Naskah Persetudjuan Indonesia — Belanda setelah menindjau dan mempeladjari semasak-masaknja terutama jang mengenai pasal 14, maka diputuskan, bahwa S.B.G. menerima.
2. Mendesak kepada Pemerintah Agung, supaja bunji pasal 27 dan 33 U.U.D. Negara Republik Indonesia didjalankan setjepat-tjepatnja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.
3. Didalam perintis pembelian jang akan diadakan oleh Pemerintah berhubung dengan adanja modal asing, maka diminta agar supaja duduk serta wakil buruh.
4. Pengurus Besar serta S.B.G. dibentuk baru dibawah pimpinan Drs. Danuhusodo, demikian pula Dewan Penasehat terdiri dari Saudara-saudara Suparwi, Mr. M. Daljono, Alimin dan Dr. Rachmad.

*

Kongres Barisan Banteng menolak

Barisan Banteng Republik Indonesia dalam kongresnja pada tanggal 14 - 16 bulan 12 di Solo telah mengesahkan resolusi kilat jang telah dilangsungkan di Paras jang isinja B.B.R.I. tetap menolak Naskah Rentjana Persetudjuan Indonesia — Belanda dan berpendapat bahwa rakjat Indonesia pada umumnja dan para pemuda pada chususnja masih merasa tjukup mempunjai kekuatan lahir maupun bathin.

5. USAHA MENJEMPURNAKAN SUSUNAN KNIP

(Peraturan Presiden No. 6).

PADA tanggal 30 Desember 1946 Peraturan Presiden No. 6 tentang penambahan anggauta K.N.I. Pusat diumumkan.
Adapun peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

bahwa perlu diadakan penjempurnaan Komite Nasional Pusat jang sesuai dengan aliran-aliran politik serta golongan-golongan besar dalam masjarakat Indonesia ; penjesuaian susunannja dengan pertanggungan djawab Pemerintah kepada Komite Nasional Pusat ;

Mengingat :

Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 18 tahun 1946, putusan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat tanggal 24 bulan Oktober 1946.

Menetapkan Peraturan seperti berikut :
PERATURAN TENTANG MENJEMPURNAKAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT.

Pasal 1.

Dibebaskan untuk melakukan kewadjiban sebagai anggauta Komite Nasional Pusat menurut susunan jang lama ialah anggauta-anggauta jang mendjabat pangkat seperti jang tersebut dibawah ini :

Presiden, Wakil-Presiden Negara Republik Indonesia ; Menteri, Wakil Menteri, Direktur Djenderal dan Sekretaris dari satu Departemen ; Sekretaris Negara, Ketua, Wakil Ketua dan anggauta Dewan Pertimbangan Agung ; Ketua dan Hakim Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi ; Djaksa Agung ; Presiden dan Wakil Presiden Bank Negara Indonesia ; Gubernur, Residen ; Pradjurit Tentara dari pangkat Kolonel keatas.

Pasal 2.

(1) Kepada partai-partai politik besar (bag. a.), serta golongan-golongan besar (bag. b) jang namanja tertjantum dalam daftar lampiran diberi hak untuk mengadjukan tjalon-tjalon guna diangkat sebagai anggauta-anggauta Komite Nasional Pusat.

(2) Banjaknja tjalon, ialah sedikit-dikitnja dua kali djumlah hak perwakilan dalam Komite Nasional Pusat seperti jang tersebut dalam daftar lampiran.

Pasal 3.

(1) Penambahan wakil untuk daerah-daerah luar Djawa - Madura dilakukan sedaerah dari sedaerah.

(2) Djumlah penambahan jang tersebut dalam ajat 1 diterangkan dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4.

(1) Untuk menetapkan penambahan wakil-wakil daerah diluar Djawa-Madura, maka Gubernur (atau wakilnja) daerah jang bersangkutan bersama dengan badan-badan perdjuangan politik jang ada didaerahnja atau untuk daerahnja berhak mengadjukan tjalon-tjalon untuk diangkat sebagai anggauta Komite Nasional Pusat.

(2) Djumlah tjalon-tjalon itu, ialah sedikit-dikitnja dua kali djumlah wakil tambahan itu.

(3) Dalam mengadjukan tjalon-tjalon Gubernur serta badan-badan perdjuangan tersebut pada ajat 1 sedapat-dapatnja mengingat akan pembagian daerahnja dalam Karesidenan-Karesidenan.

Pasal 5.

(1) Perwakilan golongan warga negara jang dibawah pemerintah kolonial tidak termasuk dalam golongan Indonesia ditambah menurut daftar lampiran.

(2) Gabungan-gabungan (perkumpulan-perkumpulan) jang terdapat diantara golongan jang berkepentingan berhak untuk mengadjukan tjalon-tjalon sedikit-dikitnja sedjumlah dua kali djumlah penambahan tersebut dalam lampiran.

Pasal 6.

(1) Daftar tjalon-tjalon harus selambat-lambatnja diterima oleh Sekretariat Negara tudjuh hari sesudah pengumuman Peraturan ini dilakukan.

(2) Pengangkatan anggauta-anggauta baru akan dilakukan dengan Maklumat Presiden.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 29 Desember 1946
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Diumumkan
Pada tanggal 30 Desember 1946
Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan Peraturan Presiden No. 6

PADA tanggal 6 - 1 - 1947, Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat mengadakan Sidang Umum di Purworedjo dengan atjara membitjarakan Peraturan Presiden No. 6 tentang penambahan anggauta-anggauta Komite Nasional Pusat.

Ruangan jang disediakan untuk umum penuh sesak sedang dari pihak Pemerintah jang hadir Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Rum, Menteri Muda Penerangan A. R. Baswedan dan Mr. Hermani dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rapat tersebut oleh Ketua dibatjakan kawat dari Presiden jang menerangkan bahwa jang bertanggung djawab atas Peraturan Presiden No. 6 itu jalah Presiden sendiri dan Presiden bersedia menerima delegasi untuk memberi pendjelasan.

Rapat berdjalan dalam suasana jang panas, dimulai pada djam 10.30 sampai 13.30 dan dilandjutkan pada djam 17.00 sampai 19.30.

Rapat memutuskan sebelum mengambil putusan terhadap Peraturan Presiden No. 6 itu, lebih dulu mengirim delegasi untuk bertemu dengan Presiden. Delegasi tersebut diketuai oleh Mr. Sartono dan anggauta-anggautanja terdiri dari Mangunsarkoro, Drs. Sigit, Dr. Halim, Supeno, Mr. Tambunan dan Sekretaris Badan Pekerdja Mr. Kuntjoro.

Sesudah mendapat pendjelasan dari Presiden nanti Badan Pekerdja akan mengambil putusan terhadap Peraturan Presiden No. 6 tersebut.

Delegasi tersebut pada tanggal 7-1-1947 bertemu dengan Presiden di Istana. Turut hadir dalam pertemuan tersebut ketjuali Presiden djuga Wakil Presiden dan Sekretaris Negara Mr. A. G. Pringgodigdo. Jang dibitjarakan dalam pertemuan tersebut jalah Peraturan Presiden No. 6.

Selandjutnja Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat pada tanggal 10-1-1947 malam membitjarakan Peraturan Presiden No. 6 tentang penambahan anggauta dan susunannja K.N. Pusat.

Dalam pembitjaraan tentang soal tersebut oleh anggauta-anggauta wakil P.N.I. dan Masjumi diadjukan keberatan-keberatan jang pokoknja dapat disimpulkan mendjadi dua, jaitu :

1. Peraturan Presiden No. 6 tidak sah, karena setelah ada Kabinet jang bertanggung djawab, Presiden tidak berhak melakukan tindakan-tindakan „wetgevend".
2. Dalam menentukan peraturan tersebut Badan Pekerdja tidak diadjak berunding.

Sebaliknja dari fihak Partai Sosialis ditegaskan, bahwa berdasarkan prerogatief Presiden sebagai Kepala Negara, Peraturan Presiden No. 6 itu adalah sah.

Mr. Sartono (P.N.I.) sebagai pembitjara pertama mengingatkan kepada tanggung djawab Kabinet kepada Badan Perwakilan Rakjat sedjak tgl. 16 Oktober 1945 dan mengingatkan kepada pengembalian kekuasaan kepada Presiden dengan persetudjuan Kabinet dan Badan Pekerdja K. N. Pusat, kemudian pertanggungan djawab kembali kepada Kabinet, djuga dengan persetudjuan Badan Pekerdja.

Selandjutnja pembitjara menjatakan bahwa kedudukan Presiden Indonesia tidak seperti Presiden Amerika, melainkan seperti radja Inggeris dan Belanda.

Mengingat pentingnja dan isinja Peraturan Presiden No. 6, maka itu adalah satu „daad van wetgeving", padahal belum ada pemberian kuasa kepada Presiden untuk mengadakan pembaruan K. N. Pusat.

Tentang pembaruan K.N. Pusat ini sudah dikeluarkan Undang-undang No. 12. Maka seharusnjalah Presiden membuat Peraturan No. 6 itu sekurang-kurangnja dengan berunding dulu dengan B.P.K.N. Pusat.

Pembitjara achirnja minta supaja kedudukan Presiden ditegaskan oleh Pemerintah, atau Presiden memberi keterangan kepada Badan Pekerdja. Djuga sudah sepantasnja Badan Pekerdja menentukan sikapnja pula.

Mr. Maramis (P.N.I.) berpendapat, bahwa Peraturan Presiden No. 6 tidak sah, karena tidak berdasarkan Undang-undang. Karena itu putusan K.N. Pusat jang akan datang atas Naskah Linggadjati di Malang tidak sah pula.

Dalam membandingkan kedudukan Presiden Indonesia dengan Presiden Amerika, pembitjara menjatakan bahwa dalam hal „uitvoerende macht" sadja ada persamaan. Sistim Amerika berdasar pembagian kekuasaan, dan Presiden

Amerika hanja mendjadi kepala „uitvoerende macht", jang tidak turut tjampur dalam hal membuat undang - undang.

Selandjutnja pembitjara bertanja, apakah perbuatan Presiden ini tindakan „wetgeving" ataukah „uitvoering"? Sebab sedjak tgl. 11 Nopember 1945 pertanggungan djawab ada pada Menteri - menteri. Dalam hal „uitvoering", Presiden tidak berhak mendjalankan undang-undang sendiri, tapi harus dengan perantaraan Menteri, hal ini berlaku djuga dalam hal „wetgeving". Dan pembaruan K. N. Pusat harus berdasarkan Undang - Undang.

Burhanudin Harahap (Masjumi): Sdr. Sartono mengemukakan kemung kinan Presiden sudah mengambil kekuasaan kembali. Tapi sampai sekarang belum ada pengumuman tentang soal itu, sehingga Kabinetlah jang memegang tanggung-djawab politik.

Pada pendapat pembitjara Peraturan Presiden No. 6 tidak sah, dan diusulkannja, supaja Badan Pekerdja mengambil mosi dan djuga Pemerintah supaja mengambil sikap tentang mosi ini.

Mangunsarkoro (P. N. I.) minta perhatian, bahwa setelah di parapnja Naskah Linggadjati, Presiden mengemukakan diri sebagai propagandis Naskah. Kemudian pembitjara mengingatkan, bahwa sesudah rapat pleno di Solo, untuk membarui K. N. Pusat, Presiden telah mengeluarkan peraturan No. 2. Peraturan itu disangkal sahnja, sehingga ditjabut kembali dan diganti dengan Undang - Undang No. 12.

Sekarang Presiden mengeluarkan lagi Peraturan No. 6 dengan tidak diadakan perembukan lebih dulu dengan Badan Pekerdja K. N. Pusat. Pada pendapat pembitjara ini suatu kegandjilan.

Tentang perwakilan Daerah dikatakan oleh pembitjara, bahwa ini tidak selaras dengan keadaan jang sebenarnja.

Selandjutnja pembitjara mengemukakan, bahwa banjak organisasi jang belum mendapat perwakilan, umpamanja Partai Rakjat, Permai dsb.nja jang menolak Naskah. Dan pada pendapat pembitjara jang mendapat tambahan kursi jalah partai-partai jang pro Naskah, barangkali tidak dengan sengadja, kata pembitjara.

Tetapi mau tidak mau timbul pertanjaan, apakah ini tidak berat sebelah? Oleh karena itu dapatlah dimengerti pendapat Sdr. Maramis, bahwa putusan K. N. Pusat atas Naskah Linggadjati di Malang j.a.d tidak sah.

Achirnja pembitjara mengusulkan, supaja Peraturan Presiden No. 6 itu ditjabut kembali, dan supaja diadakan peraturan menurut hukum dengan djalan mupakat sebagai penggantinja.

Safiuddin (P. N. I.) mendesak pula, supaja Peraturan Presiden No. 6 itu ditjabut kembali dan diganti dengan Undang - Undang No. 12. Sebab, katanja, Peraturan Presiden No. 2, jang tidak mendapat contrasign dari Menteri, telah ditjabut kembali.

Pembitjara menerangkan seterusnja, bahwa sekarang adalah saat jang baik untuk tidak menjetudjui Naskah Linggadjati, karena pengertian atas Naskah jang diputar balikkan dinegeri Belanda. Ia kuatir, djika Peraturan Presiden No. 6 itu diteruskan, bukan keselamatan jang didapat melainkan kehantjuran disebabkan kita sama kita berselisih.

Supeno (Partai Sosialis), setelah Ketua membuka giliran kedua, angkat bitjara. Ia setudju benar dengan Peraturan Presiden No. 6 dan pertama-tama ia hendak menjatakan, bahwa ada keanehan sedikit dalam pertanjaan-pertanjaan jang dikemukakan oleh pembitjara-pembitjara jang dahulu. Oleh pembitjara-pembitjara tidak dipersoalkan dasar prerogatief (hak istimewa) jang ada pada Presiden sebagai Kepala Negara. Segala sesuatu jang dikemukakannja hanja mentjari - tjari alasan - alasan staatsrechtelijk untuk menolak Peraturan Presiden No. 6.

Pembitjara berpendapat, bahwa dalam hal ini harus ditjari dasar lain, jaitu bahwa dari dulu pengangkatan anggauta K. N. Pusat harus disahkan oleh Presiden. Dan prerogatief ini belum pernah di sangkal.

Seterusnja pembitjara minta perhatian, bahwa menurut Peraturan Presiden No. 6 bukan dilakukan pembaruan K. N. Pusat, melainkan penambahan anggauta-anggauta. Dan ini memang prerogatief jang ada pada Kepala Negara.

Selain dari itu menurut pembitjara Badan Pekerdja jang sekarang tidak mentjerminkan aliran-aliran jang hidup dalam masjarakat sekarang. Oleh sebab itu ada gandjil djuga bahwa badan sematjam ini akan menambah djumlah anggauta K. N. Pusat.

Pembitjara mengakui, bahwa memang banjak organisasi-organisasi jang belum mempunjai wakil dalam K. N. I. Pusat jang akan datang.

Tetapi pada suatu waktu kita harus menentukan pendirian, jaitu bahwa partai-partai besar jang mempunjai tjabang-tjabang banjak dan terpentjar sadja jang berhak mendapat wakil dalam K. N. Pusat.

Sugondo (Partai Sosialis); Peraturan Presiden No. 6 memperhatikan kehendak Badan Pekerdja K. N. Pusat, meskipun tidak diadjak berunding. Sebab peraturan Presiden tersebut ditetapkan dengan mengingat Undang-Undang No. 12 dan putusan Badan Pekerdja K. N. Pusat tgl. 24 Oktober 1946.

Manai Sophian (P.N.I.); soal Naskah tak dapat dipisahkan dari soal penambahan anggauta K. N. Pusat, sebab penambahan ini ditudjukan untuk keperluan memberi keputusan atas Naskah Linggadjati.

Mr. Tambunan (Parkindo) menerangkan bahwa U.U.D. kita tidak memberi pegangan jang tegas, apakah pertanggungan djawab ada pada menteri ataukah pada Presiden ? U.U.D. kita adalah satu Unicum, lain daripada jang lain, kata pembitjara.

Oleh sebab itu pembitjara mengusulkan supaja Peraturan Presiden No. 6 djangan ditindjau setjara „juridisch staatsrechtelijk", sehingga tiada hasilnja, karena tiadanja pegangan jang tertentu.

Pada pendapat pembitjara soal ini harus ditindjau setjara politis dan praktis. Peraturan Presiden No. 6 itu berdasarkan kejakinan Presiden sebagai Kepala Negara, bahwa dimasa jang genting ini peraturan itu perlu untuk kepentingan Negara.

Dan menurut Wakil Presiden penambahan anggauta K.N. Pusat menurut Peraturan Presiden No. 6 bersifat sementara, dan djika perlu tentang djumlah wakil-wakil akan dipertimbangkan lagi.

Selandjutnja pembitjara mengakui hak prerogatief jang ada pada Presiden dalam hal ini.

Mr. Sartono (P.N.I.) ingin benar, supaja pembitjaraan ini dilandjutkan dengan dihadliri Wakil Pemerintah.

Mr. Tan Ling Djie (Partai Sosialis) setudju dengan usul Saudara Tambunan dan minta supaja Saudara Sartono suka menerimanja usul itu.

Seterusnja pembitjara mengingatkan, bahwa dulu ia pernah mengadjukan usul, supaja kedudukan Presiden ditentukan dengan pasti apakah Presiden itu symbool sadja ?

Tetapi ketika itu ia tak mendapat sokongan. Dan sampai sekarang belum djuga ditetapkan siapakah jang harus bubar bilamana timbul selisih paham, Badan Pekerdja ataukah Dewan Kementerian ?

Mangunsarkoro (P.N.I.) ; seharusnja kita mentjari djalan jang memuaskan untuk pembaharuan K.N. Pusat. Soal ini harus dibitjarakan dengan wakil Pemerintah atau mengadakan mosi.

Sjamsudin St. Makmur (P.N.I.) : jang sangat disesalkan jalah tidak adanja kerdja sama antara Presiden dan Badan Pekerdja dalam menetapkan Peraturan Presiden No. 6.

Menurut pembitjara, Presiden telah mengambil tindakan sendiri sadja dengan tidak mengadakan perundingan dulu dengan Badan Pekerdja.

Mr. Maramis mengusulkan pula supaja pertanggungan djawab Menteri ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Ketua Mr. Assaat mengandjurkan, supaja para anggauta berlaku bidjaksana dan djangan terburu-buru mengambil sikap. Ia mengusulkan, supaja rapat diundurkan sampai sesudah sidang Kabinet, pada tanggal 13 Djanuari 1947. Ketua minta dipertimbangkan pula, apabila hendak mentjabut Peraturan Presiden No. 6 supaja tjaranja mentjabut dilakukan atas dasar jang kuat, jang dapat dipertanggung djawabkan kepada rakjat. Apabila menolak, maka penolakan itu harus disertai dengan menundjukkan djalan, bagaimana sebaik-baiknja mengatasi kesulitan sekarang ini.

Setelah Mr. Sartono, Mr. Maramis dan Mangunsarkoro (ketiganja dari P.N.I.) menjatakan setudjunja atas usul ketua, maka diputuskan untuk menunda rapat sampai tanggal 15 Djanuari 1947.

Komunike Dewan Menteri

Berdasarkan keputusan Dewan Menteri dalam sidangnja di Linggadjati tanggal 22 - 23 Nopember 1946, maka Dewan Menteri dalam sidangnja tanggal 13 Djanuari 1947 di - Jogjakarta memutuskan, bahwa Delegasi Pemerintah Republik Indonesia tetap dikuasakan menanda tangani Persetudjuan Linggadjati jaitu dengan semata-mata berdasarkan fatsal-fatsalnja seperti tersebut didalam Naskah jang telah diparaf tanggal 15 Nopember 1946 dengan pendjelasan-pendjelasan didalam notulen dan surat menjurat jang resmi dengan pihak Delegasi Pemerintah Belanda, dan tidak terikat oleh pembitjaraan atau pengumuman-pengumuman diluar perhubungan jang resmi antara kedua delegasi didalam atau diluar negeri.

Sebelum menanda tangani Naskah Persetudjuan dan sebelum memadjukan Naskah tersebut kepada Komite Nasional Pusat, Delegasi Indonesia akan mengadakan rundingan lagi tentang beberapa soal jang mengenai Naskah tersebut dan tentang beberapa peristiwa-peristiwa jang mendjadi pertikaian dan perlu dapat penjelesaian.

Atas nama Dewan Menteri
Sekretariaat Dewan Menteri
(dtt) ALI BUDIARDJO
Jogjakarta, 13 Djanuari 1947.

Komunike Dewan Menteri

Jogjakarta, 17 - 1 - 1947.

Sekretaris Dewan Menteri mengabarkan :

Rapat Kabinet berlangsung mulai dari tanggal 13 - 1 - 1947 sampai tanggal 16 - 1 - 1947 dengan dihadliri oleh P. J. M. Presiden dan Wakil Presiden.

Pada tanggal 13 Djanuari diadakan pemandangan politik luar dan dalam negeri, antara lain dibitjarakan soal-soal jang mengenai rentjana Persetudjuan Linggadjati dan Peraturan Presiden No. 6.

Tentang soal-soal jang mengenai rentjana persetudjuan telah diadakan Komunike. Tentang Peraturan Presiden No. 6 Dewan Menteri berpendapat, bahwa Peraturan itu tidak mengenai tanggung djawab Menteri.

Sesudah tanggal 14 Djanuari 1947 dilangsungkan pembitjaraan dengan Djaksa Agung dan sesudah itu dengan Pemimpin-pemimpin Partai Politik, maka jang mendjadi atjara ialah anggaran Belandja tahun 1947.

Dalam rundingan itu dikemukakan, pemandangan umum tentang keadaan ekonomi dan keuangan Negara Republik Indonesia.

Anggaran Belandja Negara akan ditindjau lebih dalam lagi setelah diambil putusan, maka kemudian akan diadjukan pada K. N. I. Pusat.

*

Dalam rapat B.P.K.N.I.P. pada tanggal 17-1-1947 Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Rum memberikan pendjelasan berkenaan dengan Peraturan Presiden No. 6 tentang penambahan anggauta K.N.I.P. jang oleh Dewan Menteri dipandang tidak mengenai azas tanggung djawab Menteri, melainkan adalah hak tersendiri pada Presiden (prerogatief).

Bahwa systeem pemerintahan Republik Indonesia masih mengenal „Presidentieel systeem" jang terdapat didalam U.U.D. sungguhpun sedjak Nopember 1945 sudah terbentuk pula systeem menteri bertanggung djawab.

Bahwa kedua systeem itu ada dua-duanja, njata sekali, dimana sedjak Proklamasi hingga sekarang Presiden (Wakil Presiden) selalu actief, misalnja selalu pidato dimana-mana, zonder ada protes dari pihak Dewan Menteri, sehingga kedudukan Presiden bukan symbool belaka, seperti Presiden di Perantjis atau radja di Inggeris dan negeri Belanda. Disamping itu pun Presiden ada hak prerogatief, bersandar U.U.D. pasal IV peraturan peralihan, aturan mana mengenai hak executief dan legislatief.

Adapun Peraturan Presiden No. 6 sifatnja legislatief, tetapi isinja executief, jaitu menambah djumlah anggauta K.N.I.P., agar sesuai dengan keadaan masjarakat, ja'ni jang sudah diputuskan oleh sidang K.N.I.P. di Solo tempo hari. Selandjutnja kalau ditindjau dari sudut politis pun sudah pada tempatnja Presiden jang mengambil tindakan, ja'ni untuk mengurangi kegentingan jang sekarang ada diantara pihak pro dan anti naskah dan adalah tidak sehat, bahkan berlawanan dengan kedaulatan rakjat, kalau orang telah menetapkan lebih dahulu naskah pasti akan diterima oleh K.N.I.P. jang akan datang.

Dasar kedaulatan rakjat adalah musjawarat dan anggauta (B. P.) K.N.I.P. adalah wakil rakjat.

Mr. Sartono (P.N.I.) mengemukakan, dalam pendjelasan Menteri tidaklah ada alasan-alasan baru jang bisa mejakinkan dia, bahwa pendiriannja keliru.

Untuk mendjaga agar djangan timbul keadaan jang tak baik kalau B. P. harus menentukan pendirian terhadap Peraturan Presiden No. 6 itu dan agar soal ini bisa diselesaikan didalam lingkungan hukum, pembitjara mengusulkan, supaja K.N.I.P. menentukan sikapnja terhadap soal ini. Kalau K.N.I.P. menjetudjui, maka selesailah soal ini.

Prawoto (Masjumi) menjatakan tetap tak menerima sahnja Peraturan Presiden No. 6 itu, walaupun hak prerogatief disandarkan kepada U.U.D. pasal IV aturan peralihan dan lepas pula daripada convention — dalam hal ini Menteri — tanggung djawab Peraturan Presiden No. 6 tetap tidak sah, karena didalam pasal tersebut disebut kata „bantuan Dewan Perwakilan Rakjat", sedang dalam hal ini B. P. sebagai wakil K.N.I.P. tidak diminta bantuannja.

Mangunsarkoro (P.N.I.) menindjau soal ini dari sudut massa psychologie dan sosiologie serta menjatakan keberatan dan selandjutnja mengemukakan, publik bisa ragu-ragu tentang demokrasi kita. Menteri bahkan Perdana Menteri tidak tahu menahu, malah B. P. tak diadjak, sedang tindakan Presiden didasarkan atas putusan K.N.I.P. di Solo tempo hari. Peraturan Presiden tak dapat dilepaskan begitu sadja, karena menimbulkan kesan seakan-akan mau memaksakan naskah.

Menteri memotong pembitjaraan serta memadjukan supaja djangan mengemukakan apa-apa jang ditudjukan kepada Presiden jang tidak hadir. Menurut pendapat beliau tindakan Presiden tidak anti - demokratis, malah djustru untuk mentjapai demokrasi.

Drs. Sigit (Masjumi) menjokong usul anggauta Mr. Sartono dan mempersoalkan apa arti „bantuan" dalam U.U.D. pasal IV Peraturan Peralihan.

Kalau jang dimaksudkan „persetudjuan", haruslah K.N.I.P. (B. P.) menjetudjui. Kalau artinja „bantuan" sadja, maka Presiden harus tanggung djawab, mengapa sekarang belum ada Madjelis Perwakilan Rakjat, sedang seharusnja 6 bulan sehabis Proklamasi sudah harus ada.

Selandjutnja dikemukakannja, kritiek Sk. Belanda „Nieuwsgier" jang berkenaan dengan halnja Perdana Menteri tak tahu-menahu tentang Peraturan Presiden No. 6 itu telah menjatakan, bahwa kalau demikian demokrasi kita adalah suatu djenis demokrasi jang belum dikenalnja.

Kalau demikan, maka kita akan kehilangan moreel recht „menuntut" demokrasi daripada Belanda.

Menteri menjatakan, alasan-alasan jang dikemukakan kedua belah pihak ada dasarnja.

Dalam pada itu bagaimanakah arti „bantuan", dalam U.U.D. pasal IV peraturan peralihan? K.N.I.P. sudah berubah sifatnja hingga djadi „inisiatiefnemer,". Tapi menundjuk anggauta K.N.I.P. adalah hak Presiden. Dan Peraturan Presiden No. 6 mengenai K.N.I.P. jang lama, tidak mengenai K.N.I.P. jang baru, jang akan dibaharui oleh Undang-Undang. B.P. sendiri mengakui, membaharui K.N.I.P. belum bisa, dan satu-satunja instansi jang bisa dianggap berdiri sama tengah dalam hal jang demikan, jalah Presiden, karena belum ada Undang-Undang tentang pemilihan. Pun kedudukan Presiden sekarang tidak sama dengan Presiden Perantjis misalnja dan belumlah ada batas-batas jang tertentu antara hak-hak (bevoegdheden) Dewan Menteri dan Presiden. Karena Peraturan Presiden No. 6 itu, pertentangan karena naskah, tidaklah tambah djelek, asal orang tidak menghubung-hubungkannja.

St. Makmur (P.N.I.) menjatakan, dalam tjara bekerdjanja Presiden telah meninggalkan B. P. dan tjara bekerdjanja belum diatur.

Menteri mendjawab bahwa Presiden telah menggunakan „gegevens" dari B. P. dan kalau belum ada aturan tjara bekerdja tentu tak bisa ada pelanggaran.

Rapat dischors untuk beristirahat.

Sorenja djam 16.00 rapat dimulai lagi dan segera dibatjakan usul jang di tanda tangani oleh 10 anggauta, jakni: Drs. Sigit, Prawoto, (kedua-duanja dari Masjumi), Mr. Sartono, Mangunsarkoro, Manai Sophian, Safiudin, Awibowo, Sjamsudin St. Makmur, Moh. Gazali dan Hadiprabowo (semua dari P.N.I.).

Dalam keterangannja Drs. Sigit antara lain mengemukakan, bahwa djalan jang dilalui Presiden dalam hal Peraturan Presiden No. 6 adalah keluar rel.

Tan Ling Djie (Sosialis) mengemukakan hak prerogatief Presiden ada, baik berdasarkan hukum tertulis, maupun hukum jang tak tertulis (convention). Presiden memegang pimpinan tertinggi tentara, memberikan ampun, grasie, gelaran dan lain-lainnja itu jang tertulis. Mengangkat Perdana Menteri adalah suatu tjontoh hak prerogatief jang tak tertulis, demikian pula hak mengangkat anggauta K.N.I.P.

Penolakan peraturan olehnja diartikan penjangkalan hak prerogatief Presiden, maka Partai Sosialis tak bisa terus turut membitjarakan soal ini dan fraksi telah memutuskan akan meninggalkan rapat.

Tan Ling Djie, Supeno, Soegondo dan Subadio meninggalkan ruangan.

Anggauta Nona Susilowati (Perwari/P.P.I.) menjatakan tak setudju dengan alasan-alasan jang dikemukakan oleh pihak jang tak bisa menjetudjui Peraturan Presiden No. 6, alasan mana dipandangnja tidak „steekhoudend", sehingga beliau terpaksa tak bisa turut menjetem.

Anggauta Mr. Tambunan (Parkindo) membuka pembitjaraannja dengan peribahasa Perantjis: Pour discuter il faut etre d' accords, jang artinja: untuk bisa berunding sudah harus ada persetudjuan. Dalam pembitjaraan sekarang ini kedua belah pihak telah mempunjai kejakinannja masing-masing sehingga pembitjaraan tak akan ada habis-habisnja.

Usul anggauta Mr. Sartono tadi pagi pun hanja hendak memindahkan kesulitan sadja, tetapi bahwa K.N.I.P. sekarang tidak menggambarkan masjarakat, sudah terang. Tindakan Presiden itu benar atau tidak benar, sedjarah jang akan menundjukkan kelak.

Pembitjara menjatakan tidak setudju.

Anggauta Mr. Sartono menerangkan pendirian para pengusul dan menjatakan Peraturan Presiden No. 6 tak berdasarkan segala sesuatu jang ada dalam Undang - Undang Dasar karena soal itu seharusnja djadi hak inisiatief B.P. dan dengan usul ini para pengusul achirnja akan berhadapan dengan Kabinet (Menteri). Badan Pekerdja seharusnja selalu diadjak, karena B.P. adalah mewakili K.N.I.P.

Anggauta Dr. Halim (tidak berpartai) menjatakan „partystrijd" dalam B.P. sudah djadi tadjam sekali. Soal Presiden symboolkah atau bukan, dibuat permainan menurut kepentingan suatu waktu. Buat Dr. Halim masih ada presidentieel systeem disamping Menteri tanggung djawab dan Peraturan Presiden No. 6 diakuinja.

Sidang dischors.

Pada pembukaan kembali, Ketua Mr. Assaat menjatakan sebagai Sosialis sebenarnja harus meninggalkan rapat (disiplin partai), tetapi sebagai Ketua terpaksa harus tetap pada tempatnja, hanja sadja minta ditjatat, bahwa dia tidak setudju.

Dalam istirahat persesuaian belum bisa didapat.

Para pengusul memadjukan mosi:

I. memadjukan rantjangan Undang-undang menarik kembali Peraturan Presiden No. 6.

II. membentuk Panitya penjusun rantjangan Undang-undang terdiri atas Sdr.2 Prawoto, Sartono dan Mangunsarkoro, dengan bantuan Sekretaris B. P.

Mr. Tambunan menjatakan tak setudju dengan usul No. I, tak akan turut menjetudjui dan kemudian meninggalkan rapat.

Nona Susilowati mengatakan isi tetap sama sadja, tak akan turut menjetem, mengambil tasnja, lantas keluar.

Maka tinggallah 10 anggauta pihak pengusul plus Ketua jang telah menjatakan tidak setudju. Dalam keadaan demikian usul diterima dengan 10 suara pro, 1 anti.

Setelah beristirahat panitya memadjukan rantjangan Undang - undang jang dalam consideransnja menjatakan:

Peraturan Presiden No. 6 menjebabkan keberatan-keberatan jang bersifat juridisch staatsrechtelijk dan politis.

* *
*

6. KONPERENSI PEMERINTAH DENGAN BELANDA PERANAKAN

PADA tanggal 1 dan 2 Pebruari 1947 dikota Jogjakarta diadakan konperensi antara Pemerintah dan Belanda Peranakan. Dari tiap-tiap keresidenan dikirim 2 orang Wakil Belanda Peranakan, seorang wakil Pamong Pradja dan seorang wakil Djawatan Penerangan Daerah untuk mengundjungi konperensi tersebut.

Maksud konperensi : Memberi kesempatan kepada Belanda Peranakan untuk memadjukan atau mentjurahkan isi hatinja terhadap usaha pembangunan dan perdjuangan.

Konperensi tersebut tidak diadakan dengan satu perkumpulan Peranakan melainkan dengan golongan Belanda Peranakan seluruhnja.

Panitya Konperensi terdiri dari :

Ketua	:	De Roock,
Wakil Ketua I	:	Fachruddin,
Wakil Ketua II	:	Jusupadi,
Sekr. I	:	Harjoto,
Sekr. II	:	Dwidjosoegondo,
Bendahari I	:	Drs. Yap Tjwan Bing,
Bendahari II	:	K. R. T. Honggowongso.

Djalannja Konperensi

Dalam malam resepsi Konperensi Belanda Peranakan dengan Pemerintah pada tanggal 1 - 2 - 1947 di Kepatihan Jogjakarta, De Roock, Ketua Panitya Konperensi menerangkan, betapa pentingnja Konperensi tersebut bagi pembangunan dan persatuan Indonesia. Dinjatakan bahwa tidak datangnja I.E.V. jang telah diundang untuk menghadiri konperensi ini, sangat disesalkan dan membuktikan, bahwa teriak mereka untuk memperhatikan nasib golongan Indo didaerah pedalaman adalah suatu kebohongan. Rapat selandjutnja diserahkan kepada Saudara Tabrani sebagai Wakil Pemerintah memimpin malam resepsi.

Diberi kedudukan lajak

S.P. Sultan dalam sambutannja, mengemukakan bahwa Indonesia tetap sedia dan menghormat bangsa-bangsa lain, malah bersedia pula memberi tempat jang selajaknja terhadap bangsa-bangsa lain itu, asal sadja mereka itu menghormat djuga dan bersopan santun sebagai tamu.

Terhadap konperensi ini beliau menegaskan bahwa Pemerintah selalu bersedia memperhatikan nasib golongan lain. Terhadap mereka diberi kesempatan seluas-luasnja untuk menempatkan diri ditengah-tengah masjarakat kita.

„Bersatulah dengan Bangsa Indonesia", Kata Presiden.

Salah mengerti didunia luar, jang menjatakan bahwa kita adalah anti kulit putih, anti Nederlander, terlebih dahulu harus dilenjapkan, kata Bung Karno dalam permulaan pidatonja.

Kebanjakan dari masjarakat Belanda, djika mendengarkan suara saja, kata beliau selandjutnja, mengatakan: „Daar heb je Soekarno weer, de grootste Nederlander-hater".

Kita tidak membentji bangsa lain, bukan „Nederlander-hater" dan tidak menentang golongan atau bangsa lain, akan tetapi jang kita tentang ialah systeem atau stelsel mendjadjah, jang tidak mau mengetahui akan keadilan.

Pergerakan bangsa Indonesia bukannja „anti-white movement", seperti digembar-gemborkan oleh pihak pendjadjah, akan tetapi melulu pergerakan melawan pendjadjah.

Dan pergerakan tadi bukannja ditimbulkan oleh satu dua orang pemimpin sadja, akan tetapi memang timbul dari sifat hakekat keadaan. Makin menjalanja pergerakan karena dibakar oleh pihak imperialis sendiri.

Oleh beliau dibentangkan riwajat pergerakan kebangsaan sedjak lahirnja pada tahun 1908, jang tadinja bersifat cooperatief, akan tetapi oleh karena tindakan-tindakan pihak pendjadjah kembali bersifat non - cooperatief, hingga pada suatu waktu pergerakan tersebut sedemikian memuntjaknja, sampai mewudjudkan finale daad pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sesudah itu Pemerintah Republik mengalami berbagai kesukaran terhadap golongan-golongan bangsa jang ada di Indonesia, terutama terhadap golongan-golongan Indonesia jang tidak tentu kedudukannja, akan tetapi dalam pada itu Pemerintah telah membuka djalan seluas-luasnja bagi golongan Indo jang ingin menjesuaikan diri dengan bangsa Indonesia, oleh karena kita tahu, bahwa mereka lahir di Indonesia, hidup dan mati disini djuga.

Pada hakekatnja nama „Indo" sudah tidak tepat lagi, lebih baik tinggalkanlah nama „golongan Indo" itu dan bersatulah dengan bangsa Indonesia, bersatu bangsa, faham dan bahasa.

Djika golongan itu telah insjaf akan kedudukannja, maka akan hilanglah „Indo - probleem".

Konperensi tersebut selain dikundjungi oleh Presiden dan Wakil Presiden, hadir djuga S. P. Sultan, S. P. Paku Alam, para Menteri, Dr. Douwes Dekker (Dr. Setiabudhi) dan wakil-wakil berbagai golongan dan partai-partai.

Limapuluh utusan dari daerah-daerah seluruh Djawa, ketjuali Wakil Bogor dan Madura, mengundjungi konperensi tersebut.

Putusan - putusan sosial

Pemerintah dalam azasnja menjetudjui permintaan penetapan tenaga-tenaga warga negara Peranakan Belanda dalam pelbagai lapangan pekerdjaan. Dipelbagai Djawatan telah diterima dan diadakan saringan untuk menempatkan mereka menurut ketjakapannja.

Penempatan tenaga warga negara Peranakan Belanda dalam angkatan Perang setjara individueel telah dilakukan.

Setudju dibentuknja satu panitya jang akan menjelidiki hak milik warga negara Peranakan Belanda jang ada ditangan jang tidak berhak, dengan memberi laporan sedjelas-djelasnja supaja Pemerintah dapat mengambil tindakan seadil-adilnja.

Tentang urusan tundjangan atau pensiun sedang diurus, begitu pula soal uang tabungan di Postspaarbank dulu dapat diurus langsung dengan Kementerian Keuangan.

Pemerintah bersedia mendjadi badan perantara dalam memadjukan tuntutan pembajaran daripada perusahaan - perusahaan didalam dan diluar daerah **Republik.**

Permintaan voorschot atas Bank Saldi, assuransi, lijfrente dan sebagainja dapat diberikan olch Pemerintah.

Keamanan

Pihak warga Peranakan Belanda supaja menundjukkan peristiwa-peristiwa tentang kedjadian jang mengenai soal keamanan.

Pengadjaran

Prae-advies jang mengenai pengadjaran akan segera dikemukakan kepada jang berwadjib untuk diambil keputusan.

Memperluas kesempatan untuk peladjaran bahasa Indonesia.

7. SIDANG PLENO K. N. I. PUSAT DI MALANG

DALAM rapat B.P.K.N.I. Pusat pada tanggal 12 Pebruari 1947, Ketua Mr. Assaat membatjakan surat dari Presiden jang minta supaja Ketua Badan Pekerdja memanggil untuk bersidang anggauta-anggauta K.N.I. Pusat jang lama pada tanggal 25 - 2 - 1947 di Malang dan kemudian pada tanggal 27 - 2 - 1947 mengadakan sidang pleno K.N.I. Pusat dengan susunan anggauta jang telah diangkat menurut Peraturan Presiden No. 6.

Atjara sidang tanggal 25-2-1947 jalah memberi laporan umum tentang pekerdjaan Badan Pekerdja, istimewa jang mengenai Peraturan Presiden No. 6, sedang atjara tanggal 27 - 2 - 1947 jalah: beleid Pemerintah, terutama jang mengenai perundingan dengan Belanda.

Ketua mendjelaskan, bahwa pada tanggal 25-2-1947 itu akan bersidang K.N.I. Pusat lama seluruhnja, djadi ikut hadir djuga anggauta-anggauta jang mendjadi Menteri-menteri dan Presiden dan sebagainja.

Djika Peraturan Presiden No. 6 diterima, maka K.N.I. Pusat akan bersidang terus dengan anggauta-anggauta tambahan dan djika tidak diterima belum ada kepastian bagaimana sidang akan berlangsung seterusnja.

Untuk menjusun tata-tertib sidang K.N.I. Pusat Pleno di Malang dibentuklah panitya terdiri dari Sjamsudin Sutan Makmur, Drs. Sigit dan Mr. Sartono jang berkewadjiban merantjangkan tata-tertib sidang tersebut, dengan berpedoman kepada tata-tertib jang telah berlaku dalam sidang pleno K.N.I. Pusat jang terachir di Solo.

Selain itu dibentuk panitya terdiri dari anggauta Supeno, Burhanuddin Harahap dan Mr. Tambunan jang diserahi kewadjiban untuk memberi laporan tentang peraturan-peraturan negara (Undang - Undang, peraturan Presiden, peraturan-peraturan Kementerian dan sebagainja).

*

Pada pagi hari tanggal 25 - 2 - 1947 telah siap lengkap para anggauta K.N.I. Pusat dalam Gedung Rakjat Malang. Djam 10.00 tepat Presiden dengan berpakaian setjara Panglima Tertinggi dengan Wakil Presiden, diiringi oleh Panglima Besar tiba diruangan Sidang disambut oleh Panitya Penjambutan. Dalam ruangan para hadlirin tegak berdiri menghormat kedatangan Presiden beserta pengiringnja. Setelah semua kembali mengambil tempatnja masing-masing, maka Presiden menguraikan pidato pembukaan, diantaranja sebagai berikut:

Tuan-tuan jang terhormat,

Hari ini Komite Nasional Pusat bersidang untuk kelima kalinja. Pada masa ini soal-soal Negara jang patut mendjadi perhatian para pemimpin rakjat bertambah banjak dan bertambah sulit maka sudah selajaknja djika tiap-tiap anggauta K.N.I. Pusat sebagai wakil rakjat mempunjai pekerdjaan jang sangat berat. Akan tetapi djika kesemuanja dilakukan dengan penuh tanggung djawab, maka akan berdjalan dengan baik.

Kita pada waktu ini ada didalam masa revolusi, artinja segala sesuatu harus berdjalan dengan tjepat. Tiap-tiap anggauta K.N.I. sesudah sidang ini harus lekas kembali ketempatnja masing-masing supaja dapat bekerdja sebagaimana biasa. Maka hendaklah segala perundingan nanti berdjalan dengan penuh kebidjaksanaan. Tiap-tiap wakil rakjat harus dapat membedakan soal-soal jang besar, jang perlu dibitjarakan dalam sidang ini dan soal-soal ketjil jang tjukup dibitjarakan dalam sidang Badan Pekerdja. Hanja garis-garis Besar jang harus dibitjarakan dalam Sidang K.N.I. Pusat.

Sedjak maklumat Wakil Presiden No. 10, K.N.I. merupakan Badan legislatief jang diserahi kewadjiban membikin Undang-undang Negara bersama-sama dengan Pemerintah. Hal-hal penting sedjak pada masa itu diputuskan oleh Badan Pekerdja dengan Presiden.

18 Bulan kita telah merdeka. 18 Bulan lamanja kita mempertahankan kemerdekaan kita dan sekaranglah datang saatnja mentjapai usaha jang concreet. Dunia internasional pada masa ini tidak dapat memungkiri lagi adanja Negara Republik Indonesia. Dunia internasional tidak dapat lagi memungkiri adanja Negara baru jang telah tersusun dengan rapi. Sembojan sekali merdeka tetap merdeka pada masa ini telah njata. Tetapi dengan sembojan sadja kita tidak dapat mempertahankan kemerdekaan. Tiap-tiap tjita-tjita harus dikedjar harus diperdjuangkan. Dan dalam mengedjar serta memperdjuangkan ini kita harus dapat membedakan soal ideaal dan kenjataan.

Tuan-tuan sekalian. Saja minta supaja tuan-tuan sekalian tetap waspada dan bidjaksana. Perdjuangan kita masih lama. Segala putusan dari sidang jang baik akan tetap mendjadi sendi, akan tetapi suatu putusan jang tidak baik akan menjesatkan kita. Dan saja minta supaja tuan-tuan sekalian tetap mendjaga persatuan. Perbedaan faham tentu ada, perbedaan kejakinan tentu ada, pertikaian selalu ada, akan tetapi selama pertikaian itu tidak membahajakan kepentingan nasional, maka akan memupuk dan menjempurnakan demokrasi kita.

Kemerdekaan kita adalah baru, demokrasi kita baru, segala sesuatu masih baru, sehingga belum ada jang tetap. Maka djanganlah nanti tuan-tuan salah mengambil ukuran. Kita masih dalam revolusi dan revolusi artinja dinamika. Perubahan selalu akan terdjadi.

Kita pada waktu ini masih dalam keadaan tumbuh, djadi segala sesuatu belum dapat ditetapkan menurut peraturan jang tertulis. Maka K.N.I. pun jang masih dalam keadaan tumbuh selalu berubah dan ditambah. Karena tumbuhnja partai-partai baru maka mengakibatkan djuga tambahnja susunan K.N.I. Pusat. Dan inilah dinjatakan dalam peraturan Presiden No. 6. Dalam susunan baru itu nanti K.N.I. akan lebih representatief.

Badan Pekerdja telah menolak peraturan Presiden No. 6 dengan dalil-dalil jang juridis, staatsrechtelijk dan politis. Tetapi sebelum ada pemilihan maka Presiden jang mengangkat anggauta-anggauta K.N.I. Pusat seperti mulai permulaan hingga sampai sekarang.

Dikalangan rakjat telah banjak terdjadi kesalahan-kesalahan faham tentang arti demokrasi. Banjak sekali peraturan-peraturan Negara jang tidak diturut oleh rakjat. Soal inilah jang memaksa Presiden untuk bertindak.

Untuk mengobarkan api semangat revolusi, maka Presiden terpaksa kadang-kadang membanting tulang berpidato, mengobarkan semangat tersebut djangan sampai padam. Pun dalam pertikaian politik terpaksa Presiden harus bertindak sebagai arbiter perdamaian politik. Djadi Presiden a la Amerika, atau Presiden a la Perantjis jang hanja merupakan sebagai symbool, pada masa revolusi ini belum dapat. Kami sekarang adalah Presiden a la revolusi Indonesia. Djadi terpaksa Presiden sering sebagai pemimpin rakjat dan bapak rakjat membimbing dan memimpin rakjat.

K.N.I. adalah Badan Perwakilan Rakjat. Maka K.N.I. harus dapat mendjadi tjontoh rakjat untuk dapat melaksanakan demokrasi jang sehat. Rakjat

Indonesia, bahkan seluruh dunia sekarang memandang kepada sidang ini. Maka djagalah persatuan. Kepentingan Negara haruslah lebih dibesarkan daripada kepentingan partai.

Mudah-mudahan terlaksanalah segala uraian saja tersebut dan dengan ini sidang K.N.I. Pusat saja buka.

Kemudian Mr. Assaat sebagai Ketua K.N.I. Pusat mengadakan pidato sambutan jang isinja kurang lebih sebagai berikut :

Saja mengutjap sjukur kepada Tuhan jang telah memberi karunia sehingga Negara dan Pemimpin Indonesia sampai saat ini masih selamat. Kepada para peradjurit jang telah gugur atas nama seluruh rakjat kami sampaikan terima kasih pula.

Telah satu tahun sedjak sidang di Solo, K.N.I. baru sekarang mengadakan rapat.

Sedjak tanggal 16 Oktober 1945 K.N.I. telah diserahi kekuasaan legislatief dan pekerdjaannja dilakukan oleh Badan Pekerdja. Sudah banjak sekali soal-soal penting jang ditetapkan sebagai Undang-Undang Negara oleh Badan Pekerdja.

Sdr.-Sdr. berhasil atau tidaknja revolusi tidak hanja tergantung kepada Pemerintah, akan tetapi djuga tergantung kepada kesanggupan rakjat. Pun hanja kesanggupan tidak tjukup, karena harus disertai dengan ketjakapan mengatur diri sendiri.

Pada masa ini perlulah kepentingan rakjat diperhatikan, karena telah sering terdjadi rakjat masih menderita, para pemimpin tjakar-tjakaran untuk kepentingan partainja. Masing-masing harus menanja kepada diri sendiri usaha apakah jang telah dikerdjakan untuk mengurangi penderitaan rakjat.

Saudara-saudara hendaklah sekalian anggauta benar-benar dapat djadi tjontoh bagi rakjat. Tiap-tiap keputusan jang telah diambil harus ditaati oleh tiap-tiap anggauta. Tiap-tiap anggauta harus tunduk terhadap putusan jang terbanjak. Dan dengan demikian maka akan terbukti tiap-tiap anggauta akan mendahulukan kepentingan nasional dan akan memelihara persatuan nasional.

Pada masa ini kita masih dalam keadaan serba kurang, alat-alat kurang, akan tetapi kekurangan itu malah harus mendjadi pedoman untuk memperbaikinja.

Pun saja minta supaja tiap-tiap anggauta nanti berbitjara seperlunja dan jang benar-benar mengenai kepentingan Negara.

Sesudah pidato sambutan Ketua selesai, sidang ditutup dan kepada para anggauta diberi pemberitaan pekerdjaan Badan Pekerdja atas pekerdjaannja selama setahun dan jang akan dibitjarakan pada sidang malamnja.

Disekitar Peraturan Presiden No. 6.

Diantara atjara-atjara sidang K.N.I.P., ialah Peraturan Presiden No. 6 jang mendapat sambutan hangat dari para anggauta.

Badan Pekerdja telah mengadjukan usul inisiatif tentang pembatalan Peraturan Presiden No. 6.

Tapi achirnja Peraturan Presiden No. 6 diterima.

Pidato Wakil Presiden

PADA sidang K.N.I.P. hari ketiga tanggal 27 Pebruari 1947, Wakil Presiden menjatakan pidatonja diantaranja sebagai berikut :

„Kami merasa berbahagia mendengar bermatjam-matjam pendapat tentang Peraturan Presiden No. 6, baik jang ditindjau dari sudut juridis-staatsrechtelijk

maupun dari sudut politis. Teranglah bahwa matjam-matjam tjara menginterpretasi hukum-hukum itu dan bilamana mendengarkan pidato Mr. Sartono kemarin, mungkin dapat dibenarkan kata-nja, bilamana menindjaunja dari satu sudut sadja.

Padahal menindjaunja seharusnja dari beberapa sudut seperti jang telah dikemukakan oleh Sdr. Soepeno. Soal tersebut merupakan satu komplex, sehingga dapat djuga ditindjau dari sudut sosiologi.

Peraturan Presiden No. 6 dapat kita tindjau dari 3 sudut ialah : dogmatis interpretasi, historis interpretasi dan logis interpretasi.

Menurut pasal 3 dari Undang-Undang Dasar, maka segala kekuasaan diberikan kepada Presiden, sebelum Badan Perwakilan Rakjat jang sesungguhnja terwudjud. Memang beberapa kali telah saja katakan supaja setjepat-tjepatnja membentuk B.P.R. jang sedjati, tetapi hingga sekarang Undang-undang tentang B.P.R. itu pun belum ada. Disebut-sebut tentang undang-undang No. 12 tentang Perwakilan Rakjat, tetapi tidak dipikirkan bahwa isi undang-undang itupun masih bersifat sementara djuga.

Tentang hak prerogatif Presiden disana-sini timbul salah faham. Memang hak prerogatif itu adalah hak daripada radja dan sama sekali bukan maksud Negara Republik Indonesia untuk mendirikan radja dan sama sekali bukan Negara Republik Indonesia untuk mendirikan keradjaan. Hak prerogatif jang dipegang oleh Presiden itupun bersifat sementara dan lambat laun akan dikurangi hingga terbentuk B. P. R. jang sedjati".

Dikemukakan djuga oleh Wakil Presiden bahwa penambahan anggauta menurut Peraturan Presiden No. 6 itu tidak untuk mentjari imbangan antara jang pro dan kontra naskah. Selandjutnja beliau berkata :

„Tuduhan sematjam itu adalah jang terberat jang ditudjukan kepada Kepala Negara. Hendaknja diketahui bahwa dengan susunan Komite Nasional lama Naskah Linggadjati itu sudah „goal", karena imbangan kontra dan pro ialah sedikit-dikitnja 104 melawan 151.

Teranglah bahwa tindakan Presiden itu ialah untuk menjempurnakan dan mendekati B. P. R. jang sesungguhnja, sehingga dalam menghadapi soal tersebut seluruh rakjat dibelakang Pemerintah.

Beberapa pembitjara mengadjukan kompromi tentang peraturan tersebut. Hendaknja dengan djudjur dikemukakan setudju atau tidak. Menerima atau menolak peraturan tersebut dengan tiada kompromi.

Bilamana tidak puas dengan pimpinan Presiden dan Wakil Presiden hendaknja mentjari Presiden dan Wakil Presiden „jang baru".

Keterangan Wakil Presiden ini diutjapkan dengan terharu.

Achir kata dikemukakan pendjelasan Presiden bahwa beliau tidak dapat melantik K.N.I. Baru, karena tidak disangka bahwa pembitjaraan-pembitjaraan akan memakan tempoh sekian lamanja.

*

Mr. Assaat mengumumkan, bahwa B.P. menarik kembali usul penarikan kembali Peraturan Presiden No. 6. Pada waktu itu diadjukan pula usul jang ditanda tangani oleh 11 anggauta jang bunjinja sebagai berikut :

1). Peraturan Presiden No. 6 dinaikkan mendjadi Undang - undang.

2). Menambah anggauta-anggauta baru dari K.N.I.P. menurut aliran-aliran jang terdapat dalam masjarakat dan mengadjukan partai-partai dan golongan-golongan jang belum mempunjai kursi.

3). Kalau penetapan ini diterima, tambahan akan dilakukan selekas mungkin, setelah rapat pleno selesai.

Usul inipun ditarik kembali.

Pada pukul 21.15 Mr. Assaat membuka sidang malam hari. Setelah mempertangguhkan sidang untuk sementara waktu, maka sampailah pada atjara: Berhentinja B. P. dan Ketua.

Pemberhentian B. P. dan Ketua diterima baik oleh Wakil Presiden dan dalam pidatonja dikatakan bahwa meskipun B. P. belum sempurna, tetapi banjak djuga jang sudah ditundjukkan.

Menurut adat istiadat Parlemen, maka diangkatlah anggauta jang tertua sebelum ketua baru dipilih. Maka Wakil Presiden mengangkat Dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua sementara.

Pengangkatan ini diterima baik oleh Dr. Radjiman.

Ketua dan Wakil Ketua (Mr. Assaat dan Mr. Sartono) mendjemput ketua baru dan mengantarkan beliau kekedudukannja. Dr. Radjiman menjampaikan terima kasih atas kepertjajaan jang dilimpahkan kepadanja.

Rapat dibuka dan ditutup kembali oleh Ketua sementara pada pukul 21.30

Pembukaan Sidang K.N.I.P. baru

Sidang dimulai lagi pada tanggal 28-2-1947 malam. Hiruk sibuk suasana didalam Gedung Parlemen. Anggauta-anggauta K.N.I. Pusat jang lama dan baru, para Menteri dan Menteri Muda, para Wartawan dalam dan luar Negeri, serta para penindjau jang ratusan djumlahnja sibuk mentjari tempatnja masing-masing.

Penuh sesak kelihatan Gedung Parlemen jang indah dan besar itu.

Tepat djam 9 malam P. J. M. Wakil Presiden tiba dalam ruangan, disambut oleh Panitya penjambutan, terdiri dari para anggauta K.N.I. jang telah landjut usianja. Segenap hadlirin berdiri tegak menghormat kedatangan P.J.M. Wakil Presiden.

Setelah masing-masing kembali mengambil tempatnja, ketua sementara Dr. Radjiman Wedyodiningrat mengetok palu, mempersilahkan hadlirin berdiri kembali, untuk menjanjikan Lagu Indonesia Raya, sebagai upatjara pembukaan.

Riuh njaring mengumandang suara Indonesia Raya, membedah awan, membubung keangkasa membawa getaran djiwa merdeka tiap-tiap putera Indonesia kesegala pendjuru dunia raya.

Kembali masing-masing ketempat duduknja, setelah menjanjikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hening bening, tenteram diam suasana didalam ruangan.

Palu Ketua djatuh dimedja, diikuti suara perlahan-lahan keluar dari seorang ajah jang telah landjut usianja, jang diserahi memimpin sidang sementara sebelum ada Ketua, jang kemudian mempersilahkan P.J.M. Wakil Presiden untuk menjampaikan pidato pembukaan.

Segenap perhatian tertudju kearah P.J.M. Wakil Presiden jang mengutjapkan pidato pembukaan antara lain sebagai berikut:

Saja menjatakan sangat gembira, karena dapat menjaksikan sidang K.N.I. Pusat jang baru ini. Dahulu tatkala K.N.I. Pusat untuk pertama kali mengadakan sidang di Djakarta, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan Undang-Undang Dasar Negara kita, anggauta hanja 150 orang, sedangkan jang dari seberang hanja seorang sadja jang turut menjaksikannja.

Pada tiap-tiap Sidang K.N.I. Pusat, anggautanja selalu ditambah dan disesuaikan dengan keadaan masa. Dan tambahan jang sekarang ini adalah mengandung sedjarah, serta memberi imbangan djumlah perwakilan dari daerah-daerah Djawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil.

Sebagian besar dari anggauta-anggauta atau wakil daerah seberang memang benar-benar datang dari daerahnja. Dengan susah pajah dengan tidak mengingat aral dan rintangan mereka datang untuk mengundjungi Sidang K.N.I. Pusat. Maka untuk itu kami sampaikan utjapan selamat jang istimewa.

Njata sekarang bahwa K.N.I. Pusat jang baru ini akan merupakan tjermin dari kesatuan serta persatuan Negara kita.

Djangan dikira bahwa bagian Negara Indonesia, jang lazim dinamakan oleh Belanda daerah Malino mempunjai semangat sendiri. Sama sekali tidak. Mereka selalu menghendaki bersatu dengan Republik. Dengan hadlirnja wakil-wakil jang datang dari daerah tersebut nampak njata bahwa persatuan Indonesia tetap ada.

Proklamasi jang kita umumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berarti suatu kebulatan tekad untuk memiliki seluruh Negara Indonesia. Akan tetapi kebulatan Republik adalah semata-mata tergantung kepada rakjatnja sendiri. Daerah-daerah lainnja ketjuali Djawa dan Sumatera kurang kuat pertahanannja, tetapi tjukup kuat semangatnja - persatuannja.

Djalan sedjarah terus madju tidak beredar kebelakang. Maka K.N.I. Pusat pun selalu mengalami kemadjuan. Dan sekarang K.N.I. Pusat sudah mendekati bentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Berangsur-angsur K.N.I. Pusat mendekati kesempurnaannja. Dengan menggunakan segala pengalaman jang telah ada, K.N.I. Pusat meningkat kearah kesempurnaan. Dengan mengangkat wakil-wakil buruh dan tani, maka didalam K.N.I. Pusat terdapat wakil-wakil golongan jang sangat penting bagi negara kita.

Pemilihan belum dapat didjalankan, karena keadaan memaksa. Maka terimalah K.N.I. Pusat jang sekarang ini dengan sabar. Dan utamakan kepentingan Negara lebih dari pada kepentingan lain-lainnja.

Atjara jang terpenting dalam sidang ini jalah menimbang beleid Pemerintah. Saja mengharap supaja segenap anggauta-anggauta dapat memilih soal-soal jang pokok dalam memberi pertimbangan beleid Pemerintah ini. Serahkanlah soal-soal jang ketjil kepada Badan Pekerdja jang setiap waktu dapat bersidang. Tindjaulah beleid Pemerintah ini dari dasarnja. Memperdjuangkan negara bukan soal ketjil, apabila untuk mentjapai kemerdekaan sepenuh-penuhnja. Kita harus mendjalankan politik dengan mengingat suasana politik dunia internasional dan mengingat kekuatan serta kedudukan kita sendiri.

Karena kedudukan Negara kita jang terletak diantara dua samudera dan benua jang besar dan sangat penting artinja bagi dunia, maka kita harus bersahabat dengan seluruh dunia. Oleh karenanja kita harus mendjalankan politik perdamaian jang ulung dan ulet. Mulai kita memproklamasikan kemerdekaan, kita selalu menundjukkan politik perdamaian kepada dunia, jang sangat sesuai dengan „Atlantic - Charter".

Kita akan mendjamin kepentingan Negara-negara asing di Indonesia, akan tetapi kita pun minta djaminan kemerdekaan kita.

Maklumat atau manifes politik Pemerintah menundjukkan, bahwa kita selalu ingin damai. Dunia pada waktu ini, sehabis perang jang dahsjat, ingin damai dan tiap-tiap politik kekerasan akan disalahkan. Kita jakin bahwa dengan dasar politik perdamaian ini kita akan menang.

Seterusnja kita harus melihat dan mengukur kekuatan kita sendiri. Kita harus pergunakan segala kekuatan jang ada pada kita dengan sebaik-baiknja. Memboros tenaga berarti suatu kesalahan jang besar.

Kita sekarang ini menghadapi pembangunan Negara. Banjak hal-hal jang harus kita perbaiki. Banjak sekali penjakit masjarakat jang harus kita bersihkan dengan segera.

Sebagai penutup kami mohon kepada Allah Subhanahu Wataala mudah-mudahan memberi rochmat kepada segenap anggauta K.N.I. Pusat agar dapat mengadakan perundingan jang berhasil bagi kepentingan Nusa dan Bangsa.

Kemudian Ketua mempersilahkan Alimin sebagai Wakil anggauta K.N.I. Pusat jang baru untuk menjatakan utjapan sambutan. Dengan tepuk tangan riuh, djago tua ini jang berpakaian sarong, badju hidjau dan pitji hidjau, disambut oleh segenap hadlirin. Isi pidatonja kurang lebih sebagai berikut :

Pada waktu ini saja sangat terkenang akan waktu tanggal 17 Agustus 1945, waktu saja masih diluar Negeri. Saja sambut pidato P.J.M. Wakil Presiden dengan gembira, karena pidato tersebut memang sangat tjotjok dengan hati kami. Pidato P.J.M. Wakil Presiden jang menjatakan bahwa kita harus mendjalankan politik jang ulet itulah sangat tjotjok dengan perasaan kami.

Sepandjang penindjauan kami dan menurut perhitungan kami, maka dunia imperialisme pada waktu ini sangat lemah. Dan untuk dapat kuat kembali maka dunia imperialisme akan mendirikan dunia ekonomi baru.

Pada waktu ini seluruh dunia sedang mengalami revolusi, ialah revolusi tentang susunan perekonomian baru, untuk menjusun masjarakat baru. Dan revolusi kita pada waktu ini adalah mendjadi bagian revolusi dunia tersebut. Maka kita jakin bahwa kita akan mendapat kemenangan.

Maka saja berdjandji akan mentjurahkan tenaga memimpin rakjat bersama-sama dengan partai-partai lain untuk mendirikan masjarakat jang bahagia.

Setelah Wakil Presiden mengutjapkan pidato pembukaan K.N.I. Baru, maka segera diadakan pemilihan ketua baru, jang pada malam itu dipegang untuk sementara oleh Dr. Radjiman Wedyadiningrat.

Rapat dischors untuk sementara waktu untuk merundingkan tjara pemilihan. Hasil perundingan ialah mengadjukan kepada sidang 2 matjam pemilihan:

1). Sisteem pengesahan.
Hanja seorang jang diadjukan sebagai tjalon untuk disahkan oleh Wakil Presiden.

2). Sisteem „voordracht".
Mengadjukan lebih dari seorang sebagai tjalon untuk dipilih salah satu oleh Wakil Presiden.
Setelah itu sidang dibuka kembali untuk memungut suara sisteem mana jang dikehendaki oleh sidang.
Hasilnja ialah bahwa sisteem pengesahan diterima oleh sidang dengan suara 280 melawan 151.

Setelah itu pemilihan Ketua dimulai. Diadjukan 4 orang tjalon:

1). Mr. Assaat diadjukan oleh Partai Sosialis, P.B.I., P.K.I., Parkindo, Partai Rakjat, Buruh, Tani, Golongan Sunda Ketjil, Golongan Sumatera, Golongan Arab, Golongan Belanda Peranakan, Pesindo, P.P.I.. Perwari, dan golongan tidak berpartai.
2). Dr. Abu Hanifah diadjukan oleh Masjumi.
3). Suwirjo diadjukan oleh P.N.I. dan Wanita Rakjat.
4). A.J. Patty diadjukan oleh golongan Sulawesi dan Maluku.

Sesaat sebelum pemilihan dimulai, maka Masjumi menarik kembali tjalon jang diadjukan sehingga tjalon-tjalon tinggal 3 orang.

Hasil pemilihan ialah Mr. Assaat dipilih oleh sidang sebagai Ketua dengan suara 299 melawan 81 dan 6. Pemilihan sidang ini disahkan oleh Wakil Presiden pada pukul 02.00. Setelah itu sidang ditutup.

Hari tgl. 1-3 pada pukul 10.15 sidang K.N.I.P. dibuka kembali oleh ketua baru Mr. Assaat.

Wakil Presiden melantik dengan resmi ketua baru dengan pengharapan mudah-mudahan Ketua K. N. I. P. mendjalankan pekerdjaannja sebaik-baiknja memenuhi harapan rakjat dan dapat mentjapai persatuan atas segala perbedaan faham.

Setelah itu Mr. Assaat menjambut pelantikan tersebut dan menjatakan bahwa djabatan Ketua perwakilan rakjat adalah kehormatan setinggi-tingginja jang dapat dilimpahkan oleh Kepala Negara dan rakjat kepada seorang warga negara. Sungguh berat pekerdjaan ini.

Mudah-mudahan dapatlah saja menjelesaikannja tidak dengan kata-kata sadja melainkan dengan perbuatan dan sudah barang tentu dengan bantuan segenap anggauta K. N. I. P.

Perdana Menteri Sjahrir menguraikan setjara singkat tetapi memakan tempo 70 menit, kisahnja perdjalanan sedjarah negara kita sedjak sidang K. N. I. .P. jang lalu hingga sidang sekarang. Dalam waktu segala kekuatan politik, ketentaraan, ekonomi dan sosial ditudjukan untuk menjempurnakan negara kita.

Selandjutnja djuga diterangkan tentang kekeruhan politik dalam negeri hingga terdjadi pentjulikan P.M. sendiri dan usaha „coup d'etat" jang gagal itu.

Kini sedang diadakan pemeriksaan terhadap mereka jang bersangkutan oleh Kehakiman Negara dan kepada mereka jang bersalah akan diberi hukuman jang setimpal.

Setelah itu terbentuklah Kabinet Nasional lepas daripada ikatan partai. Diterangkan djuga bahwa pada waktu itu keadaan politik dalam negeri belum sebagaimana jang diharapkan karena partai-partai pada waktu itu mengasingkan diri dan keadaan tetap masih keruh. Terbentuknja Dewan Pertahanan Negara adalah satu usaha Pemerintah untuk mengatasi segala kesulitan-kesulitan, baik dari luar maupun dalam dengan tindakan-tindakan jang setjepat-tjepatnja.

Pemerintahan Dalam Negeri

Susunan pemerintahan dalam negeri tetap diperhatikan. Susunan pemerintahan Sumatera masih bersifat sementara, tetapi praktis. Efficiency dalam soal bestuur tetap soal utama dalam usaha pembangunan. Djuga Kementerian ini jang sering sendiri mengalami perubahan disebabkan berbagai-bagai hal terutama penempatan orang-orang.

Kepolisian Negara

Mula-mula djawatan tersebut termasuk dalam Kementerian DN, tetapi tidak lama lagi dibawah pengawasan P.M. sendiri. Atas djasa Kepala Polisi Negara, maka sekarang setiap warga negara dapat menjaksikan sendiri keamanan dan ketenteraman jang didjamin oleh polisi negara.

Soal kemakmuran

Bagaimanapun djuga soal kemakmuran adalah pati sari daripada segala usaha negeri dalam mana rakjat mengenjam kenikmatan usaha pemerintahan. Sungguh bukan pekerdjaan jang ketjil untuk mendjamin kemakmuran 60 djuta rakjat. Berangsur-angsur diadakan tindakan-tindakan menudju kesempurnaan. Tidak tjukup hanja dengan menggiatkan pertanian sadja, akan tetapi melalui berbagai-bagai kesulitan diadakan pula hubungan dengan dunia luar dan dimulailah perdagangan.

Pedagang-pedagang luar negeri kita persilahkan masuk kenegeri kita. Hingga sekarang aturan-aturan dan tindakan-tindakan Kementerian Kemakmuran masih bersifat defensif. Persediaan lebih hari lebih teratur. Bagaimanapun djuga soal kemakmuran adalah soal hidup langsung negara kita.

Soal keuangan

Kesulitan-kesulitan dalam soal kemakmuran dapat kita tjerminkan dalam soal keuangan.

Dengan pengeluaran uang Republik kita, maka dapat dihindarkan keruntuhan keuangan negara kita. Sungguhpun nilai ORI pada masa ini djauh berbeda dengan pada masa pengeluarannja.

Dan soal ini tidak dapat dipisahkan dengan peredaran uang dan banjaknja barang-barang jang dibutuhkan oleh rakjat, apalagi uang kita itu uang kertas. Dalam pada itu kita insjaf bahwa kekuatan keuangan negara adalah untuk mendjamin stabilisasi negara kita.

Di Sumatera pendapatan negara didapat dari tjukai, import dan export, sedangkan di Djawa hanja didapat dari „directe" belastingen jang dipikul terutama oleh pak tani sadja.

Dengan mengadakan reorganisasi, rasionalisasi dalam badan-badan negara kita, maka diharapkan akan makin baiknja keuangan kita.

Soal kebudajaan umum

Dalam hal ini kitapun bersifat mempertahankan dan rentjana tjukup. „Leerplan" bagi semua sekolahan-sekolahan telah diselenggarakan oleh Menteri Pengadjaran, sedangkan pemberantasan buta huruf tetap didjalankan dengan hasil jang baik.

Nasib guru dan murid diperhatikan benar-benar oleh Pemerintah.

Soal perdjuangan pemuda

Bagaimanapun djuga usaha pembangunan negara kita tidak dapat kita lepaskan daripada perdjuangan pemuda dan inipun ternjata duduknja seorang wakil pemuda dalam Kabinet, Dewan Pertahanan Negara, Buro Perdjuangan pusat dan daerah.

Dalam pada itu sekretariat Menteri Negara bagian pemuda tetap mengadakan perhubungan dengan pemuda-pemuda diluar negeri. Dan inipun berhasil berupa undangan-undangan, utjapan-utjapan dan simpati dan kesanggupan-pemuda diluar negeri dalam membantu perdjuangan kita.

Soal penerangan

Soal penerangan mendapat kesulitan-kesulitan karena kekurangan tenaga jang berpengalaman, tetapi makin hari makin baik pers dan radio mulai tersusun sebagaimana harusnja dalam penerangan negara. Radio lebih tersusun baik dan pers nilainjapun bertambah baik.

Selandjutnja berturut-turut diuraikan soal kesehatan rakjat dan pekerdjaan umum.

Pertahanan

Dalam soal pertahanan Pemerintah kita berpendirian bukan sadja „locaal", melainkan meliputi adanja seluruh pertahanan negara kita.

Diusahakan pula sedapat-dapatnja menambah rasa disiplin dan harga peradjurit dalam tentara kita dan djuga rasionalisasi dalam Angkatan Perang. Bilamana tahun jang lalu pertahanan kita dilaut diundurkan, hal jang sedemikian itu tidak mengherankan. Lautan mereka kuasai sedangkan daerah-daerah jang mereka duduki djauh lebih ketjil daripada jang kita pertahankan. Dengan sendirinja kemenangan materieel ada difihak sana.

P. M. menjatakan, kita tidak usah chawatir akan keadaan jang sedemikian itu, karena kita sanggup mempertahankan segala-galanja. Harga peradjurit kita mulai kelihatan dalam penjingkiran orang-orang Djepang dan Apwi. Tentara kita makin kelihatan disipliner.

Hubungan dengan Negara Asing

Hubungan dengan negara asing diadakan dengan surat-menjurat. Lagi pula Pemerintah kita memperhatikan benar-benar organisasi-organisasi Indonesia di luar negeri, hingga dapatlah dibikin bahan untuk persiapan-persiapan penempatan wakil-wakil diluar negeri.

Keadaan Dalam Negeri setelah Naskah

Uraian-uraian soal pro dan kontra terhadap Naskah Linggadjati dapat kita ikuti dalam pers dan radio.

Tidak sadja dinegeri kita Naskah Linggadjati menggontjangkan masjarakat, melainkan djuga di fihak sana. Difihak kita hal jang sedemikian itu ditimbulkan karena reaksi perasaan. Kita chawatir akan kembalinja fihak sana dan tersinggungnja kedaulatan kita. Difihak sana kegontjangan itu ditimbulkan karena

kechawatiran dan keragu-raguan akan tersinggung milik mereka. Benarkah roda sedjarah dapat kita putar kembali ? Tidak usah kita chawatirkan akan kembalinja roda sedjarah asalkan kita selalu menggunakan otak dengan kepala dingin, penglihatan jang tadjam dan hati jang tidak gentar (tepuk riuh rendah dari sidang). Tidak perlu kita bertjektjok tentang pro dan kontra, karena Naskah Linggadjati adalah suatu „evenwichtspunt" untuk sementara dalam melandjutkan perdjuangan kita.

Harapan P.M.

Achir kata P. M. mengharap supaja sidang menjetudjui apa jang sudah diuraikan diatas. Diharapkan kepada segenap anggauta supaja sehabis sidang ini lebih giat ditjurahkan tenaganja dalam menjempurnakan negara kita dari daerah Kutaradja hingga Amboina. Dalam keadaan bagaimanapun djuga daerah tersebut tetap daerah kita dan soalnja hanja soal waktu sadja. Tjepat lamanja kemerdekaan jang sempurna hanja tergantung disoal waktu sadja dan keuletan kita, hendaknja kita kurang mengomel dan lebih banjak bekerdja.

Kemudian pada tanggal 5 - 3 - 1947 djam 9.30 sidang K.N.I.P. dilandjutkan, setelah pemimpin-pemimpin fraksi berunding maka sidang tersebut mengusulkan 2 buah mosi kepada rapat pleno. Dengan perubahan beberapa kalimat kedua buah mosi tersebut diterima.

Kedua mosi tersebut adalah mosi Manai Sophiaan dan mosi Dr. A. Halim.

Adapun mosi Manai Sophiaan pada pokoknja ialah menghendaki, supaja dalam masa revolusi ini didjalankan kewadjiban penting bagi Pemerintah Republik untuk memperdjuangkan kemerdekaan bagi daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, Sunda Ketjil, Maluku dan Irian supaja daerah-daerah tersebut dengan setjepat mungkin dapat pula bergabung dalam negara Republik Indonesia. Mosi ini ditanda-tangani oleh 39 orang dari golongan pro dan contra Naskah Linggadjati.

Sedangkan mosi Dr. A. Halim berisi :

I. Pada umumnja menjetudjui beleid Pemerintah, pada chususnja membenarkan pendirian Pemerintah menerima Naskah Indonesia — Belanda sebagai mana telah diparap oleh Delegasi Indonesia dan Komisi Djenderal pada tanggal 15 Nopember 1946 di Linggadjati, menolak Naskah Indonesia — Belanda menurut tafsiran Mosi Romme dan keterangan Jonkman.

II. Memberi kepertjajaan penuh pada Pemerintah serta memadjukan sjarat-sjarat jang bermaksud menguatkan dan menegaskan usaha Pemerintah dengan djalan terutama :
   1. Mengusahakan penarikan kembali tentara pendudukan Belanda dari seluruh Kepulauan Indonesia.
   2. Mengusahakan terlaksananja hak-hak demokrasi didaerah-daerah kepulauan jang belum masuk daerah „de facto" Republik Indonesia.
   3. Menjusun dan menjelenggarakan program Pemerintah disegala lapangan masjarakat untuk waktu jang tertentu.

Mosi tersebut diterima dengan suara 284 melawan 2. Jang terachir ialah K.H. Dewantara dan Sukardjo Wirjopranoto. Sedangkan fraksi P.N.I., Masjumi, Partai Wanita Rakjat meninggalkan persidangan setelah mereka mengutjapkan pendiriannja tetap menolak Naskah Linggadjati, sehingga mereka itu tidak turut menentukan mosi tersebut.

Kemudian rapat diachiri pada djam 17.30, setelah Wakil Presiden mengutjapkan pidato sambutannja.

8. NASKAH PERSETUDJUAN LINGGADJATI DITANDA TANGANI

UPATJARA penanda-tanganan Naskah Persetudjuan Belanda — Indonesia dilangsungkan pada tanggal 25 - 3 - 1947 mulai djam 17.00 ditempat kediaman Komisi Djenderal di Djakarta dengan mendapat perhatian penuh dari segala pihak. Nampak hadir kedua Delegasi, para Menteri dan Korps diplomatik luar negeri jang ada di Djakarta.

Upatjara didahului dengan pidato Prof. Schermerhorn sebagai berikut :

Kini kita merajakan suatu peristiwa jang mulia dalam sedjarah dua bangsa, jang djuga mempunjai arti jang sangat besar, karena hal ini membawa dengannja satu penetapan djalan, jang kedua-duanja hendak menempuhnja : djalan pekerdjaan bersama jang damai atas dasar kerelaan dan penghargaan jang sama.

Tidak seorang djuapun jang bimbang, bahwa djuga djalan ini mempunjai kesukaran-kesukaran dan bahaja-bahaja untuk kita, jang pada hari ini berkumpul disini. Walaupun demikian kita lihat, bahwa kedua pemerintah jang bertanggung djawab lebih suka untuk menempuh djalan jang tidak dapat dilihat kepastiannja dari pada djalan jang hanja mengenai kekerasan, jang tak dapat dilalui oleh karena darah dan air-mata dan jang menurut kejakinan kita tidak akan memberi pandangan jang menggembirakan pada satu masa depan jang subur, akan tetapi meliputinja dengan kegelapan, jang djika bukan untuk selama-lamanja, tetapi pasti untuk satu zaman jang lama.

Meskipun kemarahan dan kesengsaraan telah ditimbulkan pada masa jang lampau dan djuga meskipun sifat jang menjukarkan dari pekerdjaan dimasa depan akan menuntut kesabaran, kebidjaksanaan dan saling-mempertjajai, akan tetapi kedua delegasi jang telah membanting tulang untuk mentjapai hasil ini, merasa senang tentang diadakannja pilihan ini. Karena pilihan itu adalah satu perbuatan jang berdasar pada hari ini, jang dapat disamakan sebagai satu tanda guna bangsa Indonesia dan Belanda.

Para pendengar, banjak sekali jang telah dibitjarakan serta diperbintjangkan tentang perbuatan pada hari ini dan berupa-rupa utjapan-utjapan jang baik serta buruk telah dikeluarkan terhadapnja, jang terutama berdasar atas pertanjaan, apakah orang akan atau tidak melahirkan kepertjajaan, jang diperlukan guna djalan keperdamaian ditengah-tengah satu dunia jang menghendaki akan kekuasaan serta melahirkan kekerasan, dalam satu dunia, dimana perasaan jang djahat serta jang mementingkan diri sendiri dalam manusia dan bangsa bangsa dinjatakan atas suatu tjara, jang dahulu orang tidak akan menduganja.

Herankah, bahwa banjak orang dikedua belah pihak menggeleng-gelengkan kepalanja djika melihat apa jang sekarang terdjadi disini dengan menaruh kepertjajaan kepada tenaga-tenaga itu dalam manusia, jang pada masa ini rupanja sangat djarang terdapat. Memang, saja mengerti betul, akan lebih baik, djika mereka, jang bertanggung djawab dikedua belah pihak, bagaimana lemah

djuapun pada permulaannja tetapi makin lama makin keras berusaha menaruh kepertjajaan pada segala sesuatu, jang orang pada sa'at-sa'at jang sangat baik dalam hidupnja mengetahuinja.

Para pendengar, sa'at-sa'at itu sedikit sekali terdapat dalam kehidupan seorang manusia dan mungkin lebih sedikit lagi dalam kehidupan suatu bangsa. Maka dari itu djalan ini sukar dan penuh bahaja. Akan tetapi ia lebih dari segala sesuatu, mulia dan sesuai dengan kehendak Jang Maha Esa, jang memberi tanda Tjinta-kasih didalam dunia ini ditengah-tengah ummat manusia jang fana ini dan jang banjak tjatjatnja.

Pandjanglah djalan, jang menudju kesa'at ini. Banjak kebodohan, banjak hawa nafsu jang terhasut untuk kedjahatan telah melimpahkan kegelapan dan menabur benih kebentjian dalam djiwa banjak orang. Senantiasa masih terdapat orang jang berkata : Andai kata dulu ini atau itu telah dilakukan dengan lebih baik, atau dengan tjara lain, maka djalannja banjak soal akan berlainan, dan kita semua akan terhindar dari banjak penderitaan. Benar pendengar-pendengar, andai kata pada tahun 1933 negeri-negeri serikat membasmi Djerman-Hitler jang sedang tumbuh, sampai keakar-akarnja, maka kemanusiaan dan Djerman pada chususnja terhindar dari banjak penderitaan. Akan tetapi djuga dalam tahun itu ahli-ahli negara menjangka, bahwa dengan tidak mengambil tindakan dalam djalannja sedjarah, mereka mengabdi sebaik-baiknja kepada kepentingan negara dan dunia.

Adakah tjontoh jang lebih menjedihkan dari kehampaan segala perundingan pada achirnja, dipihak mana djuapun dilakukannja ? Hampa belaka, djuga dalam peristiwa antara Negeri Belanda dan Indonesia.

Sedjarah kemanusiaan rupanja tetap harus ditulis dengan darah dan airmata dan bentjana mengandung ma'na jang dalam, dalam sedjarah kemanusiaan.

Hukum lembam (de wet der traagheid), jang tidak sadja berlaku di-ilmu mekanik, akan tetapi djuga dalam suasana rohani, tetap berakibat bahwa manusia dan bangsa-bangsa bertjenderung untuk mempertahankan keadaan hidupnja.

Dunia dalam keadaan tenteram, jang tidak terantjam oleh bahaja dari luar, pada galibnja bersifat konserpatip dan bertjenderung untuk mempertahankan apa jang ada. Maka dari itu setjara rohani kehidupan suatu bangsa bersifat statis. Tetapi jang adjaib ialah bahwa roh manusia ini pula dengan menggunakan technik dan ketjakapan berorganisasi, kedua-duanja bersandar atas ilmu pengetahuan, senantiasa dan terus menerus berusaha untuk merubah keadaan hidup manusia. Njata pula, bahwa usaha rohani dalam beberapa abad jang terachir telah dipertjepat, dibenua Eropah dan Amerika lebih tjepat dari Asia. Akan tetapi pengaruh usaha ini telah disaksikan pula oleh bangsa-bangsa Asia.

Disinilah pada pokoknja letaknja bentrokan antara sifat dinamis dari bentuk-bentuk kehidupan bangsa-bangsa dalam zaman modern terhadap anasir-anasir statis dalam penderian-pendirian suatu bangsa setjara rata, jang menentukan iklim rohaninja. Dalam proces ini sebagai tenaga motor bekerdja dorongan-dorongan rohani, jang diterima dari kesadaran kesusilaan dan keagamaan.

Memang, senantiasa ada beberapa orang, jang mengerti bentrokan ini. Orang-orang ini mentjoba menobloskan segala sesuatu jang tetap rupanja dan sebagai saksi dari zaman jang akan datang mereka menundjuk kedjauh, kepada hari kemudian jang mereka pertjajai itu. Merekalah orang-orang, jang hak-hak rohaninja jang tetap bergerak telah menang pula. Merekalah jang memperhebat desakan antara tenaga-tenaga jang menahan dan pekerdjaan dinamis, jang terlahir dari kemadjuan dunia.

Dimana - mana orang melihat, bahwa ketertiban jang ada guna mempertahankan dirinja, menentang akan tenaga-tenaga ini. Tiap-tiap zaman dan tiap-tiap negara mempunjai bentuknja sendiri terhadap bertumbuhnja perlawanan

ini jang seringkali tak mengenal peri kemanusiaan, akan tetapi sifat jang tidak mengenai peri kemanusiaan ini bukannja mematikan akan tetapi memperkuat akan sentimen kerevolusioneran. Kegentingan antara apa jang ada dan ketertiban jang ditjita-tjitakan, bertambah besar dengan tidak terdapat satu pemetjahan djuapun. Benar, ketertiban jang ada hampir selalu bersedia untuk memberi suatu apa pada satu pihak guna mengurangkan kegentingan, dan pada lain pihak djuga oleh karena kejakinan jang tulus ichlas, bahwa adalah baik untuk berbuat demikian.

Jang menjedihkan ialah, bahwa pada tempat-tempat itu didunia, jang harus dianggap sebagai pusat-perhatian riwajat, dalam hal ini selalu berlaku perkataan Inggeris „too little and too late" (terlalu sedikit dan terlalu lambat).

Para pendengar, saja tidak hendak membitjarakan pertanjaan, apa perkataan „terlalu sedikit dan terlalu lambat" ini djuga terutama mengantjam perhubungan antara Belanda dan Indonesia.

Adalah benar, bahwa terhadap hal ini terdapat banjak anggapan-anggapan dan bahwa ia, jang berbitjara kepada Tuan-tuan, pertjaja bahwa orang dalam negeri ini pada waktu jang silam tak dapat meluputkan diri dari bentjana kemanusiaan umum ini. Kita semua mengetahui hal jang aneh, bahwa kegentingan ini oleh kebanjakan tindakan-tindakan jang berperi kemanusiaan, jang memadjukan sifat-sifat kebatinan tidak mendjadi ketjil tetapi diperbesarkan. Begitu djuga dinegeri ini.

Hampir tidak terdapat atau mungkin djuga sama-sekali tidak terdapat, bahwa orang didalam masjarakat itu, melalui dengan sekonjong-konjong elemen-elemen jang menimbulkan kegentingan dalam perdjalanannja. Suatu tjampuran keinginan untuk mempertahankan diri dan tindakan-tindakan jang berhati-hati, jang dinjatakan sebagai perasaan bertanggung-djawab selalu dan dimana-mana sadja mentjegahnja.

Para pendengar, disinilah kegontjangan dari bentjana menjatakan artinja jang sebenar-benarnja dalam sedjarah bangsa-bangsa dan benua-benua, artinja jang sebenar-benarnja dalam sedjarah bangsa-bangsa dan benua-benua. Kegontjangan sematjam itu dapat ditimbulkan oleh satu peperangan dan tentu oleh satu ukuran, seperti jang diketahui oleh dunia modern.

Ia dapat ditimbulkan pula oleh suatu pergolakan jang hebat jang tak djauh daripada kita. Kekuatan-kekuatan jang terdapat dalam pergolakan ini, makin lama makin mendjadi kuat dan seringkali ia ada begitu kuat, sehingga nafsu-nafsu itu mentjari kepuasan dengan kekerasan, seperti jang telah dibuktikan pula oleh Negara ini, setelah pendudukan Djepang. Ini menimbulkan kerugian dan mungkin pula kemaluan bagi Negara dan bangsa, hingga mana pengertian ini tjotjok dengan pergolakan jang hebat jang berdjalan dibawah pengaruh suatu kemadjuan jang sebelum perang telah nampak, tetapi terutama dari tamparan jang hebat jang oleh peperangan dunia, menggentarkan bangsa-bangsa Asia.

Pendengar-pendengar, siapa dari Tuan-tuan mempunjai tjukup keberanian dan dugaan untuk pertjaja bahwa pidato Sri Ratu jang telah diutjapkan tg. 7 Desember 1942 jang mengandung maksud dan azas bagi kemadjuan jang kini telah nampak akan diutjapkan, djika negeri Belanda tak berperang dengan Djerman, dan negeri-negeri ini tak diduduki oleh Djepang ?

Siapa melihat ketjepatan mas'alah-mas'alah dalam 10 tahun sebelum malapetaka ini, tak dapat tidak harus terharu oleh kenjataan, bahwa perhubungan antara negeri Belanda dan Indonesia dalam tempo jang genting dan pendek itu telah dipengaruhi dan harus dipengaruhi pula oleh malapetaka. Tetapi kebanjakan orang lupa, bahwa kita masih pula hidup dalam dunia dalam mana ketertiban masih djauh terdjamin dan dalam mana kita tak dapat mengetjap perdamaian.

Tak mengherankan, bahwa pergolakan jang dimulai dengan malapetaka peperangan, belum selesai, dan tak dapat diselesaikan dengan bulat beserta tak dapat dihentikan pada sa'at pidato Sri Ratu diuraikan. Djuga usaha untuk menghentikan sedjarah pada soal tersebut, akan ternjata sia-sia belaka.

Tidak para pendengar, sedjarah tak berhenti. Djuga sesudahnja hari ini, pergolakan akan berdjalan terus untuk melaksanakan tjita-tjita jang timbul dalam hati bangsa ini, jang djuga dibimbing oleh beberapa semangat Belanda.

Dalam pekerdjaan bersama jang tetap antara negeri Belanda dan Indonesia oleh kemadjuan jang akan datang djika ini dibimbing dengan tjara teratur, hendak terdapat kelonggaran bagi susunan ketertiban tinggi, jang dapat lebih memuaskan pihak Belanda daripada sekarang.

Dalam pada ini saja hendak membentangkan beberapa fikiran. Kemadjuan jang diselenggarakan oleh Indonesia sekarang adalah begitu besar, sehingga dianggap perlu, bahwa pihak organisasi jang mengenai tata negara, jang hendak ditjiptakan dengan tjara seperti telah ditetapkan dalam naskah persetudjuan, harus berhati-hati. Ia seakan-akan masih belum dapat menjesuaikan diri ditengah-tengah dunia jang kurang mengenal belas kasihan. Djuga bukan baginja, sungguhpun pengharapan dari beberapa orang dalam Republik Indonesia ternjata berlainan. Keinsjafan tentang kemadjuan, jang diselenggarakan dengan tjara jang tepat dalam pekerdjaan bersama dengan Negeri Belanda dan dalam sikapnja didunia, hanja dapat memberi keutamaan dalam kemadjuan Indonesia.

Tetapi disampingnja kita bangsa Belanda insjaf, bahwa dalam negara-negara ini suatu pertjepatan dari da'wat kebebasan setjara bathin dan masjarakat telah timbul, jang tidak akan hilang pada hari ini, tetapi mungkin baru dimulai dengan sempurna.

Saja berkata dengan sempurna, karena adalah mengandung maksud. Karena, dunia dan djuga Negeri Belanda bukan sadja akan mengukur perdjuangan jang diteruskan untuk mentjapai tjita-tjita jang diidam-idamkan oleh seluruh bangsa Indonesia ini pada hasilnja, akan tetapi terutama alat jang digunakannja.

Tahukah Tuan, bahwa Tuan sekarang pada permulaan kemerdekaan memikul pertanggungan-djawab segenap bangsa jang merdeka, jang beladjar berdjuang dengan mempergunakan alat-alat bathin dan menghindarkan kekerasan dan tipu muslihat ? Tuan dan kita tak akan dihukum oleh riwajat atas tjara dan tempo dalam mana tidak sadja kemerdekaan jang bulat dalam lapangan politik, tetapi djuga kemerdekaan sosial dari negeri-negeri ini akan tertjapai, akan tetapi akan sifat jang sopan dari alat-alat, dengan mana ini semua di laksanakan.

Sedjarah manusia ditulis dengan darah dan keringat dan selangkah demi selangkah bangsa-bangsa madju terus di djalan sedjarah. Demikianpun djuga dengan negeri-negeri ini.

Kini kita bersama-sama menghadapi pekerdjaan untuk membuka djalan, dimana segala anak-anak negeri ini dan bangsa Belanda pula dapat mengalami sesuatu apa dalam penghidupan mereka jang biasa jang diusahakan oleh orang-orang jang utama dari kalangan kita.

Kini jang mendjadi soal ialah, dapatlah kita dengan pengerahan segala kekuatan berhasil mendapat penghargaan bukan sadja dari golongan pimpinan, tetapi terutama pula dapatlah kita, bersama-sama dengan segala golongan bangsa dengan pelahan-pelahan dan berangsur-angsur memberi sesuatu jang berguna bagi kemakmuran dan djika boleh, sedikit kebahagiaan manusia, jang dapat tertjapai dalam kehidupan damai dalam suasana jang tak mengenal permusuhan.

Anggota-anggota Delegasi Indonesia, suatu pekerdjaan hebat diserahkan kepada kita bersama. Ketua Tuan-tuan, baru-baru ini telah mengutjapkan perkataan jang penuh hikmat, dalam mana diterangkan bahwa bukan formu-

lelah jang mendjadi soal pertama, akan tetapi apakah kita bersedia saling mempertjajai. Soal ini tidak sadja berlaku bagi kita semua jang bertanggung djawab akan tetapi terutama bagi bangsa-bangsa pula.

Kita insjaf akan kesukarannja. Akan tetapi kita mengerti bahwa ini adalah djalan satu-satunja, djalan jang sempit jang hendak melalui djurang-djurang sjak wasangka dan meminta kepertjajaan jang tetap dari mereka, jang sebagai manusia jang berkeras hati berdiri pada permulaan jang lemah ini, jang bukan sadja dinjatakan dalam 17 pasal jang baru sadja kita bubuhi dengan tanda tangan, akan tetapi dalam djiwa pula, jang membawa kita kepada sudut, dimana kita mentjapai hasil ini dan dimadjukan kepada kedua bangsa kita untuk disetudjuinja.

Moga-moga Tuhan Jang Maha Esa, jang dapat menentukan nasib segala bangsa akan mentjurahkan karunia-Nja kepada kita semuanja.

Pidato P.M. Soetan Sjahrir

Dengan penanda tanganan persetudjuan Linggadjati ini, sekarang berlaku suatu kedjadian jang besar artinja serta akan besar pula akibatnja bagi sedjarah bangsa Indonesia.

Masih banjak keragu-raguan, masih banjak kesangsian, masih ada pula tjuriga terhadap kedjadian jang penting ini. Masih kabur bagi orang terbanjak dinegeri kita ini, tempo jang dihadapan.

Masih pahlawan-pahlawan kita berhadapan dengan putera-putera negeri Belanda dengan menggenggam senapan serta alat pembunuh jang lain, memandang satu dengan lain sebagai antjaman diri dan djiwa jang harus dilenjapkan, sebagai musuh jang harus dibinasakan.

Masih ribuan, puluh ribuan orang dinegeri kita ini mengandung perih serta dendam dalam hatinja oleh karena saudara kandungnja, ajahnja, ibunja, isterinja, suaminja, harta-bendanja, kedudukannja, harapannja, mendjadi kurban pergolakan sedjarah ditanah air kita.

Masih banjak perih, masih banjak luka, masih banjak keragu-raguan, masih banjak kesangsian, masih banjak ketjurigaan, masih banjak bentji, masih mendung dan gelap udara dinegeri kita jang indah ini.

Akan tetapi ada pula telah lega, ada pula terdengar dan terasa napas jang menghembuskan sesak dari dada keluar. Ada pula tanda-tanda jang menundjukkan akan djernih dan terangnja djiwa serta udara dikeliling kita. Tanda-tanda akan kemungkinan melihat kemuka, melihat djauh kalau bisa, tanda-tanda kemungkinan melupakan jang lalu serta memusatkan perhatian serta harapan pada tempo jang dihadapan.

Harapan kita bangsa Indonesia adalah kemerdekaan jang sempurna bagi bangsa kita. Hingga sekarang harapan kita itu terasa sebagai antjaman bagi sebagian penduduk negeri ini, terutama jang berasal dari negeri Belanda. Bagi kita ichtiar serta perdjuangan kita ini menimbulkan serta memupuk perasaan serta kejakinan keharusan berdjuang, berkurban, hingga menghantjurkan rintangan dan lawan, jang menghalangi terlaksananja tjita-tjita, harapan, keinginan, serta sebenarnja kebebasan djiwa kita. Kita berhadapan dengan dunia dikeliling kita sebagai halangan dan rintangan, sebagai lawan dan musuh. Ruangan hidup serta djiwa kita pedat dengan kejakinan serta semangat berdjuang dan berkurban. Dunia kita pandang dengan subjectivisme jang absoluut. Suasana pertentangan, suasana perdjuangan, suasana sesak meliputi kita, suasana itu pula didalam diri serta djiwa kita.

Demikian pula bagi mereka dinegeri ini jang merasa serta mengalamkan perdjuangan kemerdekaan kita sebagai pengumuman serta perlakuan perang terhadap dirinja. Mereka pun hidup didalam suasana perdjuangan dan pertentangan, didalam suasana sesak diluar, dan didalam dirinja.

Suasana itu, suasana gelap bagi djiwa. Hidup didalam suasana itu berarti hidup didalam gelap, akan tetapi didalam gelap jang panas. Perbuatan jang dilakukan didalam suasana itu, adalah perbuatan jang dilakukan didalam kegelapan, kesalahan, kekerasan, pembinasaan, pembunuhan jang dilakukan didalam suasana itu adalah diperkuat didalam suasana jang gelap.

Demikianlah hendaknja pengertian serta tuntutan tanggung-djawab kita pada sekalian kesalahan, perkosaan, pembinasaan jang berlaku didalam suasana perdjuangan, pertentangan, suasana sesak dan gelap itu.

Persetudjuan jang kita tanda-tangani sekarang ini dimaksudkan sebagai langkah pertama untuk membebaskan kita daripada suasana sesak ini, langkah pertama didalam ichtiar kita menghilangkan kegelapan, serta mengembalikan suasana jang terang dan djernih, mengembalikan suasana jang objectief. Suasana didalam mana pekik „ Merdeka" tidak lagi mengantjam pada sesama manusia, akan tetapi sebagai pekik kemanusiaan jang dapat pula menggerakkan tiap-tiap manusia jang lain, jang didalam suasana baru jang lega itu, djiwa kemanusiaannja, mudah pula tergerak oleh tiap utjapan kemanusiaan.

Dunia penuh dengan pertentangan, penuh dengan bahaja perdjuangan, dunia gelap. Di Indonesia kita menjalakan obor ketjil, obor kemanusian, obor akal jang sehat, jang hendak menghilangkan suasana gelap, suasana pertentangan jang mendjadi akibat daripada serta pula mengakibatkan perkosaan dan pembinasaan. Suasana sesak serta gelap.

Marilah kita pelihara obor ini supaja dapat menjala terus serta mendjadi lebih terang. Mudah-mudahan ia akan merupakan permulaan terang diseluruh dunia.

Terima kasih.

Pidato Dr. H. J. van Mook

Djika tanda-tangan, jang baru dibubuhi ini, akan mempunjai arti dalam sedjarah jang diharapkan oleh jang membubuhinja, maka upatjara pada sore ini akan merupakan berachirnja satu zaman. Satu zaman, dalam mana dua bangsa, jang sekarang telah mengikatkan diri guna bekerdja bersama-sama, jang oleh peperangan ditjeraikan satu dari jang lain dan harus mentjahari djalan untuk berdjumpa pula.

Berabad-abad kedua bangsa ini saling mengenal dan dalam berbagai-bagai hal, sedjarah mereka, kemadjuan ekonomi mereka dan kebudajaan mereka adalah hasil dari perhubungan landjut itu. Hingga pada peperangan dapat diharapkan bahwa riwajat bersama akan dilandjutkan dengan tidak mengalami peristiwa kegontjangan jang agak besar hingga pada saat jang pada hari ini kita mentjapainja dan hingga masa depan, jang kita sekarang akan menghadapi.

Akan tetapi peperangan telah memisahkan kita dengan sekonjong-konjong dan musuh-musuh kita telah memperdirikan tembok-tembok jang berlipat ganda antara kita. Kedua bangsa diasingkan dari dunia bebas ; kehidupan kedua bangsa ditindas dengan kedjam. Akan tetapi selain dari pada itu dinegeri ini segolongan bangsa diasingkan seluruhnja dan ditawan, dengan kebengisan jang tak dapat dilukiskan. Demikianlah maka terdjadi bahwa ikatan, jang terdapat diantara kita, dengan sekonjong-konjong diputuskan setjara kekerasan dan bahwa kedua bangsa ini, masing-masing harus mentjahari djalannja sendiri, hingga tertjapainja kemenangan Serikat.

Dalam waktu itu dasar-dasar untuk Linggadjati diadakan, akan tetapi djuga dengan kesukaran-kesukaran dan bahaja-bahaja, jang kita harus kalahkan dalam perdjalanan ke Linggadjati itu. Pada dasarnja tidak ada timbul rasa kebentjian antara satu sama jang lain, akan tetapi hanja satu perasaan keasingan untuk sementara. Tetapi djuga pada kedua belah pihak orang mempeladjari

betapa dalamnja pikiran dan perhubungan pendjadjahan bertjampur dalam pergaulan dahulu serta djuga betapa sukar untuk menghilangkan dan melahirkan ditempatnja pekerdjaan bersama atas dasar persamaan.

Pada pihak Indonesia diberi perlawanan jang hebat terhadap pengembalian pendjadjahan dalam bentukan mana djuapun, sesudah dialami pendjadjahan Djepang dalam bentukan jang sekedjam-kedjamnja. Pada pihak Belanda keinsjafan meluas serta timbullah penghargaan terhadap perasaan ini, akan tetapi orang harus dapat melihat azas-azas baru ini mendjadi kebenaran. Orang-orang Indonesia berkemauan untuk mendjadi satu bangsa merdeka dan pandangan mereka adalah lebih djauh dari pada organisasi jang dibenarkan. Orang-orang Belanda hendak memberi pertolongan dalam membentuk bangsa jang merdeka, akan tetapi mungkin lebih melihat kepada kesukaran-kesukaran dewasa ini dari pada tudjuan jang terachir.

Riwajat sesudahnja tanggal 15 Agustus 1945 tidak memudahkan kita untuk mentjapai saat ini. Kedua bangsa mengalami kesukaran-kesukaran jang sangat hebat oleh pendudukan; dalam kedua negara kerusakan-kerusakan jang diadakan adalah besar. Dalam keadaan-keadaan jang sangat katjau orang harus mengalami satu revolusi, jang adalah mempunjai kenjataan dalam tjita-tjitanja tetapi mesti mentjari bentukan-bentukannja lagi. Djepang telah berusaha dengan sekuat-kuatnja untuk memperbesarkan kekatjauan ini dan antjaman dari banjak djiwa orang, kadang-kadang jang menghebatkan perselisihan kedua partai. Telah timbullah satu garis, dimana kedjadian-kedjadian sehari-hari mengantjam untuk melupakan riwajat lama bersama dan hendak melahirkan perbedaan-perbedaan jang sangat tadjam. Akan tetapi djika menoleh pada 19 bulan jang achir ini, maka kita harus mengakui, bahwa kedjadian-kedjadian ini tidak hanja terdiri dari kemalangan dan kegelapan. Dalam kedjadian-kedjadian ini dari permulaannja perhubungan perseorangan antara orang Indonesia dan Belanda tetap dipertahankan.

Hal ini djuga berlaku guna kebanjakan orang, jang belum dapat bertemu satu sama lain dan membikin perhubungan lebih bebas dari perasaan jang bersifat bermusuhan, jang djika dilihat dari kedjadian-kedjadian jang telah timbul, tak disangka oleh orang. Pada pihak Belanda telah dinjatakan satu kesabaran serta tahan hati, jang patut mendapat pudjian ; pada pihak Indonesia sebelumnja dan sesudah keinginan untuk pekerdjaan-bersama dapat dilihat usaha-usaha guna menghindarkan perbedaan-perbedaan.

Kadang-kadang kelihatan seperti disini diadakan peperangan dengan memakai penghalang-penghalang setjara besar-besaran ; akan tetapi dengan melalui penghalang-penghalang itu, perhubungan jang damai atas kebanjakan soal, djuga selalu adalah mungkin. Dalam daerah-daerah Malino, pekerdjaan bersama telah memperoleh bentukannja, dengan tidak menimbulkan bahaja disampingnja untuk dipisahkan dari seluruh Indonesia.

Dunia pada waktu itu, untuk sebagian disebabkan oleh kesukaran-kesukarannja sendiri sesudahnja peperangan pada umumnja melihat akan kedjadian-kedjadian di Indonesia dengan penuh kesabaran dan penghargaan serta selalu membuka kesempatan guna perembukan dan persetudjuan jang damai. Sahabat-sahabat dari banjak negara-negara telah memberi pertolongan kepada kita dan hanja dalam beberapa hal, da'wat untuk dekat mendekati dirintangi oleh golongan-golongan jang bermusuhan atau jang tidak bertanggung-djawab.

Dan sekarang telah sebegitu djauh sehingga bukan sadja dua pemerintah, akan tetapi benarlah dua bangsa sudah melahirkan dasar jang pertama guna berdjalan bersama-sama sebagai bangsa jang sama deradjat dan tingkat, dua bangsa jang dapat mempunjai kejakinan jang lebih dalam lagi dari kemungkinan-kemungkinan pergaulan ini. Pada kedua pihak masih terdapat lagi banjak orang jang oleh ketidak sanggupnja, penjesalan atau tidak mempunjai kekerasan

hati untuk melupakan masa jang lampau, tidak melihat akan keuntungan-keuntungan dari pergaulan ini serta menjetudjui persetudjuan jang telah ditjapai. Suara-suara mereka akan hilang, djika apa jang sekarang telah disetudjui di atas kertas, akan dibangunkan dalam perbuatan-perbuatan. Dan kebenarannja perdjandjian ini harus lekas dilaksanakan. Karena negeri telah miskin dan membutuhi sangat akan pengembalian keamanan dan pembaharuan pekerdjaan. Sekarang perselisihan-perselisihan dikalangan-kalangan sendiri serta perkelahian kedaerahan jang hingga sekarang melambatkan atau menghalangi pembentukan kembali, dapat berachir. Mulai dari sekarang semua utjapan-utjapan umum pada kedua belah pihak harus menghentikan suara jang bersifat tidak pertjaja, persangkaan dan permusuhan serta pengumuman harus ditudjukan pada pembangunan.

Dari sekarang harus dilenjapkan segala perasaan jang tidak-tidak, langkah-langkah atau tindakan-tindakan politik, usaha-usaha untuk mendapat kedudukan jang baik dan pikiran serta tenaga harus ditjurahkan pada pembangunan negara baru ini dan perbaikan kemakmurannja serta kehidupan kebudajaan dan sosialnja.

Dari sekarang nafsu kenasionalan dapat meluap dan mereka, jang masih lagi memanggul sendjata atau oleh tindakan-tindakan jang bersifat demonstrasi menganggap harus menegaskan kemerdekaan ini, dengan penuh kepertjajaan bahwa kemerdekaan itu dipertanggungkan, dapatlah memulai dengan pekerdjaan jang berat serta penuh kesukaran, jang dituntut oleh masa depan.

Zaman perselisihan dan perundingan telah berlalu : zaman persahabatan dan bekerdja-bersama telah tiba. Kita semua masih akan mempunjai lagi kesukaran untuk menjesuaikan diri kita serta menentukan tingkah-laku kita dalam keadaan baru ini. Akan tetapi marilah kita memberanikan diri guna memulai akan pekerdjaan dengan gembira dan dengan tidak menaruh sak-wasangka atau sjarat-sjarat kebathinan. Mereka jang telah memberi bantuannja dalam melaksanakan perdjandjian ini, diwadjibkan untuk menjumbangkan seluruh tenaganja guna memenuhi keinginan berdjuta-djuta orang, jang berdiri dibelakang mereka, keinginan jang tak terhingga besarnja kepada keamanan dan kebebasan.

Dalam hal ini pikiran mentjahari untuk sendiri, perasaan-perasaan jang tidak-tidak terhadap perkara-perkara ketjil harus disingkirkan. Dan pada lahirnja tidak sukar untuk memperoleh sikap serta tudjuan jang benar. Karena adalah mudah untuk melihat, bahwa pekerdjaan jang baik serta teguh dari kedua partai bukan sadja memperdekatkan kebenarannja pendirian masing-masing, akan tetapi djuga dan benarlah sangat penting guna kawan. Kita dapat merasakan pertjobaan ini dengan keragu-raguan serta sak wasangka. Kita djuga dapat mendjadikan hal ini sebagai satu tjontoh dalam dunia ini, dengan djalan mentjurahkan segenap tenaga kepada pembangunan dan mengachirkan untuk selama-lamanja segala perkelahian dan perselisihan.

Bulan-bulan jang lama serta penuh kesukaran antara Linggadjati dan sekarang telah memberi udjian jang sukar atas kesabaran dan kegiatan kita. Kesukaran-kesukaran sesudahnja perang jang mengambil waktu jang lama telah membawa perasaan putus asa dan kepahitan.

Kita harus mengalahkan semuanja ini dan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja. Oleh sebab itu marilah kita pada hari ini menjingkirkan segala rintangan-rintangan dan dengan kejakinan dan kepertjajaan memulai akan pekerdjaan perdamaian ini.

Linggadjati — Renville

SETELAH keadaan permusuhan antara Negeri Belanda dan Republik Indonesia harus berachir, karena adanja persetudjuan Linggadjati, perlu sangat dihilangkan segala pikiran balas membalas dari kedua-kedua pihak dan dengan pimpinan jang kuat dan tepat tudjuannja dihentikan rasa takut akan tindakan-tindakan sematjam itu jang masih dirasai oleh banjak orang.

Banjak soal jang harus dipetjahkan bersama-sama djuga hanja dapat diselesaikan dalam suasana persahabatan dan saling pertjaja mempertjajai. Berhubung dengan ini, maka Komisi Djenderal dan Delegasi Republik mengumumkan keterangan bersama sebagai berikut:

Ta' ada seorangpun djuga akan dituntut atau mendapat kesukaran dengan tjara jang lain, oleh karena ia telah menggabungkan diri dengan salah satu pihak atau mentjari perlindungan kepada salah satu pihak. Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik akan mendjaga dengan segala kekuatan supaja keterangan ini dilakukan dan akan menghukum segala pelanggaran dengan selekas-lekasnja.

Selain dari pada itu kedua belah pihak akan mengadakan segala usaha supaja mereka jang telah mendjadi korban karena ikut dalam pertikaian politik dimerdekakan lagi atau ditjari djika mereka ditjulik dan ditahan oleh orang-orang jang tidak bertanggung djawab.

Komisi Djenderal dan Delegasi Republik telah mentjapai persetudjuan tentang demiliterisasi Kabupaten Modjokerto, jang menetapkan, bahwa kekuasaan jang tertinggi akan terletak pada Pembesar-pembesar Sipil Republik.

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik akan segera mengambil tindakan-tindakan dengan persetudjuan kedua belah pihak untuk mentjapai maksud itu serta untuk mendjamin keamanan djiwa dan benda dalam daerah ini. Demikian isi komunike bersama Kementerian Penerangan dan R.V.D. tanggal 31 - 3 - 1947.

Berhubung dengan kehendak dari beberapa partai terutama dari pihak Sajap Kiri, jang minta supaja Delegasi Republik Indonesia diganti maka setelah dibitjarakan dalam sidang Kabinet, pada tanggal 29 - 4 - 1947 oleh Presiden telah ditetapkan pembentukan Delegasi Indonesia baru jang diberi kewadjiban untuk menjelenggarakan bersama dengan Delegasi Belanda, segala hal jang terdapat dalam Naskah Persetudjuan, jang nama-namanja sebagai berikut:

Sutan Sjahrir sebagai Ketua.

Anggauta-anggauta: I. J. Kasimo, Mr. Moh. Rum, Supeno, Mr. Susanto Tirtoprodjo dan Dr. A. K. Gani.

Disamping itu, diangkat pula beberapa orang sebagai penasehat ialah:

Ir. Abd. Karim, Mr. Abdulmadjid Djojoadiningrat, Harjono (SOBSI), Dr. J. Leimena, Mr. Lukman Hakim, Drs. Maruto Darusman, Mutalib, Ir. Pangeran Noor, Sajuti Melok, Mr. Sartono, Setiadjid, Simatupang, Dr. Sudarsono dan Suwirjo.

Selandjutnja dengan penetapan Presiden No. 6 tanggal 9 - 5 - 1947 ditetapkan pula mendjadi Penasehat Delegasi Indonesia baru ialah Saudara-saudara: Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Ir. Santosa dan Ir. R.M.P. Surachman Tjokroadisurjo.

a. Nota Komisi Djenderal Belanda tanggal 27 Mei 1947

Pada tanggal 27 Mei 1947 Dr. van Mook menjampaikan kepada Perdana Menteri Sutan Sjahrir suatu pernjataan tertulis jang berisi usul-usul Belanda terachir mengenai segala sesuatunja jang dirundingkan dengan Republik Indonesia.

Adapun usul Belanda tersebut diantara lain-lain berisi:

I. Membentuk suatu pemerintah - sementara - bersama.

II. Mengeluarkan uang bersama dengan pembentukan badan bersama jang menentukan nilai uang itu terhadap uang asing.

III. Menuntut dengan segera dikirimkannja beras dari Republik kedaerah-daerah Indonesia lainnja jang menderita kekurangan makanan.
IV. Menjelenggarakan ketertiban dan keamanan diseluruh Indonesia dan di daerah-daerah Republik jang diperlukan dengan bantuan Belanda.
V. Menjelenggarakan penilikan bersama atas import dan export.

Kalimat-kalimat terachir dalam nota tersebut menegaskan, djawaban Delegasi Indonesia diharapkan sudah diterima dalam 14 hari.

Kalau djawaban bersifat menolak atau tidak memuaskan, perundingan tak akan dapat diteruskan lagi oleh pihak Belanda, dan Komisi Djenderal akan menjerahkan kepada pemerintah Belanda untuk menentukan tindakan apa jang selandjutnja akan dilakukan.

Berhubung dengan adanja nota Belanda jang bersifat ultimatif tersebut, maka pada tanggal 31 - 5 - 1947 Perhimpunan Mahasiswa Jogjakarta dan I. P. I. Jogjakarta mengadakan sidang di Gedung Gadjah Mada dengan mengambil suatu resolusi, jang antara lain berisi :

1. Menuntut penarikan tentara Belanda.
2. Mengerahkan dan menggerakkan tenaga massa bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan.
3. Bersedia mendjalankan semua usaha guna mewudjudkan putusan tersebut dengan mendesak kepada Pemerintah dengan suatu rentjana jang tegas bagi rakjat seluruhnja untuk perdjuangan selandjutnja.

Resolusi tersebut pada tanggal 1 - 6 - 1947 oleh kurang lebih 15.000 peladjar terdiri dari para Mahasiswa, Peladjar-peladjar Militer Akademi, Polisi Akademi, dan peladjar-peladjar lainnja, telah dibawa ke Istana Presiden dengan setjara demonstratif untuk disampaikan kepada Kabinet.

Demikian pula Sajap Kiri, P.B. Masjumi, P.N.I., G.P.I.I. dan B.P.R.I. dalam sidangnja tanggal 1 - 6 - 1947 masing-masing mengambil sikap menolak nota Komisi Djenderal tanggal 27 - 5 - 1947.

b. Nota Djawaban Pemerintah Republik terhadap nota Komisi Djenderal tanggal 27 Mei 1947

Pada tanggal 8 Djuni 1947 disampaikan kepada Dr. van Mook di Djakarta.

Nota tersebut memuat pasal-pasal sebagai berikut :

I. Pembentukan Pemerintah Peralihan dan perhubungan dengan luar negeri.

1. Djalan perundingan untuk menjelenggarakan Persetudjuan Linggadjati, memberi kenjataan kepada Delegasi Indonesia, bahwa Persetudjuan Linggadjati itu tidak dapat diselenggarakan pasal demi pasal, melainkan hendaknja diselenggarakan seluruhnja. Oleh karena itu Delegasi Indonesia bersedia menjetudjui usul Delegasi Belanda supaja diadakan Pemerintahan Peralihan ke Indonesia Serikat, selandjutnja disebut Pemerintah Peralihan.

   Oleh karena menurut Persetudjuan Linggadjati Indonesia Serikat akan terdiri dari pada tiga Negara, jaitu Republik Indonesia, Borneo dan Indonesia Timur, Pemerintah Republik bersedia mengakui adanja Negara Indonesia Timur, sungguhpun tjara membentuknja tidak sesuai dengan semangat kerdja bersama jang dimaksud dalam Persetudjuan Linggadjati. Pun susunan daerahnja jang mengeluarkan Nieuw Guinea dari Indonesia Timur dengan tidak persetudjuan rakjatnja, tidak sesuai dengan maksud Persetudjuan Linggadjati. Delegasi Indonesia berpendapat supaja daerah tersebut dimasukkan kedalam Negara Indonesia Timur. Pengakuan ini tidak mengurangi aliran-aliran jang sekarang ternjata didaerah tersebut untuk mengeluarkan suaranja, berdasarkan pasal 3 dan 4 Persetudjuan Linggadjati, turut serta dengan Republik.

Untuk mengadakan pembentukan seterusnja jang harmonis dari pada Indonesia Serikat, maka Delegasi Indonesia boleh menghendaki dari pada Delegasi Belanda supaja penentuan status Borneo dikerdjakan bersama oleh Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan semangat Persetudjuan Linggadjati.

2. Selama masa peralihan ini, jaitu sebelum terbentuknja Negara Indonesia Serikat, kedudukan de facto Republik Indonesia tidak boleh dan tidak akan dikurangi dalam kekuasaannja seperti jang telah diakui oleh Pemerintah Belanda dalam Persetudjuan Linggadjati.
3. Dengan menjusun Pemerintah Peralihan ini Delegasi Indonesia berpendapat, bahwa kedudukan Gubernur Djenderal dengan sendirinja berubah. Oleh karena itu selajaknja kedudukan baru itu ditegaskan pula dengan mengganti namanja dengan nama jang baru umpamanja Komisaris Tinggi.
4. Pemerintah Peralihan terdiri atas wakil-wakil Republik, Negara Indonesia Timur dan Borneo dengan penetapan bahwa sekurang-kurangnja separoh dari djumlah anggautanja terdiri dari wakil-wakil Republik.

   Dalam Pemerintah Peralihan putusan diambil dengan suara terbanjak.
5. Dalam beberapa hal jang tentu jang langsung mengenai kepentingan Negeri Belanda, dalam masa peralihan ini, diperlukan persetudjuan Komisaris Tinggi.
6. Pemerintah Peralihan itu berkewadjiban terutama seperti berikut:
   a. mengadakan persediaan untuk membentuk sebuah Persidangan Pembentuk Negara (Konstituante) jang menurut pasal 5 Persetudjuan Linggadjati akan menjusun Undang-undang Dasar Negara Indonesia Serikat.
   b. menjelesaikan soal-soal jang masih berlaku.
   c. menjerahkan kekuasaan-kekuasaan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada organisasi-organisasi Federal dan Negara Bagian (Deelstaat).
7. Dengan terbentuknja Pemerintah Peralihan ini, maka dimulai dengan mengadakan Kementerian-kementerian federal. Tentang pimpinan Kementerian itu, ataukah didjalankan oleh seorang ataukah oleh Dewan, akan dirundingkan.
8. Soal-soal besar jang mengenai penjelenggaraan Persetudjuan Linggadjati tetap diurus oleh kedua Delegasi bersama. Putusan-putusan jang ditetapkan oleh kedua delegasi itu, didjalankan oleh Pemerintah-pemerintah Negara Bagian.
9. Pemerintah Peralihan mengangkat seorang wakil di Negeri Belanda sebagai pendahuluan kepada pedjabatan Komisaris Tinggi.
10. Dari mulai terbentuknja Pemerintah Peralihan, Belanda mengusulkan Indonesia mendjadi anggauta U.N.O., dan dimulai pula membentuk perwakilan Indonesia sendiri di luar negeri, jaitu kedutaan dan konsulat.
11. Republik berhak menempatkan seorang wakil dagang pada kedutaan-kedutaan atau konsulat dari Pemerintah Peralihan di luar negeri untuk menjelenggarakan kepentingan istimewa dari Republik.
12. Untuk menjempurnakan kedutaan dan perwakilan Indonesia diluar negeri maka ditempatkan sebagai volentair tenaga-tenaga Indonesia dalam kedutaan Belanda diluar negeri untuk mendapat pengalaman.
13. Ketjuali dari pada itu Pemerintah Republik tidak berkeberatan kalau Pemerintah Belanda mengangkat orang Indonesia dalam Kedutaan Belanda.

II. Urusan Militer.

1. Urusan militer didalam perundingan Indonesia Belanda ini dapat dibagi mendjadi dua bagian:
   a. usaha jang akan menghilangkan permusuhan dan rasa permusuhan antara kedua-dua tentara;

b. usaha jang mesti dilakukan sebagai akibat dari pada kerdja sama berdasarkan Persetudjuan Linggadjati.

2. Untuk mentjapai apa jang disebut pada 1) A, maka dapat menjetudjui dengan mengemukakan sekali lagi apa jang telah diusulkan oleh pihak Indonesia dalam memorandum pertama tentang urusan militer dalam garis besarnja usul delegasi Indonesia jaitu :

   a. mendemiliteriseer daerah demarkasi dengan menjerahkan pendjagaan zone itu kepada polisi kedua belah pihak berdasarkan atas pendjagaan bersama-sama.

      Didalam usaha ini diberi tempat jang istimewa kepada daerah Sidoardjo — Krian — Modjokerto dengan selekas mungkin mentjapai keadaan jang ditentukan kepada peta demarkasi 24 Djanuari 1947 ;

   b. sebagai langkah kedua, maka tentara kedua belah pihak meninggalkan daerah demarkasi itu dan diundurkan ke kota garnizoen masing-masing ;

   c. kedua belah pihak akan bekerdja bersama-sama pula hingga didalam daerah jang termasuk Republik berangsur-angsur tentara Belanda diganti oleh pasukan Republik ;

   d. segera oleh kedua belah pihak dimulai mengurangi djumlah tentaranja masing-masing. Hal ini patut dikerdjakan selekas mungkin sebagai akibat pasal 16 Linggadjati dan sebagai usaha terpenting mengurangi permusuhan antara kedua-dua tentara.

3. Supaja dapat mengusahakan apa jang telah didjandjikan dalam pasal 16 Linggadjati (1) B, maka perlu dikemukakan dasar-dasar kerdja sama itu jang djadi sjarat mutlak.
   Dasar itu ialah :

   a. pertahanan Negara Indonesia Serikat adalah urusan negara itu sebagai satu kewadjiban nasional jang seutama-utamanja ;

   b. pada dasarnja pertahanan itu mesti dilakukan dengan tentara nasional, sebab hanja tentara nasionallah jang dapat melakukan pertahanan dengan seluruh djiwanja. Tidak menjalahkan dasar tadi kalau ada tentara asing membantu tentara nasional itu, asal dapat dipastikan lebih dahulu, bahwa kedua-dua tentara itu berdjuang untuk tudjuan jang satu ;

   c. oleh sebab a dan b. tadi maka usaha pertama jang mesti dilakukan di Indonesia ialah memperkuat Tentara Nasional Indonesia Serikat supaja dapat melakukan pekerdjaannja dalam segala tjabang usaha pertahanan. Dalam keadaan demikian maka mulai sekarang sudah mesti diletakkan dasar-dasar pembentukan segala matjam bagian tentara jaitu antara lain kesatuan-kesatuan operationil didalam Tentara Nasional Indonesia Serikat.

   d. Usaha pembangunan tentara di Negara-negara luar Republik pada masa peralihan ini adalah usaha bersama-sama antara disatu pihak Republik serta Negara-negara tadi dan dilain pihak Negeri Belanda ;

   e. Kerdja sama didalam urusan pertahanan adalah urusan antara Indonesia Serikat dan Negeri Belanda. Pada masa peralihan dapat dibentuk satu badan didalam Pemerintah Peralihan jang dapat turut mengerdjakan petundjuk-petundjuk dari kedua belah pihak delegasi. Sebagai dasar dikemukakan oleh pihak Indonesia.

      1. Perbantuan dari Belanda merupakan pertolongan alat-alat dan kalau perlu penasehat.

      2. Tjara selandjutnja bekerdja bersama-sama itu ditentukan oleh staf kedua belah pihak.

4. Pengurangan djumlah kedua belah tentara pada dasarnja adalah soal politik dan psychologis dan sebaiknja segera dimulai dengan ichlas dan djudjur.

Soal keamanan didaerah Republik tidak boleh dihubungkan dengan tentara Belanda. Kewadjiban mengurus keamanan didalam negeri bukan kewadjiban tentara Belanda, tetapi semata-mata kewadjiban Polisi Republik.

III. Urusan Ekonomi.

Tentang hal-hal jang mengenai ekonomi, Delegasi Indonesia memperingatkan, bahwa dari semulanja Pemerintah Republik berpendapat, bahwa harta benda bangsa asing akan dikembalikan selaras dengan maklumat Pemerintah Republik tanggal 1 Nopember 1945 ketjuali jang menurut anggapan Pemerintah Republik perlu dinasionalisasi dengan mengganti kerugian, dan supaja produksi dikerdjakan dengan setjepat-tjepatnja untuk memenuhi kebutuhan Dalam Negeri dan dunia Internasional kepada bahan-bahan dari Indonesia. Djuga politik perekonomian Republik jang berudjud hendak mengembangkan kemakmuran disegala lapisan rakjat seluruh Indonesia memandang Indonesia terhadap dunia luar sebagai satu kesatuan ekonomi.

Untuk mendjalankan produksi kembali dengan sebaik-baiknja perlu ada suasana saling mengerti dimana ada kerdja bersama antara kapital dan buruh dengan dasar : rendement jang pantas bagi kapital dan upah jang selaras dengan peri kemanusiaan bagi kaum buruh. Untuk mempertinggi tingkat produksi, supaja barang bersaingan dipasar dunia perlu diadakan rasionalisasi setjara ekonomis pula. Artinja rasionalisasi didjalankan dengan tidak menjingkirkan tenaga produksi dengan pertjuma, jang pada hakekatnja menimpakan tanggungan kepada masjarakat. Bagi tiap-tiap tenaga jang dikeluarkan harus diadakan pekerdjaan baru jang produktif pula.

Pemerintah Republik jang berdasarkan negara Hukum tjukuplah untuk mendjamin keselamatan segala-galanja.

Perundingan antara Delegasi Indonesia dan Delegasi Belanda tentang berbagai soal ekonomi dan keuangan kandas sampai sekarang, karena tak ada organisasi pusat jang mengikat bagian-bagian Indonesia djadi satu. Sedangkan dari djurusan ekonomi Indonesia seluruhnja harus dipandang satu, pada waktu sekarang susunannja kenegaraannja tidak satu.

Tetapi dengan terbentuknja Pemerintah Peralihan jang meliputi seluruh Indonesia, maka adalah instansi pusat tempat pemusatan urusan ekonomi jang mengenai seluruh Indonesia.

Berhubung dengan ini Delegasi Indonesia dapat menerima usul ekonomi Delegasi Belanda pada pokoknja, terketjuali dalam beberapa detail jang perlu diperundingkan lagi.

A. Lembaga Deviezen.

1. Delegasi Indonesia setudju diadakan dengan segera suatu Lembaga Deviezen sementara untuk seluruh Indonesia jang didalamnja dimasukkan segala hasil dari pendjualan barang-barang export dan pembajaran djasa-djasa jang diberikan kepada luar negeri. Dengan adanja Pemerintah Peralihan sebagai organisasi pusat, Delegasi Indonesia tak berkeberatan ditiadakan Lembaga Deviezen masing-masing Negara - Bagian.
2. Delegasi Indonesia berpendapat bahwa pengurus Lembaga Deviezen ini bertanggung djawab kepada Pemerintah Peralihan. Lembaga ini hendaknja dipimpin oleh satu pengurus jang terdiri dari 4 wakil Republik, 1 wakil Indonesia Timur, 1 wakil Borneo, 2 wakil Pemerintah Belanda, Presiden Javasche Bank dan Presiden Bank Negara Indonesia. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanjak ; manakala suara seimbang, Pemerintah Peralihan jang memutuskan.
3. Pengurus Lembaga tentang ini menetapkan peraturan tentang perdagangan export dan import seluruh Indonesia. Badan-badan dalam dae-

rah Republik dan Negara Bagian Indonesia lainnja jang telah bekerdja dalam hal ini atau jang akan didirikan kewadjibannja hanja mendjalankan peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh pengurus Lembaga. Pengawasan atas berdjalannja peraturan ini dilakukan oleh Negara-negara bagian sendiri atas petundjuk dan Pimpinan Pengurus Lembaga. Segala pembajaran kepada luar negeri jang timbul dari import atau djasa dari luar negeri kepada Indonesia seluruhnja atau bagian-bagiannja, dibajar dari Lembaga Deviezen ini.

4. Sampai terbentuknja Negara Indonesia Serikat Republik Indonesia tidak minta bagian jang tertentu dari pada Deviezen diluar negeri, melainkan hanja berkehendak supaja disediakan keperluan-keperluan jang terpenting bagi rakjat Republik sebagai textiel, obat-obat dan chemicals, alat-alat pertanian, alat-alat transport dan alat-alat perhubungan, dan lain-lainnja, menurut daftar jang akan menusul. Pada dasarnja Deviezen jang didapat dari pada export barang-barang penghasilan rakjat Indonesia dipergunakan untuk memadjukan kemakmuran rakjat.
5. Perdagangan import - export didjalankan menurut petundjuk dari Pemerintah Peralihan.
6. Sesudah memenuhi keperluan vitaal untuk seluruh Indonesia, maka kelebihan Deviezen dibagi-bagi kepada negara-bagian masing-masing menurut perbandingan banjaknja pemasukan masing-masing.
7. Lembaga Deviezen menjediakan djuga Deviezen untuk memenuhi kewadjiban financieel diluar negeri diakui oleh Pemerintah Peralihan.
8. Selandjutnja akan diperundingkan lagi kemungkinan bahwa keperluan-keperluan Republik dibeli diluar negeri dengan perantaraan organisasi Belanda dibawah pengawasan wakil Republik.

B. Pusat pendjualan bahan-bahan export perkebunan.

1. Untuk menjatakan goodwill pihak Indonesia maka Delegasi Indonesia tidak berkeberatan turut berusaha mendjual hasil perkebunan besar jang berada didaerah Republik sebelum panitia bersama menurut pasal 14 Persetudjuan Linggadjati mulai bekerdja.
2. Untuk menjelenggarakan pendjualan itu, Delegasi Indonesia menjetudjui usul Delegasi Belanda supaja didirikan suatu badan hukum. Sedikit berbeda dengan pendapat Delegasi Belanda, Delegasi Indonesia berpendapat, bahwa badan hukum ini dipimpin oleh satu Dewan pengurus jang terdiri dari pada : 4 wakil pengusaha (termasuk orang Tionghoa dan orang Indonesia), 2 wakil Republik dan 1 wakil Pemerintah Belanda.
3. Hasil dari pendjualan barang-barang export perkebunan besar itu dimasukkan seluruhnja kedalam lembaga Deviezen. Hasil netto dari pendjualan itu akan dibajarkan oleh pusat pendjualan ini kepada jang berhak sesudah ditentukan siapa jang berhak atas barang-barang itu.
   Oleh karena kesatuan uang untuk seluruh Indonesia belum ada, maka perlu dirundingkan lebih djauh matjam uang apa jang akan dipakai untuk melakukan pembajaran tersebut.
4. Dari pada hasil pendjualan barang-barang tersebut dibajar kemudian ongkos-ongkos jang dikeluarkan oleh Republik untuk memelihara barang-barang itu dan menjelenggarakan pendjualannja, sebelum hasilnja itu dibajarkan kepada orang-orang jang berhak.

C. Pengembalian harta-benda orang jang bukan warga negara Indonesia.

1. Delegasi Indonesia sependapat dengan Delegasi Belanda bahwa pengembalian integral dan tjepat adalah sjarat penting untuk menimbulkan penghidupan ekonomi jang sehat di Indonesia ini. Tetapi Delegasi Be-

landa patut mengakui bahwa hal jang demikian itu mesti dilakukan menurut aturan jang tertentu.
Aturan itu mengenai :

a. mengadakan inventarisasi.
b. mengadakan perhubungan jang baik dengan kaum buruh jang sampai sekarang mendjalankan perusahaan itu sedapat-dapatnja dan akan meneruskan pekerdjaan itu dibawah pimpinan baru. Aturan ini tidak bermaksud untuk membatasi hak milik atas perusahaan itu.

2. Terhadap perkebunan dan perusahaan partikulir jang akan dinasionalisasi dengan mengganti kerugian, akan diadakan inventarisasi bersama dan seterusnja dikuasai oleh Republik.
3. Segala perusahaan negara tetap dikuasai dan dipimpin oleh pedjabat-an-pedjabatan Republik, sedangkan dapat dirundingkan lebih landjut siapa diantara pegawai dulu jang akan dipekerdjakan kembali sebagai pegawai.
4. Perkebunan dan perusahaan bangsa jang kalah perang, buat sementara waktu dikuasai oleh Pemerintah Peralihan dan mendjalankan usahanja dapat diserahkan kepada Pemerintah Negara Bagian.
5. Usul Delegasi Belanda untuk mengadakan suatu daerah pertjobaan mendjalankan pasal 14 Persetudjuan Linggadjati dapat diterima dan hal ini dapat dirundingkan lebih landjut.

D. Pusat Pembagian Bahan Makanan.

Delegasi Indonesia sependapat dengan Delegasi Belanda, bahwa dalam urusan pembagian bahan makanan, seluruh Indonesia mesti dipandang sebagai satu kesatuan. Untuk mengatur dan memimpin hal pembagian bahan makanan memang sepatutnjalah dibentuk satu Badan Pusat untuk seluruh Indonesia, jang dapat mengatur pembagian bahan makanan berdasarkan atas tersedianja surplus dari tiap-tiap Negara Bagian. Berhubung dengan itu Delegasi Indonesia berpendapat :

1. Pemerintah Peralihan mempunjai satu pusat pembagian bahan makanan, pengurusnja terdiri dari 3 wakil Republik, 2 wakil Indonesia Timur dan 1 wakil Borneo.
   Keputusan diambil dengan suara terbanjak djika suara seimbang Pemerintah Peralihan jang memutuskan.
2. Pusat pembagian bahan makanan mempunjai kewadjiban :
   a. Menentukan minimum untuk seluruh rakjat Indonesia.
   b. Membagikan surplus bahan makanan antara Negara Bagian.
   c. Pembagian bahan makanan untuk luar negeri.
3. Djawatan Pembagian Bahan Makanan dari pada Negara Bagian tetap berdiri dan melakukan pembagian bahan makanan ditiap Negara Bagian masing-masing.
4. Pengumpulan surplus didalam tiap-tiap Negara Bagian dikerdjakan oleh Djawatan Pembagian Bahan Makanan Negara Bagian sendiri atas instruksi dari pada pusat pembagian bahan makanan.

E. Dari hal mendirikan tata-pabean (douane - regiem) dan corps douane bersama.

1. Segera akan diadakan tindakan-tindakan seperlunja agar supaja untuk seluruh Indonesia berlaku satu aturan pabean (termasuk peraturan tentang pemungutan bea-masuk dan keluar, peraturan tentang tjukai, berlakunja statuut pelabuhan laut dan sebagainja).
   Dalam pada itu Delegasi Indonesia tidak berkeberatan apabila sedapat-dapatnja diadakan persesuaian dengan peraturan-peraturan

pabean Hindia Belanda jang sekarang berlaku, dengan memperhatikan kewadjiban-kewadjiban dan kedudukan Indonesia terhadap Dunia Internasional ketjuali jang bertentangan dengan kepentingan Indonesia pada umumnja dan Republik Indonesia pada chususnja. Ketjuali itu ditudjukan kepada kewadjiban Internasional jang timbul dari pada perdjandjian-perdjandjian jang telah dibuat oleh pihak Belanda selama masa perang dan sesudahnja dengan tidak ada bantuan atau pengetahuan dari pihak Indonesia bersedia mengadakan perundingan.

2. Delegasi Indonesia menjetudjui Indonesia dipandang satu daerah-pabean kesatuan (eentolgebied). Pengawasan terhadap mendjalankan peraturan-peraturan im dan export dan urusan Deviezen akan diserahkan kepada satu corps-douane bersama untuk seluruh Indonesia, sambil menanti terbentuknja Negara Indonesia Serikat.

   Pimpinan corps douane bersama ini dibentuk oleh Pemerintah Peralihan dan dari corps douane jang ada diluar Republik.

   Sambil menanti terbentuknja corps douane untuk seluruh Indonesia ini pekerdjaan tersebut dilakukan oleh pedjabatan pabean masing-masing. Dalam masa ini sedapat-dapatnja akan didjalankan peraturan-peraturan pabean jang sama untuk seluruh daerah Indonesia dengan batas-batas seperti tersebut diatas.

   Pengawasan oleh wakil-wakil pengurus Lembaga Deviezen, seperti diusulkan oleh Delegasi Belanda tidak perlu, dan selama masa peralihan baik diserahkan kepada alat-alat Negara Bagian jang bersangkutan. Dalam pada itu Delegasi Indonesia tidak berkeberatan apabila timbal-balik ditempatkan pegawai-pegawai penghubung pada Djawatan pabean Negara Bagian jang bersangkutan, untuk mempererat kerdja sama dan menjempurnakan pengawasan.

3. Sebelumnja terbentuk Negara Indonesia Serikat, segala penerimaan bea keluar dan masuk serta tjukai jang dipungut oleh masing-masing Negara Bagian dipergunakan untuk keperluan Negara Bagian itu sendiri.

   Bea dan tjukai jang dipungut dalam daerah Republik, jang dikuasai oleh Belanda adalah hak Republik.

4. Sambil menunggu tertjapainja persetudjuan hal-hal jang mengenai export dan import Deviezen dan Pabean, seperti tersebut dalam nota ini, maka peraturan - peraturan dari pihak Pemerintah Hindia Belanda jang merintangi Perdagangan Republik Indonesia, harus segera ditarik kembali dan controle jang dilakukan didarat dan dilaut oleh tentara dan marine Belanda dan jang didasarkan atas keadaan perang, dihentikan.

F. Perhubungan Uang Sementara.

Selandjutnja Delegasi Indonesia berpendapat, bahwa untuk melantjarkan perekonomian dan melaksanakan segala sesuatu jang kelak akan mendjadi persetudjuan dari kedua belah pihak, menanti adanja peraturan jang pasti tentang soal uang untuk seluruh Indonesia, perlu diadakan aturan tentang perhubungan antara uang Republik dengan uang Hindia Belanda.

IV. Beberapa soal lain.

1. Dengan terbentuknja Pemerintah Peralihan maka hilanglah alasan bagi adanja djabatan-djabatan Gubernur dan lain-lain jang mengenai Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil, sebagai propinsi Republik.

   Maka timbul keperluan bagi Pemerintah Republik untuk mengadakan kantor Perwakilan Indonesia Timur dan Borneo untuk mempererat perhubungan antara satu dengan lain.

Sebaliknja di ibu-kota Republik diadakan kantor Perwakilan Negara Indonesia Timur dan Borneo.

2. Dengan alasan jang tersebut diatas, maka djabatan-djabatan Belanda jang bertentangan dengan pengakuan de facto Republik dihapuskan pula.
3. Penghapusan djabatan-djabatan baik dipihak Belanda maupun dipihak Indonesia serta pembentukan kantor Perwakilan-perwakilan jang tersebut diatas, harus dilakukan pada waktu jang sama.
4. Dengan terbentuknja Pemerintah Peralihan maka sudah semestinja dengan segera dikembalikan kepada Republik daerah-daerah dan kota-kota jang tidak hanja diduduki oleh tentara Belanda tapi pemerintahannja semua atau sebagian besar ada ditangan Belanda.

   Soal ini mengenai kota-kota jang sebelum penanda tanganan Naskah Linggadjati ada ditangan tentera pendudukan, dan lebih-lebih mengenai pengurangan kekuasaan Pemerintah Republik dibeberapa tempat sesudah penanda-tanganan Linggadjati misalnja: Bogor, Padang, Modjokerto, Medan, Palembang dan lain-lain.
5. Penjerahan kekuasaan pada Pemerintah Republik ditempat-tempat seperti jang tersebut dibelakang ini dapat segera dikerdjakan dengan tidak menunggu pengoperan pegawai, jang sekarang ini akan diselidiki oleh sebuah komisi bersama, karena ditempat-tempat itu tadinja Pemerintah Republik ada tjukup dengan pegawainja.

   Tentang pengoperan pegawai Pemerintah Republik pada dasarnja tidak berkeberatan, dan akan melakukannja tetapi dengan mengindahkan organisasi dan peraturan djabatan-djabatan atau perusahaan-perusahaan Republik.
6. Delegasi Indonesia tidak dapat menjetudjui pendapat Komisi Djenderal bahwa pengambilan daerah-daerah jang diduduki oleh tentara Belanda dihubungkan dengan sjarat melaksanakan dari Maklumat tanggal 29 - 3 - 1947 mengenai tawanan politik.
7. Delegasi Indonesia sebaliknja sependapat dengan Komisi Djenderal, bahwa dimana-mana harus terdjamin sjarat-sjarat untuk kepastian hukum dan berkembangnja aliran-aliran politik.
8. Sesuai dengan pendapat itu Pemerintah Republik boleh mengharap supaja pembebasan tawanan politik dilakukan oleh pihak Belanda dengan tjara jang memuaskan, demikian djuga terhentinja tindakan-tindakan jang berarti mengurangi hak demokrasi tersebut, sebaliknja mengambil tindakan-tindakan jang njata untuk memberantas aksi jang bersifat menjerang kekuasaan Republik didaerahnja jang masih diduduki oleh tentara Belanda.
9. Berhubung dengan ini perlulah dengan segera diadakan aturan jang disusun bersama untuk menentukan sikap bersama dan mengalirkan serta menjambut dimana perlu aliran-aliran jang timbul sesuai dengan pasal 3 dan 4 Persetudjuan Linggadjati.

Pidato Perdana Menteri Sjahrir

Pada tanggal 19 Djuni 1947 malam P. M. Sjahrir mengutjapkan pidato radio sebagai pendjelasan dari pada nota balasan Pemerintah R. I.

Adapun pokok pidato tersebut ialah bahwa Pemerintah R. I. mengusulkan supaja dengan segera dapat diwudjudkan kerdja sama jang dimaksudkan dan jang dikehenaki oleh Persetudjuan Linggadjati.

Sesuai dengan jang diusulkan didalam nota Komisi Djenderal tanggal 27 Mei, Indonesia menjetudjui mendirikan pemerintah peralihan setjepat mungkin. Apa jang dikemukakan oleh Indonesia tentang susunan pemerintah peralihan itu serta kedudukan wakil Mahkota tidak menutup kemungkinan bahwa pada pendirian pemerintah peralihan itu pada permulaannja wakil Mahkota berkedudukan

de jure dan formeel seperti diusulkan dalam nota Komisi Djenderal, sedangkan diharapkan bahwa didalam kelandjutannja pemerintah peralihan itu lebih merupakan jang digambarkan didalam nota balasan Indonesia, hingga achirnja melebur mendjadi Pemerintah Indonesia jang berdaulat.

Perundingan jang berhubung dengan pembentukan Pemerintah Peralihan ini seperti diusulkan oleh Komisi Djenderal sebagai „tot nader overleg" harus diadakan bersama dengan wakil-wakil Indonesia Timur dan Borneo. Hendaknja perundingan itu diadakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Pemerintah peralihan itu berkewadjiban pula mendirikan susunan-susunan jang bersifat federasi seperti jang disebutkan didalam tambahan-tambahan nota Komisi Djenderal untuk mendjalankan kewadjiban kemudian jang mendjadi kewadjiban pemerintah Indonesia Serikat jang berdaulat.

*

Berhubung dengan nota balasan kita, Komisi Djenderal telah dua kali menjampaikan surat kepada Delegasi, dimana dinjatakan dalam surat jang pertama, bahwa usul balasan Republik itu demikian djauh menjimpangnja dari nota Komisi Djenderal, sehingga dapat dikatakan tidak memuaskan sama sekali.

Surat tersebut disampaikan kepada Delegasi kita pada tanggal 20 - 6 - 1947 sedang pada hari itu djuga P. M. Sjahrir menjampaikan surat kepada Komisi Djenderal mengenai pendjelasan pokok-pokok pidato radio Sjahrir tanggal 19 - 6 - 1947. Isi surat tersebut sebagai berikut :

1. Kami menjetudjui mendirikan pemerintah peralihan setjepat mungkin.
2. Kami menjetudjui, bahwa kedudukan wakil mahkota de jure dan formeel akan seperti diusulkan didalam nota Komisi Djenderal tanggal 27 Mei. Kami harap bahwa didalam kelandjutan pemerintah peralihan itu lebih merupakan jang digambarkan didalam nota balasan kami, sehingga achirnja melebur mendjadi pemerintah Indonesia Serikat jang berdaulat.
3. Perundingan jang berhubung dengan pembentukan pemerintahan peralihan seperti diusulkan oleh Komisi Djenderal sebagai nader overleg harus diadakan bersama dengan wakil-wakil Indonesia Timur dan Borneo. Perundingan ini harus diadakan setjepat mungkin sehingga pemerintah peralihan itu telah dapat berdjalan sebelum pertengahan bulan Djuli jang akan datang.
4. Pemerintah peralihan itu, berkewadjiban pula mendirikan susunan-susunan jang bersifat federal seperti jang disebut dalam lampiran-lampiran nota Komisi Djenderal, jang sangat penting dalam hal ini dipandang pembentukannja setjepat mungkin badan-badan federal urusan ekonomi.

Demikian isi surat P. M. Sjahrir.

Dalam suratnja jang kedua Komisi Djenderal menjatakan, bahwa dengan diterimanja wakil Mahkota dalam pemerintahan sementara, belumlah berarti bahwa nota balasan Republik dapat mendekati nota Komisi Djenderal.

Selandjutnja ditanjakan pula apakah badan-badan federalnja disetudjui pembentukannja itu seperti jang didjelaskan dalam lampiran seluruhnja dari pada nota Komisi Djenderal.

Pada tanggal 23 - 6 - pagi P.M. Sjahrir telah mengirimkan surat lagi kepada Komisi Djenderal dimana didjelaskan sekali lagi tentang soal-soal pokok dalam surat jang pertama, jang menurut Antara sebagai berikut :

Membalas surat Jang Mulia tanggal 21 - 6 jang lalu dalam mana Jang Mulia minta keterangan tentang susunan perkataan jang summier (ringkas) dalam surat kami tanggal 20 - 6 jang lalu dengan ini kami beritahukan pertama-tama, bahwa surat kami tersebut memang harus dipandang sebagai usaha mengadakan djembatan untuk melalui djurang jang ada antara pendapat-pendapat, tertera dalam nota-nota jang saling ditukar antara kedua Delegasi.

Djika J. M. menduga, bahwa usaha itu terbatas pada penerimaan kami dari kedudukan wakil Mahkota dalam pemerintahan peralihan, seperti tertera dalam alinea 3 dari surat J. M., maka arti usaha ini menurut pendapat kami kurang dihargai. Dengan penerimaan itu, usul-usul kami jang lain masuk dalam suasana jang lain. Andai kata usul-usul kami tentang aturan-aturan urusan luar negeri, jang dipengaruhi pendapat kami tentang Pemerintahan Peralihan, penerimaan kami tersebut diatas berakibat, bahwa djuga dalam soal tersebut itu pendapat kedua Delegasi telah saling mendekati.

Karena J.M. dalam surat J.M. itu minta keterangan sampai mana kami menjetudjui pembentukan badan-badan federal, kami dapat menerangkan, bahwa kami tidak keberatan akan badan-badan ini sebagai badan federal. Perbedaan faham tentang badan-badan federal dalam lapangan ekonomi jang masih ada antara usul-usul J. M. dan usul-usul kami, menurut pendapat kami, dapat diselesaikan dalam perundingan lebih landjut, bersama dengan wakil-wakil Indonesia Timur dan Borneo. Akan tetapi direktorat untuk keamanan dalam negeri jang diusulkan oleh Komisi Djenderal itu, perlu istimewa disebut. Fikiran untuk membentuk badan demikan jang tunduk pada Pemerintah Peralihan kami dapat setudju, akan tetapi usul J. M. menurut pendapat kami memerlukan perundingan lebih landjut tentang susunan dan kewadjiban badan ini. Tentang susunan, Komisi Djenderal hanja membajangkan, bahwa didalamnja „een aantal civiel en militair autoriteiten van Nederlandsche en Indonesische zijde behoren zitting te nemen", sedangkan didalam alinea jang berikut dikemukakan kemungkinan untuk mengadakan organisasi berdasarkan usul termuat dalam usul-usul J. M. dalam bagian jang mengenai daerah pendudukan, tentang gendarmerie bersama. Tentang fikiran itu, delegasi kami hendak mengemukakan untuk menghindarkan salah faham, bahwa djaminan dari keamanan dan ketertiban dalam daerah Republik adalah semata-mata kewadjiban Pemerintah Republik.

Meskipun delegasi Indonesia tidak menolak kerdja sama dalam hubungan federal, terbukti dari penerimaan fikiran untuk membentuk direktorat untuk keamanan dalam negeri, hal ini harus berdasar atas pengakuan akan tanggung djawab sendiri tentang soal itu dari masing-masing bagian federal dikemudian hari. Kerdja sama atas dasar ini dalam praktek umpamanja dapat dibajangkan dalam pengawasan polisi dilaut sebagai djuga dalam perlengkapan dan pendidikan alat-alat polisi dari masing-masing negara. Delegasi Indonesia berpendapat bahwa soal ini perlu dirundingkan sedalam-dalamnja, antara semua pihak jang bersangkutan.

Ternjata dari apa jang tersebut diatas, bahwa tentang berbagai soal, perlu diadakan perundingan lebih landjut, djuga menurut isi usul-usul Komisi Djenderal. Kami memegang pendapat kami, bahwa perundingan itu sebaik-baiknja diadakan didalam Pemerintah Peralihan jang harus dibentuk dalam tempo sesingkat-singkatnja. Badan federal jang akan dibentuk menerima kekuasaannja dari dan tunduk kepada Pemerintah Peralihan.

Perundingan lebih landjut tentang susunan badan-badan itu dan luasnja kewadjibannja sebaiknja diadakan dalam kalangan Pemerintah Peralihan.

Ketua Delegasi Indonesia.

SJAHRIR.

c. Keputusan Kabinet Belanda

Pada tgl. 23 Djuni 1947 siang Dr. v. Mook bersama Dr. Koets sebagai wakil Pemerintah Belanda telah mengundjungi Perdana Menteri Sutan Sjahrir untuk menjampaikan keputusan sidang kabinet Belanda berhubung dengan contra-nota Republik.

Kabinet Belanda menjetudjui nasehat Komisi Djenderal dan mengharap supaja nota Komisi Djenderal diterima sepenuhnja oleh Delegasi Republik, untuk menghilangkan kegentingan.

Selandjutnja keputusan tsb. mengulangi dalil-dalil tentang „staats- en volkenrechtelijke positie", djaminan hukum dsb.

Oleh karena nota penegasan Belanda tsb. ditudjukan kepada Pemerintah Republik, maka Pemerintah Republik sendirilah jang harus mendjawab.

Sementara itu pada tgl. 25 - 6 Kabinet mengadakan sidangnja di Jogja, dimana Perdana Menteri memberitakan pandangan umum tentang situasi politik.

Dan selandjutnja pada sidangnja tgl. 26 - 6 para menteri diberi kesempatan menjatakan pertimbangannja.

Kabinet Sjahrir bubar

Kegentingan politik pada tgl. 26 Djuni 1947 malam sampai pada puntjaknja. Keterangan Sjahrir menimbulkan debat jang hangat dalam sidang kabinet dan dalam pada itu mengalir resolusi-resolusi dari berbagai partai.

Achirnja Kabinet menjerahkan „portefeuille" kepada Presiden.

Pokok sebab penjerahan kembali portepel Kabinet Sjahrir, adalah karena putusan Sajap Kiri pada tgl. 26 - 6, jang diantaranja berbunji: „tidak menjetudjui kompromi jang terkandung dalam surat-menjurat antara Delegasi Indonesia dan Komisi Djenderal karena tidak mendjamin persatuan antara Pemerintah dan Rakjat".

Bermatjam-matjamlah pendapat orang tentang sikap Sajap Kiri ini. Jang satu menamakannja „sikap korektif terhadap tindakan seorang anggautanja", jang lain menjebutnja „peringatan keras kepada Sjahrir", ada jang menamakannja „motie van wantrouwen" jang pasti berakibat bubarnja Kabinet Sjahrir.

Atas penjerahan kembali portepel Kabinet kepada Presiden, Presiden mula-mula tidak memberikan djawaban.

Untuk hal tsb. Presiden memerlukan memanggil semua pemimpin-pemimpin partai dan pada djam 23.55 perundingan dimulai.

Hadlir dalam sidang tsb. Mr. Ali Sastroamidjojo (P.N.I.), Dr. Soekiman (Masjumi), Mr. Tan Ling Djie (Partai Sosialis), Drs. Maruto Darusman (P.K.I.), S.K. Trimurti (P.B.I.), Harjono (Sobsi), Ir. Sakirman (Lasjkar Rakjat), Mr. Tambunan (Parkindo), Dr. Sentral (P. K. R. I.) dan Krissubanu (Pesindo).

Pada djam 01.30 perundingan dihentikan sementara waktu untuk memberi kesempatan kepada pemimpin-pemimpin untuk bertukar fikiran satu dengan lain. Semua partai ketjuali P.N.I. saat itu mengusulkan Presidentieel Kabinet. P. N. I. mengemukakan keberatan-keberatan dan mengusulkan Kabinet jang bertanggung djawab.

Pada djam 02.30 perundingan dimulai lagi. Setelah wakil P. N. I. mengadakan perundingan kilat dengan Dewan Partai, achirnja menjetudjui usul-usul partai-partai lainnja, sehingga keputusan bulat dari pada perundingan tsb. ialah „Presidentieel Kabinet".

Tentang djawaban atas aide memoire, dalam perundingan jang terachir partai-partai mengusulkan sebuah komisi untuk membantu Presiden dalam memberikan djawaban atas „aide memoire" pemerintah Belanda tgl. 23 - 6. Komisi tersebut terdiri dari Mr. Amir Sjarifuddin (Sajap Kiri), Mr. Soejono Hadinoto (P.N.I.), Harsono Tjokroaminoto (Masjumi), Mr. Tambunan (Parkindo) dan I.J. Kasimo (P.K.R.I.).

Pada malam itu diterima kawat dari pihak Belanda, dimana dinjatakan, bahwa Belanda menunggu djawaban Pemerintah Republik sampai tgl. 27-6-'47.

Sidang Kabinet jang dihentikan pada djam 22.45 dimulai lagi djam 03.00.

Pada djam 03.15 Presiden menerima portepel Sjahrir dan sedjak itu Kabinet Sjahrir demisioner. Demikian pula mulai 27-6-'47 untuk sementara waktu Presiden mengambil kekuasaan Pemerintahan sepenuhnja.

*

d. Djawaban Pemerintah Republik Indonesia atas „aide memoire" Pemerintah Belanda disusun sebagai berikut:

1. Karena Kabinet Sjahrir berhubung dengan rupa-rupa kedjadian meletakkan djabatannja, maka oleh karena gentingnja keadaan pada waktu sekarang, Kami Soekarno, Presiden Republik Indonesia, mulai tgl. 27 Djuni 1947 mendjalankan kekuasaan Pemerintahan.
2. Pada tgl. 23 Djuni 1947 oleh Letnan Gubernur Djenderal disampaikan kepada Perdana Menteri Republik Indonesia satu nota penegasan (aide-memoire). Dari aide memoire itu kami dapat memahamkan dengan kepuasan, bahwa Pemerintah Belanda sungguh bermaksud mengadakan penglaksanaan dari persetudjuan Linggadjati setjara damai.
3. Pemerintah Republik terdorong oleh minat sama, merasa perlu menegaskan sekali lagi bahwa Pemerintah Republik pun bermaksud melaksanakan persetudjuan Linggadjati setjara damai.
4. Menurut Laporan-laporan dari Delegasi, kami dengan gembira menarik kesimpulan bahwa tentang urusan Pemerintah Peralihan telah ada persetudjuan. Untuk memberi gambaran, Pemerintah Republik mengemukakan disini beberapa pokok pikiran, jaitu:
   a. soal-soal besar jang mengenai penjelenggaraan persetudjuan Linggadjati diurus oleh kedua delegasi.
   b. Pemerintah Peralihan dibentuk selekas mungkin, sedangkan tidak ada keberatan bahwa dalam Pemerintah Peralihan itu duduk wakil keradjaan Belanda.
   c. Kekuasaan dari Pemerintah „de facto" Republik dilakukan sepenuhnja oleh alat-alat kekuasaan Republik.
5. Maka menurut kedua pemerintah dengan segera harus dibentuk Pemerintah Peralihan, dalam nota penegasan (aide memoire) dinamakan Dewan Federal (federale raad). Pemerintah Republik mengulangi permintaan delegasinja termuat dalam suratnja tgl. 20 Djuni 1947, supaja perundingan seladjutnja jang sangat perlu itu, tentang susunan Pemerintah Peralihan diadakan selekas mungkin.
6. Pemerintah Peralihan itu berkewadjiban pertama-tama membentuk badan-badan federal tersebut dalam usul-usul Belanda. Susunan badan-badan federal itu harus mendjadi soal jang dirundingkan dalam Pemerintah Peralihan, jang didalamnja duduk wakil-wakil dari semua bagian-bagian jang dikemudian hari mendjadi bagian dari Federasi dan tidak dapat ditetapkan dalam perundingan dua pokok antara Belanda dan Republik. Karena itu Pemerintah Republik menunda putusannja jang pasti tentang soal ini, menanti perundingan bersama ini. Dengan mengetjualikan perundingan lebih landjut ini tentang susunan badan-badan federal jang harus diadakan bersama dengan wakil-wakil Indonesia Timur dan Borneo, maka Pemerintah Republik dapat menjetudjui adanja badan-badan seperti diusulkan dalam nota Belanda, akan tetapi dengan mengindahkan apa jang disebutkan dibawah ini tentang direktorat untuk keamanan dalam negeri.
7. Pemerintah Republik membenarkan seluruhnja apa jang Delegasinja sebutkan tentang soal ini dalam suratnja jang terachir tertanggal 23 Djuni. Karena itu, djika Pemerintah Belanda bermaksud menjerahkan djaminan untuk keamanan dan ketertiban dalam daerah Republik pada gendarmerie bersama, maka Pemerintah Republik tidak dapat menerima itu. Meskipun Pemerintah Republik bersedia kerdja sama dalam hubungan federal, pun

djuga dalam lapangan djaminan keamanan dalam negeri. Beberapa tjonto dari kemungkinan-kemungkinan praktis dalam lapangan itu telah disebutkan dalam surat Delegasi — menurut pendapatnja kerdja sama itu harus didasarkan atas tanggung djawab akan soal tsb. dari masing-masing bagian jang kemudian hari mendjadi bagian dari federasi.

8. Dengan mengadakan apa jang tsb. diatas, maka Pemerintah Republik ingin menjatakan lagi bersedianja turut serta dalam penghapusan garis-garis demarkasi dan pengunduran pasukan-pasukan ke garnizoen-garnizoennja masing-masing.

   Penglaksanaan itu dapat didasarkan atas memorandum militer jang saling ditukar antara delegasi-delegasi dan dalam hal itu telah tertjapai persetudjuan jang bulat. Kelegaan jang dapat diharapkan dari tindakan-tindakan itu tergantung pula pada penglaksanaan jang tepat dari proklamasi bersama tgl. 29 Maret 1947, penglaksanaan mana oleh Republik akan didjalankan dengan segala alat-alat jang ada padanja.

9. Segera sesudah Pemerintah Peralihan dibentuk, maka Pemerintah itu, menurut pendapat Pemerintah Republik, djuga berkewadjiban menjusun pertahanan Indonesia dalam hal itu usul-usul Belanda jang Pemerintah Republik pokoknja dapat menjetudjui, seperti njata dari nota djawaban delegasinja, dapat didjadikan dasar.

10. Pemerintah Republik jakin bahwa tentang perudjudan dari kerdja sama jang dimaksudkan dalam persetudjuan Linggadjati sekarang telah tertjapai permufakatan demikian rupa, hingga penglaksanaannja jang praktis segera dapat dimulai.

11. Pemerintah Republik dalam hal ini boleh menjatakan, bahwa penglaksanaan praktis menurut pendapatnja dapat sangat dipertjepatkan, djika saling diadakan tindakan jang dapat mengakibatkan datang kembalinja suasana saling pertjaja.

    Dalam hal ini jang terutama berguna adalah pengurangan kekuatan pasukan - pasukan kedua belah pihak. Dengan menjatakan bersedianja untuk mengurangi pasukan-pasukan lebih landjut dan dengan memperingatkan apa jang tentang soal itu dalam persetudjuan Linggadjati dimufakati. Pemerintah Republik mendesak lagi Pemerintah Belanda mendjalankan pengurangan itu.

12. Pemerintah Republik berpendapat, bahwa dengan penerimaan usul-usul Belanda setjara tsb. diatas, telah mulai saatnja untuk Indonesia untuk turut serta seluruhnja dalam hubungan dunia dan untuk memulai pembangunan negara ini jang telah demikian sangat mengalami penderitaan.

Jogjakarta, 27 Djuni 1947
SOEKARNO.

Pada tanggal 30-6-1947 Presiden menundjuk Mr. Amir Sjarifuddin, Dr. Sukiman, Dr. A.K. Gani dan Drs. Setiadjid sebagai pembentuk Kabinet baru jang bersifat koalisi.

Sementara itu menurut putusan Presiden tanggal 30 - 6, Sutan Sjahrir telah diangkat mendjadi Penasehat Presiden, dengan pertimbangan bahwa berhubung dengan keadaan pada masa itu perlu diangkat seorang penasehat dan mengingat Maklumat Presiden No. 6 tahun 1947.

Aide memoire Amerika

Pada tanggal 30 - 6 telah tiba kembali di Jogjakarta dari kundjungan ke-Djakarta Sekretaris Delegasi Mr. Ali Budihardjo untuk menjampaikan djawaban Presiden kepada Belanda.

Kedatangan Mr. Ali tersebut dengan membawa „aide memoire" konsul Djenderal Amerika dan surat pemerintah Inggeris untuk Presiden.

Adapun salinan „aide memoire" tersebut menurut Antara adalah sebagai berikut :

Pemerintah Amerika Serikat bergembira menerima laporan-laporan jang menjatakan, bahwa antara wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil pemerintah Belanda telah terdapat kemadjuan kearah persetudjuan pembentukan pemerintah sementara untuk seluruh Indonesia.

Pemerintah Amerika Serikat telah memperhatikan dengan penuh ketjemasan bahaja jang mengantjam terlaksananja persetudjuan Linggadjati.

Amerika Serikat telah semestinja memperlihatkan perhatiannja atas kedjadian-kedjadian di Indonesia, perhatian mana disebabkan karena pentingnja Indonesia sebagai faktor dalam keseimbangan (stabiliteit) dunia, dari sudut ekonomi baikpun politik.

Oleh karena itu Amerika Serikat ingin menegaskan kepada Republik Indonesia penderitaan-penderitaan jang mungkin terdjadi sebagai akibat sesuatu „deadlock".

Amerika Serikat ingin melihat suatu ichtiar bersama dalam pemetjahan soal-soal jang dihadapi Indonesia.

Pemerintah Amerika Serikat pertjaja, bahwa pembentukan Pemerintah Sentral sementara untuk Indonesia akan didasarkan atas prinsip-prinsip federasi seperti jang dikemukakan oleh Pemerintah Belanda dan dalam prinsipnja disetudjui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pun Amerika menganggap perlu sekali pembentukan ini dilakukan selekas mungkin.

Sudah terang, bahwa selama waktu peralihan itu (antara sekarang dan Djanuari 1949) kedaulatan serta kekuasaan tertinggi dalam pemerintah sementara federal itu tetap berada dalam tangan Belanda.

Oleh sebab itu Amerika Serikat mendesak Republik Indonesia, supaja dengan segera bekerdja bersama dalam pembentukan pemerintah sementara federal itu.

Sekira persetudjuan tentang ini telah tertjapai, sudah pasti soal-soal ada dalam suasana goodwill.

Adalah pengharapan pemerintah Amerika Serikat supaja pembentukan pemerintah sementara itu selain dari akan menguntungkan kedua belah pihak, djuga akan bermanfaat untuk stabiliteit politik jang sangat dibutuhkan dalam pembangunan perekonomian jang positief.

Sekira dikehendaki, Amerika Serikat bersedia akan membitjarakan soal-soal tentang pertolongan financieel untuk pembangunan perekonomian Indonesia dengan wakil-wakil Belanda dan wakil-wakil pemerintah sementara, sesudah pemerintah sementara itu terbentuk dan kerdja bersama setjara konstruktief telah terdjamin.

e. Pembentukan Kabinet baru

Perintah Presiden pada tanggal 30 - 6 - 1947 kepada Mr. Amir Sjarifuddin, Dr. Sukiman, Dr. A. K. Gani dan Drs. Setiadjid untuk membentuk Kabinet koalisi berdasar nasional tidak berhasil, sehingga ke-empat formateur tersebut mengembalikan mandaat kepada Presiden pada tanggal 1 - 7 - 1947 djam 22.00.

Selandjutnja pada tanggal 2 - 7 - 1947 djam 23.00 Presiden menjerahkan pembentukan Kabinet kepada Mr. Amir Sjarifuddin, Dr. A. K. Gani dan Drs. Setiadjid dengan dasar Kabinet Nasional.

Setelah mengalami kegagalan dalam pembentukan Kabinet koalisi seperti jang diperintahkan Presiden pada tanggal 30 Djuni 1947 kepada ke-empat for-

mateur, maka perintah ke-2 untuk membentuk Kabinet nasional kepada Mr. Amir Sjarifuddin, Dr. A. K. Gani dan Drs. Setiadjid dapat diselenggarakan dengan lantjar. Dalam tempo 14 djam Kabinet Nasional tersebut dapat dibentuk sebagai berikut:

Perdana Menteri	Mr. Amir Sjarifuddin	Partai Sosialis
Wakil Perdana Menteri I	Dr. A. K. Gani	P. N. I.
Wakil Perdana Menteri II	Drs. Setiadjid	P. B. I.
Menteri Dalam Negeri	Wondoamiseno	P. S. I. I.
Menteri Muda Dalam Negeri	Mr. Abdulmadjid	Partai Sosialis.
Menteri Luar Negeri	H. A. Salim	P. S. I. I.
Menteri Muda Luar Negeri	Mr. Tamzil	Partai Sosialis.
Menteri Kemakmuran	Dr. A. K. Gani	P.N.I.
Menteri Muda Kemakmuran I	I. J. Kasimo	P. K. R. I.
Menteri Muda Kemakmuran II	Dr. H. Tjokronegoro	Partai Sosialis.
Menteri Pertahanan :	Mr. Amir Sjarifuddin	Partai Sosialis.
Menteri Muda Pertahanan	Arudji Kartawinata	P. S. I. I.
Menteri P.P. dan K.	Mr. Ali Sastroamidjojo	P. N. I.
Menteri Muda P.P. dan K.	Surowijono	....
Menteri Keuangan	Mr. A. A. Maramis	P. N. I.
Menteri Muda Keuangan	Dr. Ong Eng Die	....
Menteri Penerangan	Ir. Setiadi	....
Menteri Muda Penerangan	Sjahbudin Latief	P. S. I.I.
Menteri Perhubungan	Ir. Djuanda	....
Menteri Pekerdjaan Umum	Ir. Moh. Enoch	....
Menteri Muda Pekerdjaan Umum	Ir. Laoh	P. N. I.
Menteri Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo.
Menteri Muda Kesehatan	Dr. Satrijo	P. B. I.
Menteri Sosial	Suprodjo	P. B. I.
Menteri Muda Sosial	Sukoso Wirjosaputro	P. S. I. I.
Menteri Kehakiman	Mr. Susanto Tirtoprodjo	P. N. I.
Menteri Agama	Kyai Achmad Asj'ari	P. S. I. I.
Menteri Negara Urusan Makanan	Sojas	....
Menteri Perburuhan	S. K. Trimurty	P. B. I.
Menteri Muda Perburuhan	Mr. Wilopo	P. N. I.
Menteri Negara Daerah Istimewa	Sultan Hamengku Buwono IX	....
Menteri Negara Pemuda	Wikana	Badan Kongres Pemuda
Menteri Negara	Siauw Giok Tjan	....
Menteri Negara	Mr. Hindromartono	Partai Sosialis.
Menteri Negara	Drs. Maruto Darusman	P. K. I.

Seperti telah disebutkan dimuka, pada tanggal 23 Djuni 1947 Dr. van Mook sebagai wakil pemerintah Belanda telah mengirimkan aide memoire pemerintah Belanda kepada Republik. Aide Memoire Belanda tersebut dibalas oleh Presiden pada tanggal 27 Djuni. Karena nota djawaban Presiden itu dianggap tidak memuaskan pihak Belanda, maka 2 hari kemudian pada tanggal 29 Djuni, Dr. van Mook mengirimkan seputjuk surat lagi jang pokok maksudnja jalah bahwa meskipun dalam beberapa pasal ternjata ada persesuaian antara pendirian Belanda

dan Republik, dalam beberapa pasal lainnja persesuaian itu tidak begitu djelas dan dalam beberapa pasal pula masih terdapat perselisihan faham jang besar, Pemerintah Belanda menganggap perlu, bahwa pasal-pasal penting dalam usul-usulnja dalam waktu jang singkat harus diterima, supaja dapat menghentikan keadaan jang tidak dapat tertahan itu. Pokok-pokok isi surat itu jalah bahwa tentang persetudjuan-persetudjuan jang telah didapat tidak usah disangsikan lagi, misalnja membuat stelling-stelling, blokkade makanan, perusakan-perusakan serta aksi-aksi jang dilakukan oleh Republik diluar daerahnja di Indonesia, menghentikan perundingan tentang mengadakan perhubungan dengan luar negeri, penghapusan badan-badan jang bertentangan dengan usul-usul jang diadjukan oleh Komisi Djenderal, penghapusan badan-badan dan pemetjatan orang-orang jang memangku djabatan itu, jang memberi kesan seolah-olah Republik akan meluaskan pemerintahannja, djuga sampai diluar daerah-daerahnja di Indonesia. Dr. van Mook minta supaja suratnja itu didjawab dalam waktu 7 hari dan mengharap pasal-pasal jang dimaksudkan itu diwudjudkan oleh Republik, begitu djuga tindakan-tindakan jang tjepat dan tegas dari persetudjuan Linggadjati harus segera dimulai.

Pada hari tanggal 6 Djuli surat Dr. van Mook itu didjawab oleh Perdana Menteri Mr. Amir Sjarifuddin dengan notanja tanggal 5 Djuli jang djuga belum memuaskan pihak Belanda. Dan terpaksalah Wakil P.M. Drs. Setiadjid keesokan harinja terbang kembali ke Jogja untuk meminta keterangan-keterangan lebih djauh tentang soal-soal pemerintah peralihan, perhubungan luar negeri dan gendarmerie - bersama.

Pada tanggal 7 Djuli malam djam 22.25 P. M. Amir Sjarifuddin mengadakan pidato radio untuk memberi pendjelasan dan menghilangkan salah faham. Pada tanggal 8 Djuli pemerintah Republik mengirimkan nota pendjelasan jang disampaikan kepada Dr. van Mook dan bunjinja sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik menerima didalam Pemerintah Peralihan akan adanja Wakil Keradjaan Belanda dengan kekuasaan memutus „de jure", segalanja itu didalam lingkungan kedaulatan Belanda „de jure" selama masa peralihan. Pemerintah Republik pun menjetudjui susunan Pemerintah Peralihan jang terdiri dari wakil Keradjaan Belanda serta wakil Negara-negara bagian di Indonesia.
2. Pemerintah Republik menjetudjui, bahwa berhubung dengan adanja kedaulatan Belanda dimasa peralihan, perhubungan Republik keluar disesuaikan selama masa peralihan ini dengan adanja kedaulatan tadi, serta dengan adanja Pemerintah Peralihan.
   Pemerintah Republik ingin supaja perhubungan - perhubungan luar negeri Republik Indonesia jang telah ada diberi tempat jang sesuai dalam rentjana jang dimaksudkan dalam par. 8 lampiran 2 dalam nota Komisi Djenderal tertanggal 27 Mei.
3. Pemerintah Republik menjetudjui adanja segala badan federal seperti diusulkan dalam nota Komisi Djenderal, serta pula pekerdjaan jang akan dilakukan olehnja, sedangkan pekerdjaan dan kewadjibannja ditetapkan bersama-sama dengan wakil-wakil Indonesia Timur dan Borneo.
4. Hak bangsa asing atas perusahaan diakui oleh Pemerintah Republik dan dikembalikan dengan tidak memakai sjarat berdasar pasal 14 Persetudjuan Linggadjati. Penjerahan akan dilakukan dengan mengadakan inventarisasi. Perusahaan Negara dahulu, jang berada dalam daerah Republik, langsung djatuh pada tangan Republik.
5. Berkenaan dengan soal keamanan dan ketertiban dalam negeri, Pemerintah Republik tetap berpendirian seperti jang telah tertera dalam nota Presiden Republik tertanggal 27 Djuni 1947. Perlu Pemerintah Republik menegaskan, bahwa dapat disetudjui Badan Pusat jang mengatur keamanan, jang didalamnja duduk wakil-wakil Negara bagian. Alat jang dipakai itu me-

nurut pemandangan Pemerintah Republik ialah gendarmerie tiap-tiap Negara bagian sendiri dan hanja dipakai di Negara bagian itu sadja.

Kerdja sama itu digambarkan dengan pimpinan bersama di Pusat.

Pemerintah Republik rela menghilangkan segala functie dan organisasi jang bertentangan dengan persetudjuan Linggadjati, pun telah menjetudjui gentjatan perang dan segala akibatnja. Segala usaha ini telah ada dan akan diteruskan dengan pengharapan, supaja pihak Belanda suka membantu kita mentjiptakan keadaan dan suasana jang memungkinkan Pemerintah Republik bekerdja dalam keadaan damai.

Pemerintah Republik berkejakinan, bahwa apa jang didjelaskan diatas adalah djalan jang sebaik-baiknja untuk mewudjudkan tjita-tjita jang terkandung dalam persetudjuan Linggadjati.

Selandjutnja pun Pemerintah Republik mengharap supaja pekerdjaan bersama antara kedua belah pihak dapat diselenggarakan terus-menerus atas dasar-dasar jang telah diletakkan dalam persetudjuan Linggadjati itu.

*

Tanggal 10 Djuli Wakil P.M. Setiadjid dan anggauta Delegasi Dr. Leimena tiba kembali di Jogja untuk memberikan laporan kepada Presiden. Mereka belum membawa djawaban pihak Belanda atas nota pendjelasan Republik tanggal 8 Djuli.

Tanggal 12 Djuli setelah mengundjungi Djawa Timur Wakil P.M. Setiadjid dan Menteri Leimena menudju ke Djakarta dan sesampainja di Djakarta terus mengadakan pertemuan dengan Dr. van Mook.

Pada hari itu djuga Menteri Muda Luar Negeri Mr. Tamzil mengadakan pula pembitjaraan dengan Dr. van Mook. Dan atas undangan Wakil P.M. Setiadjid, P.M. Amir Sjarifuddin pada tanggal 13 Djuli berangkat ke Djakarta. Pertemuan Amir dan van Mook dilakukan pada tanggal 14 Djuli.

Pertemuan tersebut dilandjutkan lagi pada tanggal 15 Djuli. Hadlir dalam perundingan itu Wakil-wakil P. M. Gani dan Setiadjid serta Menteri Leimena. Dari pihak Belanda selain van Mook, djuga hadlir Komisi Djenderal dan Dr. Koets. Pembitjaraan pada pertemuan tersebut berkisar dari gendarmerie - bersama kepada polisi federal.
Pihak Indonesia pada tanggal 16 Djuli pulang kembali ke - Jogja.

Berhubung dengan gentingnja suasana, maka pada tanggal 16 Djuli malam P.M. Amir Sjarifuddin mengutjapkan pidato jang antara lain sebagai berikut:

„Republik telah menjatakan sikap damainja menjelesaikan persoalan Indonesia — Belanda. Tuntutan politik Belanda lima soal kita setudjui lebih dari separoh, tetapi kita djelaskan, bahwa kalau hal gendarmerie - bersama Republik tetap bersikap seperti dulu.

Nota kita tanggal 8 Djuli jang lalu telah membawa kelegaan, tetapi tetap dari pihak Belanda menuntut tuntutannja tentang memasukkan gendarmerienja kedalam daerah Republik. Malahan pertama kali resmi P. M. Belanda dinjatakan kemungkinan penjelesaian soal Indonesia — Belanda dengan djalan kekerasan. Pemerintah Republik tidak putus asa. Sesudah kelihatan bahwa sikap Belanda tetap kaku, maka diputuskan supaja saja sebagai Perdana Menteri berangkat ke Djakarta untuk mentjoba mendapat penjelesaian pertikaian Indonesia — Belanda ini.

Sementara itu, pihak Belanda mulai mengemukakan tuntutan baru. Penghentian permusuhan di fronten, kata mereka. Penghentian blokade makanan, kata mereka. Penghentian pengrusakan jang dilakukan, kata mereka.

Pemerintah Republik telah menjatakan kehendak baiknja. Pangkat Gubernur kita tiadakan, dengan rasa berat. Blokade makanan kita perintahkan dihentikan. Kita sedia menolong daerah Malino dengan beras seperti baru diumumkan oleh

Menteri Kemakmuran. Sudah beberapa usaha kita, sebab kita mengerti akan kehendak Belanda, sebab kita tetap suka menghargai pihak Belanda.

Sampai saja di - Djakarta pada tanggal 14 Djuli jang lalu terus diadakan perundingan dengan pihak Belanda sampai dua hari. Pada perundingan itu jang disaksikan Wakil P. M. Setiadjid dan Dr. Leimena dan kedua kalinja djuga oleh Dr. A. K. Gani, maka sudah banjak jang dapat mendekatkan Belanda dan kami merasa kaku itu mulai hilang. Kita setudjui mentjari penjelesaian dulu.

Soal Gendarmerie. Kita setudjui pula, kalau penjelesaian ada akan dikeluarkan oleh pihak Belanda pengumuman jang isinja pernjataan bahwa sesudah penjelesaian politik tertjapai, djalan damai terbuka lagi, akan disetudjui pula akan mentjiptakan keadaan damai dengan mengundurkan kedua belah pihak tentara, sedangkan daerah demarkasi akan didjaga keamanannja oleh polisi.

Pihak Belanda menjerahkan kepada kita pada tanggal 15 Djuli 1947 usul-usul jang tertulis dan kami djandjikan merundingkannja di Jogja dengan pengharapan bahwa sehari akan tjukup menjelesaikan usul-usul itu sehingga pada hari itu djuga (jaitu tanggal 16 Djuli) telah dapat dimulai mentjiptakan keadaan damai itu. Tetapi Pemerintah Republik tidak dapat menjelesaikan soal usul dalam waktu satu hari dan wakil P. M. kembali ke Djakarta menjampaikan hal itu kepada pihak Belanda.

Sidang Kabinet sedang berapat, datanglah kabar dari Djakarta, bahwa pihak Belanda menuntut pada tanggal 16 Djuli pukul 11.00 harus diperintahkan perhentian permusuhan diseluruh daerah Republik.

Pemerintah mendjawab, bahwa keadaan damai akan tertjipta kalau penjelesaian politik sudah dapat dibereskan dan segera didjalankan penghentian permusuhan umum (dari kedua belah pihak). Tetapi kita usulkan supaja dapat didjalankan penghentian permusuhan itu kalau Belanda suka menerimanja kita djalankan bersama-sama, sebab permusuhan itu ada djuga dari kedua belah pihak.

Hal jang demikian ditolak oleh Belanda, walaupun dari pihak kita dinjatakan keadaan kita jang sabar itu, sedang kita masih berapat.

Pun permintaan kita untuk mengundurkan 24 djam hal pengumuman itu ditolak dan dituntut keras dari kita pengumuman-pengumuman dari pihak kita sadja menghentikan permusuhan.

Dengan penuh rasa tanggung djawab, Pemerintah menolak tuntutan Belanda itu. Kita mengetahui ada jang akan djadi akibatnja. Tetapi Pemerintah Republik beranggapan bahwa kebenaran dalam hal ini adalah pada pihaknja.

Kita suka damai, tetapi damai dengan kebenaran. Kita mentjari penjelesaian politik dengan damai, tetapi dalam usaha ini dipersukar oleh pihak Belanda dengan tuntutan-tuntutan jang tidak berarti penjelesaian politik, jang tidak adat pula, sebab seolah-olah hanja pihak Republik jang bersalah.

Demikianlah antara lain pidato P. M. Amir Sjarifuddin.

Gendarmerie - Bersama dan contra - usul Republik.

Pada tanggal 15 Djuli pihak Belanda mengusulkan suatu rentjana pembentukan suatu direktorat - keamanan, jang dibalas oleh pihak Republik dengan usul pula pada tanggal 17 Djuli.

Selain itu djuga pada tanggal 15 Djuli pihak Belanda pun menjampaikan usul jang bersifat ultimatief mengenai penghentian permusuhan. Pada pokoknja usul itu sebagai berikut :

Usul Belanda mengenai direktorat - keamanan.

Untuk mendjamin usaha kearah kembalinja dan terdjaminnja keamanan di dalam negeri pihak Belanda mengusulkan dibentuknja direktorat - bersama jang stafnja terdiri atas orang-orang Belanda dan Wakil-wakil Negara-negara, direktorat itu akan bekerdja dibawah kekuasaan Pemerintah Peralihan.

Pendjagaan keamanan dan ketertiban adalah pertama-tama mendjadi kewadjiban polisi negara itu. Untuk memberi bantuan kepada polisi itu diusulkan, supaja dimana perlu, di tiap-tiap negara dibentuk corps-corps polisi istimewa. Untuk memberi pimpinan dan pendidikan kepada corps polisi istimewa itu, demikian pula untuk memberi pimpinan dan pendidikan kepada polisi biasa, maka negara-negara itu menerima bantuan orang-orang Belanda jang untuk kepentingan itu dibantukan kepada negara-negara tersebut. Begitu djuga dalam corps polisi-polisi istimewa itu dapat ditempatkan pasukan-pasukan polisi Belanda, djika dipandang perlu oleh pemerintah peralihan sementara.

Direktorat buat keamanan didalam negeri itu menentukan atas tanggung djawab pemerintah peralihan - dimana corps polisi istimewa itu dipergunakan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban.

Semua pasukan militer, jang belum didemobilisir, diundurkan dalam garnizoen-garnizoen, turut tjampur dan pertanggungan djawabnja terhadap ketertiban dan keamanan berachir seluruhnja. Polisi istimewa itu dalam mendjalankan kewadjiban bisa digunakan oleh badan-badan pemerintahan jang bersangkutan, tapi dengan memperhatikan djuga peraturan-peraturan direktorat jang diberikan untuk kepentingan keamanan dalam negeri.

Sebelum pemeliharaan ketertiban dan keamanan seluruhnja dapat diambil over oleh badan-badan kepolisian jang dimaksudkan diatas, maka ketertiban dan keamanan disebelah menjebelah pada perbatasan-perbatasan daerah pendudukan di Djawa dan Sumatera akan didjaga oleh polisi bersama sementara, jang djuga dipimpin oleh direktorat untuk keamanan dalam negeri, segera sesudah dibentuk.

Contra usul Republik :

Untuk memberikan pimpinan dalam hal djaminan - keamanan dalam negeri, didirikan suatu direktorat bersama untuk keamanan dalam negara, dengan stafnja terdiri dari wakil-wakil negeri Belanda dan masing-masing negara bagian jang ditempatkan dibawah kekuasaan pemerintah peralihan.

Urusan ketertiban dan keamanan dalam negeri adalah semata-mata kewadjiban polisi dari masing-masing negara bagian. Untuk melaksanakan hal tersebut Republik telah mempunjai selain corps polisi biasa, polisi istimewa (mobiele brigade) sebagai jang telah dikemukakan dalam surat Perdana Menteri tanggal 8 Djuli 1947.

1. Direktorat untuk keamanan dalam negeri disamping alat-alat Republik, berhak djuga dibawah pertanggungan djawab pemerintah peralihan, menentukan kapan dan dimana didaerah-daerah Republik corps polisi istimewa jang termasuk dalam pasal diatas dipergunakan untuk kepentingan ketertiban dan keamanan.

2. Untuk keperluan pimpinan dan pendidikan dari corps polisi istimewa, djuga terhadap polisi biasa, pertolongan dari expert-expert Belanda oleh negara-negara bagian dapat diterima. Expert-expert itu disediakan bila negara-negara bagian jang berkepentingan memintanja.

Segala kekuatan militer jang tidak dibubarkan, ditarik kembali ke - garnizoennja masing-masing, tindakan-tindakan dan pertanggungan djawabnja terhadap ketertiban dan keamanan sama sekali dihapuskan.

Sambil menunggu penarikan kembali dari kekuatan militer masing-masing kegarnizoennja, disebelah menjebelah batas sekarang dari daerah-daerah pendudukan di Djawa dan Sumatera, untuk memelihara ketertiban dan keamanan, akan didirikan polisi controle pos-pos tjampuran sementara.

Pokok-pokok usul Belanda mengenai penghentian permusuhan

Selambat-lambatnja tanggal 16 - 7 djam 23.59 Republik memerintahkan menghentikan permusuhan (jang bersendjata atau tidak bersendjata, menghentikan perusakan, blokade makanan dan aksi terhadap daerah diluar Republik).

Selambat-lambatnja tanggal 17 - 7 dilakukan aturan untuk menghentikan semua propaganda anti Belanda.

Selambat-lambatnja tanggal 19 - 7 djam 18.00 harus dimulai usaha mengundurkan tentara Republik sampai 10 km dari batas daerah-daerah jang diduduki Belanda, dimana pemeliharaan keamanan sementara di over oleh polisi biasa sampai terbentuknja polisi bersama.

Selambat-lambatnja pada tanggal 21 - 7 usaha pengunduran tentara dari perbatasan itu harus selesai.

Sesudah itu barulah dari pihak Belanda dilakukan usaha pergantian tentara didaerah perbatasan dengan polisi, sampai dibentuknja polisi bersama (Ant).

Udara politik tambah gelap

Seperti tersebut diatas, djawaban Republik atas usul Belanda telah disampaikan kepada Belanda pada tanggal 17 Djuli oleh Wakil P. M. Dr. A. K Gani, Mr. Ali Sastroamidjojo dan Mr. Susanto.

Pada tanggal 18 Djuli siang Dr. A. K. Gani dan Mr. Tamzil menemui Konsul-Konsul Djenderal Inggeris, Amerika, Tiongkok, Perantjis dan Australia.

Menurut Harian „Nieuwsgier", Konsul-Konsul Djenderal Tiongkok, Inggeris dan Perantjis memberi nasehat kepada kedua Menteri tersebut, supaja menerima sadja tuntutan Belanda untuk menghentikan permusuhan.

Malamnja Perdana Menteri Amir Sjarifuddin mengutjapkan pidato radio lagi, dimana P. M. mengulangi lagi kesediaan Republik untuk memetjahkan soal Indonesia dengan djalan damai.

„Dalam suasana damai, bukan dalam suasana ultimatum dan antjaman perang, bangsa Indonesia dan Belanda dapat bersama-sama berusaha ketudjuan pembangunan sungguh-sungguh, demikian P.M. Selandjutnja P.M. menerangkan, bahwa Republik sedia menghentikan permusuhan, asal pihak Belanda pun suka mengambil tindakan jang dapat mengembalikan kepertjajaan pihak Republik atas kehendak baik Belanda.

Pada tanggal 19 Djuli pagi Wakil P. M. Setiadjid dan Menteri-menteri Susanto dan Leimena tiba kembali di Jogja dan terus memberikan pelaporan kepada Kabinet. Sidang Kabinet jang diadakan pada pagi hari itu terutama membitjarakan penolakan Belanda atas usul-usul Republik jang terachir.

Demikianlah, keesokan harinja pada tanggal 20 Djuli Wakil P. M. Dr. A. K. Gani menurut Antara menjampaikan surat kepada Prof. Schermerhorn jang mengandung 3 pasal :

1). Supaja Delegasi Indonesia — Belanda mengadakan pembitjaraan lagi untuk mentjari djalan damai.
2). Kalau usaha itu gagal, Indonesia dan Belanda bersama memilih seorang wasit dari negara netral.
3). Kalau ini tidak berhasil lagi, maka Mahkamah Internasional diminta untuk menundjukkan siapa jang akan melakukan arbitrage.

* *
*

9. AKSI MILITER BELANDA KESATU

DALAM pidato radio jang diutjapkan pada djam 2.30 pagi (djam Djawa) Perdana Menteri Belanda Louis Beel, setelah menguraikan, bahwa pihak Republik senantiasa tidak menepati djandji sesuai dengan persetudjuan Linggadjati dan tidak suka menerima, tetapi malahan sebaliknja menolak nota Belanda tanggal 27 Mei 1947 jang meminta supaja tembak-menembak segera dihentikan, serta masih terus sadja melakukan pengrusakan-pengrusakan, maka pemerintah Belanda telah memberi kuasa kepada Lt. Gubernur Djenderal Dr. van Mook supaja melakukan aksi polisionil, serta mewudjudkan segala sesuatu karena Republik ternjata tidak mampu melakukannja.

Sedjak tanggal 20 Djuli djam 21.20 hubungan telpon Jogja — Djakarta putus. United Press mengabarkan, bahwa mulai djam 23.00 Belanda mulai menduduki kantor-kantor Republik. Kantor kawat dan radio tidak diperbolehkan mengirimkan pengiriman biasa. Penangkapan-penangkapan setjara besar-besaran dimulai.

Menteri-menteri Republik Dr. A. K. Gani dan Mr. Tamzil jang telah beberapa hari berada di Djakarta serta Walikota Djakarta Suwirjo ditahan digedung Pegangsaan Timur.

Pagi hari tanggal 21 Djuli 1947 pesawat-pesawat terbang Belanda mulai menjerang lapangan-lapangan terbang Republik.

Djam 7, 4 pesawat terbang pemburu Belanda terbang rendah mengelilingi kota Jogja selama 15 menit, serta mengebom lapangan terbang Maguwo.

Siangnja djam 15.00 lapangan terbang Maguwo buat jang kedua kalinja diserang lagi. Pemburu Belanda telah mendjatuhkan 8 bom.

Sementara itu disegala front Belanda mulai menjerang dengan didahului dengan bombardemen.

Bersatu melawan pendjadjah
Pidato Presiden Soekarno

Malamnja djam 19.00 Presiden mengutjapkan pidato jang ditudjukan kepada seluruh bangsa Indonesia dan dunia umumnja.

Pidato itu antara lain berbunji sebagai berikut :

„Pada permulaan bulan Sutji ini, apa jang telah lama dan selalu kita chawatirkan, sekarang sudah terdjadi. Pihak Belanda, dengan perantaraan Perdana Menterinja Beel serta wakilnja disini Dr. van Mook, rupanja telah memungkiri serta membatalkan perdjandjiannja dengan Republik Indonesia atas maunja sendiri. Rupanja pula sebelum pernjataan pemungkirannja itu sampai pada kita, — malah hingga kinipun kita mengetahuinja hanja dari siaran radio Belanda sadja —, pihak Belanda telah memulai pula gerakan permusuhan terhadap kita. Republik kita, perwudjudan tjita-tjita serta perdjuangan rakjat Indonesia, sekarang diserang terang-terangan dengan sendjata, dari darat dan udara.

Maka dengan itu, berulanglah suatu kedjadian jang sedih serta kedji didalam sedjarah kemanusiaan. Apa jang berlaku itu, tak lain daripada tindakan sewenang-wenang, jang didorongkan oleh napsu akan kebuasan serta pendjadjahan semata-mata. Dunia telah serta nanti lebih banjak lagi akan mendengar rupa-rupa alasan jang bagus bunjinja dari pihak Belanda untuk menerangkan serta membenarkan sikap serta tindakan Belanda ini. Akan tetapi tiap orang jang masih berperasaan keadilan didalam hati ketjilnja akan sedar, bahwa serangan dengan kekerasan jang diadakan pada pentjiptaan kemerdekaan jang berupa Republik Indonesia ini, tiada dapat dibenarkan ataupun disembunjikan dengan alasan-alasan apapun, serangan jang dilakukan oleh Belanda dengan kekerasan sendjata itu, adalah serangan terhadap pada kemerdekaan serta keadilan, adalah perbuatan jang kedji serta sewenang-wenang, jang semata-mata berdasar pada kepertjajaan pada kekerasan serta paksaan.

Kita jakin, bahwa lebih sembilan puluh persen daripada machluk jang ada didunia ini tiada membenarkan lagi pendjadjahan, demikian pula dinegeri Belanda. Kita jakin, bahwa oleh karena itu mesti dapat kita menghindarkan (didalam usaha kita menglaksanakan kemerdekaan kita) peperangan kemerdekaan atau pendjadjahan.

Apa jang dituduhkan kepada kita sekarang sebagai kekurangan-kekurangan serta pelanggaran-pelanggaran didalam penjelenggaraan perdamaian, sebenarnja bagi orang jang masih mengandung perasaan keadilan serta kebenaran didalam djantung ketjilnja, tiada berarti sama sekali.

Sebab adilkah mengemukakan kepada negara jang baru kurang dari dua tahun, jang meliputi daerah lima kali negeri Belanda dan berpenduduk enam kali lebih banjaknja, serta pula hidup dalam kurungan militer, kurungan politik dan kurungan ekonomi, adilkah mengemukakan kepadanja ukuran jang didasarkan atas perbandingan dengan negara-negara jang merdeka jang telah berabad-abad berdiri, serta pula leluasa berbuat serta berusaha. Biarpun demikian, tak kurang orang luar negeri, djuga bangsa Belanda sendiri jang telah dapat menjaksikan serta pula menjatakan, bagaimana kemerdekaan jang telah kita tjapai serta kita beri bentuk dengan Republik kita ini, telah tumbuh baik serta bertambah sempurna. Pengakuan jang demikian pernah datang dari pihak Belanda jang resmi sendiri. Bukan sadja pengakuan de facto Republik kita, oleh karena bangsa-bangsa jang besar, serta oleh bangsa Belanda sendiri, adalah tjukup bukti untuk gambaran didalam dua tahun jang lalu ini. Sekarang didalam beberapa hari sadja segala-segala itu akan dipungkiri, serta gambaran kekurangan serta kemunduran sadja jang akan dapat terlihat oleh dunia ?

Mustahil ! Mustahil, bagi tiap orang jang masih mengandung perasaan keadilan serta kebenaran !

Oleh karena itu, maka pemungkiran pihak Belanda pada perdjandjiannja dengan kita, adalah pemungkiran penghargaannja, pada kemerdekaan, keadilan serta kebenaran. Dan kekerasan jang dilakukannja pada kita, adalah perkosaan pada kemerdekaan, keadilan kebenaran, kemanusiaan.

Dari karena kita jakin, bahwa kebenaran dan keadilan ada dipihak kita, maka dengan penuh kepertjajaan, kita bersedia menjerahkan soal perselisihan Indonesia — Belanda ini kepada U. N. O., Serikat Bangsa-Bangsa, jang didirikan semata-mata untuk mendjaga Perdamaian dan keamanan dunia. Maka bersama ini saja berseru kepada negara-negara jang tjinta kemerdekaan dan keadilan, jang menaruh sympathie kepada Republik Indonesia, sudilah kiranja mengemukakan soal perselisihan Indonesia — Belanda kehadapan Serikat Bangsa-Bangsa.

Saudara-saudara, belum dapat kita ketahui hingga mana serta berupa apa serangan kekerasan jang akan digunakan oleh pihak Belanda terhadap Republik kita. Akan tetapi apa dan bagaimana djuga nanti rupanja itu, marilah kita tetap teguh dalam iman kita, bahwa kita **akan** dan **pasti** dapat menolak segala

serangan terhadap Republik kita. Telah hampir dua tahun lamanja kita berusaha, telah hampir dua tahun lamanja kita berkorban dan menderita segala-galanja didalam penglaksanaan kemerdekaan kita, jaitu menjempurnakan, menjelamatkan Republik kita. Kita telah berikan darah dan djiwa pemuda-pemuda buat rakjat kita, harta serta ketenteraman rumah dan sawah kita, kadang-kadang perasaan serta kehormatan diri kita sendiri, untuk keselamatan serta kehormatan bangsa kita, untuk kemerdekaan kita, untuk Republik kita.

Kadang-kadang rupanja tak ada lagi jang dapat kita berikan, sumbangkan, seolah-olah telah sampai kita pada kesanggupan kita. Akan tetapi, untuk menghindarkan bentjana sekarang ini, mesti kita dapat mengumpulkan segala tenaga jang diperlukan untuk menolaknja. Jakinlah bahwa Allah Jang Maha Kuasa, jang Adil serta Benar, terlebih-lebih didalam Bulan Sutji ini, tak akan meninggalkan kita, selama kita tetap didjalan keadilan, kebenaran serta kemanusiaan. Ia jang akan menambah segala tenaga jang masih perlu kita adakan pada diri kita. Ia pula jang akan menuntun kita, melalui bentjana ini, kepada keselamatan serta kemenangan kemerdekaan. Tiap putera serta puteri Indonesia, wudjudkan segala djiwamu pada pembelaan kemerdekaan kita, kepada pembelaan Republik kita. Didalam pengabdian kita pada pembelaan kemerdekaan kita ini, seluruh bangsa serta rakjat kita harus bersatu teguh. Tiap orang mendjalankan kewadjibannja dengan minat serta pengabdian jang sesutji-sutjinja !

Seluruh rakjat serta bangsaku dikepulauan kita jang kita tjintai ini ! Seluruh rakjat serta bangsaku di Djawa, di Sumatera, di Borneo, di Sulawesi, di Maluku, di kepulauan Sunda Ketjil hingga ke Papua, sertalah serentak menggabungkan tenaga jang maha hebat serta maha kuat karena kesutjian serta kebenaran, untuk menolak serta membatalkan perkosaan Belanda terhadap buah hati kita serta hasil perdjuangan kemerdekaan kita ini, jaitu Republik kita, — lambang kemerdekaan, lambang keadilan, lambang kebenaran, lambang kesutjian ! Insja Allah, kita akan menang". Demikian pidato Presiden.

Pada malam itu berpidato pula Perdana Menteri Mr. Amir Sjarifuddin jang antara lain berbunji sebagai berikut :

„Pihak Belanda telah mengumumkan bahwa kekuatan militernja telah mulai bertindak, mendjalankan kewadjiban kepolisian kata mereka. Tentang apa kewadjiban kepolisian itu nanti saja akan terangkan sikap kita.
Tetapi jang penting jalah bahwa oleh Belanda djalan damai telah ditinggalkan. Bahwa pada tahun 1947, sesudah perang dunia II, sesudah dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesudah bertahun-tahun ada Pengadilan Internasional, sesudah pihak Indonesia mengirim surat kepada pihak Belanda untuk menjelesaikan soal Indonesia — Belanda ini dengan arbitrage exart. 17 Linggadjati, bahwa pada tahun 1947 ini satu bangsa mengangkat sendjatanja, telah memulai memitraljur dipedalaman, membom, segala-galanja itu katanja atas nama usaha perdamaian dan keadilan", demikian P.M. memulai pidatonja. Selandjutnja dikatakan ; „Tuduhan Belanda terhadap Republik banjak dan katanja beralasan, sehingga mereka terpaksa mengangkat sendjatanja ! Tetapi bolehkah saja djuga bertanja beberapa pertanjaan-pertanjaan. Beberapa lama Indonesia — Belanda berunding baru mendapat persetudjuan sedikit : jaitu usul jang dibawa ke Hoge Veluwe ?

Siapa jang menolaknja sesudah tiga pihak : Inggeris, Belanda dan Indonesia telah matang-matang merundingkannja ? Kita mengetahui bahwa dunia luar menanti-nanti persetudjuan Indonesia — Belanda, sehingga perdagangan dapat berkembang kembali, produksi didjalankan lagi. Tapi pada permulaan 1946, sesudah mulai berunding pada bulan Nopember 1945, Belandalah jang selalu mengundurkan putusan. Lord Killearn datang dan hanja atas kebidjaksanaannja beliau dapat dilangsungkan lagi perundingan. 15 Nopember 1946, sesudah berunding lebih sebulan baru ada dasar persetudjuan, jaitu naskah Linggadjati.

Delegasi Belanda berangkat ke negeri Belanda, sebentar sadja kata mereka, supaja naskah Linggadjati itu dapat disetudjui oleh perwakilan rakjat untuk ditanda tangani. Apa jang memang royaal dan loyaal telah disetudjui oleh Komisi Djenderal didebat, ditawar, diperketjil, diperkurang lagi oleh Kabinet dan perwakilan rakjat - Belanda dan baru kira-kira pertengahan Djanuari 1947 Komisi Djenderal kembali sesudah kira-kira 1½ bulan meninggalkan Indonesia. 1½ bulan tawaran dan perdebatan dan bukan kembali membawa naskah jang akan ditanda tangani tapi naskah dan tafsiran mereka sendiri jang mesti kita tanda tangani katanja. Inilah jang disebut kedjudjuran? Ini pula jang disebut bekerdja tjepat untuk meladeni keperluan dunia Internasional! Oleh karena hal lapisan itu perlu berunding lagi, jang sesungguhnja seolah-olah ada perundingan baru atas dasar baru dan sesudah menghadapi dengan sabar pihak Belanda itu, maka 25 Maret 1947 naskah Linggadjati ditanda tangani, 4 bulan lebih sesudah diparaf di Djakarta, sebab usaha bertengkar tafsiran sadja.

Insiden militer bertumpuk-tumpuk dan Belanda melanggar demarkasi: kedjurusan Krian oleh sebab dipanggil rakjat Indonesia katanja. Dan tepat orang luar bertanja, kedjurusan Sidoardjo sebab apa lagi? Dan apakah pihak Belanda sendiri tidak mengakui bahwa tindakan militer Krian — Sidoardjo itu tidak diketahui lebih dahulu oleh Komisi Djenderal dan Dr. van Mook?

Kita terus menerus melanggar gentjatan sendjata kata Belanda pula. Mereka hanja mempertahankan diri, kata mereka. Pertjajalah siapa jang suka pertjaja, bahwa tiap-tiap serdadu Belanda seorang satriya dan tiap-tiap peradjurit Indonesia seorang sjetan kedjahatan.

Beratus-ratus kali Belanda melanggar garis demarkasi, berkali-kali desa dipantai ditembaki oleh kapal perang Belanda, berkali-kali kapal terbang mereka melanggar perdjandjian gentjatan sendjata! Mereka menduduki Krian — Sidoardjo dan dikatakan untuk sementara waktu".

Selandjutnja P. M. berkata: „Menurut Linggadjati, tentara Belanda mesti dikurangi djumlahnja, tapi jang kedjadian jalah sebaliknja. Djumlahnja ditambah melebihi djumlah jang telah disetudjui didalam perdjandjian gentjatan sendjata".

Selandjutnja beliau berkata, bahwa kita rakjat merdeka dan bersatu. Kita rakjat bernegara dan berpemerintah. Dan sebab itu tidak mengakui dan mengetahui tindakan polisi dari negara lain didaerah kita. Kita hanja mengetahui, bahwa ada pertahanan nasional kalau jang disebut polisi Belanda itu memasuki daerah kita.

Achirnja beliau berseru supaja rakjat Indonesia bersatu menggunakan segala tenaga. Segala usaha seluruh rakjat mempertahankan kemerdekaan kita. „Segala lapisan, segala pemuda-pemudanja, wanitanja, tentaranja, seluruh rakjat saja panggil mendjalankan kewadjiban kita, dalam Pertahanan Nasional", demikianlah beliau mengachiri pidatonja.

Panglima Besar Soedirman pada malam itu djuga mengutjapkan pidato sebagai berikut:

Usaha Pemerintah Republik Indonesia untuk menjelesaikan soal Indonesia — Belanda dengan djalan damai berdasarkan perikemanusiaan sebagaimana jang dikehendaki oleh seluruh dunia, sebenarnja telah tjukup memuaskan bagi Belanda dan dunia seluruhnja.

Untuk turut melaksanakan pembangunan dunia jang aman damai dan makmur, maka sering kali terdjadi Pemerintah Republik beserta Rakjat seluruhnja terpaksa harus menekan amarahnja, harus banjak mengorbankan perasaan, karena terlalu banjak jang kita berikan kepada Belanda.

Pemerintah Republik Indonesia beserta rakjat seluruhnja telah menjatakan sikap jang tegas: tidak dapat memberikan consessie lebih banjak lagi, karena consessie jang telah diberikan pada Belanda sudah terlalu banjak. Dunia seluruhnja sesungguhnja telah mengerti dan mengetahui tentang hal ini, hanja Belanda sendiri jang tidak suka mengerti dan tidak suka mengetahuinja. Be-

landa minta dengan keras, supaja semua usul-usulnja kita terima sebulat-bulatnja.

Berhubung dengan sikap Pemerintah Republik Indonesia jang telah tegas, tidak akan memberikan tambahan consessienja lagi, tidak akan menelan semua usul-usul Belanda, maka Pemerintah Belanda telah memutuskan : memberikan kuasa penuh pada Dr. van Mook, untuk sewaktu-waktu mengambil tindakan terhadap Republik dengan mempergunakan seluruh kekuatan militer.

Pagi hari ini serangan umum dengan mempergunakan pesawat udara telah dimulai oleh tentara Belanda. Serangan-serangan dilakukan setjara membabi buta, karena mereka tidak hanja mengadakan serangan dimedan-medan pertempuran, tetapi djuga di beberapa daerah pedalaman.

Dengan adanja sikap Belanda jang sematjam itu, telah terang dan njata, baik segenap rakjat dan bangsa Indonesia, maupun bagi dunia seluruhnja, bahwa Belanda telah memperkosa perdamaian dan memperkosa pula kemerdekaan salah suatu Bangsa diatas bumi ini.

Sekarang tiba saatnja, bagi segenap lapisan Rakjat Indonesia untuk menunaikan sumpahnja terhadap Tuhan dan Ibu Pertiwi, mendjalankan dengan sungguh-sungguh sembojan-sembojan - tjinta kemerdekaan. Kemerdekaan jang telah kita proklamasikan dan kita pertahankan 22 bulan lebih, wadjib kita lindungi dan kita pertahankan sampai titik darah jang penghabisan. Insjaf dan ingatlah, korban telah banjak, penderitaan tidak sedikit, maka djangan sekali-kali kemerdekaan negara dan Bangsa Indonesia jang telah kita miliki dan kita pertahankan itu, kita lepaskan dan kita serahkan kepada siapapun djuga jang akan mendjadjah dan menindas kita.

Tundjukkan, bahwa benar-benar kita tjinta kemerdekaan. Buktikan, bahwa benar-benar kita dapat mengatur Negara kita sendiri, dapat pula mendjamin keamanan dan keselamatan negara kita seisinja.

Dalam keadaan jang bagaimanapun djuga kita sekalian harus tetap tenang, hati-hati, awas, waspada dan gembira. Djangan bimbang, Tuhan beserta kita. Tuhan berada dipihak jang benar.

Segala matjam tindakan dari pihak Belanda wadjib kita lajani dengan sekuat-kuatnja.

Sebagai konsekwensi dari akibat penolakan terhadap sebagian ketjil usul Belanda itu.

Seluruh lapisan rakjat wadjib bersatu.

Seluruh lapisan rakjat wadjib berdjuang

Seluruh lapisan rakjat wadjib mempertahankan dan menjelamatkan Kemerdekaan Nusa dan Bangsa.

Achirnja, kami jang diserahi tugas kewadjiban mengatur dan memimpin pertahanan Negara, memerintahkan :

Segenap anggauta Angkatan Perang, Rakjat dan Bangsa Indonesia seluruhnja.

Siaap ! ! Madju Djalan ! !

Reaksi Luar Negeri

Inggeris menawarkan diri sebagai perantara

Kementerian Luar Negeri Inggeris sangat ketjewa atas keputusan pemerintah Belanda untuk melakukan gerakan militer di Indonesia. Selandjutnja pemerintah Inggeris telah menawarkan diri untuk mendjadi perantara dalam pertikaian Indonesia — Belanda (B.B.C.).

Pemerintah Amerika Serikat sangat ketjewa, bahwa perundingan untuk menjelesaikan soal Indonesia — Belanda setjara damai telah gagal.

Pandit Nehru jang pada waktu itu Wakil Ketua Pemerintah dominion Hindustani menerangkan bahwa ia sangat menjesal tindakan-tindakan Belanda dengan melakukan gerakan militer di Indonesia.

Ia menjokong andjuran pemerintah Inggeris untuk membentuk satu Komisi polisionil netral guna memetjahkan soal kepolisian di daerah Republik.

Sementara itu kaum pekerdja pelabuhan, dipelbagai kota didunia mengadakan pemogokan tidak mau memuat lagi kapal-kapal Belanda jang sedang berlabuh disitu.

Sjahrir ke Luar Negeri

Sedjak dimulai agressi militer Belanda pada tgl. 21 Djuli, Sutan Sjahrir telah meninggalkan Jogja dengan membawa pesan istimewa dari pemerintah Republik untuk memberi penerangan tentang sikap Republik diluar negeri. Ia akan mengundjungi Amerika Serikat, Inggeris dan India.

Peristiwa jang sangat menjedihkan terdjadi di Jogja pada tanggal 29 Djuli 1947, diwaktu sebuah pesawat terbang Dakota kepunjaan Patnaik jang datang dari India dengan membawa obat-obatan ditembak djatuh oleh 2 pesawat pemburu Belanda diatas Kota Jogja.

Meskipun pihak Belanda sudah tahu bahwa pesawat Dakota tersebut pada hari itu berangkat dari lapangan terbang Kalang, Singapore, karena siaran radio Belanda pada djam 19.30 sendiri mengumumkan, bahwa sebuah pesawat dari Patnaik jang membawa Sjahrir ke Singapore, berangkat dari Singapore dengan membawa obat-obatan untuk Republik, rupa-rupanja Belanda dengan sengadja mentjegat pesawat itu dan melakukan perbuatannja jang tidak mengenal perikemanusiaan itu. Sebab djustru pada waktu Dakota tersebut mau mendarat dilapangan terbang Meguwo pesawat itu ditembak djatuh ditengah sawah didesa Ngoto 5 km Selatan Kota Jogjakarta.

Pesawat Dakota tersebut terbakar semua sedangkan korban manusia ialah: ex wing commander Constantin bersama isterinja, ex squadronleader Haselhorst, seorang Inggeris jang tidak diketahui namanja, mecanicien India Bida Ram, Adi Sutjipto, Dr. Abdulrachman Saleh, Hadisumarno dan Arifin. Luka2 Abdul Gani.

a. Republik Indonesia digelanggang Internasional

Pada tanggal 30 Djuli Pemerintah Australia memberi instruksi kepada wakilnja di Lake Succes, Kolonel Hodgson untuk memadjukan permintaan resmi kepada U.N.O. supaja soal Indonesia dengan segera dimasukkan dalam daftar pembitjaraan Dewan Keamanan.

Kolonel Hodgson diberi kewadjiban oleh pemerintahnja untuk mejakinkan Dewan Keamanan bahwa soal Indonesia perlu dibitjarakan lebih dulu daripada soal-soal lainnja.

Wakil Polandia di U. N. O. Dr. Oscar Lange menerangkan, bahwa soal Indonesia itu memang soal jang hangat, dan perlu dibitjarakan seketika itu djuga.

Biasanja menurut peraturan, semua harus dimadjukan kepada Dewan Keamanan tiga hari sebelum dibitjarakan, tetapi Lange minta supaja procedure itu kali ini diketjualikan.

India sudah lebih dulu memadjukan soal Indonesia kepada U.N.O., berdasarkan pasal 35 Piagam U. N. O. Menurut pasal itu, tiap anggauta dan tiap negara jang bukan anggauta Serikat Bangsa-Bangsa boleh minta perhatian Dewan Keamanan atau Madjelis Umum tentang perselisihan jang melihatnja, djika untuk keberesan perselisihan itu, negara itu lebih dulu menerima kewadjiban-kewadjiban untuk menjelesaikan perselisihan itu setjara damai.

India menjatakan dalam notanja kepada U. N. O., supaja soal Indonesia „selekas mungkin" dibitjarakan oleh Dewan Keamanan, sedangkan Australia minta supaja soal itu „dengan segera" diperbintjangkan.

Kedudukan Republik Indonesia dalam gelanggang internasional makin lama makin kuat, setelah masalah pertikaian Indonesia/Belanda dibitjarakan dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kolonel Hudson, wakil Australia dalam Dewan Keamanan minta kepada Dewan Keamanan supaja masalah Indonesia dianggap sebagai peperangan jang merupakan antjaman bagi perdamaian dan dengan demikian djatuh dibawah pasal 7 dari Piagam P.B.B.

Selandjutnja Kolonel Hodgson menerangkan, bahwa operasi-operasi di Djawa dan Sumatera bukanlah tindakan polisionil, melainkan suatu peperangan jang njata. Diterangkannja, bahwa segala usaha dari negeri-negeri lain untuk mendjadi perantara dalam soal Indonesia telah gagal. Maka ia minta supaja Dewan Keamanan sendiri jang menghentikan peperangan di Indonesia.

Wakil India dan Belanda telah diundang hadlir dalam sidang Dewan Keamanan tersebut. Wakil Sovjet Rusia Andrei Gromyko bertanja apakah sebabnja tidak ada wakil dari Republik Indonesia. Usul Rusia disokong oleh Amerika dan Perantjis.

Van Kleffens, duta Belanda di Amerika Serikat dan Wakil Belanda dalam Dewan Keamanan menolak adanja wakil Republik jang hadlir dalam persidangan. Ia menerangkan, bahwa Republik bukanlah suatu negara jang merdeka. Selandjutnja ia menerangkan, bahwa apa jang terdjadi di Indonesia bukanlah perang, tetapi pemerintah Belanda ingin melenjapkan anarchie sehingga rakjat Indonesia dapat hidup dengan damai kembali.

Tetapi alasan-alasan van Kleffens itu disangkal oleh wakil Australia, Kolonel Hodgson. Ia menerangkan, bahwa kekuasaan de facto dari Republik telah diakui oleh Pemerintah Belanda sendiri, Inggeris, Amerika Serikat, Australia India serta negara-negara Arab.

Hodgson menundjukkan, bahwa dalam persetudjuan Linggadjati terdapat satu pasal jang menerangkan, bahwa djika timbul perselisihan antara Belanda dan Indonesia jang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak keputusan akan diserahkan kepada arbitrage jang arbiternja dapat diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan Internasional.

Hanja negara-negara merdekalah jang dapat madjukan soal kepada Dewan Pengadilan Internasional dan karena pengakuan de facto terhadap Republik Indonesia belum pernah ditarik kembali, maka karena itu Republik Indonesia adalah suatu negara menurut hukum internasional.

B. R. Sen wakil India jang menghadliri sidang Dewan Keamanan menerangkan, bahwa sebenarnja tidak ada perbedaan dalam tjara India dan Australia memadjukan soal Indonesia kepada Dewan Keamanan. Karena India bukan anggauta dalam P.B.B., maka India tidak dapat memadjukan soal Indonesia berdasarkan pasal 7 dari Piagam P. B. B. Dia minta didjalankannja pasal 6, jang menentukan bahwa anggauta P.B.B. jang terus menerus melanggar azas-azas Piagam sekarang mungkin dikeluarkan dari Badan ini oleh Madjelis Umum setelah menerima usul-usul dari Dewan Keamanan. Selandjutnja ia menjatakan, bahwa ia didatangkan dengan lekas-lekas sebab djika tidak demikian kemenangan jang sudah dalam angan-angan Belanda dapat menguntungkan mereka bilamana nanti perundingan dimulai lagi.

Wakil India djuga mendesak supaja peperangan di Indonesia dengan segera dihentikan dan menuntut supaja tentera Belanda dan Indonesia kembali pada kedudukan sebelum terdjadinja peperangan ini.

Wakil Perantjis dan Rusia minta kepada sidang, supaja dalam masa itu djangan mengambil keputusan dulu sebelum mengetahui soal itu sebetul-betulnja.

Pada achir persidangan wakil Amerika H. Johnson menerangkan, bahwa Amerika akan mendjadi pihak perantara.

Kemudian sidang ditunda.

Selandjutnja keputusan Dewan Keamanan P.B.B. untuk menghentikan tembak menembak telah dikirimkan kepada P.M. Republik Indonesia Mr. Amir

Sjarifuddin dan pemerintah Belanda. Djawaban atas putusan Dewan Keamanan ditunggu dalam 2 atau 3 hari. Tetapi tanggal penghentian tembak-menembak belum ditetapkan.

b. Kita mendjalankan seruan Dewan Keamanan P.B.B.

Pada tanggal 3 Agustus Pemerintah Republik Indonesia telah menjatakan sikapnja terhadap putusan Dewan Keamanan P. B. B. Pernjataan Republik Indonesia itu berbunji :

1. Pemerintah Republik, dengan saksama telah mengikuti dengan mempeladjari perbintjangan didalam Dewan Keamanan P. B. B. mengenai perselisihan Indonesia — Belanda.
   Keputusan jang diambil oleh Dewan Keamanan telah dipeladjari dengan teliti pula, dan dihargai sepenuh-penuhnja oleh Pemerintah Republik sebagai usaha pertama untuk menjelesaikan perselisihan tadi, lagi menandakan, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menepati tjita-tjita dan azas dari pada Piagam P. B. B.
2. Bersama ini Pemerintah Republik Indonesia menjatakan, bahwa keputusan Dewan Keamanan tadi hingga saat ini belum diterima oleh Pemerintah Republik setjara resmi. Karenanja Pemerintah Republik Indonesia mengharap supaja keputusan itu setjara resmi dan langsung segera disampaikan hendakanja.
3. Pemerintah Republik Indonesia menegaskan, bahwa ketentuan adanja pemberhentian permusuhan dapat disetudjuinja. Pemerintah Republik Indonesia bersedia dengan segala tenaganja mendjalankan adanja pemberhentian permusuhan itu, tetapi berdasarkan atas pengalaman, Pemerintah Republik Indonesia berpendapat, bahwa usaha sedemikian itu hanja dapat dilakukan setjara sempurna kalau pasukan-pasukan kedua belah pihak di kembalikan pada garis-garis demarkasi jang ditetapkan bersama pada tanggal 14 bulan Oktober 1946. Setjara demikian rakjat Indonesia jang ikut serta dengan Angkatan Perang Republik Indonesia mengadakan perlawanan rakjat terhadap agressi kolonial Belanda, dapat terdjamin dan bebas dari segenap kekatjauan, antjaman pembalasan, dan terror daripada tentara Belanda di tempat-tempat jang telah diduduki pasukan-pasukan Belanda.
   Agar penglaksanaan pemberhentian permusuhan dapat berdjalan baik, seharusnja Dewan Keamanan sendirilah jang terus menerus mengawasi djalannja penglaksanaan tersebut.
4. Pemerintah Republik Indonesia pada azasnja tidak berkeberatan dengan diadakannja suatu arbitrage dibawah pengawasan Dewan Keamanan P.B.B., asalkan arbitrage tersebut diselenggarakan oleh suatu panitya, terdiri dari beberapa negara ditundjuk oleh Dewan Keamanan dan disetudjui oleh kedua belah pihak jang berkepentingan, jalah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda. Djalan penjelesaian tersebut harus ditempuhnja agar supaja lebih dapat terdjamin adilnja usaha penjelesaian perselisihan.
5. Mengingat pengalaman usaha penjelesaian selama dua bulan jang telah lalu mengenai perselisihan Indonesia — Belanda, maka Pemerintah Republik Indonesia menganggap amat penting sekali bahwa salah satu sjarat jang mutlak untuk mengekalkan perdamaian dan kesedjahteraan di Indonesia jalah segera ditariknja kembali Angkatan Perang Belanda dari seluruh kepulauan Indonesia. Dengan demikian maka segenap kemungkinan antjaman dan pelanggaran perdamaian ataupun perbuatan agressi jang menurut Piagam P. B. B. dapat membahajakan perdamaian seluruh Dunia dapat dihindarkan dari Indonesia, sedangkan usaha pembangunan dan perhubungan perekonomian dengan seluruh dunia tentu dapat berkembang sesempurna-sempurnanja.

6. Achirnja agar usaha Dewan Keamanan dapat berdjalan setjara lantjar dan adil, maka Pemerintah Republik Indonesia ingin mendapat kesempatan mengemukakan pendapat Republik Indonesia sepenuhnja dengan perantaraan wakilnja sendiri didalam Dewan Keamanan P. B. B. tentang masalah perselisihan Indonesia — Belanda.
7. Pemerintah Republik Indonesia menjerahkan kepada seluruh bangsa sedunia jang sungguh-sungguh berhasrat mempertegak perdamaian berdasarkan hak-hak kemanusiaan dan kemerdekaan untuk sekuat tenaga meneruskan ichtiar mereka mentjegah agressi kolonial Belanda jang terang-terangan bertentangan dengan segala azas peradaban dan keadilan seperti tertjantum didalam Piagam P. B. B.
   Pemerintah Republik Indonesia tetap mendjalankan politik damai jang berarti bahwa dalam menghadapi agressi kolonial Belanda, Pemerintah Republik Indonesia — disokong oleh rakjat — akan mempertahankan dengan segala tenaganja tjita-tjita perdamaian dan demokrasi.

*

Pendirian pihak Belanda mengenai reaksi P.B.B. dalam soal masalah Indonesia dapat kita lihat dalam sebuah pidato radio diutjapkan oleh Dr. van Mook pada tanggal 3 Agustus, jang isinja menjatakan, bahwa tanggal 4 — 5 Agustus djam 24.00 pemerintah Belanda akan memerintahkan kepada tentaranja untuk menghentikan gerakannja.

Dalam pada itu Belanda akan menunggu laporan-laporan tentang daerah-daerah mana di Djawa dan Sumatera jang mendjadi tanggung djawab Belanda sebagai akibat aksi militernja.

Meskipun demikian, ia menunggu sikap Republik Indonesia terhadap putusan Dewan Keamanan dalam hal menghentikan permusuhan. Dr. van Mook menambah bahwa menghentikan permusuhan itu tidak sadja berarti menghentikan aksi militer, melainkan djuga penghentian pengrusakan-pengrusakan, kekerasan-kekerasan dan propaganda permusuhan.

Achirnja Dr. van Mook menegaskan, bahwa Belanda tidak akan melepaskan keamanan dan kemerdekaan jang telah ditjapai.

Untuk memenuhi seruan Dewan Keamanan P.B.B. maka pemerintah Republik Indonesia memerintahkan kepada segenap angkatan perangnja supaja menghentikan permusuhan.

Perintah penghentian permusuhan jang diutjapkan oleh Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi berbunji demikian:

Kepada seluruh Angkatan Perang dan Rakjat Republik Indonesia, pada tanggal 21 bulan jang lalu pada hari ketiga bulan sutji ini, saja telah memerintahkan kepada seluruh rakjat Republik Indonesia dan Angkatan Perang kita bangun serentak dan melawan agressi Belanda jang kedji itu dengan segenap tenaga.

Rakjat Indonesia dan Angkatan Perang telah memenuhi perintah saja itu dan membuktikan kepada dunia bahwa Rakjat dan Angkatan Perang telah melakukan kewadjiban dengan segala kegembiraan dan kerelaan hati.

Sangat pada tempatnja disini saja utjapkan terima kasih saja kepada segenap Angkatan Perang jang dengan kedjudjuran hati berkorban dan menderita dalam melakukan kewadjibannja. Moga-moga arwah mereka jang telah djatuh dipadang kehormatan mendapat kelapangan di Achirat.

Tidak berhenti-henti kita dan kawan-kawan kita diluar negeri menjatakan bahwa serangan Belanda itu adalah perang kolonial, bahwa Belanda bersalah hendak memaksakan kehendaknja kepada Bangsa Indonesia dengan kekerasan sendjata.

Dunia telah menghukum agressi Belanda, Dewan Keamanan telah mengeluarkan suaranja dan mengandjurkan supaja permusuhan jang dimulai oleh

Belanda itu dihentikan. Andjuran jang demikian itu disampaikan pula kepada Republik Indonesia.

Kita telah membuktikan dapat meladeni Belanda dan menghantam Belanda dalam pertempuran jang sengit melawan tentara kolonialnja.

Dunia tak sangsi akan sikap kebenaran Republik Indonesia. Sekarang dunia dengan menghentikan peperangan mengandjurkan djalan damai. Kita penuh kepertjajaan bahwa djalan damai adalah djalan baik dan sempurna. Kita tidak akan melepaskan kepertjajaan atas diri sendiri. Kita akan terus memelihara tenaga perdjuangan kita. Tetapi sekarang kita mengindahkan panggilan Dewan Keamanan dan akan kita tempuh djalan damai dengan penuh kepertjajaan akan kekuatan kita dan kebenaran ada dipihak kita.

Oleh sebab itu dengan mengindahkan andjuran Dewan Keamanan dan kejakinan teguh meneruskan perdjuangan kita, sekarang saja utjapkan perintah sebagai berikut:

Saja memerintahkan kepada seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia dan Rakjat jang berdjuang disamping Angkatan Perang kita, mulai saat ini tetap tinggal ditempatnja masing-masing dan menghentikan segala permusuhan.

Presiden Republik Indonesia
Panglima Tertinggi
Angkatan Perang
Republik Indonesia

SOEKARNO

Jogjakarta, 4 Agustus 1947
djam 24.00
Merdeka
Sekali Merdeka — Tetap merdeka.

c. Wakil Republik Indonesia hadlir dalam Dewan Keamanan P.B.B.

Berkenaan dengan seruan penghentian permusuhan-permusuhan di Indonesia, pemerintah kita mengirimkan sebuah pengumuman kepada Dewan Keamanan P.B.B., jang isinja sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi putusan jang diambil oleh Dewan Keamanan pada tanggal 1 Agustus dan karena hasrat jang sesungguhnja untuk mengembalikan perdamaian di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan memerintahkan penghentian permusuhan-permusuhan kepada segenap Angkatan Perang Republik, pada hari Senen malam pukul 24.00 djam Indonesia.

2. Pemerintah Republik Indonesia meminta perhatian Dewan Keamanan bahwa putusan tersebut diatas (dari D. K.) disiarkan kepada Pemerintah Republik oleh Pemerintah Belanda di Djakarta baru pada tanggal 4 Agustus 1947 pukul 01.00 djam Indonesia. Didalam menghadapi perlunja tindakan-tindakan diambil selekas-lekasnja agar supaja menundjukkan dengan sempurna perintah menghentikan permusuhan-permusuhan, maka Pemerintah Republik Indonesia menjesal sekali diambilnja penjerahan putusan Dewan Keamanan oleh pembesar-pembesar Belanda di Djakarta.

3. Didalam mendjalankan perintah penghentian permusuhan, pemerintah Republik Indonesia meminta perhatian sepenuhnja dari Dewan Keamanan terhadap beberapa kesukaran-kesukaran tehnis jang benar-benar jang harus diatasi, sebagai kurangnja waktu dan kerusakan berat pada perhubungan-perhubungan disebabkan oleh tindakan-tindakan agressi Belanda.

4. Lain dari pada itu hendaknja perlu dipertimbangkan bahwa berlainan dari pada keadaan militer pada tgl. 24 Oktober 1946 ketika buat pertama kali dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh pihak ketiga, maka dewasa ini tidak dapat ditentukan garis demarkasi jang tertentu jang memisahkan dengan djelas Angkatan Perang Republik dari Angkatan Perang Belanda, disebabkan adanja taktik pertahanan rakjat jang dilakukan oleh Tentara Nasional Republik, maka pertempuran tidak terbatas kepada garis-garis pertempuran jang tertentu.

Sebaliknja dipelbagai kota dan daerah-daerah jang diumumkan oleh pimpinan tentara Belanda sebagai kota atau daerah jang telah didudukinja, maka sehingga sekarang pasukan-pasukan Republik tetap mempertahankan kedudukannja.

5. Pemerintah Republik Indonesia ingin menjatakan kechawatirannja bahwa tidak ada djaminan sama sekali bahwa suatu cease fire order tidak akan dilanggar oleh pasukan-pasukan Belanda menurut kehendak sendiri oleh karena pengalaman selama dua tahun jang lalu telah memberi peladjaran, ketjuali penglaksanaan penghentian permusuhan-permusuhan seluruhnja dan senantiasa diamat-amati oleh pihak ketiga jang netral. Oleh karena itu Pemerintah Republik dengan sangat mendesak dikirimnja sebuah panitya, terdiri atas wakil-wakil beberapa negara dan ditundjuk oleh Dewan Keamanan ke Indonesia dengan selekas-lekasnja untuk mewudjudkan dipenuhinja penghentian permusuhan-permusuhan setjara jang effectief dan lantjar.

6. Pemerintah Republik Indonesia ingin menegaskan, bahwa perintah menghentikan permusuhan-permusuhan oleh pihak Belanda harus berarti pula penghentian segala matjam tindakan-tindakan baik oleh pembesar-pembesar militer ataupun oleh pembesar-pembesar sipil Belanda ditudjukan kepada penduduk Indonesia.

7. Achirnja Pemerintah Republik berpendapat, bahwa penghentian permusuhan-permusuhan harus diikuti oleh penarikan angkatan perang Belanda dari daerah Republik sedikitnja dibelakang garis - garis demarkasi jang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak pada tgl. 24 Oktober 1946.

*

Setelah di Indonesia dilakukan penghentian permusuhan maka pada tgl. 8 Agustus Dewan Keamanan P.B.B. melandjutkan perundingannja lagi mengenai soal pertikaian Indonesia-Belanda. Wk. Australia Kol. Hodgson berusaha supaja Filipina diperbolehkan ikut serta dengan pembitjaraan, karena soal Indonesia menurut Wk. Filipina mengenai kepentingan hidup Filipina.

Usul Australia tersebut ditolak oleh persidangan, karena tidak mendapat persetudjuan dari sekurang-kurangnja 7 negara.

Kemudian wk. India B. R. Sen memadjukan usul jang boleh dikatakan sama dengan usul-usul jang telah diadjukan oleh Pemerintah Republik jaitu: Pertama, kedua belah pihak harus menarik kembali tentaranja ke kedudukannja sebelum petjah peperangan pada tgl. 20 Djuli, karena djika tidak demikian Republik sulit sekali kedudukannja dalam perundingan. Kedua, sebuah komisi arbitrage harus dikirimkan ke Indonesia.

Selandjutnja wk. Belanda mr. E. N. van Kleffens diberi kesempatan untuk berbitjara. Ia sekali lagi mendjelaskan mengapa Nederland menganggap P.B.B. tidak berhak mentjampuri soal Indonesia. Kemudian ia memberi keterangan tentang alasan-alasan Belanda untuk mengambil tindakan polisionil. Van Kleffens menerangkan, bahwa pemerintah Republik ternjata tidak sanggup mengendalikan tindakan-tindakan agressi dari rakjatnja dan bermaksud mentjaplok Indonesia Timur dan Borneo. Van Kleffens djuga membatjakan surat dari Sukawati dan Nadjamudin jang ditudjukan kepada P.B.B. Dalam surat itu dikatakan bahwa tindakan India dan Australia adalah suatu pengertian jang

salah terhadap pokok perselisihan di Indonesia dan berarti mentjampuri urusan dalam negeri, jang mungkin membahajakan perdamaian.

Wk. Australia Kol. W. R. Hodgson memadjukan tawaran Chifley untuk mendjadi perantara dalam soal Indonesia. Surat tawaran itu diserahkannja kepada Dewan Keamanan untuk dipeladjari oleh anggauta-anggautanja.

Kemudian Ketua Dewan Keamanan Faris el Khouri membatjakan surat dari wk. P. M. dr. A. K. Gani jang menerangkan, bahwa Republik akan tunduk kepada keputusan Dewan Keamanan. Gani djuga mendesak supaja lekas dikirimkan suatu komisi arbitrage ke Indonesia.

*

Pada tanggal 10 Augustus 1947, Pemerintah Republik telah mengirimkan djawaban kepada Australia jang berisikan bahwa Pemerintah Republik menerima tawaran Australia untuk mendjadi perantara dalam usaha Dewan keamanan untuk mentjapai djalan jang sebaik-baiknja agar supaja soal Indonesia dapat diselesaikan dengan lekas dan adil.

Berhubung dengan dilangsungkan Sidang Dewan Keamanan UNO pada tanggal 12 Agustus, guna membitjarakan soal pertikaian Indonesia - Belanda, maka pada tanggal 11 Agustus Pemerintah Republik mengadjukan permintaan kepada Ketua Dewan Keamanan:

1. Pemerintah Republik Indonesia meminta perhatian Dewan Keamanan untuk suatu kenjataan, bahwa perundingan tentang pertikaian Indonesia - Belanda adalah soal mati-hidup bagi Republik.

2. Pemerintah Republik berpendapat, bahwa suatu putusan jang adil dan tepat tidak dapat diambil, kalau pihak-pihak jang bersangkutan tidak diminta keterangannja sepenuhnja.

3. Oleh karena itu Pemerintah Republik memadjukan kepada Ketua Dewan Keamanan untuk mengidzinkan wakil-wakil Republik Indonesia hadlir dalam Dewan Keamanan, supaja dapat memberikan keterangan jang diperlukan dan jang harus diketahui.

4. Pemerintah Republik Indonesia menguasakan kepada Menteri Luar Negeri Hadji Agus Salim dan Sutan Sjahrir untuk mewakili Pemerintah dan memberi keterangan sepenuhnja tentang keadaan di Indonesia.

5. Selain itu Pemerintah Republik Indonesia meminta kepada Ketua Dewan Keamanan mengidzinkan masuk 3 orang wakil lainnja jang bersama-sama dengan Hadji Agus Salim dan Sutan Sjahrir.

*

Dalam sidangnja pada tgl. 12 Agustus, Dewan Keamanan telah mengambil putusan untuk mengidzinkan pihak Indonesia mengadakan pendjelasan tentang peristiwa di Indonesia. Putusan ini diambil setelah diadakan pemungutan suara jang berkesudahan 8 suara pro (Amerika Serikat, Sovjet Rusia, Polandia, Australia, Tiongkok, Syria, Colombia dan Brazilia) dan tiga menolak (Inggeris, Perantjis dan Belgia).

Sesudah pemungutan suara, maka Sjahrir dan wakil-wakil Indonesia lainnja dipersilahkan mengikuti debat sidang Dewan Keamanan jang berlangsung 3 djam lamanja.

W. R. Hodgson, wakil dari Australia mengusulkan sekali lagi dibentuknja Komisi penjelidik UNO untuk dikirimkan ke Indonesia. Ia menegaskan, meskipun Australia dan Amerika telah menawarkan pertolongannja, tetapi suatu Panitya Dewan Keamanan tetap perlu dibentuk untuk memeriksa apakah putusan Dewan Keamanan betul-betul didjalankan selama perundingan dilangsungkan. Selandjutnja Hodgson mendesak pula supaja Dewan Keamanan memenuhi permintaan Filipina turut serta dalam pembitjaraan soal Indonesia.

Wakil Belanda van Kleffens menentang usul jang dimadjukan oleh dr. Oscar Lange dari Polandia jang minta supaja wakil-wakil Republik dikirimkan memberi keterangan tentang soal Indonesia. Dikatakannja bahwa Republik bukan negara berdaulat, katanja Republik mengakui kedaulatan dan kekuasaan Belanda dimasa peralihan. Republik menolak persetudjuan Linggadjati — kata Kleffens — tetapi tidak bisa menarik kembali barang sesuatu jang tidak dipunjainja, jakni kekuasaan.

Menurut wakil Belanda, beberapa sjarat-sjarat jang menentukan bahwa sesuatu negara itu berdaulat, jaitu pertama-tama kekuasaan dan kedua: daerah jang tertentu. Van Kleffens beranggapan bahwa Republik tidak mempunjai kekuasaan, sehingga kewadjiban-kewadjiban jang diambilnja sendiri tidak bisa dilaksanakan. Selain dari itu, Daerah Republik belum mempunjai batas-batas jang tertentu; dengan terang-terangan Republik berusaha meluaskan kekuasaannja atas seluruh Indonesia, pada hal — menurut van Kleffens — beberapa daerah tidak mau mengakui kekuasaan Republik. Ia minta pada sidang supaja wakil-wakil Indonesia Timur dan Borneo bitjara.

Wakil Rusia Andrei Gromyko menjatakan, bahwa ia menolak wakil-wakil Indonesia Timur dan Borneo ikut hadir dalam persidangan Dewan Keamanan.

Wakil Inggeris Sir Alexander Cadogan menerangkan, bahwa Inggeris belum mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan oleh karena itu tidak dapat menjokong usul supaja Indonesia ikut dalam pembitjaraan di Dewan Keamanan.

Wakil Amerika Serikat Herschell Johnson menerangkan bahwa Dewan Keamanan telah minta kepada Belanda dan Republik supaja menghentikan permusuhan, karena itu sudah selajaknja kalau kedua belah pihak didengar keterangannja. Meskipun Amerika Serikat belum bersedia menjatakan pendapatnja tentang kedaulatan Republik, namun ia beranggapan bahwa Republik berhak pula untuk memberi pendjelasan.

Setelah Johnson menerangkan bahwa sidang tidak akan mempersoalkan apakah Republik sudah berdaulat, maka van Kleffens menjatakan tidak keberatan dengan ikut berbitjaranja Sjahrir, tetapi van Kleffens berkeberatan kalau Sjahrir disebut duta Republik.

Sesudah dua anggauta tetap Inggeris dan Perantjis menjokong suara anti dari Belgia, maka Ketua Dewan Keamanan Faris el Khouri menegaskan, bahwa persidangan itu hanja mengenai tjara bekerdja dan karena itu hak veto tidak bisa didjalankan.

*

Dalam kelandjutan sidang Dewan Keamanan untuk membitjarakan soal pertikaian Indonesia Belanda pada hari tanggal 14 Agustus, Sutan Sjahrir sebagai wakil Republik Indonesia buat pertama kali angkat bitjara dalam Dewan Keamanan.

Ia menuntut supaja tentara Belanda ditarik seluruhnja dari daerah Republik. Ia minta pula supaja suatu komisi pengawas dikirimkan ke Indonesia untuk mengawasi penglaksanaan perintah penghentian permusuhan dan supaja diadakan arbitrage oleh pihak ketiga jang tidak berpihak.

Terlebih dahulu wakil Australia kolonel W. R. Hodgson mengusulkan lagi supaja wakil Filipina dibolehkan ikut dalam pembitjaraan. Usul tersebut diterima dengan 9 suara, Sovjet Rusia dan Polandia tidak memberikan suaranja.

Inggeris, Perantjis dan Belgia menjokong usul Australia dengan maksud membuka djalan supaja Indonesia - Timur dan Borneo dibolehkan hadir dalam persidangan. Usul jang achir ini dimadjukan oleh Van Langenhove wakil Belgia. Perdebatan hebat terdjadi selama 2 djam. Colombia menolak hadirnja kedua daerah tersebut, karena nanti akan terdjadi perbedaan paham besar antara mereka dan wakil-wakil Republik sehingga akan menimbulkan kekatjauan dalam debat di Dewan Keamanan.

Lagi pula antara Republik dan kedua daerah tersebut terdapat perbedaan dasar besar. Indonesia Timur dan Borneo Barat berdaulat dan sama tinggi deradjatnja dengan Republik hanja dimata Belanda. Wakil Colombia memperingatkan bahwa Panitya Ekonomi dan Sosial UNO mempunjai pendirian lain, terbukti mereka mengundang Republik supaja hadir dalam sidangnja di Havana untuk membitjarakan soal perburuhan dan kesempatan pekerdjaan. Republik sekarang terlibat dalam pergolakan internasional jang membahajakan perdamaian; ini bukan halnja dengan Indonesia Timur dan Borneo jang sama sekali tidak berkepentingan.

Wakil Belanda van Kleffens menegaskan, bahwa Indonesia Timur dan Borneo Barat diakui Belanda sebagai sama tinggi deradjatnja dengan Republik. Atas dasar itu, maka kedua daerah itu harus diterima dalam Dewan Keamanan.

Ketua Dewan Keamanan Faris el Khouri kemudian menundjukkan pasal 39 dari peraturan Dewan Keamanan, menurut pasal mana, wakil-wakil Indonesia Timur dan Borneo Barat hanja dapat diterima sebagai orang-orang jang diminta oleh Dewan Keamanan, supaja memberi beberapa keterangan pendjelasan. Sir Alexander Cadogan dari Inggeris sekali lagi menjatakan keberatannja atas dimasukkannja wakil-wakil Republik dalam Dewan Keamanan. Hal itu dianggap oleh pemerintah Inggeris sebagai pelanggaran Piagam Perdamaian. Karena wakil Republik sekarang sudah dibolehkan berbitjara, maka dari sudut keadilan wakil-wakil kedua Daerah lainnja harus diberi idzin pula untuk hadir.

Kol. Hodgson dari Australia membantah keterangan Cadogan itu dan mempertahankan hak Republik untuk memberi pendjelasan dalam Dewan Keamanan.

Wakil Sovjet Rusia Gromyko menerangkan, bahwa wakil-wakil Indonesia Timur dan Borneo tidak bisa memberi suara dari rakjat jang bebas. Kemudian ia membatjakan surat Nadjamuddin jang menjetudjui tindakan militer Belanda, jang sebenarnja berarti peperangan. Meskipun demikian Belanda dibolehkan hadir, kata Gromyko. Wakil Tiongkok Tjiang menjokong Australia untuk mengirim komisi pengawas ke Indonesia. Wakil Tiongkok mendesak kepada Dewan Keamanan untuk menjampingkan dulu soal-soal jang bersifat juridis dan menggunakan djalan jang praktis untuk menghadapi peristiwa Indonesia. Kalau tidak segera dilakukan sesuatu usaha, maka semua ichtiar UNO ada dalam bahaja.

Ketika diadakan pemungutan suara, maka ternjata, bahwa Amerika Serikat, Inggeris dan Perantjis menjokong usul Belgia supaja wakil-wakil Indonesia Timur dan Borneo dibolehkan hadir.

Tapi usul itu ditolak oleh wakil 7 negara lainnja. Sesudah itu Sutan Sjahrir mengutjapkan pidato selama kira-kira ½ djam. Ia membentangkan sedjarah pendjadjahan Belanda di Indonesia. Diterangkannja, bahwa diabad ke 14 rakjat Indonesia merupakan suatu negara jang meliputi segenap pulau-pulau di Asia Tenggara. Tetapi sedjarah Indonesia itu kemudian bertolak kearah jang tragis semendjak permulaan pemerintah kolonial Belanda. Penindasan dan penghisapan Belanda bukan sadja menjebabkan kemunduran dan keruntuhan Tanah air kami — kata Sjahrir — melainkan djuga merendahkan kedudukannja jang gemilang mendjadi tanah djadjahan jang lemah dan sengsara.

Kemudian Sjahrir mengisahkan kedjadian-kedjadian jang menjebabkan terdjadinja pertempuran jang achirnja dihentikan oleh perintah penghentian permusuhan dari Dewan Keamanan.

Sjahrir menjangkal bahwa Republik didirikan oleh Djepang. Diterangkannja, bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah hasil perdjuangan kaum kebangsaan. Ia menjatakan, bahwa Belanda hendak memaksa pihak Indonesia menerima interpretasi Belanda mengenai Linggadjati dan bahwa Belanda atjapkali mengabaikan pasal mengenai arbitrage jang terdapat dalam persetudjuan itu. Tentara Belanda melebihi djumlah jang disetudjui dalam Linggadjati dengan 30.000. Pun bertentangan sekali dengan Linggadjati, Belanda mendirikan negara-negara di Indonesia Timur dan Borneo.

Sjahrir lalu menuntut 1) tentara Belanda ditarik seluruhnja dari daerah Republik, 2) diadakan komisi pengawas dan 3) dibentuk komisi arbitrage jang tidak berpihak.

Achirnja Sjahrir menegaskan lagi, bahwa Pemerintah Indonesia akan menerima tiap arbitrage jang tidak berpihak dan menunggu putusan Dewan Keamanan.

Ia memudji putusan Dewan Keamanan untuk menghentikan permusuhan, tetapi selama tentara Belanda masih ada berarti antjaman kedaulatan Republik dan perdamaian dunia.

Kemudian van Kleffens minta supaja sidang ditunda dulu karena ia hendak memberi keterangan jang penting. Permintaan itu ditolak.

*

Tanggal 15 Agustus 1947 debat mengenai peristiwa Indonesia — Belanda di sidang Dewan Keamanan dilandjutkan. Wakil Belanda van Kleffens menurut berita U. P. minta „supaja Dewan Keamanan tidak tjampur tangan dalam peristiwa Indonesia selama satu negara jang tidak berpihak menjelidiki pertikaian antara Belanda dan Republik Indonesia".

Van Kleffens dengan pedas mentjela usul intervensi United Nations dan menjatakan, bahwa „Nederland tidak membutuhkan turut sertanja United Nations melakukan penjelidikan atau perantaraan".

Van Kleffens katakan, bahwa United Nations tidak mempunjai hak juridis sama sekali dalam peristiwa Indonesia. Sekali lagi ia katakan, bahwa kekerasan jang kini dipergunakan dalam pertikaian Indonesia — Belanda adalah soal intern dalam keradjaan Belanda.

Van Kleffens menerangkan, bahwa pemerintah Belanda bersedia untuk memadjukan usul-usul kepada Republik tentang pembentukan suatu komisi jaitu :

1). Republik dan Nederland masing-masing menundjuk satu negara. Negara-negara ini kemudian memilih satu negara jang dianggap mereka sebagai tidak berpihak. Negara jang ketiga ini mengirimkan beberapa orang ke Indonesia untuk memberi laporan, jang harus diumumkan seluruhnja. Selandjutnja negara jang ketiga itu dapat memberi bantuan untuk mengadakan pembitjaraan lagi antara kedua belah pihak.

2). Nederland mengusulkan supaja semua konsul di Djakarta diberi instruksi oleh pemerintahnja masing-masing untuk segera memberi laporan tentang keadaan di Djawa, Sumatera dan Madura.

Van Kleffens kemudian menerangkan, bahwa djika perundingan dimulai lagi dan terdjadi perdebatan tentang soal federasi, maka wakil-wakil negara-negara bagian Indonesia harus diundang untuk menghadiri perundingan.

Dengan menolak hadirnja wakil-wakil Indonesia Timur dan Borneo Barat, maka Dewan Keamanan menurut van Kleffens, sekarang terbuka untuk tuduhan-tuduhan diantaranja seperti jang dikatakan oleh wakil Belgia, bahwa Dewan Keamanan mempergunakan 2 matjam pertimbangan.

Ia membantah uraian Sutan Sjahrir tentang sedjarah kolonial Belanda. Belanda tidak pernah menentang tjita-tjita kemerdekaan Indonesia, kata van Kleffens, tetapi semata-mata menentang kekatjauan jang tidak pernah dapat di lenjapkan oleh Pemerintah Republik. Van Kleffens menegaskan, bahwa urusan-urusan Republik dikerdjakan di Jogja oleh orang-orang jang katanja selama pendudukan Djepang menjerahkan beribu-ribu orang kepada musuh untuk mendjadi romusha. Van Kleffens memperingatkan djika Dewan Keamanan membantu pemerintah Republik Indonesia dalam bentuknja jang sekarang ini, maka Dewan Keamanan akan bertanggung djawab atas kedjadian-kedjadian dimasa datang apabila anasir-anasir jang liar mendapat kekuasaan lagi didaerah jang luas.

Van Kleffens menerangkan, ia sendiri akan memberi keterangan jang sebenar-benarnja tentang keadaan di Republik, ditindjau dari katjamata jang tidak berwarna sebagai katjamata Sjahrir.

Pendirian van Kleffens ditentang oleh wakil utusan Polandia Julius Katz Suchy. Ia katakan bahwa van Kleffens berusaha untuk melampaui United Nations, wakil Polandia menaruh keberatan tentang diadjukannja soal kompetensi dari Dewan Keamanan. Ia menjebut usul - usul Belanda sebagai tidak bisa diterima dan memadjukan mosi, supaja Dewan membentuk sebuah komisi sebagai badan perantara dari arbitrage.

Wakil Filipina Romulo menentang pendirian van Kleffens dan mendesak supaja Dewan Keamanan segera melakukan tindakan, karena banjak orang telah mati terbunuh dan banjak kekajaan hantjur. Iapun menentang pendirian van Kleffens, bahwa soal ini soal dalam negeri sadja. Negara Indonesia sebagai negara berkedudukan lebih baik dari pada Filipina, kata Romulo, karena Filipina hanja dibolehkan masuk mendjadi anggauta UNO sebagai milik Amerika Serikat

Iapun menjokong usul Australia untuk membentuk komisi Dewan Keamanan untuk dikirimkan ke Indonesia.

Ketua Dewan Keamanan mengusulkan supaja soal kompetensi dimasukkan atjara pembitjaraan Dewan.

Kemudian sidang ditunda.

*

Debat tentang soal Indonesia di Dewan Keamanan dilandjutkan tanggal 17 Agustus.

Wakil Polandia mengusulkan supaja segera dibentuk komisi arbitrage untuk menjelesaikan pertikaian Indonesia Belanda,. Usul tersebut disokong oleh Kol. Hodgson dari Australia dengan sjarat kedua belah pihak menundjukkan satu arbiter dan Dewan Keamanan djuga satu arbiter.

Wakil Tiongkok menjokong usul Belanda, jaitu supaja konsul-konsul luar negeri di Djakarta menjusun laporan tentang keadaan di Indonesia. Iapun setudju bahwa Indonesia dan Belanda masing-masing menundjukkan satu negara jang kemudian bersama-sama menundjuk satu negara tidak berpihak untuk menjelidiki soal Indonesia.

Wakil Sovjet Andrei Gromyko mengeritik usaha Amerika Serikat untuk bertindak sendiri sebagai arbiter dalam peristiwa Indonesia - Belanda, karena tindakan demikian tak melalui UNO.

Selandjutnja Gromyko mengandjurkan kepada Dewan 1) membentuk Komisi penjelidik ; 2) membentuk badan arbitrage. Kelihatannja, demikian Gromyko, Amerika Serikat tak menghendaki akan adanja suatu arbitrage dari UNO. Ini mungkin karena Amerika mempunjai banjak kepentingan-kepentingan ekonomi di Indonesia, kata Gromyko. Wakil Amerika Herschell Johnson memberi pendjelasan arti penawaran pertolongan Amerika dalam perselisihan Indonesia — Belanda. Amerika sama sekali tidak mempunjai angan-angan untuk arbitrage dan hanja mentjari djalan untuk mengandjurkan supaja Belanda dan Indonesia berunding lagi. Johnson minta supaja arbitrage dipisahkan dari putusan Dewan Keamanan untuk memerintahkan penghentian tembak-menembak.

Sutan Sjahrir kemudian menerangkan, sebagai akibat serangan-serangan hebat Belanda terhadap Republik Indonesia, daerah-daerah Republik jang di duduki Belanda itu dalam keadaan buruk. Tetapi wakil Belanda mengemukakan bahwa agressi Belanda itu adalah akibat dari keadaan dewasa ini didaerah-daerah jang diduduki oleh Belanda.

Kita sanggup mengemukakan bukti-bukti dimuka Dewan Keamanan, bahwa serdadu-serdadu Belanda melakukan kekedjaman dan melanggar segala peraturan

dalam berbagai pertempuran di Indonesia. Njatalah, bahwa pemerintah Belanda menjesal karena adanja perintah dari Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran di Indonesia. Djelas pula, bahwa gerakan militer Belanda itu ditudjukan untuk menghantjurkan Republik Indonesia.

Keinginan sangat dari pihak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan kami tak dapat dimengerti dan pula tak dapat memberi kejakinan, kata Sjahrir.

Semua itu dapat disimpulkan bahwa Belanda dengan sepenuhnja bermaksud untuk menghantjurkan Republik Indonesia. Dalam keadaan demikian, kita tak dapat merasa aman sebelum tentara Belanda meninggalkan Indonesia.

Maka dari itu dengan sangat saja minta kepada Dewan Keamanan supaja mengambil tindakan-tindakan jang tjepat untuk membebaskan kita dari antjaman gerakan militer Belanda dewasa ini. Sesudah keterangan Sjahrir, sidang ditunda dan sementara itu Ketua mengusulkan supaja wakil-wakil Australia, Polandia dan Tiongkok mengadakan konperensi untuk menjatukan usul-usulnja.

*

Dalam sidangnja tanggal 22 Agustus Ketua Dewan Keamanan mempersilahkan wakil Belanda van Kleffens berbitjara. Dewan Keamanan harus insjaf akan kegentingan keadaan di Indonesia. Katanja, Dewan Keamanan djangan membuat kesalahan lagi dengan menerima tuntutan-tuntutan Republik. Djanganlah pertjaja betul kepada Republik jang menurut van Kleffens sama sekali tidak mempunjai kekuasaan. Selandjutnja van Kleffens berkata, bahwa usul-usul Belanda mendjadi djaminan baik untuk Dewan Keamanan maupun untuk Indonesia. Dan bertanja apakah Dewan akan menggantungkan nasib berdjuta-djuta rakjat kepada Republik jang menurut van Kleffens bukan sesuatu negara. Achirnja ia menegaskan, bahwa wakil-wakil NIT dan Borneo Barat mempunjai kepentingan.

Kemudian wakil Belgia dengan resmi mengusulkan, supaja dua daerah itu diidzinkan menghadiri sidang dan diminta dianggap sederadjat dengan Republik Indonesia.

Usul Belgia tersebut ditolak.

Wakil Rusia menuduh, bahwa Belanda mentjoba mengulur-ulurkan waktu.

Wakil India menerangkan, bahwa sikap Belanda itu memang sikap jang biasa diambil oleh suatu negara pendjadjah.

*

Tanggal 26 Agustus Dewan Keamanan melandjutkan sidangnja membitjarakan soal Indonesia.

Pada permulaan sidang Sjahrir menegaskan dalam pidatonja, bahwa keadaan sangat mendesak, karena Belanda telah mulai lagi gerakan agressinja setjara besar-besaran. Ia minta supaja segera dikirimkan suatu komisi internasional untuk mengawasi penglaksanaan perintah penghentian tembak-menembak. Selain dari itu ia minta supaja Dewan Keamanan mendjadi arbiter terachir dalam pertikaian Indonesia — Belanda.

Sesudah Sjahrir berbitjara, wakil Belgia mendjelaskan lagi resolusi jang diadjukannja, ialah supaja Dewan Keamanan lebih dahulu menetapkan jurisdictie Dewan Keamanan dalam soal Indonesia, sebelum Dewan mengambil putusannja. Penetapan jurisdictie itu sudah harus ditentukan lebih dahulu sebagai sjarat mutlak, katanja dan mengusulkan supaja permintaannja itu dibitjarakan lebih dahulu dari pada resolusi-resolusi lainnja.

Setelah Dewan membitjarakan usul Belgia itu dalam waktu jang pendek, dimana wakil Rusia Gromyko memperdengarkan suaranja, jang menerangkan bahwa resolusi-resolusi lainnja dibitjarakan dulu dan sesudah itu baru usul

Belgia, maka usul Belgia itu ditolak dengan suara 9 blanko dan 2 pro. Sesudah itu wakil Rusia mengusulkan supaja dibentuk sebuah komisi Dewan Keamanan terdiri atas 11 negara jang akan mengawasi penglaksanaan penghentian tembak-menembak di Indonesia. Usul itu disetudjui oleh 7 negara, 2 negara blanko (Inggeris, Tiongkok) dan 2 tidak setudju (Perantjis dan Belgia). Tetapi Perantjis menggunakan hak vetonja, hingga usul Rusia dibatalkan.

Sesudah veto Perantjis diutjapkan, maka sidang mengadakan pemungutan suara tentang usul kompromi Australia – Tiongkok untuk memerintahkan kepada konsul-konsul Djenderal jang ada di Djakarta supaja melaporkan hasil perintah penghentian permusuhan di Indonesia dan sebab-sebab perintah itu tidak diturut. Jang setudju 7 dan 4 blanko. Sekalipun Rusia satu-satunja negara Besar jang tidak mempunjai konsul di Djakarta, tapi dalam hal ini tidak menggunakan vetonja.

Amerika kemudian mengusulkan, supaja Dewan Keamanan menawarkan kehendak baiknja (good offices) kepada Belanda dan Indonesia djika kedua belah pihak menghendakinja. Usul ini jalah Republik dan Belanda masing-masing menundjuk satu negara sedang kedua negara itu memilih negara jang ketiga. Ketiga negara ini akan mendjadi perantara dalam pertikaian Indonesia — Belanda. Usul ini diterima dengan 8 suara. Rusia, Polandia dan Syria blanko.

*

Sebagai penghubung antara Pemerintah dan para konsul djenderal jang hendak melakukan pekerdjaannja memberi laporan tentang keadaan sesudah perintah penghentian permusuhan dikeluarkan, telah dibentuk suatu panitya, jang diketuai oleh wakil P. M. Drs. Setiadjid.

Sebagai sekretaris ditundjuk S. Udin. Anggauta - anggautanja terdiri atas wakil Kementerian Penerangan Mr. Sudjarwo dan Amir Dahlan (marhum), Kementerian Dalam Negeri Mr. Hermani, Kementerian Pertahanan Arudji, Kementerian Perhubungan Rachim, Kementerian Negara Urusan Peranakan Tabrani dan Sumarsono, Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta KRT Honggowongso, Sekretaris Negara Mr. A.G. Pringgodigdo, Persatuan Wartawan Usmar Ismail.

*

Kabinet Republik dalam sidangnja pada tanggal 6 September 1947 telah memutuskan untuk menjampaikan kepada pemerintah Commonwealth of Australia supaja suka mendjadi anggauta dari Komisi tiga negara untuk memenuhi putusan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 26 Agustus 1947.

Sementara itu Belanda telah memilih Belgia dan dengan demikian maka Australia bersama dengan Belgia menundjuk negara jang ketiga dalam komisi 3 negara.

Dalam pada itu wakil konsul djenderal Inggeris E. T. Labert jang bersama-sama dengan konsul djenderal Belgia v. d. Stichelen sekembalinja di Djakarta dari perdjalanannja ke Jogja, menerangkan di Djakarta, bahwa 6 konsul djenderal di Djakarta telah sepakat meminta kepada pemerintah mereka masing-masing, supaja mengirimkan sebuah misi militer ke Indonesia untuk membantu mereka dalam mengawasi perintah penghentian permusuhan dari Dewan Keamanan.

d. Komisi Tiga Negara

Sebagai telah dikemukakan diatas, Belanda telah memilih Belgia sebagai anggauta K.T.N., sedangkan Republik memilih Australia. Pada tanggal 19 September 1947 Australia dan Belgia telah memilih Amerika Serikat sebagai

negara jang ketiga dalam Komisi Tiga Negara. Oleh pemerintahnja masing-masing telah ditetapkan pula wakilnja jang duduk dalam Komisi tersebut jalah:

Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, Australia diwakili oleh Richard Kirby, sedang Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham.

Untuk menghadapi Komisi Tiga Negara, maka Dewan Menteri dalam sidangnja tanggal 24 September 1947 telah membentuk sebuah delegasi jang susunannja sebagai berikut:

1. Mr. Amir Sjarifuddin ketua; 2. Mr. Ali Sastroamidjojo wakil ketua; 3. Dr. Tjoa Sik Ien; 4. Mr. Moh Rum; 5. H. A. Salim; 6. Mr. Nasrun sebagai anggauta dan Ir. Djuanda, Drs. Setiadjid, Mr. Latuharhary, Moh. Natsir sebagai anggauta tjadangan.

Penasehat-Penasehat delegasi jalah: 1. Kol. Simatupang, 2. Komodore Surjadarma, 3. Komodore Muda Halim Perdanakusumah, 4. Kol. Adam, 5. Dj. Maj. Suwardi, 6. Ir. Abdulkarim, 7. Ir. Surjomihardjo, 8. Mr. Hermani, 9. Suwirjo, 10. Ir. Saksono, 11. Dr. A. K. Gani, 12. Ir. Surachman, 13. Mr. A. K. Pringgodigdo, 14. Ir. Sosrohadikusumo, 15. R. S. Sukanto, 16. Prof. Dr. Sutomo Tjokronegoro, 17. Dr. Surono, 18. Mr. R. M. Marsoro, 19. Ruslan Abdulgani, 20. R. Rudjito, 21. Gondopratomo, 22. Sundjoto, 23. Prof. Mr. Sunarjo Kolopaking, 24. Mr. Sumarno, 25. Achmad Notonegoro, 26. Mr. Slamet Sutikno, 27. Mr. Abdulrachim Kartadjumena, 28. R. M. Margono, 29. Mr. Dr. Kusumahatmadja (marhum), 30. RAA Wiranatakusumah, 31. Mr. Tadjudin Noor dan 32. Mr. Santosa (marhum).

Sebagai sekretaris jalah Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Mr. Sunarjo dan Dr. Ir. Udin.

*

Pada tanggal 27 - 10 - 1947 petang djam 14.30 telah tiba dilapangan terbang Kemajoran Djakarta, Komisi Tiga Negara Dewan Keamanan jang terdiri atas Dr. Frank P. Graham (Amerika), Richard Kirby (Australia) dan Paul van Zeeland (Belgia).

Mereka disambut oleh Wakil P. M. Dr. Gani serta pembesar-pembesar lainnja dari pihak Republik dan dari pihak Belanda tampak Dr. van Mook, Dr. Idenburg, van Vredenburgh dan lain-lainnja.

Selandjutnja pada tanggal 29 Oktober pagi djam 9.30 Komisi Tiga Negara (K. T. N.) bersama stafnja terdiri atas 14 orang, serta Wakil P. M. Dr. A. K. Gani, Menteri Muda Luar Negeri Mr. Tamzil, Dr. Tjoa Sik Ien tiba di Jogjakarta.

Kedatangan mereka disambut oleh Wakil P. M. Drs. Setiadjid, Mr. Ali Sastroamidjojo, S. P. Sultan Hamengku Buwono, Sekr. Negara A. G. Pringgodigdo dan Sekr. Delegasi Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo.

Siang hari djam 12.00 K.T.N. mengadakan perkenalan dengan Presiden, dan djam 15.00 dengan Kabinet.

Sore harinja djam 17.30 K.T.N. mengadakan pembitjaraan dengan Delegasi Indonesia, jang diketuai oleh P. M. Amir Sjarifuddin untuk mendengar kehendak Republik tentang tempat dan procedure perundingan jang akan diadakan antara Indonesia dan Belanda dengan perantaraan K. T. N.

Pembitjaraan mengenai soal untuk menetapkan suatu tempat jang netral atau jang disetudjui oleh kedua belah pihak, dimana nanti diadakan pembitjaraan-pembitjaraan jang mengenai pokok soalnja antara Delegasi Indonesia dan Belanda.

Tanggal 30 Oktober K.T.N. kembali ke Djakarta. Sementara itu tanggal 29 Oktober H. A. Salim telah tiba kembali di Indonesia dari perdjalanannja ke Luar Negeri.

*

Meskipun mengenai penjelesaian masalah Indonesia telah dikuasakan kepada K. T. N., namun Dewan Keamanan PBB masih terus mengikuti dan mengawasi perkembangan-perkembangan di Indonesia.

Pada sidangnja tanggal 1 Nopember 1947 Dewan Keamanan melandjutkan debat mengenai pertikaian soal Indonesia — Belanda.

Sidang pada waktu itu diketuai oleh Warren Austin (Amerika) dan berachir dengan diterimanja resolusi Amerika dengan 7 suara pro, 1 kontra (Polandia) dan 3 blanko (Rusia, Syria dan Colombo).

Adapun usul Amerika itu antara lain berbunji sebagai berikut:

Kedua pihak di Indonesia tidak berusaha mendapat persetudjuan, bagai mana melaksanakan akan resolusi D.K. tanggal 4 Agustus. Diandjurkan kepada kedua pihak segera berunding, langsung atau dengan perantaraan K.T.N., bagaimana dapat melaksanankan putusan Dewan Keamanan bulan Agustus dan dalam menunggu keputusan, semua tindakan-tindakan jang melanggar putusan dihentikan dan mengambil tidakan guna mendjamin djiwa dan milik.

Kepada K. T. N. djuga diminta, supaja membantu kepada kedua pihak mentjapai persetudjuan dan supaja Komisi Konsul serta pembantu militernja suka memberi bantuan kepada K. T. N.

Resolusi 1 Nopember harus diartikan sebagai berikut:

Pemakaian kekuatan militer oleh salah satu pihak untuk meluaskan daerah mereka sesudah 4 Agustus, dilarang.

*

Dr. v. Mook telah menundjuk panitya sementara untuk mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan dengan Komisi Tiga Negara. Panitya terdiri dari: Abdulkadir Widjojoatmodjo (jang menurut Belanda, katanja djuga mewakili bangsa Indonesia jang bukan Republikein di Djawa), Jhr. van Vredenburgh, Kepala bag. politik Kemt. Luar Negeri Belanda, dr. Chr. Soumokil Menteri Kehakiman N.I.T., Pangeran Kartanegara dan Zulkarnain.

Dapat dikemukakan disini, bahwa sedjak Dewan Keamanan pada tanggal 1 Nopember 1947 menerima usul kompremi jang diadjukan oleh Amerika, maka kedudukan K.T.N. bukannja lagi good offices sadja (sekedar tawaran bantuan) tapi sudah merupakan badan jang memberikan mediation (perantaraan).

Guna mengadakan kontak jang tetap dengan Pemerintah Republik, maka K.T.N. telah menetapkan 2 orang anggauta stafnja di Jogjakarta. Susunan panitya penghubung Komisi Tiga Negara itu berganti tiap kali, Komisi Tiga Negara berganti Ketua, dan disusun tiap kali seorang wakil dari Ketua Komisi pada minggu itu dan seorang wakil dari Ketua Komisi pada minggu jang akan datang.

Guna melaksanakan penghentian permusuhan sesuai dengan putusan Dewan Keamanan tanggal 1 Nopember, maka pemerintah R. I. pada tanggal 5 Nopember 1947 telah membentuk sebuah panitya istimewa.

Dalam panitya tersebut duduk 2 orang dari kalangan sipil, jaitu Menteri Kesehatan Dr. Leimena dan Menteri Muda Dalam Negeri Mr. Abdulmadjid dan 4 orang dari kalangan militer, jaitu Let. Djendr. Urip Sumohardjo, Djendr. Maj. Didi Kartasasmita, Kol. Simbolon dan Letn. Kol. Bustami.

*

Sementara itu Kabinet Amir pada tanggal 11 Nopember 1947 mengalami perubahan. Ini disebabkan berhubung dengan kesediaan Masjumi untuk duduk dalam Kabinet.

Adapun susunan Kabinet jang baru adalah sebagai berikut:

1.	P.M. Mr. Amir Sjarifuddin	Partai Sosialis
2.	Wk. P. M. I Mr. Sjamsudin	Masjumi

3.	Wk. P. M. II W. Wondoamiseno	P. S. I. I.
4.	Wk. P. M. III Drs. Setiadjid	P. B. I.
5.	Wk. P. M. IV Dr. A. K. Gani	P. N. I.
6.	Menteri D. N. Mr. Moh. Roem	Masjumi
7.	„ Muda D. N. Mr. Abdulmadjid Djojoadiningrat	Partai Sosialis
8.	„ Luar Negeri H.A. Salim	P. S. I. I.
9.	„ Muda L.N. Mr. Tamzil	Partai Sosialis
10.	„ Kemakmuran Dr. A. K. Gani	P. N. I.
11.	„ Muda Kemakmuran I I. J. Kasimo	P. K. R. I.
12.	„ Muda Kemakmuran II Dr. A. Tjokronegoro	Partai Sosialis
13.	„ Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin	Partai Sosialis
14.	„ Muda Pertahanan Arudji Kartawinata	P. S. I. I.
15.	„ P.P. dan K. Mr. Ali Sastroamidjojo	P. N. I.
16.	„ Keuangan Mr. A. A. Maramis	P. N. I.
17.	„ Muda Keuangan Dr. Ong Eng Die	—
18.	„ Penerangan Sahbudin Latif	P. S. I. I.
19.	„ Muda Penerangan Ir. Setiadi	Pesindo
20.	„ Perhubungan Ir. Djuanda	—
21.	„ Pekerdjaan Umum Ir. Laoh	P. N. I.
22.	„ Kesehatan Dr. J. Leimena	Parkindo
23.	„ Muda Kesehatan Dr. Satrijo	P. B. I.
24.	„ Sosial Suprodjo	P. B. I.
25.	„ Muda Sosial Sukoso Wirjoseputro	P. S. I. I.
26.	„ Kehakiman Mr. Susanto	P. N. I.
27.	„ Muda Kehakiman Mr. Kasman Singodimedjo	Masjumi
28.	„ Agama K. H. Maskur	Masjumi
29.	„ Perburuhan S.K. Trimurti	P. B. I.
30.	„ Muda Perburuhan Mr. Wilopo	P. N. I.
31.	„ Negara S.P. Hamengku Buwono IX	—
32.	„ „ Wikana	Badan Kongres Pemuda
33.	„ „ Siauw Giok Tjwan	—
34.	„ „ Hendromartono	Partai Sosialis
35.	„ „ Drs. Maruto Darusman	P. K. I.
36.	„ „ Sojas	B. T. I.
37.	„ „ Anwar Tjokroaminoto	Masjumi

*

Disamping mempersoalkan tentang penghentian tembak-menembak, maka masalah jang lama diperbintjangkan jalah dimana tempat perundingan nanti diadakan. Pihak Republik mengusulkan, supaja tempat perundingan itu diadakan ditempat jang netral, sedangkan pihak Belanda semula mengusulkan supaja tempat perundingan itu Djakarta atau salah satu tempat di Kalimantan. Begitu pula telah ada 8 tempat jang ditundjuk oleh kedua belah pihak, misalnja Singapore, Manila, Bangkok, Port Darwin bahkan di India, tapi kesemuanja itu tidak mendapat ketjotjokan oleh kedua belah pihak. Achirnja diusulkan supaja perundingan itu diadakan diatas kapal.

Demikianlah pada tanggal 21 Nopember Amerika Serikat telah menjediakan kapal pengangkut tentara Amerika Serikat „Renville" untuk tempat perundingan, jang pada waktu itu berada di dekat Sjanghai.

Dan pada tanggal 2 Desember kapal tersebut telah tiba dipelabuhan Tandjung Priok.

Sementara itu Belanda telah mengumumkan tentang susunan delegasi Belanda jang diketuai oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo (Direktur Djenderal urusan umum). Wakil Ketuanja jalah: Jhr. Mr. H.A.L. van Vredenburgh (duta istimewa dengan mempunjai kuasa sebagai menteri, merangkap kepala bagian politik Kementerian L. N. Belanda.

Para anggauta jalah : Dr. P. J. Koets, Mr. Chr. Somoukil, Mr. Tengku Zulkarnen, Mr. Adi Pangeran Kartanegara, Mr. Masjarie Gelar Datuk Bendaharo, Mr. A. H. van Ophuysen, Thio Thiam Tjiong, Penulis : Jhr. Mr. A. Th. Baud, wakil penulis Mr. Staub. Pembantu-pembantu : Mr. Spranges, R. Mochtar dan Harris Sitompul.

Selandjutnja dikemukakan bahwa Delegasi Indonesia jang dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin pada tanggal 6 Desember dengan naik pesawat terbang telah tiba di Djakarta.

Perundingan-perundingan baru antara Republik dan Belanda dibawah pengawasan Komisi Tiga Negara, pada tanggal 8 Desember 1947 djam 10.15 telah dimulai dengan resmi bertempat diatas dek tengah kapal Amerika Renville.

Dibelakang medja K.T.N. berkibar bendera-bendera Australia, Amerika Serikat dan Belgia.

Sidang dibuka oleh Sekretaris K.T.N. Narayanan jang bertindak sebagai sekretaris djenderal dari P.B.B. Ketua jalah wakil Belgia Herremans jang mewakili Paul van Zeeland.

Kapten kapal „Renville" Tyree mengutjap selamat datang atas nama pemerintah Amerika Serikat. Ia menjatakan harapannja sehabis kewadjibannja di perairan Indonesia dapat memberi-tahukan kepada ketuanja, bahwa kapal „Renville" telah melakukan misinja dengan baik.

Prof. Frank P. Graham, wakil Amerika dalam K.T.N. menegaskan, bahwa para anggauta Komisi bukanlah „dukun adjaib" jang membawa obat jang mandjur dari Lake Succes. Tetapi mereka pertjaja akan keadjaiban jang timbul dari djiwa manusia. Graham mengingatkan atas kewadjiban kapal Renville dalam pertempurannja melawan Djepang dan menjatakan harapannja bahwa djuga kewadjibannja jang sekarang — kewadjiban membawa pengobatan serta good will — akan berhasil pula.

Hakim Kirby, wakil Australia mengutjapkan selamat datang kepada Herremans. Kemudian mengingatkan betapa pentingnja kewadjiban kapal Renville dalam perundingan itu, Kirby selandjutnja mengusulkan, supaja perundingan-perundingan diatas kapal „Renville" itu seterusnja akan dinamakan „Perundingan - Renville".

* * *

10. PERUNDINGAN RENVILLE

Pidato Mr. Amir Sjarifuddin, Perdana Menteri Republik Indonesia, pada tg. 8 Desember 1947 di U.S.S. „Renville"

TUAN Ketua Committee of Good Offices dari pada Security Council.

1. Sudah 38 hari liwat sesudah Security Council mengambil putusan jang mengandung sedjarah itu didalam pertikaian Indonesia — Belanda mengandung sedjarah — bukan sadja buat kepulauan dan rakjat Indonesia tapi djuga buat negara-negara di Asia dan Australia, bahkan djuga buat seluruh dunia ini.
Dengan tepat pernah telah dikatakan bahwa penjelesaian pertikaian Indonesia ini adalah „strategic in time" serta pula letaknja Indonesia ini „strategic in place".
Sesudah oleh pihak jang kita hormati dan hargai itu jang demikian diutjapkan, maka tidak perlu lagi saja dengan pandjang lebar menguraikan pentingnja penjelesaian pertikaian ini baik bagi rakjat Indonesia, bagi rakjat Belanda, maupun untuk kepentingan kemanusiaan.
2. Pemerintah Republik merasa girang bahwa sekarang telah terbuka kesempatan, berkat usaha Committee of Good Offices, menjelesaikan pertikaian Indonesia—Belanda ini. Bahwa baru pada hari ini, jaitu sesudah liwat 38 hari sesudah diumumkan resolusi Security Council dalam pertikaian Indonesia—Belanda itu, patut kita sesalkan, sebab bukan sedikit kerugian diderita jang merupakan hidup manusia jang berharga, maupun harta benda jang bermanfaat bagi hidup kita sehari-hari ; bukan sedikit djuga dialami rasa ketidak puasan, sebab kita menjaksikan sendiri bahwa seringkali tenaga dan akal manusia itu tidak tjukup menghindarkan penderitaan dan rasa bentji antara manusia dan manusia.
3. Tetapi didalam segala rasa ketidak puasan itu, didalam rasa kesedihan itu tetap ada barang jang terang : jaitu bahwa masih ada tenaga dan akal manusia, orang-orang jang mempunjai „goodwill", jang mengerti akan perdjalanan sedjarah baik dilapangan kemadjuan perbendaan manusia, maupun dilapangan kemadjuan akal manusia.
Dan dengan sabar tapi penuh pertjaja dapat diusahakan segala sesuatu jang dapat mempertjepat usaha jang luhur itu, jaitu mengganti kekerasan dengan aksi, dan mentjoba mendapat djalan dengan perundingan.
4. Sebab itu dengan rasa girang dan rasa penuh pertjaja kepada ketjakapan manusia jang mempunjai goodwill dapat dari pihak Indonesia dimulai perundingan ini.
Perasaan tadi itu ditambah dengan kejakinan kuat, bahwa apa jang akan diperundingkan itu adalah barang jang didasarkan atas perdjalanan sedjarah jang telah njata dan pula atas dasar satu gerakan jang dalam sekali berakar dalam hati manusia. Apa jang djadi pokok perundingan ini ialah mengatur dan memberi bentukan jang patut bagi tenaga-tenaga demokrasi rakjat

Indonesia dalam usahanja membentuk negara kebangsaan berdasarkan azas demokrasi. Didalam usaha itu memang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa lain pula, jang sedjak dahulu telah ada kepentingannja di Indonesia ini. Kalau rakjat Indonesia menuntut negara merdeka atas azas keadilan, tidak patut bangsa Indonesia melupakan azas keadilan itu terhadap bangsa lain.

5. Dengan rasa girang sebab menempuh djalan akal dan goodwill, dengan kejakinan bahwa jang akan diperundingkan adalah didasarkan atas panggilan sedjarah dapat dimulai perundingan ini. Saja tidak menjembunjikan disini bahwa masih ada kesulitan jang perlu kita alahkan, tetapi pengalaman didalam hal jang demikian sudah tjukup ada pada masa jang lampau. Banjak pihak kami beladjar dan memperoleh pengalaman baik dari kebidjaksanaan jang dinjatakan dua diplomaat ulung jaitu Lord Inverchapel dan Lord Killearn. Walaupun pekerdjaan mereka tidak mendapat penjelesaian jang di harapkan pada permulaan — dan kami ketahui hal jang demikian itu bukan sebab kurang bidjaksana mereka — bagian jang diberikan oleh mereka itu bukan sadja merupakan penambahan pengalaman bagi Republik jang muda itu, tapi memang berarti satu penundjuk djalan bagi dunia dengan tjara apa satu soal jang sulit dapat diselesaikan atas dasar good faith and good will dan patut bangsa Indonesia berterima kasih kepada kedua-dua orang bidjaksana itu.

6. Semua itu sekarang ditambah lagi dengan satu kejakinan jaitu bahwa dengan pengantara sebagai Committee of Good Offices ini perundingan akan dapat perhatian, penjertaan dan pengawasan jang patut, jang disaksikan oleh seluruh dunia dan akan dipertimbangkan oleh seluruh dunia, bukan sadja sebab persoalan Indonesia ini mengenai kepentingan dunia, tapi oleh sebab Committee of Good Offices Tuan di Indonesia adalah perutusan good faith dan good will dunia, jang sudah mendirikan susunan baru bagi segala orang jang ada good faith dan good will itu.

7. Bukankah rasa tadi ditambah pula oleh sebab pidato ini diutjapkan diatas kapal „Renville", jang dipersediakan oleh pemerintah U. S. A., atas permintaan Committee of Good Offices, dan pidato ini didengarkan oleh wakil-wakil U.S.A., Australia dan Belgia jang diutus oleh Security Council ? Sudah atjap kali pembitjaraan dilakukan dan putusan diambil diatas kapal, ada pembitjaraan jang berakibat perubahan sedjarah dunia, seperti pembitjaraan jang pernah dilakukan oleh salah seorang Presiden U. S. A. jang terbesar Franklin D. Roosevelt. Tidak saja bandingkan kapal ini atau pembitjaraan jang akan kita lakukan dengan pembitjaraan beliau itu, tapi saja minta perhatian atas satu hal : pernahkah pembitjaraan dimulai atas satu kapal dengan pernjataan good faith dan good will demikian besar : Kapal dipersediakan oleh pemerintah U. S. A. ; kapal diminta atas kuasa Security Council dan oleh sebab itu atas kuasa United Nations.
Dan ada pula satu hal jang sangat penting, jaitu bahwa perundingan ini dihadiri oleh wakil-wakil daripada Security Council jang mewakili United Nations jaitu organisasi besar jang dibentuk oleh dan untuk orang-orang good faith dan good will.

8. Achirnja, Tuan Ketua, bolehlah saja mengemukakan bahwa kita mulai perundingan pada bulan Desember, jang didalamnja kita rajakan kelahiran Pembawa Damai, supaja kita renungkan pesanannja damai di dunia dan kepuasan untuk manusia. Marilah pada bulan raja ini kita mengingat bahwa kehendaknja orang tidak boleh bermusuh-musuhan. Manusia selalu mesti mengingat bahwa hanja satu musuhnja jaitu kedjahatan. Dan kalau orang berkumpul untuk mengalahkan musuh itu mereka mesti ingat apa jang ditulis seorang pengarang jang baru saja batja jaitu Karl Barth jang menga-

takan „Manusia tidak boleh menolak berkumpul dengan musuhnja tetapi mesti menolak berhubungan dengan musuhnja".
Delegasi Indonesia sudah sedia untuk berunding supaja dapat mengalahkan segala pengaruh djahat di Indonesia ini.

*

S/AC. 10/CONF. 2/2
16 January 1948
Original: English
(Terdjemahan resmi). Antara.

Dewan Keamanan
Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia
Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia
Persetudjuan gentjatan-sendjata antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia
Ditanda - tangani pada pertemuan jang ke - empat pada tanggal 17 Djanuari 1948

Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia jang dalam persetudjuan ini disebut para pihak, bersama ini menjetudjui seperti berikut:

1. Bahwa suatu perintah tinggal tetap (stand fast) dan menghentikan tembak-menembak (cease-fire) akan dikeluarkan oleh kedua pihak masing-masing serta serentak dengan segera sesudah ditanda-tangani persetudjuan ini dan akan berlaku sepenuhnja didalam empatpuluh delapan djam. Perintah itu berlaku untuk pasukan-pasukan kedua pihak disepandjang garis daerah-daerah seperti dimaksud dalam Proklamasi Pemerintah Hindia-Belanda pada 29 Agustus 1947, jang akan dinamakan garis statusquo, dan didaerah-daerah seperti jang dimaksud dalam ajat jang berikut.
2. Bahwa terlebih dahulu dan buat sementara waktu akan dibentuk daerah-daerah jang akan dikosongkan oleh tentara (demilitarized - zones), pada umumnja sesuai dengan garis statusquo tersebut diatas; daerah-daerah itu pada pokoknja mengenai daerah-daerah diantara garis statusquo, dan, disatu pihak garis kedudukan Belanda jang terkemuka dan, dilain pihak garis kedudukan Republik jang terkemuka, lebarnja rata-rata daerah-daerah itu kira-kira bersamaan.
3. Bahwa dalam mengadakan daerah-daerah jang dikosongkan tentara itu sekali-kali tidak mengurangi hak-hak tuntutan-tuntutan atau kedudukan para pihak menurut resolusi-resolusi Dewan Keamanan pada tanggal 1, 25 dan 26 Agustus serta 1 Nopember 1947.
4. Bahwa setelah diterima apa jang tersebut diatas oleh kedua pihak, Komisi Tiga Negara bersedia untuk memperbantukan kepada kedua pihak pembantu-pembantu militernja, jang akan dipertanggung-djawabkan, terlebih dahulu, untuk menetapkan, apakah salah satu peristiwa memerlukan penjelidikan dari pembesar-pembesar jang lebih tinggi dari satu atau kedua pihak.
5. Bahwa, sebelum ada penjelesaian politik, tanggung djawab atas pemeliharaan hukum serta ketertiban dan keamanan djiwa dan harta benda didalam daerah-daerah jang akan dikosongkan oleh tentara itu tinggal tetap ditangan pasukan-pasukan polisi sipil dari masing-masing pihak. (Perkataan polisi sipil berarti pula pemakaian buat sementara orang-orang militer sebagai polisi sipil, tetapi pasukan-pasukan polisi itu adalah dibawah perintah sipil). Pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara akan bersedia untuk memberi nasehat kepada pembesar-pembesar jang bersangkutan dari kedua pihak, dan untuk membantu dalam pekerdjaan-pekerdjaan lain jang dianggap perlu, kalau diminta. Antara lain, mereka harus:

a) mengumpulkan pembesar-pembesar polisi jang disediakan oleh tiap-tiap pihak dalam daerahnja jang dikosongkan oleh tentara itu untuk mengikuti pembantu-pembantu militer dalam pekerdjaannja dan perondaannja didalam daerah jang dikosongkan oleh tentara. Pembesar-pembesar polisi dari satu pihak tidak boleh meronda didalam atau melalui daerah jang dikosongkan oleh tentara lain pihak kalau tidak disertai oleh seorang pembantu militer Komisi Tiga Negara dan seorang pembesar polisi dari lain pihak.

b) memperbaiki perhubungan kerdja-sama antara pasukan-pasukan polisi kedua pihak.

6. Bahwa perdagangan dan perhubungan antara semua daerah diperbolehkan sedapat mungkin ; larangan-larangan jang dianggap perlu akan disetudjui oleh kedua pihak dengan bantuan Komisi Tiga Negara dan wakil-wakilnja, kalau perlu.

7. Bahwa persetudjuan ini mengandung pula pokok-pokok jang berikut jang pada azasnja telah disetudjui oleh kedua pihak.

   a) Melarang sabotage, intimidasi, dan balas-dendam serta perbuatan-perbuatan jang bersifat sedemikian pula terhadap orang-orang, golongan-golongan dan harta-benda, termasuk djuga pengrusak harta-benda apapun djuga dan jang dimiliki siapapun djuga, serta menggunakan segala tenaga jang ada padanja untuk mentjapai maksud itu.

   b) Mentjegah pidato-pidato radio atau propaganda apapun djuga jang bermaksud menghasut atau menjesatkan pikiran tentara dan penduduk.

   c) Mengadakan pidato-pidato radio serta mengambil lain-lain tindakan untuk memberi penerangan kepada semua tentara dan penduduk tentang keadaan jang genting dan tentang perlunja untuk tunduk kepada apa jang dimaksud dalam sub a) dan b).

   d) Kesempatan sepenuhnja untuk menjelidiki harus diberikan kepada pembantu-pembantu militer atau sipil jang diperbantukan kepada Komisi Tiga Negara.

   e) Menghentikan dengan segera penerbitan komunike gerakan harian atau lain-lain keterangan tentang tindakan-tindakan militer, ketjuali kalau sebelumnja ada persetudjuan jang tertulis dari kedua pihak, selain dari pada pengumuman mingguan daftar orang-orang (mentjatat nama-nama, nomor, dan alamat) jang telah terbunuh atau tewas dari luka-luka jang diderita dalam pertempuran.

   f) Menerima azas untuk melepaskan tawanan-tawanan dari masing-masing pihak dan memulai perundingan-perundingan dengan maksud untuk melaksanakannja setjara tepat dan tjepat, pada azasnja penglepasan ini tidak memandang djumlahnja tawanan-tawanan jang dipegang oleh salah satu pihak.

8. Bahwa pada penerimaan jang tertulis diatas, pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara akan segera mengadakan penjelidikan untuk menentukan apakah dan dimana teristimewa di Djawa - Barat, pasukan-pasukan tentara Republik masih melandjutkan perlawanan dibelakang kedudukan-kedudukan garis terkemuka dari pasukan-pasukan Belanda. Kalau penjelidikan membenarkan adanja pasukan-pasukan sedemikian, maka pasukan-pasukan itu harus diundurkan selekas mungkin dan sebaik-baiknja didalam 21 hari, sebagai tertjantum dalam pasal jang berikut.

9. Semua pasukan-pasukan dari masing-masing pihak didaerah manapun djuga jang telah disetudjui untuk dikosongkan oleh tentara atau didaerah mana pun disebelah daerah pihak lain jang dikosongkan oleh tentara, akan pindah dengan aman kedaerahnja sendiri jang dikosongkan oleh tentara dengan membawa semua sendjata dan perlengkapan militer dibawah pengawasan pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara.

Kedua belah pihak berusaha memudahkan pemindahan setjara tjepat dan damai dari pasukan-pasukan jang bersangkutan.

10. Persetudjuan ini dianggap berlaku, ketjuali djika salah satu pihak memberitahukan kepada Komisi Tiga Negara dan kepada pihak lain, bahwa dia berpendapat gentjatan perang ini tidak ditaati oleh lain pihak, dan oleh karenanja persetudjuan ini harus dibatalkan.

Atas nama Pemerintah
Keradjaan Belanda,

Raden Abdoelkadir Widjojoatmodjo.
(Ketua Delegasi).

Atas nama Pemerintah
Republik Indonesia,

Mr. Amir Sjarifuddin,
(Ketua Delegasi).

Tanda-tanda-tangan jang diatas dibubuhkan pada tanggal 17 Djanuari 1948, diatas kapal U. S. S. Renville, dan disaksikan oleh wakil-wakil Komisi Tiga Negara Dewan Keamanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam soal Indonesia, dan sekretaris Komisi Tiga Negara, jang tanda-tangannja dibubuhkan disini sebagai saksi-saksi.

Ketua : Mr. Justice Richard Kirby (Australia).
Wakil-wakil : Mr. Paul van Zeeland (Belgia).
Dr. Frank P. Graham (Amerika Serikat).
Sekretaris : Mr. T. G. Narayanan.

Lampiran I

Pendjelasan tentang persetudjuan

1. Mengenai ajat 1 dari persetudjuan tadi, berarti bahwa kedua pihak harus berusaha dengan segera dan dengan semua alat jang ada padanja untuk melaksanakan semua pokok-pokok persetudjuan gentjatan sendjata ; berarti pula bahwa, djika salah satu pihak menemui kesulitan-kesulitan istimewa dalam melaksanakan sepenuh-penuhnja kewadjiban jang diberikan kepadanja oleh persetudjuan gentjatan sendjata dalam beberapa hari jang ditetapkan, sesudah diberitahukan kepada lain pihak, pembatasan waktu empatpuluh delapan (48) djam jang ditetapkan dalam pasal pertama dari usul-usul akan diperpandjang sampai paling lama duabelas (12) hari.
2. Mengenai ajat 2 dari persetudjuan tadi, berarti bahwa djika sebagai diharapkan, persetudjuan gentjatan sendjata lambat laun dilaksanakan dan keadaan umum terus menerus mendjadi baik, daerah-daerah jang dikosongkan oleh tentara akan diperbesar lagi. Soal memperbesarkan daerah-daerah jang dikosongkan oleh tentara, atas permintaan salah satu pihak, akan dipertimbangkan segera oleh pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara, jang bertindak sesuai dengan maksud ajat 5, akan memberi nasehat kepada pembesar-pembesar jang bersangkutan.
3. Mengenai ajat 4 dari persetudjuan tadi, berarti bahwa pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara, dalam mendjalankan ajat 4 dari persetudjuan gentjatan sendjata akan mendapat segala kesempatan untuk menetapkan apakah sesuatu peristiwa memerlukan pemeriksaan oleh pembesar-pembesar jang lebih tinggi dari salah satu pihak atau kedua pihak, dalam hal mana mereka pada waktu itu djuga dengan sendirinja akan menjampaikan soal itu kepada penjuruhnja, jaitu Komisi Tiga Negara, jang bersedia untuk membantu dalam menjelesaikan perbedaan-perbedaan faham antara kedua pihak, jang mengenai gentjatan perang.

*

S/AC. 10/CONF. 2/3
17 January 1948
Original : English.
(Terdjemahan „Antara").

Dewan Keamanan

Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia

Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia

Prinsip - Prinsip jang merupakan dasar jang telah disetudjui untuk melakukan perundingan politik disetudjui dalam pertemuan ke - empat tanggal 17 Djanuari 1948

Komisi Tiga Negara telah mendapat keterangan dari delegasi Keradjaan Belanda dan dari delegasi Republik Indonesia, bahwa, karena persetudjuan gentjatan-sendjata telah ditanda-tangani, Pemerintah mereka menerima prinsip dibawah ini atas dasar mana perundingan-perundingan politik akan dilakukan :

1. Bahwa bantuan Komisi Tiga Negara supaja dilandjutkan dalam pelaksanaan dan penanda-tanganan suatu persetudjuan untuk penjelesaian perselisihan politik dipulau Djawa, Sumatera dan Madura, berdasarkan prinsip-prinsip didalam Persetudjuan Linggadjati.
2. Diinsjafi, bahwa masing-masing pihak tidak berhak menghalang-halangi kemerdekaan pernjataan gerakan-gerakan rakjat kearah organisasi politik jang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Persetudjuan-Linggadjati. Diinsjafi djuga, bahwa masing-masing pihak akan mendjamin kemerdekaan berkumpul, berbitjara dan mengeluarkan pengumuman setiap waktu, asal sadja dalam djaminan ini terkandung arti membenarkan berlakunja kekerasan dan perbuatan pembalasan.
3. Diinsjafi, bahwa putusan-putusan mengenai perubahan dalam pemerintahan daerah hanja dapat didjalankan dengan persetudjuan penuh dan merdeka dari penduduk daerah-daerah tersebut dan apabila keamanan dan kebebasan daripada-paksaan bagi penduduk sudah terdjamin.
4. Bahwa sesudah penanda-tanganan persetudjuan politik supaja dibuat aturan-aturan untuk berangsur-angsur mengurangi pasukan-pasukan bersendjata dari kedua pihak.
5. Bahwa sesudah penanda-tanganan persetudjuan gentjatan-sendjata setjepat mungkin aktiviteit ekonomi, perdagangan, pengangkutan dan perhubungan dihidupkan kembali dengan kerdja-sama antara kedua pihak ; dalam pada itu diingat djuga kepentingan bagian-bagian lainnja jang merupakan Indonesia.
6. Bahwa aturan-aturan diadakan agar terdapat waktu jang lajak, jaitu tidak kurang dari enam bulan atau tidak lebih dari satu tahun setelah penanda-tanganan persetudjuan ; dalam waktu itu akan berlaku perundingan serta pertimbangan-pertimbangan jang bebas dari paksaan dan merdeka mengenai soal-soal jang penting. Pada achir waktu itu akan dilakukan pemilihan - merdeka supaja rakjat menentukan sendiri tentang perhubungan-politiknja dengan Negara Indonesia Serikat.
7. Bahwa suatu badan pembuat undang-undang-dasar akan dipilih selaras dengan djalan jang demokratis guna merentjanakan suatu undang-undang dasar bagi Negara Indonesia Serikat.
8. Diinsjafi, bahwa djika sesudah penanda-tanganan persetudjuan sebagai tersebut dalam pasal 1, salah satu pihak minta kepada Serikat Bangsa-Bangsa untuk mengadakan suatu badan guna menindjau keadaan sewaktu-waktu

hingga kedaulatan dipindahkan dari pemerintah Nederland kepada pemerintah Negara Indonesia Serikat, maka pihak jang lain akan mempertimbangkan permintaan itu dengan saksama.

Empat prinsip dibawah ini adalah diambil dari Persetudjuan Linggadjati

9. Kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Indonesia.
10. Kerdja-sama antara bangsa-bangsa Nederland dan Indonesia.
11. Suatu negara berdaulat atas dasar federal dengan suatu undang-undang dasar jang akan tertjapai dengan djalan demokratis.
12. Suatu uni antara Negara Indonesia Serikat dan lain-lain bahagian Keradjaan Nederland dibawah radja Nederland.

Disetudjui untuk pemerintah
Keradjaan Nederland
(tt) Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo
(Ketua Delegasi).

Disetudjui untuk pemerintah
Republik Indonesia
(tt) Mr. Amir Sjarifuddin
(Ketua Delegasi).

Wakil-wakil Komisi Tiga Negara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam soal Indonesia, dan sekretaris Komisi, jang tanda-tangannja dibubuhkan disini pada tanggal 17 Djanuari 1948 dikapal U.S.S. Renville mendjadi saksi bahwa prinsip-prinsip tersebut diatas disetudjui sebagai dasar untuk perundingan-perundingan politik jang akan dilakukan.

Ketua : (tt) Mr. Justice Richard C. Kirby (Australia).
Wakil-wakil : (tt) Mr. Paul van Zeeland (Belgia).
(tt) Dr. Frank P. Graham (Amerika).
Sekretaris : (tt) Mr. T. G. Narayanan.

*

S/AC. 10/CONF. 2 4
16 January 1948
Original : English
(Terdjemahan „Antara").

Dewan Keamanan
Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia
Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia
Enam prinsip tambahan untuk
Perundingan guna mentjapai penjelesaian politik, Dikemukakan oleh Komisi Tiga Negara dalam pertemuan keempat pada tanggal 17 Djanuari 1948

Komisi Tiga Negara berpendapat, bahwa diantara lain-lain prinsip jang berikut ini merupakan dasar perundingan-perundingan untuk mentjapai penjelesaian politik.

1. Kedaulatan diseluruh Hindia Belanda ada dan tetap ada pada keradjaan Nederland sampai, setelah suatu masa perantaraan jang ditentukan, keradjaan Nederland memindahkan kedaulatannja kepada Negara Indonesia Serikat.

Sebelum berachir masa perantaraan tersebut, keradjaan Nederland dapat memindahkan hak-hak, kewadjiban-kewadjiban dan pertanggungan-djawab jang lajak kepada suatu pemerintah federal sementara dari daerah-daerah Negara Indonesia Serikat jang akan dibentuk itu. Negara Indonesia Serikat, apabila ini sudah dibentuk, akan merupakan suatu negara jang berdaulat dan merdeka sebagai partner jang sedjadjar dengan keradjaan Nederland, dalam Uni Nederland - Indonesia dengan radja Nederland sebagai kepala. Status Republik Indonesia adalah status suatu negara didalam Negara Indonesia Serikat.

2. Dalam pemerintah federal sementara, jang diadakan sebelum pengesahan undang-undang-dasar Negara Indonesia Serikat jang akan dibentuk itu, semua negara akan diberi perwakilan jang lajak.
3. Sebelum pembubaran Komisi Tiga Negara, salah satu pihak dapat minta supaja bantuan Komisi itu diteruskan guna menolong dalam penjelesaian perselisihan antara kedua pihak jang berhubungan dengan persetudjuan politik dan jang mungkin timbul selama masa perantaraan itu. Pihak jang lain tidak akan memadjukan keberatan terhadap permintaan itu ; permintaan tersebut akan dikemukakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa supaja mendapat perhatian Dewan itu, oleh pemerintah Nederland.
4. Dalam waktu tidak kurang enam bulan atau tidak lebih dari satu tahun sesudah penanda-tanganan persetudjuan ini akan dilakukan suatu pemungutan suara rakjat untuk menentukan apakah penduduk-penduduk dari berbagai daerah di Djawa, Sumatera dan Madura menghendaki supaja daerahnja merupakan bahagian Republik Indonesia atau bahagian negara lain dalam Negara Indonesia Serikat ; pemungutan suara rakjat itu akan dilakukan dengan penindjauan Komisi Tiga Negara, jaitu kalau satu pihak, selaras dengan procedure jang tertera dalam pasal 3 diatas, minta djasa Komisi dalam kedudukannja sebagai Committee of Good Offices. Kedua pihak dapat djuga bersetudju mengambil djalan jang lain daripada pemungutan suara guna mendapat kepastian tentang kehendak penduduk-penduduk.
5. Sesudah terdapat gambaran (susunan) negara-negara itu dengan djalan selaras dengan procedure sebagai termaktub pada pasal 4 diatas, suatu badan pembuat undang-undang-dasar akan dibentuk dengan djalan demokratis guna merantjang suatu undang-undang-dasar bagi Negara Indonesia Serikat. Perwakilan berbagai negara dalam badan tersebut akan seimbang dengan besarnja djumlah penduduk.
6. Djika sesuatu negara memutuskan tidak akan mengesahkan undang-undang dasar itu dan berkehendak, selaras dengan prinsip pasal-pasal 3 dan 4 Persetudjuan Linggadjati, untuk merundingkan perhubungan istimewa dengan Negara Indonesia Serikat dan dengan keradjaan Nederland, maka kedua pihak masing-masing tidak akan mengemukakan keberatannja.

Keterangan Red.: 6 Prinsip Politik K. T. N. ini ditanda tangani pada tanggal 19/1 - 1948.

„Usul Natal" Komisi Tiga Negara

Dalam pidatonja sesudah penanda-tanganan persetudjuan gentjatan-sendjata dan prinsip-prinsip politik pada tanggal 17 Djanuari 1948, Ketua Delegasi Republik Indonesia Mr. Amir Sjarifuddin menjatakan keketjewaannja, bahwa „Usul-usul mengenai gentjatan - sendjata jang dikemukakan oleh Komisi pada waktu-waktu jang lalu, jang telah diterima oleh Republik, dianggap tidak dapat diterima oleh pihak Belanda".

Meskipun tidak dikatakannja, bolehlah dianggap, bahwa keketjewaan Mr. Amir terutama didasarkan pada tidak diterimanja „Usul Natal" Komisi Tiga Negara.

Apa isi usul ini sebenarnja tak pernah diumumkan dengan resmi, tetapi telah botjor pula kepada pers, terutama disiarkan oleh „United Press" dan kantor-kantor berita asing serta „Antara".

„Usul Natal" Komisi Tiga Negara, sebagai jang tersiar disana-sini dalam pers, dapat kita simpulkan dalam beberapa pokok jang terpenting:
mengenai gentjatan - sendjata: disitu disebut-sebut pula „garis demarkasi tanggal 29 Agustus", tetapi tidak dinamakannja „garis statusquo", artinja hanja disebutnja berkenaan dengan keadaan sekarang dan untuk sementara diperlukannja sebagai dasar mendjalankan gentjatan - sendjata; demiliterisasi harus dilakukan didaerah sebelah-menjebelah garis tersebut, dan disebut-sebut pula bahwa pasukan-pasukan Belanda harus mundur sampai kekedudukan tanggal 20 Djuli, jaitu kedudukan sehari sebelum perang kolonial dimulai; djumlah tentara harus lambat laun dikurangi, pengosongan „pockets" tidak disebut.
mengenai politik: dasar-dasar Linggadjati dikemukakan, didalamnja termasuk pula pembentukan Negara Indonesia Serikat; pemerintahan sipil harus segera dikembalikan pada kedudukan dan keadaannja sebelum perang kolonial.

Beberapa tjatatan

Berkenaan dengan penolakan „Usul - Natal" Komisi Tiga Negara oleh pihak Belanda tersebut, perlu ditjatat, bahwa kewadjiban pertanggungan djawab dan kemungkinan-kemungkinan bagi Komisi tersebut adalah terbatas pada „good - offices" sadja, karena tidak mempunjai kekuasaan sebagai arbiter. Kewadjibannja hanja terbatas pada menerima usul-usul dari kedua pihak, menjampaikan usul pihak jang satu kepada pihak lainnja djika dipandang perlu, mengemukakan sugesti-sugesti sendiri, menghubungkan kedua pihak dan memberi laporan-laporan, diantaranja pembantu-pembantu militer, jang bisa melakukan penindjauan dan membantu kedua pihak dalam usaha mentjapai penjelesaian.

Beberapa tjatatan lainnja:

20 Djuli 1947 djam 24.00 malam permulaan perang - kolonial.

Achir Djuli soal Indonesia dibawa ke Dewan Keamanan oleh Australia dan India.

1 Agustus dalam sidang ke - 173 Dewan Keamanan diputuskan: „...... minta kepada kedua belah pihak supaja dengan segera menghentikan permusuhan dengan djalan arbitrage atau dengan djalan damai lainnja".

4 Agustus pihak Republik baru menerima putusan tersebut. (via Belanda) dan perintah penghentian tembak-menembak diutjapkan.

7 Agustus usul arbitrage Pilipina ditolak. Djuga usul arbitrage Australia dan Polandia jang diutjapkan kemudian tidak diterima. Rusia dan Polandia atjap kali mengusulkan penarikan tentara Belanda, tetapi ditolak.

25 Agustus resolusi (usul Rusia) membentuk komisi - 11 - negara jang di terima dengan 7 suara pro, 2 contra dan 2 blanko, di-veto oleh Perantjis. Usul Amerika untuk membentuk komisi „good-offices" diterima dengan 8 suara pro, 3 blanko.

8 Oktober Komisi Tiga Negara untuk pertama kalinja bersidang di New York.

27 Oktober Komisi Tiga Negara tiba di Indonesia.

*

S/AC. 10/CONF. 2/5
17 January 1948
Original : English
(Terdjemahan „Antara").

Dewan Keamanan
Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia
Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia

Statement Komisi Tiga Negara dalam pertempuran keempat pada tanggal 17 Djanuari 1948

1. Mengenai perhubungan antara usul-usul gentjatan-sendjata (S/AC. 10/CONF. 2/2) dan keterangan prinsip-prinsip politik (S. /AC. 10/CONF. 2/3), Komisi Tiga Negara berpendapat, bahwa kedua pihak, jang masing-masing berhak sepenuhnja untuk meletakkan pengertian juridisch sendiri pada penetapan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, akan terikat pada 12 prinsip politik pada waktu persetudjuan gentjatan-sendjata di tanda-tangani, hingga dengan kenjataan dilakukannja penanda-tanganan persetudjuan gentjatan sendjata ini timbullah de facto suatu hubungan jang memberi kebulatan antara persetudjuan gentjatan sendjata dan prinsip-prinsip politik itu.
2. Mendjadi pengertian Komisi Tiga Negara, bahwa diterimanja oleh kedua pihak 6 prinsip politik (S/AC. 10/CONF. 2/4) jang disampaikan oleh Komisi Tiga Negara dalam sidang pleno tanggal 17 Djanuari, sama sekali tidak akan berarti dapat mengubah atau mengurangi status kedua pihak, terutama jang mengenai perhubungan dengan Dewan Keamanan.
3. Komisi Tiga Negara, jang insjaf akan perlunja diadakan dan dipeliharanja suasana jang baik guna landjutnja perundingan jang sebenarnja, dan jang insjaf djuga akan perlunja ada pengertian sepenuhnja pada penduduk-penduduk Indonesia tentang tindakan-tindakan jang dilakukan oleh kedua pihak dan oleh Komisi Tiga Negara jang berkenaan dengan soal Indonesia, dengan djudjur berpesan kepada kedua pihak : bahwa Komisi Tiga Negara membantu kedua pihak dan penduduk-penduduk Indonesia dengan menggunakan semua sjarat jang bisa terdapat, misalnja radio, surat-surat kabar, pidato-pidato dan lain-lainnja guna memberi penerangan-penerangan kepada penduduk-penduduk baik jang didaerah-daerah jang dikuasai Republik maupun didaerah-daerah jang dikuasai Belanda atau didaerah-daerah jang didemiliterisasi mengenai semua hal jang berkenaan dengan penjelesaian sebaik-baiknja soal Indonesia ini, terutama :
   1. isi dan maksud persetudjuan gentjatan - sendjata ;
   2. prinsip - prinsip politik sekarang atau jang sewaktu-waktu disetudjui.
4. Mendjadi pengertian Komisi bahwa pasal 7 dari persetudjuan gentjatan-sendjata, jang melarang diantara lain-lain perbuatan pembalasan dan kekerasan terhadap orang-seorang atau golongan-golongan, mendjadilah suatu pasal jang terpenting bagi kedua pihak. Sebagai pasal jang terpenting maka ini tidak sadja mengenai masa dilakukannja perundingan politik, tetapi djuga akan mendjadi pasal persetudjuan politik. Dengan demikian maka diantaranja akan mengenai pengampunan politik umum jang meliputi semua penduduk, terutama mengenai peradjurit dan bekas peradjurit atau pegawai sipil dan bekas pegawai sipil kedua pihak.
5. Diantara hal-hal jang harus dikemukakan dalam perundingan politik jang dilakukan sesudah didjalankannja persetudjuan gentjatan-sendjata, Komisi minta perhatian sepenuhnja dari kedua pihak pada dua hal dibawah ini jang menurut pendapat Komisi harus dipeladjari dengan segera ;

a. aturan-aturan tentang status dan penempatan pegawai-pegawai sipil kedua pihak jang kini masih atau tidak ada dalam dinas dan berada didaerah-daerah jang organisasinja akan dibitjarakan antara kedua pihak ;

b. aturan-aturan jang bersifat praktis untuk mendjalankan pasal 6 dari persetudjuan gentjatan sendjata dan pasal 5 dari prinsip-prinsip politik, dalam hubungannja dengan pengembalian perhubungan ekonomi jang normal.
Keterangan Redaksi „Antara" : Pokok jang merupakan interpretasi Komisi Tiga Negara tersebut dibuat di Kaliurang pada tanggal 13 Djanuari 1948.

Dalam tekst tersebut diatas dikatakan, pokok-pokok itu telah dikemukakan dalam sidang pleno pada tanggal 17 Djanuari 1948. Menurut berita tidak resmi dari Aneta, pokok-pokok itu baru disampaikan kepada pihak Belanda pada tanggal 20 Djanuari, maka tidak diketahui sebelumnja. Dan berita-berita Belanda menjatakan, bahwa Belanda hanja menerima 12 dan 6 prinsip politik tiada dengan sjarat suatu apa. Sebaliknja pihak Republik menerimanja dengan statement K. T. N. itu sebagai sjarat.

Soal perselisihan interpretasi ini sampai tanggal 24 - 1 - 1948 belum dapat diselesaikan.

*

S/AC. 10/CONF. 2/9
17 January 1948
Original : English.
(Terdjemahan „Antara").

Dewan Keamanan
Komisi Tiga Negara dalam Peristiwa Indonesia
Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia

Surat jang diterima pada tanggal 17 Djanuari 1948 dari Ketua Delegasi Republik Indonesia mengenai diperpandjangkannja waktu berlakunja persetudjuan gentjatan-sendjata.

Tuan,

Dengan hormat saja mengemukakan pendjelasan persetudjuan gentjatan-sendjata jang telah disetudjui oleh kedua pihak dan jang berbunji sebagai berikut :

Diinsjafi, bahwa kedua pihak harus berusaha dengan segera dan dengan semua alat jang ada padanja untuk melaksanakan semua pokok-pokok persetudjuan gentjatan-sendjata :
diinsjafi pula, bahwa djika salah satu pihak menemui kesulitan-kesulitan, istimewa dalam melaksanakan sepenuh-penuhnja kewadjiban jang diberikan padanja oleh persetudjuan gentjatan-sendjata dalam beberapa hari jang ditetapkan, maka sesudah diberitahukan kepada lain pihak, pembatasan waktu empatpuluh delapan (48) djam jang ditetapkan dalam pasal pertama dari usul-usul akan diperpandjang sampai paling lama duabelas (12) hari.

Karena Pemerintah Republik Indonesia menghadapi kesukaran-kesukaran istimewa dalam mendjalankan kewadjiban-kewadjiban jang diberikan padania oleh persetudjuan gentjatan-sendjata dalam waktu empatpuluh delapan (48)

djam, delegasi Republik Indonesia menjatakan kehendaknja kepada delegasi Belanda, supaja waktu jang disebut dalam pendjelasan itu diperpandjang. Perpandjangan waktu ini diartikan oleh delegasi Republik Indonesia mendjadi empatbelas (14) hari, jaitu empatpuluh delapan (48) djam dan duabelas (12) hari.
Kepada Ketua Delegasi
Keradjaan Nederland.

Hormat kami,
(tt) Amir Sjarifuddin.
Ketua Delegasi Indonesia.

*

S/AC. 10/CONF. 2/6
17 January 1948
Original : English
(Terdjemahan „Antara").

Dewan Keamanan
Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia
Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia

Statement Tambahan dibuat pada pertemuan ke-empat dari konperensi tanggal 17 Djanuari 1948

1. Sesudah sekarang persetudjuan gentjatan sendjata ditanda-tangani, Komisi Tiga Negara meminta perhatian pembesar-pembesar Belanda akan perlunja membolehkan wakil-wakil Republik menjertai pembantu-pembantu militer Komisi, bukan sadja dalam daerah jang di-demiliterisasi, tetapi djuga diluarnja, dengan sjarat-sjarat jang sama, dengan maksud supaja dapat melaksanakan gerakan tentara dan perlengkapan sebagai tersebut dalam peragrap 8 dan 9 persetudjuan gentjatan sendjata dengan lebih tjepat dan lebih mudah.

2. Menurut pengertian Komisi, pertama-tama dan diwaktu ini pemerintah Hindia Belanda, dengan tiada purbasangka, akan suka membolehkan tiga opsir Republik masuk kedalam daerah jang dikuasai tentara Belanda dengan maksud tidak lain dari pada menjertai pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara. Kewadjiban opsir-opsir Republik itu hanja akan terbatas pada memberi bantuan pembantu-pembantu militer itu dan opsir-opsir Belanda jang bersangkutan guna menjiapkan pemindahan anasir-anasir Republik jang bersifat militer jang terus melakukan perlawanan dibelakang kedudukan-kedudukan terdepan dari pasukan-pasukan Belanda jang sekarang.

*

S/AC. 10/CONF. 2/8
17 Januari 1948
Original: English
(Terdjemahan „Antara").

Dewan Keamanan
Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia
Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia
Pendahuluan dari perintah penghentian permusuhan dari persetudjuan gentjatan sendjata. Diterima dalam pertemuan keempat tanggal 17 Djanuari 1948

Hari ini suatu persetudjuan telah ditanda-tangani oleh delegasi Republik Indonesia dan Belanda dikapal U.S.S. Renville. Ini berarti, bahwa selekas mungkin tindakan-tindakan akan dilakukan untuk menghentikan semua permusuhan dengan djalan jang sebaik-baiknja. Dengan menunggu perintah dalam garis-garis ketjilnja saja memerintahkan sebagai berikut:

1. Hindarilah segala provokasi berupa apapun djuga.
2. Teruskan tugas mendjamin keamanan dan ketenteraman dalam daerah-daerah jang mendjadi tanggung djawab tuan.
3. Pertahankan diri apabila diserang.
4. Hindarkan segala insiden, dan
5. Insjafi, bahwa tuan tetap bertanggung djawab atas keamanan, djiwa dan harta.

Saja mengharap, bahwa Tuan akan mendjalankannja dan melihat bahwa perintah-perintah pendahuluan ini akan didjalankan dalam semangat persetudjuan gentjatan-sendjata jang sekarang telah ditanda-tangani.

*

Perintah jang 5 pokok itu diutjapkan oleh Panglima Besar Sudirman pada tanggal 17 Djanuari malam, sebagai berikut:

1. Menghindarkan segala provokasi berupa apapun djuga.
2. Meneruskan tugas mendjamin keamanan dan ketenteraman dalam daerah-daerah jang mendjadi tanggung djawab Angkatan Perang Republik Indonesia.
3. Mempertahankan diri apabila diserang.
4. Menghindarkan segala insiden, dan
5. Insjaf, bahwa Angkatan Perang Republik Indonesia tetap bertanggung djawab atas keamanan, djiwa dan harta.

*

Peraturan umum dalam persetudjuan gentjatan sendjata

a. Umum.

1. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan tanggal 17 Djanuari 1948 djam 21.00 sesudah penanda-tanganan perdjandjian gentjatan sendjata dan akan mulai berlaku bagi kedua belah pihak 14 hari kemudian pada djam 24.00 hari itu. Pada saat itu segala permusuhan didaerah terdepan (lihat para 8 — 10 dibawah ini) harus sudah dihentikan dengan sesungguhnja, dengan memperhatikan peraturan-peraturan dan petundjuk-petundjuk jang berikut.

2. Peraturan jang sama bunjinja dikeluarkan dengan serentak oleh pembesar-pembesar pihak Belanda dan pihak Indonesia kepada opsir-opsir pemimpin pasukan bawahan dan dengan perantaraan mereka itu kepada segala pasukan-pasukannja.

b. Penetapan daerah pendudukan

3. DI DJAWA dan SUMATERA daerah-daerah jang diduduki tentara Belanda adalah meliputi daerah-daerah sebagai diuraikan dalam pengumuman Letnan Gubernur Djenderal pada tanggal 29 Agustus 1947 seperti tertera dalam Annex dari Instruksi ini.
4. Semua daerah di DJAWA dan SUMATERA jang tidak termasuk dalam pengumuman tersebut diatas, adalah daerah-daerah jang dikuasai tentara Republik.
5. Garis jang memisahkan daerah-daerah jang tersebut dalam peragrap 3 dan 4 dinamakan „garis statusquo" dan „garis statusquo" itu dinjatakan dalam Annex dari Instruksi itu.
6. Opsir-opsir pemimpin pasukan akan mendjamin supaja selekas mungkin, garis jang tersebut diatas akan diberi tanda-tanda jang djelas kelihatan di medan. Instruksi-instruksi selandjutnja bila dan kalau perlu akan dikeluarkan oleh Kepala Staf Umum masing-masing sesudah bermusjawarat dengan pembantu militer dari Komisi Tiga Negara dan dengan pembesar-pembesar militer Belanda dan Republik.
7. Anggauta-anggauta pasukan-pasukan militer dan kesatuan-kesatuan polisi kedua belah pihak tidak diidzinkan melintasi garis „statusquo" selainnja sebagai diuraikan dalam para 17 dibawah ini. Dalam hal lalu-lintas lainnja melintasi garis tersebut lihatlah para 20 dibawah ini.

c. Daerah terdepan

8. Daerah-daerah terdepan jang akan didemiliterisir, adalah daerah-daerah jang letaknja sebelah-menjebelah „garis statusquo" dan dibatasi oleh garis-garis jang menghubungkan kedudukan-kedudukan terdepan dari masing-masing pihak (ini termasuk djuga) (lihat annex).
9. Didaerah-daerah terdepan tidak diidzinkan :
   a. membuat kedudukan - kedudukan dan/atau menempatkan detasemen-detasemen militer baru.
   b. memindah atau memperkuat kedudukan dan/atau detasemen-detasemen militer atau memperluas pertahanan-pertahanan jang telah ada.
   c. mempersiapkan atau melakukan tindakan-tindakan jang bersifat menjerang.
10. Gerakan-gerakan pasukan didaerah terdepan dibatasi seketjil-ketjilnja, umpamanja guna perawatan dan penggantian kedudukan-kedudukan terdepan. Opsir-opsir pemimpin pasukan harus memberi tahukan kepada KepalaStaf Umum masing-masing tentang penggantian pasukan sebagai direntjanakan sekurang-kurangnja 48 djam sebelum dilakukannja.

d. Daerah jang didemiliterisir

11. Daerah-daerah terdepan akan didemiliterisir dan ditempatkan dibawah pengawasan sipil dalam 14 hari.
12. Anggauta tentara tidak diperkenankan berada didaerah jang didemiliterisir. Di daerah-daerah ini pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan keselamatan akan dilakukan oleh pasukan-pasukan polisi sipil. Perkataan „polisi sipil"

tidak berarti bahwa pemakaian anggauta tentara sebagai polisi sipil untuk sementara waktu tidak diperkenankan ; dengan pengertian, bahwa pasukan-pasukan polisi itu akan berada dibawah pengawasan sipil.

13. Untuk sementara waktu kewadjiban-kewadjiban polisi, didaerah jang didemiliterisir sebelah Belanda, akan dilakukan oleh anggauta tentara jang memakai ban lengan warna oranje dengan huruf-huruf VP (Veiligheids - Politie = Polisi Keamanan) dilengan atas kiri. Untuk sementara waktu kewadjiban-kewadjiban polisi didaerah Republik jang didemiliterisir akan dilakukan oleh personeel jang memakai ban merah dengan huruf-huruf putih PK. (Polisi Keamanan).
14. VP. dan PK militer tersebut diparagrap 13 akan dipersendjatai sedemikian rupa, sehingga kewadjiban mereka sebagai polisi nampak dengan tidak mengelirukan. Petundjuk-petundjuk selandjutnja jang mengenai hal ini akan dikeluarkan pada waktunja oleh pembesar-pembesar jang berkewadjiban.
15. Perintah-perintah akan dikeluarkan oleh pembesar-pembesar tentara jang berwadjib kepada kesatuan-kesatuan VP dan PK guna penjelenggaraan kewadjiban-kewadjiban sebagai polisi istimewa, sesuai dengan instruksi-instruksi dan petundjuk-petundjuk dari pembesar-pembesar sipil jang berwadjib.
16. Djika keadaan dalam daerah jang didemiliterisir atau bagian-bagiannja mengidzinkan, maka kesatuan-kesatuan VP dan PK tersebut dalam paragrap 13 lambat laun akan diganti dengan polisi sipil.
17. Anggauta-anggauta polisi dari satu pihak tidak boleh masuk atau bergerak dalam daerah jang didemiliterisir dari pihak jang lain ketjuali djika disertai oleh seorang pembantu militer dari Komisi Tiga Negara dan seorang pegawai polisi dari pihak jang lain itu.

e. Pemindahan

18. Kesatuan-kesatuan dari pasukan-pasukan Tentara Republik jang masih berada didaerah jang dikuasai oleh tentara Belanda akan dipindahkan kedaerah mereka sendiri dengan membawa sendjata, perlengkapan dan alat-alat perang.
19. Pemindahan ini akan dilakukan dengan bantuannja dan dibawah pengawasannja pembantu-pembantu militer dari Komisi Tiga Negara. Instruksi-instruksi selandjutnja akan dikeluarkan oleh Kepala Staf Umum masing-masing setelah bermusjawarat dengan pembantu-pembantu tersebut dan dengan pembesar-pembesar pihak lain (lihat djuga para 20).
20. Pemindahan-pemindahan akan dilaksanakan dan diselesaikan selekas mungkin, selambat-lambatnja dalam 21 hari setelah penanda-tanganan dari perdjandjian gentjatan sendjata.

f. Lalu lintas sipil melalui garis statusquo

21. Lalu lintas sipil melalui „garis statusquo" akan diperkenankan dengan mengingat hal jang berikut :
    a. lalu lintas akan dibatasi pada djalan-djalan perhubungan jang ditetapkan dan disetudjui oleh pembesar-pembesar jang berwadjib dari kedua belah pihak dengan bantuannja Komisi dan wakil-wakilnja djika perlu (lihat para 25 dan 26 dibawah).
    b. Lalu lintas diluar djalan-djalan tersebut dalam a tidak diperkenankan.
    c. Instruksi dalam garis-garis ketjil mengenai barang-barang dan peredaran uang akan dikeluarkan.
    d. Orang-orang dan lain-lainnja jang melalui atau diangkut melalui „garis statusquo" akan digeledah dan diperiksa : ini akan dilakukan dengan tjara demikian sehingga tidak menjebabkan kesusahan dan kesukaran seketjil-ketjilnja.

g. Angkatan Udara

22. Pemakaian angkatan udara masing-masing akan dibatasi pada daerah-daerah jang diduduki dan dikuasai oleh pihak masing-masing. Angkutan melalui udara tidak termasuk dalam hal tersebut diatas.
23. Peraturan dalam garis ketjil selandjutnja akan diselenggarakan setelah bermusjawarat dengan ahli-ahli penerbangan dari Komisi Tiga Negara dan kedua belah pihak.

h. Angkatan Laut

24. Pemboman dari laut, pendaratan dan lain-lain gerakan angkatan Laut jang bersifat permusuhan terhadap sasaran didarat atau penembakan dari darat kearah kapal tidak diperkenankan.

i. Perundingan antara Komandan Tentera Daerah dari kedua belah pihak

25. Perundingan antara Komandan-komandan tentara daerah dari kedua belah pihak untuk membitjarakan tindakan-tindakan jang perlu guna penjelenggaraan instruksi ini dalam garis ketjilnja akan diadakan selekas mungkin dan selambat-lambatnja 5 hari setelah penanda-tanganan Perdjandjian Gentjatan Sendjata.
    Mereka dapat disertai oleh pembesar-pembesar sipil.
26. Tempat-tempat di atau dekat garis „statusquo" dimana pertemuan-pertemuan ini akan diadakan akan diumumkan oleh Kepala Staf Umum masing-masing sesudah bermusjawarat dengan wakil-wakil militer dari Komisi Tiga Negara dan dari kedua pihak.
    Nama, pangkat dan djabatan dari Komandan daerah jang bersangkutan akan diumumkan pada waktu itu djuga.

j. Peraturan Tambahan

27. Kedua pihak harus memberi bantuan sepenuhnja kepada pembantu-pembantu militer dari Komisi Tiga Negara dalam mengawasi penglaksanaan peraturan-peraturan Gentjatan Sendjata.
28. Untuk itu mereka akan diberitahukan tentang peraturan-peraturan dalam garis ketjil jang berlaku untuk daerah-daerahnja, sedangkan mereka djuga akan diminta pertimbangannja bila kedua pihak tidak dapat mentjapai persetudjuan.
29. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan Gentjatan Sendjata harus dilapurkan setjepat mungkin oleh kedua belah pihak, meliwati alat-alat perhubungan masing-masing, kepada :
    a. Kepala Staf jang bersangkutan,
    b. pembantu-pembantu militer dari Komisi Tiga Negara jang terdekat, atau kepada Komisi sendiri, mana sadja jang lebih tepat.
30. Pelanggaran-pelanggaran harus djuga dilapurkan setjara tertulis dengan setjepat-tjepatnja dan selengkap-lengkapnja dan dibubuhi dengan bukti-bukti selajaknja.
31. Komisi telah menjediakan tenaga pembantu-pembantu militernja pada ke dua belah pihak guna menetapkan apakah suatu peristiwa membutuhi penjelidikan oleh pembesar-pembesar jang lebih tinggi dari salah satu atau dari kedua pihak, maka dari itu tidak boleh diambil suatu tindakan militer terhadap pelanggaran Gentjatan Sendjata dari salah satu pihak oleh suatu Komandan Daerah dari pihak jang lain, ketjuali djika pelanggaran itu sede-

mikian rupa hingga menjebabkan bahaja jang besar serta accuut terhadap keselamatan pasukan-pasukan atau penduduk biasa dalam hal mana hal tersebut harus segera dilapurkan kepada Kepala Staf jang bersangkutan dan kepada pembantu-pembantu militer dari Komisi Tiga Negara jang terdekat atau kepada Komisi sendiri (lihat para 29).

*

Pidato Mr. Amir Sjarifuddin Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia

(Dikapal Renville pada tanggal 17 - 1 - 1948).
(Terdjemahan „Antara" dari tekst resmi Inggeris).

Tuan Ketua Komisi Tiga Negara !

Sebagian dari kewadjiban jang berat telah dilakukan. Persetudjuan penghentian permusuhan dan beberapa prinsip politik telah ditanda tangani dan di setudjui hari ini dikapal Renville sebagai dasar perundingan-perundingan selandjutnja.

Kewadjiban, jang sebagian ketjil telah diselesaikan ini, adalah kewadjiban berat, tetapi berkat djasa baik Komisi Tuan, banjak kesukaran telah dilampaui, dan banjak, jang tampaknja semula tidak mungkin telah mendjadi mungkin.

Saja, atas nama Republik, dengan sepenuh hati menjatakan terima kasih kepada Tuan dan kepada anggauta-anggauta lainnja dari Komisi, jang telah melakukan segalanja jang ada pada kekuasaan mereka untuk mendapatkan pemetjahan - soal jang adil dan tidak - berpihak, serta memuaskan bagi kedua pihak.

Masih banjak jang harus dilakukan, dan dengan kejakinan, jang diperkuat oleh pengetahuan, bahwa Komisi Tuan akan melandjutkan kesediaannja memberi dalam penjelesaian soal-soal militer maupun politik, Delegasi Indonesia akan meneruskan pekerdjaannja.

Apa jang kita tjapai hari ini adalah baru sebagian dari kewadjiban kita. Banjak kesukaran jang masih kita hadapi, tetapi hari ini adalah hari jang sangat penting, sebab kedua pihak telah mendapatkan dasar jang sama guna perundingan-perundingan jang akan datang.

Saja mengharap, supaja dasar ini akan digunakan dengan benar, agar terbukalah djalan bagi bangsa Indonesia kearah dunia jang lebih menjenangkan.

Dengan djasa baik Komisi Tuan, Tuan Ketua, dengan pimpinan Tuan, dan dengan kekuatan moral Komisi Tuan, saja jakin, bahwa kewadjiban jang sukar jang kita hadapi akan banjak dipermudah.

Republik Indonesia merasa lega dan senang, bahwa perkelahian dan pembunuhan dikepulauan ini harus dihentikan. Dalam pada itu kami ketjewa, bahwa usul-usul mengenai gentjatan sendjata jang dikemukakan oleh Komisi pada waktu-waktu jang lalu, jang telah diterima oleh Republik, dianggap tidak dapat diterima oleh pihak Belanda. Tentulah kami ketjewa, bahwa usul-usul Belanda, atas mana tertjapai persetudjuan, djauh selisihnja dengan apa jang kami harapkan, dan dengan apa jang kami harapkan dari sugesti - sugesti Komisi. Meskipun demikian, kami menerima gentjatan-sendjata ini karena jakin akan senantiasa bertambahnja kerdja-sama dari Pemerintah Nederland. Kami berniat untuk mendjalankan persetudjuan ini dengan kerdja-sama jang djudjur dan dengan kehendak jang kuat utuk melihat didjalankannja gentjatan-sendjata itu dengan sepenuhnja dan sebaik-baiknja.

Kami melakukan ini dengan pengertian penuh bahwa perundingan-perundingan politik akan dimulai dengan segera dan dengan kepuasan bahwa pihak Belanda dan kami telah bersetudju bahwa penjelesaian politik harus didasarkan atas prinsip-prinsip jang mendjadi dasar Serikat Bangsa - Bangsa dan dengan djalan demokrasi sebenar-benarnja.

Kalau saja boleh menjebut pikiran-pikiran jang semula dinjatakan kepada kami oleh Dr. Graham, pemimpin Delegasi Amerika, maka gentjatan sendjata dan prinsip-prinsip jang disetudjui hari ini mengandung pula arti ditinggalkannja djalan perkelahian dan kekerasan, dan diambilnja djalan demokrasi.

Inilah semangat jang terkandung oleh Republik ketika menanda-tangani naskah-naskah jang penting ini. Dalam semangat inilah Republik mendekati perundingan - perundingan politik, dan dengan semangat itu pula, kami kini akan mendekati Komisi dan pihak Belanda, dengan harapan jang teguh bahwa kedua pihak itu akan membantu kami untuk menjatakan pendirian kami dengan aman dan demokratis, dengan tidak merugikan atau dirugikan, sebagai imbangan pendirian dan pendapat golongan-golongan politik di Indonesia.

Saja terutama mengemukakan hal itu, karena njata bahwa demokrasi tergantung pada sjarat-sjarat jang lebih luas lagi daripada tergantung pada penerimaan prinsip-prinsip sadja. Demokrasi tergantung pada kesempatan-kesempatan ekonomi dan alam, pada soal-soal ketjil tetapi penting, pada persediaan kertas jang dapat kami gunakan untuk menerangkan kepada rakjat kami, pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan kami, pada kesempatan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan diseluruh kepulauan ini, dimana kami dapat memupuk rasa saling mengerti dan kesukaan membantu rentjana-rentjana politik dan ekonomi kami.

Djaminan akan adanja kerdja-sama Republik kearah terdapatnja penjelesaian politik, saja rasa sudah termasuk dalam konsesi kami dengan tertjapainja persetudjuan hari ini. Kami harapkan kami dapat segera menjatakannja dengan melakukan apa jang dapat kami lakukan, untuk membangkit semangat penjokong-penjokong kami dengan djalan perundingan jang aman, dengan djalan pertimbangan-pertimbangan dan putusan. Ini bisa terdjadi dengan andjuran-andjuran politik dan dengan menerangkan kepada penjokong-penjokong kami diseluruh kepulauan ini akan pentingnja organisasi dan djalan-djalan demokrasi, dan akan pentingnja prinsip-prinsip politik jang telah disetudjui.

Kami tahu, bahwa politik ini, jaitu satu-satunja politik jang selaras dengan persetudjuan hari ini, akan mendapat sokongan sepenuhnja dari Komisi. Kami duga ini akan merupakan pertjobaan bagi kedjudjuran dan kerdja sama kedua pihak, dan kami menunggu bantuan segera dari Nederland untuk mengatasi banjak kesukaran praktis jang ada didjalan kami.

Pidato Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo Ketua Delegasi Pemerintah Nederland

(Terdjemahan „Antara").

Tuan Ketua !

Dalam kesempatan seperti ini bukan sadja mendjadi kewadjiban moreel bagi saja untuk menjatakan apa jang terkandung dalam hati ; ini bahkan mendjadi hal jang saja lakukan dengan senang sekali.

Tuan tentunja ingat, Tuan Ketua, bahwa dalam pertemuan jang pertama dari Komisi Istimewa, Tuan van Vredenburch minta, supaja dalam notulen di tjatat, bahwa menurut pendapatnja, Komisi Tiga Negara mentjapai hasil-hasil. Ia utjapkan itu pada tanggal 14 Nopember. Sedjak itu telah banjak hal jang terdjadi. Banjak kesukaran telah dapat dipetjahkan. Banjak kekeliruan faham telah dapat disingkirkan.

Dengan sabar, dan dengan kesediaan jang tetap, Komisi Tiga Negara telah dapat membawa kedua pihak suka mendengarkan suara pikiran jang sehat, dan menjingkirkan semua nafsu dari dirinja. Sedjarah manusia telah menundjukkan, bahwa dalam perdjuangan antara pikiran jang sehat dan nafsu itu, atjap kali nafsulah jang terdengar lebih keras.

Dalam perdjuangan antara keduanja itu Komisi telah mentjapai kemenangan pertama bagi pikiran sehat. Dan meskipun kita semua tahu, bahwa kesukaran-kesukaran masih djauh dari pada berachir, dan bahwa masih pandjang djalan jang harus kita tempuh sebelum terdapat pengertian jang setjukupnja, saling-kepertjajaan dan pengertian jang baik antara kedua pihak, satu hal jang pasti.

Dengan ditanda-tanganinja gentjatan sendjata ini sampailah kita pada tuga pertama pada djalan jang sukar dilalui ini.

Apa jang penting sekarang ialah supaja peraturan-peraturan gentjatan-sendjata dilakukan, dengan tjepat, djudjur, setia.

Apa jang penting sekarang ialah, mengachiri kekalutan, perusakan dan pertentangan, dan mengganti semua itu dengan keamanan dan ketertiban, dengan produksi, pembangunan dan kerdja-sama.

Tidak ada orang jang mengharap, supaja kedua pihak akan berbuat lebih daripada apa jang dapat diharapkan dari mereka. Tidak ada jang menuntut hal demikian. Apa jang boleh dikehendaki ialah, supaja pembesar-pembesar kedua pihak memberi teladan supaja penduduk tergerak kehendaknja untuk menganggap sudah benar-benar berachirnja masa kerusakan-kerusakan, dan dengan tiada maksud-maksud jang lain memulai pembangunan dalam arti kata jang sebenarnja.

Komisi Tiga Negara berkewadjiban melakukan pekerdjaan jang berat. Mereka berhak mendapatkan terima kasih kami untuk apa jang mereka tjapai sampai sekarang. Mudah-mudahanlah dalam waktu jang dapat dipikirkan sekarang mereka dapat menjelesaikannja dengan baik. Dengan demikian untuk selama-lamanja pekerdjaan mereka akan hidup dalam sedjarah dan dalam hati bangsa-bangsa Nederland dan Indonesia.

Perbolehkanlah saja, Tuan Ketua, mengachiri pembitjaraan saja dengan do'a supaja djalannja kedjadian-kedjadian ini akan sebagai kita harapkan itu.

a. Sikap Partai - Partai terhadap „Renville"
Keterangan Dewan Partai „Masjumi"

UMUM mengetahui sikap „Masjumi" terhadap usul-usul Belanda dan putusan kabinet: Menolak usul-usul Belanda itu, dan kemudian, tatkala ternjata, bahwa kabinet dengan suara jang terbanjak menerimanja, menteri-menteri warga „Masjumi" menarik diri dari Pemerintah Pusat.

Penolakan itu didasarkan atas pertimbangan bahwa, dengan menerima usul-usul N a t a l — Komisi Tiga Negara, „Masjumi" sebenarnja sudah sampai pada batas, jang dapat dipertanggung-djawabkan kepada bangsa Indonesia umumnja, dan ummat Islam chususnja. Hanja dengan mempertimbangkan situasi pada masa sekarang, baik jang mengenai luar negeri, maupun jang mengenai keadaan jang njata didalam negeri, dan terdorong oleh ke-ichlasan jang sebesar-besarnja, hendak menjelesaikan pertikaian sekarang ini setjara terhormat bagi kedua pihak, untuk meletakkan dasar kerdja-sama antara bangsa Indonesia dan Belanda, maka „Masjumi" telah menerima usul-usul Komisi Tiga Negara itu bukan terutama disebabkan karena perasaan lemah atau takut terhadap agressi Belanda.

Seperti umum telah maklum, djuga kabinet menerima usul-usul Natal-K.T.N. itu dengan bantuan seluruh partai-partai. Sebaliknja, Belanda telah menolaknja dan memadjukan usul-usulnja sendiri, jang djauh lebih kurang dari pada usul-usul Natal. Baik bagian militernja, maupun bagian politiknja masih djauh kurang dari pada tuntutan-tuntutan pihak Indonesia.

„Masjumi" dengan kontan-kontan menolak usul-usul Belanda itu. Begitu pula Pemerintah kita, djuga dengan bantuan jang bulat dari partai-partai.

Akan tetapi djawaban penolakan Pemerintah itu, oleh ketua Delegasi tidak segera disampaikan kepada K.T.N., bahkan kemungkinan untuk menjampaikannja itu, kemudian sama sekali tertutup. Sebabnja ja'ni : – Dengan tidak segera menjampaikan djawaban-penolakan atas usul-usul Belanda itu, timbul sangkaan pada pihak lawan dan K.T.N., bahwa Pemerintah masih ragu-ragu dan masih dapat menerima usul-usul Belanda itu. Sikap ragu-ragu itu menjebabkan K.T.N. memadjukan beberapa amandemen terhadap usul-usul Belanda itu, jang mendekatkan usul-usul Belanda kepada usul-usul Natal - K.T.N., terutama bagian politiknja, tetapi pada umumnja masih dibawah usul-usul Natal itu. Terutama rentjana truce - agreement (penghentian tembak-menembak dan permusuhan) apabila diterima oleh kita, akan sukar dilaksanakannja dan banjak merugikan kedudukan militer kita, dengan tiada banjak djaminan dari siapapun djuga, bahwa azas-azas politik, jang diadjukan oleh Belanda itu dengan tambahan-tambahan perbaikan K.T.N., dapat ditudjukan sesungguh-sungguhnja.

Oleh karena itu „Masjumi" tetap menolak usul-usul Belanda itu, sekalipun telah diamandeer oleh K.T.N., dan oleh karena kabinet menerimanja, maka menteri-menteri warga „Masjumi" mengundurkan diri dari suatu kabinet jang dari semula, baik melihat susunannja, maupun beleidnja tidak memberikan gambaran akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan jang dihadapi Tanah Air kita.

Selain dari pada itu, „Masjumi" menganggap, bahwa sekalipun situasi politik sekarang belum pernah begitu buruk, dan kedudukan Republik belum pernah begitu lemah, masih ada djalan dan harapan untuk melandjutkan perdjuangan kita.

Tetapi sjaratnja ja'ni :

Kabinet sekarang ini harus dirubah dengan setjara radikal, agar dapat menjelesaikan kesulitan-kesulitan jang ada dalam negeri dan dapat meneruskan perdjuangan bangsa Indonesia dengan pengharapan jang njata.

Untuk mentjiptakan suasana dan politik baru, perlu kabinet sekarang ini dibubarkan dan diganti oleh suatu „nasional zaken kabinet" jang lebih mendapat kepertjajaan dari pada rakjat.

Untuk itu „Masjumi" sedia memberi bantuannja guna menjelamatkan REPUBLIK INDONESIA.

Jogjakarta, tanggal 16 Djanuari 1948.

„DEWAN PIMPINAN PARTAI"
„M A S J U M I".

*

Keterangan Dewan Partai P. N. I.

Dewan Partai P.N.I. dalam rapat plenonja tanggal 18 Djanuari 1948 telah memutuskan :

Terhadap persetudjuan Renville.

1. Dewan Partai menjetudjui sikap Dewan Pimpinan P.N.I. dan para menteri anggauta P.N.I. jang menolak persetudjuan Renville.

Terhadap kabinet sekarang.

1. Dewan Partai berpendapat bahwa kabinet dalam susunannja sekarang ternjata tidak dapat memenuhi kewadjibannja dengan semestinja. Mengingat hal itu Dewan Partai jakin, bahwa dengan kabinet dalam susunannja sekarang ini Negara Republik kita tidak akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan jang lebih besar daripada masa jang lampau berhubung dengan perdjuangan rakjat Indonesia pada tingkatan sekarang dan selandjutnja.
2. Berdasar atas pendirian diatas, Dewan Partai merasa tidak dapat mempertanggung djawabkan terus berdirinja kabinet dalam susunan sekarang. Oleh karena itu P.N.I. menuntut selekas-lekasnja penggantian Kabinet jang sekarang dengan kabinet baru jang susunannja memenuhi tuntutan-tuntutan perdjuangan mempertahankan Tanah Air dan Bangsa.

Jogjakarta, 18 Djanuari 1948
DEWAN PARTAI P.N.I.

*

Pendjelasan Keadaan Politik
Dari Dewan Harian bersama menteri-menteri Sajap Kiri

1. Sesudah perdjandjian Gentjatan Sendjata dan Dasar Politik ditanda-tangani dikapal Renville, teranglah bahwa hasil jang sebaik-baiknja daripada perdjandjian hanja bisa tertjapai, djika kedudukan pemerintah jang melandjutkan penjelesaian perdjandjian itu kuat.
2. Tuntutan pergantian kabinet oleh lebih kurang sepertiga dari djumlah menteri jang duduk dalam kabinet dan jang disampaikan pada saat mau ada penetapan lebih landjut tentang dasar-dasar jang sudah disetudjui, terang melemahkan kedudukan pemerintah jang harus melandjutkan perundingan itu.
3. Dipandang dari djurusan politik nasional, tuntutan itu tidak memberikan gambaran baik. Hal ini ternjata daripada soal dibawah ini :
   Tuntutan penggantian kabinet oleh P.N.I. berdasarkan : Susunan sekarang tidak dapat memenuhi kewadjibannja dengan semestinja. Oleh karena itu : P.N.I. tidak dapat mempertanggung-djawabkan terus berdirinja kabinet dalam susunan kabinet sekarang.
4. Tuntutan P.N.I. ini mengherankan, karena :
   1. tidak ada alasan politiknja.
   2. P.N.I. adalah mede-formateur, turut membentuk kabinet ini.
   3. P.N.I. pun dalam susunan kabinet ini tetap turut, artinja tetap turut bertanggung djawab.

4. Fraksi P.N.I. telah memadjukan mosi kepertjajaan pada pemerintah dalam Badan Pekerdja.
5. Dari hal-hal diatas, dengan mengingat pentingnja saat sekarang bagi negara kita, tuntutan itu lebih daripada mengherankan, sehingga akibat dari sikap P.N.I. jang demikian itu tidak dapat dianggap sesuai dengan pertanggung-djawaban organisasi Rakjat jang sedang mempertahankan kedaulatan negaranja.
6. Menurut berita „Antara" dan tidak ada jang menjangkal kebenarannja.

   Masjumi menjatakan :

   1. Kedudukan Republik sangat lemah.
   II. Kabinet sekarang harus diubah setjara radikal (dibubarkan).
7. Dalam pertemuan pers Ketua Fraksi Masjumi di Badan Pekerdja menjatakan :

   Persetudjuan Renville secundair dan penggantian kabinet primair.
8. Dari segala sesuatu jang tersebut di 6 dan 7 Masjumi mengakui bahwa kedudukan Republik sekarang sedang lemah dan persetudjuan Renville adalah soal nomor 2, sehingga, dengan mengingat bahajanja penggantian atau pembubaran kabinet pada tingkat perundingan, bahkan ada tuntutan pembubaran kabinet sadja, sikap Masjumi tidak sesuai dengan pertanggung-djawabannja sebagai organisasi Rakjat jang sedang mempertaruhkan segala-galanja guna pertahanan kedaulatan Republik Indonesia, karena :

   Tidak beralasan politik seperti ternjata dari pernjataannja bahwa soal Renville adalah soal nomor 2.
9. Lebih mendjadi pertanjaan umum lagi :

   Karena, surat kabar „Trouw" pada tanggal 23 Djuni 1947 pernah menjatakan, bahwa gembong-gembong Masjumi pernah mendjumpai pembesar-pembesar Belanda dengan tidak setahu pemerintah Indonesia, untuk menjatakan sedia bekerdja bersama dengan Belanda.

   Karena, Graham, dengan tidak dipersaksikan oleh orang lain, djangankan dipersaksikan Pemerintah Republik, berulang-ulang mengadakan pembitjaraan dengan orang-orang pimpinan Masjumi ;

   Karena, pada pembentukan salah satu kabinet Sjahrir gembong Masjumi tidak dapat dibawa dalam kabinet karena sangat besar kemungkinannja tersangkut perkara pelanggaran penting terhadap negara ;

   Karena, pada permulaan pembentukan kabinet Amir - Gani - Setiadjid ini telah diberi kesempatan untuk turut menjusun kabinet sekarang ;

   Karena, Masjumi, meskipun sikapnja itu, toch telah diberi kesempatan duduk dalam kabinet ;

   Karena, pada waktu itu hendak mengundurkan diri dari kabinet bukan karena susunan kabinet ;

   Karena, kemudian menjatakan sedia membantu penglaksanaan perdjandjian Renville dan duduk lagi dalam kabinet, asalkan kabinet jang telah ditolak tapi kemudian diterima lagi, dan seterusnja ditinggalkannja lagi itu, diganti.
10. Mengingat segala sesuatu jang tertera diatas, mengingat pula rasa pertanggung-djawaban terhadap negara dan Rakjat, menteri-menteri dari golongan Sajap Kiri (Front Demokrasi Rakjat) jang hadir dalam sidang Kabinet tanggal 21 - 22 Djanuari 1948 di Jogja djam 20.00 sampai djam 2 malam, menjatakan :

Tidak dapat bersama-sama bertanggung-djawab tentang negara dengan anggauta-anggauta Masjumi jang dikenakan sanctie oleh partainja. Pun merasa tidak dapat membenarkan sikap P.N.I. jang telah dinjatakan itu.

11. Dalam keadaan seperti tersebut sebagaimana tertjatat diatas itu, pada tempatnjalah kami menjerahkan kepada Rakjat Indonesia mendjadi hakim atas kedjadian dalam sedjarah negara itu dengan menjatakan sikapnja jang tegas :
    1. Membenarkan sikap kami, atau
    2. Membenarkan pihak jang melemahkan kedudukan negara kita berhadapan dengan negara lain. dan akibatnja : mempersilahkan pimpinan negara ini kepada mereka itu.

Jogjakarta, 22 Djanuari 1948

DITANDA - TANGANI OLEH :
DEWAN HARIAN „SAJAP KIRI"

Tan Ling Djie, Partai Sosialis.
Luat Siregar, P.K.I.
Asmu, P.B.I.
Sudisman, Pesindo.

Diumumkan oleh
SEKR. PUSAT „SAJAP KIRI"
(Front Demokrasi Rakjat)
t.t. (D.N. AIDIT).

Menteri-menteri golongan Sajap Kiri jang hadir dalam sidang kabinet tanggal 21/22 Djanuari 1948 .

1. Mr. Amir Sjarifuddin.
2. Mr. Abd. Madjid.
3. Dr. Tjokronegoro.
4. Mr. Hindromartono.
5. Sojas
6. Ir. Setiadi.
7. Siauw Giok Tjhan.
8. Mr. Tamzil.
9. Wikana.
10. Drs. Maruto Darusman.
11. Drs. Setiadjit (tidak hadir).
12. Trimurti (tidak hadir).
13. Dr. Satrijo (Di Sumatera).
14. Suprodjo (Di Sumatera).

*

Pada tanggal 23 - 1 - '48 P.M. Amir Sjarifuddin menjerahkan kembali mandaatnja kepada Presiden.

Dalam pengumumannja selandjutnja Presiden menundjuk Wakil Presiden Moh. Hatta sebagai formateur Kabinet dengan dasar Program Kabinet :

1. Menjelenggarakan persetudjuan Renville.
2. Mempertjepat terbentuknja Negara Indonesia Serikat.
3. Rasionalisasi.
4. Pembangunan.

Susunan Kabinet Hatta selandjutnja diumumkan pada tanggal 29 - 1 - 1948, sebagai berikut :

1.	Perdana Menteri	Drs. Moh. Hatta.
2.	Menteri Pertahanan	Drs. Moh. Hatta.
3.	„ Dalam Negeri (a. i.)	Dr. Sukiman.
4.	„ Luar Negeri	H. A. Salim.
5.	„ Kehakiman	Mr. Susanto Tirtoprodjo.
6.	„ Keuangan	Mr. A. A. Maramis.
7.	„ Kemakmuran	Mr. Sjafrudin Prawiranegara.
8.	„ Persediaan Makanan Rakjat	I. J. Kasimo.
9.	„ P. P. dan K.	Mr. Ali Sastroamidjojo.
10.	„ Kesehatan	Dr. J. Leimena.
11.	„ Agama	K. H. Maskoer.
12.	„ Perburuhan/Sosial	Kusnan.
13.	„ Pembangunan dan Pemuda	Supeno.
14.	„ Penerangan	Moh. Natsir.
15.	„ Perhubungan	Ir. Djuanda.
16.	„ Pekerdjaan Umum	Ir. Djuanda a. i. (kemudian Ir. Laoh).
17.	„ Negara	Sultan Hamengku Buwono IX.

*

b. Kedatangan Muso dan Peristiwa Madiun

PADA tanggal 20 Agustus 1948 telah tiba di Indonesia. Suripno, Wakil Republik Indonesia di Eropah Timur. Pada keesokan harinja Suripno terus menudju ke Jogjakarta.

Bersama dengan pesawat terbang jang membawa Suripno, datang pula ke Indonesia, Muso, pemimpin pergerakan jang terkenal dan sedjak 25 tahun berada diluar negeri. Dia datang dengan nama Suparto sebagai Sekretaris Suripno.

Dalam intervieuw dengan pers di Jogja, Muso mengatakan, bahwa dari permulaan sampai sekarang revolusi Indonesia ini bersifat defensief dan revolusi jang bersifat defensief mesti akan kalah. Letak kesalahan revolusi katanja selandjutnja jalah tidak adanja front nasional dari permulaan hingga sekarang.

Front nasional ini harus berudjud sebagai gabungan dari anggauta-anggauta masing-masing partai berdasar atas keanggautaan perseorangan, sehingga dengan begitu orang-orang jang partyloos jang progressief jang anti imperialis dapat masuk dalam front nasional ini.

Kedatangan Muso di Indonesia mengakibatkan berubahnja djalan partai-partai kiri.

Demikianlah antara lain pada tanggal 24 - 8 - '48 Politik Biro Central Comite P.K.I. mengeluarkan pengumuman antara lain sebagai berikut :

Satu Partai kelas Buruh.

Sebagai koreksi dalam kesalahan dalam lapangan organisasi diwaktu jang lampau, Politik Biro Central Comite P.K.I. mengusulkan supaja diantara 3 partai anggauta F.D.R. jaitu P.K.I., Partai Sosialis dan P.B.I. diadakan fusi, sehingga mendjadi satu partai kelas buruh dengan memakai nama jang bersedjarah, jaitu P.K.I.

Diterangkannja, bahwa menurut kodratnja serta dipandang dari sudut sedjarah, maka hanja kelas buruhlah sebagai kelas jang konsekwen anti imperialis, maka semestinja memimpin revolusi itu.

Mengenai kesalahan dalam lapangan politik dikatakan, bahwa kaum komunis principieel tidak boleh menjetudjui perundingan-perundingan diantara Republik dan Belanda atau negara-negara lain jang akibatnja memberi Unieverband kepada Indonesia, sebab kedudukan sematjam itu dalam prakteknja hanja merupakan djadjahan sadja dengan memakai pakaian baru. „P.K.I. hanja mufakat perundingan-perundingan jang memberi hasil meneguhkan kedudukan dan kedaulatan Republik Indonesia".

Selandjutnja dikemukakan persatuan jang kuat antara seluruh rakjat jang anti imperialis kearah kemenangan. Dikatakan, bahwa udjud satu-satunja jalah Front Nasional jang disusun dari bawah dan disokong oleh semua partai serta golongan dan orang-orang jang progressief dan supaja kabinet segera dirubah mendjadi kabinet Front Nasional.

Demikian pengumuman dari Politik Biro C.C.P.K.I.

Selain pihak P.K.I., maka SOBSI pun telah merubah haluannja.

Sidang Presidium Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia ke III pada tanggal 22 Agustus 1948 di Jogjakarta antara lain memutuskan: Mengakui kesalahan politik kompromi dengan imperialis dan selandjutnja mendjalankan politik anti imperialisme jang konsekwen.

Mendesak kepada Pemerintah: Mentjabut Manifes Politik 1 Nopember 1945; membatalkan Persetudjuan Linggadjati dan Renville, berunding atas dasar kedaulatan negara Republik Indonesia jang penuh.

*

C.C.P.K.I. telah mengirim surat kepada Masjumi dan P.N.I. jang memuat usul agar segera diadakan pembitjaraan untuk mengadakan persatuan nasional jang kuat guna menghadapi desakan imperialisme Belanda jang selalu bertambah itu.

Dalam surat djawabannja atas undangan P.K.I. untuk kerdja sama dalam persatuan nasional guna menghadapi imperialisme Belanda, Masjumi antara lain menerangkan, bahwa berdasarkan pengalaman Masjumi dan rakjat umumnja tentang pendirian dan langkah-langkah golongan P.K.I. cs (F.D.R.) selama ini, Masjumi tidak dapat memenuhi adjakan P.K.I. itu. Walaupun Masjumi djuga anti imperialisme. Surat djawaban ini telah disampaikan kepada pihak P.K.I. pada tanggal 10 September 1948.

Demikian pula Dewan Pimpinan P.N.I. pada tanggal 15 September 1948 menjatakan dengan resmi bahwa P.N.I. tidak dapat memenuhi permintaan P.K.I. untuk mengadakan perundingan guna membentuk front nasional.

Sebagai alasan dinjatakan, bahwa perundingan itu dianggap tidak akan membawa hasil selama rasa tjuriga - mentjurigai masih terdapat pada kedua belah pihak ditambah adanja perbedaan besar tentang azas serta taktik perdjuangan antara P.N.I. dan P.K.I.

Dengan sikap Masjumi dan P.N.I. itu, maka adjakan P.K.I. tidak dapat dilakukan.

*

Pada tanggal 2 September 1948 Wakil Presiden Moh. Hatta memberikan keterangan tentang beleid Pemerintah selama 7 bulan kepada Badan Pekerdja K.N.I.P. di Jogja.

Pada permulaan pidatonja Wakil Presiden Hatta mengingatkan orang pada program kabinet, jaitu:

1. Menjelenggarakan Renville.
2. Mentjapai N.I.S.

3. Rasionalisasi - dan
4. Pembangunan.

Dalam program itu tergambar usaha Pemerintah. Keluar berunding dengan Belanda untuk menjelesaikan persengketaan dengan Belanda dan kedalam memperbaiki penghidupan rakjat dengan djalan menjempurnakan organisasi kita. Perbaikan itu hanja bisa ditjapai kalau diadakan rasionalisasi besar-besaran beserta pembangunan.

Wakil Presiden Hatta menegaskan, bahwa kita tidak bisa mentjapai kedudukan kuat, djika keadaan didalam lemah, baik politik maupun ekonomi. Sebaliknja kekuatan kedalam tidak bisa ditjapai apabila kedudukan Republik dalam lingkungan politik internasional lemah. Karena itu Pemerintah mendjalankan politik realis.

Kemudian dibentangkan oleh Wakil Presiden Hatta tentang sebab-sebab Pemerintah mau menerima usul Critchley - Dubois sebagai dasar melandjutkan perundingan.

Usul itu didasarkan atas tjita-tjita demokrasi jang luas. Disana dikemukakan, bahwa satu konstituante dipilih oleh seluruh rakjat Indonesia setjara demokratis. Konstituante memilih Presiden sementara. Presiden sementara menundjuk P.M. jang akan membentuk kabinet dan kabinet mesti bertanggung djawab kepada konstituante. Konstituante jang merupakan parlemen sementara itu menetapkan negara-negara bagian dari N.I.S. dan merantjang Undang-undang dasar N.I.S. serta mengesahkan statuut Uni Indonesia — Belanda.

Diakui oleh Wakil Presiden Hatta, bahwa usul itu tidak semuanja memuaskan bagi kita, antara lain mengenai ekonomi, tetapi ditegaskannja bahwa penerimaan usul tersebut hanja sebagai dasar perundingan.

Wakil Presiden kemudian mengulangi utjapan Presiden pada tanggal 17 Agustus, bahwa Republik hanja bersedia ikut serta dalam pemerintah interim kalau pemerintah itu bersifat nasional. Kedaulatan dalam prinsipnja dalam tangan Belanda, tetapi dalam prakteknja menurut Renville didjalankan oleh pemerintah interim.

Mengenai peristiwa-peristiwa jang terdjadi di Djakarta, belakangan ini, seperti insiden Pegangsaan Timur (jaitu Belanda menembaki para pandu jang sedang mengadakan peringatan 17 Agustus), dan putusan Belanda untuk mengusir pegawai-pegawai Republik dari daerah pendudukan, Wakil Presiden Hatta menerangkan, ia mendapat kesan seolah-olah Belanda mentjari-tjari sebab untuk menjulitkan djalannja perundingan, karena Belanda sendiri sudah mempunjai program untuk membentuk pemerintah sementara diluar Republik.

Tindakan kedjurusan itu didahului oleh Belanda dengan membentuk negara-negara boneka diatas daerah Republik jang didudukinja sementara dan dengan mengandjurkan konperensi federal antara negara-negara jang dikuasainja seperti jang terdjadi di Bandung.

Tindakan Belanda tersebut bertentangan sama sekali dengan Renville jang menghendaki pengakuan statusquo bukan sadja dalam arti militer, melainkan mengenai djuga hal-hal politik dan sosial.

Sikap Belanda pada waktu jang achir ini menjatakan benar, bahwa mereka ingin kembali kepada tjita-tjita rijksverbandnja, jang sebetulnja tidak pernah dilepaskannja. Politiknja itu mau dipaksakan kepada kita dengan mengadakan satu fait accompli, jaitu dengan menjorongkan satu pemerintah federal sementara jang dibentuknja setjara unilateraal kepada kita.

Wakil Presiden mengandjurkan supaja kita djangan gelisah melihat tindakan Belanda sematjam itu, karena segala perbuatannja itu tidak menundjukkan satu kedudukan jang kuat. Sebaliknja dasar pendirian dan kedudukan kita

keluar adalah kuat, karena kita menundjukkan goodwill untuk melaksanakan dasar Renville.

Tetapi kedudukan kita jang kuat keluar itu, diperlemah oleh kekusutan didalam, oleh pertentangan politik jang makin hebat, seolah - olah kawan seperdjuangan jang berlainan paham dipandang sebagai musuh jang lebih besar dari pada Belanda. Tambahan lagi karena pertengkaran pendirian dalam kalangan F.D.R.

F.D.R. jang melahirkan jang selama ini membela mati-matian persetudjuan Renville sekarang mengusulkan supaja persetudjuan itu dibatalkan dan perundingan dengan Belanda diputuskan. Mereka djuga mengandjurkan supaja Republik jang perdjuangannja adalah menentang imperialisme, terang-terangan memilih tempat pada front anti imperialis jang dipimpin oleh Rusia.

Ditindjau sepintas lalu nampaklah satu kegandjilan politik. Golongan jang bertanggung djawab atas lahirnja Renville sekarang berusaha tidak mau menjelenggarakannja karena Renville sudah diterima negara. Situasi seperti ini sudah tentu melemahkan pendirian kita dalam menghadapi Belanda.

Situasi ini sebenarnja akibat pergolakan politik internasional jang dikuasai oleh pertentangan U.S.A. — RUSIA.

Wakil Presiden Hatta bertanja: apakah kita bangsa Indonesia jang memperdjuangkan bangsa dan negara hanja harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika.

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian jang harus kita ambil jalah supaja kita djangan mendjadi object dalam pertarungan politik internasional melainkan kita harus tetap mendjadi subject jang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperdjuangkan kemerdekaan kita sendiri, jaitu kemerdekaan Indonesia sepenuhnja.

Kita harus pertjaja akan diri sendiri dan berdjuang atas kesanggupan kita sendiri. Perdjuangan harus kita dasarkan atas realitet. Rusia sendiri memberi tjontoh kepada kita, bahwa politik internasional tidak bisa dihadapi dengan sentimen, tetapi dengan realitet dan dengan logika jang rasionil. Untuk memperkuat alat pertahanannja Rusia pada tahun 1939 mengadakan perdjandjian nonagressi pact dengan Djerman dan dengan demikian selama 18 bulan terhindar dari serangan Hitler.

Ditahun 1935 Rusia mengandjurkan kepada bangsa-bangsa terdjadjah supaja menghentikan perdjuangannja terhadap imperialisme kolonial guna kepentingan perdjuangan lawan fasisme.

Kepada komunis diluar Rusia, diandjurkan oleh Rusia supaja bersama pemerintah-pemerintah kapitalis membentuk satu volksfront politik untuk menentang arus fasisme. Bangsa-bangsa terdjadjah diminta supaja membantu volksfront itu. Tentang perdjuangan Indonesia dikatakan oleh Wakil Presiden, bahwa disini terdapat 2 aliran politik jang berlainan jang pada dasarnja sama kuatnja, komunisme dan nasionalisme.

Bagi seorang komunis Rusia adalah modal untuk mentjapai segala tjita-tjitanja, karena perdjuangan komunisme bangun atau djatuh dengan Rusia. Kalau perlu untuk memperkuat kedudukan Rusia, segala kepentingan diluar Rusia dikorbankan, terhitung djuga kepentingan kemerdekaan negara-negara djadjahan, seperti terdjadi ditahun 1935 itu.

Sebab menurut pendapat mereka apabila Rusia sudah menang dalam pertempuran dengan fasisme kemerdekaan bangsa-bangsa terdjadjah akan datang dengan sendirinja.

Pendirian seorang nasionalis adalah berlainan, sekalipun pandangan kemasjarakatan berdasarkan sosialisme. Dari sudut politik nasional, kemerdekaan itulah jang terutama, sehingga segala tudjuan dibulatkan kepada perdjuangan mentjapai kemerdekaan itu.

Dengan sendirinja perdjuangan itu mengambil dasar lain dari pada perdjuangan jang diandjurkan oleh komunis. Kemerdekaan nasional diutamakan, siasat perdjuangan disesuaikan dengan keadaan.

Betapa djuga lemahnja kita sebagai bangsa jang baru merdeka dibandingkan dengan 2 raksasa jang bertentangan, U.S.A. dan Rusia, menurut anggapan Pemerintah kita harus tetap mendasarkan perdjuangan kita atas adagium = pertjaja kepada diri sendiri dan berdjuang terus atas kesanggupan jang ada pada kita.

Mengenai kabinet dikemukakan bahwa dengan dasar Program Nasional belum dapat diadakan kerdja sama antara aliran jang menjetudjui program itu. Pertentangan partai masih hebat. Penindjauan partai-partai untuk mentjapai bentuk kabinet parlementer jang kuat tidak berhasil. Pun meluaskan dasar kabinet dengan reshuffeling kabinet presiden tidak tertjapai.

Menurut Wk. Presiden tidak ada djalan lain melainkan supaja kabinet sekarang ini berdjalan terus, sementara menunggu pemilihan jang akan datang jang akan diselenggarakan se-tjepat-tjepatnja. Atas dasar pemilihan itu akan terdapatlah kelak suatu susunan pemerintah jang mendjadi tjermin keamanan rakjat. Ditegaskannja, bahwa kabinet sekarang sanggup mendjalankan program nasional.

Luasnja kemungkinan bagi Pemerintah untuk mendjalankan se-baik-baiknja ditentukan oleh beberapa hal: 1) oleh keadaan keuangan negara; 2) oleh kesudian rakjat berbakti; 3) oleh sikap pimpinan pergerakan untuk memimpin kebaktian rakjat itu.

Lebih djauh Wk. Presiden menerangkan, bahwa kesukaran didalam negeri bertambah besar, karena senantiasa ada aliran jang tidak mau membedakan revolusi nasional dengan revolusi sosial. Seringkali dilupakan bahwa dalam tingkat perdjuangan sekarang ini kita sedang menjelenggarakan revolusi nasional. Tudjuan revolusi nasional akan patah, kalau ditjampur dengan revolusi sosial.

Djuga diantara orang-orang jang dulu memperingatkan dengan dalil-dalil dari Marx, bahwa kita masih dalam fase revolusi nasional dan karena itu belum waktunja untuk mengemukakan revolusi sosial, ada jang lupa akan teorinja sendiri dan mengandjurkan tindakan membangkitkan revolusi sosial.

Mengenai rasionalisasi dikemukakan, bahwa tak mudah untuk mendjalankannja. Rasionalisasi bukan berarti massa ontslag, melainkan memindahkan tenaga dari pekerdjaan jang kurang atau tidak produktif. Dasar rasionalisasi ialah mendekati perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara.

Kita tahu, bahwa keseimbangan itu tidak akan tertjapai selama negara kita dalam bahaja dan selama pembangunan ekonomi jang normaal belum tertjapai. Semua itu baru bisa ditjapai kalau persengketaan Indonesia Belanda sudah bisa diselesaikan.

Rasionalisasi dari semula ditentang oleh berbagai golongan dengan mengadakan agitasi hebat. Ada pula gerakan anti bajar padjak jang pada dasarnja merugikan Negara. Rasionalisasi kalau mau mendapat hasil, harus didjalankan dengan tjepat.

Mengenai rasionalisasi Angkatan Perang diterangkan, bahwa hasil jang ditjapai dalam usaha itu dihapuskan lagi oleh kenaikan harga barang-barang. Diakuinja bahwa rasionalisasi tersebut belum lagi selesai, berhubung dengan reaksi-reaksi dan rintangan psychologis.

Tentang pembangunan Wakil Presiden mengatakan, meskipun negara menghadapi berbagai-bagai kesukaran, istimewa kesukaran uang, pembangunan masih dapat didjalankan.

Karera negara kita kehilangan daerah-daerah jang subur, maka dengan sendirinja minat ditempatkan kepada memperbesar produksi, terutama produksi pertanian, perchewanan dan perikanan.

Soal tanah jang lama sekali terpendam (selama kabinet Sjahrir dan kabinet Amir djarang disebut) sekarang mendjadi pembitjaraan umum dan mendapat perhatian jang sepantasnja. Kedjadian jang penting jalah penghapusan hak konversi dan penggantian padjak bumi dengan padjak pendapatan biasa. Dalam pada itu akan diusahakan untuk memimpin desa kearah desa koperasi.

Penerangan keluar daerah Republik belum bisa dikatakan baik, tapi suatu kenjataan jang tak bisa diabaikan jalah, bahwa penerangan itu mendjumpai semangat rakjat diseluruh negeri jang membenarkan perdjuangan Republik, karena penerangan kita membawa tjita-tjita kemerdekaan dan keadilan.

Pada achir pidatonja Wakil Presiden antara lain berkata:
Sering dikatakan, bahwa Pemerintah kurang tegas dalam menghadapi berbagai kedjadian dalam negeri jang merupakan kekatjauan. Itu mungkin. Tapi dalam tindakannja, pemerintah selalu mempertimbangkan:

1) mentjapai tata tertib dan kesedjahteraan umum, dan
2) memupuk tumbuhnja demokrasi.

Tindakan Pemerintah demokrasi senantiasa kelihatan lemah, kalau dibanding dengan pemerintah kolonial. Kita mengemukakan pendidikan rakjat kedjalan demokrasi, mereka tidak ambil pusing demokrasi, jang mereka pentingkan hanjalah tata-tertib.

Demokrasi jang baru tumbuh memang sering meliwati batas. Semua hal itu menjerupai „Kinderkrankheit des Radikalismus" Pemerintah akan sabar, dan sikapnja sering merupakan kelemahan.

Tetapi apabila „penjakit kanak" itu meliwati batas, dengan mengadakan intimidasi dan menimbulkan anarchi, sehingga keselamatan negara terantjam, maka Pemerintah akan mengadakan koreksi. Kalau perlu, suatu koreksi dengan tangan besi.

Pemerintah sekarang tidak ragu-ragu dalam menghadapi berbagai hal, sekalipun bersikap tenang. Kami mempunjai garis pemerintahan jang tertentu.

Demikian keterangan beleid pemerintah Hatta kepada BP. KNIP.

*

Pada tgl. 13 September 1948 berkobarlah pertempuran di Solo berhubung dengan adanja pentjulikan-pentjulikan terhadap 7 orang T.N.I., beberapa anggauta P.K.I. dan Barisan Banteng. Sebelumnja itu telah terdjadi pentjulikan atas beberapa opsir T.N.I. Antara P.K.I. dan Masjumi terdjadi perang maklumat: P.K.I. menjatakan kelemahan kabinet Hatta dan diganti dengan kabinet Front nasional. Masjumi mengadjak rakjat berdiri dibelakang Pemerintah Hatta.

Kekatjauan di Solo tsb. disusul dengan peristiwa perebutan kekuasaan jang didjalankan di Madiun oleh orang-orang jang dikenal sebagai anggauta-anggauta organisasi-organisasi jang tergabung dalam F.D.R.

Dalam pengumuman Pemerintah tgl. 19 September ini diumumkan, bahwa dikota Madiun oleh dan dibawah pimpinan P.K.I. (Partai Komunis Indonesia), bekas F.D.R., dengan memakai tenaga kesatuan salah satu brigade tentara di Djawa Timur, telah dilakukan penjerangan atas alat-alat kekuasaan Negara dan penggantian pemerintahan daerah setjara tidak sah dengan kekerasan sendjata.

Pemerintah Republik Indonesia sedang mengambil tindakan-tindakan dengan seluruh alat-alatnja untuk mengembalikan kekuasaan dan pemerintahan jang sah didaerah tersebut.

Kepada seluruh rakjat diminta memberikan bantuan sepenuhnja untuk menjelamatkan negara kita. — demikian pengumuman Pemerintah tsb.

Berhubung dengan peristiwa Madiun itu maka dalam pidato radionja Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1948 berkata:

Pada saat ini Tanah air kita mengalami suatu pertjobaan besar. Selagi kita menghadapi persengketaan dengan Belanda jang menghendaki persatuan rakjat jang bulat dibelakang Pemerintah, supaja kedudukan kita dalam persengketaan itu djadi kuat, selagi kepentingan negara menghendaki persatuan rakjat dipetjah persatuannja itu oleh pengatjau-pengatjau. Perdjuangan politik jang sehat memang dikehendaki untuk menjuburkan tumbuhnja demokrasi kita.

Memang dengan tegas, dengan utjapan Wk. Presiden dalam Badan Pekerdja tgl. 16 bulan ini, menjatakan bahwa Pemerintah menghormat segala matjam ideologi, bahwa ideologi, betapapun djuga tjoraknja, tidak akan ditindas oleh Pemerintah. Tetapi segala tindakan anarchi — dari mana djuga datangnja — dan pengatjau-pengatjau jang membahajakan negara dan mengganggu keselamatan umum akan dibasmi.

Pemerintah hanja menudjukan tindakan korektif kepada pengatjau-pengatjau jang membahajakan negara dan membahajakan keselamatan umum. Tindakan mengatjau itu tidak sedikit terdjadi pada waktu jang achir ini. Ternjata sekali bahwa itu dikemudikan oleh lebih dari satu dalang — jang satu sama lain barangkali tak ada perhubungannja, — tetapi mereka satu dalam tudjuan, jaitu merobohkan Pemerintah Republik Indonesia.

Ternjata sekali bahwa, tudjuan pengatjau-pengatjau itu jalah menimbulkan kegelisahan dalam masjarakat dengan menggedor rakjat, memanas-manaskan hati rakjat dsb. Supaja kepertjajaan kepada Pemerintah djadi hilang. Alat-alat kekuasaan Pemerintah ditjobanja dihasut dan dipengaruhi, dengan mempergunakan kesukaran hidup dimasa sekarang. Tentara jang sedjak dulu berada didaerah pedalaman diadu-dombakan dengan tentara hidjrah. Istimewa terhadap tentara Siliwangi. Tentara kita hendak dipetjah belah supaja lumpuh, agar supaja mereka gampang merobohkan Pemerintah.

Kedalam Divisi IV lama di Solo dapat masuk beberapa element pengatjau itu, jang dikepalai oleh Jadau dan Sujoto, kedua-duanja bekas dari tentara laut jang dibubarkan, karena tak ada gunanja. Achirnja terdjadilah bentrokan antara dua bagian tentara di Solo itu.

Sebenarnja bentrokan ini mudah dipadamkan, tetapi karena pengatjau tidak menghendakinja, mereka menghasut terus, bentrokan ini didjadikan soal politik dan pertentangan politik.

Disini dengan tegas kami katakan, bahwa opsir-opsir sebagai Jadau dan Sujoto itu dipetjat dari tentara.

Sekarang kami perlu lagi memberitahukan satu peristiwa jang lebih genting lagi kepada Saudara-saudara :

Kemarin pagi P.K.I. Muso mengadakan coup, mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun dan mendirikan disana suatu Pemerintah Sovjet dibawah pimpinan Muso. Perampasan kekuasaan ini mereka pandang sebagai permulaan untuk merebut seluruh pemerintah Republik Indonesia. Ternjata dengan ini bahwa peristiwa Solo dan Madiun tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan adalah suatu rantai tindakan untuk merobohkan Pemerintah Republik Indonesia.

Buat ini dipergunakan kesatuan-kesatuan dari brigade 29, bekas kelasjkaran dibawah pimpinan Ltn. Kol. Dahlan. Dengan itu Dahlan telah mengchianati kepada Negara dan melanggar sumpah Tentara. Dahlan ini, kami petjat dari Tentara.

Saudara-saudara, tjamkan benar-benar apa artinja itu :
Negara Republik Indonesia jang kita tjintai, hendak direbut oleh P.K.I. Muso.

Rakjatku jang tertjinta. Atas nama perdjuangan untuk Indonesia Merdeka, aku berseru padamu pada saat jang begini genting, dimana engkau dan kita sekalian mengalami pertjobaan jang sebesar-besarnja dalam menentukan nasib kita sendiri, bagimu adalah pilihan antara dua :

ikut Muso dengan P.K.I.-nja jang akan membawa bangkrutnja tjita-tjita Indonesia Merdeka, — atau
ikut Soekarno — Hatta, jang Insja Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara Republik Indonesia kita ke Indonesia jang Merdeka, tidak didjadjah oleh negeri apapun djuga.

Saja pertjaja, bahwa rakjat Indonesia, jang sudah sekian lama berdjuang untuk mentjapai kemerdekaannja, tidak akan ragu-ragu dalam menentukan sikapnja. Dan djika tidak ragu-ragu berdiri dibelakang kami dan Pemerintah sekarang jang sah, bertindaklah tidak ragu-ragu pula.

Bantulah Pemerintah, bantulah alat Pemerintah dengan sepenuh-penuh tenaga, untuk memberantas semua pemberontakan dan mengembalikan pemerintahan jang sah didaerah jang bersangkutan. Madiun harus lekas ditangan kita kembali.

Bersama ini djuga kami umumkan, bahwa semua perusahaan jang vitaal, sebagai pos, telepon dan telegraf, kereta-api, gas dan listrik, paberik-paberik negara jang menghasilkan minjak, gula, textiel, dan banjak lagi lainnja, sekarang dimiliterisir, dan terhadap semua pegawai jang bekerdja disini berlaku Undang-undang dan peraturan militer.

Saudara-saudara. Kami mengetahui bahwa dari pihak F.D.R. sedjak beberapa waktu jang achir ini berlaku tindasan djiwa jang sistematis kepada buruh, tani, pemuda, pegawai dan rakjat, jang dilakukan dengan tjara intimidasi dan antjaman. Djika Saudara-saudara betul membela kebenarannja, djanganlah takut kepada gertakan dan antjaman, berdjuanglah dan bergeraklah bersama dengan Pemerintah dan alat-alat Pemerintah, untuk memerdekaan diri Saudara dari rasa takut dan untuk mentjapai demokrasi jang sebenarnja dimana tak ada paksaan dan antjaman.

Buruh jang djudjur, tani jang djudjur, pemuda jang djudjur, rakjat jang djudjur, djanganlah sekali-kali memberi bantuan kepada para pengatjau itu. Djangan tertarik oleh siulan mereka.

Dengan serobotan dan pentjulikan jang berlaku waktu jang achir ini, dan dengan coup jang terdjadi di Madiun itu, maka terbukalah kedok F.D.R. — P.K.I. jang memang telah lama merantjang aksi sistematis untuk merobohkan Pemerintah. Dengarkanlah betapa djahatnja rentjana mereka itu.

Dalam rentjana mereka jang mereka susun sedjak Pebruari j.l. pasal XI disebutkan :

„Untuk menjampingi tjara-tjara kampagne tsb. pasal 6 (jaitu aksi legal), maka tindakan illegal tetapi njata harus segera dilakukan :

a. menimbulkan kekatjauan dimana-mana selama Kabinet Masjumi masih memegang tampuk pimpinan Pemerintahan, dengan djalan menggerakkan segala organisasi pendjahat, supaja giat melakukan penggedoran-penggedoran, pentjurian-pentjurian diwaktu malam dan siang hari. Kepolisian belum kuat untuk menghadapi semua itu. Keterangan apabila semua itu dapat didjalankan dengan teliti dan rapi, maka seluruh rakjat akan selalu ketakutan, akibatnja Pemerintah tidak dapat mendapat kepertjajaan.

b. tindakan keras, kalau perlu pentjulikan harus dilakukan terhadap orang-orang jang melawan rentjana Front Demokrasi Rakjat (termasuk mereka jang melepaskan diri dari Sajap Kiri), Partai Buruh Merdeka, S.B.G. d.l.l.-ja.

Demikianlah sebagian dari rentjana jang mereka susun sedjak Pebruari tahun ini.

Pemimpin F.D.R. dahulu dengan tergesa-gesa telah memberi tahukan, bahwa program mereka itu dipalsukan oleh lawan mereka. Tetapi kedjadian-kedjadian jang achir ini membuktikan dengan njata, bahwa program itu benar ;

segala jang terdjadi, sebagai pentjulikan d.l.l. tjotjok benar dengan program itu.

Saudara-saudara bangsaku ! Bangkitlah !

Pemerintah kita mau dirobohkan oleh kaum pengatjau, jang tak sabar menunggu putusan rakjat pada pemilihan umum, negara kita mau dihantjurkan ! Marilah kita basmi bersama-sama pengatjau-pengatjau itu ! Marilah kita datangkan kembali keadaan jang aman dibawah pimpinan Pemerintah.

Demikianlah seruan Presiden Soekarno dalam menghadapi peristiwa Madiun.

*

Dalam pidato radionja pada tgl. 19 September 1948, Menteri Negara Hamengku Buwono IX antara lain berkata sbb. :

Kita sudah 3 th. lebih merdeka. Merdeka sebagai bangsa jang telah memiliki negaranja sendiri jang Merdeka pula. Negara kita ini hasil perdjuangan bersama, didirikan oleh segenap rakjat dari segala golongan, lapisan dan aliran masjarakat.

Maka dalam perdjuangan Kemerdekaan untuk mempertahankan Negara kita ini tidak ada satu golongan pun jang dapat merasa mempunjai hak atau kedudukan istimewa diatas golongan-golongan lain. Sebab memang jang mendirikan Negara kita ini adalah kita bersama seluruh rakjat Indonesia. Pun jang mempertahankan kemerdekaan Negara kita selama 3 th. ini adalah kita bersama djuga. Maka jang selandjutnja harus mempertahankan Negara kita ini adalah seluruh rakjat Indonesia dari segala golongan, lapisan dan aliran itu. Hanja dengan djalan demikianlah kita dapat menjelamatkan Negara kita. Hanja dengan djalan demikianlah kita dapat menghindarkan agar negara kita jang telah 3 th. merdeka itu, tidak dapat didjadjah kembali oleh musuh kita. Sebagai negara demokrasi memang diperbolehkan adanja dan hidupnja bermatjam-matjam aliran dalam masjarakat kita jang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak, keadaan dan djiwa rakjat kita.

Akan tetapi harus diusahakan pula, agar hidup dan berkembangnja aliran-aliran itu harus melalui djalan dan proces jang sehat dan teratur. Sebab demokrasi jang tidak sehat dan teratur terutama dalam fase perdjuangan kita sekarang, pasti hanja merugikan negara kita jang kemerdekaannja masih terantjam, oleh musuh itu.

Maka hendaknja party-strijd jang mendjadi suatu kebiasaan dalam Negara — demokrasi supaja disesuaikan dengan tingkatan (fase) perdjuangan kita itu. Party-strijd harus bersifat korektif dan konstruktif, tidak boleh bersifat permusuhan antara kita sama kita seperti permusuhan antara kita dan pendjadjah Belanda, musuh kita bersama jang sebenarnja.

Terhadap musuh jang satu itu dan tentang keharusan tetap tegaknja kemerdekaan Negara kita, tidak mungkin dan tidak boleh ada perbedaan faham dan pendapat antara kita sama kita.

Kita semua harus awas dan waspada. Djanganlah kita, dari partai apapun djuga memberi kesempatan atau lobangan pada musuh jang berusaha untuk menginfiltrasi di-mana-mana.

Maka kami minta dengan sangat kepada para pemimpin dari semua partai-partai dan badan-badan : Hentikanlah permusuhan jang tak perlu antara kita sama kita itu. Tetapi pengatjau negara harus dibasmi. Rakjat kita membutuhkan pimpinan jang sehat dan bidjaksana dari Saudara-saudara.

Sikap jang setepat-tepatnja pada saat ini tak lain adalah : dengan gotong rojong antara kita sama kita dari segala golongan, lapisan dan aliran, menghadapi segala pengatjau, menentang kembalinja pendjadjah dari manapun, melawan musuh kita bersama. Sebab djika kemerdekaan kita sampai dapat dirampas kembali oleh musuh, segenap rakjat Indonesia jang menderita ke-

rugian. Rakjat kita menunggu pimpinan Saudara-saudara jang sehat dan bidjaksana. Sebab rakjat kita tidak menghendaki adanja pengatjau itu.

Sebagai penutup kami serukan pada Saudara-saudara :

Bantulah segala usaha dan tindakan-tindakan Pemerintah untuk menjelamatkan Negara dengan memberantas segala anasir-anasir jang anarchistisch dan mengatjau jang direct atau indirect dipengaruhi/diperalat oleh musuh, — jang merugikan kemerdekaan kita itu.

Bantulah Presiden dan Wakil Presiden kita dalam segala tindakan-tindakannja untuk mengatasi kepentingan ini.

Demikian isi pidato Menteri Negara Hamengku Buwono ke IX.

*

Pidato Wakil Presiden Hatta dalam B.P.K.N.I.P.

Seperti diketahui P.K.I. Muso telah mengadakan coup perampasan kekuasaan di Madiun dan mendirikan disana satu pemerintahan baru sebagai permulaan untuk merobohkan Pemerintah Republik Indonesia, demikian Wakil Presiden Hatta dalam Badan Pekerdja K.N.I.P. tgl. 20 September 1948.

Sudah tersiar, demikian Wakil Presiden Hatta selandjutnja, bahwa utjapan Sumarsono bunjinja : „Dari Madiun mulai kemenangan", dan njatalah, bahwa pemberontakan ini bermaksud merobohkan Pemerintah dan menguasai seluruh Republik. Tersiar pula berita, bahwa Muso akan mendjadi presiden dan Amir Sjarifuddin perdana menterinja. Sebenarnja telah terbajang maksud F.D.R. untuk mengadakan perampasan kekuasaan, kalau tak lekas-lekas diadakan kabinet parlementer dibawah pimpinan F.D.R. Program rahasianja jang mengandung pasal-pasal tentang aksi legal dan illegal merentjanakan 4 tingkat dalam melakukan aksi :

1) rapat besar dan tertutup dengan mengadakan pelbagai demonstrasi.
2) mengadakan pemogokan-pemogokan.
3) mengadakan kekatjauan-kekatjauan dengan mengandjurkan perampokan dan melakukan pentjulikan.
4) perampasan kekuasaan.

Ke-empat fase itu didjalankan oleh F.D.R. dengan tjara teratur sekali. Perampasan kekuasaan di Madiunpun dilakukan dengan mempergunakan barisan garong jang habis merampasi harta benda pegawai-pegawai Pemerintah disana. Pemerintah telah berkali-kali berkata, bahwa Pemerintah membela demokrasi dan menghormati segala ideologi. Dalam negara jang berdemokrasi, tiap-tiap golongan bisa merebut kekuasaan pemerintahan negara tetapi tidak dengan djalan perkosa, melainkan dengan djalan pemilihan umum, dimana rakjat mendjadi hakim untuk menentukan partai mana atau golongan mana jang akan mendjadi partai pemerintah, berdasarkan kepertjajaan rakjat padanja.

Undang-Undang pemilihan umum telah ada, dan Pemerintah telah mendjandjikan mengadakan pemilihan umum se-lekas-lekasnja. Tapi F.D.R. tidak sabar, ia mau berkuasa sekarang djuga. Tapi kekuasaan jang direbut dengan pemberontakan itu apakah itu bisa mendjadi satu pemerintahan parlementer jang begitu diinginkan oleh F. D. R.

Djauh dari pada itu ! F. D. R. atau sekarang namanja P.K.I. tak mempunjai djumlah terbanjak dalam B.P.K.N.I.P. dan tak dapat berkuasa sendiri sebagai Pemerintah parlementer. Dan kalau sekiranja ia mempunjai djumlah anggauta terbanjak dalam B. P. tak perlu ia mengadakan coup untuk merebut kekuasaan.

Tapi karena P. K. I. bukan djumlah terbanjak dalam B. P. ini, ia ingin berkuasa dengan merebut kekuasaan dengan paksaan, dengan perkosa. Ia ingin mengadakan diktatur, meletakkan kemauannja kepada golongan jang terbanjak. Kalau diktaturnja mesti diadakan, bukanlah semestinja diktatur satu golongan jang mendasarkan segala-galanja atas kepentingan segolongannja sendiri, melainkan lebih baik diktatur Presiden, jang berdiri diatas segala golongan.

Tapi kita tak menghendaki diktatur, kita menghendaki demokrasi.

Tjukup diketahui umum, bahwa saja ingin sekali mentjapai satu kabinet parlementer dan berusaha kuat untuk mentjapainja, demikian selandjutnja Wakil Presiden Hatta. Kabinet sekarang ini saja maksud bermula untuk satu dua bulan sadja, sekedar untuk menenteramkan suasana dan pertentangan politik jang begitu hebat.

Dari semulanja F.D.R. saja adjak ikut serta, supaja tertjapai team-work, kerdja sama jang baik dalam kabinet, jang mendjadi dasar jang pokok untuk kabinet parlementer jang akan menjusul. Tapi F. D. R. menolak tawaran saja, dengan mengatakan, bahwa F. D. R. hanja mau ikut serta kalau separoh dari pada djumlah kursi kabinet diberikan padanja dan jang diminta itupun jang penting semuanja.

Sekali lagi saja tjoba menarik F. D. R. dalam kabinet sesudahnja terbentuk Program nasional. Tetapi F.D.R. menolak dengan alasan tidak setudju ikut serta dalam kabinet Presiden dan hanja mau mengambil bagian dalam parlementer.

Tapi sukarnja, aksi F.D.R. jang begitu hebat dan bermusuhan terhadap golongan lain, istimewa Masjumi menjingkirkan segala kemungkinan untuk membentuk kabinet parlementer.

Itulah gunanja kabinet Presiden untuk melitjinkan djalan ke kabinet parlementer dengan mengadakan team - work jang baik lebih dulu antara partai-partai, sehingga permusuhan bertukar mendjadi persahabatan. Seperti diketahui usaha kami gagal karena sikap menolak dari pihak F.D.R.

Sekarang P.K.I. Muso telah mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun dan bermaksud akan merobohkan Pemerintah. Kita sekarang menghadapi satu bahaja jang besar, jang mengantjam keselamatan negara kita. Hanja pihak Belanda jang akan memperoleh keuntungan besar dari pada aksi Muso ini. Sebab apabila P.K.I. Muso berhasil merebut kekuasaan dengan merobohkan Pemerintah Republik Indonesia, maka Belanda barangkali dengan bantuan Amerika Serikat akan menjerbu Republik dan menguasainja.

Muso sudah satu kali menjebabkan bangkrutnja pergerakan rakjat, jaitu tatkala ia menggerakkan pemberontakan tahun 1926 dengan persiapan dan persediaan dan sjarat jang tak tjukup sehingga gagal sama sekali dan mengakibatkan beratus-ratus rakjat dibuang ke Boven Digul.

Djanganlah sampai kedua kalinja Muso mendjadi sebab bangkrutnja tjita-tjita Indonesia Merdeka. Kita harus memberantasnja.

Untuk mendjaga keselamatan Negara, Pemerintah perlu bertindak tjepat, perlu mempunjai dasar untuk melakukan tindakan jang semestinja. Undang-Undang keadaan bahaja tidak mentjukupi dalam hal ini, sebab itu dengan ini kami madjukan pada Badan Pekerdja satu rentjana undang-undang tentang „Pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaja" jang kami minta bukan untuk se-lama-lamanja, melainkan untuk 3 bulan sadja.

Kami harap Badan Pekerdja sudi menerimanja dengan selekas-lekasnja, agar supaja Pemerintah mendapat pegangan untuk mengatasi segala kemungkinan, — demikian kata achir Wakil Presiden Hatta.

Undang - Undang tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaja

Satu-satunja pasal.

Selama tiga bulan, terhitung mulai tanggal 15 September 1948 kepada Presiden diberikan kekuasaan penuh (plein pouvoir) untuk mendjalankan tindakan-tindakan dan mengadakan peraturan-peraturan dengan menjimpang dari Undang - Undang dan peraturan - peraturan jang ada, guna mendjamin keselamatan negara dalam menghadapi keadaan bahaja jang memuntjak.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 20 September 1 9 4 8
Presiden Republik Indonesia
ttd. Soekarno.

Badan Pekerdja K. N. I. P. dalam sidangnja pada tanggal 20 September '48 setelah mendengarkan keterangan Pemerintah tentang kegentingan suasana, kemudian membitjarakan Rentjana Undang-Undang tentang „Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam keadaan Bahaja".

12 Anggauta minta bitjara. Dalam kesimpulannja 11 pembitjara menjatakan persetudjuannja. K. Werdojo tak setudju karena sebetulnja sudah ada Undang - Undang dan peraturan jang pada hakekatnja tidak berlainan dari maksud Undang - Undang jang dibitjarakan sekarang.

Anggauta Sjamsudin (Masjumi) minta supaja diadakan kernkabinet.

Maruto Nitimihardjo dari Partai Rakjat. S. M. Abidin dulu P. B. I. jang menurut keterangannja telah ditinggalkan oleh partainja dan Mr Kasman mengandjurkan djangan hendaknja tindakan - tindakan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menggentjet aliran komunis, melainkan ditudjukan semata-mata kepada orang jang mengatjau. Menurut Abidin tidak seluruh F.D.R. bersalah dan tidak hanja F.D.R. jang bersalah. Ia minta supaja kebebasan berpartai djangan dirintangi. Werdojo menjatakan belum jakin akan adanja gerakan merobohkan Pemerintah, tetapi kalau keadaan memang genting diakuinja.

Rasuna Said minta supaja selekasnja diadakan permusjawaratan rakjat. Tedjasukmana menjatakan bahwa pemberian kekuasaan penuh sudah terlambat. Ia minta Pemerintah supaja memberikan feitenmateriaal tentang apa jang telah dikerdjakan oleh Pemerintah.

Pemerintah dalam djawabannja menerangkan bukan maksud Pemerintah untuk menggentjet, merintangi atau menghalangi kebebasan berpartai.

Kekuasaan besar jang diminta dari B.P.K.N.I.P. achirnja diberikan. Undang-Undang mengenai pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden telah disetudjui oleh B.P.K.N.I.P. dengan 25 lawan 1 suara.

⁂

11. CLASH KE II

PERUNDINGAN - PERUNDINGAN dengan pihak Belanda bertambah hari bertambah seret. Suasana politik bertambah tegang. Sedang keadaan negeri kita dikeruhkan oleh peristiwa Madiun. Untuk memberi bimbingan dalam keadaan jang gelap ini, wakil Presiden Hatta pada tanggal 17 Nopember 1948 **mengadakan pidato radio,** jang isinja sebagai berikut:

Persengketaan dengan Belanda mentjapai suatu tingkat jang minta penjelesaian dengan lekas, jang hanja bisa ditjapai apabila ada goodwill dari pada kedua belah pihak, demikian antara lain Wakil Presiden Hatta dalam pidato radionja tanggal 17 Nopember 1948.

Kata Wakil Presiden selandjutnja, tentang perundingan dengan Belanda, banjak sudah pendirian politik jang dikemukakan, banjak sudah pemandangan jang ditjurahkan tentang baik atau tidaknja. Tetapi jang mendjadi pokok bagi kita untuk menjelesaikannja, ialah pertanjaan:

Apa tudjuan kita.

Apakah kita semata-mata menudju Republik Indonesia sadja, memperdjuangkan kemerdekaannja jang sempurna, ataukah kita berdjuang untuk mentjapai kemerdekaan rakjat Indonesia diluar Republik? Kalau kita mau mentjapai kemerdekaan bangsa Indonesia seluruhnja, seperti jang ditjiptakan selama ini oleh pergerakan nasional kita, tentu politik jang kita djalankan berlainan dengan politik jang ditudjukan hanja untuk Republik sendiri.

Untuk itu perlu diadakan perundingan dengan Belanda jang menguasai sebagian dari Indonesia dan perlu pula diperkuat rasa persatuan dengan rakjat Indonesia diluar Republik. Djangan kita mau diadu dombakan, tapi tjari persesuaian dan persatuan.

Karena sentimen belaka, kita mudah mentjela negara-negara boneka jang didirikan Belanda. tetapi baiklah kita dasarkan politik kita kepada kenjataan, bahwa rakjat disana djuga ingin merdeka dan melihat kepada Republik sebagai lambang kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pada saat ini jang kita mendekati tanggal 1 Djanuari 1949, jang berarti suatu saat jang penting bagi seluruh rakjat Indonesia, kita tidak boleh mengadakan politik antithetis terhadap saudara-saudara kita sebangsa diluar daerah aman Republik, melainkan harus mengemukakan politik sinthese. Bersama mereka kita akan mendirikan Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat, jang harus ditjapai dalam waktu jang singkat. Bersama mereka kita akan menghadapi segala rintangan jang ingin menangguh-nangguh waktu kemerdekaan.

Banjak sentimen jang harus diatasi, tetapi pandangan jang luas perlu untuk mentjapai tjita-tjita kita dalam waktu jang singkat.

Perundingan dengan Belanda sudah lama terhenti. Apa akan dimulai lagi ini tergantung kepada sikap Belanda sendiri. Dengan kedatangan Menteri Stikker ke Jogja, suasana jang genting berangsur baik, tapi sajang pada waktu

jang achir ini tindakan-tindakan pihak Batavia tak putusnja menimbulkan suasana jang keruh.

Siaran-siaran dari Leger-contacten mereka senantiasa menghasut membangkitkan semangat perang. Kemauan jang baik dari minister Stikker pun ditentang.

Terhadap keributan itu kita harus tenang dan sabar, djangan mau diprovoseer. Kita tetap berdiri diatas dasar mau damai dengan tiada meninggalkan dasar ksatria: membela diri kalau diserang dan melawan mati-matian. Tetapi kalau tidak diserang kita akan menetapi perdjandjian jang telah kita tandatangani dibawah penilikan Dewan Keamanan U.N.O. jaitu mendjaga dan memelihara suasana damai. Ini kewadjiban kita semuanja, Pemerintah dan rakjat.

Sekarang beberapa patah kata saja tudjukan kepada alat-alat Negara kita jang berkewadjiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban diseluruh daerah Republik, ja'ni Angkatan Perang dan Polisi.

Dalam keadaan jang kita hadapi, dimana persoalan politik diantara negara kita dan negeri Belanda belum selesai, dimana penghidupan didaerah kita tertekan oleh keadaan ekonomi, dimana kita sedang sibuk menghantjurkan sisa-sisa dari golongan-golongan jang mau merobohkan negara kita dari dalam dan mengganggu ketenteraman umum, maka dari Angkatan Perang dan Polisi diminta keichlasan jang sebesar-besarnja terhadap kewadjiban jang dipikulkan kepadanja, dan disamping itu kesabaran serta kebidjaksanaan.

Persetudjuan gentjatan sendjata meletakkan kewadjiban-kewadjiban jang penting pula atas bahu Angkatan Perang dan Polisi, teristimewa atas bahu mereka jang bertugas disepandjang garis status-quo. Dan mereka diharapkan untuk terus berdjaga-djaga dan mengambil segala tindakan untuk menghindarkan supaja golongan-golongan jang tidak bertanggung djawab djangan mendjalankan perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan Persetudjuan Gantjatan sendjata, umpamanja berangkat dari daerah kita kedaerah sana atau sebaliknja dan maksud-maksud jang tidak sesuai dengan Persetudjuan Gentjatan Sendjata.

Tentang hal ini pimpinan Tentara dan Polisi akan memberikan perintah-perintah dan pendjelasan lebih landjut dan terhadap mereka jang melanggar perintah-perintah itu akan diambil tindakan-tindakan menurut hukum militer.

Selandjutnja Wk. Presiden berkata, bahwa ada orang jang hilang harapannja tentang hasil perdjuangan sendiri, lantas menggantungkan nasib bangsanja kepada negeri asing. Sikap ini menjalahi tjita-tjita nasional. Dengan itu jang dibela ialah tjita-tjita negeri tempat bergantung tadi.

Peristiwa Madiun adalah suatu tragedi nasional jang sedih. Akibatnja tidak sadja menimbulkan kesukaran pada waktu sekarang, tetapi djuga mempengaruhi hasil panen dimasa j.a.d., karena persediaan padi dan bibit habis dibakar. Kaum pemberontak di Madiun tidak puas dengan merebut kekuasaan dan memaksa rakjat tunduk dan taat kepada mereka. Mereka membunuh lawan politiknja dengan tjara jang amat kedjam.

Sepintas lalu keganasan itu berdasar kepada kelemahan golongan minoritet jang merebut kekuasaan jang tak dapat mereka pertahankan setjara demokrasi. Itu adalah pembawaan dari segala diktatur golongan ketjil. Terror menimbulkan contra terror jang dengan susah pajah dapat ditjegah oleh pemerintah. Peristiwa Madiun ini adalah suatu pertjobaan rakjat Indonesia diatas djalan kemerdekaan dan demokrasi. Masjarakat kita terpetjah dalam beberapa golongan jang saling membentji. Adanja retak itu suatu kerugian sosial. Kita harus berusaha memperbaikinja kembali dengan berpegang kepada pantja sila.

Terror adalah sendjata diktatur, bukan djalan untuk merdeka, tapi djalan kepada perhambaan rakjat. Sistim penghambaan tidak akan melahirkan orang

merdeka jang bersifat sosial. Tudjuan revolusi nasional kita bukan semata-mata kemerdekaan bangsa, tapi lebih djauh lagi, jaitu mentjapai kemerdekaan manusia dari segala tindasan.

Wk. Presiden berkata selandjutnja, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan demokrasi dan kewadjiban kita semua memupuk demokrasi ini jang sedang tumbuh.

Tidak ada jang lebih berbahaja bagi kembangnja demokrasi dari pada diktatur jang disorongkan oleh salah satu partai atau golongan.

Tiap orang harus merdeka mengeluarkan pikirannja, merdeka memeluk agama sendiri, mengeritik jang dianggapnja salah, asal dalam batas kesopanan. merdeka berorganisasi dan bebas dari antjaman.

Dalam negeri demokrasi, tiap golongan boleh merebut kekuasaan pemerintahan, tapi dengan djalan demokrasi dan menurut hukum tatanegara. Partai jang ingin berkuasa harus berusaha mendapat pengikut jang terbanjak dalam masjarakat dan dengan itu mempengaruhi susunan Dewan Perwakilan Rakjat pada pemilihan umum jang berikut. Kemauan rakjat mendjadi pedoman bagi Pemerintah jang bertanggung djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih oleh rakjat.

Demokrasi menghendaki sportivitet, mengakui ada faham lain disebelah faham sendiri, bersedia untuk tunduk kepada putusan jang terbanjak dengan tiada melepaskan faham sendiri. Perdjuangan kita djauh dari selesai.

Betapa djuga faham dalam politik dan taktik, pertjaja mempertjajai, harus ada dan harus diperbuat. Perdjuangan rakjat tegak dan djatuh dengan persatuan kita.

Jang harus dikerdjakan dewasa ini ialah memperbaiki kembali moraal politik jang dirusak, didasarkan kembali kepada kedjudjuran, djika partai-partai politik tidak berhasil dalam hal ini, sukarlah mentjapai pendidikan politik kepada rakjat jang didasarkan kepada tanggung djawab rakjat atas nasibnja.

Sarekat Sekerdja katjau organisasinja karena gara-gara F.D.R., ia harus dibangunkan kembali atas dasar jang sehat, ditudjukan kepada kepentingan dan keselamatan buruh sebagai faktor produksi jang terpenting. Pada waktu jang achir ini sukar membangunkan kembali organisasi Sarekat Sekerdja, karena pemimpin-pemimpin jang mengerti kepentingan buruh jang mau melepaskan Serikat Sekerdja dari pengaruh partai politik merasa terkuntji langkahnja. Sjukurlah tanggal 25 jang akan datang akan diadakan suatu konperensi buruh untuk membangun kembali Sobsi diatas dasar jang sehat, dengan politik perburuhan jang konstruktif terhadap Negara dan terhadap kepentingan buruh sendiri.

Barisan Tani hendaknja dapat hidup kembali diatas dasar jang sehat dengan pimpinan jang sehat. Gerakan Tani pada dasarnja harus membantu memperkuat sendi negara jang lagi berdjuang dan tidak seperti dimasa jang lalu diandjurkan untuk ikut merobohkan Negara.

Djuga Gerakan Pemuda harus menindjau dasar-dasar perdjuangannja, harus merupakan kembali gerakan jang hidup untuk membangun negara. Kami turut mentjiptakan pemuda Indonesia sebagai pembangun negara, pelopor untuk mentjapai kesedjahteraan dan kemakmuran rakjat dimasa datang.

Pimpinan politik kenegaraan, maupun jang dari Pemerintah ataupun jang dari pihak pergerakan harus ditudjukan kepada solidaritet bangsa jang masih berdjuang untuk mentjapai kemerdekaan nasional jang sepenuh-penuhnja. Dari pada demagogi belaka untuk mentjari pengaruh, lebih baik dipergunakan segala tenaga untuk mentjapai perbaikan hidup rakjat kita.

Achirnja Wk. Presiden Hatta menjatakan penghargaan kepada Angkatan Perang, Polisi jang mendjalankan kewadjiban dalam keadaan jang sulit ini.

Demikianlah telah diutjapkan oleh Wk. Presiden Hatta:
Apa tudjuan perdjuangan kita.

*

Selandjutnja dapat dikemukakan disini, bahwa perundingan-perundingan tentang penjelesaian soal Indonesia Belanda pada hari-hari berikutnja nampak akan menemui djalan buntu. Makin lama suasana politik makin mendjadi buruk.

Sebetulnja mengenai perundingan-perundingan tsb. antara Delegasi Indonesia dan Belanda, demikian pula dalam pembitjaraan-pembitjaraan antara Menteri-menteri Belanda jang berkundjung ke Indonesia (Menteri-menteri Stikker, Sassen dan L. Neher) dengan Wk. Presiden Hatta, telah banjak konsesi diberikan oleh Pemerintah Republik, bahkan sampai mengenai soal jang berhubungan dengan kekuasaan dari Wakil Tinggi Mahkota.

Malahan pada tgl. 11 Desember '48 Pemerintah Belanda di Den Haag telah mengeluarkan maklumat resmi mengenai pembitjaraan dengan Menteri di Indonesia, dimana dikatakan, bahwa tidak ada gunanja untuk mengadakan perundingan setjara resmi atau tidak resmi dengan bantuan K.T.N. selama Republik tidak mau merubah sikapnja setjara radikal terhadap penglaksanaan persetudjuan Renville.

Tidak ada faedahnja pula, karena Republik tidak menjanggupi penglaksanaan gentjatan sendjata. Pembitjaraan tidak bisa ditangguhkan lagi. Pemerintah Belanda sekarang memutuskan untuk mendirikan pemerintahan interim Indonesia dan menjerahkan kekuasaan besar kepadanja.

Pemerintah Belanda memberi tahukan kepada K.T.N. bahwa kini telah saatnja memproklamasikan Pemerintah Indonesia dimasa peralihan jang telah dibitjarakan dengan para wakil daerah federal.

Kini njata, bahwa Republik tidak mendjundjung tinggi persetudjuan gentjatan sendjata dan tidak mampu menaati persetudjuan Renville.

Pemerintah Belanda tidak akan melambatkan lagi penglaksanaan terdjaminnja hukum tata-negara.

Demikian antara lain bunji maklumat pemerintah Belanda di Den Haag.

Suasana kemudian mendjadi tambah genting. Hal ini telah berulang-ulang ditegaskan oleh pihak pemerintah dan achirnja didjelaskan lagi oleh Panglima Tertinggi sendiri dan Panglima Besar Tentara dalam order hariannja tanggal 16 - 12 - 1948.

Dalam pada itu dalam konperensi pers jang diadakan pada tgl. 16-12-'48, Ketua Delegasi Mr. Moh. Rum menerangkan, bahwa dalam surat Wakil Presiden Hatta jang disampaikan pada Cochran pada tgl. 13 Desember telah dibantah tuduhan Belanda, dengan menegaskan sekali lagi pendirian Republik jang mengenai pasal 1 Renville (soal pengakuan kedaulatan Belanda) dan jang mengenai pimpinan tentara dimasa peralihan. Pendapat Republik tentang kedua soal itu dalam garis besarnja sedjalan dengan apa jang terdapat dalam usul Critchley/Dubois dan usul Cochran, sehingga diketahui benar-benar bahwa tuduhan Belanda tadi tidaklah benar.

Bagi Republik dan rakjat Indonesia umumnja, masa peralihan itu berarti masa menudju kepada berachirnja kekuasaan dan kedaulatan pemerintah Belanda di Indonesia sehingga lekas dapat tertjapai Negara Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat dan bukan kembalinja kekuasaan tertinggi untuk seluruh Indonesia kepada Belanda lagi.

Demikianlah keterangan Mr. Moh. Roem selaku Ketua Delegasi Indonesia.

Sebaliknja Belanda tetap pada pendiriannja untuk minta hak penuh dalam masa interim, dengan memakai alasan berdasarkan kekuasaannja de jure. Akan tetapi, bahwa Republik Indonesia dalam 3 tahun ini sebagai pemerintah jang merdeka telah menundjukkan mempunjai kekuasaan de facto jang diakui oleh

bangsa Indonesia, pemerintah Belanda tidak dapat melihatnja, apa lagi mengakuinja. Bahkan Belanda merasa dirinja mempunjai tjukup alasan untuk menjerang dan memuntahkan segala alat angkatan perangnja guna menghapuskan Republik Indonesia jang menurut pendapatnja tidak ada itu.

a. Ibu Kota R. I. Jogjakarta dalam waktu pendudukan Belanda.

PADA tanggal 19 Desember 1948 pada djam 6.45 Belanda memulai gerakannja menduduki kota Jogjakarta. Dengan pesawat terbang tentara Belanda didatangkan di Jogjakarta jang terus mengadakan kepungan dan serangan terhadap kota.

Pada hari tgl. 19 Desember pagi-pagi itu pemimpin pemerintahan jang ada dikota Jogjakarta berkumpul di Istana dan bersidang dipimpin oleh Presiden Soekarno, guna membitjarakan segala sesuatu berkenaan dengan serangan tentara Belanda itu.

Antara lain diambil keputusan:

Memindahkan kekuasaan: Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran jang sedang berada di Sumatera dengan perantaraan radio diberi kuasa untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia, djika Pemerintah Pusat oleh karena keadaan, tidak mungkin lagi mendjalankan kewadjibannja.

Perintah sematjam ini djuga diberikan kepada Mr. Maramis, Menteri Keuangan jang sedang berada diluar negeri dan Dr. Sudarsono di New Delhi, untuk berusaha membentuk Gouvernment in exile di New Delhi, djika usaha Mr. Sjafrudin Prawiranegara gagal.

Adapun lengkapnja instruksi-instruksi tsb. adalah s.b.b.:

MANDAAT PRESIDEN KEPADA MR. SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA

Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan, bahwa pada hari Minggu tgl. 19-12-1948, djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu Kota Jogjakarta.

Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintah Republik Darurat di Sumatera.

Jogjakarta, 19 Desember 1948

Presiden :	Wk. Presiden :
Soekarno	**Moh. Hatta.**

Pro Dr. Sudarsono — Palar — Mr. Maramis New Delhi

Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tgl. 19-12-1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu Kota Jogjakarta.

Djika ichtiar Sjafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera tidak berhasil kepada saudara-saudara dikuasakan untuk membentuk exile Gouvernment Republic Indonesia di India.

Harap dalam hal ini berhubungan dengan Sjafrudin di Sumatera.

Djika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunja.

Jogjakarta, 19 Desember 1948.

Wakil Presiden :	Menteri Luar Negeri :
Moh. Hatta.	**Agus Salim.**

Selandjutnja pada pagi hari itu djuga Pemerintah mengeluarkan maklumat jang disiarkan melalui R.R.I. Jogjakarta jang isi selengkapnja s.b.b.:

MAKLUMAT PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Hari ini ttg. 19 Desember, Minggu pagi djam 6.00 waktu Jogjakarta, angkatan perang Belanda sekonjong-konjong memulai serangannja terhadap Republik Indonesia. Angkatan Udaranja hingga sekarang memusatkan serangannja terhadap kota Jogja dan lapangan terbang Maguwo di Jogja.

Dengan perbuatan ini pemerintah Belanda mengindjak-indjak perdjandjian gentjatan-sendjata jang telah ditanda-tangani dengan penjaksian Komisi Tiga Negara U.N.O.

Dengan perbuatannja ini ia menjatakan pula bahwa ia tiada memperhatikan kesopanan dan perasaan baik-buruk umum didunia. Ia mengulangi tjara-tjara berlaku seperti kaum Nazi dan Militeris Djepang ketika memulai peperangannja di Eropah Barat dan serangan Pearl Harbour.

Perbuatan itu bertentangan sama sekali dengan keadilan dan kesopanan dan semata-mata menjatakan kepertjajaan pada kekerasan dan paksaan. Bangsa Indonesia didalam perdjuangannja menuntut keadilan dan kebenaran, mempertahankan kemerdekaan dan Kehormatannja, berhadapan sekarang dengan kekerasan dan paksaan militer Belanda ini untuk kedua kalinja sedjak pengumuman Kemerdekaan Republik Indonesia. Didalam perdjuangannja jang adil dan benar ini, menghadapi paksaan, kekerasan dan ketidak djudjuran pihak Belanda, pasti seluruh dunia jang berperasaan sehat ada pada pihak kita dan pasti pula, bahwa djuga sekali ini pihak jang berdiri atas dasar adil dan benar akan menang terhadap paksaan, kekerasan dan kelaliman.

Seluruh bangsa kita harus mendjadi satu didalam tekad mempertahankan Kemerdekaan serta kehormatannja untuk menggagalkan maksud kedji pihak Belanda, untuk memaksakan kekuasaannja terhadap bangsa kita.

Kita benar, kita Insja Allah pasti akan menang.

Jogjakarta, 19 Desember 1948.

Demikian pula Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta masing-masing menjampaikan amanatnja jang isi selengkapnja seperti dibawah ini:

Amanat P.J.M. Presiden Republik Indonesia

Bangsaku jang tertjinta.

Pada hari ini tanggal 19 Desember 1948, pada djam 6 pagi Belanda telah mulai dengan serangan atas kota Jogjakarta dan sekitarnja. Dengan tindakan ini njata bahwa Belanda telah mulai lagi perang kolonialnja untuk menghantjurkan Pemerintah dan negara Republik Indonesia agar mereka dapat mendjadjah kembali seluruh tanah air dan bangsa Indonesia.

Setelah kita berbulan-bulan berusaha dengan segala ketulusan hati untuk menjelesaikan pertikaian dengan Belanda setjara damai sekonjong-konjong mereka dengan tidak memberi tahu lebih dahulu mempergunakan alat sendjata jang ada pada mereka untuk melakukan kehendak mereka dengan paksaan dengan tidak mengindahkan adanja K.T.N. di Jogjakarta, dengan tidak memperdulikan adanja perdjandjian gentjatan sendjata mereka telah meniadakan segala kemungkinan untuk mentjapai penjelesaian setjara damai.

Kami pertjaja bahwa seluruh rakjat Indonesia maupun jang berada di Daerah Republik ataupun jang berada didaerah jang diduduki Belanda serentak akan berdiri dibelakang Republik untuk menentang dengan segala tenaga dan batin jang ada pada kita tindakan jang melanggar peri kemanusiaan ini.

Kami mengetahui bahwa dengan kekuatan sendjata mereka, Belanda mungkin akan dapat merebut dan menduduki beberapa tempat jang penting, akan tetapi tidak mungkin mereka dapat mematahkan semangat perdjuangan kita atau mengurangkan kemerdekaan bangsa Indonesia jang telah kita insjafkan dan pertahankan selama tahun ini.

Kemerdekaan kita jang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan telah meresap pada djiwa kita, mustahil dapat ditindas dengan kekerasan.

Marilah bangsaku, kita pertahankan tanah air dan kemerdekaan kita dengan segala tenaga jang ada pada kita.

Teruskanlah perdjuangan kita dan pertjajalah, kemenangan pasti akan pada kita. Insja Allah.

Jogjakarta, 19 Desember 1948
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(SOEKARNO)

Amanat P.J.M. Wakil Presiden

Pada Rakjat seluruhnja.

Belanda telah mulai menjerang setelah kita berbulan-bulan berunding dengan djalan damai untuk menjelesaikan soal Indonesia. Dalam keadaan genting ini saja tidak akan berbitjara pandjang, hanja sebagai kepala Negara menjampaikan beberapa pesan kepada rakjat seluruhnja. Sebagai suatu bangsa jang berkehormatan kita wadjib mempertahankan diri kita dan terus berdjuang dengan tidak putus-putusnja untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia jang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan kita perdjuangkan dengan segala tenaga sampai sekarang ini.

Musuh mau mengepung pemerintah, tetapi Republik Indonesia tidak tergantung pada nasibnja orang-orang jang mendjadi kepala negara atau jang duduk dalam pemerintahan. Rakjat harus berdjuang terus dan saja pertjaja, bahwa seluruh rakjat Indonesia bersedia untuk meneruskan perdjuangan kita ini.

Perdjuangan kita adalah perdjuangan untuk kemerdekaan dan djangan putus berdjuang sebelum tertjapai kemerdekaan kita itu, sebab kita berdjuang dengan kejakinan bahwa perdjuangan kita itu adalah perdjuangan jang adil. Pemerintah tetap akan melakukan kewadjibannja apapun djuga terdjadi dengan dirinja.

Hidup Republik Indonesia,

Hidup perdjuangan Kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sekali Merdeka tetap Merdeka.

Jogjakarta, 19 Desember 1948.
WAKIL PRESIDEN
(Moh. Hatta).

*

Berhubung gerakan Belanda itu dilakukan setjara besar-besaran, sedangkan perlawanan dari pihak Republik boleh dikata tidak ada, maka pada siang hari seluruh kota sudah diduduki tentara Belanda. Para pemimpin terkemuka jang berada di Istana Presiden, termasuk Presiden dan Wk. Presiden ditawan Belanda.

Aksi Militer Belanda tsb. menimbulkan kritik-kritik dan tjelaan-tjelaan pedas terhadap Belanda diseluruh dunia. Kabinet-kabinet N.I.T. dan Pasundan meletakkan djabatannja sebagai protes terhadap tindakan Belanda. Djuga dika-

langan-kalangan anggauta Dewan Keamanan jang pada waktu itu berkumpul di Paris, berita dimulainja agressi Belanda itu sangat menggemparkan. Dengan segera Dewan Keamanan bertindak, K.T.N. diminta setjepat-tjepatnja memberi laporan selengkap-lengkapnja.

Demikianlah laporan K.T.N. tsb. dikirimkan pada tgl. 21 Desember 1948 seperti berikut :

Laporan K.T.N.

Laporan K.T.N. kepada D.K. hanja ditanda-tangani oleh Wakil Amerika Serikat M. Cochran dan wakil-anggauta Australia T. W. Cutts, karena anggauta-anggauta lainnja sedang di Kaliurang. Dewan Keamanan diminta perhatiannja atas :

1. Pihak Belanda waktu membatalkan persetudjuan gentjatan sendjata tidak menurut apa jang sudah ditetapkan dalam artikel 10 dari persetudjuan itu.
2. K.T.N. tidak mengetahui apa pemusatan tentara Republik atau perang-perangan jang diadakan oleh tentara Republik bisa menjebabkan tentara Belanda mengadakan aksi militer dengan tergesa-gesa.
   (Tjatatan redaksi : pada tg. 19 Des. T.N.I. sedang mengadakan latihan besar-besaran selama 5 hari).
3. Bunji surat Belanda kepada Cochran pada tanggal 17 Des., dan permintaan Belanda supaja diberi djawaban dalam waktu terbatas, jang tidak mungkin dipenuhi, mengandung sifat ultimatum.
4. Sifat aksi militer Belanda, seperti jang telah didjalankan oleh tentara Belanda ada memerlukan persiapan-persiapan terlebih dulu jang luas, sehingga sukar bagi K.T.N. untuk menganggap, bahwa persiapan-persiapan itu sudah dilakukan selama diadakan penukaran surat, seperti jang sudah dituturkan oleh K.T.N. kepada D.K. pada tanggal 12 Desember dan 18 Desember.
5. Perundingan jang dilakukan baru-baru ini menurut K.T.N. tidak bisa dianggap perundingan, oleh karena berbentuk tuntutan-tuntutan dari pihak Belanda supaja Republik mengenai soal-soal jang penting menjerah sama sekali kepada Belanda.
6. Pemerintah Belanda dengan aksi militernja pada tgl. 19 Desember telah melanggar persetudjuan Renville.

Selandjutnja K.T.N. menerangkan, bahwa K.T.N. hari Sabtu tg. 18 malam pukul 11.30 diberitahukan dengan perantaraan seputjuk surat kepada Wakil Amerika Serikat tentang pembatalan persetudjuan gentjatan sendjata itu. Beberapa waktu sesudahnja, tidak mungkin mengadakan perhubungan kawat dengan Jogja, sehingga anggauta-anggauta K.T.N. jang berada disana tidak dapat diberi tahu.

Diterangkan pula, bahwa pemerintah Republik djuga tidak diberitahu tentang soal ini. Hanja ada disampaikan kepada Sekretaris Delegasi Republik di Djakarta suatu pemberitahuan seperti jang disampaikan kepada K.T.N. akan tetapi djuga Wakil Republik itu tidak dapat mengadakan perhubungan dengan Jogja.

Laporan itu berachir dengan permintaan kepada D.K. untuk mentjurahkan segala perhatian terhadap dimulainja lagi permusuhan di Indonesia, jang bertentangan dengan persetudjuan Renville.

*

Dalam sidangnja jang diadakan di Paris pada tgl. 24-12-'48, Dewan Keamanan telah menerima resolusi mengenai soal Indonesia—Belanda, jang isinja memberi andjuran kepada pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik

untuk menghentikan tembak menembak dan membebaskan semua tahanan politik jang ditawan sedjak 18 Desember. Dalam pembitjaraan jang achirnja menghasilkan resolusi tsb, djuga diusulkan oleh Amerika supaja tentara Belanda ditarik mundur ke-kedudukannja pada tgl. 18 Desember. Tetapi usul ini ditolak oleh Dewan Keamanan dengan 5 suara setudju dan 6 blanko.

Tuntutan untuk segera menghentikan tembak-menembak diterima dengan suara 7 suara pro dan 4 blanko.

Dengan diterimanja resolusi Dewan Keamanan tgl. 24 Desember itu, maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera mengumumkan sjarat-sjarat jang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Republik, memberikan perintah menghentikan tembak-menembak dan dimulai perundingan dengan Belanda.

1. Pemimpin Republik jang ditawan segera dimerdekakan.
2. Pasukan-pasukan Belanda harus ditarik kembali sampai kedudukannja pada tgl. 18 Desember 1948.
3. Pengakuan de facto dan de jure atas kedaulatan Republik di Djawa, Sumatera dan Madura.
4. Pembentukan Pemerintah Indonesia jang demokratis dan merdeka, „tidak dengan perantaraan Belanda".
5. Penarikan kembali seluruh tentara Belanda selekas-lekasnja dari Indonesia.

Sjarat-sjarat tsb. ialah sebagai dasar kesanggupan Pemerintah Republik memerintahkan kepada tentaranja untuk memenuhi perintah cease-fire dari D.K. dan kesediaan mengadakan perundingan lagi dengan pemerintah Belanda telah dikirimkan kepada Sdr. Palar, Wk. Republik di Dewan Keamanan.

Lain dari pada itu, atas usul Perdana Menteri Birma, Perdana Menteri Pandit Nehru telah mengundang Pemerintah-Pemerintah Negara-Negara Asia untuk bermusjawarat di New Delhi tentang masalah Indonesia. Demikianlah konperensi tsb. diadakan mulai tgl. 20 — 23 Djanuari '49 dikundjungi oleh wakil-wakil Pemerintah dan Penindjau-penindjau dari 21 Negara ialah: India, Persia, Afganistan, Ceylon, Birma, Mesir, Siam, Australia, Syria, Abesinia, Saudi Arabia, Nepal, Libanon, Transjordania, Irak, Yaman, Tiongkok, Pakistan, New Sealand, Pilipina dan Indonesia.

Dalam konperensi tsb. telah ditetapkan sikap dan pula memberikan garis-garis besar, bagaimana tjaranja menjelesaikannja soal Indonesia — Belanda jang mengantjam perdamaian dunia itu.

Adapun hasil konperensi tsb. ialah disimpulkan dalam sebuah Resolusi sebagai berikut:

(A) Bagian pertama:

1. Supaja para anggauta Pemerintah Republik dan pemuka-pemuka Republik lainnja dan sekalian tawanan politik di Indonesia dengan segera dimerdekakan/dibebaskan kembali;
2. Supaja Pemerintah Republik diberi kesempatan bekerdja kembali dengan leluasa, dan guna maksud itu:
   (I) Supaja Residensi Jogjakarta diserahkan kembali kepada Republik dan supaja pihak kekuasaan Belanda djanganlah mengadakan sesuatu tindakan jang boleh mengganggu kepada bekerdjanja Pemerintah Republik setjara effektif. Pemerintah tsb. haruslah diberikan kesempatan untuk mengadakan hubungan, dan diberi keleluasaan untuk bermusjawarat diseluruh daerah-daerah Indonesia;
   (II) Supaja segala daerah dipulau-pulau Djawa, Sumatera dan Madura, jang pada sebelum tgl. 18 Desember 1948 dikuasai oleh Pemerintah Republik, diserahkan kembali kepada Republik, sebelum tanggal 15 Maret 1949.

(III) Supaja pasukan-pasukan Belanda ditarik kembali (a) segera dari daerah residensi Jogja ; dan (b) berangsur-angsur dari daerah Republik sebagaimana jang diterangkan dalam sub (II) penarikan mana haruslah dikerdjakan dalam tingkatan dan keadaan jang ditentukan oleh panitya Djasa Baik atau sesuatu badan lainnja akan diangkat oleh Dewan Keamanan dan harus selesai pada sebelum tanggal 15 Maret 1949.

(IV) Supaja segala pembatasan jang diadakan oleh pihak kekuasaan Belanda terhadap perdagangan Republik dihapuskan dengan segera ;

(V) Supaja sampai waktu pembentukan Pemerintah Interim jang disebut dalam sub (3) dibawah ini. Pemerintah Republik diberikan segala kesempatan akan berhubungan dengan dunia luaran ;

3. Supaja sebelum tanggal 15 Maret 1949 dibentuk sebuah Pemerintah Interim jang terdiri dari wakil-wakil Republik serta dari wakil-wakil daerah Indonesia diluar kekuasaan Republik, jang mendapat kepertjajaan dari seluruh rakjat Indonesia, jaitu dengan persetudjuan dan bantuan Panitya Djasa Baik atau lain badan jang dibentuk oleh Dewan Keamanan. Menunggu keputusan perundingan Madjelis Konstituante, jang disebut dalam pasal (6) dibawah ini, djanganlah dibentuk atau diakui pemerintah daerah baru.
4. Supaja dengan mengingat ketentuan-ketentuan dari pasal (5) Pemerintah Interim itu haruslah mempunjai kekuasaan pemerintahan sepenuhnja, termasuk kekuasaan atas angkatan-angkatan bersendjata. Untuk mendjamin hal ini haruslah ditarik mundur sekalian pasukan Belanda dari seluruh daerah Indonesia pada suatu hari jang ditentukan tanggalnja oleh Panitya Djasa Baik atau Badan lainnja jang akan dibentuk oleh Dewan Keamanan. Selama masih menunggu penarikan itu, pasukan-pasukan Belanda tidak boleh digunakan untuk penjelenggaraan tata-tertib, ketjuali atas permintaan Pemerintah Interim, dan dengan persetudjuan dari pada Panitya Djasa Baik, atau badan lain jang dibentuk oleh Dewan Keamanan.
5. Bahwa Pemerintah Interim akan diberikan keleluasaan mengurus perhubungan luar negeri seberapa jang akan ditetapkan oleh Panitya Djasa Baik atau Badan lain jang akan dibentuk oleh Dewan Keamanan, sesudah berunding dengan Pemerintah Interim dan dengan pembesar-pembesar Belanda.
6. Supaja pemilihan-pemilihan bagi Madjelis Konstituante harus selesai selambat-lambatnja pada tgl. 1 Oktober 1949.
7. Supaja kekuasaan atas seluruh Indonesia harus sudah diserahkan dengan bulat-bulat selambat-lambatnja pada tgl. 1 Djanuari 1950, dan supaja pemerintahannja diselesaikan dalam perundingan diantara Pemerintah Negara Indonesia Serikat dan Pemerintah Keradjaan Nederland.
8. Supaja Panitya Djasa Baik atau Badan lain jang dibentuk oleh Dewan Keamanan diberikan kekuasaan untuk mendjamin pelaksanaan dari andjuran-andjuran jang tersebut diatas ini. dengan pengawasan dari pihak Dewan Keamanan jang harus diberi laporan bilamana perlu.

(B) Bagian kedua :

Supaja bilamana sesuatu dalam persengketaan ini tidak tunduk kepada andjuran dari pihak Dewan Keamanan. Dewan ini mengadakan tindakan jang tepat berdasar atas kekuasaan jang luas jang diberikan kepadanja dalam Piagam Serikat Bangsa-bangsa, guna memaksakan pelaksanaan andjuran-andjuran tersebut. Para anggauta Serikat Bangsa-bangsa jang berhimpun dalam konperensi ini mendjandjikan akan memberi bantuan sepenuhnja kepada Dewan Keamanan dalam melaksanakan tiap-tiap tindakan itu.

(C) Bagian ketiga :

Supaja Dewan Keamanan sudilah kiranja memberitahukan kepada Rapat Umum Serikat Bangsa-bangsa untuk diperbintjangkannja pada landjutan sidangnja mulai bulan April 1949, tentang tindakan-tindakan jang diadakan ataupun jang diusulkan oleh Dewan itu guna mentjapai suatu penjelesaian dalam mas'alah Indonesia dan tentang tindakan-tindakan jang telah diambil oleh pihak-pihak jang bersangkutan dalam usaha pelaksanaan tindakan-tindakan itu.

Resolusi ke-II diterima tanggal 22 Djanuari 1949

Guna mendjamin kerdja-sama jang erat diantara kalangannja tentang soal-soal jang dibitjarakan dalam Resolusi ke-I, Konperensi ini mengandjurkan kepada Pemerintah-Pemerintah jang telah turut-serta, baik jang mendjadi anggauta Serikat Bangsa-bangsa, maupun jang bukan anggauta :

a. Supaja diadakan perhubungan jang tetap antara satu sama lain, dengan perantaraan saluran diplomasi biasa ;
b. Supaja diperintahkan kepada utusan mereka masing-masing pada Markas Pusat Serikat Bangsa-bangsa, atau kepada utusan diplomatiknja, supaja bermusjawarat satu sama lain.

Resolusi ke-III diterima tanggal 22 Djanuari 1949

Pihak Konperensi menjatakan pendapatnja bahwa Pemerintah-Pemerintah jang turut serta didalamnja haruslah bermusjawarat satu sama lain untuk mempeladjari daja-upaja guna membentuk alat kelengkapan jang sewadjarnja, mengenai daerah jang bersangkutan, untuk memadjukan permusjawaratan dan kerdja-sama didalam rangkaian Serikat Bangsa-bangsa.

*

Sebaliknja pemerintah Belanda, jang telah memperhitungkan segala faktor-faktor didalam dan diluar negeri jang dapat mempengaruhi tindakannja itu sebelum mendjalankan aksi militernja, berusaha sekeras-kerasnja untuk mengimbangi reaksi-reaksi dari luar negeri itu dan terus menentang turut tjampurnja dunia internasional dalam masalah Indonesia - Belanda jang selalu dikatakan sebagai urusan dalam negeri.

Walaupun dengan kata-kata jang bagaimanapun, Belanda toch tak dapat membendung kehendak dari banjak negara jang bersimpati kepada Republik.

Demikianlah dalam sidangnja tgl. 28 Djanuari 1949, sesudah dua kali menunda pembitjaraan tentang soal Indonesia, achirnja menerima baik resolusi, jang diusulkan oleh Amerika Serikat, Tiongkok, Noorwegia dan Cuba, walaupun wakil Belanda memadjukan keberatannja atas usul resolusi itu. Adapun isi resolusi tsb. antara lain s.b.b.:

1. mengandjurkan pada Pemerintah Belanda mendjamin berhentinja segala tindakan militer dengan segera ;
   mengandjurkan pada Pemerintah Republik pada waktu jang sama memerintahkan pada pengikut-pengikutnja jang bersendjata menghentikan perang gerilja dan mengandjurkan kepada kedua belah pihak supaja kerdja-sama dalam mengembalikan perdamaian dan mendjaga keamanan dan ketertiban diseluruh daerah jang bersangkutan ;

2. mengandjurkan kepada Pemerintah Belanda membebaskan dengan segera dan dengan tiada bersjarat apapun djuga sekalian tawanan-tawanan politik jang ditawan olehnja semendjak tgl. 17 Desember 1948 dalam Republik Indonesia, dan mempermudahkan kembalinja dengan segera dari pembesar-

pembesar pemerintah Republik Indonesia ke Djokjakarta, agar supaja mereka dapat melakukan kewadjibannja tersebut pada paragraph 1 diatas dan agar supaja mereka dapat mendjalankan pekerdjaannja setjara merdeka, termasuk djuga pemerintahan didaerah Djokjakarta jang mengenai kota Djokjakarta dan sekitarnja. Pembesar-pembesar Belanda akan memberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia segala persediaan sepantasnja jang diperlukan oleh Pemerintah itu untuk melakukan kewadjibannja dalam daerah Djokjakarta itu dan untuk berhubungan dan bertukar pikiran dengan lain-lain orang di Indonesia.

3. mengandjurkan, supaja dalam kepentingan mewudjudkan tudjuan dan keinginan kedua belah pihak untuk mendirikan satu negara Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat dan berbentuk federal, dalam tempo sesingkat-singkatnja, perundingan-perundingan akan diadakan selekas mungkin oleh utusan-utusan Pemerintah Belanda dan utusan-utusan Republik Indonesia dengan bantuan Komisi tsb. dalam paragraph 4 dibawah berdasarkan azas-azas jang terdapat dalam Persetudjuan Linggadjati dan Renville dan mempergunakan apa jang telah disetudjui antara kedua pihak tentang usul jang dimadjukan padanja oleh wakil-wakil Amerika dalam Komisi Djasa-djasa Baik pada 10 September 1948; dan teristimewa atas dasar-dasar jang berikut:

   a. perwudjudan Pemerintah Federal Interim jang akan diberi kuasa tentang pemerintahan dalam negeri di Indonesia selama masa peralihan (interim periode) sebelum penjerahan kedaulatan terdjadi itu harus merupakan hasil dari perundingan-perudingan tsb. diatas dan akan dilaksanakan tidak lambat dari pada tgl. 15 Maret 1949.
   b. pemilihan wakil-wakil jang akan duduk dalam Constituant Assembly (Badan Pembentuk Undang-Undang) hendaknja selesai pada tanggal 1 Oktober 1949, dan
   c. penjerahan kedaulatan atas Indonesia oleh Pemerintah Belanda pada Negara Indonesia Serikat hendaknja dilaksanakan pada waktu sesingkat-singkatnja dan setidak-tidaknja tidak lambat dari tanggal 1 Djuli 1950;

   djikalau tidak ada persetudjuan satu bulan sebelum tanggal masing-masing tersebut di sub-paragraph (a), (b) dan (c) diatas, maka komisi tsb. diparapraph 4 (c) dibawah, dengan segera melaporkan kepada Dewan Keamanan dengan dibubuhi andjuran-andjuran untuk mentjapai penjelesaian dari pada kesukaran-kesukaran jang ada;

4. a) Komisi Djasa-Djasa Baik dikemudian hari akan disebut Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia, Komisi itu akan bertindak sebagai perwakilan Dewan Keamanan di Indonesia dan mempunjai segala kewadjiban jang diberikan kepada Komisi Djasa-Djasa Baik oleh Dewan Keamanan semendjak 18 Desember 1947 dan segala kewadjiban jang diberikan padanja oleh resolusi ini. Komisi ini akan mengambil putusan dengan suara terbanjak, akan tetapi dalam laporan dan andjuran kepada Dewan Keamanan dimadjukan pemandangan-pemandangan baik dari jang terbanjak suara maupun dari suara minoritet, djika ada perbedaan paham antara anggauta-anggauta Komisi itu.
   b. Komisi Konsul diminta membantu pekerdjaan Komite Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia dengan memberikan penindjau-penindjau Militernja dan pegawai-pegawai lainnja serta pertolongan lainnja agar supaja Komisi dapat melakukan kewadjibannja termaktub dalam resolusi sekarang ini dan untuk sementara waktu menunda segala pekerdjaan lainnja.

c. Komisi akan memberi bantuan kepada kedua belah pihak dalam melaksanakan resolusi ini, akan memberi bantuan kepada kedua belah pihak dalam mengadakan perundingan menurut paragraph 3 diatas dan berhak memberi andjuran kepada mereka atau kepada Dewan Keamanan tentang hal-hal termasuk dalam kekuasaannja. Setelah tertjapai persetudjuan dalam perundingan-perundingan itu. Komisi akan memberi andjuran kepada Dewan Keamanan tentang sifat, kekuasaan dan pekerdjaan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa jang harus tinggal di Indonesia untuk membantu pelaksanaan sjarat-sjarat dari persetudjuan itu sehingga kedaulatan diserahkan oleh Pemerintah Belanda kepada Negara Indonesia Serikat.

d. Komisi akan berunding dengan wakil-wakil dari daerah-daerah di Indonesia lain dari pada Republik dan mengundang wakil-wakil daerah itu untuk ikut serta dalam perundingan seperti termaksud dalam paragraph 3 diatas.

e. Komisi atau Badan lain dari Perserikatan Bangsa-Bangsa jang mungkin didirikan menurut andjurannja tersebut diparagraph 4 (c) diatas berhak mengawasi atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa pemilihan jang akan diadakan diseluruh Indonesia serta berhak pula memadjukan andjuran terhadap daerah-daerah di Djawa, Madura dan Sumatera tentang sjarat-sjarat jang perlu agar supaja :

   a. mendjamin bahwa pemilihan itu diadakan setjara merdeka dan demokratis dan

   b. mendjamin adanja kemerdekaan untuk berhimpun, berbitjara dan penerbitan pada setiap waktu, asal sadja djaminan itu tidak meliputi sesuatu andjuran untuk mempergunakan kekerasan atau pembalasan.

f. Komisi harus membantu mentjapai selekas mungkin kembalinja pemerintahan sipil dari Republik. Untuk hal itu Komisi setelah berunding dengan kedua belah pihak, akan mengandjurkan sampai mana daerah-daerah dari Republik jang ditetapkan menurut perdjandjian „Renville" (diluar daerah Djokjakarta) akan dikembalikan berangsur-angsur kepada pemerintah Republik sesuai dengan sjarat-sjarat untuk mendjamin keamanan dan ketertiban dan pendjagaan djiwa dan harta-benda;
dan komisi akan mengawasi djuga mengenai persediaan ekonomi jang dibutuhkan agar supaja pemerintahan dapat berlaku dengan tertib dan untuk mendjaga kehidupan rakjat dalam daerah jang dikembalikan itu. Setelah berunding dengan kedua pihak, Komisi akan mengandjurkan tentara Belanda mana, djika masih perlu akan tetap tinggal untuk sementara waktu dalam daerah luar daerah Djokjakarta untuk membantu mendjaga keamanan dan ketertiban. Djika sesuatu dari kedua belah pihak tidak dapat menerima andjuran Komisi tsb. dalam paragraph ini, maka Komisi akan melaporkan pada Dewan Keamanan dengan segera dibubuhi andjuran-andjuran lain untuk mendapat penjelesaian dari pada kesukaran-kesukaran jang ada itu.

g. Komisi akan mengirimkan laporan jang periodik kepada Dewan Keamanan dan laporan istimewa setiap waktu Komisi memandang perlu.

h. Komisi akan mempergunakan para pengawas, opsir-opsir dan lain-lain orang jang dianggap perlu.

5. Minta kepada Sekretaris Djenderal agar supaja kepada Komisi diberi Staf, keuangan dan lain-lain persediaan jang dibutuhkan oleh Komisi untuk melaksanakan pekerdjaannja.

6. Mengandjurkan kepada Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia, agar supaja memberi bantuan sepenuhnja untuk melaksanakan aturan-aturan dari resolusi ini.

*

Setelah para Pemimpin dari Republik diasingkan, maka kegiatan politik didalam negeri pada mulanja terletak pada Belanda sendiri dan B.F.O.

Dalam rapatnja jang diadakan di Djakarta pada tgl. 13 Desember, B.F.O. telah mengambil resolusi :

1. memandang perlu pembentukan pemerintah federal nasional untuk seluruh Indonesia dalam masa peralihan, sebelumnja terbentuk N.I.S. jang merdeka dan berdaulat ;

2. menerima penetapan pemerintah Belanda dalam masa peralihan (B.I.O.) sebagai dasar untuk pembentukan pemerintah federal tsb.

Selandjutnja B.F.O. sibuk mengadakan rapat-rapat, membitjarakan laporan-laporan komisi istimewa jang telah pergi ke Prapat (jaitu tempat pengasingan Presiden Soekarno, H. Agus Salim dan Sutan Sjahrir) dan Bangka (tempat pengasingan Wk. Presiden Hatta, Mr. Rum, Mr. A. G. Pringgodigdo, Mr. Assaat dan Surjadarma), untuk mengadakan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Republik. Atjara jang penting dalam rapat-rapat ialah surat djawaban dari Presiden Soekarno dan Wk. Presiden Hatta, jang diundang sebagai orang-orang terkemuka oleh Komisi istimewa B.F.O. untuk ikut dalam pembitjaraan tentang pembentukan pemerintah interim nasional.

Dalam djawaban itu, Presiden Soekarno dan Wk. Presiden Hatta, atas nama orang-orang terkemuka Republik jang telah diundang B.F.O., menerangkan, bahwa beliau dan lainnja hanja dapat diadjak berunding oleh B.F.O. sebagai „Pemerintah Republik dan djika sudah ada kesempatan untuk berunding bersama-sama".

Surat djawaban B.F.O. kepada Presiden Soekarno di Prapat dan Wk. Presiden Hatta di Bangka jang dikirim pada tgl. 2 Pebruari 1949, antara lain memuat :

A. Keterangan Wakil Tinggi Mahkota kepada B.F.O. jang maksudnja membolehkan :

   a. pembitjaraan bersama antara orang-orang Republik terkemuka,
   b. pembitjaraan antara B.F.O. dan pemimpin-pemimpin Republik, dan
   c. akan mempertimbangkan kemungkinan dibebaskannja kembali pemimpin-pemimpin Republik, djika pembitjaraan-pembitjaraan itu dapat menghasilkan djalan untuk dapat membentuk pemerintah interim setjepat mungkin.

   Dengan dilampirkannja surat keterangan Wk. Tinggi Mahkota ini, B.F.O. mengharap pemimpin Republik bersedia mengadakan perundingan-perundingan dengan B.F.O. supaja selekas mungkin dapat hasil-hasil jang njata.

B. B.F.O. setudju pada azasnja dengan surat Wk. Tinggi Mahkota kepada B.F.O., tgl. 31 Djanuari 1949, jang menjatakan, bahwa Nederland memandang pemimpin-pemimpin Republik sebagai pembesar-pembesar Pemerintah Republik, jang status dan bentuknja akan tergantung dari keinginan rakjat.

   Mengenai permintaan W.T.M. tgl. 31-1-'49, supaja B.F.O. menjatakan pendapatnja tentang resolusi D.K. tgl. 28 Djanuari 1949, B.F.O. mendjawab kepada W.T.M., bahwa tidak begitu baik untuk menjatakan pendapatnja sekarang, karena mungkin berpengaruh tidak baik pada pembitjaraan-pembitjaraan jang akan dilakukan dengan pemimpin-pemimpin Republik.

Dan untuk keperluan ini, maka pada tgl. 6 Pebruari telah mengundjungi Wk. Presiden Hatta di Bangka, Anak Agung Gde Agung, Dr. Ateng Kartanahardja sebagai Komisi penghubung Delegasi Belanda, bersama-sama dengan Dr. Darmasetiawan, Dr. Leimena, Prof. Supomo dan Mr. Sudjono.

Dalam pada itu baiklah dikemukakan disini akan sikap Republik Indonesia jang tertjantum dalam suratnja Wk. Presiden kepada Komisi P.B.B. untuk Indonesia jang menjatakan bahwa, tjara jang tertjepat dan terbaik untuk menjelesaikan masalah Indonesia, adalah bilamana baik pemerintah Belanda maupun pemerintah Republik dengan tegas menjatakan bahwa kedua-duanja hendak menerima baik keputusan Dewan Keamanan. Kepada pers selandjutnja Wk. Presiden Hatta menerangkan: „Kita mendjalankan dan menerima baik resolusi P.B.B. Republik tidak akan lagi mulai berunding, sebelum Nederland memenuhi tuntutan P.B.B. untuk memperbaiki kembali pemerintah Republik di Jogja serta menarik kembali pasukan-pasukannja dari daerah-daerah Republik ".

Dan berhubung dengan banjaknja soal jang mesti dibitjarakan bersama dengan Wk. Presiden pada waktu itu dan selandjutnja, maka mulai tgl. 9 Pebruari Presiden Soekarno dan H. A. Salim untuk sementara tinggal di Bangka.

Lain dari pada itu, mengenai soal resolusi Dewan Keamanan, Belanda selalu mentjari bermatjam-matjam akal untuk menghindarinja, dan sebaliknja sebagai suatu usul balasan jang mengganti resolusi D.K. tgl. 28 Djanuari, telah dikirimkan suatu undangan pemerintah Belanda kepada Komisi P.B.B. untuk menghadiri Konperensi Medja Bundar jang akan diadakan pada tgl. 12 Maret di Den Haag.

Mengenai Konperensi Medja Bundar tsb. baiklah diperhatikan disini keterangan Dr. Beel pada tgl. 26 Pebruari, setelah kembali dari Nederland.

1. Belanda akan menjerahkan kedaulatannja selekas mungkin kepada suatu pemerintahan federal jang dianggap mewakili Indonesia.
2. Untuk ini akan diadakan perundingan antara semua pihak. Pula untuk menjelenggarakan resolusi Dewan Keamanan tentang penglepasan tawanan-tawanan, pemimpin-pemimpin Republik akan dibebaskan.
3. Konperensi Medja Bundar ini akan diadakan di Den Haag pada tgl. 12 Maret.
4. Sjarat-sjarat penjerahan kedaulatan dibitjarakan pada waktu jang bersamaan, harus dibentuk djuga U.N.I. Indonesia — Belanda. Dibitjarakan djuga peraturan peralihan sampai waktu penjerahan itu, antara mana pembentukan pemerintah interim federal.
5. Komisi P.B.B. diundang pula pada konperensi itu untuk memberikan djasanja.

Karena Belanda selalu menjingkiri penjelesaian seperti jang diandjurkan oleh Dewan Keamanan, maka menimbulkan kedjengkelan dikalangan pemuda-pemuda kita. Perlawanan gerilja diperbagai front diperhebat. Dengan diperhebatnja perlawanan gerilja kita, maka Belanda lalu mata buta, dengan giat menangkapi para pemimpin kita, malahan pada tgl. 24 Pebruari '49 Sdr. Supeno, Menteri Pembangunan dan Pemuda gugur ditembak Belanda didesa Ganter di Nganđjuk.

Dengan keadaan jang demikian ini, perlawanan kita tidak kendor, dan untuk menundjukkan kepada dunia luar, bahwa Republik sanggup melangsungkan perlawanan gerilja, maka pada tanggal 1 Maret dimulai dengan serangan umum atas kota Jogja.

Djam 6 pagi setelah bunji sirene achirnja djam malam, Jogja diserang oleh tentara gerilja setjara besar-besaran dari empat pendjuru. Mereka menggunakan

sendjata berat automatic. Hampir seluruh kota dan gedung-gedung jang penting dapat diduduki, tetapi pada djam 11 siang, mereka mengundurkan diri dengan teratur.

Dengan terdjadinja serangan umum pada tgl. 1 Maret tsb., maka akan menambahkan kejakinan para Pemimpin kita untuk tetap pada pendiriannja. Demikianlah maka atas undangan Belanda pada Republik untuk turut serta pada Konperensi Medja Bundar, Presiden Soekarno dalam surat djawabannja kepada Wakil Tinggi Mahkota menerangkan :

a. bahwa maksud pemerintah Belanda untuk mempertjepat penjerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat seperti jang diterangkan oleh Dr Koets di Bangka pada tgl. 28 Pebruari, sangat menarik.

b. beliau berpendapat, bahwa penjerahan kedaulatan sematjam itu adalah satu-satunja djalan untuk memperbaiki perhubungan antara Nederland dan Indonesia, lebih-lebih karena tgl 1 Djanuari 1949 tgl. jang ditetapkan sebagai tanggal penjerahan kedaulatan telah liwat.

c. dalam prinsipnja setudju dengan maksud Konperensi Medja Bundar, tetapi djika kedudukan Komisi P.B.B. dan resolusi Dewan Keamanan tgl. 28 Djanuari tidak diabaikan.

d. tetapi karena kedudukan dan keadaan beliau sekarang tak mungkin untuk mengambil putusan resmi mengenai ikut dan tidaknja dalam K.M.B.

e. beliau hanja dapat menerima undangan pemerintah Belanda tsb. sebagai seseorang.

Pendapat Presiden tsb. diatas kemudian ternjata sama dengan pendirian Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera, bahwa pembebasan mereka tidak bersjarat dan pengembalian Pemerintah Republik ke Jogja merupakan dasar minimum untuk membuka kembali suatu perundingan dengan Belanda.

Pemerintah Darurat tidak djuga mau menjampingkan kekuasaan dan kedudukan Komisi P.B.B.

Terang bahwa tak ada perbedaan pendapat antara P.D.R.I. dan Bangka. Pemerintah Darurat selalu ditundjukkan ketaatan terhadap Presiden dan Wk. Presiden. Sebaliknja Bangka tidak kurang-kurang keinsjafan, bahwa suatu keputusan jang mengikat hanja baru dapat diambil setelah berunding dengan Pemerintah Darurat.

Atas sikap jang tegas ini, maka kalangan Den Haag menganggap sjarat jang diadjukan oleh Presiden Soekarno untuk turut serta dalam K.M.B. jaitu antaranja penjusunan kembali Pemerintah Republik di Jogja, tidak dapat diterima. Kabinet Belanda berpendapat, bahwa dengan demikian Presiden Soekarno ingin menarik keuntungan sebanjak-banjaknja dari resolusi D. K. dan dari rentjana Belanda untuk mempertjepat kedaulatan.

Selandjutnja mengenai pendirian Republik Indonesia tsb. diatas, Amerika mengakui Republik sebagai satu pihak dalam masalah Indonesia, maka tidak mungkin Komisi P.B.B. turut dalam K.M.B., djika salah satu pihak tidak turut hadir. Sebaliknja baik sekali K.P.B.B. turut sadja, djika memang kedua belah pihak ada pada K.M.B.

Dan karena sikap Republik seperti tsb. diatas itu, maka Konperensi Medja Bundar jang semula diadakan pada tgl. 12 Maret terpaksa diundurkan.

Selandjutnja Kabinet Belanda menindjau kembali penolakan berdirinja kembali Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta.

Dengan tertundanja pelaksanaan Resolusi D.K. 28 Djanuari oleh Belanda itu, banjak badan-badan dan negara-negara jang mengandjurkan supaja soal Indonesia segera diselesaikan.

Demikianlah pada tgl. 15 Maret Economic Corporation Administration telah mengandjurkan supaja masalah Indonesia segera diselesaikan, karena Indonesia mempunjai arti jang penting bagi perbaikan Eropah.

Eca telah menghentikan sokongannja kepada Belanda untuk Nederlands-Indie sedjak Belanda memulai aksi militernja jang kedua.

Begitu pula dalam siarannja tgl. 21 Maret, New York Times menerangkan, bahwa Presiden Truman dari Amerika Serikat akan meminta kekuasaan-kekuasaan jang luas dari Congres, didalam mana Amerika memberikan alat-alat militer jang tersedia untuk negara Pakt Atlantik.

Salah satu soal jang timbul disini adalah pertentangan tentang memberikan sendjata kepada Belanda, selama soal Indonesia-Belanda belum selesai. Pemerintah Amerika berharap, bahwa mungkin bisa diadakan suatu konperensi di Den Haag antara Belanda dan Republik, jang menjelesaikan soal Indonesia. Tradisi kolonial Belanda dan anti kolonial Amerika telah menggentingkan perhubungan antara kedua negara itu.

Ini mungkin menimbulkan soal jang lebih tidak enak lagi antara Amerika dan Eropah Barat, djika soal Indonesia tidak lekas dibereskan.

Sementara itu sedjak tgl. 10 — 23 Maret Dewan Keamanan telah memperdebatkan lagi masalah Indonesia. Jang didjadikan soal dalam perdebatan itu terutama ialah :

1. Rentjana Belanda untuk mengadakan Konperensi Medja Bundar, dimana soal penjerahan kedaulatan jang dipertjepat akan dirundingkan.
2. Resolusi Dewan Keamanan tgl. 28 Djanuari terutama jang mengenai pengembalian pemerintah Republik di Jogja.

Dalam sidang tsb. Dr. van Royen (Belanda) masih tetap pada pendiriannja jang mengatakan bahwa resolusi D.K. terutama jang mengenai pengembalian pemerintah Republik, hanja menimbulkan djalan buntu dan kekatjauan.

Djika resolusi itu (tgl. 28 Djanuari) dilaksanakan, akibatnja akan merupakan bentjana bagi Indonesia.

L.N. Palar tidak setudju dengan K.M.B. jang akan diadakan tgl. 12 Maret itu, karena konperensi itu oleh Belanda diadakannja hanja untuk menjembunjikan maksud Belanda untuk tidak mendjalankan resolusi D.K. Lagi pula penjerahan kedaulatan itu didasarkan atas perubahan Undang-undang dasar Belanda jang seperti diketahui hanja ditetapkan oleh Belanda sendiri.

Wakil Amerika menganggap K.M.B. dapat disesuaikan dengan maksud tudjuan resolusi Dewan Keamanan, asal sadja semua pihak jang bersangkut setudju dengan konperensi itu.

Sebagai sjarat ia mengemukakan bahwa pemerintah Republik dapat turut ambil bagian dalam Konperensi Medja Bundar.

Selandjutnja Palar berkata : Belanda sekarang melumpuhkan Jogja, agar supaja badan pemerintahan Republik tidak mungkin bekerdja kembali. Dimintanja Dewan Keamanan supaja memberi perintah kepada Komisi P.B.B. untuk dengan segera memberikan laporan tentang Jogja. Alasan Belanda menentang pembangunan kembali Republik untuk melindungi kaum federal dianggapnja menertawakan, karena kaum federal sendiri dengan suara bulat telah meminta supaja Republik dibangun kembali.

Pendirian Republik disusunnja s.b.b. :

1. Resolusi Dewan Keamanan harus diselenggarakan dengan segera menurut tata tjara jang terdapat dalam resolusi itu.
2. Suatu konperensi persiapan dibawah penilikan Komisi P.B.B. untuk menetapkan tjara-tjaranja jang memudahkan pembangunan kembali Republik, dapat dianggap sebagai tindakan pertama untuk menjelenggarakan resolusi

Dewan Keamanan. Konperensi dan pembangunan kembali itu tidak boleh lebih lama dari 14 hari.

3. Komisi P.B.B. dengan segera memberikan laporan tentang keamanan di Jogja.
4. Sesudah pemerintah Republik berdiri kembali, ia dapat turut pada suatu konperensi, djika ini sesuai dengan resolusi atau dianggap perlu oleh kedua belah pihak dan Komisi P.B.B.
5. Dengan segera harus dilaporkan tentang keadaan militer didaerah-daerah jang diduduki Belanda sebelum tanggal 19 Desember 1948. Oleh suatu badan internasional jang memang berhak hendaknja diadakan penjelidikan tentang kekedjaman-kekedjaman jang telah dilakukan.

Dalam sidang Dewan Keamanan tersebut telah diterima usul Canada dengan suara 8 lawan 3 (Rusia, Ukraina, Perantjis) untuk menjampaikan kepada Komisi P.B.B. bahwa kewadjiban Komisi P.B.B. untuk membantu kedua belah pihak sampai tertjapainja suatu persetudjuan, mengenai pelaksanaan resolusi tanggal 28 Djanuari dan mengenai saat dan sjarat-sjarat terselenggaranja konperensi di Den Haag. Dengan putusan Dewan Keamanan tersebut, maka segera akan diadakan pembitjaraan-pembitjaraan pendahuluan dibawah pengawasan Komisi P.B.B.

Sebagai djawaban atas undangan Komisi P.B.B. untuk mengadakan pertemuan pendahuluan, maka pada tanggal 2 April, Ketua Delegasi Republik Indonesia telah memberikan djawaban sebagai berikut :

1. Menerima baik dengan mengadakan pembitjaraan di Djakarta dibawah pengawasan Komisi P.B.B. untuk Indonesia (K.P.B.B.I.).
2. Karena Belanda belum menjatakan kesediaannja atas pengembalian pemerintah Republik Jogja, mungkin penerimaan baik itu akan menimbulkan salah faham pada pemimpin-pemimpin Republik Indonesia serta diluar Indonesia, dan pula dikalangan rakjat.
3. Oleh sebab itu akan lebih menjukaikan penjelesaian pertikaian, maka turut serta dalam pembitjaraan semata-mata bersifat terbatas.
4. Pada tanggal 19 Desember 1948 kekuasaan Pemerintah Republik diserahkan kepada Pemerintah Darurat di Sumatera, jang harus bertindak atas nama Pemerintah Republik sampai saat Pemerintah Republik merdeka untuk berkumpul lagi.
   Sebagaimana tersebut dalam pasal dua dari laporan Komisi kepada Dewan Keamanan tanggal 1 Maret dan seperti pula ditegaskan oleh sedjumlah pembitjara dalam Dewan Keamanan, pengembalian Republik adalah sjarat penting untuk dapat mengadakan pembitjaraan jang akan berhasil, karena hanja dengan demikian Pemerintah Republik dapat memutuskan sesuatu setjara merdeka, lepas dari suatu tekanan.
5. Oleh karena itu pembitjaraan pada permulaan hanja mengenai pengembalian Pemerintah Republik ke Jogja sampai ke detail-detail jang praktis.

Demikian isi surat djawaban Mr. Rum.

Selandjutnja guna mendapatkan keterangan - keterangan jang tertentu sebagai bahan perundingan nanti, maka diperlukan keterangan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Dan pada tanggal 11 April untuk pertama kali sedjak aksi militer Belanda kedua, Sri Sultan Hamengku Buwono mengundjungi Djakarta.

Beliau menerangkan, bahwa beliau mendjamin keamanan, djika Jogja dikembalikan kepada Republik dan tentara Belanda ditarik mundur. Beliau bersedia seluruh hati mengorganisasi pemerintahan di Jogja dan beliau mendjamin, bahwa polisi Republik akan dibangunkan kembali dalam 24 djam.

Dan achirnja perundingan pendahuluan dapat dimulai pada tanggal 14 April diketuai oleh Merle Cochran.

Susunan Delegasi Republik s.b.b.:

Ketua : Mr. Moh. Rum ; Wk. Ketua : Mr. Ali Sastroamidjojo, anggauta : Dr. Leimena, Ir. Djuanda, Prof. Mr. Dr. Supomo dan Mr. Latuharhary, para penasehat: Sutan Sjahrir, Ir. Laoh, M. Natsir, Dr. Darmasetiawan dan Sumarto.

Delegasi Belanda terdiri dari Ketua : Dr. van Royen dan anggauta-anggautanja Mr. Blom, Mr. s' Jacob, Dr. v/d Velde, Dr. Koets, Mr. v. Hoogstraten, Dr. Gieben, Elink Schuurman dan Kol. Thomson.

Perundingan jang dimulai pada tgl. 14 April itu kemudian pada tgl. 7 Mei 1949 dapat menghasilkan Persetudjuan Permulaan berkenaan dengan kembalinja Pemerintah ke Jogja.

Adapun Statement Delegasi Republik dan Statement Delegasi Belanda dalam pertemuan formil dibawah auspices UNCI di Djakarta pada tgl. 7 Mei 1949 djam 17.00 masing-masing diutjapkan oleh Mr. Moh. Rum dan Dr. van Royen s.b.b. :

I. STATEMENT DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

(Diutjapkan oleh Mr. Moh. Rum)

Sebagai Ketua Delegasi Republik saja diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menjatakan kesanggupan mereka sendiri (persoonlijk), sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan tertanggal 28 Djanuari 1949 dan petundjuk-petundjuknja tertanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan tertjapainja :

1. pengeluaran perintah kepada pengikut-pengikut Republik jang bersendjata untuk menghentikan perang gerilja ;
2. kerdja-sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan mendjaga ketertiban dan keamanan, dan
3. turut serta pada Konperensi Medja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempertjepat penjerahan kedaulatan jang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Sarekat, dengan tidak bersjarat.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta akan berusaha mendesak supaja politik demikian diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia selekas-lekasnja setelah dipulihkan di Jogjakarta.

II. STATEMENT DELEGASI BELANDA

(Diutjapkan oleh Dr. van Royen)

1. Delegasi Belanda diberi kuasa menjatakan bahwa, berhubung dengan kesanggupan jang baru sadja diutjapkan oleh Mr. Rum, ia menjetudjui kembalinja Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta. Delegasi Belanda selandjutnja menjetudjui pembentukan satu panitya-bersama atau lebih dibawah auspices UNCI dengan maksud :

a. mengadakan penjelidikan dan persiapan jang perlu sebelum kembalinja Pemerintah Republik Indonesia ke Jogjakarta.

b. mempeladjari dan memberi nasehat tentang tindakan-tindakan jang akan diambil untuk melaksanakan penghentian perang gerilja dan kerdja-sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan mendjaga ketertiban dan keamanan.

2. Pemerintah Belanda setudju bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan djabatannja jang sepatutnja dalam satu daerah jang meliputi Karesidenan Jogjakarta dan bahwa ini adalah satu langkah jang dilakukan sesuai dengan maksud petundjuk-petundjuk Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949.

3. Pemerintah Belanda menguatkan sekali lagi kesanggupannja untuk mendjamin penghentian segera dari pada semua gerakan-gerakan militer dan membebaskan dengan segera dan tidak bersjarat semua tahanan politik jang ditangkapnja sedjak 17 Desember 1948 dalam Republik Indonesia.
4. Dengan tidak mengurangi hak bagian-bagian bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnja sendiri sebagai jang diakui dalam azas-azas Linggadjati dan Renville, Pemerintah Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara atau daerah-daerah diatas daerah jang dikuasai oleh Republik sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan daerah Republik tersebut.
5. Pemerintah Belanda menjetudjui adanja Republik Indonesia sebagai satu staat jang nanti akan duduk dalam Negara Indonesia Serikat. Apabilla suatu Badan Perwakilan Sementara untuk seluruh Indonesia dibentuk dan karena itu perlu ditetapkan djumlah perwakilan Republik dalam Badan tersebut, djumlah itu ialah separoh daripada djumlah anggauta-anggauta semua diluar anggauta-anggauta Republik.
6. Sesuai dengan maksud dalam petundjuk Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949 jang mengenai Konperensi Medja Bundar di Den Haag supaja perundingan - perundingan jang dimaksud oleh resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Djanuari 1949 dapat diadakan selekas - lekasnja, maka Pemerintah Belanda akan berusaha sesungguh-sungguhnja supaja konperensi itu segera diadakan sesudahnja Pemerintah Republik kembali ke Jogjakarta.
   Pada konperensi itu perundingan-perundingan akan diadakan tentang tjara bagaimana mempertjepat penjerahan kedaulatan jang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat, sesuai dengan azas-azas Renville.
7. Berhubung dengan keperluan kerdja-sama dalam hal pengembalian perdamaian dan mendjaga ketertiban dan keamanan, Pemerintah Belanda setudju bahwa dalam segala daerah diluar Karesidenan Jogjakarta dimana pegawai sipil, polisi dan pegawai Pemerintah Indonesia (Pemerintah Belanda di Indonesia) lainnja sekarang tidak bekerdja, maka pegawai sipil, polisi dan pegawai Republik lainnja masih terus bekerdja, akan tetapi dalam djabatan mereka.
   Dengan sendirinja pembesar-pembesar Belanda membantu Pemerintah Republik dalam hal keperluan-keperluan dikehendakinja menurut pertimbangan jang pantas untuk perhubungan dan konsultasi dengan segala orang di Indonesia, terhitung djuga mereka jang bekerdja dalam djabatan sipil dan militer Republik, dan detail-detail tehnik akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak dibawah pengawasan UNCI.

b. Konperensi Inter Indonesia

BERHUBUNG dengan tertjapainja persetudjuan pendahuluan antara Republik Indonesia dan Belanda, maka Wakil Tinggi Mahkota Dr. Beel telah mengadjukan permintaan berhenti dan permintaan tersebut oleh Pemerintah Belanda dikabulkan, sebagai gantinja telah diangkat A.H.J. Lovink.

Selandjutnja dapat dikemukakan disini, bahwa karena adanja persetudjuan tersebut, maka pada tanggal 5 Djuni Wakil Presiden Hatta menudju ke Kotaradja, bersama-sama dengan Dr. Sukiman, Moh. Natsir, Mr. Ali Sastroamidjojo, Dr. Halim, Baharudin, Mr. Nazir St. Pamuntjak, guna mengadakan kontak dengan Mr. Sjafrudin, Kepala P.D.R.I. Rombongan ini tidak dapat berdjumpa dengan beliau.

Dan dalam sidang formil antara delegasi-delegasi B.F.O., Belanda dan Republik Indonesia dibawah pengawasan K.P.B.B.I., telah mendapat ketjo-

tjokan tentang.

1. Penarikan Belanda dari Jogja
2. Sjarat-sjarat dan waktu diadakannja K.M.B.

Tanggal 24 Djuni 1949 djam 7 pagi Sri Sultan dan S.P. Paku Alam bersama-sama K.P.B.B.I. dengan naik pesawat terbang Komisi P.B.B. menudju ke lapangan terbang Gading Gunung Kidul.

Mulai hari itu pengunduran tentara Belanda dari Daerah Istimewa Jogjakarta dimulai berturut-turut hingga selesai pada tanggal 30 Djuni 1949.

Dengan telah selesainja penarikan tentara Belanda dari Daerah Istimewa Jogjakarta, maka pada tanggal 6 Djuli, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan para pembesar Republik lainnja tiba kembali di Jogjakarta jang disambut dengan meriah oleh masjarakat di Jogjakarta.

Sementara itu rombongan Dr. Leimena jang terdiri dari Moh. Natsir dan Dr. A. Halim jang pada tanggal 4 Djuli menudju ke Bukit Tinggi untuk mengadakan hubungan dengan Mr. Sjafrudin Prawiranegara, pada tanggal 10 Djuli telah tiba di Jogjakarta bersama-sama dengan anggauta - anggauta P.D.R.I.

Selandjutnja dengan kedatangan Mr. Susanto Tirtoprodjo, Komisaris P.D.R.I. untuk Djawa, maka sidang Kabinet jang pertama sedjak kembalinja Pemerintah Republik dapat dilangsungkan.

Dalam sidang tersebut Presiden menerima kembali mandatnja jang diberikan kepada Mr. Sjafrudin pada tanggal 19 - 12 - 1948 dengan utjapan terima kasih.

Selain itu Sri Sultan Hamengku Buwono telah diangkat mendjadi Menteri Pertahanan dan merangkap Menteri Pembangunan Pemuda dan djabatannja jang lama sebagai Kordinator Keamanan dalam Negeri.

Pada tanggal 16 Djuli B.F.O. telah menerima baik usul Konperensi dari Presiden Soekarno untuk melangsungkan permusjawaratan Inter Indonesia jang sebagian dilakukan di Jogjakarta dan sebagian di Djakarta.

Demikian maka sedjak tanggal 19 — 22 Djuli Konperensi Inter Indonesia tingkat pertama telah dilangsungkan di Jogjakarta.

Adapun putusan dari Konperensi tersebut adalah sebagai berikut:

Konperensi Inter Indonesia terdiri dari Delegasi Republik dan Delegasi B.F.O. jang berlangsung dari tanggal 19 sampai tanggal 22 Djuli 1949 di Jogjakarta telah membitjarakan masalah-masalah jang mengenai ketatanegaraan dari Indonesia di hari jang akan datang, telah mentjapai persetudjuan sebagai berikut:

1. Nama jang disetudjui dari Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat ialah „Republik Indonesia Serikat" didasarkan antara lain atas azas demokrasi dan federalisme.
   Tentang bagaimana kedaulatan itu akan diatur selandjutnja sebuah Komisi Technis jang akan disusun nanti, akan mempeladjari soal itu.
2. Didalam Konstitusi sementara harus ada ketentuan jang njata tentang Negara-negara Bagian jang akan terhimpun dalam R.I.S.
   Soal inipun akan dipeladjari oleh sebuah Komisi Technis. Daerah Republik akan terdiri dari daerah menurut statusquo Renville dengan ketentuan bahwa tentang Asahan Selatan akan diadakan pembitjaraan lebih landjut.
   Seterusnja harus diadakan kemungkinan tentang mengadakan perubahan-perubahan jang mengenai batas-batas Negara berhubung dengan efficiency dalam pemerintahan berdasar kepada persetudjuan antara Republik dan negara jang bersangkutan, terutama mengenai daerah Sumatera Selatan pada saat pembentukan R.I.S. Pembagian kekuasaan antara Negara Bagian dan R.I.S. dilangsungkan menurut peraturan jang telah disetudjui,

dengan ketentuan bahwa kekuasaan-kekuasaan jang diserahkan kepada pemerintah pusat dari R.I.S. ditentukan limitatief didalam konstitusi sementara sedangkan tugas kekuasaan jang lain mendjadi kekuasaan pemerintah Negara.

Perselisihan tentang kekuasaan antara Negara Bagian dan R. I. S. akan diputuskan oleh sebuah Mahkamah.

3. Pembagian Negara dalam daerah-daerah otonom menurut sistim demokrasi diatur didalam Konstitusi Negara Bagian.
4. R. I. S. berkewadjiban untuk memperhatikan sedapat-dapatnja kedudukan chusus dari daerah-daerah zelfbestuur sepandjang R. I. S. mempunjai tjampur tangan dalam hal itu.
5. R. I. S. akan dikepalai oleh seorang Presiden. Presiden ini akan mendjadi Kepala Pemerintah jang Konstitusionil. Menteri-Menteri akan bertanggung djawab. Presiden dan para Menteri bersama-sama merupakan pemerintah federal. Presiden akan dipilih oleh Negara-Negara dan daerah-daerah Bagian (Republik dan B.F.O.) menurut aturan jang akan dibitjarakan lebih landjut di Djakarta.
6. Susunan dan pembagian pekerdjaan dalam Dewan Menteri harus ditudjukan kepada :
   a. mendjamin stabilitet daripada Pemerintahan. Kabinet tidak dirubah sebelum Konstituante dibentuk.
   b. supaja Pemerintah dapat disusun selekas mungkin.
   c. supaja Pemerintah mempunjai efficiency jang diperlukan. dan
   d. supaja ada „pembagian" jang patut. dan bahwa susunan itu harus sedemikian sehingga didalam Dewan akan ada beberapa Menteri jang mempunjai kedudukan chusus. Tentang tjaranja mengatur semuanja itu belum ada persetudjuan.
7. Akan diadakan dua badan Perwakilan jaitu badan perwakilan rakjat dan badan perwakilan Negara (dan daerah istimewa). jaitu Senat. Dewan Perwakilan Rakjat ikut menentukan Undang-undang. Kekuasaan Senat akan dibitjarakan lebih landjut.

   Dewan Perwakilan Rakjat sementara tidak akan mempunjai djumlah anggauta jang terlalu besar. Dipandang tjukup kurang lebih 150 anggauta.
8. Didalam Dewan Perwakilan Rakjat sementara minoritet - minoritet akan mempunjai perwakilan sendiri.
9. Dewan Perwakilan Rakjat sementara tidak dapat dibubarkan sebelum Konstituante dibentuk.
10. Para anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sementara tidak dapat dituntut atas pendapat jang dilahirkan atau suara jang diberikan dalam mendjalankan djabatannja.
11. Tentang „Kekuasaan membentuk Undang-Undang". „Kekuasaan executief" dan „pernjataan perang dan keadaan bahaja" terdapat persesuaian faham.
12. Tentang susunan kehakiman didapat persetudjuan. bahwa Undang-undang federal akan memberi petundjuk-petundjuk umum jang mengenai susunan Kehakiman daripada Negara Bagian. djika ini diperlukan untuk kebaikannja pengadilan. Kedudukan dan kewadjiban dari Mahkamah Agung akan diatur oleh Undang-undang federal.
13. Jang mendjadi Warga Negara Indonesia ialah :
   a. semua orang bangsa Indonesia jang dulu mendjadi „Nederlands onderdaan atau Warga negara Republik Indonesia".
   b. semua orang bangsa Tionghoa dan bangsa Arab jang dahulu mendjadi „Nederlands onderdaan" atau warga-negara Republik Indonesia dan tidak menjatakan. bahwa mereka tidak suka mendjadi warga negara Indonesia.

c. semua orang bangsa Eropah jang dahulu mendjadi „Nederlands onderdaan" dan berkedudukan di Indonesia dan menjatakan, bahwa mereka ingin mendjadi warga negara Indonesia.
Dalam melaksanakan soal diatas ini harus diadakan aturan, supaja pada saat penjerahan kedaulatan mereka jang ingin mendjadi warga negara Indonesia dengan seketika mempunjai kedudukan itu.

14. Tentang hak-hak pokok negara dapat persetudjuan jang bulat seperti jang dimuat dalam „Universal Declaration of Human Rights" (10 Desember 1948).
15. Selekas mungkin sesudah penjerahan kedaulatan Pemerintah Federal menjelenggarakan pemilihan jang bebas dan rahasia guna membentuk Konstituante.
16. Tentang hal keuangan dan anggaran-belandja terdapat kata persetudjuan dalam garis-garis besar terhadap apa jang dikemukakan oleh kedua belah pihak dalam working-papers masing-masing.
17. Pembitjaraan jang mengenai :
    a. procedure bagaimana Konstitusi Sementara akan diwudjudkan
    b. garis-garis besar dari politik keuangan dan perekonomian R.I.S.
    c. kewadjiban-kewadjiban antara Unie-partners (Belanda dan R.I.S.)
    d. kerdja sama antara Negeri Belanda dan R.I.S. dalam Unie, akan dibitjarakan lebih landjut di Djakarta.
18. Jang mengenai keamanan dipandang perlu mengusahakan supaja Delegasi B.F.O. akan ikut serta dalam suatu badan sentral maupun lokal jang akan mempunjai tugas mengawasi pelaksanaan perhentian permusuhan antara pihak Belanda dan pihak Republik.

Konperensi Inter Indonesia, babak kedua, bersidang di Djakarta dari tanggal 31 Djuli sampai tanggal 2 Agustus telah memutuskan sebagai berikut:

A. KETATANEGARAAN

I. Bendera Republik Indonesia Serikat ialah Sang Merah Putih.
Bahasa resmi Republik Indonesia Serikat ialah Bahasa Indonesia. Lagu Kebangsaan Republik Indonesia Serikat ialah lagu Indonesia Raya.

II. Tentang hal bagaimana Konstitusi Sementara akan diwudjudkan kedua Delegasi setudju dengan procedure sebagai berikut :
    a. Oleh kedua Delegasi dibentuk sebuah Panitia Technik untuk merantjang Konstitusi Sementara jang akan berdasar atas persetudjuan jang telah ditjapai pada Konperensi Inter-Indonesia ke-I dan ke-II;
    b. Setelah Konstitusi Sementara itu selesai dirantjang, lalu dimadjukan kepada kedua Delegasi di Den Haag sebagai Wakil-wakil dari Negara-negara Bagian R. I. S.
    c. Sesudah diperundingkan, kalau perlu dengan perubahan, dan disetudjui oleh kedua Delegasi, maka rantjangan tadi diparafeer oleh kedua Delegasi atas nama Pemerintahnja masing-masing ;
    d. Rantjangan tadi lalu dimadjukan kepada Dewan-Dewan Perwakilan Rakjat masing-masing untuk diratifisir ;
    e. Sesudah ratificatie, maka Wakil-wakil dari daerah-daerah bagian berkumpul lagi untuk menandatangani Konstitusi Sementara itu.

III. Kedua Delegasi sefaham, bahwa dalam waktu satu tahun, sesudah penjerahan kedaulatan, Konstituante jang dibentuk setjara pemilihan bebas dan rahasia menurut peraturan jang akan ditentukan selekas-lekasnja harus sudah dapat berkumpul untuk menetapkan Konstitusi.
Bagaimana tjara terdjadinja rantjangan Konstitusi dan penetapan rantjangan Konstitusi itu, terserah kepada Pemerintah Sementara.

IV. Kedua Delegasi mufakat, bahwa sesudah Presiden dan Menteri-Menteri diangkat, R.I.S. telah bersiap untuk menerima kedaulatan dari Keradjaan Belanda.
Pembentukan Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat akan diselenggarakan setjepat-tjepatnja.
Presiden dipilih oleh wakil-wakil Republik dan wakil-wakil daerah B. F. O. Pada pemilihan itu wakil-wakil jang bersangkutan itu akan menudju kepada persatuan faham (streven naar eenstemmigheid).

V. Mengenai pembagian kursi dalam Dewan Perwakilan Rakjat Sementara kedua Delegasi berpendapat, bahwa perwakilan daerah-daerah jang sesudah penjerahan kedaulatan akan dikuasai langsung oleh Pemerintah Federal Sementara, masuk dalam djumlah perwakilan daerah-daerah B. F. O. dan perwakilan itu akan diurus oleh B. F. O.

VI. Terhadap hal kekuasaan Senat kedua Delegasi mendapat persetudjuan, bahwa Senat itu berhak memberi pertimbangan (advies) dalam semua hal, disamping itu djuga mmpunjai kuasa pada pembentukan undang-undang (medewetgevend) tentang hal-hal jang mengenai perhubungan Pemerintah Pusat R. I. S. dan negara-negara bahagian atau antara negara bahagian dan negara bahagian.
Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakjat atau Senat sendiri dapat menentukan, apakah sesuatu rentjana undang-undang mengenai pokok-pokok perhubungan antara R. I. S. dan negara-negara bahagian atau antara negara bahagian dengan negara bahagian dan apabila terdapat penentuan tersebut oleh salah satu dari organen itu (jaitu Pemerintah, Badan Perwakilan Rakjat atau Senat) maka rentjana undang-undang itu harus diperundingkan oleh Senat. Apabila menolak sesuatu rentjana undang-undang jang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka rentjana itu masih dapat diterima sebagai undang-undang, djika Dewan Perwakilan Rakjat menerimanja sekali lagi dengan suara 2/3 dari djumlah suara.
Untuk mengadakan „over ruling" oleh Badan Perwakilan Rakjat haruslah quorum dari Badan Perwakilan itu ditetapkan 2/3 (dua per tiga) dari banjaknja anggauta badan itu.

VII. Kedua Delegasi mufakat, bahwa anggauta-anggauta Senat terdiri atas wakil-wakil dari daerah-daerah bahagian; tiap-tiap daerah bahagian mengirimkan 2 (dua) wakil dan tiap-tiap wakil mempunjai satu suara. Tiap-tiap wakil ditundjuk oleh Pemerintahnja masing-masing atas andjuran Badan Perwakilan Rakjat Daerah Bahagian; buat tiap-tiap anggauta diandjarkan 3 (tiga) orang kandidat. Pemerintah Daerah akan menundjuk dari antara 6 (enam) orang jang diandjurkan dan tidak terikat pada urutan (volgorde) nama-nama dalam andjuran itu. Badan Perwakilan Daerah Bahagian dibolehkan mentjalonkan orang-orang (untuk anggauta Senat) jang bukan anggauta Badan Perwakilan Daerah itu.

VIII. Kedua Delegasi mufakat untuk bersama-sama mengadakan suatu Panitia Persiapan Nasional terdiri dari wakil-wakil Republik dan B. F. O. Panitia itu boleh diadakan waktu kedua Delegasi ada di Negeri Belanda dan dapat meneruskan pekerdjaan kemudian di Indonesia sesudahnja Konperensi Medja Bundar. Panitia diadakan untuk mengkordinir segala persiapan dan penjelenggaraan, segala sesuatu jang harus didjalankan selama atau sesudah K.M.B. Panitia itu merupakan Badan Perantaraan Sentral antara Pemerintah Republik dan B.F.O. dan tidak bersifat konstitusionil.

IX. Tentang hal Menteri-Menteri jang mempunjai kedudukan chusus, kedua Delegasi mendapat persetudjuan sebagai berikut:
Tiga orang Kabinetsformateur diangkat oleh Presiden semufakat dengan wakil-wakil Negara-negara Bahagian dan daerah-daerah bahagian. Tiga

orang formateur itu mengusulkan kepada Presiden untuk mengangkat Menteri-Menteri lainnja dan mereka itu diangkat oleh Presiden atas usul tadi.

Dari Kementerian-Kementerian ada lima jang mempunjai sifat chusus jaitu Kementerian-Kementerian Pertahanan, Luar Negeri, Dalam Negeri, Keuangan dan Kemakmuran. Tiga orang formateur tersebut pada umumnja memimpin tiga dari lima Kementerian itu. Atas andjuran tiga orang formateur tadi Presiden mengangkat salah satu dari mereka mendjadi Perdana Menteri, Perdana Menteri tidak diwadjibkan memegang portefeuille, akan tetapi iapun mempunjai kedudukan chusus.

Arti kedudukan chusus ialah bahwa dalam hal-hal jang mendesak dan hal-hal darurat, lima (atau enam) orang Menteri tersebut dapat mengambil keputusan jang kekuatannja sama dengan keputusan Kabinet in pleno. Pada mengambil keputusan, lima (enam) orang Menteri jang mempunjai kedudukan chusus itu akan menudju kepada persatuan faham (streven naar eenstemmigheid).

Djikalau keputusan-keputusan itu mengenai sesuatu hal jang langsung berhubungan dengan kompetensi Kementerian jang lain dari pada lima Kementerian tersebut diatas, maka Menteri jang bersangkutan harus ikut serta dalam mengambil keputusan (medebeslissend).

X. Usul modifikasi dari Working-paper B. F. O. Bab V pasal 4, tentang Pengesahan undang-undang dasar negara-negara bahagian oleh R.I.S. disetudjui oleh kedua Delegasi.
Lain dari pada itu kedua Delegasi setudju bahwa akan diturut sebagai „convention" (djadi tidak dimuat dalam sesuatu peraturan) bahwa apabila sesuatu negara bahagian membentuk rentjana undang-undang dasar diadakan permusjawaratan dengan Pemerintah Federal untuk menghindarkan bentrokan dikemudian hari.

XI. Kedua Delegasi sefaham, bahwa Pemerintah Federal tidak hanja menerima penjerahan kedaulatan dari pihak Keradjaan Belanda sadja, tetapi pada waktu itu djuga akan menerima penjerahan kedaulatan dari pihak Republik Indonesia.

XII. Tentang Uni Indonesia-Belanda diantara Delegasi Republik dan Delegasi B. F. O. diadakan pertukaran fikiran dan menghasilkan banjak persesuaian faham jang memuaskan. Pembitjaraan-pembitjaraan selandjutnja akan dilangsungkan kemudian di Negeri Belanda.

B. KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN

I. Tudjuan R. I. S. dalam lapangan perekonomian dan keuangan jang senantiasa harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah R. I.S. ialah: membangunkan ekonomi nasional, memperbesar kemakmuran, memperbesar kekajaan nasional, mempertinggi tingkat hidup rakjat dan melaksanakan keadilan sosial.

A. **Perekonomian**

Untuk mentjapai tudjuan itu maka harus diselenggarakan:

a. memperbesar penghasilan agraria;
b. memadjukan industrialisasi (dalam arti jang seluas-luasnja);
c. mendjalankan transifigrasi.

Tjara-tjara jang harus dipergunakan, ialah:

1. menjusun rentjana kemakmuran umum;
2. memperkembang inisiatip nasional;
3. memberi bantuan materieel dan memberi kredit;

4. memadjukan perusahaan ketjil, perusahaan pertengahan dan besar dalam lapangan perniagaan, keradjinan, perikanan, perhubungan darat, udara dan laut, peternakan dan sebagainja ;
5. mengadakan pendidikan achli technik dalam segala lapangan ;
6. memperluas kooperasi ;
7. memberi pimpinan dilapangan ekonomi, djika kepentingan umum dan tuntunan ekonomi jang sehat memperlukannja ;
8. memperdalam dan memperluas ichtiar pertanian dalam arti jang luas dengan djalan irrigatie, proefstations dan lain-lain ;
9. memperbaiki peraturan-peraturan agraria ;
10. memadjukan dan memelihara kehutanan dengan sebaik-baiknja ;
11. menetapkan upah jang paling rendah ;
12. mengadakan tempat diam jang sebaik-baiknja ;
13. mengadakan djaminan sosial selekas mungkin (sociale verzekering);
14. mengadakan penetapan dan pengawasan harga dimana perlu ;
15. full employement ;
16. memasukkan barang-barang jang dibutuhkan (import) dan mengeluarkan barang-barang (export) untuk membajar import, sehingga ada imbangan antara import dan export ;
17. mempertinggi produksi dalam segala lapangan.

B. **Keuangan**

1. Untuk seluruh R. I. S. hanja berlaku satu alat pembajaran jang sah ;
2. mempertahankan stabiliteit nilai uang ;
3. pada dasarnja dalam R.I.S. harus diadakan satu bank peredaran sadja;
4. untuk R.I.S. perlu diadakan deviezen-instituut jang melulu bertanggung djawab kepada Pemerintah R.I.S.

C. Dilapangan perekonomian, R.I.S. harus bertindak keluar sebagai kesatuan ekonomi ;
oleh karena itu, maka :

a. import dan export harus diatur setjara sentral :
dan seluruh Indonesia dianggap sebagai satu daerah bea ;
b. pembagian barang-barang (barang-barang kapital maupun barang-barang konsumsi jang dipandang sebagai dasar hidup rakjat) diatur setjara sentral ;
c. politik perniagaan, planning-ekonomi dan pada umumnja hubungan ekonomi dengan luar Indonesia didjalankan oleh Pemerintah Federal;
d. peraturan-peraturan umum mengenai perhubungan udara, inter-insulair diatur setjara sentral.

D. **Pokok Chusus**

1. beban atas perusahaan-perusahaan akan diatur sedemikian rupa hingga tidak terlalu memberatkan (redelijke grenzen);
2. memperbarui atau memperpandjang hak-hak dan konsesi-konsesi perlu ditilik dari sudut planning perekonomian umum, dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan penanaman modal jang lama ;
3. dirasa perlu, bahwa pusat kedudukan (domicili) dari perusahaan-perusahaan jang pokok pekerdjaannja di R. I. S. bertempat pula di R. I. S., sedang perusahaan-perusahaan jang hanja mempunjai sebagian dari lapangan pekerdjaannja di R.I.S., sekurang-kuranja mempunjai gevolmachtigde directie di R. I. S. ;
4. perusahaan-perusahaan perlu memberikan bantuan dilapangan pendidikan tenaga-tenaga achli dan pimpinan dalam segala lapangan perekonomian, bank, keuangan dan sosial.

II. Kewadjiban-kewadjiban antara Negeri Belanda dan R. I. S. jang timbul karena penjerahan kedaulatan.

1. Tentang activa dari Indonesia (Hindia-Belanda) akan diadakan timbang-terima dari H. B. ke R. I. S. sesudahnja ada persetudjuan dari kedua belah pihak.
2. Djika penjelidikan segala activa dan pasiva itu membuktikan bahwa harus diadakan perubahan, maka dalam pada itu harus ditempuh djalan jang sesuai dengan sifat hasil penjelidikan.
   Seberapa mungkin sebaiknja ditempuh djalan kata sepakat; djika hal ini tidak mungkin, maka sebagai ultimum remedium harus diadakan penghapusan hak untuk kepentingan umum (onteigening ten algemeene nutte) menurut undang-undang dan dengan penggantian kerugian dalam hal mana, djika modal itu berasal dari luar, akan diadakan kemungkinan transfer, satu dan lain menurut peraturan deviezen R.I.S.
3. Selama R.I.S. mempunjai hutang jang berasal dari Hindia - Belanda dahulu maka oleh Pemerintah R. I. S. akan diadakan perundingan terlebih dahulu dengan Pemerintah Negeri Belanda, sebelum mengadakan perubahan jang penting atau pembaharuan undang-undang keuangan, undang-undang bank federal, perubahan koers mata uang R. I. S.
4. Pembajaran hutang luar negeri atau penglaksanaan kewadjiban R.I.S. kepada Negeri Belanda akan diatur demikian rupa, hingga tidak terlalu memberatkan keuangan dan perekonomian R. I. S.

III. Kerdja sama antara Negeri Belanda dan R. I. S. dalam lingkungan Unie.

1. Kerdja sama antara kedua anggauta Unie harus ditudjukan kepada memperbesar kemakmuran kedua negara.
2. Dasar dari kerdja sama ini harus bersandar atas persamaan hak dan deradjat (gelijkgerechtigheid dan gelijkwaardigheid) dan bersandar pula atas pengertian kedaulatan dari kedua negara itu.
3. Dalam hal-hal jang menguntungkan kedua pihak kedua negara ini dapat bertindak keluar sebagai kesatuan.
4. Dalam menjelenggarakan hubungan dengan luar negeri, dan dimana kepentingan anggauta jang lain tersangkut, akan diadakan pembitjaraan terlebih dahulu.
5. Atas dasar resiproriteit persamaan hak dan kedudukan, maka antara Negeri Belanda dan R. I. S. perlu diadakan preferensi, jang harus disesuaikan dengan motief ekonomi.
6. Sebagai usaha kerdja sama antara Negeri Belanda dan R. I. S. maka perlu diadakan preferensi timbalbalik, jang tidak merugikan salah satu pihak dan jang sesuai djuga dengan hukum internasional.
7. Kepentingan-kepentingan ondernemingslandbouw di R. I. S. akan mendapat perhatian dalam peraturan agraria.
8. Dalam tatanegara R.I.S. akan diadakan ketentuan hukum dan berusaha (rechts- en bedrijfszekerheid) dan perlindungan atas orang dan atas harga benda.
9. Dalam peraturan-peraturan transfer keuangan dari Indonesia ke Negeri Belanda dan sebaliknja akan diberikan fasiliteiten.

C. KEAMANAN

1. a. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat adalah Angkatan Perang Nasional.
   b. Tiap-tiap warga negara dari Republik Indonesia Serikat berkewadjiban dan berhak untuk turut serta dalam pertahanan negara.
   c. Presiden Republik Indonesia Serikat adalah Panglima Tertinggi

dari Angkatan Perang R. I. S.

d. Pimpinan Angkatan Darat, Laut dan Udara R. I. S. adalah di-tangan bangsa Indonesia.

e. Pertahanan negara adalah hak semata-mata dari Pemerintah R.I.S., negara-negara bahagian tidak mempunjai Angkatan Perang sendiri.

2. a. Pembentukan Angkatan Perang R. I. S. adalah semata-mata soal dari bangsa Indonesia.
Angkatan Perang dari R. I. S. akan dibentuk oleh Pemerintah R. I. S.

b. Pembentukan Angkatan Perang R. I. S.
Dalam pembentukan Angkatan Perang R. I. S. itu dipergunakan Angkatan Perang Republik Indonesia (T. N. I.) sebagai inti-sari (kern) bersama-sama dengan bangsa Indonesia jang ada dalam KNIL., ML., KM., VB., Terr-Bat., bekas anggauta KNIL dan lain-lain kesatuan dengan sjarat-sjarat jang akan ditentukan lebih landjut.

3. a. Anggauta KNIL dan lain-lain jang bukan bangsa Indonesia dan jang ingin mendjadi warga negara dapat dimasukkan pula dalam Angkatan Perang R. I. S.

b. Anggauta KNIL dan lain-lain jang bukan bangsa Indonesia jang tidak ingin mendjadi warga negara dapat dipergunakan sebagai instrukteurs menurut kebutuhan, dan kedudukan mereka dapat diatur setjara militaire missie antara negeri Belanda dan R. I. S.

4. Pada permulaan R. I. S. Menteri Pertahanan dapat merangkap Panglima Besar Angkatan Perang R. I. S.

5. Soal penjerahan peralatan dan bangunan-bangunan KNIL dan sebagainja termasuk djuga dari M. L. kepada Angkatan Perang R. I. S akan dibitjarakan lebih landjut dengan Pemerintah Belanda.

6. Pemerintah R. I. S. akan mengadakan perundingan dengan Pemerintah Belanda tentang kemungkinan untuk menjediakan sebagian dari Angkatan Laut Keradjaan Belanda untuk sementara waktu untuk dipergunakan oleh R. I. S.

7. a. Penarikan Angkatan Perang Belanda.
Angkatan Perang Belanda K. L. ditarik seluruhnja dari daerah R. I. S.

b. Tjara dan waktu selesainja penarikan Angkatan Perang Belanda ditentukan dalam Konperensi Medja Bundar.

8. Oleh karena soal-soal politik dan soal-soal keuangan jang bersangkutan dengan hubungan militer antara Keradjaan Belanda dan R.I.S. tidak dimasukkan dalam pembitjaran-pembitjaran Panitia Pertahanan, maka dibawah ini dikemukakan pokok-pokok tentang hubungan tersebut diatas ditindjau dari sudut kemiliteran :

a. Dalam hal-hal dimana ada kepentingan militer bersama dari R.I.S. dan Keradjaan Belanda, dapat diadakan kerdja-sama dalam lapangan kemiliteran.

b. Dalam anggar-anggar Unie diatur tjaranja Menteri Pertahanan dari R.I.S. dan Menteri Pertahanan dari Keradjaan Belanda beserta achli-achli militer dari kedua negara dapat merundingkan tjara mendjalankan kerdja-sama dalam hal-hal jang tersebut diatas.

9. Tentang kemungkinan-kemungkinan untuk menjediakan tenaga-tenaga technik oleh Keradjaan Belanda untuk keperluan R.I.S. dan sjarat-sjaratnja akan diadakan pembitjaraan lebih landjut.

D. KEBUDAJAAN

1. Kebudajaan Indonesia merupakan suatu synthese jang antara lain berarti pembangunan dan perkembangan kebudajaan - kebudajaan pelbagai daerah diseluruh R.I.S., jaitu jang mendjadi kebudajaan Indonesia jang mengandung anasir-anasir kebudajaan Timur dan Barat jang berharga. Kebudajaan Nasional Indonesia ialah kebudajaan rakjat Indonesia jang berdasarkan peri - kemanusiaan dan Demokrasi.
2. Bahasa Indonesia ialah bahasa Persatuan dan bahasa Pengantar kebudajaan Nasional Indonesia.
3. Baik R.I.S. maupun Negara-Negara Bagian mempunjai tugas kewadjiban dalam membangun dan memperkembangkan kebudajaan Nasional Indonesia, dalam arti jang seluas-luasnja.
4. Mendjalankan tugas kewadjiban ini dalam Negara-Negara Bagian akan ditentukan oleh Negara-Negara itu sendiri.
5. Pemerintah R.I.S. mendjalankan tugas kewadjiban ini untuk hal-hal jang umum dan untuk mengadakan kordinasi dalam usaha jang didjalankan oleh Negara-Negara Bagian ;
   Pemeliharaan dan penjempurnaan Kebudajaan itu memperlukan antara lain :

   A. Pendidikan,
      1. Pendidikan sekolah.
      2. „ masjarakat.
      3. „ istimewa.
      4. „ agama.
      5. „ kesenian.

   B. Alat-alat
      1. Radio, film, pers, sandiwara, dan lain - lain pertundjukan rakjat.
      2. Penjelidikan ilmu (research - work).
      3. Perpustakaan.
6. Pekerdjaan bersama dalam lingkungan kebudajaan dengan luar negeri dipandang berfaedah untuk pembangunan dan perkembangan Kebudajaan Nasional Indonesia.
7. Pekerdjaan bersama dalam lingkungan kebudajaan dengan negeri Belanda diatur atas dasar-dasar persamaan-persamaan kedua belah pihak dan atas kehendak sukarela.
8. Untuk mendjalankan tugas kewadjiban jang tersebut diatas Pemerintah R.I.S. dan Pemerintah Negara-Negara Bagian boleh minta dan harus memberikan sokongan kepada badan-badan Kebudajaan (Culturele instituten).
9. Lembaga-lembaga ilmu pengetahuan (scientific institutions) jang penting untuk seluruh Indonesia mendjadi tanggung djawab Pemerintah R.I.S.
10. Pemberantasan buta huruf didjalankan dengan tepat dan teratur, hingga dalam waktu jang tidak begitu lama semua warga-negara R.I.S. sudah dapat membatja dan menulis. Penjelenggaraannja adalah tanggung djawab Negara Bagian dengan mengingat Konkordansi dan kerdja sama dalam hal ini.

PENGADJARAN DAN PENDIDIKAN

11. Dalam soal pengadjaran tugas kewadjiban R.I.S. adalah ; „fundamental regulations concerning university education including directives for training courses that give admittance to examinations and for the civil effect of university de-grees".

Untuk sementara diseluruh R.I.S. hanja diadakan satu balai perguruan tinggi nasional jang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Pada azasnja diakui hak negara-negara bagian dan lembaga-lembaga partikelir untuk mengadakan sekolah tinggi.
Balai perguruan tinggi harus mempunjai dasar dan sifat jang bebas. Bahasa pengantar disekolah-sekolah jang diselenggarakan Pemerintah ialah bahasa Indonesia.

12. Dalam undang-undang pengadjaran negara-negara bagian hendaklah dimuat peraturan-peraturan jang memberi djaminan, bahwa tudjuan pengadjaran itu antara lain ialah:
    1. memperdalam perasaan Kebangsaan Indonesia,
    2. mempererat persatuan Indonesia.
    3. membangun dan memperdalam keinsjafan peri kemanusiaan.
13. Dengan djalan permusjawaratan dan permufakatan antara Pemerintah R.I.S. dan Pemerintah Negara-Negara Bagian dapatlah kerdjasama dengan maksud:
    1. mengadakan kordinasi dalam usaha pembangunan pengadjaran.
    2. mentjari persesuaian dalam susunan dan bentuk pengadjaran.
14. Kemerdekaan seseorang untuk mendidik anak-anaknja berdasar kepada kehendak orang tuanja, diakui.
15. Sekolah partikelir jang memenuhi sjarat, boleh diberi bantuan (subsidi) oleh Pemerintah.
16. Golongan-golongan ketjil (Minderheden) dapat mendirikan sekolahnja sendiri dimana bahasa Indonesia sekurang-kurangnja harus diadjarkan sebagai mata pengadjaran. Djika dikehendaki, pihak Pemerintah dapat memberikan bantuannja menurut peraturan-peraturan jang akan ditentukan.
17. Didalam sekolah-sekolah Pemerintah sedapat mungkin disediakan tempat dan waktu untuk peladjaran Agama.

A G A M A

18. Kemerdekaan Agama harus terdjamin dalam Undang-undang dasar R.I.S. dan Negara-Negara Bagian.
    Selandjutnja ditundjukkan kepada jang telah diterima di Djokja jaitu pasal 10 "Universal Declaration of Human Rights" seperti berikut: "The right to freedom of (thought), conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his Religion or belief in teaching, practice, worship and observance".

U M U M

19. Pada dewasa ini dan untuk selandjutnja, maka dalam urusan pendidikan dan pengadjaran serta kebudajaan pada umumnja, soal pemuda harus mendapat perhatian jang lebih banjak dari biasa.
    Perundingan-perundingan tersebut berlaku didalam suasana jang amat baik dan memuaskan.

*

Sementara itu perundingan formil telah diadakan antara Delegasi-Delegasi Republik Indonesia dan Belanda dan Wakil-wakil B.F.O. dibawah pengawasan K.P.B.B.I.

Hasil-hasil jang telah diperoleh jalah tertjatat dalam 3 dokumen dasar jaitu :
1. perintah penghentian permusuhan.
2. proklamasi bersama.
3. peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan cease fire.

Demikianlah, maka pada tanggal 3 Agustus 1949 Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dengan perantaraan R.R.I. telah mengumumkan perintah penghentian tembak-menembak diseluruh Indonesia.

Begitu djuga Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink sebagai Panglima Angkatan Perang Belanda di Indonesia memerintahkan kepada serdadu-serdadunja untuk meletakkan sendjata.

Pada tanggal 4 Agustus 1949 Kabinet mengalami perubahan dan selandjutnja disusun sebagai berikut :

1.	Perdana Menteri	Drs. Moh. Hatta X)
2.	Wakil Perdana Menteri	Mr. Sjafruddin Prawiranegara.
3.	Menteri Pertahanan Kordinator Keamanan	S. P. Hamengku Buwono IX.
4.	Menteri Luar Negeri	H. A. Salim.
5.	Menteri Dalam Negeri	Mr. Wongsonegoro.
6.	Menteri Kehakiman	Mr. Susanto Tirtoprodjo.
7.	Menteri Keuangan	Mr. Lukman Hakim.
8.	Menteri Kemakmuran	I. J. Kasimo.
9.	Menteri Persediaan Makanan Rakjat	I. J. Kasimo.
10.	Menteri Pekerdjaan Umum	Ir. Laoh.
11.	Menteri Perhubungan	Ir. Laoh.
12.	Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan	Sarmidi Mangunsarkoro.
13.	Menteri Kesehatan (ad interim)	Dr. Surono.
14.	Menteri Perburuhan dan Sosial	Kusnan.
15.	Menteri Agama	K. H. Maskur.
16.	Menteri Penerangan	Mr. Samsudin.
17.	Menteri (ta' berportofolio)	Dr. Sukiman.
18.	„ „ „	Dr. J. Leimena.
19.	„ „ „	Ir. Djuanda.

Peringatan :

x) Selama Perdana Menteri ada di luar negeri S.P. Hamengku Buwono IX merangkap acting Perdana Menteri.

Dan berhubung akan dimulainja perundingan K.M.B. maka pada hari itu telah pula diangkat anggauta-anggauta Delegasi Republik Indonesia jang terdiri dari :
Ketua : Drs. Moh. Hatta dan para anggauta : Mr. Moh. Rum, Prof. Mr. Dr. Supomo, Ir. Djuanda, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Dr. Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Drs. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. A. Karim Pringgodigdo dan Kol. Simatupang.

Sekretaris Delegasi Mr. Sumardi, W.J. Latumeten dan 7 orang anggauta.

Ketjuali para anggauta tersebut diatas telah diangkat pula beberapa ahli dan penasehat pada Delegasi.

Selandjutnja guna menghadapi perundingan di Indonesia, maka Delegasi Republik Indonesia disusun sebagai berikut : Ketua Mr. Susanto Tirtoprodjo, para anggauta Ir. Laoh, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ali Budiardjo, Moh. Natsir Mr. Latuharhary, Mr. St. Moh. Rasjid.

* *
*

12. K. M. B. DAN NEGARA KESATUAN

MESKIPUN situasi militer belum tenang, ini tidak menghalang - halangi Konperensi Medja Bundar di Den Haag.

Demikianlah pada tanggal 6 Agustus Wakil Presiden Hatta beserta rombongan Delegasi Republik Indonesia dan K.P.B.B.I. meninggalkan Indonesia menudju ke Nederland, dengan terlebih dulu singgah di India.

Konperensi Medja Bundar dibuka dengan resmi pada tanggal 23 Agustus bertempat di Ridderzaal di Den Haag. Hadir dalam konperensi tersebut ketjuali Delegasi - Delegasi Republik, Belanda dan B.F.O. pun pula dari K.P.B.B.I.

Sementara itu Delegasi Republik Indonesia di Indonesia jang melaksanakan persetudjuan Rum — Royen (terutama mengenai cease fire dan urusan daerah-daerah luar Jogja) serta diketuai Mr. Susanto Tirtoprodjo, bekerdja terus dalam hubungan dengan pihak Belanda.

Sri Sultan, selaku acting Perdana Menteri di Djawa, (Wk. P.M. Mr. Sjafrudin berada di Sumatera) sibuk, djuga selaku Menteri Pertahanan berkeliling menindjau daerah-daerah dan melaksanakan cease fire jang tak mudah itu. Beberapa hal harus segera diselesaikan. Penarikan tentara Belanda dari daerah-daerah masih sukar dilaksanakan.

Pada tanggal 24 Oktober acting Perdana Menteri Sultan Hamengku Buwono atas nama Pemerintah Republik memberikan keterangan kepada B.P. KNIP dalam sidang terbuka mengenai K.M.B. dan pelaksanaan Rum-Royen Statement.

Walaupun menghadapi kesulitan-kesulitan, K.M.B. berdjalan terus. Pada tanggal 29 Oktober di Kota Scheveningen Nederland dilakukan penanda tanganan Piagam Persetudjuan tentang konstitusi R. I. S. Dan pada tanggal 2 Nopember telah dapat dilangsungkan upatjara penutup K. M. B. bertempat di Ridderzaal di Den Haag, dengan hasil ketentuan penjerahan kedaulatan Belanda di Indonesia pada Republik Indonesia Serikat. Djuga Republik Indonesia sendiri akan menjerahkan kedaulatannja pada R. I. S. Soal Irian ditunda satu tahun penjelesaiannja. Persetudjuan K. M. B. melegakan suasana di Indonesia, walaupun banjak djuga menimbulkan banjak kritik. Indonesia katanja terlalu banjak memberikan konsesi pada kepentingan Belanda di Indonesia. Tetapi perdamaian dan ketenteraman bagi pembangunan lebih diutamakan oleh delegasi kita. Delegasi Indonesia berturut-turut kembali ke Indonesia. Demikian pula P.M. Hatta pada tanggal 14 Nopember tiba kembali di Jogjakarta.

Selandjutnja pada tanggal 16 Nopember P.M. memberikan laporan ke Kabinet, dan dengan suara bulat Kabinet Republik menerima hasil-hasil K.M.B. dan pada prinsipnja berpendapat, bahwa ratifikasi harus didjalankan dalam sidang pleno K. N. I. Pusat.

Demikianlah, pada tanggal 25 Nopember Pemerintah Republik telah memberikan keterangannja tentang K.M.B. di BP KNIP dalam sidang terbuka.

Dan mulai tanggal 7 — 15 Desember KNIP Pleno mengadakan sidangnja di Siti Hinggil guna meratifikasi hasil-hasil K.M.B. Dengan suara 226 pro, 62 anti dan 31 suara blanko, KNIP menerima hasil-hasil K. M. B.

Sementara itu, guna mengatur segala sesuatunja, maka pada tanggal 26 Nopember antara wakil-wakil Republik Indonesia dan B.F.O. telah dapat dibentuk Panitia Persiapan Nasional diketuai oleh Mr. Moh. Rum sedang Anak Agung Gde Agung wakil Ketua. Adapun para anggautanja jalah: Dr. Leimena, Ir. Djuanda, Dr. Suparmo, Radja Kaliamsjah, Mr. Kosasih dan Prof. Mr. Dr. Supomo.

Selandjutnja pada tanggal 16 Desember dengan bertempat di Kepatihan Jogjakarta oleh 16 wakil negara-negara bagian dilangsungkan pemilihan Presiden R. I. S. jang pertama. Dengan suara bulat Presiden Soekarno dipilih mendjadi Presiden R. I. S. jang pertama.

Kemudian dengan bertempat di Siti Hinggil pada tanggal 17 Desember dilakukan upatjara penobatan Presiden R. I. S.

Pada tanggal 19 Desember Kabinet R. I. S. jang pertama telah terbentuk terdiri dari:

1.	Perdana Menteri, sementara merangkap Menteri Luar Negeri	Mohammad Hatta.
2.	Menteri Pertahanan	Sultan Hamengku Buwono IX.
3.	Menteri Dalam Negeri	Ide Anak Agung Gde Agung.
4.	Menteri Keuangan	Mr. Sjafrudin Prawiranegara.
5.	Menteri Kemakmuran	Ir. Djuanda.
6.	Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum	Ir. H. Laoh.
7.	Menteri Kehakiman	Prof. Mr. Dr. Supomo.
8.	Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan	Dr. Abu Hanifah.
9.	Menteri Kesehatan	Dr. J. Leimena.
10.	Menteri Perburuhan	Mr. Wilopo.
11.	Menteri Sosial	Mr. Kosasih Purwanegara.
12.	Menteri Agama	H. Abdul Wachid-Hasjim.
13.	Menteri Penerangan	Arnold Mononutu.
14.	Menteri Negara	Sultan Hamid II.
15.	Menteri Negara	Mr. Mohammad Rum.
16.	Menteri Negara	Dr. Suparmo.

PROGRAM KABINET R.I.S.

1. Menjelenggarakan supaja pemindahan kekuasaan ketangan bangsa Indonesia diseluruh Indonesia terdjadi dengan seksama; mengusahakan reorganisasi K.N.I.L. dan pembentukan Angkatan Perang R.I.S. dan pengembalian tentara Belanda ke negerinja dalam waktu jang selekas-lekasnja.
2. Menjelenggarakan ketenteraman umum, supaja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja terdjamin berlakunja hak-hak demokrasi dan terlaksananja dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaannja.
3. Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, tjara bagaimana rakjat menjatakan kemauannja menurut asas-asas Undang-Undang Dasar R.I.S., dan menjelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.
4. Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakjat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk djaminan sosial dan penempatan tenaga kembali kedalam masjarakat;

mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan Pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terudjud kepada kemakmuran rakjat seluruhnja.

5. Menjempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masjarakat Indonesia dan membangunkan pusat kebudajaan nasional; mempergiat pemberantasan buta huruf dikalangan rakjat.
6. Menjelesaikan soal Irian dalam tahun ini djuga dengan djalan damai.
7. Mendjalankan politik luar negeri jang memperkuat kedudukan R.I.S. dalam dunia internasional dengan memperkuat tjita - tjita perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa.
   Memperkuat perhubungan moreel, politik dan ekonomi antara negara-negara Asia Tenggara. Mendjalankan politik dalam Uni, agar supaja Uni ini berguna bagi kepentingan R.I.S. Berusaha supaja R.I.S. mendjadi anggauta Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Guna keperluan timbang terima penjerahan kedaulatan dari Nederland, maka pada tanggal 23 Desember Delegasi Indonesia berangkat ke Nederland. Ketua Delegasi adalah: Drs. Moh. Hatta, anggauta-anggauta: Sultan Hamid II, Sujono Hadinoto. Dr. Suparmo, Mr. Dr. Kusumahatmadja dan Prof. Mr. Dr. Supomo.

Dan untuk Delegasi di Indonesia, jalah untuk keperluan timbang terima penjerahan pemerintahan Hindia Belanda pada R.I.S. di Djakarta, telah tersusun sebagai berikut: Ketua: Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Anggauta-anggauta: Anak Agung Gde Agung, Mr. Kosasih dan Mr. Moh. Rum.

Kemudian tibalah saat bersedjarah jalah pada tanggal 27 Desember 1949.

a. Di Amsterdam telah dilakukan upatjara penjerahan kedaulatan Keradjaan Belanda pada R.I.S.
b. di Djakarta dilakukan penjerahan pemerintahan Hindia Belanda pada R.I.S. dengan bertempat di Istana Gambir.
c. Di Jogjakarta dilakukan upatjara penjumpahan Mr. Assaat sebagai Pemangku Djabatan Presiden Republik Indonesia, dan Prawoto Mangkusasmito sebagai Wakil Ketua K.N.I.P.
d. Ketjuali itu dilakukan pula penjerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada R.I.S.

Keesokan harinja pada tanggal 28 Desember Presiden Soekarno sebagai Presiden R.I.S. pertama berangkat ke Djakarta dan pesan beliau kepada rakjat Jogjakarta, jalah:

Jogjakarta mendjadi termasjhur oleh karena djiwa-kemerdekaannja.
Hiduplah — terus djiwa kemerdekaan itu!

Soekarno

*

Sebagai Pemangku Djabatan Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 4 Djanuari 1950 Mr. Assaat menundjuk Mr. Susanto Tirtoprodjo, Moh. Natsir dan Dr. Abdul Halim sebagai pembentuk Kabinet Republik Indonesia jang sifatnja nasional.

Demikianlah para formateurs tersebut pada tanggal 16 Djanuari baru selesai membentuk kabinet Republik Indonesia jang susunannja sebagai berikut:

1.	Perdana Menteri	Dr. A Halim.
	Wakil Perdana Menteri merangkap Urusan Umum	Mr. Abdul Hakim.
2.	Menteri Dalam Negeri	Mr. Susanto Tirtoprodjo.
3.	Menteri Penerangan	Wiwoho Purbohadidjojo

4 Menteri Keuangan	Mr. Lukman Hakim.
5. Menteri Perhubungan dan Pekerdjaan Umum	Ir. Sitompul.
6. Menteri Kesehatan	Dr. Sutopo.
7. Menteri Sosial	Hamdani
8. Menteri Perburuhan	Dr. Maas.
9. Menteri Kehakiman	Mr. A.G. Pringgodigdo.
10. Menteri Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan	S. Mangunsarkoro.
11. Menteri Pertanian	Sadjarwo.
12. Menteri Perdagangan dan Perindustrian	Mr. Tandiono Manu.
13. Menteri Pembangunan dan Masjarakat	Sugondo Djojopuspito.
14. Menteri Agama	Fakih Usman.

Program Kabinet :

1. Meneruskan perdjuangan untuk mentjapai Negara kesatuan jang meliputi seluruh kepulauan Indonesia dan jang dimaksud dalam proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Melandjutkan penglaksanaan pasal 27 ajat 2 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta menjelenggarakan politik buruh dan tani, berpedoman kepada pasal-pasal tersebut.
3. Mendemokratisir kehidupan politik dan pemerintah antara lain dengan djalan :
   a. mengusahakan selekas mungkin berlakunja bebas hak-hak Demokrasi, terutama hak berserikat dan bersidang dan hak menjatakan pendapat.
   b. melaksanakan pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah.
   c sebelum pemilihan umum berhasil dimana perlu memperbaharui susunan Dewan-Dewan Perwakilan Daerah jang sedapat mungkin mentjerminkan perkembangan kehidupan politik.
4. Menjelenggarakan pemulihan tenaga-tenaga bekas anggauta tentara maupun lasjkar kembali kemasjarakat serta rehabilitasi para korban perdjuangan.
5. Memadjukan pembangunan budi disegala lapisan masjarakat dan mendjamin kebebasan suburnja djiwa keagamaan menurut agama masing-masing didalam pembangunan Negara, sesuai dengan Undang Undang Dasar pasal 29.
6. Memperluas pendidikan masjarakat dan pengadjaran Rakjat.

Setelah terbentuknja Pemerintah R. I. S. di Djakarta dan Negara R. I. sebagai negara bagian dalam R.I.S., maka sedjak permulaan bulan Djanuari 1950 banjaklah mengalir pernjataan-pernjataan dari daerah-daerah lain jang menurut hukum masuk negara bagian dalam R.I.S., tapi ingin melepaskan diri dari negara bagian tsb. dan menggabung pada Republik Indonesia. Demikianlah berturut-turut menjatakan diri sebagai daerah Republik Indonesia jalah pada tanggal 4 — 1 DPR Malang dengan mengadjukan mosi untuk lepas dari Negara Djawa Timur dan masuk pada Republik Indonesia.

DPR Djawa Tengah telah membentuk Panitya jang berkewadjiban menjusun usul-usul kepada Recomba untuk menggabung pada Republik Indonesia. Pada tanggal 30 - 1 Sukabumi minta lepas dari Pasundan dan masuk bagian Republik Indonesia.

Pada tanggal 22 April Djakarta Raya menggabungkan diri pada Republik Indonesia sedangkan pada tanggal 22 April djuga Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan menjatakan keluar dari N.I.T. dan masuk Republik Indonesia.

Menilik dari pernjataan-pernjataan tersebut, teranglah bahwa kehendak untuk mendirikan negara kesatuan sudah tak dapat ditjegah lagi. Maka hal jang demikian ini kemudian mendjadi perhatian Pemerintah-pemerintah R.I.S. dan Republik Indonesia.

Demikianlah pada tanggal 19 Mei Pemerintah-pemerintah R.I.S. dan Republik Indonesia telah mengadakan perundingan di Djakarta dan dapat menghasilkan Piagam Persetudjuan R.I.S. — R. I. sebagai berikut:

Pada hari Djum'at tanggal 19 bulan Mei 1950, kami Pemerintah R. I. S. dalam hal ini bertindak djuga dengan mandat penuh atas nama Pemerintah N. I. T. dan Pemerintah N. S. T. sebagai pihak kesatu dan Pemerintah Republik Indonesia pada pihak kedua jang melangsungkan perundingan di Djakarta, setelah mempertimbangkan dan menindjau pokok-pokok fikiran lebih landjut, Negara Kesatuan jang disusun oleh kedua belah pihak tersebut diatas menjatakan:

I. Bahwa kami menjetudjui dalam waktu sesingkat-singkatnja bersama-sama melaksanakan Negara kesatuan sebagai pendjelmaan dari pada Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 atas pokok-pokok. Kedalam: menjempurnakan penghidupan rakjat, dan persatuan bangsa Indonesia. Keluar: Memelihara perhubungan baik dengan negara-negara lain.

II. Bahwa kami menjetudjui:

A) mengenai Undang - Undang Dasar sementara:

1. U. U.D. negara kesatuan diperdapat dengan menambah Konstitusi sementara R. I. S. sedemikian rupa, hingga U. U. D. Republik Indonesia diantara lain pasal 27, pasal 29 dan pasal 33 ditambah dengan bagian-bagian jang baik dari Konstitusi sementara R. I. S. termasuk didalamnja.
2. U. U. D. Sementara Negara Kesatuan diadakan pasal jang memuat pokok fikiran hak milik itu adalah suatu funksi sosial.
3. Selandjutnja diadakan perubahan-perubahan dalam Konstitusi sementara R. I. S. antara lain ialah:
   a. Senat dihapuskan.
   b. D. P. R. sementara terdiri atas gabungan D. P. R. R. I. S. dan B.P. K.N.I.P. Tambahan anggauta atas petundjuk Presiden dipertimbangkan lebih djauh oleh kedua Pemerintah.
   c. D. P. R. sementara bersama-sama dengan K.N.P. dinamakan Madjelis - Perubahan U. U. D. mempunjai hak untuk mengadakan perubahan dalam U. U. D. baru.
   d. Konstituante terdiri dari anggauta-anggauta jang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum berdasarkan atas 1 anggauta untuk tiap-tiap 300.000 penduduk dengan memperhatikan perwakilan jang pantas bagi golongan minoriteit.
   e. Presiden ialah Presiden Soekarno.
   f. Dewan Menteri harus bersifat kabinet parlementair.
   g. Tentang djabatan Wakil Presiden dalam negara kesatuan selama masa sebelum konstituante terbentuk Pemerintah R. I. S. dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengadakan tukar fikiran lebih landjut.
4. Sebelum diadakan perundang - undang kesatuan, maka undang-undang dan peraturan-peraturan jang ada tetap berlaku. Tetapi dimana mungkin diusahakan supaja perundang - undang Republik Indonesia berlaku.

5. Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan.

B.) MENGENAI PENINDJAUAN dasar-dasar penjelesaian :
Dasar-dasar jang penting untuk menjelesaikan kesukaran-kesukaran dilapang politik, ekonomi, keuangan, keamanan dan lain-lain harus ditindjau dan direntjanakan dengan pengertian, bahwa setelah dipertimbangkan dengan diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan jang ada pada waktu itu, dan selandjutnja.

III. Bahwa kami menjetudjui pembentukan suatu panitya jang berkewadjiban menjelenggarakan segala persetudjuan tersebut seluruhnja dalam waktu sesingkat-singkatnja. Hatsil pekerdjaan panitya tersebut diadjukan oleh Pemerintah R. I. S. kepada D. P. R. dan Senat. Dan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada B.P. K.N.I.P. Djikalau sesudah ternjata bahwa D. P. R. dan Senat, serta B.P. K.N.I.P. dapat menerimanja, maka Presiden meresmikan pembentukan Negara kesatuan dalam suatu rapat gabungan D. P. R. dan Senat R. I. S. Setelah itu, maka Pemerintah R. I. S. dan Pemerintah R. I. bubar. Dan Presiden mengusahakan pembentukan Pemerintah baru.

Perdana Menteri
Republik Indonesia Serikat
Drs. MOH. HATTA
Perdana Menteri
Republik Indonesia
Dr. A. HALIM.

Perundingan antara R. I. S. dan Republik Indonesia selandjutnja diadakan pada tanggal 20 - 7 di Djakarta dan dapat menghasilkan persetudjuan mengenai pelbagai lapangan jang antara lain sebagai berikut :

1. D. P. R. Negara Kesatuan jang pertama terdiri dari pada para Ketua, Wakil Ketua dan anggauta D.P.R. R.I.S., Senat, B.P. K.N.I.P. dan Dewan Pertimbangan Agung.
2. Konstituante terdiri dari anggauta-anggauta jang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum dan sebagai dasar 150.000 penduduk mempunjai 1 wakil.
3. Kabinet terdiri dari para menteri jang mempunjai tanggung djawab penuh.
4. Sebelum terbentuknja Konstituante, didalam Negara Kesatuan diadakan Wakil Presiden jang akan dipegang oleh Drs. Moh. Hatta.
5. Buat sementara Djakarta sebagai Ibu Kota.

Demikian antara lain bunji persetudjuan Pemerintah R.I.S. — Republik Indonesia dan selandjutnja telah diputuskan djuga, bahwa rentjana Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan akan diadjukan terlebih dulu ke D. P. R. dan Senat R. I. S. serta B.P. K.N.I.P. Dan dalam sidangnja pada tanggal 12 Agustus B.P.K.N.I.P. telah menerima rentjana U. U. D. Negara Kesatuan dengan suara 31 pro, 2 anti dan jang meninggalkan sidang 7.

Dan dalam sidangnja pada tanggal 14 Agustus D.P.R. R.I.S. telah menerimanja dengan suara 90 pro dan 18 anti.

Demikianlah maka selandjutnja pada tgl. 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno telah membatjakan Piagam Pernjataan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia dimuka rapat gabungan D.P.R. R.I.S. dan Senat.

Siang harinja djam 12 Presiden Soekarno telah tiba di Jogjakarta untuk menerima kembali mandat jang telah diberikan kepada Mr. Assaat.

Pada djam 13.00 Perdana Menteri Republik Indonesia Dr. Halim telah mengembalikan mandatnja pada acting Presiden Mr. Assaat. Setelah itu Mr. Assaat mengembalikan mandat acting Presiden kepada Presiden Soekarno.

Upatjara ini dilangsungkan di Istana Presiden di Jogjakarta. Setelah upatjara di Presidenan selesai, maka kemudian di B.P. K.N.I.P. diadakan upatjara penjerahan kembali pimpinan Badan Pekerdja dari Sdr. Prawoto Mangkusasmito kepada Mr. Assaat. Upatjara ini merupakan sidang Badan Pekerdja jang terachir. Dan dimuka B.P. K.N.I.P. Presiden telah menjatakan, bahwa Ketua, Wakil Ketua dan anggauta B.P. K.N.I.P. serta Dewan Pertimbangan Agung akan dimasukkan dalam D.P.R. Negara Kesatuan.

Pada djam 14.00 Presiden Soekarno beserta para anggauta D.P.R. Negara Kesatuan (dari B.P.K.N.I.P. dan Dewan Pertimbangan Agung) bertolak ke Djakarta.

* *
*

Ir. Walujo seorang warganegara baru berasal bangsa Belanda, ikut menjambut kedatangan utusan luar Jogjakarta waktu Konperensi peranakan.

Anggauta Komisi Tiga Negara tiba di Jogjakarta disambut oleh Letn. Dj. Hamengku Buwono.

Pimpinan Badan Pekerdja K. N. I. Pusat.

Sidang B. P. KNIP dipimpin oleh wakil Ketua Prawoto Mangkusasmito.

Dr. v. Royen dengan rombongannja tiba di Jogjakarta.
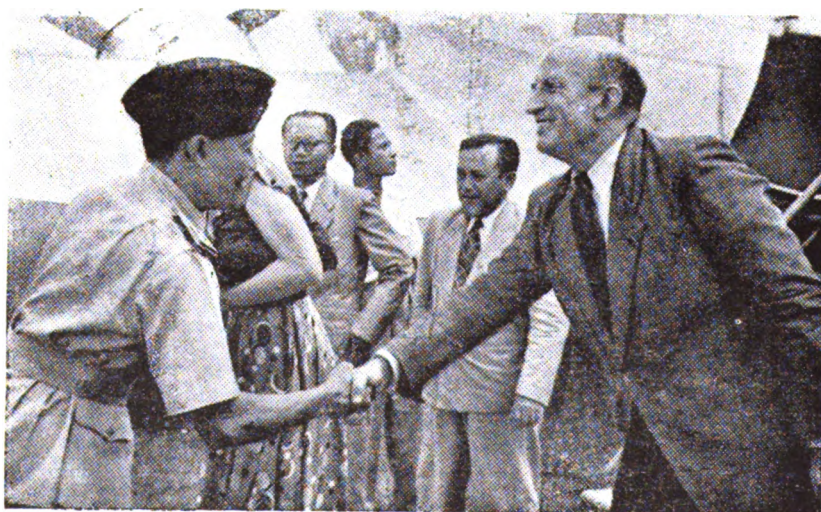
Prof. Schermerhorn mengundjungi Jogjakarta disambut oleh S. P. Paku Alam.

Konperensi Inter Indonesia antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi B.F.O. di Jogjakarta. S.P. Paku Alam VIII selaku Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta mengutjapkan kata sambutannja.
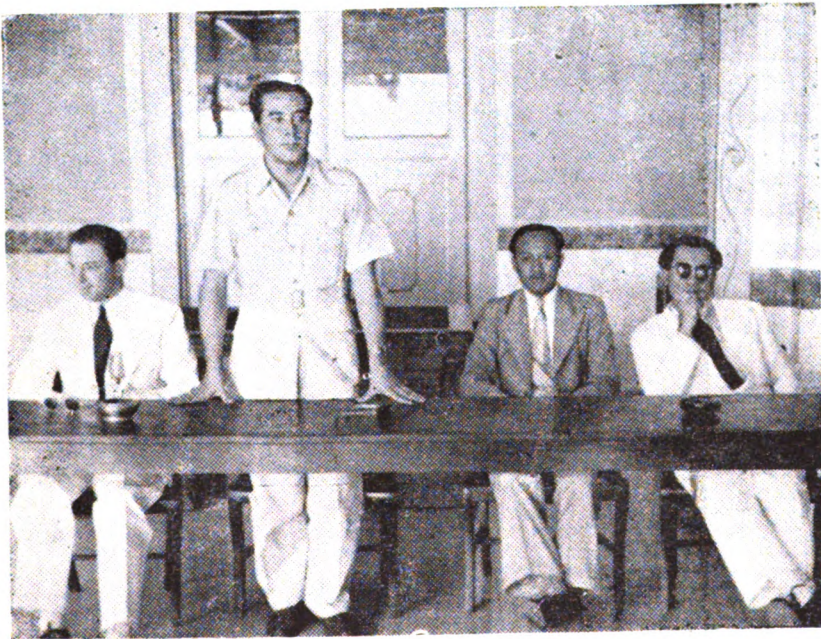
Sultan Hamid II, Ketua B.F.O. menjampaikan terima kasih atas sambutan Pemerintah di Jogjakarta.

Pada waktu kaum Republikein dan Federalis saling mendekati, dimana-mana terdapat poster ini.
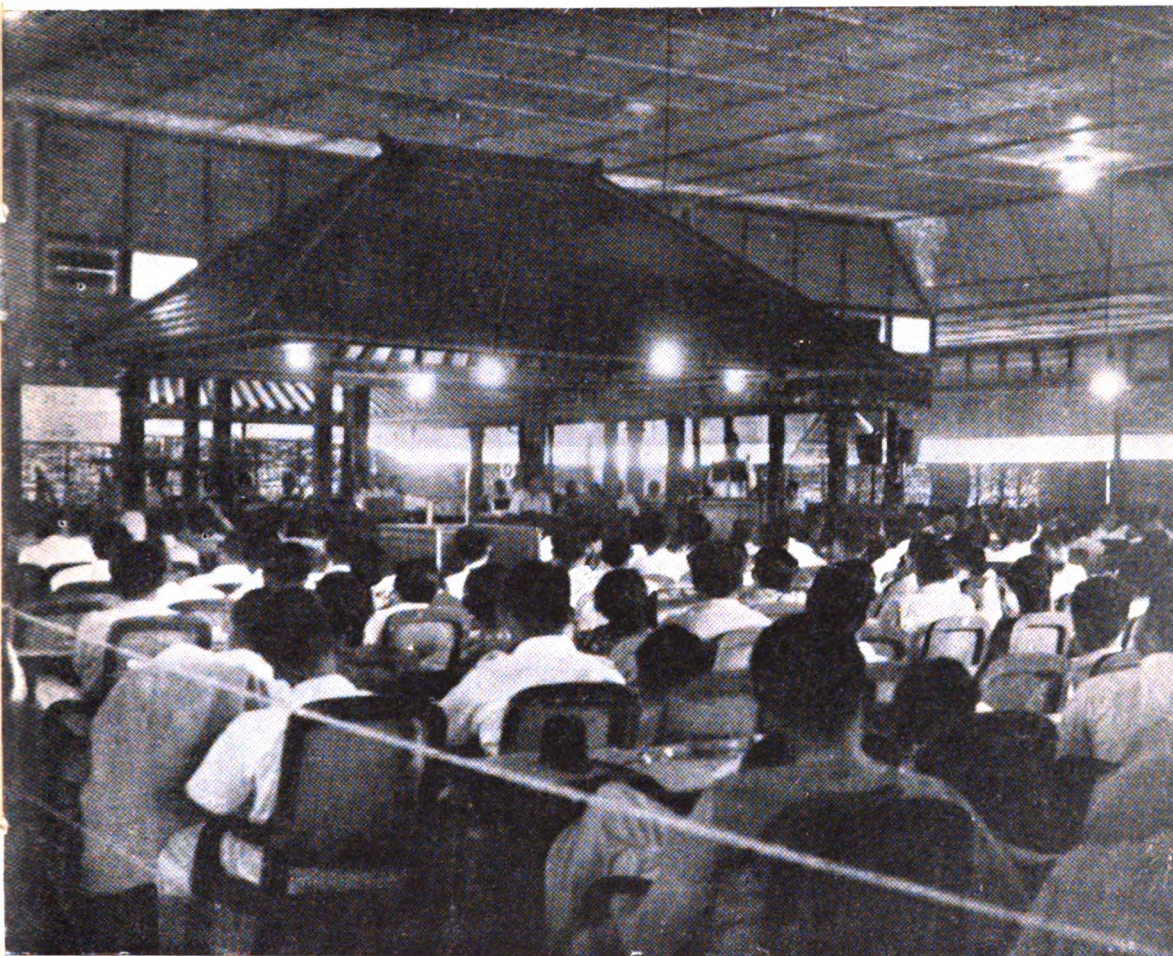
Suasana sidang KNIP pleno diwaktu malam di Siti Inggil Jogjakarta, waktu membitjarakan perdjandjian K.M.B.
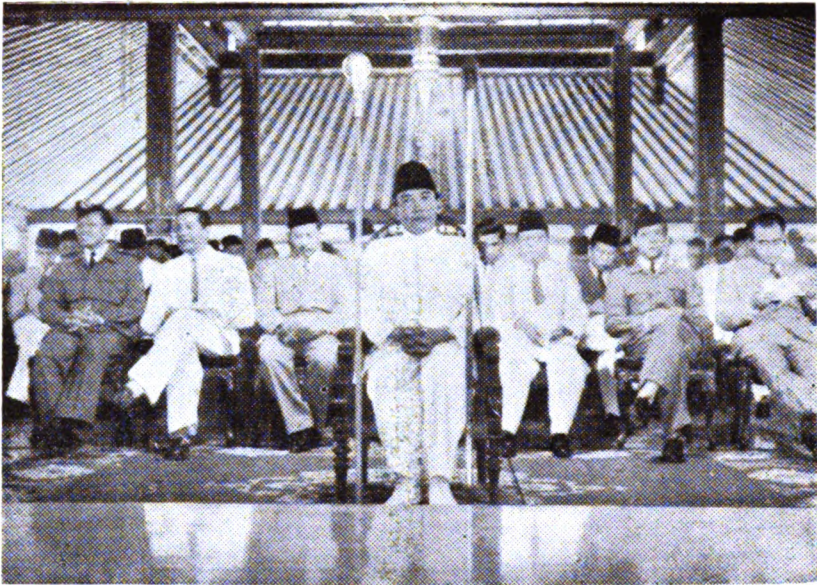
Ir. Soekarno dilantik mendjadi Presiden Republik Indonesia Serikat di Siti Inggil Jogjakarta.
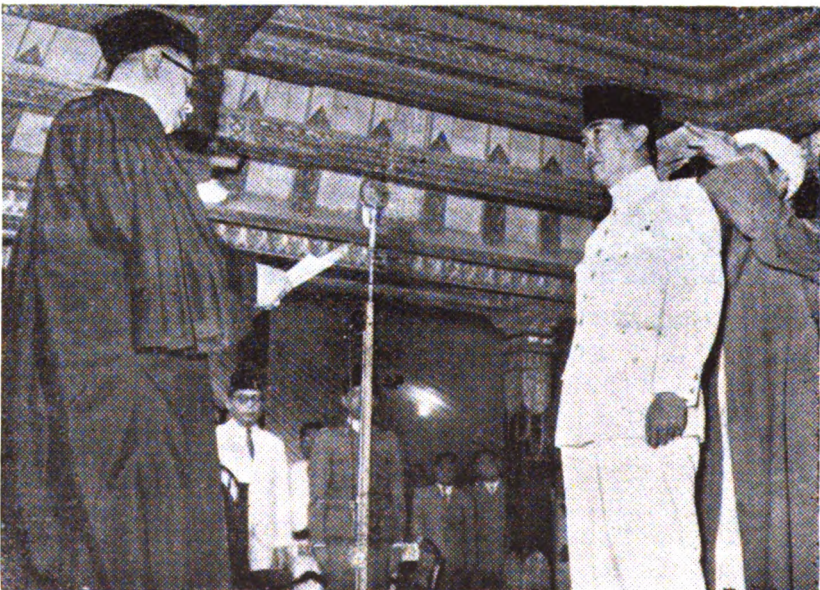
Ketua Mahkamah Agung, almarhum Mr. Dr. Kusumah Atmadja memimpin sumpah Ir. Soekarno untuk mendjabat Presiden R.I.S.

Sebelum meninggalkan Jogjakarta setjara resmi Presiden meminta diri kepada B. P. KNIP.

Acting Presiden R. I Mr. Assaat dengan resmi mengutjapkan pidato selamat djalan kepada Presiden Soekarno.

Bung Karno dan Pak Radjiman Wedyodiningrat waktu pemindahan anggauta-anggauta B.P. KNIP ke Djakarta untuk duduk di D.P.R. sementara di Djakarta.

Anggauta-anggauta Kabinet R.I. di Jogjakarta bergambar dengan Acting Presiden, sesudah pembentukan R.I.S. dan Kabinetnja di Djakarta.

BAB III :

PERKEMBANGAN ALAT KEAMANAN NEGARA

1. MEREBUT SENDJATA DJEPANG

17 AGUSTUS 1945 ..... meletus Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Rakjat dengan semangat jang menggelora serentak bergerak merebut kekuasaan dari tangan Djepang. Dengan bersendjatakan golok dan bambu runtjing serta semangat kebangsaan jang menjala-njala roda revolusi digerakkan. Dibawah pandji-pandji Sang Merah Putih seluruh rakjat Indonesia bergerak memberikan kenjataan kepada tjita-tjita nasional, membersihkan sisa-sisa kolonial dan memberi isi kepada apa jang telah diproklamasikan.

Pada tanggal 20 Agustus 1945 bertemulah berbagai-bagai organisasi kesatuan bersendjata (jang sebelumnja berdjuang sendiri-sendiri) dalam Badan Keamanan Rakjat. Tugas B.K.R. jang terpenting adalah menjelenggarakan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Kekatjauan-kekatjauan jang ditimbulkan dengan menjerahnja Djepang kepada Sekutu, dapat dipadamkan oleh B. K. R. Pekerdjaan B.K.R. tidak sampai demikian sadja. Diberbagai tempat perebutan kekuasaan dari tangan Djepang terpaksa harus dilakukan dengan kekerasan sendjata.

Dalam hal ini B.K.R. bersama-sama rakjat turut aktif bergerak ambil bagian.

Demikian gambaran pada waktu permulaan revolusi.

Di Jogja perebutan kekuasaanpun terpaksa dilakukan. Pertama-tama pimpinan kantor-kantor harus berada ditangan bangsa Indonesia. Demikian pula mengenai diri Tjokan. Dia harus pergi dari gedungnja kemudian ditempati oleh K. N. I.

Selandjutnja perundingan-perundingan dengan tentara Djepang dilakukan. Pokok pembitjaraan adalah perlutjutan sendjata militer Djepang.

Tetapi berhubung dengan sulitnja perundingan tentang perlutjutan sendjata dari tentara Djepang jang dilakukan oleh K.N.I. dengan wakil tentara Djepang, maka B.K.R. mengambil keputusan untuk melakukan perlutjutan itu djika perlu dengan kekerasan.

Demikianlah pada malam tanggal 6/7 bulan 10 - 1945 djam 23.00 terdengarlah dikampung seruan „bersiap". Dengan sekedjap mata sadja telah berkumpul beratus-ratus pemuda dikampung dan terus berbaris menudju ke Kota Baru, tempat pusat tentara Djepang. Mereka bersama-sama dengan barisan B.K.R., B.P.U., Polisi dan lain-lain mengadakan pengepungan setjara teratur.

Pada djam 4 terdengar letusan sendjata, ultimatum kita kandas, dan perlutjutan sendjata terpaksa dilakukan dengan kekerasan.

Barisan rakjat mulai bergerak menurut perintah. Sedjak waktu itu letusan sendjata dari kedua belah pihak terdengar terus menerus. Mitraljur Djepang diarahkan kepada barisan rakjat, tapi barisan rakjat tidak gentar malahan terus mendesak dan memperkuat pengepungan. Beberapa usaha telah dilakukan untuk melemahkan semangat pihak Djepang.

Tembakan-tembakan dari pihak Djepang makin lama makin berkurang.

Achirnja pada djam 10.30 esok harinja (tanggal 7/10-1945) ditengah-tengah barisan Djepang tampaklah bendera „putih" berkibar. Tentara Djepang menjerah.

Seketika itu djuga beratus-ratus tentara Djepang ditawan. Djuga dilain tangsi beberapa ratus serdadu Djepang menjerah.

Urusan tentang tawanan Djepang jang menjerah itu kemudian diserahkan kepada B. K. R.

Bantuan penduduk dan Perwari

Dengan keinsjafan sendiri, penduduk kampung jang berumah di pinggir djalan pada pagi hari menjediakan minuman-minuman jang disediakan kepada mereka jang pulang mengaso dari perdjuangan. Kemudian disusul pula bantuan dari Perwari seluruh kota jang menjediakan makan dan minum untuk lasjkar kota jang berdjuang mengadakan pengepungan.

Selama ada pertempuran, sebagian penduduk kampung mengadakan pendjagaan kuat dikampungnja masing-masing. Djalan-djalan besar penuh dengan penghalang (perintang). Begitu pula mereka bersedia tenaga untuk mendjadi tentara tjadangan. Segenap rakjat sanggup mendjadi Peradjurit.

Gembira dan berkabung

Gembira, karena tentara Djepang jang serba lengkap perlengkapannja, tidak tahan lama menghadapi serangan barisan rakjat. Berkabung, karena akibat pertempuran itu kita harus mengorbankan beberapa puluh orang diantara kawan kita. Korban dipihak kita jalah 50 orang luka dan 18 orang gugur.

Berhubung dengan itu Rakjat Jogjakarta mulai pagi hari mengibarkan bendera setengah tiang sebagai peringatan turut berduka tjita.

Pemakaman para Pahlawan kita

Pemakaman djenazah para Pahlawan korban pertempuran tersebut dilakukan pada sore harinja djam 16.00 di Taman Bahagia di Semaki.

Beribu-ribu penduduk dari segala lapisan dan golongan jang merupakan barisan-barisan jang teratur berkumpul dimuka Gedung Nasional untuk memberikan penghormatan jang penghabisan pada 18 pahlawan kita.

Datang djuga mengundjungi upatjara penghormatan tersebut para utusan pemerintahan daerah, pengurus K.N.I. lengkap dengan tjabang-tjabang dan anak-anak tjabang serta para terkemuka.

Dimuka Gedung Nasional telah siap lengkap barisan-barisan Polisi Istimewa, Polisi, B.K.R., B.P.U., para pemuda pemudi dari segenap sekolah menengah Jogjakarta dan barisan-barisan kampung. Tampak djuga djururawat-djururawat dari Rumah Sakit Jogjakarta jang telah besar djasanja dalam memberikan pertolongan kepada para korban.

Demikianlah, sesudah diadakan upatjara seperlunja 18 djenazah tersebut kemudian dimakamkan didesa Semaki.

Setelah penduduk Jogjakarta mengalami pertempuran di Kota Baru, mereka terus mempergiat pendjagaan ditempatnja masing-masing.

Demikian pula setelah Maklumat Pemerintah No. 2/X tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakjat diumumkan, maka berdujun-dujunlah pemuda-pemuda kita menudju ketempat pendaftaran, jang untuk kota Jogjakarta dilakukan oleh B.K.R. dan bertempat di B.P.K.K.P. bagian Panitra, sedangkan untuk luar kota di Kabupaten-Kabupaten dan Kapanewon-Kapanewon.

Dan untuk menudju ke arah kesempurnaan organisasi, maka oleh B.K.R. pada tanggal 12 - 10 - 1945 selandjutnja dikeluarkan pengumuman tentang pendaftaran sendjata api dan sendjata tadjam (bajonet dan pedang tentara). Pendaftaran ini melulu untuk mengetahui banjaknja sendjata.

Demikianlah, berhubung dengan gentingnja suasana dan memuntjaknja semangat perdjuangan bangsa Indonesia untuk menuntut tetap tegaknja Negara Republik Indonesia, maka oleh Pemerintah Daerah pada tanggal 12-10-1945 dikeluarkan Maklumat No. 2 jang isinja sebagai berikut :

MAKLUMAT No. 2
KASULTANAN JOGJAKARTA DAN PAKU ALAMAN DAERAH ISTIMEWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTERAMAN DAN KEAMANAN UMUM

1. Berhubung dengan gentingnja suasana dan memuntjaknja semangat perdjuangan bangsa Indonesia untuk menuntut tetap tegaknja Negara Republik Indonesia, maka Kami berdua Seri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Seri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Paku Alam VIII, sebagai Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, memerintahkan kepada segenap penduduk dari segala bangsa, golongan dan lapisan, supaja turut mendjaga ketenteraman dan keamanan umum.
2. Kami berdua tidak mendjamin keselamatan orang-orang :
   a. jang baikpun dengan langsung atau tidak langsung, maupun dengan sembunji atau terang-terangan, mengadakan atau mempunjai hubungan dengan pihak Nica.
   b. jang memudja, mendo'akan, berbuat atau bekerdja, dengan tjara bagaimanapun djuga, untuk kepentingan Nica.
3. Selaras dengan maklumat Pemerintah Republik Indonesia tanggal 2 - 10 - 1945 jang berlaku dalam daerah Kami berdua, hanja matjam uang jang hingga sekarang dianggap sah : uang Nica tidak berlaku.
4. Segenap penduduk supaja memberi bantuan sepenuhnja pada usaha Tentara Keamanan Rakjat, Polisi, Pangreh Pradja dan Barisan Pendjagaan Umum untuk menegakkan ketenteraman serta keamanan umum dan untuk memberantas hal-hal jang dapat mengganggu atau mengatjaukannja.
5. Maklumat ini berlaku semendjak diumumkan.

Jogjakarta, 6 Dulkaidah Ehe 1876
atau 12 - 10 - 1945
HAMENGKU BUWONO IX.
PAKU ALAM VIII.

Tidak lama kemudian disusul pula dengan maklumat tentang Pembentukan Lasjkar Rakjat sebagai Pembantu Tentara Keamanan Rakjat, jang bunji selengkapnja adalah sebagai berikut :

MAKLUMAT No. 5.
NEGERI KASULTANAN JOGJAKARTA DAN PRADJA PAKU ALAMAN DAERAH ISTIMEWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN LASJKAR RAKJAT SEBAGAI PEMBANTU TENTARA KEAMANAN RAKJAT.

1. Mengingat tingkatan bangsa Indonesia untuk menuntut tetap tegaknja Negara Republik Indonesia dari dunia internasional, sebagai usaha untuk mentjapai perdamaian dunia, maka Kami berdua, Seri

Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Arja Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Komite Nasional Daerah Jogjakarta, memerintahkan kepada segenap penduduk bangsa Indonesia dalam daerah Kami berdua supaja dengan segera ditiap kampung/desa membentuk Lasjkar Rakjat sebagai Pembantu Tentara Keamanan Rakjat.

2. Maksud pembentukan Lasjkar Rakjat ini :
   a. membantu mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada umumnja, Daerah Istimewa Jogjakarta pada chususnja.
   b. mempertahankan daerah kampung/desa terhadap musuh.
   c. mendjaga keamanan daerah kampung/desa.
   d. membantu kepada segala kepentingan rakjat jang membutuhkan tenaga banjak jang teratur.
3. a. Jang harus masuk mendjadi anggauta Lasjkar Rakjat ialah semua penduduk bangsa Indonesia laki-laki jang masih kuat badannja dan belum mendjadi anggauta Tentara Keamanan Rakjat.
   b. Dalam pembentukan Lasjkar Rakjat ini penduduk laki-laki jang berumur kurang dari 15 tahun dipisahkan dari penduduk jang berumur 15 tahun keatas.
   c. Segenap Kepala Barisan ditiap Kapanewon, Kemantren Pangreh Pradja merupakan Dewan Pimpinan Lasjkar Rakjat untuk merundingkan dan mengatur segala kepentingan bersama. Panewu atau Mantri Pangreh Pradja, Wakil K.N.I. dan wakil T.K.R. turut duduk dalam Dewan Pimpinan itu. Pemimpin Barisan dipilih oleh dan dari antara anggauta-anggauta Lasjkar Rakjat. Pemilihan Pemimpin Barisan harus merdeka; Pangreh Pradja, K.N.I., Lurah Desa dan pegawai-pegawai lainnja tidak boleh turut tjampur dan mempengaruhi pemilihan itu.
4. Beaja Lasjkar Rakjat ditjukupkan dari Kas Rukun Kampung/Rukun Desa. Untuk keperluan ini Rukun Kampung/Rukun Desa diperbolehkan mentjari djalan istimewa untuk mengumpulkan uang dan bahan-bahan, akan tetapi senantiasa dengan mengingat kekuatan ekonomi rakjat.
5. a. Lasjkar Rakjat hendaklah bersendjata dengan segala matjam sendjata jang dapat diadakan sendiri (termasuk djuga sendjata api).
   b. Semua latihan militer diserahkan kepada anggauta T.K.R. dimasing-masing daerah.
   c. Djikalau ada tanda mobilisasi semua anggauta Lasjkar Rakjat harus tunduk kepada perintah pimpinan T.K.R. didaerahnja masing-masing.
6. a. Dalam mendjalankan pimpinan maka Kepala Barisan harus senantiasa berhubungan dengan Kepala Rukun Kampung/Rukun Desa dan Pangreh Pradja.
   b. Semua pegawai Republik Indonesia di Daerah Istimewa Jogjakarta harus aktif dalam Lasjkar Rakjat di Kampung/Desanja masing-masing.
   c. Usaha-usaha Lasjkar Rakjat supaja selalu diatur hingga tidak mengganggu mata pentjaharian masing-masing anggauta.
7. Kepala Daerah Pangreh Pradja dan Ketua Rukun Kampung/Rukun Desa mendjadi Pelindung dan turut bertanggung djawab atas segala perihal jang berhubungan dengan Lasjkar Rakjat.

8. Instruksi-instruksi lain-lainnja tentang pembentukan Lasjkar Rakjat ini akan segera menjusul.
9. Maklumat ini berlaku semendjak diumumkan.

Jogjakarta, 20 Dulkaidah Ehe 1876
atau 26 - 10 - 1945
HAMENGKU BUWONO IX
PAKU ALAM VIII
MOH. SALEH

Maklumat tersebut kemudian dirubah dengan Maklumat No. 8.

MAKLUMAT No. 8.

NEGERI KASULTANAN JOGJAKARTA DAN PRADJA PAKU ALAMAN DAERAH ISTIMEWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. TENTANG PERUBAHAN MAKLUMAT No. 5 TENTANG „PEMBENTUKAN LASJKAR RAKJAT".

1. Untuk menjempurnakan dan mendjalankan peraturan tentang Lasjkar Rakjat, maka Kami berdua, Seri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Seri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Arja Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat Daerah Istimewa Jogjakarta, mengadakan perubahan Maklumat No. 5 tentang „Pembentukan Lasjkar Rakjat" seperti dibawah ini.
2. Pasal 3 Maklumat No. 5 dirubah seluruhnja dan selandjutnja berbunji seperti berikut:
   a. Jang harus masuk mendjadi anggauta Lasjkar Rakjat ialah semua penduduk laki-laki bangsa Indonesia jang masih kuat badannja, ketjuali:
      1. Peradjurit Tentara Keamanan Rakjat, Polisi dan Hizbullah.
      2. Kepala daerah Pamong Pradja dengan paling banjak 3 orang pegawainja jang ditundjuk olehnja.
      3. Lurah dan Tjarik desa.
      4. Ketua dan Panitra Rukun Kampung/Rukun Desa.
      5. Pegawai djawatan dan perusahaan penting jang telah ditundjuk dengan surat keterangan oleh Kepala Djawatan atau perusahaan untuk mendjaga dan mendjalankan pekerdjaan dikantor, paberik dsb. pada waktu ada perintah „siap".
      6. Badan-badan perdjuangan dan orang-orang jang berhubung dengan kewadjibannja turut diketjualikan menurut keputusan Badan Pimpinan Pusat Lasjkar Rakjat.

   b. Dalam pembentukan Lasjkar Rakjat ini penduduk laki-laki jang berumur kurang dari 15 tahun dimasukkan dalam kepanduan.
   c. Lasjkar Rakjat ditiap-tiap Kapanewon/Kemantren Pamong Pradja mengadakan Dewan Pimpinan Lasjkar Rakjat untuk perundingan, terdiri dari:
      1. Kepala Resimen.
      2. Kepala - kepala Bataljon.
      3. Kepala-kepala Kumpeni.
      4. Wakil Tentara Keamanan Rakjat.
      5. Panewu/Mantri Pamong Pradja.
      6. Wakil Komite Nasional Indonesia.
      7. Wakil Palang Merah Indonesia (dimana ada).

8. Wakil Perwani.
9. Ketua R.K./R.D. (dulu diluar kota dinamakan Son Azatyo dan didalam Kota Ku Azatyo)

d. Ditiap-tiap Kabupaten diluar Kota Jogjakarta dibentuk Dewan Pimpinan Lasjkar Rakjat Kabupaten jang terdiri dari :
2 orang wakil Dewan Pimpinan Kapanewon.
2 orang wakil Tentara Keamanan Rakjat.
1 orang wakil Pamong Pradja.
1 orang wakil K. N. I.
1 orang wakil Palang Merah Indonesia.
1 orang wakil Perwani.

Djumlah 8 orang

e. Di kota Jogjakarta disusun Badan Pimpinan Pusat oleh dan dari badan-badan perdjuangan untuk merundingkan dan mengatur segala kepentingan bersama dan memimpin Lasjkar Rakjat diseluruh Daerah Istimewa Jogjakarta pula mendjadi badan pimpinan Lasjkar Rakjat.

f. Kepala Barisan dipilih oleh dan dari antara anggauta-anggauta Lasjkar Rakjat. Pemilihan Kepala Barisan harus merdeka: Pamong Pradja, K.N.I., Lurah Desa dan pegawai-pegawai lainnja tidak boleh turut tjampur dan mempengaruhi pemilihan itu.

3. Pasal 6 ajat c tetap, ajat a, b dirubah dan ditambah satu ajat d seperti berikut :
   a. Dalam mendjalankan pimpinan maka Kepala Barisan harus senantiasa berhubungan dengan Kepala Rukun Kampung/Rukun Desa, Pamong Pradja dan K.N.I.
   b. Semua pegawai Republik Indonesia di Daerah Istimewa Jogjakarta harus bekerdja aktif dalam Lasjkar Rakjat dikampung atau desanja masing-masing ketjuali jang tersebut dalam ajat 2 a diatas.
   d. Anggauta dan Kepala Barisan Lasjkar Rakjat diperbolehkan memakai tanda (distinctieven) jang rupanja akan ditetapkan oleh Badan Pimpinan Pusat.

4. Pasal 7 dirubah seperti berikut :
   Kepala daerah Pamong Pradja, Ketua Rukun Kampung/Rukun Desa dan Wakil K.N.I. mendjadi pelindung dan turut bertanggung djawab atas segala perihal jang berhubungan dengan Lasjkar Rakjat.

5. a. Pasal-pasal lainnja dalam Maklumat No. 5 jang tidak dirubah dalam Maklumat ini masih tetap berlaku terus.
   b. Perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan instruksi akan segera menjusul.

6. Maklumat ini berlaku semendjak diumumkan.

Jogjakarta, 2 Sura Djimawal 1877
atau 7 - 12 - 1945
HAMENGKU BUWONO IX
PAKU ALAM VIII
MOH. SALEH.

Demikian pula pihak Markas Besar Umum T.K.R. mengandjurkan pula pembentukan Lasjkar Rakjat didaerah-daerah diseluruh Djawa dan Madura. Adapun maklumat Markas Besar Umum Tentara Keamanan Rakjat selengkapnja sbb.:

Merdeka!

Masa jang pada waktu ini sangat genting, memaksa kami untuk mengadakan tindakan jang tjepat serta tepat, sesuai dengan kehendak zaman.

Berhubung dengan itu, maka disamping Tentara Keamanan Rakjat jang pada waktu ini sedang dibentuk diseluruh Djawa dan Madura dilaksanakan pembentukan Lasjkar Rakjat, sebagai penolong dan pembantu Tentara Keamanan Rakjat.

Adapun sebab-sebabnja jalah demikian :

a. Tentara Keamanan Rakjat pada waktu kini belum dapat dikatakan sempurna, terutama dalam hal persendjataan.

b. Djika kita harus melawan musuh jang serba modern dalam hal persendjataannja Lasjkar Rakjat pun harus ikut bertempur.

c. Djika kekuatan dari T.K.R. jang sudah terbatas itu masih djuga diambil untuk keperluan lainnja (mitsalnja untuk : pengangkutan, pendjagaan gudang, pendjagaan kantor-kantor jang penting dan sebagainja, nistjajalah kekuatan T. K. R. sangat berkurang karenanja.

d. Djika T.K.R. dari satu daerah harus pindah kelain daerah guna memenuhi suatu kewadjiban (pertahanan atau pertempuran), keamanan rakjat didaerah jang ditinggalkan tidak dapat didjamin.
Njata benar, bahwa pembentukan Lasjkar Rakjat itu harus segera dilaksanakan, suatu Lasjkar jang harus menolong dan menguatkan Tentara Keamanan Rakjat.

Adapun pembentukan Lasjkar Rakjat ini diserahkan kepada Pemerintahan Sipil dengan petundjuk-petundjuk jang tertentu.

Jogjakarta, 30-10-1945
A.n. Kepala Markas Tertinggi T.K.R.
Kepala Markas Besar Umum T.K.R.
URIP SUMOHARDJO.

Ketjuali Maklumat ini, oleh Markas Besar Umum T. K. R. pada tanggal 30-10-1945 pula dikeluarkan pengumuman tentang pengangkatan Anggauta Agung Markas Tertinggi bagian Markas Besar Umum Tentara Keamanan Rakjat jaitu :

1. S.P. Susuhunan Surakarta, 2. S.P. Sultan Jogjakarta, 3. S.P. Mangkunegoro dan 4 S. P. Paku Alam.

Selain daripada itu diangkat pula mendjadi Opsir Penghubung jaitu : G.P.H. Surjohamidjojo dan B.P.H. Bintoro masing-masing untuk Divisi Istimewa di Solo dan Jogjakarta.

Langkah-langkah T. K. R. lambat laun menudju kearah kesempurnaan. Menteri Luar Negeri Mr. Subardjo mengawatkan kepada Markas Besar Tertinggi T.K.R. bahwa Djenderal Christison dari tentara Sekutu telah mengakui T. K. R. dan tidak akan melutjuti, asal beruniform.

Tapi jang mendjadi kesulitan pada waktu itu jalah tidak tjukupnja persediaan bahan pakaian sehingga tidak mungkin, apabila semua T.K.R. seluruhnja harus beruniform jang sama. Maka berhubung dengan itu kemudian lalu diambil tindakan-tindakan seperlunja oleh M.B.U. T.K.R. seperti tertjantum dalam Maklumat dibawah ini.

Maklumat Markas Tertinggi
TENTARA KEAMANAN RAKJAT
Kepada segenap Kepala2 T. K. R.
Djawa dan Madura.

Tentang uniform dan Tanda-tanda pangkat dalam
Tentara Keamanan Rakjat

Seperti telah kami umumkan beberapa waktu jang lalu, maka T.K.R. sebelum mempunjai uniform sendiri, diharuskan memakai tanda ban putih jang bertulisan T. K. R. berwarna merah jang harus dipakai pada lengan sebelah kiri.

Kami mengetahui pula bahwa bahan pakaian pada waktu sekarang ini kurang tjukup adanja, sehingga tidak mungkin apabila kami perintahkan supaja T.K.R. seluruhnja harus beruniform jang sama.

Mengingat kepentingan bahwa T.K.R. harus selekas mungkin beruniform, dan mengingat pula akan kekurangan bahan pakaian seperti tersebut tadi, maka dengan ini kami memerintahkan, supaja kepala-kepala T. K. R. diseluruh Djawa dan Madura berusaha sendiri-sendiri untuk memperlengkapi peradjurit-peradjuritnja dengan uniform.

Adapun warna dari uniform tadi untuk sementara waktu tidak perlu sama bagi seluruh T. K. R. di Djawa dan Madura, tetapi hendaknja T. K. R. dalam satu keresidenan memakai uniform jang sama baikpun dalam bentuk maupun dalam warnanja.

Disamping warna dari uniform jang tidak diharuskan bersamaan maka kami memerintahkan supaja tanda pangkat kemiliteran disamakan dalam barisan T. K. R. diseluruh Djawa dan Madura.

Dibawah ini kami sebutkan tanda-tanda jang harus dipakai sebagai tanda pangkat dalam T. K. R.

Bentuk : Parallellogram (empat segi miring) bersudut 60 grad, pandjang 35 milimeter dan tinggi 25 milimeter.

Setrip: Warna kuning mas, lebar 3 milimeter.

Bintang : Setral (rudji) 2 milimeter.
Berpadju lima.

Warna dasar : buat Djenderal, Letnan Djenderal dan Djenderal Major dasarnja kuning mas dan warna bintangnja perak.

Djenderal : Bintang tiga.
Letnan Djenderal : Bintang dua.
Djenderal Major : Bintang satu.
Buat Kolonel sampai peradjurit warna dasarnja biru tua.
Kolonel : Setrip 4, bintang 3.
Letnan Kolonel : Setrip 4, bintang 2.
Major : Setrip 4, bintang 1.
Kapten : Setrip 3, bintang 3.
Letnan Kl. I : Setrip 3, bintang 2.
Letnan Kl. II : Setrip 3, bintang 1.
Pembantu Letnan : Setrip 3.
Sersan Major : Setrip 2.
Sersan Klas I : Setrip 1, ditengah bintang 2.
Sersan Klas II : Setrip 1, ditengah bintang 1.
Kopral :Setrip 1, ditengah.
Peradjurit : klas I : Bintang kuning 2.
Peradjurit klas II : Bintang Kuning 1.

Demikianlah. Dan kami mengharap dengan hormat dan sangat supaja para kepala barisan T. K. R. diseluruh Djawa dan Madura memperhatikan serta mendjalankan dengan saksama segala apa jang kami perintahan diatas.

Jogjakarta, 5-11-1945
A.n. Kepala Markas Tertinggi T. K. R.
Kepala Markas Besar Umum

R. URIP SUMOHARDJO.

Demikianlah, Tentara Keamanan Rakjat tambah hari tambah njata, tambah hari tambah sempurna dan jang terpenting tambah hari tambah kuat. Tentara Keamanan Rakjat merupakan tentara jang berdisiplin, tentara jang memberi keamanan dan ketenteraman kepada rakjat dan tentara jang selalu siap sedia mempertahankan kedaulatan rakjat dan kedaulatan Tanah Airnja. Dan dengan adanja pertempuran di kota-kota lain, antaranja di Semarang, Djakarta, Bandung, Surabaja dan achirnja di Magelang, T.K.R. di Jogjakarta bersama-sama dengan pemuda-pemudanja tidak ajal lagi turut menjumbangkan darma baktinja mengusir pihak-pihak jang hendak mendjadjah kembali. Disamping itu, maka pihak kita beberapa kali mengadakan perundingan untuk mentjegah segala akibat jang mungkin menimbulkan pertumpahan darah dengan pihak tentara pendudukan Inggeris tapi semuanja gagal. Pertempuran di Magelang terdjadi. Rakjat berontak tidak sabar lagi. Beribu-ribu kaum pemberontak dari daerah Kedu dan Jogja dengan sendjatanja jang lengkap menjerbu ke Magelang.

Ketika Bung Karno mendapat laporan bahwa di Magelang telah terdjadi pertempuran antara rakjat dan tentara pendudukan Sekutu disana, maka pada tanggal 1 - 11 - 1945 pagi-pagi hari Bung Karno dengan diantar oleh Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin dan Sekretaris Negara terbang ke Semarang. Setelah di Semarang beliau menemui pemimpin tertinggi tentara pendudukan Sekutu untuk Djawa Tengah dan mendapat kesan-kesan jang memuaskan. Maka beliau serta pengiring - pengiring dengan diantar oleh Gubernur Djawa Tengah, Komisaris Tinggi Daerah Istimewa R.P. Suroso serta pemimpin-pemimpin lainnja menudju Jogjakarta.

Djam 4 sore dengan bertempat di Hotel Merdeka Jogjakarta Bung Karno mengadakan permusjawaratan dengan Staf Umum T.K.R., M.B.T.K.R. pemimpin-pemimpin dari Magelang, jang dihadliri oleh kedua S.P. Kepala Daerah Jogjakarta.

Hasil perundingan jalah semua telah mufakat untuk menghentikan pertempuran di Magelang itu. Dengan tidak mengenal lelah pada malam itu djuga Presiden Soekarno dengan pengiring meninggalkan Jogja menudju ke Semarang untuk mengadakan perundingan penghentian pertempuran.

Demikianlah antara lain gambaran kekuatan T.K.R., jang walaupun persendjataannja serba sederhana, tetapi karena didorong oleh semangat „Sekali Merdeka Tetap Merdeka" serta mendapat bantuan dari rakjat umumnja, maka mereka tidak gentar sedikitpun menghadapi serdadu-serdadu Gurkha, Inggeris dan Nica jang bersendjatakan lengkap lagi modern.

Dan untuk mentjegah djangan sampai pertempuran mendjalar kemana-mana maka diberitakan bahwa K.N.I. Daerah Jogjakarta dan Surakarta telah menerima kawat dari Presiden Soekarno, jang menjatakan bahwa tentara pendudukan Serikat jang terdiri dari tentara Inggeris dan Gurkha tidak akan menduduki daerah Surakarta dan Jogjakarta.

Berhubung dengan itu maka pada tanggal 4 - 11 - 1945 K.N.I. daerah Jogjakarta atas nama S.P. Sultan mengirimkan kawat kepada P.J.M. Presiden Soekarno jang berbunji sebagai-berikut :

Atas nama S.P. Sultan Jogjakarta, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta Republik Indonesia mengutjapkan terima kasih atas kebidjaksanaan P.J.M. dan kesanggupan Dj. Bethel jang tidak akan mengirim tentara pendudukan buat daerah Jogjakarta. Selandjutnja S.P. Sultan mengharapkan surat pernjataan dari djenderal itu sebagai Kepala tentara pendaratan Sekutu di Djawa Tengah.

K.N.I. Jogjakarta
Moh. Saleh.

Penerbang-penerbang Indonesia berkumpul di Jogjakarta.

Pada tanggal 7/11 telah tiba di Jogjakarta penerbang-penerbang pemuda kita dari Malang Saudara-saudara Hendro Suwarno, Sulistijo dan Mantiri, dari Surabaja Sudara-saudara Moh. Rivai, Sudiro, Sutojo, Sutojomihardjo, Riduan dan Pardjuni. Mereka perlu mengadakan pertemuan dengan penerbang-penerbang kita di Jogjakarta: Saudara Adisutjipto dan Tarsono Rudjito untuk membitjarakan soal penerbangan ditanah Djawa jang akan diusahakan oleh pemuda-pemuda kita.

Diputuskan, bahwa akan diadakan peladjaran terbang di Jogjakarta dan Malang dengan pimpinan Saudara Adisutjipto.

Sementara itu pada tanggal 16 - 11 - 1945 Markas Tertinggi T.K.R. Bagian Laut mengeluarkan pengumuman, jang ditanda tangani oleh M. Pardi, bahwa mulai tanggal 15 - 11 - 1945 Badan Keamanan Rakjat bagian Laut disahkan mendjadi Tentara Keamanan Rakjat bagian Laut.

Pak Dirman diangkat djadi Panglima Besar

Dalam pertemuannja Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan anggauta-anggauta Kabinet dengan Markas Tertinggi T.K.R. dan komandan-komandan divisi dan resimen seluruh Djawa dan Madura pada tanggal 18 Desember 1945 telah diangkat dengan resmi Pak Dirman sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakjat.

Kementerian Keamanan pindah Jogjakarta

Dengan pindahnja Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ke Jogjakarta pada tanggal 4 - 1 - 1946 maka Kementerian Keamanan turut pindah ke Jogjakarta.

Dari sini mulailah setapak demi setapak dengan rentjana jang tertentu disusun Angkatan Perang jang kokoh dan kuat.

Beberapa perubahan dalam Kementerian Keamanan Tentara Keselamatan Rakjat Lahir

Pada tanggal 7 Djanuari 1946 digedung kediaman Presiden, telah dilangsungkan rapat Kabinet. Ketjuali itu pun telah menghadap kepada Presiden Gubernur Djawa Timur Surjo, dan Gubernur Penasehat Sutardjo Kartohadikusumo.

Dalam pada itu Presiden telah memutuskan beberapa putusan penting:

1. Nama Tentara Keamanan Rakjat diganti mendjadi Tentara Keselamatan Rakjat, singkatnja T.K.R.
2. Nama Kementerian Keamanan diganti Kementerian Pertahanan.
3. Sebagai Wakil Menteri Pertahanan diangkat K.R.T. Sugijono Josodiningrat, pegawai tinggi Pemerintahan Kasultanan.

Selandjutnja Markas Tertinggi T.K.R. mengeluarkan pengumuman sebagai berikut:

Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakjat mengumumkan, bahwa mulai hari ini (Selasa tanggal 8 - 1 - 1946) nama Tentara Keamanan Rakjat diganti dengan nama Tentara Keselamatan Rakjat.

Jogjakarta, 8 - 1 - 1946.
Markas Tertinggi
Tentara Keselamatan Rakjat
SUDIRMAN.

Tentara Republik Indonesia

Pada tanggal 26 - 1 - 1946 Presiden dan Menteri Pertahanan telah mengeluarkan sebuah Maklumat jang maksudnja bahwa Tentara Keselamatan Rakjat diganti namanja mendjadi Tentara Republik Indonesia dan akan disusun atas dasar militer internasional dan akan diperbaiki susunannja atas dasar dan bentuk ketentaraan jang sempurna.

Untuk melaksanakan pekerdjaan itu, Pemerintah setelah Maklumat itu keluar, mengangkat sebuah panitia terdiri atas para ahli militer dan ahli-ahli lain jang berhubungan dengan ketentaraan.

Panitya Besar ini diserahi menjusun peraturan-peraturan perihal bentuk Kementerian Pertahanan, bentuk ketentaraan, kekuatan tentara, organisasi tentara, kedudukan lasjkar-lasjkar dan barisan-barisan bersendjata dari badan ketentaraan jang bukan badan pemerintah dan lain-lain.

Dalam waktu jang sangat pendek dan dalam suasana genting pada waktu itu, panitya jang diharap-harap rakjat akan hasil usaha pekerdjaannja, telah berhasil menjusun tentara kita dengan sebaik-baiknja. Pekerdjaan jang maha besar itu dapat diselesaikan dengan semestinja.

Demikianlah pada tanggal 25 - 5 di Istana Presiden diadakan upatjara resmi pelantikan pembesar-pembesar Tentara dan pembesar - pembesar pada Kementerian Pertahanan, untuk pertama kalinja dalam sedjarah Negara Republik Indonesia, dilakukan oleh Presiden Soekarno.

Dalam upatjara pelantikan itu Presiden Soekarno mengutjapkan amanatnja jang ditudjukan kepada seluruh pembesar Tentara. Dalam amanatnja antara lain dikatakan, bahwa kemerdekaan kita jang sepenuhnja hanjalah dapat ditjapai apabila kita seluruhnja mendjalankan kewadjiban kita, terutama Tentara mendjalankan kewadjibannja dengan sepenuh-penuhnja pula. Selandjutnja beliau berkata: „Kita harus menjerahkan diri kita kepada sedjarah. Djanganlah tuan-tuan merasa bahwa tuan-tuan jang membuat sedjarah, tapi Tuhanlah jang membuat sedjarah itu. Kita hanja mendjadi alat-alat sedjarah". Demikian Presiden jang kemudian melantik para pembesar Tentara.

Panglima Besar Soedirman kemudian atas nama seluruh Tentara menjambut amanat Presiden, dan beliau atas nama semua jang dilantik mengutjapkan sumpahnja dihadapan Presiden Soekarno sebagai berikut:

„Atas nama Allah Jang Maha Murah lagi Maha Asih. Demi Allah Kami Djenderal Soedirman atas nama segenap anggauta Markas Besar Umum Tentara dan para Kepala Djawatan dan Bagian Tentara jang termasuk Kementerian Pertahanan serta para Pimpinan Tentara dalam Divisi seluruhnja, bersumpah:

1. Sanggup mempertahankan Kedaulatan dan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, jang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah jang penghabisan.

2. Sanggup ta'at dan tunduk pada Pemerintah Negara Republik Indonesia jang mendjalankan kewadjibannja menurut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaannja sebulat-bulatnja.

Jogjakarta, 25 - 5 - 1946
Panglima Besar Tentara
SOEDIRMAN.

Adapun jang dilantik pada upatjara pelantikan tersebut, jalah 1 Djenderal, 1 Let. Djenderal, 7 Komandan Divisi dengan pangkat Djenderal Major, 7 Kepala Staf dengan pangkat Letnan Kolonel, 3 Komandan Brigade dengan pangkat Kolonel, 10 Djenderal Major pada Kementerian Pertahanan, 3 Kolonel pada Kementerian Pertahanan, 4 Letnan Kolonel pada Kementerian Pertahanan, 4 Kolonel pada Markas Besar Umum, 2 Letnan Kolonel pada M.B.U. dan 1 Major pada M. B. U.

Susunan Baru „Markas Besar Umum" Tentara dan Kementerian Pertahanan bagian Militer adalah sebagai berikut :

NAMA	DJABATAN	PANGKAT.
R. Soedirman	Panglima Besar	Djenderal.
	Markas Besar Umum (Generale Staf) :	
R. Oerip Soemohardjo	Kepala M.B.U.	Letnan Djenderal.
Dr. Soetjipto	Kp. Bg. Penjelidikan Militer	Kolonel.
T.B. Simatoepang	Kp. Bg. Organisasi	Kolonel.
R. Holan Iskandar	Kp. Bg. Siasat	Kolonel.
R. Soetirto	Kp. Bg. Perintah	Kolonel.
Soemardjono	Kp. Bg. Pengangkutan	Letnan Kolonel.
Soerjo	Kp. Bg. Sekretariat	Letnan Kolonel.
Machmoed	Kp. Bg. Tata Usaha	Major.
	Kementerian Pertahanan bagian militer	
Soedibjo	Direktur Djenderal	Djenderal Major.
Moehammad	Kp. Staf di Kementerian	Djenderal Major.
Soendjojo	Kp. Ur. Personalia	Kolonel.
Mr. Kasman Singodimedjo	Kp. Ur. Kehakiman dan Mahkamah Tinggi	Djenderal Major.
R. Soewardi	Kp. Bg. Pendidikan Ketentaraan	Djenderal Major.
Soeratman	Kp. Bg. Dienstplicht	Djenderal Major.
R.M.P.R. Surjosumarno	Kp. Bg. Artillerie	Letnan Kolonel.
R. D. Kartasasmita	Kp. Bg. Infanterie	Djenderal Major.
Ir. Soetomo Wongsotjitro	Kp. Bg. Topografie	Letnan Kolonel.
Ir. Hoedioro	Kp. Bg. Genie	Djenderal Major.
R. M. Soetomo	Kp. Bg. Perlengkapan.	Djenderal Major.
Soedibjo	Kp. Bg. Tata Usaha Bg. Perlengkapan	Letnan Kolonel.
Partodidjojo	Kp. Bg. Pengumpulan Bg. Perlengkapan	Letnan Kolonel.
Surjosularso	Kp. Persendjataan Bg. Perlengkapan	Kolonel.
Dr. Wirasmo	Kp. Bg. Kesehatan	Djenderal Major.
Santosa	Kp. Polisi Tentara	Djenderal Major.
Sunarjo	Wk. Kp. Polisi Tentara	Kolonel.

Kepala Divisi dan Kepala Staf

Divisi I.	A. H. Nasoetion	Djenderal Major
	Askari	Letnan Kolonel.
„ II.	Abd. Kadir	Djenderal Major.
	Bambang Soegeng	Letnan Kolonel.
„ III.	Soedarsono	Djenderal Major.
	Oemar Djoy	Letnan Kolonel.
„ IV.	Soediro	Djenderal Major.
	Fadjar	Letnan Kolonel.
„ V.	Djatikoesoemo	Djenderal Major.
	Wadijono	Letnan Kolonel.
„ VI.	Soengkono	Djenderal Major.
	Marhadi	Letnan Kolonel.
„ VII.	Imam Soedjadi	Djenderal Major.
	Iskandar Soeleman	Letnan Kolonel.
Soetarto	Komandan Brigade	Kolonel.
H. Samyoem	Komandan Brigade	Kolonel.
Gatot Soebroto	Komandan Brigade	Kolonel.

Ketjuali tersebut diatas oleh Pemerintah telah diangkat pula beberapa orang pemimpin sebagai Staf Pendidikan Politik Tentara dengan susunan sebagai berikut: Sebagai pemimpin Sukono Djojopratignjo dengan pangkat Letnan Djenderal. Pembantu-pembantu terdiri dari Wijono, Dr. Mustopo, Sumarsono, H. Farid Ma'ruf, Anwar Tjokroaminoto dan Kijai H. Mukti, masing-masing berpangkat Djenderal Major.

Berkenaan dengan reorganisasi tentara, maka pada tg. 10-6 telah dikeluarkan maklumat tentang perubahan nama Markas Besar Umum sebagai berikut:

1. Nama: Markas Tertinggi Tentara dan Markas Besar Umum dihapuskan.
2. Nama-nama baru adalah sebagai berikut:
   a. Markas Besar Tentara terdiri atas Panglima Besar serta Kepala Staf Umum dengan bagian-bagiannja.
   b. Staf Umum terdiri atas Kepala Staf Umum dan bagian-bagiannja.

Pemerintah dan badan-badan perdjuangan

Dalam rapat Buro Perdjuangan jang dikundjungi oleh segenap wakil-wakil P. P. Badan Perdjuangan seluruh Djawa dan sekitarnja bertempat di Sekolah Guru Menengah Puteri pada tanggal 10-6, ketjuali merundingkan soal rumah tangga djuga memetjahkan soal-soal organisasi dengan hasil sangat memuaskan.

Rentjana pekerdjaan Buro Perdjuangan sebagaimana jang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan, sefaham dengan badan-badan perdjuangan adalah sebagai berikut:

1. Usaha jang menudju kepada persatuan strategis, komando dan administrasi perdjuangan (Tentara, Lasjkar-lasjkar) sebelum badan ini bersatu padu merupakan satu tentara.
2. Kordinasi segala tenaga perdjuangan, sehingga dapat diperlihatkan satu sifat perdjuangan jang kokoh kuat dalam segala-galanja, kearah tudjuan mempertahankan kemerdekaan Negara.
3. Rentjana-rentjana jang lain untuk menegakkan Negara kita, baik di Djawa maupun di daerah-daerah Indonesia diluar Djawa dengan badan perdjuangan.
4. Menjokong dan turut membeajai badan-badan perdjuangan jang sudah digabungkan.

Selandjutnja ditundjuk oleh Kementerian Pertahanan sebagai Kepala Buro Perdjuangan Djoko Sujono.

Selesai rapat Buro Perdjuangan, maka dilangsungkan rapat Putjuk Pimpinan Badan-badan Perdjuangan ditempat tersebut diatas jang dipimpin oleh Djoko Sujono dan dapat mengambil putusan sebagai berikut. Mendesak kepada Pemerintah, supaja di Dewan Pertahanan, baik di Pusat maupun di Daerah, turut duduk seorang wakil dari Badan-badan Perdjuangan, Wakil dari Badan Perdjuangan untuk Dewan Pertahanan Pusat akan dikirim dengan melalui Buro Perdjuangan.

Pengangkutan Djepang Selesai

Pada tanggal 18-6-1946 Tentara kita telah menjelesaikan tugasnja dengan mengangkut rombongan serdadu Djepang jang penghabisan dari pelabuhan Probolinggo. Dengan demikian selesailah salah satu pekerdjaan penting jang diserahkan kepada Tentara kita menurut perdjandjian jang dibuat di Jogjakarta pada tanggal 1—2 April 1946 antara Putjuk Pimpinan Tentara Indonesia dan Putjuk Pimpinan Tentara Serikat di Indonesia.

Sementara itu telah diangkut 35.545 serdadu Djepang, jalah 7.711 dari Djawa Tengah termasuk djuga daerah Tjirebon dan 27.834 dari Djawa Timur.

Wakil Staf Tentara Djepang pada tanggal 20-6-1946 telah menghadap dikantor penghubung Tentara Indonesia untuk menjampaikan dengan resmi terima kasihnja kepada Tentara dan Angkatan Laut kita. Dalam pada itu pengangkutan kaum interniran bangsa Serikat (Apwi) oleh Tentara dengan bekerdja bersama-sama dengan Angkatan Udara Inggeris berdjalan terus dengan pesatnja.

*

Lasjkar dan Barisan

Berhubung dengan keadaan jang genting dan telah diumumkannja Undang-undang Keadaan Bahaja, maka pada tanggal 26 Djuni 1946 telah dibentuk suatu Dewan Militer, jang diketuai oleh Presiden Soekarno, sebagai Wakil Ketua I Wakil Presiden dan Wakil Ketua II Menteri Pertahanan. Adapun anggauta-anggautanja jalah Panglima Besar, P.U. A.L.R.I., Kepala Staf T.R.I., Kepala Staf A.L.R.I. dan Direktur Djenderal Kementerian Pertahanan.

Selandjutnja diputuskan pula bahwa Panglima Besar Sudirman diangkat mendjadi Pemimpin Tentara Darat, Laut dan Udara.

Buro Urusan Sumatera

Dengan ketetapan Menteri Pertahanan tanggal 16-7-1946 telah didirikan „Buro Urusan Sumatera", jaitu Djawatan baru, jang chusus mengurus segala hal jang mengenai ketentaraan di Sumatera. Buro tersebut adalah bagian dari Kementerian Pertahanan Bagian Militer, tetapi taktis berada dibawah Markas Besar Tentara Staf Umum III dan dipimpin oleh Letnan Kolonel R.A. Bustomi.

T.R.I. ke Djakarta

Pada tanggal 17-9-1946 malam Delegasi T.R.I. jang akan membitjarakan Truce dengan Serikat telah berangkat ke Djakarta dengan kereta api istimewa dari Stasiun Tugu Jogjakarta.

Diantara pembesar-pembesar jang turut mengantarkan ke Stasiun kelihatan Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima Besar, Kepala Staf Umum, Djuru-bitjara Tentara dan lain-lain.

Wakil Presiden menjampaikan sepatah dua patah kata kepada para utusan itu antara lain :

„Inilah untuk pertama kalinja kita mengadakan perundingan perletakan sendjata dengan Sekutu setjara internasional. Saja pertjaja akan kebidjaksanaan Saudara-saudara. Selamat djalan dan djagalah kehormatan bangsa kita".

Rombongan tersebut terdiri atas 7 orang, 5 orang dari Djawa dan 2 orang dari Sumatera, dan pimpinan Delegasi adalah Djenderal Major Sudibjo.

R. Susalit Panglima Divisi III

Oleh jang berwadjib telah ditetapkan sebagai Panglima Divisi III R. Susalit (putera almarhum R.A. Kartini) bekas Komandan Brigade VII.

Upatjara penjerahan pimpinan Divisi tersebut dilangsungkan pada tanggal 2-10-1946 oleh Wakil M. B. T. di Kantor Markas Divisi.

Kordinasi Ketentaraan

Atas keinginan dan keinsjafan rakjat sendiri terhadap pembelaan tanah air jang terantjam kemerdekaannja, maka dimana-mana berdirilah organisasi rakjat jang bersifat militer. Badan-badan perdjuangan ini sangatlah besar djasanja disegala medan pertempuran. Mereka berdjuang semata-mata memenuhi panggilan nusa dan bangsa, tidak mengharapkan upah. Tiap-tiap orang ingin berkorban, tiap-tiap orang mendjadi peradjurit. Inilah jang mengagumkan orang luar tentang revolusi kita, kagum akan keichlasan tiap-tiap puteranja membela kemerdekaan.

Kita menghadapi musuh jang teratur segala-segalanja dan lengkap persendjataannja, maka perlawanan kita, harus diatur serapi-rapinja. Untuk dapat mengadakan pertahanan jang kuat, bulat (total) dan teratur, perlu diadakan peraturan tentang Lasjkar dan Barisan dan berhubung dengan ini telah dikeluarkan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 19 jang selengkapnja sebagai berikut :

Kordinasi Ketentaraan
Kewadjiban mempertahankan Tanah Air

Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 19.

DEWAN PERTAHANAN NEGARA

Menimbang, bahwa :

a. barang siapa berdjuang setjara ketentaraan untuk kepentingan Negara harus dibeajai oleh Pemerintah ;

b. untuk dapat mengadakan pertahanan jang bulat (total) lagi teratur perlu diadakan peraturan tentang Lasjkar dan Barisan ;

Mengingat :

a. pasal 7 dari „Undang-undang keadaan bahaja tahun 1946" (Undang-undang No. 6 tertanggal 6 - 6 - 1946) ;

b. peraturan Dewan Pertahanan Negara tentang Kewadjiban bekerdja tahun 1946 Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 13 tertanggal 6 - 8 - 1946).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

Bab I : Tentang Lasjkar

Pasal 1.

(1) Jang dimaksudkan dengan Lasjkar dalam peraturan ini ialah organisasi rakjat, jang bersifat militer diluar Tentara dan jang mendapat pengesahan dari Menteri Pertahanan.

(2) Sjarat-sjarat untuk mendapat pengesahan, jang dimaksudkan dalam pasal ini ajat (1) ialah:
   a. djumlah anggauta sesuatu organisasi rakjat dibatasi menurut aturan, jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan atas pertimbangan Dewan Kelasjkaran Pusat dan Dewan Kelasjkaran Seberang dengan mengingat kekuatan dan djumlah sendjata api jang ada padanja.
   b. kekuatan sesuatu organisasi rakjat untuk daerah karesidenan sedikit-dikitnja 200 orang.
   c. diasramakan, disusun serta diatur setjara ketentaraan.

Pasal 2.

(1) Beaja untuk keperluan Lasjkar dibajar oleh Pemerintah.
(2) Lasjkar harus tunduk kepada pimpinan, jang ditundjuk oleh Pemerintah.

Pasal 3.

(1) Organisasi rakjat jang tidak dapat memenuhi sjarat-sjarat, jang dimaksudkan dalam pasal 1 ajat (2):
   a. dapat dimasukkan kedalam salah satu Lasjkar dengan mengingat aturan-aturan jang ditentukan oleh Menteri Pertahanan sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 1 ajat (2) sub b.
   b. dengan lambat laun mendjelma mendjadi Barisan jang dimaksudkan dalam pasal 6 dari peraturan ini.
(2) Pendjelmaan kearah Barisan tersebut dalam pasal ini ajat (1) sub b ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Menteri Pertahanan atas pertimbangan Dewan Kelasjkaran Pusat dan Dewan Kelasjkaran Seberang dan diselenggarakan oleh Buro Perdjuangan.

Pasal 4.

Dalam hal kewadjiban dan hak Lasjkar dipersamakan dengan Tentara.

Pasal 5.

(1) Dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal 4 tiap-tiap lasjkar berada dibawah pimpinan organisasinja masing-masing dan boleh memakai tanda-tanda dan pandji-pandjinja sendiri.
(2) Tanda-tanda dan pandji-pandji tersebut dalam pasal ini ajat (1) harus disahkan oleh Menteri Pertahanan atas pertimbangan Dewan Kelasjkaran Pusat dan Dewan Kelasjkaran Seberang.
(3) Tanda-tanda dan pandji-pandji jang telah disahkan tidak boleh ditiru atau dipakai oleh orang atau Organisasi lain.

Bab. II: Tentang Barisan

Pasal 6.

Tiap-tiap Warga Negara baik laki-laki maupun perempuan, jang berusia 16 tahun keatas dan 50 tahun kebawah dapat diwadjibkan turut serta mempertahankan Tanah Air didalam Barisan Tjadangan, jang selandjutnja disini dengan singkat disebut „Barisan".

Pasal 7.

Barisan jang dimaksudkan dalam pasal 6 berkewadjiban melakukan pekerdjaan jang bersifat militer seperti tersebut dibawah ini:
a. Melatih diri dalam hal Kemiliteran,
b. Memberantas mata-mata musuh,
c. Membinasakan tentara pajung musuh,

d. Membantu Pendjagaan Bahaja Udara,
e. Membantu pendjagaan kota, desa dan perusahaan - perusahaan jang penting.
f. Membantu pengungsian, dapur perdjuangan dan Palang Merah.
g. Membantu Tentara atau Lasjkar, bilamana dibutuhkan.
h. Membantu usaha Pemerintah lain-lainnja untuk kepentingan Pertahanan dan Pembangunan.

Pasal 8.

Bebas dari kewadjiban termuat dalam pasal 6 ialah :

a. anggauta dari Tentara Darat, Angkatan Laut dan Udara.
b. anggauta Polisi Negara.
c. anggauta Lasjkar.
d. anggauta Barisan Pendjagaan Bahaja Udara.
e. orang-orang dan golongan, jang diketjualikan oleh Dewan Pertahanan Daerah.

Pasal 9.

(1) Barisan dipimpin dan diurus oleh Buro Perdjuangan.
(2) Untuk mendjalankan apa jang ditentukan dalam pasal ini ajat (1) dengan mengingat keadaan dan keperluan Buro Perdjuangan mengadakan bagian :
   a. Inspektorat Pusat.
   b. Inspektorat Barisan untuk tiap-tiap Keresidenan, jang selandjutnja disini dengan disingkat disebut Inspektorat Daerah.
(3) Menurut keperluan Inspektorat Daerah mempunjai tenaga di Kabupaten, Asistenan dan Kalurahan atau didaerah jang sama dengan itu.

Pasal 10.

(1) Anggauta Barisan ditundjuk oleh Inspektorat Daerah tjabang Kalurahan dengan pertimbangan Kepala desa.
(2) Penundjukan termuat dalam pasal ini ajat (1) dilakukan dengan Surat-perintah.
(3) Barang siapa berkeberatan atas penundjukan tersebut dalam pasal ini ajat (1) berhak mengemukakan keberatan kepada Kepala Inspektorat Daerah dalam waktu 5 hari sesudah Surat-perintah disampaikan kepadanja.

Pasal 11.

(1) Kepala Inspektorat Pusat dan Inspektorat Daerah berhak menundjuk orang untuk :
   a. diangkat oleh Menteri Pertahanan mendjadi Opsir Tjadangan.
   b. dilatih di asrama Republik Indonesia untuk didjadikan Opsir-Tjadangan.
(2) Penundjukan termuat dalam pasal ini ajat (1) dilakukan dengan Surat-perintah.
(3) Barang siapa berkeberatan atas penundjukan tersebut dalam pasal ini ajat (1) berhak mengemukakan keberatan kepada Kepala Inspektorat Pusat dalam waktu 5 hari sesudah Surat-perintah disampaikan kepadanja.

Bab III : Tentang pelaksanaan peraturan

Pasal 12.

Pelaksanaan Peraturan ini diserahkan kepada Buro Perdjuangan dengan bantuan Dewan Pertahanan Daerah.

Bab IV : Tentang hukuman

Pasal 13.

(1) Barang siapa dengan sengadja merintangi atau mengganggu jang berwadjib dalam hal pendjelmaan kearah Barisan jang dimaksudkan dalam pasal 3 ajat (1) sub b dihukum pendjara selama-lamanja 4 tahun atau denda sebanjak-banjaknja dua puluh ribu rupiah.

(2) Barang siapa dengan sengadja :

a. melanggar aturan jang ditentukan dalam pasal 5 ajat (3) atau

b. tidak memenuhi kewadjiban termuat dalam pasal 6 jo pasal 7, dihukum pendjara selama-lamanja 2 tahun atau denda sebanjak-banjaknja sepuluh ribu rupiah.

(3) Barang siapa melanggar aturan termuat dalam pasal 5 ajat (2) dihukum kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda sebanjak-banjaknja sembilan ratus rupiah.

(4) Perbuatan termuat dalam pasal ini ajat (1) dan ajat (2) dianggap sebagai kedjahatan.

(5) Perbuatan termuat dalam pasal ini ajat (3) dianggap sebagai pelanggaran.

(6) Terhadap Organisasi rakjat atau lasjkar dalam pelanggaran aturan termuat dalam pasal 5 ajat (2) dan ajat (3) jang dituntut dan dihukum ialah Pengurus dan/atau Pemimpin Organisasi atau Lasjkar tersebut.

Pasal 14.

Peraturan ini disebut „Peraturan Lasjkar dan Barisan tahun 1946".
Ditetapkan di Jogjakarta, tanggal 19 September 1946.

Dewan Pertahanan Negara
Ketua :
SOEKARNO.

Diumumkan pada tanggal 4 Oktober 1946
Sekretaris Dewan Pertahanan
Negara
ALI SASTROAMIDJOJO.

*

Menudju kearah Tentara Nasional Indonesia

Berhubung dengan telah tertjapainja persetudjuan diantara Delegasi Indonesia dan Komisi Djenderal pada tanggal 24 - 1 - 1947 tentang pelaksanaan gentjatan sendjata dan menetapkan garis demarkasi, maka Panglima Tertinggi telah memerintahkan untuk menghentikan tembak menembak jang berlaku mulai tanggal 15 - 2 - 1947.

Hal ini hanja berlaku untuk beberapa saat sadja, maka tiba-tiba dengan alasan-alasan jang ditjari-tjari, pada tanggal 21 Djuli 1947 Belanda menjerang dari segala djurusan, baik dari darat, laut dan udara.

Masa beredar, waktupun beralih, sukar dan penuh dari rintangan djalan jang harus ditempuh sebelum alat kekuasaan didalam pertumbuhannja dapat mendjadi sesuatu jang sungguh dapat didjadikan pegangan bagi Negara. Tentara Keamanan Rakjat dirubah mendjadi Tentara Keselamatan Rakjat, Tentara Keselamatan Rakjat segera dirubah pula mendjadi Tentara Republik Indonesia.

Setelah ditimbang bahwa telah tiba waktunja untuk mempersatukan Lasjkar dan Tentara dalam satu organisasi Tentara Nasional Indonesia, maka

pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang telah mengeluarkan Penetapan jang isinja sebagai berikut:

Dalam waktu jang sesingkat-singkatnja mempersatukan Tentara Republik Indonesia dan Lasjkar-lasjkar mendjadi satu organisasi Tentara.

Menjerahkan pelaksanaannja kepada suatu Panitya jang diketuai sendiri oleh Presiden dan selandjutnja terdiri dari:

2. Wakil Ketua I: Wakil Presiden; 3. Wakil Ketua II: Menteri Pertahanan; 4. Wakil Ketua III: Panglima Besar.

Anggauta-anggautanja:

1. Kepala Staf Umum M.B.T.; 2. Dir. Djenderal Angkatan Darat; 3. Panglima Angkatan Laut; 4. Dir. Djenderal Angkatan Laut; 5. Panglima Angkatan Udara: 6. K. S. Pendidikan Politik Tentara; 7. P. U. Baro Perdjuangan; 8. Panglima Divisi III T.R.I.; 9. K. S .U. M. B. A. L. 10. Pemimpin Barisan Hisbullah; 11. Pemimpin Barisan Pesindo; 12. Pemimpin Barisan Lasjkar Rakjat; 13. Pemimpin Barisan Banteng; 14. Pemimpin Barisan Pemberontakan; 15. Menteri Negara Wikana; 16. Sumarsono Ketua B.P. Kongres Pemuda; 17. Pemimpin T. R. I. Peladjar.

Selandjutnja setelah Presiden menerima putusan Panitya Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, maka kemudian menetapkan bahwa mulai tanggal 3 Djuni 1947 Presiden mengesahkan berdirinja Tentara Nasional Indonesia.

Segenap anggauta Angkatan Perang jang ada dan segenap Anggauta Lasjkar jang bersendjata, baik jang sudah atau jang tidak tergabung didalam Buro Perdjuangan mulai saat tersebut dimasukkan serentak kedalam Tentara Nasional Indonesia.

Pada tanggal 28 - 6 - 1947 Presiden melantik Anggauta-anggauta Putjuk Pimpinan Tentara Nasional.

Mereka itu adalah:

1. Djenderal Soedirman sebagai Panglima Besar Seluruh Angkatan Perang T. N. I.
2. Letnan Djenderal Oerip Soemohardjo, Kepala Staf Umum T.N.I. diserahi tugas chusus Angkatan Darat.
3. Laksamana Muda Nazir, Panglima Angkatan Laut,
4. Commodore S. Surjadarma.
5. Djenderal Major Djokosujono, bertugas mengawasi perintah dan perhubungannja antara Tentara dan Rakjat.
6. Djenderal Major Ir. Sakirman bertugas mengurus kordinasi antara badan-badan dan djawatan-djawatan.
7. Djenderal Major Soetomo, bertugas mengurus perhubungan dan kerdja bersama antara seluruh Angkatan Perang.

* * *

2. KONGRES PEMUDA INDONESIA

Gerakan Pemuda Republik Indonesia (Gerpri)

PADA rapat „Promotor Pemuda Nasional" tanggal 25 - 10 - 1945 jang dihadiri oleh perwakilan Pemuda Buruh, Pemuda Peladjar, Pemuda Tani, Pemuda Rakjat, telah diputuskan membubarkan „Promotor Pemuda Nasional" Jogjakarta. Alasannja jalah oleh karena kewadjiban badan tersebut sebagai pengusaha pembentukan promotor perdjuangan jang harus mengikuti permintaan masa dan keadaan sudah selesai.

Masjarakat Pemuda didaerah Jogjakarta membutuhkan gerakan pemuda jang lebih njata tjoraknja, gerakan jang berorganisasi positif dan revolusioner. Untuk melandjutkan gerakan P.P.N. dibentuk badan baru jang diberi nama „Gerakan Pemuda Republik Indonesia" jang disingkat mendjadi Gerpri. Dalam badan ini berfederasi Pemuda Buruh, Pemuda Peladjar, Pemuda Tani dan Pemuda Rakjat dan hubungan perwakilan-perwakilan keempat golongan itu terhadap Pengurus Gerpri tetap seperti jang sudah didjalankan.

Perlu didjelaskan, bahwa pembentukan badan baru itu merupakan usaha menjongsong Kongres „Pemuda Indonesia" jang akan diadakan di Jogjakarta pada tanggal 10 dan 11 Nopember 1945.

Pada tanggal 28 - 10 - 1945 Gerakan Pemuda Republik Indonesia Jogjakarta mengadakan rapat di Balai Mataram untuk memperbintjangkan rentjana-rentjana Kongres Pemuda Indonesia jang akan diadakan di Jogjakarta. Dalam rapat tersebut dibentuk pula Panitya jang susunannja adalah sebagai berikut :

Panitya Kehormatan : S. P. Sultan. S. P. Paku Alam dan Moh. Saleh.
Ketua : B. R. M. Hertog.
Wakil Ketua : S. Hudoro.
Kepaniteraan : Utojo, Sukardi.
Keuangan : Zaini, Badawi dan dibantu oleh B. B. I. dan B. T. I.

Konperensi Pendahuluan Kongres Pemuda Indonesia di Jogjakarta

Konperensi Pendahuluan Kongres Pemuda jang dilangsungkan pada tanggal 31 - 10 - 1945 dihadiri oleh utusan dari M. B. Barisan Pelopor Djakarta, Api Djakarta, Pri Bandung, Pri Surabaja, Ipi Djakarta, Gerpri Jogjakarta, Staf wartawan Kempen.

Konperensi ini diadakan atas usaha Gerpri Jogjakarta, jang maksudnja menjatakan bahwa Kongres jang akan diadakan pada tanggal 10 dan 11 Nopember 1945 adalah dengan kehendak dan persetudjuan jang bulat dari pemuda.

Diantara putusan-putusannja jang penting jalah :

1. Kongres Pemuda Indonesia tanggal 10 dan 11 Nopember 1945 harus menimbulkan suatu gerakan pemuda jang bertjorak satu dan bersifat fusi dengan azas sosialistisch dan tudjuan menegakkan Negara Republik Indonesia atas dasar Kedaulatan Rakjat.

2. Kongres dinamai : Kongres Pemuda Indonesia. Putusan-putusan lainnja jalah mengenai peraturan-peraturan bagi pengundjung dan mereka jang diundang.

*

Tanggal 10 dan 11 Nopember 1945 di Jogjakarta djadi diadakan Kongres Pemuda seluruh Indonesia.

Hari jang mengandung riwajat. Dalam 2 hari itu beratus pemuda-pemudi kita berkumpul, bermusjawarat dan menentukan sikapnja jang mendjadi pedoman hidup seluruh pemuda. Pemuda bunga bangsa, pemuda tiang masjarakat. Pada pemudalah terletak beban jang berat, jang akan menentukan timbul atau djatuhnja Negara kita, jang kemerdekaannja sedang diperdjuangkan sehebat-hebatnja. Dalam memperdjuangkan kemerdekaan itu, maka pemudalah jang ambil bagian terpenting. Berkenaan dengan itu kota Jogjakarta kebandjiran ratusan, bahkan ribuan pemuda pemudi dari lain-lain daerah. Tidak hanja jang mendapat undangan sadja, tetapi djuga mereka dengan kemauannja sendiri dan wartawan-wartawan dari luar Jogja telah tiba dikota jang terkenal sebagai kota jang teraman dan paling tenteram diseluruh Djawa, untuk menjaksikan kongres jang penting artinja itu. Demikianlah Kongres Pemuda seluruh Indonesia dibuka pada tanggal 10-11-1945 bertempat digedung Balai Mataram dikundjungi oleh segenap pemuda seluruh Indonesia jaini dari Djawa, Sumatera, Sulawesi, Borneo, Sunda Ketjil dan Maluku.

Para tamu agung jang tampak hadir jaitu :

Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Menteri D.N. Wiranatakusumah, Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin, Menteri Sosial Mr. Iwa Kusumasumantri, Menteri P. P. K. K. H. Dewantara, Sekretaris Negara Mr. A. G. Pringgodigdo dan lain-lain.

Utusan pemuda jang hadir terdiri dari utusan-utusan Djawa 400 orang, Borneo 11 orang, Sulawesi 9 orang, Maluku 25 orang, Sunda Ketjil 18 orang dan Sumatera 166 orang.

Datang djuga untuk mengundjungi Kongres tersebut 6 orang wartawan-wartawan luar negeri.

Setelah masing-masing utusan memperkenalkan diri, Bung Karno menjampaikan sambutannja, seperti berikut :

Saudara-saudara sekalian.

Sebelumnja saja mengadakan sambutan, saja mengutjapkan salam „MERDEKA "!

Saudara-saudara.

Saja mengutjap sjukur kepada Allah S.W.T., bahwa saja hari ini bisa datang hadir disini, berhadap-hadapan muka dengan saudara-saudara sekalain. Saudara-saudara pemuda Indonesia bukan sadja dari tanah Djawa, tetapi djuga dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Sunda Ketjil, Maluku dan lain-lain tempat jang saja hadapi sekarang ini ialah wadjah seluruh pemuda Indonesia. Tetapi sebenarnja saja berhadap-hadapan muka dengan wadjah hari kemudian. Kita punja perdjuangan adalah menegakkan Indonesia Merdeka, bukan sadja untuk hari sekarang, tetapi Republik Indonesia hingga mendjadi kekal abadi sampai achir zaman.

Kita sekarang telah mendjadi bangsa jang bulat, bersatu dengan tenaga 70 miljun orang. Rakjat tua, muda, laki-laki, perempuan, telah tergabung untuk menegakkan Republik Indonesia. Saja mendo'akan kepada Allah S.W.T., agar supaja pemuda-pemuda jang hadir disini bisa mengambil putusan-putusan jang tepat dan bidjaksana.

Pemerintah Republik mengetahui, bahwa ada bermatjam-matjam golongan dan aliran. Saja harap, supaja Kongres ini bisa mempersatukan segala golongan

mendjadi satu aliran. Djalannja ialah mengambil putusan jang bidjaksana, agar dapat memperkekalkan dan mempertahankan Republik Indonesia jang abadi.

Tidak hanja kedalam sadja perdjuangan kita, tetapi djuga keluar. Utusan-utusan supaja bertindak jang bidjaksana, agar dapat mempertahankan Negara kita. Saja do'akan sekali lagi supaja Kongres ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknja.

MERDEKA ! ! !

Selandjutnja S. P. Sultan memberikan nasehatnja, jang lengkapnja sebagai berikut :

Pada saat ini berkumpullah ditempat ini wakil - wakil pemuda Indonesia dari seluruh Djawa dan Madura dan dari beberapa bagian dari kepulauan Indonesia. Sajang sekali berhubung dengan keadaan-keadaan, belum segenap pemuda dari seluruh Indonesia dapat mengundjungi Kongres ini. Akan tetapi walaupun demikian, wakil-wakil pemuda Indonesia jang hadir disini dapat dianggap mewakili pemuda Indonesia seluruhnja. Sebab pulau Djawa dipandang dari beberapa sudut memang merupakan dan adalah Pusat Indonesia. Pun penduduk dipulau ini merupakan perwakilan dari bangsa Indonesia seluruhnja, oleh karena golongan-golongan bangsa Indonesia, jang asalnja dari manapun djuga di Indonesia jang seluas itu, terdapat dipulau Djawa ini. Lagi pula Kami jakin, bahwa pemuda Indonesia jang berada diluar Indonesia, jang menamakan/merasa diri adalah pemuda Indonesia, tentu mempunjai semangat satu ialah semangat untuk menuntut tetap tegaknja Negara Republik Indonesia.

Semangat itulah jang menghubungkan djiwa pemuda Indonesia seluruhnja. Semangat itulah jang mendjelmakan djiwa satu ialah djiwa merdeka, djiwa jang bebas, djiwa pemuda Indonesia jang tidak mau dan tidak ingin didjadjah lagi oleh siapapun djuga. Semangat itulah jang melahirkan hasrat jang satu, kemauan jang menimbulkan keichlasan dan ketabahan hati untuk menentang segala matjam pendjadjahan, untuk berdjuang bagi tetap merdekanja nusa dan bangsa.

Pada waktu ini pemuda Indonesia mempunjai tempat jang istimewa ditengah-tengah bangsanja, oleh karena perdjuangan kemerdekaan sekarang ini terutama pada pemudanja. Pula oleh karena perdjuangan rakjat Indonesia mendapatkan motornja dalam perdjuangan pemudanja. Pemudalah jang sanggup mendorong dan menggerakkan rakjat untuk bangkit serentak berdjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Pemudalah jang seterusnja memotori perdjuangan rakjat itu.

Dalam pidatonja S. P. Paku Alam menjatakan :

Kami menjambut dengan girang hati atas datangnja Kongres para Pemuda seluruh Indonesia, jang kini datang berkumpul di Jogjakarta, akan merundingkan masalah-masalah mengenai keadaan Negara kita pada masa ini.

Lagi pula atas angkatan kami sebagai Anggauta Kehormatan dari Kongres ini, kami mengutjap diperbanjak terima kasih dan sanggup djuga turut membantu memetjahkan segala kesulitan-kesulitan jang dirundingkan dalam Kongres ini.

Sungguh berbesar hati kami melihat serentaknja para Pemuda dari seluruh Indonesia, jang semuanja itu hanja berkehendak satu, jaitu mempertahankan kemerdekaan Negara kita, jang kini telah hampir 3 bulan, sedjak kemerdekaan itu diumumkannja.

Dalam masa 3 bulan ini, kita selalu menghadapi rintangan-rintangan dan kesulitan-kesulitan, jang hakekatnja merintangi atau hendak merobohkan ber-

dirinja Negara Republik Indonesia. Dalam hal itu bangsa kita istimewa pemudanja, telah membuktikan kesanggupannja dan dapat mengatasi segala rintangan dari pihak manapun djuga.

Dari kedjadian-kedjadian di Surabaja, Semarang, Garut dan Magelang hendaknja bangsa kita djangan sampai tertipu lagi oleh pihak jang akan mendjadjah bangsa kita untuk ketiga kalinja.

Achiroelkalam, sebagai penutup, kami mendo'a, mudah-mudahan Kongres Pemuda ini akan berhasil memetjahkan segala masalah-masalah dan menambah erat bulatnja persatuan kita jang kini sangat kita butuhkan untuk mendjamin kokoh kuatnja Negara kita, jang baharu sadja lahir didunia ini.

Wassalam.

Ketua K.N.I. Moh. Saleh didalam pidatonja berharap, hendaknja para pemuda, sepulangnja ketempatnja masing-masing membawa semangat pemuda Mataram jang diwariskan oleh P. Diponegoro. Sebagai penutup pembitjara menjerukan : „Pilihlah mati, pilihlah hidup sengsara, dari pada hidup diindjak-indjak oleh pendjadjah".

Pertemuan perkenalan kemudian ditutup pada djam 11 pagi.

*

Djalannja rapat tertutup

Berhubung dengan kritiknja keadaan jang tak dapat disingkirkan, maka Kongres Pemuda hari pertama tanggal 10-11-1945 dimulai tepat djam 13.00.

Lebih dahulu diberitahukan bahwa jang mendjadi Ketua Kongres telah dipilih Supeno dari Djakarta. Supeno madju kemuka memimpin rapat. Pertama-tama Supeno mempersilahkan Krissubanu dari Surabaja mengutarakan kedjadian-kedjadian Surabaja jang maha genting, hingga beberapa orang utusan dari Djawa Timur pada saat itu djuga diberi komando kembali ke Surabaja.

Setelah itu lalu dipersilahkan Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin mengutjapkan pidatonja tentang tudjuan Kongres. Dikatakannja, bahwa saat inilah jang menentukan sedjarah Indonesia dihari nanti.

Adam Malik membatjakan Prae-advies tentang gerakan pemuda.

Selandjutnja disusul dengan prae-adviesnja Saudara Wikana tentang gerakan-gerakan pemuda jang bersifat fusi.

Kemudian berturut-turut utusan dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil dipersilahkan ketua memaparkan tentang kedjadian-kedjadian ditempatnja masing-masing.

Achirnja rapat ditutup pada djam 15.00.

*

Djam 16.00 Kongres dilangsungkan lagi, pula di Balai Mataram.

Bagaimana djuga dalam pembitjaraan-pembitjaraan jang terdjadi dalam rapat ini ternjata, bahwa pemuda memegang keras azas-azas kedaulatan rakjat. Sikap terus terang, meskipun atjap kali menimbulkan suasana agak keruh, nampak benar. Rapat petang hari itu dilandjutkan lagi mulai djam 21.00.

Dalam rapat itu pimpinan rapat jang selama itu dipegang Supeno, selandjutnja diserahkan Ibnu Parna dari Semarang.

Saudara-saudara dari Surabaja membatjakan antjaman-antjaman pimpinan tentara Inggeris terhadap rakjat Indonesia di Surabaja, diutjapkan dengan tenang dan gagah perkasa.

Selandjutnja rapat pada malam itu mengalami perdebatan jang ramai, hingga achirnja Wakil Presiden Moh. Hatta diminta prae-adviesnja. Beliau menerangkan tentang tjaranja mengadakan kordinasi dengan djelas dan terang.

Para Pemuda setudju menerima keterangan tersebut sebagai pedoman. Dari tiap - tiap markas diambil 2 orang jang dipertjaja untuk membentuk Komisi Kordinasi. Mereka mengadakan rentjana sendiri-sendiri dan rapat dischors 1½ djam.

Setelah selesai beristirahat, rapat dimulai lagi, kemudian Komisi menjampaikan hasil pekerdjaan mereka. Selandjutnja dibentuk Komisi usul-usul.

Rapat jang hangat itu berlangsung sampai djam 6 pagi.

Hari ke 2 Kongres Pemuda

Pagi hari tanggal 11 - 11 - 1945 dialoon-aloon utara diadakan rapat raksasa pemuda jang mendapat kundjungan jang meriah. Para pembesar lengkap seperti pada hari pertama tampak hadir dalam rapat raksasa tersebut.

Rapat dilangsungkan didalam suasana semangat perdjuangan jang bernjala-njala.

Ketua Gerpri Jogjakarta Lagiono membuka rapat tersebut dan menjampaikan putusan Kongres Pemuda, jang antaranja diterangkan bahwa untuk mengambil sikap jang djitu, maka diadakan suatu persatuan Pemuda seluruh Indonesia jang bersifat sosialis.

Selandjutnja diadakan federasi badan-badan pemuda jang telah ada dan federasi badan-badan ini akan membawa perubahan perdjuangan besar dikalangan pemuda seluruh Indonesia.

Krissubanu dari Surabaja dengan berapi - api menambah semangat para pemuda untuk berdjuang melawan pendjadjah sampai titik darah penghabisan. Pemuda sekarang telah lain sifatnja dengan pemuda dahulu. Djika pemuda dahulu bersembojan merdeka atau mati, maka pemuda sekarang bersembojan „merdeka atau merdeka".

Selandjutnja berpidato pula Bung Karno jang menguraikan lima dasar pedoman negara Republik Indonesia, jang sesuai dengan lima buah djari jang diangkat didalam menjerukan salam kebangsaan.

Didalam suasana jang berapi-api itu datanglah sebuah pesawat terbang jang bertanda merah putih dikemudikan oleh pemuda kita sendiri terbang rendah sekali dan menjebarkan pamflet jang berbunji : **„Indonesia, Indonesia, Tanah Airku, Aku Sungguh membelamu, sampai tiwas djiwaku.**

Sembojan ini lebih menjalakan dada tiap-tiap pemuda dan diwadjah mereka tampak suatu kesanggupan untuk membela tanah airnja dengan djiwa dan raga. Kapal terbang tersebut jang berulang-ulang terbang dengan rendah dan megahnja disambut dengan seruan „Merdeka" oleh para pemuda.

Walaupun sesudah itu datang sebuah pesawat terbang lain jang bukan kepunjaan Indonesia, mereka tidak gentar sedikitpun djuga dan rapat dilangsungkan dengan semangat jang lebih bernjala-njala lagi.

Demikianlah setelah pidato Bung Karno, rapat kemudian ditutup.

Perdjamuan di Kepatihan bagi Kongresisten

Sesudah paginja mengadakan rapat umum dialoon-aloon maka sebagai atjara landjutannja diadakan perdjamuan di Bangsal Kepatihan atas undangan S.P. Sultan. Hadir dalam perdjamuan tersebut pula Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, S.P. Paku Alam, para menteri, pembesar-pembesar T.K.R., Polisi, Kongresisten dan para wartawan.

Sebagai sambutan S.P. Sultan disamping menjatakan penghargaannja atas berlangsungnja kongres, mengandjurkan supaja dalam menjusun masjarakat baru, semangat pemuda dipelihara, dinjala-njalakan dan dipergunakan sebaik-baiknja. Disamping peladjaran militer, hendaknja pemuda diberi didikan politik untuk memperhebat semanat perdjuangan dan sebagai latihan mendjadi Pemimpin dikemudian hari.

Sesudah berturut-turut berbitjara Lagiono atas nama Kongres dan Moh. Saleh sebagai Ketua K.N.I. Daerah Jogjakarta untuk menjampaikan terima kasihnja atas perdjamuan itu, maka wakil dari Persatuan Pemuda Puteri Indonesia menjatakan kesanggupannja kaum wanita untuk mengambil sikap jang njata, ikut serta dengan sekuat tenaga memperdjuangkan kemerdekaan Indonesia berdampingan dengan kaum lelaki.

Pembitjara terachir adalah Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin jang memberikan pemandangan tentang kedudukan Pemuda pada dewasa itu dengan menganđjurkan hendaknja kita tidak memandang semangat sadja, tapi semangat hendaknja dipimpin jang sempurna, hingga kita dapat mengatakan, bahwa Pemuda Indonesialah jang mempunjai rol terpenting dalam menjusun Masjarakat baru ini.

*

Rapat penutupan Kongres

Djauh dimata, dihati djangan.

Rapat penutup Kongres Pemuda dilangsungkan pada tanggal 12 - 11 - 1945 dimulai djam 20.00.

Setelah pembukaan, dibatjakan keadaan di Surabaja, kemudian dibatjakan pula putusan-putusan kongres.

Tibalah saatnja bagi para utusan-utusan untuk menjampaikan kata perpisahan.

Wakil dari Sumatera menjampaikan salam perpisahan dengan berpantun jang diterima dengan gelak ketawa oleh hadirin. „Djauh dimata, dihati djangan", djawab pimpinan rapat.

Saudara dari Kalimantan mengatakan kesanggupannja untuk berdjuang mempertegak Pemerintah Republik Indonesia. Diharap bala bantuan dari seluruh Indonesia.

Maluku menjampaikan salam dengan permintaan, hendaklah utusan-utusan dari seluruh Nusantara menaruh kepertjajaan kepada pemuda Maluku.

Saudara dari Sunda Ketjil menegaskan dengan sikap perkasa, „Tidak ada dalam kamus kami terdapat perkataan „surut dalam perdjuangan".

Sulawesi berkata: „Merdeka atau........ Merdeka".

Setelah didengarkan pula kata perpisahan dari pelbagi daerah di Djawa, djuga dari pihak kaum putri, selesailah rapat dan selesailah pula Kongres Pemuda seluruh Indonesia ini.

Pemuda-pemuda berdiri mengheningkan tjipta tertudju pahlawan-pahlawan bangsa jang sudah tak ada lagi, kemudian dinjanjikan lagu Indonesia Raya.

Putusan Kongres Pemuda Indonesia

pada tanggal 10 - 11 - 1945

Minat dan hasrat seluruh Pemuda Indonesia, merupakan kebulatan kemauan fikiran dalam Kongres Pemuda Indonesia I, mendjelmakan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia dengan Pimpinan :

I. **Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :**

1. Chaerul Saleh — Pimpinan Umum.
2. Supardo — Wk. „ I
3. A. Buchari — Wk. Pimpinan Umum II
4. Muljo — Penulis

Anggauta Dewan Pimpinan Pusat lain-lainnja :

1. Sdr. Sudarpo — I. P. I.
2. Sdr. Nj. Sutarman — Pemuda Putri Indonesia.

3. Sdr. Dr. E. J. Siregar — Pemuda Protestan.
4. Sdr. P. Surono — Pemuda Katholik.
5. Sdr. Dr. Muwardi — Barisan Pelopor.
6. Sdr. Udin — Andalas.
7. Sdr. Akiyuwen — Pemuda Maluku.
8. Sdr. Achid Mursidi — Angkatan Muda Guru.
9. Sdr. Gusti Djohan — Kalimantan.
10. Sdr. A. Ratulangi — KRIS.
11. Sdr. Supeno — Wk. Pesindo.

II. **Organisasi diselenggarakan Dewan Pekerdja jang dalam udjudnja merupakan:**

1. Dewan Pekerdja bagian Perdjuangan dipimpin oleh Saudara Sumarsono Surabaja.
2. Dewan Pekerdja bagian Pembangunan dipimpin oleh Saudara Wikana Djakarta.
3. Adapun perkumpulan dan gerakan Pemuda Indonesia jang telah menggabungkan diri jalah:

1. I. P. I.
2. Masjarakat Peladjar Perguruan Tinggi.
3. Kebaktian Rakjat Indonesia Sulawesi.
4. Angkatan Pemuda Indonesia Maluku.
5. Pemuda Kristen Protestan Indonesia.
6. Pemuda Katholik Indonesia.
7. Gabungan Gerakan Pegawai Angkatan Muda.
8. Pemuda Andalas.
9. Angkatan Muda Indonesia Kalimantan.
10. Gerakan Pemuda Islam Indonesia.
11. Barisan Pelopor Republik Indonesia.
12. Angkatan Muda Guru.
13. Pemuda Putri Indonesia.
14. Pemuda Republik Indonesia Atjeh.
15. Pemuda Republik Indonesia Andalas.
16. Angkatan Muda Indonesia Surabaja.
17. Sarikat Peladjar Indonesia.
18. Gerakan Pemuda Minjak.
19. Gabungan Angkatan Muda Indonesia.
20. Gabungan Pemuda Islam Andalas.
21. Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat.
22. Angkatan Muda Kantor Pusat Pemerintah Republik Indonesia.
23. Pemuda Sosialis Indonesia jang terdiri dari:
    1. Angkatan Pemuda Indonesia.
    2. Angkatan Muda Republik Indonesia.
    3. Gerakan Pemuda Republik Indonesia.
    4. Gerakan Pemuda Djawatan Kereta Api.
    5. Angkatan Muda Djawatan Gas dan Listrik.
    6. Angkatan Muda Djawatan P. T. T.
    7. Pemuda Republik Indonesia.

III. **Mengambil resolusi:**

Pemuda Indonesia dalam Kongresnja di Mataram pada tanggal 10 dan 11 Nopember 1945.

Mengingat hasrat persatuan jang terbukti dengan:

a. Peleburan gerakan-gerakan Pemuda jang berhaluan sosialisme mendjadi Pemuda Sosialis Indonesia „PESINDO" jang terdjadi antara:

1. Api; 2. A.M.R.I.; 3. P.R.I.; 4 Gerpri; 5. Angkatan Muda Kereta Api ; 6. Angkatan Muda P.T.T. dan 7. Angkatan Muda Gas Listrik.

b. Dan penggabungan diantara gerakan-gerakan Pemuda:
   1. Ikatan Peladjar Indonesia.
   2. Masjarakat Peladjar Perguruan Tinggi.
   3. Kebaktian Rakjat Indonesia Sulawesi.
   4. Angkatan Pemuda Indonesia Maluku.
   5. Pemuda Kristen Protestant Indonesia.
   6. Pemuda Katholik Indonesia.
   7. Gabungan Pegawai Angkatan Muda.
   8. Pemuda Andalas.
   9. Angkatan Muda Indonesia Kalimantan.
   10. Barisan Pelopor Republik Indonesia.
   11. Gerakan Pemuda Islam Indonesia.
   12. Angkatan Muda Guru.
   13. Pemuda Puteri Indonesia.
   14. Pemuda Republik Indonesia Atjeh.
   15. Pemuda Republik Indonesia Andalas.
   16. Angkatan Muda Indonesia Surabaja.
   17. Serikat Pelajaran Indonesia.
   18. Gerakan Pemuda Minjak.
   19. Gabungan Angkatan Muda Indonesia.
   20. Gabungan Pemuda Islam Andalas.
   21. Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat.
   22. Angkatan Muda Kantor Pusat Pemerintah Republik Indonesia.
   23. Pemuda Sosialis Indonesia.

Memutuskan :

Menggabungkan semua gerakan Pemuda dalam satu badan: „Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia" jang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Indonesia dibantu oleh :

1. Dewan Pekerdja Perdjuangan.
2. Dewan Pekerdja Pembangunan.

Usahanja : Menegakkan, mempertahankan dan menjempurnakan Negara Republik Indonesia selama-lamanja.

I. Rentjana Perdjuangan sebagai berikut :

„Indonesia harus mempertahankan Kedaulatan Rakjat dan Negaranja dengan melenjapkan segala kepalsuan".

II. Rentjana Pembangunan jang dibagi dalam 3 bagian jaitu :

A. Bagian Politik seperti berikut :

1. Supaja hak bersidang, berkumpul, berdemonstrasi, hak-mogok, mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan.
2. Persamaan hak dari tiap-tiap Warga Negara terdjamin.
3. Supaja Pemerintah membentuk Kementerian Pemuda.

B. Bagian Ekonomi sebagai berikut :

1. Mentjukupi kebutuhan tiap-tiap Warga Negara.

C. Bagian Sosial sebagai berikut :

1. Undang-Undang Kemestian Beladjar.
2. Menghapuskan bekerdja anak-anak.
3. Hilangnja pengangguran.
4. Menjempurnakan Kesehatan Rakjat.
5. Perawatan Kaum perempuan diwaktu hamil oleh Pemerintah.

6. Pertanggungan Pemerintah atas Kaum Buruh dikala mendapat ketjelakaan.
7. Ketentuan djam bekerdja ialah 40 djam seminggunja.
8. Menghapuskan keadaan kemiskinan.

Rentjana umum seperti berikut:

a. Sikap terhadap tentara pendudukan Serikat, dan Rapwi menjelesaikan pekerdjaannja di Indonesia dan meninggalkan Indonesia dalam tempo setjepat-tjepatnja.
b. Supaja tentara Serikat tidak usah pergi ke Daerah jang masih ada tawanan orang Djepang atau Belanda, tetapi tjukup hal ini diserahkan kepada Kepala-kepala Pemerintah Republik jang mengurusnja hingga ke pelabuhan jang telah diduduki tentara Serikat mendjaga djangan sampai ada kegelisahan dalam rakjat seluruhnja.
c. Meminta kepada tentara Serikat di Indonesia:
   1. Supaja djangan mendaratkan orang-orang Belanda, Balatentara Belanda dengan Nicanja, dan jang sudah didaratkan supaja ditarik kembali dengan sanctie, bahwa djika soal-soal tersebut diatas tak diindahkannja, maka Pemuda Indonesia seluruhnja tak dapat menanggung djawab dan mendjamin keselamatan serta keamanan mereka:
   2. Supaja orang-orang Belanda djangan diperkenankan memakai tanda tentara Negara lain.

D. Mosi kepada Presiden, Badan Pekerdja, Pusat Dunia Internasional: dengan pemudanja di Washington sebagai berikut: bahwa segenap Pemuda Indonesia mempunjai sikap jang tegas terhadap tentara Sekutu dan memprotes terhadap kepalsuan sebagainja.

Mosi kepada Presiden sebagai berikut:

a. Supaja haluan Negara Republik Indonesia susunannja diselaraskan dengan putusan-putusan serta rentjana Perdjuangan Pemuda Indonesia.
b. Mendesak adanja keharusan keperadjuritan.
c. Supaja perlutjutan sendjata terhadap rakjat djangan sampai terdjadi.

E. Andjuran-andjuran sebagai berikut:

1. Mengingat kegentingan jang sekonjong-konjong timbul diharap segenap putusan-putusan Kongres setjepat mungkin dapat diselesaikan setjara jang mudah sekali untuk dikerdjakan dengan praktis.
2. Mengharap supaja Dewan Pimpinan memperhatikan persamaan lentjana, njanjian, pandji persatuan dan tjara salam Kebangsaan.
3. Mengharap bilamana ada Kongres Pemuda seluruh dunia Dewan Pimpinan mengirimkan utusannja.
4. Mendesak supaja Pemerintah segera mengeluarkan Uang Republik Indonesia.

F. Protes sebagai berikut:

a. Pemuda Indonesia memprotes kepada United Nations jang berkedudukan di Washington bahwa mereka semata-mata mengabaikan tindakan-tindakan tentara pendudukan di Indonesia jang mengatjaukan ketenteraman serta melanggar Kedaulatan Republik Indonesia.
b. Pemuda Indonesia memprotes sekeras-kerasnja pertemuan P.J.M. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta dengan van Mook c. s. Minat dan hasrat seluruh Pemuda Indonesia merupakan kebulatan kemauan dan fikiran dalam Kangres Pemuda Indonesia I, mendjelmakan: Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia.

Protes Pemuda Indonesia

Atas nama Kongres Pemuda Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Indonesia memprotes kepada seluruh dunia akan pemboman dan penembakan sewenang-wenang dari udara, laut dan darat oleh tentara pendudukan Inggeris terhadap Kota Surabaja dengan tiada mengenal peri kemanusiaan sehingga telah menjebabkan korban besar antara penduduk terutama anak-anak dan perempuan-perempuan jang dilakukan sedjak tanggal 10 Nopember 1945, dengan tiada beralasan suatu apa.

Jogjakarta, 11 Nopember 1945
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PEMUDA INDONESIA.

IV. Menentukan Peraturan Chusus jang berbunji :

I. Kongres Pemuda Indonesia.

A. a. Paling sedikit setahun sekali Dewan Pimpinan Pusat menjelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia.
b. Kongres Pemuda Indonesia menentukan sikap dan tudjuan dari Pemuda Indonesia seluruhnja jang mengenai perdjuangan dan pembangunan Negara.

B. Dewan Pimpinan Pusat memberi laporan tentang segala pekerdjaan kepada Kongres.

II. Dewan Pimpinan Pusat.

A. a. Dewan Pimpinan Pusat mengadakan rapat dengan anggauta-anggautanja paling sedikit sebulan sekali jang mengambil putusan tentang segala tindakan.
b. Dewan Pimpinan Pusat mengadakan perundingan dengan Markas-markas Besar Perkumpulan-perkumpulan Pemuda Indonesia paling sedikit 3 bulan sekali jang tidak mempunjai hak memutuskan tapi hak-andjuran.

B. Keuangan.
a. Keuangan didapat dari iuran, sokongan dan lain-lain usaha jang sah.

C. a. Panitera Pusat meneruskan segala putusan Dewan Pimpinan Pusat dan membantu Pemimpin Umum dalam segala usahanja untuk Dewan Pimpinan Pusat.
b. Djikalau Pemimpin Umum dan Wakil-wakilnja serta Penulis Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melakukan kewadjibannja oleh karena sesuatu hal Panitera Pusat berhak mengadakan rapat Dewan Pimpinan Pusat,
c. Djikalau semua anggauta Dewan Pimpinan Pusat berhalangan Panitera diwadjibkan mengadakan Kongres Pemuda Republik Indonesia atas initiatiefnja dan tanggungannja.

III. Dewan Pekerdja Perdjuangan.

A. a. Dewan Pekerdja Perdjuangan melaksanakan segala putusan Dewan Pimpinan Pusat jang mengenai perdjuangan.
b. Didalam keadaan genting Dewan Pekerdja Perdjuangan berhak mengambil putusan sendiri dengan menanggung djawab tentang putusan itu kepada Dewan Pimpinan Pusat.

c. Dewan Pekerdja Perdjuangan wadjib memberi segala penerangan jang diminta kepadanja oleh Panitera Pusat atau Dewan Pimpinan Pusat sendiri.

B. a. Dewan Pekerdja Perdjuangan menudju usahanja kepada :
1. usaha untuk menentang pendjadjahan.
2. mendirikan lasjkar rakjat.

b. Dalam usaha tersebut Dewan Pekerdja Perdjuangan wadjib selalu berhubungan dengan Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakjat dan mendjaga djangan sampai dalam waktu pertempuran ada perselisihan tindakan antara tentara dan lasjkar rakjat.

c. Dewan Pekerdja Perdjuangan berhubungan langsung dengan Dewan Perdjuangan Daerah.

C. Dewan Pekerdja Perdjuangan berusaha :
1. sehingga semangat perdjuangan rakjat tetap bergelora.
2. sehingga rakjat mendapat latihan pertempuran jang baik.
3. sehingga semua barisan-barisan rakjat dari segala golongan dan aliran tergabung dalam satu pimpinan perdjuangan.
4. untuk mendapatkan sendjata buat lasjkar rakjat dari dalam atau luar negeri dengan segala matjam djalan jang diperlukannja.
5. untuk mengurus segala keperluan perdjuangan rakjat antaranja menjediakan makanan buat barisan-barisan jang bertempur, mengurus baiknja pertolongan kepada korban-korban perang dan adanja pertolongan kepada jang luka dan lain-lain.
6. mengurus baik djalannja mobilisasi djikalau oleh pemerintah diperintah mobilisasi itu.

IV. Dewan Pekerdja Pembangunan.

A. a. D.P. Pm. melaksanakan segala putusan D.P. Pm., jang mengenai pembangunan Negara.

b. Didalam keadaan jang memaksa D. P. Pm. berhak mengambil putusan itu kepada D.P. Pm.

c. D. P. Pm. wadjib memberi segala penerangan jang diminta kepadanja oleh Panitera Pusat atau D. P. Pm. sendiri.

B. D. P. Pm. berusaha :

a. untuk membangunkan sifat dan pikiran politik dari rakjat seluruhnja jang ditudjukan kepada bentuk Republik Indonesia jang berasas Kedaulatan Rakjat, keadilan sosial.

b. untuk mempengaruhi Pemerintah dalam segala tindakannja jang mengenai politik, sosial, ekonomi, kebudajaan dan lain sebagainja.

c. untuk mempengaruhi Pemerintah dalam segala tindakannja terhadap kepada luar negeri.

d. untuk ikut mengatur baik djalannja pilihan wakil-wakil buat Badan-badan perwakilan Negara pusat dan daerah-daerah.

e. untuk menjokong rakjat dalam kehendaknja menjempurnakan susunan Tata Negara.

C. a. Dewan Pekerdja Pembangunan mengadakan beberapa badan jang membantu pekerdjaannja antaranja :
1. badan penerangan
2. badan politik.
3. badan sosial
4. badan ekonomi
5. badan kebudajaan.

6. badan perguruan.
7. didirikan dan lain-lain badan jang perlu.

b. D. P. Pm. mengadakan beberapa badan penjelidikan dan pengamatan.

V. Menetapkan Peraturan Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Indonesia sebagai berikut :

1. Perkumpulan-perkumpulan dan Barisan Pemuda Indonesia jang telah tergabung dalam BADAN KONGRES PEMUDA REPUBLIK INDONESIA dipimpin oleh DEWAN PIMPINAN PUSAT PEMUDA INDONESIA jang singkatnja disebut DEWAN PIMPINAN PUSAT atau D. P. P.
2. Dewan Pimpinan Pusat didalam pekerdjaannja dibantu oleh :
   a. Dewan Pekerdja Perdjuangan singkatnja D.P. Pr. dan
   b. Dewan Pekerdja Pembangunan singkatnja D.P. Pm.
3. Tudjuan : Menegakkan, mempertahankan dan menjempurnakan Republik Indonesia.
4. Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan dikota Pusat Pemerintah. Dewan Pekerdja Perdjuangan berkedudukan di kota Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakjat.
   Dewan Pekerdja Pembangunan berkedudukan dikota Pusat Pemerintahan.
5. Didaerah-daerah diadakan pula serupa ini.
6. Anggauta Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari seorang wakil perkumpulan jang tergabung dan jang mempunjai mandaat dari perkumpulannja.
7. a. Pemimpin Umum dari Dewan Pekerdja Pembangunan dipilih oleh dan dari Dewan Pimpinan Pusat dengan ketentuan bahwa Pemimpin Umum sesudah dipilih harus menjerahkan perwakilan dari perkumpulan jang bermula diwakilinja kepada jang lain.
   b. Pemimpin Umum didalam rapat Dewan Pimpinan, tidak mempunjai suara.
   c. Pemimpin Umum dipilih pada tiap-tiap setengah tahun.
8. Hak suara :
   Masing-masing Anggauta Pimpinan Pusat mempunjai satu suara.
9. Panitera Pusat merupakan satu kantor dan pemimpinnja diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat.
   Tempatnja dimana duduk Dewan Pimpinan Pusat.
10. Putusan :
   a. Tiap-tiap putusan diambil dengan suara sedikitnja 2/3 dari djumlah anggauta. Dewan Pimpinan Pusat harus didjalankan oleh semua perkumpulan jang tergabung.
   b. Didalam keadaan genting Pemimpin Umum dapat mengambil tindakan. Ia wadjib bertanggung djawab atas tindakan itu kepada Dewan Pimpinan Pusat.
11. Rapat Dewan Pimpinan Pusat bisa dilangsungkan, kalau 2/3 anggauta hadir.

Setelah Kongres Pemuda seluruh Indonesia berlangsung, maka di Jogja kemudian timbul berbagai-bagai organisasi Pemuda baru.

Dan berdasarkan atas putusan Kongres Pemuda Indonesia pertama, maka pada tanggal 24-25 11-1945 telah dapat dibentuk „Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Indonesia" Jogjakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Hertog.

Wakil Ketua : Daris Tamim

Penulis : Sukardi (IPI).
Bendahari : Astuti Darmosugito (P.P. Perwani).
Pemimpin Dewan Pekerdja Perdjuangan : J. N. Djalaluddin (Pesindo).
Pimpinan Dewan Pekerdja Pembangunan: Mr. Tandiono Manu (B. Peloopr).

Anggauta-anggauta lainnja :

1. Dasuki B.S. (G.P.I.I.).
2. .R.B. Sukanto (P.K. Protestan Indonesia).
3. J.A. Sarsito (AMKRI).
4. W. Litipaly (A.M. Maluku).
5. Abdul Madjid Halid (A.M. Sulawesi).
6. R.L. Sastroseputro (B. Pelopor).
7. Moh. Dhun (P.P.I.M.).

*

Kongres Pemuda Indonesia ke II

Kongres Pemuda Indonesia ke II dilangsungkan di Jogjakarta pada tanggal 9 — 9 Djuni 1946 dengan dapat perhatian besar sekali dari segenap organisasi-organisasi anggautanja, D.P.P. daerah-daerah, Presiden Soekarno dan lain-lain pembesar sipil dan militer, wakil-wakil organisasi-organisasi/partai-partai, pers dan lain-lain.

Dalam rapat perkenalan (resepsi) antara lain-lain jang memberi petuah kepada kongres adalah :

Presiden Soekarno jang mengandjurkan memperkuat negara dengan djalan menjelenggarakan kordinasi dan konsolidasi jang sebaik-baiknja. Dan Pemuda harus sedar, bewust terhadap negara, tentara dan pemerintah. Tegak dan tegapnja negara sangat tegantung pada Rakjat dan Pemudanja.

Menteri Negara Urusan Pemuda, Wikana, menerangkan bahwa kongres ini diadakan pada saatnja melandjutkan apa jang sudah kita kerdjakan. Pembagian pekerdjaan harus diadakan, dan harus diketahui bahwa pembangunan dan perdjuangan adalah satu dan sangat pentingnja. Harapannja ialah, agar supaja hasil pekerdjaan kongres ini akan sanggup membawa Rakjat dan negara kealam bahagia raya.

Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin, menundjukkan, bahwa pernjataan negeri ada „dalam keadaan bahaja" tepat sekali, karena bahaja jang mengantjam negara telah berada ditengah - tengah kita. Diserukan, supaja revolusi jang dimulai oleh Pemuda, seharusnja pula diselesaikan oleh Pemuda. Pemimpin dalam pemerintahan harus diganti dengan djiwa muda. Revolusi kita jang menggelora ini hanja dapat diselesaikan dengan djiwa muda dan tidak dengan djiwa kakek-kakek jang hanja pandai main tjatut dan main korupsi sadja. Untuk menjehatkan pemerintahan kita, diandjurkannja supaja Pemuda menjerbu dikalangan pemerintahan.

Pengumpulan uang pertama untuk „Pindjaman Nasional"

Dalam Kongres ke II itu, dengan serentak dan setjara spontaan sekali telah dapat dikumpulkan antara hadirin uang sebanjak Rp. 15.000 (lima belas rubu rupiah-Djepang) untuk diserahkan sebagai „Pindjaman Nasional" jang diadakan oleh pihaknja pemerintah. Inilah merupakan pengumpulan uang pertama oleh Pemuda Indonesia untuk keperluan „Pindjaman Nasional", dalam mana mereka kemudian sesuai dengan putusannja pemerintah, membantu pekerdjaan pemerintah untuk menjehatkan peredaran uang negara.

Rapat Raksasa Pemuda

Sebagai penutup Kongres pada tanggal 9 Djuni 1946 diadakan rapat raksasa Pemuda di Aloon-Aloon Lor Jogjakarta, dengan dihadiri oleh puluhan ribu rakjat dari segala lapisan masjarakat dan pelbagai golongan penduduk.

Dalam rapat raksasa itu dibentangkan putusan putusan Kongres ke II (jang dibatjakan oleh Penulis Umum Badan Pekerdja Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, Bb Kaslan), demikian pula dibatjakan resolusi Kongres dalam bahasa Indonesia, Inggeris, Perantjis, Djerman, Arab dan Urdu jang antaranja dibatjakan oleh Maroeto Darusman dan Sumijati.

Putusan - putusan Kongres

I. Pimpinan / Bentuk Organisasi.
Bentuk organisasi: tetap Presidium dan Badan Pekerdja.
Susunannja:

Dewan Pimpinan Pusat Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia:

SOEPARDO — Pemimpin Umum.
A. BOECHARI — Wakil Pemimpin Umum I.
SOEPENO — Wakil Pemimpin Umum II.
WARSONO — Penulis.

Badan Pekerdja Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia:

SOEMARSONO — Pemimpin Umum.
Bb. KASLAN — Penulis I.
SOEPARDI — Penulis II.

Tambahan:

a. menjediakan 2 orang kandidat untuk duduk dalam Dewan Pertahanan Negara, jalah:
1. Soemarsono dan 2 Soepardo.
b. nama Dewan Pekerdja Perdjuangan (D.P.Pr) Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, dengan resmi diganti dengan Badan Pekerdja Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia.

II. Politik Luar Negeri.

Kongres memutuskan sikapnja berkenaan dengan „politik luar negeri" tersebut dibawah ini:

1. Menjelenggarakan hubungan dengan Organisasi-organisasi Pemuda diluar Negeri untuk memperkuat Kedaulatan Negara Indonesia:
   a. mengirimkan delegasi-delegasi.
   b. mengadakan pidato-pidato radio.
   c. surat-menjurat.
   d. mengundang pemimpin-pemimpin pemuda luar negeri ke Indonesia.
2. Mendesak supaja Pemerintah Republik Indonesia bertindak tegas terhadap Belanda, sesuai dengan tindakan Belanda terhadap kita.
3. Kongres Pemuda Indonesia ini memperkuat resolusi Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia tanggal 25 April dan Gabungan Panitya penentang pemetjahan Indonesia:
   a. Pemuda Indonesia tetap menuntut pengakuan kemerdekaan Negara kesatuan Republik Indonesia 100% sekarang djuga.
   b. Pemuda Indonesia sanggup dan siap sedia mengerahkan segenap kekuatannja untuk menghadapi segala matjam kemungkinan guna mempertahankan Republik Indonesia sampai achir zaman.

c. Pemuda Indonesia jakin sepenuh-penuhnja bahwa Pemerintah tak akan bertentangan dengan 5 pasal Politik Programnja, istimewa jang mengenai Kemerdekaan Indonesia bulat 100%.

III. Mengambil resolusi sebagai berikut:

1. Pemuda Indonesia jang mempertahankan kemerdekaan Negaranja berdasarkan atas kejakinan akan hak „selfdetermination" itu, sekarang menderita serangan-serangan militer setjara besar-besaran dan ganas terhadap Negara dan Bangsa Indonesia jang dilakukan oleh pihak Belanda jang hendak mendjadjah Indonesia kembali.
2. Pemuda Indonesia jang tjinta perdamaian dan senantiasa berusaha mendjaganja, sekarang ini terpaksa mempertahankan diri mati-matian dan telah banjak jang mendjadi korban.
3. Oleh karena itu Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, satu organisasi Pemuda jang meliputi seluruh Pemuda Indonesia, menjerukan kepada segenap bangsa didunia terutama kepada para Pemudanja jang progressief, agar bersama-sama dapat mewudjudkan tjita-tjita „selfdetermination" bagi tiap-tiap bangsa, demokrasi dan perdamaian dunia.

IV. Politik Dalam Negeri.

Dan berkenaan dengan keadaan dalam negeri, maka Kongres Pemuda Indonesia ke II memutuskan apa jang dipaparkan dibawah ini sebagai „politiknja dalam negeri".

Tuntutan:

A. **Politik.**

I. Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia mempunjai wakil didalam Dewan Pertahanan Negara dan Dewan Pertahanan Daerah.

II. Menguatkan Resolusi Angkatan Muda Djawatan di Purwokerto tgl. 29 - 30 Mei 1946: Segenap „Angkatan Muda Djawatan", jalah Angkatan Muda Pembangunan Republik Indonesia (AMPRI), Angkatan Muda Kereta Api (AMKA), Angkatan Muda Kehutanan (AMK), Angkatan Muda Listrik dan Gas (AML & G) dan Angkatan Muda Pos,Telegrap dan telepon (AMPTT) seluruh Indonesia pada konperensinja di Purwokerto tanggal 29 - 30 Mei 1946, mengingat dan menimbang kepentingan kedudukan dan arti djawatan bagi dan dalam susunan Negara dimasa Perdjuangan Pembangunan, terutama dimasa segenting ini, hendaknja ada stabilisasi dari Pemerintah dan berputar lantjarlah roda djawatan mengusulkan kepada Pemerintah:

1. Adanja Dewan Pimpinan dan djawatan.
2. Penambahan tenaga Muda dan tenaga jang berdjiwa muda dalam Pimpinan djawatan Pusat atau Daerah, jang ikut bertanggung djawab.
3. Mengusulkan tjara bekerdja dan sifat djawatan sesuai dengan waktu dan keadaan.

Selain dari usul-usul tersebut diatas menjatakan:

Sanggup menjusun dan mengerahkan tenaga Angkatan Muda Djawatan untuk menghadapi segala kemungkinan dengan konsekwensinja dalam masa segenting ini.

III. Mobilisasi Umum.

IV. Mengulangi Tuntutan keharusan keperadjuritan.

V. Pembaharuan K.N.I. dan Badan Pekerdja.

VI. Memperhebat penerangan dan pendjelasan tentang arti kemerdekaan 100%.

B. **Ekonomi:**

Segera didjalankan Undang-Undang Dasar pasal 33.

C. **Sosial :**

Memberi perlindungan kepada korban-korban perdjuangan.

V. Perintah bersama kepada seluruh Pemuda Indonesia.

Oleh Kongres Pemuda Indonesia ke II disampaikan perintah bersama tersebut dibawah ini kepada seluruh Pemuda Indonesia :

Perintah I.

a. Dimana „Negara kita dalam keadaan bahaja", dimana pula Nica njata njata hendak memperkosa kemerdekaan kita dengan kekuatan militernja, Lasjkar kita dengan sendirinja harus kuat, baik TNI nja baik Lasjkar Rakjatnja, maupun segenap Lasjkar Pemudanja.

Kuat artinja :

1. Djumlah anggauta Lasjkarnja tjukup.
2. Anggauta Lasjkar berani, bersemangat dan berdisiplin (karena keinsjafannja, ideologi).
3. Organisasinja teratur rapi : Barisan Penggempur, Barisan pengantar makanan. Barisan Palang Merah dan barisan lain-lainnja teratur kerdjanja.

b. Dimana belum ada : susunlah Lasjkarmu. Ini berlaku bagi perhimpunanperhimpunan pemuda ataupun tempat (kantor), perusahaan dimana belum tersusun sesuatu Lasjkar. Lasjkar jang kita butuhkan itu tidak perlu merupakan standleger (Lasjkar Tetap), tjukup djikalau ditempat itu ada organisasi kelasjkaran, dan dimana perlu organisasi tersebut dapat mengerahkan segenap anggautanja untuk kepentingan pembelaan negara.

c. Setiap tenaga muda jang sehat wadjib berlatih militer. Ini sesuai dengan tuntutan kita akan keharusan keperadjuritan (burger-dienstplicht) dan sesuai pula dengan prinsip kita, bahwa perdjuangan sekarang ini harus merupakan perdjuangan seluruh Rakjat (volksstrijd). Langkah ini tidak perlu menghambat atau mengurangi usaha ataupun pekerdjaan dilain lapangan, djika segala sesuatu itu berdjalan teratur dan rapi.

Tambahan :

Atas permintaan P.P.I., supaja pemudi didalam hal tersebut diatas mengambil bagian aktip dalam lapangan P.P.P.K., Barisan Palang Merah, Dapur-umum dan lain sebagainja jang sesuai dengan kesusilaan Wanita Indonesia.

Perintah II.

Supaja segenap kekuatan jang ada pada kita dikordinasi (dipersatukan) dengan menjingkirkan nafsu golongan, persatuan kita harus dipererat dan diperkuat untuk dapat merupakan satu front jang kuat dalam menangkis serangan-serangan dari pihak pendjadjah. Nica telah meradjalela didalam rumah kita dan hanja persatuanlah jang achirnja dapat mengusir mereka itu.

Perintah III.

Penghambat dan perintang perdjuangan kita bersama terhitung :

a. pemetjahan persatuan (pengatjau).
b. perbuatan mata-mata.
c. penimbun barang-barang jang amat dibutuhkan untuk perdjuangan.
d. korupsi (mentjatut untuk kepentingan seorang diri).
e. anarcho-syndikalisme (buruh jang menguasai dan menghendaki perusahaan kepunjaan Republik Indonesia dan jang achirnja hatsil perusahaannja itu semata-mata digunakan untuk keuntungannja buruh ditempatnja itu sendiri).

Perintah IV.

Pemerintah kita harus dynamis dan revolusioner untuk dapat memimpin revolusi nasional dan sosial kita. Sesuai dengan tuntutan kita supaja sleutel-posities (djabatan-djabatan pemerintah jang penting) diisi dengan mereka jang berdjiwa muda dan revolusioner itu, maka pemuda harus dapat menjiapkan tenaganja guna tuntutan tersebut diatas, Bureaukrasi dan kelambatan bekerdja harus dihapuskan. Pemuda harus dapat mengisi pemerintahan dengan djiwa muda, djiwa revolusioner dan djiwa jang sesuai dengan kehendak rakjat banjak.

Perintah V.

Didalam revolusi kita makin lama makin menggeletar ini, Pemerintahlah jang seharusnja mendjadi satu-satunja kapten jang memegang kemudi revolusi nasional dan sosial kita itu. Pemerintahlah jang harus mendjadi sentral kekuatan kita, dan Pemerintah jang harus dapat mewudjudkan kekuatan nasional kita itu. Dan pemerintah kita itu dapat kuat, kokoh dan berdjalan dengan pesat djikalau segenap kekuatan jang ada pada masjarakat kita berdiri dibelakang Pemerintah, patuh dan taat pada Pemerintah untuk menjelesaikan revolusi kita ini. Revolusi kita bisa diselesaikan dengan baik dan pesat, djikalau segenap tenaga kekuatan jang ada pada masjarakat kita dipersatukan dan dipimpin oleh satu komando. Rakjat dan Pemerintah harus merupakan satu kekuatan baik keluar maupun kedalam, terlebih-lebih keluar dimana rakjat dan Pemerintah kita njata-njata menghadapi marabahaja jang satu, Pemerintah kita harus memimpin revolusi nasional dan sosial kita setjara aktif dan tegas dan rakjat seluruh patut dan wadjib patuh dan taat terhadap Pemerintah jang memimpin revolusi itu.

Peraturan Dewan Pimpinan Pemuda.

VI. Achirnja Kongres menentukan „Peraturan Dewan Pimpinan Pemuda" didaerah-daerah sebagai berikut :

I. Dewan Pimpinan Pemuda disusun oleh perhimpunan-perhimpunan pemuda jang ada didaerah kediamannja masing-masing. Selain dari pada anggauta Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, djuga perhimpunan-perhimpunan pemuda lainnja diperkenankan pula masuk mendjadi anggauta Dewan Pimpinan Pemuda ini.

II. Dewan Pimpinan Pemuda ini diberi nama singkat :

D.P.P. dengan dibelakangnja dibubuhi nama tempat kediamannja seperti :
D. P. P. Keresidenan ....
D. P. P. Kabupaten ....
D. P. P. Kawedanan .... dan seterusnja.

III. D. P. P. dipimpin oleh satu dewan, dimana duduk wakil-wakil perhimpunan pemuda jang tergabung didalamnja. Dewan ini membentuk pengurus harian jang mendjalankan semua putusan dan pekerdjaan sehari-hari dari D. P. P. Pengurus Harian jang merupakan Badan Pekerdja D. P. P.

IV. D. P. P. mengadakan sidang tiap kali dianggap perlu, tetapi sedikit-dikitnja 1 × sebulan untuk merundingkan segala langkah jang hendak didjalankan dan untuk mendengarkan lapuran-lapuran Badan Pekerdjanja.

Masing-masing anggauta didalam sidang tersebut mempunjai 1 suara. Keputusan diambil dengan suara sedikit-dikitnja 2/3 dari djumlah anggauta jang hadir.

V. Seluruh D. P. P. berpusat di D. P. P. P. I. melalui susunan daerah.

VI. Dewan Pimpinan Pemuda mempunjai seorang Ketua-Wakil Ketua,

Penulis, dan Badan Pekerdjanja terdiri dari bagian-bagian :

a. Pimpinan Umum : Memimpin dan mengawasi segenap pekerdjaan D. P. P.
b. Sekretariat : Mengurus baik djalannja organisasi, surat menjurat, keuangan, keanggautaan dan sebagainja.
c. Pertahanan: Menjelenggarakan pertahanan bersama, pendjagaan bersama, latihan bersama dan sebagainja. Djuga mengurusi hal kebutuhan anggauta tentaranja (persendjataan, makanan, pakaian).
d. Penerangan : Mengadakan pendidikan dan penerangan kepada seluruh pemuda dan rakjat. Membuat poster-poster, siaran, tulisan-tulisan dan lain sebagainja.
e. Penghubung : Mendjaga dan mengawasi eratnja hubungannja organisasi pemuda satu dengan jang lainnja. Menghubungkan pemuda dengan rakjat, pemuda dengan pemerintah dan lain-lain dan mengawasi langkah-langkah pemuda.

Masing-masing bagian tersebut mempunjai susunan pengurusnja sendiri dan ini jang merupakan Staf Badan Pekerdja D. P. P.

VII. Keuangan D. P. P. didapat dari iuran, sokongan dan lain-lain usaha jang sah.

VIII. D. P. P. berkewadjiban menjelenggarakan segala sesuatu jang berkenaan dengan perdjuangan dan pembangunan, baik jang mengenai politik, ekonomi dan sosial.

D. P. P. berusaha :

I. Perdjuangan :

a. sehingga semangat Pemuda dan Rakjat tetap bergelora.
b. sehingga tiap pemuda dan rakjat dapat mempergunakan segenap alat sendjata dan mendapat latihan pertempuran jang baik.
c. sehingga semua barisan-barisan rakjat dari segala golongan dan aliran tergabung dalam satu pimpinan perdjuangan.
d. sehingga tiap kampung, desa, kota merupakan pertahanan jang kuat.
e. mendapatkan/membuat sendjata guna lasjkar pemuda dan lasjkar-lasjkar rakjat lainnja.
f. menjediakan makanan buat barisan-barisan jang bertempur.
g. mengurus pengungsian dan korban-korban perdjuangan.
h. menjelenggarakan hiburan bagi para pahlawan.
i. mengurus pengerahan tenaga guna Pemerintah djika Pemerintah memerlukan hal ini.
j. mengurus baiknja djalannja mobilisasi djikalau oleh Pemerintah diperintahkan akan hal ini.

II. Pembangunan :

a. sehingga tiap pemuda dan rakjat Indonesia dapat membatja menulis.
b. sehingga tiap pemuda rakjat Indonesia insjaf akan arti kemerdekaan dan kedaulatan rakjat.
c. sehingga pemuda dan rakjat seluruhnja berwatak giat bekerdja membangunkan Negaranja, kota/desa dan kampungnja.

IX. Maksudnja D. P. P. ialah mempersatukan segenap tenaga Pemuda guna menjelesaikan segala sesuatu jang dapat dikerdjakan bersama oleh pemuda seluruhnja menudju ketjita-tjitanja. Tudjuannja ialah menegakkan, mempertahankan dan menjempurnakan Republik Indonesia. Perdjuangannja bersifat revolusioner.

*

Pertemuan Besar Pemuda pelbagai bangsa dan golongan.

Atas usaha Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia di Jogjakarta pada tanggal 3 - 6 bulan Oktober 1946 diadakan pertemuan antara pemuda pelbagai bangsa dan golongan.

Resepsi pertemuan besar tersebut berlangsung pada tanggal 6 - 10 pagi bertempat diruangan Hotel Merdeka. Hadir dalam resepsi tersebut Presiden, Panglima Besar Sudirman dengan Stafnja, Gubernur Sulawesi dan Sunda Ketjil, Wakil S. P. Sultan, Residen Kedu, wakil-wakil Kementerian, wakil-wakil partai-partai dan badan-badan.

Supeno selaku pemimpin pertemuan, dalam pidato pembukaannja menjatakan, bahwa maksud konperensi ini jalah untuk mempererat tali persaudaraan lahir dan batin antara pemuda-pemuda berbagai bangsa.

Dikatakan, bahwa tahun kedua ini haruslah mendjadi tahun kemenangan, sedangkan pemuda-pemuda harus memegang lagi revolusi.

Menteri Negara Wikana dalam pidato sambutannja berkata, bahwa di dunia ini harus diadakan rasa persaudaraan dan perdamaian antara satu negeri dengan lainnja. Kemerdekaan Indonesia adalah satu sumbangsih kepada perdamaian dunia.

Drs. Maruto Darusman menguraikan tentang perdjuangan pemuda di luar negeri. Dikatakan, bahwa keadaan negeri tentu tidak dapat lepas dari keadaan-keadaan internasional. Perdjuangan pemuda luar negeri jalah, mempertahankan perdamaian dunia, membasmi sisa-sisa fascisme, membrantas golongan jang hendak mendjadjah, mendesak kepada pemerintah masing-masing supaja pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi terdjamin haknja dalam masjarakat. Kesimpulannja jalah semua tjita-tjita jang termaktub dalam Piagam Perdamaian dan Piagam Atlantik terlaksana.

Buchari dari Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia menjatakan bahwa tiap-tiap sedjarah negara dimulai dan diachiri dengan pemberontakan. Pemuda Indonesia tidak memungkiri sedjarah. Pemuda Indonesia dengan persatuan jang erat akan memerangi sendjata kapitalisme dan imperialisme. Gerakan tentara Belanda setjara besar-besaran menundjukkan bahwa mereka berhadapan dengan pemuda Indonesia bukan berhadapan dengan golongan jang ketjil. Dengan persatuan kita akan membrantas segala rintangan kemerdekaan.

Presiden Soekarno dalam kata sambutannja menjatakan, bahwa kita berdiri atas perikemanusiaan. Kita bangsa jang mula-mula jang hendak mendirikan sosial demokrasi di Asia ini, kita ingin bekerdja dengan segala bangsa. Achirnja beliau menegaskan, bahwa djika soal Indonesia tidak selesai dalam bulan Nopember, revolusi akan terdjadi di-negeri Belanda.

Tonny Wen selaku wakil golongan Tionghoa mengatakan, bahwa pemuda Indonesia dalam memperdjuangkan kemerdekaan jang sangat hebat tidak lupa untuk mengeratkan tali persaudaraannja dengan lain-lain bangsa. Pemuda Tionghoa mendjundjung tinggi pengadjaran Dr. Sun Yat Sen dalam bukunja San Min Chu I. Pemuda Tionghoa akan mendjundjung perdjuangan Pemuda Indonesia, djuga lain-lain bangsa jang sedang menuntut kemerdekaan. Pendirian Tionghoa menuntut hak kemerdekaan bangsa sedunia.

Giskenchan wakil dari golongan India menjerukan supaja semua bangsa-bangsa bersatu untuk kemerdekaan segala bangsa. India dan Indonesia akan berusaha menjambungkan hubungan jang telah diputuskan oleh imperialis. Ia menjatakan, bahwa Nehru sudah sedia mengakui kemerdekaan Indonesia.

Tentang beras Indonesia ke India sudah selamat diterima. Dunia Internasional menghargai kesutjian hati bangsa Indonesia. Pemuda-pemuda India sangggup membantu perdjuangan pemuda Indonesia.

Estrada dalam sambutannja selaku wakil pemuda Pilipina menjatakan bahwa pemuda - pemuda Indonesia bukan extremisten dan terroristen seperti apa jang dikatakan oleh pihak Nica. Pemuda-pemuda Indonesia siap sedia bekerdja bersama dan bahu-membahu dengan lain-lain bangsa. Perasaan persaudaraan terhadap bangsa lain ada pada pemuda-pemuda Indonesia.

Kamaruddin bin Abd. Rahim wakil pemuda Malaya dengan pendek mengatakan bahwa semua kesalahan jang dilakukan oleh kaum imperialis akan kita adjukan kehadapan pengadilan dunia demokrasi. Selama kuntji Timur masih ditangan kaum imperialis, Malaya dan Indonesia tidak dapat berhubungan. Kita akan bersatu untuk merebut kuntji Timur itu supaja kita bersama-sama dapat merasakan kenikmatan jang ada pada tanah air kita.

Warsita atas nama warga negara baru, menjatakan kesanggupan memadjukan diri disegala lapangan dalam menegakkan dan membela tanah air Republik Indonesia.

Sebagai pembitjara terachir, Saudara Hadi jang mewakili golongan Arab berkata, bahwa ia tidak mewakili orang-orang Arab diluar Indonesia. Tentang soal minoritet itu adalah peninggalan dari sipendjadjah. Diharap supaja soal ini dapat dipetjahkan dalam konperensi. Pemuda-pemuda harus membawa dan menuntun golongan pemuda Arab dalam menjelesaikan revolusi kita ini.

Setelah itu, resepsi kemudian diachiri pada djam 12.45.

Putusan - putusan.

Memutuskan : Berdirinja contact-lichaam (badan perikatan) dimana duduk wakil-wakil dari pemuda-pemuda : Tionghoa, India, Pilipina, Malaya, warga negara Indonesia golongan Arab, warga negara Indonesia peranakan Belanda dan Indonesia.

Badan perikatan tersebut diberi nama : Ikatan Pemuda Pelbagai Bangsa dan Golongan.

Maksud dari pendirian badan ini jalah :

1. Mengadakan persatuan (front) untuk menentang pendjadjah.
2. Membantu tegaknja Republik Indonesia keluar dan kedalam.
3. Mempererat hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa dan golongan.

Usahanja : Memperdalam keinsjafan golongan dan bangsa-bangsa akan maksud tersebut diatas disertai pengerahan bantuan dipelbagai lapangan.

Usaha-usaha selandjutnja akan disusun lebih landjut dan diumumkan oleh sekretariat.

Sekretariat berkedudukan untuk sementara waktu di Gondolaju No. 5 (D. P. P. R. I.) Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia di Jogjaka.rta

Didaerah-daerah dimana perlu akan diadakan pula badan perikatan serupa itu.

* *
*

3. PERLAWANAN GERILJA

TANGGAL 19 Desember 1948 hari beriwajat bagi Republik. Pada hari itu kira-kira djam 05.15 telah mulai kedengaran deru pesawat terbang diatas Ibu Kota Jogjakarta ; pada mulanja suara tersebut ta' begitu terang, akan tetapi makin lama makin terdengar dengan djelas karena dari banjaknja pesawat terbang.

Sebagian pesawat-pesawat jang ada diatas kota mulai menembaki dan mendjatuhkan granat-granat, jang didjatuhkan dibeberapa tempat. Tempat-tempat jang mendjadi sasaran mendapat kerusakan. Disebelah Timur diatas lapangan Maguwo pun mulai terdengar tembakan-tembakan ramai, lebih hebat dari pada dikota. Bombardement serta mitralement dilakukan setjara kedjam oleh pesawat-pesawat musuh di Maguwo dan sekitarnja Parachute pertama jang diturunkan disebelah Barat kota, terdapat hanja boneka sadja.

Umum sudah mulai bimbang, takut dan bingung apa jang terdjadi sesungguhnja.

„Latihan" atau „musuh menjerang". Setelah tembakan makin menghebat, bom-bom banjak jang didjatuhkan, dan sebelah Timur kira-kira diatas Maguwo terlihat banjak tentara pajung jang didjatuhkan dari atas, pun dengan adanja sementara korban-korban jang telah diangkut, baru diketahui dengan segala ketjemasan bahwa :

Belanda menjerang.
Perang mulai,

Pendaratan Belanda dilakukan dengan mendadak. Tidak dikira-kirakan sama sekali kalau pada hari Minggu itu — hari dimulainja latihan perang-perangan oleh Angkatan Perang kita — Belanda menjerang kita. Rakjat mendjadi kalut terkedjut atas kedjadian jang sangat tidak dikira-kirakan itu. Rakjat mendjadi bingung, mereka tidak tahu apa jang harus dikerdjakan. Pegawai-pegawai Pemerintah karena bingungnja, tidak memperhatikan lagi akan pekerdjaannja, hingga tidak sedikit jang tidak masuk kekantornja masing-masing. Karenanja, banjak instruksi jang telah direntjanakan oleh Djawatannja masing-masing, terhalang, tidak dapat dikerdjakan.

Lebih-lebih lagi para pengungsi jang berasal dari Djawa Barat, Banjumas, Pekalongan, Semarang. Surabaja dan lain-lainnja, bingung kemana mereka harus pergi, karena selalu dikedjar-kedjar oleh Belanda sadja. Bagi orang-orang jang telah memutuskan untuk mengungsi, berdujun-dujun mereka menudju keluar kota, besar-ketjil, tua-muda, anak-anak ketjil, tidak tahu kemana tempat jang ditudju. Tentara, Polisi dan alat-alat Negara lainnja kelihatan sibuk, untuk mendjalankan tugasnja. Akan tetapi berhubung dengan keadaan jang mendadak dan lebih - lebih ditambah dengan kekalutan Rakjat karena takut dan bingung pada waktu itu, pun pula mengingat waktu jang sangat sempit, boleh dikatakan tak dapat membawa hasil apa-apa guna melawan terhadap serangan

Belanda. Divisi Siliwangi jang memang mempunjai tugas untuk kembali ke Djawa Barat, seketika itu djuga mempersiapkan diri dan segera berangkat „Wingate" ke Djawa Barat, dengan tidak memperdulikan keadaan di Jogja.

Rentjana perlawanan terhadap serangan Belanda telah diputuskan oleh Putjuk Pimpinan Angkatan Perang kita ialah: **„Perlawanan gerilja sepandjang masa".**

Perlawanan setjara frontaal memang sengadja tidak diadakan. Hanja perlu diadakan dibeberapa tempat, guna menghambat belaka atas madjunja gerakan Belanda. Kita harus berperang dengan taktik gerilja pada waktu jang tidak terbatas sampai tjita-tjita kita tertjapai. Kita harus mempergunakan alat-alat jang ada pada kita, dengan kekajaan bumi tanah-air kita. Ditiap-tiap pelosok diseluruh kepulauan Indonesia harus kita adakan perlawanan, tiap-tiap pelosok kita djadikan medan pertempuran. Dimana ada Belanda, disitulah ada perlawanan kita.

Perlawanan di Maguwo dan di kota sangat menjedihkan. Pada waktu malam sebelum Belanda mendarat di Maguwo, anggauta-anggauta Angkatan Udara Republik Indonesia bekerdja malam sampai djam 02.00 karena pemberangkatan perwira-perwira kita jang harus dikirimkan ke Sumatera. Pada pagi harinja dalam keadaan jang sangat lelah mendapat serangan jang mendadak, praktis perlawanan di Maguwo sedikit sekali, hingga dengan demikian memudahkan bagi Belanda dalam mendaratkan tentara-pajungnja dan dapat dengan mudah merebut serta menduduki lapangan terbang Maguwo dalam keadaan baik.

Setelah Belanda dapat mendarat/menduduki Maguwo, dapat kita duga lebih dahulu, bahwa mereka akan meneruskan gerakannja menudju ke kota jang djaraknja 6 km dari Maguwo. Malang bagi kita dan untung bagi Belanda. Pada waktu itu kekuatan didalam kota tidak banjak. Kesatuan Brigade 10/Div. III jang sesungguhnja mempunjai tugas didaerah Jogjakarta, hanja tinggal kekuatan 2 (dua) Seksi didalam kota, terdiri dari satu Sie Dekking Stat Brigade dan satu Sie Dekking Staf Bataljon IV Brig. 10/III jang ketinggalan, sedang lainnja berada diluar daerah Jogjakarta dan diluar kota jang djaraknja djauh, sedang perhubungan jang ada sudah terganggu (putus). Polisi Negara dan C.P.M. jang berada didalam kota kira-kira ada 3 (tiga) Kompi djumlah semuanja, dan ini taktis pada Komando Militer Kota Jogjakarta, guna mendjaga keamanan dan mengadakan perlawanan dalam kota. Dengan kekuatan 2 (dua) Sie dari Brigade 10/III mulai djam 07.15 telah diperintahkan untuk mengadakan gerakan penghambatan atas gerakan Belanda jang dari djurusan Maguwo ke kota. Kira-kira djam 09.00 pasukan tersebut dapat ditambah dengan kekuatan 2 (dua) peleton dari Akademi Militer. Dengan kekuatan tersebut jang praktis mempunjai frontbreedte 4 km, sudah barang tentu sangat sukar untuk mendjalankan tugasnja, akan tetapi karena maksudnja memang hanja untuk penghambatan atas gerakan Belanda jang menudju ke kota, guna memberi kesempatan jang sebanjak-banjaknja bagi pasukan jang berada didalam kota untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan segala sesuatu jang direntjanakan tjukup untuk kiranja melaksanakan usaha tersebut.

Gerakan Belanda dari Maguwo jang menudju ke kota dimulai dari pagi hari, kira-kira djam 14.45, baru dapat masuk kota sebelah Timur, gerakan mereka terus untuk menduduki kota seluruhnja. Gerakan mereka terdiri dari kumi-kumi jang banjak sekali jang telah mempunjai tugas tertentu guna menduduki tempat-tempat jang penting dan strategis, guna mengisoleer kota, agar pasukan-pasukan jang akan keluar dapat ditangkapnja.

Akibat keadaan jang keruh hampir semua orang akan memberi komando, hingga achirnja banjak komando jang bertentangan dan tidak ada hasilnja, bahkan lebih membingungkan atau mengeruhkan suasana.

Kira-kira pada djam 16.00 hari itu djuga Belanda baru dapat menduduki kota seluruhnja. Suara tembakan jang terus terdengar dimana-mana didalam kota, membuktikan bahwa perlawanan sekalipun ketjil masih tetap ada. Pasukan-pasukan kita sudah banjak jang keluar kota dengan tiada tudjuan jang tertentu, ada jang ke Selatan, ke Barat dan ke Utara, terpisah dari pimpinannja masing-masing. Keadaan ini sudah barang tentu menjulitkan bagi pimpinan pertempuran untuk memberi tugas. Ditambah dengan kesukaran-kesukaran mengenai perhubungan, hingga tidak diketahui dengan pasti dimana pasukan-pasukan berada. Berhubung keadaan-keadaan jang serba sulit pun pula memang kekuatan tidak begitu banjak, kesempatan jang baik pada waktu itu untuk mengadakan serangan pembalasan terhadap Belanda jang baru sadja menduduki kota, jang dalam keadaan masih pajah dan belum teratur serta belum mengenal medan dengan sefaham-fahamnja, terpaksa tidak dapat dilaksanakan.

Perlawanan harus tetap kita adakan dengan teratur, sesuai dengan rentjana perlawanan sepandjang masa.
Kepertjajaan rakjat di kota harus segera kita kembalikan dengan mengadakan serangan pembalasan.

Semuanja sulit kita laksanakan, akan tetapi harus kita kerdjakan.

Dengan kesukaran-kesukaran tersebut diatas maka hanja dengan satu djalan dapat kita laksanakan.

Pimpinan harus berdjalan berkeliling mentjari dimana pasukan berada, kemudian memberi tugas jang tertentu kepada mereka.

Mengumpulkan pasukan-pasukan jang tersebar dan menempatkan mereka ditempat jang baik untuk mengadakan perlawanan gerilja.

Menarik pasukan-pasukan dari beberapa tempat guna menambah kekuatan.

Tanggal 20 Desember 1948 usaha tersebut mulai dikerdjakan, sekalipun berdjalan siang dan malam terpaksa memakan waktu 5 (lima) hari. Perdjalanan dimulai dari Selatan kota menudju ke Barat, terus ke Utara dan ke Timur hingga kembali lagi di Selatan. Dengan bantuan koerier jang telah dikirim terlebih dahulu, maka tidak begitu sukar mentjari pimpinan pasukan jang berada ditiap-tiap pendjuru. Pada umumnja pasukan jang telah keluar dari kota semua hanja berpangkalan ditepi kota tidak djauh dari kota.

Dengan usaha ini maka Daerah Perlawanan dapat dibagi mendjadi beberapa Sektor :

Sektor Selatan.
Sektor Tenggara,
Sektor Barat,
Sektor Utara, dan
Sektor Timur.

Tiap-tiap sektor mempunjai batas jang telah ditentukan dan ditundjuk pula pimpinannja dengan diberi tugas :

1. mengumpulkan kesatuan-kesatuan jang terpentjar didaerah Sektornja dan memegang pimpinan terhadapnja.
2. mengadakan perlawanan/serangan gerilja terhadap pos-pos Belanda didalam kota.
3. mempersiapkan diri untuk mengadakan serangan balasan.

Setelah selesai perdjalanan keliling jang memakan waktu lima hari, dapat diketahui kekuatan kita jang berada disekitar kota, kurang lebih ada satu Bataljon, sedang pasukan jang masih tersebar didaerah perbatasan Daerah Jogjakarta kira-kira satu Bataljon.

Setelah diketahui dengan mata kepala sendiri djumlah kekuatan, barulah dapat ditentukan apa jang akan dikerdjakan mengenai perlawanan terhadap Belanda.

Ibu Kota djatuh ditangan Belanda pada waktu jang sangat mendadak dan waktu jang pendek sekali. Hal ini pasti mempengaruhi Rakjat pada chususnja dan perdjuangan kemerdekaan pada umumnja. Kepertjajaan Rakjat di Jogja dan diluar Jogja pasti mendjadi kurang, T.N.I. dituduh tidak mampu membela kemerdekaan, tidak mampu memperlindungi Rakjat.

Betapakah sedihnja pimpinan pada waktu itu djika memikirkan hal tersebut diatas. Kurangnja kepertjajaan rakjat berarti kurangnja bantuan dari pada rakjat. TNI adalah Tentara Rakjat, berdjuang untuk rakjat dan berasal dari rakjat. Dengan tiada bantuan daripada rakjat, TNI akan kandas dalam melakukan tugasnja.

Berkat keinsjafan dari pada anak-buah, sekalipun mereka belum mendapat perintah, dengan inisiatip sendiri mereka mengadakan serangan-serangan gerilja terhadap pos-pos Belanda, dengan tidak ada putusnja, hingga Belanda merasa tidak aman. Serangan tidak hanja diadakan dari salah satu djurusan sadja. Dari Utara, Barat, Timur dan Selatan terus aktip diadakan serangan gerilja.

Setelah perdjalanan keliling selesai dan ada hubungannja jang agak baik antara sektor-sektor dengan pimpinan, dan setelah mengetahui kekuatannja, segera dikeluarkan perintah penjerangan pembalasan. Perintah dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 1948 dan harus dikerdjakan pada tanggal 30 Desember 1948.

Pada tanggal 28 Desember 1948 Belanda bergerak dari kota ke Barat dan terus ke Selatan menudju kekota Kabupaten Bantul. Dengan adanja gerakan ini dapat kita duga bahwa mereka dengan menduduki Bantul pasti akan mengadakan gerakan dari tempat tersebut menudju ke Utara (kekota) dengan dibantu gerakan dari kota. Kalau ini dilakukan sebelum hari penjerangan kita, rentjana kita semula pasti gagal, terutama bagi Sektor Selatan. Oleh karenanja perintah penjerangan kita adjukan sampai pada tanggal 29 Desember 1948. Perintah penjerangan pembalasan berisi :

1. mengadakan serangan malam.
2. menghantjurkan kekuatan musuh sebanjak-banjaknja.
3. merampas sendjata musuh sebanjak-banjaknja.
4. membumi-hanguskan tempat-tempat jang dianggap penting.

Serangan pembalasan dengan tudjuan jang penting, untuk mengembalikan kepertjajaan Rakjat pada TNI dan membantu moreel pada kawan-kawan dilain Daerah bahwa Jogja tetap dipertahankan.

Tanggal 29 Desember 1948 djam 18.00 pasukan-pasukan kita sudah bersedia dan bergerak ketempat pangkal penjerangannja masing-masing. Pada kurang lebih djam 19.00 semua telah sampai pada tempatnja, dan terus bergerak kesasarannja masing-masing. Penjerangan dilakukan dari segala djurusan: dari Selatan, Barat, Timur dan Utara. Ditiap-tiap djurusan pasukan dibagi mendjadi dua ; satu bagian jang ketjil untuk pantjingan guna menjerang pos-pos Belanda jang berada dipinggir kota, bagian lain jang besar terus masuk bergerak kedalam kota dengan melewati tjelah-tjelah pos-pos Belanda. Mereka mempunjai tugas untuk menghantjurkan musuh jang sedang beristirahat didalam kota dan mengadang didjalan-djalan kalau mereka mengirimkan bala-bantuan ketepi-tepi kota guna memperkuat pos - pos jang diserang. Djam 21.00 tembakan pertama dimulai oleh pasukan jang bergerak kedalam. Kita telah dapat menduduki tempatnja masing-masing. Disekitar kantor pos dan Setjodiningratan, Ngabean, Patuk, Pakuningratan, Sentul dan Pengok serta Gondokusuman telah ada pasukan-pasukan kita. Dimana ada tempat istirahat

Belanda, disitu pasukan kita bersedia untuk menjerang. Tembak-menembak ditepi kota makin sengit. Belanda menghamburkan pelurunja dengan tidak ada hentinja. Mungkin karena pos-posnja jang ada ditepi kota mendapat serangan, pasukan-pasukan Belanda jang berada didalam kota bersiap-siap, truck, tank, dan pantserwagen siap dihidupkan mesinnja. Pasukan infanterinja dengan berkendaraan truck dan dikawal tank dan pantserwagen keluar dari tangsi-tangsinja. Setelah mereka keluar dari pintu tangsinja, segera disambut oleh pasukan-pasukan kita jang memang telah menunggu disitu. Tembak-menembak mendjadi sengit, pasukan kita jang telah bersedia menjerbu tiap-tiap tangsi dari belakang segera menjerbu kedalam. Belanda menghamburkan pelurunja dengan tidak karuan sasarannja asal menembak, untuk menakut-nakuti kita.

Pertempuran terdjadi hingga djam 04.00 pagi. Tank2 musuh aktip didjalan-djalan dengan menghamburkan pelurunja; mereka bergerak leluasa karena tak ada perlawanan dari kita. Pasukan-pasukan kita mulai meninggalkan kota menudju ketempatnja masing-masing. Korban dari pihak Belanda banjak terdapat didjalan-djalan, beberapa truck dan carrier jang mendapat kerusakan terdapat pula didjalan-djalan.

Pasukan-pasukan kita jang dari Sektor Selatan pada kira-kira djam 07.00 baharu sampai 1 km dari tepi kota; mundurnja dipetjah-petjah dan telah ditetapkan tempat berkumpulnja. Pasukan Belanda jang bergerak pada tgl. 28 Desember 1948 dan menduduki Bantul dengan mengadakan omweg, pada tanggal 30 Desember 1948 bergerak ke Utara menudju ke kota. Pasukan tersebut berdjumpa dengan pasukan-pasukan kita dari Sektor Selatan jang baharu kembali dari menjerang ke kota. Pertempuran segera terdjadi hingga djam 13.00. Bala-bantuan Belanda dari kota datang dan pesawat terbangnja pun aktip. Pasukan-pasukan kita memetjahkan diri dan menghindarkan diri dari penghantjuran tersebut. Terpetjah-petjah mendjadi pasukan jang ketjil-ketjil dan bergerak ketempat jang telah ditentukan. Pasukan Belanda jang dari Selatan terus menudju ke kota dengan membawa korban-korban. Pada tanggal 1 Djanuari 1949 mendapat berita dari kota bahwa korban pihak Belanda pada waktu penjerangan kita tanggal 29 Desember 1948 banjak sekali. Rakjat di kota merasa sjukur kita masih dapat mengadakan serangan, dan berharap agar terus-menerus demikian. Dan pokoknja penjerangan membawa hasil apa jang kita maksudkan terutama : **kepertjajaan rakjat bertambah.** Hal ini penting bagi TNI, untuk melandjutkan perdjuangannja.

Diatas telah diterangkan, bahwa berhubung dengan keadaan alat-perlengkapan kita dalam menghadapi Belanda jang lebih lengkap dan modern, tidak mungkin kalau kita akan menghadapi Belanda dengan kekuatan militer berdasarkan taktik perlawanan frontaal sadja. Akan tetapi harus kita hadapi dengan perlawanan totaal jang harus dilaksanakan oleh rakjat seluruhnja, dengan mempergunakan sumber-sumber kekajaan jang ada pada kita.

Akibat dari djaman pendjadjahan Belanda kemudian diteruskan oleh fascis Djepang jang selalu memeras kekajaan Indonesia, pun pula akibat dari pada tindakan Belanda dalam memblokir perekonomian kita, maka dalam menghadapi agressi Belanda jang kedua itu keadaan keuangan Negara sangat menderita. Oleh karenanja dalam menghadapi agressi ini tidak dapat kita menentukan anggaran belandja untuk menghadapi Belanda.

Akan tetapi masih ada suatu sumber jang penting jang masih kita miliki untuk mendapatkan beaja dalam menghadapi Belanda ialah :

a. keinsjafan dan kekuatan Rakjat.

b. kekajaan bumi Tanah Air.

Untuk dapat mempergunakan sumber-sumber tersebut, maka tidak dapat hanja akan mengambil dan menerima begitu sadja, akan tetapi harus ada

organisasi jang teratur rapi hingga dapat mengumpulkan, dan mempergunakan hasil-hasil dari sumber tersebut.

Kita sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat, mendapat serangan dari negara lain dengan kekuatan militernja, jalah Belanda. Maka kita harus dapat tetap mempertahankan Pemerintahan kita disegala pelosok dikepulauan kita ini. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut diatas kita harus:

a. tetap mempertahankan kedaulatan Pemerintahan kita.
b. dapat mengumpulkan dan mempergunakan kekajaan jang ada pada kita.

Maka harus ada suatu Pemerintahan jang dapat membimbing rakjat untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda, mengumpulkan atau menghasilkan segala apa jang dibutuhkan untuk perlawanan terhadap Belanda.

Satu-satunja djalan untuk melaksanakan hal jang tersebut diatas adalah, terutama dalam keadaan katjau, dibentuknja „PEMERINTAHAN MILITER'.

Pembentukan Pemerintahan Militer.

Maksud dari pada pembentukan Pemerintahan Militer ialah terutama untuk mengusahakan agar ada suatu pemerintahan jang tegas jang dapat membantu kalangan militer dalam menghadapi Belanda. Sudah selajaknja dalam keadaan katjau harus diusahakan adanja satu pimpinan dan satu komando dalam soal pertahanan maupun pemerintahan, jang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

Dalam membentuk pemerintahan militer jang harus didjalankan di Negara kita, tidak mungkin dibentuk suatu diktator militer, artinja hanja militer sadjalah jang berkuasa dan bertanggung djawab, sebab faktor jang ada pada pihak militer belum memenuhi untuk mendjalankan adanja diktator militer. Hal ini sebelumnja telah difahami oleh Angkatan Perang Republik Indonesia (TNI), maka sebelumnja organisasi Angkatan Perang pun disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diatas, ialah dengan adanja organisasi territorial, KDM dan KODM dimasing-masing daerah, tak lain dan tak bukan organisasi territorial ini untuk mempersiapkan adanja pemerintahan militer bila keadaan memaksa. Dengan organisasi territorial itu, maka KDM atau KODM dapat menjampingi para Pamong Pradja, (pemerintahan sipil). Dalam keadaan biasa mereka sebagai djembatan untuk menghubungkan antara militer dan sipil, dan dalam pemerintahan militer mereka merupakan satu alat pemerintahan bersama-sama Pamong Pradja dalam mengemudikan pemerintahan militer dibawah instansi militer. Pihak Pamong Pradja tetap mendjalankan kekuasaan seperti sediakala, hanja bertanggung djawab pada instansi militer, dan segala sesuatu jang akan dikerdjakan harus berdasarkan kepentingan militer. Sistim Wedana Militer, Panewu Militer dan Lurah Militer tidak diadakan, adanja hanja Kepala Pemerintahan Militer menurut daerahnja masing-masing.

a. Daerah Kabupaten = Kepala Pemerintahan Militer Kabupaten (P.M.K.B.).
b. Daerah Kapanewon (Ketjamatan) = Kepala Pemerintahan Militer Ketjamatan (P. M. K. T.). Pemerintahan militer hanja sampai Kapanewon (Ketjamatan), dan jang mendjabat Kepala Pemerintah Militer adalah seorang militer (Komandan territorial).

Gerakan Pembersihan.

Pada hari pertama setelah Belanda menduduki Ibu-Kota, sudah barang tentu mereka merasa gembira dan berbesar hati, merasa mendapat kemenangan jang gilang-gemilang, karena dapat menduduki Ibu Kota, dengan hanja menghadapi sedikit perlawanan dari pada TNI dan Rakjat Indonesia. Dan mereka tentu mengira bahwa seterusnja akan begitu, karena mengira TNI sudah hantjur, takut untuk mengadakan perlawanan.

Akan tetapi setelah hari jang kedua, terlebih-lebih dengan adanja penjerangan pembalasan dari pihak TNI dan Rakjat Indonesia, barulah terasa kalau TNI dan rakjat tetap mengadakan perlawanan. Bukti ini didapat dengan mendengarkan utjapan - utjapan mereka sendiri, bahwa katanja merupakan neraka bagi mereka.

Gerilja kita tidak ada putusnja. Dari segala djurusan tiap-tiap detik ada serangan, pendek kata dimana sadja ada Belanda disitu ada perlawanan jang tidak ada henti-hentinja.

Untuk menghadapi gerakan kita (gerilja) ini, maka Belanda mengadakan pembersihan. Mula-mula pembersihan diadakan di kota: tiap-tiap kampung dibersihkan, semua orang laki-laki dikumpulkan, pemudanja ditahan, apalagi jang ditjurigai. Akan tetapi mereka tidak dapat menemukan dimana sarang para gerilja.

Kemudian pembersihan ditudjukan diluar kota, ialah ditepi-tepi kota. Dalam melakukan pembersihan ini mereka mempergunakan pasukan jang kuat dan bersendjatakan berat pula.

Kesimpulannja dalam mengadakan pembersihan itu ialah bahwa mereka tidak mempunjai suatu objek jang tertentu, mengingat gerakan mereka dalam pembersihan itu hanja membabi buta. Dimana-mana, desa-desa ditembaki dengan meriam dari pesawat udara, sampai djuga dipergunakan bom, pada hal disitu tidak ada TNI.

Akibat dari pada tindakan mereka itu rakjat banjak jang mendjadi korban. Rupa-rupanja mereka tidak bisa mendapat gegevens jang tepat mengenai kedudukan kita, sekalipun mereka menjebarkan mata-matanja jang tidak sedikit djumlahnja.

Akibat dari pada tindakan jang membabi buta itu, maka tiap-tiap gerakan pembersihan dapat dihindari oleh pasukan-pasukan kita dengan setjara berpindah-pindah dari tempat jang dibersihkan ketempat disampingnja jang tidak dibersihkan.

Pada tindakan pertama setelah mengadakan pembersihan, pasukan-pasukan Belanda kembali kekota. Dan karena hasilnja tidak memuaskan maka mereka mempergunakan taktik lain ialah: BENTENGSTELSEL.

Dengan menduduki beberapa kota ketjil diluar kota, maka maksudnja mereka akan mendjauhkan pasukan-pasukan kita jang didekat kota atau diantara kota dengan kota ketjil jang mereka duduki, dan seterusnja dari beberapa kota tersebut mereka dapat mengadakan pembersihan ke/dari segala djurusan bersama-sama dengan pasukan lainnja jang berdekatan.

Akan tetapi gerakan ini djuga tidak membawa hasil jang baik seperti jang mereka harapkan. Bahkan adanja taktik „bentengstelsel" itu lebih mengurangkan kechawatiran kita akan adanja pembersihan jang besar-besaran, berhubung kekuatan mereka telah terpetjah-petjah ; pun pula memudahkan bagi kita dalam mengadakan serangan gerilja, berhubung kekuatan mereka terpentjar mendjadi kekuatan jang ketjil-ketjil.

Sebelum Belanda mengadakan taktik „bentengstelsel", maka kedudukan pasukan kita ialah didalam kota dan paling djauh ditepi kota. Oleh karenanja kita dapat terus-menerus dengan tiada putusnja mengadakan serangan gerilja, jang dilakukan oleh pasukan kita setjara berganti-ganti. Serangan kita ditudjukan pada tiap-tiap pos dan tangsi Belanda. Dengan serangan gerilja jang terus menerus ini kita bermaksud untuk tidak memberi kesempatan pada Belanda untuk beristirahat, hingga lambat-laun mereka mendjadi lemah karenanja dan pada suatu saat diadakan serangan serentak oleh semua pasukan jang ada, jang mana maksudnja untuk menghantjurkan kekuatan musuh dan merebut perlengkapan seperlunja guna memperkuat diri.

Setelah Belanda mendjalankan taktik bentengstelsel, maka gerakan kita pusatkan pada pengadangan dan pemusatan perhubungan antara pasukan jang satu dengan jang lain, sedang gerakan gerilja pada tiap-tiap pos dan asrama Belanda tetap diadakan.

Serangan serentak jang ditudjukan pada pos Belanda jang tidak kuat ini membawa hasil jang baik sekali. Disini letak keuntungan kita atas taktik bentengstelsel dari Belanda. Kita dapat mengadakan pukulan pada pasukan Belanda jang tidak kuat, hingga dengan demikian kekuatan mereka berkurang, dan mereka jang bertugas di pos-pos diluar kota mendjadi takut.

Pengantongan pasukan di kota

Bentengstelsel dilakukan oleh Belanda. Beberapa tempat diluar kota diduduki Belanda, umpamanja Bantul, Barongan, Kota Gede, Padokan, Gamping, Bantar, Kaliurang dan lain-lain. Dengan didudukinja tempat-tempat tersebut, maka kekuatan jang tadinja dipusatkan di kota mendjadi kurang. Oleh karena itu timbul kesempatan jang baik bagi kita untuk memperhebat gerilja kita di kota, agar Belanda tidak sempat mendirikan pemerintahan didalam kota.

Perlawanan dalam kota ini dilakukan oleh pasukan-pasukan jang tetap tinggal didalam kota, pada waktu siang maupun malam. Mereka tetap tinggal ditengah-tengah lawan, mengantong dengan mengadakan perlawanan terus-menerus. Pada waktu malam mereka bergerak menjerang pos-pos Belanda didaerahnja masing-masing jang telah ditetapkan, dan pada waktu siang mereka beristirahat serta beberapa orang mengadakan gerakan perseorangan (individuele-actie) dengan mempergunakan dolk atau pistol terhadap Belanda jang berkeliaran disana-sini. Kota Jogja jang hanja 5 km pandjangnja dan 4 km lebarnja itu dapat mengantong pasukan-pasukan kita kurang lebih 3 (tiga) Kompi (600 orang) lengkap dengan sendjatanja dengan tidak ketahuan/kelihatan oleh musuh. Hal ini dapat terdjadi tak lain dan tak bukan karena bantuan Rakjat jang tetap akan memperlindungi TNI jang sedang bertugas berat. Dalam waktu itu betul-betul dapat kita rasakan jang TNI dapat hidup sebagai ikan dalam samudera dan dengan tenang dapat melakukan kewadjibannja.

Sekalipun Belanda telah menduduki beberapa tempat diluar kota, umpamanja Bantul, Barongan jang letaknja 12 km dari kota, akan tetapi keadaan ini tidak memaksakan kita untuk bersarang lebih dari 13 km dari kota, meskipun maksud Belanda sesungguhnja demikian dengan adanja bentengstelsel itu. Kita tetap bersarang tidak djauh dari kota, sekalipun tempat kita terkepung seolah-olah, dan dichawatiri akan adanja gerakan pembersihan Belanda dari segala djurusan. Kita jakin, sekalipun Belanda dapat bergerak dari Utara dan Selatan untuk mendjepit kita, akan tetapi kekuatan mereka tidak mungkin akan mentjukupi. Selama mereka tidak dapat menanam tentaranja tiap 5 m 1 orang diseluruh Daerah Jogja maka kita masih dapat menghindari gerakan mereka jang besar-besaran.

Disini dengan sengadja, tiap-tiap gerakan mereka jang setjara besar-besaran selalu kita hindari, artinja kota tidak diadakan perlawanan jang hebat, mengingat akan kewadjiban kita jang pokok, ialah mengadakan perlawanan sepandjang masa djadi harus menghemat. Dan kalau kita melajani tiap gerakan jang besar dari pihak musuh maka pada waktu jang pendek kita akan kehabisan amunisi. Dan memang taktik gerilja demikian: HILANG KALAU DISERANG, MUNTJUL KALAU MENJERANG.

Sistim pengantongan ini memang berat, terutama kita harus tabah. Akan tetapi sistim tersebut tetap dapat dilakukan oleh tentara kita, berdasarkan atas keinsjafan dalam melakukan kewadjiban, dan kejakinan jang setebal-tebalnja bahwa Belanda tidak mungkin akan berkuasa, apa lagi menang. Sebaliknja pada suatu saat kemenangan terachir pasti dipihak kita.

Serangan 1 Maret

Diatas telah diuraikan, bahwa tiap-tiap kali ada kesempatan jang baik untuk mengadakan serangan serentak, selalu hal jang demikian itu diadakan. Serangan serentak jang dilakukan oleh semua tenaga jang ada didaerah, jang ditudjukan pada tempat-tempat jang telah ditentukan, terutama pada Ibu Kota, bermaksud untuk :

a. menghantjurkan kedudukan musuh ;
b. menambah kekuatan dengan hasil penjerangan (sendjata, amunisi dan perlengkapan lainnja) ;
c. membantu moril kawan-kawan dilain Daerah, dengan tetap dipertahankannja Ibu Kota Republik Indonesia. Karena mau tidak mau mereka tetap melihat pada kedjadian-kedjadian di Ibu Kota.
d. membantu dan memperkuat perdjuangan diplomasi kita jang dilakukan oleh diplomat-diplomat kita.

Diantara beberapa penjerangan umum (S. O.) maka jang mendapat hasil jang sebaik-baiknja ialah penjerangan umum pada tanggal 1 Maret. Terutama kemenangan politisch. Karena dengan penjerangan itu segala propaganda Belanda jang mengatakan bahwa TNI telah hantjur, Jogja telah dikuasai seluruhnja, pemerintahan mereka sudah berdjalan dan lain sebagainja dapat diberantas seketika itu djuga, pun jang lebih memberi kepertjajaan : Negara jang bersimpati pada perdjuangan kita tentu tidak akan ragu-ragu lagi dalam memberi bantuan pada kita, dan Negara jang membantu Belanda tentu bimbang dan achirnja mengurangi kepertjajaannja terhadap Belanda.

Perlawanan gerilja kita tak lain dan tak bukan pendjelmaan dari pada gagalnja perdjuangan diplomasi, maka sekalipun diplomasi sudah gagal, gerilja tidak dapat dilepaskan dari pada diplomasi. Hal ini sangat kita rasakan setelah soal Indonesia-Belanda mendjadi pertjaturan dunia di PBB. Dalam keadaan waktu itu aktivitet kita harus kita tudjukan kearah memperkuat wakil kita di PBB, sehingga mereka merasa mempunjai backing jang kuat untuk tetap mempertahankan pendiriannja.

Pendudukan Belanda atas Wonosari

Wonosari adalah suatu daerah Kabupaten dari Jogjakarta. Keadaan tanahnja adalah pegunungan. Desa dan penduduknja sedikit. Penghasilannja sedikit pula. Maka Wonosari adalah daerah jang minus serta sangat kekurangan air, banjak penjakit terutama penjakit pes. Melihat keadaan tersebut diatas, sedikit sekali kemungkinannja untuk mendjadi sarang pasukan-pasukan Gerilja.

Setelah kita lakukan penjerangan 1 Maret, maka Belanda mengadakan gerakan setjara besar-besaran untuk menduduki Wonosari. Gerakan mereka itu lebih besar dari pada waktu mereka menjerang Jogja untuk pertama kalinja pada tanggal 19 Desember 1948. Dilihat dari besarnja gerakan itu, maka tentu ada kepentingan-kepentingan jang sangat besar bagi mereka. Gerakan jang mereka adakan, dengan mempergunakan 30 buah pesawat pengangkut, 10 pemburu dan pelempar bom, 1 bataljon Infanteri jang bergerak didarat, memberi dasar kepada kemungkinan bahwa :

1. mereka mengira bahwa Wonosari mendjadi sarang dari pada TNI jang telah menjerang pada tanggal 1 Maret 1949.
2. mereka mengira bahwa pimpinan Pemerintahan Angkatan Perang berkedudukan ditempat tersebut.
3. mereka mengira bahwa segala sumber kekajaan perdjuangan TNI ada ditempat tersebut.

Pendek kata, mereka menduga bahwa Wonosari adalah basis dari pada perlawanan gerilja.

Apa hasil dari gerakan itu? Dapat dikatakan NIHIL. Perlawanan pada waktu mereka mendarat tidak ada, karena memang tidak ada tentara jang ada disitu, ketjuali anggauta Territorial jang tidak bersendjata. Sekalipun demikian mereka mendjatuhkan berpuluh-puluh bom dan memuntahkan beribu-ribu peluru dari pesawat terbang dan dari pasukan infanterinja, untuk menembak dimana jang mereka kehendaki. Tiap-tiap kampung dan grumbulan-grumbulan jang isinja hanja rakjat, dihudjani peluru.

Setelah Wonosari dapat diduduki, mereka terus mengadakan patroli keseluruh pelosok digunung-gunung, untuk mentjari TNI, orang-orang pemerintahan dan persediaan kekajaan Negara Republik Indonesia. Akan tetapi kesemuanja itu tidak dapat mereka ketemukan, hingga achirnja mereka hanja mengambil milik-milik rakjat, dan merampok setjara besar-besaran didaerah Wonosari.

Djadi terang dan djelas, bahwa gerakan mereka itu tidak membawakan hasil, baik dilapangan politik maupun militer; malahan sebaliknja membawakan kerugian jang sebesar-besarnja, terutama dalam hal materi dan moril dari pada tentaranja.

* *
*

BAHAN-BAHAN GUNA MENJUSUN BAB-BAB :

I. Perkembangan politik.
   Sedjarah Pemerintahan Daerah.

II. Perundingan Indonesia - Belanda.

III. Perkembangan alat Keamanan Negara.
   antaranja diambil dari :

1. Berita Antara.
2. Harian Kedaulatan Rakjat Jogjakarta.
3. Harian Nasional Jogjakarta.
4. Harian Sinar Matahari Jogjakarta.
5. Buku Pedoman Pamong Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta.
6. Buku Sedjarah Pemerintahan Kotapradja Jogjakarta.
7. Buku Gerilja Wehrkreise III.
8. Buku Risalah Gerakan Pemuda.
9. Sdr. Kep. Studio R. R. I. Jogjakarta.
10. Sdr. D. D. Susanto Sekretaris II D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta.

* * *
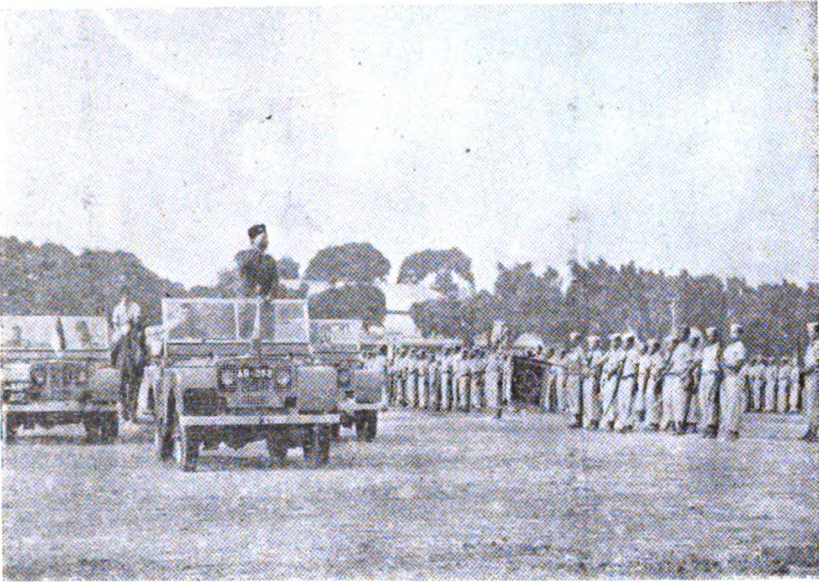
Presiden/Panglima Tertinggi memeriksa Barisan Kehormatan pada Hari Angkatan Perang ke-IV di Jogjakarta.

Sri Susuhunan Paku Buwono, Sri Sultan Hamengku Buwono, Sri Mangkunegoro dan Sri Paku Alam berpakaian seragam.

Devile tentara.

Barisan musik pada peringatan Hari Angkatan Perang ke - IV.

Tanggal 10 dan 11 Nopember 1945 buat pertama kalinja Kongres Pemuda diadakan di Jogjakarta. Pembukaan Kongres dihadiri oleh Presiden Soekarno, Sri Sultan dan Paku Alam VIII.

Presiden mengutjapkan amanat pada Kongres Pemuda di Jogjakarta.

Sisa - sisa bumi hangus.

Iring-iringan konvooi tentara pendudukan Belanda jang akan meninggalkan Jogjakarta.

Gerilja kita masuk kota dari segala djurusan.

Barisan Gerilja masuk kota.

Untuk mengatasi kesukaran uang ketjil, maka oleh Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta pada bulan Nopember 1948 telah dikeluarkan „surat tanda penerimaan uang" dengan harga Rp. 10.—, Rp. 5.— dan Rp. 2.50.
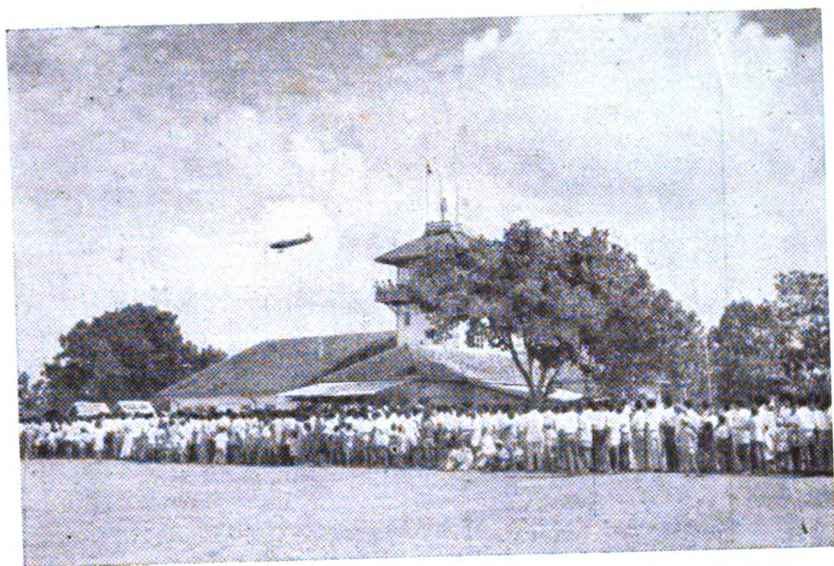
Lapangan terbang Adi Sutjipto penting sekali bagi perdjuangan bangsa kita.

Kepatihan adalah pusatnja pemerintahan Daerah Istimewa Jogjakarta. Dari Gedong Wilis ini Sri Sultan Hamengku Buwono sewaktu mendjadi Menteri Negara Kordinator Keamanan sedang memberikan perintah.
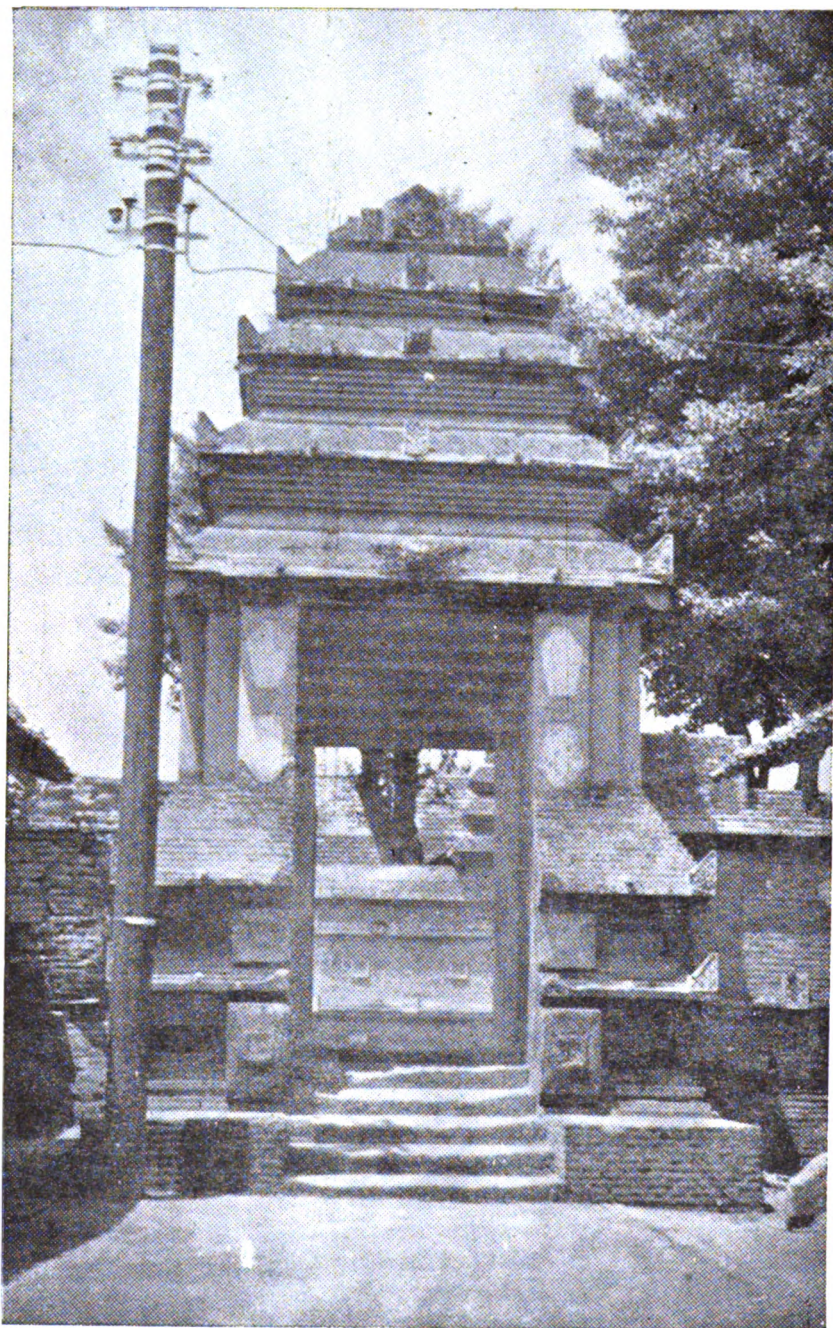
Pintu gerbang makam radja-radja di Kota Gede.

Makam Imogiri dimana Sultan Agung dan keturunannja dimakamkan. Pada waktu clash II disekitar pemandangan indah menarik ini, mendjadi tempat ribuan rakjat berlindung dan tempat penting untuk menentukan siasat perlawanan.

Kaliurang. Disalah satu kompleks dikota ini, waktu perintah clash ke II dilantjarkan oleh pihak Belanda, sedang berada wakil-wakil K. T. N. untuk mengadakan perundingan dengan Pemerintah Republik Indonesia.

BAB IV :
MEMBANGUN EKONOMI NASIONAL

1. KEADAAN UMUM

A. MEMELIHARA SENDI-SENDI EKONOMI PERDJUANGAN

SETELAH perang dunia ke-II selesai hampir semua negara menderita kerusakan atau kemerosotan dilapangan perekonomian. Tudjuan mereka sesudah itu umumnja membangun perekonomiannja masing-masing, jang akibat peperangan mengalami kemunduran.

Tetapi tidak demikian dengan negeri kita Indonesia ini. Setelah perang dunia ke-II selesai, kita belum segera dapat membangun negara kita di suatu lapangan apapun, bahkan waktu itu kita sedang memulai melakukan revolusi kemerdekaan, sebagai pelaksanaan tjita-tjita nasional jang telah terkandung berabad-abad.

Didalam revolusi itu sesungguhnja kita berhadapan dengan dua factor jang masing-masing mempunjai sifat bertentangan, jaitu disatu pihak kita bertindak merusak, akan tetapi dilain pihak kita berusaha untuk membangun.

Sesungguhnja didalam revolusi ini kita memang sengadja bertindak merusak. Jaitu merusak segala stelsel-stelsel pendjadjahan, baik dilapangan politik, ekonomi, sosial maupun kebudajaan. Dan kemudian dari reruntuhan kerusakan-kerusakan itu kita membangun baru segala-galanja atas dasar kemerdekaan nasional.

Tindakan-tindakan daripada revolusi nasional itu, dan akibat siasat perdjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan tanah-air, maka istilah merusak itu sekalipun tidak mendjadi azas gerakan kita, terpaksa kita lakukan terhadap object-object perekonomian dan bangunan-bangunan. Kita rusak segala apa jang kiranja dapat direbut dan dikuasai oleh musuh dan menguntungkan perdjuangan mereka.

Akan tetapi meskipun demikian, pada awal tahun revolusi, perdjuangan kita jang ada didaerah istimewa Jogjakarta sini tidak dan belum melakukan perbuatan perusakan apa-apa. Soal ini dapat dipahami, sebab Belanda pada waktu itu belum menduduki Kota Jogjakarta. Bahkan beberapa bulan kemudian (awal tahun 1946) setelah ternjata Kota Jogjakarta dipilih mendjadi ibu Kota sementara Republik Indonesia, dan kota ini mendjadi induk perdjuangan dalam mempertahankan kemerdekaannja, sudah barang tentu segala harta benda dan kekajaan jang ada, baik apa jang disebut milik Republik (milik sementara) jang kita rebut dari tangan Djepang, maupun milik rakjat (bangsa asing atau bangsa kita sendiri) a.l. jaitu gedung-gedung, bangunan-bangunan, perusahaan-perusahaan besar, pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan dan lain-lain, tetap kita pelihara baik-baik dan sebagian kita gunakan untuk bekal perdjuangan. Lebih dari itu kita bangunkan usaha-usaha lain jang kiranja dapat mentjukupi kebutuhan kita untuk alat dan bekal perdjuangan selandjutnja.

Perekonomian di Jogjakarta sebelum clash ke-II.

Sedjak tahun proklamasi kemerdekaan jaitu 1945, sampai achir tahun 1948 (datangnja clash ke-II) perkembangan ekonomi di Jogjakarta sedjalan dengan pasang surutnja gelombang perdjuangan, mengalami nasib timbul tenggelam jang tidak berketentuan.

Mula-mula segala persediaan bahan-bahan keperluan hidup dari barang-barang tekstil sampai bahan makan beras, gula, garam dan sebagainja jang disimpan digudang-gudang dan pabrik-pabrik jang dikuasai oleh Djepang, setelah dapat kita rebut dengan pertumpahan darah dan pertarohan djiwa, kemudian lalu dikumpulkan mendjadi satu oleh K.N.I. Daerah dan Tjabang-Tjabangnja. Seterusnja demi sedikit barang-barang tersebut dibagi kepada rakjat dengan melalui saluran kantor-kantor, badan - badan serta organisasi-organisasi, dan dari sini perputaran roda ekonomi mulai dapat bergerak untuk menarik napas, setelah mengalami tekanan jang berat dari stelsel ekonomi perang Djepang selama tiga setengah tahun. Dalam pada itu sistim distribusi bahan-bahan keperluan hidup untuk rakjat, jang biasanja disalurkan lewat organisasi-organisasi Rukun Kampung dan Kalurahan - Kalurahan berdjalan terus mewarisi tjara-tjara djaman Djepang.

Pada tahun 1946 tertjatatlah sebagai langkah dari sebagian penjusunan ekonomi baru dalam sedjarah keuangan Indonesia, jaitu dengan dikeluarkannja Uang kertas Republik Indonesia jang pertama, jang ringkasnja disebut uang O.R.I. – Uang tersebut dengan tjara-tjara jang sangat bersedjarah disahkan berlaku mulai tanggal 29 - 30 Nopember 1946 pada djam 24.00.

Sebelum terdjadi perubahan besar dalam sedjarah keuangan Indonesia maka selama itu kita telah mengalami dua djaman keuangan kolonial, ja'ni Uang Hindia Belanda dan uang Djepang. Didalam djaman pemerintahan Djepang itu Indonesia mulai mengalami inflasi jang hebat, sebab Djepang mentjetak uang kertas itu dengan semau-maunja tidak memakai tanggungan kekajaan suatu apa. Maka setelah detik sedjarah keuangan Indonesia ini mulai terbit jaitu pada tanggal tersebut diatas, kemudian uang Djepang itu mulai tidak laku. Uang kertas jang bergambar Gatotkatja (R. 10,—), Djanoko (R. 100.—) dan lain-lain gambar lagi tersebar berhamburan dimana-mana.

Beberapa djam sebelum uang Djepang itu mati, orang banjak berlomba-lomba membelandjakan uang jang sedang sekarat itu dengan harga jang tingginja luar biasa, umpamanja sadja satu piring nasi dibeli dengan harga R 50.– sampai R. 100.—, satu bungkus katjang dengan harga R. 25.— dan sebagainja, sedang esuk harinja uang kertas itu tinggal mendjadi mainan anak-anak.

Dengan keluarnja uang ORI pertama itu, pemerintah memberi modal kepada rakjat segala lapisan, baik kaja maupun miskin, pegawai negeri jang berpangkat tinggi maupun rendah, pedagang maupun buruh, setiap djiwa samarata satu rupiah (R. 1,—) dan setiap kepala keluarga ditambah 3 sen.

Dengan demikian maka menurut resminja segi-segi keuangan nasional mulai membuka sedjarah baru, dengan pengharapan dapat membrantas adanja inflasi dan mengendalikan stabiliteit harga-harga dalam negeri. Semendjak berlakunja uang tersebut, keadaan harga bahan makan sangat menjenangkan, umpamanja beras hanja 15 sen satu kg, kelapa satu buah 3 a 4 sen dan sebagainja. Akan tetapi sajang bahwa harga-harga tersebut tidak dapat tahan lebih dari satu bulan, dan selandjutnja masing-masing barang dan harga membubung sendiri-sendiri, jang disebabkan dari berbagai soal antara lain dengan tidak adanja peredaran barang akibat blokkade ekonomi Belanda, sedang persediaan barang kebutuhan hidup jang ada makin lama makin tipis.

Menggalang ekonomi untuk berdjuang.

Setelah makin lama perdjuangan bersendjata makin hebat dan mendesak terus diberbagai djurusan ditanah air kita ini, maka makin lama makin terasa

siasat Belanda untuk membikin blokkade ekonomi terhadap Indonesia, sehingga perdjuangan kita jang berada didaerah pedalaman ini terpaksa putus hubungannja ekonomi dengan daerah luar, apalagi hubungan dengan luar negeri. Kemudian dengan tekanan-tekanan ekonomi jang berat ini, terasa sekali oleh masjarakat hingga akibatnja perdagangan gelap meradja-lela, subur kembali seperti didjaman pendudukan Djepang. Perdagangan gelap ini dilakukan orang dengan keberanian mentjapai hubungan-hubungan didaerah pendudukan Belanda di Djawa Barat atau di Djawa Timur dengan melalui daerah-daerah perbatasan atau garis-garis demarkasi dari medan pertempuran Belanda dan Indonesia, baik di djaman perdjandjian Linggadjati (1947) maupun didjaman perdjandjian Renville (1948).

Segala usaha-usaha Pemerintah dalam pembangunan ekonomi, umumnja disalurkan untuk memperkuat perlawanan terhadap usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan musuh. Pembangunan ekonomi rakjat, banjak jang mengalami kegagalan akibat sukarnja mentjari bahan-bahan material jang biasanja dalam tahun-tahun sebelum perang selalu menggantungkan import dari luar negeri. Kesukaran-kesukaran itu dapat diatasi hanja dengan bahan-bahan jang dapat dibikin dan didapat dari daerah Jogjakarta sendiri, umpamanja bahan-bahan tekstil, bahan-bahan soga, wenter, paku, semen dan alat-alat lainnja. Kekurangan bahan-bahan material jang dialami oleh daerah Jogjakarta ini tidak bedanja dengan kekurangan-kekurangan seperti apa jang diderita oleh lain-lain daerah, jang mana pada umumnja dialami semendjak pendudukan Djepang dengan segala akibat-akibatnja, jaitu perekonomian seluruhnja dikuasai dan ditentukan oleh Pemerintahan Militer Djepang.

Dengan memelihara djalannja perekonomian jang makin lama makin sempit ini, toh kita dapat bertahan hidup dan berdjuang untuk melawan segala kegiatan-kegiatan musuh. Dengan keadaan jang demikian ini maka perekomian Indonesia pada waktu sebelum penjerahan kedaulatan adalah bersifat ekonomi perdjuangan. Meskipun demikian tidak berarti merupakan ekonomi perang seperti djaman Djepang jang akibatnja mentjekek leher rakjat.

Badan-badan perdjuangan jang hidup pada waktu itu dan bertudjuan turut serta menegakkan kemerdekaan, banjak mendapat sokongan dari rakjat, sehingga djaminan untuk pasukan-pasukannja dapat berdjalan dengan baik, dan bantuan-bantuan jang diterima dari rakjat tidak hanja berwudjud bahan makan sadja, akan tetapi djuga bahan-bahan pakaian, tempat-tempat asrama dan lain sebagainja. Sebab kesadaran rakjat akan perdjuangan kemerdekaan telah meresap kedalam sanubari.

Akan tetapi meskipun begitu tekanan ekonomi akibat blokkade Belanda itu makin lama makin berat djuga dirasakan oleh rakjat. Sudah sedjak pertengahan tahun 1948 peredaran bahan makan terutama beras telah dirasakan sekali kurangnja oleh rakjat, sehingga perdagangan beras kadang-kadang lenjap dari toko-toko atau warung-warung pendjual bahan makan.

Pada waktu petjahnja peristiwa Madiun, peredaran bahan makan sudah sangat membahajakan. Timbulnja perang saudara ini menambah sulitnja penghidupan rakjat, sebab hasil bahan makan didaerah Jogjakarta jang sudah terkenal minus itu, dengan penduduknja jang padat sebagai akibat datangnja para pengungsi dan mendjadi tempat kedudukan Pemerintah Pusat, ditambah lagi datangnja musim patjeklik, maka pada waktu itu daerah ini mengalami krisis jang begitu hebat. Banjak orang sampai berbulan-bulan tidak merasakan nasi sebagai bahan makan pokok, akan tetapi hanja tjukup makan gogik, tiwul gaplek, dan kalau ada djagung masih mendingan. Bahan makan berupa beras lenjap dari peredaran, tidak ada toko maupun warung jang masih sedia mendjualnja. Kekurangan beras ini tidak hanja dirasakan oleh orang-orang jang tidak mampu membeli sadja, akan tetapi sekalipun orang-orang jang mempunjai uang, menderita atau mengalami kekurangan beras ini. Rakjat hanja ber-

kemas-kemas menunggu apa gerangan kesudahan dari peristiwa ini, disamping berdebar-debar menunggu selesainja pertikaian dengan saudara sendiri dan selandjutnja keputusan dari conferensi jang diselenggarakan di Kaliurang antara Pemerintah dengan pihak Belanda jang menurut berita-berita jang tersiar telah mendekati tertjapainja penjelesaian.

Berkat daripada pendirian rakjat jang teguh untuk menegakkan kemerdekaan tanah air jang telah kita proklamasikan itu, maka perasaan jang hampir ta' tertahan lagi untuk berdjuang lebih lama akibat penderitaan ekonomi jang disebabkan dari blokkade Belanda dan lain sebagainja, dengan berdaja upaja sekuat tenaga penderitaan jang pahit ini, kita dapat bertahan.

B. DIDALAM KEADAAN DARURAT.

Puntjak daripada penderitaan rakjat ini, ialah setelah tentera Belanda dengan tidak semena-mena pada tanggal 19 Desember 1948 menjerbu dan menduduki Kota Jogjakarta. Perekonomian rakjat baik didalam maupun diluar Kota mendjadi ekonomi darurat.

Berhubung dengan perasaan terkedjut jang bertjampur dengan rasa ketakutan, dan tidak tahu apa jang harus diperbuat berkenaan dengan kedatangan Belanda ini, serta tidak adanja persiapan-persiapan dan petundjuk-petundjuk dari pada jang dianggap mengetahui hal ini, maka rakjat djatuh didalam kebingungan. Dengan tiada tentu arah tudjuannja, beribu-ribu penduduk kota besar-ketjil, tua-muda dari segala tingkatan beserta keluarga berdujun-dujun meninggalkan tempat tinggalnja pergi keluar Kota mengungsi. Pengungsian keluar Kota jang terbesar ke-daerah Selatan jaitu didaerah-daerah Bantul, Imogiri, Kretek, Wonosari, Kulon-Progo dan daerah-daerah pegunungan, karena penjerbuan tentara Belanda selain jang diturunkan dari udara, sebagian besar datang dari djurusan Magelang dan djurusan Solo. Para pengungsi tersebut tidak membawa perkakas rumah-tangga, atau barang-barang isi rumah selengkapnja, akan tetapi tjukup apa jang diperlukan untuk bekal pergi itu beberapa potong pakaian, uang, dan perhiasan jang berharga bagi jang punja.

Alat-alat kekuasaan dan pendjaga keamanan negara, baik polisi maupun tentera setelah mengadakan perlawanan sebentar, berhubung kalahnja imbangan kekuatan baik sendjata maupun tenteranja dengan pihak lawan, maka bersama-sama dengan rakjat mundur keluar Kota untuk menjusun kekuatan kembali.

Dalam tempo jang sangat pendek, semua desa dari segala pendjuru, penuh dibandjiri para pengungsi dari kota jang banjaknja beribu-ribu itu.

Suatu kedjadian jang sangat tragisch jang pernah dialami oleh rakjat di Jogjakarta dalam sedjarah kemerdekaan.

Untuk berapa hari atau bulan mereka harus meninggalkan rumahnja, dan apa bekal-bekalnja untuk hidup selama dalam pengungsian itu, tidaklah mendjadi perhitungan mereka. Tekad jang mendorong tindakan ini jalah asalkan mereka pergi dan terhindar dari bahaja maut jang sedang mengantjam. Tidak memperdulikan bagaimana nasib harta-benda serta hak-miliknja jang masih ditinggalkan. Jang menjala didalam harapannja jalah menunggu selekasnja pemuda-pemuda atau tentera kita segera melawan dan dapat menghalaukan Belanda jang telah menduduki Kota, dan dengan demikian akan segera dapat kembali ketempat mereka masing-masing.

Akan tetapi harapan ini tidak segera berhasil seperti jang dibajangkan. Sebaliknja keadaan ekonomi jang sudah krisis memuntjak ini, dengan ditambah adanja vacuum dari alat-alat pendjaga keamanan, timbullah disana-sini dalam Kota gerombolan-gerombolan garong jang menggedor rumah-rumah kosong jang telah ditinggalkan oleh penghuninja. Penggedoran ini dilakukan tidak hanja diwaktu malam hari, akan tetapi djuga terang-terangan disiang

hari, malahan kadang-kadang disiapkan dengan alat-alat pengangkutan sekali, untuk mengangkut barang-barang isi rumah tangga medja kursi, lemari dan kadang-kadang lengkap seisinja.

Gerombolan-gerombolan penggedor ini, menurut penjelidikan ada jang memang diorganiseer oleh pihak Belanda, dan ada pula jang memang telah mendjadi kebiasaan perbuatan djahat. Tetapi kemudian pihak Belanda sendiri achirnja mengambil tindakan djuga terhadap orang - orang penggedor ini, sehingga djumlah kedjahatan agak berkurang.

Demikianlah, Kota Jogjakarta beberapa hari sesudah pendudukan tentara Belanda, keadaannja sangat sunji, djalan-djalan besar tidak ada orang jang lewat, hanja tampak disana-sini tentara Belanda berpatroli atau mengadakan pendjagaan disemua persimpangan djalan. Kantor-kantor tidak ada jang buka, perusahaan-perusahaan mandeg, toko-toko tutup, pasar-pasar sunji, kampung-kampung sepi, bagaikan Kota mati jang tidak berpenduduk. Djam malam oleh peraturan Militer Belanda mulai berlaku sedjak pendudukan hari pertama dari djam 18.00 sampai djam 6 pagi. Siapa tampak didjalan besar diantara djam tersebut dapat ditembak mati tidak dengan urusan.

Sebulan setelah penjerbuan ini, Belanda mulai membuka siasat baru jaitu siasat lunak, untuk memanggil kembali penduduk Kota jang telah bubar tertjerai-berai, diluar Kota, supaja pulang kembali dengan aman dan tenteram dirumahnja masing-masing. Siasat ini dilakukan dengan penjebaran pamtlet-pamtlet melalui pesawat udara, disebarkan didesa-desa, jang maksudnja memanggil penduduk supaja kembali ditempatnja masing-masing, tentara Keradjaan (istilah mereka) datang disini untuk membawa ketenteraman dan kemakmuran, dan tidak akan mengganggu penduduk dalam mentjari penghidupan sehari-hari. Demikian campagne Belanda.

Disamping itu ditambah dengan masuknja infiltrasi mata-mata Belanda jang dapat menjelundup didesa-desa, dan menjebarkan campagne, bahwa masuk Kota, aman, tidak ada gangguan apa-apa.

Usaha Belanda ini dapat berhasil. Penduduk Kota jang sudah sekian lama mengungsi dan setelah kehabisan bekal-bekalnja untuk hidup didaerah pengungsian, ditambah dengan telah sangat rindunja untuk menengok kembali tempat tinggalnja, maka dari sedikit mendjadi berdujun - dujun, berbondong-bondong para pengungsi tadi kembali masuk Kota.

Kota Jogjakarta jang semendjak pendudukan tampak sunji, sekarang hampir sepertiga penduduknja kembali menempati tempat tinggalnja.

Perekonomian diluar Kota djaman pendudukan.

Bagaimanakah djalannja perekonomian didjaman pendudukan ini? Terlebih dahulu kita melihat betapa hidupnja semangat gotong-rojong jang dimiliki oleh rakjat diluar Kota sebagai warisan dari nenek-mojang kita. Pada hari pertama pengungsi jang berdjumlah beratus-ratus ribu banjaknja itu, disambut dengan gembira oleh penduduk luar kota. Badan-badan keamanan dan badan-badan sosial, terutama Lurah-Lurah Desa dengan tangkas mengatur dan membagi tempat-tempat untuk pemondokan. Pada umumnja didalam beberapa hari orang jang sekian ribu banjaknja itu didjamin oleh Kalurahan-Kalurahan jang bersangkutan tentang makan dan tempat tinggalnja untuk sementara waktu dengan tjuma-tjuma. Sungguh suatu sambutan jang sangat mengharukan.

Akan tetapi sudah barang tentu bahwa tjara-tjara jang demikian ini tidak perlu berlangsung terus-menerus tanpa timbal-balik djasa.

Hari berlangsung terus, perdjuangan merebut kembali Kota Jogjakarta dan usaha mengusir Belanda oleh para pedjuang makin giat. Perhubungan dan pertukaran kebutuhan hidup jang pada awal pengungsian merupakan funksi sosial, kemudian berhubung dengan keadaan-keadaan berobah kembali mendjadi funksi ekonomi, jaitu dengan nilai djual-beli.

Para pengungsi terutama jang masih muda jang mempunjai keberanian dan kesanggupan berdjuang, masing-masing menggabungkan diri dengan badan-badan perdjuangan jang ada dan jang kemudian didjadikan pasukan resmi. Jang tidak mempunjai kesanggupan berdjuang tjukup menjelamatkan dirinja sambil berusaha mentjari sesuap nasi untuk sehari-harinja dengan berdjualan apa sadja, jang kiranja dapat digunakan untuk mengulur modal jang sederhana itu.

Pasar-pasar baik besar maupun ketjil diluar Kota, antara lain Srandakan, Turi, Kretek, Pundong, Imogiri, didaerah-daerah Pakem, Kulon-Progo, Wonosari sampai jang ada digunung-gunung penuh orang-orang djualan. Adapun barang dagangannja a. l. barang-barang sisa jang dapat disingkirkan dari kota kedesa-desa, jang membutuhkan bahan makan dengan bertukaran barang lain atau pakaian. Selain itu banjak sekali orang mendjual makanan dan sebagainja.

Bahan makan terutama beras dari sedikit makin lama makin memuntjak harganja, dan sebaliknja bahan pakaian merosot nilainja bila diukur dengan nilai harga bahan makan. Diwaktu memuntjaknja, harga beras tiap kg bisa sampai ± Rp. 150.– a Rp. 200.–. Kain batik jang halus kadang-kadang hanja dapat ditukar dengan 10 a 15 kg. beras. Semua orang jang biasa bekerdja sebagai buruh ataupun pegawai negeri, selama clash Belanda ke II sebagian besar untuk keperluan hidupnja sehari-hari hanja mendjual barang hak miliknja. Seterusnja sebagai perintang waktu, orang-orang jang tidak menggabungkan diri dengan salah satu badan perdjuangan, digunakan waktunja untuk bakulan meskipun selama hidupnja baru sekali ini melakukannja. Dipinggir-pinggir djalan didekat pasar-pasar diluar kota, atau djuga ditengah-tengah pasar, banjak terdapat orang-orang bakul baru, jang terdiri dari pegawai-pegawai negeri, anak-anak sekolah, kaum buruh. Diantaranja ada jang mendjual makanan, tembakau, klembak, rokok, barang-barang rumah-tangga, pakaian lungsuran dan sebagainja. Semua pasar setiap hari tentu penuh pengundjung meskipun mereka itu tidak memerlukan membeli suatu apa, akan tetapi hanja perlu pesiar menghibur hati, berputar-putar hilir-mudik didalam pasar atau memenuhi djalan-djalan besar. Kendaraan-kendaraan satupun tidak ada jang djalan selain sepeda, dan inipun djumlahnja sangat sedikit. Sebab rintangan-rintangan djalan banjak sekali, baik jang berupa pohon-pohon ditebang roboh menjeberang djalan, maupun jang berupa djalan putus dengan lobangan parit jang lebar dan dalam (tankval).

Selama waktu pertempuran-pertempuran itu berlangsung, tidak ada sumber ekonomi jang masih hidup selain pertanian. Kaum tani dalam masa perdjuangan ini memegang rol penting, sebab selain mendjadi tempat berlindung bagi orang kota jang pergi mengungsi, djuga mendjadi tempat-tempat pertahanan, markas-markas gerilja, memberi djaminan makan pada pasukan-pasukan gerilja, kadang-kadang membantu mendjadi penjelidik atau pengawas gerak-gerik musuh, disamping masih mengerdjakan pertanian disawah, jang tetap mendjadi sumber kekuatan jang pokok. Huis-industrie masih hidup meskipun tidak seperti didalam djaman damai, a.l. pertenunan, perusahaan minjak kelapa, perusahaan wenter, perusahaan wedelan, pandai besi dan lain-lain.

Antara dua-tiga bulan sesudah pendudukan, Kota Jogjakarta seperdua dari penduduknja jang pergi mengungsi telah kembali, maka hubungan antara luar dengan dalam Kota mulai dapat bersambung meskipun masih di dalam suasana pertempuran. Dengan ini hubungan ekonomi agak luas dari pada semula. Teh, sabun, mihun dan lain-lain barang jang dibikin oleh perusahaan-perusahaan didalam Kota sudah mulai dapat mengalir keluar kota, akan tetapi masih dengan tjara selundupan. Sebaliknja dari luar Kota kadang-kadang didjual beras, gula pasir, gula klapa, tembakau, garam dan lain-lain sebagai imbangan kebutuhan.

Perusahaan garam di pesisir selatan berkembang - biak. Orang-orang jang berada didaerah itu dengan giat dan berlomba-lomba membikin garam, sehingga hatsilnja jang besar itu sampai didjual di daerah Solo, Kedu dan sebagainja.

Pada awal penjerbuan Belanda di Jogjakarta, beberapa hari kemudian pabrik-pabrik gula jang masih berdiri tegak, demi siasat perdjuangan di hantjurkan dengan trekbom sehingga tidak satupun jang masih ketinggalan. Sebab bila pabrik-pabrik gula ini djatuh ditangan Belanda, oleh mereka dapat digunakan sebagai pos jang terkuat diluar Kota, sehingga dengan demikian dapat memperluas daerah pendudukannja.

Sisa-sisa daripada simpanan gula jang masih beribu-ribu ton banjaknja itu kemudian djatuh ditangan rakjat dengan bermatjam-matjam tjara. Maka dengan adanja gula inilah merupakan salah satu modal bagi rakjat untuk menjambung djalannja ekonomi selama didalam keadaan darurat.

Meskipun begitu peraturan Militer diluar kota demi siasat perekonomian perang berlaku sangat keras. Banjak dikeluarkan peraturan-peraturan jang dimaksud untuk mentjegah djangan sampai bahan makan itu mengalir banjak kedalam kota sehingga memperkuat kedudukan Belanda.

Demikianlah keadaan pada waktu djaman pendudukan Belanda, jang terdjadi diluar kota. Dan dalam hal ini jang tidak boleh dilupakan adalah djasa djasa kaum tani, jang dapat memberi kekuatan sebesar-besarnja dalam berlangsungnja perdjuangan kita untuk merebut kemerdekaan, dan merupakan satu-satunja productie jang tidak dapat dimatikan oleh siasat perdjuangan musuh.

Perekonomian dalam Kota.

Tidak demikian keadaannja dengan penduduk jang masih tinggal di dalam kota sedjak hari pendudukan. Seminggu setelah Belanda datang, persediaan bahan makan jang memang sudah tidak sedia lagi itu, baik berupa apapun sudah habis. Beberapa hari kemudian penduduk dalam Kota sudah mulai menderita kelaparan. Daun-daun atau buah-buah mentah jang lajak dimakan dan tumbuh dihalaman-halaman sudah habis dimasak dan dimakan. Ajam tetangga jang ditinggal mengungsi oleh pemiliknja telah lama habis disembelih. Puntjak kelaparan ini, dan jang disebabkan dari buntunja segala usaha untuk mentjari makan, telah terdjadi segerombolan orang jang sampai hati menjembelih kuda untuk mentjegah penderitaan dan djangan sampai mati kelaparan. Orang-orang ini tidak berani pergi keluar kota, sebab tindakan Belanda pada waktu itu sedang keras-kerasnja.

Dengan adanja suasana jang demikian ini tentara Belanda berusaha untuk memantjing hati rakjat. Dengan berkedok memberi pertolongan pada orang-orang jang menderita kelaparan tentera Belanda mendobrak pintu toko-toko atau warung-warung baik kepunjaan orang-orang Indonesia maupun orang-orang Tionghoa jang tidak dibuka. Kemudian merampas barang-barangnja jang berwudjud bahan-bahan makan a.l. gula pasir, gaplek, gogik, katjang, minjak dan sebagainja untuk dibagikan kepada rakjat jang telah siap sedia dengan antré.

Sesudah phase ini berlalu, kemudian Belanda membuka kantornja sosial. Dari sini ia dengan tjara teratur dan dengan waktu-waktu jang tertentu membagi lagi rantsoen jang berwudjud nasi, kentang, roti, kadang-kadang daging dan sebagainja kepada penduduk, dan siapa sadja jang membutuhkan akan dapat bagian. Psychologie massa jang pada waktu itu hanja terlibat didalam soal makan, maka kesempatan ini digunakan sebaik-baiknja, meskipun orang itu djumlahnja tidak banjak.

Selandjutnja orang-orang fakir miskin dan orang-orang terlantar jang biasanja berpakaian jang sudah kojak-kojak, berkeliaran disepandjang djalan dan berteduh diwaktu malam hari dipinggir-pinggir toko dan sebagainja, kali

ini banjak kelihatan berpakaian bagus-bagus, dengan kain serta badjunja jang serba baru, kadang-kadang ada jang berpakaian jurk dan masih baik, namun lagak-lagunja itu tidak dapat menjembunjikan bekas-bekasnja. Orang-orang terlantar ini setelah mendapat pakaian jang baik, kemudian oleh Belanda dikirim kedaerah-daerah pertempuran untuk didjadikan mata-mata, supaja mentjari dan menundjukkan tempat-tempat pemuda-pemuda, atau tempat markas gerilja.

Beberapa bulan setelah pendudukan, dan setelah orang-orang kembali dari tempatnja mengungsi, maka suasana dalam Kota sudah agak mulai ramai sedikit daripada semula. Perusahaan-perusahaan ketjil, umpamanja tahu, tempe, ketjap, teh, rokok dan sebagainja sudah mulai bekerdja kembali dengan bahan-bahan persedian jang ada, meskipun masih didalam suasana pertempuran (gerilja). Djuga perusahaan - perusahaan batik, wenter, perak dan sebagainja tidak mau tinggal diam, membuka perusahaannja dengan kemampuan jang ada. Dengan demikian maka meskipun pertempuran berlangsung terus, jang kadang-kadang siang, dan kadang-kadang malam, akan tetapi ekonomi tidak boleh mandeg, orang perlu makan dengan menurut hukum-hukum masjarakat jang berdjalan. Pertukaran kebutuhan antara daerah pendudukan Belanda (dalam Kota) dan daerah Republik (diluar Kota) berlangsung lewat daerah pertahanan dengan sangat hati-hati. Orang jang sering keluar masuk Kota itu kadang-kadang terpaksa tertjepit dalam tengah - tengah pertempuran jang bila tidak mudjur dapat mendjadi korban tembakan jang membabi-buta. Tidak sedikit djatuh korban bakul-bakul pendjual minjak kelapa, bakul tembakau, djagung, beras dan lain-lainnja. Akan tetapi terdorong kebutuhan jang mendesak untuk hidup bahaja-bahaja jang mengantjam ini mudah sekali dilupakan, perdagangan ketjil berdjalan terus meskipun menghadap risico-risico besar jaitu maut.

Dari luar Kota mengalir terus bahan makan seperti ketela, gaplek, djagung, buah-buahan dan lain sebagainja. Pasar-pasar penuh orang-orang djualan bermatjam-matjam, hanja dipasar besar Beringhardjo (pusat Kota) jang sebelum perang penuh sesak tetapi sampai itu waktu hanja berisi kurang lebih seperlima sadja, sebab bakul-bakul jang biasanja datang dari luar daerah belum berani datang disini. Dalam pasar ini meskipun didalam keadaan darurat, banjak orang mendjual buku-buku prombengan, barang-barang petjah belah, dan lain-lain barang perhiasaan rumah tangga jang tidak mendjadi kebutuhan pokok dalam hidup sehari - hari dalam keadaan seperti waktu itu. Akan tetapi meskipun demikian dagangan ini laku djuga walaupun hanja satu dua buah.

Dikampung-kampung, dipinggir-pinggir sepandjang djalan besar, dimana-mana tempat timbul orang-orang djualan makanan bermatjam - matjam, sehingga tumbuh seperti djamur dimusim hudjan. Mereka ini kadang-kadang anak-anak wanita peladjar, anak-anak pegawai tinggi, isteri prijaji dan sebagainja jang membuka dagangannja hanja sekedar untuk perintang waktu, atau kadang-kadang sebagai salah satu pos gerilja rahasia dalam Kota pada waktu siang hari.

Alat - alat pembajaran.

Setelah tentara pendudukan Belanda merasa dirinja dapat menguasai daerah pendudukannja, maka ia memaksakan pada penduduk alat pembajaran baru jaitu uang Hindia Belanda dan uang Federal untuk beredar di daerah kekuasaannja.

Pada permulaanja rakjat merasa ragu-ragu dan takut untuk menerima uang Belanda ini, sebab pada hakekatnja mengandung risico jang besar jalah siapa sadja jang suka menerima dan menganggap laku uang musuh ini, oleh kalangan para pedjuang kita tentu akan dianggap membantu stabiliteit kedudukan Belanda disini, dan ini ditjap sebagai pengchianat bangsa, hukumnja ditjulik dan dibunuh.

Akan tetapi berhubung dengan tekanan - tekanan moreel dan ekonomi dari pihak Belanda, maka achirnja dengan diam-diam rakjat menerima djuga uang Belanda atau uang Federal ini, disamping masih menggunakan uang kita sendiri jaitu O.R.I. sebagai alat pembajaran jang sah.

Sementara itu uang Federal tadi hanja dapat beredar didalam Kota. Dalam hal ini untuk menentukan koers dari uang Federal melawan uang O.R.I. itu rupa-rupanja penduduk di Kota sudah terkena infiltrasi dari luar bahwa antara kedua alat pembajaran itu mempunjai nilai 1 rupiah Federal sama dengan 100 rupiah O.R.I.

Oleh karena makin lama ternjata makin penting artinja alat-alat pembajaran itu dalam masa perdjuangan, maka achirnja timbul tindakan-tindakan timbal-balik dari kedua belah pihak jang sedang bermusuhan, jang akibatnja rakjat jang menderita kerugian. Tindakan - tindakan itu jalah tentara Belanda bila mengetahui rakjat masih memegang atau menjimpan uang O.R.I. uang tersebut dirampas dan dirobek-robek biar berapapun besar djumlahnja, umpama sampai Rp. 40.000,— atau Rp. 25.000,—. Dengan adanja tindakan ini maka anak-anak gerilja kita kemudian mengambil tindakan balasan jaitu merampas dan merobek-robek uang Federal jang berada ditangan rakjat. Tindakan-tindakan jang sifatnja politisch-defensif ini hasilnja hanja mengetjewakan rakjat. Untunglah bahwa tindakan-tindakan ini tidak lama berlangsung. Kemudian alat-alat pembajaran kedua-duanja itu dapat berlaku terus berdampingan sampai penjerahan kedaulatan.

Dalam waktu pendudukan Belanda itu, oleh instansi Pemerintah telah dikeluarkan pengumuman tentang keluarnja uang kertas O.R.I. baru dengan harga tudjuh puluh lima rupiah (Rp. 75.—.). Uang tersebut dikeluarkan melalui Keuangan militer diluar kota, akan tetapi tidak dapat beredar setjara luas, sebab masjarakat tidak mau menerima. Pada umumnja rakjat merasa ragu - ragu sebab di antara instansi - instansi pemerintah sendiri belum ada kesatuan pengertian. Uang kertas tersebut merupakan uang darurat, dan gambarnja baik bentuk maupun warnanja kurang baik dan sangat kasar.

Membangun Ekonomi untuk masjarakat damai.

Menggalang ekonomi dalam djaman perdjuangan bersendjata, sudah tentu hasilnja tidak tampak dengan njata, sebab keadaan umum pada waktu itu tidak stabil dan selalu bergontjang-gontjang. Baik hubungan produksi maupun hubungan masjarakat, serba tidak aman dan tidak tenang, semuanja ini dapat kita ketahui, dari itu perekonomian kita adalah bersifat ekonomi perdjuangan.

Akan tetapi sifat ekonomi perdjuangan itu pada galibnja kita achiri setelah Belanda meninggalkan Jogjakarta dan sampai pada pengakuan kedaulatan atas Republik Indonesia. Setelah itu kita berdjuang dan bergerak dengan tjara jang lain dan dalam lapangan jang lain pula, jaitu dalam lapangan pembangunan jang menudju ke tjita-tjita keadilan sosial. Dari sini kemudian kita memulai apa jang kita sebut **membangun ekonomi nasional.** Kita bangunkan segala sudut dan semua segi ekonomi jang menudju kearah kemakmuran bangsa Indonesia.

* *
*

2. PEMBANGUNAN ALAT - ALAT PERHUBUNGAN

A. PERBAIKAN DJALAN - DJALAN BESAR DAN DJEMBATAN

OLEH karena pembangunan ekonomi sebagai tudjuan jang utama sesudah revolusi bersendjata, maka langkah pertama-tama jang diambil sesudah keadaan aman kembali, ialah pembangunan alat-alat perhubungan jang merupakan faktor jang sangat penting untuk melantjarkan djalannja perekonomian umum.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah dengan segala daja upaja berusaha untuk dapat menjelesaikan kewadjiban-kewadjiban jang sangat penting dan mendesak.

Factor-factor perhubungan jang paling primair adalah djalan-djalan besar jang menghubungkan antara daerah Jogjakarta dengan daerah luar, dan selandjutnja djalan-djalan besar jang menghubungkan antara Kotapradja dengan Kota-kota Kabupaten dan Ketjamatan-Ketjamatan.

Mengenai keadaan djalan-djalan besar didaerah selama ini, mungkin tidak bedanja dengan keadaan djalan-djalan besar jang ada di lain-lain daerah, jaitu sebelum pengakuan kedaulatan keadaannja sangat rusak dan buruk sekali. Keadaan jang djelek ini sesungguhnja sudah lama diderita, jaitu semendjak Djepang menduduki tanah air kita keadaan djalan-djalan dan djembatan-djembatan kurang sekali diperhatikan, sehingga achirnja kebobrokan-kebobrokan itu diwariskan oleh Djepang kepada kita sampai didjaman kemerdekaan ini. Sedang selama revolusi bersendjata kita belum sempat memperbaiki djalan-djalan dan djembatan-djembatan itu dengan sempurna, akan tetapi hanja merupakan sekedar tambal-sulam menurut kebutuhan.

Pada waktu itu Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah jang mempunjai tugas untuk memperbaiki dan memelihara terdjaminnja djalan-djalan besar, mengalami banjak kesulitan jang disebabkan adanja beberapa mesin gilas (stoomwals) serta alat-alat dan persediaan material lainnja telah banjak dipindahkan oleh Djepang kelain daerah.

Keadaan djalan-djalan besar sudah sebegitu buruknja sehingga hampir semua djalan raja jang dilapis dengan aspal tidak ada jang utuh lagi, disana-sini banjak terdapat djalan-djalan beraspal jang sudah petjah-petjah dan kelihatan alasnja jalah batu-batu tadjam dan dapat merusakkan band-band roda kendaraan apa sadja jang melaluinja. Djalan-djalan jang tidak dilapis dengan aspal, jang hanja dipadatkan dengan tanah dan batu telah mengalami kerusakan-kerusakan jang lebih hebat jaitu hampir disepandjang djalan terdapat banjak lobangan-lobangan sehingga djalan itu tidak rata lagi dan menjukarkan sekali bagi kendaraan jang lewat. Djalan-djalan besar sematjam ini tidak hanja terdapat diluar Kota sadja, akan tetapi ditengah-tengah Kota-pun umpamanja sepandjang djalan Tugu, Malioboro, Patjinan, Margomuljo mengalami kerusakan ini. Apa lagi diluar Kota, djalan-djalan besar jang tidak dengan lapisan sesuatu apa, jang hanja dipupuk atas padatan tanah sadja keadaannja lebih menjedihkan,

jaitu bila musim hudjan djalan ini tanahnja mendjadi lumpur dan kadang-kadang tidak dapat dilalui oleh kendaraan apapun dan kalau musim panas tanahnja mendjadi debu, bila tertiup angin tanah ini beterbangan kesegala pendjuru dan dapat menimbulkan penjakit.

Puntjak dari segala kerusakan-kerusakan djalan ini, jalah diwaktu Belanda menduduki Jogjakarta. Boleh dikatakan semua djalan-djalan besar jang belum djatuh dalam lingkungan pos militer Belanda, kita gunakan untuk alat pertahanan jaitu kita bikin parit-parit tank-val, dengan memotong-motong djalan itu mendjadi lobangan-lobangan jang lebar dan dalam. Dengan demikian maka hampir tidak ada djalan jang wutuh meskipun pada waktu siang hari parit-parit tankval itu ditutup oleh Belanda sehingga dapat digunakan lalu-lintas, akan tetapi pada malam harinja berganti kita bikin lagi tank-val di tempat jang lain atau ditempat itu djuga, agar tindakan pengluasan daerah pendudukannja dapat terhambat dengan adanja kesukaran-kesukaran ini.

Disamping tankval-tankval jang telah kita gunakan sebagai perintang lalu-lintas djalan, djuga pohon-pohon besar jang ada dipinggir-pinggir sepandjang djalan ditebang dirubuhkan melintang menjeberang djalan untuk menambah banjaknja rintangan itu.

Pengrusakan djalan-djalan sebagai salah satu siasat pertahanan ini, dilakukan djuga dengan pengrusakan-pengrusakan djembatan-djembatan baik biasa maupun kereta api, dan dalam hal ini Jogjakarta menderita kerusakan ± 200 buah djembatan. Siasat bumi hangus ini dilakukan pula atas gedung-gedung pemerintah (hanja diluar kota, didalam kota tidak sempat) antara lain rumah-rumah Kabupaten dan Kapanewon, rumah-rumah sekolah dan poliklinik-poliklinik, pabrik-pabrik gula dsb. jang dapat digunakan untuk pos Belanda.

Demikianlah pengrusakan-pengrusakan itu dilakukan demi membela kemerdekaan. Kemudian Djawatan Pekerdjaan Umum memulai dengan tugasnja jang sangat mendesak dan banjak setelah Belanda meninggalkan Jogjakarta.

Pada phase pertama untuk membangun alat-alat perhubungan ini, jalah memperbaiki djalan-djalan dan djembatan-djembatan jang menghubungkan kota Jogjakarta dengan daerah propinsi tetangga jaitu Jogja — Solo dan Jogja — Kedu. Dan sebelum hubungan dengan luar daerah ini dapat lantjar, maka kebutuhan-kebutuhan material untuk pembangunan jang belum dapat didatangkan dari luar daerah, Djawatan Pekerdjaan Umum lebih dahulu menggunakan bahan-bahan jang ada didaerah Jogjakarta sendiri, jaitu antara lain besi-besi dari bekas-bekas pabrik gula jang telah rusak, dengan tjara langsung atau tidak langsung membeli barang-barang tersebut jang telah djatuh ditangan rakjat.

Selandjutnja tentang perbaikan djalan-djalan dimulai dengan menutup bekas-bekas tankval dengan tanah sehingga rata kembali, dan membersihkan rintangan-rintangan didjalan-djalan baik jang berupa reruntuhan pohon-pohonan maupun pagar jang disusun dari bekas rel-rel lori pabrik dan sebagainja. Kemudian kita pertama-tama mendapat bantuan bahan-bahan untuk sementara dari O.W.M.J. (Openbare Werken Midden Java) di Semarang dengan perantaraan perwakilan Pemerintah R. I. disana berupa aspal dan lain-lain jang kita butuhkan. Akan tetapi setelah hubungan dengan Djakarta (Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga) pada tahun 1951 dapat dimulai, maka pembelian bahan-bahan dipusatkan di Kantor K.A.P.P.

Dalam phase pertama itu telah dapat diperbaiki djalan-djalan besar dan djembatan-djembatan jang menghubungkan Jogjakarta dengan daerah luar seperti tersebut diatas. Djalan-djalan jang telah diperbaiki kira-kira 100 km pandjangnja dengan menggunakan aspal kurang lebih 500 ton.

Dalam phase kedua, melandjutkan perbaikan djalan-djalan dan djembatan-djembatan jang menghubungkan kota Jogjakarta dengan kota-kota Kabupaten

di dalam daerah Istimewa Jogjakarta jaitu Jogja — Wonosari, Jogja — Bantul, dan lain-lain. Pandjang dari djalan-djalan jang diperbaiki dalam phase kedua ini kira-kira 100 km dan dengan menggunakan aspal kira-kira 500 ton djuga.

Phase jang ketiga jaitu memperbaiki djalan-djalan dan djembatan-djembatan jang menghubungkan antara Kota Kabupaten dengan Kapanewon-Kapanewon. Djalan-djalan jang diperbaiki dalam phase ketiga ini kurang-lebih 690 km, dan dalam hal ini tidak menggunakan aspal, akan tetapi tjukup dengan menutup lobang-lobang bekas-bekas tank-val atau lain-lain kerusakan dengan membikin rata dan padat serta radjin.

Demikianlah usaha untuk memperbaiki alat-alat perhubungan jang penting jang diperlukan sekali untuk djalannja perputaran roda ekonomi dalam masa pembangunan sehingga dari sedikit keadaan makin teratur.

Tugas dari Djawatan Pekerdjaan Umum pada waktu itu, tidak hanja memperbaiki djalan-djalan dan djembatan-djembatan jang rusak sadja, akan tetapi djuga memperbaiki dan membangun gedung-gedung pemerintahan jang hantjur. Adapun gedung-gedung pemerintah jang rusak adalah sebagai berikut :

5 buah rumah Bupati Pamong Pradja,
57 buah rumah Kapanewon Pamong Pradja.
57 buah rumah kongsen Mantri Tondopamitjis.
357 buah rumah Sekolah Rakjat Pertama.
10 buah rumah Poliklinik (Rumah Sakit)
1 buah rumah sakit di Wonosari.

Adapun jang telah selesai diperbaiki sampai achir tahun 1952 sebagai berikut :

2 buah rumah Bupati Pamong Pradja.
8 buah rumah Kapanewon.
16 buah rumah Sekolah Rakjat.
2 buah rumah Sakit Wonosari.
3 buah rumah Poliklinik.

Selain gedung-gedung jang telah dibangun kembali, djuga diantara kurang lebih 200 buah djembatan jang rusak dan diperbaiki, hanja tinggal 40 buah sadja jang belum diperbaiki berhubung dengan keadaan keuangan negara pada waktu ini.

Dengan adanja pembangunan-pembangunan ini maka lalu-lintas perdagangan dari sedikit madju terus sehingga menjenangkan bagi rakjat. Hal ini terbukti dengan makin lama-makin tampak kemadjuan dan makin bertambahnja alat-alat pengangkutan jang melalui lalu-lintas djalan jaitu antara lain kendaraan-kendaraan bermotor, sehingga memudahkan dan mempertjepat perhubungan antara satu daerah dengan lainnja.

*

B. KERETA-API SEBAGAI ALAT PERHUBUNGAN JANG PENTING

SEBELUM alat-alat perhubungan serta pengangkutan jang melalui lalu-lintas djalan dapat berdjalan dengan lantjar, maka Kereta-Api sebagai salah satu alat perhubungan dan pegangkutan jang vitaal, selalu menundjukkan kegiatannja jang tidak ada bandingnja baik untuk kepentingan perdjuangan maupun untuk keperluan umum sebagai penghubung djalannja perekonomian masjarakat.

Batas-batas daerah inspeksi Djawatan Kereta-Api jang ada di Jogjakarta ini, berbeda dengan batas-batas daerah otonoom propinsi jang lazim digunakan oleh instansi-instansi Pamong Pradja. Kereta-Api mempunjai batas sendiri jang telah diatur menurut terminologi dari Djawatan Kereta-Api sendiri.

Batas-batas daerah Inspeksi 6 D.K.A. (Djawatan Kereta-Api) jang berpusat di Kota Jogjakarta ini meliputi setasiun-setasiun

Kemrandjen (Timur Kroja)	—	Solo Djebres
Ngabean	—	Paalbapang
Bojolali	—	Baturetno
Jogjakarta	—	Parakan
Setjang	—	Tempuran (dekat Kedungdjati)

Akan tetapi setelah clash ke-II daerah dirubah mendjadi :

Montelan (Timur Kutoardjo)	—	Solo Djebres
Ngabean	—	Paalbapang
Kartosuro	—	Baturetno
Solo Balapan	—	Kedungdjati
Jogjakarta	—	Parakan
Setjang	—	Kedungdjati

Dengan demikian maka Inspeksi 6 Jogjakarta ini meliputi empat daerah jaitu Kedu, Solo, Semarang dan daerah istimewa Jogjakarta sendiri.

Kereta-Api jang ada disini mempunjai status jang sudah berubah keadaannja dulu dan sekarang. Pada djaman pendjadjah Belanda Kereta-Api jang berada didalam daerah Inspeksi 6 ini terdiri dari dua matjam badan, jaitu N.I.S. — Nederlands - Indische Stoomtram - Maatschappij — kepunjaan partikelir, dan S. S. — Staatsspoor — kepunjaan pemerintah Hindia Belanda.

Kemudian pada waktu Djepang menduduki Indonesia, semua Kereta-Api disita mendjadi kepunjaan pemerintah Djepang dengan diganti nama Rikuyu Sokyoku. Dalam pendjadjahan Djepang ini dikalangan Kereta-Api banjak terdjadi perubahan baik materieel maupun personeel, jang maksudnja untuk memperkuat kedudukan siasat perangnja. Antara lain banjak kereta-kereta maupun locomotif-locomotif jang diangkut oleh Djepang keluar Djawa dsb., begitu djuga pegawai-pegawainja. Di djaman pendjadjahan Djepang itu, dengan adanja peraturan-peraturan baru, administrasi K.A. mengalami kotjar-katjir. Pegawai-pegawai Kereta-Api merasa djengkel dengan tjara-tjara dan peraturan-peraturannja jang serba dimiliterkan. Tetapi dengan kesabarannja mereka mengatur dan menjusun kekuatan sambil menanti saat jang tepat untuk menghantjurkan tekanan-tekanan jang memberatkan itu.

Setelah berita proklamasi kemerdekaan diterima oleh kalangan pegawai K. A. terutama oleh Angkatan Mudanja, kemudian dengan segera berita jang hangat dari Djakarta ini dengan Kereta-Api kilat pula disebarkan kedaerah-daerah jang dapat dilaluinja. Berita-berita itu diperbanjak sendiri oleh pemuda-pemuda dengan stensil, dan disebarkan pada djawatan-djawatan dan sekolah-an sekolahan didalam Kota, dan lain-lain tempat.

Demikianlah suasana lalu mendjadi bersemangat, disamping bergembira mereka mulai bersiap-siap memikirkan segala sesuatu jang dapat dilakukan untuk menunaikan tugas proklamasi itu.

Dalam K.A. ini seperti djuga dilain-lain Djawatan keadaannja, meskipun kemerdekaan telah kita proklamasikan, dan pemerintah Djepang telah bertekuk-lutut terhadap Sekutu, tetapi pembesar-pembesar Djepang jang sebelum itu berkuasa dikantor-kantor resmi dan sebagainja sampai waktu itu ber-anggapan masih demikian. Tidak satupun jang dengan sukarela menjerahkan kedudukannja itu kepada orang Indonesia meskipun wakilnja orang Indonesia djuga.

Kemudian oleh angkatan muda Kereta-Api diputuskan untuk mengambil oper kekuasaan Djawatan Kereta-Api ini dari tangan Djepang. Dalam hal ini telah diadakan kata-sepakat dan kerdja sama sebaik-baiknja dengan memutuskan hubungan tilpun dari rumah Djepang jang bersangkutan,

Tepat pada hari jang telah ditentukan orang-orang Djepang jang berkuasa dikantor-kantor kereta-api itu oleh pemuda-pemuda tadi diminta djangan masuk kantor dan supaja tetap tinggal di rumahnja masing - masing dengan tenang. Dalam hal ini orang-orang Djepang itu menurut sadja dan tidak mengadakan reaksi suatu apa sehingga pengoperan kekuasaan jang revolusioner ini berdjalan dengan lantjar dan aman.

Demikianlah pada pertama-tama kegiatan-kegiatan pegawai Kereta-Api dalam membantu terlaksananja proklamasi kemerdekaan. Selandjutnja Djawatan Kereta-Api terus-menerus memberikan sumbangannja dalam hal pengangkutan untuk pasukan-pasukan jang dikirimkan ke front dimana sadja pertempuran sedang berlangsung. Kalau mula-mula timbul pertempuran dimana-mana melawan Djepang, achirnja setelah Djepang menjerah kemudian kita ganti bertempur melawan Belanda dan Inggeris jang akan memaksakan kekuasaannja kembali di Indonesia. Dalam pertempuran-pertempuran ini Kereta-Api selalu aktif untuk mengangkut pasukan-pasukan dan alat-alat perlengkapannja disamping pengangkutan kebutuhan umum, meskipun pada waktu itu dalam djumlah jang ketjil.

Angkatan muda Djawatan Kereta-Api mempunjai hubungan jang erat dengan badan-badan perdjuangan lainnja, terutama dengan Markas Besar Tentara sebagai induk angkatan bersendjata resmi. Dengan M.B.T. ini Kereta-Api dapat memberi bantuan jang berharga jaitu menjelenggarakan angkutan-angkutan mesiu, kwikzilver dan lain-lain alat penting dari daerah Djawa Barat ke M.B.T. di Jogjakarta. Lain dari pada itu pada waktu Pemerintah Pusat di Djakarta bermaksud pindah ke Jogjakarta maka Kereta - Api adalah jang mendjadi pelopor pemindahan itu sehingga dapat mentjapai Kota Jogjakarta dengan selamat. Sesudah itu kemudian diikuti pindahnja Pusat Djawatan Kereta-Api dari Bandung ke Tjisurupan dan kemudian djuga pindah ke Jogjakarta.

Pada waktu diadakan perundingan-perundingan antara Pemerintah R. I. dengan Belanda, Kereta-Api menjediakan keretanja jang istimewa jang disebut Kereta-Api Luar Biasa — K.L.B. — untuk persediaan tamu-tamu luar negeri jang mengikuti perundingan - perundingan.

Akan tetapi disamping kesanggupan-kesanggupan jang telah dapat dipenuhi itu, Djawatan Kereta-Api djuga ta' dapat terhindar dari kesukaran dan kesulitan diwaktu menghadapi tugasnja jang maha berat. Pada tahun 1947 diwaktu blokkade Belanda makin hebat, D.K.A. mengalami kekurangan sekali bahan bakar, sehingga menjebabkan kesukaran atau mandegnja usaha pengangkutan. Kesukaran ini terasa benar oleh seluruh masjarakat, sehingga achirnja dari bantuan masjarakat djuga kesukaran-kesukaran ini dapat diringankan. Pada waktu memuntjaknja kekurangan bahan bakar itu sehingga Presiden menjerukan kepada badan-badan perdjuangan dan organisasi-organisasi pemuda supaja turut aktif membantu mengusahakan adanja bahan bakar itu didatangkan dari daerah Gunung Kidul, Muntilan dan kaju karet dari daerah Tjandi Umbul. Kesukaran-kesukaran kaju bakar ini sangat meningkat sehingga seringkali Kereta-Api jang seharusnja berangkat terpaksa dibatalkan, karena tidak adanja kajubakar.

Dalam masa itu Kota Jogjakarta mengalami terputusnja hubungan elektris dengan sentral. Sehingga perlu membikin nood centraal dipabrik Medari dan pabrik listrik di Gampingan. Untuk pembikinan nood listrik ini, jang berarti untuk mendjaga djangan sampai ibu Kota menderita gelap, maka D.K.A. mendapat tugas jang berat jaitu mengangkut ketelwagens dengan residu untuk kedua pabrik tersebut.

Angkutan lain jang lebih penting lagi jaitu untuk mengangkut chorchorus — serat — dari Muntilan ke Baturetno untuk di export lewat Patjitan. Dan dari sini Kereta-Api dapat mengangkut bahan-bahan penting jang dapat digunakan untuk melandjutkan perdjuangan. Selandjutnja mempunjai tugas djuga

untuk mengangkut delegasi serta anggauta Komisi Tiga Negara untuk perundingan-perundingan di Djakarta dan Kaliurang. Sebelum tugas ini selesai disusul dengan timbulnja peristiwa Madiun, sehingga kereta-kereta itu digunakan untuk mengangkut balabantuan dari pasukan Siliwangi menudju ke Solo — Madiun.

D.K.A. dalam segala keadaan tetap bergerak dan aktif dengan kemampuan kekuatan jang ada. Tetapi segala kegiatannja itu mendjadi lumpuh seketika setelah Belanda pada achir tahun 1948 menjerbu Jogjakarta. Keadaan pegawai petjah tertjerai-berai. Persiapan belum dapat diadakan. Kepala Djawatan K.A. pada waktu itu sedang ada diluar Jogjakarta dan terdjepit. Tetapi ia melandjutkan ikut berdjuang didaerah Bojolali.

Dari kalangan Angkatan Muda K. A. setelah dapat menjatukan kembali organisasinja dan setelah dapat mengadakan hubungan kerdja-sama dengan pihak tentara, kemudian mulai melakukan aksinja jaitu dengan merusak segala alat-alat perdjalanan. Hampir semua ril dibongkar ketjuali perdjalanan antara Jogja — Magelang — Semarang. Sebab djurusan ini telah lebih dulu djatuh ditangan Belanda dan didjaga supaja tidak dirusak.

Tetapi dari pihak kita kemudian dapat djuga merusak satu djembatan dekat Mlati, jang setiap waktu berganti tangan. Apabila pada siang harinja diperbaiki oleh Belanda, maka pada malamnja dirusak oleh anak-anak gerilja kita, demikianlah terus-menerus. Setasiun-setasiun, rumah-rumah dinas, serta djalan K.A. ke beberapa djurusan kita hantjurkan.

Meskipun begitu achirnja Belanda dapat djuga menguasai sisa-sisa perlengkapan dari Djawatan Kereta-Api jang sudah tertjerai-berai itu, dan tidak antara lama kira-kira pada pertengahan bulan Pebruari 1949, Belanda mulai mentjari orang-orang pegawainja lama jaitu sebelum Djepang menduduki Indonesia. Bagi mereka jang tidak mempunjai djiwa Republikein jang kuat dan jang beranggapan bahwa Republik Indonesia betul-betul telah tidak berdaja, banjak jang suka menerima adjakan Belanda itu, ditambah lagi dengan kegiatannja mendjadi agen Belanda untuk mengadjak teman-temannja.

Setelah Belanda dapat mengumpulkan beberapa orang untuk keperluan dalam lapangan Kereta-Api, kemudian lalu mulai membangun djawatan ini dengan nama S.S.V.S. — Staatspoorwegen van Vereniging Spoorweg Maatschappijen — Usaha pembangunan ini tidak dapat berdjalan dengan lantjar, sehingga K.A. hanja dapat berdjalan dengan satu djurusan jaitu Jogja — Magelang, dan inipun hanja chusus digunakan untuk tentara Belanda, bagi umum belum boleh.

Pegawai-pegawai K.A. jang menjingkir keluar kota, termasuk dalam sekian ribu banjak pegawai R. I. jang masih setia, menggabungkan diri dalam badan perdjuangan adapun jang ada didalam kota, mengawasi perbuatan kawan-kawan jang telah mengchianati perdjuangan, dan mengawasi djuga gerak-gerik S.S.V.S.

Demikianlah sampai pada waktu Belanda meninggalkan Jogjakarta. Tetapi antara sebulan sebelum itu S.S.V.S. telah mulai mengangkut kereta K.L.B. serta locomotif-locomotif dari daerah Jogjakarta keluar sampai berdjumlah kurang lebih 213 kereta dan 97 locomotif.

Setelah pemerintah kembali di Jogjakarta, maka D.K.A. segera aktif kembali, membangun segala kerusakan-kerusakan jang dialami selama dalam masa pendudukan. Pertama-tama rel spoor jang telah terlepas sambungannja satu sama lain itu, dipasang kembali, djembatan - djembatan diperbaiki, dibangun lagi atau setasiun-setasiun didirikan. Djurusan-djurusan itu jalah : Jogja — Paalbapang, Jogja — Progo, dan Jogja — Brambanan. Adapun djurusan Jogja — Magelang, seperti jang tersebut dimuka tidak mengalami kerusakan besar, dan pada waktu Belanda meninggalkan Jogja djurusan ini sudah dapat di

pakai, tetapi baru sampai di Tempel, sebab djembatan Tempel mengalami kerusakan hebat. Dan Tempel — Muntilan didjadikan corridor.

Sebelum penjerahan kedaulatan corridor ini disebelah Selatan didjaga oleh T. N. I. dengan D. K. A. R. I. dan sebelah Utara didjaga oleh Militer Belanda dengan S. S. V. S. - nja.

Seperti djuga halnja dengan kebutuhan akan materiaal dilain-lain bagian dalam Pemerintah R. I., maka D. K. A. R. I. mendatangkan djuga kebutuhan-kebutuhan materiaal umpama steenkool dan lain-lain dari Semarang melalui corridor itu, dan alat-alat lain untuk keperluan Pemerintah.

Setelah tampak banjak tanda-tanda bahwa masa pertempuran tidak akan berlangsung terus, maka jang penting adalah berputarnja ekonomi masjarakat jang telah sekian lama tidak lantjar hubungannja. D. K. A. mempunjai kewadjiban jang sangat mendesak dalam hal ini, jaitu lantjarnja perdjalanan K. A. untuk kepentingan umum. Setelah ril-ril spoor dapat dipasang kembali, maka djembatan K.A. perlu djuga mendapat perbaikan selekas-lekasnja. Adapun djembatan di Jogjakarta jang segera diperbaiki jaitu djembatan kali Opak, kali Progo, kali Papah, kali Serang dan kali Winongo.

Sesudah pengakuan kedaulatan dan dengan berdirinja Negara R. I. S. maka seperti halnja dengan KNIL jang dimasukkan dalam A. P. kita, begitu djuga S. S. V. S. digabungkan djuga dengan D. K. A. R. I., baik materieel maupun personeel, dan kemudian disingkat mendjadi D. K. A. (Djawatan Kereta-Api).

Demikianlah kemadjuan jang ditjapai oleh D. K. A. sebagai alat-alat perhubungan baik untuk keperluan resmi, maupun umum, meskipun belum mentjapai setingkat dengan keadaan Kereta-Api pada tahun 1942.

*

C. ALAT - ALAT PERHUBUNGAN ANGKUTAN MOTOR

DALAM sedjarah kemerdekaan alat-alat perhubungan dengan angkutan bermotor mengambil bagian jang sangat penting, disamping alat-alat perhubungan lainnja, terutama dalam awal tahun revolusi.

Pemuda-pemuda pegawai Zidosha Kyoku (menurut istilah Djepang jang artinja Djawatan Mobiel) dengan semangat revolusi serentak melakukan perebutan kekuasaan dari tangan Djepang. Pengorbanan-pengorbanan besar tidak dipikirkan, tudjuannja hanja kendaraan bermotor dengan segala perlengkapannja jang waktu itu masih ditangan kekuasaan Djepang harus kita rebut dan untuk membantu pengangkutan rakjat jang sedang melakukan pertempuran dan menolong instansi-instansi pemerintah jang memerlukan kendaraan dalam melakukan tugas kewadjibannja. Al-hatsil, semua kendaraan bermotor dengan segala perlengkapannja setelah dengan perlawanan jang sengit, achirnja djatuh djuga di tangan kita. Dan tudjuan kita dalam hal ini dapat tertjapai.

Setelah pertempuran-pertempuran bersendjata jang makin lama makin mendjadi berkurang, dan sebentar-sebentar djalannja revolusi sering diseling dengan perundingan-perundingan, maka kemudian kedudukan pemerintah makin teratur. Dengan demikian maka kendaraan bermotor sedikit demi sedikit dapat dipergunakan untuk menjelenggarakan angkutan umum, baik untuk pengangkutan barang, maupun penumpang.

Instansi-instansi angkutan motor ini setelah menundjukkan usaha-usaha dan djasa-djasanja maka achirnja de facto dan de jure mulai diakui oleh Pemerintah dan masuk dalam bagian dari Kementerian Perhubungan sebagai djawatan Pemerintah jang menjelenggarakan angkutan umum dengan kendaraan bermotor, dengan diberi nama Djawatan Mobiel (D. M.) dan kemudian diganti dengan nama Djawatan Angkutan Darat (D. A. D.).

Sewaktu Abikusno Tjokrosujoso mendjabat Menteri Perhubungan ada suatu instansi jang mengurus angkutan ketjil jang dalam bahasa asingnja disebut

„afhaal en brengdienst" dalam dan sekitar kota, jang diakui pula sebagai suatu Djawatan dengan nama Djawatan Pengangkutan.

Dalam tahun 1946, atas usaha Menteri Perhubungan Ir. Djuanda berhubung dengan adanja kendaraan motor jang ada makin lama makin berkurang jang disebabkan dari kerusakan-kerusakan dan alat-alat perlengkapannja tidak dapat lagi bertambah karena blokkade Belanda, maka untuk melantjarkan perhubungan didarat disamping Djawatan Kereta Api, pada tanggal 26 Nopember 1946 di Jogjakarta dua Djawatan tadi jaitu Djawatan Angkutan Darat dan Djawatan Pengangkutan, digabungkan mendjadi satu dengan nama Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia dan disingkat D.A.M.R.I. Dalam pengumumannja Menteri Perhubungan pada tanggal tersebut didjelaskan bahwa bentuknja D.A.M.R.I. adalah didasarkan pasal 33 U.U.D. R.I., dimana dinjatakan bahwa tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak, dikuasai oleh negara. Dengan demikian maka D.A.M.R.I. dinjatakan sebagai Djawatan jang vitaal dan direct atau indirect berpengaruh terhadap seluruh perekonomian rakjat.

Adapun functienja dalam masjarakat jaitu menjelenggarakan terutama angkutan umum (penumpang dan barang), tetapi djuga untuk kepentingan pemerintahan sipil dan militer diwaktu keadaan memerlukan.

Djika dipandang dari sudut adanja kendaraan bermotor dan alat-alat-nja dalam djumlah jang sangat terbatas itu, dan hanja berupa sisa-sisa dari prewar-production, ditambah pula dengan blokkade Belanda jang haibat dan semuanja itu dihubungkan dengan tugas D.A.M.R.I. untuk menjelenggarakan angkutan umum dan untuk kepentingan negara, maka terbajanglah sudah betapa besar kesulitan-kesulitan jang harus dialami oleh D.A.M.R.I.

Dalam hal ini tak dapat dilupakan djasa kaum technici D.A.M.R.I. jang pada waktu jang maha sulit jaitu pada tahun 1947 dalam periode persetudjuan Renville, waktu daerah R.I. sudah sangat ketjil dan aanvoer dari alat-alat kendaraan bermotor sukar sekali didapatnja karena blokkade Belanda, kaum technici D.A.M.R.I. sanggup mendapatkan barang pengganti dari buah fikirannja sendiri, jang bahannja diambil dari barang besi tua jang tak dapat dipakai lagi.

Hasil-hasilnja, mitsalnja accu, onderdeel oto lainnja, dengan tjara membuatnja mereka pertundjukkan pada Exposisi Pembangunan di Solo pada tahun 1948.

Walaupun hasilnja pembuatan dibandingkan dengan buatan luar negeri djauh kurang sempurnanja, akan tetapi tjukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan onderdeel pada djaman blokkade. Bahkan dapat melajani selain untuk kepentingan sendiri, djuga instansi-instansi dari angkatan perang, pemerintah sipil dan badan-badan perdjuangan lainnja. Semuanja itu menundjukkan continuiteitnja D.A.M.R.I.

Dalam waktu jang sesulit itu, selain menjelenggarakan angkutan untuk umum, telah menjumbangkan djuga tenaganja untuk keperluan jang penting-penting antara lain untuk membantu :

1. Mengangkut tenaga-tenaga pedjuang baik dari badan-badan perdjuangan maupun dari tentara ke medan-medan pertempuran, selama pertempuran bersendjata berlangsung terus (tahun 1945).
2. Menjelenggarakan angkutan untuk APWI (Allied Prisoners of War and Interneers) (tahun 1946).
3. Penjelenggaraan angkutan beras untuk India dari daerah Pedalaman ke setasiun-setasiun Kereta Api dan pelabuhan-pelabuhan. (tahun 1946).
4. Penjelenggaraan angkutan kaju bakar jang dibutuhkan sekali untuk Kereta Api, dimasa kita mengalami blokkade jang sehebat itu. (tahun 1947).
5. Penjelenggaraan angkutan untuk kepentingan perundingan Indonesia — Belanda di Kaliurang (Komisi Tiga Negara) (tahun 1948).

Demikianlah masih banjak lagi lainnja jang tidak disebutkan disini.

Akan tetapi pada achir tahun itu djuga, jaitu pada tanggal 19 Desember 1948, lenjaplah semua usaha dan susah pajah jang telah dihatsilkan oleh warga D.A.M.R.I. selama itu, akibat serangan Belanda ke II dan didudukinja Jogjakarta oleh mereka. Dan kemudian D.A.M.R.I. hanja tinggal nama dan orang-orangnja sadja. Namun demikian, semangat jang bergelora itu tidak padam, mereka menjalurkan kesanggupannja berdjuang dan bekerdja pada lapangan lain. Warga D.A.M.R.I. sebagian terbesar menggabungkan diri kepada T.N.I. jang aktif melandjutkan perdjuangannja untuk merebut kedaulatan R. I. kembali.

Setelah Jogja kembali.

Pada tahun 1949, setelah Pemerintah R. I. kembali di Jogja, semua kendaraan bermotor diserahkan kepada D.A.M.R.I. untuk dilandjutkan usahanja dan diikuti administrasinja.

Demikianlah tugas-tugas D.A.M.R.I. berdjalan hingga badan-badan Pemerintah sudah berdjalan lantjar dan D.A.M.R.I. membuka lagi Exploitasinja di Jogjakarta.

Dari sinilah diorganiseer kembali dan dalam waktu singkat D.A.M.R.I. hidup kembali dimana-mana tempat, berdasarkan peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1949 pasal 11.

Sajangnja sesudah mengalami pait getir sekian lama D.A.M.R.I. kehilangan tenaga ahli, sedangkan dalam daerah-daerah prae-federaal D.A.M.R.I. menghadapi fait accompli ialah bahwa disitulah sudah tumbuh Perusahaan Angkutan Particulier, sehingga D.A.M.R.I. sukar untuk melebarkan sajapnja seperti sedia kala.

Berhubung dengan pengembalian daerah T.B.A. dan penggabungan Negara - Negara bagian dan Daerah lainnja kepada R.I., maka berdasarkan keputusan Menteri Pekerdjaan Umum dan Perhubungan tanggal 6 Maret 1950 No. S 19 /2/12, pekerdjaan-pekerdjaan D.A.M.R.I. dimasukkan didalam Djawatan Perhubungan dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Perhubungan.

Didaerah-daerah karesidenan dan propinsi dikenal oleh chalajak ramai dengan nama D.A.M.R.I.

Dalam masa peralihan R.I. (Jogja) — R.I.S. — R.I. kesatuan jaitu dalam tahun 1951 terdapat ketegangan jang berakibat buruk bagi D.A.M.R.I. Status D.A.M.R.I. didaerah-daerah seolah-olah dibiarkan kepada nasibnja sendiri-sendiri, pimpinan setjara sentral tak dapat dirasakan : organisasinja mendjadi lemah, modal untuk pembaharuan bus dengan alat-alatnja kurang diperhatikan sebagaimana mestinja. Rendabiliteit dan potentie D.A.M.R.I. sebagai alat Pemerintah merosot. Suara-suara dari luar jang tidak senang kepada D.A.M.R.I. mempengaruhi Pemerintah untuk mengliquideer D.A.M.R.I. karena tidak renderend dalam perusahaannja.

Akan tetapi setelah diselidiki dalam-dalam tentang sebab-sebabnja kemunduran D.A.M.R.I. dan memperhatikan tuntutan-tuntutan dari Serikat Buruhnja (S. B. K. B.) jang tidak menjetudjui diliquideernja D.A.M.R.I., maka pada tahun 1952 urusan D.A.M.R.I. dipusatkan kembali di Kementerian Perhubungan Bagian Lalu Lintas Djalan untuk mudah dan manfaatnja organisasi.

Alasan : jang dipakai untuk memperhatikan D.A.M.R.I. ialah :

1. D.A.M.R.I. sudah mendjadi perusahaan vitaal jang dalam proces sedjarahnja telah dapat membuktikan potentienja bagi negara baik dalam masa perdjuangan maupun masa normaal/pembangunan.
2. Politis dapat dipertanggung-djawabkan berdasarkan pasal 33 (2) UUD R.I. lama, jang sama bunjinja dengan pasal 38 (2) UUD sementara R.I.
3. Bedrijf economisch dapat dipertanggungkan djika organisasinja disempurnakan dan ada perimbangan antara djumlah kendaraan dan djumlah pegawai.

Dan kalau ditindjau lebih dalam, pembangunan pengangkutan didarat jang paling murah, praktis dan manfaat adalah dengan kendaraan bermotor karena dapat sampai kepelosok-pelosok desa dan dengan diadakannja kordinasi dengan angkutan jang diselenggarakan oleh kereta api Pemerintah dapat menguasai dan mengatur angkutan didarat jang dapat disesuaikan dengan politik perekonomian jang didjalankan oleh Pemerintah.

Maka djika mempersoalkan D.A.M.R.I. kita harus memandangnja dari sudut :

1. Sedjarah,
2. politik perekonomian negara dan
3. bedrijf economie.

*

D. ANGKUTAN MOTOR DALAM MASA PERALIHAN

Inspeksi Lalu-Lintas.

SETELAH Pemerintah R.I. kembali ke Jogja, dan berhubung dengan adanja Kementerian Perhubungan, maka pada tahun 1949 diputuskan adanja Inspeksi-inspeksi. Pada waktu itu segala sesuatu jang berkenaan dengan lalu-lintas djalan jang menggunakan kendaraan bermotor, mendjadi pengawasan dan diurus langsung oleh Kementerian tersebut. Semua permintaan idzin-idzin langsung mendjadi kompetensinja.

Akan tetapi setelah Pemerintah R. I. S. berdiri, dan Kementerian Perhubungan di Jogja bergabung mendjadi satu dan pindah ke Djakarta, maka Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta mendapat tinggalan kewadjiban melandjutkan pekerdjaan jang telah mulai dikerdjakan oleh Kementerian Perhubungan itu, dan achirnja berdirilah Inspeksi Lalu-Lintas Daerah. Meskipun keputusan itu telah diambil pada tahun 1950, akan tetapi berhubung dengan persiapan-persiapan dan sebagainja, baru dapat dimulai pada tahun 1951, dan mempunjai tugas antara lain :

1. Mengurus perseroan-perseroan Otobis dan Transport-ondernemingen.
2. Mengawasi djalannja lalu-lintas jang menggunakan alat-alat angkutan motor.
3. Mengawasi keluar-masuknja angkutan bermotor dalam daerah Istimewa Jogjakarta.
4. Mengawasi barang-barang jang keluar masuk dengan menggunakan angkutan bermotor.
5. Dan lain-lainnja lagi.

Pengangkutan Umum.

Sedjak permulaan tahun 1951, telah terasa benar oleh masjarakat berhubung dengan perkembangan perekonomian sehabis mengalami peperangan, akan kekurangannja alat-alat pengangkutan umum, baik untuk daerah istimewa Jogjakarta sendiri, maupun untuk mengadakan hubungan dengan luar daerah. Pembangunan ekonomi jang sangat diharapkan oleh segala pihak, memerlukan sekali perhubungan jang lantjar dan tjepat antara satu dan lain tempat, baik didalam daerah Jogjakarta sendiri maupun dengan daerah luar.

Kesulitan jang terasa pada waktu itu ialah masih kurangnja pengalaman atau masih terbatas sekali, dan kekurangan akan modal. Sudah barang tentu mereka itu tidak dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain misalnja dari Surabaja, Semarang dan lain-lain sebagainja jang telah tjukup pengalamannja dan kuat modalnja.

Akan tetapi bagi tjalon-tjalon pengusaha di Jogjakarta sini jang ada ialah pertama-tama hanja kemauan jang keras.

Dari banjaknja kesanggupan pengusaha-pengusaha di Jogjakarta itu, adalah merupakan suatu alasan jang kuat bagi Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta untuk mengambil ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada golongan warga negara Indonesia sebanjak-banjaknja untuk menjelenggarakan perusahaan pengangkutan umum untuk barang dan orang, jang besar artinja bagi perekonomian negara dan rakjat.
2. Menolak permintaan dari pengusaha-pengusaha dari luar daerah, beralasan banjaknja permintaan dari tjalon-tjalon pengusaha di Daerah Istimewa Jogjakarta sendiri.

Bagi tjalon-tjalon pengusaha di Daerah Jogjakarta sini kurangnja modal dan pengalaman bukanlah soal jang mengherankan, terutama dikalangan warga negara Indonesia, karena krisis ekonomi jang diderita oleh rakjat akibat clash ke-II memang begitu heibat, sehingga melumpuhkan usaha-usaha jang memerlukan modal jang besar. Dari itu pemerintah mengichtiarkan djalan bagi mereka jang berhasrat besar dan mempunjai tjukup kesanggupan, jaitu dengan andjuran supaja membentuk perseroan (Naamloze Vennootschap). Dengan demikian terkumpullah modal-modal ketjil didalamnja, dan mendjelma mendjadi satu dan kuat.

Didalam prakteknja pengumpulan modal-modal ketjil demikian itu mengalami kesulitan, karena disamping kurang pengertian dan keinsjafan tentang perseroan, banjak jang ingin madju sendiri, sehingga pengertian hidup bersama dan kerdja bersama kurang mendapat manfaat.

Walaupun demikian, masih banjak djuga dapat terbentuk perseroan-perroan jang menjelenggarakan perusahaan pengangkutan untuk orang. Tentang modal sebagian mereka telah mendapat bantuan dari Bank Negara atau dari I. B. C. (Indonesian Banking Corporation), sedang kekurangan pengalamannja akan didapat sambil berdjalan.

Untuk sekedar dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha angkutan bermotor didalam Daerah Istimewa Jogjakarta, dibawah ini kita tjantumkan angka-angka jang ditjatat oleh Djawatan Inspeksi Lalu-Lintas Daerah.

Djumlah bus-onderneming dan otobus-otobus

Pada tahun 1951, di Daerah Istimewa Jogjakarta sini ada 12 bus-onderneming, dengan 73 buah bus jang berdjalan dalam djurusan tetap, dan 32 bus tjadangan.

Pada tahun 1952, djumlah semuanja telah naik, jaitu bus-onderneming mendjadi 15 dan bus berdjalan tetap ada 74 buah serta 48 buah bus tjadangan.

Bus-bus tersebut mempunjai djurusan dan nama sebagai berikut:

Djurusan inter - daerah :

1.	Jogjakarta	— Semarang	:	Damri.
2.	„	— „	:	Petram.
3.	„	— „	:	Nasional.
4.	„	— Magelang	:	Damri.
5.	„	— „	:	Nasional.
6.	„	— „	:	Kilat.
7.	„	— Wonosobo	:	Petram.
8.	„	— Kutoardjo	:	Damri.
9.	„	— Purworedjo	:	Petram.
10.	„	— „	:	Baker.
11.	„	— „	:	Kilat.
12.	„	— Solo	:	Baker.
13.	„	— „	:	Petram.
14.	„	— „	:	Nasional.

15. Jogjakarta — Solo : Mars dan Adam
16. „ — „ : Eva
17. „ — „ — Sragen : Expra

Djurusan dalam daerah Jogjakarta.

1. Jogjakarta — Imogiri : Mataram.
2. „ — Wonosari : Mataram.
3. „ — „ : Damri.
4. „ — „ : Kilat.
5. „ — „ : Sederhana.
6. „ — Tjangkringan : Widodo.
7. „ — „ : Kidang mas.
8. „ — Kaliurang : Kidang mas.
9. „ — „ : Baker.
10. „ — „ : Damri.
11. „ — Kebonagung : Widodo.
12. „ — Kenteng : Mataram.
13. „ — Wates : Baker.
14. „ — „ : Petram.
15. „ — „ : Damri.
16. „ — „ : Kilat.
17. „ — Srandakan : Subur.
18. „ — „ : Prasadja.
19. „ — Kretek : Subur.
20. „ — Ngidjon : Baker.
21. „ — Tjelep : Subur.
22. „ — Turi : Turi.

*

Djumlah Penumpang Bus-Bus jang ada di Jogjakarta.

Djurusan antara	bl. Djuli s/d. Des. th. 1951.	bl. Djan. s/d Djuni th. 1952.
Jogja — Solo	293.739 penp.	521.412 penp.
„ — Semarang	92.498 „	133.770 „
„ — Magelang	130.945 „	208.980 „
„ — Purworedjo	36.007 „	81.930 „
„ — Wonosobo	20.746.	35.492 „
„ — Kutoardjo	26.573 „	52.200 „
„ — Wonosari	75.994 „	196.340 „
„ — Kulon Progo	25.865 „	95.648 „
„ — Imogiri	45.859 „	78.630 „
„ — Ngidjon	148.139 „	271.000 „
„ — Tjangkringan	21.972 „	47.152 „
„ — Wates	11.425 „	10.140 „
„ — Kretek	6.874 „	27.664 „
„ — Srandakan	5.616 „	23.480 „
„ — Kaliurang		20.330 „

N.B. Djurusan Wates, Kretek dan Srandakan mulai rit pada bulan Oktober 1951.

Pengangkutan untuk barang.

Selain bus-bus-onderneming, djuga transport-onderneming (perusahaan angkutan) mendapat perhatian besar dari umum apalagi oleh karena angkutan barang dengan Kereta Api pada waktu itu belum lantjar jang disebabkan keadaan keamanan, kekurangan alat-alat dan sebagainja, sehingga untuk sementara itu truck-trucklah jang banjak digunakan untuk alat pengangkutan barang dari Jogjakarta kelain tempat dan sebaliknja. Keadaan ini memberi kesempatan jang amat baik bagi bertambah dan berkembangnja perusahaan angkutan bangsa kita. Seperti tjendawan dimusim udjan tumbuhlah transport-onderneming-onderneming (T.O.2) di Jogjakarta ini.

Dibawah ini kita tjatat N.V.2 maupun perseorangan transportonderneming jang ada di Jogjakarta.

1. N.V. Adien
2. „ Bahagia
3. „ Mataram
4. „ Fortuna
5. „ Kalipasir
6. „ Pendowo Limo
7. T.O. Hasjim
8. N.V. Soenarjo
9. „ Expra
10. „ Timur
11. T.O. Merapi
12. „ Jogjakarta
13. T.O. Tiong Sing
14. „ Bangun
15. „ Sedia
16. „ Sakuntolo
17. „ Dinamo
18. „ Tiga Kawan
19. N.V. Gunung Sewu
20. T.O. K. W. S.
21. N.V. Baker.
22. T.O. Hasil.
23. „ Jogja.
24. „ Barito.

Pada tahun 1951 di Jogjakarta sini terdapat 25 transport-onderneming dengan 52 buah truck untuk umum, adapun jang tidak untuk umum ada 21 transport-onderneming dengan 22 buah truck.

Pada tahun 1952 ada 25 transport-onderneming dengan 65 buah truck dan 33 transport-onderneming tidak untuk umum dengan 34 buah truck.

Transport-onderneming tidak untuk umum artinja digunakan sendiri jaitu untuk pabrik-pabrik atau importir-importir dan sebagainja.

Untuk menggalang kerdja sama dan untuk mentjegah persaingan-persaingan jang tidak sehat, maka dibentuklah suatu organisasi jang bernama P.P.O.J. (Persatuan Perusahaan Otobis Jogjakarta) jang diketuai oleh sdr. Rudjito, sedang untuk transport-onderneming dibentuk suatu organisasi bernama P. P. A. J. (Persatuan Perusahaan Angkutan Jogjakarta), dan diketuai oleh sdr. Sunarjo.

Djumlah bus truck dalam tahun 1951 dan 1952.

Matjam kendaraan	djumlah th. 51	djumlah th. 52
1. Bus djalan djurusan tetap	73 buah	74 buah
2. Bus untuk tjadangan	32 „	48 „
3. Truck untuk umum	41 „	51 „
4. Truck untuk umum	11 „	14 „
5. Truck tidak untuk umum	19 „	21 „
6. Truck tidak untuk umum	3 „	13 „

N.B. Bus2 dan truck2 kepunjaan pemerintah tidak tertjatat, ketjuali dari D. A. M. R. I.

DAFTAR DARI ADANJA MASING-MASING DJENIS KENDARAAN JANG TELAH DIDAFTAR SAMPAI ACHIR TAHUN 1952

Oto persoon		Otolette Wagen		Pick-Up. Ambulance		Jeep		Bus		Truck, Kraan-Wagen		Scooter		Speda motor		Sepeda bermotor	
Ind.	Asing	Ind.	Asing	Ind.	Asing	Ind.	Asing	Ind.	Asing	Ind.	Asing	Ind.	Asing	Ind.	Asing	Ind.	Asing
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
496	58	70	22	100	6	121	1	118	—	179	24	6	10	224	42	554	129

Rekapitulasi.

Kolom 1 = 496.
„ 2 = 58.
„ 3 = 70.
„ 4 = 22.
„ 5 = 100.
„ 6 = 6.
„ 7 = 121.
„ 8 = 1.
„ 9 = 118.
„ 10 = —.
„ 11 = 179.
„ 12 = 24.
„ 13 = 6.
„ 14 = 10.
„ 15 = 224.
„ 16 = 42.
„ 17 = 554.
„ 18 = 129.

Djumlah: = 2.160.

BANJAKNJA PELANGGARAN LALU-LINTAS DJALAN DALAM TAHUN 1952.

Pelanggaran	Djan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Me i	Djuni	Djuli	Agt.	Sept.	Oct.	Nop.	Des.	Djumlah :
1. Muatan klas djalan	—	—	—	1	2	2	4	1	4	6	4	6	30
2. Batas ketjepatan	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3. Keslamatan	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	4
4. Surat2 keterangan	—	1	4	—	—	2	—	1	—	—	—	—	8
5. Kendaraan umum	—	1	5	8	2	7	2	2	3	7	1	3	41
6. Pelanggaran lain-lain	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Djumlah	—	2	11	9	4	12	7	4	8	13	5	10	85

E. P.T.T. SALAH SATU ALAT PERHUBUNGAN JANG VITAL

DISAMPING perbaikan djalan-djalan dan djembatan-djembatan, kereta-api, kendaraan bermotor, maka P.T.T. adalah termasuk salah satu alat perhubungan jang vital, jang djuga memegang rol dalam masa perdjuangan kemerdekaan maupun dalam masa damai.

Sesudah proklamasi kemerdekaan, seperti djuga dilain-lain Djawatan atau perusahaan segera berdiri organisasi Angkatan Muda jang dengan kesadarannja turut mempertahankan kemerdekaan. Dengan semangat jang berkobar-kobar banjak sekali pekerdjaan atau tugas-tugas jang berat-berat dapat diselesaikan jang didalam masa damai ta' mungkin dikerdjakan, dan pekerdjaan meliputi banjak tjabang-tjabangnja.

Berkat keinsjafan para pegawai dan kebidjaksanaan pimpinan, maka para pemuda jang terdapat dalam Djawatan P.T.T. ini dapat dikoordineer.

Gerakan pertama dari pegawai-pegawai P.T.T. jalah dari Djakarta mengirimkan utusannja ke Pusat P.T.T. di Bandung mendesak supaja segera diadakan pengoperan atau perebutan kekuasaan Djawatan P.T.T. dari tangan Djepang oleh bangsa Indonesia. Pimpinan Kantor Pusat P.T.T. supaja bertanggung djawab djangan sampai P.T.T. didaerah-daerah bertindak sendiri-sendiri. Dengan demikian maka sekaligus aksi ini akan dapat merata dan bersama-sama mulai dari Pusat sampai didaerah jang ketjil-ketjil.

Desakan ini oleh Kantor Pusat P.T.T. di Bandung jang diwakili oleh Hernowo dan wakil pemuda Soetoko, disetudjui dan segera dilaksanakan. Tidak lama lagi lalu dilangsungkan perundingan antara Wakil-wakil tersebut diatas dari Kantor Pusat P.T.T. dengan pembesar-pembesar Djepang, jang bermaksud supaja fihak Djepang menjerahkan kekuasaannja atas Djawatan P.T.T. dari pusat sampai didaerah-daerah dimana Kantor P.T.T. berada, kepada bangsa Indonesia. Berkat kebidjaksanaan wakil-wakil pegawai P.T.T. tersebut perundingan berdjalan dengan lantjar dan berhasil baik.

Hasil dari perundingan ini dapat dibuktikan dengan adanja instruksi oleh Kantor Pusat sebagai pernjataan resmi, bahwa mulai tanggal 1 September 1945, semua Kantor P.T.T. dari Pusat sampai di daerah-daerah hal pimpinan dan kekuasaannja diambil oper oleh bangsa Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia).

Semendjak saat itu untuk terlaksananja semua instruksi-instruksi Pemerintah Pusat maupun dari B.P.K.N.I.P. jang disalurkan melalui Djawatan P.T.T. kedaerah-daerah dengan telegram-telegram Hernowo sebagai pimpinan Djawatan P.T.T. jang bertanggung djawab. Pekerdjaan ini adalah sangat penting untuk mewudjudkan, bahwa Pemerintahan Nasional ini sungguh-sungguh berdjalan.

Gerakan-gerakan selandjutnja didaerah-daerah, di Kota-kota besar seperti: Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaja, Jogjakarta dan lain-lain, pegawai-pegawai P.T.T. selain aktif mempertahankan hak milik P.T.T. jang telah berada didaerah kekuasaan Republik, dengan segala konsekwensinja, djuga ikut bertempur melutjuti sendjata Djepang, dan selandjutnja ikut melawan tentara Sekutu jang akan mengembalikan kekuasaan kolonialnja di Indonesia, sehingga banjak pegawai-pegawai jang harus dinas diluar (tidak berkantor), atau menjertai B.K.R. dan mengambil bagian perhubungan digaris depan dengan memasang hubungan Telegrap, Telepon dan Radio. Adapun jang ada di kantor terus bekerdja aktif melaksanakan penilikan (sensur) surat-surat jang mengandung kepentingan musuh.

Akan tetapi setelah musuh mendesak terus dan menduduki kota-kota besar, kemudian dilakukan gerakan menjelamatkan segala matjam keperluan administrasi dan tehnik jang terantjam oleh musuh. Jang semula semuanja

itu berpusat di Bandung kemudian dibagi-bagi antara lain di Priangan Selatan, Tasikmalaja, Purworedjo, Prembun, Jogjakarta dan Surakarta.

Disamping itu masih terus dikerdjakan pemasangan setasiun-setasiun radio P.T.T. guna keperluan perhubungan tentara kita. Dengan semangat jang bergelora pekerdjaan jang penting dapat diselenggarakan antara lain pemindahan pusat Laboratorium Radio dan pusat Telekomunikasi dari Bandung masing-masing ke Jogjakarta dan Surakarta.

Dalam perdjuangan ini pengorbanan jang berwudjud harta-benda tidak dihiraukan, sedangkan korban djiwa banjak terdjadi. Pemindahan pegawai dengan keluarganja meskipun mengalami banjak sekali kesukaran tetapi achirnja dapat djuga terlaksana.

Adapun untuk keperluan di Djawa Barat diadakan tjabang Radio P.T.T. di Tasikmalaja, Manondjaja dan Tjiamis. Setasiun radio P.T.T. jang ada di Surabaja, setelah kota ini diduduki musuh kemudian dipindah ke Modjokerto. Dan setasiun radio P.T.T. dibuka djuga di Tawangmangu, Surakarta dan Jogjakarta.

Meskipun pada mulanja perhubungan P.T.T. dari seberang laut dan Djakarta dengan telegrap, telepon dan radio tetap kita pelihara dan kita pertahankan, tetapi achirnja akibat kemadjuan-kemadjuan musuh hubungan ini mendapat rintangan djuga. Namun pegawai-pegawai P.T.T. tidak putus asa, dan berusaha supaja hubungan-hubungan pos selalu dapat diadakan.

Tetapi pada waktu terdjadi clash pertama tanggal 21/7 - 1947, perhubungan seberang laut daerah-daerah Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur setjara fomeel terputus-putus. Kantor Pusat P.T.T. dipusatkan di Kota Jogjakarta dengan pimpinan jang bertanggung djawab ialah Soeharto. Tjabang-tjabangnja : Djawa Barat di Djakarta, Djawa Timur di Malang dan Sumatera di Bukittinggi.

Dengan adanja daerah-daerah pendudukan oleh Belanda itu maka pegawai-pegawai P.T.T. petjah mendjadi dua, antaranja P.T.T. R.I. dan P.T.T. Federaal. Pekerdjaan perhubungan P.T.T. jang masih dapat diadakan antara Pusat dengan tjabang-tjabangnja untuk daerah R.I. terutama jang ada diseberang laut diadakan dengan telegrap dan radio. Dan kadang-kadang bila ada kesempatan diadakan perhubungan dengan kapal udara.

Sebagai modal alat-alat jang digunakan jaitu segala matjam bahan jang masih tersimpan digudang-gudang antara lain : di Bandung, Surabaja dan Djakarta jang dapat disingkirkan ke Jogjakarta, Surakarta, Prembun, Manondjaja dan Tasikmalaja. Dengan bantuan dari Djawatan Kereta-Api alat-alat jang diangkut jang hingga berpuluh-puluh trein-formaties itu dapat diselamatkan. Alat-alat ini meliputi benda-benda dari jang beratnja beberapa gram hingga benda-benda jang berton-ton beratnja, jaitu seperti pemantjar jang besar-besar, mesin-mesin bubut, agregaat-agregaat listrik dan lain-lain.

Disini dapat dibuktikan betapa berdjasanja alat-alat tersebut didalam masa revolusi jang mengalami blokkade musuh, pada saat mana kita ketahui bahwa ta' dapat mengimport alat-alat maupun bahan-bahan baru. Dengan bahan-jang ada ini dapat dibikin alat-alat seperti stopkontakt, steker, schakelaar, resister, condenser dan lain-lain jaitu dalam tahun antara 1946 dan 1947. Pembetulan lampu-lampu pemantjar jang besar-besar setjara sederhana sudah dapat dimulai dalam tahun 1947 di Jogjakarta.

Beratus-ratus alat-alat pemantjar dan penerima besar ketjil dapat diselesaikan. Pembuatan-pembuatan baru djuga terus dikerdjakan, meskipun kwaliteit produksinja belum sempurna tetapi terbukti dapat dipakai dengan memuaskan.

Perlengkapan-perlengkapan bengkel dan laboratoria djuga dapat diungsikan kepedalaman, sehingga bagian-bagian ini dapat berdjasa sekali dalam mengembangkan keperluan alat-alat. Untuk tambahan persediaan dilakukan pembelian-pembelian terhadap pihak partikelir dan pembikinan alat-alat primair untuk

keperluan pesawat-pesawat dan instalaties. Dalam tahun 1948 dimulai pembongkaran pesawat-pesawat tua untuk memperlengkapi pesawat dalam pembikinan. Perubahan dari pembetulan ini memakan banjak tenaga dan waktu, tetapi terpaksa dikerdjakan karena pada waktu itu sulit sekali untuk mendapat bahan-bahan primair jang kita butuhkan. Pokok pekerdjaan dari radio P.T.T. jang terpenting untuk keperluan perdjuangan ialah telekomunikasi radio mengenai radio-telefoni dan radio-telegrafi baik untuk keperluan militer maupun sipil. Perhubungan ini meliputi daerah-daerah di Djawa, Sumatera dan perhubungan dengan Luar Negeri misalnja dengan India. Dengan begitu berita-berita Pers (Antara) dan pengumuman-pengumuman pemerintah jang penting-penting dapat diterima di India dan disiarkan kembali dengan pemantjar-pemantjar jang lebih kuat hingga dapat tersebar dan dapat didengar diseluruh dunia.

Begitu djuga perhubungan pemerintah dengan wakil-wakilnja di luar negeri, misalnja di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan alat-alat ini dapat dilaksanakan. Dengan demikian dapat dimengerti betapa pentingnja pantjaran radio pada waktu itu, dengan mana kita dapat menjatakan kepada seluruh dunia apa jang dikehendaki oleh rakjat Indonesia jang berdjumlah 70 djuta itu sehingga tjita-tjita dan keinginan bangsa Indonesia ini mendapat simpatie dari pelbagai bangsa.

Pada waktu terdjadi clash ke II keadaannja sangat mengchawatirkan. Sebagian ketjil alat-alat dapat diungsikan di gunung-gunung misalnja didaerah Tawangmangu dan Sarangan. Beberapa ratus pegawai sebagian besar pergi keluar kota ikut serta menggabungkan diri dalam badan-badan perdjuangan dan ikut bergerilja digaris depan, sebagian ada jang membuat perhubungan dengan alat-alat jang ada jaitu mengadakan telepon, rumah pos-pos dengan menjusun koerier-koeriernja. Sebagian dari alat-alat radio P.T.T. dengan pegawai-pegawainja jang dapat dikuasai oleh Belanda diangkut kembali ke Djawa Barat.

Satu hal jang sangat mengharukan bagi pegawai P. T. T. chususnja ialah bahwa Soeharto sebagai Kepala Djawatan P. T. T. jang berpusat di Jogjakarta ini pada waktu pendudukan ia telah ditjulik oleh Belanda sehingga sampai saat ini belum dapat diketahui tentang nasibnja. Meskipun dengan berbagai djalan dan usaha untuk menjusur peristiwa ini, akan tetapi pemerintah kita sendiri belum djuga dapat memberi pendjelasan jang menentukan. Dari kalangan P. T. T. hilangnja beliau ini sangat terasa sekali karena ia adalah merupakan suatu pimpinan jang berani, djudjur dan adil dan beliaulah jang selalu ditaati dan didjundjung tinggi oleh pegawainja.

Beberapa bulan sebelum Belanda meninggalkan Jogjakarta oleh kalangan pimpinan P. T. T. telah direntjanakan suatu formatie baru jang akan ditugaskan dengan rentjana-rentjana jang tertentu, apabila pemeritah R. I. telah kembali di Jogjakarta. Pada waktu itu Djawatan P. T. T. menghadapi kesulitan-kesulitan jang hebat mengenai segala hal. Pada tanggal 1 Djuli 1949 Belanda pergi meninggalkan beberapa matjam alat-alat P. T. T. jang tidak karuan keadaannja. Tepat pada hari itu pegawai-pegawai P. T. T. bagian radio dengan giat mulai meng-instaleer dan mengerdjakan pembetulan-pembetulan, karena dua hari lagi jaitu pada tanggal 3 Djuli 1949 perhubungan radio P. T. T. dengan Bandung harus dapat berlangsung. Tepat pada hari tersebut perhubungan radio telefoni dan telegrafi keluar daerah Jogja dengan melalui Bandung dapat dimulai. Seperti diketahui bahwa seluruh dunia betul-betul memperhatikan dengan apa jang terdjadi di pusat Ibukota sementara Jogjakarta, sehingga beribu-ribu surat kawat harus dikerdjakan sampai djauh-djauh malam. Lebih-lebih pada waktu kedatangan kembali Presiden pada tgl. 6 Djuli 1949 di Jogjakarta, tumpukan surat kawat tidak dapat dihabiskan, sehingga harus dikirim dengan pesawat udara.

Kesukaran-kesukaran ini disebabkan karena sangat kurangnja alat-alat perlengkapan sehingga sesudah diadakan penindjauan dari Menteri Perhubung-

an jang pada waktu itu ialah Ir. Laoh, Djawatan P. T. T. baru mendapat sedikit-sedikit tambahan perlengkapan dari P.B.B. Dengan berlangsungnja persetudjuan K. M. B. maka terdapat suatu keputusan bahwa pusat P. T. T. jang ada di Jogjakarta kemudian disatukan kembali dengan pusat jang ada di Bandung. Dengan demikian maka Kantor P. T. T. di Jogjakarta tidak lagi mendjadi Kantor Pusat.

Didalam waktu penggabungan P. T. T. R. I. dan P. T. T. RIS jang ada di Bandung ini dengan sendirinja pegawai-pegawainja pun digabungkan mendjadi satu. Pada mulanja pegawai-pegawai jang dari R.I. mempunjai perasaan sedikit ragu-ragu dan timbul suatu masalah jang disebut non dan co. Non jaitu pegawai-pegawai jang sama sekali tidak pernah turut Belanda dan co jaitu pegawai-pegawai jang pernah turut Belanda atau pegawai jang menjeberang. Tetapi berkat pimpinan Pemerintah jang bidjaksana ini ketegangan antara non dan co dikalangan P. T. T. dapat diatasi.

Kesulitan-kesulitan ini lebih lagi dialami oleh bagian radio P.T.T. pada waktu penggabungan itu, sebab pegawai jang masih tinggal di Jogja sesudah clash ke II hanja sedikit sekali. Baru sesudah bulan Agustus 1949 pegawai-pegawai jang ada ditjabang Terlab Karangpandan Solo turun dari gunung-gunung dengan membawa alat-alat menggabungkan kembali dengan pegawai2 jang masih tinggal di Kota Jogjakarta. Pegawai-pegawai ini disambut dengan gembira karena mereka telah berbulan-bulan mendapat tugas dipegunungan dan kembali dengan alat-alatnja jang banjak djumlahnja, meskipun sudah banjak jang rusak akan tetapi masih dapat dipakai untuk memperbaiki instalasi-instalasi. Bagian besar mereka itu berasal dari Djawa Barat, hingga pada waktu penggabungan mereka merupakan pelopor dari Pusat Radio P.T.T. di Jogjakarta. Dalam pada itu para pegawai tersebut sekali lagi harus mengalami batu udjian ialah harus membuang segala sentimen-sentimen jang timbul akibat perbedaan perdjuangan selama ini. Demi kepentingan untuk berdiri tegaknja negara kita maka sentimen tersebut dengan segala pengorbanan perasaan dapat diatasi.

Pegawai-pegawai jang datang dari daerah Karangpandan tadi mendapat hadiah langsung dari Presiden berupa pakaian beberapa stel tiap pegawai.

Sesudah penggabungan tersebut berdjalan dengan lantjar achirnja oleh Pemerintah sebagai acting Kepala Djawatan P.T.T. untuk seluruh Indonesia ditetapkan Mr. Soekardan, jang hingga sekarang tetap memangku djabatan tersebut.

Semendjak pengakuan kedaulatan sampai sekarang telah banjak sekali perbaikan-perbaikan dan pembangunan-pembangunan jang dikerdjakan dalam bagian radio P.T.T. mengenai teknik, susunan pegawai, dan lain-lain urusan. Meskipun demikian tambahnja alat-alat perlengkapan masih belum dapat lantjar seperti jang kita harapkan.

Perhubungan radio oleh Djawatan P.T.T. besar sekali artinja untuk kepentingan negara. Radio P.T.T. merupakan satu-satunja djawatan jang dengan resmi diperbolehkan mengadakan saluran-saluran telekomunikasi antar Indonesia dan Internasional dan ini merupakan djalan jang paling tjepat untuk mengadakan hubungan setjara telegrap dan telepon. Terutama besar artinja untuk negara seperti Indonesia ini jang terdiri dari banjak kepulauan.

Kita sekalian dapat membajangkan betapa sulitnja bila alat-alat tersebut diatas ini tidak ada, misalnja untuk perhubungan antara Djakarta dan Singapur, atau antara Surabaja dan Makassar atau Ambon.

Segala sesuatu akan memakan waktu berhari-hari mungkin berbulan-bulan untuk mendapatkan kata sepakat antara pihak-pihak jang berkepentingan dengan djalan surat-menjurat sadja. Lebih-lebih dalam lapangan perdagangan, perhubungan tjepat ini besar sekali manfaatnja. Maka dalam hal ini Djawatan P.T.T. terus sibuk memperluas saluran-salurannja didalam antar Indonesia,

dengan djalan radio. Perhubungan ini adalah sjarat jang ta' boleh diabaikan dalam perkembangan keamanan, lalu - lintas melalui daratan, lautan dan udara beserta dengan perkembangan ekonomi daerah-daerah. Begitu djauh nanti akan lebih madju lagi, sehingga orang dalam perdjalanan apapun dapat berhubungan dengan tempat-tempat jang dibutuhkan setjara kilat. Lebih dari itu perkembangan saluran-saluran radio menimbulkan kebutuhan akan industri jang diperlukan guna membuat perlengkapan-perlengkapannja, misalnja paberik-paberik, alat teknik jang luas sekali. Pada saat ini alat-alat tersebut masih di-import dari luar negeri jang berdjumlah hingga puluhan djuta rupiah tiap tahun.

Kerusakan-kerusakan jang diderita oleh Djawatan P.T.T. di Jogjakarta selama itu antara lain ialah terutama tjap-tjap harian, plombeer tang, kantong-kantong pos dan kendaraan untuk lantjarnja pengangkutan (mobil/sepeda). Selain itu djuga alat-alat tilpun, alat-alat radio P.T.T. dan sebagian dari gedung Kantor Besar mengalami kerusakan.

Gedung-gedung untuk Kantor-kantor pos Pembantu hampir semuanja rusak dan hingga sebagian besar terpaksa menempati gedung-gedung partikelir jang tidak begitu kuat atau kurang memenuhi sjarat-sjaratnja. Gedug-gedung Kantor Pos pembantu jang dibumi-hanguskan ialah : Brosot, Rewulu, Temon, Wonosari dan Sentolo.

Adapun banjaknja kantor Pos pembantu pada sebelum clash ke II ada 20 buah tempat, jaitu Bantul, Prambanan, Brosot, Kalasan, Kaliurang, Karanganjar (Kebumen), Kotagede, Kutoardjo, Kutowinangun, Medari, Muntilan, Nanggulan, Purwodadi (Kedu), Prembun, Rewulu, Salam, Sentolo, Temon, Wates dan Wonosari.

Sampai achir tahun 1952 ini didalam Kota selain ada Kantor Besar, telah ada Kantor-kantor Pos tambahan jaitu di Gondolaju, Klitren Lor dan Brontokusuman.

Kantor-kantor Pos pembantu jang pada sebelum clash ke II ada 20 buah tempat tadi setelah pengakuan kedaulatan jang berada dibawah pengawasan Kantor Besar di Jogjakarta hanja mendjadi 12 buah tempat, jang 8 buah tempat lainnja jaitu : Prambanan, Karanganjar, Kutowinangun, Muntilan, Purwodadi (Kedu), Prembun dan Salam dimasukkan pengawasan dilain Ibu Kantor.

Djawatan P.T.T. jang mendjadi salah satu Djawatan penghubung jang sangat penting baik untuk keperluan Pemerintah maupun untuk keperluan umum, sesudah pengakuan kedaulatan banjak sekali pekerdjaan dan kebutuhan umum jang dilajani. Meskipun pada tahun 1947 Kota Jogjakarta mendjadi padat karena tambahnja beribu-ribu penduduk jang datang dari pelbagi daerah untuk mengungsi, dan djumlah itu melebihi daripada keadaan djumlah penduduk jang sekarang, akan tetapi penggunaan umum terhadap Djawatan Pos itu tidak melebihi seperti sekarang.

Gedung Kantor Besar Pos dan Telegrap, terutama pada ruangan untuk umum, kazanah dan tempat menjimpan barang-barang pos paket tidak dapat memadai lagi menurut kebutuhan.

Kesibukan-kesibukan pekerdjaan Kantor P.T.T. itu dapat dilihat-perbandingannja antara tahun 1947 dengan 1952 dengan angka-angka seperti di sebelah ini.

Demikianlah kemadjuan-kemadjuan dan djasa-djasa dari Djawatan P.T.T. sebagai alat-alat perhubungan jang penting baik dalam masa perdjuangan maupun dalam waktu damai.

* *
*

URAIAN	Tahun 1947		Tahun 1952		Keterangan
	Banjaknja barang/surat2	Banjaknja uang Rp.	barang/surat Banjaknja	Rp. Banjaknja uang	
1. Kiriman surat-surat biasa termasuk bebas dari bea					
a. jang dikirimkan	2.776.064		4.171.310		
b. jang diterima	1.733.340		6.829.378		
c. jang singgah (passe)	2.772.372		1.629.836		
2. Kiriman-kiriman tertjatat / terdaftar					
a. jang dikirimkan	58.228		201.276		
b. jang diterima	58.472		1.391.253		
c. jang singgah (passe)	142.222		66.437		
3. Kiriman-kiriman pos wesel					
a. jang dikirimkan	112.306	19.117.717.22	113.448	28.093.122,795	
b. jang dibajarkan	126.736	7.645.447.54	380.220	47.560.134,74	
4. Kiriman-kiriman pospaket					
a. jang dikirimkan	8.858		24.864		
b. jang diterima	7.198		21.521		
c. jang singgah	17.774		17.967		
5. Pendjualan benda-benda pos		301.509.40		1.376.751.22	
„ „ meterai		190.397.80		581.793.30	
„ „ meterai - upah		78.797.50		234.650.50	
„ „ meterai pembangunan		225.085.—		336.000.—	
„ surat-surat padjak potong ternak		197.105.40		231.528.—	

URAIAN	Tahun 1947		Tahun 1952		Keterangan
	Banjaknja barang/surat2	Banjaknja uang Rp.	Banjaknja barang/surat²	Banjaknja uang Rp.	
6. Penerimaan padjak radio		112.880.—	5.863	317.625.—	
Pesawat radio jang didaftarkan	—.—				
7. Bank Tabungan Pos			21.073		
a. Simpanan	24.046	1.050.880.96	8.080	2.129.794,31	
b. Pembajaran kembali	10.712	696.058.02		538.626.66	
8. a. Telegram jang diundjukkan (aangeboden)			37.524		
b. Telegram jang diserahkan (besteld)	67.144		34.382		
c. Uang pendahuluan.	90.166	697.284.45	16.152	307.887.12	
9. a. Hubungan dengan luar negeri	—.—		240		
b. Telegram jang dikirimkan rata-rata	—.—		240		
c. Telegram jang diterima rata-rata	—.—				

3. KEPADATAN PENDUDUK DAN TRANSMIGRASI

A. PERTUMBUHAN ORGANISASI DJAWATAN

MENGINGAT bahwa rakjat Indonesia bagian terbesar adalah hidup dari pertanian, termasuk penduduk di Jogjakarta sendiri 75% adalah hidup dari pertanian, sedangkan kebutuhan akan tanah bagi kaum tani disini makin lama makin terasa kurangnja berhubung makin bertambahnja djumlah djiwa, maka djalan satu-satunja jang harus kita tempuh sebelum kita dapat mempersiapkan lapangan penghidupan jang lain seperti mempersiapkan adanja industrialisasi setjara besar-besaran, terlebih dahulu kita berusaha mentjarikan mereka lapangan hidup jang sesuai dengan bakat dan keahlian mereka jaitu dengan menempatkan mereka didaerah-daerah jang tanahnja subur jang masih belum diusahakan oleh manusia, dengan arti lain jalah diadakan transmigrasi.

Dengan demikian maka bagi rakjat disini berarti suatu keuntungan jang besar karena penduduknja jang makin lama makin bertambah banjak ini, dengan tjara jang berangsur-angsur dan teratur akan dikurangi untuk dipindahkan kelain tempat dan nasib mereka tentu akan bertambah baik. Sudah tentu kepergian mereka dari Jogjakarta itu, bila sampai ditempat jang telah ditentukan, harus bekerdja keras lebih dahulu jang achirnja mereka baru mendapatkan tanah pertanian jang luas, dan hasil produksipun akan naik.

Djadi pendek kata transmigrasi atau pemindahan penduduk dari daerah ini, kedaerah luar Djawa semestinja harus diperhebat. Akan tetapi berhubung dengan keuangan negara maka pembiajaan mengenai hal tersebut, tidak dapat mentjukupi menurut rentjana, sehingga hasil-hasil dari usaha tersebut belum memenuhi kebutuhan. Transmigrasi itu tidak melulu hanja terdiri dari kaum tani sadja akan tetapi djuga kaum pertukangan, untuk dapat bekerdja bersama-sama membangun masjarakat ditempat jang baru.

Sesungguhnja tentang pemindahan penduduk keluar daerah itu, telah lama diadakan rentjana persiapan. Sebelum pengakuan kedaulatan, jaitu pada tahun 1947 semasa Kabinet Amir Sjarifuddin, oleh Pemerintah pernah dimasukkan didalam rentjana kemakmuran 3 tahun, dengan maksud apabila keadaan suasana negara kita telah memungkinkan, maka kita tinggal mendjalankan usaha tersebut dengan lantjar.

Akan tetapi berhubung dengan timbulnja rintangan-rintangan besar ketjil, maka rentjana transmigrasi tadi bagi daerah Jogjakarta sini baru sesudah penjerahan kedaulatan jaitu pada tahun 1950 dapat mulai dikerdjakan.

Untuk dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan transmigrasi didaerah Jogjakarta sini, dibawah ini kita dapat mengikuti selandjutnja.

Pada tahun 1950 semasa Kabinet Halim, maka pada tanggal 16 - 1 - 1950 berdirilah Kementerian Pembangunan Masjarakat. Tugas penjelenggaraan transmigrasi jang sebelum itu termasuk dalam kompetensi Kementerian Dalam Negeri, kemudian oleh Kementerian ini dengan suratnja keputusan tanggal

25 - 2 - 1950, No. UP/45/15, diserahkan kepada Kementerian Pembangunan Masjarakat.

Setelah tugas tersebut diterima, kemudian oleh Kementerian Pembangunan Masjarakat bulan Maret 1950 didirikan Kantor Transmigrasi, untuk menjelenggarakan apa jang tertera dalam Peraturan Pemerintah R.I. Jogja no. 8 tahun 1950 pasal 13 sub d, jaitu : menjelenggarakan transmigrasi.

Selandjutnja mulai tanggal 1 Mei 1950, kantor tersebut didjadikan Djawatan dan pimpinan diserahkan kepada saudara Suratno Sastroamidjojo.

Pekerdjaan jang dilakukan oleh Djawatan Transmigrasi tadi terutama ialah pendirian kantor-kantor Transmigrasi dipulau Djawa dan di Sumatera Selatan, kemudian menjelenggarakan pengiriman keluarga transmigran menurut peraturannja.

Akan tetapi berhubung dengan berdirinja negara Kesatuan menjebabkan digabungkannja Pemerintah R.I. Jogja dengan Pemerintah R.I.S. maka Kementerian Pembangunan Masjarakat didalam Kabinet pertama dari Negara Kesatuan R.I. ini, jaitu dalam Kabinet Natsir, ditiadakan. Selandjutnja dengan keputusan Perdana Menteri R.I., semua pegawai dari Djawatan Transmigrasi tadi dimasukkan dalam Kementerian Sosial bagian Transmigrasi, bersama-sama dengan Bagian Pemindahan Rakjat dari bekas Kementerian Perburuhan R.I.S. jang djuga dimasukkan dalam Kementerian Sosial bagian Transmigrasi, adalah termasuk mendjadi urusan Kementerian Sosial.

Dalam hal ini pimpinan Djawatan diserahkan kepada Ir. A.H.O. Tambunan jang pernah memimpin djuga bagian Transmigrasi ini di Kementerian Dalam Negeri.

Sekarang tugas-tugas jang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada Djawatan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan rakjat didaerah jang padat untuk dipindahkan kedaerah-daerah lain.
2. Melakukan pembukaan tanah-tanah kosong dan hutan-hutan, jang baik untuk pemindahan (transmigrasi).
3. Memindahkan kaum transmigran dari tempat asalnja, ketempat-tempat jang sudah dibuka, menurut rentjana jang telah disusun.
4. Membangun usaha-usaha bagi penghidupan transmigran ditanah transmigrasi.
5. Mendjamin hidup kaum transmigran, menurut batas jang ditentukan sedjak berangkat dari tempat asalnja sampai mereka mendapat hasil penghidupan sendiri ditempat jang baru.
6. Memperbaiki keadaan para transmigran jang lama ditanah-tanah transmigrasi.

Dengan masuknja Djawatan Transmigrasi dari Kementerian Pembangunan Masjarakat ke Kementerian Sosial, maka Djawatan tersebut jang pada mulanja di Jogjakarta berkantor di Gondolaju 5 dan Tugu 44, kemudian berangsur-angsur pindah ke Djakarta.

Selandjutnja di Jogjakarta kantor Transmigrasi tinggal disebut Rayon Daerah Istimewa Jogjakarta jang pada mulanja dipimpin oleh R. Utojo Danuwinoto, kemudian pada tanggal 1 - 9 - 1951 diganti oleh Ramelan Koesasi. Tugas dari Kantor tersebut sekarang ialah :

a. Melaksanakan penjelenggaraan transmigrasi didaerah Istimewa Jogjakarta.
b. Melantjarkan pertumbuhan organisasi Djawatan dengan melaksanakan pembukaan kantor-kantor tjabang dan penjelenggaraan asrama.
c. Menjelenggarakan penginapan dan pengangkutan para transmigran dari lain daerah jang meliwati Jogjakarta.

Demikialah diantaranja tugas-tugas dari Kantor Rayon Daerah Istimewa Jogjakarta, dan selandjutnja berturut-turut telah dapat dibuka kantor-kantor

Transmigrasi tjabang: Kabupaten-Kabupaten Sleman, Kulon-Progo, Bantul dan Gunung-Kidul, semuanja dalam tahun 1951.

B. PENJELENGGARAAN TRANSMIGRASI

Tentang penjelenggaraan transmigrasi itu disini dapat diterangkan bahwa ada tiga matjam rombongan transmigrasi, jaitu: transmigrasi keluarga, transmigrasi umum dan transmigrasi dengan ongkos sendiri (vrije transmigrasi).

a. Jang dimaksud dengan transmigrasi keluarga ialah, transmigrasi jang diselenggarakan oleh pemerintah, atas permintaan dari sanak familinja jang telah lama tinggal ditanah transmigrasi. Dalam hal ini pemerintah memberikan pertolongannja mangatur perdjalanan mereka, memberi sekedar bantuan uang makan, ongkos perdjalanan dalam rayon, ongkos kereta-api, uang saku selama dalam perdjalanan dan sebagainja. Selain itu pemerintah djuga mengambil tindakan membatasi mereka jang sudah tua, atau orang-orang jang penghidupannja tidak kekurangan dan sebagainja tidak mendapat panggilan.

b. Jang dimaksud dengan transmigrasi umum jaitu transmigrasi jang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan biajanja dipikul oleh pemerintah sedjak berangkat sampai ditempat-tempat lapangan kerdja jang ditudju jang biasanja baru mulai dibuka sebagai lapangan penghidupan baru. Sehingga sebelum mereka dapat berdiri sendiri selama itu masih tetap mendjadi tanggungan pemerintah dalam hal djaminan penghidupan, menurut pertimbangan.

Transmigrasi keluarga.

Pada tanggal 1 Mei 1950, Djawatan Transmigrasi telah mengeluarkan peraturan jang ditudjukan kepada para transmigran jang sudah lama berada ditanah transmigrasi, jaitu dengan maksud mereka diberi kesempatan untuk mendatangkan sanak familinja jang masih berada di Djawa ketempat tanah transmigrasi mereka dengan perantaraan dan pertolongan Pemerintah untuk mendjadi transmigrasi keluarga.

Dengan keluarnja peraturan tersebut, maka disambut dengan hangat oleh mereka jang berkepentingan terbukti dengan banjaknja permohonan-permohonan jang diadjukan kepada Kantor Transmigrasi. Dan berhubung dengan persiapan-persiapan jang sedang dimulai maka oleh Djawatan Transmigrasi di Jogjakarta sini pada tanggal 6 Desember 1950 penjelenggaraan transmigrasi keluarga tersebut baru dapat dimulai, dan rombongan pertama telah berangkat dari Jogjakarta.

Seterusnja dibawah ini kita tjantumkan angka-angka penjelenggaraan transmigrasi keluarga mulai tahun 1950 hingga tahun 1952.

	Th. 1950		1951		1952		djumlah:	
Dari Daerah:	kel.	djw.	kel.	djw.	kel.	djw.	kel.	djw.
Kab. Sleman	4	7	39	107	123	475	166	589
Kab. Kulon Progo	1	1	51	175	160	619	212	795
Kab. Gunung Kidul	1	1	15	67	90	472	106	540
Kab. Bantul	—	—	11	24	41	159	52	183
Kotapradja Jogjakarta	—	—	—	—	4	14	4	14
Djumlah:	6	9	116	373	418	1739	540	2121

Adapun tempat jang ditudju transmigran jang tersebut diatas itu selama tiga tahun ini:

Lampung	326	keluarga	1374	orang.
Palembang	202	„	709	„
Sulawesi	7	„	27	„
Bengkulu	5	„	11	„
Djumlah:	540	keluarga	2121	djiwa.

Mereka datang sampai ditempat jang ditudju dengan selamat.

Adapun biaja-biaja jang ditanggung oleh Pemerintah sendiri jalah: ongkos perdjalanan, para transmigran beserta keluarganja terhitung pula angkos makan dari tempat jang ditinggalkan sampai tempat jang ditudju: ongkos pemeriksaan kesehatan sewaktu mendaftarkan diri; ongkos pengobatan dalam perdjalanan kedaerah transmigrasi; serta ongkos pemakaman bila ada kemungkinan kematian dalam perdjalanan.

Jang dapat diterima sebagai hutang dari Pemerintah ialah: alat-alat dapur, alat-alat pertanian dan bahan-bahan pakaian.

Soal tanah diberikan pada para transmigran keluarga disekitar tempat kediaman famili jang minta dulu, akan tetapi kalau dalam lingkungan itu tidak ada tanah kosong lagi, maka mereka ditempatkan ditempat lain, dan luasnja sesuai dengan pembagian-pembagian tanah jang berlaku dalam daerah dimana mereka ditempatkannja.

Transmigrasi Umum

Tudjuan jang pokok daripada usaha-usaha transmigrasi itu sesungguhnja ialah transmigrasi umum. Akan tetapi penjelenggaraan setjara leluasa dan besar-besaran oleh pemerintah sampai dewasa ini belum memungkinkan, ber hubung dengan faktor-faktor keuangan dan persiapan lain-lainnja, sehingga selama ini baru mentjapai djumlah jang ketjil apabila diukur dengan kepentingannja serta untuk memenuhi hasrat rakjat.

Meskipun transmigrasi umum itu mendjadi tudjuan jang utama akan tetapi pada tanggal 15 Maret 1952 baru dikeluarkan peraturan dari Djawatan Transmigrasi mengenai penjelenggaraan pemindahan tjalon-tjalon transmigran jang hanja mempunjai kepandaian pertukangan, perlu untuk persiapan pembuatan perumahan didaerah-daerah transmigrasi. Maka peraturan ini djuga sering disebut peraturan „transmigrasi tukang".

Pada tanggal 31 Djuli 1952, kantor Transmigrasi Rayon Daerah Istimewa Jogjakarta mendapat kehormatan untuk memulai dengan pemberangkatan transmigran, dan diambil dari tjalon-tjalon dari Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul.

Sebelum berangkat para kepala keluarga dari tjalon-tjalon transmigran terlebih dulu mendapat kursus tjepat jang dititik beratkan pada hidup berkoperasi, atau gotong rojong. Adapun tenaga-tenaga jang memberi kursus ialah antara lain dari Djawatan Pemerintahan Umum, Koperasi, Pertanian, Penempatan Tenaga dan Kantor Gerakan Tani.

Pada malam perpisahan rombongan pertama dari transmigrasi umum „tukang" ini, jang dipimpin oleh Begdjo dan Joewono, hadlir djuga Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, beberapa Kepala Djawatan di Daerah Istimewa Jogjakarta, Kepala Djawatan Transmigrasi Pusat, Kepala-kepala Kantor Transmigrasi Inspeksi Djawa Timur, Djawa Barat dan Kepala-kepala Kantor Transmigrasi Rayon.

Sesudah pemberangkatan pertama dan kedua dari Jogjakarta, maka peraturan no. 1/1952, tentang Transmigrasi Tukang tadi, ditarik kembali dan diganti dengan peraturan transmigrasi umum jang lebih luas.

Pemberangkatan transmigrasi umum dari Jogjakarta dalam tahun 1952 adalah sebagai berikut:

Dari Kabupaten Sleman	51	keluarga	188	djiwa
„ „ Bantul	45	„	166	„
„ „ Gunung Kidul	82	„	422	„
„ „ Kulon Progo	47	„	221	„
„ Kotapradja Jogjakarta	1	„	9	„
Djumlah:	226	keluarga	1006	djiwa

Adapun tempat jang ditudju:

Sumbersari (Lampung)	95 keluarga	419 djiwa
Purbolinggo („)	99 „	437 „
Belitung (Palembang)	32 „	150 „
Djumlah:	226 keluarga	1006 djiwa

Sesungguhnja djumlah angka tersebut diatas, perhitungannja telah ditentukan oleh Djawatan Transmigrasi Pusat, berdasarkan persiapan jang telah dilakukan ditempat-tempat jang ditudju, dan dibagi untuk seluruh Djawa.

Adapun pembagiannja adalah sebagai berikut:

Propinsi Djawa Timur	700 keluarga
Propinsi Djawa Tengah	600 keluarga
Propinsi Djawa Barat	100 keluarga
dan Daerah Istimewa Jogjakarta	225 keluarga

Dengan demikian maka menurut angka-angka ketetapan itu, ternjata dari Jogjakarta mengangkatkan lebih 1 keluarga.

Setelah ini pembagian pengangkatan selandjutnja jang akan diberikan untuk Jogjakarta, akan diatur mengingat keadaan penghidupan rakjat, dengan dasar perundingan bersama Pemerintah Daerah dan Djawatan Sosial Daerah. pembagiannja sebagai berikut: 40% untuk Gunung Kidul, 25% untuk Kulon Progo, 15% untuk Sleman, 15% untuk Bantul dan 5% untuk Kotapradja.

Bagian transmigrasi umum, biaja-biaja jang ditanggung oleh Pemerintah sendiri ialah: ongkos perdjalanan para transmigran beserta keluarganja terhitung pula ongkos makan dari tempat jang ditinggalkan sampai tempat jang ditudju, ongkos pemeriksaan kesehatan sewaktu mereka mendaftarkan, dan ongkos pengobatan dalam perdjalanan kedaerah transmigrasi.

Jang dapat diterima dari Pemerintah sebagai hutang ialah: alat-alat dapur, alat-alat pertanian, bahan pakaian, alat-alat tidur, rumah atau bahan-bahan untuk perumahan, bibit-bibit untuk pertanian, dan bahan-bahan djaminan hidup selama transmigran belum mempunjai penghasilan dan mengenai waktu lamanja menurut pertimbangan Djawatan Transmigrasi.

Tiap keluarga transmigrasi diberi tanah dengan hak jang tetap dan tjukup luasnja. Untuk keluarga transmigrasi petani mendapat 0,25 ha untuk perumahan dan paling sedikit 1,75 ha tanah untuk usaha, dan untuk keluarga bukan petani mendapat 0,25 ha untuk perumahan.

Transmigrasi ongkos sendiri (vrije transmigrasi)

Selain transmigrasi umum dan transmigrasi keluarga seperti apa jang telah disebutkan diatas, maka ada djuga transmigrasi jang berangkat atas ongkos sendiri. Dengan lewat Kantor Transmigrasi Jogjakarta djuga telah terselenggara pemberangkatan transmigrasi dengan beaja sendiri itu, dan dalam tahun 1951 telah berangkat sebagai berikut:

Dari Kabupaten Sleman	52 keluarga	171 djiwa
„ „ Kulon Progo	52 „	208 „
„ „ Bantul	8 „	17 „
„ „ Gunung Kidul	2 „	6 „
„ Kotapradja Jogjakarta	1 „	2 „
Djumlah:	115 keluarga	404 djiwa.

Tudjuan mereka pindah ke berbagai-matjam tempat, a.l. Kalimantan Barat, Lampung, Palembang, Medan dan sebagainja.

Adapun jang dimaksud dengan transmigrasi ongkos sendiri (vrije transmigrasi) itu ialah hasrat rakjat sendiri jang tidak sabar menunggu ketentuan-ketentuan jang sedang diatur oleh pemerintah, atau mendapatkan kesulitan keuangan untuk transmigrasi umum. Dalam hal ini bantuan-bantuan dari kantor

Transmigrasi terhadap mereka jang dengan ongkos sendiri ini terdiri dari bantuan penginapan dengan tjuma-tjuma ditempat asrama transmigrasi, memesankan tempat pada Djawatan Kereta Api, dan segala sesuatu jang dapat memudahkan perdjalanan mereka. Bantuan tersebut didasarkan atas pengertian untuk mentjari djalan tengah diantara mereka jang dengan keras hati ingin berpindah dari tempat tinggalnja, dan kedua untuk mentjegah transmigrasi liar jang artinja pemindahan-pemindahan jang tidak menurut saluran instansi-instansi pemerintah.

Diantara para transmigran jang pergi dengan ongkos sendiri itu, ada djuga salah satu diantaranja jang meninggalkan tanah sanggan atau sawah. Maka dari itu untuk mendjaga djangan sampai ada timbul perkara urusan tanah dikemudian hari ada salah satu daerah jang perlu diadakan perdjandjian dimasing-masing kelurahan dengan diberi petundjuk oleh Panewu Pamong Pradja, jalah apabila ada kedjadian hal-hal seperti termaksud diatas, hal tersebut supaja diputuskan oleh desa. Didalam putusannja itu supaja djelas diterangkan, bahwa si A pergi untuk bertransmigrasi, dengan meninggalkan tanah sanggan pekulen sekian ha, dan dititipkan kepada si B dengan perdjandjian :

1. Soal hatsilnja bagaimana.
2. Djika sewaktu-waktu si A pulang, bila ia minta kembali tanahnja jang dititipkan, si B harus meluluskan.
3. Sebelumnja ia pulang dari tanah transmigrasi, tiap-tiap tahun si A diwadjibkan memberi surat keterangan pada kelurahan, jang menerangkan bahwa ia masih hidup.
4. Djika si A ditempat transmigrasi meninggal dunia, jang diberi hak tanah jang dititipkan kepada si B siapa.
5. Djika kepergiannja si A tadi sudah lebih 10 tahun, tetapi tidak ada keterangan hidup atau mati, maka tanah jang dititipkan pada si B bagaimana.
6. Djika si B jang dititipi tanah itu meninggal dunia, maka si A belum pulang, jang diperbolehkan melandjutkan perdjandjian itu siapa.
7. Dan berangkali ada perdjandjian-perdjandjian lainnja.

Untuk mendjaga kesulitan-kesulitan dengan lain-lain djawatan atau daerah jang ditudju, dalam hal ini selalu diadakan hubungan surat menjurat dengan instansi-instansi jang bersangkutan.

Transmigrasi Kehutanan.

Selain daripada penjelenggaraan transmigrasi jang diusahakan oleh kantor Transmigrasi, masih ada lainnja lagi jaitu transmigrasi kehutanan jang diselenggarakan oleh Djawatan Kehutanan sendiri.

Jang diberangkatkan dari Jogjakarta pada tahun 1951.

Dari Kabupaten Sleman	45 keluarga	94 djiwa.
„ „ Kulon Progo	32 „	59 „
Djumlah :	77 keluarga	153 djiwa.

Tudjuan mereka adalah kebun djati Djatihardjo Lampung. Adapun perdjandjian untuk transmigrasi buruh kehutanan itu adalah sebagai berikut:

1. Pada tiap buruh diberi 1 tjelana dengan 1 badju, dan isterinja diberi 1 kebaja, 1 kotang dan 1 sarong.
2. Ongkos perdjalanan buruh dengan keluarganja sampai ditempat jang ditudju dipikul oleh Djawatan Kehutanan.
3. Uang saku diberikan pada tiap-tiap buruh sehari Rp. 4.—, keluarga dewasa Rp. 4.—, dan anak-anak Rp. 2.—.

Setelah sampai ditempat jang ditudju, tiap keluarga mendapat tanah ¼ ha untuk tanaman polowidjo. Perumahan dibuat sendiri oleh transmigran dengan bantuan Djawatan Kehutanan. Selama 3 bulan mendapat bahan makan pertjuma jang diantaranja terdiri dari 400 gr beras untuk orang dewasa, 200 gr

untuk anak-anak. Sehabis tiga bulan pertama pada transmigrasi diberi kesempatan memindjam uang dari Djawatan. Alat-alat dapur dan alat-alat rumah tangga lainnja diberikan sebagai pindjaman jang harus dilunaskan dalam 3 tahun. Setelah habis ikatan dinas 3 tahun, buruh dapat pulang kembali dengan ongkos sendiri dan djika tak kembali akan diberi tanah hutan tjadangan seluas 3 ha untuk penghidupan.

V. E. D. A. dan A. L. S.

Uraian-uraian tentang transmigrasi seperti jang telah kita terangkan dimuka adalah transmigrasi jang diselenggarakan oleh Pemerintah. Selain itu, ada djuga badan-badan partikelir jang sering djuga menggunakan nama transmigrasi, jaitu jang disebut : VEDA dan ALS, singkatan dari kata-kata tersebut adalah sebagai berikut :

V. E. D. A. = Vrije Emigratie Deli-planters voor AVROS; AVROS = Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra ; A. L. S. = Algemene Landbouw Syndicaat.

Menurut tjatjatan dari kantor Penempatan Tenaga Jogjakarta, dalan tahun 1951 telah diangkatkan oleh Veda 260 orang dan oleh ALS 47 orang, djumlah 307 orang.

Dalam tahun 1952 telah diangkatkan lagi oleh Veda 1053 ke Sumatra dan 9 ke tanah Djetah (Kalimantan Barat).

Rentjana transmigrasi B.R.N.

Biro Rekonstruksi Nasional (B.R.N.) dalam tahun 1953, djuga akan mengangkatkan tjalon-tjalon transmigrans, jang telah didaftar dalam tahun 1952, ke sumatera.

Djumlah jang telah tertjatat sampai achir tahun 1952, adalah sebagai berikut :

Kabupaten	Bantul	154	keluarga	442	djiwa.
„	Sleman	172	„	561	„
„	Wonosari	32	„	111	„
„	Kulonprogo	144	„	476	„
Kotapradja	Jogjakarta	24	„	64	„
	Djumlah	526	keluarga	1654	djiwa.

Mereka terdiri dari orang-orang bekas pedjuang jang tergabung dalam badan-badan perdjuangan, dan sekarang akan dikembalikan ke masjarakat.

Mengenai B.R.N. itu, sesuai dengan kewadjiban jang tersebut didalam peraturan, untuk membuka djalan bagi para bekas pedjuang bersendjata jang belum mendapat lapangan pekerdjaan untuk dapat hidup dalam masjarakat dengan mata pentjaharian jang lajak.

Dalam hal ini maka penjelesaiannja ditudjukan kepada pembangunan umum, jang antara lain ditempatkan pada :

1. Object-object pertanian, perikanan, perhewanan, kehutanan,
2. Object-object perusahaan, perindustrian, perdagangan,
3. Pembuatan djalan-djalan, irigasi dan lain-lain.
4. Transmigrasi dan pembentukan desa-desa baru.

Dengan demikian maka perlu diketahui bahwa soal-soal jang berhubungan dengan pemindahan penduduk ke luar Djawa, tetap dilakukan oleh instansi pemerintah jang pada waktu ini terutama oleh Djawatan Transmigrasi. Ada-

pun transmigrasi jang diselenggarakan oleh B.R.N. itu adalah merupakan salah satu dari berbagai matjam djalan jang bermaksud untuk menempatkan tenaga bekas pedjoang bersendjata kembali dalam masjarakat.

Untuk mentjapai hasil dari segala usaha-usaha pemerintah dalam hal transmigrasi ini, maka tidak boleh dilupakan pentingnja penerangan untuk menanam benih kesedaran bertransmigrasi pada seluruh rakjat dari daerah jang penduduknja perlu dipindahkan. Karena penerangan inilah jang akan mendjadi dasar pekerdjaan transmigrasi jang akan berlaku bertahun-tahun.

* *
*

4. PERKEMBANGAN KOPERASI RAKJAT

A. KOPERASI DI JOGJAKARTA SEBELUM KEMERDEKAAN

BAGI masjarakat didaerah istimewa Jogjakarta, sudah lama mengenal apa jang disebut koperasi itu, sebagai salah satu tjabang usaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian rakjat, jang karena akibat systeem ekonomi kapitalisme perekonomian rakjat mendjadi terdesak dan mengalami krisis.

Kita mengenal koperasi diwaktu masih djaman pendjadjah Belanda. akan tetapi pada waktu itu pada umumnja rakjat baru mengerti nama dan tudjuannja sadja jaitu memperbaiki krisis ekonomi jang diderita rakjat terbanjak. Sampai sebegitu djauh kebanjakan rakjat belum mengerti betul-betul systeem dan organisasinja, sehingga akibatnja banjak koperasi-koperasi jang berdiri dan djatuh sebagai akibat kurang pengertian jang mendalam tentang organisasi. Dari banjaknja kegagalan dalam menjusun model koperasi tersebut menjebabkan tipisnja kepertjajaan rakjat tentang faedah dan manfaatnja, karena mengingat pahitnja pengalaman-pengalaman jang sudah-sudah.

Untuk masjarakat di Kabupaten-Kabupaten diluar Kota, soal koperasi waktu dahulu lebih lagi, sering sekali tidak sadja kurang dimengerti akan dasar-dasar dan tudjuannja, akan tetapi bahkan maksudnjapun kadang - kadang diambil dengan suatu pengertian jang salah. Kadang - kadang koperasi dianggapnja sebagai salah satu usaha dagang jang bersaham jang bermaksud untuk mentjari keuntungan sebanjak-banjaknja.

Meskipun kita mengakui bahwa istilah koperasi itu adalah salah satu tjara baru sebagai import jang datang dari luar negeri, akan tetapi dasar daripada koperasi itu sendiri sesungguhnja telah kita miliki sedjak djaman dahulu kala jang dengan istilah sendiri disebut gotong-rojong, akan tetapi istilah jang terachir ini mempunjai arti jang lebih luas lagi sehingga meliputi segala segi-segi hidup bersama dalam masjarakat. Dengan begini maka koperasi itu adalah salah satu tjara untuk memperbaiki perekonomian jang sesuai sekali dengan djiwa gotong-rojong kita. Dalam hal ini tjotjog dengan apa jang telah tertjantum dalam undang-undang Dasar kita jang menjebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Kita tidak dapat tahu dengan tepat kapan systeem koperasi itu telah mulai dipakai di Jogjakarta sini, akan tetapi jang terang bahwa systeem koperasi itu sudah dimulai semendjak djaman pendjadjahan Belanda. Didalam kota pada waktu itu kita kenal koperasi jang besar - besar (menurut ukuran waktu itu) jalah antara lain koperasi batik jang bernama P.P.B.B.P. (Persatuan Perusahaan Batik Bumi Putera), perkumpulan koperasi Bumi Putera. Central Pensiun Bank, krediet koperasi Bumi Putera Usaha Pertolongan Kita dan lain-lain lagi. Selain apa jang kita sebut itu masih banjak lainnja lagi koperasi ketjil - ketjil jang djumlahnja ratusan berdiri dikampung-kampung dan desa-desa membuka warung-warung untuk menjediakan keperluan hidup sehari-hari bagi rumah tangga,

Akan tetapi koperasi ketjil-ketjil jang kita sebut belakangan itu, banjak jang tidak dapat hidup lama, dan achirnja lenjap tidak dengan meninggalkan bekas-bekas djasanja. Kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannja ialah disebabkan kurang sempurnanja organisasi dan sangat lemahnja tindakan kontrole. Diantara para pendjabat-pendjabat atau pekerdjanja jang mengemudi warung-warung koperasi itu bertindak tidak djudjur.

Semendjak Djepang berkuasa di Indonesia, maka semua perkumpulan-perkumpulan koperasi jang telah ada atas kemauan pemerintah Djepang di bekukan atau dimatikan. Dan sebagai gantinja didirikanlah oleh Djepang bematjam-matjam badan jang disebut kumiai jang bermaksud untuk membantu ekonomi perang Djepang guna melandjutkan perlawanannja terhadap Sekutu. Sudah barang tentu andjuran Djepang tentang hidup bergotong-rojong pada waktu itu adalah gotong-rojong untuk keperluan perang Djepang. Dalam hal ini perkembangan koperasi jang sudah lama dipupuk dan dipelihara oleh bangsa kita, mengalami pukulan jang hebat.

Sesudah bangsa kita memperoleh kemerdekaannja dengan djalan revolusi, maka oleh pemerintah kita dikandung niat untuk menghidupkan kembali perkumpulan-perkumpulan koperasi jang telah dirusak oleh Djepang dulu. Tidak lama kemudian niat tersebut dilaksanakan dengan tjara baru jaitu dengan bantuan pemerintah badan-badan koperasi disusun dari atas. Dengan bentuk Pusat koperasi daerah, bertjabang sampai di Kabupaten - Kabupaten dan Kalurahan-kalurahan. Maksud ini maunja baik jaitu oleh karena bangsa kita baru sadja mendapatkan kembali kemerdekaannja, dan sudah tentu segala sesuatunja rakjat masih tjanggung untuk berbuat dilapangan pembangunan ekonomi, maka pemerintah akan memberi tuntunan kepada rakjat.

Akan tetapi maksud jang baik ini belum tentu mempunjai effect jang baik pula. Dengan tjara tersebut diatas maka achirnja seolah-olah ada keharusan oleh pemerintah, sehingga tiap kepala somah (keluarga) diharuskan mendjadi anggauta. Keanggautaan mereka itu timbul tidak karena dengan dasar kesadaran akan tetapi timbul karena merasa terpaksa, dan oleh sebab itu maka koperasi pada waktu itu tidak dapat tumbuh dengan sewadjarnja.

Dalam hal ini teranglah bahwa tjara tsb. adalah kurang benar, sebab seharusnja bagi Pemerintah hanja bertugas membimbing, mengatur dan melindungi perekonomian rakjat, dan sebaliknja rakjat mempunjai tugas untuk melaksanakan kegiatannja sendiri dilapangan ekonomi dengan djalan koperasi, sebab itu maka koperasi harus timbul dari bawah, dan berdasarkan kejakinan anggauta.

Dalam hal itu oleh kalangan pendjabat Djawatan koperasi sendiri kemudian timbul pendapat-pendapat bahwa tjara jang demikian itu harus dirubah. Dan achirnja pendapat tersebut dapat disetudjui dan dibeberapa tempat perubahan itu sudah mulai dilaksanakan, akan tetapi malang nasib koperasi ini, karena kemudian datanglah bentjana dengan terdjadinja clash ke - II.

Dalam keadaan darurat

Djarang sekali orang mendengar bahwa perkumpulan - perkumpulan koperasi itu djuga banjak djasanja terhadap perdjuangan menentang pendjadjahan setjara direct dan konkreet. Akan tetapi dengan sungguh-sungguh bahwa perkumpulan-perkumpulan koperasi jang ada didaerah Jogjakarta baik jang berada di kota maupun diluar Kota diwaktu dalam keadaan darurat, jaitu pada djaman gerilja banjak menjumbangkan kekajaannja pada para pedjuang kita. Perkumpulan P. P. B. I. (Persatuan Perusahaan Batik Indonesia) jang pada waktu djaman pendjadjah Belanda bernama P.P.B.B.P. seperti jang kita terangkan diatas, Koperasi Rakjat Kota, Perwabi dan lain-lain perkum-

pulan-perkumpulan koperasi diluar Kota, telah memberikan sokongannja kepada perdjuangan gerilja baik jang berupa bahan makan beras dan sebagainja, maupun berupa bahan pakaian, uang dan lain-lain-lain sehingga berdjumlah hampir Rp. 2.000.000,— (dua djuta rupiah). Lain daripada itu masih ada lainnja lagi bantuan untuk perdjuangan jang lebih besar* jang membimbing berlangsungnja perdjuangan untuk kemerdekaan hingga tertjapai. Dengan berlangsungnja bantuan-bantuan jang diberikan dengan keberanian akan tetapi djuga berhati-hati itu, maka pernah pada suatu waktu hampir timbul kesalah fahaman diantara para pedjuang, dengan pihak penjokong.

Setelah Jogja kembali.

Sehabis clash ke - II, dan setelah keadaan aman kembali, maka nama koperasi oleh rakjat didaerah ini dipandang sudah kurang baik. Mereka pada umumnja hampir tidak pertjaja lagi dengan segala matjam bentuk koperasi, akibat dari bubarnja Koperasi rakjat di Jogjakarta jang tiada berbekas.

Selama itu didaerah Jogjakarta sini, selain hanja ada beberapa perkumpulan koperasi sadja jang didirikan oleh rakjat, telah ada Djawatan Koperasi daerah sebagai pusatnja jang mempunjai tjabang-tjabangnja di Kota dan Kabupaten-Kabupaten jang telah mulai berdiri pada tahun 1946. Dari semula hingga sekarang Djawatan ini dipimpin oleh Notokusumo, dan jang pertama-tama hanja mempunjai anggauta stafnja 3 orang pegawai, sekarang mendjadi 33 orang, bertugas untuk mengawasi dan membimbing perkembangan koperasi didaerah ini.

Dengan adanja decadensi dilapangan koperasi sesudah clash ke - II tersebut, maka Djawatan Koperasi tadi berusaha kembali untuk memperbaiki kerusakan - kerusakan dan kemunduran dilapangan koperasi, dengan memberikan pengertian - pengertian kepada rakjat, bahwa koperasi adalah suatu systeem untuk memperbaiki perekonomian rakjat jang tetap mempunjai nilai jang baik. Adapun sebab-sebab dari kedjadian jang buruk itu bukanlah disebabkan karena systeem koperasi itu sendiri, akan tetapi karena orang-orangnja jang mendjalankan. Berkat kegiatan usaha-usaha para pendukung koperasi kearah membangun ekonomi rakjat dengan djalan koperasi, dan sesuai pula dengan kebutuhan rakjat akan tertjapainja kemakmuran, maka achirnja kepertjajaan rakjat jang mula-mula telah kabur itu demi sedikit dapat baik kembali dan berkembang-biak.

Keadaan koperasi diseluruh daerah Jogjakarta setelah mengalami kemerosotan dalam tahun-tahun jang silam, berkat kegiatan para pendukung koperasi sekarang telah dapat kita lihat kemadjuannja dengan adanja angka-angka seperti disamping ini.

B. PENERANGAN UNTUK MEMULIHKAN SEMANGAT

Tjara-tjara untuk memulihkan semangat rakjat supaja menjusun badan-badan atau perkumpulan - perkumpulan koperasi itu kembali, tidak lain pertama-tama salah satu djalan jang diambil jaitu dengan memberi penerangan. Tjaranja memberi penerangan ini banjak, antara lain diberikan penerangan kepada perseorangan, dengan huisbezoek, menjebarkan keterangan-keterangan tentang koperasi kepada orang-orang jang berpengaruh didesa-desa. Penerangan ini sebagian besar mengambil object diluar kota jaitu dikalangan kaum tani, sebab didalam soal pembangunan ekonomi dari pihak Djawatan Koperasi bersembojan bahwa desa-desa — pertanian — adalah basis kemakmuran. Disamping itu Djawatan Koperasi setempat jakin bahwa untuk mengembangkan kembali koperasi jang murni dan sehat, orang-orang jang bertanggung-djawab

DJUMLAH KOPERASI DI DAERAH KAB. SLEMAN SAMPAI ACHIR TAHUN 1952

Daerah Kapanewon	Banjaknia koperasi	Djumlah anggauta	Banjaknja uang simpanan	Keterangan
1. Mlati	1 kp desa	451	R. 4.610.—	Matjamnja koperasi :
	1 „ credit	36	1.661.—	a. Kop. desa
	2 „ desa	509	34.210.33	b. „ credit
2. Mojudan	3 „ credit	695	9.386.85	c. „ lumbung
3. Sleman	1 „ desa	670	19.367.52	d. „ konsumsi
	1 „ lumbung	75	*)	e. „ produksi
4. Minggir	1 „ desa	266	10.697.92	
5. Prambanan	1 „ desa	68	610.—	*) 11 quintal padi
	1 „ produksi	575	17.145.95	
6. Sejegan	2 „ credit	141	5.561.65	
	2 „ desa	327	6.335.88	
7. Pakem	2 „ desa	956	9.190.50	
8. Tempel	1 „ credit	282	6.815.—	
9. Ngemplak	1 „ desa	50	1.275.—	
	3 „ lumbung	240	**)	**) 39½ quintal padi.
10. Kalasan	4 „ desa	347	7.980.27	
	2 „ credit	220	3.179.10	
11. Ngaglik	1 „ produksi	120	227.775.—	
	1 „ desa	37	1.476.05	
	1 „ credit	55	1.768.20	
12. Godean	3 „ desa	495	6.324.45	
13. Brebah	2 „ desa	188	8.223.40	
14. Gamping	1 „ credit	43	1.872.—	
	2 „ lumbung	23	***)	***) 492 Kg padi.
Djumlah:	39 koperasi	6870	R. 385.466.07	

N.B. 2 buah koperasi productie bekerdja sebagai onderneming (perkebunan tembakau Virginia dan Vorstenlandsch), jaitu di Kapanewon Prambanan dan Ngaglik.

Jang telah mendapat crediet dari Pemerintah :

1) Kap.	Mojudan	R.	55.000.—
2) „	Prambanan	„	400.000.—
3) „	Ngaglik	„	250.000.—
4) „	Godean	„	100.000.—
5) „	Kalasan	„	100.000.—
6) „	Minggir	„	30.000.—
7) „	Pakem	„	100.000.—
		R.	1.035.000.—

DJUMLAH KOPERASI DI DAERAH KAB. BANTUL SAMPAI ACHIR TAHUN 1952.

Daerah Kapanewon	Banjaknja koperasi	Djumlah angg.	Banjaknja uang simpanan	Keterangan
1. Bantul	2 kp desa	2443	R. 4.403.50	
	3 „ credit	2294	3.074.77	
	1 „ produksi	40	1.000.—	
2. Sewon	3 „ credit	2407	15.284.79	
	2 „ desa	2242	17.291.18	
	1 „ produksi	24	17.000.—	
3. Sedaju	2 „ desa	2697	4.300.—	
	1 „ credit	22	670.—	
	1 „ produksi	1237	3.672.47	
4. Kasihan	1 „ desa	2129	2.274.15	
	2 „ credit	1738	3.162.42	
	1 „ lain-lain	37	5.152.33	
5. Pandak	31 „ credit	4880	12.803.72	
	2 „ produksi	190	1.010.—	
6. Srandakan	2 „ credit	5229	10.000.—	
7. Sanden	38 „ credit	2879	24.886.71	
	1 „ produksi	20	480.—	
	1 „ lumbung	13	500.—	
	1 „ lain-lain	88	614.—	
	2 „ konsumsi	1688	2.967.05	
8. Panggang	7 „ lumbung	839	3.404.—	Koperasi lumbung di Kapanewon
	10 „ credit	564	8.365.50	Panggang ada jang mempunjai sim-
9. Kretek	31 „ credit	4821	42.220.80	panan :
	1 „ desa	1108	5.709.—	11.80 kg. padi
10. Pundong	7 „ credit	15475	7.941.27	456.— „ „
	2 „ lumbung	77	—.— *)	140.— „ „
	1 „ konsumsi	19	200.—	*) 40 kw. padi 77 kg.

11.	Imogiri Jogja	3 ,, credit	3371	5.897.50	
		1 ,, konsumsi	891	11.219.14	
12.	Djetis	2 ,, credit	2130	4.334.—	
13.	Gondowulung	2 ,, produksi	183	3.737.18	
		1 ,, lumbung	51	2.756.—	
		3 ,, credit	503	13.243.34	
14.	Pijungan	1 ,, desa	2156	6.810.50	
15.	Kotagede Jogja	3 ,, credit	1832	4.850.—	
		1 ,, produksi	501	20.000.—	
16.	Kotagede Solo	2 ,, konsumsi	1035	1.024.98	
		5 ,, credit	2756	3.061.51	
		1 ,, desa	729	167.40	
17.	Imogiri Solo	8 ,, desa	4015	15.186.64	
		1 ,, lumbung	12	1.850.—	
		1 ,, pusat	—	28.007,90	
	Djumlah:	192 koperasi	75365	R. 321.133.75	

N.B. Jang telah mendapat credit dari Pemerintah :
1) Kapanewon Pijungan R. 50.000.—

DJUMLAH KOPERASI DI DAERAH KAB. GUNUNG KIDUL SAMPAI ACHIR TAHUN 1952.

Daerah Kapanewon	Banjaknja koperasi	Djumlah angg.	Banjaknja uang simpanan	Keterangan
1. Wonosari	2 kp credit	297	R. 2.731.—	
	1 „ produksi	226	1.130.—	
	1 „ desa	240	998.71	
2. Plajen	7 „ desa	606	2.297.75	
	1 „ credit	57	1.489.—	
3. Pathook	1 „ credit	250	993.10	
	1 „ desa	60	1.814.—	
4. Karangmodjo	5 „ credit	560	11.717.— *)	7 kw. bahan makan.
	6 „ desa	206	1.244.50 *)	29.47 kw. bahan makan.
	6 „ lain-lain	154	2.790.—	
5. Pondjong	3 „ credit	59	11.262.20	
6. Semin	3 „ credit	376	2.017.60	
7. Semanu	1 „ credit	1824	2.000.—	
8. Rongkob	1 „ credit	65	3.042.45	
Djumlah :	40 koperasi	4980	R. 35.527.31	

*) Menerima credit dari Pemerintah Rp. 75.000.—.

DJUMLAH KOPERASI DI DAERAH KAB. KULON PROGO SAMPAI ACHIR TAHUN 1952.

Daerah Kapanewon	Banjaknja koperasi	Djumlah angg.	Banjaknja uang simpanan	Keterangan
1. Temon	1	64	R. 1.207.90	Desa 1. Lumbung 1. *)
	1			
2. Pandjatan	1	49	587.50	desa 1.
3. Wates	7	649	25.674.05	Credit 4. Desa 3.
4. Galur	11	1047	15.416.91	Credit 2. Ds. 8. Lb. 1.
5. Lendah	2	—	—	Belum terang.
6. Sentolo	3	793	42.443.50	Cr. 1 Ds. 1 Lb. 1
7. Nanggulan	6	778	20.846.09	Cr. 2 Ds. 3 Lb. 1
8. Kenteng	5	1180	10.064.10	Cr. 3 Ds. 2
9. Kalibawang	3	142	3.835.80	Cr. 2 Ds. 1
10. Samigaluh	1	18	450.—	Ds. 1
11. Pengasih	2	137	4.129.70	Ds. 2
12. Kokap	1	217	1.085.—	Ds. 1
Djumlah:	44 koperasi	5074	R. 125.740.55	

*)

Cr. = Credit.
Ds. = Desa.
Lb. = Lumbung.
Kb. = Kabupaten.

DJUMLAH KOPERASI DI KOTAPRADJA JOGJAKARTA SAMPAI ACHIR TAHUN 1952.

Daerah Kemantren	Banjaknja koperasi	Djumlah angg.	Banjaknja uang simpanan	Keterangan
1. Gondomanan	3 kp produksi	526	R. 1.217.399.52	
2. Gondokusuman	1 „ credit	107	2.675.—	
3. Ngampilan	1 „ credit	216	16.175.50	
4. Kotagede	1 „ produksi	63	—.—	beku
5. Danuredjan	2 „ produksi	63	5.720.—	
6. Djetis	1 „ produksi	43	5.815.12	
7. Gedongtengen	1 „ konsumsi	1374	90.000.—	
8. Wirobradjan	1 „ produksi	17	17.500.—	
9. Paku Alaman	1 „ credit	10	1.085.35	
D j u m l a h:	12 koperasi	2419	R. 1.356.370.49	

akan kegagalan usahanja koperasi jang mereka pimpin pada waktu jang silam, harus ichlas tidak mentjampuri usaha-usaha koperasi jang sekarang sedang dibangunkan. Sebaliknja harus diusahakan adanja kader-kader koperasi dari kalangan rakjat jang terdidik dan terpimpin sebaik-baiknja berdasarkan koperasi jang rasioneel.

Penerangan dilakukan setapak demi setapak, dan sesudah dengan tjara perseorangan kemudian meningkat sedikit pada object jang bersifat bergerombolan, jaitu umpamanja didalam konperensi-konperensi Kalurahan atau Kabupaten pendek dimana ada kesempatan orang-orang berkumpul, pihak Djawatan Koperasi menunaikan tugasnja untuk menjebarkan pengertian kembali tentang koperasi. Pekerdjaan demikian ini memang harus dikerdjakan setjara intensief, sedikit-sedikit tetapi terus-menerus, dan selandjutnja madju lagi sekarang dengan mengadakan rapat-rapat koperasi dan dalam hal ini sudah tentu psychologi massa sudah agak suka menerima, dan apabila telah demikian, maka besar harapannja bahwa usaha-usaha selandjutnja tentu akan berhasil. Hal ini terbukti bahwa harapan itu tidak sia-sia.

Dalam pekerdjaan sematjam ini semuanja selalu dikerdjakan oleh Djawatan Koperasi sendiri, hanja kadang-kadang dibantu djuga oleh Djawatan Penerangan.

Selain penerangan-penerangan lesan jang sering diberikan, djuga melalui tulisan-tulisan jang sering dimuat dalam madjallah-madjallah penerangan antara lain Pendjawat, Siaran Kotapradja, Dirgahaju, Obor dan Ngajogjakarta-Kidul. Selain itu kadang-kadang setjara tidak langsung surat-surat kabar harian atau madjallah-madjallah sering memuat masalah koperasi, jang berarti djuga telah membantu dan menambah tersiarnja tjita-tjita kopersi.

Djawatan Koperasi dalam menjiarkan penerangannja kepada rakjat menggunakan systeemnja sendiri jang dianggap lebih efficient, jaitu tidak perlu memberikan penerangannja sekaligus frontaal diratakan keseluruh daerah Jogjakarta, tetapi lebih diutamakan satu daerah Kabupaten lebih dahulu, sampai merata dan mendalam, dan bila dianggap telah tjukup baru pindah dilain tempat. Itulah sebabnja maka langkah jang diambil pertama-tama ialah mengadakan kader kursus koperasi sukarela jang disebarkan dan diselenggarakan di Giripeni — Kulon Progo — disusul di Namparedja djuga di Kulon-Progo selandjutnja dengan mengadakan asrama Balai Pendidikan Koperasi.

Systeem ini diambil, dengan maksud pertama penerangan dapat masuk kepada rakjat setjara intensief, dan tenaganja pun dapat dihemat mengingat djumlahnja, dan koperasi mendjadi mempunjai tenaga jang terdidik dan berdjiwa Koperasi.

Adapun isi dari penerangan jang diberikan kepada rakjat antara lain ialah:

a. Membangun ekonomi rakjat dengan djalan koperasi
b. Arti dan maksudnja koperasi
c. Tentang organisasi koperasi
d. Pentingnja pembukuan
e. Koperasi kredit
f. Pentingnja tabungan
g. Tjaranja memimpin organisasi koperasi
h. Pentingnja kursus kader koperasi
i. Kredit dari Pemerintah
j. Mengupas hal-hal jang menjebabkan kegagalan usaha-usaha koperasi dimasa jang lalu dengan memberikan petundjuk-petundjuk sjarat-sjarat untuk mendirikan koperasi jang baik.

Demikianlah isi daripada penerangan - penerangan tentang koperasi jang diberikan kepada rakjat. Melihat atjaranja itu, teranglah bahwa rakjat pada umumnja tentu memerlukan sekali pengertian-pengertian tentang itu, apabila

didalam hatinja timbul hasrat ingin membangunkan perekonomian dengan djalan koperasi. Sebab dalam pengalaman jang sudah-sudah terang bahwa rakjat didalam memasuki keanggautaan koperasi itu sebagian besar hanja terdorong rasa solider sadja, akan tetapi tidak dengan pengertian jang sesungguhnja untuk lebih teliti didalam memasuki keanggautaan itu, sehingga djika perlu dapat turut mendjalankan atau turut mengawasi djalannja Koperasi, dan jang faedahnja organisasi tadi dapat tetap terpelihara, dan dapat hidup subur, tertjapai apa jang mendjadi tjita-tjitanja.

Pada tahun 1951 penerangan jang diselenggarakan oleh Djawatan Koperasi itu telah berdjalan sebagai berikut:

Tempat Daerah			Djumlah tempat	Djumlah penerangan	Djumlah pendengar:
1.	Kab.	Kulon Progo	33 tempat	48 kali	883 djiwa
2.	„	Sleman	42 „	45 „	685 „
3.	„	Kotapradja	4 „	26 „	167 „
4.	„	Bantul	12 „	16 „	410 „
5.	„	Gunung Kidul	6 „	6 „	119 „
		Djumlah:	97 tempat	141 kali	2064 djiwa

Setelah penerangan tentang koperasi tadi tersebar didaerah-daerah Kabupaten dan Kotapradja, maka tiada berapa lama tampaklah procesnja dan achirnja sampai pada tahun 1952 perkumpulan-perkumpulan koperasi berdiri dimana-mana tempat dengan mengikuti pedoman atau petundjuk-petundjuk dari Djawatan Koperasi.

Kesimpulan dari hasilnja penerangan tersebut rakjat adalah:

1. Menambah hasrat rakjat untuk berkoperasi
2. Menambah hasrat rakjat untuk menabung dan menambah uang simpanan pokok.
3. Memperbaiki organisasi
4. Memperbaiki pembukuan
5. Auto-activiteit membangun ekonomi
6. Membiasakan hidup hemat
7. Berdjiwa „opor bebek mentas saka awake dewek" atau zelfhelp.
8. Ada hubungan antara kaders dengan para pengurus koperasi, dengan Pamong Kalurahan, Pamong Pradja dan instansi-instansi pemerintah lainnja.
9. Menambah perhatian rakjat pada kursus kader koperasi.
10. Mentjegah sekaras-kerasnja timbulnja penjakit jang menjebabkan gagalnja usaha koperasi seperti jang sudah-sudah.

Banjak perubahan- perubahan telah terdjadi sesudah penerangan berdjalan dibeberapa tempat, sehingga dapat mengubah sifat masjarakat jang berwatak pemboros, umpamanja kebanjakan telah mendjadi kebiasaan orang-orang di-

luar Kota bahwa untuk mengadakan hiburan, atau mengadakan selamatan dan peralatan lainnja, orang mengeluarkan biaja lebih dari ukuran dibanding dengan keperluannja, kebiasaan ini dibeberapa tempat telah berubah. Djuga massa pendjudian, dimana disesuatu tempat didaerah Sleman Barat jang terkenal mendjadi tempat pendjudian, dengan adanja pengaruh koperasi itu maka sekarang telah sangat berkurang, dan koperasi bertambah subur.

C. KURSUS KADER KOPERASI

Selain penerangan jang diberikan kepada rakjat, Djawatan Koperasi djuga mengadakan kursus kader koperasi jang maksudnja mereka setelah lulus dari kursus tersebut, dapat menjumbangkan tenaganja untuk lebih dapat menguntungkan dan memelihara adanja koperasi-koperasi jang sudah berdiri.

Adapun jang diambil sebagai kader itu ialah anak-anak jang memang atas keinginannja sendiri berhasrat mengikuti kursus jang diadakan oleh Djawatan Koperasi, dan jang sedikitnja telah berpendidikan Sekolah Rakjat V atau VI tahun berumur kurang lebih 25 tahun keatas, dan lamanja kursus hanja satu bulan.

Perhatian terhadap adanja kursus kader koperasi inipun boleh dikata tjukup baik sekalipun pada permulaannja orang sangat meragu-ragukan (sebab nama Koperasi sudah tidak baik pada waktu jang lalu). Disini terbukti dengan adanja angka-angka jeng telah mengikuti kursus kader Koperasi selama tiga tahun.

Kursus Kader Koperasi Daerah Jogjakarta.

Tempat Daerah: Kotapradja/ Kabupaten.	Tahun 1950				Tahun 1951				Tahun 1952			
	m	k	l	t	m	k	l	t	m	k	l	t
1. Kotapradja	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—
2. Kab. Bantul	55	—	43	12	31	2	27	2	45	6	33	6
3. Kab. Sleman	59	—	46	13	59	6	37	16	87	7	67	13
4. Kab. Kulon-Progo	30	—	24	6	71	5	58	8	38	2	27	9
5. Gunung Kidul	—	—	—	—	51	—	44	7	57	8	39	10
Djumlah:	144	—	113	31	212	13	166	33	230	23	169	38

Keterangan :

m = masuk.
k = keluar.
l = lulus.
t = tidak lulus.

Djasa-djasa dari koperasi untuk masjarakat.

Meskipun kemadjuan-kemadjuan jang ditjapai dalam lapangan koperasi itu masih belum mentjapai seperti jang kita tjita-tjitakan tetapi sedikit banjak telah dapat turut merubah keadaan ekonomi rakjat jang masih lemah kearah kemadjuan. Antara lain kemadjuan-kemadjuan itu ialah :

a. Telah dapat mengurangi adanja woeker, jang selalu menghisap hasil serta djerih pajah rakjat.

b. Mengembangkan perdagangan ketjil dan keradjinan, serta dapat mengurangi adanja pengangguran.

c. Menghidupkan oto-activiteit rakjat untuk turut serta membangun ekonomi nasional.

d. Menambah perputaran roda ekonomi masjarakat.

e. Menambah penghatsilan Negara, dengan penggunaan materei-materei jang tidak sedikit djumlahnja.

* *
*

5. PERKEMBANGAN PERTANIAN DI DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

A. KEADAAN UMUM PERTANIAN

DAERAH Istimewa Jogakjarta adalah sebuah daerah otonoom jang setingkat dengan propinsi dan terbagi dalam 5 daerah otonoom Kabupaten/Kotapradja.

1. Kotapradja Jogjakarta, terdiri dari 14 Kemantren, 162 Rukun-kampung.
2. Kabupaten Bantul, terdiri dari 18 Kapanewon dan 75 Kalurahan.
3. Kabupaten Sleman, terdiri dari 17 Kapanewon dan 86 Kalurahan.
4. Kabupaten Gunung Kidul, terdiri dari 13 Kapanewon dan 150 Kalurahan.
5. Kabupaten Kulon Progo, terdiri dari 12 Kapanewon dan 90 Kalurahan

Luas dan golongan tanah :

Luas tanah Daerah Istimewa Jogjakarta adalah :

1.	Sawah	63.431 ha.
2.	Tegal	116.048 „
3.	Pekarangan	80.340 „
	Djumlah tanah pertanian :	259.819 ha.
4.	Kehutanan :	
	a. Hutan	15.731 ha.
	b. Afgeschrevenboschgronden	1.849 „
	c. Tempat penumpukan kaju	27 „
5.	Tanah staat C	233 „
6.	Tanah lain-lain (tanah lapang dan lain-lain)	4.408 „
7.	Tanah kuburan dan oro-oro	6.828 „
8.	Tanah lingkungan kadaster	2.201 „
	Djumlah :	31.277 ha.

Luas Daerah Istimewa Jogjakarta ada 259.819 ha. + 31.277 ha. = 291.096 ha. tanah pertanian dan hutan. Dengan perhitungan luas djalan-djalan, kali-kali dan lain-lain maka djumlah luas Daerah Istimewa Jogjakarta ada 309.911 ha = 3.099,11 km2.

Djumlah penduduk :

1. Djumlah penduduk pada achir tahun 1951 : 1.887.703.
2. Djumlah penduduk pada achir tahun 1952 : 1.913.591.

Dengan demikian maka didalam satu tahun penduduk tambah : 1.913.591 — 1.887.703 = 25.888 (1,40%).

Dengan luas tanah 3.099,11 km2 dan berpenduduk 1.913.591 berarti rata-rata tiap-tiap km berpenduduk 657 orang.

Matjam tanah :

Tanah Daerah Istimewa Jogjakarta terdiri dari :

1. **Asch-gronden** (dari gunung Merapi atau tanah abu Merapi), terdapat di-daerah Kabupaten Sleman dan Bantul.
2. **Laterlet-gronden** (dari perubahan batu-batu kulit bumi), (tanah lateriet) terdapat didaerah Kabupaten Kulon Progo sebelah Barat, Barat Laut dan Barat daja, dan didaerah Kabupaten Gunung Kidul sebelah Utara, Barat, dan Barat daja.
3. **Tanah mergel :** (Mergel pasir, mergel lempung). Terdapat didaerah Kabupaten Kulon Progo sebelah Timur (dari Utara sampai Selatan) dan di Kabupaten Gunung Kidul sebelah Tengah.
4. **Tanah kapur :** Terdapat sebagian besar didaerah Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo sebelah Barat (dari Utara sampai Selatan).
5. **Tanah endapan :** (Afgezette gronden). Terdapat ditepi sungai - sungai Progo, Opak, Serang dan ditepi pantai Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.

Dari 5 matjam tanah tadi jang terbanjak jalah tanah kapur dan tanah abu Merapi.

Usaha membuka tanah baru :

Usaha-usaha untuk membuka tanah baru tidak ada, akan tetapi guna menambah luasnja tanah pertanian sedjak tahun 1951 diadakan pemberantasan tanah larut dengan penanaman karang kitri sebagai berikut :

1. Tahun 1951, 1952 telah menanami tanah gundul dengan karang kitri seluas 900 ha.
2. Menurut rentjana tahun 1953 akan menanami tanah gundul dengan karang kitri seluas i.k. 1.000 ha.
3. Djumlah tanah gundul seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta ada 302.088,714 ha. jaitu : Kabupaten Kulon Progo 1.260 ha., Kabupaten Sleman 1.218 ha., Kabupaten Bantul 2.874 ha., Kabupaten Gunung Kidul 248.591.914 ha.

Rentjana Kesedjahteraan Istimewa (R.K.I.) dalam periode tahun 1950/1951.

Usaha mempertinggi hasil bumi, jang diselenggarakan sedjak permulaan masa pembangunan sampai sekarang dilaksanakan dengan djalan sbb :

1. Mengadakan perlombaan bertanam padi (Pelaksanaan R.K.I. 1950).
2. Menjokong usaha memulihkan pengairan desa (selokan-selokan dan dam desa) sebagai pelaksanaan R.K.I. (Rentjana Kesedjahteraan Istimewa tahun 1950).

   Menjiarkan faktor-faktor untuk menambah produksi :
   a. Menjiarkan bibit padi dan polowidjo jang unggul dan murni.
   b. Menjiarkan rabuk Z. A., D. S. dan Crotalaria Juncea.
   c. Menjiarkan alat-alat pertanian (patjul, landak, arit dan lain-lain).
3. Memberantas hama dan penjakit dengan obat-obatan dan alat-alat jang tersedia, jai'ni terhadap :
   a. Hama dan penjakit tanaman padi dan polowidjo.
   b. Hama dan penjakit pohon buah-buahan dan sajur-sajuran.
   c. Hama dan penjakit tanaman perdagangan.
   d. Hama dan penjakit tanaman kelapa (artona).
4. Menjelenggarakan Kebun Bibit Wonotjatur Kalurahan Banguntapan, kapanewon Kotagede, Kabupaten Bantul dan membangun lagi bangun-

bangunan jang rusak karena akibat revolusi (sebagai pelaksanaan R.K.I. tahun 1950).
Luas Kebun Bibit Wonotjatur 10 ha. Kebun ini terutama dipergunakan untuk menanam dan menjediakan bibit-bibit padi jang unggul bagi tanaman rakjat seperti bibit padi Bengawan, asal dari Balai Penjelidikan Pertanian di Bogor, jang telah ternjata di Jogjakarta sini dapat memberi hasil lebih tinggi dari djenis-djenis padi asli.
Tiap-tiap tahun Kebun Bibit Wonotjatur hanja dapat menjediakan 200qt. padi bibit, karena sawahnja ta' dapat ditanami padi gabu sebab kekurangan air.
Dalam musim kemarau Kebun Bibit Wonotjatur ditanami dengan polowidjo seperti katjang tanah, djagung, kedele, jang hasilnja djuga untuk persediaan bibit pertanian rakjat.

5. Mendirikan 5 buah Balai Permusjawaratan Masjarakat Desa, dengan disingkat B.P.M.D.
Balai-balai tersebut ditempatkan di Kapanewon Sleman. Kabupaten Sleman; Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul; Kapanewon Plajen, Kabupaten Gunung Kidul; Kapanewon Kenteng dan Gaiur, Kabupaten Kulon Progo, dengan pekarangan dan sebidang tegal atau sawah, sebagai Kebun Pertjontohan dan djuga sebagai tempat beladjar untuk pengikut-pengikut Kursus Kader Tani Desa jang diadakan di B.P.M.D.2 tadi.

6. Sebagai pelaksanaan R.K.I. tahun 1950 dalam periode tahun 1950/1951 Djawatan Pertanian Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta mengadakan Pertjobaan Perusahaan Tanah Kering jang disingkat P.P.T.K. di Kapanewon Plajen, Kabupaten Gunung Kidul seluas 8 ha., dengan maksud:
   a. Dengan djalan bagaimana hasil-hasil tanah kering jang umumnja di Djawa dan Madura lebih luas dari luas sawah, demikian djuga di Jogjakarta, dapat dinaikkan, misalnja dengan djalan pemilihan bibit-bibit perabukan, pergantian tanaman dan lain-lain.
   b. Untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai djenis-djenis tanaman ditanah kering.
   c. Untuk menjelidiki: Dengan berapa ha. sekeluarga tani dapat hidup lajak dari mengusahakan tanah kering. Oleh karena itu di P.P.T.K. ditempatkan 3 keluarga tani, jang masing-masing mendapat bagian 2 ha. tegalan untuk diusahakan, menurut pimpinan dan petundjuk-petundjuk Djawatan Pertanian.
   Adapun tanah jang 2 ha. lagi dipergunakan sebagai pekarangan untuk tempat perumahan P.P.T.K. dan perumahan 3 keluarga tani tersebut diatas. Lain dari pada itu pekarangan ditanami dengan sajuran dan rumput bagi ternak jang dipelihara djuga pada P.P.T.K. disamping pemeliharaan ternak ketjil seperti ajam dan itik, hingga apabila terlaksana semua rentjana P.P.T.K. itu akan merupakan boerderij ketjil-ketjilan.

Hasil-hasil dari Kursus-kursus Kader Tani dan Sekolah Pertanian.

Dalam bulan September dan October 1951 Djawatan Pertanian Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta telah membuka 5 Kursus-kursus Kader Tani Desa disingkat K.T.D. di Kapanewon-kapanewon jang telah ada B.P.M.D. nja tersebut diatas, masing-masing dua rombongan dengan pengikut kursus 35 a 40 orang pemuda tani, diantaranja djuga pemudi-pemudi tani. Adapun jang diterima mendjadi pengikut kursus jalah pemuda-pemuda tani jang sekurang-kurangnja beridjazah S. R. 3 tahun dan telah berumur 18 tahun keatas.

Lama peladjaran 1 tahun, diberikan tiap-tiap minggu 2 kali a 2 djam pada waktu pagi atau sore, menurut keadaan masing-masing tempat.

Mata peladjaran ketjuali vak-vak pertanian diberi djuga pengetahuan umum ja'ni: koperasi, ilmu bumi ekonomi, sedjarah Indonesia, kesehatan dan tatanegara.

Tudjuan kursus: sesudah tammat dari kursus K. T. D. mereka mewudjudkan kaum tani jang berpendidikan ditengah-tengah masjarakat tani dan sebagai kader pertanian diwadjibkan memberi tjontoh-tjontoh tentang pertanian dan membimbing masjarakat kearah perbaikan ekonominja dengan membentuk koperasi-koperasi didesanja masing-masing.

Guru-guru jang memberi peladjaran jalah Pemimpin B. P. M. D. sebagai Pemimpin kursus dengan dibantu dari Djawatan-Djawatan Koperasi, Kesehatan, Penerangan, Pamong-Pradja dan lain-lain dengan sukarela.

Kursus-kursus K. T. D. tersebut diatas telah berachir pada bulan Agustus dan September 1952 dengan hasil rata-rata 50% jang tammat dan mendapat idjazah.

Adapun sebab-sebabnja jang ta' dapat mengikuti kursus sampai selesai jalah karena tekanan ekonomi atau pindah tempat kelain daerah Kapanewon (Ketjamatan).

Kursus-kursus K. T. D. baru (tahun peladjaran ke II) dibuka dalam bulan Oktober dan Nopember 1952.

Sekolah pertanian Widjilan: Adanja sekolah Pertanian Widjilan telah sedjak djaman Pendjadjahan Belanda, Pendudukan Balatentera Djepang dan sedjak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilandjutkan sampai dewasa ini karena penting kedudukannja sebagai salah satu sjarat untuk menambah pengetahuan masjarakat tani, dalam usahanja memadjukan pertanian dan perekonomiannja.

a. Lama Peladjaran Sekolah Pertanian Widjilan 2 tahun (klas I dan II).

b. Mata peladjaran: 1. Vak-vak pertanian lebih rendah dari Sekolah Pertanian Menengah dahulu. 2. Vak-vak pengetahuan umum sekolah landjutan, lebih rendah dari S. M.

c. Tanah Sekolah Pertanian Widjilan terdiri dari:

1.	Halaman Sekolah seluas	1.3240 ha.
2.	Sawah untuk peladjaran praktek seluas	6.4744 ha.
	Djumlah:	7.7984 ha.

d. Banjaknja murid tiap-tiap tahun 40 a 45 orang, dan berasal dari Daerah Istimewa Jogjakarta. Jang diterima mendjadi murid pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi tani jang telah tammat S. R. 6 tahun, dengan menempuh udjian masuk dan telah berumur 18 tahun keatas.

e. Murid-murid tidak membajar uang sekolah dan diharuskan berdiam dalam asrama, jang disediakan dengan tjuma-tjuma.

f. Sesudah tammat dari sekolah, mereka diwadjibkan kembali kedesanja masing-masing untuk mewudjudkan kaum tani jang berpendidikan ditengah-tengah masjarakat tani didesanja masing-masing dan memberi tjontoh-tjontoh tentang tehnik pertanian serta membimbing rakjat tani dalam usahanja mempertinggi perekonomiannja dengan djalan membentuk organisasi-organisasi tani dan koperasi-koperasi.

g. Apabila Djawatan Pertanian dan Perikanan Daerah Istimewa Jogjakarta membutuhkan tenaga, mereka dapat dididik dan diangkat mendjadi tjalon pegawai Djawatan Pertanian dan Perikanan.

Pun apabila didesanja terdapat lowongan anggota Pamong Kalurahan, dapatlah bekas-bekas murid sekolahan Pertanian Widjilan itu dipergunakan untuk mengisi lowongan-lowongan Pamong Kalurahan.

h. Guru-guru Sekolah Pertanian Widjilan terdiri dari: 1. Kepala sekolah, 2 orang guru untuk vak-vak pertanian, 1 orang guru untuk vak-vak pengetahuan umum, dan 1 orang guru untuk peladjaran praktek.

Permusjawaratan tani: Ketjuali dengan mengadakan sekolah pertanian dan Kursus-kursus Kader Tani Desa, maka untuk menambah pengetahuan pada masjarakat tani jang dibutuhkan dalam usahanja guna mempertinggi hasil-hasil pertanian dan memadjukan perekonomian mereka, Djawatan Pertanian Rakjat mempunjai badan penghubung antara Djawatan dengan masjarakat tani, jang bernama: Permusjawaratan tani, jang berkedudukan di Ketjamatan-ketjamatan (Kapanewon-kapanewon) jang perlu diadakan Permusjawaratan Tani itu. (P.T.)

Kini djumlah P. T. diseluruh Daerah Istimewa Jogjakarta ada 23 buah atau lebih kurang 1/3 dari djumlah kapanewon di Daerah Istimewa Jogjakarta ja'ni: 7 buah P. T. didaerah Kab. Sleman.

6 „ P.T. „ „ Bantul.
5 „ P.T. „ „ Gunung Kidul.
5 „ P.T. „ „ Kulon Progo.

Banjak anggota masing-masing Permusjawaratan Tani ada 14 a 18 orang, terdiri dari Petani-petani terkemuka dari Kalurahan-kalurahan dalam lingkungan Kapanewon (Ketjamatan).

Menurut kebutuhan dalam satu tahun P. T. mengadakan rapat (pertemuan) antara anggota-anggota P. T. dengan Pimpinan Pertanian Kabupaten, 4 a 6 kali, sekurang-kurangnja 4 kali, jaitu:

1. Pada permulaan musim labuh.
2. „ „ „ penghudjan.
3. „ „ „ marengan.
4. „ „ „ kemarau.

Jang dibitjarakan jalah soal-soal mengenai pertanian dan perekonomian Rakjat seperti:

a. Tentang bibit-bibit jang unggul.
b. „ perabukan,
c. „ alat-alat pertanian.
d. „ harga-harga dan perdagangan hasil bumi dan sebagainja.

Adapun adanja P. T. didaerah Istimewa Jogjakarta telah sedjak pendjadjahan Belanda dahulu jang diluar Daerah Istimewa Jogjakarta disebut Komisi Tani, atau Tanikring.

B. USAHA MEMPERTINGGI HASIL BUMI

Dengan adanja usaha-usaha jang diselenggarakan dalam periode tahun 1950/1951 itu maka hasil padi di Daerah Istimewa Jogjakarta rata-rata naik 2 qt padi kering tiap-tiap ha.nja kalau dibanding dengan hasil padi musim penhudjan 1949/1950.

Kenaikan hasil untuk seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta, jang luas sawahnja ada 62000 ha ada 62000 × 2 qt padi kering = 62000 qt beras = 6200 ton.

Untuk keperluan memperbaiki selokan-selokan dan dam-dam desa jang rusak pada rakjat tani Daerah Istimewa Jogjakarta dalam periode tahun 1950/1951 sebagai pelaksanaan R. K. I. tahun 1950 diberikan sokongan sebesar Rp. 121.000.— dengan dasar perhitungan tiap-tiap ha. sawah ontjoran (jang dapat air pengairan) dapat sokongan Rp. 2.—.

Lain dari pada itu dalam periode tahun 1950/1951 itu dibagikan hadiah-hadiah perlombaan bertanam padi kepada Kapanewon-Kapanewon sebesar Rp. 164.000,— terbagi mendjadi beberapa hadiah no. 1 a Rp. 10.000,— beberapa hadiah no. 2 a Rp. 5.000,— beberapa hadiah no. 3 a Rp. 2.500,— beberapa hadiah no. 4 a Rp. 1.500,— dan beberapa hadiah no. 5 a Rp. 1.000,-- dengan djumlah seperti tersebut diatas.

Melandjutkan usaha-usaha periode tahun 1950/1951.

Dalam periode tahun 1951/1952 guna mempertinggi hasil-hasil pertanian Rakjat dilandjutkanlah usaha-usaha jang telah dilakukan dalam periode tahun 1950/1951 dengan djalan seperti tersebut diatas.

Pun sebagai pelaksanaan R. K. I. tahun 1951 dalam periode tahun 1951/1952 Djawatan Pertanian Rakjat dapat memberi sokongan untuk pemulihan pengairan desa, sebesar Rp. 100.950,— kepada Rakjat Tani dan menamban pembuatan dan penjelenggaraan objek-objek R. K. I. sebagai berikut :

a. Mendirikan 5 buah B. P. M. D. baru ja'ni:
   1. Kap. Patuk, Kab. Gunung Kidul.
   2. „ Gondowulung, Kabupaten Bantul.
   3. „ Kalasan, Kabupaten Sleman.
   4. „ Panggang, Kabupaten Bantul
   5. „ Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

b. Mengadakan dan menjelenggarakan Kebun Bibit baru di Widjilan, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan sawah tadah hudjan seluas 10 ha.
   Dengan mengadakan Kebun Bibit baru di Widjilan itu Djawatan Pertanian Rakjat tiap-tiap tahun akan dapat menjediakan bibit padi 40 ton. 20 ton dari Kebun Bibit Wonotjatur dan 20 ton dari Kebun Bibit Widijlan.
   Dengan bibit 40 ton itu akan dapat ditanami bibit-bibit padi unggul (Bengawan) lebih kurang 1600 ha. sawah.
   Adapun hatsil-hatsil pertanian baik padi maupun polowidjo seluruh daerah Istimewa Jogjakarta, dalam tahun 1950, 1951, dan 1952, seperti ternjata dalam staat di sebelah ini.

C. PEMBRANTASAN HAMA DAN PENJAKIT TANAMAN

Umumnja tanaman padi sawah di Daerah Istimewa Jogjakarta kalau menderita kerusakan terutama karena :

1. Serangan hama tikus.
2. „ „ sundep atau hama beluk.
3. „ „ walangsangit.
4. „ „ penjakit mentek.
5. Kebandjiran atau kekeringan.

1. **Serangan hama tikus:** Dalam tahun 1952 luas sawah jang diserang hama tikus ada 39 ha. dengan kerusakan rata-rata 16%.

Hama ini dibrantas dengan ratjun fosfor (irisan ubi manis ubi kaju jang telah ditjampur dengan bubur fosfor) sebagai umpan atau dibrantas dengan djalan gropjokan. Hasilnja sangat baik, sehingga tidak mendjalar.

2. **Serangan hama sundep atau beluk :** Dalam tahun 1952 luas sawah jang terserang hama sundep atau beluk ada 134 ha dengan kerusakan rata-rata 75%. Terhadap ulat-ulat hama sundep atau beluk jang bersembunji dalam batang padi dapat dibrantas sebagai berikut:

a. Pesemaian jang terserang hama sundep hendaklah dibersihkan dari telur-telur dan kupu-kupu, jang terdapat pada daun-daun dan batang padi bibit

PENETAPAN PRODUKSI MULAI BULAN DJANUARI S/D DESEMBER 1950
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

Nama tanaman :	Luas tanaman h.a.	Luas pungutan hasil terhitung h.a.			Rata-rata hasil qt/ha	Djumlah hasil ton	Keterangan :
		Berhasil (a)	Pusa (b)	Djumlah (a) (b)			
1. Padi sawah.	105.487	69.917	2.930	72.847	15,12	107.573,1	Padi kering.
2. Padi gogo (tegal)	87.586	46.707	1.237	47.944	5,85	27.381,2	„ „
3. Djagung.	68.071	39.327	3.080	42.407	3,95	15.550,9	Pipilan kering.
4. Kaspo.	115.212	59.566	151	59.717	33,88	201.852,0	Ketela basah.
5. Ketela rambat.	4.814	4.315	70	4.385	29,69	12.903,1	„ „
6. Katjang tanah.	28.522	32.600	1.154	33 754	4,47	15.594,0	Wose kering.
7. Kedele.	24.839	22.567	2.365	24.932	3,79	8.563,4	„ „

KETERANGAN:

Hasil-hasil pertanian rakjat tahun 1950 ini rendah sekali, karena akibat musim hudjan tahun 1949/1950 dan pendudukan Belanda dari Desember 1948 s/d Djuli 1949, hingga penanaman musim hudjan tahun 1949/1950 itu tidak teratur dan pemeliharaan tanaman musim hudjan itu kurang pula dapat perhatian.

Produksi padi tahun 1950 itu hanja 107573 ton padi sawah + 27381 ton padi gogo = 134954 ton.

PENETAPAN PRODUKSI DARI BULAN DJANUARI S/D DESEMBER 1951
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

Nama tanaman :	Luas tanaman h.a.	Luas pungutan hasil terhitung h.a.			Rata-rata hasil qt/ha	Djumlah produksi ton	Keterangan :
		Berhasil (a)	Pusa (b)	Djumlah (a) (b)			
1. Padi sawah.	103.290	82.917	904	83821	22,42	185.901,58	Padi kering
2. Padi gogo (tegal)	77.671	39.837	1.695	41 532	8,16	33.352,45	„ „
3. Djagung.	59.820	29.863	5.171	35034	6,32	18.898,03	Pipilan kering.
4. Kaspo.	102.774	56.728	590	57327	43,15	244.799,6	Ketela basah
5. Ketela rambat.	4.048	3.116	80	3196	49,29	15.359,4	„ „
6. Katjang tanah.	29.586	24.373	767	25140	8,43	20.544,7	Wose kering.
7. Kedele.	23.590	19.944	1.541	21485	6,83	12.627,07	„ „

KETERANGAN:

Hasil-hasil pertanian rakjat tahun 1951 itu ialah hasil-hasil sesudah dilaksanakan R.K.I. tahun 1950.

Produksi padi tahun 1951 ada 185901 ton padi sawah + 33352 ton padi gogo = 219253 ton.

Kenaikan produksi padi tahun 1951 dari tahun 1950 ada 219253 ton — 134954 ton = 84299 ton = 62%.

PENETAPAN PRODUKSI DARI BULAN DJANUARI S/D DESEMBER 1952
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

Nama tanaman.	Luas tanaman h.a.	Luas pungutan hasil terhitung h.a.			Rata-rata hasil-hasil qt/ha	Djumlah produksi ton	Keterangan :
		Berhasil (a)	Pusa (b)	Djumlah (a). (b)			
1. Padi sawah.	124.819	81.842	4.698	86.540	24,01	196.564,22	Padi kering.
2. Padi gogo (tegal).	76.878	38.180	243	38.423	12,89	49.234,90	„ „
3. Djagung.	60.021	28.995	7.349	36.344	3.99	11.593,60	Pipilan kering.
4. Kaspo.	105.002	49.878	1.453	51.331	40,62	202.597,01	Ketela basah.
5. Ketela rambat.	8.170	6.396	204	6.600	55,22	35.302,2	„ „
6. Katjang tanah.	22.622	18.518	739	19.357	7,24	13.412,41	Wose kering.
7. Kedele.	24.462	16.641	1.664	18.305	4,63	7.793,60	„ „
8. Tjantel.	5.180	2.895	716	3.611	5,35	1.550,01	„ „

KETERANGAN:

Hasil-hasil pertanian rakjat tahun 1952 ialah hasil-hasil sesudah dilaksanakan R.K.I. tahun 1950 dan 1951.

Produksi pada tahun 1952 ada: 196.564 ton padi sawah + 49234 ton padi gogo = 245798 ton.

Kenaikan hasil padi 245798 ton — 219253 = 26545 ton = 12%.

dengan djalan mengumpulkan telur-telur dan menangkapi kupu-kupu diwaktu petang hari dengan lampu.

b. Terhadap hama sundep atau beluk jang menjerang tanaman disawah, hanja dapat diusahakan agar daerah-daerah jang terserang hama itu tidak terserang lagi hama sundep atau beluk, maka sehabis panen semua batang padi harus ditjabut dengan akar-akarnja, dikumpulkan dan dibakar. Dengan djalan demikian ulat-ulat jang bersembunji didalam pokok batang padi sesudah panen, ta' dapat kesempatan mendjadi kepompong, kemudian mendjadi kupu-kupu jang kelak dapat bertelur pada batang-batang padi tanaman berikutnja dan ulat-ulatnja dapat menimbulkan hama sundep pada bibit padi dipesemaian atau pada tanaman padi muda atau dapat menimbulkan hama beluk pada tanaman padi jang telah berbunga.

Pada hama sundep pupus tanaman padi mendjadi kering, tanaman kemudian mati dan pada hama beluk bunga-bunga ta' dapat mendjadi butir-butir jang berisi.

3. **Serangan hama walangsangit:** Dalam tahun 1952 sawah jang terserang walangsangit ada 143 ha dengan rata-rata kerusakan 87%.

Hama ini diberantas dengan djalan :

a. Disuluh dengan obor diwaktu petang hari. Walang-walang-sangit menjambar api obor dan mati karena itu. (Tjara pemberantasan ini hanja dapat berhasil baik, kalau didjalankan serentak diseluruh daerah jang terserang hama).

b. Dengan memasang beberapa banjak sate juju dipetak-petak sawah jang terserang hama. Karena tertarik pada bau bangkai juju, walang-walang-sangit akan mengerumuni sate-sate juju tadi dan ditangkap kemudian dibunuh.

c. Terhadap walangsangit jang masih muda (belum bersajap) dapat diberantas dengan menangkapi tlendo-tlendo walangsangit oleh banjak anak-anak.

4. **Serangan penjakit mentek:** Dalam tahun 1952 luas tanaman padi jang terserang penjakit mentek ada 1650 ha dengan rata-rata kerusakan 64%. Oleh karena penjakit mentek itu menurut penjelidikan para achli terutama disebabkan karena kekurangan udara (gas asam) didalam tanah, ja'ni akibat dari pengolahan tanah jang tidak sempurna, maka penjakit ini dapat diberantas dengan djalan :

a. Mengeringkan petak-petak sawah jang tanaman padinja menderita penjakit mentek 1 a 2 hari dengan menggemburkan tanah diantara larikan tanaman padi dan kemudian digenangi lagi 2 a 3 hari lalu dikeringkan lagi seperti tersebut diatas. Pekerdjaan itu diulangi sampai beberapa kali, hingga tanaman sembuh kembali. (Baiknja pembrantasan ini dilakukan selama penjakit masih dalam stadia permulaan, agar mudah dapat tertolong).

b. Dengan merabuk tanaman jang sakit dengan ZA. Dengan djalan merabuk ini akar-akar tanaman jang belum buruk, dapat mudah mengisap makanan (ZA) dan karena itu menambah kekuatan bagi tanaman jang sakit.

5. **Kebandjiran atau kekeringan:** Dalam tahun 1952 tanaman padi jang ta' berhasil karena kebandjiran ada 952 ha dan karena kekeringan ada 2676 ha. Terhadap bentjana alam ini Djawatan Pertanian Rakjat ta' dapat berbuat apa-apa, hanja dapat mengandjurkan kepada petani-petani didaerah-daerah jang sering kekeringan dan kebandjiran hendaknja senantiasa menanam djenis-djenis padi jang gendjah atau bertanam pada waktu jang tepat, untuk menghindari kekurangan air atau kebanjakan air tadi.

Penjakit tanaman polowidjo.

Dalam tahun 1952 karena buruknja iklim, tanaman polowidjo banjak jang menderita kekeringan dan kebandjiran.

1. Jang menderita kekeringan hingga ta' berhasil jalah :

1977 ha tanaman djagung.
165 ha „ ubi kaju.
73 ha „ ubi djalar.
362 ha „ katjang tanah.
96 ha „ kedele.
59 ha „ tembakau.
217 ha „ padi gogo.

Hama dan penjakit jang menjerang tanaman polowidjo boleh dikata tidak ada. Lebih landjut periksa daftar di sebelah.

Hama artona pada tanaman kelapa :

a. Banjaknja pohon kelapa dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, menurut perhitungan tahun 1951 ada 3813299 pohon.
Dari djumlah sekian itu jang telah berbuah ada 1869585 pohon dengan penghasilan tiap-tiap bulan dari tiap-tiap pohon rata-rata 3 buah kelapa tua atau 36 buah kelapa tua tiap-tiap tahun.
Kalau ta' ada serangan hama artona 1 tahun Daerah Istimewa Jogjakarta menghasilkan 1869585 × 36 buah = 67305060 seharga rata-rata a Rp 0,30 = Rp. 20.191.518,—.

b. Serangan hama artona :

1. Tanaman pohon kelapa dalam Daerah Istimewa Jogjakarta menderita serangan hama artona sedjak tg. 10-10-1951 dengan pusat serangan jang permulaan didesa Mranggen, Kalurahan Bangunhardjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Dari bulan 10-1951 sampai dengan achir tahun 1952 djumlah pohon kelapa didaerah Kabupaten Bantul jang terserang hama artona dari perluasan pusat serangan Mranggen ada 123687 pohon.
Untuk membasmi serangan artona dari pusat serangan Mranggen itu Djawatan Pertanian Rakjat baru dapat menjemprot dengan tjairan ratjun H. C. H. didaerah Kabupaten Bantul sedjumlah 2212 pohon ja'ni pada tanggal 17 sampai dengan 23-10-1952 ada 1180 pohon, dan pada tanggal 24 sampai dengan 31-10-1952 ada 1032 pohon.
Usaha membasmi artona dalam musim penghudjan 1951/1952 dengan djalan memapras daun-daun kelapa jang terserang tidak dapat bantuan dan persetudjuan rakjat.
Untunglah didearah serangan artona tersebut diatas terdapat agak banjak parasiet-parasiet dari artona hingga karena kekuatan parasiet-parasiet tadi dan pengaruh semprotan dengan H. C. H. tersebut diatas kini serangan artona didaerah Kabupaten Bantul dari pusat serangan Mranggen telah dapat dihentikan (lenjap) dan pohon-pohon jang sakit mulai sembuh kembali dan akan dapat mulai memetik buahnja lagi pada achir tahun 1953.
Oleh karena itu kalau dari djumlah pohon kelapa jang terserang artona dari perluasan pusat serangan Mranggen sedjumlah 123687 pohon itu jang telah berbuah dihitung 60% maka pohon jang telah berbuah lalu berhenti berbuah selama 2 tahun ada 60% dari 123687 pohon = 74212 pohon. Kerugian Rakjat selama 2 tahun itu ada 2 × 74212 × 36 buah kelapa = 5343264 buah kelapa seharga a Rp. 0,30 = Rp. 1.602.979,20.

DAFTAR RECAPITULASI LUAS DAN PERSENAN SERANGAN HAMA PENJAKIT DAN BENTJANA ALAM

Tahun 1952. **Propinsi :** . . . .

Hama Penjakit dan Bentjana alam.	Padi		Djagung		Ketela kaspo		Ktl. rambat		Ktj. tanah		Kedele.		Tembakau		Padi gogo		Lain2		Keterangan
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	
1. Tikus.	39	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Babi-hutan.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. Ulat-ulat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	100	—	—	—	—	—	—	
4. Sundep/beluk.	134	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Mentek.	1650	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Djamur.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. Bandjir (Airbah)	952	100	1977	100	165	100	73	100	3652	100	96	100	59	100	217	100	74	100	
8. Kekeringan.	2676	100	822	92	285	96	72	87	213	63	1187	69	18	45	95	60	24	100	
9. Hudjan abu.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. Potong muda.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Walang sangit	143	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Lain-lain		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Djumlah/rata-rata.	5595	87	2799	97	550	97	145	94	575	86	1309	721	77	87	312	88	98	100	

2. Serangan hama artona dari pusat serangan, didesa Dengokan, Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
Serangan mulai pada tanggal 27-12-1951 sampai dengan achir tahun 1952 djumlah pohon kelapa jang terserang artona meluas dari 1500 pohon mendjadi 110457 pohon didaerah Kabupaten Bantul, sebelah selatan.
Pun rakjat didaerah Kapanewon Sanden tidak menjetudjui pembrantasan artona dengan djalan dipapras dalam musim penghudjan itu, sedang dengan djalan semprotan ratjun dalam musim penghudjan akan sia-sia belaka. Gangguan artona itu baru akan disemprot dengan tjairan ratjun derris pada musim marengan mulai tanggal 20 Maret 1953 jang akan datang.
Dalam musim marengan dan kemarau 1952 ta' dapat menjemprot dengan ratjun H. C. H. atau derris, karena Djawatan kekurangan obat-obatan dan alat-alat penjemprotan.
Kerugian rakjat karena serangan artona dalam tahun 1952, kalau dari djumlah pohon kelapa jang terserang ada 60% jang telah berbuah lalu berhenti berbuah selama 2 tahun ada 2 × 60% × 110457 × 36 buah = 4771742 buah seharga a Rp. 0,30 = Rp. 1431522,—

3. Serangan hama artona dari pusat serangan didesa Mentjon, Kalurahan Girikarto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.
Serangan mulai pada tanggal 15 April 1952 dan djumlah jang terserang ada 245 pohon.
Hama artona ini telah dapat dibrantas dengan djalan dipapras 15 pohon pada tanggal 17 April 1952 dan disemprot dengan tjairan ratjun derris 230 pohon dengan hasil baik (artona lenjap).

4. Serangan artona dari pusat serangan didesa Dilem, Kalurahan Tilong, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul. Serangan mulai pada tanggal 13 Mei 1952. Djumlah pohon jang diserang ada 916 pohon kelapa. Serangan artona ini dapat dibrantas dengan djalan dipapras 78 pohon pada tanggal 20 Mei 1952 dan disemprot dengan tjairan derris 666 pohon pada tanggal 9 Juni 1952. Hasil pembrantasan baik (artona lenjap).

5. Serangan artona dari pusat serangan didesa Pasirmendit Kalurahan Djangkaran, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo.
Serangan mulai pada tanggal 24 Mei 1952. Djumlah jang terserang 3917 pohon kelapa.
Hama artona ini lenjap dengan sendirinja, karena didaerah tersebut banjak terdapat parasiet-parasiet artona.

6. Serangan artona dari pusat serangan didesa Bolu, Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sejegan, Kabupaten Sleman mulai pada tanggal 24-5-1952. Tanggal 1-7-1952 sampai dengan 17-7-1952 dan tanggal 14-8-1952 sampai dengan tanggal 30-8-1952 disemprot dengan obat derris dan H. C. H. sedjumlah 4569 pohon. Hasil pembrantasan baik, artona lenjap.

7. Serangan Artona dari pusat serangan didega Sumberan, Kalurahan Tjandibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, mulai pada tanggal 28-10-1952. Pada tanggal 11-11-1952 dibrantas dengan djalan dipapras sebanjak 4 pohon. Hasil pembrantasan baik, artona lenjap.

Hasil perkebunan rakjat.

Pohon-pohonan dan tanaman lain jang memberi penghasilan pada petani jalah :

1. Pohon-pohon buah-buahan seperti:

a.	Mangga (matjam-matjam)	e.	Nangka.
b.	Djeruk (matjam-matjam)	f.	Salak.
c.	Djambu mete.	g.	Gajam.
d.	Srikaja.	h.	Djambu klampok.

2. Sajuran:

a.	Lombok.	d.	Petjai.
b.	Terong.	e.	Kobis.
c.	Brambang.	f.	Katjang pandjang.

3. Tanaman perdagangan:
   a. Tebu.
   b. Tembakau.
   c. Panili.
   d. Tjoklat.

Kebun perbibitan kepunjaan Djawatan.

Guna memperbaiki dan mempertinggi hasil-hasil dari Perkebunan Rakjat, Djawatan Pertanian Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta mempunjai 5 buah Kebun Perbibitan, ja'ni:

1. Kebun Perbibitan Pusat Dongkelan, Jogjakarta.
   Luas kebun 1,5 ha. untuk Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Kebun Perbibitan Wonotjatur Jogjakarta, filiaal Kebun Perbibitan Pusat Dongkelan. Luas Kebun 4 ha.
3. Kebun Perbibitan Tambak, untuk daerah Kulon Progo. Luas kebun 3 ha.
4. Kebun Perbibitan Sentolo, untuk daerah Kabupaten Kulon Progo. Luas kebun 0,5 ha.
5. Kebun perbibitan Wonosari, untuk daerah Kabupaten Gunung Kidul. Luas kebun 3 ha.

Bibit-bibit dan benih-benih jang telah disiarkan dari Kebun-kebun perbibitan tersebut diatas kepada Rakjat tani dengan harga murah, dalam tahun 1952 adalah sebagai berikut:

7956 batang matjam-matjam tumbuh-tumbuhan.
4841 batang okulasi dari matjam-matjam pohon buah-buahan.
54 kg. benih kobis R.V.E.
10 kg. benih petjai.
1,9 kg. benih wortel.
1 kg. kropsla.

Lain dari pada itu untuk memadjakan tanaman perdagangan rakjat dalam tahun 1952 Djawatan Pertanian Rakjat telah menjiarkan bibit-bibit sebagai berikut:

6.000 batang bibit lada dari Pangkalpinang.
950 batang tumbuhan tjengkeh dari daerah Banjumas dan Kedu.
10.250 batang bibit kaju putih dari ipukan sendiri.

Untuk memadjukan tanaman perdagangan tengah diipuk di Kebun-kebun perbibitan jalah:

a. Ipukan tanaman serat Buhmeria.
b. Sere (stronela).
c. Kapuk randu.
d. Teh.
e. Kopi.
f. Karet.
g. Kentang.
h. Kelapa.

Untuk memperbaiki bentuk kebun-kebun Perekonomian Rakjat, sedjak tahun 1951 dibeberapa Kalurahan diadakan Kebun-kebun Pertjontohan jang luasnja masing-masing 1 ha, jaitu :

1. Kebun Pertjontohan Plawonan, Kapanewon Pedes, Kabupaten Bantul.
2. „ „ Depok, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
3. „ „ Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman.
4. „ „ Salamredjo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.
5. „ „ Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. (Luas kebun ini hanja 1/2 ha.).

D. BAGIAN PERIKANAN

Untuk menjediakan bibit-bibit ikan jang dipelihara oleh rakjat dikolam kolam disawah-sawah bersama-sama dengan tanaman padi djuga untuk penebaran bibit-bibit ikan didanau-danau dan sungai-sungai Djawatan Pertanian Rakjat Bhg. Perikanan mempunjai 10 buah kolam peternakan seluas 8.71 ha jaitu :

1. Kolam peternakan Dongkelan. }
2. „ „ Krapjak. } Jogjakarta.
3. „ „ Wonotjatur. }
4. „ „ Sempu, Kap. Pakem, Kab. Sleman.
5. „ „ Minggir, Kap. Minggir, Kab. Sleman.
6. „ „ Mojudan, Kap. Mojudan, Kab. Sleman.
7. „ „ Tjangkringan, Kap. Tjangkringan, Kab. Sleman.
8. „ „ Kretek, Kap. Kretek, Kab. Bantul.
9. „ „ Sanden, Kap. Sanden, Kab. Bantul.
10. „ „ Pengasih, Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo.

Tiap-tiap tahun kolam-kolam peternakan tersebut diatas menjiarkan bibit-bibit ikan dan dalam tahun 1952 kolam-kolam peternakan tersebut diatas dapat menjiarkan :

900.000 ekor bibit ikan emas.
105.000 „ „ „ mudjair.
40.000 „ „ „ gurami.
250.000 „ „ „ tawes.
50.000 „ „ „ sepat siam.

300.000 ekor bibit ikan semua.

Hasil ikan dalam tahun 1952.

1. Dari hasil pemeliharaan ikan disawah bersama tanaman padi seluas 1420 ha a 35 kg. = 49250 kg.
2. Dari kolam-kolam seluas 42.976 ha. a 778 kg. = 33490 kg.
3. Dari danau-danau dan rawa-rawa luas 257 ha a 160 kg. = 40120 kg.
4. Dari sungai-sungai menurut taksiran 39750 kg.

Djumlah ikan semua 1 tahun (bahan makan jang mengandung zat putih telur) 162610 kg.

Pertjobaan memelihara ikan bandeng diair tawar.

Sedjak tahun 1951 Djawatan Pertanian Rakjat Bhg. Perikanan mengadakan pertjobaan memelihara ikan bandeng diair tawar ja'ni di Kolam peternakan Krapjak. Sampai dewasa ini pertjobaan telah berdjalan 3 kali a 6 bulan tiap-tiap kali. Bibit ikan bandeng (nener) didatangkan dari Taju, Daerah Pati.

Hasil pertjobaan: Dari nener pandjang 1,5 cm dalam tempoh 6 bulan mendjadi ikan bandeng jang pandjangnja rata-rata 36 cm dan rata-rata beratnja lebih kurang 275 gr.

Menurut perhitungan dikolam Krapjak:
1 ha kolam dengan ditebari nener 2 kali tiap-tiap tahun dapat memberi hasil 4500 kg a 5000 kg ikan bandeng.

E. PENGAIRAN SJARAT POKOK PERTANIAN

Bila kita dimuka telah melihat perkembangan pertanian didaerah Jogjakarta ini, sudah tentu kita tidak boleh meninggalkan hal-hal jang mendjadi sjarat pokok bagi pertanian jalah pengairan. Pengairan adalah factor jang terutama menentukan mati-hidupnja usaha pertanian disamping factor-factor lainnja.

Pekerdjaan pengairan mempunjai arti tiga pokok jang penting jaitu:
1. Mengalirkan air dari sumber-sumber atau dari kali dengan alat-alat seperti bendungan-bendungan, bangunan-bangunan, atau alat-alat lainnja.
2. Membagi air jang dialirkan itu seadil-adilnja dengan tjara jang teratur, kepada sawah-sawah jang membutuhkan.
3. Membuang air jang sudah dipergunakan itu kesaluran pembuangan atau ke-kali.

Meskipun didaerah ini mempunjai musim jang banjak menurunkan hudjan, akan tetapi kenjataan membuktikan bahwa dengan air hudjan sadja segala tanaman, terutama tanaman padi tak dapat tumbuh dengan subur. Hudjan itu biasanja djatuh setjara lebat dalam tempoh jang sangat pendek dan sebagian besar airnja mengalir dengan tidak dapat dipergunakan semua. Lagi pula pada musim hudjan kadang-kadang terdapat beberapa waktu jang kering sampai 30 hari lamanja. Maka dari itu tambahan air dan langsungnja mendapat air hanja dapat ditjapai dengan sistim pengairan jang teratur.

Didaerah sini usaha tersebut telah lama dapat dikerdjakan jaitu dengan membikin selokan-selokan dan bendungan-bendungan dikali jang dapat mengalirkan air sampai menudju ketanah-tanah jang perlu diberi air. Pada bendungan-bendungan dikali tersebut dibuat pintu pemasukan air, dimana air itu dapat diatur menurut kebutuhan. Pada waktu kali itu bandjir, pintu air dapat ditutup sehingga tanah-tanah sawah jang mendapat air dari bendungan tadi dapat terhindar dari bentjana bandjir.

Keadaan bendungan-bendungan dan selokan-selokan.

Systeem pengairan jang teratur didaerah Jogjakarta sini telah ada semendjak masih dalam pemerintahan djadjahan Belanda. Dinas pengairan disini dimana ada perusahaan-perusahaan tanah misalnja tanaman tebu, tembakau dan perkebunan lainnja, diurus oleh suatu badan otonoom jang diberi nama „Waterschap Opak-Progo". Daerah pengairan lainnja diluar ini diurus oleh Dinas Kasultanan atau Paku-Alaman.

Didjaman Belanda hingga pada saat kita menghadapi runtuhnja kekuasaannja ditanah air kita ini, urusan pengairan jang sehari-harinja dibawah pengawasan Pemerintah, nampaknja telah teratur dan berdjalan dengan baik.

Dalam hal ini sesungguhnja tidak berarti bahwa rakjat telah sedar dan insjaf akan pentingnja pengairan untuk keperluan bersama, akan tetapi sematamata hanja karena tekanan-tekanan dari peraturan jang berkenaan dengan hal itu. Pada hakekatnja pada djaman itu rakjat didalam mendjalankan urusan pembagian air masih berperasaan individueel, berperasaan perseorangan. Hanja

mementingkan kebutuhannja sendiri sadja dengan tidak memperdulikan hak-hak sesamanja.

Hal ini dapat dibuktikan dengan banjaknja perkara jang diputuskan oleh Pengadilan Negeri jang sebagian besar mendjatuhkan hukuman kepada pelanggar-pelanggar dalam urusan pengairan.

Tindakan-tindakan jang demikian itu lalu mendjadi kebiasaan, bahkan lebih buruk lagi waktu pendudukan Djepang.

Peraturan tidak di-indahkan, sehingga keadaan didalam urusan pembagian air dan aturan-aturan tentang tanaman mendjadi katjau.

Andjuran menanam padi sebanjak mungkin, dengan mengurangi pemberian air tiap ha sawah, sehingga hasil produksi malahan mendjadi mundur.

Tanggul-tanggul selokan irigasi dirusak karena antara lain memenuhi andjuran supaja tiap-tiap bidang tanah harus ditanami dengan ketela polowidjo dan sebagainja, tetapi tidak dilakukan dengan bidjaksana.

Demikianlah kebobrokan-kebobrokan jang dialami selama djaman itu, sampai kepada saat-saat kapitulasi Djepang dan timbulnja pergolakan revolusi kemerdekaan keadaan dari bangunan-bangunan tetap terlantar tidak terpelihara. Memang sesungguhnja pada waktu itu sedikit sekali dipikirkan oleh kita. Sebab pada umumnja kita sekalian sedang dirundung semangat mengobarkan api revolusi kemerdekaan. Kesibukan-kesibukan sehari-hari banjak ditumpahkan pada pertempuran-pertempuran dan membumi-hangus untuk mempertahankan kemerdekaan. Sehingga seakan-akan tidak sempat memikirkan soal-soal lain daripada berdjuang dan bertempur, sedangkan pada hakekatnja bekal-bekal untuk berdjuang jang berwudjud bahan makan tidak boleh diabaikan.

„Waterschap Opak-Progo" jang pada djaman kolonial merupakan badan otonomi, achirnja sesudah proklamasi kemerdekaan diganti dengan nama Badan Pengairan Opak-Progo dan pada bulan Nopember 1946 dengan maklumat Pemerintah Daerah no. 23 badan pengairan tersebut dengan segala peraturannja dihapuskan dan kemudian mendjadi Djawatan dari Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta. Pada saat itu djuga pengairan dari daerah Gunungkidul dan Kulon-Progo, jang dahulu diurus oleh Pemerintah Kasultanan dan Paku Alaman, didjadikan satu dengan pengairan dari badan Pengairan Opak-Progo, sehingga daerah pengairan jang dulunja terpisah-pisah sekarang setelah mendjadi satu luasnja ada 51863 ha.

Berbeda dengan bangunan-bangunan jang lain umpamanja gedung-gedung dan sebagainja, maka bangunan-bangunan dari pengairan umpamanja bendungan-bendungan dan alat-alat pengairan lainnja pada waktu clash ke II tidak ada jang dengan sengadja kita rusak, tetapi kerusakan-kerusakan itu terdjadi hanja karena kurangnja pemeliharaan sadja.

Sedjak keadaan mendjadi aman kembali, revolusi bersendjata telah pindah mendjadi andjuran-andjuran pembangunan, maka haluan pikiran kita umumja djuga beralih kembali ingat kepada kebutuhan-kebutuhan jang perlu-perlu untuk menghadapi hari kemudian. Artinja kalau dalam urusan pengairan pada djaman jang lampau ada terdjadi perusakan-perusakan dan pelanggaran-pelanggaran, maka sekarang semuanja berkewadjiban mendjaga tata-tertib peraturan-peraturan pengairan dan mendjaga bangunan-bangunannja.

Tetapi apa jang dihadapkan kepada kita pada waktu kita memasuki gerbang pembangunan ini ialah keadaan jang kurang sempurna pada bangunan-bangunan keadaan mana merupakan kelambatan bagi kemadjuan pertanian pada umumnja.

Kemudian untuk mengedjar kekurangan-kekurangan itu hanja dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah dan tindakan pemeliharaan dan perbaikan sedikit-sedikit, berhubung keluarnja biaja sangat terbatas.

Bendungan-bendungan jang sudah diperbaiki dan dibangun.

Selama ini bendungan-bendungan jang telah diperbaiki ada 7 buah tempat, jaitu :

1.	Bendungan Mudja-mudju	—	Kali	Gadjah Wong.
2.	„ Nogogaten	—	„	Buntung.
3.	„ Pendekan	—	„	Opak.
4.	„ Rogobangsan	—	„	Opak.
5.	„ Pusung	—	„	Wareng.
6.	„ Baki	—	„	Sat.
7.	„ Pendek I	—	„	Pete.

Jang dibangunkan baru oleh Djawatan Pengairan ada 3 buah tempat, jaitu :

1.	Bendungan Pokok	—	Kali	Bedog
2.	„ Dokaran	—	„	Tjode.
3.	„ Karangasem	—	„	Gawe.

Jang dibangun oleh kalurahan-kalurahan ada berdjumlah 85 buah tempat.

Bendungan-bendungan serakan jang rusak ada 9 buah tempat, dan jang sudah diperbaiki ada 7 buah tempat.

—Kegiatan rakjat dalam hal membangun bangunan-bangunan pengairan ini besar sekali sehingga kadang-kadang melampaui batas jang tertentu. Dan kadang-kadang sering membangun jang tidak begitu perlu dan tidak pada tempatnja, atau tidak dengan aturan jang semestinja.

Mengenai pembangunan atas bangunan-bangunan pengairan itu seharusnja mendjadi tanggung djawab pemerintah, akan tetapi karena selalu terbentur dengan batasnja keuangan maka untuk membangun bangunan pengairan setjara besar-besaran sangat tidak mungkin. Akan tetapi akibatnja terdorong dengan kebutuhan jang makin lama makin mendesak maka rakjat achirnja kadang-kadang bertindak dengan kemauan sendiri-sendiri sehingga bagi dinas Pengairan amat sukar untuk mengatur pengairan sebaik-baiknja. Namun Djawatan Pengairan djuga tetap berusaha dan berdaja-upaja akan terdjaminnja kebutuhan air dan mentjegah tambahnja kerusakan-kerusakan.

Berkat usaha perluasan pengairan maka dari tahun 1947 sampai 1952 luasnja daerah sawah-sawah ontjoran tambah 1772 ha dan mendjadi 53635 ha.

Semendjak selokan Malasan selesai dapat menambah air dalam sungai diantaranja dari Kali Progo kekali Tjode, maka penanaman padi ada madju sekali.

Tanaman padi rendeng dalam tahun 1944/1945 ada	37024	ha.
Tanaman padi rendeng dalam tahun 1951/1952 ada	51425	ha.
tambah	14401	ha.
Tanaman padi gadu dalam tahun 1945 ada	22198	ha.
Tanaman padi gadu dalam tahun 1952 ada	32733	ha.
tambah	10535	ha.

Demikianlah kemadjuan usaha-usaha menambah hasil produksi meskipun dengan melintasi masa-masa pantjaroba. (Lihat graphiek disebelah).

Selain usaha tersebut masih ada lagi usaha besar jang kini tengah dikerdjakan.

F. MEMBANGUN SUSUKAN RAKSASA

Sesudah pengakuan kedaulatan oleh Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, maka masjarakat Jogjakarta chususnja dan rakjat Indonesia umumnja mentjatat sedjarah baru dalam lapangan pengairan, jaitu dengan adanja gerakan membikin susukan untuk pengairan raksasa didaerah Kulon Progo

Grafiek tanaman jg mendapat pengairan dilingkungan Djwt. P.U. bg. Pengairan
Daerah Istimewa Jogjakarta dari th. 1940 sampai . 1952
Dalam th. 1952 luasnja sawah dan tegal ontjoran : 58635 ha
ha
Musim Kemarau
Padi Gadu
Musim hudjan
Padi Rendengan
clash
clash
tahun
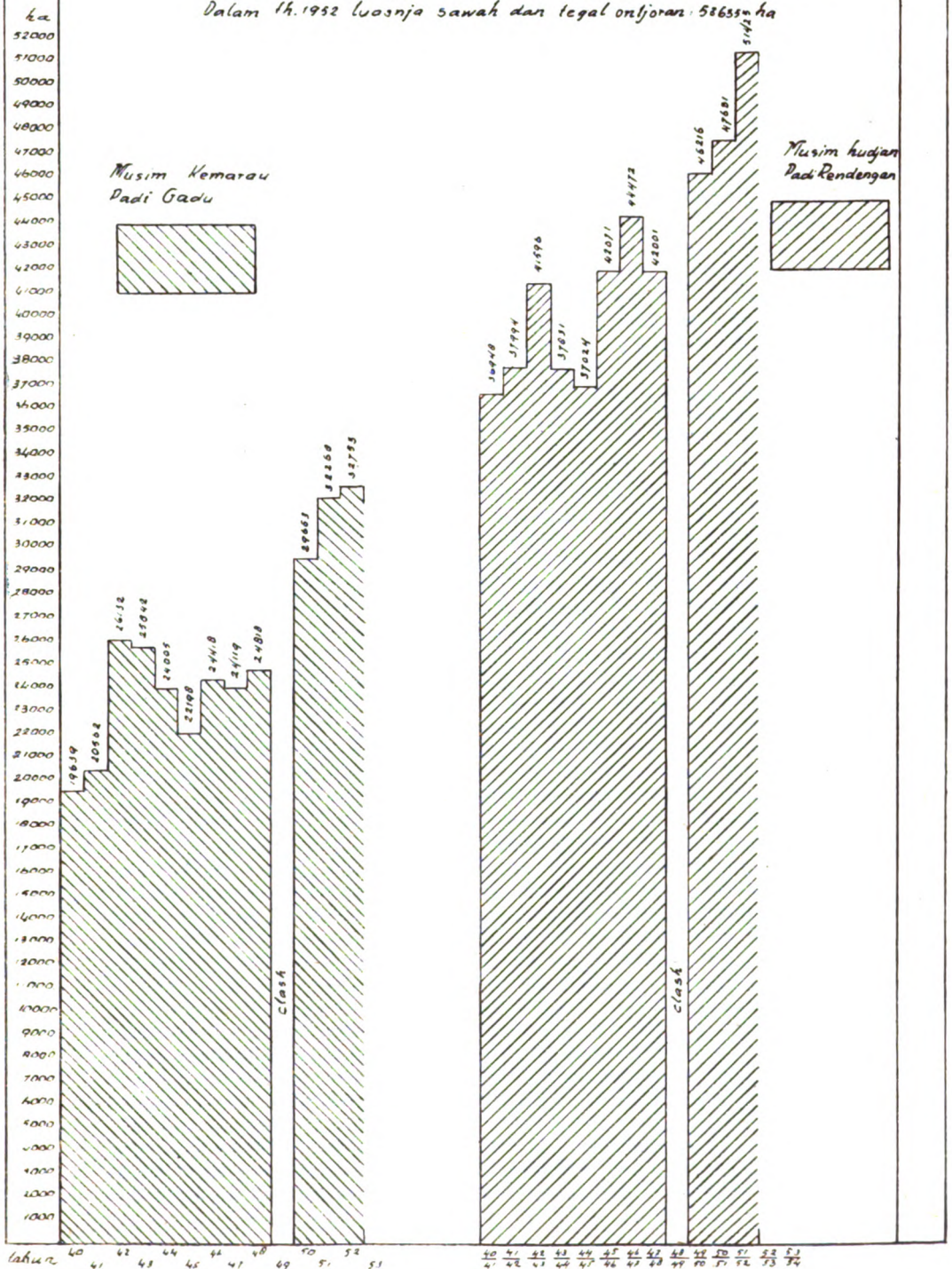
Setelah keadaan aman kembali, dan sembojan pembangunan disegala lapangan selalu bergema ditengah-tengah masjarakat, maka achirnja terasa sekali akan kebutuhan untuk tambahnja hasil produksi bagi keperluan rakjat umumnja. Dengan itu maka pada suatu waktu mentjetuslah hasrat rakjat untuk menunaikan suara hatinja. Hasrat rakjat jang bergelora ini achirnja dapat mewudjudkan suatu bangunan selokan raksasa, jang bila dapat selesai pembuatannja mengandung harapan jang besar sekali akan manfaatnja, sebagai salah satu usaha menudju kearah kemakmuran. Kini selokan raksasa di Kulon Progo itu tengah dikerdjakan.

Adapun asal mulanja pembuatan itu adalah sebagai berikut :

Sesungguhnja telah lama dirasakan oleh rakjat didaerah Kulon Progo pada umumnja, bahwa penghidupan didaerah ini makin lama makin tidak dapat mentjukupi kebutuhan.

Daerah Kulon Progo itu adalah daerah jang membudjur dari Utara ke Selatan sebagian besar merupakan tanah pegunungan. Udjung paling Utara adalah daerah Kapanewon Kalibawang, daerah mana adalah sangat kekurangan dalam arti penghidupan — minus —, tanahnja kering dan sangat kekurangan air. Penghidupan orang didaerah itu pada umumnja menjadap kelapa — untuk dibikin gula kelapa — keadaannja serba sukar dan menjedihkan. Tanahnja jang dapat ditanami padi sedikit sekali, dan banjak jang hanja merupakan sawah tadahan, dan lagi hanja sekali setahun dapat ditanami padi, sedang tanaman jang terbanjak ialah ketela dan polowidjo lainnja. Hasilnja akibat keadaan air jang sangat tidak tentu, maka kurang sekali. Banjak tanah tandus dan tidak ditanami. Rakjat umumnja hanja makan nasi sekali sehari dan tidak kenjang, dan djuga tidak tentu.

Dengan adanja segala penderitaan ini dan terbajang akan nasib anak tjutju dikemudian hari, maka tumbuhlah angan-angan rakjat betapa muljanja apabila dapat mengalirkan air dari sungai Progo jang besar ini kedaerah daratan. Bila tjita-tjita ini dapat tertjapai nistjaja penderitaan jang telah dialami bertahun-tahun ini akan segera dapat diringankan, lebih dari itu menudju ke-kemakmuran.

Dari hasrat rakjat jang telah bulat dan menggelora, jang mula-mula hanja keluar dari mulut ke-mulut, achirnja mendjadi musjawarat jang kemudian dapat menghasilkan keputusan bahwa idee jang meskipun berat itu harus dilaksanakan.

Pada awal tahun 1950, rakjat didaerah Kapanewon Kalibawang jang dipimpin oleh Prodjopangarso Panewu Pamong Pradja ditempat tersebut, dengan gotong rojong telah membulatkan tekad hendak membikin susukan untuk mengalirkan air Kali Progo ke-daerah Kapanewon Kalibawang.

Kesanggupan rakjat jang besar ini kemudian disampaikan kepada instansi jang bersangkutan, dan mendapat penuh perhatian.

Pada bulan Pebruari 1950, salah satu pegawai dari Djawatan Pengairan Kasijo — opnemer atau djuru ukur — beserta kawan-kawannja membawa alat-alat tiba di Kalibawang dan membikin tracee — rantjangan tjalon susukan.

Akan tetapi sesudah sementara waktu lamanja, rupa-rupanja rakjat tidak dapat menunggu terlaksananja itu lebih lama lagi, atau menunggu untuk dimulainja retjana tersebut dimuka. Pada bulan Maret rakjat dikalurahan Bandjarhardjo desa Duwet, dengan diam-diam telah mengumpulkan uang sampai mentjapai l.k. 11.000 rupiah. Dengan diam-diam pula telah mengadakan perhubungan sendiri dengan anemer-anemer dan lain-lain jang maksudnja hendak membuat aliran dengan mengambil air dari susukan Mataram — van der Wijk —.

Akan tetapi setelah rentjana tersebut dengan resmi dimintakan persetudjuan pemerintah, maka oleh jang berwadjib terpaksa ditolak dengan alasan, pertama akan dapat mengurangi banjaknja air jang mengalir lewat susukan

Mataram itu, dan kedua air jang akan dialirkan melalui pipa-pipa ketjil — antara 5 — 30 cm diameter — dan pandjangnja beberapa km itu setitik airpun tentu tak akan mentjapai tempat tudjuannja.

Sudah barang tentu dengan adanja keterangan-keterangan ini rakjat merasa sangat ketjewa, akan tetapi kemudian disusul dengan pendjelasan-pendjelasan lebih landjut sehingga rakjat tenang kembali dengan menunggu kelandjutan dari rentjana semula, jaitu membikin susukan baru. Dalam bulan April dan Mei tahun itu djuga rakjat tetap menunggu-menunggu keputusan pemerintah tentang rentjana tersebut diatas. Sebagian rakjat jang tidak sabar lalu membikin aliran air serta dam-dam ialah :

1. membuat aliran didesa Batjak, kalurahan Bandjarsari jang pandjangnja 3 km. dapat mengairi tanah jang luasnja kl. 35 ha dan dimulai pada „Hari Buruh" 1 Mei 1950, aliran mana sekarang telah selesai, tinggal memperkuat dam-dam dimana bagian jang perlu-perlu.
2. dam dan aliran-aliran air didesa Grembul, kalurahan Bandjaroja jang pandjangnja aliran-aliran itu kl. 4 km. Dengan bantuan ahli-ahli aliran tadi masih akan dipandjangkan lagi, dan akan dapat mengairi tanah 28 ha — untuk daerah Kedu kl. 40 ha —.
3. di Kalurahan Bandjararum membendung sungai Tinalah dan lain-lain lagi.

Demikianlah jang pada pokoknja rakjat di Kalibawang semua mentjari air, dari sebab itu mereka selalu mendesak pada jang berwadjib kapan pembuatan susukan itu dapat dimulai.

Pada tanggal 6 Agustus 1950 dalam konperensi dinas Kabupaten Sentolo, Prodjopangarso Panewu Pamong Pradja Kalibawang mendesak pada Sukabsi Kepala Seksi Pengairan Kulon Progo supaja dapat segera disetudjui tentang pembuatan susukan kali Progo jang telah direntjanakan itu, dan akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada waktu itu Sukabsi belum dapat memberi keputusan. Tetapi selandjutnja lima hari sesudah konperensi itu, Kasijo opnemer pengairan tersebut datang di Kapanewon Kalibawang dengan membawa kabar baik jaitu keputusan bahwa keinginan rakjat telah dapat persetudjuan.

Kemudian Panewu Kalibawang dengan Kasijo dari Pengairan dan Panitia 17 Agustus Kalibawang mulai mengadakan persiapan-persiapan penting.

Pada hari peringatan kemerdekaan jang kelima — 17 Agustus 1950 — setelah mengadakan upatjara resmi dengan disaksikan oleh wakil-wakil rakjat dari 93 padukuhan, para pamong Kalurahan, murid-murid sekolah, guru-guru, pemuda-pemuda serta semua instansi jang ada di Kalibawang bersama-sama berangkat menudju ke kali Progo, tempat dimana susukan akan dimulai pembuatannja. Dari Kapanewon kl. 2½ km djauhnja, dengan djurusan ke Timur Laut jaitu didesa Gedjagan, Kalurahan Bandjaroja.

Setelah orang-orang itu mendapat petundjuk-petundjuk seperlunja dari Panewu dan dari pegawai Pengairan, kemudian dilangsungkan selamatan oleh ketua dari desa itu. Sesudah selesai semua orang lalu berdiri ditempatnja masing-masing dengan memegang sendjatanja antara lain patjul, dandang, linggis, serok, kelenjem dan sebagainja. Tidak lama kemudian terdengar suara komando: „Angkat sendjata.............. gem................pur".

Dengan serentak segala sendjata jang ada ditangan orang jang djumlahnja beratus-ratus itu, bersama-sama didjatuhkan ditanah bertubi-tubi, laksana sendjata seribu menjerang tubuh raksasa. Inilah permulaan gerak tenaga jang telah dibulatkan dan jang mengagumkan untuk menggali susukan, sebagai pelaksanaan idee jang telah lama mengeram didalam djiwa masjarakat setempat. Mereka bekerdja dengan suka rela, dengan tudjuan jang sutji murni dibawah lambaian bendera Sang Merah Putih jang dikibarkan ditempat tersebut.

Hingga sekarang pembuatan susukan tersebut baru dapat kl. 7 km pandjangnja dan selandjutnja mendapat bantuan keuangan dari pemerintah.

Bagi mereka jang tidak mengetahui keadaan tanah ditempat itu, melihat hasil jang baru ditjapai ini tentu timbul dugaan jang mengetjewakan. Sebab pekerdjaan jang telah tiga tahun ini belum mentjapai hasil jang njata. Semua ini perlu diketahui bahwa semangat mereka bekerdja adalah betul-betul menundjukkan kesungguhannja, akan tetapi sebenarnja orang-orang ini tidak hanja menggali tanah biasa seperti didaerah tanah datar, melainkan menggali tanah padas, menggali tanah berbatu-batu ketjik dan batu-batu besar sepandjang susukan jang besarnja kadang-kadang dari 0,25 m3 sampai 2,8 m3. Djika melihat alat-alat jang dipergunakan untuk menggali itu jang hanja terdiri dari plantjong, linggis, patjul, bogem, padju dan sebagainja maka pekerdjaan ini boleh dikata telah termasuk hasil jang tjepat. Apalagi penggalian ini agak berubah dari rentjana semula jaitu jang dulunja direntjanakan lebarnja susukan ini hanja 2½ m maka sekarang ditambah mendjadi 4 m dan dalamnja ditambah 1 m lagi.

Semuanja ini tidak mengetjilkan atau mengetjewakan hati rakjat akan tetapi malahan menambah semangat untuk melandjutkan tjita-tjitanja. Lebih-lebih setelah berkali-kali mendapat perhatian dan penindjauan para pembesar daerah maupun pusat jang bergilir berganti-ganti.

Penindjauan pada tanggal 4 Djuli 1951 oleh Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta beserta wakil-wakil instansi dan pers.

Pada tanggal 18 Djuli 1951 dikundjungi oleh wakil Presiden Hatta diiringi oleh instansi-instansi dan pers.

Pada tanggal 4 September 1951 oleh wartawan-wartawan luar negeri/ P. B. B.

Pada tanggal 19 September 1951 dikundjungi oleh Presiden beserta pembesar-pembesar negara dan pers, jang pada esok harinja terus menindjau pasisir Adikarto.

Sesudah itu terutama dalam tahun 1952 tidak henti-hentinja berganti-ganti kundjungan para pembesar pusat dan daerah jang perlu menjaksikan pekerdjaan jang besar ini.

Pada bulan Oktober 1952 dari kalangan tentara Garnizoen Jogjakarta jang dipelopori oleh overste Sarbini sendiri dengan suka rela telah menjumbangkan tenaganja membantu pekerdjaan menggali susukan tersebut dengan anggauta-anggauta tentara sedjumlah 350 orang. Jang kedua ialah pada bulan Nopember dengan anggauta tentara 310 orang, dan jang ketiga ialah pada bulan Desember 1952 dengan anggauta tentara sedjumlah 1003 orang. Sehingga bantuan tentara jang diberikan selama ini telah berdjumlah 1663 orang.

Tindakan-tindakan ini dilakukan melulu terbit dari kerelaan hati dengan tiada mengandung harap balasan. Tekad dan semangatnja hanja melulu ditudjukan untuk lantjarnja pekerdjaan pembuatan susukan, jang mana umum telah mengetahui bahwa susukan dikemudian hari tentu akan besar sekali manfaatnja bagi masjarakat di Kulon Progo pada umumnja.

Rentjana susukan.

Sesudah dipertimbangkan sampai dalam oleh kalangan pemerintah pusat dan para ahli maka susukan kali Progo jang dimulai dari daerah Kapanewon Kalibawang itu, direntjanakan selandjutnja akan diteruskan mengalir sampai didaerah kapanewon Temon jaitu daerah jang terdekat dengan pesisir selatan jang pandjangnja susukan tersebut akan mentjapai kurang lebih 48 km, dan akan dapat mengairi sawah kurang lebih 6000 ha. Rentjana begroting semula kurang lebih 10.000.000 rupiah. Dan sampai saat ini biaja itu telah menghabiskan 2½ djuta rupiah.

Semuanja ini bila tiada rintangan sesuatu apa direntjanakan akan dapat selesai dalam 8 tahun.

G. HUTAN MENGANDUNG SUMBER-SUMBER KEKAJAAN

Dahulu kala daerah Jogjakarta ini hampir dimana-mana penuh dengan hutan-hutan. Hutan itu mengandung functie jang penting sekali bagi masjarakat sebagai suatu bagian dari rangkaian ekonomi dinegara kita jang sifatnja agraris. Seperti diketahui bahwa hutan itu mendjadi gudang terpendam jang mengandung banjak kekajaan, sumber air, sumber bahan makan, sumber kekajaan tenaga buruh dan perdagangan.

Daerah Istimewa Jogjakarta mempunjai daerah hutan jang luasnja ± 17607 ha. Jaitu jang berwudjud hutan djati — monopoli pemerintah — luasnja ± 14098 ha. dan jang berwudjud hutan rimba ± 3509 ha.

Pohon-pohon jang tumbuh didalam rimba jaitu terdiri dari : mahoni, sonokeling, dlingsem, puspo dan lain-lain. Kajunja dari mahoni biasanja digunakan untuk membuat barang-barang atau meubels jang sifatnja lux jaitu umpamanja : lemari dan peti-peti ukir-ukiran, mimbar dan sebagainja jang sering digunakan untuk menundjukkan kesenian ukir-ukiran. Kaju sonokeling diperlukan untuk tempat-tempat duduk dalam kereta api dan lain-lain keperluan. Kaju dlingsem dan puspo dapat digunakan sebagai kaju bakar atau arang jang mempunjai kwaliteit jang terbaik.

Adapun hutan kaju djati sedjak dahulu sampai sekarang tetap dikuasai oleh negara. Tiap tahunnja dapat menghasilkan lebih dari 1500 m3. Pada djaman pendjadjah Belanda dulu hasil kaju djati adalah termasuk mendjadi salah satu produksi export jang banjak mendatangkan keuntungan. Menurut keterangan para ahli dinjatakan bahwa kaju djati itu adalah salah satu kaju jang mendjadi bahan bangunan jang terbaik diseluruh dunia. Pada waktu djaman pendjadjah Belanda dulu kaju djati tersebut pernah di-export ke Zuid Afrika setjara besar-besaran, sewaktu daerah sana membutuhkan untuk bangunan bantalan rel kereta-api.

Tetapi sekarang hasil kaju djati itu tidak lagi kita kirim ke-luar negeri seperti dulu, sebab pada prinsipnja untuk dalam negeri sendiri masih membutuhkan kaju tersebut lebih banjak untuk pembangunan baik bagi pemerintah maupun untuk rakjat. Sehingga untuk keperluan itu di Jogjakarta sendiri banjak orang masih mendatangkan kaju dari lain daerah, jang tidak sedikit djumlahnja.

Didalam hutan rimba jang ada didaerah sini hidup djuga binatang-binatang liar jalah al. harimau, babi hutan, kera, ajam alas, dan sebagainja, tetapi djumlahnja tidak besar dan tidak membahajakan.

Hutan rimba didaerah Jogjakarta ini jang besar ialah disekitar gunung Merapi, digunung Plawangan atau dibelakang tempat istirahat Kaliurang, dan di Kulon Progo. Hutan-hutan kaju djati jang besar ialah didaerah Gunung Kidul.

Pada djaman Belanda orang-orang masih banjak jang suka berburu masuk kedalam hutan, dengan menurut peraturan jang disebut jaag-ordonansi. Orang jang berburu harus mendapat idjin dari residen dan pengawasannja dilakukan oleh kepala daerah hutan, tidak boleh orang keluar masuk hutan rimba dengan semaunja sendiri.

Akan tetapi semendjak pendjadjahan Djepang sehingga sekarang ini, boleh dikata tidak ada orang jang telah mentjoba mulai berburu lagi seperti dulu.

Sudah sedjak djaman pendjadjah Belanda dinas kehutanan itu diatur sebaik-baiknja mengenai tehnis maupun administratif. Djuga pendjagaan akan baik dan suburnja tanah. Tetapi hasilnja semuanja itu semata-mata hanja mendjadi keuntungan pemerintah pendjadjah sadja.

Pada djaman Djepang keadaan Djawatan Kehutanan bila dipandang dari sudut pengalaman semua aturan-aturan jang sudah ada sengadja dirusak, baik jang bersifat administrasi maupun tehnik. Hal ini terbukti dengan banjaknja aturan-aturan administrasi jang dikeluarkan, bagi djalannja pembukuan hanja

menambah kesukaran. Apalagi mengenai tehnik. banjak jang tidak menurut tehnik kehutanan, dan umumnja hanja didasarkan atas siasat peperangan, misalnja penebangan-penebangan pohon, penanaman dan sebagainja dilakukan tidak menurut aturan kehutanan jang semestinja sehingga hasilnja hanja merusak belaka.

Setelah kita dapat mentjapai kemerdekaan maka kita lalu menjusun kembali aturan-aturan tehnik kehutanan jang telah mengalami dua djaman kolonial jaitu djaman Belanda dan Djepang.

Kerusakan-kerusakan hutan jang ditimbulkan dari akibat penjakit-penjakit tanaman boleh dikata tidak ada, tetapi kerusakan-kerusakan itu terdjadi djuga jang disebabkan dari adanja pentjurian-pentjurian kaju dengan tjara penebangan jang semau-maunja, dan serobotan-serobotan tanah jang dilakukan oleh rakjat jang kurang mengerti akan faedahnja hutan jaitu terdjadi pada djaman Djepang dan pada waktu terdjadi clash ke-dua, kerusakan-kerusakan itu sampai mentjapai kurang lebih 3000 ha.

Tetapi kerusakan-kerusakan tersebut dengan kegiatan dari kalangan Djawatan Kehutanan sendiri sampai waktu ini telah dapat dihutankan kembali.

Panitia Karang Kitri.

Pada tanggal 13 Oktober 1952, Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta telah membentuk suatu panitia jang disebut Panitia Karang Kitri.

Panitia tersebut diketuai oleh Kepala Daerah dan wakil ketua oleh Kepala Djawatan Pemerintahan Umum dengan anggauta-anggautanja terdiri dari kepala-kepala Djawatan-djawatan daerah, ialah: Djawatan Pertanian, Djawatan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung, Djawatan Agraria, Djawatan Kehewanan Djawatan Kehutanan, Perwakilan Djawatan Perkebunan dan Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Adapun tugasnja ialah berusaha mengembalikan tanaman-tanaman ditanah jang tandus. Sebab Pemerintah jakin apabila tanah tandus jang tidak dipelihara atau tidak ditanami pohon-pohonan itu tentu akan menimbulkan bahaja tanah longsor — e r o s i —. Pada umumnja belum semua orang mengerti akan gunanja hutan untuk kepentingan masjarakat, sehingga pemerintah menganggap perlu hal tersebut dimasukkan dalam rentjana jang penting lebih-lebih dalam masa pembangunan seperti sekarang ini.

Tugas jang lain jaitu mendjamin dan memperbaiki keadaan air untuk keperluan pertanian, untuk air minum dan lain-lain. Terhadap keadaan hutan jang baik dan subur air hudjan jang djatuh diatasnja terpaksa mengalir dengan pelahan-pelahan dan merembes masuk kedalam tanah mengisi sumber-sumber air untuk persediaan. Alirannja air hudjan tidak menderas sebab terbentur-bentur dengan akar-akar dari pohon - pohon jang ada, dan lagi lumpur-lumpur tanah jang dapat membikin baik dan suburnja tanaman dan djuga tidak akan mudah terhanjut oleh alirannja air hudjan tadi.

Tugas selandjutnja ialah berusaha menghasilkan bahan-bahan jang penting untuk perekonomian, sebab hutan-hutan selain melindungi suburnja tanah, djuga menghasilkan bahan-bahan untuk keperluan penghidupan, seperti kaju-kaju untuk bangunan-bangunan, untuk bahan bakar, damar, areng, bumbu-bumbu batik, wenter, minjak tjat, minjak kajuputih, dan lain-lain jang semuanja itu mengenai kepentingan ekonomi.

Demikianlah antara lain tugas daripada Panitia Karang Kitri jang akan berusaha untuk tambahnja hasil-hasil dari daerah hutan. Usaha-usaha kearah perbaikan itu pertama-tama dilakukan dengan memberi penerangan kepada rakjat supaja rakjat mengerti dan insjaf betul akan faedahnja hutan, bahwa hutan itu mendjadi pelindung alam dan manusia. Hutan jang pada mulanja

lebar dan luas, achirnja mendjadi ketjil disebabkan dari tambahnja penduduk. Setiap penduduk itu tambah sudah tentu mereka membutuhkan tanah untuk pertanian dan tempat tinggal.

Pertama-tama hutan jang ada ditanah datar dibuka untuk lapangan pertanian. Jang demikian ini tidak menimbulkan akibat sesuatu apa. Akan tetapi sesudah ini, hutan-hutan jang ada di-lereng-lereng gunung djuga dibuka sehingga tidak kurang-kurang hutan jang sengadja dirusak. Lapisan tanah bagian atas jang membikin tanaman-tanaman itu gugur, tidak mendapat perlindungan lagi dari pohon-pohonan, sebab telah gundul. Kalau terserang hudjan jang lebat semua sari-sari tanah tadi hanjut kebawah terbawa alirnja air, dan dapat djuga menimbulkan tanah longsor — erosi —.

Dari sebab erosi tadi dan alirnja air hudjan jang ada digunung seperti tersebut tidak ada jang menahan, maka bila musim rendeng dapat mengadakan bandjir dan pada musim kemarau mendjadi kekurangan air.

Hutan mendjadi sumber kesuburan tanah. Djika orang merusak hutan berarti merusak suburnja tanah, jang berarti pula, merusak penghidupannja sendiri. Untuk mendjaga ini semua sebenarnja perlu sekali bantuan dari rakjat untuk tidak menebang-nebang pohon-pohon jang tumbuh, mentjuri kaju-kaju dan sebagainja. Sebaliknja rakjat sebaiknja turut mendjaga dan memelihara hutan ditempat masing-masing.

Penerangan-penerangan mengenai hal tersebut telah berdjalan dengan baik tidak sadja dilakukan oleh pemerintah, tetapi djuga dibantu oleh wakil-wakil rakjat. Dalam hal ini pernah salah seorang anggauta D.P.R. Daerah Istiadjid memberi penerangan dalam konperensi-konperensi Kabupaten di Gunung Kidul jang bermaksud supaja rakjat selain mengerti faedahnja hutan, djuga supaja turut memelihara dan turut menghutankan kembali tanah-tanah gundul seperti jang biasa terdapat dipegunungan-pegunungan.

Lain daripada itu Djawatan Kehutanan sendiri telah mengerdjakan dengan giat untuk menanami hutan-hutan jang rusak dan tanah-tanah jang tandus. Pegawai-pegawai kehutanan diwadjibkan dan diharuskan menanami tanah-tanah tersebut pertama-pertama dangan tanaman polowidjo dan sebagainja.

Mengenai pengiriman transmigrasi buruh kehutanan dari daerah Kulon Progo ke Lampung, pernah sekali berlangsung jaitu pada bulan Agustus 1952, tetapi tidak diurus oleh kehutanan Daerah Istimewa Jogjakarta, melainkan diurus langsung dari kantor besar kehutanan di Djakarta.

Mengingat pentingnja hutan tersebut maka pemerintah telah menjediakan djuga sekolah-sekolah kehutanan, a.l. bertempat di Bogor. Sekolah itu ialah Sekolah Menegah Kehutanan Atas dan Akademi Kehutanan.

Di Jogjakarta ada sekolah itu ialah pada U. N. Gadjah Mada Fak. Pertanian djurusan Kehutanan.

* *
*

6. PERKEMBANGAN KEHEWANAN DAN PETERNAKAN

A. KEBUTUHAN ORANG TENTANG PROTEIN

BAGI rakjat Indonesia pada umumnja kurang sekali memperhatikan dalam hal memadjukan kehewanan dan peternakan. Sesungguhnja soal ini banjak sekali faedahnja sebab selain ada matjam hewan jang dapat digunakan sebagai alat produksi a.l. kerbau, lembu, kuda dsb. untuk membantu tenaga manusia, djuga daging hewan itu dapat mendjadi salah satu bagian penambah zat makan jang perlu sekali bagi pertumbuhan badan manusia. Sehingga apabila ditanah air kita sini soal itu dapat mentjapai kemadjuan jang baik, maka sudah tentu hal jang demikian itu adalah salah satu bagian dari pada usaha kemakmuran.

Seperti diketahui, makanan rakjat kita mengandung sedikit zat putih telur jang berasal dari hewan (dierlijk protein). Zat tsb. adalah sjarat mutlak dalam makanan kita, agar kita dapat sehat berkemauan dan berinitiatief, agar badan kita dapat tumbuh, bergerak dan bertenaga, agar otak kita dapat berfikir. Dalam makanan rakjat kita zat tersebut adalah djauh kurang dari batas minimum untuk dapatnja hidup sebagai bangsa sebagaimana mestinja. Untuk perbandingan ;

Bangsa	Belanda	memakan	42	kg	protein	seorang	setahun.
„	Australia	„	134	„	„	„	„
„	Polandia	„	24	„	„	„	„
„	Inggeris	„	60	„	„	„	„
„	Indonesia hanja		± 4	„	„	„	„

Dapatlah dimengerti, bahwa rakjat Indonesia jang tersohor dengan menunja sebenggol sehari, tentu ta' mampu membeli makanan jang mengandung banjak dierlijk protein; karena bahan makanan (seperti daging, air asam, telur, beefstuk, gadjih dsb.) adalah mahal harganja. Menernak hewan ta' makan dagingnja, menghatsilkan telur ajam ta' makan telurnja. Bahan makanan jang tinggi harganja didjualnja untuk mendapatkan bahan makanan jang lebih murah (tentu bernilai rendah), tetapi jang banjak quantumnja, jaitu sebagai pengisi perut belaka, jang kurang manfaatnja. Protein jang termakan hanjalah sekedar gereh dan trasi. Demikianlah keadaan makanan dari rakjat kita pada umumnja.

Kekurangan dierlijk protein ini berakibat:

1. kurang tumbuhnja badan.
2. kurang berkembangnja tenaga dan activiteit.
3. kurang berkembangnja ketjerdasan otak dan initiatief (jang tersebut pada 2 dan 3 biasa diberi nama indolentie. Indolentie ini tidak hanja tersebab oleh iklim jang panas, tetapi malahan oleh kekurangan zat putih telur didalam makanannja).
4. hongeroedeem.
5. menurunkan anak berlebih-lebihan (sebagai instinct dari setiap machluk jang hidup, manakala merasa terdjepit hidupnja, maka ia berhasrat memperbanjak keturunan).

Segala sesuatu jang tersebut tadi ternjata terdjadi di Pulau Djawa, oleh karena buruknja perekonomian dari rakjatnja.

Bila nanti perekonomian kita telah meningkat keadaannja, maka tentunja rakjat akan mendjaga makanan jang tinggi nilainja, jang mengandung banjak protein, meskipun mahal harganja.

Agar bangsa Indonesia dapat madju dalam segala-galanja, maka makanan rakjat perlu diperbaiki kwaliteit dan nilainja. Soalnja ialah : adakah bahan makanan protein ini? Biarpun dimana perlu, kita dapat mendatangkan bahan tersebut dari luar Negeri, tetapi kewadjiban kita sedapat mungkin mengadakan bahan itu didalam Negeri kita sendiri.

Disinilah letaknja perhatian dari Djawatan Kehewanan. Memperbaiki peternakan rakjat dengan mengutamakan untuk memperbanjak segala djenis ternak, jaitu memperbanjak sumber dari dierlijk protein, dengan tudjuan untuk memperbaiki kwaliteit dan nilai dari makanan rakjat kita.

Daerah Istimewa Jogjakarta adalah daerah minus. Hatsil ternak tidak mentjukupi kebutuhan. Dimana hatsil dari tanahnja ta' sesuai dengan kebutuhan, maka para petani selalu mentjari lapangan penghatsilan lain, biasanja lapangan peternakan, pula untuk mendapatkan pupuk bagi tanaman-tanamannja. Ternak buat petani merupakan suatu tiang dalam perusahaannja. Didalam musim kemarau, mereka menempuh djalan sampai puluhan km djauhnja untuk mendapatkan rumput bagi makanan ternaknja. Bagaimanapun sulitnja mereka mempertahankan ternaknja. Demikianlah daerah ini mendjadi suatu daerah peternakan (veeteelt-strook), jang membutuhkan pelajanan jang lajak.

Dalam pada itu peternakan rakjat adalah soal jang tergantung ketjuali dari penjelenggaraan technisch, pula dari factor-factor, seperti : keadaan tanah (bodemgesteldheid), keadaan iklim (klimatologische omstandigheden), tumbuh-tumbuhan (vegetatie), pertanian, perekonomian dsb. Factor-factor ini membutuhkan penjelidikan dan daja upaja jang mendalam dan serius, keadaan dari daerah lain disekelilingnja, biarpun dekat letaknja. Maka dari itu Djawatan Kehewanan memerlukan susunan pegawai dan tjara bekerdja jang sesuai dengan djiwa kerakjatan. Dipandang perlu tiap Kabupaten mempunjai seorang tenaga dokter-hewan. Soal kekurangan tenaga adalah soal jang perlu dipetjahkan sebaik-baiknja.

Dalam waktu jang lampau para penernak mengalami penderitaan jang tidak sedikit. Waktu djaman Djepang para penernak terpaksa banjak menjerahkan ternaknja kepada Pemerintah Djepang. Pada waktu gerilja mereka banjak mengorbankan ternaknja untuk mendjamin tentara, pegawai dan pengungsi lain, paling tidak ajam atau kambingnja tentulah banjak dipotong untuk mendjamin para tetamu. Pada waktu pemberontakan dan penggarongan para penernak kehilangan pula ternaknja ; ternak itu dapat berdjalan sediri dan mudah dibawa lari (hanja dengan sekerat tali itu dapat dituntun dibawa lari). Dimana telah terdjadi penggarongan ternak, maka daerah sekelilingnja mendjadi kuatir akan lenjap ternaknja, banjak jang disingkirkan, tetapi banjak pula jang dipotong atau didjual.

Dalam waktu-waktu penderitaan tersebut diatas para penernak menderita lebih banjak djika dibandingkan dengan lain penduduk. Sebabnja ialah demikian : Djika petani diambil padinja, selumbung sekalipun, maka itu belum sebegitu berat dibandingkan dengan djika diambil sapinja, karena sawahnja masih dan pada waktu panenan berikutnja, mereka akan mendapat padi lagi. Tetapi djika diambil ternaknja, maka itu berarti sama dengan diambil padi dan sawahnja, djadi jang lenjap ialah ta' hanja hatsilnja, tetapi pula pangkal (dasar) dari perusahaannja sama sekali. Ketjuali itu seperti telah diuraikan diatas, sudah dibawa (dituntun) lari.

Para penernak menderita banjak. Maka dari itu peternakan rakjat membutuhkan tindakan rehabilitatie dari Pemerintah sebanjak mungkin.

Mengenai djumlah ternak angka-angka adalah sebagai berikut :

Tahun	Kuda	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Keterangan
1941	5.345	179.255	38.020	253.349	44.317	—	
1949	5.730	146.925	27.784	173.798	43.130	510	
1950	6.651	176.910	32.087	215.698	57.432	747	
1951	6.961	185.419	30.376	285.053	61.400	1.332	
1952	6.068	157.054	28.613	214.503	68.699	1.479	

Didalam bulan September 1951 diseluruh daerah Jogjakarta diadakan perhitungan ternak serentak (Keputusan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta ttg. 24 September 1951, No. 38/Tahun 1951). Maksud dari peraturan tersebut disesuaikan dan telah diadjukan kepada instansi jang berkewadjiban untuk disahkan.

Perbandingan dari angka2 djumlah ternak dalam tahun 1940 dan 1952 ternjatalah :

Djumlah kuda madju dengan 723 ekor
„ sapi mundur dengan 22.201 „
„ kerbau mundur dengan 9.407 „
„ kambing mundur dengan 38.846 „
„ domba madju dengan 24.382 „
„ babi pada tahun 1941 tidak diadakan perhitungan.

Dibandingkan dengan tahun 1949 djumlah ternak kini naik seluruhnja.

Graphiek djumlah ternak periksa dihalaman 497, 498, 499.

Oleh Djawatan Kehewanan diusahakan sebanjak mungkin bibit-bibit ternak jang baik untuk memperbaiki kwaliteit ternak rakjat.

Djumlah ternak djantan dari rakjat jang baik disiwer (ditahan dengan pemberian kerugian dipergunakan sebagai pematjek) untuk memperbaiki ternak rakjat adalah demikian :

Tahun	Djumlah		Keterangan
	Kuda	Sapi	
1949	—	98	
1950	1	216	
1951	—	124	
1952	—	172	
Djumlah	1	610	

Hingga kini telah diusahakan bibit-bibit dari berdjenis-djenis ternak dan dibagi-bagikan kepada rakjat di daerah-daerah dimana dipandang perlu seperti berikut :

Djenis ternak	Bangsa	Asal	Banjak djantan	Banjak betina	Banjak Djumlah	Keterangan
Kuda	Sandel	Sumba	20 x)	10	30	x) 20 kuda djantan ini sedang ditunggu kedatangannja.
,,	,,	Daerah sendiri	4	—	4	
		Djumlah semua	24	10	34	
Sapi peres	Friesch Hollands tulen	Negeri Belanda.	3	—	3	
,,	pranakan	Grati	—	6	6	
		Djumlah semua	3	6	9	
Sapi	Ongole tulen	Sumba	20 35	— —	20 35	
,,	Ongole tulen	Pengarasan	35	—	35	
,,	Ongole pranakan	Pati/Begelen	177	154	331	
		Djumlah semua	267	154	421	
Kerbau	Sumba	Sumba	5	5	10	
		Djumlah semua	5	5	10	
Kambing Etawa	Etawa tulen	Pengarasan	20	3	23	
,,	Etawa pranakan	Purworedjo	27	34	61	
,,	,,	Tegal	21	32	53	
,,	,,	Cheribon	10	4	14	
		Djumlah semua	78	73	151	
Domba	Garut ekor gemuk (vet staart)	Prijangan	23	23	46	
,,		Dj. Timur	16	115	131	
		Djumlah semua	39	138	177	
	Texel	Negeri Belanda.	sedang dipesan			

Ternak betina jang akan dipotong diperiksa dan dapat idzin, djika terdapat ta' baik lagi untuk peternakan (Stbl. 1936 No. 614).

Tahun	Jang diperiksa		Jang dapat idzin untuk dipotong		Keterangan
	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	
1949	153	117	104	80	
1950	335	398	200	236	
1951	839	592	516	327	
1952	1.065	491	552	248	
Djumlah	2.392	1.598	1.372	891	

Ternak jang akan dipotong atau dikeluarkan dari daerah (djantan dan betina) diperiksa untuk mendjaga djangan sampai terdjadi ezcos (ternak jang baik-baik dipotong atau mengalir ke luar daerah setjara besar-besaran).

Jang akan dipotong (djantan dan betina) dan dikeluarkan dari daerah :

	Kuda	Sapi	Kerbau	Kamb.	Domba	Babi	Keterangan
Dipotong :							
1949	122	7560	2037	7207	1085	164	
1950	70	16985	4254	11289	5590	757	
1951	71	12902	4968	13458	3996	572	
1952	61	14982	3110	18283	2627	1776	
Djumlah	324	52429	14369	50237	11298	3279	
Dikeluarkan/kereta-api :							
1949	—	—	—	—	—	—	
1950	—	1266	649	6343	479	—	
1951	16	1228	292	6132	512	—	
1952	—	280	221	16595	185	—	
Djumlah	16	2774	1162	29070	1194	—	
Djumlah	340	55203	15531	79307	12492	3279	

B. PETERNAKAN UNGGAS

Peternakan ajam pada waktu jang lampau ta' mendapat perhatian sebagaimana mestinja, oleh rakjat umumnja diselenggarakan setjara amat extensief. Makanan dan pemeliharaan ta' diberikan setjara teratur. Turahan dapur sudan amat baik kalau ada. Kalau ta'ada, maka ajam-ajam dibiarkan sadja, dilepas dan disuruh mentjari makan sendiri dikebun-kebun dan sebagainja. Masih untunglah bahwa ajam-ajam itu biasanja pulang sendiri bila malam tiba. Kematianpun banjak diabaikan. Sudah biasa ajam banjak jang mati kalau penjakit ,,piler" atau ,,kek" datang.

Nama tersebut adalah nama jang diberikan untuk penjakit ajam Pseudopest atau New Cestle desert.

Dalam pada itu penjakit ini menjebabkan banjak korban. Kematian 95% dan paling lama tiap tahun berulang.

Perhitungannja kerugian untuk seluruh Indonesia adalah demikian:
kerugian berupa ajam = 0.95 × 120 milj. × + Rp. 4 = Rp. 450 mil. lebih
kerugian berupa telur = 0.30 × 114 milj. × 60 × Rp. 0.50 = 1000 „ „

Totaal = 1450 „ „

Kerugian dierlijk protein adalah:
ajam 114 milj. a 1 kg .... = 114.000 ton
telur = 0.30 × 114 milj. × 60 × 30 gr .... = 61.560 ton

Totaal = 175.560 ton

berarti tiap orang Indonesia setahun kerugian ± 2 kg zat putih telur.

Demikian penjakit ajam jang oleh rakjat kita umumnja diabaikan sadja, adalah bagi Negeri kita kerugian jang ta' sedikit dan jang tiap waktu berulang, merupakan kerugian nasional.

Sebelum ada vaccin Pseudo-pest, sia-sialah segala daja upaja. Dimana dengan bimbingan perternakan sedang dapat mulai barkembang dan datang penjakit tersebut maka lenjaplah segala ajam. Inilah sebab jang melumpuhkan hasrat dalam lapangan peternakan unggas pada waktu itu.

Sesudah diketemukannja vaccin tersebut berubahlah sikap itu dan hiduplah kembali keberanian untuk bekerdja dalam lapangan tersebut. Dalam tahun 1950 didirikanlah Taman-Unggas di Aloon-aloon Utara untuk membimbing hasrat rakjat. Ketjuali itu kemudian di Kaliurang diselenggarakan induk peternakan jang perlu menghatsilkan bibit fokmateriaal bagi rakjat. Pada permulaan banjaklah kesulitan jang harus ditempuh, beraneka warna mentjari djalan dan memerlukan pengalaman. Kemudian oleh Taman Unggas di djelmakan:

1. Tentoonstelling, demonstratie, pertjobaan dan penerangan mengenai peternakan unggas, penetesan telur, opfak kutuk-kutuk, mengadakan kesempatan bagi rakjat menetaskan telur tersebut. Penerangan dilakukan lewat loudspeaker, radio dan madjallah.
2. Pendjualan fokmaterial, telur (tetesan, asinan dan consumptie), makanan ajam, alat-alat peternakan dan lain-lain keperluan idem.
3. Suntikan ajam (Pseudo-pest, pokken-diphterie). Pula pengobatan lain-lain penjakit seperti coccidiosis, tjatjing dan sebagainja dikerdjakan bersama-sama dengan faculteit.
4. Kebiren ajam untuk umum.
5. Pemindjaman pedjantan-pedjantan kepada rakjat. Hal ini terus diperkembangkan seluruh daerah.
6. Penerangan i.c. propaganda beredar.

Di Kaliurang induk peternakan unggas direntjanakan pula model boerderij (fok bibit sapi bangsa F. H. tulen, tjonto perusahaan air-susu, productie air-susu, jang berkwaliteit tinggi untuk para penderita penjakit dan babies), pula fok bibit domba bangsa Texel tulen untuk rakjat.

Menggirangkanlah bahwa maksud dan daja upaja tersebut diatas mendapat sambutan dan perhatian dari masjarakat.

Ketjuali kundjungan iseng-iseng jang lebih-lebih pada waktu ada keramaian (Sekaten, pasar-malam, hari besar dan sebagainja) meningkat djumlahnja hingga ta' terhitung lagi, tiap-tiap hari tertjatatlah berpuluh-puluh tetamu jang benar-benar membutuhkan penerangan beraneka-warna dan aturan keperluan lain mengenai peternakan.

Kesempatan menjuntikkan ajam pada tiap hari Sabtu selalu dipergunakan untuk ratusan ekor ajam. Ternjatalah bahwa perhatian rakjat memuaskan, contact ini selalu dipererat.

Hal suntikan ajam.

Seperti telah terlukis diatas penjakit Pseudo-pest adalah penjakit ajam jang mengakibatkan kerugian jang tidak sedikit, menurut perhitungan kerugian tersebut adalah Rp. 1450 miljun tiap tahun.

Berupa dierlijk protein kerugian ini adalah 175.560 ton tiap tahun, atau ± 2 kg seorang setahun.

Makanan rakjat kita mengandung ± 4 kg dierlijk protein ; kerugian 2 kg dari djumlah jang amat kurang itu merupakan soal jang minta perhatian. Sebab lain jang soal itu harus dipikirkan ialah : ajam bagi rakjat kita lebih-lebih bagi rakjat jang melarat, merupakan dasar (pangkal) dari perekonomiannja, dari penghidupannja. Mereka mulai dengan kutuk.

Maka dari sebab itu biarpun kesulitan beraneka warna bagaimanapun djuga, suntikan ajam didjalankan sebanjak mungkin.

1. Rakjat kita belum insjaf akan manfaatnja suntikan itu, belum pertjaja, maka dari itu mereka mengabaikan menjuntikkan ajamnja. Pula mereka menganggap ajam itu hanja barang jang remeh sadja, hidup sjukur, mati ta' mengapa. Djadi sulitlah untuk dapatnja ajam terkumpul untuk disuntik.
2. Sebuah ampule vaccin membutuhi kumpulan ajam 200 ekor, dan djika vaccin itu ampulenja sudah dibuka, harus segera habis disuntikkan.
3. Untuk mendapat kepertjajaan rakjat suntikan harus diadakan sebanjak mungkin dimana-mana, agar supaja rakjat dapat menjaksikan sendiri buahnja. Sebaliknja suntikan sulit, karena rakjat belum pertjaja (vicieuze circle).
4. Djika amat menjukarkan rakjat (harus mengumpulkan ajam, melaporkan jang sakit dan lain sebagainja) maka mereka akan lebih suka mendjual atau memotong ajamnja sadja, dari pada banjak rewel-rewel dan repot-repot.
5. Vaccin harus selalu berada didalam tempat jang dingin. Di daerah-daerah jang djauh dari kota letaknja, dimana tidak ada es atau listrik (frigidair) sulitlah untuk menjimpan vaccin didalam thermos.
6. Jang tidak kurang pentingnja, ialah pada permulaan soal kendaraan.

Recepnja untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tsb. diatas ialah keinsjafan dan kesungguhan hati, keuletan dan potentie dari para pegawai. Dimana sulit dapatnja rakjat mengumpulkan ajam, suntikan diadakan dirumahnja masing-masing, pada waktu dikehendaki oleh rakjat, tidak hanja pada waktu siang hari sadja (karena pada waktu pagi kampung itu kosong, penduduk lelaki disawah, perempuan dipasar, anak-anak sekolah dan ajamnja sudah lepas dikebun-kebun), tetapi pada waktu sore malahan dimana perlu pada waktu malam dengan pelita.

Sebagai pelopor untuk daerah R. I. Daerah Istimewa Jogjakarta mulai mengadakan suntikan ajam pada permulaan tahun 1950 dengan mendatangkan seorang dokter hewan bangsa Italia, bernama Dr. Martini, seorang ahli perihal suntikan ajam untuk pertjobaan sementara.

Sesudah itu suntikan dilandjutkan dan sampai sekarang jang disuntik ada 700.000 ekor unggas. Mengingat kesulitan-kesulitan tersebut diatas, maka djumlah tersebut dapat dibanggakan. Dengan segala daja upaja suntikan diperbanjak; menggirangkanlah jang penernak kita dipelosok sudah mulai meminta suntikan tersebut. Untuk tahun 1953 direntjanakan menjuntik 1 miljun ekor ajam.

C. PEMBRANTASAN PENJAKIT

Terhadap penjakit menular tersebut dalam Stbl. 1912 No. 435 peraturan-peraturan didjalankan sebagaimana mustinja.

1. **Aphthae Epizoeticae** (monden klauwzeer) meradja lela didaerah Jogjakarta. Jang terserang ada :

sapi 1661 ekor, kerbau 1186 ekor, dan kambing 2 ekor.
Penjakit ini menular pada manusia.
Lewat radio dan pers, kepada chalajak ramai dimintakan perhatian peraturan mengenai penjakit tersebut, lebih - lebih para peminum air - susu, para pengusaha perusahaan air-susu dan lain-lain orang jang berhubungan dengan ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.

2. **Malleus.** Penjakit menular pada kuda, djuga pada manusia. Terserang oleh penjakit tersebut ada 22 ekor kuda ; kuda-kuda tersebut dibunuh dan kepada jang punja diberi kerugian.
Tindakan preventief didjalankan ; peperiksaan klinisch, dengan opthalmo-malleinatie dan serum onderzoek, dilakukan pada 4 ekor kuda.
Dalam hal ini perlulah kiranja kami sebut pentingnja inspectie kendaraan.

3. **Tuberculosis.** Penjakit menular pada semua ternak, djuga pada manusia. Tindakan preventief didjalankan, lebih-lebih dalam perusahaan air-susu. Tidak hanja hewannja, pula para pegawainja diselidiki mengenai penjakit tersebut opthalm-tuberculinatie didjalankan pada 331 ekor sapi, dimana perlu tuberculinatie subeuntan dan idem intradermaal. Perlulah kiranja diketahui disini, bahwa air-susu di Jogjakarta ialah tbc. - vrij.

4. **Rabiës.** Penjakit ini menular pada semua ternak, lebih-lebih pada manusia, andjing dan kera. Jang terserang ada 12 ekor andjing, 3 ekor sapi, — ekor domba. Jang diobservatie ada 264 ekor andjing, 7 ekor kutjing, 8 ekor kera. Andjing jang ditangkap ada 889 ekor, dan jang dibunuh ada 471 ekor. Herzen materiaal diperiksa 147 kali. Orang jang digigit andjing ada 223. Orang jang disuntik 114. Penjakit tersebut terdapat diseluruh daerah dan tindakan dilakukan sebagaimana mustinja, dikerdjakan bersama-sama dengan Instituut Pasteur Jogjakarta. Sewaktu di Jogjakarta belum ada Instituut Pasteur, maka sulitlah keadaannja, para patient harus diangkut ke Bandung, mereka ta' insjaf dan ta' mau, ta' punja uang, alat Pemerintahan belum potent, fondsen belum ada. Karena hal ini mengenai djiwa manusia, maka segala daja ditempuh untuk dapatnja para patient tertolong, pula dapatnja Instituut Pasteur didirikan di Jogjakarta. Dalam pada itu kepada chalajak ramai lewat radio, pers dan madjallah disiarkan penerangan-penerangan setjukupnja dan kepada para instansi-instansi jang bersangkutan dinasehatkan betapa perlunja peraturan-peraturan itu dilakukan.
Tempat pengasingan andjing di Gading dan ditiap-tiap kazerne polisi, alat penanngkapan, pembunuhan dan seksi andjing dibangun dan diperlengkap.

5. **Surra.** Penjakit menular pada segala ternak. Tindakan preventief didjalankan massaal, microscopisch bloedonderzoek pada 3 ekor kuda, 522 ekor sapi dan 452 ekor kerbau.
Jang terserang dan disuntik dengan naganol, arsokoll, ada 1 ekor kuda, 55 ekor sapi dan 63 ekor kerbau.

6. **Gangraena emphysematosa bovum** (boutvuur).
Penjakit menular pada sapi dan kerbau. Jang terserang ada 27 ekor. Tindakan preventief didjalankan suntikan massaal pada 22817 ekor sapi dan — ekor kerbau.

7. Lain-lain penjakit seperti **anthrax, Abortus Bang, Ecchinococcosis, Trichihosis, Sporidiosis, Coccidiosis, Pokken diphtherie, Dochmiosis, tjatjing** dan sebagainja diperhatikan dengan saksama.
Mengenai pengobatan penjakit hewan jang ta' menular dikerdjakan bersama-sama jang erat dengan Faculteit, misalnja kliniek, sectie, penapelan kuda, perlindungan hewan dan sebagainja.

Djumlah penapelan kuda ada 14.266 ekor.

Veterinair hygiene.

Tempat pemotongan hewan di Ngampilan Jogjakarta, Godean, Sanden, Imogiri dibangun dan diperlengkap.

Angka tentang potongan hewan adalah demikian :

Tahun	Besar				Ketjil		Keterangan
	Kuda	Sapi	Kerbau	Babi	Kambing	Domba	
1941	119	10.693	7.693	2.266	17.990	2.968	
1942	47	7.942	7.317	2.768	13.514	2.829	
1943	64	12.209	8.169	2.572	19.208	3.234	
1944	178	17.279	6.679	2.742	38.586	6.600	
1945	83	11.348	3.518	2.038	30.473	7.325	
1946	59	13.716	3.718	1.742	28.293	10.500	
1947	40	18.673	8.300	3.389	30.160	11.271	
1948	77	13.768	6.636	1.877	22.343	3.178	
1949	122	7.860	2.037	174	7.207	1.085	
1950	71	12.902	4.968	572	13.458	3.996	
1951	70	16.985	4.254	757	11.289	3.590	
1952	60	14.982	3.110	1.776	18.283	2.627	

Peperiksaan daging, semua aturan-aturan mengenai hygiene daging penangkapan daging clandestien dan sebagainja didjalankan kembali sebagaimana mustinja.

Perusahaan-perusahaan susu dibangun kembali dan diperlengkap. Peraturan-peraturan mengenai hygiene air-susu, pemeriksaan air-susu dan sebagainja sedang terus didjalankan kembali sebagaimana mustinja. Sapi-sapi peres diluar dikembalikan kedalam perusahaan. Laboratorium dibangun kembali dan alat-alat instrumen diperlengkap.

Monster air-susu jang diperiksa ialah :

Tahun 1949 = 59 kali ;
„ 1950 = 357 „
„ 1951 = 325 „
„ 1952 = 494 „

Totaal = 1235 kali.

Penjakit-penjakit menular anthrax, aphthae epizooticae, tbc, rabies, abortus-bang dan sebagainja diperhatikan, dimana perlu diambil tindakan sebagaimana mustinja. Peperiksaan ophtalmo-tuberculinatie dilakukan pada 331 ekor sapi..

Peperiksaan kendaraan dan hewan penarik diusahakan, perlu diadakannja peperiksaan kuda-kuda penarik terhadap penjakit malleus sebagai tindakan preventief, mendjaga djangan sampai penjakit ini mendjalar kepada lain kuda, lebih-lebih kepada manusia.

Biarpun ta' ada laporan tetapi dipandang tentu ta' sedikit adanja manusia jang terserang oleh penjakit tersebut, mengingat pergaulannja jang rapat dan kemungkinan penularan.

Peraturan-peraturan mengenai hygiene andong, pertenakan babi, pendjemuran kulit, pemasakan kulit dan sebagainja sedang terus didjalankan kembali.

PERDAGANGAN DAN PEREDARAN HEWAN

Angka-angka mengenai hewan jang diperdagangkan adalah demikian :

Tahun	Diperdagangkan dipasar hewan						Jang lalu						Kete-rangan
	Kuda	Sapi	Kerbau	Kam-bing	Domba	Babi	Kuda	Sapi	Kerbau	Kam-bing	Domba	Babi	
1949	47	8928	1397	16148	5564	—	—	3362	743	8334	3402	—	
1950	95	29629	6217	49775	7302	—	—	10023	3181	28790	3812	—	
1951	123	51718	8439	88747	11423	—	1	20033	4770	62429	5477	—	
1952	73	56644	8374	18974	22373	—	—	26590	4691	79976	5337	—	

Angka-angka mengenai pemasukan dan pengeluaran hewan adalah demikian :

Tahun	Hewan jang dimasukkan kedalam daerah						Hewan jang dikeluarkan dari daerah						Kete-rangan
	Kuda	Sapi	Kerbau	Kam-bing	Domba	Babi	Kuda	Sapi	Kerbau	Kam-bing	Domba	Babi	
1949	—	35	8	—	—	—	—	56	7	—	—	—	
1950	10	2704	2605	791	179	—	10	3126	1564	12729	562	—	
1951	13	5712	2883	2447	1430	—	35	4200	1702	17218	625	—	
1952	1	7028	3820	8675	5997	—	—	1623	1244	22570	214	—	

Peraturan-peraturan mengenai lalu-lintas hewan (pas) diadakan peraturan oleh Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 22 Djanuari 1951 No. P.D./I/IX/A/51.

Kambing

No urut	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	Djiwa hewan
	211.150	253.344	271.511	266.563	234.439	241.472	159.698	165.021	186.591	173.798	215.698	238.053	214.503	

No urut: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Djiwa hewan: 0 10000 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Kuda

No urut	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	Djiwa hewan
	4.612	5.345	6.182	6.329	6.666	6.333	4.970	5.505	6.817	5.730	6.651	6.961	6 068	

No urut: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Djiwa hewan: 0 1000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KERBAU
Nº URUT
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
DJIWA HEWAN
36.974
38.020
39.315
36.282
32.367
40.459
28.534
28.963
31.284
27.784
32.087
30.376
28.613
SAPI
Nº URUT
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
DJIWA HEWAN
169.697
179.255
193.448
191.975
178.634
164.694
122.330
125.706
155.081
146.923
176.910
183.419
157.054

Domba

No urut
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
Djiwa hewan
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 10.000 0
33 615
44.317
47 256
38 393
39 489
40 674
56.380
50 905
54 015
43 130
57 432
61 400
63 699

Babi

No urut
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
Djiwa hewan
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 200 0
1.759
1.685
510
747
1 332
1 479

7. TANAH DAN PERUSAHAAN - PERTANIAN ASING DIDALAM DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA (TAHUN 1945 - 1953)

A. ICHTISAR LUAS TANAH ZAMAN REVOLUSI TAHUN 1945

DIDALAM Daerah Istimewa Jogjakarta, waktu mulai petjahnja revolusi tahun 1945, masih tertjatat 27 Perusahaan-Pertanian Asing (milik Belanda), diantaranja termasuk 10 buah paberik gula dan 2 buah paberik tembakau, jang masih dapat bekerdja (intact). Kesemuanja itu, waktu berkobarnja revolusi masih didalam kekuasaan Pemerintah Djepang, jang achirnja mengalih didalam pengawasan Pemerintah R. I. Paberik gula dimaksud itu jalah: Gondang - Lipuro, Pundong, Gesikan, Kedaton - Plered, Padokan (kesemuanja dalam daerah Kabupaten Bantul) dan Tjebongan, Beran, Tandjungtirto, Medari dan Sendang - Pitu (terletak didaerah Kabupaten Sleman), serta 2 buah paberik tembakau Wanudjojo dan Sorogedug (daerah Sleman dan Bantul) (lihat gambar).

Luas tanah untuk lapang pekerdjaan bagi 27 perusahaan Pertanian itu ada 22.460 ha perintjiannja seperti berikut:

a.	Tanah glebagan tahun gandjil (lazim disebut: glebagan biru)	—	10.798 ha.
b.	Tanah glebagan tahun genap (glebagan merah)	—	10.799 ha.
c.	Tanah glebagan 3 tahun	—	633 ha.
d.	Tanah untuk gedung-gedungnja paberik, rumah pegawai jajasan dan lain sebagainja	—	230 ha.
			22.460 ha.

Demikianlah ichtisar mengenai luas tanah jang dipergunakan oleh Perusahaan Pertanian Asing didalam Daerah Istimewa Jogjakarta, untuk melaksanakan usahanja jang telah dikenal oleh umum dengan **„hak-conversie"**.

Untuk memberi pengertian jang agak djelas, bagaimana awal mulanja Perusahaan Pertanian Asing (ondernemers) mendapat djaminan jang kuat atas pemakaiannja tanah, didaerah Jogjakarta, perlu djuga diutarakan sedikit riwajatnja.

Riwajat singkat hak tanah.

Sedjak zaman dahulu didaerah Keradjaan Djawa, kekuasaan dari pada Radja adalah sedemikian besarnja, hingga dapat mempengaruhi rakjat diatas hak-miliknja jang menentukan „hidup dan mati", singkatnja „tanah".

Untuk menundjukkan kebaktiannja terhadap Radja, sebagai padjak rakjat menjerahkan sebagian dari hasil bumi, karena beranggapan, bahwa jang memiliki tanah adalah Radja (Kagungan Dalem Nata); rakjat hanja menggaduh sadja.

PETA BEKAS PERUSAHAAN PERTANIAN ASING
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA
UKURAN 1:200.000
KARESIDENAN KEDU
KARESIDENAN SURAKARTA
LAUTAN HINDIA
Kab. Kulon-Progo
Kab. Gunungkidul
KOTAPRADJA
Daerah Surakarta
Keterangan
Tanah Perusahaan
Tanah sewan merasuke (Kebonongan)
Wringin, Tempel, Mlesen, Medari, Sendangpitu
Bulus Wetan (+), Bedojo (+)
Gondangluri, Randugunting (+), Bandjarhardjo
Bulusulon, Beran
Gedjajan, Maguwo, Tandjungtirto
Kadirodjo
Sewugalur (+)
Seregoduq, Wonodjojo
Wioro, Mudjamudju, Kedabanplered
Barongan
Sodajo (+), Rewulu, Demakidjo
Padokan
Bantul, Gesikan
Gondanglipuro
Pundong
Siblanden
(+) Dikundurkan tahun 1931 - 1938

Demikianlah didaerah Jogjakarta, tanah jang seluas daerah itu sebagian dikuasakan pada para keluarga Radja dan para pegawai, sebagai nafkahnja; mereka itu disebut **patuh**, sedang tanahnja **„tanah kepatuhan"**. Bagi rakjat mempunjai kewadjiban selain menjerahkan sebagian dari hasil tanahnja pada patuh itu tidak mempunjai hak sama sekali atas tanah, melainkan mengenai hasilnja. Untuk mengurus segala sesuatu ini ditundjuk seorang **bekel,** jang mendapat djaminan pula atas 1/5 dari tanah.

Dengan ringkas djelasnja sebagai berikut: 1/5 untuk bekel, 2/5 untuk patuh, 2/5 untuk rakjat sendiri. Sebagaimana diutarakan diatas, hak-hak dari pada patuh maupun **bekel** ini, tidak lain dari pada mendapat bagian hasil tanah, tetapi didalam praktik kekuasaannja begitu besar terhadap tanah dan rakjatnja, sehingga para patuh merupakan **tuan tanah-besar** dengan para bekel sebagai tangan kanannja.

Keadaan „Agrarisch-stelsel" sematjam ini, dizaman kolonial dibuat kesempatan sebagai dasar untuk memberi kesempatan pada modal Asing, agar dapat berkembang didaerah ini (djuga di Surakarta).

Demikianlah didalam keterangan jang resmi didalam „Rapport" mengenai hak-hak jang dibebankan diatas tanah didaerah residentie Surakarta, jang terbikin menurut Gouvernement-besluit ttg. 25 Oktober 1875 No. 38, antaranja kutipannja:

„Als eerste resultaat van elk onderzoek, dat in de Vorstenlanden van Java „naar de rechten op den grond gedaan wordt, zal wel onmiddelijk in het „oog springen de volkomen juistheid van de stelling, voorkomende in het „rapport van den Commissaris — Generaal, Du Bus, dd 1 Mei 1827, dat de „Vorst in de meest absoluten zin des woords is eigenaar van den grond. „Die stelling is niet betwistbaar. Sedert eeuwen heeft de Vorst niet alleen „als zodanig gehandeld en is hij als zodanig door de geheele bevolking „door iedereen erkend, maar nimmer is daartegen zelfs een enkele stem „opgekomen uit den boezem der inlandsche maatschappy — en wat meer „zegt — de geheele inrichting dier inlandsche maatschappy is gegrond „op de basis, — de Vorst eigenaar van den grond".

Kurang lebih terdjemahannja:

— Menurut penjelidikan, bahwa mengenai hak-hak tanah didaerah Ke-
— radjaan Djawa, seperti jang dinjatakan didalam laporannja Komis-
— saris-Djenderal Du Bus, ttg. 1 Mei 1827, dapat dibenarkan, jalah
— bahwa hanja Radja jang mempunjai hak atas tanah didalam
— daerahnja.
— Pendirian ini tidak dapat dibantah lagi, karena sedjak berabad-abad
— para Radja selain bertindak sedemikian itu, pun djuga oleh rakjat se-
— muanja diakuinja, dan tidak ada suara dari masjarakat Indonesia jang
— menentangnja, malahan masjarakat Indonesia berdasarkan azas, Radja
— berhak penuh atas tanah.

Onderneming Asing didaerah Jogjakarta

Faham jang kolot itu, kalau dipandang menurut pengetahuan jang kuno pula, sudah dapat diketahui, bahwa ada hal jang penting tetap dilupakan, jaitu: rasa ketimuran asli ditjampur dengan pendapat Barat. Anggapan rakjat tanah adalah milik Radja, djanganlah dilupakan bahwa ada maksud jang sangat dalam, jaitu karena zaman dahulu merupakan suatu tanda: **ketaatan, ketjintuan** terhadap Radja, sebagai Pemimpin rakjat jang abadi. Mempunjai ma'na pula, agar djangan sampai setjara mudah atas hak-haknja itu diganggu gugat oleh pihak lain. Lalu mengalih kepada keadaan jang sedemikian itu, mau tidak mau tentunja pengaruh Barat pula jang menelorkan perubahan.

Djika dipandang menurut aliran dan zaman modern, pendirian Du Bus tahun 1827 jang kolot itu, teranglah tidak tjotjok lagi didalam Negara kita jang telah merdeka, njatalah bertentangan dengan azas politik perekonomian Negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar Sementara Pasal 28 dan 38.

Dengan dasar jang sematjam itu, pun berkenaan dengan kelemahan dari golongan ketjil jang berkuasa itu, antara pertengahan abad ke: **XIX** para Perusahaan Pertanian Asing mendapat lapang pekerdjaan baik didaerah Surakarta, maupun didaerah Jogjakarta.

Persewaan tanah dengan setjara mudah dapat dilaksanakan antara para patuh dan Perusahaan Pertanian Asing, berdasar Landhuur-reglement tahun: 1857 jang terachir dirubah didalam tahun: 1906. Disekitar persewaan ini riwajat menundjukkan, bahwa rakjat tidak ketinggalan mendjadi korbannja. Didalam teori seolah-olah memberi manfaat bagi rakjat, karena ta' perlu menjerahkan lagi sebagian hasil bumi, tetapi sebaliknja tanah-njalah jang harus diserahkan. Tidak lagi pada patuhnja tetapi pada Perusahaan Pertanian, djuga untuk kepentingannja Perusahaan Pertanian, rakjat diharuskan menjerahkan tenaganja, tidak dengan upah, djadi **„menjewa tanah dan rakjatnja".** Betapakah beratnja ta' perlu diuraikan disini, tetapi tjukup djelas bahwa akibat dari pembebanan jang sematjam ini, menimbulkan beberapa excessen disana sini. Djika rakjat **meninggalkan hak miliknja tanah,** karena ta' tahan lagi menderita, bukan termasuk keadaan jang aneh dan tidak djarang terdjadi.

B. PERUBAHAN HUKUM TANAH TAHUN 1918

Demikianlah atas hasrat para Radja Djawa (Jogjakarta dan Surakarta) hukum tanah jang bertjorak feodal, didalam tahun : 1918, dirubah sedemikian rupa sehingga rakjat diberi hak atas tanah jang lebih kuat, dengan istilah **„erfelijk"-individueel gebruiksrecht** (hak anganggo turun-tumurun = hak memakai jang dapat diwariskan). Kepada bekas daerah kebekelan lama, jang lalu diatur dengan „kalurahan" (desa), hak-hak tanah ini diberikan dengan „Inlandsche-bezitsrecht" (hak andarbe = hak mempunjai). Didalam praktik istilah-istilah ini kerap menimbulkan salah faham, sebab hak jang diberikan pada rakjat itu sesungguhnja ta' berbeda dengan „hak milik" dilain daerah sedang bagi kalurahan, sesungguhnja hak menguasai belaka (dorpsbeschikkingsrecht).

Disampingnja itu perlu pula ada bantuan dari pihak Perusahaan Pertanian Asing, jang dulu sama menjewa dari para patuh. Bantuan ini merupakan pernjataan kesediaan atas perubahan keadaan persewaan tanah, sebab tentunja akan terdjadi hal jang sangat gandjil, bila mereka itu masih melangsungkan seperti tjara jang lama (sekalipun di-idzinkan), karena berarti masih memberatkan bebannja rakjat tani.

Singkatnja „Agrarische reorganisatie" dapat dilaksanakan sebagaimana jang dikehendaki. Bagi para **Perusahaan Pertanian Asing,** didjamin atas pemakainja tanah **selama 50 tahun,** jang lazim dinamakan dengan **„hak conversie"** (mengalih pada peraturan baru), jaitu jang didasarkan menurut peraturan-peraturan jang termuat didalam Vorstenlandsch-Grondhuurreglement (V.G. H.R.), staatsblad tahun: 1918 No. 20 (jang sedjak itu telah berulang-ulang dirubah dan ditambah.

Pemberian **„hak - conversie"** ini sifatnja sebagai „hak-kebendaan" (zakelijk-recht) jang dapat dibebankan dengan hypotheek.

Pemberian hak-conversie tersebut dihubungkan pula dengan daerah-daerah jang telah diatur menurut kalurahan (desa baru). Dimulai pada bulan April 1920, dan jang terachir terdjadi didalam tahun 1925. Pemberian hak-conversie pada perusahaan pertanian Asing ditentukan menurut „Conversiebeschikking" dari Zelfbestuur jang berkepentingan.

Pada waktu itu didalam daerah Jogjakarta kesemuanja ada 32 Perusahaan Pertanian Asing. Achirnja dengan penderitaan dizaman malaise tahun 1931 — 1935 ada 5 buah jang telah menjerahkan kembali hak-haknja conversie (seluruhnja), sehingga tinggal 27 Perusahaan Pertanian Asing (termasuk djuga jang telah menjerahkan kembali sebagian dari arealnja).

Apakah dengan **„Perubahan hukum tanah"** (Agrarische reorganisatie) itu benar-benar membawa manfaat bagi rakjat tani?

Untuk daerah jang tidak ada ondernemingnja (Gunung Kidul-Kulon Progo) dapat dikatakan benar-benar besar manfaatnja, karena rakjat hak-haknja diatas tanah lebih kuat dari keadaan semula.

Didalam daerah jang ada perusahaan-perusahaan asing, walaupun pengakuannja hak sama, tetapi masih diliputi dengan hak-conversie, berarti hak-haknja rakjat masih terikat. Peraturan „glebagan" (giliran pemakainja tanah) masih langsung berlaku. Keadaan systeem „glebagan" ini, rakjat tani teranglah tidak dengan merdeka mengerdjakan tanahnja. Didalam theorie setahun rakjat mempekerdjakan ½ (separo) bagian tanahnja, dan bagian lainnja untuk onderneming. Praktiknja rakjat dengan terburu - buru sekali mengerdjakan tanah jang mendjadi gilirannja itu, sebab harus menjerahkan tanahnja pada onderneming didalam bulan April. Adapun penerimaannja ganti tanah dari onderneming, harus menunggu empat sampai enam bulan lagi, ringkasnja rakjat hanja punja waktu ½ tahun untuk mengerdjakan tanah jang mendjadi gilirannja itu. Benar karena penjerahannja tanah dari onderneming ini, rakjat diberi „kerugian uang", lazim disebut **„uang kasepan"**, tetapi perhitungannja djauh lebih rendah dari pada hasil jang dapat diperoleh kalau tanah itu ditanami sendiri. Belum terhitung kerugian lain-lainnja, seperti untuk memulihkan galengan, got, membersihkan akar tebu, dan lain sebagainja, hanja diberi uang pemulihan, **„uang dongkelan** = dongklakan". jang didasarkan atas perhitungan „upah kerdja" (loonstandaard) sebenggol sedjam, atau sehari bekerdja 8 djam = Rp. 0,20, rata-rata antara Rp. 4,— sampai dengan Rp. 7,— per ha. Inipun masih ditawar oleh onderneming. dengan dasar upah kerdja hanja 5 sen sehari.

Bahwa kegelisahan hati rakjat dapat dibuktikan dengan tindakan-tindakan rakjat, seperti menghadap setjara rombongan (demonstrasi) ke Kepatihan (waktu itu instansi jang tertinggi) pun djuga tindakan jang dilakukan setjara perseorangan untuk mentjari pengadilan, dengan tingkah laku, mendjemur dirinja (pepe) ditengah-tengah Aloon-aloon Utara antara kedua Ringin-Kurung, dengan berkudung kain putih diatas kepalanja, kerap kali terlihat oleh umum.

Desakan rakjat menghendaki segera hapusnja „Hak Conversie"

Bertalian dengan keadaan itu, dimana rakjat benar-benar dikurangi atas hak-haknja, maka ta' mengherankan lagi, bahwa semendjak meletusnja revolusi tahun 1945, telah terdengar suara-suara menghendaki akan lekas hapusnja hak - conversie.

Demikianlah bulan Agustus 1946 suara rakjat itu diwudjudkan dengan tindakan - tindakan jang njata dari rakjat tani, dengan setjara merampas tanaman tebu dan menutup got-got pengairan dimana ada tanaman tebu atau tembakau. Peristiwa ini terdjadi didaerah Kapanewon (Ketjamatan) Panggang, Bantul, Djetis, Sewon, Berbah, dan didaerah tembakau Sorogedug/Wanudjojo. Dikala itu „perusahaan pertanian tebu" diselenggarakan oleh B.P.P.G.N. (Badan Penjelenggaraan Perusahaan Gula Negara) sedang „Perusahaan Pertanian tembakau" oleh B.P.N., badan-badan mana jang berlindung dibawah kekuasaan Pemerintah dirasakan oleh rakjat akan mengganti kedudukan onderneming jang ingin meneruskan hak-haknja. Perbuatan rakjat tidak hanja dilakukan oleh sementara orang sadja, tetapi sampai ratusan orang serta „bersendjata grang-

gang". Seolah-olah rakjat akan melawan, pada siapa sadja, jang berani meng-halang-halangi kehendaknja itu. Pengusutan lebih landjut menjatakan, bahwa tindakan rakjat itu sesungguhnja merupakan **„Moment-demonstrasi"**, jang menghendaki agar „hak-conversie" selekas mungkin dihapuskan.

Peraturan Sementara.

Bertalian dengan peristiwa-peristiwa itu, tjukuplah bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil sikap seperlunja. Setelah soal itu dibitjarakan dengan beberapa badan-badan jang ada didaerah ini, achirnja dengan persetudjuan Pemerintah Pusat, oleh Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dikeluarkan suatu „peraturan Sementara atas pemakaiannja tanah oleh B.P.P.G.N. dan P.P.N.

Dengan keluarnja peraturan itu, diachirilah sudah soal **glebagan „uangkasepan", dongkelan dan lain sebagainja,** singkatnja soal-soal jang merupakan beban rakjat, althans dapat dirasakan oleh rakjat tani dengan setjara langsung.

Peraturan dimaksud diatas hanja berlaku untuk selama 3 tahun, sambil menunggu Peraturan jang concreet dari Pemerintah Pusat.

Tempo 3 tahun dirasakan lama benar oleh rakjat tani, sebab tentang tanah jang masih diusahakan oleh perusahaan pertanian belum dapat diterima kembali.

Suasana tidak tahan lagi menunggu waktu itu, dan disusul oleh beberapa resolusi dan mosi dari beberapa organisasi Tani, baik jang ditudjukan pada Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah, agar selekas mungkin dihapushannja **„hak-conversie".**

Panitya Conversie tahun 1948.

Dengan penetapan Presiden R.I. tertanggal: 6/3-1948 No. 11/1948 di bentuklah sebuah „Panitya-Conversie", terdiri dari beberapa achli baik dari pelbagai Kementerian, maupun Daerah (Jogja dan Solo) dan pula sementara anggauta dari Badan Pekerdja K.N.I.P. jang dikala itu Negara kita masih beribu-Kota di Jogjakarta.

Tugas jang diberikan kepada Panitya tadi supaja mengadakan penindjauan sedalam-dalamnja sekitar „hak-conversie" jang ada didalam daerah Jogjakarta dan Surakarta, dan diminta oleh Pemerintah supaja didalam tempo sependek-pendeknja mengadakan pertimbangan pada Pemerintah mengenai keinginan rakjat tani jang menghendaki selekas mungkin hapusnja hak-conversie.

Kemudian dari pada itu setelah „Panitya Conversie" tadi mengadakan penjelidikan jang saksama, didalam tempo jang sesingkat-singkatnja dapat mengadjukan laporannja jang lengkap beserta pertimbangannja.

C. PENGHAPUSAN HAK - CONVERSIE

Achirnja dengan Undang-undang R. I. tanggal: 26/4-1948 No. 13 peraturan-peraturan jang mengenai conversie jang berlaku untuk daerah Jogjakarta dan Surakarta, sebagai jang termuat didalam V. G. H. R. (Vorstenlandsch-Grondhuurreglement) (Staatsblad tahun 1918 No. 20) ditjabut.

Dengan hapusnja hak-conversie itu hak-hak tanah dari rakjat tani berdasar Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1948, penuh mendjadi miliknja rakjat, didalam arti kata mengenai tanah pertanian (bouwvelden), sedang tanah-tanah jang dipergunakan untuk mendirikan pabrik-pabrik, bangunan-bangunan dan lain sebagainja, tetap mendjadi milik Pemerintah.

Pendudukan tentara Belanda.

Tanggal 19 Desember 1948 saat jang tidak akan dilupakan oleh penduduk, Jogjakarta dengan sekonjong-konjong diduduki oleh tentara Belanda.

Pada umumnja Pabrik-pabrik jang masih lengkap sebagai mana diutarakan diatas, dipergunakan sebagai markas oleh tentara Belanda, sepertinja : Padokan, Kedaton-Plered, Tandjungtirto, Tjebongan, Beran dan lain sebagainja. Mereka menduduki pabrik-pabrik ini tentunja ada maksud jang tertentu.

Pertempuran jang sengit sekali antara tentara Belanda dan Gerilja dari tentara kita, mengakibatkan pula kerusakan-kerusakannja pabrik tersebut. hingga dapat dikatakan kesemuanja lebur, ta' ada sebuah pabrik jang ketinggalan dengan sempurna. Setelah pendudukan, baik besi-besi maupun onderdeel-onderdeel pabrik diangkuti oleh pemiliknja dengan idzin dari Pemerintah Daerah.

Dapatkah perusahaan pertanian Asing bekerdja kembali didaerah Jogjakarta? Pertanjaan ini tjukup diberi djawaban sebagaimana jang dimaksud didalam Ontwerp financieele en economische-overeenkomst dari adanja persetudjuan K. M. B. - Afd. A. mengenai **„Rechten, Concessies, Vergunningen en Bedrijfsuitoefening".**

Ondernemers asing ingin mengusahakan kembali.

Sampai kini dapat dikemukakan, bahwa dari beberapa perusahaan pertanian Asing (ondernemers) jang telah minta idzin akan bekerdja kembali didaerah ini, jalah baru Sorogedug, Wanudjojo dan Pundong (tembakau) dan Gondang-Lipuro (gula).

Fihak pengusaha dari ketiga perusahaan pertanian Asing tersebut, menjatakan tidak dapat menerima sjarat-sjarat jang dikemukakan oleh Pemerintah Daerah.

Gondang-Lipuro jang telah suka menerima sjarat-sjarat itu, sudah diberi idzin untuk bekerdja kembali tersebut, idzin tgl. 16/1-1951 No. 41/th. 1951. Walaupun idzin ini sudah 1½ tahun lamanja, ternjata fihak pengusaha menghadapi kesulitan tentang dapatnja tanah untuk keperluan perusahaan-perusahaannja. Didalam sjarat-sjarat dikemukakan bahwa perusahaan pertanian dapatnja tanah melalui sewan-manasuka, tetapi karena dengan systeem ini terbukti didaerah luar daerah Jogjakarta menghadapi beberapa kesulitan lalu dikemukakan setjara „Cooperatief". Tjara jang dikemukakan oleh fihak pengusaha ini terus terang ditolak oleh rakjat, sehingga sampai sekarang belum ada sebuahpun dari perusahaan pertanian Asing jang bekerdja kembali didaerah Jogjakarta.

D. USAHA RAKJAT

Adakah dari bangsa Indonesia mempunjai hasrat untuk menanam tebu ataupun tembakau sendiri didaerah ini ? Terachir ini hasrat itu nampak besar sekali. Misalnja didaerah Kalasan, Godean, Sedaju, Sewon dan lain sebagainja sedjak tahun 1951 rakjat telah mulai menundjukkan keinginan untuk menanam tebu sendiri, walaupun tidak setjara besar-besaran. Dari hasil tanaman tebu, ada jang lalu dibuat gula mangkok, ada pula jang lalu didjual kepabrik Gondangwinangun (Klaten). Mudah-mudahan ditahun-tahun jang akan datang usaha jang sedemikian itu tambah memuaskan hasilnja. (Umum telah mengetahui kiranja, bahwa dizaman kolonial dulu, penanaman tebu oleh rakjat mendjadi larangan ; memang maksudnja agar dapat di-monopolie oleh para pengusaha pertanian Asing).

Disamping itu ada pula dari fihak bangsa kita jang menaruh minat akan mendirikan pabrik gula, dimana telah ada sebuah Panitya jang telah merentjanakan soal itu. Semoga Panitya ini didalam tempo jang sesingkatnja dapat melaksanakan apa jang ditjita-tjitakan.

Demikianpun didaerah Sorogedug-Wanudjojo, atas usaha rakjat sendiri telah berdiri pula suatu koperasi jang menjelenggarakan perusahaan tembakau, dengan nama „Urat" (Usaha Rakjat Tani), dan bermodal dari baton (aan-

deel) para anggauta a Rp. 100,— tiap-tiap aandeel dan dapat mengumpulkan modal Rp. 13.000,—. Disampingnja telah menerima bantuan uang Rp. 40.000,— dari Pemerintah. Didalam tahun 1951 hanja dapat menanam tembakau dalam lingkungan Kalurahan Sumberhardjo, dan dalam tahun 1952 dapat meluas sampai kalurahan Sumberhardjo, Maduredjo dan Bokohardjo. (Kapanewon Prambanan) seluas ± 300 ha. Bila „Urat" ini mendapat bantuan, sokongan dan bimbingan jang sebaiknja, teranglah dapat madju dengan pesatnja, jang tentu membawa manfaat bagi Rakjat dan Negara.

Kalau diingat dizaman kolonial dulu, Daerah Istimewa Jogjakarta terkenal sebagai daerah paberik gula dan tembakau jang dapat diusahakan oleh modal asing, dan dapat mengenjam keuntungannja jang sebesar-besarnja, kita pertjaja di tahun-tahun jang akan datang, bangsa kita sendiri, tentu dapat menghidupkan kembali, dengan usaha dan modal kita sendiri pula.

* * *

8. USAHA MEMPERBESAR PRODUKSI

A. KRISIS BAHAN - BAHAN KEPERLUAN HIDUP

KEKURANGAN hatsil produksi bagi rakjat di Jogjakarta chususnja dan rakjat Indonesia pada umumnja sudah lama dirasakan. Tinggal soalnja bagaimana kita dapat mengatasi kekurangan-kekurangan itu dengan berusaha memperbesar produksi lebih dari jang sudah-sudah.

Produksi di Jogjakarta ini dapat kita bagi mendjadi 3 matjam, ialah: produksi bahan makan, bahan pakaian dan barang-barang keperluan hidup sehari-hari, atau barang-barang keperluan rumah tangga.

Mengenai produksi bahan makan telah diuraikan setjara luas dalam bagian pertanian, perikanan dan sebagainja.

Tetapi gambaran bagaimana memperbesar produksi bahan pakaian dan barang-barang keperluan hidup sehari-hari dalam bab ini tidak dapat diuraikan setjara concreet melainkan hanja sekedar merupakan ichtisar belaka, sebab bahan-bahan jang diperlukan untuk ini sangat sedikit.

Kekurangan akan bahan pakaian itu, seperti halnja dengan kekurangan barang-barang kebutuhan lainnja telah kita alami sedjak Djepang menduduki Indonesia.

Pada waktu Djepang pertama-tama menduduki Indonesia, keadaan perdagangan masih berdjalan seperti biasa, persediaan barang-barang baik dipasar-pasar maupun ditoko-toko masih ada, harga-harga masih stabiel. Taktik menimbun barang oleh para pedagang boleh dikata belum meradja-lela.

Akan tetapi beberapa bulan setelah itu Djepang mulai mendjalankan siasat ekonominja perang, jaitu dengan setjara teratur dan litjin mulai memborong bahan-bahan penting dari toko-toko maupun jang ada dipasar-pasar termasuk bahan-bahan tekstil. Dengan demikian maka lama-lama barang2 tersebut baik dipasar maupun ditoko-toko lenjap dari peredaran, tenggelam kedalam pasar gelap. Rakjat mulai menderita kesukaran untuk mendapatkan barang-barang jang dibutuhkan.

Setahun setelah pendudukan Djepang kesukaran ekonomi mulai meningkat orang tidak dapat lagi membeli bahan pakaian dengan kekuatan jang sepadan. Pemerintah Djepang sendiri mulai mengatur pembagian bahan makan maupun bahan pakaian melalui Organisasi Tonari Gumi (Rukun Tetangga).

Antara dua tahun sesudah itu keadaan umum sudah sampai pada puntjaknja. Bahan makan sudah sulit sekali, sehingga binatang bekitjot jang tidak lajak mendjadi makanan manusia oleh Pemerintah Djepang diandjurkan supaja rakjat suka membiasakan makan. Dalam suatu pameran masakan dipasar malam, pernah ditundjukkan suatu demonstrasi masakan rempejek lalat, rempah tok-ijik, ingkung tikus dimasak seindah-indahnja.

Barang-barang distribusi bahan pakaian sudah tidak mungkin lagi. Karung goni oleh Djepang mulai dibagi-bagikan kepada rakjat supaja dapat dipakai sebagai tjelana, bagor sebagai kain bagi orang-orang perempuan. Disamping

itu Djepang sendiri menumpuk-numpuk segala matjam kebutuhan hidup, dari bahan makan, bahan pakaian sampai barang-barang lux sekalipun tidak kekurangan.

Banjak orang kurus kering menderita penjakit honger-oedeem. Orang mati terlentang dipinggir djalan tiada terang ahli warisnja telah biasa. Usaha memperbesar produksi andjuran Djepang tidak menguntungkan rakjat, tetapi semata-mata mendjadi kepentingan perang sadja misalnja andjuran menanam djarak, dan tanaman-tanaman lainnja, seperti menanam kapas, memelihara ulat sutera dan lain-lain.

Setelah Proklamasi kemerdekaan dan pertempuran - pertempuran melawan Nica, Inggeris dan Ghurka sudah berhenti, maka rakjat mulai membangun ekonomi dengan bahan-bahan dari dalam negeri sendiri jang ada. Menunggu-nunggu bahan dari luar negeri pada waktu itu hanja mendjadi impian sadja, dan achirnja rakjat mengantih dan menenun sendiri dengan kapas tanaman sendiri. Pemeliharaan ulat sutera sebagai peninggalan Djepang dan penanaman kapas dihidupkan kembali, dan meskipun ketjil usaha-usaha tersebut dapat berdjalan dan sekedar dapat digunakan untuk memperpandjang waktu dalam menunggu selesainja pertikaian dengan Belanda.

Tiba-tiba datanglah clash Belanda ke-II, sehingga dengan keadaan jang serba sempit dan terbatas industri ketjil ini hidup didesa-desa.

Kemudian setelah Belanda meninggalkan Jogjakarta, maka untuk segera dapat mengatasi kekurangan bahan pakaian jang telah diderita bertahun-tahun oleh masjarakat itu, oleh Pemerintah Daerah diusahakan supaja penanaman kapas dan pemeliharaan ulat sutra peninggalan djaman Djepang itu dihidupkan kembali. Andjuran pemerintah ini disambut baik sekali oleh rakjat dimana-mana tempat, sehingga pemeliharaan ulat sutera madju dengan pesat, dan isi kepompongnja dibeli oleh pemerintah dan akan didjadikan benang jang kemudian akan didjadikan bahan tenun. Lain daripada itu rakjat djuga diandjurkan supaja dapat membuat benang sendiri.

Akan tetapi tidak antara lama pemerintah pusat sendiri mendatangkan barang-barang tekstil dari luar negeri. Hal ini dapat dimengerti sebab orang umumnja tidak dapat sabar lebih lama lagi untuk menunggu pembuatan bahan pakaian dari daerah sendiri. Kemudian bandjirlah barang-barang tekstil luar negeri itu dan masuk djuga di Daerah Istimewa Jogjakarta. Dengan demikian maka industri tekstil bangsa sendiri jang sedang akan tumbuh baik ini dengan bandjirnja barang-barang tekstil luar negeri tidak dapat bertahan untuk bersaing, sehingga makin lama makin mundur kalau tidak boleh dikatakan mati sama sekali.

Walaupun demikian, usaha bangsa kita sendiri untuk membikin bahan pakaian tetap dipertahankan, dan sudah barang tentu jang dikerdjakan ialah barang-barang jang tidak didatangkan dari luar negeri, misalnja tenun lurik alus, rimong, setagen, amben, sarung dan lain-lain.

Dari kalangan mereka berpendapat bahwa tenun dalam negeri akan dapat hidup subur apabila mendapat proteksi dari pemerintah, misalnja semua pesanan bahan-bahan pakaian jang mentjapai djumlah besar antara lain uniform tentara, polisi dan sebagainja diserahkan kepada pengusaha tenun nasional dan kalau perlu jang diimport hanja barang-barang lain jang selama ini kita sendiri belum dapat membikin. Selandjutnja pemerintah supaja mengusahakan adanja penanaman kapas supaja kebutuhan akan benang lawe tidak selalu menggantungkan dari luar negeri. Sebab kenjataan seperti sekarang ini harga benang lawe luar negeri harganja sangat tinggi, sehingga apabila dibikin bahan pakaian harganja djuga tidak dapat menjaingi dengan barang-barang tekstil jang ada ditoko-toko keluaran luar negeri.

Didalam Daerah Istimewa Jogjakarta ini perusahaan tenun jang tertjatat ada 66 buah, tetapi jang masih berdjalan hanja tinggal 19 buah, adapun lain-

lainnja berhubung dengan beberapa hal misalnja kekurangan modal, tidak mendapat pasar dan sebegainja terpaksa berhenti semua.

Situasi ekonomi di Jogjakarta ini dengan usahanja memperbesar produksi sehingga menudju ke indutrialisasi dalam tahun 1945 sampai 1949 baru dalam tjita-tjita sadja. Akan tetapi sesudah itu, kemadjuan-kemadjuan perusahaan dari tahun ketahun dapat meningkat terus, dan dalam hal ini dapat dilihat dengan adanja angka-angka seperti disebelah ini. Dan angka-angka sebelum tahun 1951 tidak dapat dikemukakan, oleh karena selama pendudukan hampir semua documentasi dari kantor apapun lenjap dirampas Belanda.

B. USAHA - USAHA PENERANGAN EKONOMI

Tidak boleh dilupakan bahwa usaha-usaha memperbesar produksi dikalangan rakjat di Jogjakarta ini, terutama djuga dihidupkan oleh kegiatan-kegiatan penerangan mengenai ekonomi.

Sudah barang tentu penerangan-penerangan mengenai itu diusahakan oleh Djawatan jang bersangkutaan, jaitu semula oleh Djawatan Kemakmuran, dan sekarang Djawatan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri, Perindustrian dan Koperasi. Selain penerangan-penerangan setjara lesan, djuga disini diterbitkan suatu madjallah resmi bulanan jang bernama madjallah „Ekonomi". Penerbitan ini sebelum clash diurus oleh Djawatan Kemakmuran, akan tetapi sesudah ada perubahan susunan pemerintahan daerah, kemudian madjallah tersebut termasuk dalam urusan Sekretariat Pemerintah Daerah.

Madjallah tsb. pertama kali terbit pada tahun 1946 dengan oplaag 750 exemplaar, sebagai pertjobaan dan hanja terbit satu kali sadja dalam tahun itu. Pada tahun 1947, belum terbit lagi.

Kemudian pada tahun 1948 M.E. terbit lagi dengan beberapa kemadjuan dan oplaagnja 1000 expl. sedang isinja tuntunan-tuntunan perekonomian dengan bahasa Daerah (Djawa kromo) dengan huruf latin.

Penerbitan ini meskipun disebarkan dengan membajar, tetapi pada prinsipnja tidak bersifat commercieel, melainkan bertudjuan usaha-usaha penerangan belaka dan pembiajaannja dapat tertutup dengan uang langganan itu. Adapun jang mendjadi object ialah pemimpin-pemimpin rakjat, Lurah-lurah desa, Ketua-Ketua Rukun-kampung, Instansi-instansi dan orang-orang jang mempunjai minat.

Kalau dalam tahun 1949 (clash ke II) M.E. ini seperti usaha-usaha lainnja berhenti, maka sesudah pengakuan kedaulatan 1950 terbit kembali dengan bentuk jang lebih pantas dan oplaagnja tambah mendjadi 1200 expl.

Untuk menjesuaikan dengan perkembangan situasi tanah air maka M.E. diisi soal-soal jang berhubungan dengan pembangunan ekonomi, a.l. pendidikan ekonomi, bimbingan-bimbingan, dorongan-dorongan dan pertjobaan-pertjobaan, dalam hal pemeliharaan ulat sutera, penanaman kapas, djarak, tenun rumah tangga jang banjaknja kurang lebih ada 55.000. Sudah tentu supaja isinja dapat dipertanggung djawabkan, maka jang mengisi artikel-artikelnja adalah Kepala-kepala Bagian jang menguasai technik, sehingga teori dan praktijk dalam segala matjam hal tidak akan mengalami pertentangan dan bisa tepat dengan penggunaannja.

Oplaag M.E. lama-lama meningkat terus sehingga mentjapai djumlah 2500 expl. Mulai tahun 1951 disamping M.E. diterbitkan djuga almanak ekonomi dengan oplaag 1000 expl., pada tahun 1952 1500 expl. dan untuk tahun 1953 2000 expl.

Demikianlah penerangan-penerangan untuk memperbesar produksi diberikan setjara teori. Adapun praktijknja apabila rakjat membutuhkan tuntunan jang djelas, maka dari pihak djawatan mengirimkan seorang ahli ketempat jang membutuhkan, dan ditempat mana orang itu tinggal beberapa waktu untuk

ANGKA - ANGKA PERINDUSTRIAN/KERADJINAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA TAHUN 1950 — 1951 — 1952.
PERUSAHAAN PABRIK ES. (2 BUAH).

Keterangan :	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952.	Djumlah :
I. Produksi dan lain2:				
a. Pembikinan	1.697.925,—	2.838.082,—	3.607.668,—	8.143.675,—
b. Dikeluarkan	1.606.605,—	2.716.919,—	3.414.740,—	7.738.264,—
c. Hantjur	114.766,50	208.374,75	190.353,25	513.494,50
II. Pendjualan/pengeluaran Es dalam kg.				
a. Pendjualan bebas	1.491.093,37	2.496.055,75	3.284.232,50	7.271.389,62
b. Civiel/Militer	55.377,12	81.645,50	91.885,50	228.908,12
c. Dengan tjuma-tjuma	40.438,75	79.395,—	74.265,50	194.099,25
d. Afgekeurd	31.937,—	68.656.50	43.407,50	144.001,—
e. Djual keluar kota.	102.385,—	468.936,50	606.050,25	1.177.371,75
III. Harga pendjualan Es Rp.	376.742,97	525.923,94	527.115,07	1.429.781,98
IV. Pemakaian bahan2 dan lain2				
a. Air m3.	1.760.597,—	2.838.082,—	3.607.668,—	8.206.347,—
b. SO2 kg.	750,—	917,—	790,—	2.457,—
c. Garam kg.	14.218,—	14.038,50	12.068,—	30.324,50
d. Minjak semir ltr.	647,—	984,50	1.355,—	2.986.50
e. Tenaga listrik luar spertijd Kwh	88.848,—	429.994,—	461.139,—	979.981,—
f. Tenaga listrik dalam spertijd Kwh	24.175,—	8.833,8	1.441,6	34.450,4
g. Pembikinan per Kwh.	175,12	206.29	183,59	565,—

PERUSAHAAN PABERIK PENGGILINGAN PADI (6 BUAH)

Keterangan :	Tahun 1950 :	Tahun 1951 :	Tahun 1952 :	Djumlah :
I. Bahan2 pembelian Gabah	Belum dibuka			
a.	—	—	—	—
b.	—	729,18	1.210,81	1.939,99
c.	—	729,18	1.210.81	1.939.99
d.	—	729,18	1.210.81	1.939.99
e.	—	—	—	—
II. Dikerdjakan dalam hitungan kwintal. Beras tumbuk				
a.	—	1.391,80	4.928.16	6.319.96
b.	—	42.447,68	89.236.19	131.683.87
c.	—	43.839.48	94.164.35	138.003.83
d.	—	41.793,96	194.863.10	136.657.66
e.	—	1.094,14	1.185,84	2.279,98
III. Bahan2 jang dihasilkan dalam kwintal. Petjah kulit.				
a.	—	—	—	—
b.	—	1.857,—	—	1.857.—
c.	—	—	—	—
IV. Bahan2 jang dihasilkan dalam kwintal. Beras sosoh.				
a.	—	7.677,57	4.781.84	12.459,41
b.	—	46.510,05½	88.461.29	134.971.34½
c.	—	7.798,70	5.358,04	13.156,74
V. Penggilingan djalan.				
Hari.	—	1.346,—	1.568,—	2.914,—
Djam	—	7.661,—	9.628,—	17.289,—

N.B. **Keterangan penggilingan padi :**

Untuk : Gabah, beras tumbuk :

a. Persediaan pada awal bulan.
b. Pembelian/pendapatan dalam bulan repotan.
c. Djumlah a + b.
d. Dikerdjakan dalam achir bulan repotan.
e. Persediaan pada achir bulan repotan.

Untuk : Petjah kulit, Beras sosoh :

a. Persediaan awal bulan.
b. Hasil pembikinan dalam bulan repotan.
c. Persediaan pada achir bulan.

PERUSAHAAN SEPATU/SANDAL (9 BUAH)

Tahun :	Produksi pasang		Harga pasang.	
	Sepatu	Sandal	Sepatu	Sandal
1950	3.995	3.175	22.50/75,—	15,—/40,—
1951	9.314	6.050	40,—/80,—	15,—/45,—
1952	13.366	7.295	35,—/85,—	15,—/50,—
Djumlah :	26.275.—	16.520	22,50/85,—	15,—/50,—

PABERIK WADJAN (2 BUAH)

Tahun :	Djumlah Buah.			Djumlah Berat kilo			
	Perbedi	Ganstow	Djumlah	Perbedi	Ganstow	Djumlah	Buruh :
1950	Belum dibuka kembali.						
1951	118.331	14.359	132.690	265.791	23.119.90	288.910.90	368
1952	200.701	23.328	222.029	484.723	43.959,—	528.682,—	368
Djumlah :	319.032	37.687	354.719	750.514	67.078,90	817.592,90	368

PERUSAHAAN PENJAMAK KULIT (5 buah).

Keterangan :	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Djumlah
I. Matjam jang diproduceer.				
a. Zool kg.	6.050	40.202	48.240	94.492
b. Voering Voet.	23.400	35.240	58.500	117.140
c. J. Box voet.	—	48.000	58.000	106.000
d. Kulit kering basah.	6.750	2.260	—	9.010
e. Glaco kg.	4.725	538	—	5.263
II. Harga rata - rata.				
a. Zool kg.	14,—	12,—/19	15,—/21	12,—/21
b. Voering voet.	2,—	1,50/ 2,25	1,50/ 3,25	1,50/ 2,25
c. J. Box zol.	—	45,—/47	40,—/60	40,—/60
d. Kulit kering.	17,—	15,—/23	—	15,—/23
e. Glaco.	2,75	2,75	—	2,75

PERUSAHAAN SABUN (3 buah).

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Djumlah
I. Pemakaian bahan kg.				
a. Caustic Soda.	94.300	70.500	96.369	261.169
b. Waterglas.	4.500	11.650	13.591	29.741
II. Produksi kg.	1.003.000	280.342	355.529	1.638.871
III. Harga pendjualan sebatang berat 320 gr.	0,65/ 0,85	—	—	
IV. Harga minjak kelapa blek.	38.—/60	—	—	
V. Buruh.				
a. Lelaki.	50	40	46	
b. Perempuan.	10	6	9	

PERUSAHAAN TEH (3 buah)

Keterangan.	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Djumlah
I. Hasil dalam				
a. Bungkus 1¼ ons.	10.484.568	10.618.044	10.698.456	31.801.058
II. Pemakaian bahan mentah.				
a. Daun teh.	588 ton	608 ton	624 ton	1.820 ton
b. Kemb. Melati.	5 ton	7 ton	8 ton	20 ton
c. Kertas.	5 riem	6 riem	7 riem	18 riem
III Buruh.				
a. Lelaki.	30	30	32	
b. Perempuan.	120	130	135	
IV. Djumlah pendjualan	2.096.913,60	2.123.608.80	2.139.691.20	6.360.215.60

PABERIK MINJAK KELAPA (1 buah).

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Djumlah
I. Produksi dari Fabricage.				
a. Minjak kg.	908.000	1.543.000	3.831.660	6.282.660
b. Bungkil kg.	50.243	82.630	216.675,2	349.548,2
c. Ampas kg.	25.100	40.250	116.364	181.714
II. Bahan copra jang dipergunakan.	1.580.000	2.832.040	6.515.020	10.927.060
III. Buruh.				
a. Lelaki	100	115	137	
b. Perempuan	1	1	1	

PERUSAHAAN BATIK

Keterangan :	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Djumlah
I. Banjaknja perusahaan.				
a. Ketjil.	541	552	314	469
b. Samben.	130	150	161	147
c. Besar	65	70	73	69
II. Penghasilan dalam kodi.				
a. Batik halus.	8.679.50	8.679,50	4.425	21.784,—
b. Batik kasar.	25.757	23.428	14.700	63.885
c. Lain-lain (taplak).	110,50	110,—	110	330,50
III. Bahan2 jang dipergunakan dalam hitungan kg.				
a. Naptol A.S.	120	100	100	320
b. Garam Bordeans.	300	150	100	550
c. Garam merah B	300	500	300	1.100
d. Obat idjo ganda.	100	150	100	350
e. Hars	206.248,50	219.148,25	280.149,36	615.546,11
f. Indigosolem.	7.610	6.500	6.450	20.560
g. Kopal Soga.	600	550	600	1.750
h. Nilo 50%.	3.000	3.250	3.500	9.750
IV. Pemakaian Greijs (M).	10.813	10.813	—	21.626
V. Pemakaian cambrics (meter)	1.708.389,56	1.823.107,82	1.643.244,50	5.174.741,88
VI. Buruh.				
a. Biasa.	6.645	5.664	5.500	5.903
b. Ngetjap.	1.095	905	800	930

PERUSAHAAN PERTENUNAN

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Djumlah
I. Perusahaan jang djalan.	42	14/41	12/20	12/42
II. Pemakaian alat.				
a. Mesin	—	52/65	5/17	5/65
b. Tangan	127/373	676/934	70/190	70/934
III. Banjaknja alat.				
a. Mesin.	—	98/308	69	69/308
b. Tangan.	—	—	750/819	750/819
IV. Buruh.	280/770	248/739	196/263	195/770
V. Produksi pertenunan dalam				
a. Potong.	—	41.179,50	45.188,05	86.367,55
b. Meter.	426.605	284.055.15	231.243,31	941.903,46
c. Kilo.	—	27.213.472	19.056.088	46.269.560
VI. Harga hasil Rp.	2.657.814.—	1.862.359,89	1.154.054,69	5.674.228,58
VII. Bahan-bahan.				
a. Benang kg.	43.303.000	3.517.500	18.916.988	65.736.488
b. Tjet d.l.l. kg.	1.668.945	1.080.880	3.624.768	6.374.593
VIII. Harga Benang.				
a. No. 20/s Gry	60,—/180,—	106,—/143,50	79,—/157,50	60,—/180,—
b. No. 30/s/Gry	60,—/160,—	118,50/147,50	98,—/157,50	60,—/160,—
c. No. 42/2 Gry	102,—/225,—	175,—/280,—	102,50/182,50	102,—/280,—

KERADJINAN SETAGEN

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Djumlah
I. Hasil Kodi	13.340	8.750	2.445	24.535
II. Djumlah harga	1.305.800	815.100	187.200	2.308.100
III. Pemakaian benang Rp.	797.570,—	602.044,93	146.961,—	1.546.575,93
IV. Pemakaian bahan tjet d.l.l.	—	42.525,—	7.600,—	50.125,—
V. Harga rata2 kodi	80.—/137	—	65,—/85	65,—/137
VI. Penenunan.		1.467	727	1.194

KERADJINAN BAGOR

Keterangan	Tahun 1952	Djumlah	Tahun 1952	Djumlah
I. Hasil kodi	20.930,—	33.820	33.635,—	88.385,—
II. Harga pendjualan	454.420,—	850.205,—	797,390,—	2.102.015,—
III. Pembelian putjuk	—	264.010.—	317.805.—	581,815,—
IV. Harga pendjualan per kodi.				
a. Kwal. I.	23,—/25,50	28,—/35,—	29,—/30,—	23,—/35,—
b. Kwal. II.	22,—/25,—	24,—/30,—	25,50/27,—	22,—/30,—
c. Kwal. III.	20.—/23,—	20,—/27,—	22,—/24,—	20,—/27,—
d. Kwal. IV.	15,—/23,—	15,—/24,—	17,—/20,—	15,—/24,—

PABERIK BISCUIT (2 buah)

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Djumlah
I. Hasil biscuit kg.	599.731,2	614.410,8	654.570,4	1.868.712,4
II. Bahan2 jang dipergunakan dalam hitungan kg.				
a. Tepung.	405.692	408.800	411.768	1.226.260
b. Tapioka.	130.271.88	130.374,73	132.341,40	392.988,01
c. Gula pasir.	130.044,24	128.082,56	130.803,24	388.930,04
d. Telur bidji	209.988	209.784	211.104	629.876
e. Mentega.	60.995,88	63.008,28	65.708,60	189.712,76
f. Sodakue.	8.103,12	8.125,20	8.197,20	24.425,52
g. Amoniak.	10.876,36	10.907,88	11.042,04	32,826,28
h. Vanilli.	5,8	6,—	6,—	17,8
i. Kaju bakar.	43.494,80	43.779,—	43.830,48	131.103,48
j. Essence.	60	60	60	180
III. Buruh.				
a. Lelaki	132	132	144	
b. Perempuan	211	211	233	

PABERIK TEGEL : (3 buah)

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Djumlah
I. Hasil Produksi				
a. Tegel (bidji).	559.810	600.910	612.054	1.880
b. Terasso.	588	609	663	1.772.774
c. Beton	2.108	2.374	2.673	7.155
II. Pemakaian bahan				
a. Cemen (zak)	3.000	3.080	4.095	10.175
b. Kleurstof kg.	646,60	860,30	875,50	2.382,40
III. Buruh.				
a. Lelaki	613	613	613	
b. Perempuan	263	263	·263	

PABERIK LIMUN : (2 buah)

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Djumlah
I. Produksi dalam hitungan botol.				
a. Limun a 400 cc	—	254.231	326.817	581.048
b. Limun a 200 cc	—	20.819	29.928	50.747
c. Air Soda 400 cc	—	25.420	27.651	53.071
d. Air Soda 200 cc	—	1.000	1.991	2.991
e. Stroop 500 cc	—	2.810	3.032	5.842
II. Pemakaian gula kg.	—	80.603	93.924	174.527
III. Buruh.				
a. Lelaki	—	31	31	
b. Perempuan	—	—	—	—

memberi tuntunan hingga peminat dapat berdjalan sendiri. Pada sebelum clash ke II dari pihak Djawatan Kemakmuran telah mengeluarkan instruksi supaja di Gunung Kidul didirikan suatu paberik keramik untuk menolong rakjat didaerah tsb. Selain itu djuga diberikan tuntunan praktijk untuk samben rumah-tangga jaitu keradjinan-keradjinan menganjam tikar, tukang kaju, membikin tepas, dll. dengan disediakan penuntun untuk mendidik hingga dapat. Tjara-tjara jang demikian ini baik sekali hatsilnja, terbukti dibeberapa tempat jang mula-mula orang belum dapat membikin barang-barang itu, sekarang telah dapat dan telah mendjadi salah satu tjabang penghidupan. Exposisi kemakmuran kerap kali diadakan sehingga dapat menambah kemadjuan rakjat dilapangan perekonomian.

Dari pihak pemerintah daerah sendiri telah menjediakan atau mengadakan monster kamer bertempat di Djalan Danuredjan, jang selama ini selalu mendapat kundjungan tamu-tamu baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pada waktu P.M. Sri Nehru berkundjung di Jogjakarta, di Kepatihan Danuredjan djuga diadakan exposisi ekonomi dan mendapat perhatian besar. Pada waktu itu rupa-rupanja beliau tertarik akan keindahan seni keradjinan perak, sehingga pemerintah sendiri perlu membeli barang-barang tersebut untuk dipersembahkan pada beliau.

Sesudah clash ke-II perkembangan perusahaan batik madju pesat sekali, pembagian mori (cambrics) diatur oleh Djawatan Kemakmuran. Pasar batik ramai sekali. Perusahaan tenun pun tidak ketinggalan, sehingga tiap-tiap Kalurahan jang mempunjai penduduk perusahaan tenun banjak jang menitipkan barang-barangnja dimonster kamer untuk ditjarikan pasar.

Demikianlah usaha-usaha penerangan jang dapat menambah hasil productie.

C. MENUDJU INDUSTRIALISASI

Untuk menambah penghatsilan daerah dan menaikkan ekonomi rakjat dalam daerah minus dengan penduduknja jang padat seperti di Jogjakarta ini, maka ada dua djalan jang dapat ditempuh jaitu dengan mengadakan transmigrasi umum dan industrialisasi.

Kota Jogjakarta bukanlah kota dagang seperti kota-kota besar lainnja, dan bukan pula kota industri seperti dilain-lain tempat. Industri dalam arti kata paberik-paberik jang besar jang dapat menghasilkan alat-alat industri ketjil atau paberik besar jang dapat menghasilkan barang-barang penting setjara massaal, dan memelihara buruh jang sampai beribu-ribu banjaknja.

Perusahaan-perusahaan di Jogjakarta jang ada sekarang ini tidak ada jang boleh disebut besar, dan rata-rata hanja merupakan industri ketjil.

Dihalaman berikutnja kita tjantumkan banjaknja perusahaan-perusahaan jang ada didaerah ini dengan capaciteitnja.

Meskipun kelihatannja di Jogjakarta ini banjak perusahaan-perusahaan berdiri, tetapi banjaknja perusahaan-perusahaan itu belum dapat menutup adanja pengangguran jang makin lama makin meningkat, sedang perusahaan perusahaan itu sendiri keadaannja tidak stabiel, sebentar naik sebentar turun dan kadang-kadang djatuh mengikuti gelombang situasi ekonomi umum jang dapat mempengaruhi keadaan ekonomi disini.

Pada hal maksud daripada industrialisasi itu ialah selain menambah hatsil produksi dalam negeri sendiri jang berarti mengurangi kekajaan Indonesia diangkut keluar negeri, djuga bermaksud untuk mentjegah adanja pengangguran, sehingga kedudukan perburuhan dapat stabiel dan menudju ke kemakmuran.

Antara tahun 1900 didaerah Jogjakarta ini banjak didirikan paberik gula setjara besar-besaran oleh bangsa asing (modal Belanda). Paberik-paberik gula

HASIL PRODUKSI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DIDAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

No.	Matjam perusahaan	Banjaknja	Produksi tiap bulan.	Berat kg.	Keterangan
1.	Tenun:	66			
	a. Sarong/slendang		14.000 m.	789 „	Barang-barang produksi ini rata-rata 50% dikirimkan keluar: antara lain ke - Solo, Magelang, Banjumas, Djakarta, Surabaja, Semarang, Sumatera, dan lain-lain tempat.
	b. Kain badju.		40.000 m.	2.000 „	
	c. Setagen/amben.		40.000 M.	2.000 „	
2.	Batik:				
	Kain/Sarong.	457	360.000 pt.	84.000 „	
	Perak:				
	a. Barang2 perak	80	12.600 kg.	10.000 „	
4.	Genteng:	300	1.200.000 bd.	60.000 „	
5.	Batu merah:	150	5.000.000 „	—	
6.	Bagor:	300	2.603 kd	20.000	
7.	Blek:				
	a. Tjeret, soblok ember dll.	70	30.000 bd.	3.600 „	
8.	Tegel:	3	50.000 „		
9.	Timbangan:	22	1.500 st.	7.800 „	
10.	Tinta tjap:	1	60 kg.	60 „	
11.	Minjak:	1			
	a. Babut kesed, dll.	2	350.000 „	—	
	b. bungkil		180.000 „	—	
12.	Sabut kelapa:				
	a. Babut kesed, dll.	2	800 m^2	3.200 „	
13.	Wadjan:		18.500 bd.	30.000 „	
14.	Besi tua:	12	50.000 kg.	50.000 „	
15.	Biscuit:	2	50.000 „	40.000 „	
16.	Sabun:	6	30.000 „	10.000 „	

No.	Matjam perusahaan	Banjaknja	Produksi tiap bulan	Berat kg.	Keterangan
17.	Teh:	11	3.000.000 bk	9.000 ,,	
18.	Emping:	—	—	—	Belum didaftar
19.	Meubel:	70	700 m3	320.000 ,,	
20.	Kapur tulis:	1	40.000 ds.	—	
21.	Kulit:	7	8.000 kg.	4.000 ,,	
22.	Tanduk/penju:	—	—	—	,,
23.	Tikar mendong:	700	4.200 m2	1.400 ,,	
24.	Aluminium:				
	Alat-alat rumah tangga	1	300 kg.	250 ,,	
25.	Kuningan:				
	Alat2 rumah tangga	6	750 ,,	600 ,,	
26.	Pande besi:				
	Alat2 pertanian	500	450.000 ,,	180.000 ,,	
27.	Gula Djawa:	—	150.000 ,,	100.000 ,,	

tersebut berdjalan dengan lantjar dan mempunjai penghasilan jang besar, buruhnja beribu-ribu dan hasil produksinja sebagian terbesar mendjadi bahan export.

Dengan adanja paberik-paberik gula, penghidupan orang-orang didaerah ini terutama mereka jang bekerdja pada paberik-paberik itu mempunjai penghidupan jang agak lumajan daripada setelah paberik-paberik itu tidak ada lagi, disamping kita mengetahui djuga bahwa kekajaan alam Indonesia jang berlimpah-limpah itu mestinja kita keduk sendiri tidak dikeduk oleh modal asing, dan hal jang demikian ini adalah akibat pendjadjahan Belanda jang telah beratus-ratus tahun sehingga kita djatuh didalam kebodohan serta tidak mempunjai kebebasan untuk menentukan nasibnja sendiri. Dengan kemadjuan-kemadjuan dari perusahaan-perusahaan gula itu, sudah tentu jang menarik keuntungan besar sekali adalah kaum modal, akan tetapi situasi perburuhan pada waktu itu tidak atau belum mengalami kesulitan seperti tahun-tahun jang belakangan ini.

Keadaan jang agak baik bagi situasi perburuhan itu hanja terbatas pada waktu dimana paberik gula di Jogjakarta masih berdjumlah 17 buah tempat, jaitu sampai antara tahun 1929. Sesudah tahun itu berturut-turut dunia mengalami krisis atau malaise, maka perburuhanpun terseret dalam keadaan buruk ini, sehingga timbul banjak pengangguran jaitu antara tahun 1933, dan selandjutnja sampai pada tahun 1939 paberik gula jang tudjuh belas djumlahnja itu tinggal 10 buah sadja jang masih berputar. Adapun jang lain-lain terpaksa ditutup berhubung export dunia tentang gula sudah kurang madju lagi, sebab dibeberapa negeri telah dapat membikin gula sendiri dengan bahan-bahan jang didapat dinegeri itu sendiri.

Djaman Djepang produksi gula tidak untuk export tetapi untuk bekal perang, dan disini paberik tinggal 7 buah jang buka. Selandjutnja pada tahun 1945 setelah kita mulai berhak mengatur ekonomi kita sendiri, paberik gula jang putar tinggal 4 buah, jang lain pun tutup, sebab hasil produksi tidak dapat keluar dan hanja mendjadi timbunan.

Akan tetapi riwajat paberik gula jang mula-mula ditanam oleh kaum modal Belanda itu sekarang mengalami kehantjurannja setelah Belanda pada clash ke-II menduduki Jogjakarta. Adapun paberik-paberik itu kita bumi-hanguskan sendiri demi kepentingan siasat perang.

Setelah keadaan normaal kembali, dengan mengingat keadaan perekonomian umum maka timbullah pikiran-pikiran untuk mengrehabiliteer pabrik-paberik gula jang telah hantjur itu. Dalam bulan Oktober 1951 timbullah suatu inisiatief jang bermaksud untuk mendirikan paberik gula itu kembali jang dipelopori oleh suatu panitya jang disebut Panitya Pendiri Paberik Gula disingkat P. P. P. G. Langkah pertama - tama jang akan diambil jalah mengadakan hubungan dengan rakjat, kedua dengan para technisi, dan seterusnja mentjari modal.

Dalam pada itu mengenai pendirian paberik gula tsb. D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta dalam prinsipnja telah menjetudjui, dan disarankan tentang pembagian aandeelnja ialah supaja 51% diambil oleh Pemerintah Daerah, sedang jang 49% oleh rakjat (organisasi, atau badan dll.).

Panitya tersebut bermaksud akan mendirikan N.V. (badan hukum) dan akan mengumpulkan saham sebagai stoot-kapitaal sebanjak 10 djuta.

Inisiatief P.P.P.G. itu sesungguhnja telah dikuatkan oleh Dewan Ekonomi, dan pernah diadakan perundingan dengan Sri Sultan dengan mengadjukan delegasi. Setelah Panitya itu mengadjukan rentjana kepada Pemerintah Daerah, rentjana mana kemudian diadjukan kepada D.P.R. Daerah dan mendapat persetudjuan, maka sekarang panitya itu kedudukannja hanja mendjadi sumber

pikiran, dan seterusnja Pendirian Paberik Gula itu mendjadi urgensi program dari Pemerintah Daerah.

Dengan mengingat segala factor-factor ekonomi dan sosial maka setelah diselidiki sedalam-dalamnja Panitya mempunjai dasar jang kuat untuk kemungkinan pendirian paberik gula. Sedang Pemerintah Daerah dengan tegas telah menentukan akan mengambil aandeel 51%, dan jang 49% diserahkan rakjat.

Meskipun usaha-usaha tersebut boleh dikata bermaksud memulihkan, akan tetapi pada hakekatnja ialah membangun paberik baru dan menudju keindustrialisasi.

Selain usaha pendirian paberik gula seperti tersebut diatas, ada usaha-usaha lain jang djuga bermaksud untuk mengembangkan adanja industri-industri ketjil maupun besar, jaitu dengan adanja pengembalian bekas anggauta pedjuang kedalam masjarakat.

Pada waktu pemerintah R.I. di Jogja dulu ada salah satu Kementerian jang disebut Kementerian Pembangunan Masjarakat dan tugasnjapun sesuai dengan namanja. Kemudian setelah mendjadi Negara Kesatuan ini, Kementerian tsb. ditiadakan dan mendjelma mendjadi Djawatan Pendidikan Kerdja dibawah Kementerian Sosial, dan belum lama itu Djawatan tersebut berubah lagi mendjadi Biro Rekonstruksi Nasional dan urusannja langsung dibawah Kabinet Perdana Menteri.

Diantara beberapa tugasnja jang banjak itu B.R.N. bergerak djuga dalam usaha menjalurkan tenaga-tenaga pedjuang bersendjata jang timbul sebagai akibat Revolusi Nasional kembali kedalam masjarakat setjara teratur dan pemerintah berhasrat mengistimewakan mereka jang telah berdjasa dengan membuka djalan baginja agar dapat memperoleh pentjaharian hidup jang lajak. Adapun penjelesaiannja ditudjukan kepembangunan umum, antara lain menudju object-object perusahaan perindustrian dan perdagangan.

Dalam tugas ini B.R.N. Tjabang Daerah Istimewa Jogjakarta telah membuka beberapa perusahaan Rekonstruksi (Staatsproefbedrijven) jang sudah berdjalan dengan baik. Matjam-matjamnja perusahaan di tulis dalam lain bagian.

Dalam pada itu anggauta-anggauta bekas pedjuang bersendjata tadi jang telah dapat dipekerdjakan dalam perusahaan-perusahaan tersebut sudah lebih dari 100 orang, jang sebelumnja telah mendapat didikan vak dari B.R.N.

Akan tetapi oleh karena sangat banjaknja djumlah anggauta Bekas Pedjuang Bersendjata, maka badan jang dibentuk oleh pemerintah jaitu B.R.N. mengingat soal-soal technis dan financieel, terpaksa belum dapat mengurus semuanja. Menurut keterangan djumlahnja Bekas Pedjuang Bersendjata seluruh Indonesia ada k.l. 400.000 orang baik bekas anggauta angkatan perang resmi maupun dari badan-badan perdjuangan.

Sedang jang diurus oleh B.R.N. hingga tahun 1952 baru mentjapai k.l. 12.000 orang.

Berhubung dengan sangat mendesaknja keadaan dan didorong oleh kehendak untuk mempertahankan hidup, maka para bekas pedjuang bersendjata ini tidak suka menterlantarkan dirinja, dan kemudian mereka masing-masing berusaha menjusun persekutuan untuk membela nasibnja.

Badan persekutuan ini dalam permulaannja antara tahun 1950, timbul seperti djamur dimusim hudjan, dimana-mana tempat dan daerah berdiri serta mempunjai tjorak dan sifatnja sendiri, ada jang bersifat comercieel dan ada pula jang bersifat sosial sadja.

Atas kesatuan pendapat dari beberapa badan pada tanggal 23 sampai 31 Desember 1951 di Djakarta telah dilangsungkan kongres Bekas Pedjuang Bersendjata Seluruh Indonesia jang dikundjungi oleh 139 organisasi.

Satu diantara putusan-putusan jang diambil oleh kongres jang urgen ialah memfusikan seluruh Organisasi jang bermatjam-matjam tjoraknja itu. Usaha ini sebagian besar telah terlaksana.

Di Jogjakarta berdirinja badan fusi itu pada tanggal 27 Desember 1952 dan berkedudukan sebagai badan bawahannja jang pusatnja di Djakarta.

Mula-mula comite persatuan di Jogjakarta ini sebelum kongres fusi itu terlaksana hanja terdiri dari 3 organisasi jaitu Tenaga Demobilisan, Bangun dan Persatuan Bekas Tentera Indonesia. Kemudian setelah dekat pada waktunja kongres di Djakarta badan jang tergabung dalam comite persatuan itu bertambah mendjadi 6 jaitu : 1. Usaha Tenaga Demobilisan, 2. UPPRI, 3. B.P. R.I., 4. P.T.P., 5. Bangun dan 6. P.B.T.I. Hingga sekarang sampai terdjadinja peleburan organisasi di Jogjakarta itu badan fusi tersebut mengikuti pusatnja bernama Persatuan Bekas Pedjuang Bersendjata Seluruh Indonesia dengan disingkat PERBEPBSI.

Diantara beberapa rentjana usaha Perbepbsi itu telah berhasil mendirikan suatu badan hukum jang berbentuk Jajasan, jang telah didirikan sebelum fusi. Djadi dalam hal ini Perbepbsi tinggal menjetudjui dan melangsungkan sadja. Jajasan itu bernama Jajasan Bekas Pedjuang „BERDJUANG."

Adapun program kerdjanja Jajasan itu ialah pertama-tama mentjari kapital dengan djalan :

a. mengadakan Pasar Malam tiap tahun seperti Jaarmark. Usaha ini telah didjalankan pertama pada tahun 1952, dan dapat berhatsil.

b. mengadakan lotery barang, tetapi usaha ini tidak diidjinkan oleh jang berwadjib.

c. mengexploiteer kekajaan alam (tambang dsb.). Usaha ini telah dilaksanakan dengan mengadakan exploitasi tambang mangaan di Kulon-Progo dan Gunung Kidul. Tetapi pada hakekatnja usaha ini belum merupakan exploitasi melainkan baru bersifat exploirasi dan memperdagangkan mangaan-mangaan jang ada pada rakjat. Harapan besar sekali setelah usaha ini nanti dapat diidjinkan oleh pemerintah untuk di exploitasi.

Kapital jang didapat dari usaha tersebut dipergunakan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan jang dapat mempergunakan tenaga manusia jang banjak dan dapat menambah pengetahuan bagi para Bekas Pedjuang.

Perusahaan jang telah didirikan ialah :

1. Perusahaan tali dan babut dari sabut kelapa dan sisal bernama Babut dau Tali industri „Berdjuang" di Mudja-Mudju. Keadaan perusahaan ini sekarang belum stabiel. Masih mengalami naik turun jang tidak tentu. seperti djuga halnja dengan perusahaan-perusahaan lainnja.

2. Taman Karti „Berdjuang". Jang telah berdjalan ialah :
   a. Perusahaan Bouwaannemerij & Meubel-industri. Perusahaan ini mendjadi tempat memberi peladjaran tentang tukang batu, kaju dan besi. Djadi mereka disamping dapat memperoleh hatsil djuga ditambah memperdalam pengetahuan dan kepandaian.
   b. Perusahaan pertanian, untuk ini telah menjewa sawah di Pijungan.

Jang sedang dalam pembentukan ialah Perusahaan Opelet untuk mengadakan pendidikan sopir montir. Selain itu djuga pendidikan colporteur, accountanten untuk administrasi penerbitan.

Jang masih medjadi rentjana ialah :

1. Mendirikan pemintalan kapas jang modern. Karena diketahui bahwa pemintalan ini sangat dibutuhkan sekali, sebab menurut tjatatan di Indonesia sini terdapat banjak perusahaan tenun, tetapi perusahaan pemintalan baru ada satu tempat sadja jaitu di Garut. Usaha mendirikan perusahaan Pemin-

talan ini bermaksud pula akan diadakan persekutuan dengan kaum tani jang suka menanam kapas.

2. Mendirikan perusahaan gula jang tjaranja seperti perusahaan pemerintah.
3. Mengadakan transmigrasi dengan tjara mendirikan perusahaan ditempat jang ditudju.

Demikianlah rentjana-rentjana dari anggauta-anggauta Bekas Pedjuang Bersendjata jang tidak mendjadi urusan B.R.N. dan menudju ke industrialisasi.

Dari kalangan lain jaitu Organisasi Himpunan Tehnik Indonesia di Jogjakarta jang pusatnja di Djakarta, djuga mempunjai tudjuan ke industrialisasi. Dalam pendiriannja dinjatakan bahwa H.T.I. berusaha menjelenggarakan Industri Nasional jang dapat mendjamin Pertahanan Nasional dan Ekonomi Nasional. Usaha jang terpenting jalah merentjanakan adanja Industri Berat sebagai Industri Induk jang akan dapat melajani kepentingan-kepentingan industri atau perusahaan-perusahaan ketjil.

Untuk melaksanakan tjita-tjita itu sudah tentu beberapa factor perlu diperhatikan antara lain jalah : Sfeer ke-tehnikan dari masjarakat Indonesia sendiri dalam keadaan seperti sekarang ini, kadervorming jang selaras dengan perkembangan industri nasional, perkembangan kapital asing jang telah berakar di Indonesia, djalannja pikiran para politici Indonesia dan Kapitalvorming. Bagi H.T.I. tidak merasa takut dengan apa jang sering dikatakan kekurangan tenaga ahli, sebab sesungguhnja otak Indonesia pun mempunjai capasiteit jang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain, hanja tinggal soalnja penjempurnaan dan kepertjajaan dari jang wadjib.

Meskipun dalam usaha-usaha itu H.T.I. tidak mengadakan bedrijven sendiri, akan tetapi menjokong sekuat-kuatnja moreel dan bila mungkin materieel kepada siapapun jang bertjita-tjita seperti tersebut diatas.

Adapun jang bertalian dengan projek-projek industri kini sedang diurus dengan Jajasan Tehnik.

Tjita-tjita menudju industrialisasi jang paling achir timbul di Jogjakarta ialah dalam suatu pertemuan jang diadakan antara Sri Sultan Hamengku Buwono, S.P. Pakualam, dengan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua D.P.R.D., anggauta-anggauta D.P.D., dan Ketua-Ketua Fraksi didalam D.P.R.D. Istimewa Jogjakarta. Jang mendjadi pembitjaraan pada waktu itu ialah antara lain mengenai industrialisasi sebagai salah satu usaha untuk menambah penghasilan dan meningkatkan perekonomian daerah. Untuk melaksanakan itu akan diadakan suatu planningboard jang akan dipimpin oleh Sri Sultan sendiri.

Rentjana industrialisasi ini disebut rentjana 5 tahun dan meliputi a.l. industri kaju, gula, keramik dll. Adapun jang mendjadi soal selandjutnja ialah tentang modal untuk keperluan itu. Apakah Pemerintah dapat membantu usaha ini. Bila tidak mungkin maka pemerintah Daerah dapat memindjam uang kepada Pemerintah Pusat atau kepada Bank Industri Negara, untuk modal usaha ini.

Kesimpulannja meskipun Jogjakarta bukan kota industri, namun demi kepentingan kemakmuran rakjat, banjak idee jang menudju kearah industrialisasi.

Kader Perekonomian.

Mengenai kader perekonomian didaerah Istimewa Jogjakarta ini meskipun tidak madju pesat akan tetapi usaha-usaha kearah itu tetap ada.

Didalam bab-bab dimuka telah banjak ditjantumkan kader perekonomian menjampingi bab-bab jang bersangkutan, misalnja kader koperasi, kader tani, kursus-kursus dan sekolah-sekolah pertanian, kursus-kursus kehutanan dsb.

Lain daripada itu masih ada lagi sekolah jang chusus mengenai ekonomi jaitu Sekolah Menengah Ekonomi Pertama dan Sekolah Menengah Ekonomi Atas, disamping S.M.A. C jang djuga mempunjai djurusan ekonomi.

Disamping itu oleh Djawatan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri, Perindustrian dan Koperasi Daerah Istimewa Jogjakarta telah berkali-kali diadakan kursus-kursus Kader Keradjinan a.l. kursus batik, tenun, kursus natah-njungging-ngukir, kursus keramik, kursus kulit, sabut kelapa, kursus perak, kursus-tanduk-penju dsb. jang hasilnja memuaskan.

* *
*

9. BANK RAKJAT MEMBIMBING PERKEMBANGAN EKONOMI RAKJAT

A. TUDJUAN KREDITNJA MENOLONG JANG LEMAH.

MEMBANGUN Negara dan Rakjat dengan mengambil bagian dalam lapangan ekonomi sudah djelas diketahui pentingnja oleh siapapun. Setelah dimuka banjak diuraikan tentang segi - segi dan sudut ekonomi untuk menudju ke pembangunan ekonomi nasional, maka masih perlu rasanja satu hal dikemukakan jaitu tentang Bank.

Diantara bank-bank jang ada, baik bank pemerintah maupun partikelir, bagi chalajak ramai teranglah bahwa Bank Rakjat Indonesia sedjak dulu hingga sekarang adalah satu-satunja bank jang mempunjai hubungan erat dengan rakjat dipelosok-pelosok, masjarakat buruh, tani, bakul-bakul di Kalurahan-Kalurahan jang tersebar dimana-mana, mengena! B. R. I. sebagai suatu sumber pemberi kredit. Berhubung dengan kewadjiban B. R. I. jang sampai kini masih sadja melajani masjarakat baik kota maupun desa, maka penjaluran pemberian modal dari Pemerintah untuk pembentukan badan-badan kredit desa, untuk keperluan modal bagi bakul-bakul ketjil, dan untuk pemberian pindjaman kepada pak tani pada musim rendeng, B. R. I. lah jang terutama paling banjak menerima bagiannja.

B. R. I. adalah suatu bank landjutan dari Algemene Volkscredietbank sewaktu djaman pemerintahan Belanda dahulu, dan kemudian pada djaman pemerintahan Djepang bank tersebut diganti dengan nama Syomin Ginko.

B. R. I. dibangunkan pada tg. 22 Pebruari 1946, adapun modalnja diperoleh dari kekajaan-kekajaan Volkscredietbank, Syomin Ginko dan tundjangan dari Pemerintah.

Adapun usaha-usaha jang dilakukan oleh B.R.I. antara lain menerima (in belegging) uang-uang daerah otonoom dengan badan-badannja, dan menjimpan serta mengerdjakan administrasi dari effecten, saham dan lain-lain surat jang berharga dari badan-badan itu.

Djuga menerima simpanan dari chalajak, baik perseorangan maupun badan-badan, serta mendjalankan usaha bank pada umumnja.

Lain daripada itu, djuga memberi nasehat dan pertolongan perseorangan, dan penilikan kepada badan-badan perkreditan untuk rakjat, perkumpulan-perkumpulan koperasi, badan-badan perkreditan desa, dengan mengingat sekalian peraturan jang sah jang tersebut dalam peraturan B. R. I. itu sendiri.

Sesungguhnja mengenai tugas dari B.R.I. ialah berkewadjiban untuk membantu pengusaha-pengusaha golongan menengah baik perseorangan maupun berbentuk organisasi, dan dengan demikian membantu pula dalam usaha memadjukan kemakmuran rakjat Indonesia, umpamanja dengan djalan bersama-sama membantu perekonomian jang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Akan tetapi disamping matjam-matjam kredit jang telah ada, bagi negara jang agrarisch seperti Indonesia ini, perkreditan bagi kaum tani adalah factor

penting sebagai suatu rangkaian kearah pembangunan ekonomi, djustru karena kedudukan pak tani sebagai penghasil bahan makan.

Sajang sekali bahwa dalam penjelenggaraan perkreditan tani ini terdapat faham jang satu sama lain masih belum mendekati. Jaitu faham jang memerlukan kredit dan faham jang memberi kredit. Oleh sebab itu djembatan sebagai penghubung antara kehendak kedua pihak tadi perlu disusun sedemikian rupa sehingga dapat mendekati satu sama lain.

Menurut dogmanja bahwa kredit itu adalah suatu „economische daad' bukan „sosiale daad", djadi uang pindjaman itu harus dibajar kembali. Pihak pemberi kredit sebelum pindjaman diberikannja, harus mempunjai kejakinan zakelijk bahwa uang itu dibajar kembali, sehingga memerlukan sjarat-sjarat tertentu jang harus dipenuhi oleh peminta kredit.

Tetapi sebaliknja pihak peminta kredit mengadjukan keinginan supaja sjarat-sjarat itu dibuat minimum sadja, jaitu berdasar kepertjajaan moril belaka, keinginan itu dapat difahami pula, karena kredit itu djustru harus menolong jang lemah.

Sampai dimana kedua pihak ini dapat mendekati satu sama lain tergantung dari banjak factor dan keadaan.

Semendjak djaman Djepang sampai revolusi bersendjata, keadaan Bank Rakjat Indonesia jang ada di Jogjakarta sini tidak dapat mentjatat segala sesuatu dengan tepat, sebab kedudukan uang pada waktu itu tidak stabiel, dan banjak tjatatan-tjatatan jang kabur. Pada waktu pendudukan Belanda, seperti djuga keadaannja dengan kantor-kantor lainnja, maka B. R. I. disini djuga ditutup.

Tetapi setelah Belanda meninggalkan Jogjakarta, dan B. R. I. mulai dibuka kembali, maka angka-angka banjaknja pemindjam maupun djumlahnja pindjaman menundjukkan kenaikan. Hal ini disebabkan karena begitu mendesaknja kebutuhan rakjat dan makin populernja B. R. I. dikalangan rakjat, Lagi pula oleh B. R. I. selalu diusahakan agar supaja pemberian kredit kepada rakjat dapat merata dan mudah djalannja.

Tahun	Dipindjamkan :		Dibajar kembali	Pindjaman achir tahun :	
	Orang:	Uang:		Orang:	Uang:
1950	6.551	R. 3.382.000	R. 2.472.000	4.017	R. 1.268.000
1951	12.933	„ 9.238.000	„ 5.587.000	9.975	„ 4.815.000
1952	14.987	„ 12.994.000	„ 12.434.000	13.426	„ 5.235.000
Angka2	sebelum	perang (1940)			
1940	*)	R. 149.000	„ 155.000	11.447	„ 563.000

Keterangan:

*) Tidak dapat diketahui. Djumlah uang dibulatkan sampai ribuan rupiah.
Baik mengenai banjaknja pemindjam maupun djumlahnja uang jang dipindjamkan sekarang telah melampaui dari sebelum perang.

B. TIGA GOLONGAN PEMINDJAM

Para pemindjam dapat dibagi mendjadi 3 golongan.

a. pindjaman kepada rakjat tani
b. pindjaman kepada para pegawai
c. pindjaman kepada golongan pertengahan.

a. Pindjaman tani (pindjaman ketjil sampai Rp. 1.000.—)

Pindjaman sebagian besar untuk keperluan garap sawah dan dagang ketjil-ketjilan, misalnja grabadan, penimbunan hasil bumi dan lain-lain.

Pemberian kredit ketjil merupakan bagian jang terbesar dari usaha B.R.I. meskipun menurut Peraturan Pemerintah No. 25 tgl. 20 April 1951 kredit ketjil ini sebetulnja sudah tidak mendjadi kewadjibannja B. R. I. Menurut P. P. tersebut B. R. I. telah didjadikan (berstatus) bank pertengahan. Oleh B. R. I. selalu di-idam-idamkan supaja P. P. No. 25 tersebut dapat segera dilaksanakan, ja'ni dengan mengoperkan kredit ketjil kepada Badan Kredit Desa. Ketjuali untuk mengisi P. P. memang kredit paling baik dilajani dalam kelurahan-kelurahan sendiri, untuk mentjapai efficiency sebesar-besarnja. Pemberian kredit ketjil di-kalurahan-kalurahan akan menguntungkan semua pihak, teristimewa untuk sipeminta kredit, karena :

1. sipeminta kredit tidak perlu mengeluarkan ongkos djalan untuk mendaftarkan ke B. R. I., untuk terima pindjaman dan nitjil tiap bulannja ke B.R.I.
2. sipeminta kredit dapat lekas dilajani (mendapat pindjaman), tidak perlu tunggu lama-lama seperti sekarang karena pemberian kredit dipusatkan di B. R. I.
3. sipeminta kredit dapat mendapatkan pindjamannja sesuai dengan keperluannja, karena segala sesuatu dipertimbangkan oleh teman-temannja sendiri jang tahu seluk beluknja sipeminta pindjam dari dekat.
4. B. R. I. dapat mentjurahkan tenaganja untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 25, ja'ni untuk mendjadi bank pertengahan.
   Selama B. R. I. masih dikerumuni oleh pemindjam-pemindjam ketjil, sukar agaknja untuk mendjelma mendjadi bank pertengahan. Bahwa kredit ketjil itu merupakan bagian jang terbesar dari bedrijf B. R. I. sekarang dapatlah dilihat dari angka-angka tersebut dibawah ini.
   Dari angka-angka tersebut diatas jang mengenai kredit ketjil ialah :

Tahun	Dipindjamkan		Dibajar kembali	Pindjaman achir tahun	
	orang	uang		orang	uang
1950	6.391	R. 2.172.000	R. 1.392.000	3.960	R. 950.000
1951	12.071	„ 5.077.000	„ 3.325.000	9.467	„ 2.705.000
1952	11.827	„ 3.869.000	„ 4.191.000	11.461	„ 2.381.000

Menurut Statistik dari seluruh Indonesia dalam tahun 1952 pemberian kredit ketjil dari B. R. I. Jogjakarta merupakan jang terbesar.

b. Para pegawai :

Kebanjakan kredit jang diberikan kepada golongan ini merupakan beleg

Kebanjakan kredit jang diberikan kepada golongan pegawai merupakan beleggingskredit jaitu untuk bikin baik rumah, mendirikan rumah-rumah, beli sepeda, perkakas rumah tangga dan lain keperluan sematjam itu. Golongan ini djumlahnja ta' seberapa djika dibandingkan dengan kredit kepada rakjat desa.

c. Golongan pertengahan (middenstanders).

Bahwa B.R.I. sampai sekarang belum dapat melajani golongan pertengahan dengan sesempurna-sempurnanja, dapat dilihat dari angka-angka ini:

Tahun	Dipindjamkan		Dibajar kembali	Pindjaman achir tahun	
	orang	uang		orang	uang
1950	125	R. 1.111.000	R. 997.000	40	R. 117.000
1951	182	„ 1.398.000	„ 908.000	121	„ 732.000
1952	179	„ 1.895.000	„ 1.492.000	147	„ 1.134.000

Bahwa banjaknja para pemindjam kaum pertengahan sedikit, selain karena alasan tersebut diatas djuga disebabkan karena :

a. banjaknja kaum pertengahan bangsa Indonesia masih sedikit.

b. specialisasi dalam lapangan usaha dalam masjarakat Indonesia kurang nampak.

Selain pindjaman jang berupa persekot seperti tersebut diatas, oleh B.R.I. djuga diberikan pindjaman setjara rekeningkoran kepada beberapa golongan pertengahan seperti tersebut dibawah ini.

Tahun	Rekening koran jang terbuka		Rekening koran jang berdjalan pada achir tahun :	
	orang	Batas max.	orang	Djumlah
1950	45	R. 894.000	38	R. 544.000
1951	52	„ 962.000	32	„ 442.000
1952	44	„ 1.186.000	29	„ 516.000

Kredit kepada golongan ini kebanjakan untuk keperluan industri ketjil perusahaan batik, perusahaan kaju, perdagangan hasil bumi setjara besar-besaran. Sebagian besar dari perusahaan batik adalah lengganan B. R. I.

Modal B. R. I. diperoleh dari Pemerintah, karena B. R. I. adalah untuk Pemerintah. Besarnja modal untuk tiap-tiap tjabang tidak tertentu. Tiap kali suatu tjabang B. R. I. kekurangan modal dapatlah ia minta tambahan modal kepada Kantor Besar B. R. I., karena modal dari Pemerintah dipusatkan di Kantor Besar B. R. I.

Besarnja pindjaman mulai dari Rp. 100.— sampai djumlah tidak tertentu hanja mengingat kekuatan membajar kembali dari sipemindjam sadja. Tanggungan, penghasilan dan keperluan pindjaman dari sipemindjam adalah faktor-faktor jang terpenting dalam hal B. R. I. menentukan besarnja pindjaman.

Lamanja pindjaman (termijnstelling) sebagian besar terdiri dari 10 sampai 12 bulan. Termijn pendek ini masih dibutuhkan mengingat karena modal jang diberikan oleh Pemerintah masih sangat terbatas. Disamping termijn 10 — 12 bulan ada djuga jang sampai 1½ tahun.

B. R. I. berpedoman : djangan sampai melelang tanggungan dari pemindjam, karena pelelangan itu selain makan banjak ongkos (jang semuanja harus dipikul oleh pemindjam) djuga makan banjak pekerdjaan untuk B. R. I. Tetapi terhadap para pemindjam jang sudah sampai beberapa kali (biasanja paling sedikit 3 kali) diperingatkan masih djuga membandel, B. R. I. terpaksa mengambil tindakan menjelesaikan perkara liwat Pengadilan Negeri. Hal ini perlu, mengingat karena betalingsdicipline dari para pemindjam banjak merosotnja.

Dari angka-angka tersebut dibawah ini dapat diambil kesimpulan, bahwa B. R. I. tidak serampangan sadja mengambil tindakan mengadjukan perkara ke Pengadilan Negeri.

Tahun	Diadjukan Pengadilan negeri :	Didjatuhi vonnis	Ditjabut karena melunasi pindjaman :
1950	—	—	—
1951	6	4	2
1952	12	9	3

Pada waktu sebelum perang umumnja para pemindjam setia menepati perdjandjian. Djumlahnja tunggakan sekarang djauh lebih besar dari pada sebelum perang (lihat angka-angka dibawah ini).

Tahun :	Ditangan orang :	Tunggakan :	
		Djumlah :	Procentage :
1940	R. 563.000	R. 27.000	5%
1952	„ 5.235.000	„ 1.078.000	20%

Djumlah pemindjam dan uang jang dipindjamkan sekarang lebih besar dari pada sebelum perang. Tetapi dalam hal ini djanganlah dilupakan bahwa pada waktu sebelum perang disamping B.R.I. ada 402 bank-desa jang tidak sedikit djumlah pemindjamnja, sedang sekarang dari 402 bank-desa itu, baru 59 jang telah dibuka kembali.

			Ditangan orang		Tunggakan	
			Orang	Djumlah	Djumlah	%
1940	Pindjaman	B.R.I.	11.447	R. 563.000	R.27.000	50%
	„	bank-desa	27.000	R. 162.000	—	—
		Djumlah :	38.447	R. 725.000	R. 27.00	4%
1952	B.R.I.		13.426	R. 5.235.000	R. 1.078.000	20 %
	Bank-desa		3.844	R. 255.000	R. 2.000	0,8%
			17.270	R. 5.490.000	R. 1 080.000	20 %

Dari angka-angka ini terbukti bahwa djumlah banjaknja para pemindjam B.R.I. dan bank-desa sebelum perang djauh lebih besar dari pada sekarang jang berarti bahwa sekarang kredit ketjil belum dapat merata diantara rakjat. Oleh karena itu B.R.I. selalu berusaha untuk membuka kembali perkreditan desa dengan saluran bank-desa.

Djuga dapat dilihat bahwa pemberian kredit ketjil didesa oleh kelurahan lebih efficient dari pada kalau diberikan oleh B.R.I. (tunggakan tidak ada 1%) sedang kredit ketjil jang diselenggarakan oleh B.R.I. menundjukkan tunggakan jang tinggi seperti tersebut dibawah ini :

	Djumlah ditangan orang	Djumlah tunggakan	% tuggakan
1950	R. 950.000	R. 270.000	28
1951	R. 2.705.000	R. 461.000	17
1952	R. 2.381.000	R. 585.000	20

Dalam melaksanakan tugasnja, B.R.I. menghadapi banjak kesulitan-kesulitan teristimewa mengenai pembajaran kembali para pemindjam. Setiap bulan djumlahnja para penunggak terus naik (lihat daftar penunggak disebelah). Para penunggak itu sebagian besar disebabkan bukannja karena tidak mampu (onmacht), melainkan karena dengan sengadja (onwil). Meskipun banjak djuga pertolongan jang diberikan dari pihak Pamong Pradja dalam hal memberantas tunggakan, tetapi sampai sekarang hasil jang diperoleh belum memuaskan seperti apa jang diharapkan.

Kesadaran rakjat tentang perlu adanja B.R.I. ada. Mereka sangat membutuhkan kredit jang murah. Tetapi sajang kebutuhan akan kredit itu tidak/ kurang disertai kesadaran akan pembajaran kembali.

* *
*

PERKREDITAN B.K.D. S/D DESEMBER 1952 DARI 41 BANK DESA (KABUPATEN KULON PROGO)

	Jang dipindjamkan		Sisa ditangan orang		Tunggakan		Procentage
	Banjaknja orang	Djumlah	Banjaknja orang	Djumlah	Banjaknja orang	Djumlah	Tunggakan
Kw. I	3706	R. 181.000	3221	R. 111.000	160	R. 2.000	1.37%
„ II	3619	„ 244.000	3613	160.000	250	„ 2.000	1.47%
„ III	3536	„ 284.000	3460	216.000	137	„ 2.000	0.80%
„ IV	4003	„ 303.000	3844	255.000	130	„ 2.000	0.88%
	14864	R. 1.012.000	3844	R. 255.000	130	R. 2.000	0.88%

Keterangan:

B.K.D. Kemantren Wates dibuka kembali pada bulan Pebruari 1951, sebanjak 39 B.K.D. dan sekarang s/d Desember 1953 telah berdjumlah 42 B.K.D.

Bunga waktu permulaan pembukaan 18% (minggon). Setelah berdjalan lebih kurang 1½ tahun, bunga sekarang telah dapat diturunkan sebagai berikut:

Minggon	15%
Lapanan	20%
Tani	20%

Maximum pindjam seorang Rp. 250,—. Djika nanti keadaan telah mengizinkan akan dapat dinaikkan s/d Rp. 1.000,—, sehingga perkreditan desa betul-betul dapat ditjukupi oleh desanja sendiri.

Adapun jang dimaksudkan dengan bedrijfsfonds ialah urusan uang dari semua B.K.D.2 jang dikumpulkan djadi satu dan dipergunakan buat membajar

1. Belandja Djuru-tulis dan uang djalan.
2. Membajar urunan pensiun dan uitkerings-fonds
3. Ongkos buku-buku dan perkakas-perkakas lain dari B.K.D.

   Jang termasuk dalam pos lain-lain diantaranja ialah:

   a. ongkos-ongkos untuk penanaman peti-peti besi.
   b. ongkos-ongkos djalan untuk mengambil dan setor uang dari anggauta commissie.

PERKREDITAN DESA JANG DIDJALANKAN OLEH B.R.I. JOGJAKARTA (SELURUH DAERAH)

Perkreditan desa s/d Desember 1952 adalah sebagai berikut :

I. A.: pindjaman tani (musiman)

	Jang dipindjamkan		Sisa ditangan orang		Tunggakan		Procentage
	Banjaknja orang	Djumlah	Banjaknja orang	Djumlah	Banjaknja orang	Djumlah	Tunggakan
Kw. I	1050	R. 364.000	3034	994.000	758	R. 160.000	16.01%
„ II	1310	„ 463.000	4347	1.148.000	1137	„ 276.000	24.06%
„ III	1124	„ 396.000	3885	1.197.000	1044	„ 211.000	17.06%
„ IV	1060	„ 374.000	3827	1.129.000	1127	„ 254.000	22.47%
Dlm. 1 th.	4544	R. 1.597.000	3827	R. 1.129.000	1127	R. 254.000	22,47%

I. B.: pindjaman desa bulanan.

	Banjaknja orang	Djumlah	Banjaknja orang	Djumlah	Banjaknja orang	Djumlah	Tunggakan
Kw. I	1862	R. 643.000	7067	R. 1.652.000	2630	R. 319.000	13,27%
„ II	2393	„ 670.000	8000	1.652.000	3329	„ 401.000	24,33%
„ III	1750	„ 523.000	7932	1.434.000	2879	„ 345.000	24.04%
„ IV	1278	„ 436.000	7624	1.251.000	3266	„ 331.000	26,45%
Dlm. 1 th.	7283	R. 2.272.000	7624	. 1.251.000	3266	R. 331.000	26,45%

Djumlah 1 A dan 1 B dalam 1 tahun.

	Banjaknja orang	Djumlah	Banjaknja orang	Djumlah	Banjaknja orang	Djumlah	Tunggakan
I A	4544	R. 1.597.000	3827	R. 1.129.000	1127	R. 254.000	22,47%
I B	7283	„ 2.272.000	7624	„ 1.251.000	3266	„ 331.000	26,45%
Djumlah	11827	R. 3.869.000	11451	R. 2.380.000	4393	R. 585.000	24,56%

Keterangan:

Jang dimaksudkan pindjaman desa, ialah pindjaman sampai dengan djumlah Rp. 1.000,—

I A : pindjaman tani, jang penitjilan/pembajaran kembali, diwaktu panen.

I B : pindjaman desa s/d djumlah Rp. 1.000,— dimana tjitjilannja dilakukan tiap-tiap bulan.

Bunga pindjaman desa ini ialah 12% setahun.

Dari angka-angka tersebut diatas dapatlah kami simpulkan sebagai berikut :

B.K.D.			**B.R.I.**		
Sisa ditangan orang	Rp.	255.000,—	Sisa ditangan orang	Rp.	2.380.000,—
Tunggakannja	„	2.000,—	Tunggakannja	„ „	585.000,—
atau	:	0,88%	atau	:	24,56%

Dari angka-angka ini dapat terlihat bahwa procentage tunggakan dari B.R.I. djauh lebih tinggi dibandingkan dengan procentage B.K.D.

Ini disebabkan karena :

1. Kredit via B. K. D. dapat diberikan dalam waktu jang tepat, menurut keperluannja, sedang kalau via B.R.I. sering kali waktunja sudah lewat, karena harus diadakan pemeriksaan dulu terhadap tiap-tiap individu jang akan pindjam.
2. Bonafiditeit dan keuletan bekerdja para pemindjam, B.K.D. lebih mengetahui dari pada B.R.I., karena pengurus B.K.D. terdiri dari pamong kelurahan dan orang-orang dari kelurahan tersebut.
   Dan factor ini merupakan tiang jang penting sekali dalam dunia perkreditan, sedangkan pemindjam-pemindjam tersebar dimana-mana.
3. Lain dari itu effek pindjaman liwat B.K.D. lebih besar dari pada B.R.I karena biaja-biaja bagi sipemindjam untuk pulang pergi kekantor B.R.I. dikota tentu sangat djauh bedanja bila orang itu tjukup berhubungan dikelurahannja masing-masing untuk memperoleh pindjaman di B.K.D.

Bandingan diatas menggambarkan perlu adanja B.K.D. di kelurahan-kelurahan untuk melajani kebutuhan pindjaman ketjil-ketjil masjarakat desa, sedangkan B.R.I. lebih dapat mengutamakan tugas menurut Peraturan Pemerintah No. 25 tanggal 20 April 1951 mendjadi Bank Pertengahan, jaitu melajani pindjaman pedagang-pedagang golongan menengah.

C. BANK DESA ATAU KOPERASI PERLU BANJAK DIDIRIKAN.

Manfaat adanja B.R.I. ialah sedikit banjak telah mengurangi adanja „idjon" dan „woeker", karena ternjata sampai sekarang belum ada instansi lain jang mengganti tugas B.R.I. sebagai pemberi kredit kepada rakjat. Dimana perkreditan desa telah teratur dan kuat, B.R.I. meninggalkan lapangan perkreditan didesa itu jang telah dapat dilajani oleh badan perkreditan dalam desa (koperasi atau bank-desa).

Hal ini telah dibuktikan didaerah Kulon Progo, dimana telah banjak bank-desa dibuka kembali. Sampai djumlah tertentu, pemberian pindjaman dilajani oleh bank-desa, dari desa sendiri.

Dalam tahun ini direntjanakan supaja dibank-desa batas pindjaman dapat meningkat sampai Rp. 500,— dengan pembajaran 10 bulan tjitjilan.

Disebelah ini kita muatkan keadaan neratja Badan Kredit Desa Kemantren Wates dalam tahun 1952, dari 41 bank-desa di Kabupaten Kulon - Progo.

* *
*

KEADAAN BADAN KREDIT DESA KEMANTREN WATES DALAM TAHUN 1952 DARI 41 BANK - DESA (KABUPATEN KULON PROGO) BALANS PER 31 DESEMBER 1952.

No.	Keterangan		Djumlah	No.	Keterangan	Djumlah
1.	K a s		R. 61.481,40	1	Hutang kepada B. R. I.	R. 187.075,45
2.	Pihutang :			2	Simpanan panduduk	„ 32.285,20
	Minggon	R. 65.483,50		3	Kekajaan bersih	„ 53.725,89
	Bulanan	.. 177.082,—		4	Untung	„ 43.477,26
	Tani	„ 12.055,—	„ 254.620,50			
3.	Materai		„ 462,90			
						R. 316.564,80
			R. 316.564.80			

Rugi & untung per 31 Desember 1952.

No.	Keterangan	Djumlah	No.	Keterangan	Djumlah.
1.	Bunga kepada B. R. I.	R. 6.020.84	1	B u n g a :	
2.	Gadji Commissie	„ 20.738,39		Minggon	R. 123.948,57
3.	Controle Kasten	„ 21.992,—			
4.	Bedrijfsfonds	„ 74.737,—	2	Bulanan	„ 44.415,—
5.	Lain-lain	„ 1.444,93			
6.	Untung	„ 43.477,26		B u n g a B.R.I.	„ 46,85
		R. 168.410,42			R. 168.410,42

10. LALU LINTAS PERDAGANGAN

A. PERKEMBANGAN PERDAGANGAN

KOTA Jogjakarta tidak termasuk kota dagang seperti Surabaja, Semarang, Djakarta, Padang Medan, Makassar dan lain-lain. Tetapi lebih merupakan kota peladjar dan kebudajaan disamping sebagai kota perdjuangan dan kota politik.

Sehingga dengan demikian ramainja kota ini tidak diramaikan dengan banjaknja lalu-lintas perdagangan baik barang-barang jang masuk, maupun jang keluar, ataupun jang hanja singgah sementara waktu, tetapi sebagian besar diramaikan oleh banjaknja peladjar jang sedang menuntut ilmu-pengetahuan. Kita melihat betapa berhilir berdujun-dujunnja anak-anak peladjar dari jang tingkat rendah, menengah sampai jang tingkat tinggi pulang pergi kesekolah sewaktu-waktu dari pagi-pagi dimana fadjar mulai menjingsing, sampai siang, petang dan terus sampai malam hari, tidak henti-hentinja para peladjar mengalir berganti-ganti menghiasi Kota sepandjang djalan raya.

Namun meskipun demikian kota Jogjakarta, terbawa oleh letaknja jang strategis untuk lalu-lintas karena berada di tengah-tengah pulau Djawa, tengah-tengah antara Djawa Barat dan Djawa Timur sehingga merupakan simpang djalan jang menudju ke berbagai djurusan, maka kota Jogjakarta ramai djuga dalam hal lalu-lintas perdagangan.

Banjak para pedagang besar ataupun ketjil dari berbagai daerah jang sengadja menudju Jogjakarta, jang datang dari Djawa Timur untuk menudju ke Djawa Barat atau sebaliknja, jang memerlukan terlebih dahulu singgah di Jogjakarta. Disini pedagang - pedagang itu kadang - kadang bertemu satu sama lain jang achirnja menimbulkan suatu hubungan dan menambah kemadjuan-kemadjuan dilapangan perdagangan. Banjak sekali barang-barang jang keluar dan masuk maupun jang hanja singguh dari dan kedaerah-daerah dimana sadja menurut kebutuhan.

Ramai dan tidaknja lalu-lintas perdagangan didaerah ini tidak ditentukan oleh surplus atau minusnja keadaan perekonomian disini, akan tetapi lebih banjak ditentukan oleh adanja perhubungan antara penduduk didaerah ini, atau penduduk dari sesuatu daerah dengan lainnja, dan hubungan produksi sebagai bahan perdagangan.

Daerah Jogjakarta terutama Kotanja makin lama makin padat dengan penduduknja dan sudah barang tentu keadaan makin ramai melebihi tahun-tahun jang sudah-sudah.

Pada waktu Jogjakarta masih mendjadi Ibu Kota Republik Indonesia memang Kota ini pernah mengalami kepadatan jang luar biasa, dari banjaknja para pengungsi dan orang-orang perdjuangan disamping penduduk aslinja. Lalu-lintas perdagangan pada waktu itu tidak ramai, sebab barang-barang dagangannjapun tidak ada, barang-barang produksi baru hanja keluaran dalam negeri, sedang barang-barang luar negeri barang-barang tidak baru atau bila

ada jang baru dan asli luar negeri, barangnja sembunji dan dengan harga jang tinggi sekali, umpamanja bahan-bahan tekstil, bahan-bahan onderdeel sepeda, mesin-mesin, obat-obatan dan lain-lain.

Semuanja bersifat perdjuangan atau darurat. Pakaian sederhana, makan sederhana, tempat tinggal sederhana, pelesirpun sederhana, sehingga dari segala jang serba sederhana ini lalu-lintas perdagangan pun sederhana djuga, dan perdagangan jang paling sibuk hanja bahan makan, antara lain beras, djagung, sajuran, rokok dan lain-lain.

Alat-alat pengangkutan sedikit sekali dan tidak banjak pekerdjaan pengangkutan untuk perdagangan. Tetapi kaum bakul jang waktu itu disebut dengan istilah tukang tjatut, meradja-lela, memperdagangkan barang-barang jang halus sampai barang-barang jang kasar, dari barang-barang bahan makan, pakaian sampai barang-barang keperluan produksi boleh dikata semua djatuh ditangan tukang tjatut dengan tjara selundupan atau gelap-gelapan. Toko-toko meskipun buka tetapi barang-barang dagangannja lenjap dari peredaran setjara legaal, dan tenggelam kedalam perdagangan gelap. Keadaan sematjam ini telah dimulai semendjak Djepang menduduki Indonesia, sehingga sesungguhnja lalu-lintas perdagangan telah mati sedjak lama kalau tidak boleh dikatakan kandas.

Sesudah pengakuan kedaulatan ini, keadaan perdagangan mulai hidup kembali dan lalu-lintas perdagangan mulai berdjalan. Barang-barang luar negeri membandjir dan mendesak produksi dalam negeri. Perusahaan-perusahaan dalam negeri jang dulu sudah dapat mentjukupi kebutuhan sekarang terdesak mati.

Semua rumah dan toko-toko jang terletak disepandjang pinggir djalan raya sudah buka semua dengan lemari-lemarinja jang penuh dengan dagangan-dagangan, mulai dari barang-barang klontong, bahan makan dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari sampai barang-barang lux seperti auto, radio, lemari es dan sebagainja.

Siang malam toko-toko itu hampir semuanja selalu dibandjiri orang. Toko - toko buku baik jang menjediakan buku - buku baru maupun buku-buku lama, banjak menarik keuntungan. Para peladjar membeli buku-buku seperti membeli kuweh sadja. Perusahan-perusahaan potret jang tampaknja hanja untuk bersenang-senang sadja, akan tetapi ternjata banjak menarik keuntungan, terbukti dengan banjaknja toko-toko atau perusahaan-perusahaan foto jang timbul dimana-mana, tidak sadja ditengah-tengah kota seperti djaman Belanda dulu, tetapi telah meluas sampai dipinggir-pinggir kota, didalam kampung-kampung, dan dikota-kota Kabupaten.

Semua pasar-pasar baik besar maupun ketjil dimana orang dapat mendjual segala rupa barang dagangannja, atau orang dapat membeli segala matjam barang jang dibutuhkan, sekarang telah penuh sesak dengan banjaknja para bakul maupun banjaknja pembeli. Lebih-lebih pasar jang berpusat dikota ini jaitu pasar Beringhardjo jang luas itu, sekarang sudah tidak dapat memuat lebih banjak lagi. Ruangan tempat pendjualan jang sudah ditetapkan sudah tidak mentjukupi lagi, sehingga para pendjual sampai meluap di gang - gang dan ruangan-ruangan djalan dalam pasar. Meskipun hal jang demikian itu tidak semestinja, akan tetapi pemerintah Kota bertindak bidjaksana karena merasa belum dapat memenuhi kebutuhan umum.

Pasar penuh sesak, menghendaki pengluasan, toko-toko penuh barang-barang dagangan dan ramai dengan para pengundjungnja, perdagangan berdjalan pesat, alat-alat pengangkutan truck, bus, kereta api, sibuk berdjalan mondar-mandir keluar masuk kota mentjapai hubungan dengan djarak-djarak dekat maupun djauh didesa-desa, sampai dikota-kota lain propinsi. Semuanja ini menundjukkan sibuknja lalu-lintas perdagangan.

Ramainja lalu-lintas perdagangan ini selain disebabkan dengan letak daerah dan kota jang berada ditengah-tengah persimpangan djalan jang menudju ke berbagai djurusan dan padatnja penduduk, djuga karena daerah ini meskipun tidak besar, mendjadi daerah penghasilan produksi barang-barang.

Barang-barang produksi jang dikeluarkan oleh Daerah Istimewa Jogjakarta dan jang diperdagangkan keluar antara lain adalah sebagai berikut : Barang-barang : sarong/slendang, kain badju, setagen/amben dikirim ke Solo, Magelang, Banjumas, Djakarta, Surabaja, Semarang, Sumatera. Barang-barang : kain, sarong dikirim ke seluruh Djawa, Sumatera, Barang-barang : Perak dikirim ke Djakarta Surabaja, Sumatera. Barang-barang : genteng dikirim ke Semarang, Klaten. Barang-barang : Batu merah dikirim ke berbagai tempat. Barang-barang : Bagor dikirim ke seluruh Djawa. Barang-barang : tjeret, soblok, ember dan lain-lain dikirim ke Magelang, Solo. Barang - barang : Tegel (belum tertjatat). Barang-barang : timbangan dikirim ke Surabaja, Bandung. Barang-barang tinta tjap dikirim ke Djakarta. Barang-barang : minjak kelapa, katjang, babut, kesed dan lain-lain dikirim ke Surabaja, Djakarta. Barang-barang: wadjan dikirim ke Solo, Semarang. Barang-barang : Besi tua dikirim ke Djakarta. Barang-barang : Biscuit dikirim ke Semarang dan lain-lain. Barang-barang : Teh, dikirim ke kota-kota Djawa Tengah. Barang-barang : kapur tulis dikirim ke Semarang. Barang-barang: keradjinan tangan dikirim ke (belum tertjatat). Barang-barang : tikar dikirim ke Muntilan dan lain-lain. Barang-barang : alat-alat rumah/tangga dikirim ke Surabaja, Semarang, Djakarta. Barang-barang: alat-alat pertanian dikirim ke Magelang, Banjumas. Barang-barang gula kelapa dikirim ke Solo, Magelang.

Demikianlah hatsil produksi di Jogjakarta jang dapat menambah ramainja perhubungan perdagangan.

Pada waktu itu bahan - bahan jang diperlukan untuk produksi tadi djuga masih didatangkan dari luar daerah, sehinga merupakan pertukaran, dari bahan mentah diterima dari luar daerah, setelah mendjadi barang-barang produksi dikirim keluar kembali.

Selandjutnja ramainja lalu-lintas perdagangan ini dapat kita lihat dengan angka-angka barang-barang dalam djumlah berat jang keluar dan masuk didaerah Jogjakarta, baik jang berupa bahan mentah maupun barang-barang produksi.

Disebelah ini kita kutipkan angka-angka jang tertjatat oleh Kantor Inspeksi Lalu-lintas di Daerah Istimewa Jogjakarta, dan sebagai ukuran hanja kita ambil barang-barang jang masuk dan keluar dalam tengah tahun ke II 1951, dan tengah tahun ke-I 1952. Dengan melihat angka-angka jang tiap-tiap bulan kadang-kadang meningkat itu kita dapat mengetahui makin lama betapa sibuknja keadaan lalu-lintas perdagangan.

B. BARANG-BARANG MASUK DENGAN ANGKUTAN MOTOR DAN KERETA - API

Angka-angka itu menundjukkan kemadjuan-kemadjuan dilapangan pertukaran kebutuhan. Dalam menjebutkan nama barang - barang itu kita singkat „golongan matjam barang."

Barang-barang jang tertjatat disebelah itu ialah barang-barang jang diangkut dengan angkutan motor oleh perusahaan-perusahaan angkutan (transport-onderneming). Meskipun semua itu tidak merupakan barang dagangan, sebab kadang-kadang barang-barang jang diangkut itu hanja kepentingan perseorangan seperti pindah rumah, mendatangkan bangku - bangku sekolah dan sebagainja akan tetapi dalam angkutan ini jang terbesar adalah merupakan barang-barang dagangan, sehingga dengan demikian dapatlah dipakai ukuran betapa kemadjuan lalu-lintas perdagangan itu dengan melihat perubahan-perubahan angka-angka setiap bulan.

BARANG-BARANG JANG KELUAR DARI JOGJAKARTA DALAM TENGAH TAHUN KE - II 1951.

Keluar:

Golongan matjam barang:	Djuli	Augt.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.	Ket.
1. Bahan makan/sajuran/buah-buahan.	122.650	66.600	104.890	80.991	143.635	129.470	Hitungan dalam kg.
2. Gula/teh/kopi dan sebagainja.	36.027	23.565	26.550	19.165	18.660	46.650	
3. Minjak/sabun/areng/kaju bakar.	30.150	7.300	97.125	31.600	18.800	31.300	
4. Tembakau/rokok/korek-api.	39.200	—.—	20.600	6.500	11.700	2.000	
5. Bumbu-bumbu/rempah-rempah.	26.700	9.500	25.800	1.600	26.300	2.000	
6. Obat-obatan/bahan-bahan chemisch.	2.000	2.000	—.—	—.—	—.—	4.000	
7. Bahan-bahan batik/kulit dan sebagainja.	—.—	—.—	2.276	—.—	—.—	—.—	
8. Bahan-bahan pakaian	1.050	—.—	—.—	2.000	—.—	—.—	
9. Bahan pembangunan.	18.200	5.100	47.090	19.350	19.500	78.200	
10. Kertas/alat-alat pembungkus.	5.820	3.250	6.300	500	500	—.—	
11. Prabot rumah-tangga/kantor/sekolah	4.800	3.500	54.100	40.250	7.750	14.550	
12. Alat-alat perusahaan/onderdeel-onderdeel	4.500	7.450	4.500	5.300	4.500	—.—	
13. Barang-barang klontong.	1.300	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	
14. Lain-lain.	16.000	1.500	6.500	12.905	18.750	3.500	
Djumlah:	308.397	129.765	395.731	220.161	270.095	311.670	

BARANG - BARANG JANG MASUK DI JOGJAKARTA DALAM TENGAH TAHUN KE - II 1951.

Masuk:

Golongan matjam barang :	Djuli	Augt.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.	Ket.
1. Bahan makan/sajuran/buah-buahan.	14.400	16.150	83.525	50.350	32.700	55.091	Hitungan dalam kg.
2. Gula/teh/kopi dan sebagainja.	3.450	41.659	11.574	22.097	16.700	380.329	
3. Minjak/sabun/areng/kaju bakar.	2.700	41.000	96.577	88.819	141.275	173.258	
4. Tembakau/rokok/korek-api.	500	2.500	3.500	2.500	—.—	—.—	
5. Bumbu-bumbu/rempah-rempah.	3.200	—.—	7.950	11.950	7.200	4.300	
6. Obat-obatan/bahan-bahan chemisch.	3.500	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	
7. Bahan-bahan batik/kulit dan sebagainja.	25.500	10.200	23.250	10.430	23.000	13.900	
8. Bahan-bahan pakaian.	6.100	4.000	9.000	20.200	2.000	—.—	
9. Bahan pembangunan.	24.900	26.700	19.500	15.300	41.950	16.300	
10. Kertas/alat-alat pembungkus.	500	6.500	150	7.110	31.700	4.200	
11. Prabot rumah-tangga/kantor/sekolah.	—.—	4.250	500	4.300	1.700	6.100	
12. Alat-alat perusahaan/onderdeel-onderdeel.	3.000	2.600	—.—	2.500	—.—	2.500	
13. Barang-barang klontong.	33.250	14.450	—.—	1.200	5.000	—.—	
14. Lain-lain.	13.750	14.000	3.350	9.500	8.600	4.400	
Djumlah:	134.750	184.009	258.876	251.286	311.825	660.378	

BARANG - BARANG JANG KELUAR DARI JOGJAKARTA DALAM TENGAH TAHUN KE - I 1952

Keluar:

Golongan matjam barang :	Djanuari	Pebruari	Maret	April	Mei	Djuni	Ket.
1. Bahan makan/sajuran/buah-buahan.	48.125	66.400	105.480	137.482	228.524	214.485	Hitungan dalam kg.
2. Gula/teh/kopi dan sebagainja.	17.604	44.300	62.540	16.100	99.271	55.724	
3. Minjak/sabun/areng/kaju bakar.	3.500	14.000	5.450	47.100	64.200	48.825	
4. Tembakau/rokok/korek-api.	—.—	—.—	4.500	5.500	15.500	—.—	
5. Bumbu-bumbu/rempah-rempah.	—.—	2.000	—.—	8.800	10.400	16.450	
6. Obat-obatan/bahan-bahan chemisch.	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	
7. Bahan-bahan batik/kulit dan sebagainja.	5.000	—.—	700	—.—	7.600	—.—	
8. Bahan-bahan pakaian.	—.—	—.—	500	—.—	—.—	144	
9. Bahan pembangunan.	7.000	56.250	37.050	36.900	52.150	24.100	
10. Kertas/alat-alat pembungkus.	2.600	100	3.230	8.880	19.380	30.230	
11. Prabot rumah tangga/kantor/sekolah.	4.000	12.260	4.350	1.505	25.500	27.025	
12. Alat-alat perusahaan/onderdeel-onderdeel	2.500	—.—	8.000	5.500	2.500	1.590	
13. Barang-barang klontong.	—.—	—.—	—.—	—.—	85.000	5.750	
14. Lain-lain.	—.—	6.500	250	—.—	13.500	—.—	
15. Tambahan traject tetap Jogja – Semarang jang djuga mengangkut barang-barang seperti diatas.	—.—	—.—	—.—	—.—	263.244	294.477	
Djumlah :	90.329	201.810	232.050	267.767	886.769	718.800	

BARANG-BARANG JANG MASUK DI JOGJAKARTA DALAM TENGAH TAHUN KE-I 1952.

Masuk:

Golongan matjam barang :	Djanuari	Pebruari	Maret	April	Mei	Djuni	Ket.
1. Bahan makan/sajuran/buah-buahan.	49.300	67.100	108.400	94.590	140.117	139.568	Hitungan dalam kg.
2. Gula/teh/kopi dan sebagainja.	55.100	45.500	96.533	48.000	101.272	40.320	
3. Minjak/sabun/areng/kaju bakar.	27.250	31.200	30.410	30.500	115.404	116.850	
4. Tembakau/rokok/korek-api.	—.—	—.—	—.—	3.000	3.500	1.500	
5. Bumbu-bumbu/rempah-rempah.	—.—	—.—	8.400	11.000	10.450	18.400	
6. Obat-obatan/bahan-bahan chemisch.	—.—	—.—	—.—	3.000	2.500	—.—	
7. Bahan-bahan batik/kulit dan sebagainja.	5.500	10.500	35.000	3.500	22.485	12.000	
8. Bahan-bahan pakaian.	6.000	6.500	22.200	17.000	21.200	18.800	
9. Bahan pembangunan.	12.500	13.400	22.000	47.400	85.675	42.600	
10. Kertas/alat-alat pembungkus.	—.—	15.300	22.700	10.254	12.345	9.500	
11. Prabot rumah-tangga/kantor/sekolah.	—.—	4.800	4.000	750	25.000	11.500	
12. Alat-alat perusahaan/onderdeel-onderdeel.	—.—	—.—	5.000	11.500	17.700	6.567	
13. Barang-barang klontong.	9.500	—.—	—.—	12.000	29.000	1.500	
14. Lain-lain.	3.500	3.500	—.—	3.000	5.230	6.500	
15. Tambahan traject tetap Jogja – Semarang jang djuga mengangkut barang-barang seperti diatas.	—.—	—.—	—.—	—.—	235.401	329.605	
Djumlah :	168.650	197.800	361.643	295.494	827.279	755.210	

BARANG - BARANG JANG KELUAR KOTA DALAM LINGKUNGAN DAERAH JOGJAKARTA MARET S/D DJUNI 1952

Keluar:

Golongan matjam barang :	Maret	April	Mei	Djuni	Keterangan
1. Bahan makan/sajuran/buah-buahan.	31.300	30.731	27.135	50.798	Hitungan dalam kg.
2. Gula/teh/kopi dan sebagainja.	3.400	400	2.500	500	
3. Minjak/sabun/areng/kaju bakar.	25.250	54.100	48.480	19.230	
4. Tembakau/rokok/korek-api.	—.—	—.—	—.—	—.—	
5. Bumbu-bumbu/rempah-rempah.	6.500	4.000	9.175	4.500	
6. Obat-obatan/bahan-bahan chemisch.	—.—	1.000	—.—	—.—	
7. Bahan-bahan batik/kulit dan sebagainja	—.—	—.—	—.—	—.—	
8. Bahan pakaian.	—.—	—.—	—.—	—.—	
9. Bahan pembangunan.	8.000	23.885	18.000	35.775	
10. Kertas/alat-alat pembungkus.	—.—	—.—	—.—	—.—	
11. Prabot rumah tangga/kantor/sekolah.	5.250	3.000	—.—	—.—	
12. Alat-alat perusahan/onderdeel-onderdeel.	—.—	—.—	250	2.000	
13. Barang-barang klontong.	2.200	—.—	1.500	—.—	
14. Lain-lain.	1.000	—.—	—.—	—.—	
Djumlah:	82.900	117.116	107.040	112.803	

BARANG - BARANG JANG MASUK DARI LUAR KOTA DALAM LINGKUNGAN DAERAH JOGJAKARTA MARET S/D DJUNI 1952.

Masuk:

Golongan matjam barang :	Maret	April	Mei	Djuni	Keterangan
1. Bahan makan/sajuran/buah-buahan	28.636	28.824	23.335	85.880	Hitungan dalam kg.
2. Gula/teh/kopi dsb.	12.150	5.000	—.—	2.000	
3. Minjak/sabun/areng/kaju bakar.	179.750	252.920	261.800	265.200	
4. Tembakau/rokok/karek-api.	—.—	—.—	—.—	850	
5. Bumbu2/rempah2.	2.000	3.000	—.—	—.—	
6. Obat-2an/bahan2 chemisch.	—.—	—.—	—.—	—.—	
7. Bahan2 batik/kulit dsb.	—.—	—.—	2.500	—.—	
8. Bahan pakaian.	—.—	—.—	—.—	—.—	
9. Bahan pembangunan.	29.000	59.550	88.600	47.000	
10. Kertas/alat2 pembungkus.	120	1.445	1.760	4.565	
11. Prabot rumah tangga/kantor/sekolah.	—.—	—.—	3.000	—.—	
12. Alat2 perusahaan/onderdeel2.	3.000	2.000	—.—	—.—	
13. Barang2 klontong.	—.—	—.—	—.—	—.—	
14. Lain-lain.	3.350	5.800	—.—	—.—	
Djumlah:	258.006	358.539	380.995	405.495	

Adapun djurusan-djurusan jang mendjadi tudjuan dan asal barang tersebut dikirim atau diterima, disini dapat kita sebutkan bahwa kebanjakan jang lewat transport-onderneming sebagian besar hanja dengan tempat-tempat atau kota-kota di Djawa Tengah, jaitu Delanggu, Muntilan, Solo, Munggi, Kutoardjo, Pijungan, Wonosari, Klaten, Kedungdjati, Semarang, Wates, Gombong, Magelang, Blitar (Djawa Timur), Brosot, Temanggung, Wonosobo, Gombong, Purworedjo, Tempel, Kebumen, Bendungan, Tjongot, Temon, Palihan, Bagelen, Ngandjuk, (Djawa Timur) Kutowinangun, Sragen, Sentolo, Kalasan, Purwokerto, Prambanan, Pakem, Gamping, Bodjonegoro (Djawa Timur), Djakarta (Djawa Barat), Borobudur, Plajen, Malang, Pati, Pedan, Gentan, Wonopeti, Tjilatjap, Gondangwinangun dan masih banjak lagi.

Adapun barang-barang jang termasuk dalam kolom golongan matjam barang itu ialah :

1. Beras, kedele, ketela, gaplek, katjang, tepung, gadum, kuweh-kuweh, roti, biscuit, emping, trigu, sajuran, buah-buahan.
2. Gula pasir, gula djawa, gula batu, gula aren, melk, minum-minuman, teh, kopi, stroop dan lain-lain.
3. Minjak tanah, minjak widjen, djarak, minjak kelapa, minjak kelapa sawit, sabun-sabun tjutji, sabun mandi, areng, kaju bakar, dan lain-lain.
4. Tembakau, rokok, korek-api dan lain-lain.
5. Trasi, garam, ragi, rempah-rempah, ebi, empon-empon, djamu-djamu djawa, dan lain-lain.
6. Obat-obatan dari luar negeri, caustic soda, dan barang-barang chemisch lainnja.
7. Bahan-bahan batik a.l. malam, soga, tingi, wenter, gondorukem, sari kuning, blendok, kulit sapi dan lain-lain.
8. Bahan-bahan pakaian, dari barang tekstil, lawe, benang, kain-kain, sarong-sarong, tjita-tjita dan lain-lain.
9. Bahan pembangunan, dari pasir, krikil, semen, kaju djati, bahan-bahan besi, bambu, katja, tjet, gamping dan lain-lain.
10. Alat-alat pembungkus, drum kosong, karung goni, kantong gandum, kertas-kertas koran dan lain-lain.
11. Prabot rumah tangga untuk orang pindah rumah, alat kantor tulis-menulis, alat sekolah, medja-medja, bangku-bangku dan lain-lain.
12. Alat-alat perusahaan, mesin - mesin, alat - alat besi, onderdeel-onderdeel, mesin, auto, sepeda dan lain-lain.
13. Barang-barang klontong, ialah barang-barang dagangan jang biasa didjual ditoko-toko dan lain-lain.
14. Lain-lain ialah ada besi tua, dan sebagainja jang tidak termasuk dalam kolom itu.

Djumlah barang-barang jang keluar masuk dalam Kota Jogjakarta dengan hitungan tiap bulan dalam berat kg. baik jang berupa barang dagangan maupun barang perseorangan, sudah dapat membajangkan ramainja perhubungan perdagangan.

Akan tetapi angka-angka jang tertulis dimuka itu masih sangat ketjil bila tidak digabungkan dengan djumlah angka-angka barang jang diangkut dengan Kereta-api, dan dalam soal pengangkutan sesungguhnja Kereta-apilah satu-satunja alat pengangkut jang mempunjai capaciteit jang terbesar.

Disebelah ini kita tundjukkan lebih banjak lagi barang-barang jang keluar dan masuk didaerah Jogjakarta dengan lewat angkutan Kereta-api, dengan hitungan tiap bulan dalam berat ton.

BARANG-BARANG JANG DIKIRIM DAN DITERIMA DI JOGJAKARTA DENGAN KERETA API DALAM TENGAH TAHUN KE-II 1951.

Keluar:

Matjam kiriman	Djuli	Agustus	Sept.	Okt.	Nop.	Des.	Keterangan.
1. Kiriman barang hantaran.	511	1.209	851	945	1.178	55	Hitungan dalam ton (1.000 kg).
2. Kiriman barang biasa.	1.137	1.368	656	1.161	807	134	
3. Bagase.	105	114	230	289	272	101	
Djumlah:	1.753	2.681	1.737	2.395	2.257	290	

N. B.

Kiriman barang hantaran = bestelgoed.
Kiriman barang biasa = vrachtgoed.
Bagase = barang-barang pasar sajur-sajuran.

Masuk:

Matjam kiriman	Djuli	Agustus	Sept.	Okt.	Nop.	Des.	Keterangan.
1. Kiriman barang hantaran.	73	124	143	153	170	109	Barang masuk dengan bagase tidak ditjatat.
2. Kiriman barang biasa	4.011	4.747	4.637	6.008	6.739	—.—	
3. Bagase	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	
Djumlah:	4.084	4.971	4.780	6.161	6.909	109	

BARANG-BARANG JANG DIKIRIM DAN DITERIMA DI JOGJAKARTA DENGAN KERETA API DALAM TENGAH TAHUN KE-I 1952.

Keluar:

Matjam kiriman.	Djan.	Pebr.	Mrt.	April	Mei	Djuni	Keterangan :
1. Kiriman barang hantaran.	912	782	894	789	62	476	Hitungan dalam ton. (1.000 kg).
2. Kiriman barang biasa.	761	748	190	289	472	855	
3. Bagase.	132	88	72	91	117	123	
Djumlah:	1.805	1.618	1.156	1.169	651	1.454	

Masuk:

Matjam kiriman.	Djan.	Pebr.	Mrt.	April	Mei	Djuni	Keterangan :
1. Kiriman barang hantaran.	140	139	122	104	68	16	Barang masuk dengan bagase tidak ditjatat.
2. Kiriman barang biasa.	1.117	—.—	6.779	4.852	5.155	5.347	
3. Bagase.	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	
Djumlah:	1.257	139	6.901	4.956	5.223	5.363	

BAHAN - BAHAN GUNA MENJUSUN BAB :
IV. Membangun Ekonomi Nasional.

didapat dari :

1. Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Djawatan Kereta Api Inspeksi VI.
3. Djawatan Angkutan Motor (D.A.M.R.I.) Jogjakarta.
4. Djawatan P.T.T. dan Radio P.T.T.
5. Djawatan Transmigrasi Rayon Daerah Istimewa Jogjakarta.
6. Djawatan Koperasi.
7. Djawatan Kehutanan Daerah Istimewa Jogjakarta.
8. Djawatan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri, Perindustrian dan Koperasi.
9. Kantor B.R.N. Tjabang Jogjakarta.
10. Kantor Pengairan Daerah Istimewa Jogjakarta.
11. Kantor Inspeksi Lalu-Lintas Daerah Istimewa Jogjakarta.
12. Kepolisian Bagian Lalu-Lintas.
13. Jajasan bekas pedjuang „Berdjuang".
14. Madjallah Dirgahaju.
15. Pemimpin Redaksi Madjallah Ekonomi.
16. R. Sudjalmo dari Djawatan Pertanian Daerah Istimewa Jogjakarta.
17. Dr. Sumitro dari Djawatan Kehewanan Daerah Istimewa Jogjakarta.
18. K.R.T. Wirobumi dari Djawatan Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta.
19. R. Tjipto Adinugroho dari Bank Rakjat Indonesia Jogjakarta.

*
* *

Exposisi ekonomi di Kepatihan Jogjakarta. Hasil keradjinan menarik perhatian Presiden Soekarno dan bekas Presiden Pilipina Quirino, waktu berkundjung di Jogjakarta.
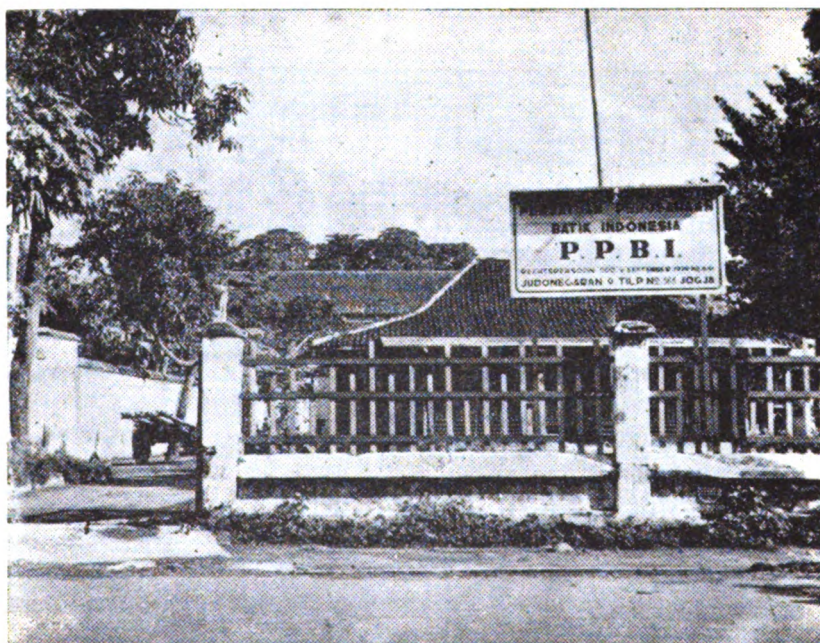
Persatuan Perusahaan Batik Indonesia (P. P. B. I.) salah satu koperasi batik jang terbesar di Jogjakarta.
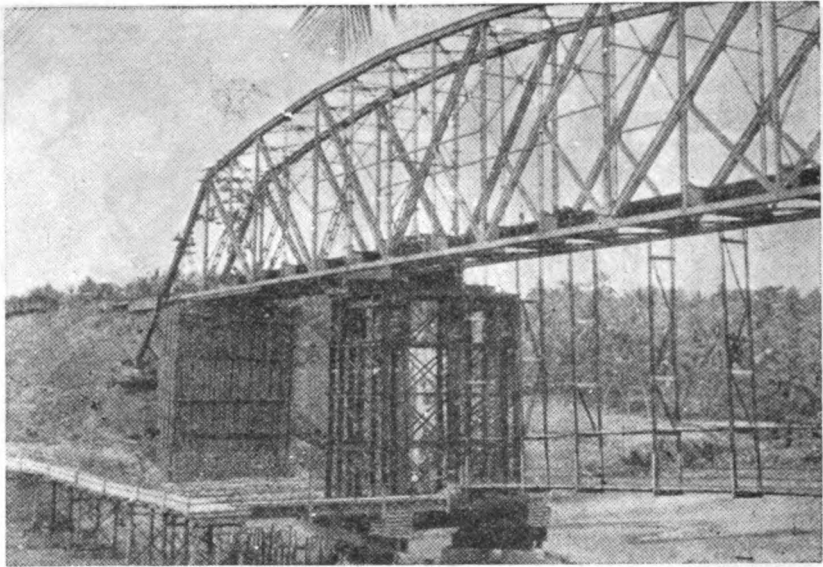
Djembatan kereta api Progo jang sangat penting untuk lantjarnja perhubungan sedang dibangun.
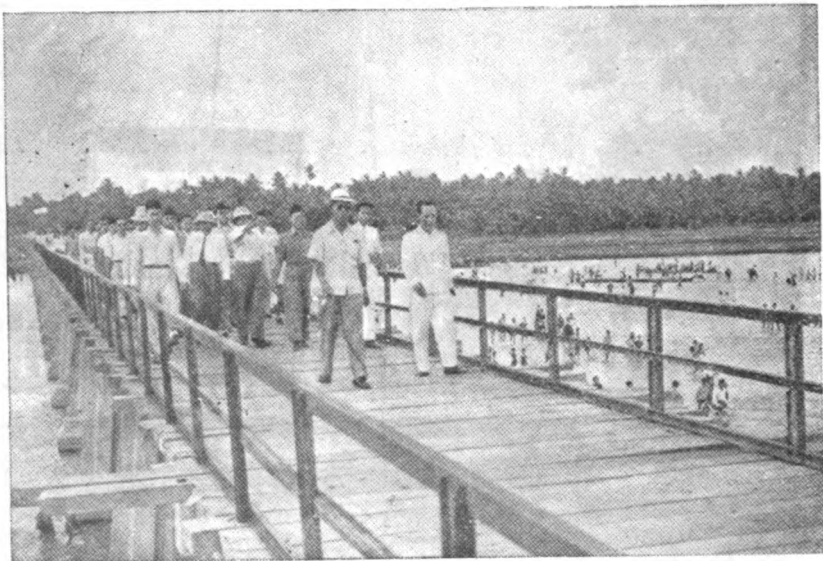
Dibukanja djembatan Brosot, kembalilah hubungan antara Kulon Progo dan Bantul dengan lantjar.
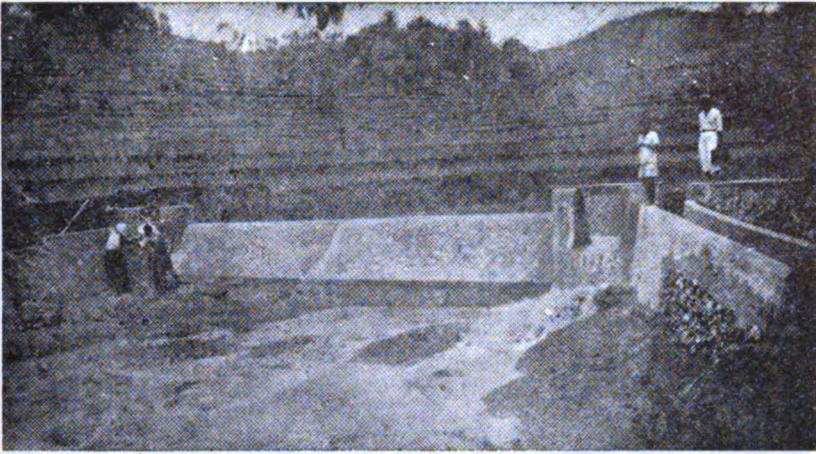
Bendungan Semojo, Kap. Patuk, Kabupaten Gunung Kidul.

Air dari kali Progo dialirkan melalui bendungan Kalibawang.
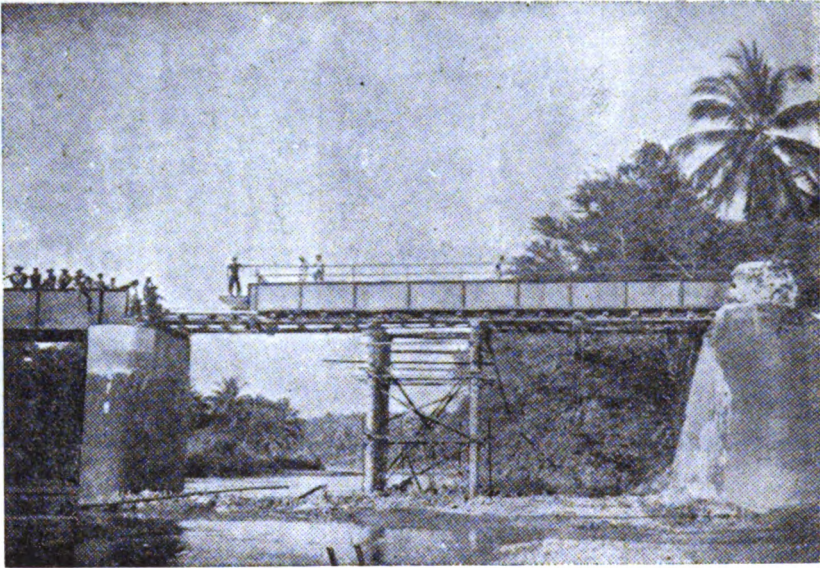
Djembatan Dajakan sedang diperbaiki.
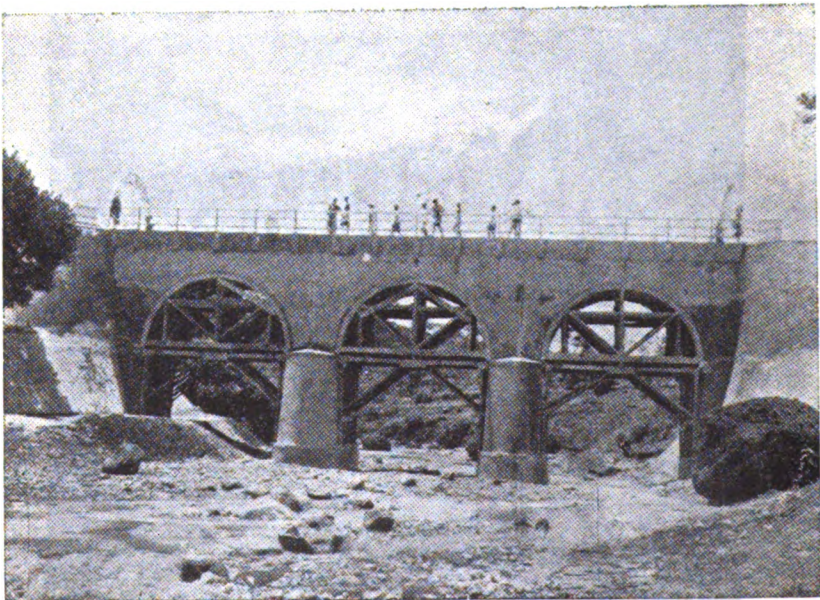
Djembatan Pentung didjalan Jogja — Wonosari antara km 19 — 20 telah ***selesai dibangun.***
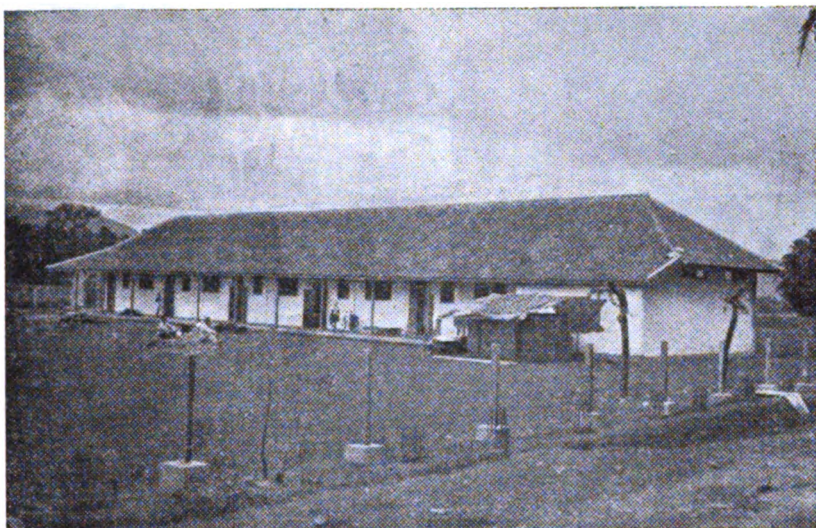
Gedung sekolah rakjat di Delegan Kap. Pijungan jang waktu clash ke II dirusak, kini telah dibangun lagi.
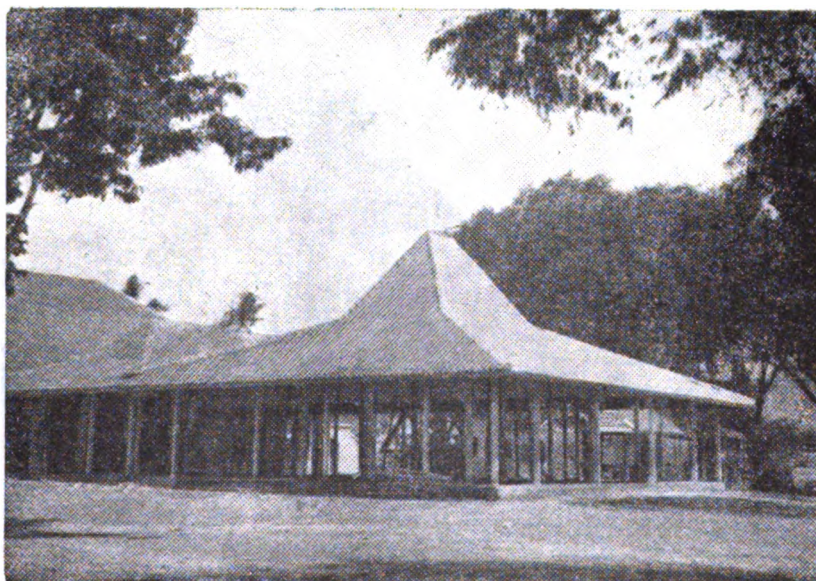
Rumah bupati Wonosari telah selesai dibangun.
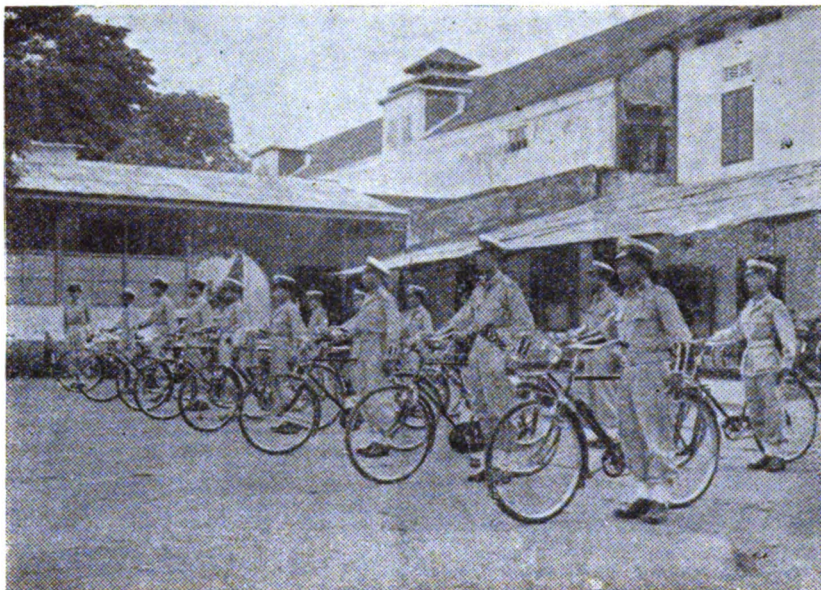
Anggauta Polisi Negara siap melakukan tugasnja.
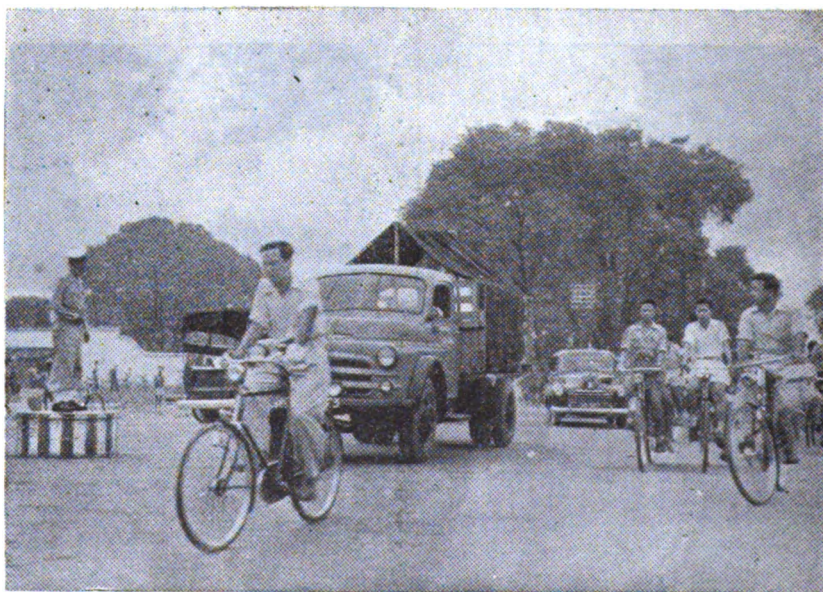
Pendjagaan lalu - lintas salah satu kewadjiban penting dari polisi.
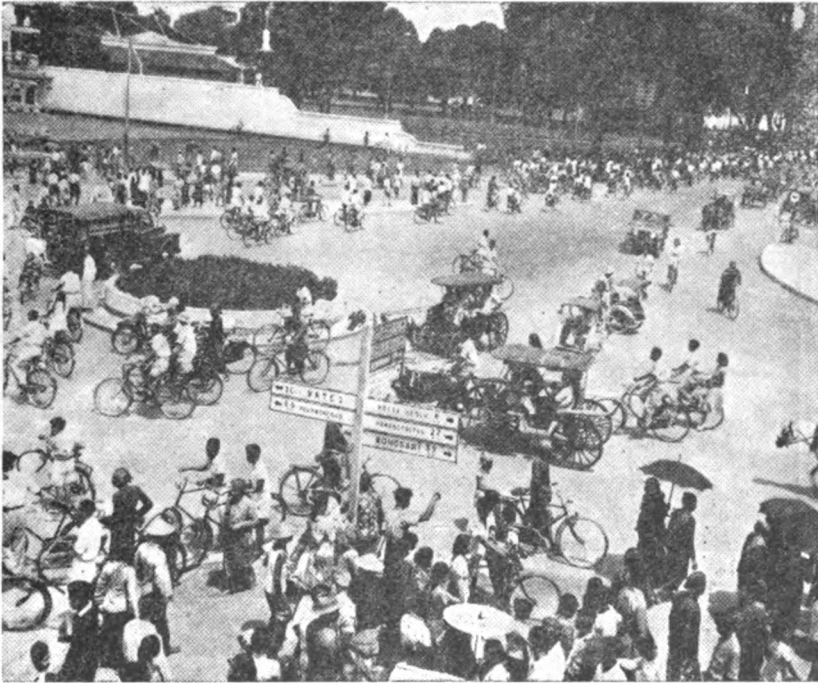
Keadaan lalu - lintas di Jogjakarta kian hari kian tambah ramai.
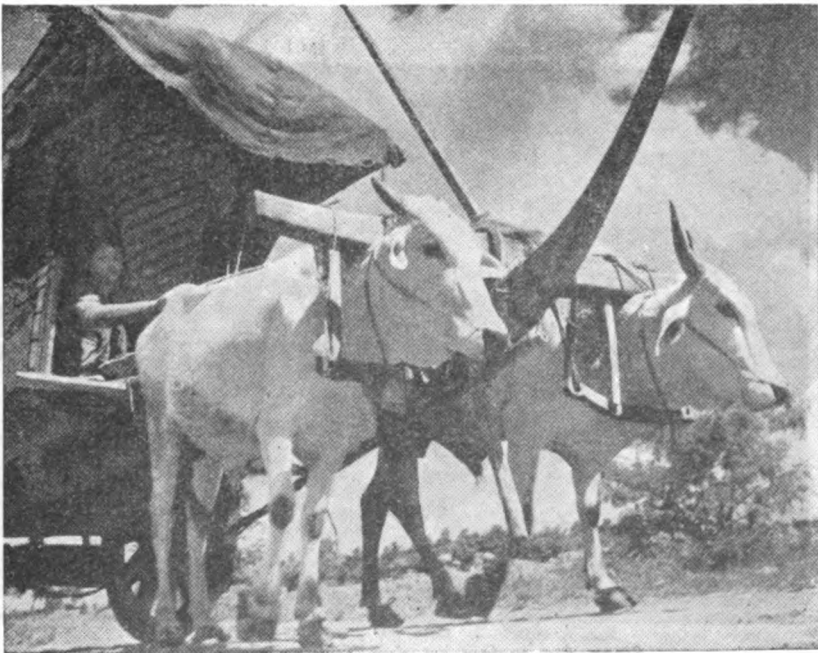
Grobag adalah alat pengangkutan jang primitif, tetapi berdjasa besar sebelum alat pengangkutan modern tjukup tersedia.
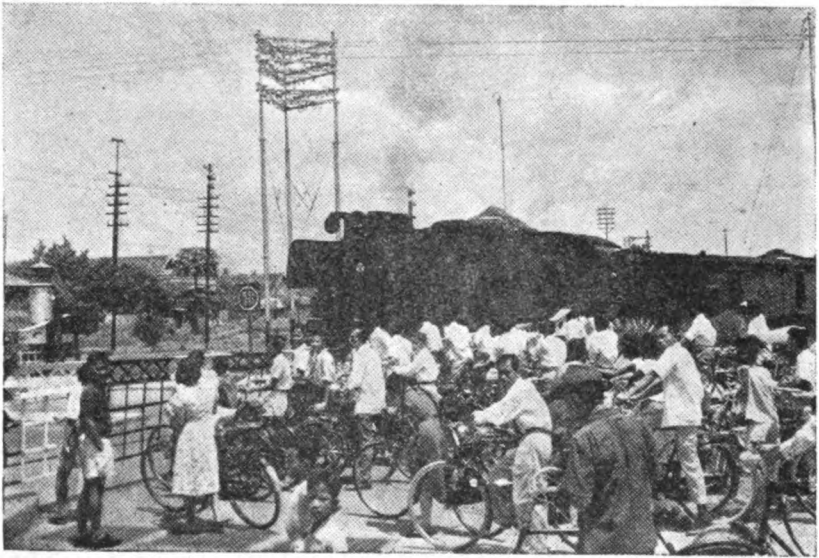
Kereta - Api merupakan alat pengangkutan dan perhubungan jang vital.
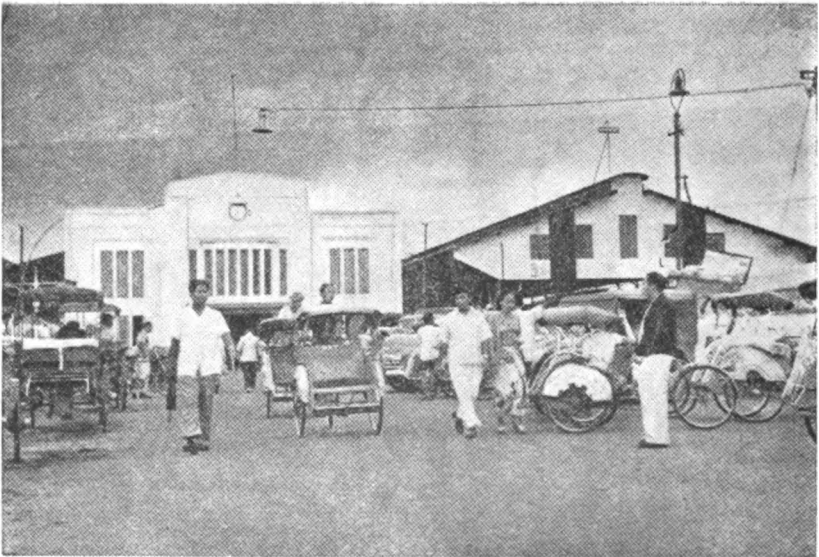
Siang dan malam setasiun Tugu selalu ramai.

Ramainja lalu lintas perhubungan di Jogja dapat dilihat dari banjaknja bus - bus jang datang dan pergi di Setasiun bus ini.
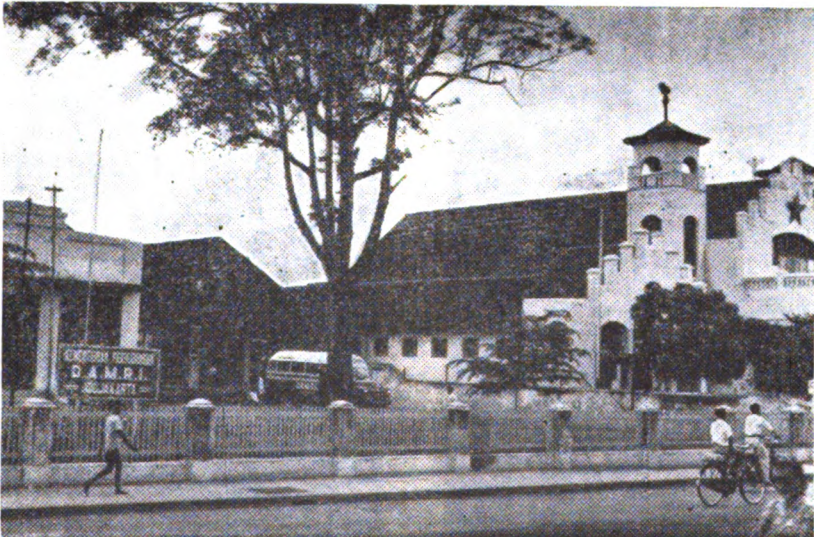
Kantor Damri jang terletak di Tugu Kidul.
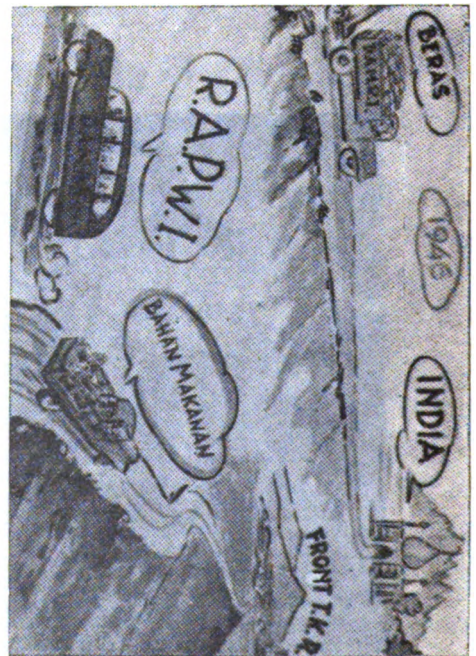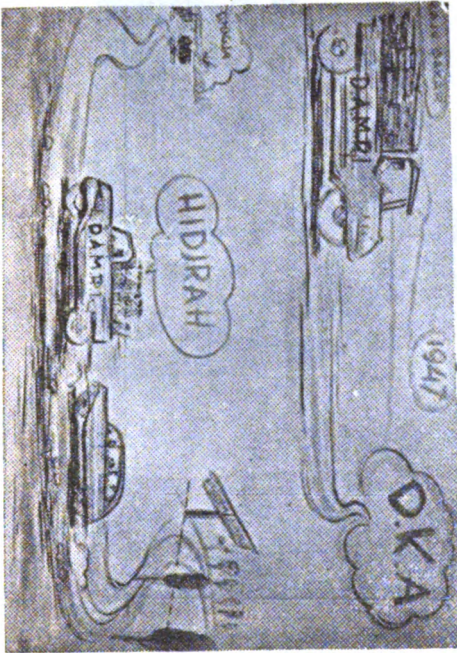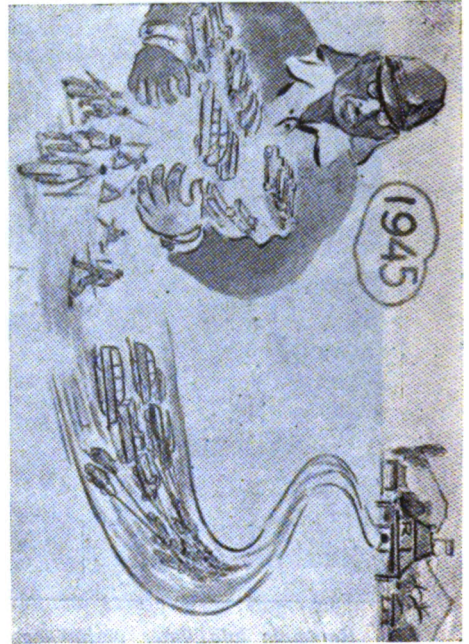
Perdjuangan Damri selama revolusi.
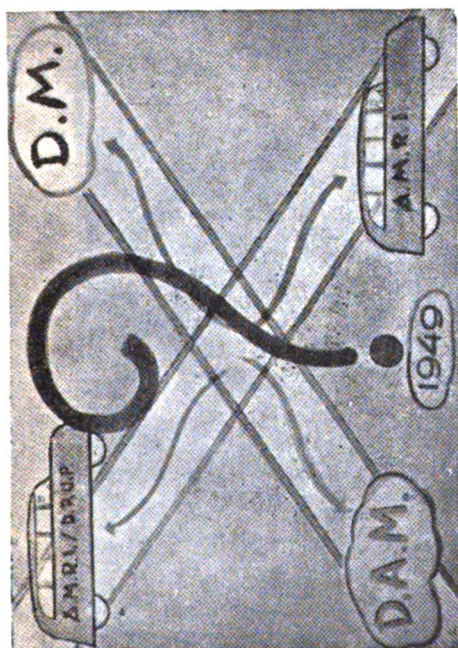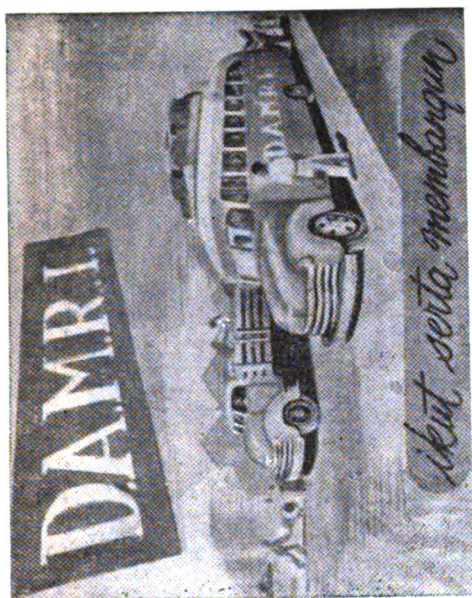
Damri turut serta membangun.
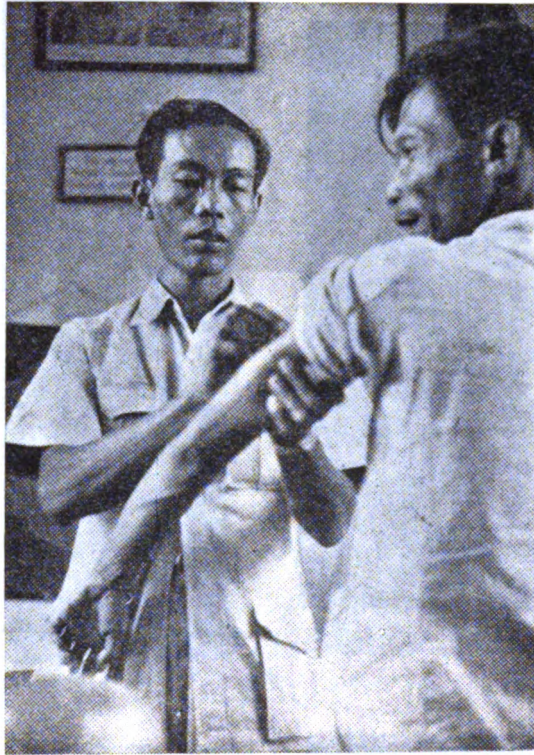
Para transmigran sebelum berangkat ketempat jang baru kesehatan harus diperhatikan.

Para transmigran siap untuk berangkat.

Paberik besi Watson telah berganti nama „Perbedij".

Tjerutu - tjerutu hasil dari paberik Taru Martani sedang dimasukkan dalam kotak - kotak sebelum dikirim kepelbagai pendjuru.

Membuka tanah untuk perlombaan padi Kapanewon Lendah.

Menjikat (nggaru Dj.)

Pak tani sedang giat mengolah tanahnja, dan berusaha agar mendapatkan hasil jang memuaskan.

Hasil padi jang memuaskan.

Tanaman papaja di kebun Wonotjatur.

Tanaman djeruk di kebun Wonotjatur.

Mengirimkan bibit buah - buahan untuk rakjat di Kabupaten Kulon Progo.
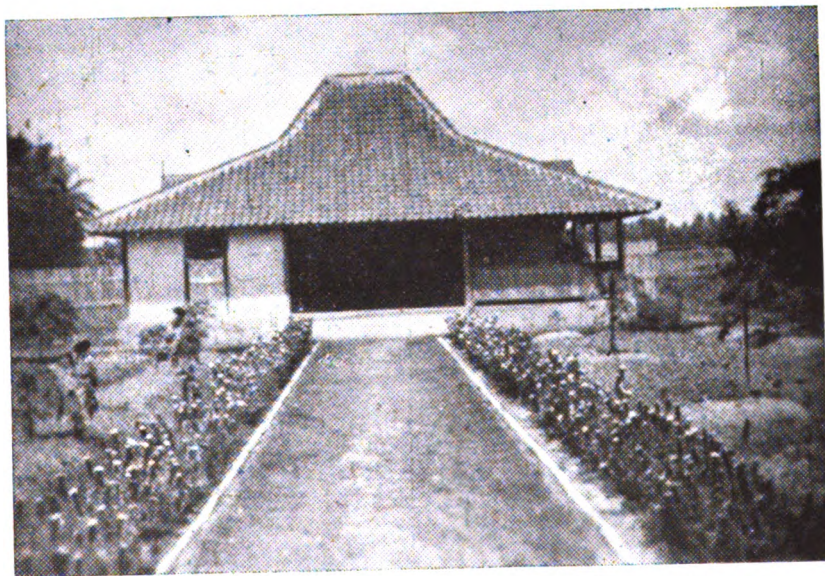
Balai Pendidikan Masjarakat Desa di Sewon Kabupaten Bantul.
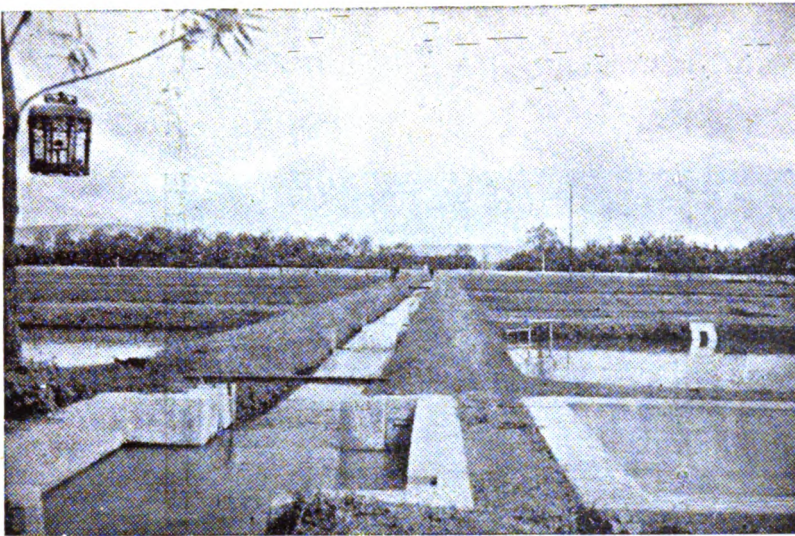
Pemandangan kolam di Wonotjatur

Karper dari kolam Sanden
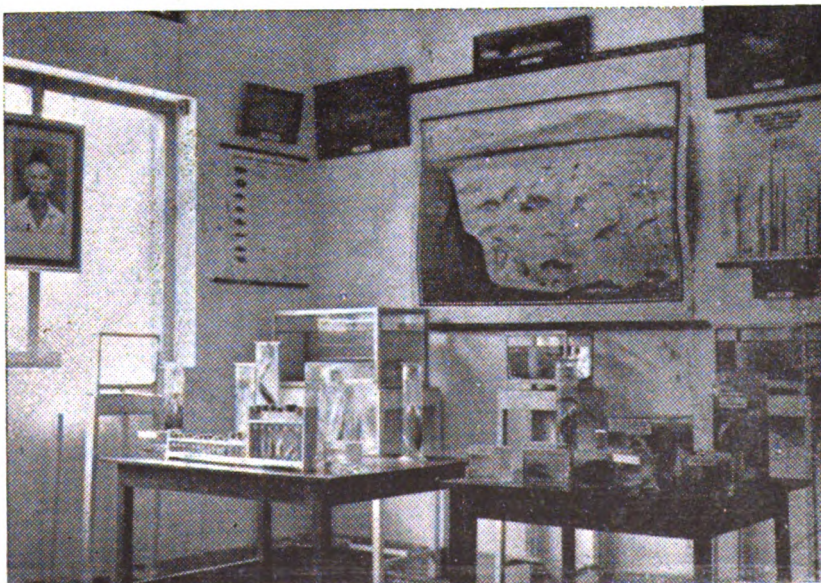
Exposisi perikanan di Aloon-aloon.
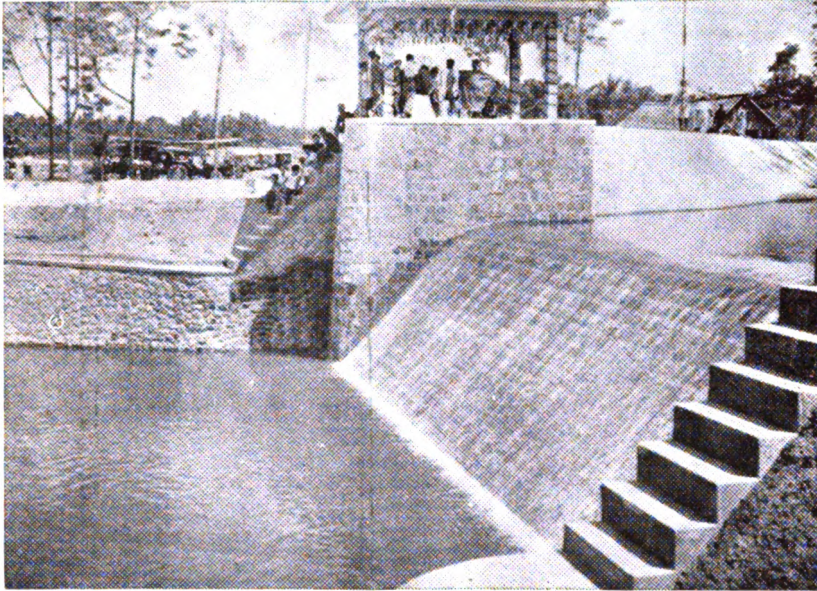
Air adalah sjarat hidup utama bagi petani. Pembangunan dam di Pijungan tak dilupakan oleh Pemerintah Daerah.

Petani mengerti kebutuhan, jalah air. Dengan tidak menunggu perintah, mereka mulai menjalurkan air selokan kesawahnja.

Dengan alat jang sederhana, rakjat di Kalibawang bekerdja keras membuat selokan.

Tentara dan rakjat bersatu, dibuktikan dengan adanja gotong rojong membuat selokan di Kalibawang.
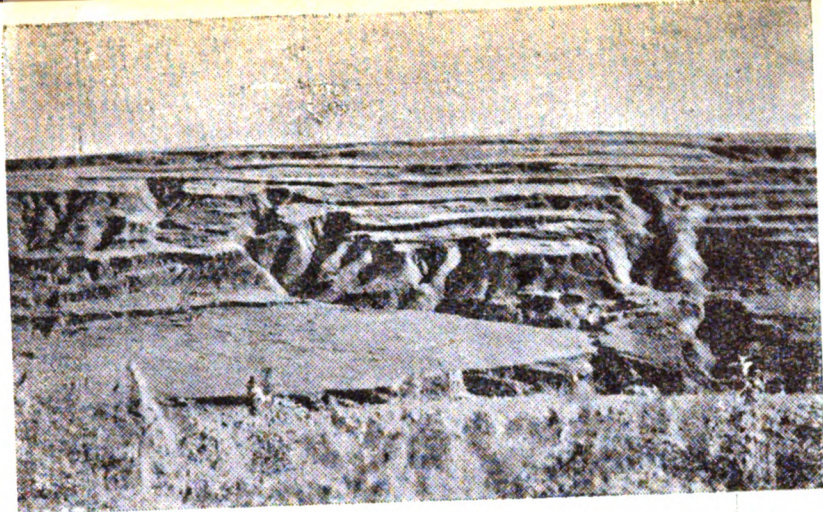
Tanah larut menjerupai parit didesa Randusari, daerah Kabupaten Gunung Kidul.

Pada tanggal 22 - 12 - 1952 diperbatasan ***Daerah Istimewa Jogjakarta*** *dan* ***Propinsi Djawa Tengah*** *dilangsungkan peresmian penjebaran benih lamtara oleh* ***Sri Paku Alam*** *dan* ***Residen Salamun*** *jang mewakili* ***Gubernur Djawa - Tengah.***

Usaha-usaha Penerangan. Pasar malam atau Sekaten merupakan tempat-tempat jang baik untuk usaha-usaha penerangan dilapangan perekonomian.

Kesatuan Penerangan Mobil Jogjakarta membuka stand pula didalam Sekaten, untuk usaha-usaha penerangan.
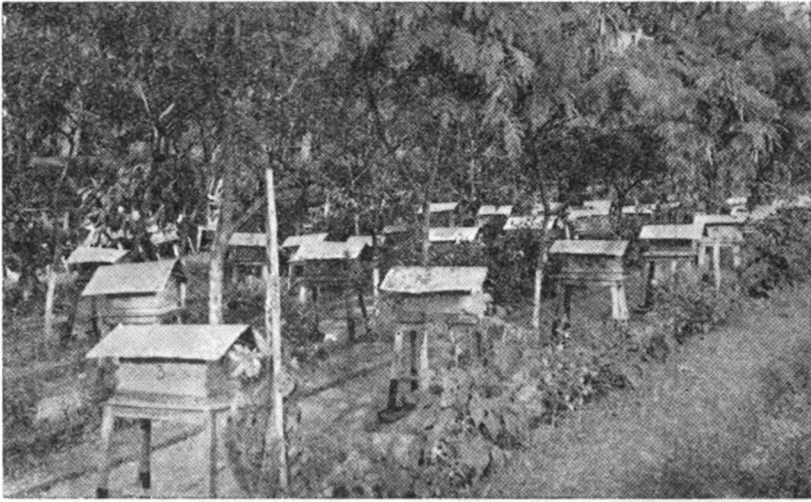
Kebun lebah kepunjcan Djawatan Pertanian.

Memberi peladjaran perlebahan kepada para Mantri Tani bagian Perlebahan.

Taman Unggas di Aloon - aloon Utara.
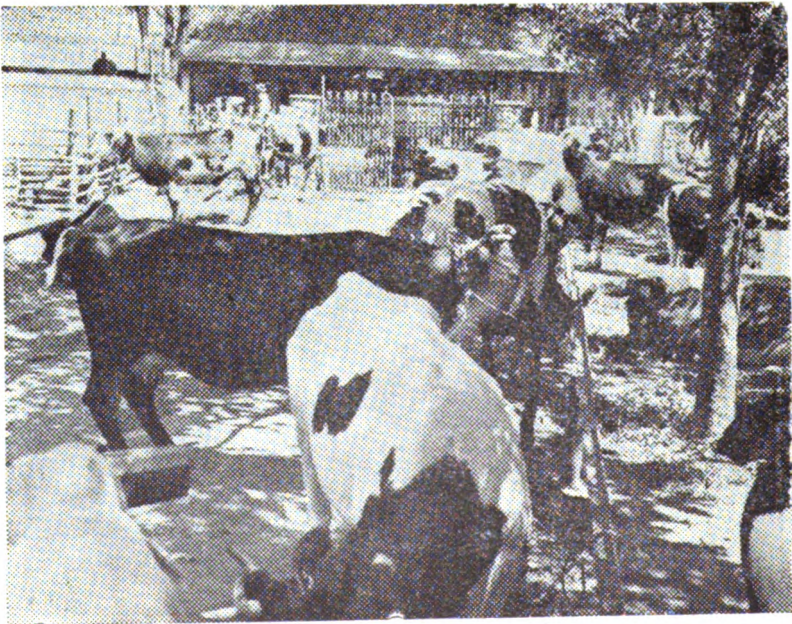
Sapi-sapi jang menghasilkan susu selalu diperiksa kesehatannja.

Gedung Bank Rakjat Indonesia di Terban Taman Jogjakarta.

Gedung Bank Negara Jogjakarta di Djalan Pangurakan.

Gedung Bank Indonesia tjabang Jogjakarta di Djalan Setjodiningratan.
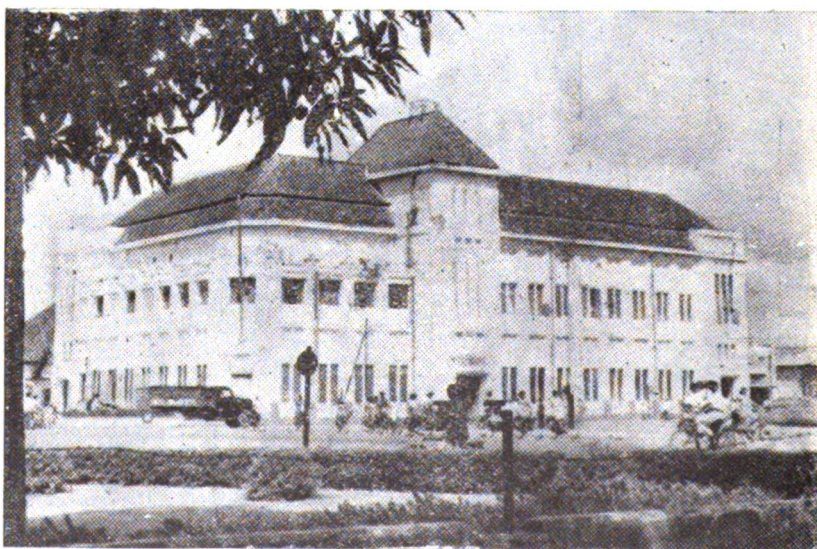
Bank Tabungan Pos menempati gedung tersebut diatas diudjung sebelah kanan.
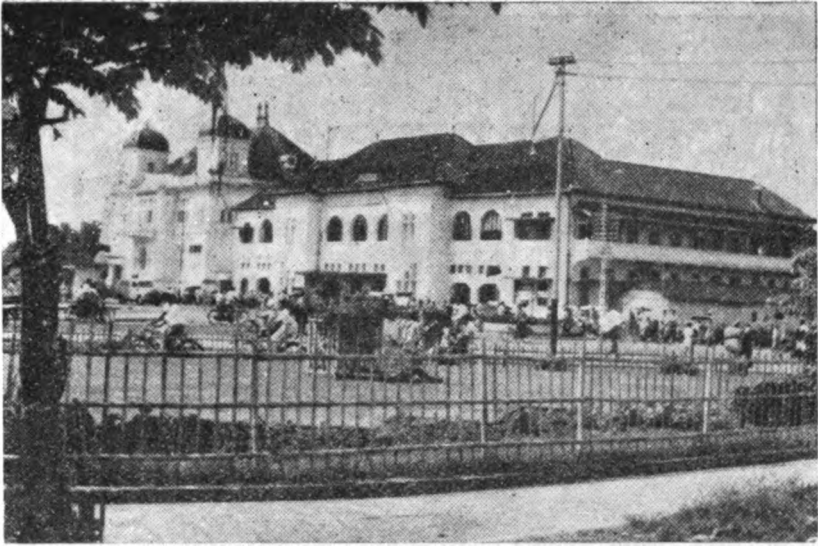
Gedung P. T. T. di Jogjakarta.

Gedung Bumi Putera di Djalan Sriwedani Jogjakarta.

Mangaan jang dibeli dari rakjat oleh Jajasan bekas pedjuang „Berdjuang".

Panen tembakau oleh anggauta-anggauta Perbepbsi atas usaha Jajasan bekas pedjuang „Berdjuang".

BAB V:

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MASJARAKAT

1. SEKITAR PERBURUHAN DALAM DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

a. Perkembangan pada umumnja.

PADA perkembangan perburuhan diseluruh Indonesia dapat dikatakan sebagai perkembangan hidup penuh sifat keperwiraan, melopori segala matjam tindakan jang menudju kepada perubahan dari segala bentuk pendjadjahan dibangun mendjadi bentuk kenasionalan.

Dari mulai saat pidjar (vonk) revolusi tertjetus sampai pada saat menghebatnja api revolusi dan sampai pada saat achir-achir ini, dalam soal perburuhan Jogjakarta pegang peranan jang ta' dapat dilupakan, karena daerah jang semungil ini telah mengalami pait-getirnja mendjadi Ibu Kota Republik Indonesia, jang berarti pula mendjadi tempat kelahiran segala tjita-tjita dan aktivitet dalam soal Perburuhan.

Dalam perdjuangan mengangkat sendjata untuk mengenjahkan kekuasaan Pemerintah Djepang, dan mengusir tentara Belanda jang akan kembali mendjadjah Indonesia, golongan buruh merupakan suatu potensi jang tidak ketjil dalam menggerakkan roda revolusi disamping golongan-golongan lain. Sebagai panggilan masa pada saat itu buruh belum tergores batas-batas mana jang madjikan dan mana jang buruh, tetapi hanja kemerdekaan jang terdjalin ditiap-tiap sanubari buruh. Buruh tetap merasa buruhnja, pun madjikan merasa buruh pula.

1945 B.B.I. Dalam perdjuangan revolusi seperti tersebut diatas, disamping golongan lain, maka dari seluruh masjarakat buruh jang berbentuk baik Serikat - serikat Buruh maupun Serikat - serikat Sekerdja, semuanja bersatu dan bergerak dalam bentuk Barisan Buruh Indonesia. Dalam bentuk B.B.I. ini belum kelihatan garis-garis politik dalam golongan buruh, dan pada saat itu tidak dapat dilupakan figuur **Soedarsono** sebagai pendorong dan pimpinan gerakan buruh.

Tetapi dapatlah dianggap sewadjarnja bahwa pada saat itu ada orang jang mentjita-tjitakan adanja garis-garis politik perburuhan jang tertentu dalam B.B.I., karena sebagai badan jang mewakili sebagian besar buruh, harus dapat dan boleh turut menentukan garis-garis politik Pemerintahan. Dan selandjutnja untuk mentjapai tudjuan itu B. B. I. seharusnja tidak hanja berbentuk organisasi sosial sadja, tetapi harus berbentuk kepartaian, disinilah timbulnja tjita-tjita adanja P.B.I. (Partai Buruh Indonesia).

Dengan adanja konperensi buruh seluruh Indonesia jang diadakan pada tanggal 7 Nopember 1945, ini lebih memberikan kenjataan, adanja golongan jang menghendaki supaja B.B.I. dilebur mendjadi Partai Buruh, tetapi masa belum menghendaki adanja kekuatan buruh jang compact untuk mengusir pendjadjahan dari muka bumi Indonesia, maka B.B.I. tetap berdiri dan konperensi buruh di Solo, dapat dianggap sebagai pembulatan tekad dari seluruh buruh Indonesia.

1946 — G.A.S.B.I. (Gabungan Serikat Buruh Indonesia).

Perkembangan gerakan buruh dengan mengikuti perputaran roda revolusi terus berdjalan dengan memupuk segala aktivitet baik kedalam maupun keluar. Bentuk organisasi kian hari harus dapat disesuaikan dengan kehendak masjarakat buruh jang merupakan sebagian besar dari masa revolusi itu. Maka untuk menjesuaikan bentuk organisasi buruh dengan keadaan pada saat itu, psychologis sudah pada tempatnja pergantian nama dari B.B.I. mendjadi G.A.S.B.I, dari nama jang mengandung prinsip kelasjkaran sadja, dirubah atau lebih ditegaskan mendjadi suatu orgaan jang berdasarkan prinsip perburuhan, sungguhpun pada saat itu gerakan buruh djuga masih melangsungkan adanja bagian kelasjkaran dalam organisasinja, ialah L.B.I. (Lasjkar Buruh Indonesia). Dalam pimpinan L.B.I. tidak dapat ditinggalkan pula nama Tasripin sebagai busi, pendorong L.B.I.

Djanuari 1946. Tidak dapat dilupakan pula oleh tiap-tiap buruh jang aktif dalam gerakan organisasinja, ialah dengan terbentuknja **„Persatuan Perdjuangan"** di Purwokerto jang didukung oleh 143 organisasi dan sebagai pengandjurnja adalah **Tan Malaka.**

Dalam perkembangan politik — diplomasi Republik Indonesia, maka Persatuan ini boleh dikatakan sebagai **imbangan** dari politik Pemerintah pada saat itu (Kabinet ke II atau Kabinet Parlementer jang ke I, Perdana Menteri Sutan Sjahrir) jang merupakan politik mentjari djalan aman (kompromi). Dipandang dari sudut untung dan rugi, politik Pemerintah pada saat itu dipandang lemah menghadapi politik Belanda oleh Persatuan Perdjuangan; sebaliknja bila Pemerintah mengambil begitu sadja prinsip dari politik Persatuan Perdjuangan, berarti Pemerintah tidak dapat menjesuaikan diri atau tidak mengetahui gelagad suasana internasional pada saat itu, jang hakekatnja menghendaki perdamaian.

Dengan bubarnja Kabinet Sjahrir jang pertama pada bulan Djuni 1946, dapatlah ditarik kesimpulan, bagaimanakah kekuatan opposisi Persatuan Perdjuangan, jang sebagian besar terdiri dari gerakan buruh.

27 Djuni — 3 Djuli 1946

Bila orang berpendapat atau mengatakan bahwa dalam gerakan buruh sedjak timbulnja Persatuan Perdjuangan jang menentang prinsip perundingan antara delegasi Indonesia dengan delegasi Belanda, ada pergeseran faham dalam anggauta-anggautanja, hal ini tidak mustahil bilamana orang menindjau kepada akibat-akibat jang terdjadi dalam gerakan buruh, setelah terdjadinja peristiwa 27 Djuni, pentjulikan atas diri Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan peristiwa 3 Djuli 1946, atas pertjobaan perebutan kekuasaan terhadap Pemerintah.

Dengan ditangkapnja beberapa orang dari pimpinan buruh diantaranja Sjamsu Harya Udaya, Drs. Danuhusodo dan lain-lain, maka dalam gerakan buruh lebih terasa adanja dua matjam faham jang bertentangan, golongan pertama tetap menentang adanja perundingan dengan Belanda, dan golongan jang kedua mengikuti djedjak politik Pemerintah.

29 Nopember 1946

Gerakan buruh Indonesia sebelum melangkahkan kakinja untuk bersatu dengan federasi buruh seluruh Indonesia, maka sudah selajaknja bahwa buruh Indonesia lebih dahulu menundjukkan persatuannja kedunia luar dengan tergabungnja seluruh gerakan buruh dalam satu badan. Usaha ini dapat dibuktikan dengan lahirnja S.O.B.S.I. pada tanggal 29 Nopember 1946 di Solo atas tergabungnja 2 (dua) gabungan Serikat Buruh jang kuat, ialah G.A.S.B.I. dan G.S.B.V. (Gabungan Serikat Buruh Vak).

Kongres S.O.B.S.I. pertama diadakan di Malang pada tanggal 16 Mei 1947, dengan mendapat perhatian besar dari wakil buruh Luar Negeri, diantaranja Blokzijl (wakil buruh Nederland) dan Cambell (wakil buruh Australia).

Walau konperensi ini dinjatakan tjita-tjitanja S.O.B.S.I. untuk menggabungkan diri bersatu dengan Federasi Buruh seluruh Dunia (World Federation Trade Unions — W.F.T.U.), selandjutnja tjita-tjita ini dapat diudjudkan dengan adanja keputusan konperensi untuk menggabungkan S.O.B.S.I. kepada W.F.T.U. — baru pada tanggal 9 Djuni 1947 S.O.B.S.I. diakui sebagai anggauta W.F.T.U. dalam sidangnja di Praha, dan sebagai utusan S.O.B.S.I. ialah Setiadjid dan Oey Gee Hwat.

18 September 1948 — Madiun affair

Tanggal 11 Agustus Suripno dengan diikuti orang jang mengaku bernama Suparto dan sebetulnja ialah Muso, tiba di Jogja. Dengan kedatangannja Muso ini, semua partai jang tergabung dalam Front Demokrasi Rakjat (F.D.R.), mengalami waktu pantja-roba jang sangat hebatnja. Dalam hal ini S.O.B.S.I. djuga tidak luput dari suasana hangat jang dialami oleh F.D.R., karena S.O.B.S.I. merupakan kekuatan primair dari F.D.R.

Dalam rapat umum di Jogja pada tanggal 22 Agustus tahun 1948, Muso mengadakan tuntutan supaja perundingan dengan Belanda dihentikan, Linggadjati dan Renville berarti mengchianati tudjuan revolusi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selandjutnja Muso menghendaki supaja seluruh Partai jang tergabung dalam F.D.R. mengadakan zelfkoreksi dalam partainja masing-masing — dalam pengumuman zelfkoreksi itu dinjatakan bahwa langkah berunding dengan Belanda, menjetudjui persetudjuan Linggadjati dan Renville adalah keliru. Maka itu mereka sekarang menolak tiap-tiap persetudjuan jang bersifat kompromi.

Dengan keadaan tragis — politik jang dialami oleh F.D.R., retaklah persatuan buruh Indonesia. S.O.B.S.I. telah mulai terlihat warnanja, serikat-serikat buruh jang terdiri dari bermatjam-matjam ideologi ini satu persatu mendjauhkan diri dari S.O.B.S.I., memupuk dan menguatkan serikat-buruhnja menurut kejakinan atau golongan masing-masing.

Tanggal 17 September 1948, Solo diumumkan dalam keadaan bahaja.

Tragis dalam sedjarah politik dan perburuhan Indonesia pada saat itu, lembaran hitam tertjetak dan tergores dalam tiap-tiap sanubari orang Indonesia dari semua golongan, karena tindakan Muso merupakan benih perpetjahan dalam lapangan buruh chususnja dan lapangan politik umumnja.

Setelah adanja peristiwa Madiun, Serikat-serikat Buruh belum sempat untuk melebarkan sajapnja masing-masing, disusul dengan tindakan tentara Belanda untuk melenjapkan Pemerintah Republik Indonesia.

Tanggal 19 Desember 1948, Ibu Kota Republik Indonesia Jogjakarta diduduki tentara Belanda. Untuk sementara waktu gerakan buruh menghentikan aktivitet perburuhannja; perdjuangan bersendjata — gerilja tidak asing bagi masjarakat buruh umumnja.

Setelah kembalinja Pemerintahan Republik Indonesia ke Ibu Kota Jogjakarta tanggal 30 Djuni 1949, sampai pada saat Ibu Kota pindah di Djakarta, sedjarah perburuhan masih sukar untuk ditjari garis perdjalanannja setjara umum.

b. Pemerintah dan Perburuhan

Dalam Negara demokrasi seperti Republik Indonesia ini sudah selajaknja bilamana dari pihak Pemerintah mentjurahkan perhatiannja terhadap soal perburuhan dan perhatian ini tidak merupakan hanja pengawasan jang bersifat politis sadja, tetapi diutamakan pula dalam bentuk sosial. Dan dalam dua sifat pengawasan ini telah dinjatakan dengan keluarnja Undang-undang Kerdja No. 12 tahun 1948 dan Undang-undang pengawasan perburuhan No. 23 tahun 1948, selandjutnja sebagai penjempurnaan disusul dengan keluarnja Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnja sesudah dua Undang-undang tersebut diatas.

Buruh pada umumnja dan Pegawai Negeri chususnja, jang pada hakekatnja merupakan salah suatu konstruksi dalam suatu Negara, tidaklah pada

tempatnja bilamana mereka dibiarkan hidup dan bertumbuh setjara liar dengan tidak diikat dan didjamin nasibnja, terutama bagi sebagian buruh jang bekerdja dibawah kekuatan kapital asing. Undang-undang Kerdja dan Pengawasan Perburuhan sangatlah terasa pentingnja sebagai penghalang atau pengendalian terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak madjikan.

Kantor Penjuluh Perburuhan Daerah Istimewa Jogjakarta

Lepas dari segala soal jang mengenai perselisihan faham antara Kementerian Perburuhan dengan Pemerintah Daerah Istimewa jang terdjadi pada saat naskah ini dibuat, perlu diketahui tentang tugas-tugas jang disampaikan kepada Kantor Penjuluh Perburuhan Daerah Istimewa Jogjakarta, baiklah hal ini dikutip dari Laporan tahunan 1950 jang dikeluarkan oleh kantor Penjuluh Perburuhan tersebut (K. P. P.).

Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta jang menjelenggarakan tugas pekerdjaan mengenai masaalah perburuhan adalah Djawatan Sosial bagian Perburuhan, jang disampingnja tugas perburuhan diserahi pula tugas mengenai Penempatan Tenaga.

Diwaktu Kementerian Perburuhan R. I. membentuk Kantor Pembantu Penjuluh Perburuhan di Jogjakarta, timbul keragu-raguan dalam kalangan saudara-saudara buruh, maka atas kebidjaksanaan Kementerian Perburuhan R.I. dan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, menggabungkan dua instansi tersebut djadi satu jang setingkat dengan propinsi dan diberi nama Kantor Penjuluh Perburuhan Jogjakarta, jang meliputi Kota Besar Jogjakarta dan seluruh daerah Kabupaten dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

Tugas.

Tugasnja meliputi dua urusan :

I Mengenai Urusan Perburuhan Umum.

II Urusan mengenai Penempatan Tenaga.

Menurut Undang-undang no. 3 tahun 1950, Daerah Istimewa Jogjakarta statusnja setingkat dengan Propinsi.

Di Propinsi-propinsi lainnja, Djawatan jang mengurusi tersebut no. I dan II diatas, berdiri sendiri (terpisah) mendjadi dua Djawatan. Tetapi di Daerah Istimewa Jogjakarta dua Djawatan tadi didjadikan satu dengan nama „Djawatan Sosial Bagian Perburuhan Daerah".

Tugas Perburuhan adalah :

a. Mengenai Perburuhan umum.
b. „ Gerakan Buruh.
c. „ Djaminan Sosial dan Kesedjahteraan Buruh.

I. a) **Perburuhan Umum,** menjelenggarakan :

1. Mengetahui overzicht administrasi susunan organisasi-organisasi Buruh dan Perusahaan-perusahaan.
2. Sebagai Badan Penerangan dalam soal Perburuhan.
3. Mendjadi pendorong mendamaikan perselisihan jang terdapat antara Buruh dan Madjikan (termasuk pula pemogokan).

b) **Gerakan Buruh.**

1. Mengandjurkan dan membantu berdirinja Serikat-serikat Buruh.
2. Mengadakan hubungan dengan Serikat Buruh jang telah ada.
3. Mengadakan kursus-kursus soal perburuhan bagi peminat-peminat dari Serikat-serikat Buruh.
4. Usaha lain-lain kearah perbaikan organisasi Serikat Buruh.

c) **Djaminan Sosial dan Kesedjahteraan Buruh.**

1. Mengandjurkan/membantu kearah usaha memperbaiki kesehatan Buruh.

2. Penjelenggaraan penitipan anak-anak Buruh.
3. Membantu sekitar perbaikan perekonomian Buruh (Koperasi, fonds sakit, tundjangan-tundjangan).

II. **Urusan Penempatan Tenaga.**

1. Menjelenggarakan pentjatatan tenaga.
2. Menghubungkan pentjarian tenaga dengan pentjarian pekerdjaan.
3. Menjelenggarakan sokongan penganggur, usaha-usaha lain kearah kesedjahteraan kaum penganggur.
4. Menjelenggarakan pengerahan, pembagian dan pemindahan tenaga.
5. Menjelenggarakan penerangan tentang pemilihan vak pekerdjaan.
6. Menjelenggarakan latihan kerdja untuk mempertinggi deradjat ketjakapan vak dari kaum buruh umumnja dan kaum penganggur serta tenaga muda chususnja.

Bentuk perselisihan dalam lapangan buruh dapat dibagi dalam soal-soal :

a. Penuntutan tambahan upah.
b. Penuntutan tundjangan pada sesuatu saat jang penting bagi Buruh.
c. Terdjadi suatu massa ontslag.
d. Terdjadi pemetjatan seseorang.
e. Perselisihan faham antara Madjikan dengan Serikat Buruhnja.

Tjara mendamaikan : dalam hal ini K.P.P. merupakan suatu Badan Pemisah dengan djalan atas dasar-dasar :

a. Peraturan Pemerintah.
b. Keadaan jang bersifat umum pada saat itu.
c. Meng-kompromikan atas pendapat Madjikan dengan pihak Serikat Buruh atau Buruhnja.
d. Dengan pemeriksaan atas adanja kekuatan ekonomi dalam perusahaan.

Dalam segala hal K. P. P. berusaha permulaan dengan djalan damai, tetapi djika hal ini tidak mungkin barulah dipergunakan kekuasaan Hakim (seperti jang terdjadi pada persengketaan antara Buruh dengan Madjikan Hotel Garuda).

Sementara Statistik.

1. **Perselisihan:** tahun 1950 — 1951 djumlah 111 soal, sebagian besar telah selesai.
2. **Djumlah buruh** pada achir Desember 1951 :

a.	Pertjetakan	13	tempat,	1229	buruh ;
b.	Pertenunan	10	,,	801	,,
c.	Perusahaan	49	,,	3763	,,
d.	Pertundjukan	7	,,	155	,,
e.	Sekolahan	26	,,	2841	,,
f.	Rumah Sakit	16	,,	1297	,,
	Rumah Obat.				
g.	Organisasi	50	,,	21414	,,
	Djumlah :	171	tempat	31500	buruh.

3. **Djumlah Serikat-Sekerdja/Serikat-Buruh achir tahun 1951.**

a.	Pemerintah	—	Vertikal	=	34 badan
b.	Partikelir	—	Vertikal	=	14 badan
c.	Partikelir	—	Lokal	=	15 badan
			Djumlah	:	63 badan

4. Djumlah penawaran/penempatan/penghapusan/sisa tenaga achir tahun 1951 di Jogjakarta

Pendaftaran			Penempatan			Penghapusan			Sisa		
L	W	L + W	L	W	L + W	L	W	L + W	L	W	L + W
13058	1789	14847	459	120	579	469	47	516	12130	1622	137582

5. Kursus jang diselenggarakan Djawatan Penempatan Tenaga tahun 1951 di Jogjakarta

a.	Kader Pertanian	1 th.	murid	54,	lulus	46.	tidak lulus	6
b.	Memegang Buku	1 th.	,,	107.	,,	15.	,, ,,	27
c.	Tk. Besi/Kikir	1 th.	,,	29.	,,	23,	,, ,,	6
d.	Perkebunan	1 th.	,,	86,	,,	—	,, ,,	—
	Djumlah murid			276,	lulus	84,	tidak lulus	41

Djumlah murid pada permulaan terlihat banjak, tetapi selandjutnja karena ada jang mendapat pekerdjaan atau keluar dari kursus, maka udjian diadakan bagi murid jang ada pada saat udjian sadja.

6. Djumlah Uang Sokongan jang diberikan oleh K.P.T.D.I. (Jogja) pada achir 1951 bagi para penganggur.

Sokongan A		Sokongan B		Djumlah semua.	
Orang	Uang R.	Orang	Uang R.	Orang	Uang R.
1446	51.192.50	1406	396.521,50	2852	447.714,—

2. PENDIDIKAN MASJARAKAT DALAM DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

TUGAS „Pendidikan Masjarakat" jang didjalankan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta tidak menjimpang dari apa jang telah mendjadi keputusan Menteri P.P. dan K. No. 423/A, tgl. 24 - 11 - 1949, adalah :

a. Membangunkan, menjedarkan, menginsjafkan dan mengisi masjarakat diluar lapangan sekolah, agar tiap warga-negara mendjadi anggauta masjarakat jang sedar, hidup berguna dan berharga bagi Negara.

b. Mengubah sifat masjarakat jang bertjorak pasif, statis, djadjahan, mendjadi masjarakat jang aktif, dinamis dan merdeka.

c. Dengan membentuk Panitya Pendidikan Masjarakat, bertudjuan agar masjarakat menginsjafi, bahwa sebenarnja usaha Pendidikan Masjarakat itu semata-mata bukan hanja usaha Pemerintah, akan tetapi sudah mendjadi keharusan dan wadjib dari rakjat sendiri, supaja dalam masjarakat timbul otoaktivitet, karena itu sistim Panitya ini tidak boleh ditawar-tawar lagi.

Untuk mentjapai tiga matjam idam-idaman tersebut diatas, dan supaja pada seluruh lapisan masjarakat dapat serentak bangkit menjesuaikan diri dengan kemerdekaan Negaranja, maka tiga matjam usaha pula jang merupakan factor pokok bagi pendidikan masjarakat :

I. **Dengan Pembrantasan Buta Huruf** (P.B.H.) Pendidikan Masjarakat bertudjuan memberikan kuntji untuk membuka gerbang gudang pengetahuan, jang masih tertutup bagi rakjat jang masih buta huruf.

II. **Dengan K.K.O.D. (Kursus Orang Dewasa) dan P.M. (Pengetahuan Masjarakat),** bertudjuan, membimbing taraf penghidupan masjarakat dengan memperbaiki, mempertinggi usaha masjarakat sehari-hari (pertanian, pertukangan, perdagangan, perindustrian, pekerdjaan kantor). Dan hendaknja bekas-bekas sifat pendjadjahan jang bertentangan dengan tjita-tjita nasional dapat dihapuskan dikit demi sedikit, djanganlah hendaknja tukang kedai tetap selalu tukang kedai, opas tetap mendjadi opas, tetapi djustru sebaliknja, opas harus dapat meningkat djadi djuru-tulis, djuru-tulis mendjadi komis dan selandjutnja.

III. **Dengan K.P.U. (Kursus Pengetahuan Umum),** bertudjuan membentuk kader masjarakat, supaja mereka nanti dapat aktif membantu usaha pendidikan masjarakat dan supaja mereka mempertinggi mutu pekerdjaan mereka sendiri, merupakan api pendorong bagi masjarakat dengan tidak melupakan memupuk keaktivan pribadinja.

A. **Susunan Pendidikan.**

I. P.B.H., dibagi dalam 3 tingkatan :

a. **P.B.H. bertjorak massaal,** disini pengikut dapat kesempatan bergaul dengan masjarakat disekelilingnja ; maka dikenal dengan huruf-huruf, sebagai kuntji untuk dapat membatja.

b. P.B.H. **Pertama,** ditempat pendidikan ini pengikut sudah mulai sungguh-sungguh beladjar membatja dengan baik, dan diberi pengertian tentang apa-apa jang dibatjanja.
c. **P.B.H. Landjutan**. Selain pengikut masih melandjutkan beladjar membatja dengan sistim jang tertentu, disampingnja djuga diberi pengetahuan jang ada hubungannja langsung dengan kepentingan masjarakat dalam daerahnja.

Pada achir peladjaran P.B.H. landjutan ini, tiap-tiap saat jang telah ditentukan diadakan udjian, dan pengikut jang dapat lulus dalam udjian, padanja diberikan sehelai **„Surat Idjazah P.B.H."** ditandatangani oleh :

1. Ketua Panitya Udjian
2. Penulis

   dan diketahui oleh :
3. Bupati.

II. **K.K.O.D.,** tingkatan pendidikan ini, terutama disediakan bagi para lulusan P.B.H., djuga diperuntukkan bagi orang-orang Dewasa jang setingkat dengan lulusan P.B.H. (dapat membatja dan menulis). Pada mereka diberikan pengetahuan kemasjarakatan jang praktis dapat didjalankan dalam hidup tingkatan masjarakat mereka.
Bagi pendidikan ini tidak diadakan udjian penghabisan, djadi hanja melulu sebagai sekedar menambah pengetahuan para orang Dewasa.

III. **K.P.U.** (Kursus Pengetahuan Umum), diadakan dalam 3 tingkatan :

a. **K.P.U./A :** sebagai tersebut dimuka, ialah untuk membentuk kader-kader masjarakat, dan pada tingkat pendidikan ini para pengikut kursus diberikan peladjaran jang bersifat pengetahuan-umum, praktis jang berhubungan dengan kepentingan masjarakat dalam daerah Kapanewon (Ketjamatan).
b. **K.P.U./B :** bermaksud sama dengan tudjuan K.P.U./A, hanja tingkatan ini merupakan tingkatan lebih tinggi daripada tingkatnja K.P.U./A dan disediakan bagi masjarakat daerah Kabupaten.
c. **K.P.U./C :** merupakan pendidikan kemasjarakatan Tinggi. Berarah tudjuan memberikan bimbingan jang luas kepada masjarakat kota Besar.

   Mata peladjaran jang diberikan kepada kursus K.P.U.2, itu adalah vak-vak jang bersifat umum dan sedemikian rupa dibuat supaja sesuai dan praktis dapat berguna bagi kepentingan seluruh lapisan masjarakat, vak tersebut ialah :
   1. Sedjarah (kebangsaan).
   2. Perekonomian (praktek ekonomi).
   3. Pengetahuan Kesehatan.
   4. Tata-Negara.
   5. Bahasa Indonesia (untuk praktis leven).
   6. Budi-Pekerti.

B. Tenaga Pengadjar :

Djika diingat bahwa bagi pendidikan disekolah-sekolah sadja sudah kekurangan tenaga-tenaga pengadjar, darimana Pendidikan Masjarakat mendapatkan Tenaga-Pengadjar bagi kursus-kursus itu ? Hal ini memang dirasakan berat bagi Pendidikan-Masjarakat, akan tetapi sampai pada saat ini, karena keinsjafan dari para tjerdik-pandai atas kebutuhan masjarakatnja, tidak sedikit djumlahnja jang suka menjumbangkan tenaganja untuk memberikan peladjaran pada kursus-kursus tersebut. Dan pada hakekatnja tenaga Pamong-Pradja mempunjai rol penting dalam lapangan ini, selain menggerakkan masjarakat didaerah-daerah, biasanja djuga turut memberikan peladjaran pada kursus-kursus itu.

C. Hubungan Djawatan Pend. Masjarakat dengan Panitya Pend. Masjarakat.

Soal kemadjuan masjarakat dalam lapangan pengetahuan, inilah tidak dapat dititik beratkan kepada kepentingan Pemerintah sadja, tetapi djustru tiap-tiap perseorangan harus memiliki pengetahuan jang setjukupnja supaja dapat lajak hidup sebagai Warga-Negara dalam Negara jang merdeka, maka harus diinsjafi pula bahwa soal pendidikan masjarakat ini mendjadi kewadjiban langsung dari masjarakat itu sendiri. Untuk berdiri dan langsung hidupnja suatu kursus sebaiknja ini mendjadi tanggung-djawab masjarakat, dan Pemerintah merupakan petundjuk-djalan dan pengisi kursus-kursus jang diadakan oleh rakjat itu untuk mentjapai tudjuannja.

Dalam hal ini, maka hubungan **Panitya Pendidikan Masjarakat** pada pihak kesatu dengan **Djawatan Pendidikan Masjarakat** pada pihak kedua, merupakan Dwi-tunggal, jang masing-masing telah mempunjai lapangan pekerdjaannja sendiri-sendiri.

Pertama, Panitya sebagai Badan kerakjatan, berusaha mendirikan dan mendjaga langsung hidupnja suatu Kursus.

Kedua, Djawatan sebagai Badan Pemerintah mengisi dan menasehatkan bagaimana tjara sebaiknja kursus-kursus itu harus dibentuk dan penjelenggaraannja. Schema dapat dilihat dihalaman 601.

Perkembangan Pendidikan Masjarakat
Daerah Istimewa Jogjakarta

Pendidikan Masjarakat sebagai Djawatan berdiri pada tanggal 1 - 8 - '49 menurut keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 24 - 11 - 1949 No. 423/A.

Sebelum itu Pendidikan Masjarakat sebagai bagian C dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan telah melangkahkan kakinja pada permulaan tahun 1948.

Daerah Istimewa Jogjakarta pada permulaan tahun 1948 oleh Kementerian P.P. & K. bagian C telah diserahi penjelenggaraan P.B.H., K.P.U. dan nazorg P.B.H.

Dan mulai waktu itu perkembangan usaha Pendidikan Masjarakat selalu sedjalan dengan apa jang mendjadi tugas kewadjiban Pendidikan Masjarakat.

Akan tetapi sebelum tahun 1948, ialah mulai djaman pendudukan tentara Djepang, Daerah Istimewa Jogjakarta telah mengusahakan Pemberantasan Buta Huruf, pada waktu itu bernama „Pambrasta Wuta Sastra". Usaha P.W.S. ini mendjadi tugas kewadjiban Paniradya Wijata Pradja jang dengan adanja sistim Pemerintahan Collegiaal lalu mendjadi bagian dari Djawatan Sosial dan jang sekarang bernama Djawatan P.P. & K. Daerah Istimewa Jogjakarta. Jang ditugaskan untuk mengurus usaha „P.W.S." ini hingga tahun 1947 ialah almarhum R. Ng. Dwidjowijoto.

Angka-angka jang tertjatat pada waktu itu ialah :

Dalam tahun 1944 ada kursus P.B.H. : 11.462 dengan pengikut 24.548 orang. Dalam tahun itu belum dapat diadakan udjian. Untuk tahun 1945 ada 9.871 kursus dengan pengikut 91.562 orang. Hasil udjian jang tertjatat ada 18.368 orang dari penempuh udjian 23.715. Selandjutnja dalam tahun 1946 dan 1947 P.B.H. tidak berdjalan, karena tekanan ekonomi.

Djadi mulai tahun 1944 hingga tahun 1947 Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta telah mendjalankan usaha Pendidikan Masjarakat, akan tetapi hanja terbatas pada Pemberantasan Buta Huruf dengan latihan gurunja, jang didjalankan oleh Paniradya Wijata Pradja.

Djawatan Pendidikan Masjarakat dalam bentuk sekarang ini di Jogjakarta dimulai pada bulan Djanuari 1948. Terselenggaranja usaha Pendidikan Masjarakat diserahkan kepada Djawatan Sosial Daerah Istimewa Jogjakarta bagian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Usaha Pendidikan Masjarakat pada waktu itu dimulai dengan Kursus Pengetahuan Umum, Kursus Pemberantasan Buta Huruf dengan pemeliharaan (nazorg)-nja, ialah Madjallah Rakjat. Usaha ini didjalankan oleh Djawatan Sosial Daerah Istimewa Jogjakarta Bagian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan urusan Pendidikan Masjarakat, dengan Pemimpin Umum R.W Kusumobroto. Pemimpin bagian K.P.U. R.W. Siswobroto, pemimpin bagian P.B.H. R.W. Resobroto dan pemimpin bagian Madjallah Rakjat (Volksblad) R. W. Notowasito, dengan dibantu oleh 3 orang djuru tulis/pembantu djuru tulis dengan satu orang pesuruh. Di tiap-tiap Kabupaten dan Kotapradja diadakan djuga pegawai-pegawai untuk urusan Pendidikan Masjarakat. Ialah seorang pemimpin Pendidikan Masjarakat Kabupaten; seorang djuru tulis sebagai pemegang tata usaha, dan Pembantu-Djuru tulis sebagai djuru tik.

Pada waktu penjerbuan tentara Belanda di Daerah Jogjakarta, usaha Pendidikan Masjarakat dipusat Daerah berhenti sama sekali. Akan tetapi di daerah Kabupaten usaha Pendidikan Masjarakat ialah terutama Pemberantasan Buta Huruf masih berdjalan terus, dimana keadaan tidak/belum dikatjaukan oleh pihak Belanda. Tetapi hasil-hasilnja terpaksa tak dapat tertjatat.

Sesudah tentara mengundurkan diri dari Jogjakarta, usaha Pendidikan Masjarakat dimulai lagi. Kementerian P.P.K. jang dulunja berada di Solo, pada waktu itu pindah di Jogjakarta. Petugas-petugas Pendidikan Masjarakat dalam Daerah Istimewa Jogjakarta masih tetap utuh, hingga usaha dapat segera dimulai. Usaha jang terpaksa pada waktu itu tidak/belum dimulai, ialah Madjallah Rakjat. Dan achirnja bagian ini dipusatkan di Djawatan Pendidikan Masjarakat Pusat jang mengenai penerbitan dalam bahasa Kesatuan, dan jang mengenai penerbitan dalam bahasa Daerah diselenggarakan oleh Inspeksi Pendidikan Masjarakat Propinsi jang dibentuk mulai tanggal 1 April 1950. Dan dengan lahirnja Inspeksi Pendidikan Masjarakat Daerah Propinsi, lahir pula Inspeksi Pendidikan Masjarakat Kabupaten. Inspeksi ini dibentuk dengan Putusan Menteri P.P.K. tanggal 30 - 3 - '50 No. 2386/C. Dan dengan ini mulai timbulnja suasana jang djauh tidak kita inginkan, ialah jang pada waktu itu disebut „Djawatan kembar". Meskipun dalam wilajah Daerah Istimewa Jogjakarta aparaat Pendidikan Masjarakat masih lengkap, tidak ada kurangnja suatu apa, dan jang mulai tahun '48 telah mendjalankan usaha Pendidikan Masjarakat tidak ada ubahnja dengan daerah-daerah diluar Daerah Istimewa Jogjakarta, ialah mendjalankan usaha Pendidikan Masjarakat tidak ada pemisahan antara Penilikan (inspeksi) dan penjelenggaraannja. Tetapi serta peraturan itu berlaku bukan petugas-petugas Pendidikan Masjarakat dalam Daerah Istimewa Jogjakarta jang diangkat mendjadi Inspektur-inspektur atau Penilik-peniliknja (Seperti diluar Daerah Istimewa Jogjakarta), tetapi Inspeksi diadakan sendiri, dan petugas-petugas di Daerah Istimewa Jogjakarta hendaknja didjadikan Penjelenggara sadja.

Hal mana oleh Pemerintah Daerah ditolak.

Keadaan sematjam itu tentu sadja tidak mungkin dapat mendjelmakan usaha dengan lantjar, melainkan sebaliknja.

Telah mulai tahun 1949, pegawai Pendidikan Masjarakat dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, mengingat perkembangan usaha Pendidikan Masjarakat, dan djuga mengingat kemampuan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta menambah banjaknja pegawai, djumlahnja berangsur-angsur bertambah.

Keadaan sekarang didaerah ada 3 orang tehnis dan 6 orang tenaga administratif, sedangkan dikabupaten ada 2 orang tenaga tehnis dan 3 orang tenaga administratif jang sebetulnja untuk Pendidikan Masjarakat Daerah

sekurangnja 17 orang (tenaga tehnis dan administratif), dan dikabupaten 12 orang. Didaerah kabupaten mestinja sudah ada Pend. Masj. kawedanan (distrik) dengan 3 orang pegawai, tetapi hingga sekarang Pendidikan Masjarakat kawedanan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta belum diadakan.

Perubahan-perubahan sesudah pendudukan Belanda, ketjuali banjaknja Pegawai djuga mengenai Pimpinan Umum bagian Pend. Masj. di Daerah jang dulu didjalankan oleh R.W. Kusumobroto, mulai tanggal 19 - 2 - 1951 dipegang oleh R.W. Notowasito, sedang R.W. Kusumobroto dipindahkan kebagian kebudajaan.

Dan perubahan jang penting ialah setelah kota besar Jogjakarta diberi otonomi, Pendidikan Masjarakat dibagi mendjadi Penjelenggara Pend. Masj. dan Pendidikan Masjarakat Kota Jogjakarta. Pegawai-pegawainja oleh karena daerah otonom kota besar Jogjakarta tidak/belum mempunjai pegawai, lalu wakil Pemimpin Pend. Masj. kota Jogjakarta dengan 3 orang tenaga administratif diserahkan kepada Daerah otonom kota besar Jogjakarta sebagai pegawai Penjelenggara urusan Pend. Masj. dan Pendidikan Masjarakat kota Jogjakarta, lalu berkantor dikantor P.P.K. Daerah Istimewa Jogjakarta.

Adapun nama-nama petugas-petugas Pendidikan Masjarakat Daerah Istimewa Jogjakarta ialah sebagai berikut:

1. R.W. Kusumobroto, Pemimpin Umum Urusan Pendidikan Masjarakat dan Djawatan Sosial Daerah Istimewa Jogjakarta bagian P.P.K. dan jang lalu diganti oleh:
2. R.W. Notowasito, Pemimpin Urusan Pendidikan Masjarakat Djawatan P.P. & K. Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. R.W. Siswobroto Pemimpin bagian K.P.U., merangkap urusan Perpustakaan A — B; kewanitaan jang berhubungan dengan K.P.U.; publikasi; interdep.
4. R.W. Resobroto, Pemimpin bagian P.B.H. merangkap urusan K.K.O. D.P. T.P.P. — Kewanitaan — Pemuda — Olah Raga — Kepanduan.
5. R.Ng. Manitrobroto, Kepala Kantor.
6. R.Ng. Darmobroto, mengurus perlengkapan alat-alat tulis-menulis — alat peladjaran — administrasi perpustakaan.
7. Sasudarinah urusan tik-tikan dan membantu agenda.
8. Hardjo, urusan agenda dan membantu tik-tikan.
9. Hardjosumarto, pesuruh.
10. Jahman — urusan keuangan.

Kota Jogjakarta

1. R.P. Setyobroto, Pemimpin Pendidikan Masjarakat.

Kabupaten Sleman

1. Dirdjosumarto, Pemimpin Pendidikan Masjarakat Sleman.
2. Hardoparmoko, Wakil Pemimpin Pend. Masj. Kabupaten Sleman.
3. Sastrodiwarno.
4. Radjiman.
5. Tondosahid.

Kabupaten Bantul

1. Notosewojo, Pemimpin Pendidikan Masjarakat Kabupaten Bantul, sudah tiga tahun sakit dan akan dipindahkan. Pimpinan dirangkap oleh:
2. Hadisutjipto, Wakil Pemimpin Pendidikan Masjarakat Kabupaten Bantul.
3. Martolegowo — Tata Usaha.
4. Santo — Djuru tik.
5. Hardjosuprapto — pesuruh,

Kabupaten Gunung Kidul

1. Hardjodisastro, Pemimpin Pendidikan Masjarakat Kabupaten.
2. Pudjojuwono, Wakil Pemimpin Pendidikan Masjarakat Kabupaten.

Kabupaten Kulon Progo

1. Tjiptosiswojo, Pemimpin Pendidikan Masjarakat Kabupaten.
2. Hardjopranoto Wakil Pemimpin Pendidikan Masjarakat Kabupaten.
3. Martosatmoko — Tata Usaha.
4. Martodihardjo — Djuru tulis/Tik
5. Basja, Djuru tulis.

Daftar murid dan jang lulus udjian P.B.H.
Th. 1948 s/d 1952
Daerah Istimewa Jogjakarta.

Tahun kursus	Djumlah kursus	Djumlah murid	Djumlah jang lulus udjian	Keterangan
1948	2605	91656	21231	
1949	—	—	—	Tahun 1949 karena akibat serbuan tentara Belanda tidak diadakan udjian.
1950	978	36591	12028	
1951	1185	44364	18520	
1952	2304	64377	27629	
Djumlah	7072	236988	79408	

Udjian penghabisan K.P.U. matjam A dan B
Daerah Istimewa Jogjakarta

Telah dilangsungkan serentak :
Udjian tulisan pada tg. 18, 19 dan 20 Desember 1952 dan
Udjian lisan pada tg. 22 dan 23 Desember 1952.

Kabupaten	Matjam	Banjak K. P. U.	Penempuh udjian			L u l u s		
			Lk.	Want.	Djml.	Lk.	Want.	Djml.
Kota Besar Jogjakarta	A	9	131	63	194	125	51	176
	B	1	25	7	32	22	7	29
B a n t u l	A	18	394	36	430	323	32	355
	B	1	36	—	36	23	—	23
S l e m a n	A	12	321	13	334	286	13	299
Kulon — Progo	A	11	287	30	317	257	27	284
Gunung — Kidul	A	5	149	—	149	119	—	119
	B	1	44	2	46	28	—	28
Djumlah :	A	55	1282	142	424	1110	123	1233
	B	3	105	9	114	73	7	80

Daftar adanja lulusan K.P.U. A.B.C. mulai tahun 1948 s/d tahun 1952 dalam Daerah Istimewa Jogjakarta

Kabupaten	Matjam KPU; jang resmi	1948		1949		1950		1951		1952	
		Banjak KPU ; achir kursus	Lulus	Banjak KPU ; achir kursus	Lulus	Banjak KPU ; achir kursus	Lulus	Banjak KPU ; achir kursus	Lulus	Banjak KPU ; achir kursus	Lulus
Kota Besar	(A	2	25			4	33	6	68	9	176
	(B	4	50			2	9	1	16	1	29
	(C	3	Clash II			1	35	1	10	—	—
Bantul	(A	8	130			15	306	17	330	18	355
	(B	1	18			—	—	—	—	1	23
	(C										
Sleman	(A	6	116			14	329	13	261	12	299
	(B	5	92			—	—	—	—	—	—
Kulon Progo	(A	7	88			10	218	9	205	11	284
dan Adikarto	(B	3	42			—	—	—	—	—	—
Gunung Kidul	(A	4	27			11	154	6	145	5	119
	(B	2	Akibat serangan Belanda			—	—	—	—	1	28
Djumlah :	(A	27	386			54	1040	51	1010	55	1233
	(B	15	202			2	9	1	16	3	80
	(C	3	—			1	35	1	10	—	—

S C H E M A
BENTUK DAN TUDJUAN PENDIDIKAN MASJARAKAT
Kader
Djawatan
Panitya
Pembimbing Masjarakat
Pendidikan Masjarakat
Pendidikan Masjarakat
P E N J E L E N G G A R A A N
B E R T U D J U A N
Usaha Pertama
Pemeliharaan
Otonoom jang sempurna
1. Ur. Pemuda
2. „ Kewanitaan
3. „ Kepanduan
4. „ Olah Raga
5. „ Taman anak2
6. „ Perkumpulan dan wali murid.
1. K.P.U./C
2. K.P.U./B
3. K.P.U./A
4. K.K.O.D.
5. P.B.H./landjutan
6. P.B.H./pertama
1. Perpustakaan
2. Madjallah
3. Taman Pustaka
4. Pagujuban Maos
5. Pagujuban Masjarakat.
1. Oto aktivitet
2. Kader Masjarakat jang sedar:
a. Kemerdekaan
b. Kebangsaan
c. Kemasjarakatan
d. Kenegaraan
3. Tjakap berorganisasi dan lain lapangan.
4. Rasa tanggung djawab.
5. Pengetahuan jang tjukup sebagai dasar Demokrasi.

3. PENGEMBALIAN PEDJUANG KEDALAM MASJARAKAT

A. PEDJUANG PELADJAR

PEDJUANG, dapat difahamkan dalam dua arti kata:
a. Pedjuang pada umumnja, jang bersifat suatu tindakan pembelaan untuk Negara, dengan tjara dan alat apapun jang dimiliki.
b. Pedjuang bersendjata jang berbentuk ketentaraan.

Sebagai telah diketahui oleh masjarakat, bahwa mulai petjahnja Revolusi sampai pada saat clash jang terachir pedjuang-pedjuang bersendjata dari lapisan masjarakat-biasa dan masjarakat-Peladjar merupakan kekuatan jang besar disamping Angkatan Perang Republik Indonesia.

Maka setelah persengketaan Pemerintah R.I. dengan Pemerintah Belanda agak reda, dengan adanja persetudjuan dalam K.M.B., dan pula setelah baik keadaan politik Pemerintah maupun keadaan penghidupan rakjat mendekati keadaan normal, Pemerintah menimbang perlu bila pedjuang-pedjuang dari dua matjam lapisan tersebut dialirkan kembali kepada masjarakatnja masing-masing:
a. Bagi para peladjar supaja kembali kebangku sekolahan masing-masing.
b. Dan bagi pedjuang lain-lainnja jang bermatjam-matjam tjorak ragamnja, dapat kembali kepada lapangan hidup jang semula atau dengan usaha Pemerintah supaja mendapat penghidupan jang sesuai dengan bakat mereka.

Perhatian dan usaha Pemerintah terhadap dua matjam bekas pedjuang ini telah dibuktikan dengan keluarnja P.P. no. 32 th. 1949 sebagai penghargaan dan djaminan bagi peladjar jang telah berbakti kepada Negara.

Untuk melaksanakan P.P. no. 32/1949 maka terbentuklah **„Kantor Urusan Demobilisan Peladjar"** (K.U.D.P.), dan untuk pelaksanaan Penetapan Presiden No. 2/1949 maka lahirlah Badan **„Rekonstruksi Negara"** (B.R.N.) K.U.D.P.

Sebelum K.U.D.P. terbentuk, maka pelaksanaan P.P. 32/1949 ini diselenggarakan oleh Kementerian P.P. dan K. R.I. (sebelum Negara Kesatuan), dan P.P. 32/1949 diambil oper oleh Pemerintah R.I.S. dengan Peraturan no 14/1950 tg. 14 Djuli 1950.

Kesulitan-kesulitan jang dialami oleh Kementerian P.P. dan K. dalam menjelenggarakan P.P. 32/1949 ini dapat ditindjau dari uraian Wakil Kem. P.P. dan K. dalam keterangannja pada Rapat Pembentukan kantor Urusan Demobilisan pada tanggal 1 Djanuari 1950 di Kantor Djawatan Sosial D. Istimewa, a.l.: „...... untuk menguruskan nasibnja bekas tentara-peladjar itu berhubung dengan adanja peraturan Pemerintah R.I. no. 32/1949 telah didjalankan oleh Kem. P.P. dan K R.I. dibantu dengan Panitya P.P. 32. Karena tidak adanja kordinasi antara Pem. R.I. (P.P. dan K.) dan Pem. R.I.S. (Kem. Pertahanan), maka pekerdjaan-pekerdjaan tsb. banjak menemui kesulitan-kesulitan, lebih-lebih karena terus dibandjiri para bekas tentara Peladjar tidak hanja dari R.I. sadja, tetapi djuga dari daerah lain-lainnja, karena mereka itu memandang bahwa Jogja itu tetap mendjadi symbool perdjuangan. Untuk mereka jang tergabung dalam Be. 17 T.G.P., Corps Peladjar Siliwangi dan Mobpel jang

diakui oleh Kem. Pertahanan, mengurusnja agak mudah, tetapi jang menggabung pada kesatuan-kesatuan liar, misalnja diluar Djawa, agak susah, mereka setelah di-demobiliseer tentunja lalu terlantar (di Bali sadja ± 200 — 300 anak-peladjar).

Walaupun pegawai-pegawai dari Kem. P.P. dan K. dan P.P. 32 itu didalam mendjalankan pekerdjaan seperti diutarakan diatas banjak menemui kesulitan tetapi berkat ketabahan hati dan kemauan bekerdja mereka, karena mereka sama mengingat bahwa pekerdjaan mereka itu bertudjuan luhur dan sutji, kesulitan-kesulitan tadi toch dapat mereka atasi, walaupun hasilnja belum 100% sebagaimana jang diharapkan oleh para bekas pedjuang tentara peladjar, tetapi sebagian dari mereka telah dapat merasakan hasilnja, ialah dapat dibebaskan dari uang sekolah bagi para murid-murid S.M. dan uang Kuliah bagi para maha-siswa.

Dibentuknja K.U.D.P. Rayon III (Daerah Istimewa Jogjakarta ini berdasarkan atas surat Penetapan Menteri P.P. dan K. R.I. no. 19330/50 tanggal 28/9-1950.

Dalam rapat Pembentukan K.U.D.P. jang diselenggarakan pada tg. 1 Djanuari 1950, karena mendjumpai kesulitan-kesulitan untuk mentjari orang jang mau ditetapkan mendjadi kepala Kantor dengan tingkatan menurut formasi jang diberikan oleh Kem. P.P. dan K., setelah mendapatkan kebulatan untuk mengadakan perubahan formasi tersebut, hal ini diserahkan kepada Soejono, Kem. P.P. dan K. dan Pemerintah Daerah, jang selandjutnja merundingkan hal itu dengan Pemerintahan Pusat di Djakarta; maka sebelumnja K.U.D.P. Rayon III mendapatkan pengesahan dari Pusat, sementara waktu turut bekerdja mendaftarkan bekas pedjuang-pedjuang peladjar jang datang disitu, dan kantor bertempat di Bale-Mangu bekas kantor Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Resmi berdirinja dan dikenal oleh umum, K.U.D.P. Rayon III Jogjakarta ialah pada pertemuan perkenalan, jang diadakan pada tanggal 20 Desember 1950 di gedung Wijata Pradja, Danuredjan, dipimpin oleh E. Suwandi jang ditunggui pula oleh kep. Djawatan Sosial, K.R.T. Notojoedo sebagai comptable ambtenaar.

Kedudukan K.U.D.P. Rayon III Jogjakarta semula meliputi daerah Karesidenan Purwokerto, Kedu dan Daerah Istimewa Jogjakarta, tetapi karena mengingat besarnja tanggung-djawab D. Istimewa sebagai **Kota-peladjar** jang mempunjai Perguruan Tinggi dengan 6 Faculteitnja, dan beberapa sekolah-menengah, maka K.U.D.P. Jogjakarta dipisahkan tersendiri dari daerah-daerah lainnja, hanja mengurusi demobilisan jang melulu ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta sadja.

Tugas K.U.D.P. adalah:

a. Menjelenggarakan pendidikan para demobilisan-peladjar.
b. Penjelenggaraan pendaftaran dengan penjelidikannja.
c. Mengurus soal kesedjahteraan jang bersangkutan dengan demobilisan-peladjar.

Riwajat singkat Mobilisasi Peladjar Daerah Istimewa Jogjakarta.

Bila Pemerintah besar perhatiannja terhadap demobilisan-peladjar, seperti jang terkandung dalam maksud P.P. 32/1949, inilah sudah pada tempatnja, karena memang sangat terasa besarnja bantuan para peladjar chusus terhadap Angkatan Perang, dan terhadap masjarakat umumnja dari mulai petjahnja Revolusi sampai pada saat achir memuntjaknja pergolakan Revolusi, djiwa dan hidup mereka ditaruhkan untuk kepentingan Ibu Pertiwi. Maka karena itu dianggap perlu tiap djiwa Indonesia mengetahui riwajatnja singkat mengenai apa jang telah dikerdjakan oleh anak-anak kita itu dalam pergolakan Revolusi,

hal mana dapat dikutipkan dari buku Sekitar Perdjuangan Peladjar dan Penjelesaiannja jang diterbitkan oleh K.U.D.P. Rayon III Jogjakarta, sebagai berikut:

Riwajat singkat dari Mobpel (Mobilisan Peladjar) tak dapat kita lepaskan dari sedjarah I.P.P.I. (Ikatan Peladjar Pedjuang Indonesia). Kalau T.P. (Tentara Peladjar) lahir dari ibu Organisasi I.P.I. (Ikatan Peladjar Indonesia), maka Mobpel lahir dari ibu organisasi I.P.P.I.

Sedjarah Mobpel terbatas hanja pada agressi ke II sadja, tetapi tidak berarti bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 Mobpel sudah ada, Tidak, sewaktu itu Mobpel belum ada. Waktu itu sebagian besar peladjar jang tak bersendjata berdjuang dibawah pandji I.P.P.I. Atas nama I.P.P.I. mereka menjediakan tenaganja untuk bertugas ditempat-tempat O.D.M. (Onder District Militer), K.D.M. (Komando District Militer) dan S.O.D.M. (Sub Onder District Militer.

Suasana pertempuran menghendaki tjara bekerdja lebih rationeel dan tjepat. Peladjar harus gemiliteriseerd. Tjara bekerdja seperti organisasi biasa tak dapat dipertahankan. Maka atas usaha beberapa pihak, idee mibilisasi ini dikemukakan kepada Angkatan-Perang. Bagi Jogjakarta hal ini tak merupakan suatu kesulitan, karena peladjar - peladjar sudah dikordinasi dengan baik dalam I.P.P.I. jang dibagi dalam sektor-sektor, tinggal menjalurkan kepada organisasi Militer jang teratur, kuat dan rapi.

Pada tanggal 1 Pebruari 1949, dikeluarkan surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No. 1 U/S.G.A.P./49, jang berisi suatu keputusan „memobiliseer tenaga-tenaga peladjar" untuk membantu usaha-usaha perdjuangan dalam lapangan jang telah ditentukan.

Segera diusahakan penjusunan tenaga peladjar jang waktu itu sebagian besar telah mengaktifkan tenaga-tenaganja dalam ikatan organisasi-organisasi peladjar (seperti I.P.P.I. dll), terutama dalam lapangan penerangan, kesehatan, pemerintahan sipil dan lain-lain.

Untuk daerah Jogjakarta diberikan mendaat Perintah Harian oleh S.T.M. no. 218/P.H./S.T.M.J./49 serta mandaat dan Perintah Harian M.B.K.D. Mobilisasi Peladjar No. 1/D.K. pada tg. 16 dan 18 Maret 1949.

Segera setelah Staf S.T.M.J. Mobilisan Peladjar terbentuk dimulai perdjalanan berkeliling untuk memenuhi Perintah Harian S.T.M.J. tersebut untuk membentuk Mobilisan Peladjar K.D.M.

Langkah pertama ialah mendaftar djumlah peladjar-peladjar jang ada ditiap-tiap Kabupaten dan sesudah diperoleh overzicht jang lengkap, segera dimulai dengan detachering tenaga jang memerlukan, terutama tenaga-tenaga lichting pertama dan kedua.

Prinsip diadakannja Mobilisasi Peladjar ialah sebagai berikut:

a. Mobilisasi peladjar bertudjuan untuk menambah kapasitet dan mengisi vacuum dalam bermatjam-matjam lapangan dari Pemerintah Militer.
b. Mengerahkan tenaga peladjar kearah tersebut a dengan georganiseerd dan dibawah instansi Militer.
c. Sebagai langkah pertama kearah Mobilisasi umum.

Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut diatas tenaga-tenaga peladjar telah dikerahkan tenaganja, terutama dalam lapangan jang sesuai dengan ketjakapannja, sedang peladjar-peladjar jang bersendjata digabungkan dalam kesatuan Mobiel, dan djuga ada jang didetacheer keluar daerah Jogjakarta.

Sebagai peladjar-peladjar tidak pula dilupakan usaha-usaha menambah pengetahuannja dan dengan demikian diadakan kerdja sama jang erat sekali, terutama dengan Pem. Kapanewon (Ketjamatan) dan achirnja berhasil didirikan 18 Sekolah Menengah dalam Daerah Jogjakarta. Mereka jang masih muda-muda (ketjil-ketjil) dipelihara peladjarannja dan mereka jang bertugas diperkenankan pula mendengarkan tjeramah-tjeramah pengetahuan umum jang

diadakan setelah tugas selesai. Sekolah Rakjat hampir ditiap kelurahan diusahakan. Dengan alat serba sulit usaha-usaha penjempurnaan terus dikerdjakan.

Dalam usaha-usaha untuk melaksanakan tudjuan dari pada mobilisasi telah dikerdjakan hal-hal dalam lapangan-lapangan antara lain:

a. **Pendidikan.**

Sekolah Menengah jang didirikan:

di K.D.M. I	10 (sepuluh) rumah.
„ „ II	3 (tiga) rumah.
„ „ III	2 (dua) rumah.
„ „ IV	1 (satu) rumah.
„ „ V	2 (dua) rumah.

Kursus-kursus S.M.A.

di K.D.M. I	1 (satu) rumah.
„ „ IV	1 (satu) rumah.

Disamping peladjaran sekolah diberikan tjeramah-tjeramah mengenai hal-hal jang praktis, misal P.P.P.K. (E H B O), Pengungsian, Penerangan, dan mempertebal patriotisme (kebangsaan).

b. **Kesehatan.**

Membantu kerdja-sama pada pos-pos P.P.P.K. dan rumah-rumah sakit darurat dan pengambilan/mengusahakan obat-obatan dari dalam kota. Rumah-rumah sakit Darurat dan pos-pos P.P.P.K., dimana anggauta-anggauta Mobpel ikut ditempatkan:

di K.D.M. I	12 (duabelas) rumah.
„ „ II	7 (tudjuh) rumah.
„ „ III	3 (tiga) rumah.
„ „ IV	1 (satu) rumah.
„ „ V	4 (empat) rumah.

Disamping itu pengobatan-pengobatan bagi penduduk dengan keliling dikerdjakan pula.

c. **Penerangan.**

Membantu penerangan kepelosok-pelosok bersama Pemerintah Militer Kabupaten/Kapanewon dll. dengan langsung. Menjiarkan berita-berita radio tentang perdjuangan dari Dalam dan Luar Negeri. Membuat dan menjebarkan pamflet-pamflet, poster-poster terutama tentang Volksweerbaarheid.

d. **Sosial.**

Membantu usaha-usaha penjelenggaraan pengungsian penduduk. Hiburan bagi penduduk umumnja. Hiburan-hiburan makanan dll. untuk pedjuang-pedjuang diselenggarakan oleh puteri-puteri terutama tiap pada tanggal 17.

Dalam kota diadakan persiapan-persiapan terutama mengenai keamanan. Ditiap-tiap Kemantren sudah disusun tenaga-tenaga jang sewaktu-waktu dapat dikerahkan.

Ketika Ibu Kota (Jogjakarta) kembali dikuasai Pemerintah kita, segera didalam kota dikerahkan tenaga peladjar jang diselenggarakan oleh Mobilisasi Peladjar Ibu Kota. Terutama dalam lapangan K.P.K. (Komando Pertahanan Kemantren) dan Keamanan, tenaga-tenaga tersebut ditempatkan.

Pengerahan tenaga peladjar didalam kota meningkat sampai djumlah 508 (limaratus delapan) orang. Selain lapangan tersebut diatas djuga dalam lapangan Sosial, Pendidikan dan lain-lain.

Diluar kota mereka jang ditempatkan sampai digunung-gunung tidak luput dari pada bahaja serangan-serangan dari pihak musuh.

Telah gugur dalam mendjalankan tugasnja selama itu 8 (delapan) orang peladjar; mereka ini hanja jang ditugaskan dalam Pemerintah Militer.

Sebagai penghormatan/penghargaan kepada mereka, sebagian djenazah-djenazahnja telah dipindahkan ke Taman Bahagia dengan persetudjuan keluarganja.

Sesuai dengan tingkatan perdjuangan waktu itu maka berangsur-angsur peladjar-peladjar jang dapat diganti tenaganja mulai kembali kebangku sekolah masing-masing dalam kota.

Pada achir bulan IX (1949) selesailah dengan pengerahan tenaga tsb., terketjuali mereka jang mendjadi anggauta-anggauta permanent dalam staf-staf K.D.M. dll.-nja. Praktis pada saat itu dan sesuai pula dengan surat Perintah Harian Komandan S.T.M.J. No.: 428/K/PH/S.T.M.J 249 tanggal 16 September 1949 tentang pemindahan Mobilisasi Peladjar di K.D.M.-2 telah dikerdjakan.

Demikian pula dengan keadaan Mobilisasi Peladjar Ibu Kota, achir bulan Oktober semua peladjar telah dapat dibebaskan dari tugasnja di K.P.K.-2 dan lain-lain, dan kembali kebangku sekolah masing-masing.

Ketjuali sebagian ketjil dari mereka jang djadi anggauta permanent diluar kota maka peladjar-peladjar jang telah bertugas tersebut diusahakan agar mendapat tempat pondokan. Terutama bagi mereka jang berasal dari luar Kota Jogjakarta. Usaha ini dapat berwudjud dengan didirikannja asrama-asrama sebanjak 4 (empat) buah.

Fourageering (kebutuhan/makanan) bagi mereka ini turut diberikan/didjamin oleh S. T. M. Jogjakarta. Achirnja menurut surat Keputusan no. 24/B/Div. III/50, kemudian sesuai dengan Perintah Harian Panglima Div. III No. 423/A.I/D/III/50, dan Perintah Harian Mobpel Div. III no. 39/P.H./D.III/50 dengan resmi didjalankan demobilisasi bagi peladjar-peladjar jang selama itu termasuk dalam dinas Angkatan Perang didaerah Jogjakarta".

Demikian sekedar riwajat singkat dari perdjuangan para peladjar, dan selandjutnja dapat diketahui statistik para peladjar jang telah pernah mentjurahkan tenaganja sebagai tsb. dibawah ini:

Daftar Anggauta Sub Territorium Militer Jogjakarta Mobilisasi Peladjar jang telah bertugas, Lichting Pertama dan Kedua. Menurut tingkatan Pendidikan selama agressi ke II.

(Kutipan dari Sekitar Perdjuangan Peladjar dan Penjelesaiannja).

No.	Peladjar-peladjar dari Sekolah — 2:	Lichting pertama K.D.M. — 2 :						Lichting kedua : K.D.M. 2 + K.M.K.						Djumlah:
		I	II	III	IV	V	Djumlah	I	II	III	IV	V	K.M.K.	
1.	Ac. Pend. Guru	4	2	—	1	1	8	—	—	—	—	1	1	2.
2.	S.T.T.	2	—	—	3	2	7	—	1	—	—	1	8	10.
3.	Perguruan Tinggi Gadjah Mada	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1.
4.	Sek. Tinggi Keuangan	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5.	Sek. Tinggi Padjak	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6.	Cine Drama Inst.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7.	Sek. Tabib Tinggi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.
8.	U.I.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.
	Djumlah Peladjar Perg. Tinggi :	8	2	—	6	3	19	—	1	—	—	2	13	16.

1.	S.M.A.	63	36	—	20	15	134	—	30	18	8	12	258	326.
2.	S.G.B.. A.	9	3	—	6	—	18	—	1	4	—	3	1	9.
3.	S.T.M.	13	5	—	—	—	18	—	6	1	1	—	8	16.
4.	S.P.M.T.	4	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	1	2.
5.	Idem — lulus	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
6.	S.K.M.T.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7.	S.E.M.	15	2	—	3	3	23	—	1	1	—	2	5	9.
8.	Sek. P.T.T.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1.
9.	Sek. Textiel	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
10.	Sek. Tehnik kl. IV	—	—	—	2	—	2	—	—	1	1	2	10	14.
11.	Sek. Guru kl. IV	7	5	—	4	4	20	—	1	5	2	3	—	11.
12.	Instituut Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.
13.	Ind. Comm. CMg	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2.
14.	Sek. Ass. Apotheker	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.
15.	Sek. Metrologic	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.
	Djumlah Sek. Menengah Atas.	114	51	—	38	22	225	—	40	31	12	22	289	394.
1.	S.M.P. kl. III	41	18	—	3	19	81	—	14	38	3	13	134	206.
2.	S.G. kl. III	5	4	—	3	10	22	—	—	1	1	5	1	8.
3.	S.T. kl. III	6	2	—	—	—	8	—	2	—	—	—	18	20.
4.	S.D. kl. III	10	2	—	—	—	12	—	1	3	1	—	9	14.
5.	Sek. Rad. Tehnik	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	Djml. S.M. kl. III	63	26	—	6	29	124	—	17	42	5	18	162	248.

1.	S.M.P. kl. I + II	59	15	—	4	11	89	—	19	65	1	15	37	137.
2.	S.G. Kl. I + II	2	4	—	—	7	13	—	7	11	—	11	—	29.
3.	Sek. Rad. Tehnik	4	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—
4.	S.T. kl. I + II	1	—	—	1	—	2	—	4	1	—	1	5	11.
5.	S.D. kl. I + II	3	2	—	—	—	5	—	1	—	—	—	2	3.
6.	S. Pertanian Menengah	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	10.
	Djml. S. M. kl. I + II	69	21	—	5	19	114	—	41	77	1	27	44	190.
	Djml. lichting ke I + II . . .	265	100	—	55	74	494	—	100	150	18	69	509	846.
								265						
								265	100	—	55	74	—	494.
								265	200	150	73	143	509	1340.

Keterangan : Sebelum agressi ke II Perguruan Tinggi Gadjah Mada belum mendjadi Universitit Gadjah Mada.

Usaha - usaha K. U. D. P.

A. PENDIDIKAN.

Untuk menjelenggarakan pendidikan bagi para peladjar demobilisan sebagai jang dikehendaki oleh P.P. 32/49, maka K.U.D.P. telah melangkahkan kaki menudju kedjurusan itu. Mulai bulan Pebruari 1951 mereka telah mengadakan program dan phase demi phase program mana telah dipraktijkkan.

a. **Klasifikasi.**

Guna memudahkan mendapat overzicht tentang tingkatan-tingkatan demobilisan dalam peladjaran jang akan dimasuki, maka hal itu lalu diadakan klasifikasi dan terdapat pada achir tahun 1951 djumlah peladjar pedjuang dalam K.U.D.P. Rayon III Jogjakarta terhitung:

1.	Mahasiswa	=	988 orang.
2.	S.M.A./Vak sedradjad	=	2477 orang.
3.	S.M.P./kursus2	=	371 orang.
	Djumlah :	=	3836 orang.

Pengaruh-pengaruh dalam perdjuangan (jang merupakan pengaruh liar) jang timbul dalam djiwa-djiwa peladjar selama revolusi ini, sangat diperhatikan, dan diusahakan pula **mentale omschakeling** dari suasana liar ke suasana masjarakat peladjar biasa dengan mendjaga pula supaja semangat perdjuangan dan semangat kebangsaan mereka djangan sampai lenjap. Mengenai soal ini usaha pertama mengumpulkan demobilisan dalam asrama, dan baik santapan djiwa maupun santapan lahir diberikan disamping mereka mendapat peladjaran disekolahan, mereka masing-masing mendapat peladjaran; sport dan hiburan di asrama djuga disediakan sebaik-baiknja, djustru merupakan keharusan bagi mereka.

b. **Kontrole.**

Mendjaga agar supaja segala jang telah diusahakan selalu dapat djalan teratur, kontrole diadakan pada tiap-tiap waktu dengan tindakan-tindakan:

1. Menindjau tata-tertib dalam asrama-asrama.
2. Mentjari keterangan dan menerima laporan dari kepala-kepala sekolah tentang hal perubahan intelligentie serta moraal peladjar-peladjar jang bersekolah.
3. Menjelidiki bagaimana tingkah-laku mereka dalam masjarakat umumnja.
4. Mengurangi/menghilangkan factor-factor jang menghambat perkembangan kemadjuan hasrat beladjar, misal: menjediakan penerangan lampu tjukup untuk beladjar, menjediakan tempat-tempat pembatjaan dalam asrama, kebersihan dalam asrama selalu terdjaga.

c. **Hasil-hasil jang telah ditjapai.**

Selain peladjar-peladjar jang sudah mendapat pekerdjaan dalam lapangan kepegawaian, dan jang meneruskan peladjarannja ke Universitit Negeri Gadjah Mada, pada th. 1951 telah lulus sebanjak 110 orang dari beberapa djurusan vak peladjaran sebagai berikut:

I.	1.	Tamat S.G.A.	26 orang.
	2.	Tamat S.G.K.P.	13 orang.
	3.	Tamat S.T.M. I.	11 orang.
	4.	Tamat S.T.M. II	6 orang.
	5.	Tamat S.E.M.A.	5 orang.
	6.	Tamat S.E.M.P.	2 orang.
	7.	Tamat S.G.B. I.	25 orang.
	8.	Tamat S.T. I.	15 orang.
	9.	Tamat S.K.P.	1 orang.
	10.	Tamat S.T. II	16 orang.
		Djumlah :	110 orang.

II. Pada th. 1950/1951 jang melandjutkan beladjar kepada sekolahan jang lebih tinggi tingkatannja:
   1. Tamat S.M.P./sederadjad, masuk S.M.A. 172 orang.
   2. Tamat S.M.A./sederadjad, masuk ke Perguruan Tinggi 223 orang.

III. Mengingat kepada para peladjar pedjuang jang pada hakekatnja memperlukan udjian-penghabisan dalam keadaan jang tersendiri, luar dari keadaan seperti peladjar biasa, maka dianggap perlu dengan adanja udjian penghabisan jang spesial hanja bagi para peladjar perdjuangan.

   Dalam tahun 1951 udjian tersebut diadakan 2 kali, pada bulan Agustus dan bulan Desember.

   Udjian bulan Agustus bag. S.M.A., untuk peladjar pedjuang Rayon III Jogjakarta diadakan di tiga tempat.

   1. Bagian A. di Malang; ikut 46, lulus 46 orang.
   2. Bagian B. di Jogja; ikut 98, lulus 63 orang.
   3. Bagian C. di Magelang; ikut 26, lulus 22 orang.

   Udjian bulan Nopember, Desember/1951, hanja merupakan udjian-udjian jang pada bulan Agustus tidak lulus.

   Bagi S.M.P. diadakan udjian pada bulan Agustus 1951, menghasilkan:
   1. Bagian A. ikut 87 — lulus 63 orang.
   2. Bagian B. ikut 96 — lulus 66 orang.

IV. Disamping peladjaran-peladjaran tsb. diatas, djuga telah didjalankan usaha mengirimkan peladjar-peladjar keluar Negeri, bagi mata peladjaran jang tidak terdapat di Indonesia:
   1. Kesusasteraan dan filsafat djurusan Psychologie = 4 orang.
   2. Perg. Tinggi Tehnik djurusan Schipsbouw = 2 orang.
   4. Opleiding Leerbewerking = 1 orang.
   5. Perguruan Tinggi Economi/Accountancy = 1 orang

V. Selain banjak peladjar jang meneruskan peladjarannja kedjursan vak biasa ada pula jang masuk ke:
   a. Academi Polisi Djakarta = 3 orang.
   b. Academi Militer Tjimahi = 2 orang.
   d. Guna menolong kesukaran-kesukaran mengenai soal alat peladjaran, K.U.D.P. berusaha meringankan kesukaran-kesukaran itu dengan djalan:
      a. Maha-siswa dapat memesan buku-buku jang sangat dibutuhkan, dengan djalan mengangsur.
      b. Mengusahakan kepentingan-kepentingan jang mengenai soal-soal Ikatan Dinas/Studie Opdracht.

Bagi peladjar-peladjar pedjuang jang tidak lulus dalam udjian S.M.A. atau S.M.P., maka diadakan agar supaja anak-anak tadi dapat diterima dalam kursus-kursus Djawatan jang selandjutnja tenaganja dapat dipakai oleh Djawatan jang bersangkutan. Hanja sajang sampai pada saat ini soal ini belum berhasil dengan memuaskan, karena beberapa matjam halangan.

Untuk jang telah lulus dalam sekolah-sekolah vak sudah ada sedjumlah 52 orang jang ditetapkan sebagai Pegawai-Negeri pada Kementerian/Djawatan.

Para Maha-Siswa (peladjar-pedjuang), selain menuntut ilmu di Perguruan Tinggi, masih mempergunakan waktunja untuk memberi peladjaran disekolah-sekolah Menengah baik Negeri maupun Partikelir, hal ini terdjadi karena desakan ekonomi dan mengingat pula kurangnja tenaga-tenaga guru.

B. ASRAMA.

Pertama kali asrama jang diurus oleh K.U.D.P. adalah asrama bagi mobilisan-peladjar, asrama bagi Tentara Peladjar masih dibawah pengawasan Be. 17

(Copex); asrama mobilisan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta permulaan jang diurus K.U.D.P. tsb. ialah:

1.	Mob. Daerah Jogja	—	4 asrama	—	131 orang.
2.	Mobpel Be. 8 Banjumas	—	1 asrama	—	20 orang.
3.	Mobpel Be. 9 Kedu	—	1 asrama	—	33 orang.
4.	Mobpel Djawa Timur	—	1 asrama	—	3 orang.
5.	Seksi Peladjar Be. 16	—	4 asrama	—	89 orang.
6.	T.P. Atjeh	—	2 asrama	—	24 orang.
7.	T.G.P.	—	4 asrama	—	54 orang.
8.	Trip. Djatim	—	1 asrama	—	15 orang.
9.	T.P. Sumatera-Tengah	—	1 asrama	—	15 orang.
10.	Tjampurau	—	1 asrama	—	17 orang.
11.	Jang telah sembuh dari sanatorium Pakem	—	1 asrama	—	10 orang.

Pada tanggal 28 April 1951 dilangsungkan penjerahan asrama Sub Copex Jogja kepada K.U.D.P. Rayon III, sebanjak 13 asrama;

1.	Asrama Gredjen 34	—	25 orang.
2.	Asrama Limaran 3	—	26 orang.
3.	Asrama Bintaran Kulon 3	—	13 orang.
4.	Asrama Sumbing 18	—	12 orang.
5.	Asrama Widoro 1	—	39 orang.
6.	Asrama Batonowarso 32	—	44 orang.
7.	Asrama Merapi 30 14	—	12 orang.
8.	Asrama Gondokusuman 2	—	32 orang.
9.	Asrama Sindunegaran 4	—	60 orang.
10.	Asrama Widoro 5	—	23 orang.
11.	Asrama Sindoro 23	—	orang.
12.	Asrama Pontjowinatan 15	—	6 orang.
13.	Asrama Batonowarso 30	—	10 orang..
	Djumlah:	—	302 orang.

Asrama dengan penghuninja jang baru-baru diserahkan oleh Be. 17 (Copex Jogja), perlengkapannja lebih baik daripada asrama-asrama K. U. D. P. pada saat itu, karena hal keuangannja lebih terdjamin; hanja penghuninja sadja jang merupakan Pedjuang Bersendjata dan baru turun dari gelanggang Gerilja, sangat mendjadikan perhatian K. U. D. P., karena mentale omschakeling harus dilaksanakan dengan saluran-saluran jang tertentu. Benih-benih suasana panas jang masih tersimpul dalam sanubari Pedjuang Bersendjata memperlukan suatu pimpinan dan pendidikan jang sangat bidjaksana.

Sungguhpun keuangan merupakan suatu struikelblok bagi matjam usahapun, tetapi karena keantepan tekad, maka kesukaran-kesukaran lambat-laun dapat disingkirkan.

Besarnja keuangan jang diberikan oleh K. U. D. P. Pusat kepada K. U. D. P. Royan III untuk kepentingan asrama dari bulan Djanuari 1951 s/d bulan Pebruari 1952 adalah sebesar Rp. 70.790 (Tudjuhpuluh ribu tudjuh ratus sembilan puluh rupiah), dimana diberikan menurut perintjian tiap-tiap bulan.

C. PEMELIHARAAN KESEHATAN

Bagi kesehatan para bekas Peladjar Pedjuang diselenggarakan usaha sebagai berikut:

1. **Pendjagaan kesehatan di Asrama-asrama,** disediakan obat-obatan dan alat-alat pertolongan-pertama (E H B O); pemeriksaan terhadap makan jang disediakan bagi para penghuninja. Bagi mereka jang dengan tjara pertolongan

seorang tinggal diluar, bilamana sakit dapat melaporkan ke K.U.D.P. bagian Kesehatan.

2. **Tempat pengobatan** disediakan pada klinik-klinik di :
   a. Klinik Djetis — Dr. S a h i r .
   b. Klinik Klitren Kidul — Dr. Soekardi/Dr. Kasmolo.
   c. Klinik Pakualaman.
   d. Klinik Wirobradjan.
   e. Klinik P.M.I. Ngabean — Dr. Ismail.
   f. Klinik Gandekan Lor.

3. **Bagi recept** para patient, maka recept itu dapat ditukarkan dengan obat-obat di Apotheek Kementerian Kesehatan (P 3. O). Karena P 3. O tidak seluruhnja dari recept itu dapat dipenuhi, maka djuga perlu adanja bantuan dari Apotheek Partikelir, dan recept-recept ini dapat diberikan korting 10%.

4. Bagi jang menderita sakit Paru, setelah mereka mendapat surat keterangan dari Consultatie Bureau Penjakit Paru-paru (Dr. Samalo), maka mereka lalu dikirim ke Sanatorium Pakem. Bagi mereka tiap bulan diberikan uang liggeld (uang tinggal) dengan ditambah uang saku sebesar Rp. 50,—. Bagi jang telah berumah tangga sendiri (berdiam di luar) diberikan uang Rp. 100.—.

Untuk mengusahakan supaja K. U. D. P. dapat mempunjai dokter sendiri sampai pada saat ini belum terlaksana.

*

B. BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL (B.R.N.)

B. R. N. adalah kelandjutan dari Kementerian Pembangunan Masjarakat sewaktu Pemerintah R. I. di Jogjakarta, jang berhubung dihapuskannja Kementerian tersebut mendjelma untuk sementara mendjadi Djawatan Pendidikan Kerdja jang dibeajai oleh Kementerian Sosial, kemudian dirubah lagi hingga sa'at ini mendjadi B.R.N. jang langsung dibawah Kabinet Perdana Menteri.

Dalam pada itu Pemerintah menjatakan betapa besar hasratnja menghargakan bekas anggauta-anggauta pedjuang bersendjata dan hasratnja meng-istimewakan penjaluran orang-orang jang telah berdjasa itu kembali kemasjarakat dengan membuka djalan baginja agar mereka dapat memperoleh pentjaharian hidup jang lajak. Kini penjelesaiannja ditudjukan ke pembangunan umum, antara lain ditempatkan pada :

1) Object-object pertanian-perikanan-perchewanan-kehutanan, mendjadi urusannja **Kementerian Pertanian.**
2) Object-object perusahaan-perindustrian-perdagangan, mendjadi urusannja **Kementerian Perekonomian.**
3) Pembuatan djalan-djalan-irigasi dll., mendjadi urusan **Kementerian Pekerdjaan Umum & Tenaga.**
4) Transmigrasi dan pembentukan desa-desa baru, mendjadi urusannja **Kementerian Sosial** dan **Kementerian Dalam Negeri.**

Mengingat luas lapang pekerdjaan jang disediakannja maka terbentuklah :

a. Dewan Rekonstruksi Nasional (D. R. N.) jang diketuai oleh Perdana Menteri/Wakil P. M. (merupakan Badan Legislatief).
b. Biro Rekonstruksi Nasional Pusat (B. R. N.) jang dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu sebuah Staf dari Wakil-wakil Kementerian jang bersangkutan (merupakan Badan Executief).

Direktur B.R.N. Pusat bertanggung djawab kepada D.R.N. dan praktijknja kepada Wk. Perdana Menteri.

Sifat organisasi D. R. N. ialah Interdepartementaal, terdiri dari beberapa Menteri dan berbentuk Integraal. Demikian dikandung maksud agar segala sesuatunja jang berkenaan dengan usaha-usaha Rekonstruksi dari berbagai Kementerian dapat dikordinasi begitu rupa, sehingga bantuan Pemerintah terhadap ex. pedjuang dapat ditindjau dan diteliti kemungkinan-kemungkinan dari beberapa sudut setjara deskundig.

Untuk mendjalankan tugas ini sudah barang tentu menghendaki suasana apparatuur vertikaal, dimana B.R.N. Tjabang seperti terdapat di Daerah Istimewa Jogjakarta ini perlu didirikan Badan Penjelenggara Urusan Rekonstruksi (B. P. U. R.), menurut urgensinja dan pula mengingat organisasi dalam masa pertumbuhan.

Tjara bekerdja B. P. U. R. menjerupai D. R. N., ialah Interdepartementaal Interdjawatan, dimana duduk Pemimpin-pemimpin dari Djawatan jang bersangkutan jang karena urusan rekonstruksi mendjadi anggauta B. P. U. R.

B. R. N. Tjabang Daerah Istimewa Jogjakarta dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan didalam mengerdjakan usaha rekonstruksi ia selaku Sekretaris B. P. U. R. bertanggung djawab kepada Ketua B. P. U. R. disini Kepala Daerah Istimewa Sri Paduka Paku Alam dan sebagai Wakil Ketua B. P. U. R. K. R. T. Notojudo. Dalam mengerdjakan pekerdjaan sehari-hari ia sebagai Kepala Kantor B.R.N. Tjabang bertanggung djawab kepada Direktur B.R.N. Pusat.

Hubungan antara B.R.N. dan Corps Tjadangan Nasional (C.T.N.) dalam pekerdjaan menurut hierachie masing-masing bertanggung djawab kepada atasannja dan karena tugasnja bersama-sama menjelenggarakan/merentjanakan sesuatu object B. P. U. R. ditempat, maka dengan sendirinja rapat sekali hubungannja sehari-hari, terutama mengenai penjaluran ex pedjuang kedalam masjarakat, dan terhadap organisasi-organisasi ex pedjuang jang kini memerlukan bantuan.

Menurut dan berdasarkan petundjuk-petundjuk (instruksi) dan keputusan D. R. N., maka lapangan bekerdja B. R. N. bergerak dalam usaha menjalurkan tenaga-tenaga pedjuang bersendjata jang timbul sebagai akibat revolusi Nasional kedalam Masjarakat setjara teratur, agar mereka dapat memberi isi kemerdekaan — jang telah ditjapai oleh Bangsa Indonesia.

Didalam usaha kedjurusan itu, maka tiap-tiap Kementerian jang ada kepentingannja dan ada sangkut-pautnja dengan usaha-usaha jang telah mendjadi tugas B.R.N., diwadjibkan menjelenggarakannja dengan apparatuurnja jang kini sudah terhimpun dalam B.P.U.R.

Djika kita mengingat tentang tugas **rekonstruksi** ini dan **mengingat pula belum terdapatnja** didalam sedjarah kita, maka sudah selajaknja kita menemui beberapa kesulitan dalam penjelenggaraannja.

Menurut keputusan B.R.N. No. 1 ditjantumkan djuga rentjana transmigrasi. Memang sudah mendjadi pengertian umum bahwa rentjana ini dipandang dari beberapa sudut sangat urgent dan menghendaki segera dilaksanakannja. Terbukti banjaknja permintaan-permintaan tidak sadja dari rakjat umum, melainkan djuga dari kalangan-kalangan ex pedjuang. Kemauan ini sangat menggembirakan, akan tetapi permintaan ini sebagian baru dapat dipenuhi ialah pengiriman dari :

a. Kesatuan C.T.N.
b. Kesatuan Staf „K" dan
c. B.R.N.

Pengiriman transmigrasi umum diselenggarakan oleh Djawatan Transmigrasi.

Sepintas lalu tentang transmigrasi dapat menimbulkan pertanjaan antara lain banjaknja instansi jang mengurusnja. Tetapi setelah hal ini dipeladjari, tidak ada pertentangan faham didalamnja, djustru karena pentingnja, maka

usaha ini diselenggarakan harus mengingat faktor psychologisch dan kordinasi jang baik. Selandjutnja mengingat akan besarnja potensi Negara dikemudian hari, maka B.R.N. mendjalankan rentjana transmigrasi setjara besar-besaran dengan batas kekuatan keuangan Negara kita. Bahwa penjelenggaraannja transmigrasi tidak semudah kita membikin rentjana, maka guna sekedar mempunjai gambaran tentang omvang pekerdjaan jang bertalian dengan transmigrasi baiklah kita sebutkan sebagian dari pekerdjaan persiapan, misalnja :

Ditempat asal, harus diadakan :

1. penerangan
2. pendaftaran, seleksi
3. pendidikan kader
4. pengumpulan, transport
5. perlengkapan kebutuhan transmigrasi.

Ditempat jang akan ditudju harus diadakan :

1. penjelidikan daerah
2. pengaturan hak tanah
3. pengukuran daerah
4. penjusunan projekt
5. pembuatan djalan
6. pembuatan bangun-bangunan umum
7. persiapan kedatangan transmigrasi
8. Pembuatan tanah pertanian
9. pembuatan perumahan
10. pemeliharaan kesehatan
11. pendidikan
12. penjusunan dan pemeliharaan organisasi perekonomian
13. penjusunan organisasi kemasjarakatan
14. perlengkapan alat bekerdja
15. persediaan bahan makan.

Instansi Pemerintah pada waktu ini terutama adalah Djawatan Transmigrasi dari Kementerian Sosial jang mengadakan pemindahan ke Luar Djawa, sedang B.R.N. pula menjelenggarakan transmigrasi sebagai **salah satu djalan** melaksanakan kewadjiban jang dibebankan kepadanja, jalah penempatan tenaga bekas pedjuang bersendjata dalam masjarakat.

Kewadjiban B.R.N. Bagian Pendidikan jalah untuk mengadakan **mentale omschakeling** bekas pedjuang dan disamping itu memberi pendidikan **vak** kepada mereka, agar supaja ada bekal untuk menghadapi hidup dalam masjarakat, sehingga boleh dikata Bagian Pendidikan B.R.N. adalah **pembuka pintu masjarakat** bagi bekas pedjuang ini.

Bagian ini mentjoba mentjapai tudjuan dengan sementara mengadakan vak bagi anak-anak ex. pedjuang seperti berikut :

1. Kursus Pelajaran
2. Kursus Perkapalan
3. Kursus Pertanian/Perkebunan
4. Kursus Kehutanan
5. Kursus Kechewanan/Peternakan
6. Kursus Keradjinan
7. Kursus Pertukangan Besi
8. Kursus Koperasi dan lain-lain.

Bagian perekonomian B.R.N. Tjabang Daerah Istimewa Jogjakarta telah membuka beberapa **Perusahaan Rekonstruksi** (Staatsproefbedrijven) jang sudah berdjalan tjukup memuaskan selama lebih kurang 6 bulan, dalam mana dapat dipekerdjakan lebih dari 100 bekas pedjuang jang dulu telah mendapat didikan vak dari B.R.N.

Perusahaan Rekonstruksi B.R.N. jang sudah berdjalan jalah :

1. Pers. Rek. Bag. Kaju di Tjokrodiningratan 24, Jogjakarta, menerima pesanan dari umum, membikin dan mendjual meubiler, bangun-bangunan rumah dan lain-lain.
2. **Pers. Rek. Bag. Penjamakan Kulit (Leerlooierij)** di Djogokarijan 6 Jogja; memasak bermatjam-matjam kulit dan mendjual pada umum matjam-matjam kulit (leer).
3. **Pers. Rek. Bag. Sepatu** di Djogokarijan 6. Jogjakarta.
   Dengan alat-alat modern (mechanisch),
   menerima pesanan dari umum membikin dan mendjual sepatu, tas, koffer dan lain-lain barang dari kulit.
4. **Pers. Rek. Bag. Pengangkutan,** alamat sementara di Kantor B.R.N. Gondokusuman 16 Jogja,
   menjelenggarakan trajek Bus Jogja — Solo p.p. dengan merk „B. R. Nasional".
   Jang sekarang sedang menunggu penjelesaiannja ialah :
5. **Pers. Rek. Bag. Minjak Kelapa,** di Kabupaten Wates Jogja (dimuka setasiun D.K.A. Wates).
   Dari kopra dimasak mechanisch mendjadi minjak kelapa.

*

URAIAN VERSLAG SINGKAT DJALANNJA PENDIDIKAN

Pendidikan jang ke I dalam bulan Maret dan bulan April 1952, bertempat di Podjok Beteng, kepada Cie Mathalatta mengenai 14 matjam vak

Djalannja Pendidikan kurang memuaskan, disebabkan :

a. banjak diantaranja para peladjar, mempunjai basis jang kurang, (ada jang buta huruf),
b. para peladjar masih kurang insjaf akan maksudnja pendidikan jang sesingkat-singkatnja itu.
c. hampir 75% mempunjai overwaardigheidscomplex,
   jang 25% „ minderwaardigheidscomplex,
d. para pengadjar belum ada pengalaman memberi peladjaran kepada Anggauta C.T.N.

Akan tetapi meskipun menghadapi banjak kesulitan-kesulitan, para pengadjar pihak C.T.N. dan pihak B.R.N. selalu berusaha mentjari djalan jang sebaik-baiknja untuk dapat mengetahui semua kesukaran - kesukaran itu. Selesai pendidikan anak-anak tersebut diatas pada bulan Djuli 1952 semua dikirim ke Kalimantan, dan disana Cie tersebut dinamakan Cie Dasamuka; menurut keterangan jang diterima dari Inspeksi C.T.N. Semarang, anak-anak anggauta C.T.N. jang sudah dikirim ke Kalimantan sudah aktif bekerdja dan dapat kerdja bersama-sama dengan rakjat disana, misalnja didalam pembuatan ladang, saluran air dan lain sebagainja.

Pendidikan jang ke II dalam bulan Djuni, Djuli, Agustus 1952, bertempat di Purbodirdjan Jogjakarta, kepada 60 orang Anggauta C.T.N. mengenai Administrasi/Organisasi Koperasi

Pendidikan tersebut dipimpin oleh Notokusumo Kepala Djawatan Koperasi Jogjakarta.

Djalannja pendidikan jang kedua ini nampak lebih lantjar dari pada jang sudah-sudah disebabkan :

a. para pengadjar sudah ada pengalaman,
b. pihak B.P.U.R., B.R.N., dan C.T.N. selalu berusaha mentjari djalan untuk menjempurnakan pendidikan.

Pendidikan jang ke III mengenai Kehewanan/Pertanian, jang diselenggarakan oleh B.R.N. sendiri dalam tahun 1952

Djalannja Pendidikan :

Pada umumnja Pendidikan B.R.N. kepada para Bekas Pedjuang Bersendjata sebanjak 61 orang mengenai Vak Kehewanan/Pertanian, memuaskan berkat kerdja sama antara B.R.N. dan Djawatan-djawatan lainnja terutama Djawatan Kehewanan jang memberi bimbingan dan didikan baik mengenai theorie maupun praktijk.

Diharap pada achir bulan Pebruari 1952 pendidikan sudah selesai dan besar kemungkinan para kader akan dipindahkan ke Sumatera, untuk ditempatkan di Perkebunan B.R.N. di Lampung.

Mentale omschakeling.

Ketjuali pendidikan biasa seperti tersebut diatas, djuga diusahakan merubah djiwa dari para bekas pedjuang bersendjata jaitu ke djiwa „Construktief" jang disebut „Mentale omschakeling".

Untuk itu kita selalu mengadakan hubungan dengan Dr. Soeharso, Kepala R.C. di Solo. Menurut beliau ada dua jaitu :

I. Directe dan
II. Indirecte mentale omschakeling.

I. Memberi didikan ke-Tuhanan (tidak dididik supaja mendjadi orang Islam, Katholik dan sebagainja) melainkan menjadarkan anak-anak, bahwa mereka adalah anggauta masjarakat jang berguna.

II. **Indirecte methode :**

a. diadakan **testing** lebih dulu.
b. supaja **„opwekken interesse"** terhadap vaknja atau pekerdjaannja,
c. kalau sudah ada, menambah interessenja.
d. mendidik supaja mereka mempunjai rasa **tanggung djawab.**
e. opwekken **autoactiviteit.**

Hal tersebut diatas sudah mulai didjalankan dan hasilnja memuaskan.

Penjelenggaraan Pendidikan jang ke IV kepada C.I.T.O. jaitu peladjar-peladjar titipan dari Djakarta Raya sebanjak 10 orang dalam bulan September, Oktober, Nopember, Desember 1952.

1. Lima kader di Bagian Kulit dipimpin oleh Dudung Kepala Djawatan Penjelidikan Kulit di Jogjakarta, tiap hari kerdja bertempat di Kantor Penjelidikan Kulit Jogjakarta.
Guru-gurunja pegawai-pegawai dari Djawatan tersebut.
2. Lima Kader di **Bagian Tehnik** dipimpin oleh K.R.T. Prodjodiningrat Kepala Djawatan Perbi Daerah Istimewa Jogjakarta bertempat di Perbi Daerah Istimewa Jogjakarta. Dan gurunja Marjoto dan Martedjo dari Djawatan tersebut.
Keadaan :

I. Di bagian Kulit memuaskan, ada kemauan keras untuk beladjar dan hasrat besar untuk menuntut ilmu jang lebih djauh, hasil-hasil pendidikan memuaskan.

II. di Bagian Tehnik kurang memuaskan :
a. disebabkan kurang berhasrat untuk beladjar (mengambil kesimpulan dari absensielijst, banjak tidak masuk sekolah),
b. jang prakteknja baik, theorienja kurang memuaskan.

Pendidikan jang ke V mengenai Bagian Houtzagerij/Pertukangan kaju jang akan dialirkan ke Werkcentraal lamanja 3 bulan.

Pada bulan Oktober 1952 pendidikan tersebut dimulai, diikuti oleh 30 orang Bekas Pedjuang Bersendjata. Sdr.2 tersebut diambil dari pendaftaran Bekas Pedjuang bersendjata di B.R.N. Tjabang Jogjakarta.

Adapun peladjaran theorie dan praktek dipimpin oleh Aris seorang achli Tehnik dan Kurupatkin dari D.P.U. Daerah Istimewa Jogjakarta. Tempat mengadjar theorie di Notojudan di gedung Mardiluwih Jogjakarta.

Praktek di Batjiro, adapun rumah-rumah dan tanah, kepala Kehutanan membantu setjukupnja.

Penjelenggaraan ke VI mendidik Anggauta C.T.N.

Adapun mengenai pendidikan tersebut masih banjak kekurangan-kekurangan di antaranja :

I. kurangnja alat-alat pendidikan,
II. kurangnja medja sekolah,
III. kurangnja tempat dan lain-lain.

Mudah-mudahan kesukaran-kesukaran tersebut diatas lekas dapat diusahakan. Diwaktu ini pendidikan jang sudah berdjalan adalah seperti berikut :

1. Vak mengenai pertukangan besi bertempat di Werkcentraal, D.P.U. di Pingit Daerah Istimewa Jogjakarta,
2. Vak Pengairan bertempat di Djawatan Pengairan di Djetis Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Vak Pertanian di Asrama C.T.N. Karangwuni Jogjakarta,
4. Vak Perikanan di Asrama C.T.N. Karangwuni Jogjakarta,
5. Vak Tehnik/Electro/Motor di Djawatan D.T.T. Jogjakarta.

Para anggauta dengan ichlas hati, mengerdjakan praktek-praktek jang diperintahkan dan diberikan oleh guru-guru (tunduk kepada pimpinan guru).

SCHEMA SUSUNAN PENGURUS

„BADAN PENJELENGGARA URUSAN REKONSTRUKSI".
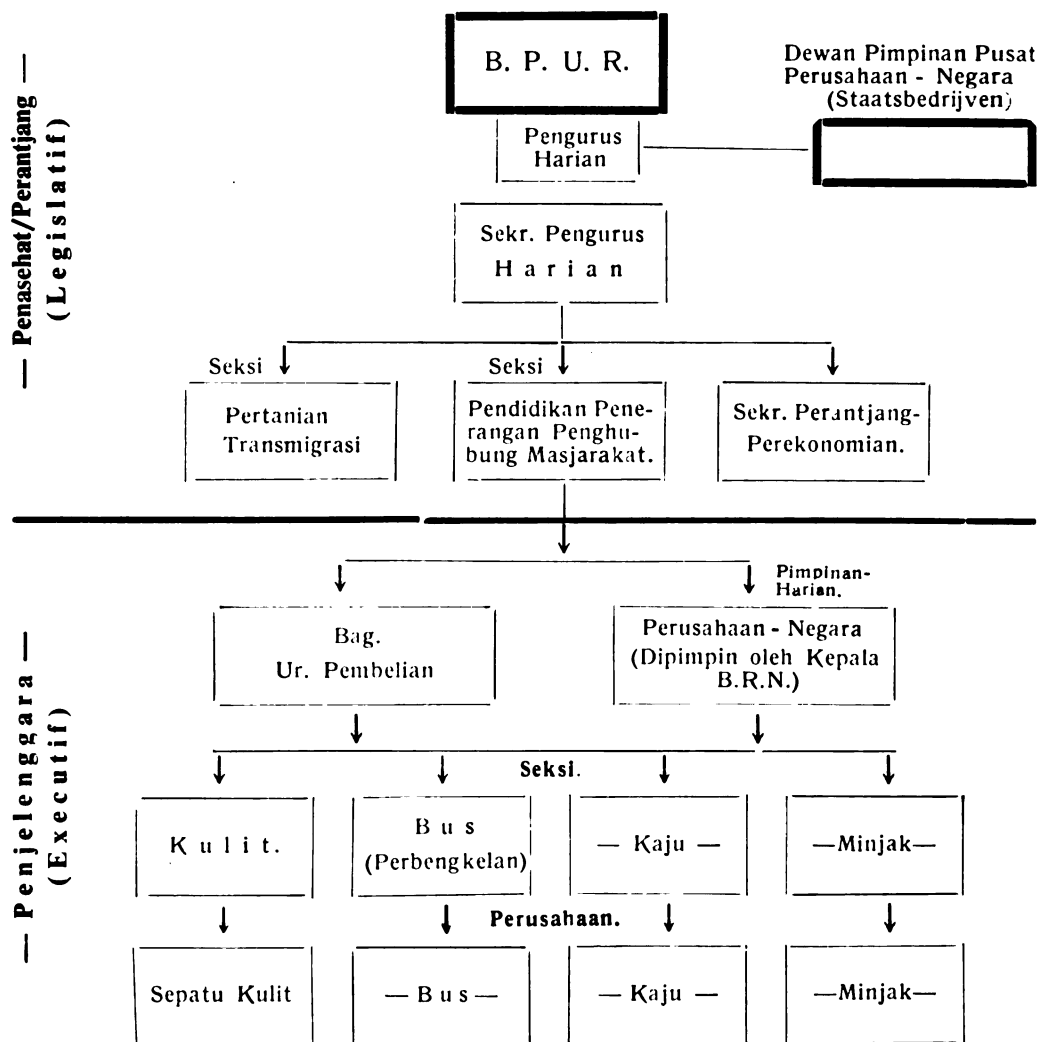
4. KESEHATAN RAKJAT DALAM DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

Phase perbandingan.

SUPAJA dapat diketahui adakah kemadjuan kesehatan rakjat dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, harus diketahui lebih dahulu tentang kesehatan rakjat pada saat-saat jang telah lampau, djustru dengan pengalaman jang serba sulit pada waktu pemerintahan pendudukan Djepang, pergolakan revolusi sampai pada saat achir-achir ini, maka akan lebih djelas tentang naik turunnja kemadjuan kesehatan rakjat.

a. **Pada waktu Pemerintah Belanda.**

Sungguhpun Daerah Istimewa Jogjakarta (D.I.J.) jang pada saat itu sudah biasa disebut daerah minus, tentang kesehatan rakjat pada umumnja dapat dikatakan baik, karena segala matjam penjakit apapun mulai dari penjakit-penjakit jang ringan sampai pada penjakit menular atau berat, mudah diusahakan pengobatannja, karena hubungan Hindia Belanda pada saat itu dengan Negara-negara luar masih belum mendapat kesulitan seperti waktu meletusnja perang dunia ke II. Hanja setelah hubungan Hindia Belanda terputus sama sekali dengan Eropah, maka segala obat-obat jang merupakan patent mulai sukar didapat, persediaan obat jang ada pada Pemerintah tinggal merupakan persediaan tjadangan. Lebih terasa sukarnja lagi setelah Djepang menduduki seluruh kepulauan Indonesia.

b. **Pada waktu pendudukan Djepang.**

Setelah pemerintah Djepang sama-sekali menguasai kepulauan Indonesia, dan mulai mendjalankan kekuasaannja, maka segala matjam pekerdjaan sosial untuk kepentingan umum semua dipusatkan dan langsung dikerdjakan oleh pemerintah sendiri, sungguhpun masih ada beberapa badan usaha partikelir, tetapi hal ini tidak luput dari pengawasan dan pengendalian keras dari pihak pemerintah Djepang.

Terutama mengenai soal kesehatan, baik jang tadinja milik Pemerintah Hindia Belanda maupun jang milik partikelir, semuanja ini langsung dibawah pengawasan dan kekuasaan Pemerintah (Djepang).

Bagaimana keadaan kesehatan rakjat pada waktu itu, dapat dikatakan selama waktu pendudukan Djepang kesehatan masjarakat umumnja kian hari kian buruk keadaannja, karena:

1. Obat-obat patent (dari Luar Negeri) sudah sangat sukar didapatnja; persediaan jang ada pada pemerintah, hanja melulu digunakan untuk mendjamin kesehatan orang-orang Djepang (opsir - opsir, pegawai sipil-tinggi), bagi rakjat Indonesia umumnja sama sekali dibiarkan hidup dalam kesukaran, obat jang sedikit mudah didapat rakjat, hanja satu-satunja ialah kinine, seolah-olah kinine ini merupakan penjambung umur bagi rakjat Indonesia pada saat itu.

2. Keadaan makanan rakjat jang merupakan factor utama bagi kesehatan, sedemikian rupa buruknja keadaan makanan pada saat itu, sampai rakjat menderita kelaparan, dan karena lapar inilah orang mudah dihinggapi segala matjam penjakit. Malaria, oedeem, alcus-tropicum, meradjalela diseluruh pelosok Indonesia, terutama ditempat-tempat mana jang merupakan tempat penampungan **romusha.**
Segala usaha pemerintah Djepang hanja merupakan propaganda untuk kepentingan Djepang, baikpun mengenai soal kesehatan djuga hanja tjukup dengan propaganda, usaha pemberantasan penjakit hanja terbatas karena tidak ada obat.

c. **Pada waktu pergolakan Revolusi.**

Sungguhpun dalam waktu revolusi, kesehatan rakjat tidak kurang tragisnja dari pada saat djaman Djepang, tetapi karena factor makanan bagi rakjat lebih terdjamin, dan pula bagaimanapun mahalnja harga obat-obatan dipasar-pasar gelap atau jang diberikan oleh Pemerintah Republik, maka lambat laun kesehatan rakjat berubah menudju kepada perbaikan.

Setelah usaha Pemerintah Republik dapat menembus blokkade Belanda, dan dapat hubungan sendiri dengan Luar Negeri, maka obat-obatan lebih mudah didapat oleh rakjat dari pada waktu jang lampau.

Sikap Pemerintah Republik terhadap badan-badan kesehatan partikelir tidak merupakan pengekangan lagi seperti Djepang, tetapi merupakan pelindung bagi mereka, disamping pemberian subsidi, pemerintah djuga memberikan kemerdekaan kepada mereka untuk leluasa mengembangkan usahanja.

Sampai pada saat penjerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik, kesehatan rakjat sudah dapat dikatakan mendekati perbaikan.

Kesehatan Rakjat dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

Dalam tiga phase tersebut diatas, keadaan kesehatan rakjat Jogjakarta tidak djauh berbeda dengan keadaan didaerah-daerah lainnja.

Sampai pada saat ini usaha Pemerintah Daerah untuk memberantas penjakit rakjat (malaria, patek) terus diusahakan dengan giat. Penjelenggaraan pemberantasan ini diselenggarakan dengan pembersihan serentak atas penjakit itu daerah demi daerah. Baik mengenai penjakit rakjat maupun penjakit menular setelah diadakan pembersihan serentak, maka untuk pemeliharaan selandjutnja tetap masih diadakan pemeriksaan dan suntikan bersama tiap-tiap daerah pada waktu jang telah ditetapkan.

Penjakit rakjat.

Bagi daerah Jogjakarta jang dapat dimasukkan sebagai penjakit rakjat ialah:
1. Patek.
2. Malaria.

Penjakit patek dapat tumbuh subur ialah bilamana soal kebersihan tidak dapat dipenuhi oleh Rakjat. Misal daerah Kabupaten Wonosari (Gn. Kidul), karena daerah ini merupakan daerah jang sangat minus dan kekurangan air, maka mudahlah rakjat disini terserang penjakit tsb.

Tetapi meskipun bagaimana, usaha Pemerintah untuk memberantas penjakit itu tetap memuaskan, hal ini dapat ditindjau dalam tjatatan penjelidikan jang diselenggarakan oleh „Lembaga Penjelidikan Pemberantasan Penjakit Rakjat" (L. P3. R.) jang diketuai oleh Dr. Warsono, jang diadakan di Kap. Wonosari mengenai penjakit Frambosia;

a. **Pemberantasan ke I th. 1952.**
Orang jang datang 34.933, jang diperiksa 27.576 sedang jang menderita ada 5.471.

b. **Pemberantasan ke II th. 1953.**

Orang jang datang 36.619, jang diperiksa 13.209, jang menderita ada 1.646. Selandjutnja penderita 1.646 ini waktu sekarang jang menderita tinggal 954.

Orang-orang jang dulu belum diperiksa dan sekarang menderita ada 421. Melihat tjatatan tsb., dapat dikatakan bahwa usaha pemberantasan itu berhasil baik.

Mengenai penjakit malaria, bagi daerah jang kerap kali terserang ialah Daerah Adikarto (Kl. Progo), tetapi dengan usaha pembersihan tempat didaerah itu, dan dengan disediakan kinine, maka daerah tsb. sampai sekarang sudah lepas dari tjengkeraman malaria.

Penjakit menular.

Usaha pemberantasan penjakit pes, jang merupakan momok bagi rakjat umumnja, sampai waktu ini djuga dapat dikatakan berhasil baik, usaha ini merupakan usaha-usaha :

1. Pembersihan rumah
2. Penangkapan tikus dengan serentak
3. Suntikan umum

Hasil ini dapat dilihat dari menurunnja tjatatan orang jang diserang sakit pes ; menurut keterangan Dr. Sahir dalam rapat D.P.R.D. tgl. 16-2-1953 sebagai berikut :

Daerah	Orang jang kena penjakit pes.		
	1950	1951	1952
Kab. Sleman	545	93	5
„ Bantul	224	29	3
„ Kl. Progo	31	15	nihil
„ Gn. Kidul	309	241	551

Usaha Pemeliharaan.

Untuk mendjaga lebih terdjaminnja kesehatan rakjat dipelosok-pelosok daerah, maka usaha Pemerintah Daerah pada saat ini terhalang karena kekurangan tenaga ahli.

Usaha jang telah tertjapai ialah tiap-tiap Kapanewon telah diadakan poliklinik dengan 1 mantri djuru rawat. Selandjutnja tjita-tjita untuk tiap-tiap Kabupaten dengan satu dokter belum dapat diselenggarakan.

Guna mengurangi kematian kelahiran baji, karena sukarnja untuk mendapatkan tenaga **bidan,** usaha pertama ialah dimana Kapanewon jang sudah dapat ditaruh tenaga bidan, maka lalu diadakan kursus-kursus bagi dukun-dukun baji, sekedar dapat menolong dan meringankan pekerdjaan bidan dalam daerah itu.

Consultasi bureau Penjakit Paru-paru.

Sedjak berdirinja badan ini, maka bagi rakjat Jogjakarta merasa lebih terdjamin lagi tentang kesehatannja, karena bagi para penderita penjakit paru-paru maupun jang belum menderita dapat memeriksakan kesehatannja dengan tidak ragu-ragu lagi, sebab mereka mendapatkan peperiksaan dari orang jang ahli dengan alat-alat jang serba lengkap.

Usaha Consultasi Bureau ini ialah dibagi dalam 2 bagian :

a. Pemeriksaan : diselenggarakan dengan pemeriksaan rontgen, spartien, blutsengkung, dan mantoux-reactie.

Dan patient-patient dibagi dalam dua tingkatan, ialah bagi orang penderita T.B.C., dan orang penderita T.B.C. jang harus dipisah, dan memerlukan perawatan tersendiri.

b Propaganda: dengan usaha ini jang dilakukan dengan siaran-siaran brochures, pamfletten, film, maka dapat mendorong dan menginsjafkan rakjat, seberapa besarnja bahaja penjakit paru-paru dan supaja orang dengan kehendaknja sendiri mau memeriksakan paru-parunja.

Pada tahun 1951 Consultasi ini telah mentjatat djumlah pengundjung terdapat ada 7505 orang, diantaranja 5333 laki-laki dan 2172 perempuan.

Demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kesehatan rakjat dalam Daerah Istimewa Jogjakarta adalah baik, karena:

1. Jogjakarta sampai pada saat ini tidak ada epidemi.
2. Tjatatan djumlah penderita penjakit rakjat, maupun penjakit menular, menundjukkan tanda perbaikan.

* *
*

5. SEKITAR KESOSIALAN MASJARAKAT DALAM KOTA — PRADJA JOGJAKARTA

A. „GOTONGROJONG" (RUKUN KAMPUNG)

Pandangan Umum.

DASAR gotong-rojong ini dapat dilihatnja dengan terang pada pergaulan hidup masjarakat dipegunungan atau dipelosok-pelosok jang letaknja djauh dari kota. Sebab tidak lain, karena mereka itu belum banjak terpengaruh oleh individualisme.

Bagaimana keadaan pergaulan hidup masjarakat dalam kota? Pergaulan hidup masjarakat dalam kota pada umumnja sangat berbeda kalau dibandingkan dengan pergaulan hidup masjarakat dipegunungan atau dipelosok-pelosok jang djauh dari kota, collectiviteit sudah tipis, sehingga sifat-sifat gotong-rojong sudah mendjadi tipis pula, bahkan ada jang hampir-hampir hilang sifat gotong-rojongnja, mereka pada umumnja, lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri.

Sedjak datangnja Balatentara Djepang ke Indonesia, maka sifat-sifat gotong-rojong jang terdapat pada masjarakat Indonesia dipergunakan olehnja untuk keperluan membantu perang Azia Timur Raja dengan dibentuknja organisasi **Tonari Gumi** (Rukun Tetangga).

Setelah berachirnja perang Azia Timur Raja dan sedjak diproklamasikannja Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, maka organisasi Tonari Gumi dibubarkan. Dibeberapa tempat dibentuknja Rukun-Tetangga dan Rukun Kampung. Dalam kota Jogjakarta djuga tidak ketinggalan, didirikannja Rukun Kampung jang mengambil dasar **gotong-rojong** sebagai dasarnja.

Rukun Kampung dalam Kota Jogjakarta.

Sesungguhnja sedjak sebelum petjah perang Azia Timur Raja, dikota Jogjakarta telah berdiri Rukun Kampung. Tetapi sifat-sifatnja berbeda dengan Rukun-Kampung sekarang ini.

Rukun-Kampung sedjak waktu pendjadjahan Belanda hingga sekarang ini mengalami perubahan-perubahan tiga tingkatan sebagai berikut:

1. Rukun-Kampung pada masa pendjadjah Belanda, jang diurus misalnja: tentang sinoman, tentang rukun kematian, tentang pendjagaan keamanan bersama d.l.l.
   Adapun keanggautaan bersifat aktif (ledenstelsel).
2. Rukun-kampung/Tonari Gumi pada masa pendjadjahan Djepang. Badan ini dibentuk oleh Pemerintah Balatentara Djepang untuk memenuhi keperluan-keperluan perang Djepang. Adapun keanggautaannja bersifat passief (ledenstelsel). Tonari Gumi tersebut djuga didjadikan alat pemerintahan Dai Nippon jang terbawah, sehingga segala sesuatu jang mengenai urusan Pemerintahan dan urusan perang disalurkan melalui Rukun-Kampung. Pada waktu itu Rukun Kampung (Azatjokai) bekerdja sangat giatnja karena takut antjaman bajonet Djepang.

3. **Rukun Kampung pada alam Kemerdekaan Republik Indonesia.**

Sedjak proklamasi Negara Republik Indonesia tg. 17-8-1945, maka Rukun Kampung/Azatjokai tjap Djepang lalu meninggalkan pakaian Djepang lalu berganti pakaian Republik Indonesia, bentuk dan sifatnja passief ledenstelsel.

Pada waktu itu Rukun Kampung bekerdja sangat giat membantu revolusi Republik Indonesia dengan berpegangan gotong-rojong. Tidak sedikit djasa-djasa Rukun Kampung selama revolusi, misalnja :

a. Membantu menggerakkan Rakjat dan pemuda-pemuda Kampung pada waktu merebut dan menjerang benteng Djepang di Kota Baru Jogjakarta.
b. Membantu mendjaga keamanan di Kampungnja masing-masing.
c. Membantu mengawasi gerak-gerik mata-mata musuh.
d. Membantu pertahanan Kota Jogjakarta di Rukun Kampungnja dengan membentuk Lasjkar Rakjat.
e. Membantu mengumpulkan dan mengirim bahan makanan untuk garis depan.

Untuk melantjarkan djalannja bantuan kepada revolusi kita, maka susunan Pengurus Rukun Kampung dirubah sebagai berikut :

1. Ketua Umum
2. Wakil Ketua Umum
3. Penulis.
4. Ketua Bagian Sosial
5. „ „ Penerangan
6. „ „ Kemakmuran
7. „ „ Keamanan
8. „ „ Pemuda
9. „ „ Wanita.

Biaja jang dikeluarkan oleh Rukun Kampung untuk melaksanakan bantuannja kepada revolusi kita diusahakan dengan tjara gotong-rojong. Tidak sedikit biaja jang telah dikeluarkan oleh Rukun-Kampung untuk keperluan melaksanakan bantuan bagi revolusi kita.

Tenaga dan fikiran Pengurus-pengurus Rukun Kampung pada umumnja ditjurahkan untuk keperluan membantu revolusi kita. Bukan sadja pada waktu jang normaal tetapi djuga pada waktu serdadu-serdadu Belanda menduduki kota Jogjakarta; sehingga tidak sedikit Pengurus-pengurus Rukun Kampung jang menderita kekedjaman dari serdadu-serdadu Belanda.

Hubungan Rukun-Kampung dengan Pemerintah.

Pada waktu revolusi hubungan Rukun-Kampung dengan Pemerintah, baik dengan Pemerintah sipil maupun dengan Pemerintah militer sangat eratnja; sehingga semua usaha-usaha dan urusan-urusan Pemerintahan dapat disalurkan melalui Rukun-Rukun Kampung dengan mudah dan lantjar.

Gabungan Rukun Kampung.

Untuk mempermudah hubungan-hubungan Rukun Kampung dengan Pemerintah dan hubungan antara Rukun Kampung satu dengan Rukun Kampung lainnja, maka ditiap-tiap Kemantren Pamong-Pradja dalam Kota Jogjakarta dibentuk **Gabungan Rukun Kampung Kemantren,** jang dipimpin oleh salah seorang Ketua R.K. jang dipilih dari dan oleh Ketua-Ketua R.K. dalam Kemantrennja masing-masing. Ketua Gabungan R.K. tersebut dapat mewakili Rukun-rukun Kampung dalam Kemantren Pamong-Pradjanja masing-masing.

Pada tg. 19 Maret 1946 dengan persetudjuan wakil-wakil Rukun Kampung seluruh kota Jogjakarta, dapat dibentuk suatu Gabungan Rukun Kampung Seluruh Kota Jogjakarta, dengan diberi nama **Gabungan Rukun Kampung Kota Jogjakarta.**

Gabungan R.K. Kota ini dipimpin oleh suatu Pengurus jang dipilih dari dan oleh Ketua-ketua Rukun Kampung seluruh Kota dalam rapat pleno.

Pengurus Gabungan R.K. ini mewakili Rukun Kampung seluruh Kota keluar dan kedalam.

Perwakilan dari Gabungan R.K. Kota.

Besar pengaruhnja Rukun Kampung beserta dengan Gabungan R.K. Kotanja pada waktu revolusi. Karena pengaruhnja, maka ada beberapa instansi-instansi dan Badan-Badan Panitya jang minta agar Gabungan R.K. Kota memberikan wakilnja untuk duduk dalam Panitya-panitya tersebut, misalnja ;

1. Panitya Pembangunan Kota
2. Panitya Pembantu Sosial Kota
3. Dewan Pertahanan Daerah Seksi Perumahan
4. Panitya Penjambutan pada waktu Pemerintah akan kembali ke Jogjakarta.
5. Pada M.P.K. (Markas Pertahanan Kota) Gabungan R.K. Kota punja wakil sebagai Penasehat.

Gabungan R.K. Kota pernah minta kepada jang berwadjib, agar diberi tempat duduk pada D.P.R. Haminte Kota Jogjakarta (sekarang Kota Pradja) sebagai wakil dari Rukun Kampung. Permintaan ini merupakan suatu perdjuangan jang sukar dan sulit baru dapat tertjapai sesudah perdjuangannja memakan waktu berbulan-bulan. Pada bulan September 1947 berhasillah Gabungan Rukun Kampung mendapat kursi dalam D.P.R. Haminte Kota Jogjakarta; mula-mula mendapat satu kursi, kemudian ditambah lagi satu kursi; sehingga djumlah wakil Gabungan R.K. Kota dalam D.P.R. djadi dua orang sampai sekarang ini.

Rukun-Kampung pada waktu pendudukan tentara Belanda.

1. Pada waktu Belanda menduduki Kota Jogjakarta mulai tg. 19 Desember 1948, Rukun-rukun Kampung berkerdja passief, bahkan seakan-akan bubar. Dengan maksud agar tidak mudah diperalat oleh serdadu-serdadu Belanda.
2. Pengurus-pengurus Rukun - Kampung waktu itu pada umumnja terus berdjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
3. Pengurus Gabungan R.K. Kota pada waktu itu selalu berhubungan erat dengan Pemerintah Kota Pradja Jogjakarta.

Sesudah pendudukan Belanda.

Sesudah Belanda meninggalkan Kota Jogjakarta Rukun Kampung dibangun kembali, diadakan pemilihan Pengurus baru serentak.

Pemerintah Kota Pradja berusaha akan memisahkan Rukun Kampung dengan Pemerintah. Tetapi belum dapat berhasil sepenuhnja.

Djadi ada pekerdjaan-pekerdjaan jang masih dikerdjakan oleh Rukun Kampung.

Pada waktu Daerah Istimewa Jogjakarta mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggauta-anggauta D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta, Rukun Kampung membantu dengan aktif hingga selesainja pemilihan umum tersebut diatas. Tetapi sesudah pemilihan umum lampau, tahun 1952, umumnja Rukun Kampung kelihatan sunji. Hanja ada beberapa Rukun Kampung sadja jang masih aktif dalam lapangan pendidikan, sosial dan perekonomian.

*

B. GOTONG-ROJONG DALAM MASJARAKAT DESA

SOAL gotong-rojong bagi masjarakat desa sebenarnja bukan merupakan soal baru, dari abad ke abad naluri sematjam ini dipegang teguh. Segala sesuatu jang dirasakan oleh seorang, djuga dirasakan pula oleh masjarakat sekitarnja. Kesusahan dan kegembiraan mereka bersama merasakan, sesuatu penderitaan jang menimpa seorang atau beberapa orang, sedapat mungkin penduduk desa

berusaha mengurangi penderitaan itu, Suatu kebutuhan jang merupakan kepentingan umum mereka tidak segan-segan seija-sekata bersama mengerdjakan kepentingan itu, hal ini dapat dilihat pada usaha-usaha seperti tersebut dibawah ini :

Daerah Kalurahan-Kalurahan Kalidengen, Hargomuljo, Temon Barat dan Timur, Kapanewon Temon, di daerah Kabupaten Kulon Progo (Wates) daerah ini termasuk suatu daerah lembah (rendah), pada musim hudjan merupakan daerah bandjir, dalam keadaan sematjam itu beberapa ribu rupiah hasil rakjat jang dimusnahkan oleh bandjir dengan sekali-gus. Untuk menghindarkan keadaan tersebut maka kali Waluh satu-satunja saluran di daerah itu jang sudah dangkal lantas dikeduk (diperdalam sampai sepandjang 4507 meter. Pekerdjaan ini diselesaikan dalam 4 bulan (dari 10/7 - '52 s/d 31/10 - '52), dengan tenaga rakjat tidak kurang 16807 orang, usaha ini dapat bantuan dari Pemerintah Rp. 5970,—.

Usaha-usaha sematjam diatas djuga terdapat didaerah Kabupaten lain-lainnja dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

Pekerdjaan Gotong-rojong membuat Dam jang selesai dalam tahun 1952 di Kabupaten Wonosari (Gunung Kidul).

Nama-nama Dam	Biaja Rp.	Jang merupakan sokongan dari Pemerintah Rp.	Mengenai sawah/ladang seluas.	
Semojo	30.000,—	2.010,—	30 ha	
Sendang Sari	30.000,—	1.500,—x)	60 ha	*) Rp. 1000.— sokongan dari Pem. D. Isti. ; Rp. 500,— dari Pem. Kabupaten.
Gedangan	35.000,—	2.750,—	50 ha	
Karang Tengah	20.000,—	1.000,—	50 ha	
Ngagel	20.000,—	1.500,—	50 ha	
Nglegi	20.000,—	2.500,—	50 ha	

*

C. PEMELIHARAAN ORANG TERLANTAR

BILAMANA dalam keadaan normaal sudah ada orang jang terlantar hidupnja, maka tidak mengherankan bilamana pada sesuatu saat habis peperangan, revolusi, ada sebagian rakjat jang karena beberapa faktor sampai terlantar hidupnja.

Faktor ekonomi jang sebenarnja pada djaman Pemerintahan Belanda sudah dirasakan berat atau sulit bagi sebagian besar rakjat Indonesia, maka pada saat pendudukan Djepang sampai pada berkobarnja Revolusi Nasional, perekonomian rakjat tambah morat-marit, jang mengakibatkan bagi orang jang merasa tidak mampu lagi untuk menempuh gelombang hidup itu, terpaksa membiarkan diri hidup terkatung-katung, meminta-minta atau dengan mendjual diri sekedar untuk mentjari sesuap nasi.

Karena tingkatan hidup jang sebegitu rupa, mengakibatkan pula perubahan achlak dalam diri mereka, rasa malas dan enggan untuk mentjari nafkah dengan djalan bekerdja kian hari kian merana dalam sanubari mereka.

Bila pada achir tahun 1951 di Daerah Istimewa Jogjakarta sudah tertjatat 14.874 djumlah penganggur, maka pada tahun selandjutnja jang merupakan massa perubahan dalam lapangan perburuhan (dengan adanja massa ontlag), dapat ditentukan adanja kenaikan djumlah penganggur. Dengan ini maka berapakah djumlah banjaknja orang jang tidak punja mata pentjaharian jang tidak mendaftarkan diri, sukar ditaksir.

Usaha Pemerintah Daerah

Meskipun bagaimana beratnja beban Pemerintah Daerah, kekurangan uang merupakan segala penghalang bagi tjita-tjita untuk memperbaiki keadaan masjarakat.

Tetapi dengan kekuatan jang ada, lambat laun soal nasib orang terlantar mendapat perhatian. Diusahakan bagaimana supaja orang-orang tadi dapat kembali hidup dalam masjarakat biasa.

Usaha-usaha ini dibagi dalam tiga matjam :

a. Pemeliharaan anak-anak fakir miskin, jatim piatu.

b. Pemeliharaan keluarga (suami-isteri) jang tak tertentu mata pentjahariannja (gelandangan).

c. Pemeliharaan perempuan latjur.

Tjara penjelenggaraan

a. **Mengumpulkan :** Bagi anak-anak jang bergelandangan didapatnja dengan djalan penangkapan dipasar-pasar atau sepandjang djalan. Bagi suami-isteri biasanja mereka datang sendiri menjerahkan diri, dan djuga ada jang karena dapat tertangkap dipasar-pasar atau dibawah djembatan.

Pengumpulan terhadap perempuan-perempuan pelatjur diadakan penangkapan dikampung-kampung dan didjalan pada malam hari.

Perumahan bagi mereka semuanja dikumpulkan dalam rumah-perawatan menurut djenis mereka masing-masing.

b. **Perawatan :** Selain mereka didjamin tentang makan dan pakaiannja, soal kesehatan dilakukan pula pemeriksaan bagi mereka, terutama mengenai para perempuan pelatjur.

c. **Pendidikan :** Dalam usaha penampungan ini, diutamakan sekali pendidikan bagi mereka, untuk merubah watak mereka dari alam liar kepada keadaan masjarakat biasa (mentale omschakeling), dengan djalan matjam pendidikan :

1. Diberi pekerdjaan tangan (handenarbeid) menganjam tikar, karung, dan lain-lain.
2. Jang belum dapat membatja, diberikan kursus buta huruf (P.B.H.),
3. Peladjaran achlak, maupun bersifat ke-Tuhanan atau tidak, perlu sekali hal ini diberikan kepada mereka, supaja dapat dipakai sebagai pedoman dalam hidup mereka bila nanti kembali kepada masjarakat.

d. **Mengembalikan mereka kemasjarakat umum :**

Dalam beberapa bulan atau tahun, bilamana mereka menurut pendapat pengurus sudah dapat dikembalikan kepada masjarakat, maka oleh pengurus diusahakan pekerdjaan jang bersifat kekeluargaan (perkawinan), dapat pula terdjadi saat dalam perawatan itu, hal inipun djuga dibiajai dan diurus oleh pengurus perawatan.

Setelah mereka kembali ditengah-tengah masjarakat, tidaklah mereka terus didiamkan begitu sadja, tetapi masih diadakan hubungan dengan pengurus perawatan, setjara tindjau menindjau, atau diadakan penjelidikan oleh pe-

ngurus perawatan terhadap mereka itu dengan djalan menanjakan kepada tetangga disekitarnja.

Rumah Perawatan orang terlantar dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

I. Kepunjaan Pemerintah Daerah (Djawatan Sosial):

1. R.P. (Rumah Perawatan) **„Tjiptomuljo"** di Tegalgendu, untuk pemeliharaan orang jang landjut usianja (djempol) dan orang tjatjad (invalid: buta dan lain-lain).
2. R.P. **„Tjiptomuljo"** di Tungkak untuk perawatan anak-anak dan orang jang berkeluarga.
3. R.P. **„Budi Darmo"** untuk perawatan orang-orang budjangan laki dan perempuan.
4. R. P. **„Wilosoprodjo"** untuk anak jatim-piatu atau dari R. P. Tjiptomuljo, jang sudah dipilih dan diperkenankan tinggal disitu.

II. Kepunjaan Jajasan Partikelir.

1. Rumah Jatim P. K. U. (Muhammadijah) di Lowanu.
2. Rumah Jatim putri P. K. U. (Muhammadijah) di Ngabean.
3. R.P. **„Rekso Putro"** (Jajasan Keristen) di Sagan.

* *
*

6. SEKITAR SOAL MINORITET DALAM DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

I. **Pandangan umum :**

BILA mempersoalkan arti minoritet (suatu golongan jang termasuk ketjil djumlahnja dalam suatu Negara), maka orang akan menemukan dua unsur :

a. **Unsur ideologi,** jang bertjorak ke-igamaan atau ke-Tuhanan (kepertjajaan) dan bertjorak tjita-tjita pengetahuan.

b. **Unsur kebangsaan,** jang merupakan suatu golongan asal keturunan dari dua djenis bangsa, jang biasanja disebut golongan peranakan.

Pada dua unsur itu jang akan dibitjarakan disini ialah minoritet jang mempunjai dasar kebangsaan, karena hal inilah jang berpengaruh besar kepada soal kewarganegaraan dalam suatu Negara, terutama bagi Indonesia jang mempunjai djumlah tidak ketjil dari golongan peranakan itu.

Untuk menentukan kedudukan golongan peranakan sebagai Warga-Negara memang tidak begitu mudah sebagaimana seperti jang terkandung dalam tjita-tjita suatu tudjuan Negara jang menghendaki hanja adanja dua matjam penduduk sadja, ialah penduduk Warga-Negara dan penduduk Asing.

Demikian pula bagi Pemerintah Indonesia djuga mendjumpai kesulitan dalam sekitar menentukan kewarga-negaraan golongan peranakan itu, baik dipandang dari sudut psychologis, maupun dipandang dari sudut juridis (hukum ketata-negaraan).

Tjita-tjita Pemerintah untuk menghapuskan soal peranakan dapat dikadji dari maksud jang termaksud dalam U.U. No. 3 tahun 1946 jo. U.U. No. 6 tahun 1947 pasal 1 a, b, dan ini dapat untuk menentukan kewarga-negaraan seseorang dengan setjara aktif atau passif (actief en passief stelsel).

Dengan tjara aktif mudah didjalankan dengan menjatakan kehendak seseorang untuk masuk mendjadi Warga-Negara Indonesia.

Tetapi dengan setjara passif ternjata masih sukar untuk didjalankan, karena Pemerintah harus mempertimbangkan :

a. **Juridis,** mengenai undang-undang negara lain jang ada sangkut-pautnja dengan Undang-undang Warga-Negara R.I. Misal, dengan adanja pernjataan Undang-undang Warga-Negara Pemerintah Tiongkok tanggal 5 Pebruari 1929, pasal 1, jang menjatakan dimana seseorang asal keturunan dari ajah bangsa Tionghoa, ialah bangsa Tionghoa, (Ius sanguinnis).
   Dalam soal kesulitan juridis ini bagi golongan Peranakan Belanda sudah dapat diselesaikan dengan adanja **„Persetudjuan Perihal Pembagian Warga Negara"** dalam K.M.B.

b. **Psychologis :** Pemerintah R.I. chususnja dan rakjat Indonesia umumnja harus mendapat kejakinan, sampai dimana djauhnja dan dalamnja golongan Peranakan itu mempersatukan diri (zich oplossen) dengan Rakjat Pribumi, hal ini dapat lekas atau tidaknja ditjapai tergantung kepada perkembangan masjarakat sendiri,

II. Minoritet dalam Daerah Istimewa Jogjakarta :

Keadaan minoritet dalam Daerah Istimewa Jogjakarta tentu djuga tidak djauh berbeda dengan keadaan minoritet dilain-lain daerah. Menurut pentjatatan-djiwa sampai achir bulan Djanuari 1952 djumlah Peranakan -Tionghoa ada 8297 djiwa, mengenai golongan peranakan lainnja tidak banjak.

Baigamana keadaan penghidupan golongan Peranakan - Tionghoa ini sehari-hari ?

Teristimewa bagi Daerah Swapradja Jogjakarta dan Surakarta (Surakarta sudah mendjadi Karesidenan Surakarta) jang pada djaman Belanda disebut Vorsten Landen, perkembangan masjarakat antara golongan Pribumi dan Peranakan Tionghoa hidup berdampingan dan saling mendapatkan pengaruhnja masing-masing, baik jang merupakan kebudajaan maupun tjara hidup mereka sehari-hari, termasuk pula adat-istiadat.

Bila orang pernah mendengar perkataan bahasa **Indonesia—Belanda** atau biasanja pada djaman pemerintahan Belanda dahulu disebut bahasa **Melaju—Tionghoa,** maka dalam Swapradja Jogjakarta dan di Surakarta orang akan mendengarkan kebalikannja, ialah bahasa **Tionghoa — Djawa,** karena bahasa Djawa mempunjai pengaruh jang dalam bagi penghidupan sehari-hari baik terhadap golongan Tionghoa - Peranakan maupun Tionghoa - Totok, sebegitu rupa pertjakapan sehari-hari mereka memakai bahasa Tionghoa tjampuran sebagian besar dengan bahasa Djawa atau sama-sekali memakai bahasa Djawa, dan tidak sedikit djumlahnja **Peranakan Tionghoa** jang sama sekali tidak mengenal bahasa leluhurnja jang asal dari pihak ajah (vaderlijke zijde).

Telah dikenal pula oleh masjarakat umumnja bagaimana teguhnja bangsa Tionghoa mendjundjung tinggi kebudajaan dan adat-istiadatnja, tetapi karena beberapa faktor jang terpenting bagi penghidupan mereka jang tiap hari mempengaruhinja, misal faktor ekonomi, dan faktor kemasjarakatan lainnja, maka tidak mengherankan bila baik kebudajaan, maupun adat-istiadat mereka kian hari lebih mendekati dan bertjorak kebudajaan dan adat-istiadat Djawa.

Dalam pesta perkawinan jang terdapat pada golongan Peranakan Tionghoa pada umumnja, upatjara perkawinan selain mempergunakan upatjara dari leluhur Tionghoa, mereka tidak lupa pula mempergunakan Gagar-Majang jang dalam adat Djawa sebagai tanda kebersihan (de maagdelijkheid) dan kekajaan mempelai kedua-duanja.

Dalam pesta lain-lain, atau slamatan untuk memperingati arwah leluhurnja, sudah beberapa puluh tahun jang lampau Wajang-Kulit mengganti kedudukan Wajang Po-Te-Hi untuk meramaikan atau sebagai atjara dalam pesta atau slamatan itu. Rempah-rempah jang terdapat pada makanan upatjara slamatan sudah merupakan rempah-rempah jang terdapat pada adat Djawa.

Maka bila ditindjau lebih landjut soal kebudajaan dan adat-istiadat golongan ini jang kian hari mendekati peleburan diri kepada apapun jang bertjorak Indonesia, demikian pula dapat ditentukan bahwa pada sesuatu saat peleburan diri dari golongan Peranakan-Tionghoa ke golongan Indonesia tidak akan mendjumpai kata-kata tidak adanja kemungkinan.

Usaha dari golongan Peranakan Tionghoa jang dengan tindakan njata menanam benih mempersatukan diri dengan penduduk asli lambat-laun sudah kelihatan. Hal mana sangat menggembirakan Pemerintah, bilamana benih tadi dapat tumbuh subur dalam golongan itu, misal :

a. Menjekolahkan anaknja di S.R., S.M. dan Perguruan Tinggi Pemerintah.
b. Menjusun kapital bersama dengan golongan asli (ini sudah dibuktikan dengan berdirinja : Transport-Onderneming Kilat, Badan Penolong Kesedjahteraan Rakjat atau B.P.K.R.).
c. Gotong-rojong dalam Rukun-Tetangga.

III. Badan Pemerintahan jang mengurusi golongan peranakan/asing.

Sementara pendapat orang menjatakan, bahwa dengan adanja Badan Pemerintahan jang spisial mengurusi soal Peranakan berarti Pemerintah melangsungkan adanja soal Peranakan dalam Negara Indonesia. Tudjuan sematjam ini sama-sekali tidak dikandung tjita-tjita Pemerintah, djustru dengan adanja Badan jang mengurusi soal golongan Peranakan, Pemerintah berhasrat dan bertindak mempersatukan golongan Peranakan ke golongan Asli, menurut saluran-saluran jang tertentu dengan selalu menindjau perkembangan masjarakat dalam Negeri kita, karena sudah lajak bagi suatu Negara jang berdasarkan Demokrasi, bahwa sesuatu akan dapat terdjadi dan berdiri dengan tegak dan kuat, bilamana sesuatu itu didukung oleh kehendak masjarakat itu sendiri.

Perhatian Pemerintah terhadap soal ini, sudah dimulai sedjak tahun 1946, dengan adanja Bagian Urusan Peranakan di Kementerian Penerangan dalam Pemerintah R. I. (sebelum R.I.S. berdiri) jang dipimpin oleh M. Tabrani, dan tidak begitu lama bagian ini diserahkan kepada Kementerian Negara, dalam Kabinet Sjahrir ke 3 (2 Oktober 1946), dibawah pengawasan Menteri Negara Mr. Tan Po Gwan; dan selandjutnja dalam Kabinet Amir Sjarifuddin tahun 1947 (3 Djuli 1947), dibawah pengawasan Menteri Negara Siauw Giok Tjan. Dalam Kabinet Hatta jang pertama (29 Djanuari 1948), Urusan-Peranakan dipindahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, sampai pada saat naskah ini dibuat.

Pada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, Urusan-Peranakan dikerdjakan oleh Kantor Kewarga-Negaraan bertempat di Kepatihan Danuredjan, dengan Seksi-seksinja:

1. **Burgerlijke Stand** (mentjatat kelahiran, kematian perkawinan penduduk jang bersangkutan).
2. **Tjatatan penduduk** (Tjatjah-Djiwa).
3. **Urusan Peranakan/Bangsa Asing (U. P. B. A.)**. (Mentjatat pernjataan masuk Warga-Negara).

SCHEMA KANTOR KEWARGA - NEGARAAN
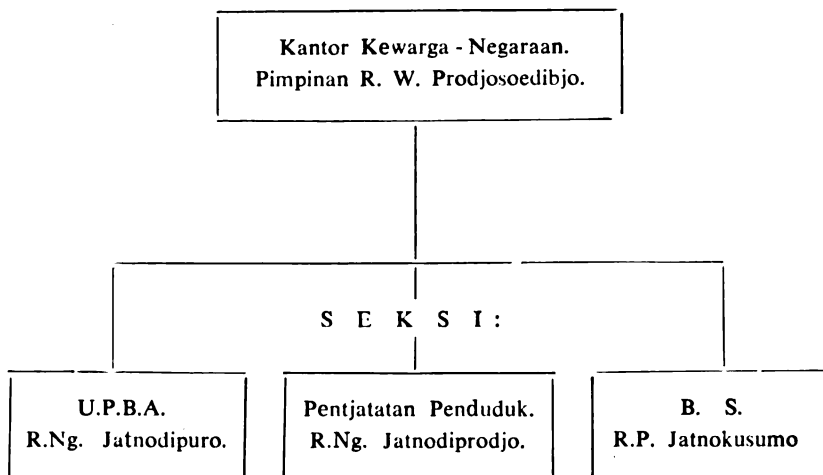
Tjatatan golongan Asing/Peranakan jang telah mendaftarkan masuk Warga-Negara Indonesia dan jang masih berkedudukan Asing

(Sampai achir 31 Djanuari 1952)

No.	Golongan:	Jang masih berkedudukan Asing:	Jang sudah mentjatatkan mendjadi Warga-negara :
1.	Tionghoa.	3.292.	4.
2.	Peranakan Tionghoa.	2.616.	5.093.
3.	Belanda.	23.	56.
4.	Peranakan Belanda.	46.	29.
5.	Austria.	2.	1.
6.	Djerman.	8.	—
7.	Rusia	—	1.
8.	Arab.	28.	1.
9.	India.	80.	--
10.	Pakistan.	8.	—.
11.	Djepang.	7.	2.
12.	Formosa.	—	1.
13.	Perantjis.	2.	—
14.	Afrika.	6.	—

* *
*

BAHAN - BAHAN GUNA MENJUSUN BAB :
V. Perkembangan pembangunan masjarakat.

didapat dari :

1. Buku Lukisan Revolusi Kempen.
2. Buku Sekitar Perdjuangan Peladjar dan Penjelesaiannja.
3. Buku Seplemen Masalah Pengangguran di Indonesia.
4. Laporan tahunan K.P.P. Jogjakarta tahun 1950 — 1951.
5. Bendel Undang-undang Kusnodiprodjo.
6. Harian Nasional Jogjakarta.
7. Harian Kedaulatan Rakjat Jogjakarta.
8. Sdr. Mudjono Sosrodirdjo Kepala Bag. Pewartaan Djapendi.
9. „ Sudomo Bandjaransari Kepala Bag. Pewartaan Djapen Kotapradja. Jogjakarta.
10. „ Surjono Sobsi Tjabang Jogjakarta.
11. „ Sardjono Djawatan Sosial Bag. Kesehatan Kotapradja Jogjakarta.
12. „ Darmojuwono dari Pendidikan Masjarakat.
13. „ Prajitno dari Djawatan Sosial Kotapradja Jogjakarta.
14. „ Oei Tik Giauw dari C.H.T.H. Jogjakarta.
15. „ Nitiwarsito dari Djawatan Pendidikan Masjarakat Daerah Istimewa Jogjakarta.
16. „ Prodjosudibjo dari Kantor U.P.B.A. Jogjakarta.
17. K.R.T. Notojudo dari Kantor Penjuluh Perburuhan Daerah Istimewa Jogjakarta.
18. Dr. K.R.T. Purwohusodo dari Djawatan Kesehatan Daerah Istimewa Jogjakarta.

1 Mei, adalah hari kemenangan Buruh. Lapar, perang, dan fasisme akan lenjap dari dunia, bila buruh giat bekerdja, untuk menghasilkan produksi jang besar.
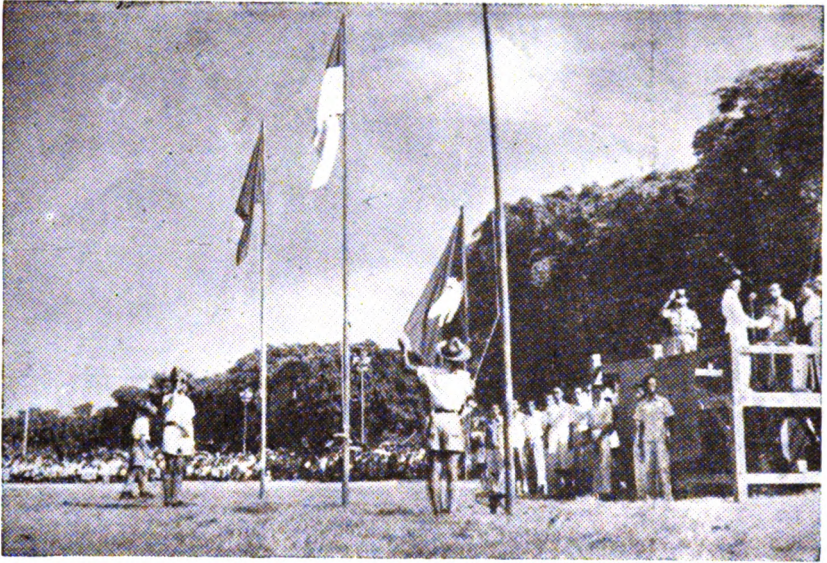
Rapat umum 1 Mei 1952 di Aloon-aloon Utara Jogjakarta.
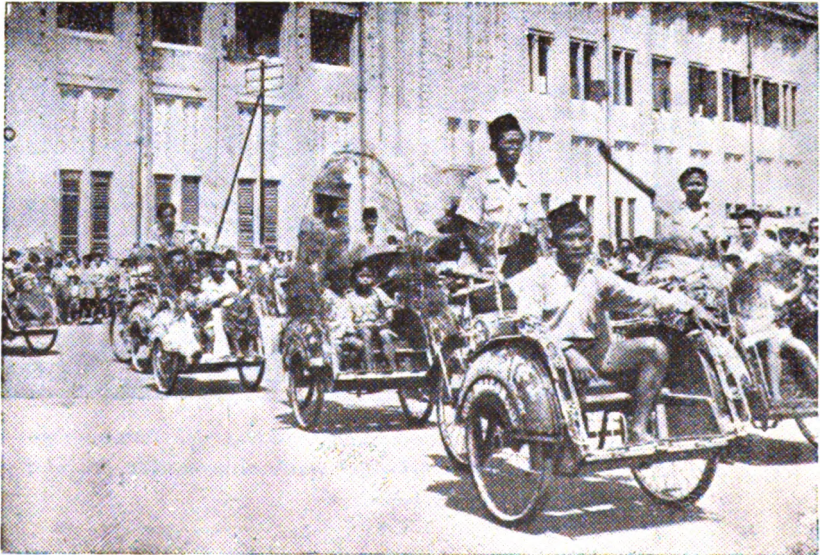
Bung betjakpun djuga turut meriahkan 1 Mei.

Buruh djuga anti buku dan film tjabul.

Pembangunan ! Diantaranja pemberantasan buta-huruf dipergiat.

Bupati Gunung Kidul „Labaningrat" membuka pameran „Balai Pendidikan Masjarakat Desa" (B P M D).

Pameran hasil pertanian B P M D.

Dia adalah salah seorang Kader Tani, dengan disahkan oleh idjazah kursusnja.
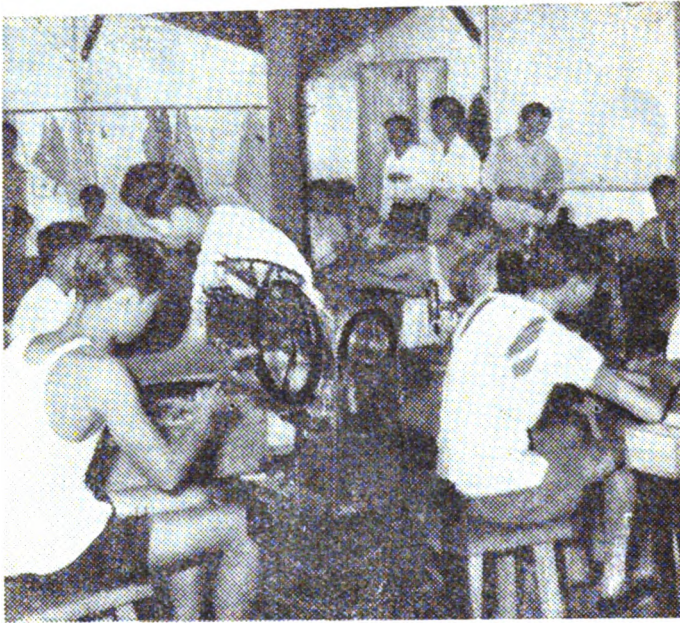
Perusahaan sepatu, usaha dari bekas pedjuang di Jogjakarta.

Penjamakan kulit di Jogjakarta, usaha bekas pedjuang.

Frambosia termasuk penjakit - rakjat di Gunung Kidul.
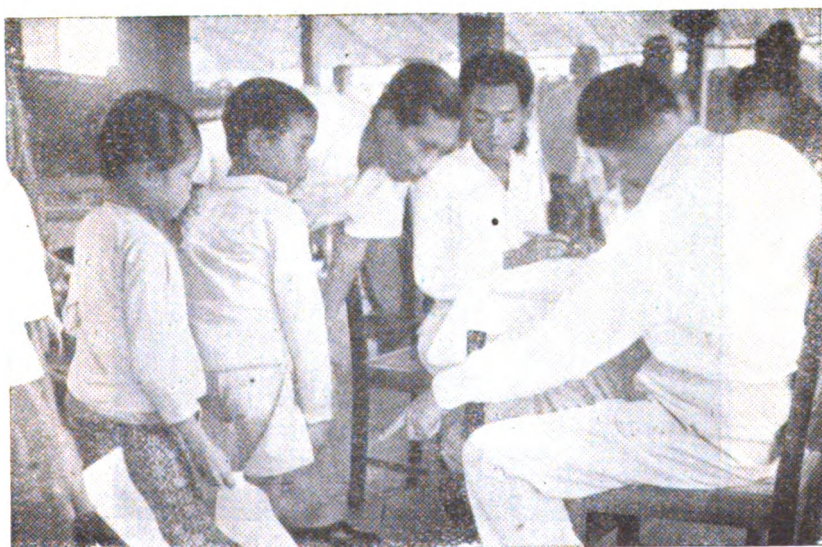
Pemberantasan frambosia didjalankan setjara masaal.

Sri Paku Alam VIII beserta rombongannja menindjau rumah - sakit penderita hongeroedeem di Kabupaten Gunung Kidul.
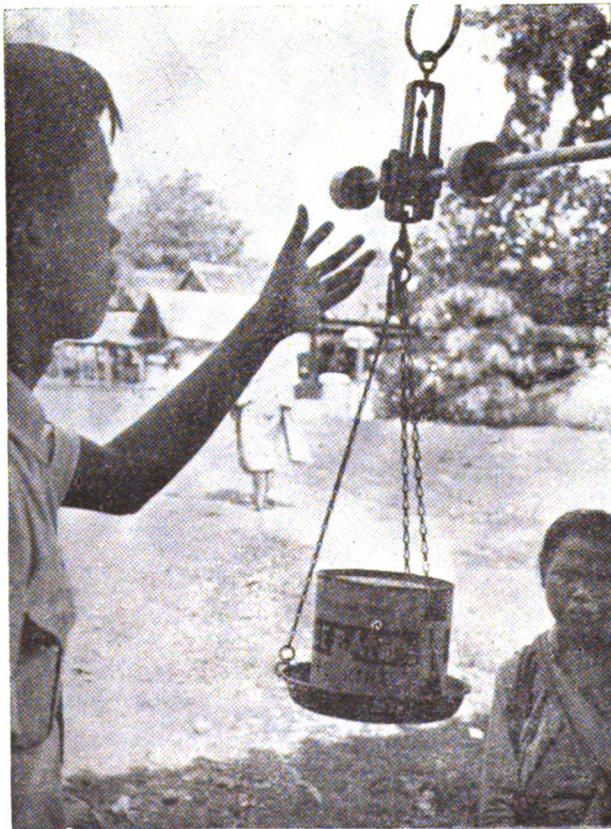
Pembagian beras kepada penderita hongeroedeem ditimbang dengan teliti.

Hongeroedeem menimpa rakjat, bantuan Pemerintah Daerah dan para dermawan berupa djaminan beras mengalir ke Gunung Kidul.

Pengobatan disamping suntikan beras.
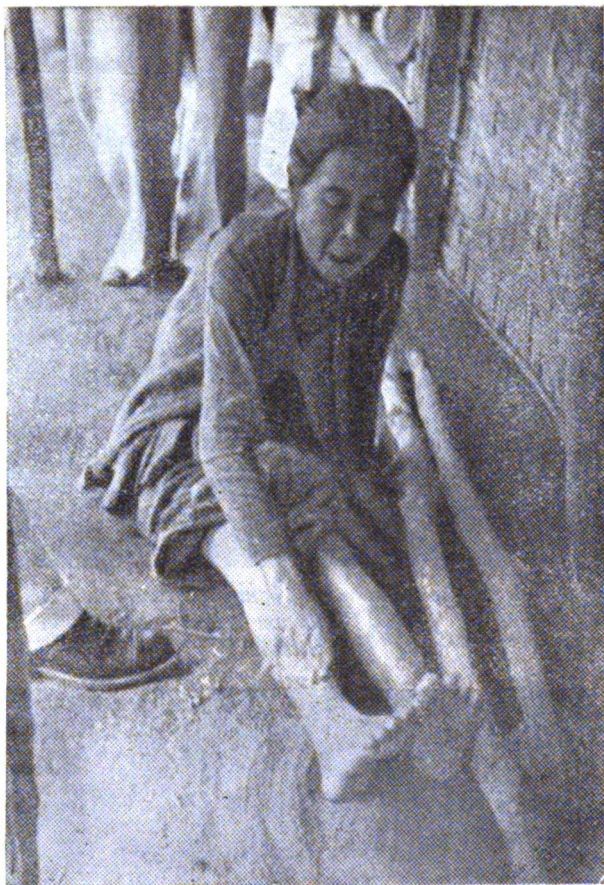
Penderita hongeroedeem.

Beberapa bal tumpukan beras tersedia untuk rakjat Pondjong dan sekitarnja.

Ditiap Kapanewon (Ketjamatan) terlihat bantuan UNICEF.
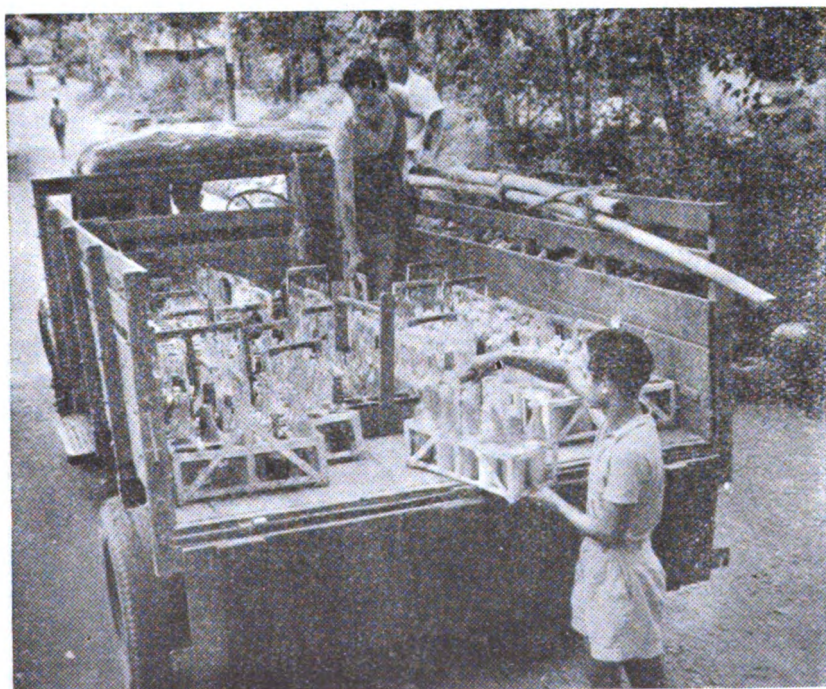
Siap dibagikan untuk baji dan penduduk jang dipandang memerlukan.

Melk perlu bagi anak-anak kita ini.

Kepada baji diadakan pembagian susu.

Ta' ada sesuatu jang kasip untuk diperbaikinja, mereka berhak mendjadi Warga Negara jang lajak dalam masjarakat.

Anak nakal? Bukan! Mereka masih perlu dididik sebaik-baiknja.

Para transmigran siap meninggalkan tempat jang lama untuk menudju tempat jang baru.
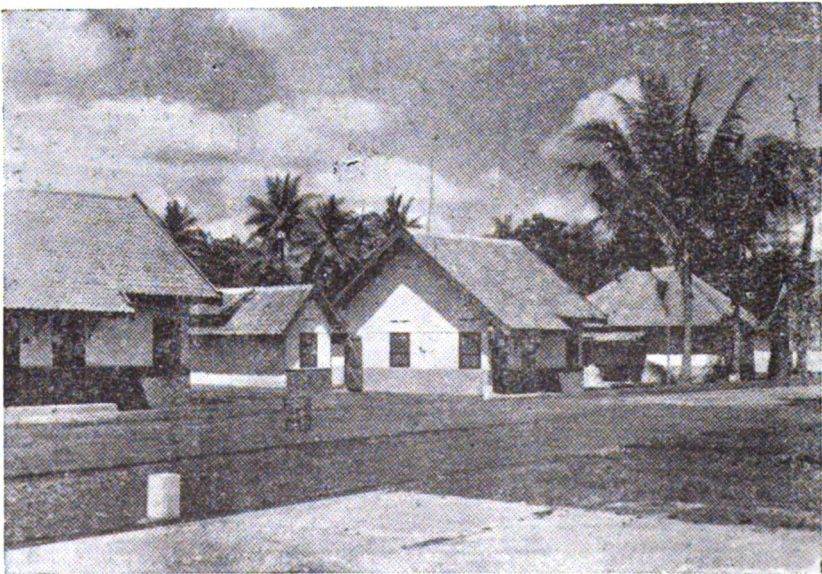
Rakjat butuh rumah. Pemerintah Daerah menjediakan dan rakjat dapat membeli dengan mengangsur.
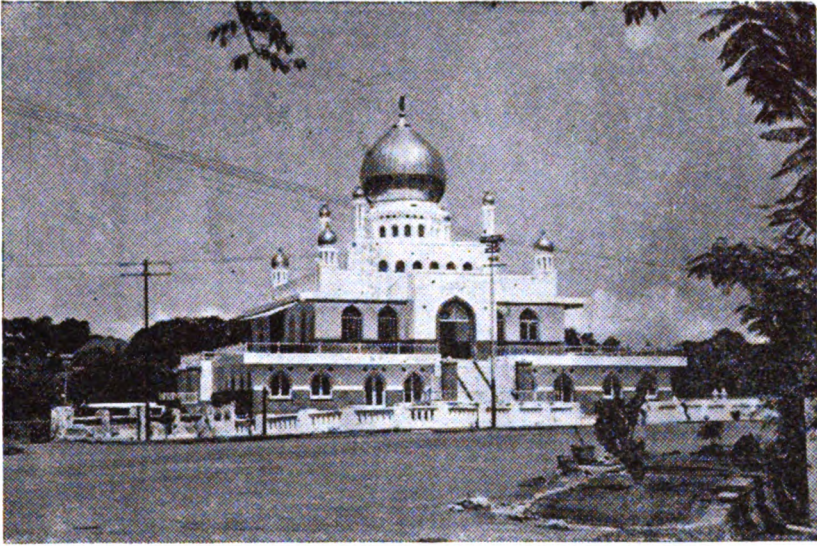
Lahirnja mesdjid Sjuhada merupakan lambang pembangunan djiwa.

Pembangunan „Taman Bahagia" di Semaki, sebagai tanda ketinggian budi orang-orang jang telah ditinggalkan oleh pahlawan-pahlawannja.
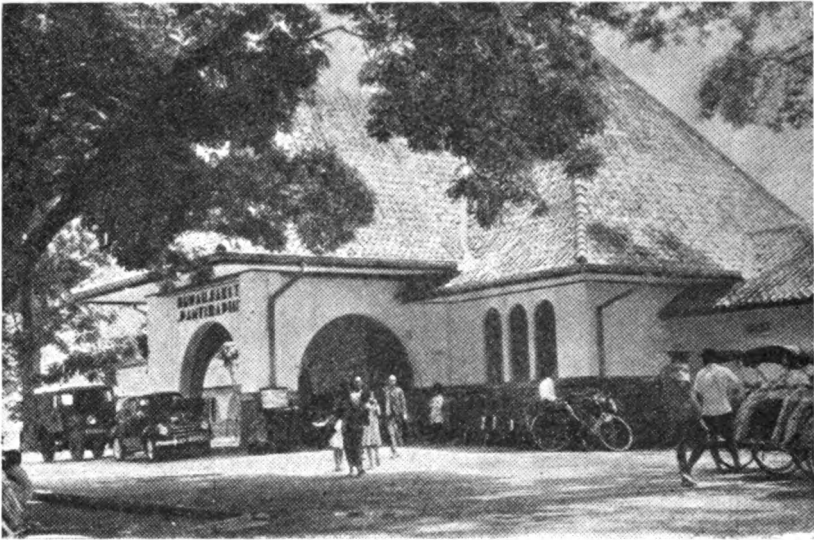
Rumah Sakit „Panti Rapih" di Terban Taman.

Rumah Sakit „Bethesda" di Gondokusuman.

Rumah Sakit „P. K. U." di Ngabean kepunjaan Muhammadijah.

Rumah Sakit Mata „Dr. Yap".

Rumah Sakit Mangkubumen Bagian dari Universitit Negeri Gadjah Mada.
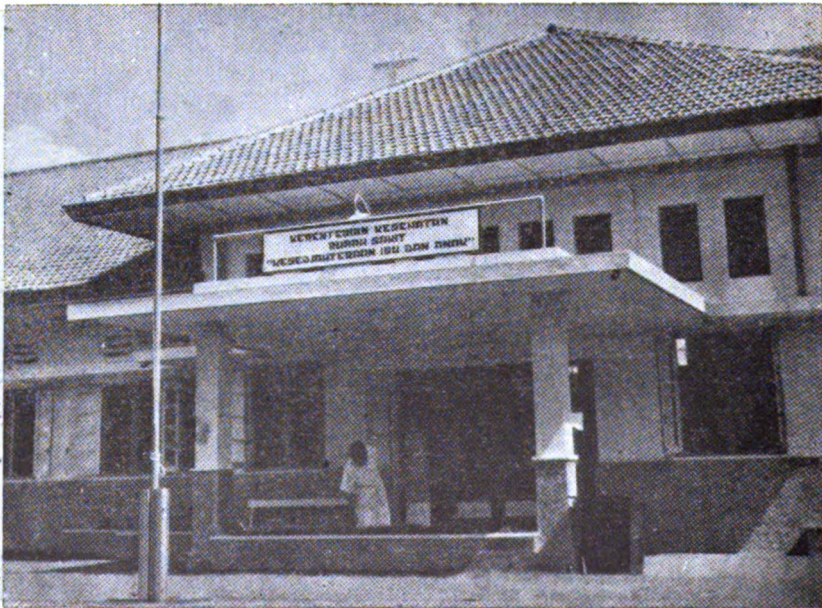
Rumah Sakit „Kesedjahteraan Ibu dan Anak" di Mangkujudan Jogjakarta.

BAB VI :

MEMELIHARA DAN MEMBANGUN KEBUDAJAAN

1. PEMELIHARAAN BENDA-BENDA KEBUDAJAAN KUNA

Pekerdjaan Kepurbakalaan di Daerah Istimewa Jogjakarta 1945 — 1952.

PEKERDJAAN kepurbakalaan dan keadaan jang tidak tenteram sukarlah disesuaikan. Karena itu maka tahun-tahun pertama sesudah penjerahan Djepang merupakan masa jang sulit bagi pegawai-pegawai Djawatan Purbakala dahulu. Pekerdjaan jang dilandjutkan selama dan segera sesudah Perang Dunia ke-II terpaksa dihentikan karena aksi militer Belanda jang ke-II. Disekitar pusat daerah penjelidikan kepurbakalaan Prambanan terdjadilah pertempuran-pertempuran jang hebat dan sengit. Baru setelah daerah Jogjakarta diserahkan kembali, pekerdjaan disitu dapat dimulai lagi. Pada waktu terdjadi kerusakan-kerusakan besar pada kantor seksi bangunan dilapangan tjandi Prambanan, foto-foto, gambar-gambar dan laporan-laporan jang merupakan hasil pekerdjaan bertahun-tahun telah hilang. Petjahan-petjahan artja Bogem ditepi djalan besar dan lubang-lubang peluru pada bagian Barat-daja tjandi Çiwa menundjukkan, bahwa bangunan-bangunan purbakala itu sendiri, jang terletak didaerah pertempuran, tidak terhindar dari kerusakan-kerusakan.

Dalam zaman Republik, dalam zaman R.I.S., dan djuga dalam bulan-bulan pertama dari pemerintahan Republik Indonesia, Bagian Purbakala dari Dinas Kebudajaan — sebagaimana namanja dahulu — di Jogjakarta dan Djawatan Purbakala jang berkantor pusat di Djakarta bekerdja terlepas jang satu dari jang lain, sehingga menimbulkan suasana jang kurang enak bagi keduanja. Baru mulai 1 Nopember 1950 (sebenarnja keputusan untuk itu baru diambil beberapa bulan kemudian) kedua bagian dari „Oudheidkundige Dienst" dahulu dipersatukan lagi. Sedjak itu kantor di Jogjakarta, jang kemudian dikembalikan ketempatnja lama di Prambanan, ada dibawah seksi bangunan dari Dinas Purbakala.

Disamping kesukaran-kesukaran besar jang harus dihadapi kantor di Jogja dalam melaksanakan tugasnja, jang pun dalam zaman Republik dan zaman R.I.S. tidak hanja meliputi daerah kesulitan sadja melainkan seluruh daerah Republik (daerah Republik dahulu) ada satu anasir penting jang menguntungkan ialah bahwa dikantor tsb. berkumpul sebagian besar dari tenaga-tenaga jang berpengalaman dari seksi bangunan. Inilah jang memungkinkan bahwa setiap kali dapat dilandjutkan lagi pekerdjaan lama atau dimulai pekerdjaan baru. Dengan demikian dapatlah kita dibawah ini mengemukakan keuntungan jang sangat penting itu terhadap kerugian-kerugian dalam tahun-tahun sebelum penjerahan kedaulatan jang dengan singkat telah kita tundjukkan diatas.

Dalam tahun-tahun 1945 — 1952 pekerdjaan-pekerdjaan kepurbakalaan di Daerah Istimewa Jogjakarta berpusat pada tiga tempat: kelompok Loro Djonggrang. Ratu Boko, dan tidak djauh dari situ Banjunibo.

Tjandi Çiwa di Prambanan dan pembangunannja kembali sudah bertahun-tahun lamanja dapat dianggap sebagai lambang bagi pekerdjaan Dinas

Purbakala, suatu pekerdjaan pemugaran jang benar-benar dapat dipertanggung djawabkan setjara ilmu pengetahuan, jang dapat mengembalikan suatu milik kebudajaan Indonesia jang sangat indah. Perhatian dari pihak orang Djawa dan disamping itu dari siapapun djuga, bangsa Indonesia ataupun bangsa Asing, jang mengundjungi lapangan pertjandian itu, sudah membuktikan betapa tepatnja keputusan jang telah diambil dari 25 tahun jang lalu itu, ialah bahwa prinsip pemugaran, asal sadja dapat dipertanggung djawabkan setjara ilmu-pengetahuan, tidak hanja dapat dibela, tetapi bahkan merupakan suatu kewadjiban. Setelah mengadakan persiapan jang lama jang telah dimulai pada tahun-tahun sebelum „masaalah pemugaran" tsb. diatas (kira-kira th. 1917), dan jang dimulai lagi sepuluh tahun kemudian dengan tjara-tjara jang baru, pada th. 1937 dimulailah dengan pembinaan kembali jang sebenarnja. Pekerdjaan ditaksir akan makan waktu 8 tahun, tetapi peperangan menjebabkan pekerdjaan itu tidak dapat selesai pada waktu jang telah direntjanakan. Setelah penjerahan Djepang pekerdjaan terhenti selama kira-kria satu tahun, kemudian dilandjutkan lagi sampai aksi militer Belanda jang ke-II.

Dalam bulan Desember 1948 pemugaran telah sampai kepada bagian terbawah dari atap tingkat ke-4, hanja penjelesaiannja jang lebih halus baru sampai kepada atap tingkat ke-2. Ketjuali kesukaran-kesukaran jang lain, kekurangan semen menjebabkan pekerdjaan tidak dapat berdjalan dengan lantjar, sedangkan djustru kita menghendaki ketjepatan berhubung dengan bahaja rapuhnja perantjah jang tidak dapat bertahan sekian lamanja. Setelah perhubungan-perhubungan bertambah baik lagi, dapatlah pekerdjaan berlangsung setjara teratur, dan penjelesaiannja tampak didepan kita. Pada tgl. 16 Djanuari 1952 dapatlah diperingati kenjataan, bahwa tidak lama sebelumnja telah dapat dipasang kembali puntjak Çiwa jang tingginja 47 m itu dalam suatu upatjara jang dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan banjak orang-orang lain jang telah membantu pekerdjaan Dinas Purbakala dalam tahun-tahun itu dan jang telah mentjurahkan perhatian mereka. Adapun penjelesaiannja jang terachir dapatlah waktu itu diharapkan akan tertjapai dalam tempoh satu tahun. Petir jang menjambar puntjaknja — sjukur tidak membawa kerusakan-kerusakan jang besar — mengingatkan kita akan bahaja-bahaja jang mengantjam sebuah tjandi jang telah dibina kembali. Nampaklah dengan djelas bahwa penempatan sebuah tangkal petir diatas tjandi itu merupakan suatu keharusan. Akan tetapi ternjata bahwa pelaksanaannja makan waktu banjak sekali, sehingga sampai sekarang sebagian dari perantjah disekeliling tjandi Çiwa masih sadja ada, untuk memasang kawat tangkal tersebut. Dalam bulan Agustus 1952 pembinaan kembali sebenarnja telah selesai, hanja masih tinggal penjusunan batu langkannja dan penempatan kembali pintu gerbang untuk keempat bilik tjandi.

Semakin banjak bagian perantjah jang dapat dibongkar, semakin banjak jang terlihat dari tjandi Çiwa jang perkasa itu. Kalau kita datang dari Jogja dan hampir sampai di Prambanan, maka mulai dari djembatan sudah — bahkan sebetulnja dari djauh didaerah sekitarnja — tampaklah bangunan jang besar itu, mendjulang tinggi diantara runtuhan-runtuhan, disamping beberapa puntjak lainnja, ialah dari tjandi-tjandi apit jang djuga telah dibina kembali.

Dari dekat kelihatanlah, dari berapa bagian sadja tjandi itu harus disusun kembali, terutama dibagian-bagian atas jang tadinja telah runtuh dari djarak jang tinggi. Untuk meringankan tekanan himpunan batu-batu jang sangat besar itu, dibuatkanlah tiga buah rongga bersusun didalam teras tjandi diatas bilik tengah. Jang teratas hingga sampai puntjak.

Mengenai langkan — jang hingga sekarang masih dikerdjakan djuga — belum ada kepastian benar-benar. Sebagian dari batu-batu jang berukiran tari-tarian dapat dipasang kembali dengan pasti, jang lain dipasang kembali

hanja berdasarkan petundjuk-petundjuk dari sudut ilmu bangunan. Tetapi batu-batu itu dipasang sedemikian rupa, sehingga kemudian, apabila makin banjak kita dapatkan petundjuk-petundjuk, dan ternjata ada kekeliruan, pemasangan itu dapat diperbaiki dengan tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan.

Dalam tahun 1944 tjandi-tjandi **Brahma** dan **Wishnu** telah selesai pasangan pertjobaannja dari bagian tubuhnja. Pasangan pertjobaan itu sekarang masih ada disebelah Selatan lapangan pertjandian. Dibelakang kedua tjandi tsb. sedang dikerdjakan pemasangan pertjobaan tingkat-tingkat atap. Tingkat jang pertama dapat diketemukan kembali dengan lengkap. Agar dapat memusatkan segala tenaga pada pembangunan kembali tjandi Çiwa, maka pekerdjaan mentjari batu dari kedua tjandi tsb. diatas dihentikan. Pun pekerdjaan membinanja kembali belum dapat dimasukkan dalam rentjana, berhubung dengan banjaknja pekerdjaan jang lain, baik disini maupun ditempat-tempat lain, jang masih menunggu penjelesaiannja.

Dikerdjakan djuga pemasangan pertjobaan gapura - gapura dari tembok keliling pertjandian jang sebelah dalam. Jang terlengkap ialah gapura disebelah Utara, jang pasangan pertjobaannja ditempatkan tidak djauh disebelah Utara tembok itu sendiri.

Guna mendapatkan gambaran tentang bentuk tjandi-tjandi perwara, jang mula-mula berdjumlah 224 buah tersusun dalam empat baris antara tembok keliling jang sebelah dalam dan jang kedua, maka telah ditjoba untuk memugar salah satu dari padanja. Pada kedua buah pertjobaan jang pertama, diantaranja tidak mungkin diadakan pemugaran jang lengkap. Memang sukar akan menentukan dengan pasti dari tjandi perwara manakah sesuatu batu itu berasal, — oleh karena tjandi-tjandi perwara itu hampir sama semuanja. Pada pertjobaan ketiga ternjata mungkin ditjapai hasil jang lebih baik. Sekarang sedang dibangun kembali sebuah tjandi perwara disisi Timur, tepat disebelah Selatan poros Timur-Barat. Tjandi itu akan dapat dibina kembali dan akan mentjapai tinggi kira-kira 14 m. Dalam bulan Agustus 1952 pembangunan kembali telah sampai pada perbingkaian bawah badan tjandi. Sebuah tjandi perwara jang lain ternjata tidak selesai dari dahulunja, dan terhenti sampai diatas atap tingkat kedua.

Sumuran tjandi perwara jang sedang dibina kembali sekarang hanja berisi petjahan-petjahan batu, tetapi dibawah lapisan batu jang merupakan dasar sumuran tsb. terpendam sebuah peti batu jang terdiri atas tiga buah batu jang ditumpuk-tumpuk.

Dataran tinggi Ratu - Boko, jang terletak diatas djorokan Gunung Kidul disebelah Barat-daja pertjandian Loro-Djonggrang, telah lama menarik perhatian penduduk disekitarnja dan ahli-ahli purbakala. Betulkah disitu dahulu ada sebuah keraton sebagaimana dikatakan dalam tjeritera-tjeritera? Dan kalau betul, bagaimanakah rupanja ? Dan mengapakah terletak disebuah tempat jang kelihatannja tidak lajak dipakai sebagai tempat kediaman ? Meskipun disitu sudah sedjak th. 1937 diadakan penggalian-penggalian dan pemugaran-pemugaran, tetapi masih belum djelas benar bagaimana kedudukannja itu semua. Betul orang biasa mengatakan tentang keraton, sitinggil, alun-alun dsb. — tak dilupakan pula sebuah keputren — tetapi bagaimana keadaan jang sesungguhnja ? Apakah guna sebuah bangunan jang dianggap sebagai tempat pembakaran disamping lapangan-lapangan dan gapura-gapura dari kelompok bangunan disebelah Barat ? Untuk apakah gua-gua pertapaan dan tempat-tempat penggalian batu tidak djauh disekitarnja ? Gambar perentjanaan kembali dari lapangan pertjandian disebelah Barat jang sangat djelas itu dan jang telah diterbitkan dalam Amerta I, tidak djuga dapat memberikan djawabannja. Dinas Purbakala masih terus melandjutkan pemugaran kelompok gapura-gapura disana; pekerdjaan itu merupakan landjutan dari pekerdjaan tahun-tahun sebelum dan selama Perang Dunia ke-II. Lebih chusus lagi bagi tahun-tahun 1945 — 1952 ialah penjelidikan jang dimulai pada tahun 1948 atas lapangan dekat apa jang dinamakan batur

pendapa ditengah-tengah timbunan batu-batu jang terserak, tembok-tembok, lapangan-lapangan, djalan-djalan, jang merupakan „keraton jang sebenarnja". Disebelah Timur batur pendapa itu ada diketemukan sekelompok gapura-gapura, dinding-dinding, dan kolam jang dalamnja kira-kira 7 m — terlalu dalam untuk dikatakan kolam, terlalu besar (kira-kira 5 × 3,50 m) untuk dikatakan sebuah sumur — membudjur disepandjang ambarau jang membentang sedjadjar dengan sisi pendapa. Meskipun lapangan jang tergali itu makin lama makin tampak tersusun, masih djuga belum dapat diketemukan hasilnja lain dari pada dengan foto-foto dan uraian singkat.

Lapangan pekerdjaan jang ketiga, Banjunibo, dapat ditjapai apabila mengikuti djalan ke Sorogedug sesudah sedikit melalui Ratu-Boko, sampai ada penundjuk djalan jang menundjukkan kearah Timur, menundjuk ketempat penemuan jang dimaksudkan. Tempat ini dahulu dalam buku-buku mengenai kepurbakalaan hanja disebutkan sebagai beberapa bukit dengan batu-batu. Tetapi setelah diadakan penggalian-penggalian jang sudah dimulai sedjak sebelum perang ternjata, bahwa disini kita berhadapan dengan sebuah kelompok pertjandian jang sangat menarik perhatian. Sebuah tjandi jang apabila dipandang sendiri, sudah penting, dikelilingi oleh stupa-stupa. Bentuk kaki tjandi itu sudah terlebih dahulu dapat ditetapkan dengan pasti. Dilapangan pertjandian itu terdapat pasangan pertjobaan sebagian dari bilik-pintunja, tetapi hubungannja dengan badan tjandi masih belum djelas. Badan tjandinja sendiri tidak disusun disamping kaki tjandi sebagaimana biasa melainkan diatasnja, pada tempat aslinja, untuk mendapatkan hubungan jang lebih njata antara dinding luar dan dalam. Meskipun demikian masih belum dapat kita memperoleh gambaran jang lengkap tentang bentuk dinding-dinding itu. Karena itu maka pembangunannja kembali dihentikan buat sementara, sambil menunggu petundjuk-petundjuk lebih landjut jang akan didapat dari penggalian penjelidikan lapangan itu. Telah mendjadi rentjana untuk lebih mentjurahkan perhatian terhadap penggalian-penggalian penjelidikan lapangan tersebut.

Barang siapa memperhatikan kesukaran-kesukaran jang dihadapi dalam tahun-tahun jang telah dibitjarakan dengan singkat diatas, kesukaran-kesukaran jang mengenai tiap-tiap bagian ketjil dari pekerdjaan tersebut dan jang hampir-hampir tidak memungkinkan kita bekerdja terus, tidak boleh tidak akan mengutjap sjukur, bahwa dalam waktu itu dapat dikembalikan beberapa bangunan-bangunan kuna kepada masa dan bangsa sendiri, dengan didorong oleh rasa penuh tjinta dan bakti terhadap bangunan-bangunan itu. Inilah pekerdjaan jang masih harus diselesaikan oleh banjak orang dalam tahun-tahun jang akan datang, tetapi jang hanja mungkin dikerdjakan dengan rasa tjinta dan bakti tadi.

* * *

2. PEMELIHARAAN KEBUDAJAAN DAERAH

SEDJAK tanah-air kita mendjadi negara jang merdeka, maka nampak dimana-mana hasrat rakjat untuk **menjatukan** segala apa jang dalam zaman pendjadjahan Belanda berpetjah-belah. Pertama kali rasa nasional perlu disatukan untuk seluruh rakjat diseluruh kepulauan. Tidak ada lagi bangsa Djawa, bangsa Ambon, bangsa Menado, bangsa Sumatera dll.; hanja bangsa Indonesia-lah jang ada. Tidak ada kewarga-negaraan jang bermatjam-matjam seperti dizaman Belanda; jang ada hanja orang-orang bangsa Indonesia atau bangsa asing. Satu Negara, satu Pemerintahan, satu Pengadilan, satu Tentara .... pendek segala urusan jang perlu disatukan, dan jang mungkin disatukan, harus ada satu sadja.

„Satu bahasa" .... sesuai dengan tuntutan Kongres Pemuda kita tahun 1928 di Djakarta, harus diartikan sebagai **satu bahasa nasional** untuk seluruh Indonesia. Bahasa-bahasa lainnja jang dimiliki dan dipakai oleh rakjat didaerah-daerah, tetap ada dan diakui sebagai **bahasa-bahasa daerah.** Tidak mungkin dan tidak perlu bahasa-bahasa jang telah bersatu dengan djiwa rakjat didaerah-daerah itu, dimusnakan begitu sadja. Dapat kita saksikan sendiri, banjak negeri-negeri jang „ber-satu-negara" pun mempunjai dan memelihara bahasa-bahasa daerah seperti: Rusia, Swis, Belgia, India, Filipina d.l.l. Bahkan ada jang menggunakan dua bahasa daerahnja sebagai „bahasa nasional" setjara resmi, jaitu **Belgia** (dengan bahasa Perantjis dan bahasa Nederlandnja) dan **Swis** (dengan bahasa-bahasa Djerman, Perantjis dan Italia-nja). Dalam pada itu alasan-alasan jang dianggap paling penting ialah agar tetap adanja kesatuan negara. Pernah rakjat Vlaanderen (Belgia sebelah Utara) mengantjam hendak memisahkan diri dari Belgia - Selatan, apabila dalam soal kebudajaan pada umumnja, chususnja dalam soal bahasa mereka akan di-Perantjiskan. Sedjarah Belgia pernah dengan tegas menundjukkan pula tidak sukanja rakjat Vlaam (disisi Utara) terhadap kesatuan agama sebagai sjarat mutlak untuk mewudjudkan satu bangsa dan satu negara. Seperti diketahui rakjat Belgia Selatan beragama Katholik, sedangkan sebagian rakjat disebelah Utara memeluk agama Protestant.

Memang benar; memang tidak salah. Apabila dalam satu negara hanja ada satu bahasa, hanja satu agama, satu kebudajaan, pastilah keadaan itu akan mengokohkan kesatuan bangsa dan negara. Sebaliknja kalau kesatuan bahasa, agama dan kebudajaan tadi hendak ditjapai dengan tekanan atau paksaan, lebih-lebih sebagai **siasat politik,** besarlah kemugkinan rakjat akan berpetjah-belah. Lain keadaannja, apabila karena sudah ada kesatuan kenegaraan lalu timbul „konvergensi", ja'ni laku saling berdekatan antara bentuk-bentuk dan isi hidup dan penghidupan rakjat.

Konvergensi jang sedemikian inilah jang dengan sendiri akan menimbulkan kesatuan kodrati jang „natuurlijk", jang runtut laras atau „harmonisch"; jang „concentrisch", jaitu bertitik pusat satu, namun mempunjai garis lingkaran sendiri-sendiri. Bersatu dengan pihak-pihak lain, namun tidak kehilangan kepri-

badiannja sendiri. Dengan begitu maka kesatuan jang tertjapai akan merupakan kesatuan jang kokoh kuat, karena didalamnja terkandung djumlah segala kekuatan-kekuatan pribadi daripada bagian-bagiannja.

Dipandang dari sudut jang kita kemukakan itu maka jakinlah, bahwa perkembangan kebudajaan-kebudajaan daerah dinegeri kita, perlu sekali, djustru untuk mentjapai kesatuan kebudajaan jang kaja dan kuat, kebudajaan jang nasional dan mendjamin tetap adanja kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Untuk djelasnja baiklah dibawah ini kita bahas soal pemeliharaan kebudajaan daerah, untuk mentjapai kebudajaan jang luhur dan bernilai dan lajak bagi tanah-air kita jang merdeka dan berdaulat; pula seperti tersebut tadi, untuk mendjamin tetap adanja kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Kita mulai dengan pengakuan, bahwa tidak kurang dari 3½ abad, selama pendjadjahan Belanda, kita hidup berpisah-pisah, tidak sadja dalam arti kemasjarakatan, namun djuga dalam arti politik dan kebudajaan. Sebelum pendjadjahan kolonial jang sangat lama itu, rakjat kita sungguhpun belum sampai merupakan satu rakjat jang „compact" menurut ukuran kenegaraan jang modern, akan tetapi kesatuan djiwa jang nasional sudah ada, berkat adanja negara jang berpusat (di Sriwidjaja dan kemudian Madjapait). Dalam pada itu djanganlah dilupakan, bahwa negeri kita jang disebut Nusantara itu merupakan daerah-daerah kepulauan, sedangkan pulau-pulau kita jang besar-besar semuanja merupakan daerah-daerah pegunungan. Semua itulah jang menjukarkan hubungan lalu-lintas bagi penduduknja. Dengan begitu maka „assosiasi" (perhubungan dan saling mempengaruhi), apalagi „assimilasi" (bersatu-padu) tidak dapat terlaksana dengan gampang. Inilah jang menjebabkan pula adanja perbedaan bentuk-bentuk, tjorak-tjorak dan isi antara kebudajaan didaerah jang satu dengan jang lain. Sekarang kita hidup dizaman jang modern, ja'ni selain hubungan pos, telegrap, telepon, ada hubungan radio, hubungan kapal laut dan udara, hubungan pendidikan dan pengadjaran, hubungan djawatan-djawatan pemerintahan jang bebas, dan lain-lain sebagainja. Dalam zaman ini tidak ada lagi daerah jang „geisoleerd". Dengan begini maka perkembangan kebudajaan-kebudajaan daerah dengan sendiri akan terdjadi, djuga perkembangan kearah „konvergensi" antara kebudajaan daerah jang satu dengan jang lain.

Marilah kita menindjau sepintas lalu keadaan diluar negeri kita.

Seperti dapat kita saksikan sendiri di negeri-negeri jang tadinja berdiri atas daerah-daerah jang agak berlainan tjorak kebudajaan, achirnja dapat djuga terwudjud persatuan kebudajaan dari negeri itu. Kebudajaan nasional di Nederland misalnja terdjadi dari laku konvergensi daripada kebudajaan-kebudajaan didaerah-daerahnja (Holland, Friesland, Groningen, Utrecht, Limburg, d.l.l-nja). Terbukti disitu bahwa puntjak-puntjak kebudajaan diseluruh daerah-daerah tersebut, sesudah terbentuknja negara kesatuan, makin lama makin saling berdekatan dan achirnja mewudjudkan kesatuan kebudajaan jang diakui sebagai kebudajaan nasional Nederland. Achli lukis Rembrandt, jang tersohor diseluruh dunia, dulu adalah seorang pelukis Holland. Kemudian sesudah dapat berdiri negara kesatuan Nederland ia terkenal dan diakui sebagai achli lukis Nederland. Malah pada zaman dahulu dalam lingkungan ke-propinsian dapat djulukan „Amsterdamsche schilder". Dan ini tjotjok dengan pendirian orang di Nederland sendiri, jang berkejakinan, bahwa kebudajaan Nederland tidak akan dapat mendjadi besar dan agung, tanpa puntjak-puntjak kebudajaan daerah-daerahnja. Pula bahwa kebudajaan daerah-daerah propinsinja tidak akan dapat berkembang seandainja tidak ada puntjak-puntjak kebudajaan kota.

Barang tentu disamping puntjak-puntjak kebudajaan Nederland, jang berasal dari alam dan zaman kepropinsian jang lampau, banjak pula bentuk-bentuk kebudajaan baru, jang terdjadi sesudah ada persatuan bangsa. Ja'ni jang timbul dan berkembang tidak melalui kedaerahan propinsi. Begitulah kebudajaan

nasional Indonesia sebenarnja dan seharusnja tidak sadja terdjadi dari segenap puntjak-puntjak kebudajaan lama diseluruh daerah-daerah Indonesia (jang dahulu hidup berpisah-pisahan), namun disamping peninggalan-peninggalan dari nenek-mojang kita itu, berkembang pula bentuk-bentuk kebudajaan baru, jang tidak merupakan landjutan langsung dari kebudajaan-kebudajaan daerah, karena merupakan tjiptaan-tjiptaan baru. Tjiptaan-tjiptaan baru ini kebanjakan berasal dari atau dapat pengaruh dari kebudajaan-kebudajaan asing, baik dari Eropah dan Amerika maupun dari Asia; namun karena dapat memberi kepuasan dan dibimbing serta dipelihara oleh angkatan baru kita, lambat laun kebudajaan jang baru itu mendapat tjorak warna Indonesia.

Pada permulaannja kebudajaan baru tadi merupakan „putera" atau „turunan" kebudajaan asing, namun karena dipelihara baik-baik oleh angkatan baru tersebut dan kemudian digemari oleh rakjat banjak, maka achirnja seolah-olah diadopteer oleh rakjat dan kelaknja mendjadi kebudajaan Indonesia, jang dianggap „murni" dan „nasional". Baiklah kiranja disini kita ingati adanja **kesenian wajang** kita, jang terdapat diseluruh pulau Djawa, di Madura, Bali, Sumatera dan Kalimantan. Kini kesenian wajang, jang luhur dan indah itu, merupakan kesenian „nasional" dan dianggap „murni". Padahal dahulu terdjadi sebagai „putera" atau „turunan" kebudajaan Hindu dengan Ramayana dan Mahabharatanja jang tersohor diseluruh dunia itu.

Jang sedang diuraikan ini hendaknja diterima sebagai pendjelasan dari salah suatu dalil jang sudah sering dilahirkan oleh ahli kebudajaan kita seperti K.H. Dewantara jang antara lain sebagai berikut: Kebudajaan nasional Indonesi ialah sari-sari dan puntjak-puntjak kebudajaan jang terdapat diseluruh kepulauan Indonesia, baik jang lama maupun jang tjiptaan-tjiptaan baru jang berdjiwa nasional.

Apabila kita mengikuti uraian tadi, tentunja dapatlah dimengerti, bahwa pemeliharaan kebudajaan daerah itu tidak hanja penting untuk mendjamin akan tetap adanja kebudajaan-kebudajaan daerah jang lama dan jang bernilai tinggi, namun djuga untuk mendjamin adanja kelandjutan antara zaman lama, (jang kaja kebudajaan jang bernilai tinggi), dengan zaman baru serta konvergensi antara jang baru dan jang lama. Dengan begitu maka bentuk-bentuk kebudajaan baru, jang berasal dari kebudajaan asing, kelak akan merupakan kebudajaan jang bernilai dan bertjorak atau berdjiwa nasional, sehingga tidak lagi merupakan „copy" belaka dari Barat.

Selain itu tidak boleh dilupakan, bahwa pada saat peralihan zaman kolonial kezaman kemerdekaan sekarang ini, boleh dikata belum ada kebudajaan baru jang pasti dan tertentu. Jang ada hampir semata-mata kebudajaan daerah, diantaranja banjak jang sungguh-sungguh bernilai tinggi. Dan hal ini diinsjafi benar-benar oleh rakjat disegenap kepulauan Indonesia. Perhatian terhadap kebudajaan lama jang masih melekat pada hidup dan penghidupan rakjat diseluruh kepulauan Indonesia masih tetap ada, sekalipun mereka semua ikut serta dalam pembangunan dan perkembangan kebudajaan nasional baru itu. Hasrat untuk memelihara kebudajaan lama jang bertjorak kedaerahan tadi, nampak timbul dengan keras sesudah Djepang mengusir pendjadjah kolonial Belanda. Waktu itu Djepang berhasrat „men-Djepangkan" rakjat kita. Kita sendiri belum dapat mewudjudkan kesatuan kebudajaan Indonesia. Hanja kebudajaan-kebudajaan daerahlah jang dapat kita gunakan sebagai perisai untuk menangkis serbuan „kultuur-imperialisme" Djepang, jang dilakukan setjara haibat sebagai alat politik oleh Djepang itu.

Sebetulnja sudah sedjak zaman Belanda, didalam rentjana pendidikan Taman-Siswa sudah dapat dimasukkan systeem pendidikan dan pengadjaran jang berdasarkan kebudajaan bangsa sendiri, karena hanja dengan djalan itulah rakjat dapat menghindarkan pendjadjahan asing, baik kulturil maupun politik.

Dalam pada itu berulang-ulang pimpinan pusat Taman Siswa mengandjurkan pemeliharaan kebudajaan daerah dimasing-masing wilajah dari pada tjabang-tjabangnja. Untuk Djawa Tengah pada umumnja (jang njata-njata masih menundjukkan kesatuan, „kultuur-melieu"), chususnja untuk Jogjakarta, dimulai dengan memelihara segala bentuk-bentuk kebudajaan jang tjukup bernilai tinggi seperti bahasa dan kesusasteraan daerah, seni suara, baik jang bersifat vokal maupun instrumental, kesenian tari, kesenian lukis (membatik dan menjungging), sedjarah dalam bentuk „babad" dan kesenian drama (wajang kulit, dan wajang orang), baik jang masih dipelihara dalam kraton maupun jang masih hidup dikalangan rakjat dan lain-lain sebagainja. Untuk itu telah diusahakan berhubungan dan minta bantuan dari orang-orang jang ahli. Almarhum Raden Pandji Djojopranoto dari Pura Paku Alaman waktu itu menuntun peladjaran bahasa Kawi dan lagu-lagu njanjian klasik (tembanggede, tembang madya dan tembang matjapat).

Pimpinan peladjaran gending, wajang-orang dan tari-tarian, teristimewa rati-tarian bedaja dan serimpi, diserahkan kepada pemimpin-pemimpin „Krida Beksa Wirama", jaitu Pangeran Surjodiningrat, Pangeran Tedjokusumo dan pembantu-pembantunja.

Dalam pada itu banjak bantuan diperoleh dari Keraton dan Paku Alaman, Pada waktu itu Taman Siswa adalah satu-satunja perguruan, jang pertama kali mempeladjarkan tari bedaja dan serimpi setjara systematis dengan idzin Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.

Untuk kepentingan-kepentingan tersebut Taman Siswa sudah sedjak berdirinja mempunjai gamelan sendiri, mendirikan „pendapa agungnja", guna dapat memelihara suasana jang kulturil dan klasik setjara „integral", ja'ni utuh dan penuh.

Berhubung dengan perhatian jang sangat besar dari dunia internasional terhadap kesenian Djawa, jang a.l. terbukti dengan datangnja beberapa orang wanita dari luar-negeri untuk mempeladjari tari-tarian bedaja dan serimpi (dibawah tuntunan „Krida Beksa Wirama") dapatlah disini diberitahukan, bahwa pernah Taman Siswa kepondokan Mrs Swamminadan dengan puterinja Miss Mrinalini dan tuan Shanti Deva Gose, (guru seni di Shanti Niketan Rabindranath Tagore). Dan wanita jang tersebut itu sebenarnja adalah tamu Sri Sultan VIII dan Sri Mangkunagoro VII, tetapi pondokannja diserahkan kepada Taman Siswa. Mrs. Swamminadan sekarang mendjadi anggauta Parlemen India; Miss Mrinalini kini sudah bersuami dan mendjadi orang ahli tari jang terkenal dan sering mempertundjukkan tari-tarian Hindu baru, dalam mana nampak gerak-gerak jang serba indah, berasal dari tari-tarian bedaja dan serimpi.

Sedjak Proklamasi Kemerdekaan segala usaha itu tidak sadja dilandjutkan, namun djuga dipergiat. Selain tjabang-tjabang Taman Siswa sendiri, banjak djuga golongan-golongan lain jang minta pimpinan dalam soal pemeliharaan kebudajaan daerah tadi dari Taman Siswa Pusat di Mataram.

Systeem „Sari-Swara" jang dengan sengadja ditjiptakan untuk memudahkan dan memoderniseer pengadjaran lagu dan gending Djawa (dan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX jang sekarang ini dan marhum Mangkunegoro VII dipakai setjara resmi oleh djawatan-djawatannja pendidikan dan pengadjaran diseluruh daerahnja masing-masing) kini terpakai djuga oleh golongan-golongan penggemar kesenian lagu Djawa dibeberapa wilajah, tidak sadja di Djawa Tengah, namun djuga dilain-lain daerah bahkan diluar Djawa oleh penduduknja jang berasal dari Djawa. Untuk usahanja kesenian (lagu-gending, tarian dan wajang) kini Taman Siswa di Jogja dapat subsidi dari Pemerintah.

Selain systeem „Sari-Swara" di Jogjakarta ada pula peladjaran lagu gending dengan memakai systeem jang terkenal sebagai „Kepatihan-schrift", jang berasal

dari pemimpin Kepatihan Solo jang dahulu (marhum K. R. M. A. A. Sosrodiningrat). Systeem tersebut kini di Jogjakarta diadjarkan djuga oleh Basir Arintoko, Kepala S.R. „Wilosoprodjo".

Bedanja „Sari-Swara" dengan „Kepatihan-schrift" (jang kedua-duanja menggunakan angka) pokoknja ialah bahwa „Sari-Swara" memakai dasar-dasar jang kira-kira sama dengan „Chevé methode" (jang angka-angkanja : 1 — 2 — 3 — 4 — 5 bernilai menurut „patet"-nja), sedangkan „Kepatihan-schrift" kira-kira sama dengan systeem „a - b - c", tetapi dengan menggunakan angka-angka : 1 — 2 — 3 — 5 — 6 — (dalam hal mana angka-angka Kepatihan-schrift mempunjai nilai-nilai tetap).

Sebenarnja sudah lama sebelum lahirnja systeem „Sari-Swara", di Jogjakarta sudah ada systeem untuk menulis (lebih tepat menggambarkan) lagu gending Djawa, jang terkenal dengan namanja **„noot-rante"** (sesuai dengan memukul saron). Systeem „noot-rante" ini memang praktis untuk memainkan „saron" (instrumental), namun menurut pendapat K.H. Dewantara sukar untuk djadi tuntunan njanjian (vokal).

Tentang kebudajaaan jang berhubungan langsung dengan hidup kebatinan, didalam pendidikan Taman Siswa diwudjudkan sebagai pengadjaran adab dan kesusilaan. Adapun dasar-dasar dan garis-garis besar jang digunakan ialah segala apa jang terdapat didalam masjarakat kita seumumnja, mulai zaman dahulu hingga sekarang. Adjaran-adjaran ethica jang terkandung didalam filsafat agama-agama Hindu, Islam, Kristen dan lain-lainnja jang merupakan dasar-dasar jang pokok, diambil sebagai bahan-bahan peladjaran adab dan kesusilaan.

Dengan begitu dimaksud akan memperluas serta memperdalam keinsjafan anak-anak kita dalam segala soal kebatinan, dengan tidak terikat oleh dogma-dogma jang tertentu, namun berlingkung dalam suasana „Ke-Tuhanan", seperti jang dimaksud oleh sila jang pertama dalam Pantjasila Negara kita. Karena biasanja pokok-pokok dan pangkal-pangkal atau inti-sari daripada adjaran adab dan kesusilaan itu biasanja tersimpan dalam pelbagai adat-istiadat dari sesuatu bangsa, maka sebaiknjalah adat-istiadat jang terus dipelihara rakjat ditiap-tiap daerah itu selalu dipentingkan. **Bukannja kita harus mengikat diri kepada** segala adat-istiadat dalam bentuk-bentuknja jang asli. Dalam hal ini hendaknja **hanja inti-sari atau maksud-maksudnja jang pangkal jang harus kita utamakan.** Djanganlah sekali-kali dilupakan, bahwa adat-istiadat itu dalam bentuk-bentuk dan isinja terus berganti-ganti menurut tuntutan-tuntutan tiap-tiap perubahan alam dan zamannja. Misalnja menghormat orang lain, orang tua, orang pembesar, dizaman ini tetap harus kita lakukan, tetapi djanganlah dengan djongkok dan sembah seperti jang kita kenali di zaman feodal jang kini telah lenjap itu.

Tjontoh lainnja lagi : tjara-tjara pergaulan antara orang-orang perempuan dan laki-laki dizaman sekarang harus sudah lain bentuk-bentuk dan isinja dari pada tjara-tjara dizaman jang lampau, dimana ada systeem „p i n g i t a n". Pergaulan tadi sudah seharusnja bersifat **bebas,** tetapi djanganlah dalam pada itu inti-sari kesusilaan sampai terlanggar. „Kebebasan" dapat dilakukan dengan tetap mendjundjung tinggi sjarat-sjarat adab dan kesusilaan, jang menghendaki keluhuran dan keindahan hidup manusia.

Adanja kekatjauan dalam hubungan bebas antara putera dan puteri dizaman sekarang ini, menurut anggapan K.H. Dewantara ialah karena angkatan baru zaman kini kebanjakan masih dikuasai atau dipengaruhi aliran² fikiran baru, berasal dari pengadjaran Barat, jang kurang sempurna atau hanja setengah² diterima dan di-insjafinja, dan jang pokoknja timbul dari meradjalelanja **intelectualisme** (mengagungkan kekuatan fikiran) dan **individualisme** (mengagungkan diri pribadi). Selain itu biasanja kebudajaan kita, **karena kebekuannja,** tidak sanggup menjediakan tjara-tjara pergaulan baru jang sesuai dengan alam dan zaman jang serba bebas sekarang ini, sehingga para pemuda dan pemudi menggunakan tjara-tjara jang berke-Barat-Barat-an jang tidak sesuai dengan djiwa

ke-Timuran. Kita mengerti betapa sukarnja bagi seorang untuk mengganti, lebih-lebih melepaskan adat-istiadat jang biasanja sangat ditaati rakjat. Adat adalah tjara pergaulan se-seorang dengan masjarakat untuk mendjamin ketertiban dan kedamaian hidup bersama. Itulah sebabnja orang biasanja segan-segan melepaskan adat-istiadat rakjatnja. Orang takut, djangan-djangan pergantian adat tadi menimbulkan nasib diri pribadi jang tidak diinginkan, atau mengurangkan tertib-damainja hidup bersama. Sebaliknja tiap-tiap orang jang tidak suka memperbaharui kebiasaan-kebiasaan hidupnja sesuai dengan alam dan zamannja, pastilah ia akan dikedjar-kedjar oleh perubahan-perubahan tata pergaulan jang timbul karena bergantinja alam dan zaman tadi.

Achirnja tak boleh tidak ia akan terpaksa djuga meninggalkan adat jang lama, karena kekolotannja akan menjukarkan hidupnja.

Pada achir uraiannja K.H. Dewantara berkata: „Saja pertjaja, bahwa segala adat lama, baik jang **feodal** atau **kolonial,** maupun jang **animistisch,** pada suatu waktu dengan sendirinja akan lenjap.

Sebelum menutup uraian saja ini jang bermaksud mengutarakan beberapa usaha Taman Siswa di Jogjakarta, jang bersangkutan dengan **pemeliharaan kebudajaan daerah serta alasan-alasannja,** maka perlulah diketahui, bahwa ada golongan-golongan lain pula jang berdjasa dalam hal itu. Sebelum Taman Siswa memulai usahanja, jang kadang-kadang harus dilaksanakan setjara atau dengan perdjuangan, sudah ada golongan lain, jaitu „Krida Beksa Wirama". jang dengan tuntunan Pangeran Soerjodiningrat, Pangeran Tedjokusumo dan pemimpin-pemimpin lainnja dengan bantuan moril dan materiil dari Sri Sultan Hamengku Buwono ke VIII dan ke IX, berhasil mempengaruhi para pemuda dan pemudi kearah kegemaran terhadap kesenian tari, lagu vokal dan instrumental, serta seni wajang Djawa. Kursus pedalangannja, jaitu „Habiranda", sudah dapat mendidik dan melatih orang-orang kearah seni pedalangan setjara systematis diantaranja terdapat orang-orang jang tadinja sudah melakukan pekerdjaan sebagai „dalang". Bahkan golongan kami sendiri, Taman Siswa, bukan lain melainkan „Krida Beksa Wirama" jang memberi tuntunan dan bantuan banjak dalam peladjaran seni tari pada umumnja, seni tari bedaja dan serimpi chususnja. Sesudah bagian Kesenian dari Taman Siswa di waktu itu seakan-akan merupakan „tjabang" dari K.B.W., maka makin lama makin mendjalar kegemaran para pemuda dan pemudi peladjar terhadap kesenian-kesenian daerah tersebut. „Kridanggo" berdiri, disusul dengan lain-lain golongan, misalnja „Instituut Kebudajaan", ranting IPPI dan jang tak boleh dilupakan ialah organisasi para peladjar umum, jang terkenal dengan namanja „Irama Tjitra", golongan mana kini mendjadi badan kesenian jang terkemuka dan sudah beberapa kali melawat ke-luar Jogja dan selalu mendapat sukses besar. Masih banjak golongan-golongan lain menusul, diantaranja organisasi-organisasi orang-orang dewasa jang kebanjakan sekarang sudah mendapat subsidi dari Djawatan Kebudajaan dari Kementerian P.P. & K. dan karenanja makin lama makin berkembang kearah kemadjuan dan kesempurnaan.

Tentang usaha Taman Siswa sendiri baiklah diketahui pula, bahwa T.S. mulai dulu sudah memberi kesempatan kepada para peladjar-peladjarnja wanita untuk memperoleh „Idjazah bedaja - serimpi", agar mereka lalu mendapat hak untuk mengadjar tari-tarian puteri, baik dalam kalangan perguruan Taman Siswa maupun dikalangan lain. Baik pulalah disini diperingati, bahwa dalam so'al pemeliharaan kesenian-kesenian daerah seperti jang tertera dimuka tadi, golongan kami berpendirian, bahwa kesenian kita jang klasik, jang luhur dan indah dan kini semata-mata berupa „kesenian-keraton" atau „hofkunst" itu seharusnjalah dapat dimiliki oleh rakjat umum. Dengan begitu maka rakjat akan beruntung, sedangkan kesenian kita akan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan ini berarti kesenian kita dapat terhindar dari kebekuan atau „verstarring", jang biasanja dapat mematikan atau membelokkan perkembangan kearah jang tidak normal (dekadensi)".

3. KEHIDUPAN KEAGAMAAN

MENGURAIKAN kehidupan keagamaan jang hanja terbatas dengan bilangan tudjuh tahun (1945—1952), tentulah tidak akan ada arti dan faedahnja bagi seseorang jang menghadjatkan agar uraian itu dapat dipergunakan meneropong dan me-reka-reka keadaan masjarakat sesuatu bangsa jang tengah hendak membangun setjara besar-besaran baik materieel maupun moreel, sama ada jang mengenai kelahiran ataupun jang menjangkut sekitar soal kebathinan.

Karena djiwa dan rasa Islam jang dengan kebidjaksanaan para penjuluh Islam pada waktu-waktu jang lampau itu, maka dalam tjabang-tjabang lapang hidup dan kehidupan, terseliplah rasa atau djiwa ke Islaman itu, dengan sangat luasnja dan kadang-kadang sampai tidak dengan keinsjafan masjarakat itu sendiri. Tjontoh-tjontoh mengenai hal itu banjak sekali. Diantaranja: Upatjara dalam perkawinan, chitanan, kematian, waktu lahirnja baji.

Dilihat dari segi agama.

Kalau kita maksudkan toleransi antara kaum Muslimin dengan kaum Christendom dipandang dari sudut keagamaan bolehlah kita katakan, bahwa antara kedua golongan itu ta' ada sama sekali pertentangan antara satu sama jang lain. Meskipun jang demikian itu belum boleh dikatakan, bahwa jang demikian itu sudah berarti dapat bekerdja sama, dalam memadjukan geraknja agama mereka masing-masing.

Peladjaran agama Kristen pun kini banjak djuga diadjarkan pada sekolah-sekolah baik jang mereka dirikan dengan setjara dimintakan subsidi Pemerintah dan terutama jang dari usaha mereka sendiri atas beaja mereka sendiri. Pada pendjara-pendjara dan lain sebagainja, pun usaha itu mereka lakukan dengan setjara sabar tetapi penuh kegiatan.

Begitulah usaha-usaha kaum Kristen dalam memadjukan agamanja dengan tiada memerlukan menjinggung-njinggung kaum Muslimin. Mereka menginginkan dan memang menudju agar ummat mereka benar-benar tahu akan kewadjibannja sebagai ummat Kristen. Djika ummat Kristen telah dapat memenuhi apa jang mendjadi kewadjiban sebagai ummat Kristen dan mendapat pula kebebasan dari Pemerintah dalam mengerdjakan agamanja, maka itupun bagi mereka telah dianggapnja baik dan tjukup.

Disamping itupun, kaum Muslimin djuga nampak kegiatannja dalam mengusahakan kemadjuan agamanja, dengan memperbanjak pendirian madrasah baik jang rendah, menengah dan atas. Pendirian pengadjian-pengadjian jang tiada bersifat sekolah, jang terdiri dari para orang tua-tua pun kelihatan bertambah madju. Diperkuatkannja organisasi-organisasi Islam, diperbanjakkannja organisasi Islam seperti berdirinja Peladjar Islam Indonesia jang menghimpun peladjar-peladjar Islam, berdirinja H.M.I. jang menghimpun para maha-

siswa Islam, berdirinja mesdjid Sjuhada', bertambah populernja pengadjian Putri Islam di Kota Baru Jogjakarta, semakin bertambah banjaknja pengikut pengadjian Arrosjad jang dipimpin oleh Njonjah Zaenab Nuri, diperbaikinja Madrasah Mu'alimin Ketanggungan, dibangunkannja Madrasah Mu'alimat Notopradjan, disempurnakannja Pondok Krapjak jang dipimpin oleh K. H. Abdullah Affandi, dibangunkannja Pesantren Aisjijah di Kauman, dan lain sebagainja. Kesemuanja itu adalah merupakan tanda-tanda kegiatan ummat Islam dalam lapangan memadjukan agamanja.

Kedua golongan itu nampak begitu giat dalam mengichtiarkan dan mengusahakan untuk kemadjuan agamanja dalam kalangan masjarakat.

Kita haruslah bersjukur kepada Tuhan, jang mereka itu bekerdja dengan baik, dengan tiada main tentang menentang. Hal itu nampak bahwa dari masing-masing berasa bahwa dalam mereka mengerdjakan dan memadjukan agamanja adalah berdasarkan kejakinan dan keinsjafan. Djadi tiadalah seperti jang digambarkan dan kenjataan dimasa sebelum Indonesia Merdeka. Tetapi dengan gambaran-gambaran jang sekarang dapat dilihat njata, bahwa mereka mengerdjakan agama adalah benar-benar karena keinsjafan dan kejakinan dari hati mereka jang sutji.

Dari pihak Pemerintah pun kini dapat kita rasakan, bahwa Pemerintah senantiasa mengusahakan dan mengichtiarkan, agar seluruh penduduk Indonesia dalam mengerdjakan dan memeluk agama senantiasa mendapat perlakuan dan djaminan jang lajak. Pemerintah tahu dan merasa bahwa Pemerintah Indonesia adalah djelmaan dari segenap ummatnja, djelmaan dan dorongan dari seluruh penduduk dan warga negaranja. Oleh karenanja sampai sekarang Pemerintah pun tiada menampakkan sesuatu agama mendjadi agama Negara. Melainkan Pemerintah mengambil dasar jang dapat menggambarkan bagaimana kepertjajaan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah tahu bahwa Indonesia banjak agama. Karenanja maka tiadalah agama jang satu dipandang lebih dari agama jang lainnja. Adapun kalau Pemerintah memberikan bantuan dan sokongan kepada agama-agama itu tentulah didasarkan kepada sedikit banjaknja jang sama memeluknja. Djadi perbedaan banjak sedikitnja sokongan bukanlah karena memperbedakan agama itu, melainkan atas perbandingan para pemeluknja itu.

Adapun dasar Negara Indonesia jang memang nampak lebih representatif seperti jang terkenal ialah dengan dasar Pantja-Sila :

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Kebangsaan jang bulat.
4. Kedaulatan rakjat jang penuh.
5. Keadilan sosial.

Berdasarkan dengan Pantja-Sila jang sudah njata itu, maka sudah sewadjarnja kalau Pemerintah dengan semua alat-alatnja baik setjara vertikal maupun setjara horizontal, dalam pelaksanaannja tentulah selalu mempunjai maksud menudju kesatuan politik agama seluruh Indonesia ini. Mentjampuri agama setjara intensif, tentulah bukan itu jang mendjadi maksudnja. Negara hanjalah mendjaga dan membimbing dan mengusahakan adanja kesatuan politik agama itu sadja, lain tidak.

Oleh karenanja, maka usaha dan pembimbingan Pemerintah terhadap masjarakat dalam menjusun dan mendorong masjarakat agar dapat menudju masjarakat jang harmonis, masjarakat jang aman damai, masjarakat jang utama, tentulah Pemerintah tidak mengadakan pertjampuran tangan atau ikut sertanja dalam soal-soal intern sesuatu agama.

Membangkitkan semangat beragama dari kalangan orang-orang agama itu sendiri, dimana masjarakat itu perlu dibantu dan disokong, maka Peme-

rintah dapat memberikan sokongan dan bantuannja. Bantuan Pemerintah terhadap pendirian tempat-tempat beribadat, baik jang berupa geredja maupun jang berupa mesdjid, maka kesempatan itu adalah mendjadi tanda bukti bagaimana Pemerintah memberikan perlindungan dan pendjaminan terhadap pembenaran atas tindakan mereka itu.

Sampai sekarang jang telah sepakat diakui oleh masjarakat pada umumnja, selaras dengan falsafat hidup bangsa kita, baik seluruh tanah air, maupun sedaerah-sedaerah, diakui bahwa agama adalah benar-benar perlu untuk membentuk bangsa Indonesia, sebagai bangsa jang utama. Soal agama mana jang harus dianut, maka hal itu tergantung pada masing-masing, melainkan jang njata dan terang, bahwa agama itu adalah perlu untuk perbaikan moraal.

Masjarakat kini mengakui, bahwa perseorangan atau setjara bergerombolan, baik jang berada sebagai pegawai negeri, baik jang hidupnja sebagai peladjar, mahasiswa atau apapun djuga, diakui bahwa mereka jang ta'at kepada agamanja adalah lebih baik untuk achlak.

Disamping pengakuan seperti jang telah kita terakan diatas, maka kini masjarakat pun menggemakan suatu tendens, bahwa agama adalah **harus** tidak membawa kekatjauan dalam masjarakat dan Negara. Karenanja maka Pemerintah lengkap dengan segala alat-alatnja menetapkan, bahwa agama dan kepertjajaan bagaimana dan apa sadja boleh dipeluk oleh setiap warga negara, selagi tidak akan mengakibatkan kekatjauan.

Untuk djelasnja, maka baiklah disini kita gambarkan adanja angka-angka jang dengan angka-angka ini pembatja dapat menimbang sendiri.

Disamping itu, baik djuga disini dibentangkan hal-hal jang mengenai kehidupan keagamaan, dan jang mengenai agama Kristen, Katholik beserta angka-angka.

Keterangan/Keadaan	Tahun 1951	Tahun 1952.
1. Mesdjid	482 buah	496 buah
2. Langgar	3015 buah	3015 buah
3. Madrasah Rendah	147 buah	138 buah
4. Muridnja	19680 orang	14599 orang
5. Gurunja	618 orang	535 orang
6. Madrasah Menengah	31 buah	21 buah
7. Muridnja	3282 orang	2130 orang
8. Gurunja	102 orang	169 orang
9. Sekolah Rakjat Islam	? buah	20 buah
10. Muridnja	? orang	3644 orang
11. Gurunja	? orang	73 orang
12. Sekolah Menengah Islam	? buah	7 buah
13. Muridnja	? orang	995 orang
14. Gurunja	? orang	62 orang
15. Sekolah Guru Islam	2 buah	8 buah
16. Muridnja	332 orang	1225 orang
17. Gurunja	24 orang	107 orang
18. S.R. Negeri jang diadjar agama Islam	47 buah	99 buah

19.	Murid jang mengikuti	10718 orang	59056 orang
20.	Guru jang mengadjarkan	25 orang	52 orang
21.	Pengadjian biasa	2889 tempat	3193 tempat
22.	Muridnja ada	49976 orang	69925 orang
23.	Peringatan Nuzulul Qurân	703 tempat	471 tempat
24.	Hadirin ada	134365 orang	116573 orang
25.	Peringatan Isra' Mi'radj	997 tempat	727 tempat
26.	Hadirin ada	429454 orang	230520 orang
27.	Peringatan Maulud Nabi	652 tempat	? tempat
28.	Hadirin	75255 orang	? orang
29.	'Idul — Fithri	722 tempat	656 tempat
30.	Hadirin	200064 orang	142855 orang
31.	'Idul — Adha	591 tempat	514 tempat
32.	Hadirin	79166 orang	92665 orang
33.	Fithrah beras sebanjak	64757,75 kg	70377,80 kg
34.	Berudjud uang sebanjak	Rp. 5863,43	Rp. 15386,—
35.	Dibagikan kepada	48576 orang	72745 orang
36.	Qurban berupa lembu	32 ekor	31 ekor
37.	Qurban berupa kambing	977 ekor	1197 ekor
38.	Dibagikan kepada	33690 orang	34281 orang
39.	Nikah ada	37540 orang	25952 orang
40.	Nikah gratis ada	92 orang	29 orang
41.	Talak ada	15507 orang	12070 orang
42.	Talak gratis ada	13 orang	5 orang
43.	Rudjuk ada	609 orang	495 orang
44.	Rudjuk gratis ada	3 orang	4 orang
45.	Zakat padi ada	belum terdaftar	142,19 Kwintal
46.	Dibagikan kepada	idem	9133 orang

*

A. KEHIDUPAN AGAMA KRISTEN

BILAMANA pada waktu zaman Belanda dan Djepang dikatakan orang, bahwa agama Kristen adalah agama Barat, maka pandangan itu sekarang telah berubah sama sekali; hal ini antara lain disebabkan karena banjak pula putera Indonesia dari pemeluk agama Kristen jang merupakan patriot-patriot dizaman revolusi; dengan kata lain: agama Kristen telah mulai mendapat tempat ditengah-tengah masjarakat Indonesia.

Apa jang disebabkan diatas membawa akibat, jaitu perkembangan agama Kristen lebih lantjar dari pada zaman-zaman jang lampau. Kalau pada zaman jang lampu dikatakan bahwa orang masuk Kristen karena dorongan nasi, pada zaman sekarang karena keinsjafan bathin. Salah sebuah dari banjak tjontoh: tidak sedikit adanja orang-orang dewasa jang masuk mendjadi orang Kristen, kebanjakan orang-orang terpeladjar. Pada tanggal 25-12-1952 ada pembaptisan orang dewasa hingga 46 orang di geredja Gondokusuman, belum lagi ditempat lain.

Pun usaha dilapangan pendidikan, masjarakat Jogja banjak jang telah mengenal BOPKRI (Badan Usaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia). Badan itu telah banjak mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari S.R. sampai S.M.A. Pada bulan Oktober 1951 tertjatat 30 buah sekolah dengan 7168 orang murid. Setiap tahun sekolah-sekolah landjutan jang berada di Jogjakarta senantiasa dibandjiri anak-anak tjalon murid.

Usaha sosial lainnja boleh dikatakan kurang. Bagaimana toleransi antara golongan-golongan agama ?

Sudah mendjadi rahasia umum, bahwa tiap-tiap agama ada inti kompetisi antara satu dengan lainnja. Di Jogja dapat orang boleh merasa puas dengan hubungan baik antara satu dan lainnja.

Sebagai gambaran jang njata disini dilampirkan statistik geredja Kristen seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta seperti berikut:

Statistik achir tahun 1951

No.	Aliran	Tempat Kebaktian		Pengantar agama				Penganut
		Geredja	Rum.	Pend.	Guru	Lain2	Djum.	
1.	Gereformeerd	27	15	10	27	108	145	3680
2.	Kerasulan	8	4	2	11	16	29	611
3.	Tionghoa	1	—	1	1	9	11	514
4.	Protestant	1	1	—	1	5	6	300
5.	Advent	1	—	—	1	8	9	52
6.	H.K.B.P.	1	—	—	—	9	9	158
7.	Pantekosta	2	1	1	2	—	3	401
8.	Effatha	1	—	2	1	4	7	111
	8 Aliran	43	21	16	44	159	219	5827

Dan achirnja, apakah jang diusahakan oleh Bg. Kristen dari kantor Agama untuk membimbing perkembangan berbagai agama dalam suasana toleransi dan kemerdekaan beribadat ? Usahanja tidak ada, ketjuali mendjaga, agar ummat Kristen merasa mendapat kebebasan beragama dalam arti jang luas, jang sesuai dengan kehendak ummat itu sendiri, jang disesuaikan dengan suasana umumnja.

*

B. GEREDJA ROMA - KATHOLIK

DITENGAH-TENGAH kota dimana berdiri kantorpos, kalau orang berdjalan kearah Timur kira-kira 100 m, akan melihat sebuah gedung disebelah Selatan djalan, dengan ada tulisan didinding muka atas „I.H.S." dan salib dipuntjak.

Gedung ini adalah geredja Katholik jang pertama di Jogjakarta. Geredja ini didirikan pada permulaan abad 20 ini. Diwaktu itu gedung inilah satu-satunja geredja Katholik diseluruh Daerah Istimewa Jogjakarta. Baru pada tahun 1925 disusul dengan berdirinja geredja Kotabaru, disusul pula dengan geredja Bintaran, Pugeran, kemudian Kumetiran, semuanja ada didalam kota. Sedang diluar kota didirikan geredja Gandjuran (daerah Bantul), Boro dan Nanggulan (Kulon - Progo Utara), Wates, Kalasan, Mlati, Medari dan Somoitan di Sleman

Utara, sehingga pada tahun 1952 ini mempunjai djumlah 21. Selain itu ada beberapa rumah dipelosok jang dipergunakan sebagai geredja pula sebanjak 26 tempat tersebar diseluruh Daerah Istimewa Jogjakarta ini.

Berapa banjaknja orang Katholik.

Pada tahun 1915 baru ada	300	orang Katholik.
„ „ 1925	10000	„ „
„ „ 1950	20000	„ „

Melihat angka-angka diatas njata bahwa perkembangan antara tahun 1925 — 1952 ada kurang lantjar, bila dibanding dengan antara tahun 1915 — 1925. Antara lain disebabkan karena pendudukan Djepang didaerah ini jang sedikit banjak menghambat perkembangan tersebut. Pastoor-pastoor bukan sadja jang berkebangsaan Belanda jang mendjadi musuh Djepang, dan karenanja banjak ditangkap, diinternir, bahkan pastoor Djawa ada beberapa jang menderita nasib sama dengan pastoor Belanda. Dengan ditangkapnja beberapa pimpinan agama sudah dengan sendirinja kekurangan pemimpin semakin besar. Gedung-gedung sekolah, kediaman broeder-broeder, biara, zuster-zuster diduduki dengan tidak mendapat gantinja.

Walaupun pendudukan ini hanja 3½ tahun lamanja, namun memberi akibat jang sangat merugikan. Tahun 1945, Djepang djatuh, bangsa kita merdeka. Dengan „Pantja Sila" Pemerintah bukan hanja tidak melarang, bahkan menolong perkembangan setiap agama jang diakuinja. Tetapi pada permulaan revolusi, pernjataan ini belum bisa dirasakan oleh golongan Katholik. Pastoor-pastoor masih beberapa terdapat dalam pengasingan dan karena kekurangan gedung, ada jang masih diperlukan oleh Pemerintah.

Baru pada tahun 1949, berangsur gedung-gedung tersebut dapat diserahkan kembali pada pihak geredja. Saat itu pulalah, pembangunan mulai dipikirkan demi sedikit perbaikan diselenggarakan, baik geredja, asrama/biara maupun sekolah-sekolah.

Keadaan jang sekarang ini, telah kembali seperti sediakala. Peladjaran agama maupun sekolah berdjalan sebagai mestinja.

Djumlah pastoor belum seberapa, tetapi banjak djuga pastoor-pastoor Indonesia (Djawa), jang lebih dekat hubungannja dengan masjarakat.

Seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta :

ada :	Pastoor	69
	Zuster	96
	Broeder	26
	Guru agama	6
	Ummat Katholik	20405
	Geredja	21
	Kapel	26
	Sekolah :	
	Sekolah Ra'jat	34
	Menengah Pertama	6
	„ Atas	2
	Guru Bawah	2
	„ Atas	2
	Fröbel R.K.	2
	S.K.P.	1
	Jajasan :	
	Rumah Sakit	3
	„ Jatim	2

Perkumpulan-perkumpulan :

a. Partai Katholik.
b. Katholik Wandawa.
c. Wanita Katholik.
d. Muda Katholik Indonesia.
e. P.G.K. (Pers. Guru Katholik).
f. Pangrukti-Lojo.
g. Kepanduan.

Kongregrasi bapak, ibu, pemuda dan pemudi.

*

C. GERAKAN ALIRAN KEBATINAN

1. Pertumbuhannja.

DIPANDANG dari sudut masa adanja, maka sesungguhnja gerakan aliran kebatinan ini adalah suatu gerakan jang telah lama sekali timbulnja buat daerah Jogjakarta chususnja, dan di Indonesia umumnja. Pembawaan dari orang-orang kita memang gemar sekali merundingkan, mempermusjawaratkan, mengadakan orientasi, ramah-tamah (saresehan) dalam hal-hal jang mengenai soal-soal sekitar kebatinan. Banjak sekali segala laku-laku atau tindakan, perkataan-perkataan, tulisan-tulisan, benda-benda dan lain sebagainja, kesemuanja itu disamping dilihat kenjataan atau kelahirannja, tentulah dilihat dari djurusan rochaninja. Sehingga mereka itu senantiasa, bahkan telah mendjadi kegemarannja, suka mereka-reka atau menggambar-gambarkan tentang maksud arti, tudjuan, hakekat dan djiwa dari sesuatu benda atau mata barang jang lahir itu.

Kita mengenal kebiasaan dari orang-orang kita jang suka atau gemar menafsir-nafsirkan adanja gerhana bulan, gerhana mata-hari, gunung meletus, gempa bumi, bintang beralih, lahir pada Djum'at sore djam 4, orang sedang mendjadi mempelai kebetulan hudjan lebat dan lain-lain sebagainja. Sehingga hal-hal jang sematjam itu buat kalangan orang-orang kita kadang-kadang mendjadi suatu ilmu pengetahuan jang tersendiri.

Adanja tachajul, adanja gugon tuhon, adanja bijgeloof adalah kesemuanja itu menundjukkan pula adanja ikatan-ikatan batin, adanja kepertjajaan setjara ruhanijah dan lain sebagainja.

Karena itu maka njatalah bahwa sesungguhnja timbulnja gerombolan aliran-aliran kebatinan itu, pada hakekatnja adalah bukan barang baru bagi kita. Melainkan sedjak djaman Belanda, djaman Demak, djaman Madjapahit, bahkan sebelum itu adanja orang-orang kita memasak soal-soal kebatinan itu adalah sudah biasa. Maka adalah suatu hal jang sukar dipetjahkan, kalau orang bermaksud hendak menghilangkan aliran atau memberantas aliran kebatinan itu. Kantor Urusan Agama pun tiada akan memberantas aliran-aliran kebatinan itu. Pemerintah Pusatpun tidak. Hanja jang perlu diketahui, bahwa aliran-aliran kebatinan jang tidak sehat, jang akibatnja merusakkan kepada keamanan, mengatjaukan pergaulan dan terutama mengatjaukan negara, maka sudah barang tentu aliran-aliran kebatinan sematjam itu tidak dapat dibenarkan oleh Pemerintah.

2. Bentuk atau sifat alirannja.

Kita mengenal, bahwa telah mendjadi suatu mode jang umum bagi para pemimpin atau para guru aliran-aliran kebatinan itu, dalam memberikan wedjangannja tentulah dengan „systeem rahasia". Diantaranja, tjara memberikan

wedjangan itu ada jang harus dalam satu kamar gelap hanja dibawah mata empat sadja. Ada jang diadjarkan pada tempat jang harus sunji sekali, pada djam 2 malam dihalaman rumah jang harus sudah sunji benar-benar.

Disamping dengan tempat jang serba rahasia itu, maka diberikan pula keterangan, bahwa siapa-siapa jang mendengarkan wedjangan dari sang guru itu baik berudjud binatang maupun berupa daun, kaju, tumbuh-tumbuhan, batu dan lain sebagainja, tentulah akan dapat masuk sjurga. Disamping itu, ditetapkan pula beberapa sjarat-sjarat jang serba tersendiri. Sesudah diadakan wedjangan jang serba rahasia, pada tempat jang rahasia, dengan sjarat-sjarat jang serba tersendiri dan istimewa itu, maka ditutupnja dengan kata-kata, bahwa seseorang jang telah diwedjang itu tidak boleh menerang-nerangkan segala sesuatu jang diutjapkan atau dilakukan oleh sang guru itu. Dan kalau sampai berani menerang-nerangkan rahasia itu, maka ketjelakaan dan kebinasaan tentulah akan menimpa sampai tudjuh keturunannja.

Kita mengerti, bahwa pembawaan manusia adalah mempunjai nafsu menjelidiki kepada hal-hal jang belum diketahui. Karena pembawaan jang demikian itu, maka sebelum ia mempunjai kepertjajaan keagamaan jang telah dapat memberikan bimbingan dan pimpinan kepada akal dan fikiran serta batinnja kepada djalan jang benar atau kepada suatu agama jang dipandang telah memuaskan, maka **mudahlah** mereka itu tertarik kepada orang-orang jang senantiasa mengeluarkan keterangan jang serba rahasia itu.

Berhubung dengan tjara jang demikian itu, maka untuk mengetahui jang sesungguhnja bagaimana maksud atau tudjuan aliran itu sendiri-sendiri, tentulah **tidak mudah.** Adapun kalau disini dapat diterangkan, adalah hal-hal jang tidak bersifat rahasia, ataupun diambil dari keterangan orang-orang jang pernah atau masih mendjadi warga dari aliran tersebut. Selain itu djuga kadang-kadang hanjalah dapat kita ketahui dari laku-laku jang dikerdjakan oleh para pengikutnja.

Bentuk atau aliran-aliran Kebatinan itu diantaranja ada jang:

Keuahnijahan melulu, seperti adanja aliran-aliran jang mempertjajai sematamata kepada adanja badan-badan halus, djin-djin dan lain sebagainja. Aliran itu tiada mempunjai pengaruh apa-apa dalam kalangan masjarakat. Hanja malahan mendjadi satu bukti kemunduran mereka itu dalam tjara berfikir dan menundjukkan masih sangat sempitnja alam fikirannja.

Sedikit ke Islam-Islaman.

Aliran-aliran jang ke Islam-Islaman, jang dimaksudkan adanja aliranaliran jang disana-sini mengambil dari peraturan-peraturan Islam atau ka'idahka'idahnja. Soal ke-Tuhanannja dan nama-nama Rosul dan lain sebagainja, banjak jang diambil dari Islam. Hanja mengenai sjare'at jang didjalankannja, itulah jang sengadja tidak dipersamakan, melainkan hanjalah soal-soal jang mengenai kebatinannja sadja. Itupun sudah bertjampur aduk dengan kebatinankebatinan jang mereka ambilkan dari ke-Djawaan dan ke-Hinduan dan lain sebagainja.

Tetapi kalau diteropong dengan peraturan-peraturan Islam jang sebenarnja, maka aliran-aliran ini telah sangat djauh sekali, atau malah bertentangan.

Ke-Hindu-Djawaan.

Adapula aliran-aliran jang dipandang dari tjara-tjara mereka atau mendjalankan serta kepertjajaan atau lafal-lafalnja, maka aliran itu dapat dikatakan kebatinan jang bertjampur dengan Hindu Djawa. Mereka masih mempunjai kepertjajaan adanja dewa-dewa dan lain sebagainja. Begitu pula nama-nama sembahan mereka dan peribadatannja banjak dipergunakan nama-nama Hindu.

Aliran Kebatinan jang dimodernisasi.

Disamping itu ada pula aliran kebatinan jang menurut bentuknja dan sifatnja sudah agak **dimodernisasi.** Aliran-aliran ini pada dasarnja adalah sama djuga dengan aliran-aliran kebatinan jang lain-lain. Hanja tjara organisasi atau hubungannja sadja. Seperti jang sudah banjak diketahui, bahwa aliran-aliran kebatinan itu walaupun mempunjai persamaan nama antara satu tempat dengan tempat jang lain, tetapi satu dengan jang lain tiada mempunjai hubungan sama sekali, baik dalam tjara mengadjarkan ilmu kebatinan itu, maupun dalam tjara mengerdjakan wirid-wiridnja.

Demikianlah setjara umum, aliran-aliran kebatinan itu dipandang dari luar. Dikatakan, sekedar pandangan dari luar, karena dari dalam sukar sekali mengingat terlalu serba rahasianja aliran-aliran kebatinan itu.

Berhubung dengan sifatnja jang demikian itulah, maka orang-orang jang tidak bertanggung djawab mempergunakan kesempatan-kesempatan jang sematjam itu untuk kepentingan mereka sendiri. Adanja dukun tjabul, adanja dukun palsu jang mentjari keuntungan materieel dan lain sebagainja, maka itu adalah akibat mode kebatinan jang umum itu, jang selalu dalam segala hal mempergunakan „systeem rahasia" itu. Dan karena jang demikian itu, maka ilmu klenik, ilmu kebatinan, ilmu pedukunan dan sebangsanja, mudah sekali mendapat tjap jang tidak baik dipandag mata orang-orang jang terpeladjar terutama.

Untuk membimbing kepada aliran kebatinan jang sehat dan menudju kemadjuan jang selaras dengan kemadjuan tjara berfikir dalam fikiran orang-orang sekarang, maka perlu sekali diadakan penerangan-penerangan agama jang mendalam sampai kepelosok-pelosok. Dengan demikian maka orang akan terbuka fikiran dan akal mereka, hingga tidak mudah mereka itu terpengaruh oleh akal-akalan dari orang-orang, jang sengadja membawa faham-faham kebatinan jang untuk dimasukkan dalam kalangan rakjat murba.

Untuk itu sesungguhnja diperlukan sangat bertambahnja pembatjaan-pembatjaan ringan mengenai keagamaan dengan bahasa Daerah jang mudah untuk dimasukkan dalam kalangan ra'jat murba.

*

D. DAFTAR ADANJA ALIRAN - ALIRAN KEBATINAN

I. Kotapradja Jogjakarta.

1. Kemantren Mantri Djeron.

a. Perkumpulan Kawula Ngajogjakarta disingkatkan dengan P. K. N. Perkumpulan ini dipimpin oleh Pangeran Surjodiningrat. Perkumpulan ini pada lahirnja adalah kelandjutan dari P.K.N. dizaman pendjadjahan dahulu. Pada mulanja bukanlah merupakan perkumpulan kebatinan. Tetapi pada achir-achir ini, kemungkinan djuga karena pengaruh dari pendirinja jang dipompakan kepada para pengikutnja, maka perkumpulan ini mendjadi bertjorak kebatinan. Dan achir-achir ini, kemungkinan atas usaha dari orang-orang jang berkepentingan, perkumpulan ini sudah mulai nampak mempunjai gambaran bersifat perkumpulan politik/kenegaraan, meskipun belum ada pengumuman dari jang bersangkutan sendiri. Dan kini djuga telah mempunjai nama Grinda, Gerakan Rakjat Indonesia.
Berhubung adanja kesalah fahaman dari sementara para pengikutnja disementara tempat, maka Pamong Pradja terpaksa turut tjampur dalam urusan mereka, sehingga kini ada djuga beberapa tempat jang lalu timbul keinginannja terhadap P.K.N. ini.

b. **Mardi Tentrem.**
Mardi Tentrem ini dibawah pimpinannja Hardjoredjoso. Tetapi laporan selandjutnja lalu terhenti, sehingga belum dapat dikenal bagaimana aliran ini.

2. **Kemantren Wirobradjan.**

Pagujuban Sumarah.

Pemimpinnja diantara jang terkenal ialah Sukinohartono dan Dokter Surono. Peladjarannja menjembah/berbakti kepada Ilahi, untuk mentjapai ketenteraman lahir dan batin. Untuk itu didjalankan dengan meditasi atau bersamadi. Disamping itu mempunjai kepertjajaan an adanja penitisan ruh atau biasa disebut reincarnasi. Sukinohartono adalah sebagai pegawai Negeri dikantor Kas Negeri di Jogjakarta, sedangkan Dokter Surono sebagai dokter partikelir.

3. **Kemantren Gondomanan.**

Gletek Petel.

Aliran ini merupakan gerombolan ketjil, bertempat di Sajidan Jogjakarta. Mendapat pimpinan dari seorang jang terkenal dalam kalangan pengikutnja Pak Tjokro. Tuntutannja memudji kepada Sang Hjang Girinoto.
Peladjarannja mengurangi makan dan tidur. Golongan ini mempunjai faham tiada menjukai adanja agama-agama jang datang seperti Islam, Kristen dan lain sebagainja.

4. **Kemantren Paku Alaman.**

Aliran Ilmu Kedjawen.

Aliran ini dipimpin oleh Mangundihardjo Purwokinanti Paku Alaman Jogjakarta. Aliran ini bertudjuan menghidupkan peladjaran-peladjaran Djawa kuno, dengan maksud agar peladjaran-peladjaran itu tiada hilang lenjap. Tudjuannja kepada Hjang Sutji. Pedomannja kitab Djojobojo. Peladjaran wirid dan laku-lakunja belum dapat diketahui dengan djelas, karena bersifat sangat rahasia. Tetapi effek lain-lain tidak nampak.

5. **Kemantren Ngampilan.**

Hardopusoro.

Aliran bertjorak mempeladjari ilmu perdukunan atau kenudjuman. Para pengikutnja gemar sekali menafsirkan arti bintang jang dilangit itu pada setiap malamnja. Mereka sangat mempertjajai kepertjajaan adanja takdir dari Tuhan Allah dengan bulat-bulat. Sehingga mereka sama sekali tidak mengadakan usaha atau ichtiar untuk mengubah nasib hidupnja masing-masing. Kelompokannja rupanja tiada banjak dan sampai sekarang djuga tidak begitu dikenal.

6. **Kemantren Paku Alaman.**

SUBUD.

Susilo Budi Darmo (disingkatkan SUBUD). Berada di Nototarunan Paku Alaman. Pimpinan oleh R. Subuh. Tudjuannja memperdalam soal-

soal kewadjiban jang djuga berdasarkan dengan ke-Tuhanan. Adapun laku-lakunja diserahkan menurut agama dan kepertjajaannja masing-masing.

7. **Kemantren Mergangsan.**

Ikatan Peladjar Pembangunan Djiwa (I.P.P.D.). Dipimpin oleh R. Wignjosupraptono pensiunan mantri guru. Pernah mendjadi penulis Masjumi Kota Jogjakarta. Laku-lakunja menudju kekuatan djiwa. Dengan djalan meditasi duduk atau berdiri, Sjare'at-sjare'at djuga banjak jang tetap dengan sjare'at-sjare'at Islam. Dalam pada itu mempunjai pendirian bahwa solat seperti biasa itu belum ta'at jang sempurna.

II. Kabupaten Bantul.

1. **Kapanewon Djetis.**

a. ADARI.

ADARI (Agama Djawa Asli Republik Indonesia). Aliran ini tiada seberapa orang pengikutnja. Mendapat pimpinan dari orang jang terkenal dalam kalangan pengikutnja bernama Djojowolu dari Klitren Jogjakarta. Karena keaktifan Pamong Pradja setempat dalam mengikuti djedjaknja, maka aliran ini tiada mendapat sambutan jang lajak dari kalangan penduduk. Sampai sekarang geraknja jang djelas djuga masih tidak mudah diketahui, karena sedikitnja.

b. Hidup Betul.

Bermaksud mengedjar kebahagian hidup dengan menghilangkan hawa angkara murka dengan mendjalankan laku djudjur dan adil serta temen (lurus). Para pengikutnja tiada seberapa banjak, hanja beberapa orang sadja.

2. **Kapanewon Padjangan.**

Hardopusoro.

Aliran ini ada membajangkan tjabang dari Hardopusoro jang berada dikotapradja Jogjakarta. Dipimpin oleh Mangundihardjo. Peladjarannja mentjari wahju dengan berdikir-dikir dan dikirnja dengan bahasa Daerah.

3. **Kapanewon Pandak.**

I. I. H.

Hidup Betul Iman Igama Hak (I.I.H.). Lakunja dengan menjebut nama Allah dan Muhammad dan diharuskan mengetahui dirinja sendiri dengan arti setjara klenik.

4. **Kapanewon Kretek.**

a. Pardopusoro Panitisan Ruhani.

Menudju kesempurnaan hidup dan mentjari untung. Melakukan mandi tiap-tiap malam djam 12.

b. I. I. H.

Hidup Betul seperti klenik Djawa umum. Seolah-olah tidak ada sangkut pautnja dengan lain-lain I.I.H. jang sudah agak diorganisasi itu.

5. **Kapanewon Pundong.**

Klenik. Tudjuannja mentjahari kebahagiaan dengan memandang matahari setiap pagi.

6. **Kapanewon Imogiri I.**

I.I.H. (Iman Igama Hak). Seperti lain-lain I.I.H.

7. **Kapanewon Imogiri II.**

a. Perkumpulan Budi Murni (P. B. M.).

Pemimpinnja tiada djelas diketahui. Menudju kepada kebaikan kebatinan. Melakukan tahlil setiap djam 12 malam.

b. Adam Ma'rifat.

Dipimpin oleh seorang bernama Djojokandar. Bekas Lurah berasal dari Borobudur. Pandai mendalang wajang kulit. Tjara laku-lakunja sama dengan kebanjakan klenik Djawa biasa jang belum diorganisasi dan gemoderniseerd.

8. **Kapanewon Gondowulung.**

Aliran Sumarah.
Mendapat pimpinan dari Wirjopawiro bekas pegawai paberik gula Plered. Tuntunan dan tudjuannja untuk mentjari kesempatan hidup dengan mengheningkan tjipta semalam tudjuh kali.

9. **Kapanewon Kotagede I.**

Mardi Naluri.
Bagaimana tjara-tjaranja, pelaporan terhenti ta' ada kelandjutan.

10. **Kapanewon Kotagede II.**

Perkumpulan Budi Murni (P. B. M.)
Tahlil setiap malam Djum'at Kliwon sampai posing, dengan bermaksud memperbaiki diri mereka.

11. **Kapanewon Srandakan.**

Tekad Manunggal (Teman).
Dipimpin oleh guru klenik dari kampung Wirobradjan Kotapradja Jogjakarta. Siapa nama guru itu dan bagaimana tjara-tjaranja, sampai sekarang belum dapat didjelaskan.

12. **Kapanewon Sedaju.**

Adam Ma'rifat Hidup Betul.
Mengabdi kepada Tuhan dan minta wahju perintah segala apa jang mendjadi hadjatnja dengan mentjari impian diwaktu tidur.

III. **Kabupaten Sleman.**

Dengan ringkas menurut laporan jang sampai kepada kita, bahwa aliran kebatinan didaerah Sleman jang ada hanjalah Puami, sementara di Kapanewon-Kapanewon :

1. **Tempel.**
2. **Minggir.**
3. **Mojudan.**
4. **Godean.**
5. **Sejegan.**

IV. Kabupaten Kulon Progo.

1. **Kapanewon Wates (Bendungan).**

   P. K. N.

   Aliran ini adalah rembesan dari P.K.N. Surjodiningratan. Geraknja sekarang sudah tidak begitu kentara.

2. **Kapanewon Temon.**

   a. S u m a r a h.

   Aliran ini merupakan aliran klenik biasa. Apakah aliran ini ada hubungannja dengan Sumarah jang berada dikota Jogjakarta, djuga belum djelas.

   b. A d a m M a' r i f a t.

   Sekarang ini sudah tidak begitu nampak geraknja (passif).

3. **Kapanewon Sentolo.**

   I. I. H.

   Seperti lain-lain I.I.H. pernah akan mengadakan perkawinan, tetapi dapat digagalkan.

4. **Kapanewon Kenteng.**

   a. **G r i n d a.**

   Ini adalah tjabang dari Grinda Surjodiningratan.

   b. K l e n i k.

   Seperti pada umumnja klenik Djawa jang mengutamakan soal hakekatnja beribadatan. Nama-nama banjak jang berbau Islam, tetapi pada sjare'atnja tjara mendjalankan tidak sesuai. Lebih terkenal dengan nama Islam garingan.

   c. T a r e k a t.

   Hampir sama dengan gerakan klenik.

   d. S u m a r a h.

   Inipun djuga hampir sama sadja (sebangsa) dengan klenik Djawa.

5. **Kapanewon Nanggulan.**

   I l m u S u m a r a h.

   Idem seperti klenik Djawa jang mengutamakan kebatinan.

6. **Kapanewon Pengasih.**

   P. E. B. M.

   Praktek peladjarannja seperti I.I.H. Banjak sudah melangsungkan perkawinan seperti I.I.H. atau P.U.A.M.I., tetapi oleh kegiatan Pamong Pradja setempat bekerdja sama dengan K.U.A. pun banjak pula jang digagalkan dan ada jang diulangi lagi pernikahannja.

7. **Kapanewon Kalibawang.**

   a. K l e n i k b i a s a.

   Ini berada disementara tempat, tetapi hanja sedikit sekali pengaruhnja. Seperti biasanja klenik jang berada dipegunungan - pegunungan.

   b. I. I. H.

   Idem dengan klenik Djawa.

   c. S u m a r a h.

   Tjara peladjaran mengusahakan sutjinja hati atau budi pekerti hidup. Laku-lakunja banjak djuga seperti klenik Djawa biasa.

V. **Kabupaten Gunung Kidul (Wonosari).**

Ringkasan laporan dari Gunung Kidul, aliran kebatinan jang ada hanjalah P.U.A.M.I. pada semetara Kapanewon. Itupun gerak-geriknja kini telah tidak sedemikian kuat dan aktif seperti ditahun jang sudah. Perkawinan-perkawinan tjara mereka pun tiada begitu banjak. Dan banjak pula jang menjesal setelah terbentur, ialah karena dalam perkawinannja tiada beruntung, lalu minta tjerai di kenaiban, tetapi oleh kenaiban dikatakan tiada dapat dilaksanakan, karena perkawinan itu tiada menggunakan undang-undang Negara jang sah. Kini pengaruh Puami menurut penglihatan setjara kelahirannja, sudah tiada seberapa lagi.
Adapun Kapanewon jang ada aliran tersebut ialah :

1. **Semanu (seolah-olah merupakan pusatnja).**
2. **Plajen.**
3. **Patuk.**
4. **Semin.**
5. **Pondjong.**

Pandangan sekali liwat.

Diantara aliran-aliran kebatinan seluruh Jogjakarta kesemuanja itu, jang mudah sekali dilihat karena nampaknja para pengikutnja ialah kebatinan jang dengan pimpinan Pangeran Surjodiningrat. Setiap malam Djum'at kelihatan njata banjaknja orang-orang jang mendjadi anggautanja. Tetapi sekali lagi dapat dinjatakan, bahwa pada umumja adalah penduduk dari luar kota Jogjakarta. Pun umumnja tidak dari kalangan orang-orang terpeladjar. Karena keadaan jang demikian itulah maka kemungkinan sekali mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak jang selalu mentjari kesempatan menggunakan massa itu.
Adapun lain-lain aliran hanjalah ditangan para gurunja atau pemimpinnja.

Kata penutup.

Soal-soal keagamaan, soal-soal kepertjajaan, soal-soal pegangan kebatinan, kesemuanja itu akan senantiasa tumbuh, mengingat pembawaan dari bangsa kita pada umumnja. Soal tersebut menurut kejakinan akan tetap hidup, meskipun keadaan kemadjuan berfikir dan ketjerdasan otaknja akan lebih madju dan menudju kepada kemadjuan jang lebih tinggi lagi.

Menurut faham kita kehidupan keagamaan tidaklah akan mengurangkan kemadjuan sesuatu bangsa. Theori-theori jang mengatakan, bahwa bangsa jang terikat djiwanja dengan agama dan keagamaan, akan tidak dapat madju, maka itu adalah baharu theori jang masih sukar dibuktikan. Karena bangsa-bangsa jang teguh dalam keagamaannja seperti Djepang, Mesir, Saudi Arabia dan lain sebagainja, toch masih djuga dapat memasuki pintu-pintu kemadjuan itu.

Hanja jang perlu kita harus ingati, bahwa negara Indonesia adalah bukan negara jang berdasar sesuatu agama. Melainkan negara kita Indonesia adalah negara jang berdasarkan Pantja Sila. Sudah barang tentu bahwa Pemerintah memberi kemerdekaan pada masing-masing untuk memeluk agama jang dijakini dengan paham jang lebar.

*

E. DAFTAR ADANJA PARA PENGIKUT GERAKAN KEBATINAN TAHUN 1952

Kabupaten Gunung-Kidul.

1.	Kap. Wonosari	P.U.A.M.I.	150 orang
2.	Kap. Semanu	B.E.B.M. (Brantas Eklasing Budi Murko)	75 orang

3.	Kap. Plajen	P.U.A.M.I.	132 orang
4.	Kap. Pathuk	P.U.A.M.I.	13 orang

Kabupaten Bantul.

1.	Kap. Kotagede I	Mardi Naluri	6 orang
2.	Kap. Gondowulung	Sumarah	23 orang
3.	Kap. Imogiri II	Iman Igama Hak	5 orang
4.	Kap. Imogiri II	Adam Ma'rifat	25 orang
5.	Kap. Imogiri II	Perkump. Budi Murni	20 orang
6.	Kap. Imogiri I	Igama Islam Hak	9 orang
7.	Kap. Djetis	Hidup betul	15 orang
8.	Kap. Panggang	Pagujuban Sumarah	140 orang
9.	Kap. Pundong	Hidup Betul	25 orang
10.	Kap. Pundong	Klenik	—
11.	Kap. Kretek	Hidup Betul	20 orang
12.	Kap. Kretek	Hardopusoro	40 orang
13.	Kap. Sanden	Sumarah	25 orang
14.	Kap. Pandak	Iman Igama Hak	25 orang
15.	Kap. Padjangan	Hidup Betul	9 orang
16.	Kap. Padjangan	Hardopusoro	20 orang
17.	Kap. Sedaju	Hidup Betul	14 orang
18.	Kap. Kasihan	Windukentjono	50 orang
19.	Kap. Kasihan	Hidup Betul	—
20.	Kap. Sewon	Hidup Betul	80 orang
21.	Kap. Bantool	Hidup Betul	21 orang

Kabupaten Sleman.

1.	Kap. Minggir	P.U.A.M.I.	100 orang
2.	Kap. Tempel	P.U.A.M.I.	700 orang
3.	Kap. Gamping	Hidup Betul	100 orang

Kabupaten Kulon Progo.

1.	Kap. Temon	Adam Ma'rifat	32 orang
2.	Kap. Kalibawang	Iman Igama Hak	80 orang
3.	Kap. Kalibawang	Igama Djawa	90 orang
4.	Kap. Kenteng	Ilmu Sumarah	6 orang

Kotapradja Jogjakarta.

1.	Kemantren P..P Gedong Tengen	Sumarah Ngalah	—
2.	Kemantren P.P. Mergangsan	Ikatan Pembangunan Djiwa	200 orang
3.	**Kemantren P.P.** Pakualaman	Susilo Budi Darmo	100 orang
4.	Kemantren P..P Wirobradjan	Pagujuban Sumarah	300 orang

Lain-lainnja karena laporan kurang lengkap tak dapat didjelaskan berapa banjaknja para pengikutnja atau orang-orang jang terpengaruh. Mengenai Grinda/P.K.N./Aliran Surjodiningratan, tak dapat dihitungkan dengan pasti, karena kebanjakan mereka mengundjungi kursusnja setiap Djum'at umumnja dari luar Kota dan tidak tentu melainkan banjak berganti-ganti.

Akibat dari meluasnja aliran-aliran kebatinan dapat menimbulkan beberapa perkawinan liar, diluar undang-undang Negara.

Bulan	Gng. Kidul	Bantul	Sleman	Kotapradja	Kulon Progo
Djanuari	1	—	—	—	—
Pebruari	—	—	—	—	6
Maret	1	—	—	—	—
April	—	3	11	—	—
Mei	—	—	—	—	3
Djuni	1	—	2	—	—
Djuli	—	—	—	—	—
Agustus	2	3	—	—	—
September	6	11	—	—	—
Oktober	—	—	—	1	2
Nopember	—	—	2	—	3
Desember	—	—	—	—	—
Djumlah	11	17	15	1	14 = 58 orang

*
* *

4. MEMADJUKAN SEGALA TJABANG KESENIAN

A. PERKEMBANGAN SENI TARI DALAM DAERAH JOGJAKARTA SEDJAK 17 AGUSTUS 1945

DJIKA kita akan membuat sedjarah perkembangan seni tari didalam Daerah Istimewa Jogjakarta — disini dimaksudkan seni beksa jang asalnja dari Keraton Jogjakarta — perlu diingat bahwa semuanja itu adalah atas buah hasil dari pada usaha perkumpulan Krida Beksa Wirama, suatu perkumpulan seni tari jang didirikan sedjak tgl. 17-8-1918. Sebelum itu seni tari kita, terutama tari bedaja dan serimpinja, jang dipelihara didalam istana, hidup terbatas dikelilingi oleh empat dinding tebal dan tinggi mendjadi larangan besar untuk keluar dari batas-batas itu. Maka bila sekarang ini banjak perkumpulan-perkumpulan jang mempeladjarkan beksa, adalah djustru akibat dari usaha perkumpulan itu, jang hingga sekarang masih tegak berdiri ditengah-tengah masjarakat kita. Hanja pada waktu revolusi tgl. 17 Agustus 1945 hingga clash pertama itu ia berhenti, tertidur, tetapi tetap bersedia untuk bergerak kembali bilamana keadaan memungkinkan.

Hal ini tidaklah aneh, karena keadaan pergolakan djaman jang merupakan revolusi tentu besar pengaruhnja terhadap perkembangan kesenian pada umumja.

Demikian pula dengan seni tari kita didalam daerah Jogjakarta ini. Sedjak pertengahan bulan Agustus hingga kira-kira Maret 1946, tidak terdengar sesuatu tentang mempeladjari kesenian Djawa. Sebabnja tak lain karena semua tenaga dikerahkan dalam perdjuangan merebut kekuasaan dari tangan Djepang maupun Belanda beserta begondal-begondalnja. Kesenian tak dapat terpelihara, latihan-latihan berhenti. Tak sempat orang memikirkan nasib kesenian kita pada waktu itu. Hal ini tidak hanja terdapat di Jogja sadja, tetapi djuga dibeberapa pusat kesenian Djawa, seperti di Solo dan lain-lain. Ini tidak berarti, bahwa para pendukung dan pentjinta kesenian akan tinggal diam dan menjerahkan kesueniannja pada nasibnja, tidak, sekali-kali tidak. Pada waktu itu telah dirasa oleh para peminat dan pendukung kesenian Djawa dari angkatan muda, bahwa ditengah-tengah revolusi itu perkembangan kesenian tidak boleh putus dan berhenti. Tidak boleh ada stagnatie, perkembangan kesenian harus mengikuti pula perkembangan pergolakan djaman, agar nanti selalu ada kelandjutan antara bentuk aliran seni pada waktu itu dengan aliran jang akan datang jang tentu sadja akan dipengaruhi oleh keadaan aliran djamannja.

Maka pada bulan Maret 1946 berkumpullah beberapa seniman-seniwati dipelopori angkatan mudanja digedung B.T.I. Bintaran Lor, mempersoalkan nasib dari pada kesenian daerah kita. Diputuskan dalam rapat itu untuk mengaktifkan kembali usaha-usaha kesenian dengan sembojan mengerdjakan apa jang dapat dikerdjakan.

Sebagai dorongan pertama untuk menghidupkan kembali usaha kesenian kita, dimulailah satu pertundjukan massaal merupakan fragment dengan mengambil tjeritera „Tjalonarang".

Pemain-pemainnja diambilkan saudara-saudara dari sekolah-sekolah landjutan. Usaha ini dimaksud untuk dapat mengumpulkan kembali tenaga-tenaga kita dalam suatu organisasi, diketuai oleh Wasisto Soerjodiningrat dan dibantu oleh Sudarso dan Suhardono almarhum dengan teman - temannja. Pertundjukan ini dilangsungkan di Bangsal Kepatihan pada tanggal 14 Djuli 1946, dengan diberi pindjam pakaian dari Sri Sultan. Perlu ditjatat disini, bahwa tidak sedikit pula bantuan jang didapat dari Wijata Pradja dan I.P.P.I. daerah Jogjakarta. Setelah pertundjukan berhasil, maka terasalah perlu adanja organisasi kesenian untuk menanam bibit-bibit pentjinta dan pendukung kesenian Djawa jang setiap saat berguna bagi pembangunan negara.

Maka terbentuklah sebuah organisasi dengan tiga kekuatan sebagai sendinja, ialah:

1. Dewan ahli, jang merupakan gedung ilmu kesenian, dipimpin oleh Sudharso.
2. Dewan perantjang, jang merentjanakan peladjaran, dipimpin oleh Suhardono almarhum.
3. Pengurus harian jang diketuai oleh Wasisto Soerjodiningrat.

Organisasi ini bertudjuan membentuk kader-kader pedjuang kesenian dengan rentjana kerdjanja satu tahun. Adapun kader-kadernja diambilkan dari murid-murid Krida Beksa Wirama di Jogjakarta jang telah dapat menari, jang semuanja ada 11 orang putera dan 8 orang puteri. Latihan pertama dimulai pada tgl. 5-10-1946 dipendapa Wijata Pradja.

Pada bulan Djuli 1947 Belanda melanggar perdjandjian Linggadjati, clash pertama diadakan, hingga keadaan jang telah sedikit reda mendjadi hangat kembali. Pemuda-pemudi kita banjak jang madju kegaris pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan negaranja. Pada waktu itu latihan di Wijata Pradja, satu-satunja usaha jang mengadakan peladjaran tari, terpaksa ditutup.

Tindakan Belanda itu oleh Dewan Keamanan P.B.B. didjadikan masalah internasional. Soal Indonesia — Belanda dibitjarakan dalam sidang Dewan Keamanan P.B.B., hasilnja dibentuklah Komisi Tiga Negara jang diberi tugas sebagai arbitrage mengenai perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Maka sekarang Indonesia disamping bertempur, lapangan diplomasi djuga harus dipergiat. Dalam hal ini kaum seni djuga tidak mau ketinggalan. Untuk mentjari hati dari para wakil-wakil luar negeri jang mengadakan penindjauan keadaan di Indonesia, bila mereka datang di Jogjakarta diberi hidangan pertundjukan-pertundjukan tari, berupa bedaja, serimpi dan atau beksan-beksan. Dengan demikian kita dapat menundjukkan kepada mereka, bahwa Indonesia itu sudah tjukup dewasa untuk berdiri sendiri, buktinja telah mempunjai suatu bentuk kesenian (kebudajaan) jang demikian tinggi nilainja. Selama diadakan perundingan itu tidak kurang dari 11 kali diselenggarakan pertundjukan-pertundjukan bertempat di bangsal Kepatihan, gedung Presidenen atau di Kaliurang. Pertundjukan pertama diadakan pada tgl. 18-9-1947 di bangsal Kepatihan. Dan pada waktu Komisi Tiga Negara datang untuk pertama kali di Jogjakarta pada tgl. 5-11-1947 diberi hidangan pertundjukan berupa beksan-beksan Menak Kontjar melawan Menak Suwanda, Djajengpati melawan Umarmaja, dan sebuah bedaja mengambil tjeritera „Dewarutji".

Adapun jang menari merupakan tenaga-tenaga perseorangan dari perkumpulan Krida Beksa Wirama serta para abdidalem Keraton. Penjelenggaraan pertundjukan ini oleh Pemerintah (delegasi Indonesia) diserahkan kepada Wijata Pradja, maka olehnja dibentuklah sebuah panitya jang diketuai sendiri oleh K. R. T. Notojudo. Pakaian serta kelengkapan wajang lainnja didapat dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Perundingan ini menghasilkan perdjandjian Renville, dan setelah itu keadaan mendjadi sedikit tenang, maka oleh Pengurus Krida Beksa Wirama

pada rapatnja tgl. 11-3-1948 dirasa perlu segera membuka kembali latihan-latihannja. Dengan dibukanja kembali latihan-latihan oleh Krida Beksa Wirama, maka tenaga-tenaga pengadjar jang merupakan kader di Wijata Pradja akan kembali menerima tugasnja dalam perkumpulan itu, tetapi mengingat kepentingan pengeluasan perkembangan seni tari kita, latihan-latihan jang diadakan di Wijata Pradja tetap diteruskan dan diserahkan kepada Soeastoeti Notojudo dengan beberapa kawannja kader-kader, untuk melangsungkan latihan-lathannja.

Bersama-sama dengan pembukaannja kembali latihan-latihan oleh Krida Beksa Wirama, Taman Siswa djuga tidak mau ketinggalan, dan tidak lama lagi latihan disana djuga dimulai, serta tidak lama berselang terbentuklah organisasi Taman Kesenian Taman Siswa. Disamping menjelenggarakan peladjaran pada waktu sore untuk umum dan murid-murid Taman Siswa, pada tiap² hari Sabtu dan Rabu pagi djuga diadakan peladjaran menari chusus untuk murid-murid Taman Guru.

Latihan-latihan beksa mulai berkembang baik, tetapi pada hari Achad tgl. 19-12-1948 Belanda dengan tiba-tiba menjerang Ibu Kota Republik Indonesia, Kota Jogjakarta mulai diduduki. Maka selama itu latihan-latihan tak mungkin dapat diadakan. Pemuda-pemudanja jang biasanja memberi peladjaran tidak sedikit jang turut dalam gerakan-gerakan ondergrondse actie maupun menggabungkan diri pada ketenteraan.

Setelah Jogja kembali, Negara R.I.S. terbentuk, dimulai pembukaan kembali latihan-latihan. Latihan di Wijata Pradja segera dimulai, berkembang madju, dan pada tgl. 25-12-1949 terbentuklah sebuah organisasi bernama „Irama Tjitra". Keadaan semakin lama semakin teratur, perkembangan latihan-latihan beksa madju dengan pesatnja. Beberapa organisasi kesenian lahir, diantaranja Among Beksa jang diusahakan oleh Keraton, dengan latihannja dipendapa Poerwodiningratan Kadipaten Kidul.

Marsudi Wirama timbul, latihan-latihannja diadakan ditempatnja Indrosugondo, djl. Sukun. Kabupaten Sleman-pun tidak mau ketinggalan. Pada tgl. 3-4-1950 terbentuklah sebuah organisasi bernama „Krida Langen Budaja" jang mengadakan latihan-latihannja di bangsal Ambarukma. Adapun guru-gurunja didapat dari Among Beksa dan Mataja Mataram.

Selain tempat-tempat dan organisasi-organisasi kesenian jang telah disebutkan diatas, maka masih banjak pula perkumpulan-perkumpulan jang menjelenggarakan peladjaran-peladjaran beksa, terutama diluar kota. Perkembangan peladjaran beksa pada waktu itu hingga kini ibarat tjendawan dalam musim hudjan.

Jogjakarta termasjhur karena djiwa kemerdekaannja. Demikian utjapan Presiden Soekarno pada waktu beliau mau pindah ke Djakarta.

Jogjakarta ternjata bukan hanja penting karena mendjadi pusat perdjuangan sadja, melainkan mempunjai arti dalam lapangan kesenian. Misalnja seni tari serimpi dan bedaja jang terkenal diseluruh dunia. Jogjakarta termasjhur karena mendjadi sumber pengetahuan seni tari. Hal ini dibuktikan dengan njata diwaktu jang silam. Baik dari kalangan Keraton Solo maupun dari luar negeri, banjak jang mengirimkan penggemar seni tari ke Jogjakarta, untuk mempeladjari seni ini, hingga memperoleh idjazah. Bukan Jogjakarta sadja memperoleh nama jang harum, akan tetapi negara sendiri naik deradjatnja karena seni tari itu.

Dari G. P. Tedjokusumo, jang mendjadi anggauta pengurus perkumpulan tari „Krida Beksa Wirama" didapat keterangan tentang perkembangan seni tari di Jogjakarta, sebagai berikut.

Mulai tahun 1922 Krida Beksa Wirama atau disingkat mendjadi K.B.W., membuka kesempatan bagi penggemar seni tari untuk memperdalam pengetahuan seni itu.

Pada tahun 1922 K.B.W. menerima sebagai murid putera dan puteri Sri Paku Alam VII, jaitu:

1. R.M. Surjosularso, jang sekarang mendjadi Sri Paku Alam VIII.
2. R. M. Surjosutikno (P. A. Nototaruno).
3. R. A. Sulastri (Njonjah Sugriwo).
4. R. A. Kussaban (Njonjah Ir. Kusumaningrat).
5. R. A. Kuspinah (Njonjah Mr. Hapsoro).

Selain dari itu P.A. VII djuga mengirimkan seorang bedaja untuk mengikuti peladjaran tari bersama-sama dengan putera dan puteri tersebut.

Kepada para puteri agung itu diberikan peladjaran tari „serimpi Merak Kasimpir", sedang kepada para putera diberikan peladjaran „Endjeran". Hasil dari peladjaran memuaskan.

Pada tahun 1923 K.B.W. menerima murid seorang wanita bangsa Amerika, bernama Zella Thomas, dan seorang wanita dari Rusia bernama Veramirowa. Dalam udjian penghabisan mereka mendapat nilai 4.

Pada tahun 1926 Sri Mangkunegoro VII mengirimkan puteri-puterinja R. A. Siti Nurul dan R. A. Partinah, bersama 8 puteri bangsawan Mangkunegaran dan 11 orang bedaja ke Jogjakarta untuk mengikuti peladjaran tari. Kepada mereka diberikan peladjaran: tari Sari Tunggal, serimpi Merak Kasimpir, serimpi Pande Lori, serimpi Puteri Tjina dan bedaja Sinom. Buah peladjaran mereka pada udjian memuaskan. R.A. Partinah lulus dalam udjian ini dengan nilai 7.

Pada tahun 1937 R. A. Siti Nurul oleh ajahnja dikirim kenegeri Belanda (Den Haag), untuk mempertundjukkan seni tari Sari Tunggal diiringi dengan gending Pande Lori. Pertundjukan itu disambut dengan rasa kagum oleh orang Barat. Sedjak waktu itu tari serimpi mulai dikenal dan memperoleh nama di Eropah. Dengan sendirinja negara Indonesiapun membubung deradjatnja.

Pada tahun 1926 K.B.W. menerima seorang wanita Rusia bernama Helen Litman mendjadi muridnja. Wanita ini mempeladjari tari Sari Tunggal. Pada achir peladjaran Helen Litman mempertundjukkan kepandaiannja menari dipendapa Taman Siswa dan pendapa Tedjokusuman. Dalam pasamuan ini hasilnja memuaskan.

Pada tahun 1927 datang di Jogjakarta sebagai murid tari seorang wanita dari Riga bernama Kleinrunhell. Wanita ini diberi peladjaran tari Sari Tunggal. Hasilnja memuaskan. Sesudah beladjar tari Djawa di Jogjakarta Klenrunhell mengadakan perdjalanan keliling dinegeri Amerika dan Eropah, dengan mempropagandakan seni tari Djawa Sari Tunggal, dengan diiringi oleh bunjinja gending dari plaat gramapun jang sepesial dibuat untuk keperluan itu.

Sehabis menari 5 menit Helen Litman berhenti sebentar untuk menerangkan namanja dan gending jang dipertundjukkan.

Pada tahun 1928 Sri Sunan Pakubuwono X Surakarta mengirimkan 8 orang bedaja serimpi Keraton Solo ke Jogjakarta dibawah pimpinan R.T. Wirjodiningrat, untuk mempeladjari tari „Merak Kasimpir".

Murid-murid dari Keraton Solo ini memperoleh hasil baik. Kepandaian menari oleh mereka dipertundjukkan pada hari ulang tahunnja Sunan Pakubuwono X.

Pada tahun 1929 K.B.W. menerima seorang puteri India, Mrinalini. Puteri ini mempeladjari tari Sari Tunggal. Atas permintaan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, Mrinalini memberi pertundjukan tari Sari Tunggal di Bangsal Manis Keraton Jogjakarta, disaksikan oleh para bangsawan dengan isterinja. Hasil peladjaran terbukti memuaskan.

Pada tahun 1939 seorang wanita dari Marokko, Nj. Patmapani, mempeladjari tari Sari Tunggal. Hasilnja tjukup.

Pada tahun 1939 K.B.W. menerima murid seorang wanita bangsa Vietnam, isterinja pemimpin redaksi harian Locomotief.

Pada tahun 1938 wanita Tionghoa Irna datang di Jogja sebagai murid K. B. W.

Pada tahun 1938 dua orang puteri bangsawan dari Pura Paku Alaman R.A. Kusdarinah (Nj. Mr. Hardjono) dan R.A. Kusbinah (Nj. Ir. Sugoto) dan 8 orang bedaja masuk mendjadi murid K.B.W. Mereka mendapat peladjaran tari Sari Tunggal dan bedaja Ranggawati. Hasilnja terdapat baik. Pada th. 1943 murid-murid bangsawan itu mempertundjukkan kepandaiannja menari pada pesta perkawinan R. A. Upomo (isteri Dr. Upomo) dipendapa Tedjokusuman.

Pada tahun 1940 berhubung dengan penobatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX oleh K.B.W. diadakan pertundjukan tari bedaja Sinom digedung Negara.

Diantara tahun 1922 sampai 1942 K.B.W. menerima murid bangsa Belanda, akan tetapi pada umumnja karena kurang tenang (djenak) hasilnja tidak sebegitu memuaskan. Beberapa orang sadja dari mereka memperoleh nilai sedang, misalnja Nona Tuty Elbers, tuan Reineker. Tuan ini menerima peladjaran tari Kalang kinantang. Tuan Tommie Resink, Professor Dr. Tjan Tju Sim dan njonjah bangsa Australia turut beladjar djuga, tapi hasilnja tidak baik.

Pada tahun 1942 hingga 1945, djadi selama pendudukan Djepang, K.B.W. diminta oleh Bala Tentara Dai Nippon untuk mengadakan pertundjukan tari digedung Negara dan pendapa Tedjokusuman untuk memberi hiburan pada tentara dan pembesar-pembesar Djepang. Selama 3 tahun itu atas permintaan pemerintah Djepang oleh K.B.W. diselenggarakan 99 kali pertundjukan tari serimpi dan petilan.

Pada tahun 1950 K.B.W. menerima 4 orang puteri, 2 orang putera dan seorang kemenakan dari Sri Paku Alam VIII, mendjadi murid.

Pada 8 September 1952 K.B.W. menerima murid dari Kementerian P.P.K. (Pendidikan Djasmani), murid kursus B 1 dan tjalon guru olah raga pada S.M.A. terdiri dari 37 orang laki-laki dan 3 orang puteri. Kepada murid laki-laki diberi peladjaran tari olah raga, sedang kepada murid perempuan diberi peladjaran tari Sari Tunggal. Tiap-tiap minggu diberi peladjaran tari 4 djam. Guru tari diberi honorarium oleh Pemerintah, tiap bulan Rp. 225,—.

Pada 10 Oktober 1952 K.B.W. menerima murid seorang wanita Inggeris, bernama Forster, isterinja seorang maha-guru bahasa Inggeris pada U.N. Gadjah-mada.

Pada tanggal 22 Nopember 1952 K.B.W. mentjatat sebagai murid 2 orang wanita Amerika, jaitu Anola Rijan dan Hilderd Geerz, maha-siswa pada U.N. Gadjah-Mada. Mereka beladjar di Universitit Gadjah-Mada atas biaja perkumpulan Ford di Amerika. Mahasiswa Amerika itu diberi peladjaran Sari Tunggal. Pengadjarnja seorang guru puteri.

Pada 8 Djanuari 1953 K.B.W. menerima murid seorang wanita Perantjis, Cuisinier, jang sepesial mempeladjari gending Djawa. Wanita ini mendjadi mahaguru di U.N. Gadjah-Mada.

Pada penutupan tahun 1952 K.B.W. mempunjai 300 orang murid puteri dan 300 orang putera.

Dari keterangan G. P. Tedjokusumo diatas dapat kiranja diambil kesimpulan, bahwa tari serimpi baik oleh bangsa kita maupun bangsa asing dihargai dan dipeladjari. Seni tari dan gending Djawa ternjata populer dilain negeri. Kursus tari ini hingga sekarang dianggap sebagai samben, baik oleh guru maupun muridnja. Peladjaran tari diberikan oleh guru manasuka, sedang tempat beladjar menari tidak tjukup luasnja.

Dan karena banjaknja kursus tari, timbul kekurangan guru tari. Tjalon guru tari harus mendapat pendidikan setjukupnja. Penghargaan guru dan waktu peladjaran menari hendaknja disesuaikan dengan guru lainnja. Pendek kata guru tari harus mendapat penghargaan materieel, agar dia dapat hidup tjukup dengan keluarganja.

Reorganisasi sekolah tari baru akan berhasil baik, djika orang mau mengingat kekurangan-kekurangan tersebut.

*

B. KEHIDUPAN SENI SUARA TAHUN 1945 — 1952

Agustus 1945.

DENGUNGAN seni suara dengan tjorak jang tertentu, jang selama 3½ tahun meliputi suasana Indonesia, surutlah dengan meninggalkan ketjakapan bernjanji bertingkatan tidak tinggi, tetapi meluas dikota-kota, desa-desa dan gunung-gunung.

Bergeloralah diseluruh Indonesia seruan dan lagu-lagu kemerdekaan tjiptaan bangsa Indonesia.

Di Jogja timbul hasrat jang besar, untuk mengembangkan kesenian, dan oleh seniman-seniman kita didirikan Front Seniman jang diketuai oleh Sri Murtono. Usaha didalam berbagai tjabang kesenian diselenggarakan, dan peladjaran seni suara diberikan oleh Lukman Effendi.

Tahun 1947.

Oleh W.F.D.Y. (World Federation of Democratic Youth) dengan a.l. S. Soedjojono, Usmar Ismail, Indrosoegondho, L. Manik, Mutahar, Kusbini d.l.l. sebagai anggauta, diusahakan penjelenggaraan suatu hidangan seni suara. Usaha ini baru dapat terlaksana di Madiun setjara sederhana.

Himpunan Musik Indonesia, jang diketuai oleh Ir. S. Prawironegoro usahanja: menghdupkan seni musik setempat dengan djalan menghidangkan musik kamar.

Peladjaran privat; oleh Tan Thiam Kwie, dan N. Saffrie, Lukman Effendi.

Panitia „Lambang Negara Republik Indonesia" jang diketuai Ki Hadjar Dewantara dan Mr. Yamin jang dibentuk oleh Pemerintah (Kementerian P.P. dan K.), bertugas mempeladjari lambang dan lagu kebangsaan Indonesia Raja.

Panitia Seksi lagu: Partosiswojo, B. Sitompul, Kusbini, Mutahar.

Usaha ini gagal karena clash II th. 1948 (19 Desember).

Tahun 1948.

Didirikan:
1. „Hiburan Mataram" jang diketuai oleh Dr. Hujung dimana tenaga-tenaga seni setempat disatukan dan dikerahkan untuk menjelenggarakan berbagai-bagai kesenian, a.l. seni suara jang diketuai oleh Kusbini.
2. Cine Drama Institut a.l. diadjarkan seni suara oleh Lukman Effendi.

   Usaha-usaha ini gagal karena clash II.

Tahun 1949.

Didirikan:
1. Sekolah musik „Kusbini" oleh Kusbini, (th. 1949—1951). Meskipun usaha ini terhenti, karena para anggautanja dan para guru banjak jang pindah tempat, Kusbini melandjutkan usahanja dengan memberi peladjaran-peladjaran privat.
2. Sekolah Seni Drama oleh Front - Seniman a.l. memberi peladjaran seni suara, oleh: L. E. Soemarjo.

Tahun 1950.

Didirikan : 1. Himpunan Musik Amateur (H.M.A.) oleh Lukman Effendi jang diketuai oleh Suthasoma/Mudojo, usahanja : memberi dorongan dan didikan pada masjarakat untuk menghidupkan dan membangun seni musik.
Pula selain memberi kursus-kursus, djuga menjelenggarakan hidangan-hidangan seni suara untuk masjarakat.

Tahun 1951.

Rombongan musik dibawah pimpinan Jos Cleber menghidangkan seni musik dengan buah tjiptaan Indonesia.

Tahun 1952.

Didirikan : Oleh Kementerian P.P. dan K. Sekolah Musik Indonesia pada tanggal 17 Djanuari 1952.

Oleh Lukman Effendi diberikan tjeramah : Serba-serbi kearah seriosa melalui R.R.I. Jogjakarta, selama 6 bulan.

Tjeramah jang pada tanggal 29 dan 30 Desember 1952 dilakukannja buat para mahasiswa dan peladjar S. M. keatas, dengan disertai concert jang diselenggarakan oleh Nicolay Varvolomeyef dengan teman-temannja.

Berbagai-bagai buah musik ditjiptakan a.l. oleh Martono, Mutahar, L. Manik, Kusbini, Suthasoma, Muradji, Daldjono.

Mengingat keadaan diatas, ditambah pertanjaan disana-sini, bilamana tjeramah-tjeramah sebagai tersebut diatas itu diulangi, njatalah bahwa di Jogja seni suara mendapat perhatian besar dari masjarakat.

Djuga seni suara daerah jang seakan-akan kehilangan perhatian selama 3½ tahun, telah bergelora kembali segar bugar sebagai sediakala, dengan tidak menundjukkan bekas-bekas selubung jang telah menutupnja selama 3½ th. itu.

Dengan hasrat jang serentak diantara seniman-seniman karawitan, untuk menudju ke-kesatuan jang kokoh, tiga perkumpulan jang pokok, ialah Murbalaras. Mardiwirama dan Swarapradangga, telah meleburkan diri didalam Dajamardawa jang diresmikan pada tanggal 17 Pebruari 1947, dan diketuai oleh Tjokrowasito.

Front karawitan, jajasan Dajamardawa telah dapat mengadakan hubungan dengan badan-badan karawitan diluar kota ialah : Wates, Pakem, Bantul dan Wonosari.

Oleh Basir Arintoko diberikan kursus-kursus jang diikuti oleh guru-guru S.R. dimana ketjuali sedikit tentang tjara mengadjar tembang, djuga diadjarkan lagu-lagu sekolah karangan Hadisukatno dan C. Hardjosubroto, dan jang lain-lainnja.

Pantas ditjatat adanja tjiptaan-tjiptaan baru sebagai :

1. Gending Teguhdjiwa tjiptaan R.W. Larassumbogo jang dimasak dan sering diselenggarakan oleh Dajamardawa dan oleh umum disebut gending „Tek dung" jang amat terkenal.
2. Gending Tunggaldjiwa tjiptaan Tjokrowasito sebuah potpori jang diambil dari 11 matjam gending.
3. Langensekar tjiptaan C. Hardjosubroto ialah rentetan gending didalam irama bertiga jang telah dihidangkan pertama kali pada pembukaan Sekolah Musik tanggal 17 Djanuari 1952 dan kedua kalinja pada tanggal 20 Desember lengkap dengan tari-tariannja, saduran Djojosetiko.
4. Gending Djajamanggalagita tjiptaan Tjokrowasito (Agustus 1952) jang mentjeritakan sedjarah karawitan mulai Erlangga sampai hari Proklamasi.

Dengan masuknja irama bertiga didalam karawitan, maka untuk Tjokrowasito chususnja dan Dajamardawa pada umumnja terbuka berbagai-bagai kemungkinan didalam tehnik menabuh alat-alat gamelan.

Sebagai tjontoh terdapat olehnja suatu matjam tabuhan gender jang dinamakannja tridadi.

Perkembangan selandjutnja akan kita lihat dikemudian hari.

Djuga perlu ditjatat, bahwa dalam rentetan lagu-lagu Langensekar, djuga terdengar „Lagu tri-swara" (driestemmig lied), ialah lagu : Tuhu Mulja jang motifnja diambil dari tembang : Padmawitjitra. Inisiatif ini diambil oleh C. Hardjosubroto buat pertama kali pada tahun 1925 dalam lagu Tarupala jang telah dipasang didalam madjalah Djawa.

Dengan putusan Menteri P.P.K. (R.I. negara bagian) pada tahun 1950 didirikan Konservatori Karawitan Indonesia di Surakarta, dengan Pangeran Soerjohamidjojo sebagai Pemimpin Umum.

Sebagai peladjaran pokok diberikan bukan sadja karawitan Djawa, melainkan djuga karawitan Bali, Sunda, d.l.l., pun djuga ilmu musik internasional.

*

C. PERKEMBANGAN PEDALANGAN

PERKEMBANGAN pedalangan disesuatu tempat tidak dapat dipandang tersendiri dengan tidak meraba perkembangan pedalangan pada umumnja. Sebab pertundjukan wajang dilakukan oleh dalang-dalang dari masjarakat untuk masjarakat. Maka dari itu soal pedalangan tidak dapat dipisahkan pula dengan keadaan masjarakatnja.

Setelah bangsa Indonesia bergaul dengan bangsa Barat beberapa abad lamanja dan setelah tjara pendidikan Barat mendalam pada bangsa Indonesia, hal-hal ini sangat mempengaruhi dasar pandangan hidup masjarakat kita. Dasar pendidikan bangsa Indonesia jang dulunja dititikberatkan pada memperkembang dan mempertadjam perasaan lambat-laun bertjampur djuga pada mempertinggi ketadjaman fikiran, jang achirnja terasa atau ta' terasa sebagian besar masjarakat kita sangat mengagumi dan memakai dasar fikiran semata-mata hidup sehari-hari dalam pergaulannja, dari hidup ke-Tuhanan berubah ke-hidup ke-bendaan, jang semakin lama semakin menebal.

Maka pertundjukan wajang purwa dengan tjeritera-tjeritera klasik dari kitab sutji Mahabharata dan Ramayana jang kemudian digubah, disesuaikan dengan keadaan masjarakat kita oleh pudjangga-pudjangga kita pada zaman j.l. sengadja dimaksudkan untuk didjadikan saluran mendidik kerochanian, jang erat hubungannja dengan religi. Tjara mendidik dalam pertundjukan ini disulam rapi dengan sulaman persatu-paduan dari berbagai ragam kesenian (drama, rupa, sastera, suara dan gerak) jang bernilai, sehingga dari permainan dalang jang terpilih dan tjakap, orang tidak merasa terdidik, karena selama pertundjukan masjarakat penonton terpikat oleh tjeritera. Tidak hanja selama melihat pertundjukan sadja, tetapi djuga sehabis pertundjukan, mereka seolah-olah mengulangi lagi djalan tjerita dan suasana pakeliran jang mereka lihat didalam angan-angan dan isi-isi dari pertundjukan itu tergores dalam kalbu mereka. Dengan djalan demikianlah maka pertundjukan wajang oleh seorang dalang empu merupakan alat pendidikan djiwa jang sempurna.

Lambat-laun, dengan berubahnja dasar pandangan hidup masjarakat dari ke-Tuhanan ke-kebendaan, maka demi sedikit isi pedalangan semakin mem-„benda" djuga. Lakon-lakon tjarangan timbul, jang ditjiptakan untuk melukiskan keadaan-keadaan kelahiran, misalnja lakon-lakon Seloka „Swarga Bandang" atau Srikandi menandak, jang melukiskan Sultan Agung di-Mataram mena'lukkan

Ki-Ageng di-Mangir, lakon „Tug(h)u - wasesa" atau Werkodara mendjadi radja dinegeri Gilingwesi seloka zaman perang masjarakat Tionghoa melawan keradjaan Kartasura, waktu Sunan P.B. II, lakon „Kresno kembang" atau Norojono dan Rukmini berlambangsari jang menggambarkan keadilan P.B. IV (Sunan bagus) terhadap hukuman jang didjatuhkan kepada puterinja jang berlambangsari dengan Notowidjojo. Tjara menjisipkan keadaan-keadaan jang dimaksudkan dalam lakon-lakon tadi digambarkan samar-samar.

Semendjak zaman pendudukan tentara Djepang di-Indonesia, apa jang mungkin dipergunakannja untuk membakar semangat, sebagai misal: pedalangan, dipakainja sebagai alat pendidikan kearah djiwa keperadjuritan, kebaktian. Maka mulai saat itu hingga selama perdjuangan kemerdekaan tidak sedikit manfaatnja pedalangan sebagai pembangun semangat ksatria dalam bangsa kita. Pada umumnja oleh para pentjipta lakon ataupun oleh para dalang tidak dimasukkan isi-isi jang menudju kearah ke-Tuhanan.

Oleh karena sebab-sebab ini semua, disamping pandangan hidup sebagian besar dari masjarakat berubah berdasar kebendaan djuga dalang-dalang dan pedalangan pada umumnja mengalami perubahan jang demikian pula.

Dasar jang dimiliki oleh sebahagian besar dari dalang-dalang pada dewasa ini sungguh sulit: untuk mengedjar, mengikuti pendidikan djasmani (intelek) tidak mentjukupi, sedang dasar-dasar tentang pendidikan djiwa menudju kearah ke-Tuhanan kurang diperhatikan.

Demikianlah uraian selajang pandang mengenai perkembangan pedalangan.

Keadaan pedalangan di - Jogjakarta kurang lebih djuga didalam keadaan sedemikian. Jang perlu ditjatat tentang kedjadian-kedjadian dalam lingkungan pedalangan di Jogjakarta mulai th. 1945 hingga sekarang diantaranja ialah:

Pada th. 1949 ditjiptakan lakon „Pradja-binangun" untuk melukiskan pikiran bangsa Indonesia tentang kedjadian-kedjadian dalam perdjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia melawan pendjadjahan Belanda (lakon dokumentèr). Siapa jang mentjiptakannja masih belum ada kepastian jang njata. Jang terang ialah, bahwa pertundjukan-pertundjukan lakon ini dimulaikan oleh Djapendi di Jogjakarta.

Dalam waktu lakon ini masih baru, setiap pertundjukan wajang didaerah Jogjakarta disampaikan permintaan untuk mempertundjukkannja.

Djuga lakon „Gunturwasesa" ditjiptakan pada waktu itu, tapi hingga kini orang belum pernah melihatnja.

Mulai tahun itu djuga R.R.I. Jogjakarta berniat mentjahari djalan memperbaiki deradjat pedalangan, jang sukar sekali pelaksanaannja.

Pada tahun 1949 di Djl. Sukun diusahakan peladjaran-peladjaran pedalangan oleh Perkumpulan kesenian „Marsudi-wirama", jang sekarang dipimpin oleh Padmosuwarno.

Pada permulaan tahun 1950 dibuka kembali Sekolah Dalang „Habiranda" (Hanindakake Biwara Rantjangan Dalang) jang diketuai oleh B. P. H. Pakuningrat, bertempat di „Komandaman" Jogjakarta, kemudian pindah di Pratjimasana sebelah Barat Siti Inggil

Pada tahun 1951 seorang pegawai dari Kempen, Harsono Hadisoeseno mentjiptakan wajang Pantja Sila, jang dimaksudkan untuk keperluan penerangan kepada masjarakat tentang hal-hal kenegaraan. Dalam fase pertumbuhannja masih banjak mengalami berbagai rintangan, sebagai halnja dengan bermatjam-matjam usaha baru.

Oleh para peminat wajang purwa jang tergabung dalam pagujuban „Anggara Kasih" kini telah diterbitkan madjalah pedalangan „Pandjang Mas". Madjalah ini terbit tiap-tiap hari Selasa Kliwon (Anggara kasih).

*

D. PERKEMBANGAN KETOPRAK DAN DAGELAN MATARAM

KETOPRAK dan dagelan Mataram dikenal oleh orang melalui udara, terutama jang mengerti bahasa Djawa semendjak tahun 1934, bersamaan dengan muntjulnja penjiaran Radio Mavro (Mataramse Vereniging voor Radio Omroep) di Jogjakarta. Mula-mula dagelan Mataram itu digunakan untuk pertundjukan tambahan (extra) dalam pertundjukan-pertundjukan ketoprak di Jogjakarta, diberi nama „Extra".

Oleh karena lelutjon itu suatu hiburan jang sehat dan semua manusia gemar akan lelutjon-lelutjon (penggeli hati) itu, maka oleh Mavro para ahli komiek (pemain penggeli hati) dikumpulkan dalam satu rombongan dinamakan „Dagelan Mataram" untuk didjadikan bahan siaran jang disamping siaran ketoprak, ujon-ujon d.l.l. Usaha ini dapat sambutan hangat dari masjarakat dimasa itu sampai terkenal diseluruh Indonesia. Pada mula-mulanja banjaklah aksi dari pihak pendengar jang tidak suka kepada dagelan tsb. karena mula-mula isinja hanja menggambarkan pertjektjokan suami isteri, serta disiarkan terpisah dari ketoprak, tetapi disamping itupun lebih banjak pula pernjataan-pernjataan jang memberikan persetudjuannja terhadap dagelan tersebut.

Dari hari ke hari dagelan tsb. dibimbing kearah perbaikan untuk mendapatkan hasil jang memuaskan bagi penggemar dagelan Mataram. Karena penjiaran Radio membutuhkan kesenian tsb. untuk perkembangan kesenian Radio umunnja.

Setelah banjak mendapat petundjuk-petundjuk, pengalaman-pengalaman seperlunja tentang maksudnja siaran dagelan dan ketoprak kepada para pendengar, maka kemudian dagelan dan ketoprak lalu mendjadi populer dikalangan masjarakat Indonesia.

Dalam pernjataan-pernjataan serta reaksi dari para pendengar terhadap dagelan dan ketoprak dimasa jang lampau itu terdapat beberapa matjam soal. Ada jang memandang dari sudut paedagogie, ada pula jang memandang dari sudut kesenian, dan lain-lain. Dipandang dari sudut pendidikan, kalau seandainja isi tjeriteranja menjalahi hukum-hukum pendidikan, maka memang tidak menguntungkan masjarakat, tetapi kalau dipandang dari sudut kesenian, dagelan dan ketoprak, adalah perkembangan kesenian jang dapat menghasilkan hiburan jang sehat. Karena dinegara manapun kesenian sematjam dagelan dan ketoprak itu mendapat penghargaan jang lajak, misalnja Charlie Chaplin dan lain-lainnja.

Karena seni sematjam itu memang sukar didapat, kalau orangnja tidak mempunjai pembawaan lutju dan djenaka, tidak mungkinlah ia akan mendjadi lawak dan menarik.

Tetapi untuk orang jang sudah mempunjai aanleg lutju sematjam pemain dagelan Mataram dan memainkan peranan sebagai pemain ketoprak, haruslah memperluas dan mempertinggi pengetahuannja sehingga dapat memberi manfaat kepada masjarakat dalam segala lapisan.

Usaha kearah ini oleh R.R.I. terus didjalankan agar peil dari dagelan Mataran dan ketoprak dapat menghibur seluruh golongan masjarakat.

Disamping itu oleh beberapa pemain dagelan Mataram dibentuk perkumpulan dengan nama „Barisan Kuping Hitam". Team ini adalah jang terbaik diantara rombongan-rombongan dagelan di Jogjakarta.

Apakah arti dagelan Mataram itu ?

Dalam bahasa Djawa sebetulnja sudah terang, perkataan „dagel" artinja setengah masak, dus dagelan artinja mainan setengah masak, sedang Mataram adalah nama tempat. Djadi arti kata seluruhnja jalah „permainan setengah masak model Mataram".

Kalau ditindjau dari namanja, maka sebetulnja dagelan tidak dapat dipandang dari sudut paedagogie, tetapi harus dipandang dari sudut kesenian sadja. Tetapi meskipun demikian ta' boleh terlantar begitu sadja, harus dipelihara agar dapat berguna bagi masjarakat ialah mendjadi suatu hiburan jang sehat.

Memang ada kalanja dagelan diisi penerangan-penerangan jang ringan, tetapi untuk diisi penerangan-penerangan jang berat, misalnja soal-soal politik dan lain-lain kurang tepat dan dapat mengurangkan ernstnja soal-soal jang dipentingkan.

Dalam djaman Djepang misalnja, dagelan diisi matjam-matjam soal penting. Oleh karena basis pengetahuannja pemain-pemain belum sampai kesitu, maka akibatnja mengurangkan lutjunja, dus kurang menarik.

Tetapi meski bagaimanapun sukarnja, dagelan tetap dapat mendjadi alat penghibur masjarakat. Sampai sekarang dalam usahanja penerangan Djapendi Jogjakarta masih djuga menggunakan dagelan.

Apakah arti ketoprak Mataram ?

Arti kata :

Ketoprak jalah dari suara bunji-bunjian (tabuhan) jang digunakan untuk mengiringi pertundjukan ketoprak dimasa lampau.

Bunji-bunjian tersebut ditimbulkan oleh suara pukulan pada lesung (penumbuk padi) dengan alu (anak lesung).

Soal nama Mataram telah diuraikan diatas. Ketoprak Matarampun disamping menghibur, djuga memberi pendidikan dan bimbingan, terutama dalam lapangan budi pekerti.

Apakah perdjuangan dagelan dan ketoprak Mataram dalam perdjuangan nasional ?

Pada tahun 1935 — 1938 dagelan dan ketoprak Mataram sedikit banjak djuga membantu perdjuangan Nasional, jaitu pada waktu sedang hebat-hebatnja konkurensi siaran antara Nirom Ketimuran dengan Mavro.

Kalau seandainja dagelan dan ketoprak Mataram jang pada waktu itu sedang populernja bekerdja pada Nirom, maka nistjaja akan mendapat honorarium jang setjukupnja, padahal di Mavro mereka hanjalah mendapat uang andongan (transportgeld) pada tiap-tiap main di Radio, djaminan lain-lainnja tidak ada. Tetapi oleh karena insjaf, bahwa Mavro adalah usaha Nasional, dan pula jang membimbing mereka kearah populeritetnja, maka mereka tidak mau membantu Nirom kalau tidak dengan perantaraan Mavro. Sikap sedemikian itu merata keseluruh pembantu-pembantu siaran dari Mavro, hal mana menjebabkan ta' dapat mengadakan siaran Ketimuran sendiri langsung dari Jogjakarta kalau tiada dengan perantaran Mavro di Jogjakarta.

Oleh karena pada masa itu pendengar-pendengar dari siaran Ketimuran gemar sekali akan siaran ketoprak, dagelan dan ujon-ujon dari Mavro, maka blokkade Mavro dalam kesenian tersebut dapat memberikan backing kepada P.P.R.K. jang pada masa itu memperdjuangkan dalam volksraad akan mengoper siaran-siaran Ketimuran dari Nirom. Dus sedikit banjak dagelan dan ketoprak Mataram, djuga turut dalam perdjuangan Radio Nasional.

Dagelan dan ketoprak dikalangan rakjat djelata terkenal sekali, tidak hanja di Jogjakarta sadja tetapi diseluruh Indonesia. Sampai sekarang dagelan dan ketoprak masih tetap digemari sekali oleh rakjat, tetap mengisi atjara untuk hiburan jang menarik dan menggelikan hati bagi para pendengar radio jang mengerti bahasa Djawa.

Dimasa pendudukan Belanda para anggauta ketoprak dan dagelan Mataram tetap setia kepada Pemerintah Republik, terbukti, meskipun mereka menderita, ta' sudi membantu usaha siaran Belanda.

*

E. PERKEMBANGAN GAMELAN STUDIO R.R.I. JOGJAKARTA

GAMELAN Studio R.R.I. Jogjakarta adalah pendjelmaan dari pada perkumpulan - perkumpulan kesenian Djawa (gamelan) di Jogjakarta jang sudah terkenal semendjak berkembangnja siaran Radio di Indonesia ini. Semendjak di Jogjakarta didirikan perkumpulan Radio partikelir oleh bangsa Indonesia ialah MAVRO (Mataramse Vereniging Voor Radio Omroep) ja'ni pada tahun 1934, maka perkumpulan-perkumpulan gamelan (karawitan) di Jogjakarta membantu dengan sukarela kepada Mavro dengan gratis. Diantara perkumpulan-perkumpulan karawitan tersebut jang membantu Mavro ialah: 1. Murbararas, 2. Dajapradangga, 3. Saripradangga, 4. Brantararas, 5. Muda Langen Swara, 6. Siswapradangga, 7. Sihing Pangripta Pradangga, 8. Krusukraras dan lain-lain.

Pada waktu itu perkumpulan kesenian Djawa tsb. membantu usaha-usaha penjiaran Radio Nasional, untuk kemadjuan kesenian Djawa pada umumnja. Dalam hal ini perkumpulan-perkumpulan tersebut tidak luput dari penderitaan konsekwensi dari pada tjita-tjitanja membantu usaha-usaha penjiaran Radio Nasional. Seandainja pada waktu itu diantara perkumpulan-perkumpulan tsb ada jang suka membantu penjiaran Radio usaha dari Nirom Ketimuran, maka nistjaja dapat melemahkan kedudukan Mavro jang pada itu masa bersaingan penjiarannja dengan Nirom, karena pada masa itu Nirom ingin sekali dapat menjiarkan kesenian Djawa langsung dari perkumpulan-perkumpulan kesenian Djawa tersebut di Jogjakarta tiada dengan perantaraan Mavro, meskipun harus dengan pembajaran-pembajaran jang lebih tinggi. Tetapi usaha tersebut tiada berhasil dan terpaksa Nirom dalam menjiarkan kesenian-kesenian Djawa dari Jogjakarta harus minta pertolongan Mavro. Dengan bantuan dari perkumpulan kesenian Djawa tersebut maka Mavro mendjadi populer diseluruh Indonesia. Kemudian semendjak Djepang berkuasa di Indonesia, maka penjiaran Radio usaha dari pemerintah pendudukan Djepang ja'ni Jogjakarta Hosokyoku. Oleh karena pada masa pendudukan Djepang segala perkumpulan Radio partikelir dilarang, maka perkumpulan-perkumpulan kesenian Djawa di Jogjakarta, pembantu-pembantu siaran Mavro, dengan sendirinja menjesuaikan diri dengan suasana tersebut. Oleh Jogja Hosokyoku jang pada waktu itu pemimpin umumnja djuga seorang bekas omroepleider Mavro, maka susunan dan penghargaan Jogja Hosokyoku terhadap perkumpulan-perkumpulan kesenian Djawa melandjutkan usaha-usaha jang sudah pernah dikerdjakan oleh Mavro dulu. Maka dengan sendirinja perkumpulan-perkumpulan gamelan jang sudah banjak djasadjasanja terhadap perdjuangan Radio Nasional mendapat perhatian selajaknja.

Setelah Radio Republik Indonesia Jogjakarta berdiri, maka anggauta perkumpulan gamelan seluruhnja sedjumlah kurang lebih 80 orang membantu kepada R.R.I., mula-mula sebelum R.R.I. mendapat biaja jang tertentu dari Pemerintah dengan setjara sukarela. Mereka membantu dengan tjuma-tjuma; kemudian setelah mendapat biaja dari Pemerintah, maka perkumpulan-perkumpulan tersebut didjadikan pegawai pembantu bagian kesenian Djawa, bernama Dajamardawa. Sampai sekarang Gamelan Studio Dajamardawa selalu memperdengarkan ujon-ujonnja dibawah pimpinan R.W. Larassumbogo dan Ngabehi Tjokrowasito.

Perlu dituturkan disini, bahwa agressi ke II jalah selama Belanda mengadakan siaran-siaran kesenian di Jogjakarta, anggauta-anggauta dari Gamelan Studio „Dajamardawa" tiada mau membantu penjiaran strijdkrachten

programa dari tentara pendudukan tersebut. Setelah Jogjakarta dikembalikan kepada Republik dan R.R.I. kembali pula dikota Jogjakarta, maka Dajamardawa disusun kembali dan sampai sekarang masih lengkap dengan achli-achlinja jang ternama. Dajamardawa ini djuga bertugas meramaikan siaran-siaran dagelan dan ketoprak disamping menjelenggarakan atjara langen mandra wanara, santiswara dan lain-lain.

*

F. PERTUMBUHAN SENI LUKIS MUDA DI JOGJA MULAI TAHUN 1945

PERTUMBUHAN seni lukis di Jogja sesudah 1945 adalah sebagian dan kelandjutan dari kelahiran di Djakarta, mula-mula dengan terbentuknja perkumpulan seni lukis jang pertama „Persagi" sebagai singkatan dari: Persatuan Ahli Gambar Indonesia, pada tahun 1939.

S. Sudjojono adalah pembentuknja dan ketua perkumpulan tsb, dengan anggauta-anggauta diantaranja: Agus Djayasuminta, G. Sukirno, Sindusisworo dan S. Tutur waktu itu.

Perkumpulan bermaksud menjusun alam fikiran seni sendiri jang bebas, dengan dasar-dasar perikemanusiaan dan tjinta hidup jang merdeka, seperti djuga telah dirintis oleh pentjipta-pentjipta seni muda di Perantjis dalam pertengahan abad 19 oleh pelukis-pelukis Perantjis Cesanne dan Gauquin atau oleh Van Gogh seorang pelukis Belanda, jang melukiskan kehidupan manusia biasa, rakjat sehari-hari, sedang seni lukis sebelumnja terutama melukiskan kemegahan kalangan teratas dari pemerintahan keradjaan sadja dan motif-motif agama.

Dan Persagi didirikan djuga karena merasa tidak puas, kalau bangsa Indonesia dapat turut melihat pada exposisi-exposisi jang diadakan oleh kunstkring-kunstkring Belanda sadja, jang tentunja tak sampai akan memperdulikan fikiran-fikiran jang timbul pada bangsa Indonesia atau pelukisnja, seperti pertanjaan apakah seni lukis jang dipertundjukkan itu selalu jang sebaiknja sebagai hasil-hasil seni, ataupun pendapat, tidaklah sepatutnja kalau lebih banjak orang Indonesia akan berkesempatan menikmati hasil-hasil seni lukis, karena untuk dan oleh merekalah djuga dapat diadakan exposisi-exposisi lukisan sendiri? Tapi untuk anggauta-anggauta kunstkring, bahkan **ta' mudah pertjaja, bahwa sudah ada pelukis-pelukis bangsa Indonesia lainnja,** selain jang sudah dikenal, seperti almarhum Raden Saleh, Basuki Abdullah dan ajahnja.

Didjaman Djepang.

Mulai djaman pendudukan Djepang, Djakarta mendjadi pusat perdjuangan bangsa Indonesia dengan Pusat Tenaga Rakjat-nja „Putera" dibawah pimpinan Soekarno — Hatta, disamping pusat gerakan kebudajaan propaganda Djepang dengan „Pusat Kebudajaan-nja" atau Keimin Bunka Sidosho.

Demi kegiatan kedua badan „Putra" dengan bagian seni rupanja jang dipimpin Sudjojono — Affandi maupun Keimin Bunka dengan pimpinan pelukis-pelukis Djepang, umum mendapat kesempatan jang lebih besar, djuga dikota-kota lain dengan exposisi jang berkeliling, dari pada didjaman Hindia Belanda untuk beladjar menikmati hasil-hasil lukisan. Dan sekarang dari hasil pelukis-pelukisnja sendiri.

Muntjullah waktu itu nama-nama baru seperti: Emiria Sunasa. Henk Ngantung, Otto Dhayasuntara, Kartono Yudhokusumo dan masih banjak lagi.

Sesudah 1945.

Berhubung dengan keamanan jang pada bulan-bulan pertama sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, makin hari bertambah sukar dipertahankan di ibu-kota Djakarta, karena makin kuatlah kedudukan Inggeris dengan bertambahnja djumlah tentaranja dikota tsb. demi hari berpindahlah setjara berangsur-angsur kantor-kantor pemerintahan Indonesia ke Jogja, djuga 70% pelukisnja.

Pada tahun 1946 terbentuklah perkumpulan SIM atau Seniman Indonesia Muda dengan ketua S. Sudjojono dan anggauta-anggautanja : Affandi, Hendro, Surono, Suromo, Dullah, Harjadi, Rusli, Sudibjo, Trubus, Zaini, Usman Effendi, Trisno Sumarto dan anggauta-anggauta mudanja D. Jus dan Tino S.

Oleh SIM dikeluarkan sebuah madjallah seni jang memuat reproduksi-reproduksi lukisan, sadjak-sadjak dan tjatatan sekitar hidup seniman, jang bermaksud memberi adjakan tjinta kesenian dan mengerti hasil seni. Sebagian anggauta SIM kemudian berpindah di Solo dan Madiun, bahkan berpindahlah pusatnja ke Solo djuga untuk dua tahun.

Pada tahun 1947 terbentuklah perkumpulan jang kedua di Jogja, ja'ni „Pelukis Rakjat" dengan berpindahnja beberapa anggauta SIM ke perkumpulan ini. Pelukis Rakjat diketuai Hendro dengan anggauta-anggautanja : Affandi. Kusnadi, Sudarso, Sesongko, Trubus, Sudiardjo dan Setjojoso

Pelukis Rakjat memberikan latihan-latihan pada bibit-bibit pelukis jang beladjar, sampai pada waktu ketika pengikut latihan-latihan ini berdjumlah 100 orang. Sebagian mendapat latihan di Sonobudojo, sebagian di Sentul, kurang lebih sebagian lagi di Nagan dan Gendingan.

Dari bibit-bibit baru ini lahir pelukis-pelukis muda jang sekarang kita kenal sebagai pelukis dan pematung: Rustamadji, Sajono, A. Ali, Sumitro, Saptoto dan beberapa lainnja mendjadi siswa ASRI seperti: Abdulkadir.

Berulang-ulang diadakan oleh pelukis rakjat, kurang lebih tiga pertundjukan seni lukis atau patung setahunnja dalam tahun 1947 sampai 1949 guna menghilangkan djarak jang masih dirasa sangat lebar antara umum dan hasil seni muda.

Dengan lahirnja Pelukis Rakjat lahirlah pula seni patung muda. Hasil-hasil jang pertama dibikin dari tanah liat, dipelopori oleh Affandi; kemudian djuga dihasilkan patung dari batu, dan jang pertama-tama oleh Hendro.

Patung Pak Dirman jang sekarang berada dimuka Gedung Dewan Perwakilan Rakjat di Jogjakarta oleh Hendro, dan patung Pak Urip oleh Trubus; patung Chairil di Taman Siswa Djakarta oleh Sajono adalah hasil-hasil jang sudah selesai. Sedang pembikinan relief Tugu „Muda" di Semarang jang dimaksud akan selesai dan dapat dibuka oleh Panitya Kotapradja Semarang pada tgl. 20 Mei j.a.d. adalah hasil jang kedua. Diantara turut membikin lima peladjar ASRI anggauta Pelukis Rakjat: Djonitrisno, Wim Mirahua, C. Latu-puti dan Sutopo.

Patung-patung pertama jang berukuran besar diantaranja patung Pak Dirman itu dibikin di Kaliurang dalam kurang lebih satu tahun, dimana batu-batu besar tadi dambil dari kebun atau kali, kemudian dipotong-potong dengan bantuan keahlian jang telah bertradisi dari para pembikin batu kidjing ditempat.

Pada tahun 1950 terlahirlah perkumpulan Pelukis Indonesia dengan berpindahnja sebagian anggauta Pelukis Rakjat ke perkumpulan baru, dengan ketua Sumitro dan anggauta-anggauta: Sholihin, Kusnadi, Sumarjo L.E., Rubai, Sesongko, Sukotjo, Saptoto, Kussudiardjo dan Suwarjono. Tiap kelahiran perkumpulan baru, disebabkan bertambahnja dan bertumbuhnja fikiran seni muda Indonesia.

Dan sebelum perkumpulan-perkumpulan diatas lahir di Jogja, telah terbentuk „Pusat Tenaga Pelukis Indonesia" dengan ketua Djajengasmoro jang beranggauta Indrosoegondho, Prawito, Sindusisworo dan Surjosoegondio dengan

kursus gambarnja jang bernama „Prabangkara" dan dimaksud sebagai sekolah menengah seni lukis.

Akademi Seni Rupa Indonesia.

Pada tahun 1950 telah didirikan sebuah Akademi Seni Rupa oleh Kem. P.P.K. dengan guru-guru, sebagian mana terdiri dari pelukis jang berasal dari perkumpulan-perkumpulan diatas, sebagian lain adalah guru-guru gambar, dan beberapa dokter jang memberi peladjaran anatomi.

Dapat dimengerti kiranja bahwa dengan berdirinja perguruan ini, sebagian bibit seni muda dari seluruh kepulauan Indonesia telah dapat tertolong, sedang sebagian keinginan pelukis hendak memberikan fikiran atau djalan bagi angkatan muda sudah terdjawab, selain dapat diduga tentang belum sempurnanja instelling baru.

Siswa ASRI terbagi atas 5 bagian, sebagai tjalon-tjalon:

1. pelukis.
2. pematung.
3. guru dan ahli ukir.
4. ahli reklame dan
5. guru gambar.

Ia akan merupakan generasi jang termuda, dan semoga ditilik dari sudut tehnik dan artistik akan dapat memberi djawaban jang memuaskan atas harapan kita. Akan mendjadi seniman jang tidak mudah puas dan dimana perlu djuga dapat mengisi djabatan-djabatan dan instelling-instelling jang banjak sangkutpautnja dengan memadjukan seni bangsa jang muda.

Dua exposisi jang sudah lalu pada th. 1951 dan 1952 jang bertempat dipendopo dari museum Sonobudojo, kiranja dapat melukiskan tingkatan jang ditjapai para siswa, dalam beberapa tahun beladjar. Dan dalam exposisi-exposisi jang akan datang, semoga dapatlah kita melihat kelandjutan pertumbuhannja.

P.I.M. „Pelukis Indonesia Muda", adalah perkumpulan-perkumpulan jang termuda di Jogja, didirikan oleh para siswa ASRI kelas jang tertua.

Perkembangan Akademi Seni Rupa Indonesia

Sedjak tanggal 15 Djanuari 1950, ialah hari lahirnja A.S.R.I., hingga kini, maka A.S.R.I. masih memelihara 5 bagian sadja ialah:

I. Bagian Seni Lukis (jang disebut Bagian I.)
II. „ „ Patung dan Pahat (Bagian II).
III. „ „ Keradjinan dan Pertukangan (Bagian III).
IV. „ „ Reklame, Dekorasi, Illustrasi dan Grafik (Bagian IV).
V. „ „ untuk Guru Seni Rupa (Guru Gambar) (Bagian V).

Adapun bagian djurusan **Seni Architektuur,** berhubung alasan tehnik hingga kini belum dapat dibuka.

Berhubung dengan adanja 5 bagian atau djurusan itu, jang sifatnja dan tudjuannja berlainan, meskipun semuanja mempunjai dasar kesenian, maka senjatanja bagian-bagian tersebut dapat dipersamakan dengan sekolah vak jang berdiri sendiri, karena mempunjai susunan program peladjaran sendiri-sendiri jang berlainan jang disesuaikan dengan tudjuan djurusannja masing-masing.

Lama peladjaran:

Semula maka lama peladjaran pada djurusan Seni Lukis, Seni Patung dan Pahat dan Seni Keradjinan dan Pertukangan direntjanakan 3 tahun dengan mengambil bibit lulusan dari S.M.P. atau S.T. (3 tahun) sehingga tahun ini sebenarnja A.S.R.I. telah dapat meluluskan beberapa orang dari bagian-bagian tersebut, ialah para siswa jang lulus untuk tahun peladjaran ke 4.

Akan tetapi sedjak September tahun jang lalu lama peladjaran itu diperpandjang mendjadi 5 tahun, sehingga kemudian ada civil effectnja jang lebih tinggi dari semula. Sekarang peladjarannja dapat dipandang sebagai dasar vakstudie 3 tahun sesudah S.M.P., ditambah 2 tahun; sehingga sama dengan S.M.A. plus 2 tahun dan mempunjai wewenang untuk mendjadi guru Seni Rupa pada S.M.P. dan sekolah-sekolah jang sederadjat.

Begitu djuga jang keluar dari bagian III selain dapat memimpin perusahaan perak mempunjai wewenang untuk mengadjar di S.T. (3 tahun).

Sedjak dibukanja A.S.R.I. maka mereka jang mendjadi guru pada S.M.P. dan S.M.A. jang memberi peladjran menggambar dapat diterima sebagai siswa pada bagian IV (Bagian Seni Reklame, Dekorasi, Illustrasi dan Grafik) dan pada bagian V (Bagian Guru Seni Rupa) (Guru Gambar). Disamping itu djuga mereka jang berbakat seni dan beridjazah S.M.A. atau sekolah sederadjat.

Peraturan penerimaan tersebut sedjak 1 September tahun 1952 djuga telah diubah. Untuk bagian IV dan V maka jang diterima hanja mereka jang berbakat seni dan beridjazah S.M.A. atau diploma jang sederadjat dan disahkan oleh Kementerian P.P. dan K.

Lama peladjaran masih tetap 5 tahun.

Tentang uang kuliah :

Semula maka djumlah uang kuliah Rp. 200,—. Sedjak September 1952 maka djumlah itu diubah mendjadi Rp. 240,— dan pada djumlah tersebut telah termasuk uang alat-alat, sehingga dengan adanja peraturan ini dapat dipandang sebagai pertolongan jang sebaik-baiknja dan dengan perkataan lain para siswa dibebaskan dari pembelian alat-alat jang amat mahal itu.

Aturan jang demikian itu hanja ada pada A.S.R.I.; di akademi-akademi Seni Rupa di L.N. para siswa harus membeli alat-alat sendiri.

Djumlah para siswa :

Pada tahun pertama	djumlah	siswa ada	40 orang.
	„	pendengar	5 orang.
Pada tahun kedua	„	siswa ada	106 orang.
Pada tahun ketiga	„	siswa ada	139 orang.
	„	pendengar	6 orang.

Diantaranja ada 27 orang peladjar pedjuang. Siswa wanita baru ada 3 orang.

Kita selalu merasa kurang puas, karena hingga saat ini jang tertarik untuk mengikuti A.S.R.I. bagian IV dan V djumlahnja sedikit sekali.

Hal jang demikian itu mungkin berhubung dengan peladjaran jang memang amat berat dan lama itu, ialah 5 tahun sesudah S.M.A. dan untuk sementara belum ada sebutannja sebagai di Luar Negeri (ketjuali di Nederland) meskipun civil effect-nja kemudian sama dengan jang bertitel Dr. atau Ir.

Guru - guru :

Pada tahun pertama A.S.R.I. hanja mempunjai 17 orang guru, diantaranja ada 2 orang guru tetap. Pada tahun kedua bertambah mendjadi 27 orang guru, diantaranja ada 4 orang guru tetap.

Achirnja tahun ketiga ada 30 orang guru dan 7 orang guru tetap.

Dengan mengindjaknja tahun ke-empat, maka A.S.R.I. mendapat tambahan guru 7 orang ialah :

1. Nj. Tjokrosoeharto. 2. Drs. Koentjaraningrat. 3. Soeradio. 4. C. Roggen, 5. Soerono. 6. Prof. Dr. Tjan Tjoe Sim. 7. Nj. Soenarjo.

Adapun guru-guru lama masih tetap sebagai semula ialah :

1. R. Katamsi. 2. Djajengasmoro. 3. Ardan. 4. Mardiokoesoemoatmodjo. 5. Soemarno. 6. Josowihardjo. 7. Widjokongko. 8. Prawito. 9. Soetrisno. 10. Prof. Drs. Radyopoetro. 11. Dr. Martohoesodo. 12. Ir. Soemani. 13. Drs, Thio Goan Tjoan. 14. Soerjosoegondo. 15. Wignjowidagdo. 16. Ir. Marsito. 17. Warindio. 18 Kawindrosoesanto. 19. Hardisijadi. 20. Sri Moertono. 21. Hartono. 22. Padmopoespito. 23. Setjojoso. 24. Hendro. 25. Soedarso. 26. Soeromo. 27. Troeboes. 28. Koesnadi. 29. Soewarjono. 30. Soetarmin. 31. Jahja Zam Zamy. 32. Moeljoharsono. 33. Roesli. 34. Abdoelsalam. 35. Soesiloatmodjo.

Hal gedung prefabricated dari Amerika :

Setelah jang achir-achir ini, jang mengenai prefabricated building untuk A.S.R.I. dibitjarakan lagi dengan instansi-instansi jang bertanggung djawab, maka dapat di terangkan disini, bahwa pekerdjaan umum segera akan mulai dengan fundering-nja, ada ditempat jang sedjak 2 tahun jang lalu telah disediadakan ialah ada didekat lapangan olahraga Asri Kuntjen.

Menurut projek jang telah dipeladjari, maka gedung prefabricated, jang dari besi itu bentuk dari ruang-ruangnja jang amat rendah langitannja, tidak akan sesuai dengan adanja tjita-tjita kita dan peladjaran aesthetica jang diadjarkan.

Mengenai tempat-tempat memberi peladjaran :

Berhubung hingga kini A.S.R.I. masih belum mempunjai gedung sendiri dan tempat-tempat jang sekarang ini dipakai untuk memberi peladjaran telah kurang luas lagi, maka pada permulaan September 1952 ditambah lagi dengan 1 buah paviljoen untuk bagian IV dan V, sehingga peladjaran A.S.R.I. sekarang terdapat pada 5 tempat, ialah :

1. di Bintaran Lor 12b dalam gedung P.T.P.I., jang umumnja dipergunakan untuk bagian I dan II, dimana ada sebuah atelier jang ketjil untuk peladjaran melukis dan mematung, sehingga seakan-akan jang bekerdja disitu karena sempitnja tak dapat bergerak.
2. di Bintaran Lor 8, dimana terdapat ruang-ruang untuk menambah kekurangan tempat menukang bagian III dan bagian I/II.
3. di Ngabean 6, bekas Kunstambachtschool, jang kenjataannja tempat tersebut sekarang mendjadi kurang luas karena adanja tambahan kelas.
4. di Kota Baru pada S.M.A.B., maka A.S.R.I. diperbolehkan mempergunakan ruang-ruang untuk menggambar tangan dan mistar.
   Karena untuk kepentingan S.M.A. sendiri pada waktu pagi djam-djamnja telah mendjadi tambah banjak, maka untuk A.S.R.I. waktu jang baik tidak mungkin lagi diadakan dengan tjukup.
   Lokal-lokal tersebut umumnja untuk menggambar stilleven dari bagian IV dan V.
5. di Gondolaju 20, dipergunakan untuk bagian IV dan V. Disitu terdapat djuga tambahan ruang-ruang untuk : dokumentasi, laboratorium, ruang batjaan dan ruang gelap untuk peladjaran fotografie.

Waktu peladjaran :

Semula peladjaran A.S.R.I. diberikan pada waktu pagi dan petang, karena diantara para siswa ada jang mengadjar pada waktu pagi.

Meskipun A.S.R.I. menghendaki agar semua peladjaran dapat diberikan pada waktu pagi, maka kenjataannja berhubung dengan beberapa hal masih belum mungkin dilaksanakan, sehingga sampai sekarang ini masih ada peladjaran

petang, karena pada waktu pagi gurunja tidak dapat memberi peladjaran hanja petang sadja, misalnja dengan peladjaran anatomi dari Dr. Martohoesodo, peladjaran bahasa Inggeris dari Zam Zamy, peladjaran aplikasi Inggeris dari C. Roggen dan peladjaran opmeten dan projeksi dari Ir. Marsito.

Mata peladjaran jang baru akan diadjarkan pada tahun j.a.d. ialah peladjaran mengetjor gips dan logam, peladjaran membatik dan pembuatan maket-maket.

Sistim peladjaran :

Hingga achir tahun ke-3. maka experiment dengan mempergunakan sistim „project-globaal" untuk mata peladjaran **melukis, mematung** dan **menggambar manusia** didjalankan terus.

Adapun kenjataannja, menurut paham kita, amat memuaskan. Pada tiap-tiap pekerdjaan baru tampak sekali kemadjuannja. Hasil-hasil pekerdjaan jang terachir ini akan diperkenalkan pada chalajak ramai pada exposisi tahunan A.S.R.I. jang ke - 3.

Pada sistim ini tidak akan terdapat tjara jang — untuk melahirkan kesenian tersebut — djiwanja selalu terikat oleh sistim jang dipakai guru sendiri, sehingga tampak adanja aliran-aliran jang murni jang dilahirkan oleh para siswa sendiri dan hasil pekerdjaan siswa tidak menggambarkan tjap dari aliran gurunja sadja.

Istimewa untuk memelihara bagian Seni Lukis dan Patung, maka A.S.R.I. menghendaki agar dari pemulaan, sehingga kemudian jang memberi peladjaran para seniman kita sendiri jang lebih banjak mempunjai dan dapat menghargai dasar seni Nasional/asli.

Para siswa umumnja kerap kali dibawa keluar, agar betul-betul mengenal alam dari dekat, dapat mentjintai dan kemudian dapat merasakan dan melahirkan alam disekitarnja itu pada lukisannja dengan atmosfeer-nja jang lebih hidup dan tepat (njata). Memang alam disekitar kita inilah jang dipandang sebagai himpunan model-model jang harus dilukis.

Hasil pekerdjaan selama tiga tahun :

Hasil-hasil pekerdjaan Seni Lukis dari tahun jang pertama banjak jang dipamerkan ada di Kementerian P.P.K., Djawatan Kedudajaan dan Gedung Negara Jogjakarta. Begitu djuga jang mengenai tjiptaan patung diantaranja ada beberapa jang dipamerkan dalam Gedung Negera di Jogjakarta.

Pada tahun jang lalu maka A.S.R.I. dalam Pekan P.P.K. di Djakarta, Makassar dan Bali meng-exposisikan sebagian dari hasil-hasil pekerdjaan siswa dari seluruh bagian. Tahun jang lalu A.S.R.I. mengirimkan sebuah lukisan „seorang petani sedang meluku" dari Ruliaty Abidin untuk di-exposisikan di Philadelphia dan 3 orang siswa dari tahun peladjaran ke 3 ialah: Endrodjasmoro, Ra'is Rajan dan Eddy Soenarso mengirimkan buah tjiptaannja **"The unknow political prisoner"** ke London untuk ikut serta dalam international Sculpture Competition dari The Institute of Contemporary Arts 17 Donerstreet.

Pada Soenarso ini tampaklah kemadjuannja dalam mengerdjakan goresan kaju dan tjukilan linoleum begitu djuga dalam pembuatan ets.

Pada bagian Seni Keradjinan dan Pertukangan, maka pada tahun jang lalu telah dimulai dengan mengerdjakan pekerdjaan perak.

Alat-alat peladjaran :

Meskipun tiap tahun alat-alat untuk keperluan A.S.R.I. makin bertambah, maka kenjataannja jang kurang masih amat banjak sekali.

Djustru jang harganja mahal dan tidak dapat dibeli begitu sadja sebagai bubutan logam dan kaju, vergrotingstoestel lengkap, degelpers, ububan, microscope, epidiascope dan masih banjak lain-lainnja.

Maka berhubung dengan itu, sudah tentu sadja peladjaran tidak dapat diberikan setjara lengkap.

Alat-alat schilderdoek dan tjat minjak, djikalau dapat membeli bahan-bahannja, maka kemudian dibikin sendiri dalam laboratoriumnja.

Kitab-kitab jang dibutuhkan diterdjemahkan sendiri.

Perpustakaan :

Djikalau tahun ini dipersamakan dengan tahun jang lalu, maka tambahnja kitab-kitab sedikitnja ada 100%.

Udjian untuk Guru Seni Rupa (Guru Gambar) :

Meskipun A.S.R.I. baru mengindjak tahun ke 4, maka pada para siswa jang dahulu diterima dengan sjarat idjazah A menggambar stijl lama, jang sebenarnja sama dengan idjazah B I menggambar selandjutnja akan diberi kesempatan untuk menempuh udjian penghabisan untuk idjazah Guru Seni Rupa pada Sekolah Landjutan bagian Atas.

*

G. PERKEMBANGAN SENI DRAMA DI JOGJA

SEDJAK tahun proklamasi hingga saat karangan ini ditulis, seni drama di Jogja dapat kita bagi dalam dua masa, ialah masa sebelum dan masa sesudah clash. Sengadja dikatakan demikian, karena kedua masa tersebut satu sama lainnja sangat berlainan sifatnja. Jang pertama sifatnja sama dengan suasananja, ialah revolusi. Jang kedua sifatnja djauh lebih tenang sesuai dengan djamannja, ialah sifat tenang membangun. Kesibukan seni drama dalam masa jang pertama dimulai pada permulaan tahun 1946 setelah banjak ahli-ahli seni drama datang di Jogja, disebabkan oleh berkobarnja pertempuran-pertempuran ditempatnja masing-masing. Nama-nama seperti Andjar Asmara, Usmar Ismail, Sri Murtono, Bakri Siregar, Kotot Sukardi, Djaja Kusuma, Armijn Pane, D. Suradji, Sumanto, Hamidy Djamil dll. makin dikenal djuga pekerdjaannja, tidak hanja dalam lapangan mentjipta, tetapi djuga dalam menjelenggarakan pertundjukan-pertundjukan seni drama. Masa hangat-hangatnja revolusi itu banjak memberi bahan-bahan kepada mereka untuk mentjiptakan tjerita-tjerita baru. Terutama Kotot Sukardi, Sri Murtono, Bakri Siregar dan Hamidy Djamil sungguh sangat produktif dalam karangan-karangannja. Tjerita-tjerita jang ditulis dan dipertundjukkan pada waktu itu antara lain buah pena :

Sri Murtono : 1. „Semarang", 2. „Dibelakang kedok djelita", 3. „Awan berarak", 4. „Revolusi", 5. „Tidurlah anakku", 6. „Wanita", 7 „Gunung Berintik" dan 8. „Kearah pandji berdendang djaja".

Kotot Sukardi : 1. „Sepandjang Malioboro", 2. „Jogja bukan Hollywood", 3. „Dibalik dinding sekolah".

Bakri Siregar : 1. „Sabotage", 2. „Kebangunan Rakjat", 3. „Hantu perempuan".

Hamidy Djamil : 1. „Tiang gantungan", 2. „Warung Kopi", 3. „Sersan Major".

Para ahli seni drama tersebut diatas banjak sekali memberi tuntunan kepada para peladjar di Jogja, baik jang terhimpun dalam himpunan-himpunan, maupun jang tidak. Dan semangat kearah ke sandiwaraan ini makin mendapat dorongan dengan kedatangannja rombongan-rombongan sandiwara professional seperti Bintang Surabaja dibawah pimpinan Fred Yong, Pantjawarna dan Bintang Timur dibawah pimpinan Njoo Seong Seng, jang kemudian beralih pimpinan kepada Djamaludin Malik, Tjahaja Timur dibawah pimpinan Andjar Asmara dan Ratna Asmara.

Tahun 1946.

Tahun ini mengenal berdirinja beberapa himpunan-himpunan sandiwara amatir, diantaranja jang banjak mengadakan pertundjukan-pertundjukan ialah.

1. **„Ksatrija"** dengan pemain-pemain terdiri atas peladjar-peladjar dari S.M.A. dan mahasiswa-mahasiswa seperti Karseno, Subono, Herqutanto, Daruni (sekarang Nj. Herqutanto) dll. Tjerita-tjerita jang pernah mereka mainkan a.l. „Semarang" tulisan Sri Murtono dibawah pimpinan Kotot Sukardi dan Sri Murtono.

   „Mutiara dari Nusa Laut" karangan Usmar Ismail, dibawah pimpinan Usmar Ismail dan Djajakusuma.

   „Awan berarak" karangan Sri Murtono, dibawah pimpinan penulisnja sendiri.

   „Kisah pendudukan Jogja" tulisan Dr. Hujung dibawah pimpinan Hujung dan Djajakusuma.
2. **„Remadja Seni".** Pemain - pemainnja kebanjakan terdiri atas pegawai-pegawai kantor baik partikelir maupun pemerintah. Diantaranja Redansjah (sekarang telah meninggal), Zainudin, Tjukup Harjoga, Suparni, Kasirah dll. Himpunan ini sering djuga keliling main dikota-kota dekat front untuk menghibur tentara dan invaliden. Pernah djuga mengadakan pertundjukan drama di Malang untuk mengiringi rapat pleno K.N.I.P. jang pertama. Tjerita-tjerita jang mereka mainkan antara lain „Dibelakang kedok djelita" tulisan Sri Murtono, jang dipimpin oleh penulisnja sendiri.

   „Tjitra" dari pudjangga India Rabindranath Tagore jang disadur oleh Sri Murtono.

   „Revolusi", „Didepan pintu Bharatayuda", „Tidurluh anakku", ketiga tiganja tjerita karangan Sri Murtono.
3. **„Sandiwara Buruh"** jang dipimpin oleh Pak Medi banjak melakukan tjerita-tjerita dagelan jang mengandung penerangan-penerangan tentang arti dan maksud perdjuangan buruh.

Disamping perkumpulan-perkumpulan tsb. diatas banjak sekali sekolahan-sekolahan jang mengadakan pertundjukan - pertundjukan drama, diantaranja Sekolah Tehnik dibawah pimpinan Mochtar, Sekolah Guru Putri dengan pimpinan Suskamdini.

Pada tahun ini pula didjalan Setjodiningratan berdiri kantor P.O.S.I. (Persatuan Sandiwara Indonesia) sebagai landjutan dari P.O.S.D. (Persatuan Usaha Sandiwara Djawa) pada djaman Djepang. Kantor ini dipimpin oleh Anwar dan Koedoes.

Tahun 1947.

Tahun ini mengenal suatu gabungan rombongan-rombongan sandiwara peladjar-peladjar dari pelbagai sekolahan dibawah pimpinan Mochtar: Sekolah Tehnik dengan Mochtar, S.G.P. dengan Suskamdini, S.M.A. Bopkri dengan Pranowo, A.M.K.R.I. dengan Prasmadji, S.K.P. dengan Tuty Bintarti.

Dan tahun ini mengenal pula permainan para mahasiswa Klaten dan Solo jang mempertundjukkan buah pena Mr. Moh. Yamin „Ken Arok dan Ken Dedes" dibawah pimpinan Dr. Purbotjaroko.

Dalam pada itu keluarga Djalan Sumbing 5 dengan Usmar Ismail dan Sumanto telah berhasil menggulingkan P.O.S.I. untuk mendirikan B.A.P.E.R.S.I. (Badan Permusjawaratan Sandiwara Indonesia). Bapersi segera mulai bekerdja aktif, mengadakan hubungan dengan pelbagai matjam sandiwara, mulai dari sandiwara umum sampai pada ketoprak dan wajang orang. Setelahnja itu didirikan S.A.S. (Serikat Artist Sandiwara), diketuai oleh Sri Murtono dan P.S.O. (Persatuan Sandiwara Oesaha), diketuai oleh Soekarno. Disamping S.A.S. dan P.S.O. kemudian dilahirkan S.R.I. (Sandiwara Rakjat Indonesia) diketuai oleh Hamidy Djamil.

Selain Bapersi, djalan Sumbing 5 melahirkan pula Badan Welfare jang dipimpin oleh Sri Murtono jang berkantor di Djalan Tugu 2 dan kemudian pindah ke Djalan Bintaran lor 8.

Alamat-alamat tsb. diatas inilah jang banjak mengirimkan rombongan-rombongan penghibur ke front-front seperti Malangbong, Tasikmalaja, Salatiga, Modjokerto, Djombang dll.

Disamping tjerita-tjerita hiburan tentara, mereka mempertundjukkan pula tjerita-tjerita besar seperti: „Tjitra", „Bajangan diwaktu fadjar", dari Usmar Ismail dimainkan oleh S.A.S., dimana ikut serta main pemain-pemain profesional jang kini telah mendjadi bintang film kenamaan seperti: Sofia, Waldy, Netty Herawati, Sukarno, Mustadjab, disamping pemain-pemain amatir seperti Hamidy Djamil dll. P.S.O. dengan nama „Sekar Lati" memainkan tjeritera „Api" djuga dari Usmar Ismail.

Tjahaja Timur dengan pimpinan Andjar Asmara dan Ratna Asmara memainkan tjerita-tjerita „Musim Bunga di Selabintana" buah pena Andjar Asmara dan „Si Bachil" tjerita saduran dari penulis drama Perantjis Moliere oleh Iskandar. Tjerita-tjerita tsb. dimainkan a.l. oleh Ratna Asmara dan Sukarno Is.

Pantjawarna dan Bintang Timur dengan pimpinan Djamaludin Malik dan Mashud Pandji Anom, ta' mau ketinggalan pula. Mereka memainkan „Antara bumi dan langit" dari Amijn Pane. Pemain-pemain utama ialah Dahlia dan Djumala. Achir tahun ini melihat lahirnja himpunan sandiwara „Kaliwara" dengan pimpinan tehnis dari Hamidy Djamil dan Djajakusuma.

Tahun 1948.

Tahun ini banjak melihat pekerdjaan-pekerdjaan sandiwara Kaliwara jang memainkan tjerita-tjerita a.l. dari Kotot Sukardi: „Sepandjang Malioboro", „Jogja bukan Hollywood", „Hallo-hallo Bandung", dari Armijn Pane merupakan tjerita saduran dari gubahan H. Ibsen „Ratna" („Nora"). Tjerita jang belakangan ini titelrol dimainkan oleh isteri Bakri Siregar.

Instituut Indonesia jang sekolahnja menggontjeng disekolah Keputran, podjok Selatan Aloon-Aloon Utara membuka sekolah kesenian bertempat dirumah Monggangan di Aloon-Aloon Utara dengan nama „Studio Artist" dibawah asuhan Sri Murtono. Sekolahan tsb. berhasil mempertundjukkan tjeritera tjiptaan Rabindranath Tagore „Tjitra", jang disadur oleh Sri Murtono mendjadi „Tjitra dan Ardjuna". Pemain-pemain utama ialah Sartini Moehdi, Suhandar dan Dusy Harris.

S.M.A. Bopkri dengan pimpinan Pranowo tampil kemuka dengan tjeritera „Njai Lenggang Kentjana" dari Armijn Pane dan „Pantai Madura" dari Sri Murtono.

Kemudian disaksikan oleh dinding Pressroom Kedaulatan Rakjat dulu (di Dj. Malioboro) dan Armijn Pane serta Sri Murtono sebagai penasehat, D. Suradji telah berhasil melahirkan himpunan sandiwara amatir Raksi Seni. Pemain-pemain utama dari himpunan tsb. ialah Deliana, Amran S. Mouna, Alam dan Widjaja. Mereka memainkan „Ular" dan „Madah Tjintaku" kedua tjerita dari D. Suradji jang dipimpin oleh penulisnja sendiri.

Djika tahun 1947 melihat lahirnja „Kaliwara", tahun 1948 melihat lenjapnja himpunan tsb. setelah mempertundjukkan tjeritera saduran dari "The Finger of God" dimainkan oleh Tuty Bintarti, Prasmadji dan Pranowo.

Tetapi tahun ini beruntung djuga melihat lahirnja sebuah institut seni drama dengan nama C.D.I. (Cine Drama Institute); usaha dari Kementerian Penerangan dengan pimpinan umum Mr. Sudjarwo dan pimpinan sekolahan Iskak dan Dr. Hujung. Peladjar-peladjar harus tamatan S.M.A. dan ditjita-tjitakan mendjadi ahli-ahli dalam lapangan cine drama. Guru-gurunja diantaranja Drs. Sigit, Ki Hadjar Dewantara, Drs. Sumadji, Armijn Pane,

Intojo dll. Tetapi institut tsb. belum sampai menghasilkan apa-apa sudah disapu oleh datangnja clash. Dan rumah Maduretnan di djalan Notopradjan hanja mendjadi tempat kenang-kenangan tjita-tjita jang ta' tertjapai. Dengan gagalnja usaha Hujung dalam C.D.I. ia kemudian mendirikan Stichting Hiburan Mataram dengan R. M. Darjono dan R. M. Harjoto sebagai putjuk pimpinannja. Stichting Hiburan Mataram menelorkan Kino Drama Atelier (K.D.A.) jang dikerdjakan dengan sungguh-sungguh oleh Dr. Hujung. K.D.A. banjak mengadakan tjeramah-tjeramah bagi peladjar-peladjarnja jang kebanjakan adalah dari tamatan S.M.P. Guru-guru tjeramah diambilkan dari orang-orang jang dalam dunia seni drama telah banjak dikenal seperti D. Suradji, Kotot Sukardi, Sri Murtono, Kusbini dll.

Kemudian untuk sementara waktu riwajat ditutup oleh serbuan tentera Belanda.

Tahun 1949.

Tahun perginja pasukan Belanda dari Jogja. Penghidupan kembali ramai, seni drama mendjadi aktif lagi. Rangkaian pertundjukan dibuka dengan tjerita „Kisah pendudukan Jogja", karangan Dr. Hujung, dipersembahkan oleh Stichting Hiburan Mataram, dimainkan oleh himpunan „Ksatrija" dan kemudian oleh Kino Drama Atelier sendiri. Tjerita dipimpin oleh Dr. Hujung dan Djajakusuma.

Kemudian datang tjerita „Konvoi Penghabisan" karangan Sri Murtono dipersembahkan oleh Stichting Hiburan Mataram djuga, dimainkan oleh Nj. Bakri Siregar, dan pemuda-pemuda dari Kementerian Penerangan diantaranja Sri Hartini, Sutikno dll. Tjerita tsb. dipimpin oleh Sri Murtono dan Bakri Siregar.

Untuk menghadapi segala kemungkinan infiltrasi kebudajaan dari musuh Tanah Air, maka himpunan - himpunan kesenian di Jogja mendirikan suatu badan federatief dengan nama „Front Seniman", jang diketuai oleh Sri Murtono, sedang wakil ketuanja ialah Djajengasmoro. Anggauta-anggauta lain-lainnja ialah : Indrosugondo, Hendro, Kusnadi, Sumarijo L.E. Sindusisworo, Prawoto, Surjosugondo, Bakri Siregar, Kaharudin, D. Suradji, Safiudin dan lain-lain.

Front Seniman tidak hanja bergerak dalam lapangan seni drama, tetapi djuga dalam lapangan seni rupa, seni suara, seni tari, seni sastera dan film. Banjak sekali usaha-usahanja baik diarahkan kegaris depan maupun kegaris belakang pertempuran. Kantor pusatnja ialah dirumah P.T.P.I. Bintaran 12.

Dalam lapangan seni drama mereka telah mempertundjukkan a.l. „Djalan Kembali" karangan Djoko Lelono, „Bunga rumah makan" dari M. Sontani, „Diambang pintu" gubahan Sri Murtono. Pemain-pemain utama adalah Djoko Lelono, Amran S. Mouna, Deliana, Alam, Markirah, Mudjimun.

Atas andjuran Front Seniman oleh Amrin Thajib telah didirikan Gapel (Gabungan Artist Peladjar) jang sangat aktif pula geraknja dalam lapangan seni drama.

Tahun 1950.

Tahun ini melihat lahirnja „Bahadur Tjitra" dibawah pimpinan Djoko Lelono, suatu sekolahan jang memberi peladjaran dalam lapangan seni drama dan djurnalistik. Dan tahun ini melihat pula lahirnja A.S.R.I. (Akademi Seni Rupa Indonesia) dari Kem. P.P.K. jang pembukaannja disambut oleh Front Seniman dengan pertundjukan seni drama tjerita „Tjandra Kirana" karangan Sri Murtono. Tetapi tahun ini melihat pula berangkatnja Kino Drama Atelier dengan Hujungnja ke Djakarta untuk meneruskan pekerdjaannja dalam lapangan film.

Jang paling malang tahun ini melihat perginja satu demi satu ahli-ahli seni drama, untuk menetap di Djakarta. Jang masih tetap tinggal di Jogja hanjalah Sri Murtono, jang dengan rasa tjemas-tjemas menghadapi arus deras mengalirnja film-film Luar Negeri.

Tahun 1951.

Tahun ini sepi dari segala pertundjukan drama, tetapi ramai dengan film-film aneka warna dari Luar Negeri.

Hanja Raksi Seni, jang pimpinannja dioper oleh Amran S. Mouna dan Deliana, berusaha muntjul dalam hari peringatan ulang tahunnja jang ke III dengan tjerita „Gadis Modern" gubahan Adlin Affandi dan „Liburan Seniman" dari Usmar Ismail. Tetapi setelah itu lenjaplah segala usaha dalam lapangan drama. Artinja pada lahirnja, sebab dalam dada seniman-seniman drama tetap mengerenjam niat menghidupkan kembali dunia seni drama. Dan keinginan jang sekian lama tersimpan ini pada achirnja meletus pula berupa lahirnja sebuah sekolah Seni Drama dan Film dari Institut Kebudajaan Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1951 sebagai hasil usaha Sri Murtono.

Tahun 1952.

Pada bulan Maret mulai tanggal 26, tiga hari berturut-turut Sekolah Seni Drama dan Film mempersembahkan hasil pertamanja, drama klasik lyris romantisme „Genderang Bharatayuda" gubahan Sri Murtono dimainkan digedung Negara untuk merajakan hari ulang tahun Institut Kebudajaan Indonesia. Pemain-pemain dari angkatan muda jang telah berhasil memainkan tjeritera tsb. ialah: Sumardjono, Roosmanidar Gani, Meta Surjaatmadja, Suisman, Sudjadi, Supardi, Sukito Ardjo, Mari dan Nus Surjoatmadja, Suprapti, Juth, Suwati, Sadeli, Muslam, Gunarto, Sudarsono, Surono dll.

Pemuda-pemuda tsb. mendjadi pendorong dari pemuda-pemuda berikutnja jang makin besar perhatiannja terhadap perkembangan seni drama.

Sehingga ta' lama kemudian menusul pertundjukan tjeritera ,Konvoi Penghabisan" sebagai sambutan hari ulang tahun Pemerintah kembali di Jogja. Sekolah Seni Drama dan Film ini jang berkantor di Malioboro dan sekolahnja membontjeng digedung A.S.R.I. Bintaran makin giat bekerdjanja.

Pada tg. 17 Agustus mereka mempersembahkan suatu drama terbuka (openlucht drama) tjeritera „Sumpah Gadjah Mada" gubahan Sri Murtono. Tjeritera tsb. dimainkan pada malam hari dilapangan muka gedung museum Sono Budojo, Aloon-Aloon Utara. Pemainnja berdjumlah 450 orang pemuda dan pemuda puteri. Selandjutnja dalam pertundjukan tsb. dipakai kuda tunggang 8 ekor, sapi 20 ekor, pedati 10 buah, djempana keraton, sedang puntjak klimaks dari tjeritera tsb. berupa pawai Madjapahit sepandjang djalan raja didalam kota. Masa regie ini dipegang oleh Sri Murtono, dibantu oleh Prasmadji, Sudjadi, Sukarno, dan Meta Surjaatmadja. Tanggal 3 September para peladjar Sekolah Seni Drama dan Film mengadakan suatu Ikatan Siswa Sekolah Seni Drama dan Film (Issdraf) diketuai oleh Agus Premady dan telah berhasil mengadakan pertundjukan-pertundjukan sebagai praktek peladjaran mereka.

Dalam pada itu pemuda-pemuda anggauta Raksi Seni tidak mau lama bertopan dagu. Dengan pimpinan baru Sukarno, Sumardjono dan Nindito mereka telah mulai bergerak lagi dan dengan bantuan para peladjar Sekolah Seni Drama dan Film mereka telah tampil lagi dengan tjeritera „Awal dan Mira" gubahan U. Sontani. Regie dalam pertundjukan tsb. dipegang oleh Sumardjono.

Himpunan „Padmanaba" dari S.M.A. BI dengan pimpinan Rijanto pada bulan September mempertundjukkan tjeritera „Tjitra" dari Rabindranath Tagore saduran Sri Murtono.

Pada bulan Nopember Dr. Severino Montano, professor seni drama dari The American University di Washington memberi tjeramah tentang seni drama di Amerika dihadapan para siswa Sekolah Seni Drama dan Film.

Tahun 1953.

Tahun ini dibuka oleh Sekolah Seni Drama dan Film dengan pertundjukan drama 1 babak „Rara Djonggrang" gubahan Sri Murtono sebagai sambutan ulang tahun ke IV dari A.S.R.I.

*

H. PERKEMBANGAN KESUSASTERAAN DIDAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

Pendahuluan :

MAKSUD dikemukakannja karangan ini, ialah akan memperkenalkan kepada masjarakat ramai, kesusasteraan di Jogjakarta. Kalau dikatakan kesusasteraan di Jogjakarta, jang di maksud ialah kesusasteraan Djawa.

Mulai dahulu sampai sekarang, kesusasteraan di Jogjakarta ini belum pernah diselidiki dan diuraikan oleh para ahli.

Di Surakarta kita dapat mengenal pudjangga - pudjangga keraton jang memang besar, seperti Josodipuro I, Josodipuro II, Ronggowarsito dan lain-lainnja.

Memang diakui, bahwa kesusasteraan di Jogjakarta itu hanja sedikit sekali, tetapi penting djuga untuk diketahui, didjadikan bekal melangkah kedepan.

Mungkin karena sedikitnja, maka kesusasteraan di Jogjakarta oleh para ahli dianggap tidak ada. Tetapi kesusasteraan di Jogjakarta ini memang ada, mungkin hal ini hanja disebabkan sukarnja mentjari hubungan untuk menjelidiki kesusasteraan itu.

Oleh karena itu, kalau nanti diuraikan tentang kesusasteraan di Jogjakarta ini, tentu hanja sepintas lalu sadja, karena sukarnja mentjari bahan. Lebih-lebih mengenai kesusasteraan lama. Pada zaman modern ini timbul djuga kesusasteraan-kesusasteraan Djawa jang berbentuk baru, tetapi agaknja di Jogjakarta ini djuga sukar ditjari, sasterawan-sasterawan mana jang telah mengeluarkan sebuah buku.

1. Riwajat kepudjanggaan Jogjakarta.

Perdjalanan kesusasteraan itu, dinegeri manapun djuga, selalu berhubungan dengan keadaan masjarakatnja. Kesusasteraan lama di Jogjakarta itu, seperti kesusasteraan lama didaerah lainnja djuga, berkembang didalam keraton. Kalau kita menjusur kembali rawajat keraton Jogjakarta itu, maka sedjak lahirnja, masjarakat keraton Jogjakarta itu selalu diselubungi oleh kegentingan politik.

Pengatjau pemerintah Belanda terhadap keraton Jogjakarta selalu mendesak, sehingga kesempatan untuk bernafas tidak ada lagi.

Hamengku Buwono I, mengalami Perang Gianti, jang sangat merugikan kedudukan keradjaan Djawa.

Kemudian disusul oleh Hamengku Buwono II jang ditangkap oleh G. G. Daendels, karena hendak memberontak. Kemudian diganti oleh Hamengku Buwono III. Tetapi sesudah pemerintah Belanda dapat diruntuhkan oleh Lord Minto, H.B. II dikembalikan keatas tachta keradjaan oleh Luitn. G.G. Raffles.

Tetapi H.B. II ingin sekali membebaskan keradjaannja dari pengaruh asing, sehingga timbul perselisihan dengan Pem. Inggeris. Akibatnja tentera Sepei masuk ke keraton dan H.B. II diasingkan di Ceylon. Kemudian H.B. III kembali naik tachta keradjaan lagi. Tetapi kekatjauan dalam keraton tidak hanja sampai disini sadja. Penggantian H.B. III dengan H.B. IV, dan lagi karena pengatjauan Belanda, timbullah peperangan Djawa, pada th. 1825 — 1830.

Sesudah selesai peperangan di Djawa ini, jang dipimpin P. Diponegoro, maka kekuasaan Belanda atas keraton Jogjakarta sudah besar sekali. Keamanan dapat ditjapai, meskipun perselisihan batin disana-sini masih tetap ada.

Sudah mendjadi kebiasaan bagi radja-radja di Djawa, bahwa tiap-tiap radja pasti mengeluarkan bukunja. Tentu sadja ada radja jang agak melengahkan soal kesusasteraan ini, dan bagi radja jang demikian itu, biasanja lalu menjerahkan sadja pekerdjaan itu kepada kantor kepudjanggaan di keraton.

Kewadjiban kantor kepudjanggaan ini, ketjuali menjusun sedjarah keraton atau keradjaan, djuga menerbitkan buku-buku jang berhubungan dengan keraton.

Tentu sadja buku-buku sedjarah kesusasteraan keraton itu sebagian besar memudji-mudji radja. Kedjelekan-kedjelekan radja hanjalah dipertundjukkan dengan lambang-lambang, sehingga kedjelekan-kedjelekan itu tidak begitu terasa. Disamping itu, biasanja isi kesusasteraan keraton itu disisipi nasehat dan filsafat. Banjak buku-buku itu jang dikutip diluar, tetapi tidak ditjetak. Tentu sadja kadang-kadang kesusasteraan berubah sedikit-sedikit. Djika ada orang melahirkan anak, biasanja diadakan pertemuan diantara kaum kerabat, dan dalam pertemuan itu dibatjanja sebuah buku babad jang dinjanjikan dengan lagu **matjapat** sehingga pertemuan itu terasa sangat resmi.

Demikianlah kesusasteraan keraton itu berkembang dalam masjarakat tidak dengan ditjetak, melainkan hanjalah kutip-emngutip, dan jang memiliki biasanja orang jang masih ada hubungan dengan keluarga radja atau kepala-kepala desa.

Sesudah H.B. V naik tachta keradjaan, kesusasteraan keraton itu baru berkembang dengan suburnja. Karangannja jang terkenal ialah „Purwakanda", dan H.B. VII mengarang „Serat Asal-Usul".

2. Pengaruh kesusasteraan keraton terhadap masjarakat.

Tadi sudah dikatakan, dalam kesusasteraan keraton itu, pudjangga hanja memudji-mudji keluhuran radja, kemakmuran negeri dibawah radja ini atau radja itu. Kalau rakjat membatja buku ini, tinggallah mereka itu pertjaja sadja, karena kedudukan pudjangga pada saat itu memang penting. Pudjangga dianggap orang jang tahu segala-galanja. Apa jang terisi dalam buku, seorang pudjangga mudah mendjadi kepertjajaan rakjat. Pandangan hidup, jang selalu menjerahkan diri kepada takdir, sangat mempengaruhi rakjat. Begitu pula sifat menggantungkan diri. Djadi sebenarnja apa jang terisi dalam tjeritera itu sangat menghambat kedinamikan dalam masjarakat.

Kedudukan radja sangat tinggi. Hal ini masih terasa sampai pada saat ini. Feodalisme mengembang dengan suburnja. Tiap-tiap gerak-gerik radja selalu dilihat oleh rakjat dan mendjadi tjontoh. Kalau radja itu memang berbudi untunglah. Tetapi kalau radja itu tidak berbudi, mudah menghantjurkan negara.

Tetapi disamping kedjelekan-kedjelekan jang tersebut diatas, djuga banjak kebaikan-kebaikannja. Dalam buku itu banjak pendidikan jang ditudjukan kepada sifat-sifat jang luhur, dan sifat-sifat ini menimbulkan kesetyaan rakjat terhadap tata tertib dan tata susila. Semua peraturan dalam masjarakat, sangat ditaati. Boleh dikata tidak ada orang jang menjimpang dari apa jang oleh masjarakat dianggap baik. Memang patut diakui, bahwa hal ini menjebabkan masjarakat mendjadi statis, sukar bergerak dan berubah. Tetapi harus diakui pula, bahwa dengan demikian ketenteraman hidup dalam rumah-tangga dapat terdjamin, begitu pula tata-tertib masjarakat, sehingga menimbulkan harmoni dalam kehidupan.

Dengan timbulnja revolusi, dan karena pengaruh kehidupan modern ini, hal-hal jang menghambat kemadjuan dalam masjarakat itu sudah banjak berkurang. Desa-desa sudah mulai bergerak, orang sudah mulai memperhitungkan uang. Djika dahulu orang menolong tetangganja dengan tidak dibajar apa-apa, sekarang upah sudah mulai difikirkan. Memang mengenai hal-hal jang

pokok, masih banjak dikerdjakan setjara gotong-rojong, misalnja mendirikan rumah d.l.l. Demikianlah pada saat ini kepekatan dan ketenangan dalam masjarakat sudah dapat dipetjahkan oleh pengaruh modern. Kebaikan pengaruh kesusasteraan ialah ketaatan kepada aturan-turan dalam masjarakat, tetapi keburukannja ialah menebalkan faham feodalisme, dan menghambat kemadjuan.

Pada zaman modern ini, timbul aliran-aliran baru dalam kesusasteraan jang sangat berbeda dengan kesusasteraan dahulu, sesuai dengan masjarakatnja.

3. Masa kebangkitan Nasional.

Pengaruh bangsa Barat sangat terasa pula dalam kesusasteraan daerah di Jogjakarta. Prosa-prosa jang berbentuk baru timbul, tetapi tidak banjak. Biasanja hanja terdapat dalam madjallah dan merupakan tjeritera pendek, jang berbentuk roman. Isinjapun hanja bersifat propaganda. Orang memudja-mudja tanah airnja. Buku-buku jang bersifat kesusasteraan boleh dikata tidak ada. Memang ada buku-buku kesusasteraan Djawa jang terbit, tetapi biasanja karangan dari pada pengarang-pengarang Surakarta.

Lebih-lebih setelah timbulnja bahasa Indonesia, perhatian kepada bahasa daerah sedikit demi sedikit mendjadi terdesak. Hal ini lebih-lebih lagi mentjekik bahasa daerah serta kesusasteraannja. Tetapi kesusasteraan lama, jang hidup dalam masjarakat tetap hidup. Kekuatan pengaruh buku-buku lama itu masih mendalam dalam masjarakat. Tetapi kesusasteraan Djawa baru didaerah boleh dikata tidak bernafas.

4. Sedjarah Pura Paku Alaman terhadap kesusasteraan Jogjakarta.

Pengaruh pura Paku Alaman terhadap perkembangan kesusasteraan daerah Jogjakarta ini sangat besar sekali. Ketika keraton Jogjakarta terlibat dalam kegelapan kabut politik, kesusasteraan dipura Paku Alaman berkembang dengan segarnja. Bahkan sebenarnja peletak dasar pertama dari pada kebiasaan jang bersifat kesenian dan kesusasteraan dalam keraton adalah pura Paku Alaman. P. Notokusumo (P.A. I) adalah pengandjur kesusasteraan pura Paku Alaman. Ketjuali itu masih ada figuur-figuur lain jang historisch.

Hasil kesusasteraan dari pada P.A. I mentjerminkan kehidupan djiwanja dan mendjadi pertanda dari pada kehidupan masjarakat disekelilingnja pada masanja.

Buku-buku karangannja ialah: „Kyai Djati Pusaka" dan „Babad Betawi". Kedua buku ini dapat dipandang sebagai autobiografi, dan menggambarkan persoonlijkheid daripada pengarangnja. Tetapi sebenarnja buku ini chronologisch muda.

„Kyai Djati Pusaka" menjerupai sebuah parabel, sedang „Babad Betawi" menggambarkan udara politik di Jogja pada waktu ia masih ketjil, hingga mendjadi P.A. I.

„Kyai Sudjarah Darmo Sudjajeng Resmi" (Kyai Sarahdarmo) adalah buku karangan P.A. I jang tertua. Tentang karakter banjak diambil dari „Serat Menak".

Pada buku „Serat Rama" roh dari pada P.A. I dapat kita lihat, tetapi sudah sebagai orang jang masak dan guru besar penjair.

P.A. I djuga banjak mengeluarkan „Surat Piwulang" jang pendek-pendek, jang berisi tentang pengadjaran adat istiadat, jang mempunjai harga kesusasteraan jang tinggi.

P.A. II adalah seorang seniman jang ulung, lebih dari pada seorang litterator. Ini mudah dapat dimengerti, karena dia mengalami keadaan jang tenang. Kesenian ramai dipeladjari di pura Paku Alaman. P. A. I tidak mempunjai kesempatan untuk mempeladjari kesenian, karena selalu berhadapan dengan situasi politik jang genting. Dalam kekatjauan-kekatjauan didalam

keraton Jogjakarta, jang berachir dengan berachirnja perang Djawa th.1825 — 1830, ia dapat memperoleh funksi jang penting. Berkat persoonlijkheid, ia selalu ditarik dalam pertengkaran sebagai adviseur, sebagai wali atau lainnja, dan pada tahun 1830 ia diangkat mendjadi zelfbestuurder, sebagai P.A. I.

P.A. II. dibantu oleh R.T. Hardjowinoto, sebagai seorang jang hafal njanjian-njanjian kawi.

Pada zaman P.A. II itu soal-soal baru bagi seni musik dan drama terbuka, sesudah mempeladjari soal-soal jang lama jang akan diperbaharui. Sebagai kenjataan dari pada keunggulan kesenian pura Paku Alaman pada waktu itu ialah, bahwa Sultan H. B. V pada waktu itu tetap mengirimkan sentono dan abdidalem, untuk mempeladjari njanjian-njanjian kawi dipura Paku Alaman. Sebelum H. B. V kesusasteraan dan kesenian dikeraton Jogjakarta sangat menjedihkan keadaannja, berhubung dengan pengatjauan-pengatjauan Belanda terhadap politik keraton.

Ketjuali mendjadi zelfbestuurder, P.A. II itu djuga mendjadi **kori** keraton Jogjakarta. Pada waktu itu ia mendapat kesempatan untuk mendjadi intermediair H.B. V jang tjinta seni itu, dengan tradisi keraton jang patah.

Buku-buku karangan P.A. II ialah „Serat Baratajuda" (Matjapat). Buku ini memperlihatkan bakat penjair dan kekajaan pengetahuan tentang bahasa kawi dan lagu kawi.

„Serat Dewarutji" ditulis dengan irama lagu kawi. Buku ini sebenarnja olahan dari pada sjair karangan P.A. I, jang P.A. II turut membuatnja, jaitu „Sjahadat" dan „Sipat kalih dasa".

„Serat Ngadi-damastra", berisi tentang peladjaran adat-istihadat. Karangan ini dapat disebut zedengedicht, tebalnja 200 pagina folio.

„Serat Babar Loepian" berisi kumpulan-kumpulan ilustrasi jang bersifat artistik seperti jang biasa terdapat pada bagian permulaan dari pada buku-buku Djawa (Javaasche Handschriften). Ketjuali itu djuga berisi tentang keindahan baik mengenai alam maupun manusia, sehingga sebenarnja dapat disebut „buku pegangan untuk aesthetica".

Ketjuali itu ia memberi djuga bentuk-bentuk baru pada tari-tarian „Beksan Bondobojo" jang bersifat musikal dramatis adalah tjiptaannja. Djuga „Ladrang imum", „Lawung-ageng"„ „Gadung-mlati", dan „Puspawarna".

Kemudian lahirlah P.A. III atau P. Surjo Sasraningrat jang kemudian mendjadi seorang pudjangga jang boleh dikatakan besar.

Ia mengarang „Serat Darmo-Wirajat" jang seolah-olah menggambarkan keadaan didunia ini. Ia mengadakan correspondensi dengan pudjangga-pudjangga Solo pada waktu itu.

Karangannja jang lain ialah „Serat Ambya Joesoep" suatu olahan dari pada kitab „Amir Hamzah". Putera dari pada P.A. III, P. Surjaningrat dan P. Sasraningrat, djuga seorang pengarang jang kenamaan pula. Mereka mengolah buku „Sastra Gending" adjaran dari pada S. Agung Prabu Hanjokrokusumo. Teks asli dari pada buku itu tidak didapatkan, tetapi P. Surjaningrat hafal isi kitab itu. Maka timbullah „Serat Sastra Gending" Wirajatdalem ingkang Sinuhun Sultan ing Mataram.

Sesudah P.A. III, tradisi jang bersifat kesusasteraan (letterkundige traditie) tetap dilandjutkan.

P.A. IV, tidak diketahui arsipnja dalam pura Paku Alaman, tetapi ia adalah saudara sepupu dari P.A. III. jang sangat tertarik kepada kesenian jang lalu. Ia bekerdja bersama-sama dengan Ngabehi Kawisastra seorang ahli drama pura Paku Alaman.

Ia mentjiptakan „beksan floret" dan „beksan schermen", mengambil motif dari kesenian tinggi Barat jang kemudian di stileer.

P.A. V adalah seorang jang telah berorientasi ke Barat. Ia seorang ekonoom. Meskipun demikian ia masih dapat mengerdjakan buku tembang-tembang kawi. djuga orkes gamelan jang besar.

Untuk musik dramanja, ia mengarang tjeritera-tjeritera jang bersifat historisch, misalnja: tjeritera „Bandjaransari", jang dengan tari-tarian serimpinja. Ketjuali itu ia membuat djuga sadjak-sadjak lepas pada beberapa serat.

Pada masa P.A. VI ada perubahan besar. Sekolah didjadikan hal jang terpenting, sehingga kehidupan seni agak terdesak.

P.A. VI tidak lama naik tachta keradjaan, karena pada waktu naik tachta ia sedang sakit. Sesudah satu setengah tahun naik tachta, kemudian ia meninggal dunia.

Isteri dari pada Paku Alam VI, adalah anak dari pada P.A. III, jang sangat tjinta kepada kesusasteraan. „Babad Paku Alaman" dikarangnja, dengan dilakukan kepada salah seorang abdi dalem jang terkenal, ialah R.I. Djajengutoro.

P.A. III terkenal sebagai pembangun kebudajaan Djawa. Kesenian ramai kembali dipeladjari dalam keradjaan.

Sesudah P.A. VI hasil kesusasteraan dari radja tidak ada lagi, melainkan kehidupan kesusasteraan mempunjai djalan jang lain. Kesusasteraan itu berkembang diantara keluarga radja.

Tidak boleh dilupakan ialah B. R. A. Nototaruno. Meskipun sudah pasief, tetapi ia adalah seorang ahli babad. Orang dapat menanjakan kepadanja soal-soal dan kedjadian-kedjadian dalam babad. Misalnja: kehidupan radja-radja di Djawa mulai ketjil sampai besar.

Kalau kita melihat riwajat kesusasteraan dalam pura Paku Alaman ini, maka tidak mungkin kita akan menjia-njiakan pengaruh kesusasteraan pura Paku Alaman itu terhadap masjarakat.

5. Kesusasteraan Djawa baru.

Dengan petjahnja perang Asia-Timur, jang kemudian diikuti oleh perang kemerdekaan, penderitaan rakjat makin menghebat. Pendjadjahan jang tiga setengah abad lamanja, telah mengurangi daging rakjat sedikit demi sedikit, dan revolusi jang dimulai tahun 1945 telah menghantjurkan kehidupan rakjat, baik rochani maupun djasmani.

Dimuka telah ditjeritakan, bahwa kehidupan kesusasteraan itu tergantung kepada masjarakat dan lingkungannja. Hingga sekarang akibat revolusi masih sangat terasa, dan penderitaan rakjat sangat mengikat djiwa orang seorang. Pengedjaran terhadap uang mendjadi soal jang terpenting. Perhatian terhadap kesusasteraan boleh dikata tidak ada. Kebanjakan dari mereka jang agak mentjintai kesusasteraan, hanja mengarang untuk madjalah - madjalah sadja, jang dapat tjepat menguntungkan uang. Tambahan pula, tjita-tjita Nasional jang kuat, menjebabkan terdesaknja bahasa daerah oleh bahasa Indonesia. Perhatian umum biasanja hanja ditudjukan pada buku-buku dengan bahasa Indonesia. Buku-buku bahasa Djawa, jang bersifat peneranganpun, orang segan membatjanja. Madjalah-madjalah bahasa Djawa jang ingin mendukung kebudajaan dan kesusasteraan sangat sukar hidupnja, sedang perhatian umum terhadap politik negara mentjekik madjalah sematjam ini.

Misalnja madjalah „Surja-Tjandra", madjalah ini ingin mendukung kebudajaan dan kesusasteraan. Ia mengemukakan bentuk-bentuk baru dalam puisi Djawa, pun mengadjukan idee-idee untuk membuat tjeritera wajang dengan bentuk baru pula. Tetapi agaknja masjarakat tidak dapat menerima hal ini. Sebenarnja masjarakat desa sangat merasa kekurangan batjaan, tetapi agaknja dari pada uangnja dipergunakan untuk langganan madjalah lebih baik untuk menghibur keluarganja.

Baru-baru ini terbit madjalah „Waspada". Tetapi dalam madjalah itu jang dipentingkan ialah politik. Dalam ruang kesusasteraan berisi tjeritera-

tjeritera pendek, jang agaknja dapat diharapkan perkembangannja. Pada achir-achir ini djuga tirabul lagi sebuah madjalah dengan nama „Ngajogjakarta". Dalam madjalah ini diberi djuga ruangan kesusasteraan.

Semoga dengan timbulnja madjalah-madjalah ini, makin mengembangkan hasrat untuk menghidupkan kesusasteraan daerah.

6. Penutup.

Tadi sudah dikatakan, bahwa untuk mempeladjari perkembangan kesusasteraan daerah itu sangat sukar, karena kurangnja bahan-bahan. Para ahli belum ada jang menjelidiki hingga selesai.

Tetapi meskipun demikian kita beranggapan, bahwa kesusasteraan daerah sangat penting pula bagi kehidupan kesusasteraan serta kebudajaan Indonesia.

Oleh karena itu, meskipun bahan untuk itu sangat sukar ditjari, tetapi karena ingin pula memperkenalkan kesusasteraan daerah di Jogjakarta ini, dengan maksud mempersilahkan pentjinta kesusasteraan untuk menjelidiki, dibawah ini disadjikan tjontoh-tjontoh jang perlu, jang agaknja dapat mendekatkan pembatja kepada perasaan pengarang-pengarang daerah di Jogjakarta.

*

AREP LUNGA

Teng......! Teng......! Teng......!

Djenggirat, Muljana mandeng djam tembok.

Djam 8. Djlug! Muljana andjlog saka randjam, terus ndjrantal menjang pekiwan. Sawise raup lan rambute ditelesi, bali maneh mlebu kamar, nuli dandan sadela.

Tanpa ngenteni sarapan, nuli pamitan karo pamane, arep bali menjang Semarang. Pamane rada gumun. Miturut rentjanane mestine sesuk lagi bali menjang Semarang. Saiki esuk-esuk kok wis pamitan arep mulih. Pamane takon sababe. Wangsulane Muljana, sababe ing ngomah akeh pegawejane. Pamane ngreti, jen alasane Muljana iku mung etok-etok. Nanging deweke ja nglilani Muljana mulih saiki.

Sawise Muljana budal, pamane weruh ana lajang gumletak ing randjam. Lajang diwatja. Sawise matja, pamane Muljana gedeg karo ngunandika: „E, e, e, ana lelakon kok kaja mengkene. Mula Muljana kesusu mulih. Muga-muga Muljana pinaringan kuwat imane, lan Suwarni oleh pangapura saka Pangeran lan bisa enggal bali maneh marang dalan sing bener".

„Amin"

Wagiman
„Djedjer telu sing tengah"......
Waspada No. I

*

LIONG NIO

Wis sawatara dina iki kumpulan sandiwara „Trama-Djaja" main ana kuta Ngajodja prelu kanggo amal kurban gunung Kelud kang mentas wae ndjeblug. Olehe main oleh kawigaten gede banget. Ora amarga kanggo amal mau, nanging kegawa saka pemaine kang pantjen pada wasis olah kridaning sandiwara. Apa maneh kang njekel role, jaiku Sardjana, lan partnere bodjone dewe. Sadjrone

tjrita njekel rol nonah Liong Nio. Kadjaba rupane kang kaja golek, pantjen baut banget, mula ora anggumunake jen nganti gawe tjingaking para penonton. Apa maneh nalika main djupuk lakon babad Bali, jaiku : I. Swasta ; sawidjining pahlawan Bali kang kondang kekendelane. Sarta kang bekti ing ratu. Kaselingan patemone I. Swasta karo Ni Nogati, nalika pada patemon ing Taman Warampul, nganti para penonton akeh sing pada ndomblong, kasmaran karo Liong Nio kang dadi Ni Nogati, wis precies kaja wanita Bali kae, ora ana gesehe setitik-titika. Apa maneh bareng deweke tetembangan tjara Bali karo djogede kang alus prigel trampil, bersemangat, nganti awake kaja kitiran. Para penonton saja tjingak kabeh. Igeling tangan manut iramane gending, binarung suwarane kang tjemengkling, nganjut-anjut ati.

Waspada No. 6.

„Any Asmara"
Katresnan tan mawang bangsa.

*

Surja Tjandra No. 8 th. I.

Wis pitung dina pak Jasin njekukruk neng tawanan. Paribasane, arepa wudjude Pak Jasin mono gagah gede duwur, tjrapang brengose, nanging djago ana kurungan. Kobrak-kabruk ja tanpa guna. Tiwas wirang djago kate ngisin-isin saka djaba. Semono pak Jasin ndeleng bangsane kang pada kumaki menghadapi pak Jasin. Tjoba pada dene ana djaba, batine.

. Atine djibeg, jen mati, ora mati, urip njesaki dada. Kelingan anak buahe, mesti pating petenteng kalung katju abang, klambi ireng katok ireng, mbegali truk kang pada liwat Djokja Kaliurang. Mulih-mulih dipetukake wedang panas embuh umob embuh ora, gulane djawa. Djangan gori sega setengah mateng. Ngono wae rasane wus nikmat banget. Bestik pitik masakane bu Jasin muda, ditjuri susu, meksa kurang timbang nikmate. Lha saiki...... ana kurungan. Gek kapan ketemu anak buahe. Ana kono wedang kopi tjampur susu, sega goreng endoge ngetapluk. Roti tjampuran kedju ora keri. Meksa tjemplang seret ana gulu.

Tudjune kantjane tunggal paturon ana lima. Pemudane telu, katone isih abang menger-menger. Botjah wingi sore wae teka katut dibersihake, apa ngregedi, mengkono pikirane pak Jasin. Memelas jen nganti diukum pati. Gek ngreti apa .... Saja jen kelingan wingi esuk. Apa hija baji-baji iku disiksa kaja deweke. Wong kono mesti luwih kuwatir karo apa wae kang diarani pemuda. Mangka sing nglakoni dewe babar pisan ora rumangsa kang semono mau. Jen ndeleng solah tingkahe botjah-botjah mau, olehe pada rebutan roti, sirat-siratan wedang, pak Jasin ngelus dada. Anak buahe katon gawang-gawang ana mripate. Weteng ora wareg, klambine tambalan, kober-kobere pating brengok pada gegujon, gelutan rebutan rokok. Kadang-kadang bantingan, uleng-ulengan, kaja ora njedaki bebaja blas.

Tjapung liwat, metenteng ngawe-awe. Sing tuwa mangkel tjampur deg-degan. Angger bisa sing ngemong, bisa olehe menehi ati, dikon nindakake kang kaja ngapa abote, kaja ngapa gawate, kebat tanpa sambat.

Petikan „Madu ana Tawone"
Sri Maya.

*

Surja Tjandra No. 16 th. I.

Petikan

1) Kang wasita midjil sing tyas sutji,
Mring kadangku wadon,
Karja eling jwa kongsi katlompen,
Lan enggane tinitah pawestri,
Pamengkune widji,
Wadah widji luhur.

2) Mapan gawat tinitah pawestri,
Kudu bisa momot,
Saniskara bisa njakup kabeh,
Lahir batin datan ngutjiwani,
Titi surti tuwin,
Nastiti ing laku.

3) Solah bawa muna lawan muni,
Tjatur lan wiraos,
Tindak tanduk sapari polahe,
Rereh ruruh tanapi aririh,
Ngarah — arah tuwin,
Den awas ing semu.

4) Solah bawa tindak tanduk tuwin,
Den mapan den manggon,
Nanging hajwa sira gawe-gawe,
Pepulase samudana lamis,
Kinarja nenarik,
Mring kang samya ndulu.

S. Parwoto.

Surja Tjandra No. 15 Th. II

Petikan

Duh kadang mitra sadarum,
Swawi pada den wiwiti,
Anjinau Pantja Sila,
Pedoman Nagri Republik,
Linaras djiwa mardika,
Nasional wutuh murni.

Kita perlu wani mbangun,
Djiwa anjar lahir batin,
Eling marang karsa Tuhan,
Kang njipta kabeh dumadi,
Aneng alam kelahiran,
Njirik ala ngudi betjik.

Bukti wekdal ingkang sampun,
Keh panindak medal sangking,
Hukum kodrat masjarakat,
Ngrusak tata nglanggar dalil,
Lali jen titah pangeran,
Wadjib nembah ngesti Gusti.

*

I. PENTJAK/SILAT DALAM DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

BERDASARKAN penindjauan ternjatalah bahwa pentjak/silat itu sungguh-sungguh masih hidup dalam semua kepulauan diseluruh Negara Republik Indonesia, bahkan dibeberapa tempat, sangat subur hidupnja, sehingga mendjadi adat istiadat ditempat-tempat itu,

Di Daerah Istimewa Jogjakarta-pun pentjak/silat itu masih hidup dan dipelihara baik-baik oleh para penggemarnja.

Daerah Istimewa Jogjakarta terkenal sebagai daerah pusat kebudajaan, sedang pentjak/silat itu termasuk salah satu kebudajaan nasional, maka dengan sendirinja rakjat jang tertentu dari daerah itu merasa wadjib memeliharanja, agar djangan sampai pentjak/silat itu lenjap dari muka bumi ini.

Walaupun pada zaman pemerintah kolonial Belanda meradjalela di Indonesia, pentjak/silat mendapat tekanan, namun kebudajaan Indonesia, diantaranja pentjak/silat tetap hidup dalam djiwa bangsa Indonesia umumnja dan rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta pada chususnja.

Memang kebudajaan itu berurat-berakar didalam djiwa, dan djiwa itu tidak dapat mati karena tekanan lahir.

Demikianlah keadaan dan kehidupan pentjak/silat di Daerah Istimewa Jogjakarta, sedjak dahulu (zaman Sultan Agung diabad 17, dan Pangeran Diponegoro abad 19) hingga sekarang abad 20 ini, tetap hidup dan dimiliki oleh rakjat, bahkan pada abad jang terachir ini perkembangan pentjak/silat didalam Daerah Istimewa Jogjakarta sangat nampak kemadjuannja, baik diteropong dari sudut organisasinja, maupun systim dan ideologi-nja.

Agar lebih djelas, so'al perkembangan pentjak/silat di Daerah Istimewa Jogjakarta ini di bagi mendjadi 3 bahagian, ja'ni :

1). Bahagian dimasa pemerintah kolonial Hindia Belanda.
2). Bahagian dimasa pemerintah militer Djepang
3). Bahagian dimasa pemerintah Republik Indonesia.

1. Dimasa pemerintah kolonial Hindia Belanda

Pada waktu pemerintah kolonial Belanda bersimaharadjalela di Indonesia selama ± 350 tahun pentjak/silat ditekan oleh Pemerintah.

Pemerintah kolonial tahu, apabila rakjat (istimewa Jogjakarta) mahir dalam ilmu pentjak/silat, tentu berbahaja bagi pemerintahannja. Setidak-tidaknja menambah tidak gampang (sulit) untuk memerintahnja. Lebih-lebih pada waktu zaman perang Diponegoro melawan Belanda (th. 1825) peladjaran kepandaian pentjak/silat mengantjam kedudukan Belanda langsung.

Ketjuali pentjak/silat itu berbahaja langsung bagi pemerintah Belanda pada waktu berperang dengan rakjat Indonesia (dulu Hindia Belanda), djuga berbahaja jang **tidak langsung** terhadapnja, karena pentjak/silat dapat menimbulkan rasa tjinta kepada kebudajaan sendiri, ialah kebudajaan nan indah permai warisan dari nenek mojang Indonesia.

Apabila orang sudah tjinta kepada kebudajaan bangsa sendiri, maka orang itupun timbul rasa tjinta kepada bangsanja sendiri.

Kalau orang tjinta kapada bangsanja sendiri (Indonesia), dengan sendirinja suka membela kepentingan bangsanja.

Djika orang Indonesia suka membela kepentingan bangsanja (Indonesia), barang tentu langsung atau ta' langsung merugikan atau membahajakan bagi pemerintah kolonial Belanda.

Karena tekanan itu, banjak rakjat takut, bahkan ada jang malah membantu Belanda dan membentji pentjak/silat. Mereka itu sungguhpun bangsa Indonesia, berpendapat seperti Belanda djuga, merendahkan (menghina) pentjak/silat, terutama kaum terpeladjar.

Tetapi ada djuga jang sebaliknja. Oleh karena tekanan itu, bahkan insjaf, bahwa pentjak/silat dll. kebudajaan Indonesia harus dihidupkan. Ada ahli seni tari jang djuga faham pentjak/silat mentjiptakan tarian baru jang berisi rahasia-rahasia pentjak/silat, **agar dapat mengadakan latihan dengan leluasa tidak ada gangguan dari pihak pemerintah Belanda.** Hingga kini tari-tarian tersebut masih ada, dan dapat dibuktikan sebagai pentjak/silat. Tari-tarian dari Istana Jogjakarta dan Surakarta, agak banjak jang berisikan gerak-gerik pentjak/silat jang amat halus.

Salah satu tjontoh dari pada insjaf itu, misalnja: Taman-Siswa jang berpusat di Mataram — Jogjakarta, dibawah pimpinan Ki Hadjar Dewantara.

Pada waktu pemerintah kolonial Belanda belum ada satu sekolahpun di Indonesia ini jang mau/berani mentjantumkan peladjaran pentjak/silat itu dalam lesrooster, ketjuali perguruan nasional Taman-Siswa jang berpusat di Daerah Istimewa Jogjakarta, dan jang kemudian diikuti oleh suatu perguruan jang berdasarkan nasional djuga di Kajutanam Minangkabau (Sumatera) dibawah pimpinan Moh. Sjafei (I.N.S.).

Diluar sekolah (dalam masjarakat) Jogjakarta masih banjak perkumpulan pentjak/silat jang umumnja dibawah pimpinan gurunja (pendekarnja. Masing-masing organisasinja belum begitu rapih. Hanja satu dua jang sudah baik. Alirannja matjam-matjam, satu dan jang lain kadang-kadang berbeda djauh/bertentangan. Persatuan seluruh aliran belum ada, bahkan ada kalanja agak berlawanan. Ideologinjapun beraneka warna pula.

II. Dimasa pemerintah militer Djepang

Pemerintah militer Djepang mengerti faedahnja pentjak/silat untuk dipergunakan dalam perang. Oleh karena itu membantu giat sekali perkembangan pentjak/silat. Dari Jogjakarta diminta dua orang pendekar dilatih (ideologi pentjak/silat) di Djakarta oleh apa jang disebut Saudara Tua. Semua dengan beaja pemerintah. Untung djuga dua orang dari Jogjakarta itu sudah punja pendirian, hingga maksud itu ta' berhasil seperti jang diharapkan.

Di Jogjakarta timbul: „Gerakan Latihan Petjak/Silat" diketuai oleh K.P.H. Nototaruno, saudara muda dari Sri Paku Alam VIII, Sekretarisnja Himodigdojo.

Gerakan tersebut mengangkat Moh Djumali sebagai pelatih pentjak seluruh sekolah di Jogjakarta.

Kemudian timbul: „GAPEIMA" Gabungan Pentjak Indonesia Mataram). Maksudnja mempersatukan semua aliran pentjak/silat di Mataram Jogjakarta. (tahun 1942).

Orang-orang terpeladjar sudah banjak mau mendekati pentjak/silat diantaranja Dr. Koesmargono, Dr. H. Sentraal. Soegardo (kini Kepala Djawatan Pengadjaran P.P. & K.), Dr. Martohoesodo, d.l.l. Bergabung dalam „GAPEIMA" 18 organisasi seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

1.	Alip Poerwowarso	— Ketua	S.H.O.
2.	Prodjohandoko	— Wk. Ketua	R.K.B.
3.	Ismadi	— Penulis I	S.H.O.
4.	Soewarno	— Penulis II	S.H.T.
5.	Soekirman	— Bendahari	R.K.B.
6.	Moh. Djoemali	— Komisaris	Taman-Siswa.
7.	Soetardjo	— Komisaris	KIPAS (PHASADJA).
8.	Soebardjo	— Komisaris	P.H.

Dimasa itu hampir semua Sekolah Landjutan diadakan kumpulan latihan pentjak/silat dibawah pimpinan pelatih-pelatih Taman-Siswa jang diketuai oleh Moh. Djoemali. Dibeberapa Sekolah Rakjatpun diadakan latihan-latihan seperti itu.

Djuga di Seinen Kurensho (Latihan Pemuda Djepang) di Pingit, Jogjakarta, diberi peladjaran pentjak/silat oleh Moh. Djoemali.

Buat pertama kali pada zaman Djepang (th. 1942), perguruan Taman-Siswa Wirogunan, mengadakan demonstrasi. jang diikuti oleh murid sebanjak 3.000, dan kemudian bertanding sepasang-sepasang.

3.000 orang ini diberi aba-aba dengan kentongan berirama atau musik. Pentjipta gerak-pentjak/silat itu adalah Moh. Djoemali. Sekarang tjiptaan gerak-pentjak/silat itu sudah diakui baik oleh Kongres I.P.S.I. (Ikatan Pentjak Seluruh Indonesia) th. 1950 di Jogjakarta, dan kini oleh Ketua I.P.S.I. Mr. Wongsonegoro, tjiptaan tersebut diserahkan kepada Menteri P.P. & K., Dr. Bahder Djohan untuk dipakai disekolah-sekolah.

Tjiptaan lain jang djuga diakui dan diserahkan kepada Menteri P.P. & K. ialah :

1. Kumpulan Kebudajaan Magelang (Marijun).
2. Dari Mr. Djokosoetono. (Roesli).
3. Dari Prodjosoemitro.

Organisasi pentjak/silat tambah rapih, persatuan aliran mulai ada, ideologi agak berdekatan, systim pentjak/silat mulai mengindjak kearah baru.

III. Dimasa Pemerintah Republik Indonesia

„GAPEIMA" terus berdiri sampai tahun 1947. Dan pada th. 1947 beralih mendjadi „I.P.S.I." (Ikatan Pentjak Seluruh Indonesia) tjabang Jogjakarta. Ketua I.P.S.I. Jogjakarta berganti-ganti, S. Winadi kini di Kalimantan, pernah djuga mendjadi Ketua Tjabang Jogjakarta.

Susunan Pengurus „I.P.S.I." Tjabang Jogjakarta jang sekarang adalah sebagai berikut :

Ketua	=	Alip Poerwowarso	S.H.O.
Wk. Ketua	=	Soetardjo Dirdjosoeparto	PHASADJA.
Penulis I	=	Soewarno	S.H.T.
Penulis II	=	Moedjijono	PHASADJA.
Bendahari	=	Soebardjo	P.H.

Moh. Djoemali dari Jogjakarta, pernah mendjadi Acting Ketua Umum Pengurus Besar „I.P.S.I." merangkap Ketua Bagian Tehnik P.B. „I.P.S.I.", ialah waktu Ketua Umum P.B. „I.P.S.I., Mr. Wongsonegoro, mendjadi Menteri P.P. & K.

Sekarang ia (Moh. Djoemali) sebagai Komisaris P.B. „I.P.S.I." buat Jogjakarta dan Wakil Ketua Bagian Tehnik P.B. „I.P.S.I."

Tiga Saudara di Jogjakarta, ada djuga jang mendjadi Anggauta-anggauta P.B. „I.P.S.I." ialah :

1. Sri Paku Alam VIII (sebagai Wk. Ketua P.B. „I.P.S.I."
2. Soetardjo (sebagai Sekrataris II P.B. „„I.P.S.I.").
3. Roosdi (sebagai anggauta P.B. „I.P.S.I.").

Tempat kedudukan P.B. „I.P.S.I." sedjak lahirnja hingga R.I.S. pun didalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

Kongres ,I.P.S.I. sampai karangan ini ditulis, baru sekali sadja dan diadakan di Jogjakarta djuga

Semua tjiptaan-tjiptaan tersebut timbul waktu P.B. „I.P.S.I." di Jogjakarta dan pengakuan dari pihak jang berwadjib pun didapat di Jogjakarta djuga.

Teranglah, bahwa Daerah Istimewa Jogjakarta pegang peranan penting dalam perkembangan pentjak/silat tidak sadja bagi daerahnja, tetapi djuga bagi seluruh Indonesia. Jogjakarta sungguh-sungguh tempat bersedjarah mengenai perkembangan pentjak/silat baik dipandang dari sudut permulaan diadjarkannja pentjak/silat disekolah-sekolah dengan dipelopori oleh Taman — Siswa Jogjakarta maupun dilihat dari kenjataan tumbuhnja-besarnja organisasi pentjak jang meliputi seluruh Indonesia (I.P.S.I.).

Setelah Indonesia merdeka, perkumpulan-perkumpulan pentjak di Jogjakarta semakin banjak merata, meliputi segala lapisan masjarakat.

Penghargaan kepada pentjak/silat nampak tinggi dari kalangan masjarakat.

Pada waktu Jogjakarta diduduki oleh tentara Belanda (Desember 1948 — Djuni 1949 = 6 bulan) para pendekar Jogjakarta sebagian besar keluar dari Kota, dan hidup ditengah-tengah rakjat desa, berpindah-pindah tempat, mengadjar pentjak kepada para anggauta-anggauta gerilja.

Bukti-bukti menundjukkan, bahwa selama clash ke II pentjak/silat tidak sedikit manfaatnja bagi pihak Indonesia.

Memang, menurut sedjarah, orang-orang besar di Jogjakarta seperti: Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro dan lain-lain, ialah pendekar-pendekar pentjak/silat.

Sehabis clash ke II, ialah Jogjakarta ditinggalkan oleh Belanda (Djuni — 1949), para pendekar kembali masuk kota-kota, dan menggiatkan latihan-latihan pentjak/silat.

Semua organisasi-organisasi pentjak/silat nampak lebih baik dari jang sudah-sudah, keinsjafan masjarakat dan penghargaannja kepada pentjak/silat lebih besar lagi daripada jang sudah-sudah.

Persatuan antara perkumpulan-perkumpulan pentjak/silat satu dengan lainnja bertambah erat, dan saling harga menghargai.

Tanggal 15 Maret 1952 buat pertama kalinja „I.P.S.I." di Jogjakarta mengadakan demonstrasi pentjak/silat di Gedung Negara (bekas Presidenan di Margomuljo 1) jang dapat menundjukkan bermatjam-matjam aliran pentjak/silat dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

Nampak dalam demonstrasi itu persatuan jang baik dari segala matjam aliran. Masing-masing mempertundjukkan ketjakapannja, berupa tari-tarian pentjak (bunga-bunga), langkah-langkah, pertandingan, gerak-badan pentjak, dan lain sebagainja, diiringi dengan musik atau gamelan.

Ada djuga jang bermain dengan tiada disertai bunji-bunjian.

Styl dan systimnja kelihatan lebih modern dari pada tahun-tahun jang lampau. Ideologinja-pun sudah meningkat tinggi. Pada umumnja egoisme sudah sangat tipis, dan faham untuk kepentingan bersama guna nusa/bangsa sudah hidup didalam sanubari para pendekar di Daerah Istimewa Jogjakarta.

Pada tanggal 17 Agustus 1948 dilapangan Kridosono Jogjakarta dapat dipertundjukkan gerak-pentjak/silat systim Taman-Siswa dari murid-murid S.R. seluruh kota Jogjakarta, dilakukan bersama-sama oleh 1200 orang murid, atas inisiatif Soepardi (Inspektur Olah-Raga Daerah Istimewa Jogjakarta). Hasilnja memuaskan.

Gerak-gerik pentjak bertambah populer. Waktu D.P.R.I. (Dewan Perdjuangan Rakjat Indonesia) Daerah Istimewa Jogjakarta berkantor di Djl. Ngabean 4, tahun 1946 — 1947 (jang sekarang dibuat kantor Djapendi) lasjkar-lasjkar wanitapun giat mempeladjari pentjak/silat diruang sebelah atas, pelatihnja ialah Moh. Djoemali.

Ada seorang wanita jang pada waktu itu mendjadi Menteri (S. K. Tri Moerti) pernah djuga turut mengikutinja dan turut berpraktek.

Tahun 1950 Kursus B.I. di Jogjakarta (jang diselenggarakan oleh Djawatan Pengadjaran Kem. P.P. & K. Bg. Kursus-kursus/Sekolah) diberi peladjaran pentjak/silat oleh Soetardjo Dirdjosoeparto.

Tahun 1951 S.G.P.D. (Sekolah Guru Pendidikan Djasmani) di Jogjakarta diberi djuga peladjaran pentjak/silat, dibawah pimpinan Alip Poerwowarso.

Tahun 1949 di A.P.D. (Akademi Pendidikan Djasmani) Terban Taman Jogjakarta mulai diberi peladjaran pentjak jang diurus oleh Soebekti. Saudara ini djuga memberi peladjaran pentjak di M. A. (Militer Akademi) Jogjakarta.

Bapaknja Soebekti (Soekirman) sekarang guru pentjak di Sekolah Polisi Negara di Sukabumi, pernah djuga mengadjar pentjak kepada anggauta Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta.

Dus dalam Daerah Istimewa Jogjakarta pentjak/silat sungguh-sungguh meliputi semua lapisan masjarakat (tentara, polisi, sekolah-sekolah, asrama-asrama dan penduduk umum sampai kanak-kanak).

Pada tahun 1949 Menteri P.P. & K., Mangoensarkoro, di Jogjakarta memerintahkan kepada seorang guru dari Sekolah Landjutan jang memberi peladjaran pentjak di S.T.P. Jogjakarta (Moh. Djoemali) untuk menindjau dan mempeladjari pentjak/silat ditempat-tempat jang tersohor dipulau Sumatera, terutama Minangkabau.

Lebih dari 3 bulan Sdr. itu didaerah Sumatera dan achirnja pulang dengan membawa hatsil jang sudah diserahkan kepada Menteri tersebut.

Waktu Poeromartodipoero dari Inspeksi Pendidikan Djasmani masih di Jogjakarta, menaruh djuga perhatian kepada pentjak/silat.

Tanggal 17 Agustus 1952 diadakan lagi demonstrasi pentjak/silat di Gedung Negara Jogjakarta dan kelihatan lebih meningkat.

Para pembesar didaerah Istimewa Jogjakarta sekarang ini, (Wakil Kepala Daerah Istimewa— Sri Paku Alam VIII dan Wali Kota Jogjakarta, Mr. S. Poerwokoesoemo) kedua-keduanja gemar pentjak/silat dan hingga kini masih suka sekali-sekali berlatih diri. Putera-putera dari Sri Paku Alam VIII jang masih ketjil-ketjil (9 — 14 tahun) pun sudah pandai pentjak, karena Istana Paku Alaman dipakai djuga sebagai tempat latihan pentjak jang dipimpin oleh almarhum Soeliodikoesoemo dan Sri Paku Alam VIII sendiri.

Pada waktu penjerahan hadiah perlombaan 17 Agustus 1951, di bangsal Kepatihan Danuredjan Jogjakarta diadakan djuga pertundjukan pentjak ; putera-putera Sri. Paku Alam VIII (Ambarkoesoemo, Probokoesoemo dan Gondokoesoemo) djuga mempertundjukkan ketjakapan pentjaknja.

Soedarsono, Acting Kepala Djawatan Kebudajaan Kementerian P.P. & K. di Jogjakarta, pada tanggal 1 April 1952 berhasil membentuk suatu „seksi pentjak" Djawatan Kebudajaan, Kementerian P.P. & K. jang berpusat di Jogjakarta.

Tugas pertama dari seksi pentjak Djawatan Kebudajaan Kementerian P.P. & K. tersebut, membimbing dan membantu (subsidi d.l.l.) perkumpulan-perkumpulan pentjak/silat diseluruh Indonesia jang dipandang perlu.

Seksi pentjak itu di Jogjakarta mendapat perhatian besar dari chalajak ramai, dan dalam waktu ½ tahun sadja seksi pentjak Djawatan Kebudajaan sudah populer di Jogjakarta serta nampak kemadjuannja jang pesat.

Pada tanggal 29 Desember 1952 seksi pentjak Djawatan Kebudajaan di Jogjakarta mengadakan tjeramah dan demonstrasi pentjak/silat bertempat di Gedung Negara Jogjakarta, jang mendapat perhatian besar sekali dari segala lapisan masjarakat.. Walaupun hudjan, kundjungan mendekati 1.000 orang (900 — 1.000 orang).

Hadir dalam tjeramah itu ketjuali bangsa Indonesia, nampak djuga beberapa orang bangsa asing seperti: Djerman (diantaranja Dr. Baudisch d.l.l.) bangsa Belanda, Tionghoa, dan lain sebagainja.

Pembesar-pembesar dari pelbagai Djawatan diseluruh Daerah Istimewa Jogjakarta hampir lengkap.

Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Paku Alam VIII. Wali Kota Jogjakarta, Mr. Poerwokoesoemo dan acting Ketua D. P. R., Daerah Istimewa Jogjakarta semua memberi sambutan dengan perasaan puas.

Selama dunia berkembang, ditanah air kita belum pernah ada Pemerintah jang mengadakan tjeramah disertai demonstrasi-demonstrasi pentjak/silat, **ketjuali di Daerah Istimewa Jogjakarta,** itulah buat jang pertama kalinja, dan menurut laporan dari semua pihak, sungguh-sungguh memuaskan.

Buku „pentjak/silat Indonesia" jang diterbitkan oleh P. B. I. P. S. I. pun baru satu sadja, dan dibuat di Jogjakarta djuga. Panitya pembuat buku jang bersedjarah itu semua bekerdja di Jogjakarta, ialah :

1). Sri Paku Alam VIII — Ketua
2). Moh. Djoemali — Wakil Ketua
3). Soetardjo — Penulis
4). Prodjosoemitro — Bendahari
5). Roosdi — Pembantu

Buku itu sudah selesai, tetapi belum disiarkan kepada umum.

Buku-buku pentjak/silat lainnja jang dibuat dan diterbitkan oleh para pendekar Jogjakarta, ialah :

1. „Latihan pentjak/silat Taman-Siswa" oleh Moh. Djoemali, S. Dirdjoatmodjo dan Pak Tomo.
2. „Pentjak dan silat" oleh Soekowinadi.

Djelaslah bahwa bukti-bukti menjatakan, bahwa Daerah Istimewa Jogjakarta benar-benar merupakan pusat pendukung kebudajaan pentjak/silat dengan setjara mendalam.

Tugu-Kidul No. 44 Jogjakarta (Kantor Seksi Pentjak Djawatan Kebudajaan Kem. P.P. & K.) adalah salah satunja pusat latihan pentjak/silat dari kaum terpeladjar dan rakjat umum.

Radio Republik Indonesia di Jogjakarta, tiap-tiap dua minggu sekali (hari Selasa djam: 19.15) menjiarkan so'al-so'al pentjak/slat dalam siaran „Mimbar Kebudajaan".

Ini berarti Jogjakarta tetap memelihara dan mendorong, membimbing serta membina perkembangan pentjak/silat.

Dulu waktu Soekowinadi di Jogjakarta, seminggu dua kali tiap-tiap djam 6 pagi diadakan peladjaran Pentjak — Radio, melalui pemantjar R.R.I. Jogjakarta.

Begitulah kata „sedjarah dan bukti-bukti" jang telah ada.

*

J. PERKEMBANGAN SENI - KERADJINAN PERAK KOTA - GEDE

SEPERTI jang telah terdjadi djuga dilain-lain tempat perusahaan-perusahaan, sesudah proklamasi kemerdekaan, beratus-ratus pemuda dari perusahaan seni keradjinan perak Kota-Gede dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, meninggalkan perusahaan-perusahaan untuk pergi berdjuang.

Dengan demikian maka sekonjong-konjong keadaan dalam perusahaan-perusahaan mendjadi sunji, pasar-pasar perak mendjadi sepi, pedagang-pedagang perak ta' ada jang datang karena terhalang. Produksi dan pendjualan mendjadi sangat berkurang. Kekuatan produksi dari seluruh perusahaan hanja dapat bergerak kira-kira 20%, sedang pasarnja masih tetap sepi sampai permulaan tahun 1946.

Setelah beberapa bulan kemudian kota jang besar-besar, misalnja Surabaja, Djakarta, Bandung, Semarang dll. berturut-turut diduduki Belanda, tidak antara lama datanglah beberapa orang pedagang dari daerah pendudukan ke Kota Jogjakarta dan Kota-Gede dengan tjara menjelundup untuk mentjari dagangan barang-barang perak. Djedjak itu dengan sendirinja segera diikuti oleh beberapa orang pedagang dari Jogjakarta dengan tjara menjelundup djuga, masuk dalam daerah-daerah pendudukan untuk mendjual hasil-hasil dari keradjinan perak.

Sedjak pertengahan tahun 1946 sampai achir 1948 perdagangan barang-barang perak setjara demikian itu nampak makin ramai dan perusahaan-perusahaan perak dapat bergerak lagi dengan kekuatan produksi kira-kira 50%.

Pada tanggal 19-12-'48 sekonjong-konjong tibalah hari jang malang bagi Daerah Istimewa Jogjakarta dengan serbuan dan pendudukan jang dilakukan oleh tentara Belanda.

Waktu mereka melakukan operasinja di Kota-Gede, ta' ada sebuah perusahaan perak pun jang berani membuka pintunja, bahkan kebanjakan ditinggalkan mengungsi. Tidak sedikit djumlah barang-barang perak jang dirampas oleh Belanda.

Setelah Kota-Gede termasuk mendjadi daerah pendudukan Belanda, maka beberapa waktu kemudian ada beberapa buah perusahaan jang berhubung dengan soal-soal keselamatan dan penghidupan terpaksa membuka perusahaan lagi. Adapun djumlahnja kira-kira ada 20 buah dengan masing-masing 4 a 5 orang tukang. Seluruhnja hanja merupakan kekuatan produksi kira-kira 5%.

Setelah Belanda ditarik mundur dari Daerah Istimewa Jogjakarta, banjak perusahaan-perusahaan perak jang dibuka kembali, akan tetapi pengguntingan uang dalam permulaan tahun 1950 sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan-perusahaan dan pasar-pasar perak, sehingga produksi merosot kembali sampai kira-kira 20%.

Selandjutnja hubungan dengan lain-lain daerah jang masih banjak penduduknja bangsa Belanda dan bangsa asing lainnja sedikit demi sedikit mendjadi baik dan lantjar, dan dengan demikian maka dalam tahun 1951 produksi dapat meningkat dengan tjepatnja sampai kira-kira 75%.

Akan tetapi setelah banjak Belanda dan bangsa asing lain-lainnja berangsur-angsur meninggalkan Indonesia dalam achir tahun 1951/1952, maka lambat laun produksi mendjadi turun lagi sampai kira-kira 50% pada penghabisan tahun 1952.

Agar dapat mudah diketahui kemadjuan dan perkembangannja, disebelah ini kita susun angka-angka sebagai jang dimaksudkan diatas. Sebagai pedoman kita ambil angka-angka dari saat jang terbaik diwaktu sebelum perang, ialah diantaranja tahun 1935 — 1938.

Lebih landjut kita bentangkan dibawah ini kesukaran-kesukaran jang dialami dan dengan susah-pajah harus diatasi oleh para pengusaha-pengusaha perusahaan seni-keradjinan perak jang mempertahankan „keahlian" peninggalan dari nenek-mojangnja jang telah berturun-temurun, kesulitan-kesulitan mana mengenai soal-soal jang penting, misalnja **bahan, kwalitet, produksi dan pasar.**

Dalam tahun 1945/1946, bahan perak dan produksi masih terdapat banjak sekali sisa-sisa zaman Djepang. Pada saat itu perak murni ta' terdapat dan jang ada hanja rosok-rosok. Rosok jang terbaik ialah tjap Singa dengan gehalte 0.900, dan ini harganja per kilogram = Rp. 550,— Djepang. Oleh beberapa pedagang, bahan perak tersebut setiap kilonja ditjampur dengan 4 kilogram tembaga. Dengan demikian setiap kilo bahan perak 0.900 didjadikan 5 kilo bahan perak dari kira-kira 0.200 (perak merah). Perak merah ini didjual dipasar-pasar atau perusahaan-perusahaan dengan harga Rp. 0.12 1 gram, atau Rp. 120,—, sekilonja. Djadi setiap kg perak putih bagi pedagang atau pemasak perak merah hanja dapat keuntungan Rp. 50,— kotor. Oleh beberapa perusahaan, perak merah itu masih dipergunakan untuk membuat barang-barang dagangan jang ketjil-ketjil dengan harga Rp. 0.25 segramnja, atau Rp. 250,— per kg. Dengan demikian perusahaan-perusahaan itu mempunjai keuntungan setiap kilonja Rp. 130,— kotor.

Dalam tahun 1947, setelah uang Djepang diganti dengan uang O.R.I. harga bahan perak 0.900 mendjadi kira-kira Rp. 150,— sekilonja. Karena pada saat itu perak merah sudah mulai tidak laku, maka kebanjakan dari pengusaha-pengusaha lantas membuat barang-barang dengan gehalte 0.600 — 0.700 dan

Tahun.	Banjaknja perusahaan.	Banjaknja tukang	Produksi kurang / lebih	
			1 bulan	1 tahun.
Waktu terbaik sebelum perang 1935 — 1938.	70 buah.	1.400 orang.	± 2.100 kg.	± 25.000 kg.
1945.	50 buah.	250 orang.	± 375 kg.	± 4.500 kg.
1946.	70 „	350 „	± 525 „	± 6.500 kg.
1947.	80 „	400 „	± 1.200 „	± 14.500 kg.
1948.	90 „	500 „	± 1.350 „	± 16.000 kg.
1949. (Djuni + Djuli)	20 „	100 „	± 150 „	± 1.800 kg.
(Agust. Des.)	40 „	200 „	± 300 „	± 3.600 kg.
1950.	50 „	300 „	± 375 „	± 4.500 kg.
1951.	100 „	1.000 „	± 1.500 „	± 18.000 kg.
1952.	80 „	700 „	± 1.000 „	± 12.000 kg.

segala matjam barang besar, sedang dan ketjil, mulai dibuatnja dengan harga segramnja Rp. 0.30 sampai Rp. 0.60, atau Rp. 300,— sampai Rp. 600,— sekilonja.

Dalam tahun 1948, bahan perak sebagian besar berupa uang perak lama dan umumnja jang dikehendaki oleh perusahaan - perusahaan perak ialah mata uang ketip dan talen perak (sisa-sisa uang zaman pendjadjahan Belanda, sebab gehaltenja sudah tjukup tinggi (± 0,700), sedangkan setiap serupiahnja beratnja ketip dan talen adalah lebih dari lain-lainnja. Harga uang perak lama tersebut serupiahnja = Rp. 3,—. Harga produksi dalam tahun inipun dapat meningkat, misalnja Rp. 0.60 a Rp. 0.80 1 gram.

Dalam tahun 1949, dalam waktu pendudukan Belanda harga bahan perak jang baik sangat gontjang, ialah diantaranja Rp. 300,— a Rp. 600,— (O.R.I.) 1 kg, adapun harganja produksi Rp. 1,— a Rp. 1,25 (O.R.I.) 1 gram.

Dalam tahun 1950, harga bahan dari uang perak lama ketip dan talen serupiahnja = f 2,—. Karena mulai tahun ini ketenangan dan ketenteraman bekerdja dan berfikir telah ada, maka djalannja pekerdjaan-pekerdjaan mulai lebih teratur dan lantjar dan kwalitet produksipun mendjadi lebih baik. Harga produksi 1 gram f. 0.40 sampai f. 1,—. Tetapi pasar produksi jang mulai mendjadi baik itu sekonjong-konjong terhenti karena adanja pengguntingan uang. Pasarnja mendjadi sepi sampai silamnja tahun 1950.

Dalam tahun 1951, harga uang perak lama ketip dan talen serupiahnja mendjadi Rp. 2,50. Dalam bulan Djanuari 1951 Javasche Bank Jogjakarta mulai mendjual perak lantakan dari Pemerintah dengan harga Rp. 15,— selantaknja (54 gr), harga mana dalam bulan Pebruari 1951 ditambah dengan Rp. 0.40 padjak peredaran, mendjadi Rp. 15,40. Pada tanggal 19 Djuli 1951 harga itu mendjadi Rp. 17,— inclusief padjak peredaran. Dengan dikeluarkannja bahan jang baik ini (gehalte ± 0,950), maka hasrat pengusaha dan pembeli untuk memperbaiki kwalitet produksi mendjadi lebih besar. Barang-barang besar, sedang dan ketjil banjak jang dibuatnja dari perak 0.800 dan kwalitetnjapun dipertinggi. Harga produksi segramnja Rp. 0,40 sampai Rp. 0,75.

Dalam tahun 1952, harga bahan jang berupa uang perak lama, ketip dan talen, semula serupiahnja Rp. 2.70. Dengan disiarkannja Undang-undang Darurat dalam surat-surat kabar pada permulaan bulan Djanuari 1953 mengenai „Larangan mempergunakan dan memasukkan dalam peredaran uang lama dst.", maka lenjaplah uang-uang perak tsb. di pasar-pasar. Dan djika ini muntjul lagi sebagai bahan untuk dilebur didjadikan barang-barang, maka harganja Rp. 3.25 serupiahnja. Harga bahan perak Pemerintah di Javasche Bank kini masih tetap Rp. 20,— selantaknja. Harga produksi adalah Rp. 0.45 sampai Rp. 0.80 1 gram.

Perkembangan jang sebaik-baiknja bagi seni keradjinan perak Kota-Gede waktu sebelum perang dunia ke II, ialah diantaranja tahun 1935 — 1938. Dari adanja kegontjangan-kegontjangan suasana di Eropah dan lain-lain Negeri Barat, sedjak tahun 1939 mulai terasalah kemunduran perdagangan barang-barang keradjinan perak dan selandjutnja ditengah-tengah petjah perang dunia ke II, tahun 1940, 1941, kemunduran itu makin nampak djelas djuga dalam perusahaan-perusahaan dan achirnja terpaksa berhenti seluruhnja pada tanggal 8 Maret 1942, karena Djepang pada saat itu menguasai djuga Jogjakarta.

Setelah pemerintahan teratur kembali sebagian besar dari perusahaan-perusahaan perak dapat bergerak lagi. Ta' lama kemudian pasar-pasar perak mendjadi ramai. Djepang sangat banjak membeli barang-barang perak, tetapi karena tjaranja sangat merugikan perusahaan-perusahaan, maka kwalitetnjalah jang mendjadi korban. Gehaltenja perak terus menurun sampai ± 0.200 (perak merah) sebagai diatas telah diterangkan djuga.

Sekarang djelaslah bahwa dalam waktu 10 tahun seni-keradjinan perak telah mendjumpai dan dapat mengatasi beberapa matjam kesulitan jang sangat membahajakan kedudukan dan perkembangannja, karena seni-keradjinan perak Kota-Gede telah mendapat tempat dan pengaruh jang sangat baik a.l. dalam pameran di kota Nagoya, Djepang, pada tahun 1937, dalam Wereld-tentoonstelling di New-York dan San Francisco, Amerika, pada th. 1939.

Seni keradjinan perak telah dikenal dan digemari oleh bangsa-bangsa asing ke-hampir seluruh Eropah, Inggeris, Amerika, Australia, New-Zealand dan lain-lain.

*

PERKEMBANGAN SENI - KERADJINAN LAINNJA DI DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

SELAIN seni-keradjinan perak, dalam Daerah Istimewa Jogjakarta terdapat djuga bermatjam-matjam seni-keradjinan, jang kemadjuan dan perkembangannja sangat terbatas, karena dalam dasar dan/atau tjoraknja sedikit atau banjak berbeda dengan seni-keradjinan perak.

Seni - keradjinan emas :

Sedjak waktu sebelum perang dunia ke-2 keadaan seni-keradjinan emas tampak sangat mundur. Pada zaman dahulu memang banjak kemasan-kemasan jang membuat barang-barang besar dari bahan emas jang terukir dan dihias dengan permata atau batu-batu dan nodjowerdi untuk keperluan keraton-keraton, bangsawan-bangsawan dan hartawan - hartawan, umpamanja gendogo, angsa, ajam, naga, rusa, petèn, pendok d.l.s. Tetapi pembikinan barang-barang sematjam itu makin lama makin berkurang, bahkan achir-achir ini orang kebanjakan hanja membuat perhiasan-perhiasan jang bersifat umum, misalnja : gelang, kalung, subang, tjintjin dan lain sebagainja.

Seni - keradjinan perunggu :

Satu-satunja ahli seni-keradjinan ini ialah **Ki Atmoredjoso,** jang telah meninggal dunia pada zaman pemerintahan Djepang. Sedjak itu seni-keradjinan terus-menerus mundur, karena ta' ada seorangpun jang tjukup ketjakapannja untuk melandjutkan pekerdjaan itu, achirnja mati. Seorang puteranja jang sedjak ketjil dari ajahnja menerima pendidikan tentang kesenian tersebut, belum dapat dianggap tjukup kepandaiannja untuk mempertahankan keahlian itu. Waktu hidupnja Ki Atmoredjoso telah dapat mengerdjakan dan mentjipta matjam-matjam barang jang bernilai tinggi, umpamanja : matjam-matjam standaard lampu, alat-alat medja tulis, klinting-klinting Buddha, artja-artja Buddha, artja-artja biasa, artja-artja binatang, artja-artja wajang orang d.l.s. Barang-barang tersebut ada djuga jang dibuat dari kuningan dan aliminium. Ki Atmoredjoso almarhum adalah djuga seorang ahli mengukir batu.

Seni - keradjinan kuningan :

Dibandingkan dengan keadaan sebelum perang, seni-keradjinan ini sangat mundurnja, akan tetapi karena soalnja tidak begitu berat dan sulit, maka sampai sekarang masih dapat dipertahankan. Kesulitan-kesulitan sebagian besar hanja terletak pada modal dan pasar. Dari bahan kuningan itu oleh para ahli dibuat matjam-matjam standaard lampu, matjam-matjam rookstel, alat-alat medja tulis, klinting-klinting, matjam-matjam bendè d.l.s.

Seni - keradjinan gongso :

Ini adalah tjampuran bahan sematjam perunggu, teristimewa dipergunakan untuk meniru barang-barang perhiasan badan dari emas. Oleh karena itu barang-barang tadi dinamakan „imitasi". Berhubung dengan tingginja harga emas bagi kaum rendahan, maka barang-barang ini kini mengalami kemadjuan pesat terutama diluar Djawa.

Seni - keradjinan aliminium :

Ini termasuk usaha baru. Achir-achir ini banjak dibuat barang-barang dari aliminium jang terukir, misalnja : tempat buah, tempat abu rokok, sendok-sendok, tempat-tempat dan tutup gelas d.l.l. Meskipun pasarnja belum begitu baik, namun perusahaannja sudah berdjalan sehari-hari.

Seni - keradjinan pusaka :

Satu-satunja ahli jang terkenal dan banjak hubungannja dengan masjarakat ialah Ki Empu Supowinangun dari desa Djenggalan (Ngénto-énto), Godean, Jogjakara. Waktu sebelum perang ia banjak membuat keris-keris jang baik untuk para bangsawan, abdidalem dan para peminat. Dalam zaman Djepang meskipun tidak banjak pekerdjaan, ia tidak sedikit membuat keris-keris untuk umum dan pembesar-pembesar Djepang. Disampingnja itu dia djuga membuat pedang-pedang berpamor untuk beberapa opsir Peta. Sesudah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tgl. 17-8-1945 sampai kira-kira tahun 1949 pekerdjaan Ki Supowinangun dapat dikata sepi.

Setelah Belanda mengundurkan diri dari Jogjakarta, mulai tahun 1950 sedikit demi sedikit Ki Supo mendapat pekerdjaan lagi, sehingga pada tahun 1952 pekerdjaan itu tjukup banjaknja untuk menggerakkan perapennja sehari-hari. Sifatnja pekerdjaan ini ialah pembuatan keris-keris biasa untuk diperdagangkan di pasar-pasar jang harganja pada sa'at ini Rp. 12,50 sebilahnja dan sebulannja dapat dibuatnja kira-kira 8 bilah keris. Keris-keris jang baik masih dibuatnja djuga tetapi hanja mengenai pesanan. Adapun harga-harganja keris jang baik ialah diantaranja Rp. 100,— sampai Rp. 300,— sedangkan untuk mengerdjakan 1 bilah keris dibutuhkan 3 sampai 5 minggu. Djika dahulu banjak dipergunakannja besi meteoor sebagai pamor, maka kini jang dipergunakan untuk pamor ialah besi putih dan/nikkel, sebab besi meteoor ta' mudah didapat lagi.

Seni - keradjinan mengukir batu :

Sebagai umum telah mengetahui, sampai sekarang pekerdjaan mengukir batu itu umumnja hanja ditudjukan untuk pembuatan batu kubu (kidjing). Sedjak waktu sebelum perang oleh Kantor Keradjinan pernah ditjoba memadjukan pekerdjaan tersebut, pertjobaan mana hasilnja sangat memuaskan. Tetapi karena harganja mendjadi hampir lipat dua dari pada jang biasa, maka kemadjuannja sangat sukar.

Seni - keradjinan mengukir kaju :

Sedjak zaman dahulu kala Daerah Istimewa Jogjakarta telah terkenal djuga sebagai pusat seni-keradjinan mengukir kaju, tetapi karena titik berat dari seni-keradjinan itu letaknja pada pendidikan dan pemeliharaan, maka soalnja ta' dapat disamakan dengan perusahaan-perusahaan pengukir kaju dilain-lain tempat jang tudjuannja terutama kearah perdagangan dan djika keadaan memaksa, menomor duakan seni-ukirnja. Oleh karena itu seni-keradjinan mengukir kaju di Jogjakarta sampai kini belum mengenal pasar seperti di Bali, Djepara, Serenan d.l.l.

Seni - keradjinan batik :

Soal ini sungguh lain daripada jang lain, karena pokok dasarnja seni keradjinan ini mengenai djiwa dan tenaga wanita. Seni batik adalah lukisan dari djiwa dan kebaktian wanita. Dari buah tjiptaannja dapat digambarkan djiwa sipentjipta dan dari buah tangannja (penjelesaiannja) dapat dibajangkan ketangkasan dan kebaktiannja terhadap kewadjiban-kewadjibannja. „Batikan", pada zaman kuno adalah suatu sjarat bagi kaum lelaki untuk mengenal djiwa ketangkasan dan kebaktian seseorang wanita. Tetapi karena dalam kemadjuan djumlah pembatik makin berkurang sedangkan djumlah pemakainja makin lebih banjak, maka seni-batik lalu terpengaruh oleh perdagangan dan oleh karenanja sebagian besar merosot nilainja. Hal ini berarti kemadjuan bagi perekonomian, tetapi bagi keseniannja berarti kemunduran. Djika zaman dahulu seni batik hanja mengenal kain pandjang, slendang atau kemben, kain kepala, sarung dan dodot, maka dalam perkembangannja seni-batik mengenal djuga sementara kebutuhan-kebutuhan asing misalnja : tjelana tidur, taplak medja, perhiasan dinding, portiere, pajung, kipas, tas, samak album, saputangan, dasi d.l.l., baik dari katun maupun dari sutera. Achir-achir ini jang nampak djelas kemadjuannja ialah soal penjelesaiannja (technische afwerking) misalnja perbaikan dari : matjam-matjam bentuk pepetannja (figuren), pembahagian ruang, pengisian ruang, perseimbangan (verhoudingen), memberinja warna d.l.s. Tetapi soal tjiptaan-tjiptaan jang tinggi nilainja dan mendalam artinja (jang berdjiwa) dalam zaman kemadjuan ini belum nampak. Jang banjak terlihat pada saat ini ialah hanja tjampuran-tjampuran (kombinasi) dari beberapa tjorak (motief) jang telah ada dengan matjam perubahan dan tjara. Tjara demikian itu sama sekali ta' dapat menimbulkan pengaruh jang mendalam dan paling djauh hanja dapat mentjapai wudjud jang „baik" di pandangan mata, tetapi lekas menimbulkan rasa bosan. Oleh karena itu telah ratusan orang dari beberapa tempat jang datang di Kantor Keradjinan Daerah Istimewa Jogjakarta bagian penjuluhan batik untuk mendapatkan pola-pola jang kuno dan mungkin telah ribuan lembar kain dengan pola-pola kuno itu jang „dibatiknja", baik untuk dipakai sendiri maupun untuk diperdagangkan.

Seni - keradjinan tatah - sungging :

Seni - keradjinan ini kini mengalami kemunduran jang ta' sedikit. Waktu sebelum perang, selain didalam keraton, diluarpun masih banjak terdapat tukang-tukang jang menatah dan menjungging wajang. Dalam perkembangan seni tatah-sungging itupun pernah mendapat lapangan dan kemadjuan jang baik, misalnja mengenai djuga pembuatan kipas, kap lampu, samak buku, dan lain-lain barang jang ketjil-ketjil, jang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduk bangsa asing dan kaum pelantjong (touristen). Keadaan diwaktu itu sungguh menguntungkan bagi para ahlinja, tetapi pada saat ini keadaannja sangat mundur, sehingga hasil-hasilnja hanja tjukup untuk memelihara dan mempertahankan diri sadja.

Seni - keradjinan penju dan tanduk :

Dalam tingkat perkembangan dan kemadjuannja memang pernah ada barang-barang dari penju dan tanduk jang terukir. Tetapi karena beberapa soal (factor) ta' memungkinkan perkembangan itu bertahan lebih lama, maka dalam beberapa tahun sadja keradjinan itu djatuh kembali pada tingkat lama. Untunglah keradjinan itu dapat dikombinasi atau dihias dengan keradjinan perak, sehingga sifat dan gunanja mendapat tambah perhatian, dan penghargaan dari masjarakat sendiri maupun asing. Waktu sebelum perang barang-barang itupun madju sekali karena banjaknja bangsa asing jang membutuhkannja. Wudjudnja barang-barang

itu ialah: matjam-matjam kebutuhan medja makan, dapur, kantoran, perhiasan badan, bersihan (toilet) d.l.s. Tetapi karena berhubung dengan keadaan sekarang barang-barang tersebut diatas itu sepi pasarnja maka pembuatan barang-barang dari tanduk dan penju sangat terbatas, kebanjakan hanja untuk mentjukupi kebutuhan sendiri (sisir, tusuk konde d.l.l.), maka hasilnjapun hanja tjukup untuk bertahan diri.

* *
*

5. PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN

1. PERGURUAN - PERGURUAN TINGGI DI JOGJAKARTA
A. PERKEMBANGAN UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA JOGJAKARTA

DIDALAM revolusi ini keadaan djaman senantiasa berubah, sebelum kita menginsjafi benar-benar. Dari itu banjak jang dilupakan dan banjak pula jang tidak dimengerti kedjadian itu.

Djuga perkembangan dari Universitit Negeri Gadjah Mada berdjalan sangat tjepat. Dari itu banjak kedjadian-kedjadian diwaktu jang lalu sudah tidak tampak djelas lagi.

Toch kedjadian-kedjadian itu harus dihargai, karena itu mendjadi suatu rangkaian atau mendjadi dasar dari perkembangan Universitit, jang sesudah pembikinan gedung Universitit dimulai dengan perletakan batu pertama oleh Presiden Dr. Ir. Soekarno pada tanggal 19 Desember 1951, terlihat akan mendjadi besar.

Untuk memberi gambaran jang agak lengkap dari riwajat Universitit Negeri Gadjah Mada perlu diadjukan hal-hal seperti berikut.

Sebagai-mana orang mengetahui Universitit Negeri Gadjah Mada mempunjai :

1. Fakultit Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi ;
2. Fakultit Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik ;
3. Fakultit Technik ;
4. Fakultit Sastera, Pedagogik dan Filsafat ;
5. Fakultit Pertanian ;
6. Fakultit Kedokteran Hewan.

Fakultit-fakultit itu mempunjai riwajat sendiri-sendiri.

Pertama akan dimulai dengan riwajat dari Fakultit Technik, karena Fakultit ini jang dibuka di Jogjakarta lebih dulu dari jang lain-lain.

Untuk djelasnja diberitahukan disini, bahwa sesudah tentara Belanda menjerah kepada tentara Djepang pada tanggal 7 Maret 1942, maka semua Perguruan Tinggi dari Pemerintah Hindia Belanda ditutup.

Dua tahun sesudah tentara Djepang masuk di Indonesia, maka Sekolah Technik Tinggi di Bandung dibuka pada tanggal 1 April 1944, dinamakan Koo Gyoo Dai Gaku dengan bagiannja : a. Sipil, b. Kimia, c. Listerik dan Mesin.

Tetapi sesudah Djepang didalam perangnja menjerah kepada Sekutu, dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannja, maka para mahasiswa pada tanggal 17 Agustus 1945 di Bandung melutjuti guru-guru bangsa Djepang, menahan mereka dirumahnja masing-masing, dan urusan hal Sekolah Tinggi Technik dipegang oleh bangsa Indonesia.

Pimpinan dipegang oleh Prof. Ir. Roosseno dan dibantu oleh Ir. Goenarso, Ir. Soewandi Notokoesoemo, Ir. Soenarjo dan Sutan Mochtar Abidin.

Kuliah-kuliah diberi tugas terus, tetapi dibulan Oktober Inggeris dan Belanda menjerbu Bandung, dan memberi suasana jang sangat hangat; sebelum bulan itu habis, didalam kota sudah banjak tembak-menembak antara tentara kita dan tentara Sekutu.

Mulai bulan Nopember 1945 kuliah-kuliah dibubarkan, meskipun kantor administrasinja dibawah Sutan Mochtar Abidin dan Ir. Soenarjo masih berdjalan terus.

Tetapi pada tanggal 6 Djanuari 1946 kantor itu dipindah ke Jogjakarta atas pimpinan Prof. Ir. Roosseno, Ir. Soenarjo dan Ir. Soewandi Notokoesoemo, untuk berhubungan dengan Panitya pendirian Jajasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada.

Pada suatu rapat dengan Panitya tersebut tidak terdapat persesuaian faham, karena Panitya tersebut tetap mengakui mendirikan perguruan Tinggi partikelir, sedangkan Prof. Ir. Roosseno c.s. telah memperoleh perintah dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan untuk membuka Sekolah Technik Tinggi di Jogjakarta, jang dapat diselenggarakan dan dibuka pada tanggal 17 Pebruari 1946 digedung S. M. A.

Mula-mula pimpinan dipegang oleh Prof. Ir. Roosseno, jang kemudian diganti oleh Prof. Ir. Wreksodhiningrat pada tanggal 1 Maret 1947.

Mahasiswa jang dapat meninggalkan Bandung, dapat meneruskan peladjar-annja di Jogjakarta dan dapat menempuh udjian Insinjur untuk pertama kalinja dibulan Oktober 1946.

Karena penjerbuan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 Sekolah Technik Tinggi di Jogjakarta ditutup. Didalam suasana jang menjedihkan dan membahajakan, alat-alat jang berharga sedikit demi sedikit diselamatkan oleh pimpinan dan mahasiswa-mahasiswa.

Riwajat Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada

Siapakah mula-mula jang mempunjai pikiran untuk mendirikan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada?

Pada tanggal 24 bulan 1 tahun 1946 digedung S.M.T. Kotabaru Jogjakarta diadakan pertemuan dari beberapa tjerdik pandai perlu merundingkan hal-hal kemungkinan mendirikan Balai Perguruan Tinggi (Universitit) partikelir di Jogjakarta.

Jang mendjadi promotornja jaitu; Mr. Boediardjo, Ir. Marsito, Dr. Prijono dan Mr. Soenarjo (Jogjakarta).

Oleh Mr. Soenarjo ditegaskan, bahwa di Djakarta Nica sudah mendirikan Universitit. Kita bangsa Indonesia djangan sampai ketinggalan. Lebih-lebih sekarang pada waktu pembangunan, waktu kita membutuhkan bermatjam-matjam ilmu pengetahuan. Kalau kita mendirikan Universitit, tempatnja tidak di Djakarta, karena Djakarta itu sfeernja internasional, sedang kita berniat mendirikan suatu Universitit nasional.

Selandjutnja diadakan panitya lengkap jang beranggauta 32 orang jang berpengaruh besar, dengan Ki Hadjar Dewantara sebagai Ketua dan Mr. Soenarjo sebagai Penulisnja.

Kedjadian didirikannja suatu jajasan, jang bertugas mendirikan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada dengan Mr. Boediarto sebagai Ketua,

Dr. Soekiman sebagai Wakil Ketua,

Dr. Boentaran sebagai Penulis,

Dr. Soeharto sebagai Bendahari,

dan anggauta-anggauta B.P.H. Bintoro, H. Farid Ma'ruf, Mr. Mangunjudo, K.R.T. Notojudo, K.P.H. Nototaruno, Prof. Ir. Roosseno.

Djuga Dewan Kurator lalu dibentuk dengan Sri Sultan sebagai Ketua, dan Ki Hadjar Dewantara sebagai wakil Ketua.

Sesudah semua persiapan selesai, maka pada tanggal 3 Maret 1946 digedung K.N.I. di Malioboro Jogjakarta diadakan pertemuan resmi untuk mengumumkan berdirinja Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada partikelir dengan bagiannja Fakultit Hukum, Fakultit Kesusasteraan dari Jajasan tersebut.

Disini tidak dilupakan bahwa jang memberi sokongan sebesar-besarnja untuk langsungnja pertumbuhan Balai Perguruan Tinggi partikelir itu jalah Sri Sultan.

Tetapi djuga Fakultit-fakultit partikelir ini ditutup sesudah penjerbuan Belanda di Jogjakarta pada tanggal 19 Desember 1948.

Hal Fakultit Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi

Karena oleh Pemerintah tentara Djepang diinsjafi, bahwa tenaga kesehatan langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi kekuatan berperang, maka Sekolah Tinggi Kedokteran di Djakarta dan Sekolah Kedokteran Gigi di Surabaja dibuka pada tanggal 1 April 1943 dan djuga dibuka baru Sekolah Tinggi Farmasi jang didjaman Belanda belum ada.

Sesudah hari proklamasi kemerdekaan, maka dengan segera Sekolah Tinggi Kedokteran dapat diambil oper oleh bangsa Indonesia dari tangan Djepang.

Tetapi keadaan ini tak dapat lama, karena sesudah kedatangan tentara Sekutu jang diikuti tentara Belanda, kita merasa tidak tenteram dan tidak aman. Pula dengan meletusnja pertempuran di Surabaja pada tanggal 10 Nopember 1945, maka Sekolah Kedokteran Gigi jang sudah direntjanakan akan dimulai, terpaksa ditinggalkan dan alat-alatnja diselamatkan oleh pegawainja ke Malang.

Dari situ atas kebidjaksanaan Kementerian Kesehatan didjalankan pemindahan dari sebagian dari Sekolah Tinggi Kedokteran kepedalaman.

Ini tindakan sungguh tepat, karena tidak lama lagi gedung Perguruan Tinggi Kedokteran Djakarta diduduki Belanda.

Dibulan Djanuari 1946 sudah dimulai dengan pemindahan alat-alat dan buku-buku. Didalam hal ini jang giat mengatur perdjalanannja dengan kereta api, dengan susah pajah penjelundjupannja melalui pendjagaan Belanda di setasiun Salemba jalah asisten Moegiono dibantu dengan mahasiswa-mahasiswa.

Tetapi menjusun kembali Sekolah Tinggi itu sangat sulit dan hampir gagal, karena tidak ada gedung-gedungnja dan perumahan untuk pegawai-pegawainja; di Jogjakarta tidak ada tempatnja, pun tidak dapat di Magelang. Solo mempunjai hasrat membikin persiapan, menerima bagian atas, jang bagian klinis, tetapi belum dapat ditentukan.

Diwaktu itu Prof. Dr. Sardjito sudah ada di Klaten, baru menjusun Institut Pasteur dengan sebagian alat-alat dan bahan-bahan, jang dapat dipindahkan dari Bandung.

Karena didengar tentang kesulitan-kesulitan jang dialami didalam hal mendirikan Perguruan Tinggi Kedokteran, maka dokter Soetarman dan Prof. Sardjito menindjau soal ini, dan mendapat kesimpulan, bahwa jang bagian bawah dari Sekolah Tinggi itu, jang membutuhkan laboratorium-laboratorium, dapat diadakan di Klaten, dengan bantuan dokter Soenoesmo almarhum, pemimpin dari Rumah Sakit Tegaljoso, dan djuga dari dokter-dokter lain di Klaten.

Djuga di Solo sesudah ditindjau keadaannja dengan dokter Poedjo Darmohoesodo, pemimpin Rumah Sakit Djebres, dengan bantuan dari pengurus Palang Merah dan dokter-dokter dari Solo, dimana persiapan mentjukupi, maka dapatlah ditetapkan pembukaannja pada tanggal 4 Maret 1946, sedang pembukaan dari bagian Sekolah Tinggi Kedokteran di Klaten didjatuhkan pada tanggal 5 Maret 1946.

Guru-guru datang dari Djakarta ditambah dengan dokter-dokter setempat.
Mahasiwa-mahasiswa jang dapat meninggalkan Djakarta dapat meneruskan peladjarannja di Klaten dan di Solo.

Perguruan Tinggi di Klaten mendjadi besi magnit jang menarik hasrat pembangunan dari beberapa djurusan, ialah dari Kementerian Kesehatan untuk mendirikan Fakultit Farmasi, dan Kementerian Kemakmuran untuk mendirikan Fakultit Pertanian di Klaten, dan kedua-duanja dibuka pada tanggal 27 September 1946.

Didalam hal mendirikan Fakultit Pertanian dapat ditjatat, bahwa jang memberi spirit jalah Ir. Goenoeng Iskandar.

Kemudian jang djuga mempengaruhi perkembangan Perguruan Tinggi di Klaten jalah penjerbuan Belanda ke I didalam daerah R.I. pada tanggal 21 Djuli 1947.

Malang djatuh ditangan Belanda, Perguruan Tinggi Kedokteran, Perguruan Tinggi Pertanian dan Sekolah Kedokteran Gigi dari Pemerintah dan Perguruan Tinggi Hukum partikelir, jang dikota itu sudah berdjalan, mendjadi bubar. Dari Perguruan tinggi kepunjaan Pemerintah para mahasiswanja jang ingin meneruskan peladjarannja pergi ke Solo dan ke Klaten.

Karena Kementerian Kesehatan kehilangan Sekolah Kedokteran Gigi di Malang, maka untuk menghindari vacuum didalam pendidikan itu, lalu didirikan Fakultit Kedokteran Gigi di Klaten djuga, jang dibuka pada permulaan tahun 1948, bersama dengan pembukaan Fakultit Kedokteran Hewan.

Fakultit Kedokteran Hewan ini mempunjai riwajat serupa sebagai jang lain-lain, seperti berikut.

Dalam bulan Nopember 1946, maka atas usul Panitya pendirian Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan, jang dibentuk oleh Menteri Kemakmuran, Sekolah Dokter Hewan di Bogor jang didalam djaman Djepang djuga dibuka, oleh Pemerintah R.I. didjadikan Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan.

Mahasiswanja harus keluaran dari S. M. T. dan peladjar-peladjar dari Sekolah Dokter Hewan diatas tersebut diterima djuga mendjadi mahasiswa, tetapi dengan kursus aplikasi.

Djuga Perguruan Tinggi ini djatuh ditangan Belanda dengan penjerbuan Belanda pada tanggal 21 Djuli 1947. Mahasiswanja semua mula-mula setia kepada sifat perdjuangan dan tidak mau masuk kembali sampai bulan Mei 1948. Tetapi kemudian sebagian mendjadi „co" dan jang lain mendjadi „non".

Mahasiswa jang tidak mau kembali ke Bogor, datang di Klaten.

Semua Perguruan Tinggi di Jogjakarta, Klaten dan Solo meskipun dengan banjak kesulitan berdjalan terus dengan penuh optimisme, mengadakan rentjana untuk memperbesarkan dan membuat gedung-gedung. Sementara itu Kementerian Dalam Negeri membentuk sebuah Panitya Pembentuk Akademi Ilmu Politik, jang diketuai Mr. Wongsonegoro, untuk mendirikan suatu Akademi Ilmu Politik dengan maksud mengadakan didikan akademi kepada tjalon - tjalon pegawai Pemerintahan dalam negeri, Kedutaan-kedutaan diluar negeri dan ahli - ahli publisitit. Selandjutnja Akademi Ilmu Politik itu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan dibuka pada permulaan tahun 1948 di Jogjakarta.

Kemudian di Solo oleh Kementerian Kehakiman didirikan sebuah Balai Pendidikan Ahli Hukum pada 1 Nopember 1948 untuk mendidik semi akademis. Atas usaha bersama dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan Kementerian Kehakiman dengan kerdja sama dengan Panitya untuk mendirikan Perguruan Tinggi partikelir di Solo, jang diketuai oleh Mr. Drs. Notonagoro, dibentuk sebuah Panitya terdiri atas Mr. Drs. Notonagoro, Mr. Koesoemadi dan Mr. Hardjono untuk mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Negeri di Solo. Kedjadian Sekolah Tinggi Hukum Negeri ini didirikan tersebut dalam

Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1948, dan Balai Pendidikan Ahli Hukum dimasukkan dalam Sekolah Tinggi Hukum itu sebagai Akademi. Pembukaannja direntjanakan pada tanggal 28 Desember 1948.

Tetapi datanglah tanggal 19 Desember 1948 hari penjerbuan Belanda setjara besar-besaran dengan menghantjurkan semua jang sudah dibangun, djuga Perguruan Tinggi.

Tanah air memanggil kita untuk berdjuang, siapakah jang mau ketinggalan ?

Dimana-mana terdengar mengereteknja senapan dan mitraljur, sering djuga dentuman meriam, bom dan granat.

Sjukurlah alchamdulillah kita tahan udji sampai tanggal 7 Mei 1949, persetudjuan Roem — van Royen dapat ditjapai, dan Jogjakarta sebagai ibukota, meskipun disitu masih penuh Belanda dan saban malam masih ada tembak-menembak, Jogjakarta membangun kembali Pemerintahan R.I. dengan alat-alatnja komplit, djuga Perguruan Tinggi harus dihidupkan kembali.

Atas panggilan dari Sekretaris Djenderal Kementerian Kesehatan Dr. Soerono, Prof. Sardjito dapat datang dari pedaleman di Jogjakarta untuk membitjarakan hal menjusun laboratorium, jang berutgas seperti Instituut Pasteur di Klaten.

Karena hal Perguruan Tinggi bersangkutan dengan Kementerian lain-lain, maka diadakan rapat dari sebuah Panitya Perguruan Tinggi pada tanggal 20 Mei 1949 dibangsal Kepatihan Jogjakarta, dipimpin oleh dokter Soetopo, jang dihadiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof Dr. Prijono, Prof. Dr. Sardjito, Prof. Ir. Wreksodhiningrat, Ir. Harjono, Sugardo, Wakil Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan Mr. Slamet Soetikno sebagai ahli keuangan.

Panitya dapat menetapkan berhubung akan dibentuknja Negara Federal Republik Indonesia, menjetudjui adanja Perguruan Tinggi Federal, asal tidak mengurangi hak Negara Bagian untuk menjelenggarakan Perguruan Tinggi sendiri. Dan sebagai konsekwensi dari kembalinja Republik jang mulai dengan sebesar daerah Jogjakarta, maka kita menjanggupi menjusun kembali Perguruan Tinggi, chususnja oleh Prof. Ir. Wreksodhiningrat, Prof. Dr. Prijono dan Ir. Harjono.

Prof. Dr. Sardjito djuga turut sanggup, tetapi dengan menindjau kembali kemungkinannja, karena Perguruan Tinggi jang dipimpinnja terletak diluar daerah Republik jang telah dikembalikan, dan jang masih ada peperangan. Dan seandainja dapat memindahnja, untuk pegawai - pegawai dan alat - alatnja harus ada tempatnja.

Prof. Dr. Sardjito kembali di Klaten membitjarakan kemungkinan-kemungkinan dengan dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa jang tempatnja berdekatan disitu, maka ditetapkan pemindahan ke Jogjakarta.

Dalam hal soal mendapat gedung-gedung maka atas kemurahan hati Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan kegiatan dokter Soetopo dapat lekas dikupas dan mulai diselesaikan.

Meskipun cease-fire-order belum diperintahkan, pekerdjaan pemindahan Perguruan Tinggi Klaten dimulai (perletakan sendjata 3 Agustus 1949 djam 20.00).

Persiapan dapat berdjalan baik, sehingga pada tanggal 1 Nopember 1949 Komplex Perguruan Tinggi di Kadipaten, jalah Fakultit Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi, Fakultit Pertanian, Fakultit Kedokteran Hewan dapat dibuka resmi, jang dihadiri djuga oleh Presiden Soekarno, sedang pembukaan Fakultit Technik, Akademi Ilmu Politik dan Fakultit - Fakultit dari Jajasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada djatuh pada tanggal 2 Nopember 1949.

Selandjutnja Sekolah Tinggi Hukum Negeri di Solo tersebut dalam sebuah Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Jogjakarta. Persiapannja ditugaskan

kepada Prof. Mr. Drs. Notonagoro, dan pembukaannja di Jogjakarta dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan pada tanggal 3 Desember 1949.

Diwaktu itu Fakultit-Fakultit masih dibawah Kementerian-Kementerian jang bersangkutan; melainkan Fakultit Hukum dan Fakultit Kesusasteraan jang masih ditangan Jajasan tersebut diatas. Tetapi untuk perkembangannja selandjutnja dirasa lebih baik, bila Fakultit-Fakultit Negeri dipusatkan pada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan Fakultit-Fakultit dari Jajasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada diserahkan kepada Pemerintah. Penjerahan ini dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 1949, dan Fakultitnja Hukum dipersatukan dengan Sekolah Tinggi Hukum Negeri.

Pada tanggal 19 Desember 1949 oleh Pemerintah R.I. didirikan Universitit Negeri Gadjah Mada Jogjakarta, gabungan atas Fakultit-Fakultit Sastera, Hukum, Technik, Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi, Pertanian dan Kedokteran Hewan.

Pada hari itu djuga ditetapkan adanja Senat Universitit Negeri Gadjah Mada tersebut dengan anggautanja: Prof. Ir. Wreksodhiningrat, Prof. Mr. Djokosoetono, Prof. Dr. Prijono, Prof. Mr. Soenarjo Kolopaking, Prof. Ir. Johannes, Prof. Mr. Pringgodigdo, Prof. Soetopo, Prof. Mr. Wirjonoprodjodikoro, Prof. Dr. Aboetari, Drs. Soeparwi, Ir. Harjono, Prof. Mr. Drs. Notonagoro (sekretaris), dan Prof. Dr. Sardjito (Ketua).

Susunan Dewan Kurator, jalah Sri Paku Alam (Ketua), Sutardjo Kartohadikoesoemo (Wakil Ketua), anggauta-anggautanja Dr. Kodijat, Ki Hadjar Dewantara, Prof. Ir. Wreksodhiningrat, Mr. Hadi, Ir. Goenoeng Iskandar, Notojoedo, Sekretaris Mr. Poesponagoro, dan sekarang ditambah Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Ketua Kehormatan), Mr. Poerwokoesoemo, Samadikun dan Moestadjab sebagai anggauta.

Riwajat tanah air kita berdjalan terus. Pada tanggal 27 Desember 1949 diserahkan oleh Republik Indonesia dan Negeri Belanda Kedaulatannja kepada Republik Indonesia Serikat.

Djalannja politik diwaktu itu jalah akan bangunnja negara kesatuan atas kemauan rakjat Indonesia dan prakteknja jalah bersatunja R.I.S. dan R.I.

Pemerintah R.I. di Jogjakarta dengan alat-alatnja akan mendjadi satu dengan Pemerintah R.I.S. dengan alat-alatnja, dan akan meninggalkan Jogjakarta.

Dalam keadaan jang sedemikian itu bagaimanakah nasib Universitit Negeri Gadjah Mada, apakah Universitit ini akan turut berpindah?

Sungguh diwaktu itu banjak suara-suara jang menghendaki pindahnja Universitit Negeri Gadjah Mada untuk mendjadi satu dengan Perguruan Tinggi R.I.S., karena kita belum mempunjai tjukup orang jang dapat memberi peladjaran di Perguruan Tinggi. Dari itu pendapatnja lebih baik adanja satu Perguruan Tinggi dengan tjukup guru-guru bangsa Indonesia jang berderadjat tinggi, dari pada dua Perguruan Tinggi jang deradjatnja rendah karena kekurangan guru. Apa lagi bila dilihat akan kedjadian kota Jogjakarta jang akan kehilangan Kementerian-Kementerian dan kantor-kantor pusat jang mempunjai peranan penting, maka dianggap bahwa Jogjakarta akan mendjadi kota ketjil, jang akan tidak dapat memberi bahan-bahan jang dibutuhkan Universitit untuk dapat ditimbang.

Tetapi pendirian Senat berlainan, dan pada tanggal 22 Mei 1950 atas nama Senat dalam suatu pertemuan dengan orang terkemuka dari masjarakat dimana hadir Acting Presiden R.I., dan Menteri-menteri, Prof. Dr. Sardjito dipertahankan, supaja Universitit Negeri Gadjah Mada tetap tinggal di Jogjakarta.

Pendapat ini disetudjui oleh Mr. Assaat Acting Presiden R. I. dan Menteri P.P. dan K., Ki Mangunsarkoro, jang mengadjukan hal ini didalam Kabinet Halim.

Untuk memperkuat kedudukan Universitit, maka diadjukan djuga dalam rapat Kabinet rentjana Peraturan Pemerintah tentang Universitit Negeri Gadjah Mada dengan tudjuan membentuk manusia susila jang tjakap, dan warga negara jang demokratis serta bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah air berdasar atas azas-azas Pantja Sila dan kenjataan. Rentjana ini disusun oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro dengan mengingat sepenuhnja resolusi-resolusi dan pembitjaraan-pembitjaraan pada Kongres Pendidikan di Surakarta, pembitjaraan-pembitjaraan mengenai chusus pendidikan dan pengadjaran tinggi Republik di Jogjakarta dan Djakarta, dan achirnja keputusan-keputusan pada konperensi antara Indonesia di Jogjakarta.

Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 dapat disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950, dan pada hari itu djuga Fakultit Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi dari Kementerian Kesehatan, Fakultit-Fakultit Pertanian dan Kedokteran Hewan dari Kementerian Pertanian diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan; ini suatu hal jang dulu oleh Mr. Ali Sastroamidjojo, sebagai Menteri P.P. dan K. senantiasa didesaknja.

Senat Universitit pada itu hari djuga diperkuat dengan pengangkatan beberapa guru besar dan guru besar luar biasa jalah Prof. Iso Reksohadiprodjo, Prof. Mr. Djojodigoeno, Prof. Drs. Radiopoetro, Prof. Drs. Soewarwi, Prof. Ir. Harjono Danoesastro, Prof. Drs. Sardjono, Prof. Ir. Soenarjo, Prof. Ir. Poerbodiningrat dan Prof. Dr. Heubült.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 datanglah saatnja terlahirnja kembali Negara Kesatuan R. I. dengan likuidasi dari Pemerintah R. I. di Jogjakarta dan pindahnja alat-alat Pemerintah ke Djakarta.

Perkembangan Universitit Negeri Gadjah Mada dari tanggal 1 Nopember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berdjalan baik, meskipun dengan banjak kesulitan, atas kegiatan Kementerian jang bersangkutan, istimewa dari Sekretaris Djenderal Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Mr. Hadi.

Selandjutnja perkembangan Universitit dapat dilihat dari bertambahnja djumlah mahasiswa jang mendaftarkan pada tanggal 1 Nopember 1949 ada 463,
pada penghabisan bulan Agustus 1950 ada 966,
pada penghabisan bulan Agustus 1951 ada 1765, sedang
pada penghabisan bulan Agustus 1952 ada 3439, dan dari
sebanjak itu mahasiswa jang baru ada 1812.

Dengan sendirinja semua alat-alat Universitit seperti gedung-gedung untuk kuliah-kuliah, kantor, laboratorium, perpustakaan, rumah-sakit-rumah-sakit, bengkel-bengkel, djuga isinja sebagai instrument-instrument seharusnja turut lekas bertambah; tetapi oleh beberapa hal gedung-gedungnja berbentuk sebagai bangunan darurat, sedangkan instrumentarianja masih belum mentjukupi.

Untuk memenuhi kebutuhan Universitit sebaik-baiknja, memang sedjak dulu waktu Pemerintah R.I. masih di Jogjakarta sudah ada desas-desus bahwa Negeri akan mendirikan gedung-gedung Universitit jang besar di Bulak Sumur djalan Pakem, tjukup untuk ± 10.000 mahasiswa.

Tjita-tjita ini mulai mempunjai bentuk jang njata pada Dies Natalis jang kesatu pada tanggal 19 Desember 1950, jang dikundjungi oleh Wakil Presiden R.I. Drs. Moh. Hatta. Diwaktu itu Wakil Presiden membitjarakan hal ini dengan Ketua Dewan Kurator dan Pengurus Senat. Hasil dari pembitjaraan jalah tertjantum dalam surat Wakil Presiden tgl. 30 Desember 1950, bahwa Universitit Negeri Gadjah Mada akan memperoleh uang Rp. 15.000.000,— dibagi dua tahun, untuk pembelian tanah dan persiapan.

Untuk keperluan tersebut atas kegiatan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Kementerian Keuangan, maka uang sebanjak 5.000.000,— rupiah dapat disediakan dalam anggaran belandja tahun 1951, dan pembelian tanah dapat didjalankan.

Atas kebidjaksanaan Panitya penaksiran harga tanah, jang terdiri dari:

K. R. T. Honggowongso dari Pemerintah Daerah sebagai Ketua.
Prof. Ir. Wreksodiningrat dari Universitit Negeri Gadjah Mada,
Mr. Imam Koes Soetikno dari Pengadilan Negeri.
K. R. T. Prawiraningrat dari Kabupaten Sleman,
K. R. T. Wirobumi dari Kantor Urusan tanah,
R. Soeroso dari Djawatan Gedung-gedung,
R. Prodjo Sindoro dari Kota Besar Jogjakarta,
Sadji Sastrosasmito dari Petani,
Soemarto dari B. T. I.,
Soedarmo dari B. T. I. I.,
K. R. T. Mertosono dari Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah,
sebagai Sekretaris K. R. T. Brotopratolo, pembelian tanah dapat berdjalan baik dengan damai. Ditentukan akan dibelinja 100 ha tanah, jang 85 ha sudah dapat dibeli dan jang 15 ha belum.

Sesudah ada ketentuan bahwa tanah akan dibeli, maka Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, bagian Djawatan Gedung-gedung dibawah Praktek Insinjur Soetardjo dan architectnja Praktek Insinjur Hadinagoro sibuk membuat gambar-gambar projek supaja pekerdjaan mendirikan gedung-gedung Universitit dapat lekas dimulai.

Maka pada tanggal 19 Desember 1951, hari Dies Natalis jang kedua perletakan batu pertama dari Gedung Universitit dapat dilangsungkan oleh Presiden R.I. Dr. Ir. Soekarno. Dan sekarang sudah terlihat kemadjuan pekerdjaan ini.

Kemudian pada permulaan tahun pengadjaran 1951/1952 jang lalu susunan Senat Universitit bertambah kuat djuga dengan diangkatnja beberapa guru besar dan guru besar luar biasa, jalah Prof. Mr. Moeljatno, Prof. Mr. Soekardono, Prof. Mr. Notosoesanto, Prof. Mr. Koesoemadi Poedjosewojo, Prof. Mr. Hardjono, Prof. Moh. Salim dan Prof. Soerojo. Tenaga Prof. Dr. Fokker sebagai guru besar istimewa luar biasa merupakan perbaikan pemeliharaan peladjaran.

Tentu sadja kita tidak hanja memikirkan kebutuhan Universitit untuk dapat mendjalankan tugas sebaik-baiknja, tetapi kebutuhan para mahasiswa djuga dapat perhatian sepenuhnja.

Sebagai tjontoh jalah hal perumahan dari mahasiswa, jang membandjiri kota Jogjakarta.

Mula-mula ditjari oleh para mahasiswa sendiri beberapa rumah, jang oleh Universitit disewa, diperlengkapi, dan seterusnja perongkosan untuk lampu, air dan pegawai dipikul oleh Universitit.

Djuga atas kegiatan Panitya Pengawas Asrama, jang diketuai oleh K.R.T. Notojudo, disiapkan dua buah gedung untuk asrama mahasiswa.

Disebut pula bantuan Persatuan Wanita Keluarga Universitit Gadjah Mada, jang a.l. dapat sekedar mengatasi soal kesukaran mentjari gedung asrama, dengan menitipkan para mahasiswa pada keluarga-keluarga, jang dapat menerimanja (inkwartieringen), dimana perongkosan meubel jang dibutuhkan, sewa kamar, lampu, air, pelajan dipikul oleh Universitit, sedang perongkosan makan dipikul oleh mahasiswa sendiri.

Pada saat ini ada 40 asrama dan inkwartiering jang memberikan tempat bagi 476 mahasiswa.

Djuga Kementerian Dalam Negeri mempunjai asrama sendiri untuk 92 mahasiswa ikatan dinasnja.

Djadi djumlah mahasiswa jang tertolong ada 568.

Bila kita mengingat banjaknja mahasiswa ada 3439, dan banjaknja jang akan datang, maka pertolongan jang didjalankan itu sungguh belum mentjukupi; maka dari itu soal perumahan untuk mahasiswa harus dikupas dengan djalan lain.

Atas andjuran dari Kadarisman, penasehat dari Jajasan Fonds Universitit Negeri Gadjah Mada, Pengurus Senat dan Senat mempeladjari soal ini, dan berpendapat bahwa Universitit Negeri Gadjah Mada akan turut membentuk suatu Jajasan, jang dapat bekerdja mendirikan asrama mahasiswa. Dan usaha ini dapat terlaksana. Jajasan bernama Guna Dharma didirikan pada tanggal 13 April 1952 oleh

1. Sri Sultan Hamengku Buwono IX,
2. K. R. T. Soetedjo Brodjonegoro atas nama Jajasan Pantja Sila.
3. Prof. Dr. M. Sardjito atas nama Fonds Universitit Negeri Gadjah Mada.
4. Dokter Sahir Nitihardjo atas nama Jajasan Asrama Peladjar.

Atas usaha Jajasan ini dengan pertolongan Kementerian - Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Keuangan, maka Jajasan dapat uang 10.000.000 rupiah untuk permulaan mendirikan asrama jang akan tjukup untuk 600 mahasiswa.

Pekerdjaan mendirikan asrama ini, berudjud prae-fabricated building, sudah mulai.

Karena gedung-gedung ini belum selesai, maka Panitya asrama dan Persatuan Wanita Keluarga Universitit Gadjah Mada masih terus bekerdja menjiapkan inkwartiering untuk mahasiswa jang akan datang dan membutuhkan pertolongan.

Baik ditjatat djuga usaha untuk memperbaiki pemeliharaan kepentingan para mahasiswa, jalah putusan sementara Senat Universitit tertanggal 16 April 1952 No. 891/Sn/1/52 guna membimbing lebih landjut pertumbuhan keluarga mahasiswa Universitit Negeri Gadjah Mada, dengan diberikannja dasar resmi dan kedudukan tertentu bagi badan pimpinannja. Sebagai ketentuan sementara Keluarga mahasiswa tersebut ditetapkan sebagai kesatuan seluruh masjarakat mahasiswa Universitit Negeri Gadjah Mada, dengan ketentuan untuk memperbaiki anggaran dasarnja, terutama kearah kesatuan jang sesempurna-sempurnanja, serta pula Dewan Mahasiswa ditetapkan sebagai perwakilan keluarga mahasiswa tersebut, jang dalam hal-hal jang tertentu mengenai kepentingan mahasiswa diminta pendapatnja oleh instansi-instansi Universitit, dan jang djuga atas kehendak sendiri atau atas permintaan instansi-instansi Universitit dapat mengadjukan pendapatnja tentang hal-hal lainnja.

Sekarang dari hal perkembangan dari Universitit, dari Fakultit-Fakultitnja dan bagian-bagiannja.

Pada tanggal 23 Djanuari 1951 dibukalah Fakultit Sastera, Pedagogik dan Filsafat, jang pada tanggal 1 Maret 1952 ditambah dengan peladjaran Baccalaureat Pendidikan Djasmani, dengan leburnja Akademi Pendidikan Djasmani dalam Universitit Negeri Gadjah Mada. Di Semarang dibentuk sebuah panitya dimana duduk:

Gubernur Boediono.
Kepala Divisi Djawa Tengah Kolonel Gatot Soebroto,
Wali Kota Mr. Koesoebijono Hadinoto,
Inspektur Kesehatan Dokter Soemadijono,
Kepala Rumah Sakit pusat Dokter Aboebakar dan
Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Dokter Soehardi.

Panitya ini bertugas menjiapkan gedung-gedung dan laboratorium untuk bagian atas dari bagian Farmasi dari Fakultit Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi. Pekerdjaan pembikinan ruangan kuliah, laboratorium, kamar obat, kantor dan gudang dengan isinja sudah hampir selesai, dan djuga guru-gurunja sudah siap, sedang pembukaannja tinggal menunggu saat jang baik sadja.

Fakultit Technik disamping bagiannja Sipil dapat menjelenggarakan bagiannja Kimia dan sekarang menjiapkan Baccalaureat Technologi. Fakultit Pertanian jang baru mempunjai djurusan Pertanian dapat ditambah dengan djurusan Kehutanan, jang sekarang dapat dimulai.

Fakultit Hukum, Sosial dan Politik djuga mengalami kemadjuan, dengan dibukanja Tjabang Bagian Hukum di Surabaja, dan ditambahnja dengan bagian Ekonomi, sehingga nama Fakultit mendjadi Fakultit Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik. Pembentukan djurusan Kehutanan dan Bagian Ekonomi tersebut djuga diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Kutipan dari laporan Sekretariat Fakultit Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik mengenai pembentukan Tjabang Bagian Hukum di Surabaja adalah sebagai berikut.

Dalam bulan September 1951 Jajasan Perguruan Tinggi Surabaja, jang dalam tahun 1950 telah mendirikan sebuah Perguruan Tinggi Ilmu Hukum di Surabaja, mohon idzin kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan untuk menggabungkan Perguruan Tinggi Ilmu Hukum itu dengan Universitit Negeri Gadjah Mada untuk dipertimbangkan.

Berhubung dengan itu atas nama Universitit Negeri Gadjah Mada oleh Fakultit Hukum, Sosial dan Politik didalam bulan Oktober dan Nopember 1951 diadakan perundingan dengan Pengurus Jajasan Perguruan Tinggi Surabaja.

Hasil jang ditjapai dalam perundingan-perundingan itu jalah bahwa didalam prinsip Universitit Negeri Gadjah Mada tidak berkeberatan mengoper Perguruan Tinggi Ilmu Hukum di Surabaja itu, dan Perguruan Tinggi Ilmu Hukum itu akan didjadikan tjabang bagian Hukum dari pada Fakultit Hukum, Sosial dan Politik Universitit Negeri Gadjah Mada. Selandjutnja harus diadakan persiapan lebih dahulu, berwudjud menjamakan susunan, asas dan sifat tjorak Perguruan Tinggi Ilmu Hukum itu dengan peraturan Fakultit Hukum, Sosial dan Politik di Jogjakarta. Untuk keperluan itu beberapa dosen Fakultit Hukum, Sosial dan Politik dari Jogjakarta akan membantu di Surabaja sebagai dosen luar biasa Perguruan Tinggi Ilmu Hukum itu.

Hasil perundingan itu kemudian disetudjui oleh Senat Universitit Negeri Gadjah Mada dan pada tanggal 18 Nopember 1951 djuga oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan (Mr. Wongsonagoro) dalam pertemuan Menteri itu di Jogjakarta dengan Senat Universitit Negeri Gadjah Mada.

Pada tanggal 17 Djanuari 1952 Pengurus Jajasan Perguruan Tinggi Surabaja dengan persetudjuan Dewan Pengawasnja menanda-tangani sebuah naskah kesediaan menjerahkan Perguruan Tinggi Ilmu Hukum di Surabaja kepada Pemerintah Republik Indonesia. Naskah itu, setelah disetudjui djuga oleh pihak Universitit Negeri Gadjah Mada disahkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan surat keputusan tertanggal 30 Djanuari 1952 No. 3400/Kab.

Berdasarkan atas surat keputusan itu sedjak bulan Pebruari 1952 beberapa dosen Fakultit Hukum, Sosial dan Politik Universitit Negeri Gadjah Mada oleh Pengurus Jajasan Perguruan Tinggi Surabaja diangkat sebagai dosen luar biasa pada Perguruan Tinggi Ilmu Hukum di Surabaja.

Para dosen itu kemudian sekali sebulan berganti-ganti pergi ke Surabaja untuk memberikan kuliah disana.

Atas pertimbangan bahwa karena Perguruan Tinggi Ilmu Hukum akan didjadikan tjabang Universitit Negeri Gadjah Mada dianggap perlu Dewan

Kurator Universitit Negeri Gadjah Mada ditambah dengan dua orang anggauta jang berkedudukan di Surabaja, maka dengan surat keputusannja tgl. 20 Maret 1952 No. 10475/BPT/A Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mengangkat Gubernur Djawa-Timur dan Wali Kota Surabaja sebagai anggauta Dewan Kurator Universitit Negeri Gadjah Mada, terhitung dari tanggal 1 Pebruari 1952.

Pada tanggal 31 Mei 1952 Gubernur Djawa-Timur dan Wali-Kota Surabaja itu diangkat oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan di Jogjakarta sebagai anggauta Dewan Kurator Universitit Negeri Gadjah Mada.

Dalam pada itu persiapan untuk penjerahan Perguruan Tinggi Ilmu Hukum di Surabaja kepada Pemerintah dikerdjakan terus, sehingga Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan pada tgl. 15 Djuli 1952 dengan surat keputusan No. 23121/Kab. dapat memutuskan, terhitung mulai tanggal 19 Djuli 1952, di Surabaja diadakan Tjabang Bagian Hukum dari pada Fakultit Hukum, Sosial dan Politik Universitit Negeri Gadjah Mada dengan untuk sementara, peladjaran tingkat propaedeuse dan tingkat kandidat.

Kemudian pada tanggal 19 Djuli 1952 di Surabaja diadakan upatjara penjerahan Perguruan Tinggi Ilmu Hukum kepada Pemerintah dan peresmian Tjabang bagian Hukum dari Fakultit Hukum, Sosial dan Politik Universitit Negeri Gadjah Mada itu.

Dengan peresmian ini maka untuk tahun peladjaran 1952/1953 jang dimulai tanggal 1 September 1952 segala sesuatu di Surabaja sudah berdjalan dalam suasana baru, jaitu Universitit Negeri Gadjah Mada.

Kuliah akan dimulai pada tanggal 22 bulan ini dan diadakan sebagian digedung jang disewa oleh Universitit Negeri Gadjah Mada, jaitu bekas gedung Komedi di Tegalsari dan sebagian digedung Bahari jang dipindjamkan oleh ALRI kepada Universitit Negeri Gadjah Mada.

Sekretariat Tjabang bagian Hukum itu ditempatkan diruangan jang oleh Universitit Negeri Gadjah Mada disewa dari perkumpulan Simpang Sociteit Surabaja.

Oleh pihak Kota-Besar Surabaja diberikan sebidang tanah di Karangmen-djangan luas ± 14 ha dengan tjuma-tjuma untuk mendirikan gedung tjabang bagian Hukum itu.

Mengenai perlengkapan alat-alat dari Universitit, antara lain bagi perpustakaan dan untuk Röntgenologi, disini diutarakan penerimaan sumbangan dengan terima kasih dari Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Usis, British Council dan dari Paberik Philips. Meskipun tidak begitu lantjar sebagaimana diharapkan, pembelian buku-buku dan alat-alat perlengkapan laboratorium terus diusahakan.

Dalam pembangunan Universitit terpeliharanja pekerdjaan tata usaha adalah sangat penting, dan dapat dikatakan dalam tahun pengadjaran jang baru lalu terlihat kemadjuannja, meskipun banjak hal jang masih perlu diperbaiki.

Keadaan para pegawai jang berdjumlah ± seribu orang, diusahakan perbaikannja, dan djumlah mereka jang berkedudukan pegawai tetap bertambah, sedangkan bagi lain-lainnja jang telah memenuhi sjarat-sjaratnja didjalankan penjelesaiannja.

Sebagai usaha dari para pegawai sendiri dapat disebutkan diperkuatkannja pertalian kekeluargaan, telah diadakannja koperasi dan fonds kematian.

Sedang Universitit berkembang dalam sifat raga atau badannja, maka kita djuga mentjari-tjari djalan supaja djiwanja turut bertumbuh, jang ditudjukan kearah dua djurusan.

Jang pertama :

Jalah bahan keilmuan dari para guru supaja mendalam dan dapat mendjadi dasar jang kuat.

Didalam hal ini kita menginsjafi kekurangan kita jang disebabkan oleh beberapa tahun blokade dari Belanda, sehingga kita tidak dapat mengetahui kemadjuan ilmu pengetahuan didunia luar.

Untuk mengikuti dan mengedjar ilmu pengetahuan jang technis tidak mudah dikerdjakan tjuma dengan membatja sadja. Dari itu kita mempunjai rentjana supaja para dosen dapat kesempatan melihat, mendengar sendiri dan berkontak dengan orang-orang jang ternama diluar negeri.

Dengan djalan ini, jang disetudjui oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan kita dapat mengirimkan beberapa dosen, dan djuga mahasiswa-mahasiswa. Didalam hal ini tidak dilupakan tawaran dan pertolongan dari luar negeri seperti dari Inggeris, Amerika, Djerman, Swedia, India, Australia, dan lain-lainnja.

Untuk djelasnja dibawah ini dikutip laporan dari dokter Soemardi jang untuk 3 bulan dikirim keluar negeri, seperti berikut:

Apa jang saja dapat pada kedua-dua kongres internasional itu banjak sekali dan tak dapatlah saja menguraikan hasil-hasil jang saja pungut dari kongres itu, dalam rangka laporan ini. Tjukuplah kiranja saja katakan, bahwa saja dapat beladjar banjak sekali dari kedua-dua kongres itu. Saja kira, setahun pembatja literatur dalam vak saja tak dapat menggambarkan sebegitu djelas bagi saja kemadjuan-kemadjuan, jang terdapat pada lapangan kedokteran gigi, dari pada melihat apa jang dipertundjukkan pada kongres itu, serta mendengarkan uraian-uraian pada sidang-sidang jang diadakan selama kongres itu.

Sebaliknja kedatangan sardjana-sardjana dari luar negeri, sepertinja Prof. Romein, Prof. Hill dan Prof. Dr. Krishnan memberi injectie djuga kepada kita, para guru dan mahasiswa. Lebih-lebih Universitit Negeri Gadjah Mada sudah menjiapkan diri untuk mendjalankan joint research dengan Universitit Havard dilapangan anthropologi disekitar Wonosobo, jang dibulan muka akan dimulai. Dan dengan sendirinja didalam hal ini kita, guru-guru dan mahasiswa-mahasiswa jang bersangkutan, harus bekerdja sekuat-kuatnja untuk dapat mengikuti, menjamai nilai sepak terdjang didalam lapangan keilmuan dari tamu-tamu jang akan datang dari Amerika.

Jang kedua:

Menurut Statut Universitit tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950, maka Universitit Negeri Gadjah Mada tidak sadja berdasar atas kenjataan, tetapi djuga atas Pantja Sila.

Disini Universitit tidak sadja mengabdi kepada kenjataan, tetapi djuga buahnja Universitit disadjikan kepada kesedjahteraan nusa dan bangsa, dan djuga untuk perikemanusiaan dan menebalkan perasaan ke-Tuhanan.

Perkembangan Universitit jalah perkembangan ilmu pengetahuan:

a. jang berdasar atas ilmu pengetahuan exact, dan
b. ilmu jang berdasar atas kerochanian dan kemasjarakatan.

Kenjataan atau kebenaran hal materi, dari hal gaja dan tenaga alam, dimicri dan macrocosmos, didekati dan diselidiki dengan ilmu pengetahuan exact. Sebaiknja kenjataan atau kebenaran dari hal sesuatu kedjadian dimasjarakat ketjil atau masjarakat besar harus kita selidiki dengan alat-alat sebagai fikiran jang tadjam, jang sudah dilatih dalam keilmuan jang berdasar perasaan. Didalam Universitit Negeri Gadjah Mada, dimana kedua djenis pengetahuan tidak sadja harus diperkembangkan tetapi djuga harus dapat dikombinasi satu sama lain dan harus dapat dikordinasi sebaik-baiknja, supaja buahnja dapat disumbangkan tidak sadja untuk nusa dan bangsa, tetapi djuga untuk perikemanusiaan.

Untuk dapat mengkordinasi dan mengombinasi pendapat-pendapat dari penjelidik-penjelidik harus ada suasana kekeluargaan, dan understanding sebaik-baiknja, ada tudjuan sama jalah mengisi Pantja Sila, antara kita semua.

Penjelidik-penjelidik djanganlah menjendiri. Sebaiknja dengan mengadakan kontak satu sama jang lain, jang juris dengan jang dokter, jang insinjur dan jang lain-lain, bersama mentjari djalan bagaimana kita dapat mengisi Pantja Sila dengan keilmuan kita.

Bila kita teliti kedua djurusan perkembangan djiwa dari Universitit Negeri Gadjah Mada jang diharapkan diatas tadi, maka tampaklah djurusan jang kesatu, untuk memperdalam keilmuan itulah jang mudah didjalankan. Sebaliknja tudjuan jang kedua, untuk mengisi Pantja Sila, jalah jang sulit.

Meskipun demikian kita harus djangan putus asa, karena djiwa dari Universitit Negeri Gadjah Mada jang besar dan luhur sungguh diharap-harapkan jang akan sesuai dengan gedung Universitit jang sangat besar, jang sudah diuraikan diatas.

Universitit Negeri Gadjah Mada berusaha mentjari kontak dengan masjarakat dengan memberi tjeramah satu kali sebulan dan beberapa kali dalam pekan malaman.

Untuk mendengar suatu tjeramah datanglah orang-orang jang berdujun-dujun, sebaliknja tjeramah jang lain tidak mendapat sebegitu besar perhatian. Mengenai suatu soal, jang mendjadi perhatian dalam masjarakat, jalah bahasa Belanda, Universitit Negeri Gadjah Mada mengadjukan pendapatnja kepada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, jang sesuai dengan ketentuan dalam Statut Universitit, bahwa bahasa pengantar pada Universitit Negeri Gadjah Mada adalah bahasa nasional kita.

Beberapa pihak menjatakan bahwa peladjaran bahasa Belanda di S.M.A. harus dianggap perlu sekali, terutama untuk kepentingan peladjaran pada perguruan tinggi, karena buku-buku peladjaran dan sumber-sumber untuk memperdalam pengetahuan buat Fakultit-fakultit tertentu (kebanjakan) tertulis dalam bahasa Belanda, lagi pula masih banjak dosen-dosen Belanda, jang sekarang tidak sanggup memberi kuliah dalam bahasa Indonesia. Universitit Negeri Gadjah Mada berpendapat, bahwa ditindjau dari segala sudut lebih baik usahanja ditudjukan dengan langsung akan menghilangkan sumber kesulitannja, jalah menjelesaikan likwidasi bahasa Belanda di Indonesia, dari pada memberikan kembali kedudukan resmi kepada bahasa tersebut, jang bagaimanapun djuga sekurang-kurangnja akan memperlambat perkembangan nasional, chususnja perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan.

Usaha jang demikian itu memang mungkin, seperti telah dilakukan pada Universitit Negeri Gadjah Mada seberapa dapat mengganti buku-buku peladjaran dalam bahasa Belanda dengan misalnja buku-buku dalam bahasa Inggeris dll. jang dapat dipahami oleh para mahasiswa, kalau penggantian itu tidak mungkin dapat diadakan asistensi oleh asisten-asisten jang menjalin buku-buku dalam bahasa Belanda itu setjara langsung dalam bahasa Indonesia dengan lisan. Kuliah-kuliah jang belum dapat diberikan dalam bahasa Indonesia, dapat diberikan dalam misalnja bahasa Inggeris.

Terdjemahan dalam bahasa Indonesia baik mengenai buku-buku peladjaran maupun sumber-sumber ilmu pengetahuan jang tertentu dalam bahasa Belanda diperhatikan dan dikerdjakan benar-benar.

Dapat diusahakan pula terdjemahan dalam bahasa Inggeris oleh tenaga-tenaga Belanda, suatu hal jang nampaknja telah djuga mendjadi minat orang dinegeri Belanda.

Bahasa Belanda sebenarnja bukan hanja soal perguruan tinggi, tetapi djuga soal masjarakat seluruhnja, maka djuga peraturan-peraturan jang diperlukan bagi pemerintah, Negara dan hidup masjarakat baiklah diselenggarakan terdjemahannja.

Lain dari itu dimasukkannja bahasa Belanda, meskipun hanja fakultatif, dalam peladjaran S.M.A. akan memberatkan jang tidak sebanding dengan manfaatnja.

Lebih baik misalnja peladjaran dalam bahasa Inggeris, Djerman dan Perantjis pada S.M.A. diperbaiki.

Selandjutnja bagi mahasiswa-mahasiswa jang betul-betul harus memahami bahasa Belanda untuk pembentukan tenaga kader ilmu pengetahuan dan lain-lain pekerdjaan, diadakan kesempatan untuk mempeladjarinja, kalau perlu djuga dengan mengirimkan mereka ke Negeri Belanda.

Dengan demikian menurut pendapat Universitit Negeri Gadjah Mada kesulitan sekitar bahasa Belanda dapat diatasi dengan effisien, jang tidak merugikan kepada perkembangan nasional.

Kemudian dapat diberi tahukan, bahwa sekarang Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan telah diputuskan, untuk memperbaiki pengetahuan para mahasiswa dalam bahasa Inggeris dengan diadakan kewadjiban mengikuti kursus bahasa Inggeris untuk mengurangkan kesulitan dalam mengikuti kuliah-kuliah dan mempeladjari buku-buku dalam bahasa itu. Djuga diusahakan memberi peladjaran bahasa Indonesia kepada dosen-dosen bangsa asing.

Meskipun gambaran jang diberikan dari hal-ichwal Universitit Negeri Gadjah Mada sampai saat ini belum dapat dibilang lengkap dan komplit, tapi kiranja tjukup djelas untuk para pembatja.

No.	Dari Fakultit	Untuk	Banjak Mahasiswa	Lulus	Presentage
1.	Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi.	Propaedeuse	19	7	36, %
		Kandidat	2	0	0, %
		Doktoral	7	5	70, %
2.	Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik.	Propaedeuse	174	137	70, %
		Kandidat/ Baccalaureat	34	28	80, %
		Doktoral	6	4	66,6%
3.	Technik.	Propaedeuse	312	56	17, %
		Kandidat	73	21	28,7%
		Doktoral	37	21	56,7%
4.	Sastra, Pedagogik dan Filsafat.	Propaedeuse	19	16	84,2%
5.	Pertanian.	Propaedeuse	9	1	11, %
		Baccalaureat	15	15	100, %
6.	Kedokteran Hewan	Propaedeuse	1	0	0, %
		Baccalaureat	2	1	50, %

Kepada semua Mahasiswa dalam
Republik Indonesia.-

Saja sambut lahirnja P.O.M. dengan kegembiraan, dan keaktipannja dalam usianja jang muda itu memberi harapan jang baik buat masa datang.

Saja selalu setudju benar kepada keolahragaän. Keolahragaän berarti satu sumbangan penting kepada pembangunan djasmani bangsa, dan pula kepada pembangunan mental dan moril.

„Mahasiswa" bagi saja berarti: tiang hari-kemudian, pendjamin hari-kemudian. Mahasiswa jang djasmaninja kuat, jang mental dan moril sehat, membuatlah hari-kemudian bangsa mendjadi satu kepastian jang telah dapat diraba diwaktu sekarang.

Soekarno.—
Presiden

Djokjakarta 19/12 '51

B. PERKEMBANGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SEDJAK dulu kala bangsa Indonesia, terutama ummat Islam berhasrat sekali untuk menambah pengetahuannja tentang agama Islam, hingga para pemuda kita, meninggalkan tanah airnja merantau keluar negeri guna menambah pengetahuannja tentang agama Islam itu. Mula-mula terutama di Mekka, tetapi lambat-laun djuga ke negeri-negeri Islam lain-lainnja sebagai ke Mesir, Turki, Pakistan dan sebagainja. Hasrat dari ummat Islam untuk memiliki sendiri suatu perguruan tinggi besar sekali, sehingga tidak sedikit di Indonesia ini berdiri berbagai-bagai usaha untuk mempertinggi mutu pendidikan dan peladjaran tentang agama Islam.

Pada waktu-waktu jang lampau perguruan agama Islam hanja terdapat di pondok-pondok, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah jang tidak dapat berkembang oleh karena pemerintah djadjahan pada waktu itu sama sekali tidak memperhatikan keadaan pondok-pondok, pesantren dan sebagainja, bahkan menekan dan memusuhinja, sebagai ternjata dengan ordonansi sekolah liar dan sebagainja.

Setelah Pemerintah Hindia Belanda djatuh, maka hasrat untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam begitu kuat, hingga terdjelmalah Sekolah Tinggi Islam di Djakarta jang mula-mula diselenggarakan oleh Bung Hatta dibantu oleh antara lain Mr. Soewandi, Drs. Ramli, Faried Ma'ruf, K.H. Mansur, K.H. Abd. Kahar Muzakkir dan K.H. Fatchurrachman Kafrawi.

Sedjak proklamasi, Sekolah Tinggi Islam itu dipindah dari Djakarta ke Jogjakarta, jang kemudian mendjadi Universitit Islam Indonesia jang mempunjai 4 Fakultit ja'ni Hukum, Ekonomi, Pendidikan dan Agama.

Oleh karena makin hari makin sukar keadaan Universitit Islam Indonesia itu, sedang Pemerintah membutuhkan sekali akan tenaga-tenaga ahli Agama, untuk djabatan-djabatan sebagai Hakim-Hakim Agama, Guru Agama, Kepala-kepala Djawatan Agama (Urusan Agama). Pendidikan Agama, Penerangan Agama, Kepala-kepala Kantor Agama di Propinsi, Kabupaten dan sebagainja, maka Pemerintah dengan mengingat kepentingan itu, mengoper Fakultit Agama dari Universitit Islam Indonesia.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1950 jang ditanda tangani oleh Pemangku Djabatan Presiden Republik Indonesia Mr. Assaat, Fakultit Agama dari Universitit Islam Indonesia dioper oleh Pemerintah. Dalam konsiderans serta pendjelasan dari peraturan tersebut dinjatakan, bahwa Pemerintah tidak membeda-bedakan antara agama satu dan lainnja, tetapi jang dirasakan sangat mendesak, ialah kekurangan tenaga dalam ilmu keagamaan Islam. Berhubung dengan itu Pemerintah mengambil keputusan mengoper Fakultit Agama dari Universitit Islam Indonesia.

Dalam pasal-pasal peraturan Pemerintah tersebut diatas, ditegaskan tentang tudjuan dari pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri ja'ni: **memberi pengadjaran tinggi dan mendjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalamkan ilmu pengetahuan tentang agama Islam.**

Adapun penjelenggaraan dan penetapan hari pembukaan Perguruan Tinggi Agama Islam diserahkan pada Menteri Agama.

Berhubung dengan itu, maka Menteri Agama R.I. (sebagai negara bagian) membentuk suatu panitya persiapan jang terdiri atas: K.H. Fatchurrachman Kafrawi sebagai Ketua, Prof. Drs. Abd. Sigit sebagai Wakil Ketua, sedang anggauta-anggautanja ialah Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo, Prof. Mr. Notosusanto, Ustaz Abdulkahar Muzakkir, Faried Ma'ruf, K. H. Abdullah Effendi, Sulaiman serta Mr. Roesbandi.

Waktu terbentuknja Negara Kesatuan, maka diadakan persetudjuan antara Menteri Agama R.I. (sebagai negara bagian) serta Menteri Agama R.I.S., bahwa

segala usaha-usaha dari Kementerian Agama R.I. jang telah didjalankan, atau jang akan didjalankan, akan diteruskan oleh Menteri Agama Negara Kesatuan (setelah Agustus 1950).

Berhubung dengan itu maka panitya persiapan bekerdja terus, hingga pada bulan Nopember 1950 panitya persiapan telah dapat menjusun:

I. Peraturan tentang Perguruan Tinggi Agama Islam.

II. Susunan para dosen pada P.T.A.I.N.

III. Susunan Dewan Kurator.

Karena Perguruan Tinggi Agama Islam itu menurut Peraturan Pemerintah No. 34/1950 pasal 3 harus pula mendapat persetudjuan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, maka setelah diadakan tukar pikiran dengan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, diputuskan, bahwa rentjana peraturan dari panitya persiapan itu ditindjau kembali oleh suatu panitya ketjil jang terdiri atas:

1. K. H. Fakih Usman, Kepala Djawatan Pendidikan Agama sebagai Ketua.
2. Prof. Mr. Drs. Notonagoro : anggauta.
3. Prof. Drs. Abd. Sigit : „
4. Mr. Soenarjo : „

Panitya ketjil itu telah menindjau kembali rentjana peraturan P.T.A.I.N. serta telah menghasilkan sebuah rentjana peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan jang mendjelma mendjadi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri P.P. & K. tgl. 21-10-1951 No. K/1/14641 th. 1951 Agama dan 28665/Kab. th. 1951 Pendidikan.

Adapun jang dapat didaftar sebagai mahasiswa pada Fakultit Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri ialah sedjumlah 67 orang, sedang jang dapat diterima disekolah Persiapan sedjumlah 28 orang.

Pada tanggal 26 September 1951 „Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri", jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah tgl. 14 Agustus 1950 No. 34/1950 disertai dengan aturan penglaksanaan ja'ni peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tgl. 21-10-1951 No. K/I/14641 th. 1951 Agama dan 28661/Kab. th. 1951 Pendidikan, dibuka.

Tiap-tiap barang baru mengalami kesulitan-kesulitan, begitu pula „Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri" tidak lepas dari kesulitan-kesulitan itu. Tetapi kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh „Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri" agak istimewa, jang tidak dialami oleh Perguruan-Perguruan Tinggi lain-lainnja.

Pertama-tama tentang penerimaan mahasiswa.

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri menurut pasal 13 peraturan bersama tersebut diatas harus menerima mahasiswa, jang beridjazah dari Sekolah Umum (S.M.A. Negeri, Sekolah Vak Menengah bagian Atas) serta beridjazah Madrasah Menengah Tinggi, setelah menempuh udjian dalam semua mata peladjaran jang termasuk udjian penghabisan Sekolah Menengah Atas Negeri djurusan Sastra.

Dua matjam mahasiswa ini, menimbulkan kesukaran-kesukaran jang tidak sedikit.

Jang beridjazah Sekolah Umum, kurang, hampir-hampir tidak ada pengetahuan agamanja, sedang alat-alat untuk memperoleh pengetahuan agama Islam pun, ja'ni pengetahuan tentang bahasa Arab, tidak ada pula.

Untuk mengatasi kesukaran-kesukaran ini terpaksa diadakan dua matjam kuliah bahasa Arab, satu chusus bagi mahasiswa-mahasiswa jang beridjazah Sekolah Umum dan jang lain bagi mahasiswa-mahasiswa beridjazah Madrasah Menengah Tinggi, jang telah mempunjai pengetahuan tentang bahasa Arab agak lumajan.

Sebaliknja bagi mahasiswa-mahasiswa tamatan dari Madrasah Menengah Tinggi untuk memperlengkapi pendidikan pendahuluannja (vooropleiding), perlu diadakan pengadjaran-pengadjaran dalam mata-mata peladjaran testimonium.

Mata-peladjaran-mata-peladjaran testimonium bagi udjian propaedeuse adalah mata-peladjaran-mata-peladjaran Azas-azas Hukum Tata Negara Indonesia serta Sedjarah Kebudajaan Umum. Mata peladjaran testimonium tadi tidak sadja penting bagi mahasiswa-mahasiswa tamatan dari Madrasah Menengah Tinggi, tetapi pun penting djuga bagi mahasiswa-mahasiswa tamatan Sekolah Menengah Vak bagian Atas, atau Sekolah Menengah bagian Atas djurusan B.

Selandjutnja bagi pemuda-pemuda tamatan dari Madrasah Menengah Tinggi, jang mempunjai hasrat jang kuat untuk melandjutkan peladjaran agama di „Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri", disediakan Sekolah Persiapan jang sekarang dipimpin oleh R. M. Hertog Djojonegoro.

Sesaat sebelum pembukaan, persiapan-persiapan untuk mendjalankan „Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri" dengan segala daja upaja diselenggarakan. Persiapan-persiapan tersebut meliputi adanja gedung, peralatan kantor dan sekolah, Dewan Kurator, dosen-dosen, mahasiswa dan siswanja, Sekretariat dan lain-lain kebutuhannja.

Pada waktu itu hingga sekarang djuga terpaksalah „Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri memakai gedung jang sesungguhnja semula direntjanakan untuk keperluan Sekolah Guru dan Hakim Agama Negeri. Maka sebagai kenjataan, keadaan gedung tersebut tidak sesuai dengan kebutuhannja. Lebih-lebih dengan kemadjuannja Fakultit, keadaan tersebut akan tidak sedikit mendjadi rintangan untuk kelantjarannja. Telah didaja-upajakan untuk mendapat persetudjuan dari Kementerian-Kementerian jang bersangkutan (ialah Kementerian-Kementerian Agama, Keuangan dan Pekerdjaan Umum) tentang pembuatan perluasan Gedung jang chusus untuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan sesuai dengan kebutuhannja. Mudah-mudahan kebutuhan jang urgent ini dapat dimengerti oleh segenap pihak jang bersangkutan hingga dalam waktu jang sesingkat-singkatnja kebutuhan dalam hal ini dapat dilaksanakan.

Ketjuali dari itu, sesuai dengan dasar dan tudjuan Perguruan Tinggi tsb., sangat dibutuhkan adanja asrama bagi para mahasiswa serta siswa dari Sekolah Persiapannja, padahal tempat untuk asrama pun sampai sekarang belum dapat diadakan.

Keadaan mengenai kedua kebutuhan jang penting itu dapat menimbulkan kechawatiran jang mungkin mendjadi rintangan besar bagi perkembangannja perguruan, djika tidak dapat diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Kemudian pada saat Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dibuka, dapat dikatakan, bahwa persiapan-persiapan untuk mendjalankannja telah dapat disediakan, meskipun ada diantaranja jang belum lengkap atau belum sempurna sama sekali. Tetapi hal ini tentunja dapat dimengerti, djika diingat, bahwa „Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri" adalah suatu usaha baru.

Kesukaran-kesukaran jang dialami oleh „Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri" jang kedua ialah, berhubung „Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri" mempunjai dua Menteri, ja'ni Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Sebagai lazimnja, apabila suatu barang itu diatur oleh dua instansi itu, akibatnja malah tidak melantjarkan urusan-urusannja. Kadang-kadang usul telah disetudjui oleh salah satu, tetapi belum disetudjui oleh jang lain hingga urusannja terhenti. Kadang-kadang saling tunggu menunggu hingga urusannja pun terhenti pula.

Dosen-dosen jang ada pada waktu ini ialah :

a. Mr. R. Soenarjo — jang mendapat tugas untuk memberi kuliah dalam m.p. Azas-azas Hukum Tata Negara, 2 djam tiap minggunja.

b. Much. Jahja — jang mendapat tugas memberi kuliah dalam m.p. Tafsir dan Hadits, 6 djam seminggu.

c. Thohir Abdul Muin — jang mendapat tugas memberi kuliah dalam Ilmu Kalam, 2 djam seminggu.

d. H. Djojonegoro — jang mendapat tugas memberi kuliah dalam m.p. Sedjarah Kebudajaan dan Sedjarah Umum, 2 djam seminggu.

e. H. Anwar Musaddad — jang mendapat tugas memberi kuliah dalam m.p. Bah. Arab, untuk mahasiswa-mahasiswa asal dari Madrasah Menengah Atas, 5 djam seminggu.

f. K. H. R. Moh. Adnan — jang ditugaskan memberi kuliah dalam Feqih dan Usul Feqih, 3 djam seminggu.

Kemudian menjusullah pengangkatan-pengangkatan:

g. K. H. Faried Ma'ruf — sebagai lektor luar biasa, memberi kuliah dalam m.p. Bah. Arab, untuk mahasiswa asal dari Sekolah-sekolah Menengah Atas Negeri atau partikelir jang sederadjat, 4 djam seminggu.

h. Prof. Dr. Tjan Tju Siem — sebagai guru besar luar biasa, memberi kuliah „Islamic Institutions" 1 djam seminggunja.

Baiklah diterangkan, bahwa K.H.R. Moh. Adnan ditetapkan pula sebagai Ketua Fakultit, dan Mr. Soenarjo disamping tugasnja diatas ditetapkan sebagai Sekretaris Fakultit.

Dengan demikian, tenaga-tenaga dosen untuk tingkat propaedeuse boleh dikatakan telah mentjukupi.

Mengenai tambahan tenaga-tenaga dosen untuk th. pengadjaran jang akan datang sedang dalam pertimbangan Fakultit, jang akan segera diadjukan kepada Dewan Kurator untuk mendapat pertimbangannja.

Dapat ditambahkan disini, bahwa Fakultit rata-rata dua kali sebulannja mengadakan sidang, untuk membitjarakan hal-hal jang bersangkutan dengan djalannja „Perguruan Tinggi Islam Negeri". Sehari-harinja, keperluan-keperluan insidentil dan rentjana-rentjana ditudjukan kepada perkembangan perguruan.

Kesukaran-kesukaran jang dihadapi oleh „Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri" jang ketiga ialah sebagai djuga dialami oleh Perguruan-Perguruan Tinggi lain-lainnja. Kekurangan tenaga-tenaga dosen jang tjakap serta kurangnja kitab-kitab dalam bahasa Indonesia jang mengenai ilmu keagamaan Islam.

Kitab-kitab tentang ilmu keagamaan Islam jang mendalam hanja terdapat dalam bahasa asing, sehingga untuk menolong para mahasiswa perlu diadakan asistensi tidak sadja mengenai ilmu-ilmu agama Islam pula mengenai bahasa-bahasa asing terutama bahasa Arab dan bahasa Inggeris.

Untuk mendapatkan tenaga-tenaga dosen bagi ilmu agama Islam perlu diusahakan diluar negeri, terutama dinegara-negara Islam jang telah mempunjai Perguruan-perguruan Tinggi Islam jang kenamaan.

Mengenai soal ini telah diusahakan kepihak atasan, untuk mendapatkan persetudjuan.

Inilah kesukaran-kesukaran jang selama satu tahun jang lampau itu dialami oleh „Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri" jang alhamdulilah dapat diatasi dengan sebaik-baiknja.

Mengenai soal pengadjaran dapat dilaporkan sebagai berikut:

Jang mendaftarkan sebagai mahasiswa biasa, tamatan dari S.M.A. Negeri ialah 13 orang mahasiswa laki-laki, tamat dari Sekolah Vak Menengah bagian Atas setelah menempuh udjian dalam mata peladjaran-mata peladjaran pengetahuan umum, tatanegara, ekonomi dan bahasa Inggeris, terdapat 2 orang.

Tamatan dari Pendahuluan U.I.I. tahun peladjaran 1950/1951 terdapat 12 orang mahasiswa setelah menempuh udjian dalam semua mata peladjaran jang termasuk udjian penghabisan Sekolah bagian Atas Negeri djurusan Sastera, antara lain 10 laki-laki dan 2 puteri.

Udjian masuk Fakultit Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri diadakan dalam bulan Agustus dan September 1951 dan diselenggarakan oleh Panitya udjian masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri jang diangkat oleh Menteri Agama dengan keputusannja tertanggal 23 Oktober 1951 No. K/I/ 14746, dan terdiri dari:

1.	Hertog Djojonegoro	—	Ketua Panitya
2.	K. H. A. Musaddad	—	Sekretaris
3.	Abdul Quddus	—	Anggauta
4.	Prof Mr. Notosusanto	—	„
5.	A. Timur Djaelani	—	„
6.	Iman Suparto	—	„
7.	Malikus Suparto	—	„
8.	Iman Sudijat	—	„
9.	H. Zubair	—	„
10.	Moetono	—	„
11.	Sastrosoedjono	—	„
12.	Soemarno	—	„

Panitya udjian masuk tadi telah mengudji 47 orang pemuda, jang lulus ada 18 orang pemuda, ja'ni 12 orang laki-laki dan 6 orang puteri.

Selain dari mahasiswa ini, maka Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri harus pula menampung 20 mahasiswa dari U.I.I., Fakultit Agama jang menurut perdjandjian harus diambil over dari Universitit tersebut. Djadi djumlah mahasiswa adalah 51 orang; jang mendapat tundjangan ikatan dinas 42 mahasiswa.

Sekolah Persiapan mempunjai 27 orang peladjar, antara lain 21 orang peladjar laki-laki dan 6 orang peladjar puteri.

Mereka itu kesemuanja tamatan dari Madrasah Menengah Tinggi setelah menempuh udjian dalam semua mata peladjaran termasuk mata peladjaran-mata peladjaran jang diberikan pada penghabisan kl. II dari S.M.A. bagian A.

Dari 27 orang siswa terbagi antara 21 laki-laki dan 6 puteri jang mendapat beasiswa ada 18 orang, antara lain 13 orang laki-laki dan 5 orang puteri.

Udjian itu didjalankan pula oleh panitya tersebut diatas.

Pada penghabisan tahun peladjaran 1951/1952 dari 51 mahasiswa jang telah mendapat testimonium dalam mata peladjaran Azas Hukum Tatanegara ada 31 orang, diantara 25 laki-laki dan 6 orang puteri, serta jang harus mengulangi hingga dua kali 7 orang.

Jang mendapat testimonium dalam mata peladjaran Sedjarah Kebudajaan umum ialah 31 orang diantaranja 25 laki-laki dan 6 orang puteri, serta jang harus mengulangi hingga dua kali 8 orang. Dari siswa-siswa Sekolah Persiapan jang telah lulus dalam udjian penghabisan ialah 11 orang antara lain 10 laki-laki dan 1 puteri.

Dalam bulan Agustus jang lalu ini telah djuga diadakan udjian masuk Fakultit, udjian mana ditempuh oleh 77 pemuda ja'ni 21 orang tamatan dari Madrasah Menengah (atas) Tinggi, 8 orang dari Sekolah Vak Menengah bagian Atas dan 48 orang dari S. M. A. partikelir.

Adapun jang lulus 19 orang.

Jang masuk Fakultit Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri tamatan dari S.M.A. Negeri berdjumlah 17 orang, hingga djumlah mahasiswa baru adalah 36 orang.

Jang menempuh udjian-masuk Sekolah Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri ialah 28 orang, jang lulus 12 orang pemuda. Jang tidak lulus dalam udjian penghabisan Sekolah Persiapan 9 orang.

Oleh karena masih ada beberapa pemuda dari luar Djawa jang telah mendaftarkan diri dan telah pula mendapat panggilan untuk menempuh udjian masuk Sekolah Persiapan, tetapi berhubung kapal agak terlambat datangnja, diadakan lagi udjian masuk Sekolah Persiapan pada tanggal 3, 4, dan 5 September 1952.

Menurut pasal 7 ajat 1, 2, 5, 6 peraturan bersama Menteri P.P.K. dan Menteri Agama tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Jogjakarta tersebut diatas, diadakan kesempatan untuk mengikuti kuliah-kuliah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagai mustamek (pendengar). Kesempatan ini pada tahun pengadjaran 1952/1953 akan dipergunakan oleh 3 orang, jang dengan djalan demikian ingin menambah pengetahuannja dalam ilmu-ilmu tentang agama Islam.

Sekian tentang mahasiswa dan siswa dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

Mengenai hubungan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dengan pihak luaran dapat diterangkan sebagai berikut:

Hubungan dengan Perguruan Tinggi lain-lainnja adalah memuaskan terutama dengan Universitit Negeri Gadjah Mada jang sebagai Perguruan Tinggi jang lebih tua suka memberi bantuan petundjuk dimana diperlukan. Begitu pula dengan Universitit Islam Indonesia ada hubungan jang rapat sekali, tukar menukar antara para dosen telah dikerdjakan.

Perlu pula diterangkan disini hubungan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dengan Balai Pergururan Tinggi Indonesia (Universitet Indonesia) Djakarta jang telah menolong Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dengan seorang guru besar luar biasa ja'ni Prof. Dr. Tjan Tjoe Siem.

Pada pembukaan Fakultit Hukum Surabaja, Ketua Fakultit Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, dapat pula menghadiri pembukaan itu sebagai wakil dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

Kini sedang ditjari hubungan dengan Sekolah Tinggi Theologie serta Sekolah Tinggi Theologie Roma Katholik jang ada persamaan lapangan pekerdjaan.

Perlu pula diketengahkan disini hubungan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dengan perpustakaan-perpustakaan terutama dengan Perpustakaan Negara dan Perpustakaan Hatta Foundation serta Perpustakaan Islam. Kebutuhan dari para dosen-dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri akan kitab-kitab selalu dipenuhi dengan memuaskan.

Selandjutnja dapat diutarakan, bahwa Perpustakaan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri kini dipimpin oleh Patah, pemimpin Perpustakaan Negara dan Hatta-Foundation.

Perpustakaan Fakultit sudah mempunjai himpunan kurang lebih 3500 buah buku, jang meliputi buku-buku agama (Islam terutama) dan Keristen, buku-buku pengetahuan dari segala lapangan dan dalam bermatjam bahasa, selandjutnja kamus dan encyclopedia. Disamping itu perpustakaan menjediakan „buku

peladjaran" jang diperuntukkan siswa-siswa dari Sekolah Persiapan. Buku-buku tersebut mengambil dasar dari daftar Kementerian P.P. & K. mengenai buku-buku peladjaran bagi S M.A. Bagian Sastra.

Diantara buku-buku perpustakaan jang sudah ada, masih perlu didatangkan dari Luar Negeri.

Hubungan selandjutnja dengan pihak luar dapat diterangkan disini, bahwa Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri telah mendapat kundjungan-kundjungan :

1.	Prof. Dr. Tjan Tju Som	—	guru besar luar biasa Universitet Leiden.
2.	S. R. Kidwai	—	Wakil Unesco (urusan Pendidikan) pada tg. 17-10-1951.
3.	Raja B. Mannikam MA, BD, PL, DDD.	—	Secr. W.C.C. for East Asia pada tg. 4-1-1952.
4.	Mr. Wongsonegoro	—	Menteri P.P. & K dan Secr. Djenderal pada tgl. 18-11-1951.
5.	Dr. Arthur Lehning	—	dari Urusan Perpustakaan Amsterdam.
6.	S. Koperberg	—	dari Kementerian P.P. & K. Djakarta.

Pada tgl. 4 Agustus 1952 telah dilantik dengan resmi Ketua dan anggauta-anggauta Dewan Kurator, jang telah diangkat oleh Menteri Agama dengan persetudjuan Menteri P.P. dan K. dengan surat keputusan tgl. 14 Nopember 1951 No. G/II/2/16111.

Adapun Dewan Kurator „Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri" terdiri dari :

1.	Sri Sultan Hamengku Buwono IX	—	selaku	Ketua Kehormatan.
2.	Sri Paku Alam VIII	—	„	Ketua.
3.	Prof. Dr. M. Sardjito	—	„	Anggauta.
4.	Prawoto Mangkusasmito	—	„	Anggauta.
5.	Mr. Assaat	—	„	Anggauta.
6.	K. R. T. Honggowongso	—	„	Anggauta.
7.	Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo	—	„	Anggauta.
8.	Wiwoho Poerbohadidjojo	—	„	Anggauta.
9.	Harsono Tjokroaminoto	—	„	Anggauta.

Sebagai diketahui, pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri diadakan pula kelas pendahuluannja jang dinamakan Sekolah Persiapan „Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri". Adapun tenaga-tenaga gurunja sebagai berikut :

1.	H. Djojonegoro	—	ditugaskan memberi peladjaran Sedjarah Kebudajaan dan Umum, 3 djam seminggu. Selain itu ditetapkan pula sebagai Pemimpin dari Sekolah Persiapan.
2.	Dr. Soerono	—	ditugaskan memberi peladjaran Biologie, 2 djam seminggu.
3.	Timur Djaelani	—	ditugaskan memberi peladjaran Bah. Indonesia, 3 djam seminggu.
4.	Sastrosoedjono	—	ditugaskan memberi peladjaran Bah. Djawa Kuno, 2 djam seminggu.

5.	Soenartono	— ditugaskan memberi peladjaran Ilmu Ekonomi, 2 djam seminggu.
6.	Soekanto	— ditugaskan memberi peladjaran Ekonomi dan Tata Negara, 4 djam seminggu.
7.	Saketi Sumosumarto	— ditugaskan memberi peladjaran Kimia, 1 djam seminggu.
8.	Soemarmo	— ditugaskan memberi peladjaran Bahasa Djerman, 2 djam seminggu.
9.	Slamet Rahardjo	— ditugaskan memberi peladjaran Sedjarah Indonesia, 4 djam seminggu.
10.	H. Zubair	— ditugaskan memberi peladjaran Bah. Perantjis, 1 djam seminggu.
11.	Soetopo	— ditugaskan memberi peladjaran Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, 3 djam seminggu.
12.	Thohir Abdul Muin	— ditugaskan memberi peladjaran Agama, 1 djam seminggu.
13.	Tengku M. Hasbi	— ditugaskan memberi peladjaran Agama, 2 djam seminggu.
14.	H. Anwar Musaddad	— ditugaskan memberi peladjaran Bah. Arab, 2 djam seminggu.
15.	R. Malikus Suparto	— ditugaskan memberi peladjaran Ilmu Bumi Alam, 2 djam seminggu.
16.	Abdul Quddus	— ditugaskan memberi peladjaran Bah. Inggeris, 4 djam seminggu.

Terketjuali Tengku Moh. Hasbi, kesemuanja adalah sebagai guru tidak tetap.

Sekedar tentang Gedung Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Bentuk gedung tersebut belum merupakan gedung dari Sekolah Tinggi jang lazim. Dengan gembira didapat kabar, bahwa telah ada persetudjuan dari Djawatan Gedung-gedung untuk memperluas Gedung Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri jang sekarang.

Selandjutnja telah diusulkan pada pihak atasan untuk membuat gedung bagi asrama mahasiswa. Asrama bagi Perguruan Tinggi Agama memang suatu kebutuhan jang mutlak.

Tidak diharapkan pendidikan agama jang sempurna, bila belum diadakan asrama bagi mahasiswa-mahasiswa agama. Ini adalah suatu conditio si'ne qua non dan dengan ini di desakkan sekali lagi pada Menteri Agama dan Menteri P. P. dan K. Pengasuh-pengasuh dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dapat diterangkan, bahwa mereka telah berhimpun dalam suatu organisasi.

Adapun Senat mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sekarang ini terdiri dari:

Acting Ketua	:	Isa Sarul
Sekretaris	:	Kolimah
Wk. Sekretaris	:	Zaini Dahlan
Keuangan	:	Ibrahim Husin
Penerangan	:	Imam Suhadi Masjfuk Zuhdi Hartati

Untuk memperluas pengetahuan agama pada umumnja, maka dalam bulan Desember 1952, diadakan studie-reis ke Bali, jang dipimpin oleh Prof. Dr. Tjan Tjoe Siem dan Hertog Djojonegoro, dengan pengikut 63 orang mahasiswa.

Selandjutnja setelah diadakan udjian propaedeuse, maka jang menempuh udjian tersebut ada 24 orang, jang lulus 18 orang, sedang jang tidak lulus 6 orang.

*

C. PERKEMBANGAN UNIVERSITY ISLAM INDONESIA (U.I.I.)

KEBANJAKAN para mahasiswa di U.I.I. beragama Islam, akan tetapi ada djuga jang beragama Nasrani (Protestan dan Katholik), sebab memang djuga diterima mahasiswa dari berbagai agama.

1. **Nama dan sedjarah berdirinja U.I.I.**

   Perguruan Tinggi itu bernama University Islam Indonesia atau Al Djami'ah Islamijah al Indonesijah, bertempat di Jogjakarta dan mempunjai sebuah Fakultit Hukum di Surakarta.
   University Islam Indonesia itu didirikan pada hari Mi'rodj 27 Rodjab 1361/10 Mei 1948, sebagai landjutan dari Sekolah Tinggi Islam jang didirikan di Djakarta pada 27 Rodjab 1364/8 Djuni 1945. Dan dipersatukan pula dengan Perguruan Tinggi Islam jang didirikan di Surakarta pada bulan Djanuari 1950.

2. **Badan jang mendirikan.**

   U. I. I. didirikan oleh suatu Badan Wakaf bernama Badan Wakaf U. I. I. dengan Akte Notaris Jogjakarta tgl. 22 Des. 1951. (Akte tersebut sebagai pembaharuan Akte Notaris Sekolah Tinggi Islam di Djakarta, tahun 1945). Badan Wakaf tersebut mempunjai Dewan Kurator bertugas mengawasi perdjalanannja Universitit.

3. **Pimpinan Universitit.**

   U. I. I. dipimpin oleh Dewan Maha Guru (Senat).

4. **Fakultit-fakultit U.I.I.**

   University Islam Indonesia mempunjai 4 Fakultit:
   1. Fakultit Hukum.
   2. Fakultit Ekonomi.
   3. Fakultit Pendidikan
      semua bertempat di Jogjakarta, dan
   4. Fakultit Hukum di Surakarta,

5. **Rentjana peladjaran.**

   Rentjana peladjaran untuk Fakultit Hukum baikpun di Jogjakarta maupun di Surakarta adalah sama dengan rentjana peladjaran pada Universitit Negeri Gadjah Mada ditambah falsafah Islam, bahasa 'Arab 2 tahun (untuk Kandidat II dan Doktoral I), sedang Hukum Agama dan Hukum Islam diberikan dengan luas (4 tahun).
   Rentjana peladjaran Fakultit Ekonomi adalah mendekati rentjana peladjaran Perguruan Tinggi Dagang di Rotterdam dengan mata peladjaran Hukum Islam 4 tahun.
   Adapun Fakultit Pendidikan ialah untuk memperdalam dan menghasilkan tenaga-tenaga ahli dalam pendidikan; Fakultit tersebut sedang dalam persiapan dibuka kembali, sampai saat ini masih kekurangan tenaga-tenaga dosen.

6. **Peraturan University Islam Indonesia.**

Keuangan University Islam Indonesia diusahakan oleh Badan Wakaf University Islam Indonesia.

7. **Keuangan U.I.I.**

Keuangan University Islam Indonesia diusahakan oleh Badan Wakaf U.I.I. dari pada: wakaf, sodaqoh (derma), wasiat, hadiah, dan bantuan Pemerintah (subsidi) dan perusahaan-perusahaan.
Sedjak berdirinja Sekolah Tinggi Islam hingga kini subsidi U.I.I. diterima dari Pemerintah (Kementerian Agama).
Badan Wakaf U.I.I. pada masa ini baru mempunjai: perusahaan Pertjetakan, Penerbitan dan sebuah gedung untuk Kantor Pengurus.

8. **Tempat-tempat kuliah.**

Untuk kuliah Fakultit-Fakultit U. I. I. dipergunakan ruangan Mesdjid Sjuhada', Gedung Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (P.T.A.I.N.) dan gedung rumah jatim perempuan Muhammadijah di Djl. Ngabean 36 Jogjakarta.
Adapun di Surakarta telah mempunjai gedung dan tanahnja di Kepatihan, hadiah dari Sri Susuhunan Surakarta, ialah bekas Kepatihan Kasunanan.

9. **Kantor-kantor U.I.I.**

a. Senat dan Sekretaris bertempat di Djl. Terban Taman 14 Tilpun No. 139 Jogjakarta.
b. Kantor Dewan Pengurus di Djl. Lawu No. 1 Jogjakarta.
c. Sekretariat Fakultit Hukum Surakarta di Kepatihan tilpun No. 184 Surakarta.
d. Perpustakaan U.I.I. di Mesdjid Sjuhada' Jogjakarta dan di Kepatihan Surakarta.

10. **Sjarat-sjarat penerimaan mahasiswa.**

Semendjak masih bernama Sekolah Tinggi Islam dan setelah mendjadi University Islam Indonesia, sjarat-sjarat penerimaan mahasiswa disesuaikan dengan peraturan jang dipakai oleh Perguruan-Perguruan Tinggi Pemerintah, pada tahun kuliah 1951/1952 hanjalah mereka jang beridjazah S.M.A. Pemerintah sahadja jang dapat diterima.
Para peladjar dari Perguruan-Perguruan Agama Menengah dapat diterima mendjadi mahasiswa dengan udjian jang sederadjat dengan S.M.A. dan mulai tahun peladjaran 1951/1952 mereka harus udjian S.M.A. Pemerintah pula.
Sjarat-sjarat jang lain disamakan dengan Pemerintah (kesehatan dan kelakuan baik). Banjaknja uang kuliah disamakan dengan uang kuliah Universitit Negeri Gadjah Mada (1 tahun adjaran Rp. 250,—).

11. **Banjaknja mahasiswa U.I.I.**

Banjaknja mahasiswa University Islam Indonesia sebagaimana tersebut dalam lampiran.

12. **Kementerian-Kementerian jang telah memberi ikatan dinas.**

Para mahasiswa U.I.I. sebagian telah dapat ikatan dinas dari:

a. Kementerian Agama
b. Kementerian Perhubungan
c. Kementerian Pekerdjaan Umum, dan
d. Kantor Urusan Demobilisan Peladjar (K.U.D.P.).

13. **Hubungan dengan Luar Negeri.**
University Islam Indonesia djuga sudah mempunjai perhubungan dengan beberapa Pengurus Tinggi di Luar Negeri misalnja: Colombia University, McGill University (Islamic Studies) di Kanada, Punjab University di Pakistan, Faud University di Kairo, Farook University di Alexandria.

*

Daftar banjaknja mahasiswa tahun kuliah 1952/1953.

No.	Fakultit	Banjaknja :	Djumlah :
	a. **Jogjakarta.**		
1.	Fakultit Ekonomi	138 orang	
2.	Fakultit Hukum	84 orang	
3.	Mustami' Istimewa	1 orang	
4.	Mustami' Biasa	5 orang	228 orang
	b. **Surakarta.**		
1.	Fakultit Hukum	131 orang	131 orang
		Djumlah:	359 orang

*

D. PERKEMBANGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KATHOLIK DI JOGJAKARTA

PERGURUAN tinggi agama Katholik, jg menurut istilah Geredja Katholik disebut Seminari Agung didirikan tahun 1936 di Muntilan. Sedjak dari permulaan missi Katholik bagi orang Indonesia telah terbuka kesempatan untuk mendjadi imam (pastur). Akan tetapi sebelum tahun 1936 tiap orang Indonesia, jang mempunjai keinginan mendjadi imam, terpaksa meneruskan peladjarannja diluar negeri dan masuk suatu orde. Namun makin lama makin terang, bahwa untuk perkembangan missi apa lagi untuk menambah djumlah pastur Indonesia adalah perlu sekali mendirikan suatu Sekolah Theologia sendiri ditanah ini, sehingga seorang Indonesia, jang tidak ingin masuk suatu orde, dapat meneruskan dan menjelesaikan peladjarannja dengan tidak meninggalkan tanah airnja. Untuk keperluan inilah pada tahun 1936 telah didirikan Seminari tsb.

Djumlah siswanja selalu tambah, sehingga pada tahun 1938 gedung sekolah guru di Muntilan sudah tidak dapat memuatnja. Seminari Agung lalu dipindahkan ke Mertojudan, dan dua tahun lagi dari sana pindah ke gedungnja sendiri di Dj. Tjode 2, Jogjakarta, jang kini masih dipakainja. Nasib Seminari Agung (S. A.) waktu perang dan pendudukan Dai Nippon tidak akan diuraikan dengan pandjang lebar. Tjukuplah bahwa S. A. dengan perlindungan istimewa dari Tuhan dapat meenruskan pekerdjaannja, meskipun dengan selain pindah tempat dan dalam keadaan jang amat sukar. Tapi kini sikap Pemerintah kita selalu memperlindungi dan menaruh sympathic kepada Seminari tersebut.

Karena waktu pendudukan Djepang Seminari Menengah harus ditutup, sesudah tahun 1946 djumlah siswa S.A. pun turun, sehingga pada permulaan tahun peladjaran 1952—1953 belum melebihi 20 orang. Akan tetapi mengingat bahwa S. A. dalam waktu 10 tahun, ialah dari 1942 sampai 1952, dapat menghasilkan 43 orang pastur Indonesia, jang kini telah bekerdja bukan sadja di Djawa melainkan djuga di Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur, terang-

lah bahwa S.A. mempunjai arti besar dalam perkembangan missi ditanah Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa Seminari tsb. merupakan perguruan untuk seluruh Indonesia. S.A. adalah kepunjaan Vikariat Semarang, bekerdja dibawah pimpinan tertinggi Vikaris Apostolik Semarang, ialah Mgr. A. Soegijopranoto. Akan tetapi karena banjak Vikariat-Vikariat lain belum mempunjai Perguruan Tinggi sematjam ini, tjalon-tjalon imam dari sana kerap kali dikirim ke Jogjakarta.

Jang mengenai rentjana peladjaran, garis besarnja adalah sebagai berikut. Jang diterima sebagai siswa ialah peladjar sederadjat S. M.A. dan S. G. A., dengan tjatatan bahwa jang mempunjai idjazah S. M. A. atau S. G. A. sebelum masuk S. A. harus mengikuti kursus bahasa Latin dahulu. Peladjaran di S.A. dibagi dalam dua bagian, ialah bagian Philosophia dan bagian Theologia. Bagian Philisophia: Cosmologia, Psychologia, Ethica Theodica, Biologia, Anthropologia. Bagian Theologia empat tahun lamanja, terdiri dari mata peladjaran: Theologia, Moral, Hukum, Kitab Sutji, Sedjarah agama, pengertian tentang agama lain, agama Islam, Hindu, Buddha. Djadi peladjaran di S. A. dapat diselesaikan dalam waktu enam tahun. Sesudahnja seorang siswa dapat ditahbiskan mendjadi imam, jang sama deradjatnja dengan pastur-pastur lain. Kini S.A. mempunjai lima orang guru besar dan lima orang guru luar biasa.

Pada achirnja perlu ditjatat pula, bahwa pekerdjaan S.A. adalah selaras dengan petundjuk-petundjuk Pembesar Geredja Katholik, jang mempunjai kehendak jang kokoh, jang berdasarkan pengalaman, jang telah berabad-abad lamanja, supaja pekerdjaan missi Indonesia, pun pimpinannja, setjara berangsur-angsur diserahkan kepada orang Indonesia. Mudah-mudahan dengan berkat dan perlindungan Tuhan jang Maha Asih tudjuan jang tinggi ini dapat tertjapai.

*

II. PERKEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. PERKEMBANGAN SEKOLAH THEOLOGIA

PADA zaman pendjadjahan Belanda di Jogjakarta telah terdapat Sekolah Theologia, jang didirikan oleh Geredja-geredja Gereformeerd dinegeri Belanda pada 6 September 1906.

Sedjarah pendjadjahan Belanda di Indonesia berachir, tetapi sedjarah Indonesia sebagai tanah djadjahan belumlah tamat, karena datanglah pendjadjahan Djepang di Indonesia. Zaman pendjadjahan jang sangat gelap itu, ada akibatnja jang baik djuga, ialah mempertjepat masaknja **tjitta-tjita akan memiliki Sekolah Theologia sendiri.** Pada zaman pendjadjahan Belanda, tjita-tjita itu telah ada, tetapi belumlah memperoleh djalan untuk dilaksanakan; keadaan zaman pendjadjahan Djepang merupakan pemetjut, hingga tjita-tjita jang telah terkandung itu, terlahir didalam tekad jang bulat, ialah:

„Geredja-geredja di Djawa Tengah membuka Sekolah Theologia".

Djuga pada waktu itu telah terdapat garis-garis jang tertentu untuk tjorak Sekolah Theologia jang dimaksudkan, ialah, bahwa Sekolah Theologia tidak dilepaskan dari lingkungan Indonesia merdeka. Maksud jang sematjam itu, tentu tidak akan terdjadi, bilamana orang masih didalam alam pendjadjahan. Tuhan jang memimpin perdjalanan sedjarah, mendatangkan, **keadaan baru di** Indonesia ialah: terdjadinja proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Peristiwa ini, merupakan peristiwa jang sangat penting djuga bagi perkembangan Sekolah Theologia.

Segala tekanan mendjadi lenjap; pembukaan Sekolah Theologia hanja tinggal menunggu pemetjahan soal-soal technis sahadja. Makin hari orang makin mendekati hari pembukaan Sekolah Theologia. Dan achirnja pembukaan

dapat terdjadi pada 31 Oktober 1946. Sekolah Theologia ini didirikan oleh dua buah golongan Geredja ialah Geredja-geredja Djawa di Djawa Tengah, dan Geredja-geredja Tionghoa di Djawa Tengah, dan ditempatkan di Jogjakarta.

Sekolah Theologia sedjak permulaan mengalami banjak kesulitan, misalnja soal gedung, soal pergantian uang baru d.l.l. Kesulitan memang banjak sekali, tetapi hasrat adalah tjukup kuat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Lagi pula tidak mengherankan bilamana terdapat beberapa kesulitan, sebab kita ini masih hidup didalam dunia, jang telah terkutuk karena dosanja; kita akan sesat, bilamana kita beranggapan, bahwa kita sekarang sudah hidup didalam Firdaus.

Pengudjian-pengudjian bagi Sekolah Theologia jang baru didirikan, masih banjak sekali. Misalnja adanja aksi militer I, memperbesar djuga kesulitan-kesulitan Sekolah Theologia, sebab beberapa Geredja jang tergolong kepada Geredja-geredja Djawa Tengah, lalu terpaksa terpisah karena adanja garis demarkasi, hal mana berarti bahwa Geredja didaerah Republik jang harus memikul segala beaja untuk Sekolah Theologia.

Kesulitan ini disusul oleh kesulitan lainnja lagi, ialah clash II, jang ber-akibatkan pendudukan Jogjakarta, tetapi segala kesulitan ini tidak dapat mematahkan tekad jang bulat ini. Pada waktu pendudukan, Sekolah Theologia terpaksa diberhentikan untuk sementara waktu. Seandainja peladjaran pada waktu itu dilandjutkan tentu djuga tidak akan berarti, sebab djumlah peladjar tidak dapat lengkap, karena beberapa peladjar melakukan tugasnja sebagai pemuda-pemuda Indonesia, ialah ikut serta didalam gerilja.

Achirnja kursus itu dapat diachiri pada achir tahun 1949. Kemudian pada Maret 1950 dimulai lagi dengan kursus baru jang nanti akan selesai pada pertengahan tahun 1954. Kursus ini disusul dengan kursus jang lain lagi, pada bulan Agustus 1951, jang nanti akan selesai pada pertengahan tahun 1955. Jang diterima mendjadi peladjar untuk kursus-kursus itu, ialah mereka jang serendah-rendahnja beridjazah S. M. P.

Peladjaran-peladjaran pada kursus-kursus itu diatur demikian:

a. Satu tahun bagian persiapan. Peladjaran ini diachiri dengan udjian.

b. Tiga tahun bagian Theologia. Hanja mereka jang lulus pada udjian persiapan sadja jang diperbolehkan melandjutkan pada bagian Theologia.
   Bagian ini diachiri dengan udjian penghabisan; jang lulus diberi idjazah Sekolah Theologia.

Disamping kursus-kursus ini diadakan djuga **kursus pertama,** jang mempunjai peladjaran 2 tahun lamanja, ialah jang dibuka pada pertengahan tahun 1951 dan akan dichiri pada pertenghan tahun 1953. Sifat kursus ini adalah sangat sederhana.

Pengalaman-pengalaman pada Sekolah Theologia ini, dan pembitjaraan-pembitjaraan pada konperensi para dosen Sekolah Theologa di Indonesia jang diadakan pada Djanuari 1952 di Tjiumbuluit Bandung, memberi beberapa peladjaran, jang memaksa adanja perubahan-perubahan didalam rentjana peladjaran. Karena itu kursus baru, jang akan dibuka pada Agustus 1953, akan memakai rentjana peladjaran jang baru, jang disusun demikian:

a). **Bahagian persiapan.** Lama peladjaran 2 tahun, dengan mata peladjaran:

1. Sedjarah Sutji	8. Sedjarah Umum
2. Archaelogia/Ilmu Bumi Sutji	9. Sedjarah Asia dan Indonesia
3. Catechismus	10. Sedjarah Kebudajaan Indonesia
4. Ethnologia	11. Ilmu Musik
5. Ilmu Masjarakat	12. Bahasa Indonesia/ kesusasteraan Indonesia
6. Ilmu Djiwa	13. Bahasa Inggeris
7. Filsafat	14. Bahasa Junani.

b). Bahagian Theologia. Lama Peladjaran 3 tahun, dengan mata peladjaran :

1. Canoniek dan Tafsir Perdj. Lama
2. Canoniek dan Tafsir Perdj. Baru
3. Istilah-istilah Kitab Sutji
4. Dogmatiek
5. Ethiek
6. Sedjarah Geredja
7. Hukum Geredja
8. Symboliek dan Oikumenika
9. Catecheik
10. Homiletiek
11. Liturgiek
12. Pemeliharaan Djiwa
13. Agama-agama bukan Keristen
14. Sedjarah Zending
15. Methodiek Zending
16. Bahasa Inggeris
17. Bahasa Junani
18. Bahasa Indonesia.

c). Keistimewaan-keistimewaan :

1. Bahasa Djawa
2. Bahasa Tionghoa
3. Keb. dan Filsafat Tionghoa
4. Bahasa Djerman
5. Bahasa Iberani.

*

B. PERKEMBANGAN S. M. A. B./I NEGERI

Tahun lahirnja „Padmanaba"

DJIKALAU kita mendengar perkataan „Padmanaba", maka kita ingat djaman pendjadjahan Djepang.

Disini akan digambarkan dengan singkat keadaan perguruan S.M.T. pada waktu itu jang didirikan oleh „Pemerintah Balatentara Dai Nippon" pada bulan Djuni 1942.

Memang...... sesudah bangsa jang semula kita sebut bangsa Djepang, setelah menduduki dan menguasai dahulu „Ned. Oost Indië" lalu segera membuat undang-undang agar nama „Djepang" itu kemudian diganti dengan „Nippon". Karena menurut keterangannja pada waktu itu, perkataan Djepang dipergunakan sebagai mengandung maksud penghinaan. Siapa jang dengan sengadja memakai perkataan larangan itu, akan menerima tamparan dari saudara tua kita.

Guru-gurunja pada waktu itu, semuanja bangsa Indonesia, jang pada djaman pendjadjahan Belanda mempunjai pengalaman tjukup dilapangan perguruan, diantaranja orang jang bertitel Mr. — Ir. — Cdt. Ir. dan Semi Arts.

Kerap kali para guru menerima gemblengan dari saudara tua kita, agar kita dapat melaraskan segala peraturan-peraturan dengan tjara kehendak Nippon (Anak-anak kita mengatakan dengan bisik-bisik : Gemblengan Djepang).

Sesuatu jang akan diadjarkan harus disusun dulu, lalu dibitjarakan dengan saudara tua kita. Jang mengenai diktat-diktat Sedjarah dan Ilmu Bumi disensur oleh Kenpeitai (Polisi Militer) dan Sendenbu (Barisan Propaganda). Maka hampir semua peladjaran ketjuali jang bersifat mathematisch dan bahasa Indonesia atau Daerah, merupakan masakan Nippon. Peladjaran Nippon Go (Bahasa Nippon. — Penj. !) merupakan mata peladjaran istimewa. Taiso tiap-tiap pagi, djudo, kendo djangan dilupakan! Peladjaran berbaris setjara militer Djepang dengan memanggul senapan kaju dilakukan tiap Minggu sekali. Begitu djuga melakukan kinrohosi, kebaktian jang dilakukan bersama (menanam bidji djarak, mentjangkul, membersihkan alat-alat paberik dsb.nja) jang kerap kali dikerdjakan dari pukul 8 pagi sampai pukul 4.30 petang (satu setengah djam lebih pagi dari pada djam Djawa). Kerap kali diharuskan djuga, seluruh S.M.T. berdjam-djam berdiri berdjadjar ditepi djalan untuk menunggu datangnja pembesar Nippon ; kalau tamunja lewat tiap-tiap murid jang memegang sebuah bendera, harus mengangkat tangannja keatas sambil menjerukan „banzai"...... „banzai"...... „banzai"......

Hidup para guru selalu dalam suasana tidak tenang dan takut. Inisiatif dan keberanian para pengadjar seakan-akan lenjap. Aktivitet ada. Kita, dengan adanja chaos itu seakan-akan mendjadi selalu pasif sadja impotent.

Apakah akibatnja terhadap murid-murid S.M.T. di Jogja pada waktu itu ? Murid-murid jang bukan anak ketjil lagi ? Sedikitnja mempunjai perasaan jang sama dengan bapak-bapak guru ! Murid-murid jang meneruskan beladjar dengan maksud menambah pengetahuan, murid-murid dari golongan jang kurang mampu, murid jang datangnja dari djauh, umumnja banjak jang mengeluh karena peladjaran dan training Nippon jang berat itu.

Meskipun kehendak Djepang agar para murid itu tiap-tiap hari harus digembleng setjara Nippon. Dengan mengutjapkan sumpahnja tiap-tiap pagi. „Warera Wa........ tjikoo ! ! !" Menghadap ke Utara...... Saikerei, setelah itu jasume, bertaiso dan lain-lainnja dengan kemudian menerima petundjuk jang terang dan tegas mengenai kinrohosi dan menanam djarak dan sebagainja. Maka jang sebenarnja dilakukan oleh para murid pada waktu itu hanja sandiwara belaka. Tidak ada suatupun jang mendjalankan sesuatu dengan keinsjafan dan senang hati.

Pada waktu anak-anak kita merasa, agar ada kekuatan jang berupa persatuan lahir batin untuk memperkekal persaudaraan dan kemauan bantu-membantu atau tolong-menolong, diantara murid sama murid dan guru dengan guru, 3 bulan sesudah S.M.T. dibuka, (18 September 1942) pada djaman jang suasananja untuk kita umumnja amat keruh itu, timbullah dari hati sutji para siswa S.M.T. Jogjakarta kemauan keras untuk mendirikan perkumpulan keluarga S.M.T.Jogjakarta dengan diberi nama „Padmanaba".

Berhubung pada waktu itu Djepang melarang adanja perkumpulan-perkumpulan, maka hampir-hampir Padmanaba tidak dapat didirikan, kalau sadja tidak suka bertanggung djawab „mengamati". Demi murid membentangkan tentang poritik tuang........ potong reher. Karau hanja mempunjai maksud mempererat persatuan bore. Demikianlah keterangan dari Bunkjo-ka Tjo, atas advies dari Kenpeitai dan Sendenbu.

Setelah Padmanaba didirikan, maka kemudian diadakan sajembara untuk mentjiptakan bentuk lambang untuk lentjana. Jang dipilih sebuah idee jang berbentuk „Padma" (teratai merah) sebagai bunga sutji, jang timbul dari pusar Wishnu (jang nama sindirannja „Padmanaba").

Dalam dongengan Wishnu (Padmanaba) itu satu-satunja dewa jang tertua (Oer God) jang berbaring diatas Sesha atau Ananta. Maka lahirlah kemudian Brahma dari bunga Padma. Sehingga Wishnu dan Brahma dapat dipandang sebagai dwi-tunggal. Brahma jang bermuka 4 itu terdapat/terkenal diseluruh dunia. Menurut dongengan maka Wishnu (Padmanaba) pernah melaksanakan permintaan para dewa, jang merasa chawatir ketika ada seorang radja, jang karena tabiat dan kebadjikannja akan menguasai seluruh dunia (dunia bawah, bumi dan langit). Maka Wishnu kemudian merupakan dirinja sebagai orang Katai dan menghadap radja tersebut untuk memohon agar kepadanja diberikan sebidang tanah jang luasnja hanja 3 langkahnja. Dengan tertawa maka radja tersebut mengabulkan permintaan si Katai itu. Setelah diidjinkan maka orang Katai itu merupakan Wishnu pula dan ternjata, bahwa kakinja jang satu mengindjak bumi dan kakinja jang lain (kaki kirinja) melangkah sampai dilangitnja Brahma sehingga achirnja jang menguasai dunia terus Wishnu.

Mengamankan alat-alat

Pak Kasio berdjasa dalam masa pendudukan.

Kalau pembatja belum puas, masih banjak tempat keterangan. Marilah sekarang kita bawa ketugu peringatan kedua. Disini memuat perdjuangan peladjar-peldajar dalam permulaan revolusi ; revolusi jang penuh onak dan duri, masa pemuda menjabung njawa...... Keterangan-keterangan selandjut-

nja kita peroleh dari Ir. Marsito jang antara lain sebagai berikut: ....
Dengan berachirnja tahun peladjaran 1945 — 1946 selama waktu mana S.M.A. negeri berturut-turut dipimpin oleh Soegardo Poerbokawotjo, Dr. Prijono, Mardowo selaku wakilnja, maka pada permulaan tahun peladjaran 1946 — 1947 pada pertengahan bulan Agustus pimpinan sekolah diserahkan pada Ir. Marsito. Djika suasana tahun peladjaran '45/'46 diliputi oleh keadaan jang langsung bersangkutan dengan petjahnja revolusi, dengan titik berat pada perebutan kekuasaan dari tangan pemerintah Balatentara Djepang, maka pada tahun peladjaran '46/'47 keadaan ada sedikit lebih tenang.

Perdjuangan menghadapi Sekutu bertjorak agak lain dan bertitik berat pada konsolidasi (memperkokoh) kekuasaan jang telah kita miliki, lebih-lebih setelah Pemerintah Republik pindah ke Jogjakarta. Keadaan ini bertjermin djuga pada suasana sekolah-sekolah. Djalannja peladjaran lebih teratur dari pada tahun sebelumnja; banjaknja murid sangat bertambah sehingga terpaksa memisahkan S.M.A./A kegedung Djalan Djati 2 Jogja, dibawah pimpinan Drs. Soemadi Sumowidagdo. Kedua S.M.A. jang gedung sekolahnja dan pimpinannja sekarang telah terpisah, masih merasa tergabung dalam ikatan satu keluarga, dibawah Pandji-pandji Padmanaba. Satu kali setiap triwulan oleh kedua S.M.A. diadakan perlombaan Olah Raga, jang kemudian ditutup oleh malam gembira.

Agar murid-murid dapat memenuhi kewadjibannja: beladjar dan berdjuang maka diadakan peraturan jang membolehkan tiap-tiap kelas meninggalkan peladjaran selama satu bulan, ganti-berganti sedemikian sehingga tingkat peladjaran antara tiap kelas pada achir tahun tidak sangat berbeda.

Boleh kita banggakan bahwa peladjar-peladjar memenuhi kedua kewadjibannja ini tadi dengan penuh semangat biarpun keadaan makin hari makin sukar, persediaan mengenai kebutuhan sehari-hari makin kurang, seperti alat-alat tulis, alat-alat peladjaran lain, bahan pakaian, lampu dll.

Tahun peladjaran '46/'47 penuh giliran berlangsung teratur; selingan beladjar dan berdjuang, bersuka ria dan berduka tjita, bergembira dan berkabung, begitulah berseling-seling sampai achirnja pada pertengahan bulan Djuli 1947 tahun jang ditutup dengan liburan puasa. Tetapi kali ini adalah liburan jang sangat malang. Seminggu kemudian pada tg. 21-Djuli-1947 setelah murid-murid meninggalkan sekolahnja dan tinggal dirumah orang tua masing-masing berkobarlah clash I dan 2 a 3 hari kemudian tersiarlah sudah kabar, bahwa musuh telah ada didaerah Magelang dan Salatiga. Kesibukan nampak diibu kota Jogjakarta. Gedung-gedung besar, teristimewa Gedung-gedung Sekolah diminta untuk keperluan perdjuangan; djuga S.M.A./B harus menjerahkan beberapa ruangan untuk ini.

Liburan besar berlangsung sampai lebih kurang 3 bulan. Tahun peladjaran 1947/1948 baru dapat dimulai setelah gentjatan sendjata tertjapai. Selama itu peladjar-peladjar berdjuang dalam pelbagai lapangan, guru-guru mengikuti anak-anaknja atau diperbantukan kepada lain-lain djabatan.

Dengan tertjapainja gentjatan sendjata, Republik kita kehilangan sebagian besar dari daerahnja. Ibukota Jogjakarta dibandjiri dengan pengungsi-pengungsi dari pelbagai djurusan. Karena tak mungkin menerima peladjar baru sebanjak itu maka dibukalah S.M.A. Pedjuang dan S.M.A. Darurat. Kesulitan jang makin hari makin meningkat akibat makin rapatnja blokkade Belanda dan berita-berita jang langsung maupun terlambat tentang gugurnja peladjar jang berdjuang adalah tjorak dari tahun peladjaran '48/'49 jang hanja diachiri dengan kenaikan kelas sadja sedang udjian penghabisan belum dapat diadakan karena pendeknja tahun peladjaran.

Pada bulan Agustus '48 mulailah tahun peladjaran '48/'49 dengan antara lain penjelenggaraan udjian penghabisan S.M.A. untuk tahun peladjaran jbl. Keadaan mengenai perekonomian maupun politik sudah mendekati krisis

dan tidak heranlah kiranja djika krisis ini meletus kemudian pada hari Minggu 19 Des. 1948 dengan petjahnja clash ke II. Dalam satu hari Belanda dengan berlangsung begitu tjepat hingga seperti keadaan dalam impian. Segera archief-archief diselamatkan dan alat penting milik S.M.A./B sebelum tentara induk Belanda datang. Hari Selasa tgl. 21 Des. 1948 datanglah mereka menduduki gedung S.M.A./B. Seorang opsir Belanda memberi nasehat supaja buku-buku dan alat-alat lain dipindahkan jang lebih aman. Kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknja berkat kegiatan para guru, murid-murid, pegawai-pegawai tata usaha dan pelajan-pelajan, semua barang jang penting dapat diselamatkan kelain ruang jang tak mudah terlihat. Pendjagaan terhadap barang-barang ini selalu didjalankan. Tidak dilupakan djasa-djasa Moch. Nazir, sekarang direktur S.M.A. Bukittinggi, A.L. Weno, sekarang pegawai Inspeksi Pendidikan di Djakarta, dan Pak Kasio, salah satu pelajan jang tertua. Pak Kasio inilah jang dengan setia mendjaga gedung serta isinja sedjak tahun 1923 (Berdirinja Gedung S. M. A. / B).

Kira-kira pada bulan April 1949 oleh pemerintah pendudukan dibuka lagi Sekolah-sekolah Landjutan dikota Jogjakarta. Oleh sebab sedikit sekali murid-murid jang datang, sekolah-sekolah itu dikumpulkan dalam salah satu Gedung ialah Gedung S.M.A./B. Sekolah ini hanja berlangsung selama satu bulan.

Pada tanggal 6 Djuli 1949 Pemerintah R.I. kembali ke Jogjakarta, tetapi S.M.A./B. baru dapat dimulai sebulan kemudian, dengan keadaan jang tidak memuaskan. Sebagian besar dari peladjar-peladjar masih tersebar dimana-mana dan baru dapat kembali kira-kira bulan Nopember 1949, ketika sebagian besar dari mereka dapat bebas dari tugasnja. Achirnja begitu banjak djumlah mereka jang datang kembali sehingga S.M.A. Pedjuang harus dibuka lagi jang kemudian disebut S.M.A./II..........

Habis Gelap Terbitlah Terang ! ! !

Srikandi Melawan Belanda ! ! !

Siapa Insinjur puteri pertama ? ? ?

Betapa sukarnja menghadapi keadaan dikala itu, dapat kita bajangkan. Tetapi perdjuangan akan menimbulkan hasil-hasil jang njata, tjahaja jang memantjar melalui tjelah-tjelah reruntuhan korban revolusi. Revolusi tidak mengurangi kegembiraan pemuda-pemuda. Olah Raga tak dilupakannja. Dengarkanlah........ sambil beristirahat........ Hardjoko akan berkisah ...... Jogja tidak hanja termasjhur dengan kenakalannja, tetapi djuga terkenal dengan tingkatan tinggi dari Ilmu Pengetahuan.

Ini tidak ditentukan oleh precentage jang besar dalam udjian penghabisan; kalau diperhatikan lain-lain daerah, seperti Solo, tidak kurang peladjar jang lulus. Hanja University-lah jang dapat membuktikannja. Di S.T.T. dan P.T.K. pada tingkatan atas penuh dengan anak-anak Jogja. Hasil-hasil jang gilang gemilang, diantaranja anak-anak seperti almarhum Kunto Suroto, Suwasono, Pragnjono, Windrati, Warisni, Srihartati, Sumantri dan lain-lain. Windrati adalah mahasiswa jang pertama, jang lulus dengan Cum Laude di S.T.T. Warsini Slamet Urip, insinjur puteri jang pertama. Apa sebab ? Faktor-faktor jang menguntungkan, memang banjak. Guru-gurunja terselected, harus kita akui, Selandjutnja alat-alat djuga masih agak lengkap; karena berdekatan dengan sekolah Tinggi maka suasana beladjar mendjadi lebih baik.

Mungkin sampai kini pembatja akan mendapat kesan, seakan-akan peladjar-peladjar di Jogja semata-mata didjadikan hamba Science; sekali-kali tidak. Dalam lapangan lain mereka giat sekali. Mereka mempunjai bagian Press jang seminggu sekali menerbitkan madjalah tempel. Ada lagi jang mengurus perpustakaan (sampai kini tetap ada —). Kesenian tari asli (djoged) djuga mendapat perhatian jang tidak sedikit. Ada lagi bagian jang mengurus gerakar. pentjak. S.M.T. pada waktu itu mempunjai bagian sandiwara jang mentjoba mentjari djalan kearah kesenian baru. Kumpulan musik, krontjong tak dilupa-

kan, mungkin ada jang terlupa tak disebut disini, tetapi pokoknja sekolah merupakan masjarakat jang ketjil. Perlombaan menjanji dan menggubah lagu sering diadakan. Kesempatan dan kemungkinan untuk mengembangkan djiwa peladjar-peladjar dengan leluasa terbuka. Pergaulan antara individu-individu baik sekali. Hubungan antara peladjar-peladjar dan sementara guru-guru boleh dikenangkan.

Olah Raga

Sampailah sekarang pada atjara olah raga. Kalau S.M.T. jang terkenal dengan tingkataan peladjarannja, lebih berhak kita katakan bahwa S.M.T. bersemarak namanja berkat kemadjuan olah raganja. Kita harus memudji peladjar-peladjar dengan apa jang telah mereka tjapai. Pentjapaian mereka memuaskan sekali berkat persatuan mereka dan latihan jang sungguh-sungguh dan teratur. Hanja inilah jang membawa mereka ketingkatan jang menjamai sebelum perang. Kesulitan apa sadja jang harus mereka hadapi ? Antara lain, alat-alat serba kurang, pimpinan jang sempurna tidak ada, makanan sama sekali tidak mentjukupi untuk sjarat-sjarat ini, untuk berlatih teratur dan achirnja tekanan djiwa, jang tidak sedikit berpengaruh terhadap kesanggupan mentjapai. Tetapi kesulitan-kesulitan itu tidak mematahkan mereka, sebaliknja rintangan dan kesulitan itulah meudjudkan „pantjadan untuk madju". seperti halnja dengan burung, jang dapat membubung tinggi karena rintangan dari hawa atau seperti pisau dapat tadjam karena mendapat rintangan dari ungkal.

Atletik, sepak bola, bola tangan, basket, bolakrandjang, baseball, rounders, pingpong, badminton, dan berenang mendjadi sport mereka. Faktor apakah jang menjebabkan kemadjuan ini ? Setiap tahun ada 3 kali pertandingan antar kelas. Semua kelas harus mengikuti semua nomor, jang meliputi semua nomor lari sampai 1500 m, semua nomor lempar dan semua nomor lompat. Saingan antara kelas seru sekali. Akibatnja dalam semua tjabang harus diperlukan latihan jang sungguh-sungguh dan ini dilakukan djika ada waktu senggang, hingga menimbulkan djuara sekolah dan djuara luar sekolah. Dalam berenang S.M.T. I. mendapat djago, seperti Suharko (jang turut dalam Olympiade Helsinki), almarhum Sugianto, Kuswalagita, Sudarmi dan lain-lain.

Bolakrandjang termasuk jang terkuat diantara sekolah-sekolah, bahkan boys-teamnja dapat mengalahkan C.H.T.H. dan mendjadi djuara daerah. Dengan adanja Subardjo dan Margono didalamnja, maka mereka dapat menguasai gelanggang badminton Jogja. Kekuatan basket ball dan base ball pernah diudji oleh Semarang, jang datang berkundjung kemari, dan ternjata tidak mengetjewakan, berkat keuletan Askar Djundjunan, jang mendjadi pitcher tanpa lelah. Kiranja sepakbola tidak perlu diuraikan. Setiap penduduk Jogja tahu pemain-pemain seperti Abdullah, Mardjuki, Murdianto, Kerek, Kirom, Sukamto, Subjantoro, Mashud dan Susidarto jang tak asing lagi dalam masjarakat. Mereka adalah pemain P.S.I.M. jang tangguh. Sepakbola S.M.T. adalah pembawa nama kepelosok-pelosok pulau Djawa. Beberapa kali mereka didatangkan untuk amal di Djawa Barat : Tasikmalaja. Di Djawa Tengah : Purwokerto, Magelang, Semarang, Solo, di Djawa Timur : Malang, Surabaja. Hanja T.R.I.P. Djawa Timurlah jang dapat menaklukan S.M.T. Puntjak kegiatan ditjapai ketika S.M.T. hampir keluar dari kompetisi sebagai djuara dan mendatangkan Romeo dari Solo. Apakah modalnja? Modalnja hanja optimisme, keberanian kemauan kerdja. Hasilnja stadion penuh sesak. Adalah menggembirakan bahwa hasil jang ditjapai menundjukkan kekuatan jang seimbang ialah 2 — 2 dengan djuara Solo tadi.

Keuntungan sudah barang tentu besar ; dan ini dipergunakan untuk mengisi fonds peladjar. Atletikpun tak kurang perhatiannja. Waktu 11 dan 11,5 detik sudah tertjapai oleh Soekanto, Wing Harjono, Rudy Lisapaly dalam lari 100 m. S.M.T. mempunjai 2 rombongan 10 × 100 m dengan waktu rata-rata

11,5 detik, 2 rombongan 10 × 300 m ; 2 rombongan 10 × 400 dengan waktu rata-rata 57 detik dirombongan I ; dalam pertandingan antara kelas setiap kali terdapat pentjapaian jang tinggi : lontjat tinggi 170 cm, lontjat djangkit 12 m, lontjat djauh 6.10 m. Tjakram 32 m, lembing 51 m, peluru 12 m. Subagijo, Darsono, Fuad, Umar Bahsan, Sajoga, Martono, Askar adalah nama-nama jang disegani dalam atletik.

Dalam hal turnen pun S.M.T. turut berbitjara dan gerak djalan tjepatnja nomer satu dengan mengalahkan Militer Akademi, jang terdjamin makannja dan latihannja. Belum lagi kita membitjarakan „Perwarinja" jang paling banjak hanja berdjumlah 70 orang sadja. Dalam apa sadja mereka sanggup melajani „lawan" jang berkundjung. Anak-anak seperti Sumarweni, Ani, Nini. Budiarti, Dengah, Marpindjung, Mediati, Tetty, Sugesti, Warisni, meradjalela dilapangan hidjau. Nini dengan 200 m dalam 30,2 detik. Tetty dalam 100 m dengan 13,6 detik Ani dalam 100 m dengan 13,8 detik, tjakram 26,40 m. Roundersnja hanja dapat dilawan oleh C.H.T.H. jang telah mempunjai team jang tetap semendjak sebelum perang, sehingga menang dalam team work dan pengalaman bertanding. Rounders menghasilkan pitchers seperti Ani, Sudibjakti dan catcher seperti Sumarni. Tak lupa pula tokoh-tokoh seperti Pratjojo (Kampret, gugur sebagai penerbang pemburu), Polly Sulistijo (kini invalid).

Kalau dulu class meeting diadakan diluar djam sekolah (Sabtu sore dan Minggu Pagi) maka dengan persetudjuan Dr. Prijono jang memandangnja peristiwa penting, diperkenankan memakai hari Sabtu seluruhnja, sehingga perhatian peladjar-peladjar lebih besar.

Sudah dapat diduga semula bahwa peladjar-peladjar jang meluap-luap semangat berdjuang ini seperti terbukti dalam lapangan hidjau, mendjawab „ad sum" atau „sandika kasinggihan dawuh dalem", ketika negara memanggil tenaga warganja. Peladjar-peladjar puteri membuat bendera-bendera, makanan tahan lama, granat-granat ; sedang peladjar putera menjerbu kegelanggang djaja. Korban pertama djatuh di Kotabaru ketika menjerbu benteng Djepang. Djustru anak-anak „nakal" jang selalu tampak dilapangan hidjau pada waktu seperti itu menjabung njawa dimedan laga. Pemuda Faridan berkelakar diatas truck. Kalau aku gugur ingin aku diantarkan dengan truck ini. Granat jang harus dinjalakan dengan korek api memberi sasaran pada musuh dan tembakan dari atas pohon meminta dharma bakti para teruna nan bersemangat. Jeanne d'Arc „Wo die gefahr ist, da must Johana sein". Korban satu disusul jang lain. Pahlawan olah raga membuktikan semangat ksatria, mengenangkan semangat dan idealnja. Di Krawang, Suroto Kunto pembendung Nica dan Gurkha menunaikan tugasnja sampai adjalnja. Sugiarto, adiknja gugur di Bandung. Serombongan S.M.T. dengan Djoko Pramono membawa kisah penuh sensasi, terdjepit gerombolan Nica di Kedu Selatan, achirnja maut tebusannja.

Pahlawan jang masih dapat menuturkan perdjalanannja, djuga tidak sedikit. Ingat sadja pemuda Sarsono, djago djarak sedang jang penuh dengan fighting spirit, mempertahankan Alastua, jang tjita-tjitanja merebut Semarang tidak terkabul. Tanjakan kepada Belanda, siapa Djarot. Belanda jang lebih tahu dari pada siapa sadja, kalau ada jang diseganinja tak lain dari Djarot Subjantoro (bekas ketua umum keluarga Padmanaba jang pertama-tama), disamping TRIP Djawa Timur dan Barisan Warok. Sesudah disekolah Tinggi mendjadi pelopor Corps Mahasiswa. Bila kita suka menindjau ke Kedu Utara pada clash II kita akan mendjumpai seorang gadis jang mengepalai sepasukan T.P. di Tretep. Itulah Warisni, mahasiswa S.T.T. Ia turut membendung Belanda disebelah Utara. Tidak ada barisan jang patuhnja terhadap pimpinan seperti pasukan jang dipimpin Srikandi tadi.

Nah, pembatja telah puas mengenang masa silam ditaman Padmanaba ? Tetapi masih banjak jang belum kita selidiki. Marilah berdjalan kesana ! Kekolam Padmanaba nan indah, ketjil mungil. Kita mulai sadja mengamat-

amati dinding kolam jang sebelah sana, jang berlukiskan relief th. 1945/1946. Sebenarnja masih banjak kedjadian sebelum itu, waktu pimpinan berturut-turut dipegang oleh: Djarot Subjantoro, Sasmito, Suhud, Dwidjo, (kemudian Wasisto. Ismantoro, Wardojo, Sihono, Birowo).

Petjahnja revolusi Nasional pada 17 Agustus 1945 menimbulkan pula alam baru dalam kehidupan peladjar-peladjar. Mendjelang runtuhnja kekuasaan Djepang, suasana dalam sekolah-sekolah makin keruh, bukan sadja peladjaran mundur sekali akibat „kinrohosi" atau „kyoren", tetapi pun hubungan diantara murid-murid mendjadi tegang akibat suasana „tjuriga mentjurigai" jang ditimbulkan karena „penangkapan-penangkapan", demikianlah pula, hubungan guru dan murid makin tegang.

Murid-murid memandang guru sebagai „musuhnja", karena merupakan alat „pendjadjah", tak dapat mereka menjedari, bahwa pun guru-guru mengalami penderitaan bathin dalam melakukan pekerdjaan jang sering bertentangan dengan pendiriannja. Keadaan mendjadi memuntjak ketika Hardjoko, guru gerak badan jang populer dikalangan peladjar-peladjar S.M.T. dimasukkan dalam tahanan......

Mengindjak alam Indonesia Merdeka, pun S.M.T. mengalami perubahan-perubahan besar dengan mendadak. Kembalilah alam bebas, hilanglah suasana tjuriga-mentjurigai, dimana hubungan kekeluargaan pulih kembali sebagai bermula pada waktu permulaan zaman Djepang, dimana bekas peladjar-peladjar A.M.S./A — A.M.S./B dan H.B.S. bersatu padu membentuk „Keluarga Padmanaba" jang berlambangkan bunga teratai.

Prof. Dr. Prijono diangkat mendjadi Kepala Sekolah mengganti Soegardo dan sedjalan dengan ini berhubung dengan keadaan „Pimpinan Keluarga S.M.T." sudah tidak lengkap akibat revolusi, maka diputuskan untuk membentuk pengurus baru. Pemilihan jang dilakukan sesuai dengan suasana dilakukan dengan bebas, langsung dan demokratis. Dahulu pemlihan tidaklah setjara langsung, setiap murid hanja memadjukan satu suara, sedang Kepala Sekolah masih tjampur tangan.

Kekeluargaan:

Pekerdjaan pertama-pertama dari pengurus baru ialah memperbaiki suasana kekeluargaan. Aula jang sunji dengan segera diatur hingga mendjadi „gezellig". Dinding aula jang gundul kembali dihias dengan lukisan-lukisan besar, kursi tidak disusun berderet-deret seperti dalam sidang, tetapi diatur berkelompok ketjil-ketjil, sedang piano diudjung selalu pada waktu istirahat memberikan hiburan. Lagi pula oleh Kepala Sekolah disediakan madjalah-madjalah lengkap; sedangkan ditengah-tengah aula dipasang pot tanaman.

Bahwasanja usaha pengurus baru mendapat perhatian besar, terbukti bahwa aula jang semula sunji kini mendjadi penuh, merupakan pusat berkumpul.

Suara S.M.T.:

Untuk mengembangkan bakat dalam karang-mengarang, pengarang-pengarang muda S.M.T. berkumpul, dan dengan pimpinan Tjiptohardjono dan Sunarjoto, tiap Minggu sekali dapat dihidangkan „Suara S.M.T." dipapan pembatjaan.

Kesenian:

S.M.T.-lah jang pertama-tama mengeluarkan suaranja dimuka tjorong R.R.I. Jogja dikalangan peladjar-peladjar. Siaran tiap Minggu berganti-ganti berupa: siaran musik Barat (Murdianto), gamelan Jogja (Wasisto), dan pan-

tjaran sastera (Abdulmadjid). Ternjata kemudian peladjar-peladjar sekolah lainpun berlomba-lomba mengisi program R.R.I. jang berarti menambah perhatian peladjar-peladjar kepada dunia kesenian. Usaha mengadakan sandiwara amal jang dipimpin Sunarjoto dan Karsono untuk kas studiefonds S.M.T. pun mendapat hasil jang memuaskan, baik dalam keuangan maupun dalam kerdja sama antara panitia.

S.M.T. dan I.P.I. :

Sebagai sekolah jang tertinggi pada waktu itu, barang tentu peladjar-peladjar S.M.T. merupakan tenaga penting dalam organisasi I.P.I. dan pemilihan pengurus baru, Prastowo jang mewakili S.M.T. sebagai tjalon, terpilih mendjadi pengurus I.P.I. (ketua) Jogjakarta disamping djabatannja sebagai anggauta keluarga S. M. T.

Penutupan tahun peladjaran 1945/1946 di S.M.T. :

Pimpinan keluarga merasa berbesar hati, bahwa pada perajaan penutupan tahun jang merupakan perpisahan dengan murid-murid S.M.T. (anggota keluarga Padmanaba), sehingga aula penuh sesak dan meriah. Patut ditjatat banjak peladjar-peladjar memakai pakaian daerahnja masing-masing, sedang duduk „lesehan" (diatas tikar), sehingga suasana kekeluargaan terasa sungguh.

Dalam pertundjukan perpisahan „Dosomuko/Subali" dan „Kelana" Kepala Sekolah Prof. Dr. Prijono sendiri mendjadi „dalangnja".

Penutupan tahun peladjaran 1945/1946 oleh I.P.I. :

Hal jang pula menarik perhatian ialah bahwa disamping penutupan tahun jang dirajakan disekolah masing-masing, oleh pimpinan I.P. I. diselenggarakan penutupan resmi bersama-sama seluruh peladjar Sekolah Menengah bertempat dibangsal Kepatihan pada tanggal 14 Djuli 1946, jang diramaikan dengan pertundjukan wajang orang, fragment „Tjalon arang" gubahan bagian kesenian I.P.I. pimpinan Wasisto.

Ternjata bahwa mutu pertundjukan ini sungguh dapat dibanggakan dan merupakan sumbangan jang berharga bagi kemadjuan dan perkembangan seni tari Jogja, istimewa permainan mixed, jang sebelum itu merupakan „pantangan".

Pertundjukan besar jang dilakukan 50 penari, 25 pemain gamelan dan 40 penjanji membuktikan potentie peladjar-peladjar Sekolah Menengah dalam lapangan kesenian, dan hasil gilang-gemilang itupun berkat bantuan pula dari Djawatan Pengadjaran Wijoto Prodjo (K.R.T. Notojudo) berupa keuangan serta sumbangan pakaian lengkap dari Sri Sultan.

Patut ditjatat bahwa Bung Karno pun hadir dalam perajaan itu, pertama kali keluar dari Presidenan sesudah coup 3 Djuli gagal, sehingga perlu dikawal dengan pendjaga-pendjaga jang bersendjata selama menjaksikan perajaan itu.

Demikianlah bahwasanja suasana waktu itu S.M.T. merupakan „home" jang kedua ; hiburan film belum ada, sehingga sore hari Sekolah penuh dengan murid-murid jang penuh semangat berolah raga atau main tjatur dan melatih musik dsb.

Pengadjar dan peladjar adalah dwitunggal.

Clash ke II mendjadi batas antara masa perdjuangan dan masa pembangunan.

Keadaan sesudah clash II dapat dikatakan, bahwa Padmanaba djuga mengikuti pergolakan masa itu. Sebenarnja ia terpaksa, dipaksa oleh keadaan, bahwa ia harus bergerak sesuai dengan masjarakat diluar dirinja kalau Padmanaba tidak ingin hanjut dalam pergolakan masa. Dimana-mana ada kon-

perensi-konperensi, kongres-kongres jang semuanja bertudjuan menudju kepada jang satu dan mendoorbrak apa sadja jang merintanginja. Pada saat jang bagus itu partai-partai politik memperhebat kampagne-nja untuk mentjari pengikut sebagai akibat dari tersiarnja berita bahwa tidak lama lagi akan ada pemilihan umum untuk membentuk konstituante, untuk mentjari kader semata-mata untuk kepentingan partainja sendiri. Dalam pada itu makin terasa effect jang langsung ataupun tidak dengan adanja hubungan antara International Union of Student (IUS) dan peladjar Indonesia.

Faktor inilah jang mendorong para peladjar supaja bergerak dengan bantuan tidak sedikit dari guru-guru. Bantuan ini pantas didjundjung tinggi oleh semua anggauta, karena waktu itu mendjadi motor penggerak jang utama, sehingga mereka berdjumpa dengan suatu kenjataan, bahwa guru dan keluarga Padmanaba adalah loro-loroning atunggal atau Dwi tunggal jang tidak dapat dipisah-pisahkan kalau orang menghendaki supaja Padmanaba tetap subur.

Hanja persatuan antara Pengadjar dan Peladjar jang utuh sadjalah jang akan membimbing Sekolah dan Keluarga.

Ruang Sekolah.................

Keadaan makin bertambah baik. Peil peladjaran terus meningkat, dan disengadja supaja peil peladjaran terus membubung tinggi. Dengan buku-buku peninggalan djaman Djepang jang sudah tidak tjukup banjaknja lagi peladjaran diselesaikan. Guru - guru bekerdja dengan giat untuk dapat memadjukan tingkat peladjaran dan memulihkan semangat beladjar sesudah masa pertempuran. Dalam waktu jang singkat peladjaran harus diselesaikan; ini bertambah berat dengan masih sedikitnja alat-alat terutama buku tulis dan kertas-kertas jang sangat diperlukan untuk mentjatat mata peladjaran. Waktu beladjar habis untuk mendikte peladjaran karena belum adanja buku jang lengkap isinja dan djumlahnja untuk dapat didjadikan pegangan. Untuk mengadjar ini kadang-kadang peladjaran diadakan djuga waktu sore terutama waktu udjian sudah mendekat.

Keadaan mendjadi lebih baik. Pada waktu itu mulai dipergunakan diktat-diktat jang disetensil jang ditulis oleh guru-guru sebelum buku-buku jang lebih baik tersebar seperti sekarang ini. Tenaga guru terus diusahakan; tetapi karena kurangnja tenaga pengadjar maka banjak pengadjar tidak tetap, terdiri dari tenaga mahasiswa. Karena tenaga tak tetap inilah maka kadang-kadang peladjaran terhenti sampai satu bulan. Ini dapat diatasi hanja kalau ada buku-buku jang lengkap, jang mudah dimengerti oleh peladjar-peladjar dan tidak memberatkan peladjar untuk membeli setiap buku jang dibutuhkan.

Mengenai hasil S. M. T. — S. M. A. itu dapat dilihat pada daftar dan gambar I dan gambar II. Daftar tersebut disusun dari archief jang masih dapat diselamatkan, karena umum telah mengetahui selama pendudukan Belanda, gedung S.M.A./B I Negeri Jogjakarta telah diduduki dan banjak barang-barang jang hilang atau rusak, hingga susunan daftar inipun tidak dapat sempurna (lihat tahun 1945 — 1946). Pada tahun 1948 — 1949 sekolah-sekolah ditutup karena serbuan musuh (lihat sedjarah). Gambar I menundjukkan djumlah peladjar, sedang gambar II menundjukkan percentage para peladjar jang lulus dalam udjian terachir.

Pada gambar I nampak sekali bagaimana menghebatnja kenaikan djumlah peladjar pada tahun peladjaran 1946 — 1947 dari 392 orang ditahun 1945 — 1946 sampai 718 orang. Ini disebabkan karena pada tahun peladjaran itu gedung S.M.A./B melulu digunakan oleh S.M.A./B sadja, sedang pada tahun-tahun sebelumnja S.M.A. bag. Sastra turut memakanja pula hingga djumlah ruang diparo. Suatu factor lain lagi jang menjebabkan kenaikan tersebut ialah karena sesudah proklamasi hasrat para peladjar untuk meneruskan peladjarannja keperguruan tinggi meluap-luap hingga berakibat sangat kurangnja perhatian sekolah-sekolah vak.

Gambar I
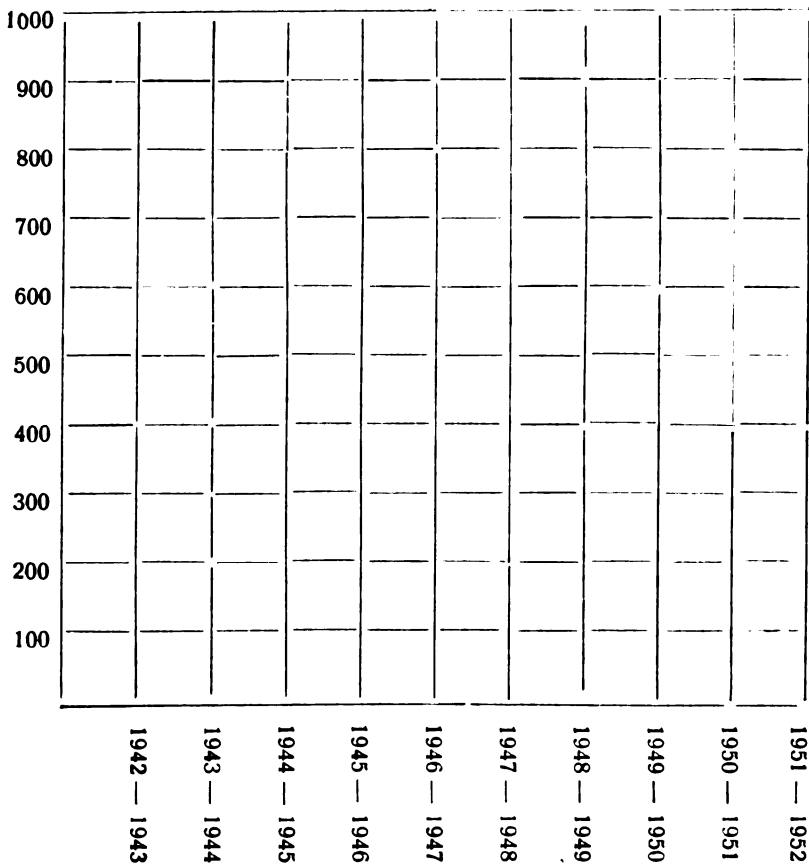
Gambar II
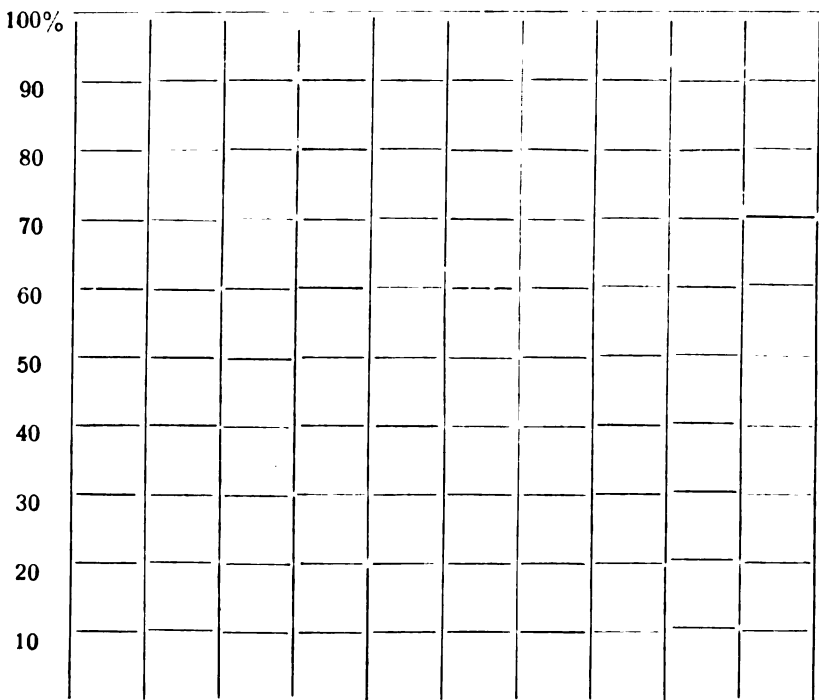
Tahun	Kelas	Djuml. kelas	Peladjar			Hasil kepandaian			Guru	
			Putri	Putra	Djum.	Naik Lulus	Tidak	Kelu-ar	T.	L.
1942—1943	I	4	9	121	130	96	15	19	—	—
	II	3	6	88	94	74	7	13	17	—
	III	2	8	64	72	56	16	—	—	—
	Djum.	9	23	273	296	226	38	32	—	—
1943—1944	I	5	17	166	183	105	29	32	—	—
	II	2	6	71	77	70	4	3	—	—
	III	2	7	69	76	70	6	—	—	—
	Djum.	9	30	306	336	245	39	35	—	—
1944—1945	I	4	27	88	115	98	8	9	—	—
	II	4	13	100	113	94	11	8	19	—
	III	3	5	89	94	90	4	—	—	—
	Djum.	11	45	277	322	282	23	17	—	—
1945—1946	I	5	27	135	162	—	—	—	—	—
	II	4	16	98	114	—	—	—	—	—
	III	4	12	104	116	—	—	—	—	—
	Djum.	13	55	337	392	—	—	—	—	—
1946—1947	I	6	46	228	274	167	65	42	—	—
	II	6	46	212	258	169	48	41	—	—
	III	4	30	156	186	119	44	23	—	—
	Djum.	16	122	598	718	455	157	106	—	—
1947—1948	I	6	57	199	256	167	76	13	—	—
	II	5	35	180	215	161	45	9	—	—
	III	4	29	124	153	97	47	9	—	—
	Djum.	15	121	503	624	425	168	31	—	—
1948—1949		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1949—1950	I	7	48	232	280	210	39	31	—	—
	II	5	26	127	153	115	23	15	16	41
	III	5	28	126	154	112	42	—	—	—
	Djum.	17	102	485	587	437	104	64	—	—
1950—1951	I	7	55	203	258	179	29	50	—	—
	II	6	33	147	180	142	34	4	17	28
	III	4	26	199	145	122	23	—	—	—
	Djum.	17	114	469	583	443	86	54	—	—
1951—1952	I	7	46	130	176	137	39	—	—	—
	II	6	38	161	199	128	71	—	17	34
	III	4	37	139	176	131	45	—	—	—
	Djum.	17	121	430	551	396	155	—	—	—

Pada gambar II dapat dilihat bahwa djumlah peladjar jang lulus udjian achir rata-rata selalu diatas 70 persen ketjuali dalam tahun 1944—1945 (kurang lebih 95 persen).

Kalau untuk tahun peladjaran 1945 — 1946 kita ambil jang lulus udjian achir 85 orang (kurang lebih 73 persen), maka selama 10 tahun ini telah meninggalkan S.M.A./B negeri Jogjakarta, 882 peladjar dengan idjazah. Sungguh suatu hasil jang tidak ketjil djumlah dan artinja untuk sesuatu bangsa jang sangat kekurangan akan tenaga pengadjar. Sajang sekali panitya tidak mempunjai gegeven mengenai 882 orang bekas peladjar tersebut. Jang telah pasti diketahui ialah, bahwa diantara djumlah tersebut sekarang telah ada seorang jang mendapat gelar Ir., 4 orang lagi dalam tahun ini diharapkan mendapat gelar Insinjur pula, 5 orang telah mendapat gelar Drs. dalam ilmu Ketabiban. Selain dari itu tidak djauh salahnja kiranja kalau kita mengatakan bahwa dua atau tiga ratus sedang menuntut peladjaran - peladjaran diperguruan-perguruan tinggi, lebih kurang empat puluh orang meneruskan peladjaran di Nederland.

Banjak pula djumlah mereka jang mentjeburkan diri dalam angkatan perang dan lapangan masjarakat lainnja. Mengenai peladjar puteri, dapat dikatakan bahwa djumlahnja selalu madju, sesuatu hal jang sangat menggembirakan. Dalam djaman Belanda rata-rata djumlah peladjar puteri 5 persen, untuk tahun 1941 — 1942 misalnja peladjar puteri ada 5,8 persen. Mulai 1942 — 1943 hingga 1951 — 1952 djumlah peladjar puteri berturut-turut 7,5 persen, 10 persen, 16 persen, 16 persen, 20,5 persen, 23,5 persen, 21 persen, 24 persen dan 28 persen, (lihat daftar disebalik).

Suatu soal jang perlu mendapat perhatian ialah djumlah peladjar jang duduk dalam tiap ruang ; kalau kita lihat pada daftar, maka tidak ada sebuah kelaspun jang peladjarnja kurang dari 30 orang tiap ruang, ada kalanja sampai 35 — 40 orang tiap kelas. Keadaan sematjam ini dengan sendirinja tidak menguntungkan.

*

C. PERKEMBANGAN S.M.A./A NEGERI JOGJAKARTA

SMA bag. A Negeri di Jogjakarta dipisahkan dari saudaranja, SMA/B pada permulaan tahun-sekolah 1947 — 1948, lalu berdiri sendiri sampai sekarang. Sekedar riwajatnja.

Sebelum djaman Djepang, dikota Jogjakarta ada AMS afd. B dan AMS afd. A (A I bagian sastera Timur, A II bagian sastera Barat). Hanja kota Jogjakarta sadja jang mempunjai AMS afd. A, dikota lain tidak ada.

Oleh karena itu maka pada djaman Djepang kota Jogjakarta mempunjai guru bangsa Indonesia, bekas guru AMS afd. A.

Setelah sekolah-sekolah landjutan di Jogjakarta dibuka kembali pada permulaan tahun sekolah 1942 — 1943 (djaman Djepang), bagian A dan B dipusatkan dibawah pimpinan seorang pemimpin dengan nama S.M.T.

Pemimpin jang pertama-tama : ialah R.J. Katamsi, lalu R. Sugardo, sekarang kepala Djawatan Pengadjaran Kementerian P.P.& K. Dr. Prijono djuga telah pernah memimpin S.M.T. tersebut.

Nama AMS diganti SMT bagian A dan B mengalami perubahan-perubahan jang hebat dengan arti tidak baik jang dialami oleh bag. A. Hanja sebuah sinar sadja jang menerangi suasana gelap gulita, jakni bahasa Indonesia lalu mengambil tempat jang kita idam-idamkan. Mata peladjaran seperti sedjarah kebudajaan, sedjarah kesenian, vak-vak jang mendjadi djiwa bag. A, tidak tampak lagi diantara vak-vak jang diadjarkan di bag. A. Pada waktu itu tenaga guru Indonesia jang berpengalaman mengadjar di bagian A kurang sekali, tetapi

kurang penting dan tidak lebih penting dari bae. B.
bagaimanapun djuga bag. A terus berdjalan sedapat-dapatnja. Tidak menghiraukan, djuga bag. A dipandang orang kurang (= rendah) dari pada bagian B. Keadaan jang demikian itu tidak dapat dipertahankan. Bagian A tidak kurang penting dan tidak lebih penting dari bagian B.

Bag. A, lebih-lebih sekarang, dapat memperlihatkan kepada murid-murid akan kekajaan tanah kita dan kekajaan batin bangsa kita, agar kita dapat mentjari kembali dasar atau perumahan kita. Barang siapa mengingat pembawaannja sudah mempunjai kejakinan nanti akan mengabdi masjarakat dilapangan kepolisian, pemerintahan, misalnja, jakni lapangan jang membawa pergaulan erat-erat dengan sesama manusia, lebih baik berdasar bag. A dari pada bag. B

Barang siapa mengingat bakatnja sudah berkejakinan hendak mengabdi sesama manusia nanti dilapangan tehnik, kedokteran dll. lebih baik pergi ke bag. B. Bagian A memberi Petundjuk, bagian B jang „Tandang-Gawe".

Lalu pada permulaan djaman kemerdekaan ada niat mentjeraikan bag. A dari bagian B sekedar memperbaiki bag. A. Untunglah niat ini disokong djuga oleh pemimpin S.M.A./AB pada waktu itu, jakni Ir. Marsito, jang menaruh simpathie kepada bagian A, meskipun seorang insinjur. Untung Dr. Prijono (asal dari AMS afd. A, sekarang ketua Fakultit Sastera dan Filsafat di Djakarta) pindah ke Jogjakarta dari Djakarta. Untung pada waktu itu jang mendjadi inspektur SMA ialah Mr. Widodo almarhum, dari AMS/A. Untung sekolah guru di Jogjakarta mau melepaskan Hadiwidjono untuk guru bahasa Djawa. Untung Prof. Dr. Prijono jang telah banjak djuga kewadjibannja pada waktu itu di Jajasan Gadjah Mada, menjanggupkan bantuan sebanjak-banjaknja. R. J. Katamsi sekarang direktur ASRI pada waktu itu mengatur museum Sanabudaja, bersedia membantu djuga. Berkat kesedaran tsb. dapatlah bag. A dipisahkan dari saudaranja bag. B, lalu berdiri sendiri pada permulaan tahun sekolah 1947 — 1948; tidak perlu lagi akan naungan saudaranja. Oleh karena Prof. Dr. Prijono sudah bertugas, begitu pula R.J. Katamsi (seorang dari dua warisan AMS/A Jogja), maka pimpinan SMA/A Negeri Jogjakarta diserahkan kepada R. Sumadi Sumowidagdo, guru warisan AMS afd. A.

SMA/A diberi gedung djalan Pakem. Murid-muridnja ialah murid-murid bag. A dari SMA/B I ditambah murid-murid bag. A dari SMA/A II di Pagelaran, kesemuanja ada 7 (tudjuh) kelas.

Inilah riwajat SMA/A Negeri Jogjakarta sampai 1948. Desember 1948 semua sekolah kita bubar akibat serangan militer Belanda terhadap Jogjakarta. Demikian R. Sumadi Sumowidagdo.

Sehabis pendudukan, achir 1949, dengan usaha Sugardo jang diberi tugas oleh Sri Sultan sebagai Kordinator Keamanan, sekolah-sekolah kita dapat terbuka lagi. SMA/A-pun tidak ketinggalan, walau dengan mengajom saudaranja lagi (SMA/B).

Ketjuali beberapa orang guru tetap, misalnja A. T. Djaelani, Kuntjoro, Padmopuspito, Duliman, Subronto dan Bakri Siregar mendapat bantuan dari tenaga-tenaga istimewa misalnja: Njonjah Prijono (isteri Dr. Prijono), Nj. Suriadarma, Nj. Effendi Saleh dll.

Tidak lama kemudian dapat menempati gedung djalan Pakem 2 lagi.

Murid-murid selalu bertambah-tambah, karena anak-anak kita asal SMA/A Negeri atau partikelir dari tempat-tempat lain selajaknja harus pula diterima. Untung mudah pula mendapat bantuan mengadjar dari Subadio Sastrosatomo, Maramis, Mr. Im. Supomo, Mr. Nitidipuro, Mr. Suhardi, Drs. Sutjipto, Prof. Dr. Prijono sampai waktu pindahnja bertugas di Djakarta lagi, selalu memberikan minat beliau terhadap pertumbuhan SMA/A Negeri. Gambar „Samba-Yadjnjawati" lukisan Bali, ukuran besar sekali, satu-satunja perhiasan dinding disekolah itu hadiah dari beliau, bukti minat beliau terhadap puteri-puteranja jang akan mengedjar ilmu-achlak seperti ilmu beliau.

Tidak lama dari terbentuknja lagi SMA/A jang sekarang djadi SMA/A I, terpaksa membuka SMA/A II masih dalam tahun 1949, jang sampai sekarang belum mempunjai gedung sendiri dan terpaksa beladjar pada waktu sore, menumpang digedung SMA/A I.

Sedjak pertengahan tahun 1950 keadaan telah berlaku agak normaal, dan dapat diadakan perubahan pemimpin baru ialah Mardowo (sekarang dikantor Kementerian), diganti Sunardjo Haditjaroko, jang lalu pergi beladjar di London, dan diganti oleh Thio Kiem An, achirnja dalam tahun 1952 dipimpin oleh direktur jang sekarang R.M. Sutardi Surjohudojo, dari Inspeksi pusat SMA.

Sekarang ini SMA/A I berkelas 11 buah, berguru tetap 13 dan berguru sementara 19 orang. Pimpinan tata-usaha sedjak semula dipegang oleh Rum Supandi.

SMA/A II meskipun belum bergedung sendiri, pun sudah berkelas 11 buah, dipimpin oleh Wahjudi, lengkap dengan guru tetap dan guru bantunja.

SMA/A jang partikelir, tidak kurang dari 10 buah, misalnja dari golongan kebangsaan: Taman Madya, dari golongan agama: Islam, Kristen, Katholik.

*

D. PERKEMBANGAN S.M.A./B II

PADA tanggal 16 Djanuari 1950, S.M.A./B II lahir di Jogjakarta dibawah pimpinan Suwito Puspokusumo jang pada ketika itu merangkap mendjadi Direktur S.M.A. bagian C Jogjakarta.

Pada hakekatnja S.M.A./B-II dibuka berhubung Pemerintah berhasrat menghargai djasa-djasa dari pedjuang-pedjuang jang pada waktu jl. dengan gagah berani ikut serta membela kemerdekaan Negara.

Pada bulan Oktober 1950 oleh karena baik S.M.A./B-II maupun S.M.A./C bertambah djumlah muridnja dan bertambah kelas, Suwito Puspokusumo menjerahkan pimpinan S.M.A./B-II kepada Hartono.

Nama S.M.A./B-II. Kebanjakan orang menjebut atau menjangka bahwa S.M.A./B-II Jogjakarta S.M.A. Peralihan. Ini tidak benar. S.M.A./B-II Jogjakarta adalah S.M.A. Negeri bagian B biasa atau umum (dapat menerima murid-murid kalau memenuhi sjarat-sjarat untuk bahagian B, akan tetapi **diistimewakan menerima murid-murid pedjuang** jang memenuhi sjarat-sjarat untuk bagian B).

Maka dengan uraian ini ternjata bahwa S.M.A./B-II terdiri sebahagian besar dari bekas-bekas Pedjuang.

S.M.A./B-II bertempat di Tamankrido no: 7 (bekas gedung A.M.S. afd. B); dibuka pada sore hari djam 1.30 sampai djam 7 malam, karena pada waktu pagi gedung dipakai oleh S.M.A./B-I.

S.M.A./B-II mulai pada 16-1-1950 dengan kelas I — 2 kelas, mempunjai 56 murid putera dan 4 puteri. Kelas II — 2 kelas, mempunjai 47 murid putera dan 2 murid puteri. Kelas III — 2 kelas, mempunjai 60 murid putera dan 7 murid puteri. Djadi djumlah 6 kelas dengan mempunjai 176 murid.

Pada ketika itu S.M.A./B-II mempunjai guru tetap 1, guru tidak tetap 28, pegawai administrasi 3 dan pekerdja 4 orang.

Sesudah 2 bulan, jaitu pada 13 Maret 1950 kelas I mendjadi 3 kelas dengan 60 murid putera dan 6 puteri. Kelas II mendjadi 3 kelas dengan 79 murid putera dan 3 puteri. Kelas III mendjadi 3 kelas dengan 85 murid putera dan 12 puteri. Djumlah mendjadi 9 kelas dengan 275 murid.

Berarti sesudah 2 bulan bertambah 3 kelas dengan tambahan 99 murid.

Kemudian S.M.A./B-II mempunjai:

Kelas I - 4 kelas dg. 101 murid putera dan 17 puteri) Djumlah 10 kelas

Kelas II - 4 kelas dg. 105 murid putera dan 2 puteri) dengan mempunjai
Kelas III - 2 kelas dg. 69 murid putera dan 2 puteri) 294 murid.

Mempunjai guru tetap 9 orang, guru tidak tetap 29, pegawai administrasi 5 dan pekerdja 5 orang.

Karena sekolah dibuka pada sore hari, maka timbullah kesukaran-kesukaran antara lain :

a Banjak murid-murid pindah kesekolah lain, teruama murid-murid putri.
b. Guru-guru kebiasaannja pada pagi hari bekerdja pada sekolah atau Djawatan lain, atau mengikuti kuliah. Mereka ini selalu tergesa-gesa mengedjar waktu agar djangan terlambat; mungkin sampai lupa makan siang.
c. Direktur selalu berdiri dengan hati ber-debar-debar bersedia akan mendjalankan tugasnja apabila seorang guru terlambat atau tidak hadlir.
d. Para pegawai tata-usaha terpaksa bekerdja 10 sampai 12 djam tiap hari karena mereka harus masuk pagi untuk berhubungan dengan kantor-kantor atau djawatan-djawatan lain.
e. Soal listrikpun memegang peranan penting. Karena peladjaran selalu terganggu kalau lampu mati.
f. Air minumpun turut menjusahkan, karena mulai djam sekolah dibuka jaitu djam 1.30 air minum tidak mengalir lagi.

Walaupun ada 1001 kesukaran S.M.A./B-II dapat mengatasi semuanja dengan hasil jang menggembirakan.

Pada bulan Agustus 1950, jaitu pada udjian penghabisan umum (ketika itu S.M.A./B-II baru berdjalan 6 bulan, karena 2 bulan libur), telah lulus 4 orang dari 7 murid = 57%. Desember 1950 lulus 79 orang dari 114 murid = 73 %. Djadi rata-rata dalam tahun peladjaran 1949/1950 ada 69% lulus.

Agustus 1951 lulus 74 orang dari 88 murid = 84%. Nopember 1951 lulus 9 orang dari 14 murid = 64%. Djadi rata-rata dalam tahun peladjaran 1950/1951 lulus 81%.

April/Mei 1952 lulus 39 orang dari 47 murid = 83%.

Dari keterangan tadi dapat diambil kesimpulan, bahwa S.M.A./B-II tiap-tiap tahun turut mengadakan udjian penghabisan dua kali.

Dengan tidak mengingatkan pajah atau kesukaran-kesukaran, maka putera-putera kita jang pada beberapa waktu jang lalu sebagai Pedjuang turut bertempur dimedan perang, dapat dididik dalam waktu jang singkat.

*

E. PERKEMBANGAN S.M.A./C DI JOGJAKARTA

PADA tanggal 17 September 1949 di Jogjakarta telah dibuka Sekolah Menengah Umum bagian Atas bagian Juridis - Ekonomis (S.M.A./C).

Sebelum pemulihan kedaulatan, masjarakat Jogjakarta belum memiliki S.M.A./C. Sebelum clash II hanja beberapa kota sadjalah jang mengenal S.M.A./C, a.l. Surakarta dan Magelang. Mengingat kebutuhan Negara akan tenaga-tenaga menengah, maka sekitar tahun 1946 ditjiptakanlah sebuah S.M.A. baru jaitu bagian Juridis - Ekonomis. Pada djaman Djepang terdapatlah di Surakarta sebuah Sekolah Menengah Atas Pamong - Pradja, jang ditutup hampir bertepatan waktu dengan proklamasi kemerdekaan, karena sekolah sematjam ini dirasakan tidak sesuai lagi dengan panggilan djaman. Tetapi jang mendjadi persoalan ialah:

a. bagaimanakah tjara menampung peladjar S.M.A. Pamong-Pradja jang belum selesai peladjarannja ?
b. bagaimanakah tjara mengisi kebutuhan Negara akan tenaga-tenaga dalam pelbagai lapangan misalnja Pengadilan Negeri, Pamong Pradja, Perdagangan dan sebagainja.

Persoalan ini dipetjahkan oleh para perentjana — salah seorang anggauta terkemuka adalah almarhum Mr. R. M. Widodo Sastrodiningrat — dengan melahirkan S.M.A. Juridis-ekonomis jang bertudjuan:

a. memenuhi kebutuhan Negara akan tenaga menengah pada pelbagai djawatan misalnja Pengadilan Negeri, Pamong Pradja.
b. memberi djalan pada siswa-siswa-nja untuk melandjutkan ke Perguruan lahirkan S.M.A. Juridis-ekonomis jang bertudjuan:

Tjorak Juridis - Ekonomis ini dinjatakan dengan mata peladjaran seperti berikut:

Juridis: hukum negara
hukum pidana
hukum sipil dan dagang

Ekonomis: ekonomi umum
ekonomi perusahaan
urusan uang dan kredit
ilmu bumi perekonomian

Disamping mata peladjaran umum, terdapat pula mata peladjaran hitung dagang dan memegang buku, hingga dengan demikian siswa-siswa S.M.A./C tidak akan tjanggung-tjanggung menghadapi pekerdjaan-pekerdjaan pada djawatan Pemerintah, pula tidak akan asing apabila ditempatkan pada perusahaan-perusahaan partikelir.

Belum lagi dapat menamatkan seorang murid, perang kolonial II meletus. Terhentilah untuk sementara waktu pendidikan kepada pemuda-pemuda kita.

Segera setelah Pemerintah dapat melantjarkan tugasnja, maka dengan surat putusan Menteri P.P. & K. no. 210/B tg. 27/10-1949 jang mulai berlaku pada tg. 27-9-1949 dibukalah S.M.A./C di Jogjakarta. Seperti tiap-tiap permulaan, maka permulaan S.M.A./C Jogjakarta dibawah pimpinan Hadiwidjono Acting Direktur S.M.A. Negeri bagian Sastera, sangat sederhana. Lebih dari sederhana, karena S.MA. Negeri bagian C mulai dengan tiada memiliki sesuatu apa. Gedung menumpang pada gedung S.M.A. Puteri Stella Duce, dan kemudian menumpang pada gedung S.M.A. Negeri B dan achirnja hingga sekarang mempergunakan gedung Bopkri. Tetapi berkat kegiatan Hadiwidjono dapatlah segala kesulitan-kesulitan diatasi.

Setelah S.M.A./C agak mendjadi besar dan Hadiwidjono amat sibuk pula dengan tugasnja jang utama, ialah memimpin S.M.A. Negeri bagian Sastera dan membantu Fakultit Sastera, maka datanglah penggantinja, jaitu R. M. Soewito Poespokoesoemo.

Dibawah pimpinan R.M. Soewito Poespokoesoemo dimulailah dengan penjempurnaan isi dan tjorak S.M.A./C, jang bagi kita masih baru sama sekali. Dari angka-angka dibawah ini akan ternjata bahwa S.M.A./C. mendapat perhatian lebih dari pada memuaskan, baik dari anak maupun orang tua.

Tahun Peladjaran	Djumlah murid	Tambahan dinjatakan dengan %:
1949 / 1950	82	—
1950 / 1951	129	59
1951 / 1952	335	160
1952 / 1953	392	14

Menurut daftar tambahan murid pada tahun peladjaran 1952/1953 tidak begitu banjak, kurang lebih hanja 14%. Tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa pada tahun peladjaran 1952/1953 S.M.A./C terpaksa dipetjah mendjadi dua,

masing-masing berdiri sendiri-sendiri (Surat putusan Menteri P.P. & K. no. 3094/B tg. 21-7-1952). Adapun pemetjahan ini dirasakan sebagai suatu keharusan, karena pendaftaran sebagai tjalon murd S.M.A./C melebihi dari pada ruangan jang tersedia. Dengan adanja pemetjahan ini S.M.A./C-I tetap buka pada petang hari, sedang S.M.A./C-II pada pagi hari. Bahwa Jogjakarta merupakan tanah jang tjotjok bagi S.M.A./C ternjata dengan banjaknja djumlah S.M.A./C partikelir. Pada tahun peladjaran 1952/1953 S.M.A./C-II mempunjai 6 buah kelas I, 1 buah kelas II dan 2 buah kelas III, dengan djumlah murid 280 orang.

Selama tiga tahun ini S.M.A./C Jogjakarta telah dapat membagikan idjazah sebanjak 339 helai, berturut-turut seperti berikut:

1950 — 56

1951 — 74

1952 — 209.

Djumlah ini tidak hanja dari S.M.A./C Negeri sadja, melainkan djuga dari S.M.A./C partikelir. Tahun 1953 S.M.A./C akan lebih banjak menjerahkan siswa-siswanja kepada masjarakat, mengingat bahwa tjalon-tjalon penempuh udjian jang tertjatat sudah ada kurang lebih 600 orang. Pemilik-pemilik idjazah S.M.A./C sebagian melandjutkan peladjarannja ke Perguruan Tinggi atau kursus-kursus, sebagian terdjun kedalam masjarakat bekerdja sebagai pegawai Negeri, kantor-kantor partikelir, dan tidak sedikit pula jang mendjadi guru Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, tersebar diseluruh kepulauan Indonesia.

Dunia pendidikan Indonesia tidak statis, perubahan-perubahan kearah perbaikan pendidikan diadakan. Pada permulaan tahun 1952/1953 seluruh mata-peladjaran pada S.M.A./C mendapat penindjauan. Apabila sifat S.M.A./C sebelum 1952/1953 dualistis, jaitu mentjukupi kebutuhan masjarakat dan mendidik bibit bagi perguruan tinggi, dengan titik berat diletakkan kepada kebutuhan masjarakat, maka S.M.A./C sesudah tahun 1952/1953 menitik beratkan pendidikannja kepada persiapan perguruan tinggi. Rentjana mata-peladjaran S.M.A./C baru banjak menjimpang dari rentjana lama. Mata-peladjaran hukum dan ekonomi terbatas pada pengertian-pengertian jang bersifat umum (rentjana lama mendalam sampai hal-hal jang chusus). Sifat-sifat juridis dan ekonomis kita dapati seperti berikut:

Juridis: Tatanegara
Tata Hukum
Ekonomis: Ekonomi (umum)
Ilmu bumi perekonomian
Sedjarah perekonomian.

S.M.A./C terutama mempersiapkan siswa-siswa untuk Fakultit Hukum dan Ekonomi. Menurut bakatnja, maka siswa-siswa S.M.A./C pada tahun ketiga dipetjah mendjadi dua, jaitu djurusan hukum dan djurusan ekonomi. Mana jang baik rentjana lama atau rentjana baru tidak perlu didjawab disini, karena ini termasuk pada kekuasaan ahli politik pendidikan.

Kegiatan-kegiatan Inspeksi S.M.A. tidak hanja ditudjukan pada penjelenggaraan dan pembimbing S.M.A. sadja, melainkan djuga ditudjukan pada penjelenggaraan guru-guru pada S.M.P. Demikianlah sedjak tahun peladjaran 1952/1953 S.M.A./C Jogjakarta mempunjai tugas untuk membuka Pendidikan Guru Sekolah Landjutan Pertama. Mula-mula perhatian abiturient S.M.A. terhadap P.G.S.L.P. sangat ketjil, tetapi beberapa bulan kemudian ternjata bahwa usaha Inspeksi S.M.A. mendapat sambutan hangat dari pada pemuda-pemuda lulusan S.M.A.

Menjelenggarakan sebuah S.M.A. dan P.G.S.L.P. dengan murid sedjumlah 600 orang, adalah bukan soal jang ringan. Tetapi berkat pengorbanan dari para tjerdik pandai dapatlah kedua sekolah tersebut diselenggarakan sebaik-baiknja.

Guru besar (bahkan decan sesuatu fakultit) dan Walikota, guru-guru tetap bersama-sama dengan para mahasiswa menjelenggarakan tugas berat: mendidik dan mengadjar pemuda-pemuda.

Betapa besar keinsjafan tenaga pendidik terhadap tugasnja dapat dilihat dari hasil tanja djawab seperti berikut. Kepada seorang academicus muda dalam ilmu ekonomi, ditanjakan mengapa ia memilih pekerdjaan guru, maka didjawabnja, meskipun ia dapat mentjari posisi jang lebih baik, toch ia memilih pekerdjaan guru, karena ia menganggap bahwa pilihannja itu merupakan investatie untuk djangka pandjang, jang lebih berguna bagi masjarakat Indonesia.

Kegiatan beladjar dikalangan pemuda ternjata lebih dari pada memuaskan. Tetapi alat-alat peladjaran masih sangat kurang, antaranja S.M.A./C belum mempunjai gedung sendiri. Kita berusaha dengan alat-alat jang kita miliki, dan dengan penuh pengharapan kita menghadapi masa depan.

*

F. S.M.E.A. NEGERI JOGJAKARTA

SEKOLAH S.M.E.A. (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) kurang dikenal oleh masjarakat. Untuk memperoleh gambaran jang agak lengkap, perlu kiranja kita menindjau sebentar kepada keadaan didjaman pendjadjahan Belanda dan pada djaman penindasan Djepang. Pada djaman kolonial dahulu karena masih sangat tebalnja semangat „kaprijajen", lapangan perekonomian pada umumnja kurang menarik pemuda-pemuda kita. Sekolah-sekolah jang memberikan peladjaran kedjurusan perdagangan, seperti M.H.S. dan sebagainja semata-mata mendidik tenaga-tenaga jang diperlukan untuk melajani keperluan perusahaan-perusahaan asing. Demikian djuga dengan sekolah ini dahulu, jang oleh masjarakat Jogjakarta dikenal dengan nama Djokjasche Handelsschool. Lama peladjaran pada sekolah itu ialah 5 tahun jang dibagi mendjadi 3 tahun „onderbouw" dan 2 tahun „bovenbouw".

Setelah Djepang mendarat ditanah air kita, semua sekolah ditutup dan begitu djuga D. H. S.

Atas inisiatip dari beberapa guru bangsa Indonesia jang dulu mengadjar pada D. H. S. didirikanlah sebuah sekolah partikelir dengan nama S. M. D. sebagai kelandjutan dari D. H. S. dan menempati gedung jang sama djuga jaitu di Djetis No. 3. Susunan sekolah dan mata-peladjaran jang diberikan belum banjak mengalami perubahan, hanja djiwa dan semangat jang diisikan kepada pemuda-pemuda kita, jang sangat berlainan.

Insjaf akan tugas jang kita hadapi bagi nusa dan bangsa dimasa depan, maka pada peladjar-peladjar kita mulai diisikan semangat kenasionalan dan pembentukan djiwa jang bersendikan „pertjaja akan diri sendiri".

Revolusi '45 meletus, benih-benih perdjuangan jang diam-diam dipupuk selama penindasan Djepang minta diudji. Sekolah di Djetis No. 3 mendjadi Markas Divisi IX, dan semua guru-guru masuk dalam Divisi dan peladjar-peladjarnja mendjadi tentara.

Sesudah Negara kita berumur beberapa bulan, ternjata bahwa tidak semua peladjar mendapat tempat dalam perdjuangan bersendjata, dan berkeliaran dimana-mana dengan tiada tugas jang tertentu.

Karena guru-guru merasa bertanggung djawab atas pendidikan dan nasib mereka dikemudian hari, maka perlu diadakan pembagian tugas. Sebagian dari guru-guru ada jang tetap di Divisi, dan sebagian lainnja (7 orang) ditugaskan untuk membuka sekolah kembali. Sesudah berusaha beberapa minggu, berhasillah memperoleh gedung di Gowongan - Kidul No. 5/188, dan sekolah dibuka kembali dengan 27 orang murid dan 7 orang guru. Sesudah beberapa bulan berdjalan, maka ini sudah dapat merupakan sekolah biasa,

sehingga dapat dibentuk kelas-kelas. Dalam „clash" pertama perguruan mengalami kekatjauan lagi, karena sebagian besar dari peladjar - peladjar menerdjunkan diri dalam lapangan perdjuangan dan gedung sekolah dipakai oleh „Persendjataan". Sesudah ada persetudjuan „Renville" sekolah dapat berdjalan kembali seperti biasa.

Pada tanggal 31 - 5 - 1947, sekolah S.M.D. didjadikan sekolah jang bersubsidi. Dan pada saat itu djuga oleh Inspeksi Pengadjaran Ekonomi jang pada waktu itu berada di Solo direntjanakan suatu systim pendidikan baru mengenai lapangan perekonomian, karena sesudah Negara kita merdeka, dirasakan benar kebutuhan akan tenaga-tenaga, jang dapat menduduki tempat-tempat dalam lapangan perekonomian jang dulu mendjadi monopoli bangsa Belanda.

Disusunlah oleh Inspeksi suatu rentjana peladjaran baru, jang mendjamin tertjapainja suatu tingkat pengetahuan jang harus dimiliki oleh seorang „bedrijfsleider" sesuatu perusahaan atau jang dapat dipakai seseorang jang ingin mengembangkan inisiatifnja sendiri dalam lapangan perekonomian. Mengingat akan hasrat pemuda-pemuda kita jang besar, untuk melandjutkan peladjarannja keperguruan tinggi, maka rentjana peladjaran itu dibuat sedemikian rupa, sehingga peladar-peladjar jang tjukup bakatnja dapat mengikuti peladjaran di perguruan tinggi jang sedjurusan dengan pendidikannja sesudah dapat diterima diperguruan tinggi itu menurut sjarat-sjarat penerimaan jang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri.

Bagian „onderbouw" dirubah namanja mendjadi Sekolah Dagang (S.D.) menerima peladjar-peladjar tamatan S.R. dan lamanja didikan 3 tahun.

Bagian „bovenbouw" namanja mendjadi Sekolah Ekonomi Menengah (S.E.M.) lamanja peladjaran djuga 3 tahun dan menerima peladjar-peladjar tamatan S.M.P. atau S.D.

Pemberian nama S.D. dan S.E.M. kemudian oleh Inspeksi dirasa kurang tepat dan pada tanggal 1 April 1951, nama S.D. diganti mendjadi S.M.E.P (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama), dan nama S.E.M. diganti mendjadi S.M.E.A. (Sekolah Menengah Ekonomi Atas).

Sesudah terbukti, dengan kekuatan sendiri, sekolah ini dapat mentjapai tingkatan seperti jang ditjita-tjitakannja, pada tanggal 12 Agustus 1950, sekolah beserta gedung dan miliknja diserahkan kepada Pemerintah dengan tiada memakai sjarat.

Demikian keadaan sekolah ini jang dalam tahun 1945 dimulai dengan 27 orang murid dan 7 orang guru, sekarang sudah tumbuh mendjadi 2 sekolahan jang berdiri sendiri, jaitu:

I. S.M.E.P. jang mempunjai 8 kelas dengan 19 guru, jang karena tidak adanja ruangan terpaksa diadakan pada petang hari;

II. S.M.E.A. jang mempunjai 11 kelas dengan 43 tenaga pengadjar, dan dapat menempati gedung sekolah pada pagi hari.

Dalam bulan Oktober 1952, pada S.M.E.A. Negeri di Jogjakarta digabungkan suatu Pendidikan Guru Sekolah Landjutan Pertama djurusan Ekonomi, (P.G.S.L.P. — Ekonomi) suatu pendidikan bertingkat Colege, jang merupakan tempat persemaian untuk guru-guru sekolah landjutan, jang dirasa sangat kurangnja, untuk mengimbangi hasrat ingin madju dari bangsa kita jang meluap-luap, sesudah mentjapai kemerdekaannja.

*

G. SEKOLAH GURU PENDIDIKAN DJASMANI

SEDJAK bangsa kita mendjadi bangsa jang merdeka, mulailah kita mengadakan usaha mengatur kebutuhan-kebutuhan kita, diantaranja usaha dilapangan pendidikan dan pengadjaran. Maka lahirlah undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan djasmani disekolah. Didalam undang-undang itu terdapat pasal jang berbunji:

„Pendidikan djasmani jang menudju kepada keselarasan antara tumbuh-nja badan dan perkembangan djiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia mendjadi bangsa jang sehat dan kuat lahir batin, diberikan kepada segala djenis sekolah" (Undang-undang pendidikan bab VI ps. 3).

Pendidikan dan pengadjaran harus meliputi kesatuan rochani-djasmani. Pertumbuhan djiwa dan raga harus mendapat tuntunan jang menudju kearah keselarasan, agar tak timbul penjebelahan kearah intelektualisme atau kearah perkuatan badan sadja.

Perkataan keselarasan mendjadi pedoman pula untuk mendjaga agar pendidikan djasmani tak mengasingkan diri dari pada pendidikan keseluruhan. Pendidikan djasmani merupakan usaha pula untuk membuat bangsa Indonesia sehat dan kuat lahir batin. Oleh karena itu pendidikan djasmani berkewadjiban djuga memadjukan dan memelihara kesehatan badan, terutama dalam arti preventief, tetapi djuga setjara correctief.

Pendidikan djasmani sebagai bagian dari pada tuntunan terhadap pertumbuhan rochani-djasmani dengan demikian tak terbatas pada djam peladjaran jang diperuntukkan baginja sadja.

Untuk melaksanakan tudjuan dari pendidikan djasmani maka dengan surat keputusan Menteri P. P. & K. pada Agustus 1950 dibuka sebuah Sekolah Guru Pendidikan Djasmani Jogjakarta (sebulan kemudian di Bandung dan setahun sesudah itu di Surabaja).

Jang diterima mendjadi murid, jalah mereka jang beridjazah S.M.P. atau jang sederadjat dengan itu. Para tjalon ini semua masih mengalami pemeriksaan-pemeriksaan : a) Physiologisch (pemeriksaan darah dan kesehatan badan, pemeriksaan ukuran tentang pertumbuhan badan dan b) ketangkasan (berenang, bersenam, lompat, lempar, lari).

Tjalon-tjalon jang beridjazah S.M.P. bagian A dan S. T. masih diharuskan menempuh udjian dalam mata-mata peladjaran masing-masing, ilmu pasti, ilmu manusia, dan ilmu hewan.

Peladjaran S.G.P.D. mendapat pendidikan selama 4 tahun dan setelah lulus dari udjian penghabisan diperbolehkan mengadjar di sekolah landjutan tingkat pertama. Selain dari pada itu mereka dapat djuga mendjalankan pekerdjaan instruktor pendidikan djasmani untuk sekolah rakjat, perusahaan, kantor besar, asrama-asrama, perkumpulan-perkumpulan olah-raga, pusat latihan pemuda atau angkatan perang.

Pada waktu pembukaan S.G.P.D. Jogja hanja dapat menerima sedjumlah peladjar dan baik sekolah maupun asramanja bersifat darurat. Perumahan darurat itu letaknja disebuah desa jang djauhnja 5 km dari kota. Sampai tahun 1952 djumlah peladjarnja meningkat mendjadi 190.

Sudah dapat dibajangkan, bahwa pertumbuhan S.G.P.D. berpangkal pada titik no. I. Selangkah demi selangkah S.G.P.D. berdjalan, sebatu demi sebatu perumahannja dibangun, dan berkat kesabaran pentjipta pengusaha dan peladjarnja terwudjudlah sudah Sekolah Guru Pendidikan Djasmani jang sekarang ini.

Statistik guru.

Th peladjaran	Guru tetap	Guru tidak tetap	Djumlah	Keterangan
1950/1951	3	10	13	
1951/1952	5	23	28	
1952/1953	5	32	37	

Statistik peladjar.

Th. peladjaran	djumlah peladjar	Djumlah kelas	Djumlah Keterangan
1950/1951	33	1	I
	59	2	I
	65	2	I
1951/1952	126	5	I dan II
1952/1953	190	6	I, II dan III

*

H. SEKOLAH GURU KEPANDAIAN PUTERI

PADA djaman pendudukan Djepang dalam bulan Nopember 1942 di Djakarta didirikan sebuah Sekolah Guru Tinggi Puteri (Djoto Josi Koto Sihangakko) dibawah pimpinan Prof. Dr. Prijono. Sekolah ini mempunjai tiga bagian, jaitu: a. kerumah tanggaan, b. bahasa dan c. ilmu pasti.

Dalam bulan Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan diutjapkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, para guru Sekolah Guru Tinggi Puteri berkumpul di gedung museum Djakarta untuk disumpah kesetiaannja terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Pada waktu itu susunan guru adalah sebagai berikut:

Kepala : Dr. Prijono.
Guru-guru : Nona Kartini Prawirotanojo,
Suratmi,
Kajatun (wakil kepala),
Nj. Nurseha,
Nonah Legoh.
Umilah dan
Nj. S. Kartowijono.

Pada bulan September 1945 tentara Inggeris dengan Nica menduduki Djakarta. Kekatjauan timbul dimana-mana. Suara tembakan sendjata api tidak asing lagi.

Suatu peristiwa telah memaksa para guru Sekolah Guru Tinggi Puteri mengambil tindakan setjara tegas berhubung ditjuliknja seorang murid dari SMPP Djakarta oleh tentara Nica dan dibawa ke bataljon 10, jang tersohor akan kebuasannja itu. Pembatja tidak usah menanjakan, bagaimana nasib anak tadi. Berhubung kedjadian tersebut lagi pula karena para murid tiap pergi kesekolah harus meliwati bataljon 10, maka oleh para guru SGTP diputuskan untuk menutup sekolahnja. Dalam pada itu 45 orang murid jang berdiam diasrama Kramat diberi peladjaran dirumah oleh para guru, dibawah pimpinan Nona Suratmi. Untuk menghindari gangguan, maka asrama itu didjadikan asrama Palang Merah Indonesia. Sementara itu Dr. Prijono dengan surat keputusan Menteri P.P. dan K. diangkat mendjadi Direktur SMA Jogjakarta. Dalam pertemuannja dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada Dr. Prijono disarankan kemungkinan memindahkan SGTP Djakarta ke Jogjakarta atau Solo. Pada bulan Djanuari 1946 guru-guru Kajatun dan Umilah pergi ke Jogja untuk membitjarakan pemindahan sekolah tersebut.

Buat sementara sekolah dibuka digedung Stella Duce tiap sore djam 14.00 — 19.00. Pembukaan dinjatakan sedjak 1-1-1946. Tapi sebenarnja sekolah baru dapat dimulai pada bulan Pebruari 1946. Mula-mula sekolah dipimpin

a. 3 tahun — 1948,
b. 3½ tahun — 1949/50,
c. 3 tahun — 1951/52 dan
d. 4 tahun — 1952.

Rentjana pengadjaran.

a. 1946/48 disesuaikan dengan masa perdjuangan, disampingnja itu diusahakan pengetahuan umum jang diperlukan untuk mengisi kemerdekaan.
b. 1949/50 disesuaikan dengan masa pembangunan. Bahan-bahan keperluan peladjaran praktek mulai ada (kain - kain, benang - benang dll.). Untuk mengedjar kekurangan karena clash II lama kursus ditambah ½ tahun.
c. Mengingat kekurangan tenaga pengadjar bagi S.K.P. - S.K.P., waktu beladjar dirubah mendjadi 3 tahun.
d. 1952. Pengalaman menjatakan, bahwa lama kursus 3 tahun terlampau singkat untuk memberi bekal kepada para tjalon guru. Dalam konperensi ditetapkan lama kursus 4 tahun dengan pembagian waktu sebagai berikut:
Tahun pertama: kelas persiapan — semua peladjar diberikan kerumahtanggaan maupun djahit-mendjahit dan pengetahuan umum.

Tahun ke 2 dan 3: Differentiasi memperdalam vak jang dipilih oleh para murid.
Pada achir tahun ke 3 diselenggarakan udjian praktek.

Tahun ke 4: bagian pendidikan. Para murid dilatih mengadjar disekolah latihan mengadjar dan bekerdja diluar (rumah sakit — piatu — hotel — mode — atelier, dalam rumah tangga keluarga jang mau mempergunakan bantuan tenaga murid).

Perbedaan G.O.S.V.O. — S.G.K.P. R.I.

Dulu 1. **Rentjana pengadjaran diberatkan** kepada vak: pengetahuan umum tidak mendapat perhatian. Mata-mata peladjaran umum jang diberikan: bahasa Belanda, bahasa Inggeris, Ilmu Pendidikan.
2. **Dasar pendidikan:** perseorangan, hubungan satu sama lain tidak ada.

Sekarang: Rentjana pengadjaran diatur sedemikian rupa, hingga terdapat imbangan antara **peladjaran vak** dan **peladjaran umum.**
Perbandingan dalam pembagian waktu = 2 : 1.

Dari mata peladjaran umum diberikan:

1. Bahasa Indonesia.
2. „ Inggeris.
3. Ilmu Alam/Kimia.
4. Ilmu Pendidikan.
5. Sedjarah Kebudajaan.
6. Ilmu Kemasjarakatan.
7. Gerak Badan.
8. Hygiene.

Dasar pendidikan: Kekeluargaan.

Tempat S.G.K.P. Jogjakarta:

1946 digedung S.K.P. Lempujangwangi 16,
1946/47 „ S.M.P.P. (Stella Duce) Djalan Mahameru.
1947/48 „ S.K.P. Lempujangwangi 16.
Oktober — Desember 1948 — di Gondokusuman 23; mendapat 3 ruangan dari Djawatan Kehutanan. Peladjaran praktek sebagian diberikan digedung S.G.P. Dj. Djati 2.

oleh Dr. Prijono, dan seperti di Djakarta sekolah masih tetap mempunjai 3 bagian. Pada th. 1947 berhubung dengan pertimbangan praktis S.G.T.P. didjadikan 2 sekolah, jaitu: Sekolah Guru Kepandaian Puteri, chusus untuk peladjaran kerumahtanggaan digedung Sekolah Kepandaian Puteri di Lempujangwangi dan bagian bahasa dan ilmu pasti diberi nama Sekolah Guru Menengah tetap tinggal digedung Stella Duce. Murid-murid SGM ini kemudian meneruskan peladjarannja ke Teachers college, dibawah pimpinan Drs. Sumadi. Achirnja abiturient Teachers college ini diterima masuk Fakultit Sastera Paedagogik dan Filsafat Universitit Negeri Gadjah Mada.

Pada tahun 1947 pimpinan S.G.K.P. dipegang oleh Nj. K. Warsito dan kemudian pimpinan pindah ketangannja Nj. Sukadi. Pada th. pengadjaran 1950/51 sekolah dipimpin oleh N. Kartini Prawirotenojo dan mulai th. 1951 pimpinan dipegang oleh Nona S. Roegajah.
Lama peladjaran S.G.K.P.:

Masa pendudukan.

Persiapan memperlengkapi ruang-ruang digedung Gondokusuman 23 baru dimulai waktu clash ke-II pada 19 Desember 1948. Barang-barang, alat-alat tulis menulis — alat-alat dapur sebagian besar hilang. Jang dapat diselamatkan beberapa mesin djahit, perkakas dapur jang kemudian dititipkan dirumah guru-guru.

Selama pendudukan Belanda S.G.K.P. ditutup. Sumbangan guru-guru dan murid-murid:

1. Menjelenggarakan huisonderwijs dirumah masing-masing.
2. Membantu P.M.I.
3. Beberapa murid membantu badan-badan perdjuangan, baik diluar maupun dalam kota Jogjakarta.

Pada bulan Djuni/Djuli 1949 persiapan pembukaan kembali S.G.K.P. di Lempujangwangi 11 mendapat kesukaran, a.l. berebutan gedung dengan djawatan sosial. Pada tg. 8 - 8 - 1949 sekolah diresmikan pembukaannja oleh Kartini. Susunan guru terdiri dari 4 orang guru tetap, diantaranja 3 orang guru vak, seorang guru umum. Untuk Tata Usaha ditempatkan seorang pegawai Siti Safiah.

Susunan kelas:

Kelas IV	:	2	orang murid,
IIIa	:	10	orang murid,
IIIb	:	13	„ „
IIa	:	14	„ „
IIb	:	13	„ „

Penerimaan murid baru dilakukan dalam bulan Oktober — Nopember. Dalam bulan Pebruari 1950 diselenggarakan udjian bagian Pendidikan untuk 2 orang dari kelas jang tertinggi dengan hasil: keduanja lulus. Seorang diantaranja mengikuti kursus B 1 Kepandaian Puteri di Djakarta.

Djumlah guru jang telah dihasilkan S.G.K.P.:

1946	—	orang.
1947	28	„
1948	12	„
Pebruari 1950	2	„
Djanuari 1951	27	„
Djanuari 1952	32	„
September 1952	34	„

Penempatan abiturien-abiturien :
di semua Sekolah Kepandaian Puteri maupun partikelir di Djawa atau luar Djawa. Menurut tjatatan :

di Sumatera	16	orang.
Kalimantan	5	„
Bali	3	„
Sumbawa	1	„

Lain-lain tersebar di Djawa dan beberapa diantara mereka telah diserahi pimpinan Sekolah Guru Puteri dan 3 orang mendjadi guru pada S.G.K.P. Beberapa orang melandjutkan peladjaran pada kursus B 1 Kepandaian Puteri, dan beberapa orang mendjadi mahasiswa pada Fakultit Sastera, Paedagogik dan Filsafat.

*

I. S.G.A. (SEKOLAH GURU 6 TAHUN) NEGERI JOGJAKARTA

SESUAI dengan maksud Pemerintah untuk mempertinggi mutu guru serta dengan pendiriannja bahwa guru Sekolah Rakjat di Indonesia harus paling sedikit berpendidikan 6 (enam) tahun setelah Sekolah Rakjat, maka dibukalah dalam bulan Nopember 1947 S.G.A. Jogjakarta sebagai salah satu S.G.A. jang pertama-tama didirikan di Indonesia.

Lamanja peladjaran pada sekolah ini ialah 3 (tiga) tahun dan jang dapat diterima sebagai murid ialah mereka jang beridjazah S.M.P. atau murid-murid dari S.G.B. kelas III jang naik ke-kelas IV dengan melalui seleksi.

Guru-guru lulusan S.G.A. akan dipekerdjakan di Sekolah-Sekolah Rakjat, karena Pemerintah jakin bahwa Sekolah Rakjatlah jang mendjadi dasar dari segala pendidikan dan pengadjaran dan memerlukan perhatian dan bimbingan dari pada kita jang sebesar-besarnja. Djika dasar ini kurang kuat atau kurang baik, maka mau tidak mau hal demikian akan mempengaruhi perkembangan si-anak kelak. Dengan keinsjafan seperti ini maka disusunlah sebuah rentjana peladjaran untuk S.G.A. jang sesuai dengan tugasnja si-tjalon guru didalam masjarakat nanti. Boleh dikatakan bahwa tudjuan dari S.G.A. membentuk guru-guru jang disampingnja mempunjai tjukup pengetahuan jang diperlukan untuk pekerdjaannja djuga dapat berfikir dan berbuat sesuatu atas inisiatip sendiri dalam melakukan tugasnja, jang psychologis dan paedagogis dapat dipertanggung-djawabkan.

Didalam 5 tahun sedjarah S.G.A. Jogjakarta tidak sedikit jang dialami oleh sekolah ini :

1. Clash ke-2 dan waktu didudukinja Kota Jogjakarta oleh tentara Belanda. Pada waktu itu hampir seluruh murid S.G.A. disebar didaerah jang masih merdeka dan diberi tugas jang sesuai dengan pendidikannja dengan tidak dilupakan kewadjibannja sebagai pemuda biasa.
   Setelah tentara Belanda mundur, sekolah dengan segera dibuka kembali, meskipun masih banjak kesukaran-kesukaran jang dihadapinja, mengenai gedung, alat-alat dan sebagainja. Atas inisiatip kepala sekolah maka sebagian besar dari murid S. G. A. Solo, jang pada waktu itu belum dapat dibuka kembali, digabungkan dengan Jogjakarta.
2. Hingga sekarang sudah 2 kali sekolah S.G.A. mengadakan udjian penghabisan dan dapat menjumbangkan kurang lebih 80 orang guru kepada masjarakat kita. Hanja sajang sekali bahwa mereka berhubung dengan kesukaran-kesukaran jang djuga dialami di sekolah-sekolah landjutan dalam soal kekurangan guru, terpaksa ditempatkan disekolah landjutan pertama sebagai suatu penempatan darurat berhubung dengan keadaan.

Meskipun hasil penempatan ini, hingga kini memuaskan, tetapi tetap disesalkan bahwa maksud semula dari pada S. G. A. terpaksa ditinggalkan.

3. Sangat disesalkan pula, bahwa hingga kini S.G.A. belum dapat memakai gedungnja sendiri (komplex Djetisardjo Lor) karena masih dipergunakan oleh pihak tentara dan belum dapat dikembalikan. S.G.A. Jogjakarta masih menumpang baik jang mengenai sekolahnja maupun jang mengenai asramanja.

Permintaan mendjadi murid tiap-tiap tahunnja besar sekali, hingga tidak sedikit jang terpaksa ditolak berhubung dengan kekurangan tempat. Untung sekali bahwa Jogjakarta masih mempunjai 2 buah S. G. A. subsidi dan beberapa S.G.A. partikelir jang belum bersubsidi, jang dengan bekerdja ber-sama-sama dengan S. G. A. Negeri dapat menerima murid-murid lulusan S. M. P. ini, jang besar hasratnja untuk mendjadi guru.

Memang sudah diakui bahwa hasrat orang-orang tua di Djawa Tengah untuk mengirimkan anak-anaknja kesekolah guru besar sekali.

Pada waktu ini S. G. A. Jogjakarta terdiri atas 12 (duabelas) kelas dengan djumlah murid kurang lebih 460 orang. Rentjana pengluasan untuk tahun jang akan datang sedang dikerdjakan serta sedang ditindjau pula sebuah rentjana baru jang hasilnja dapat didjadikan pedoman untuk rentjana pendidikan guru selandjutnja.

Bantuan dari pada masjarakat kita pada umumnja dan orang-orang tua murid pada chususnja kepada murid-murid S.G.A. dalam melakukan kewadjibannja kelak, tetap diharapkan.

*

J. SEKOLAH GURU B. I. NEGERI JOGJAKARTA

S. G. B. I Jogjakarta salah satu sekolah jang tertua di Indonesia, dibuka tanggal 7 April 1897. Banjak orang-orang jang sekarang berkedudukan tinggi (Gubernur Sulawesi Sudiro, Inspektur Djenderal Sugardo dan lain-lain), adalah bekas murid Kweekschool Djetis, sekarang S.G.B. I Jogjakarta.

Tanggal 7 - 3 - 1942 Hindia-Belanda menjerah kepada Pemerintah Balatentara Djepang. Sesudah ditutup selama 6 bulan, sekolah dibuka kembali pada tanggal 23 September 1942 dengan nama S.G.L. (Sekolah Guru Laki-laki) Jogjakarta, dibawah pimpinan almarhum A.W. Karjoso.

Tanggal 1 - 8 - '45 S.G.L. oleh pemerintah Djepang diserahkan kepada Wijata-Pradja. Sekolah masih dapat leluasa mempergunakan gedung-gedungnja sendiri. Dibawah pimpinan D. Martodarsono gedung-gedung S.G. complex Selatan terpaksa dipergunakan oleh T.N.I. (divisi Diponegoro).

Tanggal 22-11-1947 dibuka Sekolah Guru A, dalam gedung S.G.B. Negeri No. I Jogjakarta, dengan Sikun Pribadi sebagai direkturnja.

Tingkatan peladjarann memuaskan, meskipun ...... akibat dari blokkade Belanda ...... kita hidup dalam keadaan jang sukar.

Tanggal 19-12-1948 datang clash kedua. Seperti djuga dalam clash pertama banjak murid-murid jang berdjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Negaranja. Setelah ditutup selama 9 bulan sekolah S.G.A./B pada tanggal 1 - 9 - 1949 dibuka kembali dibawah pimpinan Alimurni. Tetapi gedung-gedungnja complex Utara maupun Selatan dipergunakan oleh tentara. Dan dimana bangku-bangkunja, alat-alat peladjarannja ?

Pada tanggal 12 - 9 - '49 mulailah murid-murid diberi peladjaran biasa digedung Sekolah Tehnik. Meskipun pada waktu beladjar mereka mula-mula hanja duduk dilantai, tetapi karena telah haus akan peladjaran, dengan senang hati mereka mengikutinja.

Sesudah djumlah murid mendjadi besar, sedang S.T.M. djuga memerlukan gedungnja sendiri, maka setelah melalui phase perdjuangan dari murid-murid jang dibantu oleh seluruh anggauta I.P.I. sedaerah Jogjakarta, barulah sekolah S.G.A./B mendapatkan gedungnja kembali.

Tanggal 1 September 1950 datanglah saatnja untuk pemetjahan S.G.A./B. djadi S.G.A. dibawah pimpinan Supojo, dan S.G.B. dibawah pimpinan R.F. Atmodarsono jang dapat dikatakan salah seorang „tjikal bakal" dari S.G.L. dahulu.

Meskipun ruangan kelas-kelasnja sangat kurang, hingga sekolah terpaksa masuk pagi dan petang, meskipun asrama belum dapat dipergunakan sendiri, sekolah S.G.B. I. Jogjakarta, jang dalam 3 tahun jang terachir rata-rata tiap tahun menjumbangkan 90 orang guru S.R. untuk constructieve revolusi, makin lama makin menudju kearah kesempurnaannja, dalam pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan.

*

K. SEKOLAH GURU B II PUTERI

PADA 7 Nopember 1942 Sekolah Guru B Puteri didirikan di Djetis dengan nama Sekolah Guru Perempuan. Sekolah dengan asramanja mengambil tempat digedung jang sekarang dipakai oleh Fakultit Tehnik Universitit Negeri Gadjah Mada. Pada waktu itu sekolah mulai dengan 10 kelas, jaitu kelas I terdiri dari tiga kelas, kelas II dua kelas, kelas III dua kelas dan kelas IV ada tiga kelas. Djumlah murid semua ada 300 orang. Mereka berasal dari Normaalschool, HIK, van Deventerschool dan Inheemsche Mulo. Pada 1 April 1943 Sekolah Guru Perempuan itu dipindah ke gedung Djalan Djati 2, dibawah pimpinan Sri Umijati, adik almarhum Dr. Sutomo Surabaja. Pada tahun 1948 Sri Umijati meletakkan djabatannja dan diganti oleh Dien Wongsodjojo. Berhubung adanja clash II maka angka-angka jang tepat mengenai murid tidak dapat diberikan. Mulai th. 1942 hingga 1948 kira-kira ada 350 orang murid jang lulus dalam udjian penghabisan S.G.P.

Pada clash II ibu kota Republik diduduki oleh tentara Belanda maka Sekolah Guru Perempuan mulai tanggal 18 Desember '48 sampai 29 Djuni 1949 ditutup.

Dari th. 1950 s/d 1952 hasil S.G.P. s.b.b.

Th	Banjaknja murid jg. mengikuti udjian	Lulus	Tak lulus	Jang melandjutkan ke S.G.A. dari kl. III	dari kl. IV
1950	68	67	1	—	7
1951	46	62	—	9	2
1952	64	63	1	10	2

Dari kelas IV biasanja jang tidak lulus hanja sedikit, karena dikelas I, II dan III diadakan seleksi agak keras.

Sekolah Guru Perempuan mengalami beberapa masa.

Masa pertama th. 1942 — 1945. Masa pendjadjahan Balatentara Dai Nippon. Pemimpin S.G.P. Sri Umijati, jang sekarang mendjadi Kepala Jajasan Lekture, berkata: „Kita harus mempersiapkan anak-anak ini untuk kemerdekaan". Sesuai dengan utjapan itu para guru S.G.P. dibawah pimpinan-

nja mentjurahkan segala tenaga untuk melaksanakan adjakan tersebut. Pada pertengahan tahun 1945 dan pada awal 1946 Sri Umijati berkata: „Djanganlah anak-anak wanita kami kehilangan kewanitaannja dalam masa pantjaroba ini. Mereka dalam perdjuangan harus tetap wanita".

Masa kedua, 1948 sampai sekarang. Tanggal 19 Desember 1948 tiba. Maka tiba pula perihatin guru-guru Sekolah Guru Perempuan.

Setengah tahun lamanja S.G.P. terpaksa ditutup. Waktu setengah tahun itu dirasakan seolah-olah setengah abad. Namun guru-guru dalam penderitaan itu jakin bahwa achirnja kemenangan ada pada pihak Republik. Mereka jakin akan kembalinja Negara Republik Indonesia.

Alchamdulilah, setelah persetudjuan Roem — van Royen diparaf dalam bulan Mei 1949, maka pada tgl. 29 Djuni 1949 pendjadjah meninggalkan kota Jogja. Pada hari itu diwaktu pagi dari djendela-djendela asrama di Gondokusuman 1 beberapa orang kawan guru melihat sipendjadjah meninggalkan kota. Setelah tentara Belanda pergi maka S.G.P. dibuka kembali pada 8 Agustus 1949.

Pada permulaan clash tersebut ibu asrama S.G.P., Kamdijah, karena masih mempunjai banjak persediaan bahan makanan, dapat menolong beberapa keluarga. Kamdijah pernah didatangi serdadu Belanda. Mereka minta kepada Kamdijah supaja para murid, jang pada waktu itu masih ada 50 orang tinggal di asrama, suka membantu mereka dengan mentjutjikan pakaiannja. Permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Kamdijah, jang membentak: „Kun je zelf niet wasschen ?"

Perdjuangan murid-murid dan guru-guru.

Pada djaman pendudukan murid-murid S.G.P. jang pulang kerumah orang tuanja, mengadjar ditempatnja masing-masing. Beberapa orang pemudi S.G.P. mendjalankan tugas sebagai koerier pergi ke kota berkedok sebagai pedagang telur. Dengan demikian pihak musuh tidak tahu, bahwa mereka mendjadi penghubung utama dari tentara kita. Dari kota pemudi-pemudi siswa S.G.P. itu membawa obat-obatan untuk keperluan gerilja kita.

Guru-gurunja pun tidak mau ketinggalan. Mereka tidak sudi mendengarkan adjakan Belanda untuk membuka kembali sekolahnja dengan bantuan musuh. Mereka memberi huisonderwijs kepada anak-anak, a.l. dirumahnja Dr. Esnawan di Djalan Tjemara Djadjar dan dirumahnja Mr. Roem di Pakuningratan.

Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Rakjat dan S.M.P. darurat.

Dalam pada itu Suparno dan Sutasoma, guru S.G.P. jang tertinggal dikota, dibantu oleh teman-temannja guru, berhasil mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Rakjat darurat di djalan Merapi dan Sekolah Menengah Pertama digedung pondokan S.G.P. di Gondokusuman I.

Gedung Sekolah Guru Puteri pada waktu itu diduduki dan dipergunakan sebagai markas oleh tentara Belanda. Sekolah Taman Kanak-kanak dibawah pimpinan Nj. Kartono bertempat dirumah Djalan Merapi 18 mendapat perhatian dari penduduk Kotabaru. Diantara penduduk itu terdapat Nj. Fatmawati Soekarno, Nj. Hatta dan Nj. Suriadarma. Mereka menaruh perhatian besar kepada sekolah darurat tersebut. Nj. Fatmawati tiap hari mengantarkan dan mendjemput putera dan puterinja, Guntur dan Megawati, jang masuk sekolah di Taman Kanak-kanak di Djalan Merapi 18. Nj. Hattapun sering pula menengok ke sekolah darurat tsb. Untuk memelihara semangat perdjuangan maka tiap-tiap bulan sekali, jaitu pada tanggal 17, diadakan peringatan, setjara sederhana. Peringatan ini didatangi oleh ibu-ibu dan putera-puterinja. Baik Nj. Fatmawati Soekarno maupun Nj. Hatta suka mengundjungi peringatan itu.

Didalam hudjan peluru anak-anak Sekolah Darurat tak gentar masuk sekolah. Alat-alat seperti bangku dll. sangat sederhana, bahkan mula-mula

anak-anak hanja duduk dilantai untuk menerima peladjaran. Dari tiap-tiap „kelas" dari huisonderwijs itu sudah diadakan pula lesrooster jang tertentu. Para murid mula-mula bersekolah hanja berlima-lima untuk menghindari ketjurigaan dari orang-orang Belanda. Guru-gurupun kerap kali mengadakan rapat-rapat setjara rahasia.

Dan diantara usul-usul jang terdapat didalam rapat itu ialah: agar anak-anak tiap-tiap kali seminggu berkumpul menjanji lagu-lagu perdjuangan dan lagu-lagu nasional untuk tetap membimbing serta membentuk rasa tjinta tanah air dan bangsanja. Seluruh anak-anak S.R. dan S.M.P. dari tiap-tiap kelas dari huisonderwijs berkumpul di asrama S.G. Puteri di Gondokusuman untuk menerima peladjaran menjanji.

Pernah pula sekolah darurat itu mendapat kundjungan dari pemimpin-pemimpin kita. Diantaranja Ki Hadjar Dewantara, jang waktu itu berkata: „Kami tidak menjangka sama sekali, bahwa anak-anak kita masih terus dipupuk rasa kebangsaannja".

Tatkala Pemerintah kita dan Bung Karno akan tiba di Jogjakarta, maka anak-anak jang selama pendudukan Belanda menerima peladjaran, menjambut Pemerintah dengan lagu-lagu jang melukiskan rasa merdeka kembali digedung Presidenan di Jogjakarta.

Waktu wakil-wakil Pemerintah N.I.T. datang ke Jogja, anak-anak kita menjambut P.M. N.I.T., Mr. A. A. Gde Agung, dengan lagu-lagu serta gambaran-gambaran jang dilukis dengan potlod serta alat-alat jang sederhana. Dari beliau sekolah darurat menerima sebuah peti alat-alat tulis menulis, karena beliau terharu waktu melihat anak-anak kita disekolah darurat mempergunakan alat-alat jang sederhana itu.

Setelah kota Jogjakarta dikembalikan, maka sekolah-sekolah darurat, ketjuali Taman Kanak-kanak, setjara resmi dibuka digedung Sekolah Guru Puteri di Djalan Djati 2, dengan diberi nama: Balai Pendidikan Taman Ksatria. Pada waktu itu dibuka pula Sekolah Guru Taman Kanak-kanak. Beberapa orang pemimpin kita menghadiri peresmian tersebut, antara lain Mr. Ali Sastroamidjojo, jang memberi „isi" kepada anak-anak kita. Sekolah Rakjat Taman Ksatria kemudian ditutup, sedang S.M.P. dan S.G.T.K. Taman Ksatria pada tahun 1952 dioper oleh Fakultit SPF Universitit Negeri Gadjah Mada, untuk didjadikan sekolah pendidikan.

*

L. SEKOLAH TEHNIK NEGERI I JOGJAKARTA

Didirikan pada tanggal 17 Pebruari 1943 dalam pemerintahan pendudukan Djepang

PELADJAR - PELADJAR S.T.N. I telah insjaf, bahwa mereka jang akan menerima tanggung djawab atas baik buruk negaranja. Djustru karena itu, pada tahun berdirinja S.T.N. I telah ada pergerakan-pergerakan kearah kemerdekaan bangsa dengan bimbingan pelopor-pelopor kita jang tidak asing lagi namanja untuk bangsa kita. Kalau kita tindjau lebih landjut, usia S.T.N itu sebetulnja lebih dari X tahun, kalau menghitung adanja P.J.S. (djaman Belanda). Menurut keterangan Wali Kota Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo kalau terhitung dari adanja P.J.S. umurnja S.T.N. sudah 36 tahun. Sedjak P.J.S. berganti nama S.T.N.

Arti P.J.S. pada djaman Belanda dulu dianggapnja oleh orang-orang jang belum tahu adalah Prinses Juliana School. Akan tetapi arti pada teman-teman kita (Bangsa Indonesia), jang pada waktu itu sedang tumbuh untuk berdjuang (berorganisasi), adalah Pangreksa Juning Sudara, djadi merupakan suatu organisasi dibawah tanah. Demikian keterangan dari bekas peladjar-peladjar P.J.S. Abdul Bakir, Kepala Djawatan P.P. & K. sekarang.

Dapat ditegaskan, bahwa peladjar-peladjar S.T.N. sedjak ulang tahun jang pertama telah insjaf akan kewadjibannja untuk turut menjumbangkan tenaga-fikiran guna membangun kemerdekaan dan kebebasan Negara Indonesia dari tekanan-tekanan kolonial.

Kemadjuan-kemadjuan peladjar disini hanja dapat kita terangkan sedjak sesudahnja clash ke II.

Adapun djumlah murid dari kelas I sehingga kelas IV (I — II — III — IV), tahun peladjaran '49/50 adalah lebih kurang 450 anak (semua bagian a).

Pengikut udjian tahun peladjaran '49/50 adalah:

Kelas IV bg.
- Bangunan Gedung-gedung pengikut udjian 22 anak — lulus semua (100%).
- Mesin-mesin pengikut udjian 31 anak — lulus 25 anak, tidak lulus 6 anak
- Listrik pengikut 27 anak — lulus 21 tidak lulus 6 anak.
- Kimia pengikut udjian 2 anak — lulus 2 (lulus semua = 100%).

Demikian hasil pada tahun peladjaran 1949/1950 untuk S.T. I.

Djumlah murid pada tahun peladjaran 1950/1951 untuk S.T. I = 505 anak.

Pengikut udjian:

IV B. Gedung-gedung	—	27 anak, jang lulus 17, jang tidak lulus 12 anak.
IV Mesin-mesin	—	43 anak, jang lulus 33, jang tidak lulus 10 anak.
IV Listrik	—	22 anak, jang lulus 15, jang tidak lulus 5 anak.
IV Kimia	—	7 anak, jang lulus 7, = (100%).

Pada tahun itu ada beberapa perubahan.

I. Bagian Kimia dihapuskan.

II. Ditambah dengan bagian Bangunan air.

Sedang jang masuk Bangunan air maupun bangunan gedung-gedung setelah peladjar-peladjar kelas III bagian Bangunan naik kelas IV dan ditentukan bagian apa mereka sukai. Artinja disini pembagian B.A. maupun B.G. pada kelas IV, djadi teranglah bahwa pada kelas I — II — III belum ditentukan.

Untuk tahun peladjaran '50/51 S. T. N. I Jogjakarta ditambah S. T. N. II jang chusus untuk peladjar pedjuang, akan tetapi pada tahun ini ('52/53) sudah dihapuskan arti sekolah peralihan peladjar pedjuang, dan sekarang menerima murid biasa.

Djumlah murid untuk tahun peladjaran '52/53 untuk S.T. I = 399 anak.

Perlu diterangkan terlebih dahulu, bahwa untuk tahun peladjaran 52/53 (sekarang) S.T. I Jogjakarta hanja untuk kelas III dan kelas IV — semua bagian.

Hanja untuk S.T. I ditambah 1 bagian lagi, ialah bagian Radio (R) untuk tahun ini baru kelas III — kelas IV belum ada.

Bagian-bagian S.T. I jang ada sekarang adalah:

1.	Bangun-bangunan gedung	(B G)
2.	„ Air	(B A)
3.	Mesin-mesin	(M)
4.	Listrik	(L)
5.	Radio	(R)

Guru-guru pengadjar untuk mata peladjaran ekstra (pasti/alam/kimia) kebanjakan dari mahasiswa U.N.G.M., sedang guru vak kebanjakan guru tetap, Adapun pengadjar seluruhnja ada 50 orang.

Beberapa guru-guru S.T. I djuga mengadjar pada S.T. II.

Hubungan peladjar dan guru-guru sangat erat, sehingga bila ada keperluan dapat ditanggung bersama pula.

Pada ulang tahun ke X peladjar S.T. I/II telah tampak kemadjuannja. Sebagai bukti disini dapat dinjatakan, bahwa selain peladjar-peladjar, guru-guru mengadakan hari perajaannja, djuga atas usaha peladjar telah diadakan eksposisi Tehnik.

Eksposisi itu ternjata banjak mendapat perhatian dari masjarakat, terutama peladjar-peladjar sekolah, sehingga pada buku tjatatan pengundjung tertjatat djumlah 3753 orang.

Eksposisi itu meliputi bagian Bangunan — Listrik — Radio — Mesin. Jang dieksposisikan adalah alat-alat, hasil pekerdjaan dan penerangan-penerangan lainnja; dapat diartikan pula — eksposisi Tehnik. Inipun mendapat bantuan dari beberapa instansi. Tak luput Ir. S. Purbodiningrat memberi berbagai petundjuk-petundjuk dan bantuan jang tidak sedikit nilainja.

Tjatatan :

S.T.N. hanja ada kelas III dan IV, karena kelas I dan II ada pada S.T.P. Djadi dari S.T.P. dapat segera melandjutkan ke S.T.N. dan dari S.T.N. ke S.T.M. dan seterusnja. Karena rentjana Pemerintah adalah = Demokratiseering sekolah-sekolah Tehnik = jang dapat meningkat sedjenis.

Tahun	B G		B A		M		L		Kimia	
	L.	TL.	L.	TL.	L.	TL.	L.	TL.	L.	TL.
48 / 50	22	—	—	—	25	6	21	6	2	—
50 / 51	17	12	—	—	33	10	15	7	7	—
51 / 52	16	9	15	9	29	7	29	10	—	—
	55	21	15	9	87	23	65	23	9	—

49 / 50
s / d   23   Lulus, - 76 tidak lulus.
51 / 52

49 / 50	=	403	lulus	91
50 / 51	=	505	„	72
51 / 52	=	381	„	89
	/	1289	— /	252

M. SEKOLAH TEHNIK II NEGERI JOGJAKARTA

PADA tanggal 10-4-1950 oleh Pemerintah di Jogjakarta disamping Sekolah Tehnik I Negeri dibuka Sekolah Tehnik II Negeri; karena belum tersedia gedung berikut perlengkapannja sementara menumpang pada Sekolah Tehnik I Negeri Jogjakarta.

Adapun program peladjaran tiada berbeda dengan Sekolah-sekolah Tehnik lainnja; hanja sadja Sekolah Tehnik II disediakan chusus untuk menampung para peladjar jang telah berbakti kepada Negara (berdjuang).

Untuk menjelenggarakan Sekolah Tehnik II oleh Pemerintah ditundjuk sebagai pimpinan Soebakto, Kepala Sekolah Tehnik I Jogjakarta.

Dalam pada itu ta' ketinggalan guru-guru Sekolah Tehnik I dan lain-lainnja, membantu penjelenggaraannja, jaitu memberi peladjaran sebagai guru tidak tetap; mengingat masih sangat kurangnja tenaga pengadjar dari pihak mahasiswapun ta' ketinggalan pula memberikan bantuannja.

Karena keadaan tempat, peladjaran Sekolah Tehnik II dilangsungkan pagi hari untuk peladjaran praktek, sedang theori dari djam 14.00 — 19.40. Sekolah Tehnik II Negeri mempunjai 3 bagian, jaitu bagian Listrik, Bangunan Gedung dan Mesin. Untuk tahun peladjaran 1952/1953 telah dimasukkan dalam rentjana bagian Pertambangan dan Radio — telegrafi. Berhubung dengan penghematan keuangan Negara hingga kini belum mendapat persetudjuan.

Permulaan tahun peladjaran 1950 S. T. II diikuti oleh 230 peladjar pedjuang terdiri dari kelas I sampai dengan kelas IV dalam semua bagian. Kepada mereka dapat dibebaskan uang sekolah dan alat berdasarkan P.P. 32 asal sadja mereka dapat menundjukkan surat keterangan jang sah.

Bagi peladjar pedjuang diadakan peraturan udjian tersendiri dimana udjian penghabisan tiap-tiap habis tahun peladjaran pada bulan Desember. Pada achir tahun peladjaran 1950 bulan Desember Sekolah Tehnik II mengadakan udjian penghabisan bagi mereka jang duduk pada kelas tertinggi dan kenaikan bagi mereka jang masih kelas I sampai dengan kelas III.

Udjian penghabisan diikuti oleh 44 tjalon.

Dari 44 tjalon dapat lulus 31 tjalon, sedang 13 tjalon harus mengulangi peladjarannja. Setelah kenaikan kelas murid kelas I jang tidak naik terpaksa diserahkan pada S. T. I, karena banjaknja murid untuk didjadikan satu kelas tidak memenuhi.

Pada permulaan tahun peladjaran 1951/1952 S. T. I dibandjiri murid dari pelbagai daerah jang ingin mendjadi murid sekolah tersebut. Berhubung tempat ta' mentjukupi 4 buah kelas diserahkan kepada S. T. II. Oleh sebab itu S. T. II mempunjai 2 matjam kelas, jaitu kelas pedjuang dan bukan pedjuang: Bagi murid bukan pedjuang tahun peladjaran dimulai bulan Djuli dan berachir bulan Desember.

Disebabkan dari banjaknja peladjar jang ingin masuk ke sekolah kedjuruan, maka Pemerintah memandang perlu mengubah S.T. II mendjadi S. T. biasa (bukan pedjuang) dan menempatkan Kepala Sekolah sendiri; karena pada waktu itu masih dibebankan kepada Kepala Sekolah Tehnik I.

Kemudian pada tanggal 1-9-1951 diangkatlah Soekarso Atmodipuro mendjadi Kepala Sekolah Tehnik II Negeri Jogjakarta dan mendapat instruksi bahwa S.T. II didjadikan S.T. biasa.

Pada saat Soekarso Atmodipuro mulai memangku djabatannja, S.T. II baru mempunjai 1 guru tetap dan 4 orang pegawai tetap, sedang lainnja tak tetap.

Kemudian barulah disusun tenaga pengadjar, pegawai dan perlengkapan. Berkat bantuan dari sana sini, sekarang Sekolah Tehnik II telah mempunjai sedjumlah tenaga pengadjar tetap, 19 pegawai tetap dan perlengkapan sekolah jang tjukup, hanja tinggal berusaha gedungnja.

Achir tahun peladjaran 1951 (S.T. pedjuang) mengadakan udjian penghabisan dan kenaikan kelas.

Udjian diikuti oleh 63 tjalon. Dari 63 tjalon dapat lulus 38 tjalon. Dari mereka jang lulus 25% menerdjunkan diri kedalam masjarakat, sedang 75% meneruskan peladjarannja. Mereka tidak hanja meneruskan peladjaran ke S.T.M. sadja, tetapi ke S.G.S.T.P., sekolah minjak di Prabumulih dan lain-lain.

Berhubung dengan peralihan dari S.T. pedjuang mendjadi S.T. biasa, jang dalam segala hal mengikuti Sekolah Tehnik lainnja, maka murid-murid pedjuang jang pada bulan Djanuari naik kelas, pada bulan Mei naik kelas lagi dan bagi murid kelas tertinggi diadakan udjian penghabisan bersama Sekolah Tehnik I Negeri. Dalam pada itu program peladjaran jang seharusnja diselesaikan dalam 1 tahun hanja diselesaikan dalam 4 bulan. Untuk menjelesaikan program itu murid-murid diberi peladjaran istimewa, sehingga peladjarannja mendjadi 56 djam seminggunja. Ada kalanja waktu libur murid-murid diberi peladjaran. Berkat kegiatan para pengadjar S.T. II pada udjian penghabisan tadi hasilnja memuaskan djuga.

Ternjata dalam udjian penghabisan tadi dari 35 tjalon dapat lulus 15 tjalon, dan seorang diantaranja dapat meneruskan ke S.T.M. kelas II sedang lainnja ke kelas I.

Permulaan tahun peladjaran 1952/1953 (bulan Djuli '52) S.T. II mempunjai 221 murid, dalam semua bagian. Sedjak tahun peladjaran 1951/1952 S.T. tidak diperkenankan menerima murid untuk kelas I, hanja menerima untuk keluas III sadja. Mereka jang diterima ialah murid-murid tamatan S.T.P. jang lulus udjian masuk S.T.

Demikian riwajat singkat dari S.T. II (S.T. Pedjuang) Negeri Jogjakarta.

*

N. SEKOLAH TEHNIK MENENGAH (S.T.M.) JOGJAKARTA

I. Keadaan dewasa ini.

SEKOLAH Tehnik Menengah pada dewasa ini terdiri atas 2 (dua) sekolah ja'ni: S.T.M. I dengan 19 kelas dan S.T.M. II dengan 6 kelas.

Adapun djumlah peladjar pada waktu naskah ini dibuat ialah sebagai berikut:

S. T. M. I dengan 555 peladjar
S. T. M. II dengan 185 peladjar.
S. T. M. Jogjakarta mempunjai 4 (empat) bagian:

1. Bagian Bangunan
2. Bagian Mesin
3. Bagian Listrik dan
4. Bagian Kimia.

Angka-angka tersebut diatas sekiranja dapat menggambarkan bahwa S.T.M. Jogjakarta bukan sekolah jang ketjil. Mudah dimengerti, bahwa djumlah guru jang dibutuhkan tidak ketjil pula.

Berhubung dengan sangat kurangnja tenaga guru dewasa ini, maka djumlah guru tetap pada S. T. M. Jogja hanja 24 (dua puluh empat). Oleh karenanja maka para guru tidak tetap (lose leerkrachten) sebanjak 72 (tudjuh puluh dua) pada S. T. M. I dan 46 (empat puluh enam) pada S. T. M. II memegang peranan jang penting sekali. Sebagian besar dari guru tetap terdiri atas mahasiswa-mahasiswa Fakultit Tehnik dari Universitit Negeri Gadjah Mada.

II. Riwajat singkat.

Dalam zaman pendjadjahan, sebelum pendaratan Djepang, di Bandung terdapat sebuah Sekolah Tehnik Menengah atau Middelbare Technische School dalam istilah asing.

Setelah Djepang mendarat, sekolah tersebut ditutup. Sesudah proklamasi kemerdekaan diselenggarakan usaha-usaha kearah pembukaan kembali sebuah sekolah tehnik menengah. Usaha-usaha tersebut berhasil dengan didirikannja sebuah sekolah jang disebut Sekolah Menengah Tinggi Tehnik (S.M.T.T.) dibawah pimpinan Abidin.

Dalam tahun 1946, setelah Bandung diduduki tentara Belanda, S.M.T.T. pindah ke Jogjakarta dengan mengambil tempat digedung Sekolah Tehnik Pertama (S.T.P.) di Tegal Lempujangan 55 dan tetap dibawah pimpinan Abidin. Kemudian berhubung dengan sesuatu hal, Abidin meletakkan djabatannja. Pemimpin S.M.T.T. diserahkan kepada Ketua Fakultit Tehnik dari Universitit Gadjah Mada Ir. Wreksodiningrat jang menundjuk Ir. Soenarjo, lektor S.T.T. sebagai penggantinja dalam pimpinan S.M.T.T.

Dibawah pimpinan Ir. Soenarjo S.M.T.T. mengalami perubahan nama, S.M.T.T. mendjadi S. T. M.

Dibawah pimpinan Ir. Soenarjo S.T.M. memperoleh kemadjuan besar, selangkah demi selangkah tjorak „cowboy-cowboy"-an dapat dilenjapkan selangkah demi selangkah segala sesuatu menudju kearah tata-tertib.

S. T. M. jang seperti dikatakan diatas, semula mengambil tempat di S.T.P., kemudian pindah kegedung jang sekarang masih ditempatinja, jaitu gedung Djetishardjo I, dahulu kala P.J.S.

Sajang sekali bahwa, baik di S. T. P. maupun di Djetishardjo I, peladjaran terpaksa diberikan petang hari karena gedung-gedung tersebut pagi hari digunakan oleh sekolah lain.

Pada tgl. 19 Desember Jogja diduduki tentara Belanda. Gedung S.T.M. di Djetishardjo I dari tanggal tersebut sampai Belanda meninggalkan Jogja terus-menerus diduduki tentara pendjadjah dengan akibat bahwa, setelah Jogja dimerdekakan kembali, seluruh arsip, seluruh peralatan hilang lenjap.

Setelah Belanda meninggalkan Jogja, pimpinan S.T.M. diserahkan kepada Stambul Kolopaking jang sampai sekarang masih memegang pimpinan.

Pada waktu S.T.M. akan dibuka kembali dalam bulan 19 Agustus 1949, maka berhubung dengan hilangnja seluruh peralatan, kantor S.T.M. bertempat dalam sebuah ruang seluas 3 × 4 meter dari rumah pemimpin. Djumlah guru semula ada lima, djumlah pegawai ada satu. Mudah dimengerti betapa besar kesulitan-kesulitan jang dihadapi, akan tetapi hal ini tidak asing karena dihadapi oleh siapa sadja jang ikut mendirikan kembali Negara kita.

Kemudian S.T.M. dibuka kembali dengan bertempat di S.M.A./B Kotabaru, peladjaran dilangsungkan petang hari. Gedung di Djetishardjo I tetap diduduki T. N. I.

Dalam bulan Djanuari 1950 Gedung di Djetishardjo I dikosongkan oleh T.N.I., S.T.M. dapat kembali ke „tempat-asalnja", peladjaran dapat berlangsung pagi hari.

Dalam bulan Maret 1950 dibuka S.T.M. II sebagai sekolah untuk penampungan peladjar-peladjar pedjuang. Pimpinan S.T.M. I dan II ada disatu tangan, hal mana sangat memudahkan kordinasinja.

III. Pertumbuhan S.T.M. Jogjakarta

Angka-angka dibawah ini melukiskan pertumbuhan S.T.M. I/II Jogjakarta selama 6 tahun.

Tahun Peladjaran	Pen-daf-taran	Jang di terima	Tidak di terima	Djum. th. pe-ladjr.	Lulus udjian Achir	Melan djutk. Sek.	Beker-dja pada Djwt.	Ta' a-da ke-terang an.	Keterangan
Permulaan 1946	60	60	—	60	—	—	—	—	Belum ada
1946/1947.	120	120	—	180	—	—	—	—	Udjian Achir
1947/1948	60	30	30	210	28	—	—	28	Baru tenga-han tahun
1948/1949	280	118	161	300	—	—	—	—	Belanda ma-suk.
Bentukan kembali 1949	94	94	—	94	—	—	—	—	Kelas jg. ter-tinggi masih sedikit (be-lum ada udjian).
1949/1950	160	160	—	160	15	5	10	—	
1950/1951	300	180	120	325	44	19	15	10	
1951/1952	615	311	304	592	76	12	17	47	
1952/1953	1040	361	679	740	x	—	—	—	x. Ditaksir.

Ichtisar kelas dan bagiannja, guru, pegawai, pelajan.

Pada tahun ke;	Banjaknja					
	Kelas	Bagian peladjaran	Guru te-tap	Guru ti-dak tetap	Pegawai	Pelajan (Pesuruh)
Ke I 1946/1947	6	L;M;C;K/T.	7	15	4	5
Ke II 1947/1948	8	L;M;C;K/T.	9	20	6	8
Ke III	17	L;M;C;K/T.	12	30	10	14
Ke IV 1950/1951	21	L;M;C;K/T.	18	63	15	23
Ke V 1951/1952	24	L;M;C;K/T.	22	68	17	23
Ke IV 1952/1953	25	L;M;C;K/T.	24	118	19	25

Keterangan :

L = Listrik
M = M e s i n
C = Civiel(Bangunan)
K = K i m i a
T = Tambang

O. SEKOLAH TEHNIK PERTAMA (S.T.P.) DI JOGJAKARTA

RIWAJAT perkembangan Sekolah Tehnik Pertama adalah sebagai berikut:
I. Djaman pendjadjahan Belanda S.T.P. bernama Ambachtsschool voor Inlanders, pertama dibuka di Jogjakarta pada tahun 1919 berturut-turut dengan tjabang-tjabangnja di: 1. Wates, 2. Sleman, 3. Kalasan, dengan seorang Kepala Sekolah, 22 orang guru, 650 orang murid. Pada tahun 1932 nama sekolah tersebut diganti mendjadi Ambachtsleergang.

II. Pada djaman Djepang nama sekolah tersebut diganti Sekolah Tehnik Menengah Pertama (Koyo Gakko).
Keadaannja tidak berubah sebagai djaman Belanda.

III. Pada kurang lebih dalam pertengahan tahun 1943 sekolah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta hingga Pemerintah Republik Indonesia.

IV. Pada waktu Pemerintah R.I. lalu diurus oleh Kementerian P.P. & K., nama sekolah tersebut diganti dengan Sekolah Pertukangan.

V. Masa pertumbuhannja:

No.	Tahun	Alamat S.T.P.	Banjaknja kelas	Banjaknja guru	Banjaknja murid	Keterangan
1.	1945	Jogja I Lempujangan	21	64	580	Bagian bangunan kaju dan mesin
2.	1948	Wates	10	19	320	
3.	„	Wonosari	6	11	150	
4.	1949	Surjaden (Jogja)	9	17	292	Bg. karamik dan mebel.
5.	„	Sleman	6	11	202	Bagian bangunan kaju dan mesin.
6.	1950	Kalasan	4	7	128	
7.	„	Jogja II (Gowongan)	8	14	205	
8.	1951	Bantul	4	6	123	
9.	„	Jogja III (Ambarukmo).	1	3	35	Bg. kulit
		9. S.T.P	69	52	2035	

Diantara 9 buah sekolah tersebut (S.T.P.) itu baharu S.T.P.I. di Jogjakartalah jang telah mempunjai gedung. Adapun jang lainnja masih menjewa, dan rata-rata rumah-rumah jang disewa itu belum memenuhi sjarat-sjaratnja sebagai sekolah jang seharusnja.

Setiap tahunnja banjaknja anak-anak jang diterima masuk hanja 10% sadja, dari pada banjaknja anak-anak jang mendaftarkan. Semua bagian peladjaran tersebut dapat meneruskan kelain sekolah jang sedjenis, umpama ke: S.T., S.T.M. dan sebagainja.

*

P. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

Di Kota Jogjakarta terdapat 5 buah Sekolah Menengah Pertama Negeri, jang masing-masing mempunjai riwajat sendiri-sendiri, jaitu seperti tersebut dibawah ini:

S.M.P. I Negeri, di Djalan Terban Taman No.: 25

Didirikan oleh Pemerintah pendudukan Djepang pada tanggal 11 September 1942, bertempat digedung S.G.B. II (S.G. Puteri) sekarang ini.

Guru-guru terdiri dari keluaran HKS/HIK dan Hoofdacte-bezitters (Ind. H.A.). Murid-muridnja berasal dari MULO, HBS, AMS pada djaman Belanda hampir semuanja penduduk dari kota Jogja sendiri.

Jang perlu diingat ialah ketaatan mereka kepada para guru dan kemauan beladjar mereka jang sungguh lebih besar daripada para peladjar sekarang ini.

Djumlah kelas ada 12 buah, terdiri dari kl. III (4), II (4) dan kl. I (4). Rata-rata tiap kelas mempunjai 30/40 orang murid.

Pada tahun 1943 sekolah dipindahkan kegedung sekarang ini.

Setelah proklamasi kemerdekaan sekolah berdjalan terus, meskipun keadaan terpengaruh besar oleh suasana pada waktu itu.

Dalam pertempuran melawan Djepang di Kotabaru seorang peladjar gugur, dan beberapa mendapat luka-luka. Beberapa waktu lamanja murid-murid diserahi mendjaga keamanan di Kotabaru.

Terutama dari kl. III pada waktu itu banjak jang meninggalkan bangku sekolah, pergi ketempat-tempat „pertempuran", ke Surabaja, ke Magelang dan ketempat-tempat lain, ada pula jang keluar Djawa.

Datanglah clash jang kedua. Sekolah didjadikan markas barisan tank Belanda.

Kemudian oleh Belanda dibuka SMP Pendudukan digedung S.R. Latihan SGP. didjalan Ungaran.

Sesudah Belanda pergi sekolah dibuka kembali.

Keadaan gedung bukan lagi keadaan gedung sekolah. Banjak alat-alat jang rusak. Jang diserahi pimpinan pada waktu itu 2 orang bekas guru SMP I dan dengan tambahan 3 orang guru lagi sekolah dapat dimulai dengan 12 kelas dengan djumlah murid lebih kurang 500 orang.

Berhubung dengan keadaan lalu diadakan „gesplitste schooltijden". Rombongan jang ke II datang djam 11. Sekolah berachir djam 3.30 siang.

Hal tersebut berdjalan hingga tahun peladjaran 1950/1951, meskipun tenaga guru telah mentjukupi kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh karena 4 ruangan kelas dipergunakan sebagai tempat kediaman pegawai-pegawai Kem. P. P. dan K. jang dipindahkan dari Solo.

Djumlah murid rata-rata 500/600 orang dibagi atas 15 kelas (kl. III = 5, kl. II = 5 dan kl. I =5).

Rata-rata jang menempuh udjian penghabisan setiap tahunnja 150 orang. Jang lulus rata-rata 70/80 persen.

S.M.P. II Negeri di Setjodiningratan No.: 28

Sekolah ini didirikan pada tanggal 12 September 1942 di gedung Setjodiningratan 28, 30 dibawah asuhan Basari.

Pada tahun 1947 Basari diganti oleh Marjatmo, jang mendjabat Kepala Sekolah sampai Desember 1948.

Pada tanggal 15 Agustus 1949, setelah tentara Belanda ditarik dari Jogjakarta, maka SMP II dibuka kembali. Pimpinan diserahkan kepada Moeljosoemarto.

Tahun peladjaran 1949/1950.

Pada tahun peladjaran ini djumlah kelas ada 15 buah, 22 orang guru, dan 500 orang murid. Jang turut udjian bagian A 76 dan bag. B 117. Dari bag. A jang lulus 46 orang murid atau 60,5%, sedang bagian B lulus 85 orang atau 72,6%.

Tahun peladjaran 1950/1951.

Djumlah kelas 15, guru 21 orang, murid 639 orang.

Pada tahun peladjaran ini dari bagian A jang turut udjian 57 dan bagian B 79. Dari mereka jang lulus bagian A 46 orang dan bagian B 66 orang.

Dari jang lulus itu jang melandjutkan peladjarannja ke SMA/A 15 orang, SMA/B 58 orang, SMEA 2 orang, SGA 2 orang, SGKP 3 orang, STM 4 orang dan Geologi 1 orang.

Tahun peladjaran 1951/1952.

Djumlah kelas berkurang, sekarang mendjadi 12, dengan 20 orang guru dan 481 orang murid. Dalam udjian penghabisan dari bagian A jang ikut 75 orang, jang lulus 59 orang. Dari bagian B ada 88 orang, jang lulus 79 orang.

Murid-murid jang lulus itu melandjutkan peladjarannja ke SMA/A 29 orang, SMA/B 58 orang, SMA/C 33 orang, SGA 8 orang, SGKP 3 orang, STM 4 orang, SGPD 1 orang dan SGTK 1 orang.

Tahun peladjaran 1952/1953.

Guru : 18 orang.
Murid : 473 orang.

Turut udjian	:	bagian A		84 orang
		bagian B		76 orang
Lulus	:	bagian A		67 orang
Melandjutkan	:	SMA/A	:	11 orang
		SMA/B	:	45 orang
		SMA/C	:	45 orang
		SMEA	:	7 orang
		SGA	:	22 orang
		SGKP	:	5 orang
		SGTK	:	5 orang
		SPMA	:	6 orang

S.M.P. II Negeri di Padjeksan No.: 18

Apabila didjaman Djepang dikota Jogjakarta hanja ada tiga buah SMP Negeri, jaitu SMP I, SMP II dan SMPP, maka sehabis proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibukalah pada tahun 1946 SMP III Negeri dibawah pengawasan Wijata Pradja.

Tetapi sekolah itu baru berdjalan satu tahun, kemudian terpaksa ditutup untuk sementara waktu, akibat aksi militer Belanda I. Guru dan murid meninggalkan bangku sekolah untuk menggabungkan diri pada badan-badan perdjuangan.

Setelah sekolah-sekolah dibuka kembali maka mulai 1 Oktober 1947 semua sekolah menengah diurus langsung oleh Kementerian P.P. dan K.

Pada waktu itu SMP III menempati bekas gedung Eerste Europeesche Lagere School B didjalan Setjodiningratan dan baru mempunjai kelas satu dan dua. Untuk menampung peladjar jang mengungsi dan peladjar bekas pedjuang maka SMP III membuka kelas tiga.

Formasi guru diperkuat dengan mahasiswa jang kembali dari perdjuangan.

Didjaman pendudukan Belanda gedung sekolah dipergunakan untuk markas, sehingga arsip sekolah beserta arsip udjian penghabisan tahun 1948 lenjap semuanja.

Sebagian dari guru-guru bekas pedjuang turut berdjuang lagi dalam perang gerilja, sebagian mengungsi kedesa, dan sebagian lagi jang tinggal dikota berdjualan dipasar untuk menjelamatkan diri dari pembersihan.

Sesudah Clash II.

Pada tanggal 8-8-1949 Sekolah dibuka kembali dengan djumlah murid 189 orang, jaitu 46% dari djumlah seluruhnja sebelum clash.

Menurut ketentuan dari jang berwadjib bekas gedung SMP III di Setjodiningratan dipergunakan untuk dua sekolah, jaitu: pada waktu pagi untuk SMP II dan pada waktu sore hari untuk SMP III.

Karena alat-alatnja belum ada, maka SMP III berusaha memindjam gedung sekolah rakjat jang sudah ada bangku dan papan tulisnja.

Setelah satu minggu menempati SR Panembahan, mulai 16 Agustus 1949 pindah ke SR Keputran I di alun-alun Utara jang lebih baik letaknja.

Pada tanggal 29 Oktober 1949 pindah lagi dari Keputran I ke Padjeksan 18 menempati gedung H.C.S., jang pada waktu itu dipergunakan oleh Djawatan Perlengkapan Kementerian P. P. dan K.

Gedung jang semula terdiri dari 8 buah ruangan segera dibangun mendjadi gedung jang mempunjai 14 ruangan kelas dan 3 ruangan kantor untuk Kepala Sekolah, guru-guru dan tata-usaha.

Pembangunan ini selesai pada bulan Maret 1951 dengan beaja 185.000 rupiah.

Statistik sekolah :

Sedjak berdirinja hingga kini SMP III berturut-turut dipimpin oleh: 1. Pinandojo, 2. Sugeng Suprobo. 3. Sudibjo, 4. Hutauruk, 5. Sujono Sumodinoto, 6. Supadi Padmodarsono dan 7. Sulardi.

Djumlah kelas, murid dan guru.

1947/1948	— kelas	— murid	— guru
1948/1949	10 „	412 „	15 „
1949/1950	8 „	350 „	16 „
1950/1951	11 „	432 „	15 „
1951/1952	13 „	485 „	16 „
1952/1953	12 „	468 „	21 „

Hasil udjian penghabisan :

1948	lulus	± 50%
1949	—	—
1950	lulus	52%
1951	„	82%
1952	„	80%

Peladjaran.

Dengan adanja gedung baru alat-alat jang agak lengkap dan keadaan murid jang sudah mulai insjaf tentang pentingnja beladjar, maka djalannja pengadjaran makin bertambah baik. Tetapi kemudian ketjerdasan otak tidak seimbang dengan kemadjuan pendidikan kesusilaan dan pembentukan watak, jang hasilnja djauh daripada memuaskan.

Usaha pendidikan.

Funksi sekolah bukannja untuk mengedjar idjazah belaka melainkan untuk membentuk watak agar anak mendjadi manusia susila jang tjakap, serta warganegara jang demokratis dan bertanggung djawab terhadap kesedjahteraan nusa dan bangsa. Guna memberi keselarasan dalam pendidikan disamping pendidikan ketjerdasan otak, telah diusahakan pendidikan kesusilaan, pendidikan keindahan dan pendidikan djasmani, dengan mengadakan matjam-matjam latihan, perlombaan dan pertundjukan, seperti olah-raga, mengarang, menggambar, pekerdjaan tangan, seni suara, kesenian Djawa.

Dalam latihan kesenian Djawa sekolah banjak mendapat bantuan dari perkumpulan kesenian Irama Tjitra dan Siswobudojo.

Untuk memupuk kesadaran menunaikan kewadjiban dan kesadaran memikul tanggung djawab diadakan organisasi keluarga peladjar.

Kesimpulan :

Tetapi segala usaha pendidikan disekolah ini tidak akan berhasil sedikitpun apabila orang tua pada chususnja dan masjarakat pada umumnja tidak merasa bertanggung djawab terhadap pendidikan anak-anaknja.

Untuk kepentingan nusa dan bangsa pendidikan dalam arti jang luas tadi haruslah bersama dipikul oleh sekolah, orang tua dan masjarakat bersama-sama, bukannja semata-mata tanggungan sekolah.

S.M.P. IV Negeri di Djalan Pogung

Semula SMP ini disebut SMP perdjuangan dan didirikan pada tanggal 15 Pebruari 1950. Pada 1 Agustus 1950 SMP perdjuangan ini didjadikan SMP biasa, karena harus menerima murid-murid jang baru lulus udjian masuk sekolah landjutan.

Pada waktu berdirinja SMP perdjuangan terdiri atas 4 buah kelas, ialah 3 buah kelas III dan sebuah kelas II. Setelah diubah mendjadi SMP biasa mempunjai 9 buah kelas, jaitu 3 buah kelas III, sebuah kelas II dan 5 buah kelas I. Sedjak 1 Djuli 1952 SMP IV mempunjai 12 buah kelas.

Mula-mula SMP IV mondok pada SMP III Padjeksan dan memberikan peladjarannja pada waktu siang. Demikian keadaannja sampai 30 Djuni 1951. Dalam tahun peladjaran 1951/1952 mondok pada SMA/C dan sekolah dibuka pada pagi hari dan sedjak 1 Djuli 1952 SMP IV menempati gedungnja sendiri.

Rata-rata djumlah murid tiap tahun dengan 10 à 12 kelas ada 400 orang.

Hasil udjian penghabisan sebagai berikut:

Tahun 1950/1951. Djumlah murid kl. IIIA jang ikut udjian sebanjak 41 orang, lulus 11 orang. Dari bagian B jang menempuh ada 37 orang, lulus 10 orang.

Tahun 1951/1952. Djumlah murid kelas IIIA jang ikut udjian ada 27 orang, lulus 9 orang. Dari bagian B. jang turut 35 orang, lulus 25 orang.

Tahun 1952/1953. Djumlah murid jang mengikuti udjian bagian A sebanjak 41 orang, lulus 39 orang atau 95%.

Dari bag. B ikut 70 orang, jang lulus 44 orang, djadi 62,5%.

S.M.P. V Negeri di Djalan Seraju

Pada tanggal 1 April 1944 oleh pemerintah Djepang didirikan Nippongogakko dengan nama Sekolah Menengah Pertama Puteri, bertempat di gedung Stella Duce Djalan Mahameru. Waktu dibuka ada 8 kelas. Murid kelas II dan III berasal dari SMP I dan SMP II, dengan gurunja sebanjak 6 orang, jaitu:

1. Malikus Suparto, Kepala Sekolah.
2. Soemedi Gondoatmodjo.

3. Dwidjohudojo,
4. Suwandi,
5. Rukijat,
6. Nj. Sahlan.

Selama clash II SMPP ditutup. Gedung Sekolah diduduki tentara keradjaan Belanda untuk didjadikan dapur. Oleh karena itu semua alat-alat pengadjaran dipakai untuk kaju dan semua habis terbakar. Sedjak berkobarnja revolusi para murid menjumbangkan tenaganja bagi perdjuangan, a.l. membantu dapur umum dan palang merah. Pada bulan Djuni 1949, setelah Belanda meninggalkan kota Jogjakarta, para murid SMPP menerima peladjaran digedung SMA/Bl Negeri dan kemudian SMPP dibuka di gedung SMA bagian A djalan Pakem. Tidak lama kemudian SMPP dipindah ke gedung Sekolah Tionghoa Katholik di Dagen, ke gedung SMPP Darurat di Gowongan kidul (SMEA) dan pada tahun 1950 achirnja dipindah ke Djalan Seraju 4.

Pada tahun 1951 nama SMPP diganti mendjadi SMP V, karena ternjata bahwa djumlah gadis jang masuk SMPP makin berkurang.

Keadaan kelas, guru dan murid :

Tahun peladjaran 1949/1950. Ada 10 kelas, 18 orang guru dan 408 orang murid. Dari bagian A jang ikut udjian 82 orang, lulus 44 orang. Dari bagian B ikut udjian 61 orang, lulus 56 orang.

Tahun peladjaran 1950/1951. Sekolah mempunjai 11 buah kelas, 18 orang guru dan 421 orang murid. Dari kelas III bagian A ikut udjian penghabisan 70 orang, telah lulus 50 orang. Dari bagian B ikut 51 orang, dan lulus 43 orang.

Tahun peladjaran 1951/1952 Sekolah mempunjai 13 buah kelas, dengan 20 orang guru dan 479 orang murid. Dalam udjian penghabisan lulus bagian A 28 orang dari 62 pengikut, sedang bagian B lulus 39 orang dari 51 orang pengikut.

Tahun peladjaran 1952/1953. Sekolah mempunjai 14 kelas, 21 orang guru dan 524 orang murid. Jang mengikuti udjian penghabisan bagian A 70 orang, lulus 46 orang. Dari bagian B ikut 77 orang murid, lulus 56 orang.

*

III. USAHA PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN DALAM DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA MULAI 1945 s/d 1952

GUNA mengikuti perkembangan usaha pendidikan dan pengadjaran didalam Daerah Istimewa Jogjakarta, maka ditetapkan pangkalnja :

1. Sebelum proklamasi.

a. Sebagai daerah Swapradja, Jogjakarta sedjak sebelum proklamasi kemerdekaan sudah menjelenggarakan Sekolah-sekolah Rakjat dengan mempunjai apparatuur penjelenggaraan dan pengawasan.

b. Disamping S.R. djuga berhak menjelenggarakan pendidikan guru-guru 2 tahun jaitu Cursus volksonderwijzers (C.V.O.).

c. Didalam pemerintah Djepang, sebelum waktu proklamasi kemerdekaan, hak itu diperluas dengan penjelenggaraan Sekolah-sekolah Landjutan jang bersifat umum maupun kedjuruan (vak).

2. Pada sa'at proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dalam Daerah Istimewa Jogjakarta terdapat keadaan sebagai berikut :

a. Ada Djawatan Pengadjaran, bernama Paniradya Wijata-Pradja sebagai salah satu dari 6 Djawatan dari Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, jang masing-masing di kepalai oleh seorang Kepala Djawatan, bergelar Bupati Paniradya Pati.
b. Didalam penjelenggaraannja terdapat:
(1) S.R. III — S.R. V — S.R. VI, beberapa dengan bagian taman kanak-kanak.
(2) Sekolah-sekolah Landjutan umum, dan vak.
c. Apparatuur Pengawas S.R. (bagian Inspeksi) dengan tjabang-tjabangnja di Kabupaten-kabupaten.

3. Ketjuali apa jang tersebut pada pasal 2 ajat b, masih ada usaha-usaha lainnja jang didjalankan dalam lapangan pendidikan, jaitu:
a. Pembrantasan Buta Huruf (Pembrasta Wuta Sastra — P.W.S.); dengan djalan:
(1) menjelenggarakan kursus-kursus untuk pendidikan guru bagi kursus P.W.S.
(2) menempatkan pada setiap Kapanewon seorang Penilik P.W.S.
(3) membentuk Panitya-panitya P.W.S. Kapanewon.
(4) menjelenggarakan udjian-udjian P.W.S.
(5) mengusahakan alat-alat guna keperluan P.W.S. (buku-buku, kapur, papan-tulis, dan lain-lain sebagainja).
b. Bagian Pemuda dengan nama: Norojuwono". Tugasnja jalah mendidik pemuda-pemuda, diantaranja membentuk kepanduan-kepanduan dipelosok-pelosok dan memelihara/mengkordinasi kepanduan-kepanduan jang telah ada.
c. Membantu penjelenggaraan sekolah-sekolah partikelir dengan memberinja subsidi.
d. Usaha kesedjahteraan pegawai, usaha mana berkisar didalam mentjari rupa-rupa bahan makan dan alat-alat keperluan pegawai didalam masa kekurangan.

4. Guna mentjapai kelantjaran dan kesempurnaan tugas dari Paniradya Wijata-Pradja, maka dibentuk suatu Panitya Perentjana terdiri atas pegawai-pegawai/guru-guru dalam lingkungan Wijata-Pradja, jang dibaginja mendjadi seksi:
1). Seksi pindah-memindah guru.
2). Seksi peraturan gadji.
3). Seksi pembentukan kursus-kursus guru
4). Seksi leerplicht (kewadjiban beladjar).
5). Seksi reorganisasi S.R.

5. Pertumbuhan dalam tahun 1946:
a. Semua S.R. V didjadikan S.R. VI.
Semua S.R. III didjadikan S.R. IV.
Sementara S.R. VI diteruskan sampai kelas VII dan VIII (kelas VII — VIII dinamakan kelas masjarakat, digabungkan pada induk S.R. VI).
b. Mengadakan kursus guru S. R. III (C. V. O.) untuk menutup kekurangan guru.
c. Guna memenuhi hasrat beladjar anak-anak jang telah tamat S.R. VI di-usahakan:
1). Memperluas adanja Sekolah Landjutan dengan membuka S.M.P. No. III di Jogjakarta dan S.M.P. Negeri di Wates.
2). Mengadjukan adanja S.M.P. di Kabupaten-kabupaten, buat sementara waktu bersifat partikelir.
3). Membuka S.M.A. II.

d. Mengusahakan adanja Perguruan Tinggi; didirikan setjara partikelir dengan bantuan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah: „Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada". Mendapat tempat di Siti-Hinggil Jogjakarta.

6. Dengan pindahnja Ibu Kota R.I. dari Djakarta ke Jogjakarta dan disusul dengan adanja clash I, membawa perubahan besar dalam lapangan pendidikan. Disamping perluasan adanja S.R. dan S.M., maka timbullah **S.R.2. Darurat,** guna menampung anak-anak pengungsi agar mereka tidak terlantar peladjarannja. Lagi pula memberi tempat kepada guru-guru pengungsi, dimana tenaga mereka dapat dipergunakan agar tidak terputus penghidupannja, dengan tidak mengabaikan mereka berhubung dengan tempat tinggalnja.

7. Berhubung dengan keputusan Kementerian P.P. dan K. mengenai bentuk Sekolah Rendah mendjadi S.R. VI dan S.R. III, maka Daerah Istimewa Jogjakarta dalam tahun 1947 mengadakan reorganisasi sebagai berikut:

a. Mengubah S.R. IV mendjadi S.R. III dengan memindahkan kelasnja IV kepada S.R. VI jang berdekatan.
b. Menumbuhkan S.R. IV jang besar (kuat) mendjadi S.R. VI.
c. Menggabungkan S.R. IV dengan S.R. VI jang bersifat Sekolah Sambungan (berkelas V dan VI) mendjadi S.R. VI lengkap.
Sehingga dalam tahun 1947 keadaan S.R. di Daerah Istimewa Jogjakarta sebagai berikut:

A. **Banjaknja S.R. Negeri dan Partikelir ada:**

1. S.R. Negeri	441
2. S.R. Partikelir	100
Djumlah:	541

B. **Banjaknja murid S.R.**

1. S.R. Negeri.	89948
2. S.R. Partikelir	18480
Djumlah:	108428

C. **Banjaknja guru S.R.**

1. guru S.R. Negeri	1366
2. guru S.R. Partikelir	353
Djumlah:	1719

D. Rata-rata tiap-tiap guru mengadjar lebih kurang 63 murid.

8. **Apparatuur Inspeksi** diatur kembali dan diperluas. Disamping **Kantor Inspeksi Kabupaten diadakan Kantor Inspeksi Daerah (District).**

9. Guna mentjukupi tenaga guru maka ditiap-tiap Kabupaten dibukalah sebuah S.G.C. dengan diadakannja asrama. Penjelanggaraannja termasuk dalam kopetensi Kementerian Dalam Negeri. S.G.C. ini menurut rentjana peladjarannja ada 2 tahun.

10. Pada achir 1947 diputuskan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian P.P.K.), bahwa Sekolah Landjutan seterusnja diurus oleh Pemerintah Pusat, sehingga mulai pada tanggal 1 - 1 - 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta hanja mengurus Sekolah Rakjat sadja.

11. Sementara itu sesuai dengan rentjana Kementerian P.P.K. timbullah di Daerah Istimewa Jogjakarta usaha baru, jaitu pendidikan diluar sekolah jang dinamakan: **Pendidikan Masjarakat,** usaha ini menudju kepada Pemberantasan Buta Huruf (P.B.H.) dan adanja Kursus-kursus Pengetahuan Umum (K.P.U.) jang bertingkatan A — B dan C.

12. Disusul kemudian dengan usaha mempergiat pendidikan djasmani pada Sekolah Rakjat dengan membentuk Inspeksinja (Inspeksi Pendidikan Djasmani — I.P.D.) mula-mula dipusat daerah, kemudian djuga di Kabupaten-kabupaten.

13. **Clash II** membawa perubahan jang tidak ketjil. Dengan didudukinja daerah Jogjakarta, maka Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta memerintahkan sekolah-sekolahnja tutup. Tetapi Belanda berusaha membukanja kembali dengan mempergunakan tenaga-tenaga guru jang bersedia. Diikutinja oleh beberapa sekolah partikelir, jang menerima bantuan dari pemerintah pendudukan Belanda berupa materieel maupun moreel. Bahkan ada sekolah-sekolah partikelir jang dibuka digedung-gedung jang sebelumnja dipergunakan untuk sekolah Negeri dan dengan murid-murid (sebagian) dari sekolah Negeri itu.

14. **Sehabis clash II.**

a. Sekolah Rakjat Darurat didjadikan sekolah Rakjat biasa (S.R. VI)

b. S.G.B. memerlukan perluasan S.R. Latihan. Setelah S.R. Djalan Ungaran dan Djetis II mulai 1948 dipergunakan, maka disusul untuk keperluan itu dengan S.R. Gondolaju dan Djalan Seraju.

c. S.G.C. ditutup. Murid-muridnja jang naik kelas II ditampung pada S.G.B.; dari 6 buah S.G.C. hanja mendjadi sebuah S.G.B. jaitu di **Bogem** Kabupaten Sleman.

15. Dengan keluarnja Undang-undang Pokok Pendidikan R.I. tahun 1950 No. 4, maka ada perubahan umum mengenai murid, jaitu:
uang sekolah dan **uang alat** mengenai S.R. dihapuskan, djadi bebas (gratis) prodeo seluruhnja.

Pun tjoraknja pendidikan mengalami perubahan. Dimana kebudajaan nasional sudah selalu mendapat perhatian besar dalam pendidikan, sekarang mendjadi pokok jang dipentingkan.

16. Pengaruh membebaskan uang sekolah dan uang alat tersebut dan kesadaran umum akan kepentingan beladjar, maka djumlah murid dalam permulaan tahun peladjaran 1950 — 1951 mendjadi lipat 1½, dan tambahan murid S.R. Negeri sadja adalah lebih kurang 4800. Dengan demikian maka kekurangan tenaga guru mendjadi lebih besar. Seandainja S.G.C. tidak ditutup, maka pada sa'at itu sudah mengeluarkan murid, sehingga kekurangan guru tidak begitu menjulitkan. Untuk mengatasi ini maka pada waktu itu mulai didjalankan **peraturan mengadjar darurat,** jaitu sesudah melakukan tugas pokok diwaktu pagi hari, guru dipekerdjakan lagi diwaktu sore dengan menerima honorarium.

17. Sebagai persiapan kewadjiban beladjar oleh Kementerian P.P. dan K. diadakan Kursus Pengadjar (disingkat K.P.) untuk mendidik guru guna sekolah-sekolah kewadjiban beladjar nanti. Kursus ini lamanja 4 tahun diatas S.R. VI, djadi setingkat dengan S.G.B. Pengikutnja menerima tundjangan ikatan dinas.

Daerah Istimewa Jogjakarta mendapat 12 buah K.P. (tiap Kabupaten 2 K.P.), dimulai dengan kelas I dengan murid 40 anak.

18. Tahun peladjaran 1951 — 1952 madjunja pendidikan seimbang dengan tahun peladjaran 1950 — 1951; tambahan murid pada S.R. Negeri ada lebih kurang 4200. Untuk menampung anak-anak sebanjak itu, oleh Kementerian P.P.K. diadakan tindakan darurat, jaitu: murid-murid K.P. jang naik

ke-kelas II diberi tugas mengadjar pada Kursus Pengantar ke-Kewadjiban Beladjar (K.P.K.B.), disamping beladjar. Dengan demikian di Daerah Istimewa Jogjakarta dapat dibuka 137 K.P.K.B. dengan murid rata-rata 125 orang. Diwaktu itu penerimaan murid untuk kelas I dapat diperluas sampai jang berumur 12 tahun, Kekurangan guru pada S. R. masih tetap besar, sehingga stelsel mengadjar darurat masih terus berdjalan pula.

Guna sekedar mengatasi/memperketjil kekurangan guru pada S.R., maka oleh Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta telah diputuskan menerima tenaga-tenaga beridjazah S.M.P. Negeri mendjadi guru-muda dengan sjarat-sjarat tertentu.

19. Didalam menggalang pendidikan nasional jang berdasarkan Pantja Sila (Undang-undang Tahun 1950 No. 4) Kementerian P.P.K. membuka Sekolah Rakjat Pantja Sila di Jogjakarta dengan mengubah S.R. VI biasa. Untuk keperluan ini oleh Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta disediakan:
1. S.R. VI Pudjokusuman (Kota Jogjakarta); 2. S.R. VI Pakem (Kabupaten Sleman); 3. S.R. VI Wates (Kabupaten Kulon Progo). Sekolah-sekolah ini diperlengkapi lebih sempurna (alat-alat, tanah untuk bertjotjok-tanam, systeem mendidik dengan tjara baru, guru-gurunja terpilih).

20. Dalam tahun 1952 dengan bantuan Daerah oleh Kementerian P.P.K. telah dapat dibuka 3 buah S.G.B. baru dengan masing-masing dua buah kelas I à 40 murid; jaitu di Wates, Wonosari dan Bantul.

21. Guna menambah mutu guru-guru pada S.R. jang pendidikannja belum setingkat dengan pendidikan S.G.B., maka oleh Kementerian P.P.K. dengan bantuan dari Pemerintah Daerah telah dibuka Kursus Lisan Persamaan S.G.B. di Wonosari, Bantul, Wates dan Kalasan. Kursus ini diadakan pada sore - hari dan diikuti oleh guru-guru sekitar tempat-tempat tersebut.

Disamping K.L.P.S.G.B. kepunjaan Pemerintah, oleh Badan-badan Partikelir diadakan kursus-kursus sedjenis itu djuga, didalam maupun diluar Kota Jogjakarta.

Oleh P.G.R.I. Jogjakarta diselenggarakan djuga sekolah K.L.P.S.G.A. di Kota Jogjakarta guna memberi kesempatan kepada guru-guru jang beridjazah S.G.B. untuk meningkat kepada idjazah S.G.A.

22. Sementara itu rentjana pertumbuhan S.R. setiap tahun berdjalan terus, jaitu dengan berangsur-angsur menumbuhkan S.R. III jang baik mendjadi S.R. VI; memetjah S.R. VI jang besar mendjadi 2 buah S.R. VI; membuka tjabang-tjabang S.R. dan memisahkan tjabang-tjabang jang sudah dapat berdiri sendiri dan lain sebagainja.

23. Keadaan pendidikan S.R. pada tahun 1952 berupa sebagai berikut:

A. Banjaknja S.R.:

1.	Negeri (termasuk sekolah Pantjasila + Latihan	470
2.	Partikelir	113
3.	Kursus Pengantar	137
	Djumlah:	720

B. Banjaknja murid:

1.	Negeri	174.010
2.	Partikelir	33.749
3.	Kursus Pengantar	23.968
	Djumlah:	230.727

C. Banjaknja guru :

1.	Negeri	2.747
2.	Partikelir	677
3.	Kursus Pengantar	135
	Djumlah:	2.953

D. Rata-rata seorang guru mengadjar murid lebih kurang 78.

Keterangan : Dalam djumlah guru pada Kursus Pengantar belum termasuk tenaga pengadjar dari Kursus Pengantar.

24. Djika menilik djumlah penduduk Daerah Istimewa Jogjakarta jang mendekati djumlah 2.000.000, maka belum semua anak jang mestinja bersekolah mendapat tempat.

a. Anak-anak berumur 6 — 15 tahun ada lebih kurang 15% dari penduduk = lebih kurang 300.000 orang anggauta.
b. Jang telah dapat ditampung lebih kurang 228.000 orang anggauta.
c. Jang belum mendapat tempat pada S.R. ada lebih kurang 72.000 orang anggauta.

25. S.G.B. serta K.P. jang mendidik guru untuk S.R. akan mulai mengeluarkan tenaga guru baru pada permulaan tahun peladjaran 1954 — 1955 lebih kurang 720 guru. Dalam hal ini usaha partikelir belum terhitung.

26. Kemudian dapat didjelaskan, bahwa Daerah Istimewa Jogjakarta mentjapai perkembangan - perkembangan seperti diuraikan diatas tidak dengan mengadakan peraturan-peraturan sendiri, melainkan mengikuti djedjak Pemerintah Pusat (Kementerian P.P.K.), melaksanakan apa jang direntjanakan dari Pusat jang termasuk tugasnja menurut peraturan-peraturan serta pedoman-pedoman dan petundjuk-petundjuk dari Pusat. Semua itu dikerdjakan disamping mendjalankan tugas-tugas, jang telah mendjadi tunggungan dari Daerah Istimewa Jogjakarta sebelumnja.

Didalam melaksanakan usaha-usaha baru, Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta senantiasa bersikap membantu sekuat mungkin.

Mungkin dalam organisasinja di Daerah Istimewa Jogjakarta ada beberapa hal jang berlainan dari pada jang berlaku didaerah lainnja, karena keadaan jang berbeda-beda.

*

PENDIDIKAN DJASMANI

Perkataan pendidikan djasmani ini terdjemahan dari „lichamelijke opvoeding". Djika kita melihat perkataan „djasmani = lichaam", maka agaknja kita hanja mementingkan „bentuknja badan", pun latihan-latihannja jang hanja mengenai badan sadja.

Dalam pertjakapan sehari-hari djasmani dan rochani itu terpisah, tetapi pendidikan djasmani itu tidak terpisah dari pendidikan rochani, karena pendidikan djasmani itu mempengaruhi rochani, sedang sebaliknja pendidikan rochani mempengaruhi djasmani djuga.

Djiwa dan rasa adalah satu kesatuan.

Pada tahun 1945 perkataan „pendidikan djasmani" belum muntjul, jang dipakai masih „olah raga" dan „gerak badan", sedang oleh Bung Karno pada PON ke I tahun 1948 dipakai istilah „olah sarira". Menurut hemat penulis istilah ketiga-tiganja itu sama artinja — melatih raga — badan-sarira, tetapi „pendidikan djasmani", adalah pendidikan jang lebih mendalam. Pentjipta

jang mula-mula memakai „pendidikan djasmani" adalah Puro Marto-dipuro, Inspektur Umum Pendidikan Djasmani di Djakarta jang pada waktu itu masih berkantor di Solo.

Sesudah Djepang menjerah, latihan-latihan gerak badan setjara Djepang meskipun lenjap, tetapi sisa-sisanja masih nampak, umpama: tjara aba-aba, tjara mengatur barsan dan lain-lain. Taiso (gerak badan bersama-sama oleh murid-murid dan pegawai-pegawai) lenjap. Terang bahwa mendjalankan Taiso dulu itu hanja karena takut kepada jang memerintah, tidak karena insjaf akan faedahnja gerak badan.

Sebelum clash I pimpinan gerak badan dipegang oleh Sadarjun, sekarang mendjabat Kepala Djawatan Pendidikan Masjarakat dari Kem. P.P.K. di Djakarta. Oleh beliau dikeluarkan kitab gerak badan untuk Sekolah Rakjat dan untuk Sekolah Landjutan.

Peladjaran gerak badan di S. R. tidak diberikan, karena taiso mereka tidak suka lagi. Permainan disana-sini dikerdjakan dengan bebas, artinja tidak di-bawah pimpinan guru dengan sungguh-sungguh. Bersenam (gymnastik) pun tidak ada.

Peladjaran gymnastik di Sekolah Landjutan nasibnja sama, tetapi permainan dan atletik ada dan dipeladjari dengan saksama. Perlombaan-perlombaan atletik ada djuga. Untuk Jogjakarta Sekolah Landjutan diurus oleh Wijata Pradja.

Pada suatu rapat diantara guru-guru olah raga Sekolah Landjutan, diputus-kan untuk mengadakan latihan gerak badan di Djetis dengan asrama. Mesikipun hasilnja belum memuaskan, tetapi usaha kearah perbaikan peladjaran gerak badan di Sekolah Landjutan ada. Berhubung dengan kekurangan guru gerak badan di Sekolah Landjutan, maka di Jogjakarta diadakan kursus aplikasi gerak badan, lamanja 6 bulan dan diikuti oleh 21 orang guru.

Langkah pertama buat memperbaiki peladjaran bersenam di Sekolah Rakjat ialah mengumpulkan guru-guru Sekolah Rakjat ditiap-tiap Kabupaten. Theori bersenam didalam kelas diberikan kepada guru-guru jang sudah dikum-pulkan itu. Begitu sampai berdjalan beberapa lama. Ternjata, bahwa tjara ini hasilnja tidak seperti diharapkan semula. Disamping itu tidak lupa dihidupkan kembali permainan kasti jang sudah meresap di kalangan murid-murid Sekolah Rakjat sedjak djaman Belanda. Perlombaan kasti antara sekolah dan sekolah diadakan, begitu pula perebutan djuara Kabupaten dan achirnja perebutan djuara Daerah Istimewa Jogjakarta oleh 5 Kabupaten diatur dengan piala beredar dan dengan idjazahnja. Berkat latihan-latihan jang teratur dan sisti-matis itu, maka kasti Daerah Istimewa Jogjakarta jang mewakili Djawa-Tengah, dalam PON ke II di Djakarta, keluar sebagai djuara seluruh Indonesia. Regu puterinja menerima bintang perunggu sebagai nomer tiga.

Peristiwa ini membesarkan hati murid-murid.

Kembali kepada so'al membuat kader, maka Inspeksi Pusat Pendidikan Djasmani mengadakan Instruktor Pendidikan Djasmani jang diambilkan dari Kepala Sekolah Rakjat jang memenuhi sjarat-sjaratnja dan mengadakan Kursus Ulangan Pendidikan Djasmani jang diikuti oleh guru-guru Sekolah Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta, sampai ada 5 orang Inspektur Pendidikan Djas-mani, jaitu: di Kota-Besar Jogjakarta, di Kabupaten-kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo. Mereka berkantor bersama-sama dengan Penilik Sekolah Kabupaten, hingga kerdja sama antara Instruktor dan Penilik Sekolah terus terpelihara.

Mengenai Kursus Ulangan Pendidikan Djasmani (K.U.P.D.) keadaannja sbb.

K.U.P.D. ke I tgl. 29-9 -'51 s/d. 10-10-51 — 32 orang guru Negeri.
K.U.P.D. ke II tgl. 19-11-'51 s/d. 29-11-51 — 30 orang guru Negeri.
K.U.P.D. ke III tgl. 27-12-'52 s/d. 8- 1-52 — 31 orang guru Negeri
3 orang guru Partikelir.

K.U.P.D. ke IV tgl. 4-2 -52 s/d. 16-2-52 — 31 orang guru Negeri 6 orang guru Partikelir.
K.U.P.D. ke V tgl. 28-4 -52 s/d. 10-5-52 — 30 orang guru Negeri 2 orang guru Partikelir.
K.U.P.D. ke VI tgl. 14-7 -52 s/d. 26-7-52 — 31 orang guru Negeri 4 orang guru Partikelir.
K.U.P.D. ke VII tgl. 25-8 -52 s/d. 6-9-52 — 30 orang guru Negeri 3 orang guru Partikelir.
K.U.P.D. ke VIII tgl. 8-9 -52 s/d. 20-9-52 — 21 orang guru Negeri 1 orang guru Partikelir.
K.U.P.D. ke IX tgl. 28-9 -52 s/d. 11-10-52 — 35 orang guru Negeri 4 orang guru Partikelir.
K.U.P.D. ke X tgl. 26-10-52 s/d. 8-11-52 — 27 orang guru Negeri 5 orang guru Partikelir.
K.U.P.D. ke XI tgl. 16-11-52 s/d. 29-11-52 — 31 orang guru Negeri 3 orang guru Partikelir.

Selandjutnja tiap-tiap bulan diadakan satu K.U.P.D., diantaranja telah diadakan K.U.P.D. untuk guru-guru puteri (19 s/d. 31 Djanuari 1953).

Mata peladjaran jang diberikan di K.U.P.D. di Jogjakarta jaitu :

1. Bersenam praktek dan theori.
2. Bermain „ „ „
3. Atletik „ „ „
4. Anatomi „ „ „
5. Physiologi „ „ „
6. Organisasi „ „ „
7. Ilmu djiwa dan Ilmu mendidik.
8. Methode : menulis, berhitung dan lain-lain.

Hasil K.U.P.D. ini baik sekali. Kemadjuan tjara mengadjar bersenam, bermain S.R. telah nampak. Hubungan antara guru-guru dan Penilik Sekolah dan Instruktor/Inspeksi Pendidikan Djasmani lebih erat.

Perlu diterangkan disini, bahwa methode - methode dan administrasi S.R. itu diberikan oleh para Penilik Sekolah, sebagai pelaksanaan perintah dari Kementerian P.P. & K.

Usaha Inspeksi Pusat Pendidikan Djasmani di Djakarta dengan Puro Martodipuro sebagai kepalanja, jang menambah mutu guru-guru S.R. mengenai tugasnja mengadjarkan Pendidikan Djasmani, dengan djalan mengadakan K.U.P.D. sudah njata berhasil baik. Langkah kearah perbaikan itu sudah djauh lagi, jaitu dengan mendirikan Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (S.G.P.D.) di Jogjakarta, Bandung dan Surabaja, Akademi Pendidikan Djasmani (A.P.D.) di Jogjakarta dan di Bandung, Kursus Instruktor Pendidikan Djasmani (K.I. P.D.) di Jogjakarta dan di Surabaja.

Olah raga di Kota Jogjakarta mulai 1945 — 1952 mendapat banjak kemadjuan.

*

IV. PERKEMBANGAN PERGURUAN NASIONAL

A. PERGURUAN TAMAN - SISWA

PADA tanggal 3 Djuli 1922 oleh R.M. Suwardi Suryaningrat jang kemudian bernama Ki Hadjar Dewantara, didirikan Perguruan Kebangsaan „Taman-Siswa" jang pada waktu itu masih bernama „Nationaal Onderwijs Instituut Taman - Siswa", jang pertama-tama di Jogjakarta.

Dengan pandjang lebar diterangkan oleh K.H. Dewantara dimuka orang tua murid dan beberapa tamu tentang maksud „Taman-Siswa" :

1. Pendidikan dan pengadjaran itu untuk tiap-tiap bangsa berudjud pemeliharaan buat mengembangkan benih turunan dari bangsa itu, agar dapat tumbuh dengan sehat lahir batinnja. Buat si-individu haruslah berkembang djiwa dan badannja, buat bangsa ditudjukan kulturil dan maatschappelijk. Segala alat-alat jang dipakai harus berdasarkan adat-istiadat rakjat, agar dapat tjepat dan sesuai (natuurlijk menurut kodratnja) dengan kemadjuannja bangsa.

2. Pengadjaran jang kita dapat dari orang Barat hingga kini tidak terluput dari pengaruh politik kolonial, ja'ni kita dididik untuk keperluan jang mendidik. Inilah sendi pengadjaran berasal dari aliran Oost Indische Compagnie. jang hingga kini masih terus dipakai, walaupun sekarang aliran sudah berganti mendjadi etis. Dan anehnja rakjat kita dari tingkatan burdjuis tetap gemar pada onderwijs sematjam itu, jang maksud menjekolahkan anaknja melulu untuk mentjari „diploma" buat mendjadi „buruh", tidak untuk isi pendidikannja dan mentjari pengetahuan guna kemadjuan djiwa-raga.

3. Karena onderwijs jang berdjiwa kolonial itu hingga kini kita tak dapat mengadakan perikehidupan bersama (maatschappelijk) sendiri dan teruslah hidup dan menghidupkan kita tergantung pada bangsa Barat. Keadaan ini tidak akan lenjap djika hanja dilawan dengan pergerakan politik sadja. Oleh karena itu djanganlah kita hanja melulu mementingkan perlawanan terhadap pada luar sadja, akan tetapi harus djuga mementingkan menjebar benih hidup merdeka dikalangan rakjat kita dengan djalan pengadjaran jang disertai pendidikan nasional.

4. Oleh karena tjara pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah jang ada sekarang hingga kini ditudjukan kearah kepentingan kolonial sadja, maka haruslah kita berani membuat sistim pedagogik dan metodik baru jang bersandarkan atas kultur kita sendiri dan mengutamakan kepentingan masjarakat kita sendiri. Haruslah kita ingat pada djaman dulukala ketika bangsa kita masih merdeka dan mempunjai sistim onderwijs sendiri, mulai djaman asrama hingga djaman pondok — pesantren.

5. Ingatlah pula bahwa di Eropah dan Amerika pada waktu ini timbul aliran pendidikan dan pengadjaran baru jang berdasar „kemerdekaan" dan „idealisme" sebagai reaksi dari tjara „paksaan", manusia dianggap sebagai barang dan mengutamakan keduniawian atau „materialisme" dengan sjaratnja „intellectualisme" (mengabdi pada angan-angan sadja). Ingatlah akan sistim Montessori, Tagore dan lain-lain tjita-tjita pendidikan, jang lama-kelamaan terlihat sama atau sesuai dengan sistim pendidikan tjara kebangsaan kita, jang kini terus hidup sebagai angan-angan Among, ja'ni bukan „perintah-paksaan", akan tetapi „tuntunan" (bukan pangudja !) bagi hidup anak-anak agar dapat subur dan selamat, baik lahir maupun batinnja.

6. Untuk dapat mempraktekkan pendidikan dan pengadjaran nasional itu haruslah ada kemerdekaan jang seluas-luasnja; karena itu djanganlah suka menerima bantuan jang dapat mengikat lahir atau batin dari siapapun djuga: sedangkan untuk dapatnja berdiri langsung haruslah kita mengadakan „zelfbedruipingssysteem" (sistim hidup atas kakinja sendiri) dengan sjarat „berhemat".

7. Pengadjaran harus tersebar dikalangan rakjat jang terbanjak, djanganlah hanja diberikan kepada sebagian lapisan jang tertinggi sadja, karena kekuatan bangsa tidak berkembang djika hanja lapisan jang teratas sadja jang terpeladjar.

Susunan pengadjaran harus dimulaikan dari bawah (tersebarnja onderwijs jang paling perlu, bukan tingginja peil) untuk dapat tertib dan kuatnja susunan kearah atas.

Pada tgl. 31 Desember 1922 diadakan permufakatan antara K.H. Dewantara dengan marhum R.M. Soetatmo Soerjokoesoemo untuk menentukan sikap dan program selandjutnja setelah Taman-Siswa makin mendapat perhatian dari masjarakat dari beberapa tempat.

Pada tgl. 6 Djanuari 1923 untuk lebih menjempurnakan djalannja Taman-Siswa maka dibentuk suatu ,Instituutraad', jang anggauta-anggautanja terdiri dari: Ketua R.M. Soetatmo Soerjokoesoemo, Ketua II R. M. H. Soerjopoetro, Panitera-Umum K. H. Dewantara dan anggauta-anggauta lainnja: Ki Pronowidigdo, Ki Soetopo Wonobojo, B. R. M. Soebono, R. Roedjito dan R. Ng. Wirjodihardjo. Oleh Madjelis itu diumumkan, bahwa Taman-Siswa adalah suatu usaha rakjat mengadakan pendidikan dan pengadjaran jang berdasar nasional dan bersifat **„wakaf"**. Supaja dapat kemerdekaan jang luas untuk mentjari djalan jang selaras dengan maksud dan tudjuannja, tidak diadakan anggaran dasar dan - tetangga.

Untuk mendjaga ketertiban-umum K. H. Dewantara diberi hak-leluasa (diktatur).

Pada tanggal 20 - 22 Oktober 1923 di Jogjakarta diadakan konperensi jang memutuskan:

1. Taman-Siswa adalah „badan wakaf" (stichting);
2. pendjelasan tentang azas-azas Taman-Siswa, sendi-sendi pendidikan serta daftar peladjarannja;
3. peraturan Taman-Siswa bukan peraturan jang mati, tetapi peraturan jang hidup, organis, dan berdasarkan leiderschap (sifat pemimpin, persoonlijk gezag).

Agar Taman-Siswa sebagai badan wakaf dapat kepertjajaan penuh dari masjarakat, lalu Instituutraad diperluas mendjadi Hoofdraad (Madjelis - Luhur), dan diambilkan dari beberapa orang jang mendapat kepertjajaan dari bermatjam-matjam golongan dan aliran dari masjarakat kita. Susunan Madjelis-Luhur jang pertama itu terdiri dari:

Ketua	:	Marhum R. M. Soetatmo Soerjokoeoemo.
Ketua kedua	:	Marhum R. M. H. Soerjopoetro.
Panitera - Umum	:	Ki Hadjar Dewantara.
Anggauta-anggauta	:	Ki Pronowidigdo, R. Ng. Wirjodihardjo, R. Roedjito, Mr. Soejoedi, marhum R.M. Soerjoadipoetro.
Penasehat	:	Ki Prawirowiworo.

Adapun anggauta-anggauta diluar Jogjakarta dan bernama „Gedelegeerden" jaitu: 1. Ki Soetopo Wonobojo di Bogor, 2. Ir. Soekarno di Bandung, 3. Panudju Darmobroto dan 4. Mr. M. Besar di Tegal, 5. Ki Tjokrodirdjo dan 6. Ki Hardjosoesastro di Semarang, 7. Soetedjo Brodjonagoro di Surakarta, 8. Soedijono Djojoprajitno di Wonokromo-Surabaja, 9. Marhum K. Notodiputro, 10. Dr. Soewarno dan 11. Mr. Ali Sastroamidjojo di Surabaja, 12 Ki Puger di Malang dan 13. Marhum Dr. Mr. Gondokusumo di Pasuruan.

Adapun azas-azas Taman-Siswa jang telah disahkan dalam Konperensi Oktober 1923 tersebut untuk lengkapnja riwajat dimuatkan dibawah ini; demikian djuga terdjemahannja jang orisinil dalam bahasa Belanda beginsel-program tersebut.

1. Hak mengurus keadaan sendiri, selaras dengan perhubungannja pergaulan-hidup jang sempurna, itulah azas kita jang terutama. Tertib dan Damai maksud kita jang termulia. Tak ada ketertiban djika tak ada perdamaian. Sebaliknja tak ada perdamaian, djika manusia tiada berkemerdekaan untuk hidup jang semestinja. Kemadjuan kodrat jaitu suatu sjarat terpenting didalam evolusi untuk membuka kekuatan - kekuatan orang jang selaras dengan kodratnja. Oleh karena itu kita tidak setudju dengan „opvoeding" (pendidikan) jang berarti „opzettelijke vorming van het karakter des kinds" (membangun watak anak dengan disengadja) dengan tiga perkataan „regeering - tucht - orde" (perintah - paksaan - batin - tertib sopan). Kita men-

djundjung pendidikan jang berarti mendjaga dengan suka-tjinta, jaitu sjarat terpenting untuk membuka kekuatan anak, baik kekuatan watak dan fikirannja, maupun badannja. Pendidikan ini kita namakan „Among-systeem".

2. Didalam sistim ini pengadjaran tidak-boleh-tidak maksudnja jaitu mendidik murid-murid supaja dapat berperasaan, berfikiran dan bekerdja merdeka. Selainnja memberi pengetahuan jang perlu dan berguna, „Guru" harus mengadjar „Siswa" mentjari dan mempergunakan pengetahuan tadi. Inilah jang dikemukakan sistim „Among". Pengetahuan jang perlu dan berguna itu pengetahuan jang selaras dan berguna untuk keperluan orang lahir dan batin, untuk pergaulan orang masing-masing.
3. Tentang nasib kita sebagai suatu bangsa dikemudian hari, terkurunglah kita dalam kegelapan. Karena terbawa oleh nafsu kita jang tidak benar, jaitu buahnja peradaban asing jang susah dipenuhi dengan sjarat-sjarat sendiri, kita sering kali turut menggontjangkan perdamaian, kita selalu merasa tidak puas. Dari pengaruhnja nafsu kita jang tidak benar itu kita hanja memikirkan kemadjuan fikiran sadja, jang menghilangkan kemerdekaan ekonomi kita dan mendjauhkan kita dari bangsa sendiri. Didalam kegelapan ini sedjarah-peradaban kitalah jang harus mendjadi pokok kemadjuan kita. Hanja dengan berdasar peradaban sendiri dapatlah kita timbul bergerak dengan selamat; keluarlah bangsa kita dimedan ramai segenap bangsa didunia dengan watak dan rupa nasional jang bukan tiruan.
4. Tidak ada pengadjaran, bagaimanapun tingginja jang berguna, djika hanja diberikan kepada sebagian ketjil orang dalam pergaulan hidup. Daerah pengadjaran harus diperluas. Kekuatan sesuatu negara ialah djumlahnja kekuatan orang satu-satunja. Pengadjaran Rakjat itulah jang kita maksudkan. Kalau pengadjaran akan dipertinggi tidak boleh mengurangi luasnja daerah pengadjaran.
5. Kalau orang mendjalankan suatu azas harus dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu kita tidak menanti pertolongan atau tundjangan orang lain, djika kemerdekaan kita mendjadi kurang karenanja. Tundjangan lain dapat kita terima dengan senang hati, akan tetapi kita senantiasa mendjauhkan apa sadja jang dapat mengikat kita. Maka kita putuskan segala tali-tali dan kebiasaan-kebiasaan jang mengikat dan memaksa.
6. Oleh karena kita hanja boleh mendjagakan kekuatan diri sendiri, maka kita harus hidup dengan sederhana sedapat-dapatnja. Tidak ada suatu keadaan didunia jang bekerdja merdeka akan hidup lama, djika tak dapat berdiri sendiri. Semua jang kita djalankan harus bersendi atas „kekuatan sendiri".
7. Anak mesti kita dekati dengan tiada terikat oleh apapun sadja dan dengan hati jang sutji. Tiada suatu hak djuapun dapat kita minta selainnja daripada membela dan menghambakan diri kepada Sang Anak.

Perlu diterangkan disini, bahwa tjandrasangkala Taman-Siswa jang senantiasa dipakai, jaitu guna mengingatkan berdirinja Taman-Siswa, ja'ni „Lawan Sastra Ngesti Mulja" — 1852 (Djuli 1922), sedang timbulnja Persatuan Taman-Siswa: „Sutji Tata Ngesti Tunggal" — 1854 (Oktober 1923).

Nama Taman-Siswa mula-mula Nationaal Onderwijs Instituut Taman-Siswa, kemudian setelah berdiri Taman-Siswa dibeberapa tempat, nama tersebut diubah dengan Hoofdzetel Jogjakarta. Sesudah kongres jang pertama di Jogjakarta pada tahun 1930, nama tersebut diterdjemahkan dalam bahasa Indonesia mendjadi Perguruan Nasional Taman-Siswa berpusat di Mataram-Jogjakarta, kemudian sesudah merdeka ini nama disingkat mendjadi Perguruan Taman-Siswa berpusat di Jogjakarta.

Tentang nama Ki Hadjar, dulu R.M. Suwardi Suryaningrat, kemudian setelah berusia 5 windu atau 40 tahun-Djawa, jaitu pada tanggal 2 bulan Puasa

Djimachir 1858 atau tanggal 23 Pebruari 1928, diganti mendjadi Ki Hadjar Dewantara.

Sesudah konperensi itu terus mendjalarlah perguruan kita dimana-mana, tidak sadja dipulau Djawa, akan tetapi djuga di Andalas (Sumatera), kemudian sampai Kalimantan (Borneo).

Perguruan kita di Mataram sendiri, seperti telah dikatakan diatas, jang mula-mula menurut perembukannja hanja membuka bagian Taman Anak dan Taman-Guru sadja, terdorong oleh keadaan sangat banjak anak-anak tak dapat diterima disekolah negeri dan minta masuk Taman-Siswa, maka terpaksa membuka bagian Taman-Muda. Selandjutnja karena anak-anak jang telah tamat dari Taman-Muda toh ingin melandjutkan peladjarannja, sedang untuk masuk disekolah landjutan negeri tidak mudah sjarat-sjaratnja, ditambah pula banjak permintaan orang tua murid, jang telah tamat dari H.I.S. dan sesamanja, supaja Taman-Siswa membuka sekolah landjutan sendiri, maka pimpinan Taman Siswa lalu memaksakan diri untuk memenuhi permintaan tersebut.

Sebelum meneruskan hal diatas, guna lengkapnja perlu ditjatat dalam riwajat Taman-Siswa seperti berikut:

Makin besarnja perguruan Taman-Siswa, tersebarnja pendidikan kebangsaan, jang berarti akan terdesaknja roch kolonial. bermatjam-matjam akal jang didjalankan oleh pihak sana untuk menindasnja. K.H. Dewantara jang bertempat tinggal ditengah-tengah perguruan, kamarnja dikelilingi oleh kelas-kelas, ja, memang perguruan Taman-Siswa merupakan suatu „schoolwoningtype", perguruan dan rumah bersama-sama, — perguruan tidak kosong, sepi sesudah murid-murid pulang — dikenakan padjak rumah tangga. Beliau tidak suka membajar padjak tersebut, sebab untuk beliau sendiri dengan keluarganja hanja menempati dua kamar, jang menurut taksiran tidak sampai kena padjak rumah tangga; adapun lain-lainnja itu kepunjaan perguruan jang barang tentu bebas dari padjak tersebut.

Pada tgl. 19 Djuni 1924 hari Kemis, barang-barang Taman-Siswa bangku-bangku dan medja-medja terpaksa dilelang untuk menutup pembajaran padjak rumah tangga. Sebelum lelangan diadakan pembitjaraan antara para petjinta jang akan membeli barang-barang itu, karena kemudian akan diserahkan kembali kepada Taman-Siswa. Atas lelangan beslahan itu K.H. Dewantara memadjukan protes. Dengan keputusan Kepala Keradjaan Paku Alaman padjak rumah tangga untuk R.M. Suwardi Soerjaningrat dihapuskan. Ternjata protesan dibetulkan

Pada tgl. 7 Djuli 1924 Taman-Siswa membuka M.U.L.O. — Kweekschool 4 tahun. Inilah M.U.L.O. pertama jang didirikan oleh bangsa Indonesia, jang tidak luput dari edjekan-edjekan, tetapi hasilnja memuaskan.

Tahun 1927 didirikan oleh murid-murid Taman-Siswa perkumpulan bernama M.K.V.T.S. (MULO - Kweekschool - Vereniging - Taman-Siswa), dan dilebarkan djadi P.P.T.S. (Pemuda Peladjar Taman-Siswa). Maksudnja untuk berlatih bergerak dan berorganisasi sedjalan dengan bangunnja pergerakan Indonesia jang berdasar kebangsaan.

Pada 13 April 1929 di Jogjakarta didirikan P.B.M.T.S. (Persatuan Bekas Murid Taman-Siswa), jang maksudnja: melangsungkan ikatan batin, tetap memelihara dan mendjundjung tinggi serta menjiar-menjiarkan pendidikan Taman-Siswa.

Pada bulan Agustus 1927 Sang Pudjangga Rabindranath Tagore dari Shanti Niketan Bolpuur India jang terkenal dengan pengiringnja jang dipimpin oleh Prof. Dr. Chatteryce mengundjungi Taman-Siswa: bukti besar ketjilnja hubungan Taman-Siswa dengan dunia luar.

Pada tgl. 6 — 13 Agustus 1930 Kongres (Rapat Besar Umum) pertama diadakan; dan memutuskan:

I. mengadakan „Persatuan" dengan peraturan-peraturannja.

II. membuat surat-perdjandjian pendirian (oprichtingsprotocol).

Pada waktu itu banjaknja tjabang 52, murid 6500 tersebar diseluruh Indonesia.

Sesudah Kongres 1930 hingga djatuhnja pemerintah Hindia Belanda th. 1942 Taman-Siswa terus madju. Tentu sadja tidak luput dari gangguan topan jang menjerang perkumpulan-perkumpulan Kebangsaan; bukti bahwa Taman-Siswa sehaluan dengan perkumpulan-perkumpulan tersebut.

Perdjuangan jang boleh ditjatat jaitu mengenai:

I. Onderwijs ordonnantie sekolah liar 1932.
II. Padjak-Upah atau loonbelasting 1935.
III. Kindertoelage 1935.

Ketiga hal itu berhasil baik dan umum ikut merasakan.

Pada tahun 1939 banjaknja tjabang sampai 205 dan murid 12.000 (sebagian tjabang baru mulai dibuka).

Perkembangan Ibu Pawijatan-Mataram-Jogjakarta jang boleh ditjatat mengenai:

1. Kesenian tari daerah Jogja jang dikemudikan oleh pemuka-pemuka Krida Beksa Wirama: B. P. H. Soerjodiningrat, G. P. H. Tedjokoesoemo dan angkatan muda. Pertundjukan jang terbesar pernah dipertundjukkan diantaranja di Istana Mangkunegaran (1949).
2. Sistim „Sari-Swara" tjiptaan K.H. Dewantara, mulai djaman Hindia Belanda sudah dipakai djuga diperguruan Pemerintah, terutama di Djawa-Timur.
3. Sistim pentjak Taman - Siswa tjiptaan Moh. Djoemali, jang praktis dipeladjarkan diperguruan untuk murid laki-laki dan perempuan bersama-sama.
4. Njanjian anak-anak Djawa-asli dan baru, gubahan K.H. Dewantara dan Hadisoekatno, jang penuh semangat dan sesuai dengan djiwa anak-anak. Sebagian dulu sudah diterbitkan oleh Kem. Negara Urusan Pemuda.
5. Njanjian anak-anak Indonesia gubahan Soeratman terkumpul dikitab „Embun Pagi", jang tjukup meriah dan gembira.
6. Sandiwara anak-anak ketjil dengan njanjian jang tidak asing untuk tamu-tamu agung dalam dan luar negeri jang pernah datang di Ibu Pawijatan, umpama Sri Mangkoenegoro VII, Rabindranath Tagore, Sri Jawaharlal Nehru, Sri Hamengku Boewono IX, beberapa Menteri, Presiden Soekarno dan lain-lain.
7. Kesenian dari lain-lain daerah djuga tidak lupa dipelihara mengingat semangat murid-murid kita, umpama: menotor (Tapanuli), tari pajung, tari katju, tari piring, tari pasemah, tari Bali dan lain-lain.
   Tari Bali pernah dapat diperdalam, dan menurut para ahli, tingkatannja termasuk lebih dari sedang.
8. Rasa „Kekeluargaan" dan „gastvrijheid" dari Taman-Siswa tidak mengetjewakan. Dari golongan dan perkumpulan apa sadja, jang tidak pernah djadi t a m u Taman-Siswa! Meskipun dengan sederhana mereka diterima dengan gembira. Apa lagi sesudah „Pendapa" simbul „persatuan" kita sudah berdiri! Hampir semua golongan dan perkumpulan-perkumpulan pernah memakai, apa-lagi waktu dikota Jogja belum banjak gedung-gedung jang boleh dipakai untuk umum.

Djaman pendudukan Djepang

Seperti golongan-golongan dan perkumpulan-perkumpulan umumnja, Taman-Siswa pada waktu itu djuga banjak menderita. Sebagian banjak dari tjabang-tjabang ditutup, jang masih hidup susah. Taman-Siswa tetap tidak suka menerima subsidi. Sebaliknja Taman - Dewasa (Sekolah Menengah) Mataram — Jogjakarta satu-satunja sekolah Menengah jang dibolehkan terus buka. Sebab itu sampai mempunjai: 42 kelas; 76 guru dan 3500 murid.

Djaman Indonesia Merdeka

Memproklamasikan kemerdekaan mudah, akan tetapi berat konsekwensinja. Suatu revolusi dari alam pendjadjahan kealam merdeka. Dari tidak mempunjai apa-apa hingga mempunjai Negara dengan alat-alatnja. Suatu revolusi jang mendadak, spontaan, tidak direntjanakan lebih dahulu tjara-tjaranja, walaupun rakjat berdjuang sudah berpuluh-puluh tahun. Suatu kedjadian jang sungguh mengagumkan tidak sadja bagi rakjat Indonesia, akan tetapi djuga untuk seluruh dunia. Korban revolusi tidak hanja ratusan atau ribuan, tetapi sampai djutaan. Korban mati biasa atau setjara merebut kekuasaan Djepang, perang dengan Inggeris jang menurut tugasnja diserahi mengembalikan keamanan di Indonesia dan menjerahkan negeri ini kembali kepada Belanda, atau perang melawan Belanda sendiri jang ingin kembali mendjadjah kita. Dan barang tentu dari keluarga Taman-Siswa sendiri tidak sedikit pula jang telah menjumbangkan njawanja untuk revolusi ini. Kepada mereka sekalian jang telah gugur untuk kepentingan tetap tegaknja Negara Indonesia Merdeka tidak lupa diberikan „grootsaluut" kita, mudah-mudahan jang ditinggalkan dapat tetap meneruskan perdjuangannja jang sutji itu! Kedua-kalinja : untuk memelihara kemerdekaan jang sebaik-baiknja untuk keperluan rakjat banjak tidak mudah pula, seperti jang kita alami hingga kini.

Dalam pada itu perguruan kita terus buka dan berdjalan seperti biasa, sekarang tiada jang merintangi. Apalagi jang ada didaerah pedalaman jang djauh dari pantai dan tidak ada seorang serdadu Djepang keadaannja lebih teratur. Murid jang besar-besar jang sudah berhasrat untuk berdjuang minta perlop kepada guru madju ke front. Demikianlah keadaannja pada djaman revolusi itu segala-galanja serba tidak teratur. Guru-gurunja jang ingin mengadjukan muridnja barang tentu tidak berani menghalang-halangi anak-anaknja bertempur atau djika mereka suka dituduh akan mengchianati revolusi. Pendek kata kita sekalian madju kemuka menurut bakatnja masing-masing; djika ada pertempuran ditetapkan pembagian pekerdjaan, jang berani madju kemuka, jang kurang keberanian tinggal dibelakang ada tugasnja sendiri-sendiri. Djika waktu agak tenteram ditempatnja, kaum pemberani madju kefront, lain-lainnja melandjutkan pekerdjaan sehari-hari.

Dalam pada itu Ki Hadjar Dewantara sedjak hari proklamasi ada di Djakarta, dulu pada djaman Djepang sebagai „Sanjo" kantor pengadjaran, setelah Kabinet jang pertama dibentuk pada tanggal 5 September, beliau menduduki kursi Menteri Pengadjaran hingga penggantian Kabinet tanggal 14 Nopember 1945, dua bulan sembilan hari beliau duduk dalam Kabinet pertama.

Pada bulan Agustus 1946 Taman - Siswa mengadakan Rapat-Besar jang ke-IX di Jogjakarta untuk merundingkan beberapa masalah berhubung dengan suasana baru dalam alam kemerdekaan.

Diantara kita ada jang mengatakan :

1. Kita sudah merdeka, maksud kita sudah tertjapai. Sekolah partikelir dan chususnja Taman-Siswa sudah tidak perlu lagi ada, maksud-maksud kita sebenarnja toh akan dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri, kepunjaan Pemerintah kita sendiri nanti, jang barang tentu berdasar nasional pula.
2. Untuk beberapa tahun ini Taman-Siswa masih perlu ada. Sebab :
   a. Pemerintah belum dapat mengadakan sekolah-sekolah sekaligus begitu banjaknja menuruti keperluan rakjat.
   b. Isi sekolah-sekolah negeripun belum dapat diubah sekaligus sebagaimana jang kita maksudkan.
3. Walaupun djumlah sekolah sudah banjak dan isinja djuga sudah nasional, toh Taman-Ssiswa masih perlu ada, walaupun hanja satu dua tjabang sadja, akan tetapi jang sungguh-sungguh baik. Selain itu dalam negara merdekapun tiada halangannja ada sekolah-sekolah partikelir, apa lagi jang memang mempunjai dasar sendiri seperti Taman-Siswa.

Ketjuali daripada itu dibentuk djuga panitia jang berkewadjiban menindjau kembali peraturan Taman-Siswa dengan segala isinja. Tentang subsidi — sebab ini sebelumnja barang asing buat orang Taman-Siswa pada waktu itu — mereka belum berani mengatakan „itulah hak kita, kita harus menuntut", akan tetapi hanja „kita tidak minta, tetapi djika diberi kita terima."

Waktu terus berdjalan, suka dan duka kita alami, Belanda terus-meradjalela, agressi dilakukan pada tanggal 21 Djuli 1947. Kita kurang dapat hubungan dengan tjabang-tjabang daerah pendudukan Belanda. Walaupun demikian pada tanggal 22 hingga 24 Desember 1947 diadakan Rapat - Besar - Umum jang ke-V di Jogjakarta guna menjempurnakan pekerdjaannja lebih landjut.

Setelah diselidiki lebih mendalam oleh Panitia dibawah pimpinan S. Mangoensarkoro, ternjata azas-azas Taman - Siswa seperti jang dimuat dalam halaman muka itu bukan hanja azas sadja, tetapi djuga sudah termuat program perdjuangan Taman-Siswa. Adapun azas-azas Taman-Siswa jang sebenarnja adalah lima, jaitu : I. kemerdekaan, 2. kodrat alam, 3. kebudajaan, 4. kebangsaan, 5. kemanusiaan. Program perdjuangan sebagian sudah kita bekukan, artinja tidak kita pakai berhubung dengan kemerdekaan nasional sudah ada pada kita. Akan tetapi djika ternjata nanti peraturan-peraturan negeri bertentangan dengan azas kita, terpaksalah program perdjuangan jang sudah kita bekukan itu kita hidupkan kembali. Djadi buah penjelidikan Panitia sama sekali tidak bertentangan atau mengubah azas kita sebermula seperti jang dimaksudkan dalam „perdjandjian pendirian". Adapun keterangan lima azas tersebut adalah seperti berikut :

1. Azas Kemerdekaan harus diartikan disiplin pada diri sendiri oleh diri sendiri atas dasar nilai hidup jang tinggi, baik hidup sebagai individu maupun sebagai anggauta masjarakat. Maka itu kemerdekaan itu mendjadi alat mengembangkan pribadi jang kuat dan sedar dalam suasana perimbangan dan keselarasan dengan masjarakat tertib-damai ditempat keanggautaannja.

2. Azas Kodrat-Alam berarti, bahwa pada hakekatnja manusia itu sebagai machluk adalah satu dengan kodrat-alam ini. Ia tidak bisa lepas dari kehendaknja, tetapi akan mengalami bahagia djika bisa menjatukan diri dengan kodrat-alam jang mengandung kemadjuan itu, ialah kemadjuan jang dapat kita gambarkan sebagai bertumbuhnja tiap-tiap benih sesuatu pohon jang kemudian berkembang mendjadi besar dan achirnja berbuah dan setelah menjebarkan benih bidji jang baru mengachiri hidupnja, dengan kejakinan, bahwa dharmanja akan dibawa hidup terus dengan tumbuhnja lagi benih-benih jang disebarkan.

3. Azas Kebudajaan Taman-Siswa tidak berarti asal memelihara kebudajaan kebangsaan itu kearah kemadjuan jang sesuai dengan ketjerdasan zaman, kemadjuan dunia dan kepentingan hidup rakjat lahir dan batin tiap-tiap zaman dan keadaan.

4. Azas Kebangsaan, Taman-Siswa tidak boleh bertentangan dengan Kemanusiaan, malahan harus mendjadi bentuk dan fiil kemanusiaan jang njata dan oleh karena itu tidak mengandung arti permusuhan dengan bangsa lain, melainkan mengandung rasa satu dengan bangsa sendiri, rasa satu dalam suka dan duka, rasa satu dalam kehendak menudju kepada kebahagiaan hidup lahir dan batin seluruh bangsa.

5. Azas Kemanusiaan menjatakan, bahwa dharma tiap-tiap manusia itu adalah mewudjudkan kemanusiaan, jang berarti kemadjuan manusia lahir dan batin jang setinggi-tingginja, dan djuga bahwa kemadjuan kemanusiaan jang tinggi itu dapat dilihat pada kesutjian hati orang dan adanja rasa tjinta-kasih terhadap sesama manusia dan terhadap machluk Tuhan seluruhnja, tetapi tjinta-kasih jang tidak bersifat kelembekan hati, melainkan bersifat

kejakinan adanja hukum kemadjuan jang meliputi alam semesta. Karena itu dasar tjinta-kasih kemanusiaan itu harus tampak pula sebagai kesimpulan untuk berdjuang melawan segala sesuatu jang merintangi kemadjuan selaras dengan kehendak alam.

Guna memudahkan menghafalkan urut-urutannja azas tersebut, walaupun kita tidak usah terikat akan urut-urutan itu, oleh Ki Hadjar Dewantara digambarkan sebagai berikut:

Berilah kemerdekaan dan kebebasan kepada anak-anak kita: bukan kemerdekaan jang leluasa, akan tetapi jang terbatas oleh tuntutan-tuntutan kodrat-alam jang chak atau njata, dan menudju kearah kebudajaan, jaitu keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Dan agar kebudajaan tadi dapat menjelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masjarakat, maka perlulah dipakai dasar kebangsaan, akan tetapi djangan sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar jang lebih luas, jaitu dasar kemanusiaan.

Adapun dasar-dasar pendidikan Taman-Siswa jang susunannja diserahkan kepada K. H. Dewantara dan dimana kelima azasnja sudah termasuk seperti berikut:

1. Pendidikan adalah usaha kebudajaan jang bermaksud memberi tuntunan didalam hidup tumbuhnja djiwa raga anak-anak, agar kelak dalam garis-garis kodrat-pribadinja dan pengaruh segala keadaan jang mengelilingi dirinja anak-anak dapat kemadjuan dalam hidupnja lahir dan batin menudju kearah Adab — Kemanusiaan.
2. Kodrat hidup manusia menundjukkan adanja segala kekuatan pada machluk manusia sebagai bekal hidupnja jang perlu untuk pemeliharaan dan kemadjuan hidupnja, hingga dengan lambat laun dapatlah manusia mentjapai keselamatan dalam hidupnja lahir dan kebahagiaan dalam hidupnja batin, baik untuk diri pribadinja maupun untuk masjarakatnja.
3. Adab kemanusiaan mengandung arti keharusan serta kesanggupan manusia untuk ketjerdasan keluhuran budipekerti bagi dirinja serta bersama-sama dengan masjarakatnja jang berada dalam satu lingkungan alam dan zaman menimbulkan kebudajaan Kebangsaan jang bertjorak chusus dan tetap berdasar atas adab kemanusiaan sedunia, hingga berwudjudlah alam — diri, alam — kebangsaan dan alam — kemanusiaan, jang saling berhubungan bersamaan dasar.
4. Kebudajaan sebagai buah budi dan hasil perdjuangan manusia terhadap kekuasaan alam dan zaman membuktikan kesanggupan manusia untuk mengatasi segala rintangan dan penghidupannja guna mentjapai keselamatan dan kebahagiaan didalam hidupnja bersama jang bersifat tertib dan damai pada umumnja, chususnja guna memudahkan dan memfaedahkan, mempertinggi dan menghaluskan hidupnja.
5. Kemerdekaan adalah sjarat mutlak dalam tiap-tiap usaha pendidikan jang berdasarkan kejakinan, bahwa manusia kodratnja sendirinja dan dengan hanja terbatas oleh pengaruh-pengaruh kodrat-alam serta zaman dan masjarakatnja, dapat memelihara dan memadjukan, mempertinggi dan menjempurnakan hidupnja sendirinja; tiap-tiap perkosaan akan menjukarkan dan menghambat kemadjuan hidup kanak-kanak.
6. Sebagai usaha kebudajaan, maka tiap-tiap pendidikan memelihara dan meneruskan dasar-dasar dan garis-garis hidup jang terdapat dalam tiap-tiap aliran kebatinan kemasjarakatan untuk mentjapai keluhuran dan kehalusan hidup dan kehidupan menurut masing-masing aliran. jang menudju kearah adab kemanusiaan.
7. Pendidikan dan pengadjaran rakjat sebagai usaha mempertinggi dan menjempurnakan hidup dan penghidupan rakjat adalah kewadjiban negara, jang oleh pemerintah harus dilakukan sebaik-baiknja, dengan mengingati

atau memperhatikan segala kechususan dan keistimewaan, jang sehat dan kuat, serta memberi kesempatan pada tiap-tiap warga negara untuk menuntut ketjerdasan budi, pengetahuan dan kepandaian jang setinggi-tingginja menurut kesanggupannja masing-masing.

Tentang „subsidi" dari Pemerintah Republik pada waktu Rapat-Besar-Umum itu kita sudah tidak menjatakan „kita tidak minta, tetapi djika diberi kita terima" lagi, akan tetapi rapat lalu memutuskan supaja Taman-Siswa „minta" (mengusahakan dapatnja) dan hal ini diserahkan kepada Madjelis-Luhur; sebab djamannja sekarang sudah berganti. Ketjuali daripada itu pada kongres tersebut diadakan pula pilihan Madjelis - Luhur baru. Atas dorongan Ki Hadjar untuk membaharui organisasi katanja, dalam susunan Madjelis - Luhur diadakan anggauta wakil dari wanita Taman-Siswa, Ikatan Keluarga Taman-Siswa dan Pemuda Taman-Siswa, kemudian susunan Madjelis-Luhur lalu mendjadi seperti berikut :

A. Pemimpin - Umum : Ki Hadjar Dewantara.

B. Dewan Pengetua : Ketua : Ki Hadjar Dewantara, anggauta-anggauta : Nji Hadjar Dewantara, Ki Pronowidigdo, Ki Tjokrodirdjo dan Ki Sutopo Wonobojo.

C. Dewan Pertimbangan : Ketua : Soewandi, panitera : Soepardo, anggauta-anggauta Nji S. Mangunsarkoro, Nji D. M. Hadiprabowo, S. Mangunsarkoro, Sukemi, Sindhoesawarno, Wijono Soerjokusumo, Bambang Soeparto dan Djumali.

D. Dewan Pengurus : Ketua : Darmobroto, wakil Ketua I dan II M. Hadiprabowo dan Soedarminto, panitera Soerjobroto, dan anggauta-anggauta Soebroto, Sajoga, Sjamsu Hadjar Lelono, Nji Satrijowibowo (W. T. S.), Hertog (I. K. T. S) dan Abdoel Moeis (P. P. T. S.), Dewan Pengurus tersebut dibagi tiga badan jaitu :

1. Badan Pendidikan, jang diketuai Darmobroto, sedang anggauta-anggautanja Nji Satrijowibowo dan Soebroto.
2. Badan Perbendaharaan, jang diketuai Soedarminto sedang anggauta-anggautanja Sajoga, M. Hadiprabowo dan Abdoel Moeis.
3. Badan Organisasi, jang diketuai Soerjobroto, sedang anggauta-anggautanja Sjamsu dan Hertog.

Perlu diterangkan disini, bahwa Soebroto dan Sajoga mula-mula menolak pilihan, akan tetapi oleh Madjelis-Luhur lalu diminta untuk suka menerimanja. Baru berdjalan beberapa bulan kedua saudara tersebut terpaksa mengundurkan diri djuga, sebab : Subroto karena banjak pekerdjaan, sedang Sajoga merasa memang pada periode itu tidak pada tempatnja ikut duduk bertanggung djawab dalam Madjelis-Luhur jang susunannja demikian.

Walaupun begitu, mengingati tenaganja Soedarminto, disamping pekerdjaannja di-Ibu-Pawijatan, Sajoga masih tetap suka membantu pekerdjaan Soedarminto pada perbendaharaan Madjelis-Luhur. Darmobroto setelah perlop lalu mengundurkan diri mulai bulan Djuni 1948, sedang Soerip lalu dimasukkan sebagai anggauta Madjelis-Luhur mewakili Badan Pendidikan Ibu-Pawijatan mengganti kedudukan Darmobroto dalam Badan Pendidikan. Soerjobroto pada bulan September djuga terpaksa meletakkan djabatannja sebagai anggauta dan panitera, sedang Moeis diganti Soenardi. Dalam rapatnja lengkap oleh K. H. Dewantara diusulkan membentuk Badan Hakim jang tetap dengan anggauta-anggautanja : Soedarminto, M. Hadiprabowo, Soekemi, Wijono dan S. Mangoensarkoro.

Demikianlah keadaan Madjelis-Luhur pada waktu itu hingga Rapat-Besar-Umum bulan Maret 1950, kantornja sering kosong tidak ada orangnja, walaupun tetap kelihatannja terbuka. Pada waktu itu jang boleh dikata aktif bekerdja dalam Madjelis-Luhur, sesudah ditinggalkan Sjamsu ke Djawa - Barat pada

achir clash kedua hanja dua orang, jaitu Soedarminto dan Muljanto. Soedarminto jang merangkap mendjadi ketua Ibu Pawijatan, mengadjar pula, dan Muljanto jang membantu Madjelis-Luhur sering tidak kelihatan dikantor. Sedang M. Hadiprabowo, sekeluarnja Darmobroto lalu menggantinja sebagai ketua Madjelis-Luhur (Soedarminto wakilnja) datangnja dikantor mudah orang menghitungnja.

Untuk mengurusi tjabang-tjabang Taman-Siswa jang berada didaerah pendudukan Belanda, di Djakarta dibentuk suatu Konsulat jang terdiri dari Sukemi sebagai ketuanja, Moh. Said — panitera, Basirun — bendahari dan Angronsudirdjo jang memutarkan usahanja.

Pada tgl. 13 dan 14 April 1948 di Jogjakarta diadakan konperensi Taman-Dewasa untuk membitjarakan soal pendidikan dan pengadjaran melulu. Sedang pada tgl. 4 hingga 7 Djuli 1948 di Jogjakarta pula dilangsungkan Rapat-Besar jang ke-X djuga melulu merundingkan hal pendidikan dan pengadjaran.

Seperti jang telah diterangkan dimuka, kongres 1947 telah menjetudjui minta subsidi kepada Pemerintah; dan hal ini telah djuga dilaksanakan oleh Madjelis-Luhur. Pada waktu itu tjabang kita jang berada didaerah Republik tinggal 17, lainnja didaerah pendudukan jang sukar dapat diurusnja.

Dan sebagai siasat untuk memperkuat perdjuangan kita didaerah pendudukan dengan semufakatnja Kementerian P.P. & K., diusahakan berdirinja tjabang-tjabang itu jang sekiranja mungkin dapat didirikan. Karena itu untuk kedua-duanja kita mintakan subsidi. Maka dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tgl. 14 April 1948 No. 9/A Rahasia kepada 5 perguruan Taman-Siswa di Djawa Timur, 5 di Djawa-Tengah dan 3 di Djawa-Barat, semuanja diluar daerah Republik, diberikan subsidi sekaligus untuk biaja penjelenggaraannja sebesar masing-masing R. 44.000 — R. 50.000,- dan R. 28.000,—, djumlah R. 122.000.—. Selain itu mulai bulan April 1948 untuk biaja setiap bulannja kepada 13 perguruan Taman-Siswa itu buat sementara waktu diberikan subsidi masing-masing sebesar R. 30.000,— R. 33.000,— dan R. 24.000, djumlah R. 87 000.—. Uang tersebut pada waktu itu sebagian besar kita udjudkan (belikan) barang-barang perak dan lain-lain; sebab katanja didaerah pendudukan Belanda barang-barang inilah jang lebih berlaku, sebaliknja koers uang-uang Republik merosot sekali.

Adapun tjabang-tjabang kita jang berada didaerah Republik menurut keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 14 Oktober 1948 No. 9213/A kepada 13 buah bagian Taman-Muda mulai Agustus 1948 hingga Djuli 1949 diberi subsidi sebesar R. 7.500,—, sedang untuk 12 buah bagian Taman-Dewasa menurut surat keputusan Menteri tgl. 14 Oktober 1948 No. 9348/A sebesar R. 11.000,— tiap bulannja. Tjabang-tjabang tersebut jaitu jang mempunjai Taman-Muda di Dampit, Turen, Donomuljo, Pare, Tulungagung, Kediri, Djombang, Madiun, Ngawen, Blora, Tjepu, Djetis Jogjakarta, sedang jang mempunjai bagian Taman-Dewasa di Jogjakarta, Ngawen, Djuwana, Kudus, Tjepu, Babat, Djombang, Madiun, Kediri, Tulungagung, Turen dan Kepandjen.

Uang „subsidi" dari Pemerintah jang baru pertama kali itu kita terima dan baru berdjalan beberapa bulan sadja, bahkan untuk tjabang-tjabang daerah Republik sendiri belum lagi kita terima surat putusannja, sudah timbul rame-rame „perkara Madiun". Tidak sedikit diantara keluarga Taman-Siswa jang mendjadi korban perkara ini, baik masuk pihak jang satu atau lainnja.

Sungguh kita merasa sajang sebab dikedua-dua pihak jang mendjadi korban itu tidak sedikit jang sungguh-sungguh orang dan tenaga jang baik! Negara jang baru membangun, kehilangan!

Belum perkara itu selesai, baru tiga bulan berdjalan, maka pada hari Achad tanggal 19 Desember 1948, presis murid-murid sekolah menengah hari itu pulang kerumah orang-tuanja masing-masing, Belanda mengadakan agressinja jang kedua kalinja, menjerbu Jogjakarta, kedudukan Pemerintah Pusat.

Tidak perlu dikatakan pandjang lebar, para terkemuka ditangkapi diantaranja K. H. Dewantara sendiri, jang pada waktu itu dalam Pemerintah mendjabat anggauta dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung. Belanda sangat kedjam, tidak sedikit rakjat mendjadi korban; sebaliknja pula dari mereka banjak jang mati karena gerilja kita. Perguruan tidak buka, menandakan keadaannja tidak aman.

Pada waktu rame-rame itu Darmobroto, bekas ketua Madjelis-Luhur, pada tanggal 19 Pebruari 1949 djam 4 sore telah meninggal dunia dipadepokan Taman-Siswa Mataram. Esok harinja djenazah dimakamkan di Surakarsan, tidak djauh dari pendapa, Innalilahi waina ilaihi Rodji'un!

Sebelum Belanda mundur meninggalkan Jogjakarta, tepat semalam sebelum wartawan luar negeri datang berkundjung ke Jogja, dimuka pintu Kantor Madjelis-Luhur oleh Belanda dipasang tijdbom dengan plakat-plakat, mestinja pengharapan supaja kedjadian itu dibuat dokumentasi dan diumumkan diluar negeri.

Pada malam harinja di tengah malam itu terdengar suara jeep berhenti, kemudian datang lagi orang dengan sepatunja berdjalan (mestinja lalu memasang tijdbom itu), kemudian naik jeep. Dua djam kemudian datang lagi orang dengan mobilnja, mestinja untuk mengontrole pekerdjaan orang jang pertama betul tidaknja.

Tanggal 29 Djuni 1949 Belanda gulung tikar meninggalkan Jogjakarta, tanggal 1 Djuli Daerah Jogjakarta sudah bersih dari serdadu-serdadu pendjadjah.

Diumumkan oleh mereka, katanja Jogja sesudah ditinggalkan Belanda tidak akan aman, menjebabkan hampir semua bangsa Tionghoa kena budjukan tersebut ikut konvooi Belanda. Akan tetapi njatanja, bahkan sedjak tanggal 1 Djuli 1949 itu keadaan Jogjakarta tenteram aman dan tidak ada apa-apa. Sekolah-sekolah, djuga Taman-Siswa, mulai dibuka kembali dengan keadaan jang ada pada waktu itu setelah menderita pahit getir tjukup 6½ bulan lamanja.

Kemudian setelah keadaan sedikit reda, Pemerintah Republik Indonesia Serikat terbentuk. Presiden Soekarno kembali lagi ke Djakarta pada penghabisan tahun 1949, maka pada tanggal 1 hingga 5 Maret 1950 Taman-Siswa mengadakan Rapat Besar Umum jang ke VI di Jogjakarta.

1. Rentjana Peraturan dasar Taman-Siswa keputusan R.B.U. tahun 1947 dengan beberapa perubahan diterima baik.
2. Preadvis K.H. Dewantara tentang „pendidikan dan kebudajaan" dasar-dasarnja diterima.
3. Tentang bahasa asing dalam Taman-Siswa:
   di Taman-Siswa: bahasa Inggeris, sedang Taman-Madya: bahasa Inggeris, Perantjis dan Djerman; fakultatif bahasa Tionghoa, Arab, Hindustan.
4. Terhadap keputusan konperensi Pendidikan Antar Indonesia tentang Sekolah Menengah Umum 6 tahun jang dibagi mendjadi 2-2-2, dalam prinsipnja diterima untuk merupakan bahan bagi Madjelis-Luhur guna diperdjuangkan supaja dipakai oleh Pemerintah selekas-lekasnja.
5. Madjelis-Luhur jang baru dibentuk oleh tiga orang formateur jang dipilih oleh Rapat-Besar-Umum, jaitu Moch. Tauchid, Moh. Said dan Soedarminto.
   Kemudian susunannja seperti berikut:
   Ketua — Umum Soedarminto,
   Bagian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan: Ketua: Padmopuspito, sedang anggauta-anggautanja: S. Brotohamidjojo, Moch. Tauchid (sementara) dan Moh. Said.
   Bagian Organisasi: Soedarminto (sementara), sedang anggauta-anggautanja: Suratman dan Supardo.

Bagian Perbendaharaan: ketua: Sajoga, sedang anggauta-anggautanja: S. A. Soedibjo dan Hertog.

Dan K.H. Dewantara tetap sebagai Bapak dan Pemimpin-Umum-Taman-Siswa. Selandjutja Madjelis-Luhur mempunjai program djangka pendek dan djangka pandjang.

Ketjuali itu kongres telah membuat resolusi pula mengenai perdjandjian K.M.B. dalam lapang kebudajaan, jang isi maksudnja memutuskan: mentjegah dengan sekuat-kuatnja akan timbulnja bahaja pendjadjahan kebudajaan jang disebabkan karena penglaksanaan persetudjuan K.M.B. dilapang kebudajaan dengan djalan:

a. Bersama-sama dengan seluruh rakjat umumnja dan badan-badan kebudajaan chususnja memelihara dan mendjaga kebudajaan kebangsaan kita, agar terlepas dari bahaja tersebut.
b. Menjokong politik pengadjaran Republik Indonesia.
c. Mendesak agar supaja Undang-undang Pokok-Pendidikan dan Pengadjaran R.I. jang sudah disetudjui dan diterima oleh Badan Pekerdja K.N.I.P. segera dilaksanakan untuk seluruh Indonesia.

Selandjutnja itu Konsulat Madjelis - Luhur jang berkedudukan di Djakarta jang semula bertugas mengkordinasi tjabang-tjabang diluar daerah Republik, karena keadaannja sudah berganti, lalu dalam kangres itu dibubarkan.

Adapun tentang susunan Madjelis-Luhur, setelah berdjalan beberapa bulan, dan berhubung tidak mungkin Padmopuspito sebagai ketua bagian mentjurahkan tenaganja penuh untuk Madjelis - Luhur, Brotohamidjojo karena banjaknja pekerdjaan, menjatakan lebih baik mengundurkan diri dahulu daripada mendjadi anggauta Madjelis-Luhur tidak dapat bekerdja, maka guna lantjarnja pekerdjaan, lalu diadakan perubahan jang susunannja hingga kini sebagai berikut:

Ketua — Umum : Soedarminto.

Bagian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:

Ketua : Wardojo, sedang anggautanja: Padmopuspito, Marminah, Moch. Tauchid, Moch. Said dan Supardo.

Bagian Organisasi : Ketua: S. A. Soedibjo, anggautanja: Soeratman.

Bagian Perbendaharaan : Ketua Sajoga, anggautanja: Hertog.

Adapun hariannja terdiri dari ketua-umum dan ketua-ketua bagian. Dan oleh karena paling sedikit empat orang ini harus mentjurahkan tenaganja penuh untuk kepentingan Persatuan, agar pekerdjaannja jang terang banjak itu dapat terpelihara baik djangan seperti jang sudah-sudah, maka guna keperluan Persatuan mereka terpaksa dilepaskan dari kewadjibannja di Ibu pawijatan.

Tada djeleknja diterangkan disini, bahwa Moch. Tauchidlah hingga kini sebagai anggauta biasa dan berkedudukan diluar Jogjakarta jang paling aktif memikirkan keperluan Persatuan; dan dialah jang sering diserahi berhubungan dengan pihak Kementerian tentang urusan Madjelis-Luhur dalam umumnja dan Moch. Said jang melulu urusan pengadjaran, sebab kebanjakan dari kita djika sudah diberi djandji atau kata-kata baik sudah merasa puas dan pertjaja. Sungguhpun Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah kita sendiri dan Menteri-Menterinja P.P.K. mulai dulu hingga sekarang semua baik, akan tetapi seorang Menteri tidak mungkin dapat memeriksa segala pekerdjaan kementeriannja. Aparat-aparatnja sebagian masih terdiri dari orang-orang lama dengan fikiran-fikirannja jang lama pula, fikiran jang masih membeda-bedakan antara sekolah negeri dan sekolah partikelir, bahkan mempersulit berdirinja sekolah partikelir, menganggap sekolah partikelir tidak perlu ada, djika ada nanti mengkonkurensi sekolah negeri, sekolah partikelir tentu lebih

buruk daripada sekolah negeri dan sebagainja. Jang kelihatan sadja Moch. Said sering menegor Kementerian urusan udjian.

Djangan semata-mata menggantungkan diri pada uang subsidi. Dus djuga djangan hendaknja dengan mudah mendirikan perguruan baru dengan „nama' Taman-Siswa, karena dengan nama „Taman-Siswa" orang mendapat „subsidi" dari Pemerintah! Pemakaiannja nama ini Taman-Siswa dengan pimpinannja harus awas betul! Kita lebih senang djumlah Taman-Siswa tidak banjak, tetapi sungguh-sungguh „namansiswani" isinja dan „op peil" tingkat peladjarannja. dapat dibuat tjontoh, daripada banjak djumlahnja tetapi „oppervlakkig" segala-galanja.

Madjelis-Luhur baru selain mendjalankan kewadjiban membimbing tjabang-tjabangnja djuga menguruskan hal subsidi kepada Pemerintah.

Pada tanggal 28 Pebruari sampai 1 Maret 1951 Madjelis-Luhur mengadakan konperensi-dinas dengan wakil-wakil dan pembantu-pembantunja bertempat di Djakarta. Selain untuk merundingkan pekerdjaan sehari-hari djuga untuk menjiapkan Rapat-Besar 1951 dan merundingkan hal subsidi, membaginja pada tjabang-tjabang, berhubung ada tjabang jang muridnja banjak gurunja kurang dan sebaliknja. Djuga telah diputuskan: djika menerima uang tundjangan bulan Agustus hingga Desember 1950 sekaligus, jang diberikan kepada tjabang-tjabang hanja 50%, sedang jang 50% lainnja sesudah dipotong untuk iuran Madjelis-Luhur, fonds-keluarga dan weerstandsfonds Persatuan, akan dibuat modal guna perumahan tjabang-tjabang. Tjaranja mempergunakan uang itu dibagi menurut daerahnja masing-masing dan tjabang-tjabang mana sadja dalam daerah itu memerlukan lebih dulu. Tjabang jang sudah memakai uang tiap bulan diwadjibkan mengangsur, dan dengan demikian lambat-laun semua tjabang akan mempunjai rumah perguruan sendiri. Hal tersebut telah mendapat persetudjuan pula dari Rapat-Besar di Malang dan hingga kini sudah berdjalan dengan baik. Dengan kegiatan para keluarga ditjabang-tjabang mengurangi nafkahnja, mereka berusaha supaja mempunjai rumah perguruan sendiri, untuk djika dapat membeli gedung bekas rumah-rumah orang Belanda dulu dengan harga murah padahal tjukup lebar untuk ruangan kelas.

Dalam pada itu dan untuk keperluan itu pula oleh Madjelis-Luhur telah diusahakan supaja Taman-Siswa mendjadi „badan-hukum", untuk seluruh persatuan. Usaha ini telah berhasil djuga, Jajasan Persatuan Perguruan Taman-Siswa berpusat di Jogjakarta mendjadi „badan-hukum" jang disahkan oleh Notaris di Jogjakarta, R.M. Wiranto, tersebut dalam aktenja tanggal 1 September 1951 No. 1. Maka dengan adanja akte tersebut untuk seluruh persatuan, akte-akte badan-hukum jang lama waktu djaman Djepang, jang hanja diperuntukkan buat Taman-Siswa pada masing-masing daerah, dengan sendirinja lalu tidak terpakai lagi.

Pada tanggal 23 sampai 26 Djuni 1950 Taman-Siswa mengadakan konperensi tahunan atau Rapat-Besar jang ke-XII di Malang untuk mengoreksi putusan-putusan kongres jang lalu sudah didjalankan atau belum, merundingkan soal-soal sesudah kongres jang perlu-perlu dan Madjelis-Luhur kurang berani memutuskan sendiri atau ketetapannja minta pengesahan Rapat-Besar, dan hal-hal lain guna persiapan kongres jang akan datang.

Ketetapan Madjelis-Luhur mengenai uang subsidi dari Pemerintah serta soal fonds perumahan disahkan oleh Rapat-Besar. Selandjutnja untuk persediaan kongres jang akan datang, sebagai konsekwensi diterimanja preadvis mengenai pengadjaran, dibentuk „panitia ad hoc" guna menjelidiki dan membuat rentjana serta preadvis atas segala sesuatu mengenai „pendidikan nasional".

Pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1951 Madjelis-Luhur mengadakan konperensi dinas dengan wakil serta pembantu-wakilnja bertempat di Jogjakarta guna merundingkan persiapan kongres bulan Puasa jang akan datang serta masalah „bahasa Belanda disekolah tinggi". Dengan singkat putusannja tentang

bahasa Belanda ini jaitu supaja pada perguruan tinggi tingkat jang pertama mulai tahun-pengadjaran 1952/1953 tidak lagi diadjarkan peladjaran-peladjaran memakai bahasa pengantar bahasa Belanda. Untuk keperluan ini barang tentu kepada kementerian diandjurkan beberapa saran-saran.

Tentang subsidi untuk tahun-pengadjaran 1952/1953 oleh Madjelis-Luhur telah pula diadjukan permintaan baru dengan perubahan djumlah tjabang dengan murid-muridnja, akan tetapi jang diterimanja hingga kini masih tetap presis seperti tahun jang lalu. Perlu diterangkan disini, bahwa jang diminta Taman-Siswa jaitu bukan subsidi biasa, akan tetapi subsidi bantuan jang menghitungnja dengan dasar djumlah murid kali pengeluaran jang njata murid sekolah negeri jang setingkat dalam setahunnja; dan subsidi supaja dapat diurus setjara sentral oleh Madjelis-Luhur untuk tjabang-tjabangnja. Selain itu untuk perumahan tjabang-tjabang oleh Madjelis-Luhur djuga telah dimintakan subsidi kepada Pemerintah (Kementerian), akan tetapi hingga kini toh djuga belum ada keputusannja.

Bagian Organisasi Madjelis-Luhur sehabis kongres 1950 telah berdaja-upaja sekuat-kuatnja untuk menjempurnakan organisasinja dalam umumnja. Perdjalanan keliling sering dilakukan untuk melihat dengan mata kepala sendiri keadaan tjabang-tjabang, akan tetapi karena memang kekurangan tenaga, sekuat tenaga jang ada sadja. Daerah Andalas jang sangat menanti kedatangan utusan Madjelis - Luhur telah didatangi djuga; Soedarminto keliling Sumatera-Utara dan Tengah, sedang S. A. Soedibjo dan Mudjono ke Sumatera-Selatan. Dengan demikian Madjelis-Luhur sekarang sedikit banjak mempunjai orientasi atas tjabang-tjabangnja di Djawa dan Sumatera. Banjaklah gunanja djika perdjalanan itu dapat didjalankan dua kali dalam setahun umpamanja.

Madjallah resmi „Pusara" jang pada djaman Belanda tetap terbitnja tiap bulan sekali, mulai Djepang masuk tidak keluar dan baru terbit kembali pertengahan tahun 1948. Dan mulai itu keluarnja tidak tentu. Pada konperensi di Malang redaksinja diserahkan kepada anggauta-anggauta di Djakarta dengan Supardo sebagai pemimpinnja, akan tetapi njatanja karangan tidak datang Pusara dikembalikan ke Jogjakarta lagi; dan Madjelis-Luhur tiada tenaganja. Demikianlah nasib Pusara! Tentang buku-buku penerbitan sendiri jang diserahkan kepada panitia tidak djalan pula. Hanja ulangan umum tahun 1950/1951 dan udjian achir tahun 1951/1952 jang sudah dapat berdjalan, walaupun kurang memuaskan berhubung kurangnja pengalaman dan sebagainja.

Kongres Taman-Siswa jang ke-VII jang mestinja akan dilangsungkan dalam bulan Puasa atau Djuni 1952 ini terpaksa ditunda, karena panitia ad hoc pendidikan dan pengadjaran dalam rapatnja pada tgl. 28 hingga 30 April jbl. belum dapat menjelesaikan tugasnja, padahal atjara tersebut adalah jang terpenting dalam kongres jang akan datang. Selain itu akan ditindjau pula peraturan besar Taman-Siswa, disesuaikan dengan keadaan dan kenjataannja. Rapat-Besar-Umum akan dilangsungkan dalam liburan bulan Oktober 1952 jang akan datang. Keluarga Taman-Siswa diluar Djawa tentu merasa sangat menesal diundurnja kongres tersebut, sebab sebagian dari mereka sudah merentjanakan akan bertamasja ke Djawa/menengok orang tua, sanak saudaranja sambil mengundjung kongres.

Achirnja sebagai tjatatan diterangkan disini, bahwa Persatuan Taman-Siswa pada tahun-pengadjaran 1951/1952 jang berdjalan ini mempunjai 95 tjabang, anak dan kandidat tjabang dengan: 64 perguruan bagian Taman - Indriya, Taman-Anak dan Taman-Muda dengan 611 kelas, 24.775 anak murid, 383 orang guru-tetap dan 44 tidak-tetap, 72 perguruan bagian Taman-Dewasa dengan 417 kelas, 16.333 anak murid, 531 orang guru-tetap dan 152 tidak-tetap, 8 perguruan bagian Taman-Madya dengan 57 kelas, 1.851 anak murid, 67 orang guru-tetap dan 100 tidak-tetap, 1 perguruan bagian Taman-Guru-Indriya dengan 4 kelas, 119 anak murid, 4 orang guru-tetap dan 14 tidak-tetap, 3 perguruan

bagian Taman-Guru lengkap dengan 5 kelas, 176 anak-murid, 7 orang guru-tetap dan 41 tidak-tetap serta 1 perguruan bagian Taman-Guru satu tahun dengan 3 kelas, 25 anak murid dan 5 orang guru.

Djumlah semua 149 perguruan dengan 1.097 kelas, 43.380 anak murid, 997 orang guru-tetap dan 351 tidak-tetap.

*

B. PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN MUHAMMADIJAH

MUHAMMADIJAH adalah perkumpulan Islam, termasuk salah satu perkumpulan jang tua, jang baru sadja memperingati ulang tahunnja jang ke-40. Perkumpulan jang didirikan oleh Kjai Achmat Dahlan bertempat di suatu kampung dalam lingkungan Jogjakarta jang disebut orang: Kauman. Kemudian dalam perdjalanan masa perkumpulan tadi jang sangat mementingkan kepada amalan, dapat hidup subur tumbuh berkembang sampai keluar dari wilajah daerah Jogjakarta, meliputi seluruh kepulauan Indonesia.

Muhammadijah lebih terkenal sebagai perkumulan sosial, dengan adanja rumah jatim, rumah miskin, balai kesehatan dan pertolongan lain-lainnja. Disamping gerak amalan sosial, jang menarik perhatian chalajak ramai ialah dengan usahanja dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran.

Mengapakah Muhammadijah bersusah pajah mendirikan dan memelihara madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah, pada hal usaha itu banjak makan tenaga, fikiran dan benda. Muhammadijah mempunjai tjita-tjita, mempunjai tudjuan. Untuk mentjapai tjita-tjita itu harus ada usaha, jang harus diikuti dengan pengorbanan tenaga, fikiran dan benda. Bagaimana sistim pengadjaran Muhammadijah ? Sistim Montessourikah ? Daltonkah ? Dalam hal ini Muhammadijah memanglah belum menentukan sistim apakah jang dianutnja. Soal sistim ataupun metodenja belum lagi masuk hal jang primair pada dewasa ini. Jang primair dianggapnja oleh Muhammadijah pada dewasa ini, ialah tentang ISI dari pendidikan pengadjaran itu.

Muhammadijah memandang ada kekosongan dalam pendidikan dan pengadjaran pada djaman kolonial itu. Kekosongan itu ialah kekosongan tentang agama, Muhammadijah berusaha mengisi kekosongan ini, dengan tjara memasukkan peladjaran agama dalam rentjana peladjaran. Dengan demikian diharap akan tertutup djurang jang memisahkan antara golongan jang sering disebut kaum „abangan" dan kaum „mutihan"; kaum intelek dan kaum kjai; santri dan peladjar; kolot dan modern. Bila djurang ini telah tertutup, maka seorang pandai tjendekiawan akan menemukan titik pertemuan jang sehat dalam masjarakat, dengan seorang alim ulama jang mahir dalam soal agama, dan begitupun sebaliknja. Si tjerdik pandai akan tiada menjimpang dari garis agama, karena telah mendapat didikan agama, dan djiwanja tiada lagi buta dari soal-soal agama, karena pernah pula menerima peladjaran agama.

Demikianlah para alim ulama akan dapat mengikuti perkembangan dunia, dan dapat menjalurkan perkembangan alam fikiran dalam saluran jang haq.

Disaat pemerintah Belanda djatuh, daerah Jogjakarta mempunjai sekolah jang bersubsidi :

S.R. III (sekolah desa)	100 buah
S. R. V/VI (sekolah kelas II)	20 „
H. I. S.	1 „
Kleinhandelsch-Mulo	1 „

Disamping sekolah jang bersubsidi, masih ada beberapa sekolah jang tiada bersubsidi :

H.I.S.	10 buah
Schakelschool.	5 „

Mulo 3 „
H.I.K. 1 „

Selain sekolah jang bersifat umum, ada mempunjai sekolah jang sebagian besar mata peladjarannja peladjaran agama, lazimnja sekolah sematjam itu disebut madrasah. Madrasah ini bertingkat rendah dan menengah. Madrasah rendah disebut madrasah Ibtidaijah lamanja 4 tahun dari Sekolah Rakjat (sekolah desa) III tahun. Madrasah menengah disebut madrasah Wustha atau Tsanawijah lama peladjarannja 3 tahun. Selain madrasah tersebut diatas madrasah pendidikan guru agama lamanja 5 tahun, menerima murid dari Sekolah Rakjat VI (H.I.S.). Madrasah itu disebut madrasah Mu'alimin untuk bagian putera, dan Mu'alimat untuk bagian puteri. Selain madrasah jang dibuka biasa pada siang hari, berpuluh bilangan matjam madrasah jang dibuka pada petang dan malam hari, pada djam 3 — 5 dan 7 — 9. Madrasah ini disediakan bagi anak-anak jang paginja masuk sekolah jang tiada ada peladjaran agama, ialah sekolah-sekolah jang lazim dinamakan Sekolah Umum.

Tahun 1942. Pemerinah Belanda djatuh. Balatentara Djepang menduduki Jogjakarta. Dunia pendidikan dan pengadjaran mengalami perubahan sangat radikal. Sekolah Rakjat jang beraneka matjam tjorak ragamnja, dibongkar didjadikan sekolah rakjat VI tahun. Dalam masa Djepang, sekolah-sekolah partikelir mengalami penderitaan pula. Sekolah-sekolah jang biasanja menerima subsidi, sekonjong-konjong tiada dapat lagi menerima bantuan, akibatnja banjak sekolah jang lalu gulung tikar. Jang masih dapat langsung berdiri, supaja menjerahkan usahanja kepada pemerintah. Muhammadijah, berpendirian tetap akan mempertahankan sekolahnja, bagaimanapun nanti akibatnja. Berkali-kali pengurus didatangi dan didatangkan, supaja menjerahkan sekolahnja. Sekian kali pulalah didjawabnja, bahwa selama Muhammadijah masih ada kesanggupan menjelenggarakan sekolahnja akan masih diteruskan usahanja.

Kalau memang pemerintah memaksakan, mengambil sekolah-sekolah Muhammadijah dan melarang mengadakan sekolah, Muhammadijah tiada akan membangkang atau melawan, tetapi menjerahkan usahanja tiada sekali-kali masuk dalam rentjana. Sekolah Muhammadijah adalah kepunjaan orang banjak sebagian lagi adalah merupakan barang wakaf, djadi Muhammadijah semata-mata badan jang mengerdjakan amanat. Untunglah pemerintah Djepang tiada dilandjutkan mentjoba memaksakan penjerahan itu. Sekolah Muhammadijah seluruh Jogjakarta berdjalan sebagai biasa. Tetapi karena sokongan dihentikan, tenaga tambah hari tambah kurang, akibatnja sekolah-sekolah itu satu demi satu terpaksa menutup pintunja pada siang hari, beralih haluan didjadikan tempat pengadjian diwaktu terluang. Achirnja hanja tinggal sedikit jang dapat mempertahankan langsungnja, ialah sebagian besar sekolah jang ada dalam kota.

Dalam soal pendidikan, Muhammadijah merasa sangat tertusuk hatinja dengan adanja peraturan Djepang menudju kepada menjembah matahari. Ditambah lagi dengan adanja „seikerei". Meskipun tentang hal ini Djepang telah berhasil mendjalankannja diseluruh daerah Jogjakarta, tetapi dalam ruang pendidikan Muhammadijah belum dapat lagi berlaku. Dengan teguh Muhammadijah mengambil ketegasan lillahi-ta'ala, menentang adanja „seikerei". Langkah itu diambilnja dengan peraturan „leher" atau siksaan dalam tjengkeraman „kempei". Sikap Muhammadijah dianggapnja menentang kekuasaan pemerintah Balatentara. Pengurus Besar tersèrèt. Perkara itu naik sampai digunsaikanbu Djakarta. Entah bagaimana, tetapi hasilnja: Tsuda, kepala sendenbu Jogja dipindah dari Jogja, dan sikap Muhammadijah „tiada mau seikerei" itu dianggapnja sepi, tiada ada apa2. Sekolah berdjalan biasa. Peladjaran agama dimana-mana mendapat perhatian penuh. Sekolah-sekolah negeri terutama sekolah menengahnja dan menengah-atasnja giat menerima peladjaran agama tiap-tiap hari Djum'at dari pada mubaligh Muhammadijah. Dari saat itulah mula-mula ada

berdiri shalat Djum'at di Kotabaru, dan kemudian dirasa perlu adanja mesdjid. (Achirnja dalam djaman merdeka ini telah berdiri mesdjid Sjuhada tahun 1952 jang tiada kurang indahnja).

17 Agustus 1945.

Dalam kantjah revolusi itu, Muhammadijah tiada sedikit mengambil bagian disegala lapangan, menentang si pendjadjah jang selalu berusaha memainkan rolnja lagi. Lapangan pendidikan dan pengadjaran tiada pula dilupakan. Anak-anak dikumpulkan lagi, sekolah dibuka kembali, peladjaran berdjalan sebagai biasa lagi. Tetapi beberapa gedung terpaksa dipakai oleh Pemerintah kita, karena mendesaknja diantaranja gedung S.G.M. (HIK) didjalan Setjodiningratan untuk B. K. R.; gedung S.M.P. Bintaran-tengah dipakai Hizbullah. Dengan demikian terpaksalah S.G.M. dipindahkan ke Patangpuluhan, menempati gedung asrama madrasah Mu'alimin, dan S.M.P. dipindah ke-asrama anak jatim di Tungkak.

Roda kemerdekaan rupanja belum lagi terlepas dari tjobaan, akan diudji keteguhan hati dan tekad rakjat jang telah lama didjadjah dan ditindas itu. Clash I Djuli 1947 mendjadi kenjataan. Kemudian runding-berunding. Perdjandjian diteken. Clash I selesai. Jogjakarta sebagai Ibu-kota sesak. Perumahan sangat kurangnja. Lagi sekolahlah jang harus turut pula memikul akibatnja. Kementerian Agama menempati sekolah S. R. Muhammadijah Ngupasan. Pegawai-pegawai dari Kementerian Keuangan perlu ditolong perumahannja. S.M.P. dan S.G.M. jang menempati gedung asrama Mu'alimin di Patangpuluhan, terpaksa pindah lagi, menjerahkan tempat itu untuk para pegawai Kementerian Keuangan. Sekolah masuknja diatur bergiliran. Untunglah tiada lama kemudian gedung asrama dapat diminta kembali. S.M.P. dan S.G.M. kembali lagi ditempat asrama di Patangpuluhan.

Belum lagi pulih, sekonjong-konjong clash II Desember 1948. Sekolah kotjar-katjir.

Belanda menduduki Jogjakarta. Sekolah-sekolah tutup. Pemuda keluar kota. Anak-anak tiada sekolah, berkeliaran kian kemari. Keadaan kota serem. Makin hari makin tambah menggelisahkan. Belanda berusaha menutup kekatjauan itu, dengan kedok sosialnja. Muhammadijah terkenal sebagai badan sosial. Pengurus bagian Pengadjaran dipanggil, diadjak bekerdja bersama, dan supaja membuka sekolah-sekolahnja. Kebutuhan guru-guru akan didjamin penuh, bahkan akan diperhitungkan „maled" mulai zaman pendudukan Djepang. Alat sekolah akan diperlengkap. Keamanan terdjamin, tiap sekolah akan diberi pengawal. Bagaimanakah sikap Muhammadijah? Muhammadijah tiada bisa akan berchianat. Tawaran Belanda tiada dapat diterimanja, dengan alasan: guru tiada ada, anak-anak tiada mau masuk, takut; orang tua murid tiada berani melepaskan anak dari rumahnja. Dalam hal ini kita mendapat sangkalan, karena katanja telah ada beberapa sekolah jng telah dibuka, dan menerima segala tawaran jang diberikan itu.

Siasat bumi hangus dari pihak kita didjalankan dengan seksama. Gedung Mu'alimin beserta asramanja di Patangpuluhan terletak digaris api. Siang ditangan Belanda, malam kembali dalam tangan pemuda-pemuda kita. Serta ada niatan Belanda akan mendjadikan sekolah sebagai markas, maka pada suatu petang kelihatan dari djauh asap mengepul dengan tebalnja, dan ternjatalah gedung satu-satunja, jang didirikan atas usahanja sendiri, kini terpaksa dikorbankan, mendjadi umpan api. Ja apa boleh buat memanglah kemerdekaan tiada murah dan tiada mudah didapat.

Siang bertukar malam, malam bertukar siang. Achirnja datang djuga waktu, Belanda harus meninggalkan Jogja. Republik kembali. Perasaan lega. Anak-anak kita panggil masuk sekolah. Dengan riang gembira sekolah-sekolah dapat dibuka kembali, meskipun dibeberapa tempat anak-anak hanja mendapatkan puing belaka dari gedung jang semula ditinggalkan. Dari gedung Mu'alimin jang

indah itu tinggal tumpukan batu dan arang. Dari gedung asramanja tinggal separo. Perlengkapan habis, sebagian jang tiada terbakar kena dibawa orang-orang tiada karuan.

Kini kita perlu melihat kemuka. Kita singsingkan lengan badju, tenaga dikerahkan, biaja diichtiarkan. Dengan berkat Tuhan, alhamdulilah diatas puing tadi kini telah berdiri gedung jang lebih luas, lebih indah jang masih terus dikerdjakan mendekati kesempurnaannja.

Satu windu sudah, kita mengenjam alam merdeka. Sampai kini keadaan Muhammadijah sesudah melalui beberapa masa pergolakan, belum lagi pulih sebagaimana semula. Usaha kedjurusan pendidikan dan pengadjaran tetap masuk dalam program jang terpenting. Matjam sekolah boleh dikata masih sebagaimana dahulu, hanja djumlah masih sangat djauh berbedanja dengan masa lampau. Achir windu jang pertama ini djumlah sekolahan madrasah Muhammadijah dalam daerah Jogjakarta adalah sebagai berikut:

Bustanul-athfal (taman kanak2)	7	buah,
S. R. III	5	„
S. R. VI (bersubsidi)	10	„
S. R. VI (masih mendapat sokongan)	10	„
S.M.P. „putera" dan „puteri" (bersubsidi)	2	„
S. M. P. „sore"	3	„
S. M. A. (pagi) bagian A dan B	1	„
S. M. A. (sore) bagian A, B dan C.	1	„
S. G. A.	1	„
Mu'alimat (Sekolah Guru agama „Puteri")	1	„
Mu'alimin (Sekolah Guru agama „Putera")	1	„
Darul-ulum (Sekolah Menengah agama)	1	„
Sekolah Pertukangan bagian kaju	1	„
Sekolah Pertanian	1	„

Selain jang bersifat sekolah seperti tersebut diatas, jang berudjud pengadjian dan kursus-kursus agama, masih berdjalan terus dan sebagian besar diselenggarakan oleh Muhammadijah bagian Tabligh.

Achirnja perlu ditjatat disini, bahwa tjita-tjita Muhammadijah sebagaimana jang telah diputuskan dalam kongresnja jang ke-25 tentang adanja sekolah tinggi Muhammadijah, tetap termasuk dalam program usaha.

*

C. PERGURUAN ISLAM REPUBLIK INDONESIA

PADA waktu berdirinja, jaitu 28 September 1929 (Rechtspersoon 4 April 1930 No. 1 X), Gerakan Ahmadijah Indonesia aliran Lahore baru merintis djalan, jaitu langkah pertama untuk penjiaran Islam. Da'wah (propaganda) Islam dengan lisan dirapat-rapat atau pertemuan memang besar djuga faedahnja, tetapi dengan tulisan-tulisan adalah lebih besar faedahnja karena dapat mentjapai kalangan jang lebih luas dan pengertian dapat lebih mendalam. Sebab itu maka mulai waktu itu djuga berusaha menerbitkan kitab-kitab Islam. Oleh karena pada waktu itu amat banjak anak-anak kita pemuda harapan bangsa, jang hanja gemar membatja kitab-kitab bahasa Belanda, maka Ahmadijah berusaha sedapat-dapatnja menerbitkan kitab-kitab Islam dengan bahasa Belanda. Agak banjak djuga kitab jang demikian itu sudah diterbitkan, ada jang ketjil, ada jang agak besar dan ada jang besar. Jang besar itu ialah De Heilige Qur'an (teks Arab, terdjemah dan tafsirnja), De Religie van den Islam. Jang agak besar ialah De Leerstellingen van den Islam, Muhammad de Profeet. Dan beberapa banjak kitab ketjil-ketjil.

Lain dari pada itu diterbitkan djuga madjallah-madjallah dengan bahasa Belanda, Djawa dan Indonesia serta Sunda.

Djika diperhatikan sikap dan djalan fikiran orang-orang Islam sekarang dan jang pada waktu itu masih mendjadi pemuda, maka kita bersjukur kehadirat Allah Jang Maha Bidjaksana, karena rupanja usaha untuk menerbitkan kitab dan madjallah itu tidak sia-sia, bahkan ada besar djuga faedahnja.

Inilah langkah (phase) pertama.

Zaman pendjadjahan Djepang amat banjak merugikan mengenai usaha dan materieel.

Dalam kongresnja jang pertama didalam Indonesia merdeka, jaitu pada tahun 1947, diputuskan: meneruskan langkah jang pertama itu dan menambah langkah jang kedua, jaitu mendirikan Perguruan Islam Republik Indonesia (P. I. R. I.)

Pembentukan Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI).

1. Jang membentuk PIRI jalah Gerakan Ahmadijah Indonesia aliran Lahore
2. Pantjasila, jaitu dasar Negara R.I. disetudjui dan dipertahankan langsungnja oleh Gerakan Ahmadijah Indonesia aliran Lahore.
3. PIRI adalah badan bahagian Gerakan Ahmadijah, jang diberi tugas turut membangun Negara R. I. dalam lapangan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, dengan tidak menjalahi Pantjasila.

Maksud PIRI

Maksud PIRI ialah maksud Ahmadijah djuga : jaitu mendirikan Islam untuk mentjapai bahagia (falah) bagi seluruh ummat Indonesia ja'ni falah jang mendjadi sebahagian dari falah seluruh ummat Indonesia, dengan berpedoman Qur'an Sutji dan Summah Nabi Muhammad s.a.w.

Usaha PIRI

1. Mendirikan sekolah (pondok), tempat pendidikan, rumah sembahjang, perpustakaan, pondok (asrama) dan lain-lain.
2. Membantu kepada orang dan badan jang selaras dengan PIRI.
3. Memperhatikan Pendidikan dan Pengadjaran jang diberikan kepada ummat di Indonesia, baik oleh Pemerintah baik dari pihak jang lain.

Pendidikan PIRI

1. Manusia jang terbanjak ialah berbakti kepada Allah dan berbuat baik kepada machluk-nja. Dan tjontoh jang terbaik ialah diri Nabi Sutji Muhammad s.a.w. Tjita-tjita inilah jang ditudju oleh Pendidikan PIRI.
2. Sebab itu Pendidikan PIRI jang dipakai dalam segala sekolahnja ialah : Membangkitkan tjinta kasih kepada Allah dan utusan-Nja Nabi Muhammad s.a.w. sehingga dapat menta'ati-Nja dan membela-Nja.

Peladjaran PIRI

Sekolah PIRI memberi peladjaran ilmu kepandaian umum sebaik-baiknja seperti jang diberikan disekolah-sekolah Negeri.

Usaha PIRI

Pada bulan April 1947 Kongres Ahmadijah diadakan di Purwokerto. Inilah jang memutuskan pendirian PIRI. Segera sesudah itu diadakan persiapan pendirian sekolah-sekolah PIRI dibeberapa tempat, misalnja di Purwokerto, Jogjakarta, Surakarta, Madiun, Blora dan lain-lainnja. Tetapi pada 21 Djuli 1947 perang kolonial Belanda dimulai. Belanda menjerbu dimana-mana. Maka rusaklah persiapan pendirian sekolah PIRI itu. Hanja satu tempat jang dapat dilangsungkan, jaitu di Jogjakarta. Karena serbuan Belanda itu, maka di Jogjakarta penuh sesak dengan pengungsi. Terlalu banjak pemuda dan anak-anak jang

tidak dapat bersekolah, karena kekurangan tempat. Mereka ini bergelandangan hilir mudik tidak berketentuan. Sebab itu dengan serba darurat sekolah PIRI dibuka pada bulan Oktober 1947, jaitu S. G. A., S.M.A. dan S.M.P. Banjak guru jang mengurbankan tenaga, memberi peladjaran kepada murid-murid jang terlantar itu disekolah PIRI. Pemerintah memberi pindjaman gedung sekolah dengan perkakasnja. Pengurbanan jang hebat dari pihak guru-guru dan pengurus PIRI dan bantuan Pemerintah serta beberapa peminat itulah jang menjebabkan sekolah-sekolah PIRI dapat berdiri tegak. Sampai pada hari serbuan Belanda kekota Jogjakarta, jaitu pada tanggal 19 Desember 1948. Murid-murid sekolah-sekolah PIRI jang djumlahnja 1200 orang bubar, karena sekolah diistirahatkan. Banjak diantaranja jang menggabungkan diri dalam perdjuangan Tentara Peladjar, dan ada beberapa orang jang gugur. Bersama-sama dengan seluruh ra'jat Jogjakarta keluarga PIRI dengan murid-muridnja mengalami penderitaan jang hebat dalam waktu pendudukan Belanda selama 7 bulan. Setelah tentara Belanda mundur dari Jogjakarta, 29 Djuni 1949, PIRI bersiap-siap akan membuka sekolah-nja kembali.

Dalam pembukaan kembali sekolah-sekolah itu ternjata, bahwa keadaan sekolah PIRI banjak perubahannja. Muridnja tinggal 300 orang, karena banjak jang meninggalkan Jogjakarta, dan setengahnja ada jang belum kembali dari perdjuangan.

Dengan keteguhan hati PIRI meneruskan usahanja dalam keadaan jang masih serba sukar, sehingga lambat laun dapat djuga kemadjuan. Pada triwulan pertama tahun 1951 sekolah PIRI ialah :

S. G. A.	1 kelas
S. M. A.	10 kelas
S. M. P.	5 kelas
S. G. B.	2 kelas
Pers. S. G. A.	1 kelas
Djumlah	19 kelas dengan djumlah murid 700,

dan gurunja 60 orang.

Usaha memadjukan dan meninggikan mutu peladjaran dan pendidikan didjalankan terus menerus dengan menempuh beberapa kesukaran. Makin lama, bantuan Pemerintah makin bertambah, berwudjud petundjuk dan bimbingan dan uang bantuan (subsidi). Sudah tentu sadja ini menambah lantjarnja roda kemadjuan PIRI.

Rupanja, PIRI ini sudah mulai mendapat perhatian besar dari chalajak ramai. Tidak hanja di Djawa sadja, malah diluar Djawa besar djuga perhatian itu, misalnuja dari Andalas, Kalimantan dan Sulawesi serta Sundaketjil.

Achir tahun 1952

Keadaan pada achir tahun 1952 seperti dibawah ini :

S. G. A.	6 kelas
S. M. A.	13 kelas
S. M. P.	11 kelas
S. G. B.	11 kelas

Djumlah 41 kelas dengan djumlah murid 1400 orang.

S.M.A. masih memakai pindjaman gedung sekolah negeri, sedang jang lain-lainnja sudah dapat memakai rumah sewaan sendiri.

Dengan maksud supaja djalan sekolah-sekolah PIRI lebih lantjar dan menaikkan mutunja, maka ada beberapa guru Pemerintah jang dipindjamkan disekolah S.G.A., S.G.B. dan S.M.P. PIRI. Murid di S.G.B. dan S.G.A. boleh minta dan dapat tundjangan ikatan dinas dari Pemerintah.

Pada achir tahun 1952 di Purwokerto dapat didirikan S.G.B. PIRI baru dua kelas, tetapi dalam tahun ini belum mendapat bantuan subsidi dari Pemerintah, mungkin karena penghematan.

Sudah agak lama pengurus berusaha mendirikan pondok, seperti pesantren, jaitu tempat pendidikan agama Islam setjara modern, seperti halnja pondok

di Gontor daerah Ponorogo atau lain-lainnja. Bahkan ini seirip dengan pondok pesantren di Ngampel, Tuban, Dradjat, Gresik pada zaman para wali dahulu. Pendirian pondok ini tidak begitu lantjar, seperti jang diharapkan, hanja sekedar kekuatan sendiri. Sedang Jajasan Dana Bantuan sampai sekarang belum memberikan bantuannja.

Sekiranja pondok itu sudah berdiri, tentu pengurus dapat mengabulkan usul dari beberapa tempat, baik di Djawa maupun diluar Djawa, jang meng-harapkan berdirinja sekolah-sekolah dan mesdjid serta pondok. Usul-usul ini mendjadi perhatian jang mendalam bagi pengurus.

Buah Perguruan Islam Republik Indonesia belum banjak, karena baru sekali mengeluarkan murid Persamaan S.G.A. dan dua kali dari S.M.A., dua kali dari S.M.P.

Jang lulus udjian Persamaan S.G.A. 20 orang dari tjalon 22 orang. Jang lulus ini ada 15 orang jang menempuh udjian S.G.A. dan lulus 12 orang. Ini kebanjakan meneruskan peladjarannja ke Kursus bagian Pendidikan dan Pendidikan Djasmani.

Jang lulus dari S.M.A. kebanjakan meneruskan ke Gadjah Mada dan Perguruan Tinggi Agama Islam.

*

D. PERGURUAN SRIWIDJAJA

Ichtisar perkembangan :

SEDJAK th. 1949 Balai Perguruan Sriwidjaja muntjul ditengah masjarakat Indonesia dan pada 17 Agustus 1950, mulailah menjebarkan pengetahuan. Berangsur-angsur dari sekolah landjutan hingga dengan perguruan-tingginja. Dengan penuh kejakinan Balai Perguruan Sriwidjaja, berdjalan terus dengan melalui berbagai rintangan, namun begitu setapak demi setapak, sesaat demi sesaat, mulailah berkembang, laksana mekarnja sekuntum bunga hingga menghasilkan buah. Minat beladjar serta perhatian chalajak ramai mendapat sambutan dari segenap lapisan masjarakat di Indonesia, dari kalangan Buruh, Tani, Angkatan Perang dan lain-lainnja, baikpun tua dan muda. Dan pada tahun belakangan ini nampak mendesaknja perhatian masjarakat, hingga dari luar Negeripun datang mendaftarkan diri, seperti dari Malaya, British-Borneo, Nederland dan lain-lainnja lagi.

Peladjaran tertulis :

Selain dari sekolah dengan lisan, Balai Perguruan Sriwidjaja memberi kesempatan djuga untuk menambah pengetahuan dengan setjara tertulis (schriftelijk). Mengingat keadaan-keadaan dewasa ini, sungguh nampak betul faedahnja dengan adanja atau diberikannja peladjaran tertulis oleh Balai Perguruan Sriwidjaja. Mereka jang terpentjil diluar kota djauh perhubungan dengan dunia luar bisa ikut serta beladjar, baikpun mereka jang dikotapun bisa melandjutkan beladjar bagi mereka jang tidak berkesempatan untuk beladjar dengan setjara lisan.

Masih banjak lagi manfa'atnja, djika dikadji-kadji.

Menurut tjatatan-tjatatan, mereka jang telah mentjapai sesuatu keahlian dengan deradjat doctor sekalipun, ikut djuga berladjar dengan peladjaran tertulis ini, untuk menambah pengetahuan kelain djurusan.

Djurusan-djurusan sekolah :

Hingga tahun 1953 ini Balai Perguruan Sriwidjaja telah membuka sekolah-sekolah landjutan tingkatan Pertama dan Atas; dan Perguruan - perguruan Tinggi untuk djurusan Hukum, Ekonomi dan Kedokteran.

Djumlah murid :

Siwa/mahasiswa Balai Perguruan Sriwidjaja, terdiri dari pelbagai bangsa, seperti Indonesia, Malaya, India, British-Borneo, Arab, Tionghoa, Belanda.

Banjaknja djumlah peladjar kira-kira 5.000. Sebahagian terbesar terdiri dari bukan peladjar jang melulu untuk beladjar.

Rentjana peladjaran :

Bahasa pengantar bahasa Indonesia, mata peladjaran disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan peladjar agar pengetahuannja betul-betul bisa dipergunakan dalam masjarakat. Sebagai salah satu tjontoh pendapat dan tudjuan Perguruan Sriwidjaja untuk segera memperbaiki rentjana pengadjaran seperti tulisan salah satu pengasuh Perguruan Sriwidjaja.

Sistim pendidikan di Indonesia.

Djadi tudjuan Perguruan Sriwidjaja ialah ikut berusaha memperbaiki pendidikan, pengadjaran di Indonesia dengan sebaik-baiknja menurut kebutuhan masjarakat.

*

E. SEKOLAH - SEKOLAH B.O.P.K.R.I.

DJIWA Proklamasi 17 Agustus 1945, ternjata dimiliki pula oleh segenap Warganegaranja jang beragama Keristen.

Segenap Warganegara jang beragama Keristen didalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta merasakan pula akan tanggung djawabnja terhadap nusa dan bangsa dikelak kemudian hari. Rasa tanggung djawab tersebut antara lain dinjatakan dengan kebulatan tekad turut serta mengambil bagian menjongsong maksud Pemerintah didalam usahanja membangun Negara dan Masjarakat, dengan menjelenggarakan sekolah-sekolah Keristen.

Oleh masjarakat Keristen di Jogjakarta pada tanggal 11 Mei 1946 dengan acte Notaris R.M. Wiranto di Jogjakarta diresmikan berdirinja sesuatu badan pendidikan Keristen dengan nama : Badan Oesaha Pendidikan Keristen Republik Indonesia, disingkat B.O.P.K.R.I.

Pendirian B.O.P.K.R.I. tersebut, dimulai tanggal 18 Desember 1945.

Adapun azas dan tudjuan dari pada B.O.P.K.R.I. ialah :

1. Dasar pendirian B.O.P.K.R.I. ialah Kitab Sutji, jaitu Firman Tuhan.
2. Turut serta bekerdja dengan Pemerintah didalam usahanja mempertinggi deradjat bangsa Indonesia pada umumnja dalam dunia pengetahuan dan kebudajaan.
3. Memperluas pengadjaran dan pendidikan Keristen didalam Negara Repu blik Indonesia, dengan usaha-usahanja :
   a. Mendirikan segala matjam sekolah, baik jang memberikan pendidikan umum, maupun jang memberikan pendidikan vak.
   b. Menjelenggarakan pendidikan masjarakat.
   c. Menerbitkan buku-buku batjaan dan peladjaran.

Pada tahun permulaan bulan Desember 1945 B.O.P.K.R.I. membuka sekolah-sekolahnja jang pertama diwaktu siang hari :

1. Prawara Sita atau Sekolah Guru Taman Kanak-kanak sebanjak satu buah, bertempat digedung Bintaran Kulon.
2. Sekolah Rakjat sebanjak 3 buah didalam kota, bertempat di Ungaran 3, Klitren Lor 17 dan Bintaran Kulon.
3. Sekolah Taman Kanak-kanak (diwaktu pagi hari) di Bintaran Kulon, Ungaran 3 dan Tjlangap.
4. Sekolah-sekolah Rakjat diluar dibukanja pula didaerah Sleman 3 buah: desa Minggir, desa Nulisan dan Rewulu ; sedang didaerah Kulon Progo 3 buah : desa Temon, Palihan dan Ngulakan.

Pada pertengahan tahun 1946 sekolah-sekolah B.O.P.K.R.I. berkembang lagi dengan dibukanja sekolah-sekolah :

1. S.M.P. sebanjak 2 buah bertempat di : Terban Taman 33 dan Ungaran 3.
2. S.M.A. sebanjak 2 buah kedua-duanja bertempat di Gemblakan 42 (pagi/petang).
3. H.B.S. sebanjak 1 sekolah di Gemblakan 42.

Dalam tahun 1947 Sekolah-sekolah Rakjat didalam kota ditambah lagi dengan S.R. Demangan dan S.R. Terban Taman.

Dalam pada itu B.O.P.K.R.I. pun mengusahakan sekolah-sekolahnja diluar daerah Jogjakarta, antara lain di : Malang, Kediri dan Modjowarno.

Statistik B.O.P.K.R.I. menundjukkan blok diagram sebagai berikut :

Pun didaerah Gunung Kidul ada dibuka sekolah-sekolah Keristen antara lain di : Wonosari, Djepitu, Kemadang dan Ngembes dengan djumlah semua 6 (enam) Sekolah Rakjat dan sebuah S.M.P.

Keadaan demikian itu berlangsung hingga djatuh pada malam peristiwa 19 Desember 1948 (doorstoot Jogjakarta).

Selama zaman pemerintahan pendudukan militer Belanda B.O.P.K.R.I. menutup segenap sekolah-sekolahnja jang ada didalam kota. Akan tetapi keenam sekolah-sekolahnja jang ada diluar kota tetap terus diselenggarakan dengan penuh kejakinan akan berachirnja kekuasaan asing didalam Negara Republik Indonesia.

Selama masa pendudukan pemerintah Belanda tiada segan-segan memakai tjara-tjara jang litjik dengan memerintahkan membuka kembali sekolah-sekolah jang telah ada. Pun sekolah-sekolah Keristen tiada luput dari perintah-perintah kekuasaan tersebut, akan tetapi B.O.P.K.R.I. tetap diam dalam segala bahasa.

Bulan Djuli 1949 Pemerintah Republik Indonesia kembali diibu kota Jogjakarta.

Sesuai dengan seruan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Negara/Kordinator Keamanan pada tanggal 5 Djuli 1949, agar semua sekolah dibuka kembali, maka B.O.P.K.R.I. pun tiada ketinggalan.

Dengan melalui saluran-saluran jang sah, maka dengan keputusan Menteri Pekerdjaan Umum kepada B.O.P.K.R.I. dikembalikan pemakaiannja gedung-gedung Sekolah Keristen di : Gondolaju 24, Terban Taman 33, Klitren Lor 17, Demangan, Gemblakan 42, Bintaran Kulon, Gondokusuman 29 dan Ngupasan 21.

Tundjangan moreel dari Pemerintah itu mentjambuk B.O.P.K.R.I. agar meluaskan dan menjempurnakan usahanja didalam lapangan Pendidikan dan Pengadjaran.

Dalam permulaan tahun gemilang 1949 itu B.O.P.K.R.I. membuka kembali sekolah-sekolahnja antara lain : I Sekolah-sekolah Taman Kanak-kanak digedung :

1. Gondolaju 24

2. Ungaran 3
3. Bintaran Kulon
4. Gondokusuman 39

II. Sekolah-sekolah Rakjat di gedung-gedung:
1. Gondolaju 24
2. Terban Taman 33
3. Klitren Lor 17
4. Bintaran Kulon
5. Demangan
6. Daerah Kulon Progo di: Temon, Palihan, Ngulakan dan Wates.
7. Daerah Sleman di: Sidomuljo, Nulisan, Minggir.
8. Daerah-daerah Luar Daerah Istimewa Jogjakarta.

III. Sekolah-sekolah Menengah bagian Pertama, di gedung-gedung:
1. Gemblakan 42
2. Ungaran 3 (waktu siang hari).
3. Bintaran Kulon (waktu siang hari).

IV. Sekolah-sekolah Menengah bagian Atas di gedung-gedung:
1. Gondokusuman 29
2. Gondolaju 24 (waktu siang hari).

Dalam tahun peladjaran 1950/1951 B.O.P.K.R.I. menambah sekolah-sekolahnja dengan:

S.K.P. bertempat di Gondokusuman 29, sedang Sekolah Rakjat di Gondolaju 24 jang ternjata sudah besar itu dipetjah mendjadi dua sekolah: S.R. VI A dan S.R. VI B.

Dalam pada itu B.O.P.K.R.I. pun telah membuka tiga buah Sekolah Rakjat diluar kota, jaitu: di Bantul S.R. Pranti dan S.R. Turen dan di Wates. S.R. Wates.

Dalam tahun peladjaran 1951/1952 sekolah-sekolah B.O.P.K.R.I. bertambah lagi dengan:
1. S.G.B. bertempat di Gemblakan 42
2. S.G.A. „ „ Gondokusuman 29
3. S.G.T.K. „ „ Gondokusuman 29 sedang
4. S.M.P.-nja bertambah sebuah lagi di Bintaran Kulon.

Dengan demikian maka tahun peladjaran 1952/1953 B.O.P.K.R.I. bekerdja dengan menjelenggarakan sekolah-sekolahnja didalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

I. Taman Kanak-kanak:
1. Gondolaju 24
2. Gondokusuman 39
3. Ungaran 3
4. Bintaran Kulon

(Sekolah-sekolah tersebut belum bersubsidi).

II. Sekolah-sekolah Rakjat (didalam kota):
1. S.R. VI A Gondolaju 24
2. S.R. VI B Gondolaju 24
3. S.R. VI Klitren Lor 17
4. S.R. VI Terban Taman 33
5. S.R. VI Demangan
6. S.R. VI Bintaran Kulon

IIa. Daerah Kulon Progo: (luar kota)
7. Temon
8. Palihan
9. Ngulakan
10. Wates

IIb. Daerah Sleman (Luar kota):
   11. Sidomuljo/Rewulu
   12. Nulisan
   13. Minggir

IIc. Daerah Bantul (Luar kota):
   14. P r a n t i
   15. T u r e n

(Semua Sekolah-sekolah Rakjat B.O.P.K.R.I. sudah bersubsidi)

III. Sekolah Menengah bagian Pertama A/B:
   1. S.M.P. I di Gemblakan 42, (bersubsidi)
   2. S.M.P. II di Bintaran Kulon
   3. S.M.P. III di Gondokusuman 29 (waktu siang hari)
   4. S.M.P. IV di Bintaran Kulon (waktu siang hari)

IV. Sekolah-sekolah Guru antara lain:
   1. S.G.B. di Gemblakan 42
   2. S.G.T.K. di Gondokusuman 29
   3. S.G.A. di Gondokusuman 29

(Ketiga-tiganja belum bersubsidi).

V. Sekolah Kepandaian Puteri di Gondokusuman 29 (bersubsidi).

VI. Sekolah Menengah bagian Atas A/B/C:
   1. S.M.A. I di Gondokusuman 29 (bersubsidi)
   2. S.M.A. II di Gondolaju 24 (siang hari) (bersubsidi)

Lain dari pada itu pun masih ada terdapat sekolah-sekolah Keristen didaerah-daerah Wonosari a.l.:
   1 S. R. Wonosari.
   2. S. R. Kemadang
   3. S. R. Ngembes
   4. S. M. P. Wonosari

Sedang sekolah-sekolah Keristen lain-lainnja jang ada didalam Daerah Istimewa Jogjakarta a. l.:
   1. S. M. P. di Wates/Kulon Progo.
   2. S. M. P. di Rewulu/Sleman.

Pesat dan kemadjuan Sekolah-sekolah B.O.P.K.R.I. sedjak tahun 1949 sampai dengan permulaan tahun 1953 digambarkan dengan blok-diagram sbb.:

*
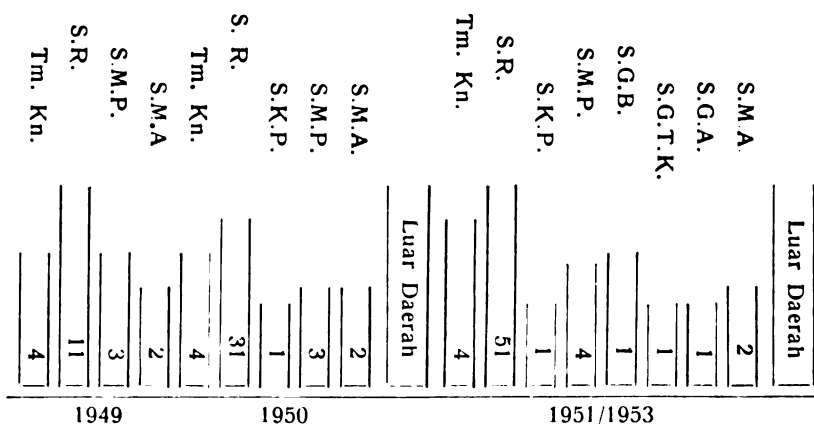
F. PENDIDIKAN TIONGHOA DI JOGJAKARTA

SETELAH tentara Djepang mendarat dipulau Djawa, maka kekuasaan pemerintah Belanda beralih ketangan Djepang. Susunan masjarakat berubah sama sekali disebabkan adanja pergantian tjorak jang tidak dipahami oleh chalajak ramai. Sudah barang tentu masjarakat Tionghoapun tidak bebas dari perubahan sosial jang begini hebat bagaikan malapetaka. Mau tidak mau berhubung dengan kekuatiran terhadap pemerintah Balatentara Djepang, maka semua perkumpulan Tionghoa jang ada didalam masjarakat dikubur. Satu-satunja perkumpulan Tionghoa jang dapat didirikan pada masa itu jalah Kakyo Sokay. Automatis sekolah Tionghoa dilindungi oleh Kakyo Sokay tersebut.

Pada tahun 1946 kekurangan dalam begroting pendidikan sebegitu besar, sehingga C.H.T.H. merasa tak berdaja lagi untuk terus menerus menanggung beban jang amat berat ini. Berhubung dengan itu lahirlah „Pengurus Pendidikan Tionghoa" jang bermaksud menggantikan C.H.T.H. dalam soal pendidikan. Pada masa itu sekolah Tionghoa didirikan atas dasar kebudajaan Tionghoa dan tjoraknja sekali-kali tidak berpolitik. Karena usaha ini diterima baik oleh Kiauw Poa, Wu Sang ditundjuk oleh umum sebagai ketua pertama dari badan pengurus pendidikan Tionghoa Jogjakarta, sedang Ong Tiong Tjui sebagai kepala bagian keuangan menanggung segala kekurangan. Dengan susah pajah Ong Tiong Tjui mengurbankan tenaga baik berupa moreel maupun materieel. Karena djasanja maka rumah pendidikan Tionghoa dapat diselamatkan dari djurang kebangkrutan.

Pada tahun 1946 keadaan sekolah dibawah penilikan Badan Pengurus pendidikan Tionghoa sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Tionghoa ...... guru kepala Djhe Djhe Fang.
2. Sekolah Rakjat Tionghoa ke 1 .... guru kepala Lie Tje Tjhiang.
3. Sekolah Rakjat Tionghoa ke 2 .... guru kepala Lie Tje Tjhiang.
4. Sekolah Rakjat Tionghoa ke 3 .... guru kepala Tan Hwa King.
5. Sekolah Rakjat Tionghoa ke 4 .... guru kepala Jap Kiong Hian.

Pada tahun 1947 Wu Sang mengundurkan diri dari djabatan ketua atas permintaan sendiri. Sebagai gantinja ditetapkan Ong Tiong Tjui selaku ketua Badan Pendidikan Tionghoa. Pergantian pimpinan ini mengakibatkan perubahan dalam susunan tenaga pengadjar.

1. Sekolah Menengah Tionghoa . . .. Guru kepala Chen Chang Hui.
   Guru Lie Tja Dhjiang, Hu Chou Sheng, Chen Chien Kang, Wu Ming Gun, dan lain-lain.
2. Sekolah Rakjat Tionghoa ke 1 .... Guru kepala Yu Ping Lie. Guru-guru Liu Hong Chiu, Tjeng Ting Ching, Un Gay Hun, Gui Gwat Kong dan lain-lain.
3. Sekolah Rakjat Tionghoa ke 2 .... Guru kepala Tjia Siauw Tjim.
   Guru-guru: Jang She Shen, Liem King Hoo, Lie Te Sheng, Sie Gwan Djiang dan lain-lain.
4. Sekolah Rakjat Tionghoa ke 3 .... Guru kepala Tan Hwa King.
   Guru-guru: Shu Sheng Che, Lo Hay Hwat, Huang Shien Shiang, Lin Thian Djing, dan lain-lain.
5. Sekolah Rakjat Tionghoa ke 4 .. Guru kepala Jap Jiong Hian.
   Guru-guru: Jang Pei Thang, Ang Ay Tjwan, She Thian Lie, Khu Tan Hoa, dan lain-lain.

Pada tahun 1948 timbul banjak soal-soal dan kesulitan, jang minta banjak tenaga dan pikiran. Tapi berkat kebidjaksanaannja Ong Tiong Tjui segala matjam kesukaran dapat diatasi. Didasarkan atas djasanja maka sebagai penghargaan Ong diangkat lagi mendjadi ketua Badan Pengurus Pendidikan Tionghoa di Jogjakarta.

Susunan tenaga guru berubah sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah .... kepala diwakili oleh Lie Tjie Djiang.
   Guru-guru: Jang Sie Pei, Chang Siauw Lien, Chen Chien Kang, Mrs. Molly.
2. Sekolah Rakjat ke 1 kepala Sun Che Chien.
   Guru-guru: Tan Kok Po, Liauw Ting Hwie, Chen Ming Han Lu Jeh.
3. Sekolah Rakjat ke 2. Tenaga guru tidak berubah.
4. Sekolah Rakjat ke 3. Tenaga guru tidak berubah.
5. Sekolah Rakjat ke 4. Tenaga guru tidak berubah.

Tahun 1948 mendjadi tahun kenang-kenangan untuk sekalian Kiauw Pao di Jogjakarta, karena pada tahun itu pendidikan Tionghoa di Indonesia pada umumnja dan di Jogjakarta pada chususnja mengalami masa jang gilang gemilang. Pada tahun itu didirikan sebuah rumah gedung Sekolah Rakjat Tionghoa ke 2 di Notojudan, jang makan biaja kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat djuta Ori). Dari ongkos sebesar ini jang dibajar oleh Ong Tiong Tjui Rp. 2.500.000. Dengan demikian Ong Tiong Tjui membiajai 70% dari ongkos semua. Selain dari itu Tjan Gin Tjang. Lie Kun Gie, Tie Po Kie, Tjin Khan Giok, Tjang Kim Thian dan lain-lain pun telah ikut serta memberi bantuan moreel dan materieel jang berharga.

Pada tahun 1949 Ong Tiong Tjui untuk ketiga kalinja diangkat mendjadi ketua.

Susunan pengadjar pada tahun 1949 itu sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Kepala: Lie Tjie Djiang. Guru tetap seperti tahun jang telah lampau.
2. Sekolah Rakjat....Kepala: Tan Kok Po. Pembantunja: Liauw Ting Hwie, Si Bian Djiang, Lie Kiem Hay dan lain-lain.
3. Sekolah Rakjat ke 2 ..Kepala: Tjia Siauw Tjim. Guru-guru karena banjak jang mengungsi diganti dengan guru darurat.
4. Sekolah Rakjat ke 3....Rumah sekolah ini diminta kembali oleh Pemerintah.
5. Sekolah Rakjat ke 4....Kepala dan pembantu tetap seperti sediakala, tapi hanja untuk setengah tahun lamanja.

Setelah tentara Belanda ditarik mundur dari Jogjakarta, maka ada beberapa orang anggauta pengurus tanpa pemberitahuan meninggalkan kewadjibannja.

Pada masa itu perkumpulan Tionghoa di Jogjakarta membutuhkan bantuan moreel maupun materieel sebanjak-banjaknja. Anggauta pengurus terdiri dari : Ong Tjun Bie, Yu Ping Lie, Ko Bing San, Lie Ping Hiem. Guru-gurunja banjak jang meninggalkan Jogjakarta. Berhubung datangnja keadaan demikian itu mendadak, maka perkumpulan dengan sendirinja mendjadi setengah beku, segala sesuatu tidak bisa berdjalan seperti biasa. Berkat kegiatan guru jang masih tetap tinggal di Jogjakarta, jaitu: Jeng Sie Pei, Tan Kok Po, Liauw Ting Hwie, Sie Bian Djiang, Tjie Siauw Tjim dan beberapa orang kawannja sadja, setelah pengunduran tentara Belanda, atas usaha dan kegiatan para anggauta pengurus dan guru maka sekolah dapat dibuka kembali dalam beberapa hari sadja. Sampai sekarang sekolah-sekolah tersebut terus berdiri.

Keadaan Sekolah - sekolah Tionghoa Jogjakarta

Tahun 1945. Ada 4 Sekolah Rendah dengan 6 kelas, jaitu:

No. I. Klenteng, murid 450, guru 16;
No. II. Dagen, murid 550, guru 22;
No. III. Gandekan, murid 500, guru 20;
No. IV. Ketandan, murid 200, guru 9.

Tahun 1946.

S.R. No. I. Klenteng, murid 450, guru 16;
S.R. No. II. Dagen, murid 550, guru 22;
S.R. No. III. Gandekan, murid 500, guru 20;
S.R. No. IV. Ketandan, murid 200, guru 9.
S.M. didirikan di Klenteng, murid 60, guru 7.

Tahun 1947.

S.R. No. I. Klenteng, murid 450, guru 16;
S.R. No. II. Dagen, murid 700, guru 22;
S.R. No. III. Gandekan, murid 500, guru 20;
S.R. No. IV. Ketandan, murid 200, guru 9.
S.M. murid 100, guru 7.

Tahun 1948.

S.R. I. Klenteng, murid 500, guru 16;
S.R. II. Dagen, murd 800, guru 24;
S.R. III. Gandekan, murid 500, guru 20;
S.R. IV. Ketandan, murid 200, guru 9.
S.M. Klenteng, murid 230, guru 11.

Tahun 1949.

S.R. I. Klenteng, murid 300;
S.R. II. Dagen, murid 500;
S.R. III. Gandekan, ditutup.
S.R. IV. Ketandan, ditutup.
S.M. ditutup.

Tahun 1950.

S.R. I. Klenteng, murid 350, guru 15;
S.R. II. Notojudan, murid 700, guru 24;
S.R. III. Gandekan tutup;
S.R. IV. Ketandan tutup;
S.M. 3 kelas murid 140 guru 7.

Tahun 1951.

S.R. I. Klenteng, murid 550, guru 19;
S.R. II. Notojudan, murid 900, guru 26;
S.R. III. Gandekan tutup;
S.R. IV. Ketandan murid 200, guru 7;
S.M. 3 kelas murid 180, guru 8.

Tahun 1952.

S.R. I. Klenteng, murid 550, guru 19;
S.R. II. Notojudan, murid 990, guru 26;
S.R. III. tutup;
S.R. IV. Ketandan murid 230, guru 7;
S.M. 3 kelas murid 220, guru 9.

* *
*

6. PERKEMBANGAN PERPUSTAKAAN

„The true University of these days is a Collection of Books".
— Carlyle —

PERPUSTAKAAN sebagai chazanah ilmu pengetahuan, tempat kumpulan ber-bagai-bagai buku, agaknja telah banjak diketahui oleh umum, walaupun hal ini dinegara kita kurang sekali mendapat perhatian. Bagi negara-negara jang telah madju, perpustakaan adalah penting sekali artinja, bahkan tak dapat dipisahkan dari perkembangan kemadjuan negara dan bangsanja, perpustakaan mendjadi barometer kemadjuan negara dan tingkat ketjerdasan bangsa.

Kalau dengan melihat kebudajaan sesuatu bangsa, kita dapat mengetahui tingkat kemadjuan bangsa itu, maka demikian pulalah halnja dengan melihat perpustakaannja. Dengan mengetahui isi perpustakaannja dan bagaimana arti perpustakaan bagi bangsa itu — dengan melihat statistik pengundjung dan djenis buku jang dipindjam — maka dapatlah kita membajangkan bagaimana tingkat kemadjuan, ketjerdasan dan peradaban bangsa itu.

Demikian pentingnja perpustakaan itu bagi bangsa-bangsa jang telah madju, sehingga perhatian se-penuh-penuhnja ditjurahkan untuk itu. Kita mengetahui misalnja adanja perkumpulan-perkumpulan perpustakaan (Library - Associations), jang anggauta-anggautanja terdiri dari orang-orang jang ditentukan dengan sjarat-sjarat, orang-orang jang terdidik dan berpengetahuan luas serta benar-benar mempunjai keahlian dalam ilmu perpustakaan. Untuk mendapatkan ahli-ahli perpustakaan ini, chusus didirikan pendidikan kedjuruan, jang mempunjai tingkat perguruan tinggi, dengan gelar-gelarnja B.A., M.A. dan sebagainja dalam ilmu perpustakaan (B. A., M. A. Lib. Sc.), Kalau mengingat bahwa perpustakaan adalah merupakan chazanah berbagai ilmu pengetahuan, maka sudah seharusnjalah apabila pemimpin-pemimpin perpustakaan itu terdiri dari orang-orang jang berpengetahuan luas dalam berbagai ilmu pengetahuan itu, the right man on the right place, orang-orang jang benar-benar ahli dalam lingkungannja. Karenanja tiada heranlah kita mengetahui bahwa pemimpin-pemimpin perpustakaan banjak jang terdiri dari para sardjana, jang bergelar profesor, doctor (Ph. D), dsb. Sungguh kelirulah pendapat sementara orang jang mengatakan, bahwa pekerdjaan perpustakaan adalah pekerdjan jang mati dan dangkal. Orang jang berpendapat demikian, adalah orang jang melihat pekerdjaan perpustakaan dari luarnja sadja, — bagaimana mengambil buku dari rak, memberikan kepada pemindjam dan selandjutnja menjimpannja lagi. Habis tidak lebih !—, jang tidak mengetahui seluk-beluk dan liku-liku pekerdjaan perpustakaan jang sesungguhnja.

Diluar maksud dari tulisan inilah untuk menguraikan bagaimana seluk-beluk pekerdjaan perpustakaan itu, — bagaimana pemilihan pembelian/penukaran buku-buku, ragam inventarisasi penulisan titel, penjusunan katalogus, pengaturan buku dan pemeliharaannja, keadaan gedung, pengaliran udara dan temperatur, penerangan, pembinasaan hama, dan lain-lain sebagainja. Hanja

jang perlu ditekankan ialah bahwa pekerdjaan perpustakaan bukanlah pekerdjaan jang dapat dilangsungkan dengan sambil lalu sadja.

Perpustakaan jang benar-benar hidup ditengah-tengah masjarakatnja, akan merupakan vraagbak, pusat tempat bertanja bagi anggauta masjarakatnja tentang ber-bagi-bagai hal, dan djuga tempat bertanja bagi orang-orang asing jang datang kenegeri itu. Untuk hal ini, pada berbagai perpustakaan diluar negeri diadakan bagian penerangan jang chusus melajani hal itu. Teranglah bahwa perpustakaan harus merupakan sumber ilmu dan pengetahuan jang tiada kering-keringnja bagi bangsanja maupun bagi bangsa-bangsa lain. Dalam hubungan ini dapatlah kita mengerti betapa bangga sesuatu bangsa jang memiliki perpustakaan jang berisi buku berdjuta-djuta dan terutama bila memiliki buku-buku dan naskah-naskah jang djarang terdapat lagi dan satu-satunja didunia ini. Belum lagi benda-benda dokumentasi, microfilms, piringan-piringan-hitam, dan benda-benda audio-visueel serta benda-benda perpustakaan lainnja. *)

Kita lebih dapat menginsjafi hal ini, bila kita mengingat bahwa perpustakaan bukanlah suatu hal jang baru lahir pada zaman modern ini sadja, tetapi djauh lebih dahulu. Sedjak zaman purba, perpustakaan telah ada. H. Layard dalam penjelidikannja di Niniveh pada tahun 1850, telah mendapatkan tanda-tanda adanja perpustakaan di Assyria pada masa radja Assurbanipal (tahun 600 sebelum Masehi) jang mempunjai kumpulan 10.000 buah pustaka.

Djauh sebelum itupun, di Babylonia telah terdapat perpustakaan (tahun 2000 sebelum Masehi) jang berisi kumpulan pustaka-pustaka dari tanah liat. Di Mesir pada masa Ptolemy I (tahun 300 sebelum Masehi) djuga telah terdapat perpustakaan jang berisi 6 sampai 700.000 buah pustaka. Djuga di Junani dan Romawi kuna telah terdapat perpustakaan. Penukilan lebih dalam tentang hal ini adalah diluar tugas dari uraian ini, dan memerlukan tulisan tersendiri tentang sedjarah perpustakaan.

Bagaimanakah perkembangan perpustakaan dinegara kita Indonesia?

Sungguh mengetjewakan, karena hal ini kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinja. Lebih-lebih dari golongan awak sendiri. Dalam hal ini tidaklah ada faedahnja kita melemparkan kesalahan kepada masa jang lalu demikian sadja, dengan mengatakan sebagai akibat politik pendjadjahan sekian abad lamanja dari Belanda. Karena pada masa merdeka sekarang inipun, walau nampak tanda-tanda kemadjuan, masih djauh dari memuaskan.

Satu-satunja perpustakaan jang besar dan berarti pada masa pendjadjahan itu, ialah Perpustakaan Museum dari Het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen jang didirikan pada tahun 1778, di Djakarta. Buku-buku jang terkumpul ada lebih kurang 300.000 dan merupakan koleksi jang berharga.

---

*) Sekedar perbandingan, dibawah ini disadjikan kekajaan berbagai perpustakaan-perpustakaan besar (menurut tjatatan 1950):

Lenin Library di Moskow: 12.000.000 buku, dan lain-lain.

Public Library di Leningrad: 6.000.000 buku, dan lain-lain.

Library of Congress di Washington : 6.600.000 buku-buku dan ber-ribu-ribu manuskrip, komposisi-musik, peta.

New York City Public Library : 4.500.000 buku dan pamflet, piringan hitam film.

Bibliotheque Nationale di Paris : 5.000.000 buku dan 15.000 manuskrip.

British Museum Library di London : 4.000.000 buku dan manuskrip.

Kalau diluar negeri kita mengenal berbagai matjam perpustakaan, misalnja perpustakaan negara, perpustakaan umum, perpustakaan parlemen, perpustakaan universitas, dan sebagainja kita di Indonesia pada masa sekarang inipun mempunjai Perpustakaan Negara (Jogjakarta, Semarang, Makasar, Bandung). Perpustakaan Rakjat (tersebar ke-desa-desa), Perpustakaan Universitas, dan sebagainja.

Dengan tiada mengurngi kemadjuan-kemadjuan didaerah lain, perkembangan perpustakaan ini lebih djelas tampak di Jogjakarta. Hal ini tidaklah mengherankan, karena Jogjakarta adalah kota bersedjarah dan pusat kebudajaan dan djuga dahulu adalah pusat Pemerintahan Republik Indonesia, dan jang kini merupakan kota peladjar (kalau tidak boleh disebut kota universitas), dimana berkumpul peladjar-peladjar dari segenap pendjuru tanah air untuk menuntut ilmu. Dan perpustakaan sebagai chazanah ilmu pengetahuan, sungguh merupakan suatu kebutuhan jang sangat dirasakan, apabila pada masa harga buku sangat mahalnja sebagai sekarang ini. Hal ini sungguh lebih-lebih dapat dirasakan oleh para peladjar dan mahasiswa, djuga oleh mahaguru-mahaguru, djawatan-djawatan dan kantor-kantor di Jogjakarta. Dan untunglah, bahwa bagi mereka Jogjakarta telah mempunjai Perpustakaan Negara, Perpustakaan Hatta Foundation, Perpustakaan Sono Budojo, Perpustakaan Islam, Perpustakaan Universitas (Gadjah Mada, P.T.A.I.N.), Perpustakaan Fakultit-Fakultit dan berbagai perpustakaan-perpustakaan ketjil lainnja (Perpustakaan Jajasan Pantja-Sila, Perpustakaan Lembaga Pers dan Pendapat Umum, Perpustakaan Djapen, dan sebagainja).

Dengan tiada mengurangi arti perpustakaan lain-lainnja, sungguh tiada ber-lebih-lebihanlah bila dikatakan, bahwa Perpustakaan Negara adalah satu-satunja perpustakaan jang besar dan banjak memberi bantuan baik bagi peladjar — mahasiswa — mahaguru maupun bagi instansi-instansi pemerintah dan masjarakat umum.

Untuk lebih mengenal Perpustakaan Negara, sebagai perpustakaan besar dan merupakan sumber pengetahuan jang berarti bagi masjarakat ini, baiklah kita menindjau pertumbuhan Perpustakaan Negara ini dari semula.

PERPUSTAKAAN NEGARA

Dengan menginsjafi akan arti dan pentingnja perpustakaan bagi pembinaan negara merdeka, maka sebelum clash ke-II, ketika Jogjakarta masih mendjadi ibu kota Republik Indonesia, oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan (Mr. Ali Sastroamidjojo) telah diperintahkan untuk mendirikan suatu perpustakaan. Maka lalu dimulailah pengumpulan buku-buku.

Djasa dan dorongan Mr. Santosa dan Mr. Hendromartono dalam pendirian perpustakaan ini sungguh tiada terlupakan (kedua beliau ini telah gugur ditembak Belanda pada waktu clash ke-II, tanggal 19 Desember 1948). Umum dapat mengira-irakan betapa sukarnja melaksanakan pekerdjaan ini, terutama bila mengingat akan keadaan jang serba sukar pada masa blokkade itu, dan sebelum kerdja ini mentjapai hasil jang diharapkan, petjahlah aksi-militer Belanda ke II pada tanggal 19 Desember 1948. Dengan didudukinja Jogjakarta oleh tentara keradjaan Belanda, maka kotjar-katjirlah pekerdjaan jang dengan susah pajah mulai diselenggarakan ini. Kemudian dengan tertjapainja persetudjuan Indonesia — Belanda, dan setelah Jogjakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia, maka ternjata buku-buku jang baik jang telah dikumpulkan dahulu banjak jang hilang dan jang tinggal hanja buku-buku roman bahasa Belanda jang kurang berguna bagi kita.

Maka dimulailah usaha pendirian perpustakaan dari semula pula. Dengan serba kekurangan dan kesukaran pada masa itu, sungguh senjatanjalah kalau usaha pendirian perpustakaan ini dimulai dengan tiada bermodal. Modal satu-satunja ialah tjita-tjita dengan kemauan jang keras dan usaha jang tak kenal

putus asa. Atau menurut istilah jang terkenal dari penjelenggaranja, perpustakaan ini didirikan hanja dengan modal „abab" dan „dengkul" sadja.

Kepada para sardjana kita dan para pentjinta ilmu-pengetahuan, dimintakan perhatiannja terhadap pendirian perpustakaan ini. Dan bantuan beliau-beliau jang besar artinja itu sungguh tiada dapat dilewatkan demikian sadja dalam sedjarah pendirian perpustakaan kita.

Demikianlah, maka pada tanggal 17 Oktober 1949 telah dapat dibuka dengan resmi Perpustakaan Negara Republik Indonesia, dengan R. Patah sebagai kepalanja dan menempati gedung di Tugu 66 Jogjakarta. Dengan menghadapi berbagai kesukaran dan dengan formasi pegawai jang djauh dari pada mentjukupi, dilandjutkan usaha ini dengan tidak mengenal pajah.

Banjak buku-buku berharga jang mulai terkumpul, baik jang dihadiahkan maupun jang dititipkan pada Perpustakaan Negara, diantaranja dari Mr. Ali Sastroamidjojo, Prof. Dr. Poebatjaraka, Prof. Dr. Tjan Tjoe Siem, Amir Dahlan (P.F. Dahler) alm., Marjoen Prawirasastra alm., Dr. Radjiman Wedyodiningrat alm., dan lain-lainnja.

Djuga kepada badan-badan penerbit dari seluruh tanah air, tiada segan-segan diminta perhatian dan bantuannja terhadap hal ini, jang disambutnja dengan penuh keinsjafan akan pentingnja arti usaha ini bagi pembinaan negara. Maka mengalirlah buku-buku, madjalah - madjalah, surat-surat kabar dan sebagainja dari segenap pendjuru tanah air, jang disumbangkannja kepada Perpustakaan Negara. Demikianlah pendirian Perpustakaan Negara ini didukung sepenuhnja oleh usaha bersama dan diperuntukkan bagi keperluan bersama pula.

Hal ini terbukti dengan telah terkumpulnja madjalah-madjalah dan surat-surat kabar dari seluruh Indonesia, jang diterbitkan sedjak tahun 1945.

Setelah suasana politik internasional mulai djernih, dimulailah memperluas usaha Perpustakaan Negara ini, dengan mengadakan perhubungan-perhubungan dengan luar negeri dan menjelenggarakan perpustakaan buku-buku jang berguna bagi Indonesia.

Sampai pada masa ini, telah dilangsungkan perhubungan dan pertukaran buku-buku dengan :

Amerika :

1. Library of Congress, Washington.
2. United Nations World, New York.
3. Cornell University, New York.
4. University of Florida, Florida.
5. Pacific Spectator, California.
6. Hoover Institute and Library, California.
7. University of California Library, California.

Inggeris :

8. British National Book Centre, National Central Library, London.
9. The Library Association, London.

Perantjis :

10. International Clearing House for Publications, Paris.
11. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris.
12. World Federation of Democratic Youth, Paris.
13. Science et Vie, Paris.

Hongaria :

14. World Youth, Budapest.
15. Hungarian Foreign Trade, Budapest.
16. Hungarian Chamber of Commerce, Budapest.

Tsjekoslovakia :

17. World Student News, Praha.

Denemarken :

18. Denmarks Institute for International Udveksling of Videnskalelige Publikationer, Kopenhagen.
19. The Danish Exchange Center Kopenhagen.
20. Institut Danois des Exchanges Internationaux de Publications Scientifiguas et Litterares, Bibliotheque Royale, Kopenhagen.

Swedia :

21. Stockholms Högskolas Bibliotheek, Stockholm.

Swis :

22. International Press Institute, Zurich.

Austria :

23. Osterreichsche Nationalbibliotheek, Wina.

Australia :

24. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, East Melbourne.
25. Australian Road, Safety Council, Melbourne.

Dan lain-lain.

Djuga dengan India negeri Belanda, banjak diadakan hubungan dan banjak lagi dengan negara-negara lain jang akan terlalu banjak bila disebutkan semuanja.

Ketjuali pertukaran buku-buku dengan luar negeri dan usaha-usaha lainnja sebagai telah diutarakan diatas, untuk memperbesar pengumpulan buku-buku, djuga dilakukan pembelian buku-buku dengan menggunakan anggaran belandja jang telah disediakan oleh pemerintah.

Disamping usaha-usaha untuk memperbanjak pengumpulan benda-benda perpustakaan, djuga tiada dilupakan usaha memperbaiki organisasi perpustakaan dan pendidikan pegawai.

Langkah pertama dalam organisasi, ialah dengan ikut sertanja Kepala Perpustakaan Negara, R. Patah, dalam Kongres Perpustakaan se Asia di Indore, India, pada bulan Mei 1951. Dan untuk memperluas pendidikan pegawai, telah dikirim S. Muksan ke Australia pada bulan Maret 1952 untuk menghadiri Australian Library Seminar 1952 dan mempeladjari organisasi perpustakaan disana selama tiga bulan.

Demikian antara lain usaha-usaha untuk memperkokoh Perpustakaan Negara. Selandjutnja, berhubung dengan kemadjuan perkembangannja, maka gedung di Tugu 66 sudah tiada mentjukupi lagi. Maka pada tanggal 17 Maret 1952 pindahlah Perpustakaan Negara menempati gedung di Malioboro 85 Jogjakarta. Perpustakaan Hatta Foundation, berhubung dengan belum mempunjai gedung sendiri, bersama-sama menempati gedung itu. Bergabungnja Perpustakaan Negara dan Perpustakaan Hatta Foundation ini sungguh merupakan perpustakaan jang sangat berharga dan bermutu tinggi. Disitu terkumpul buku-buku, potret-potret, slides, dan lain-lain sedjumlah ± 60.000 buah. *)

---

*) Sekedar perbandingan, dibawah ini disadjikan kekajaan perpustakaan-perpustakaan lainnja di Jogjakarta, menurut tjatatan achir 1952 :

Perpustakaan Universitit Gadjah Mada : 29.000 buku
Perpustakaan Islam : 15.500 buku.
Perpustakaan Sono-Budojo : 14.000 buku.
Perpustakaan P.T.A.I.N. (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) : 13.000 buku.
Perpustakaan Pantja-Sila : 1.100 buku.
Perpustakaan Lembaga Pers & Pendapat Umum : 250 buku.

Bagaimana arti perpustakaan ini bagi masjarakat Jogjakarta, dapatlah dilihat pada grafik pengundjung dan buku-buku jang dibatja.

Ketjuali buku-buku jang dipindjamkan untuk dibatja di ruang batjaan djuga diselenggarakan pemindjaman buku-buku keluar. Tetapi pemindjaman keluar ini untuk sementara masih sangat dibatasi, mengingat adanja dan sukarnja buku serta banjaknja jang membutuhkan. Pemindjaman buku-buku keluar gedung perpustakaan ini hanja dilakukan untuk instansi-instansi pemerintah jang sungguh memerlukan, untuk para guru dari sekolah-sekolah menengah dan landjutan, untuk pers, untuk para mahaguru dan untuk mahasiswa/peladjar jang akan menempuh udjian atau tentamen.

Ketjuali besar artinja bagi masjarakat Jogjakarta, djuga Perpustakaan Negara mendapat perhatian dari daerah-daerah diluar Jogjakarta, bahkan diluar Djawa dan luar Indonesia. Pada Ruang Studi, selain dipergunakan oleh para mahaguru, para wartawan djuga banjak dipergunakan oleh utusan-utusan dari daerah-daerah lain (misalnja : Solo, Tegal, Djakarta, Atjeh dan sebagainja) jang perlu untuk mentjari bahan-bahan pengetahuan jang dibutuhkan. Djuga dalam hal-hal jang luar biasa dan penting, untuk keperluan Pemerintah, buku-buku dipindjamkan keluar daerah dan djuga keluar negeri.

Disamping perhatian masjarakat jang mengambil pengetahuan dari chazanah buku-buku Perpustakaan Negara ini, banjak djuga organisasi-organisasi perpustakaan lain jang mengirimkan pegawai-pegawainja untuk mempeladjari pekerdjaan dan ilmu perpustakaan di Perpustakaan Negara (misalnja dari Solo, dan banjak dari Jogjakarta sendiri.)

Demikianlah seledjang terbang keadaan perkembangan Perpustakaan Negara di Jogjakarta. Sepintas lintas tampak adanja kemadjuan perhatian masjarakat terhadap perpustakaan. Tetapi kalau kita tilik lebih dalam, hal ini masih djauh dari pada memuaskan. Library-mindedness harus lebih luas meresap kemasjarakat, sehingga ia merupakan bagian dari hidupnja jang tak dapat dipisahkan.

Disamping itu, organisasi perpustakaan sendiripun perlu diperkuat keadaannja. Mengingat bahwa perpustakaan kita adalah masih dalam tingkat permulaan pertumbuhannja, dan karenanja masih belum mendapatkan kesatuan bentuk dan sistim bagi seluruh perpustakaan di Indonesia, maka kiranja perlulah diadakan penindjauan jang mendalam terhadap hal ini, agar segera tertjapai persamaan sistim, susunan katalogus, dan lain-lainnja jang akan lebih memudahkan bagi para pengundjung perpustakaan dan pentjinta ilmu pengetahuan dalam mentjari buku-buku jang dikehendaki dan memudahkan pula kemungkinan terbitnja bibliografi dari buku-buku disegenap perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. Kearah ini kita perlu segera bertindak, agar kita djangan terlalu djauh ketinggalan dibelakang. Kongres perpustakaan kiranja perlu segera diselenggarakan untuk memperbintjangkan hal ini.

Djuga perhatian pemerintah lebih-lebih sangat diharapkan. Memang perpustakaan financieel tidak memberi keuntungan, tetapi bagi perkembangan ketjerdasan bangsa dan kebudajaan sungguh tiada ketjil artinja. Apalagi kalau kita mengingat bahwa Perpustakaan Negara adalah satu-satunja perpustakaan pendirian negara kita ditengah kantjah revolusi, dan mendjadi kewadjibannja untuk djuga mengumpulkan benda-benda dokumentasi dalam chazanah perpustakaannja, benda-benda perpustakaan jang mempunjai nilai dokumentasi sedjarah dan revolusi pembinaan negara ini, benda-benda mana jang sekarang sudah djarang dan sukar didapatkan lagi dan banjak pula jang telah hilang. Makin lalai kita berusaha kearah ini, makin banjak kita membuat kerugian. Kerugian bagi anak-tjutju keturunan kita kelak, kerugian bagi ilmu pengetahuan dan kerugian bagi sedjarah.

Untuk ini dikehendaki usaha jang sungguh-sungguh penuh kebidjaksanaan, keuletan dan ketelitian — dan djuga beaja !

Alangkah lega kita, bila kita jang hidup dimasa revolusi pembinaan negara ini dapat mengumpulkan selengkap mungkin benda-benda perpustakaan jang bertebaran disekitar sedjarah negara kita ini, dan keturunan kita beratus tahun nanti tiada mengumpat nenek-mojangnja karena mereka masih dapat terpenuhi keinginannja untuk mendengarkan suara pidato Presiden pertama dari negaranja jang konon terkenal menggeledek dan mengguntur itu, masih dapat mendengar pidato dan lagu pemberontakan bung Tomo, masih dapat menjaksikan pamflet-pamflet dan poster-poster jang ikut berdjuang selama revolusi, masih dapat menjaksikan djalannja perundingan-perundingan negaranja dulu waktu revolusi dari microfilms, masih dapat melihat buku-buku dan suratkabar-suratkabar penerbitan darurat dan gerilja, masih dapat .... jang semuanja itu berkat kerdja kita kini, dimasa ini ! Untuk ini, kelalaian adalah berarti kerugian jang tak dapat didjangka lagi !

Njatalah betapa terasa perlunja pemerintah lebih mentjurahkan perhatiannja kepada perpustakaan ini. Disamping gedung perpustakaan jang sungguh-sungguh memenuhi sjarat-sjaratnja, djuga terasa perlunja pemerintah mengadakan undang-undang perpustakaan, sebagai halnja pada negara-negara lain. Djuga pengiriman lebih banjak kader-kader dalam ilmu perpustakaan keluar negeri perlu segera didjalankan, mengingat sangat kurangnja (kalau tak boleh disebut tidak ada !) tenaga jang benar-benar ahli dalam ilmu perpustakaan jang menghendaki pengetahuan jang luas itu.

Ini semua kalau kita menghendaki Perpustakaan Negara — satu-satunja perpustakaan pendirian negara ditengah kantjah revolusi — benar-benar merupakan tugu revolusi jang sungguh-sungguh hidup dan berarti bagi ilmu dan budaja bangsa dari masa kemasa !

Perpustakaan Negara R.I. - Jogjakarta.

PERANGKAAN *)

No. Urut	Keterangan	1949	1950	1951	1952
1.	Pengundjung.	5024	20355	21520	22754
2.	Buku jang dibatja.	2145	10684	11148	15634
3.	Madjalah jang dibatja.	1336	6209	7142	7529
4.	Surat-kabar jang dibatja	1208	5040	5285	5599

*) Pada th. 1953 sekarang ini, djumlah pada triwulan pertama sudah mendekati djumlah pada tengahtahun th. 1952.

Keterangan:

I	=	Pengetahuan umum.
II	=	Filsafat.
III	=	Agama.
IV	=	Sedjarah purba dan Pengetahuan zaman kuna.
V	=	Sedjarah.
VI	=	Riwajat hidup.
VII	=	Ilmu bumi dan Ilmu bangsa-bangsa.
VIII	=	Ilmu tubuh manusia dan Ilmu hajat (hewan).
IX	=	Ilmu masjarakat dan Ilmu politik.
X	=	Ekonomi. Politik ekonomi.
XI	=	Hukum.
XII	=	Pendidikan dan Pengadjaran.
XIII	=	Kebudajaan. Kesenian.
XIV	=	Ilmu bahasa dan Kesusasteraan Eropah dan Amerika.
XV	=	Ilmu bahasa dan Kesusasteraan Asia, Afrika dan Australia.
XVI	=	Ilmu bahasa dan Kesusasteraan Indonesia.
XVII	=	Ilmu pasti dan Ilmu pengetahuan alam.
XVIII	=	Ilmu pengetahuan tanah.
XIX	=	Ilmu kedokteran.
XX	=	Pertanian. Peternakan. Perikanan. Kehutanan. Ilmu tumbuh2an.
XXI	=	Perniagaan dan Perhubungan.
XXII	=	Ilmu teknik.
XXIII	=	Ilmu ketentaraan.
XXIV	=	Ilmu perkapalan dan penerbangan.
XXV	=	Pengetahuan buku-buku dan Ilmu perpustakaan. Bibliografi.
XXVI	=	Pengetahuan mata-uang dan Tanda-djasa. Pengetahuan keturunan, Tanda pusaka dan Lambang.
XXVII	=	Peta-peta.

* *
*

7. PERKEMBANGAN KEPANDUAN DI JOGJAKARTA

Timbulnja Kepanduan di Jogjakarta

HAMPIR bersamaan waktunja, pada permulaan tahun 1922 di Jogjakarta dibentuk: Nationale Padvinderij dibawah pimpinan Daslam Adiwarsito; Wiro Tamtomo dengan promotornja A. Zarkasi; Hizbul Wathan, diasuh oleh Djumaeni; Hizbul-Anzor dengan Muslimin almarhum sebagai pemukanja dan Sarekat Pemuda dibawah komando Soejar. Pun disini terdapat djuga tjabang De Nederlands Indische Padvinders-Vereniging jang pusatnja berada di Betawi (batja: Djakarta!), tetapi djumlah anggautanja dari bangsa kita sangat terbatas.

Sudah barang tentu haluan dari tiap-tiap kepanduan tersebut tidak dapat menjimpang dari pada induk organisasinja. Maka inilah pula sebabnja kepanduan Indonesia selama djaman pendjadjahan selain ditjap „dengan dasar jang tidak baik", karena menjalahi tudjuan kepanduan jang diandjurkan oleh pemerintah kolonial dulu, terangnja, tidak sama dengan N.I.P.V.!

Pertumbuhannja.

Sesudah perkumpulan-perkumpulan peladjar jang hampir semuanja berpusat di Djakarta a.l. Jong-Java, Jong Indonesia, Jong Islamietenbond, membentuk bagian kepanduan sendiri-sendiri, ditempat-tempat dimana ada tjabang-tjabangnja perkumpulan itu dengan sendirinja berdiri bagian kepanduannja.

Tjabang-tjabang dari perkumpulan Jong-Java, Jong Indonesia, J. I. B. di Jogjakarta djuga tidak ketinggalan membentuk kepanduannja. Sampai pada achir tahun 1929 di Jogjakarta terdapat kepanduan-kepanduan.

1. Nationale Padvinderij (achirnja meluluhkan diri kedalam NIPV.)
2. Sarekat Islam Afd. Padvinderij (pendjelmaan dari Wiro Tamtomo)
3. Hizbul Wathan.
4. Indonesisch Padvinders Organisatie (peleburan dari J.I.P.O. dan N.P.O.)
5. Pandu Kebangsaan (gantinja J.J.P.)
6. Nationaal Islamietische Padvinderij (Natipij).
7. Al - Kasjaaf.
8. Tri Darma (dari golongan Protestan).
9. Kepanduan Anak Katholik Indonesia (K.A.K.I.).
10. N. I. P. V.

Kepanduan Sarekat Pemuda dan Hizbul Ansor terpaksa bubar karena organisasinja selalu mendapat rintangan dari pihak jang berwadjib. Dengan berdirinja K. B. I. dalam tahun 1930 **di Djakarta** tjabang I.N.P.O. dan P.K. mendjadi K.B.I. (Kepanduan Bangsa Indonesia) tjabang Jogjakarta.

Dari sekian banjaknja perkumpulan kepanduan Indonesia jang ada di Jogjakarta dapat kita bagi mendjadi tiga golongan menurut azasnja sendiri-sendiri; keagamaan, kebangsaan dengan kerdja-sama dengan kepanduan Belanda.

Kaum Puteri dengan Kepanduan.

Dikalangan peladjar puteri jang ikut dalam perkumpulan banjak djuga jang terdjun dalam kepanduan.

Bahkan tidak hanja terbatas pada kaum peladjarnja: Beberapa orang guru puteri memimpin ikut aktip memandu. Di Jogjakarta jang terkenal sebagai pelopor-pelopor pandu puteri a.l. Siti Rachmah, Hafnizarah, Ismudiati, Mugarumah (alm.) dan tidak terlupakan Bu Roeswo. Malah beliau sampai detik ini masih tetap berketjimpung dikalangan K.B.I.

Jang pantas ditjatat karena besarnja bantuan moreel para penghuni „internaat" Wisma Rini Taman Siswa di Jogjakarta.

Sumber kekuatan.

Suatu keuntungan bagi kemadjuannja pergerakan pemuda di Jogjakarta termasuk kepanduannja, bahwa disini banjak berdiam bapak-bapak pemimpin rakjat seperti: Mr. Soejoedi, Ki Hadjar Dewantara, Roedjito, B.P. Soerjodiningrat, Gondoatmodjo almarhum, Dr. Soekiman, Tjokroadikusumo alm. dan masih banjak lagi. Beliau-beliau inilah jang mendjadi pendukung dan pendorong, sumber segala kekuatan lahir dan batin bagi hidupnja pergerakan pemuda di Jogjakarta umumnja.

Daerah jang subur bagi benih „persatuan"

Tjita-tjita Indonesia Bersatu, jang dilahirkan dimedan Kerapatan Besar Pemuda di Djakarta pada 28 Oktober 1928 dengan pernjataannja: Satu Bangsa, Satu bahasa dan satu Tanah-air Indonesia, disambut oleh kepanduan-kepanduan di Jogjakarta dengan mendirikan sebuah „Contact-lichaam" bernama: Badan Persaudaraan Kepanduan Mataram (B.P.K.M.).

Putusan 28 Oktober itu pun djuga mempertjepat proses peleburan tiga Kepanduan Indonesia jang berpusat di Djakarta, jaitu P. K., I. N. P. O. dan P.P.S. (Pandu Pemuda Sumatera) mendjadi: Kepanduan Bangsa Indonesia (K.B.I.) pada 30 September 1930. Tidak lama kemudian di Djakartapun dibentuk Badan-Persaudaraan antara Kwartir-kwartir Besar Kepanduan-kepanduan Indonesia bernama Persaudaraan Antara Pandu Indonesia (P.A.P.I.), jang disusul dengan andjuran, supaja ditempat-tempat dimana ada kepanduan jang induk-organisasinja mendjadi anggauta P.A.P.I. bersama-sama membentuk tjabang P.A.P.I. atau Papi-daerah.

Bagi Jogjakarta adalah sangat mudahnja, jaitu dengan mengganti nama . B.P.K.M. didjadikan P.A.P.I.M. (Persaudaraan Antara Pandu Indonesia Mataram).

Tidak luput dari rintangan pihak pemerintah kolonial.

Sudah djamaknja pergerakan rakjat djadjahan tentu mendapat rintangan dari jang mendjadjah. Termasuk kepanduannja. Larangan jang sangat berat dirasakan dikalangan kepanduan, umpamanja: tidak boleh mengadakan apiunggun, pandu-pandu dilarang berbaris, pada waktu latihan tidak boleh mengibarkan bendera Merah-Putih, tidak boleh menjanjikan lagu Indonesia Raja, dilarang berziarah kemakam-makam pahlawan dan lain-lain sebagainja. Pendekkata: segala tindakan dan utjapan jang meresapkan dan menebalkan perasaan dikenakan larangan. Memang dari pihak jang berwadjib ada tendens akan meniadakan kepanduan-kepanduan jang berazas kebangsaan. Ini semua dialami oleh kepanduan-kepanduan di Jogjakarta.

Apa hasilnja?

Dengan adanja larangan-larangan itu bahkan kepanduan tidak makin mundur melainkan madju terus! Hubungan antara para pemimpin di Jogjakarta dengan jang ada di Djakarta erat sekali.

Guna melandjutkan tjita-tjita persatuan jang telah dirintis oleh P.A.P.I., maka pada 30 April 1938 oleh Pucjuk Pimpinan K.B.I., S.I.A.P., Natipij dan Hizbul Wathan diadakan konperensi bertempat di Solo. Rentjana-kerdja pembikinannja diserahkan kepada pemimpin-pemimpin di Jogjakarta.

Pertemuan bersama ini berhasil membentuk : Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia disingkat B.P.P.K.I. Jang dipilih mendjadi Ketua dari badan federatif Sjamsu Harya Udaya, pada waktu itu masih mendjadi peladjar Taman - Siswa di Jogjakarta.

Dalam bulan Desember tahun itu djuga Pengurus B.P.P.K.I. mengadakan perundingan lagi di Solo dengan wakil-wakil Kwartir Besar J.P.O., H.W., K.A.K.I., Al Wathoni, dan Taruna Kembang. Kepanduan-kepanduan ini bukan anggauta dari B.P.P.K.I.

Langkah-langkah B.P.P.K.I. selandjutnja .

Sampai pada bulan Pebruari 1941 anggauta B.P.P.K.I. bertambah dengan masuknja : K.I.I., Hizbul Wathon Islam, Sinar Pandu Kita. Al Wathoni dan K.A.K.I. sedang H.W. dan K.M.I. tinggal menunggu putusannja.

Tepat pada hari ulang tahun keIII tanggal 11 Pebruari 1941 dalam konperensinja di Solo B.P.P.K.I. menetapkan peraturan rentjana pekerdjaan sbb. :

1. Semua kepanduan Indonesia telah masuk dalam badan federasi.
2. Untuk menetapkan peraturan-peraturan dan pembulatan organisasi, akan dibentuk satu panitya istimewa.
3. Merah-putih diakui sebagai bendera persatuan federasi.
4. Mengusahakan agar hanja ada satu matjam aba-aba (komando) untuk seluruh kepanduan.
5. Mengadakan perkemahan besar jang dinamakan : Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum atau PERKINO (U dalam edjaan : OE) di Jogjakarta pada bulan Djuli 1941 ; untuk mengatur Perkino ini dibentuk satu panitya persiapan.
6. Perkino hanja boleh diikuti oleh kepanduan-kepanduan Indonesia jang tidak menggabungkan diri dalam N.I.P.V.
7. Menetapkan Pengurus harian B.P.P.K.I. tetap jang terdjadi dari wakil-wakil K.B.I. (Ketua), S.I.A.P. (Penulis) dan Natipij (Bendahari).

Melihat putusan B.P.P.K.I. diatas sudah terang bagi kita semua, bahwa kalangan kepanduan tidak mau ketinggalan dengan gerakan pemuda lainnja, didalam usaha mewudjudkan tjita-tjita bangsa.

Perkino dan hasilnja.

Sebagaimana telah diputuskan dalam konperensi B.P.P.K.I. di Soli itu, maka PERKINO djadi diusahakan pada bulan Djuli 1941 di Jogjakarta. Perkemahan umum ini diikuti oleh 1500 pandu selama empat hari. Diwaktu pandu-pandu mengadakan perlombaan dan demonstrasi, para utusan mengadakan sidang untuk membitjarakan rentjana pekerdjaan jang selandjutnja akan didjalankan bersama. Pertemuan pemimpin ini dapat mengambil putusan :

1. Untuk menghindari kesulitan bentuk organisasi B.P.P.K.I. buat sementara waktu tidak berubah.
2. Membentuk Jajasan Perkino (Perkino-Stichting).
3. Mempersatukan tjara permainan dari bagian tehnik.
4. Mempersatukan pakaian pandu dan mengadakan lentjana tanda persatuan.
5. Mengadakan peraturan umum.
6. Menetapkan satu matjam komando.
7. Membentuk Pengurus B.P.P.K.I. baru dengan susunan : Ketua wakil dari K.B.I., Penulis dari K.A.K.I., Bendahari dari Natipij, sedang Panitya Tehnis dibawah pimpinan S.I.A.P.
8. PERKINO ke II akan dilangsungkan dalam tahun 1944.

Putusan-putusan diatas belum lagi dapat dikerdjakan, karena terhalang petjahnja perang Asia Timur Raya, jang mengakibatkan gantinja keadaan diseluruh tanah air kita.

Kepanduan Indonesia dalam masa pendudukan Djepang.

Pada permulaan bulan Maret 1942 Balatentara Djepang dengan tjepat dapat menaklukkan Hindia Belanda dan menguasai seluruh daerahnja. Empat bulan kemudian oleh Pemerintah Balatentara dikeluarkan larangan berdirinja segenap partai dan organisasi rakjat Indonesia.

Sungguhpun demikian pandu-pandu tidak berputus asa. Pada tanggal 6 Pebruari 1943 berhasil mengadakan PERKINO ke II di Djakarta.

Tetapi ternjata Pemerintah Militer Djepang sudah mempunjai rentjana tertentu. Gerakan kepanduan kita tidak boleh dilangsungkan. Dan sebagai gantinja pemuda dan anak-anak kita dimasukkan dalam gerakan Keibodan dan Seinendan.

Kepanduan di Indonesia sesudah 17 Agustus 1945.

Tidak lama setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berkobarlah api revolusi meliputi tanah-air kita. Seluruh rakjat, tua dan muda, bergerak serentak. Segala rintangan jang menghalangi kemerdekaan jang telah kita miliki itu dihantjur luluhkan............

Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.

Bekas pendjadjah Djepang jang masih ada ditengah-tengah kita, kekuasaannja harus diserahkan kepada bangsa kita, djika perlu dengan kekerasan. Kemauan jang bergelora timbul dari rakjat sendiri dengan sangat hebatnja. Karena itu, maka pertempuran tidak dapat dielakkan lagi. Disana sini meletus dengan dahsjatnja.

Pada saat-saat itu pula pandu-pandu kita, dan Putera jang telah tersebar dikalangan masjarakat, ikut serta berdjuang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara kita. Ada jang membantu digaris belakang, ada jang ikut kefront sebagai anggauta Palang Merah Indonesia serta banjak pula jang memanggul senapan.

Bung Tomo, salah seorang pandu kita tingkat I, jang belum banjak djumlahnja dikalangan kita, muntjul sebagai „Djenderal" Barisan Pemberontak Rakjat Indonesia sangat disegani oleh musuh kita.

Banjak kawan-kewannja pandu jang ikut dalam barisannja.

Diluar Djawapun perebutan kekuasaan dari tangan bekas pendjadjah tidak kurang seramnja, Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali „old Scout" kita tidak mau ketinggalan dengan saudara-saudaranja di Djawa dan ikut mengambil bagian dalam pergolakan rakjat menentang musuh kemerdekaan. Banjak pandu kita mendjadi korban, djatuh sebagai „Bunga Bangsa" didalam menunaikan djandjinja terhadap Nusa dan Bangsanja.

Pandu Rakjat Indonesia berdiri.

Dalam keadaan revolusi inilah dikalangan bekas pemimpin pandu timbul tjita-tjita untuk menghidupkan kembali adanja organisasi kepanduan Indonesia. Tetapi bentuk dan sifatnja harus berlainan dengan kepanduan pada zaman pendjadjahan dahulu, sesuai dengan kehendak masa dan tiada lagi terpetjah belah.

Demikianlah, maka pandu-pandu harus bersatu dalam tekad dan langkahnja untuk ikut memenuhi panggilan Pertiwi.

Pada achir bulan September 1945 berkumpullah beberapa orang bekas pemimpin pandu di Jogjakarta, digedung „Balai Mataram", jang sekarang tinggal riwajatnja sadja. Jang datang pada pertemuan itu ialah para pemimpin pandu dari H.W., K.B.I., S.I.A.P., Natipij, Tri Darma, K.A,K,I, dan P,K,

Putusan pertemuan itu jang terpenting a.l. ialah:

1. Membentuk Panitya Kesatuan Kepanduan Indonesia.
2. Mengandjurkan terbentuknja Satu organisasi kepanduan untuk seluruh Bangsa Indonesia.
3. Mendirikan sebuah Panitya Pekerdja untuk melaksanakan andjuran itu.
4. Mengadakan selekas mungkin Kongres Kepanduan Indonesia.

Inisiatip Panitya Kesatuan Kepanduan Indonesia ini diperkuat dengan kedatangan: Soebagio, Koenia dan Dr. Soetarman dari Djakarta dalam penindjauannja keseluruh Djawa untuk maksud jang sama. Antara Panitya dan kawan-kawan dari Djakarta itu diadakan pembagian pekerdjaan. Jang pertama membuat rentjana penglaksanaan putusan Panitya, sedang tiga kawan itu diserahi mengadakan kontak dengan pandu-pandu jang tersebar dan dengan instansi-instansi untuk, bilamana diperlukan, minta pertolongan dan bantuannja.

Panitya di Jogja mengadakan hubungan dengan teman-teman pandu di Solo, jang ternjata telah siap menerima adjakan itu. Diputuskan bahwa Kongres Kepanduan Indonesia akan diselenggarakan dikota Bengawan selama tiga hari dan akan didjatuhkan pada tgl. 27 sampai dengan 30 Desember 1945.

Seruan kepada segenap pandu disiarkan dengan perantaraan Radio Republik Indonesia Jogjakarta serta dibawakan pandu - pandu jang mendjadi koerir kegaris-garis pertempuran supaja berita itu diketahui oleh kawan-kawan pandu jang sedang ikut berdjuang difront.

Maka, tepat pada saat Kongres akan dimulai, datanglah berdujun-dujun pandu-pandu dari segala tempat menudju kekota Bengawan. Dari Djawa Timur ada jang datang dengan truck, jang mereka rampas sendiri dari musuh. Mereka bersendjata lengkap pula tiada bedanja dengan tentara kita, hanja didadanja tertjantum lentjana pandu. Tidak hanja sekian semangat pandu-pandu kita. Bahkan pandu-pandu kita jang datang dari front Mranggen, Srondol dan sekitarnja banjak jang datang dengan berdjalan kaki sadja, perdjalanan mana memakan waktu dua hari. Mereka memerlukan datang pula karena taat kepada seruan bekas Putjuk Pimpinannja masing-masing dan setia kepada sembojannja: „Sekali Pandu, Tetap Pandu". Pandu-pandu dari Djawa Barat datang membontjeng kereta api malam. Berpuluh-puluh jang datang dari Bandung, Djakarta, Bogor, Tjirebon dan lain-lain tempat. Amat disajangkan bahwa pandu-pandu dari Madura dan Banten tak dapat mengirimkan utusannja, karena pada waktu itu perhubungan dengan kedua daerah tersebut diatas terputus. Mereka jang hadir dalam Kongres itu ialah pandu-pandu dari kalangan bekas: H.W., K.B.I., Natipij, I.P.O., S.I.A.P, K.A.K.I., Taruna Kembang, Tri Darma, Al Wathony, K.M.I., Hizbul Islam, K.I.I., Sinar Pandu Kita, K.R.I., P.K., P.I., Pandu Pasundan, jang semuanja berdjumlah lebih kurang 300 orang, pandu dan pemimpin.

Pada tanggal 28 Desember 1945 itulah, „Ikatan diterima". Telah diambil putusan dengan suara bulat oleh Kongres itu: mendjelmakan suatu organisasi kepanduan Indonesia baru, jang sifat dan udjudnja: Kesatuan dengan nama: Pandu Rakjat Indonesia.

Dalam upatjara pelantikan jang dipimpin oleh Dr. Moewardi alm. dengan diikuti oleh segenap hadirin Kongres, keluarlah „Djandji Ikatan Sakti" dengan tulus ichlas dari mulut, terdorong oleh niat jang sutji dari hati nurani, tiap-tiap pengundjung, menembus suasana hening - wening didalam dan di sekitar pertemuan itu, jang berbunji:

1. Melebur segenap perkumpulan kepanduan Indonesia dan didjadikan satu organisasi kepanduan: Pandu Rakjat Indonesia.
2. Tidak akan menghidupkan lagi kepanduan jang lama.
3. Tanggal 28 Desember diakui sebagai Hari Pandu bagi seluruh Indonesia.

4. Mengganti setangan leher jang beraneka warnanja dengan warna hitam.

Selandjutnja diputuskan oleh pertemuan itu bahwa, hal permainan pandu buat sementara diserahkan kepada kebidjaksanaan para pemimpin masing-masing. Petundjuk permainan pandu akan direntjanakan sambil menunggu bahan-bahan dari daerah-daerah dan tjabang-tjabang, berdasarkan pengalamannja masing-masing selama setahun jang akan datang.

Setelah berdjalan setahun

Pada achir bulan Desember 1946 berlangsunglah Kongres Pandu Rakjat Indonesia ke I di Surakarta.

Selama setahun tidak banjak soal-soal jang dihadapi oleh Pandu Rakjat Indonesia. Tindakan Putjuk Pimpinan terutama ditudjukan untuk memperkuat organisasi kedalam. Sesuai dengan putusan-putusan jang telah diambil didalam pendirian Pandu Rakjat Indonesia. Mengingat suasana revolusi sedang menghebat diseluruh tanah air, kita tidak perlu banjak bitjara. Hasil pekerdjaan P.B. jang telah tertjapai selama setahun antara lain ialah :

1. Didapatnja pengesahan Pandu Rakjat Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia.
2. Membentuk anggaran dasar, rentjana - rentjana tehnis untuk dipakai sebagai tuntunan ditjabang-tjabang.
3. Mengkonsolidir tjabang-tjabang Pandu Rakjat Indonesia diseluruh Djawa, dengan mengadakan kundjungan anggauta Kwartir Besar ke tjabang-tjabang.
4. Mengatur hubungan dengan tjabang-tjabang diluar Djawa (Sumatera) dengan perantaraan radio telefoni.
5. Mengadakan latihan pemimpin Pandu Rakjat jang pertama kali dengan diikuti oleh kurang lebih 70 orang dari hampir seluruh Djawa di Ambarwinangun (Jogjakarta).

Ada suatu soal lagi jang perlu diketahui dan telah dibitjarakan djuga dalam kongres itu, ialah soal hubungan kepanduan dengan Biro Kepanduan Internasional di London.

Dalam prisipnja, Pandu Rakjat setudju masuk mendjadi anggauta dari Biro itu. Tetapi perlu diingat, bahwa masuk kita kedalam gabungan itu bukan semata-mata tudjuan, melainkan kita akan meperlihatkan kepada dunia luar, bahwa pandu-pandu Indonesia pun tidak terkebelakang dalam mengedjar tjita-tjita peri kemanusiaan seperti apa jang mendjadi idam-idaman Bapak Pandu seluruh dunia : Lord Baden Powell.

Minta keuletan tenaga

Tahun 1947 adalah tahun kelandjutan usaha Pengurus Besar. Banjak kesukaran dihadapinja, karena musuh kita mulai memperlihatkan keinginannja akan melenjapkan kemerdekaan jang sedjak dua tahun telah kita rebut kembali.

Belanda membom kota-kota besar kita seperti : Palembang, Medan serta djuga mengadakan serbuan ke Djawa Timur untuk mematahkan semangat kita, tetapi bukan karena itulah semangat perlawanan rakjat untuk mengenjahkan musuh semakin berkobar. Dan ini mentjapai puntjaknja sesudah Belanda terang-terangan menimbulkan perang kolonial (21 Djuli 1947).

Sementara itu masjarakat kita mengalami bermatjam-matjam kesulitan karena adanja pertentangan faham. Didalam keadaan ini sungguhpun langsung tidak ada hubungan dengan organisasi kepanduan namun banjak tjabang-tjabang Pandu Rakjat mengalami kesukaran-kesukaran.

Dr. Moewardi, salah seorang jang merupakan tiang pokok dari Pandu Rakjat terpaksa tidak dapat penuh menjumbangkan tenaganja karena

dibutuhkan oleh organisasi diluar kepanduan. Soeratno Sastroamidjojo, sebagai Ketua P.B. tidak dapat memimpin organisasi sehari-hari, karena berdiam di Magelang, sedang tempat kedudukan Pengurus Besar ada di Surakarta dan Jogjakarta.

Tugas jang diberikan oleh Putjuk Pimpinan di Jogjakarta kepada kawan-kawan di Djakarta antara lain:

1. Mengusahakan berdirinja tjabang-tjabang Pandu Rakjat Indonesia dimana-mana dalam daerah pendudukan,
2. Dalam melaksanakan usaha, sebagai pegangan, dipakai peraturan-peraturan Pandu Rakjat jang telah ada dengan perubahan-perubahan sesuai dengan waktu dan keadaan ditempat itu.
3. Djika kepanduan - kepanduan jang didirikan itu memakai nama Pandu Rakjat Indonesia, maka mereka harus tunduk kepada Putjuk Pimpinan di Jogjakarta,
4. Memperbolehkan kawan-kawan dengan tiada nama Pandu Rakjat Indonesia, asal sadja berdasarkan nasional, untuk turut membantu perdjuangan Republik Indonesia.

Wakil-wakil P.B./Kw. B. mengadakan penindjauan kedaerah-daerah dibagi atas tiga rombongan. Rombongan ke I menindjau daerah Djawa-Barat. Penindjauan hanja sampai ditempat-tempat seperti Purwakarta, Subang, Tjirebon, Tjikampek. Lebih djauh dari tempat-tempat itu sudah tidak mungkin, mengingat gentingnja keadaan disana.

Didaerah-daerah Djawa-Tengah dan Timur, ketjuali Semarang dan Surabaja, jang sudah diduduki oleh Belanda, hampir semua tempat dimana terdapat tjabang-tjabang Pandu Rakjat dikundjungi oleh rombongan penindjau tsb.

Kundjungan sematjam itu terbukti berguna sekali, karena sedjak saat itu hubungan Putjuk Pimpinan dengan tjabang-tjabang bertambah erat.

Djer basuki mawa beja.

Tahun 1948 merupakan waktu jang tersulit bagi Putjuk Pimpinan organisasi.

Dengan adanja serbuan militer Belanda di daerah-daerah Republik sedjak tanggal 21 Djuli 1947, maka hubungan dengan tjabang-tjabang didaerah-daerah jang telah diduduki Belanda terputus jang menjebabkan segala petundjuk jang dikirimkan oleh Putjuk Pimpinan tidak sampai kepada tempat-tempat jang ditudju.

Sungguhpun demikian, dengan tjara-tjara tersendiri, seperti jang biasanja didjalankan oleh pandu-pandu, Kwartir Besar di Jogja dapat selalu mengetahui usaha-usaha teman-teman kita didaerah pendudukan, untuk kepentingan perdjuangan Negara kita, jang didjalankan oleh pandu-pandu disana.

Didaerah-daerah pendudukan bertambahlah djumlah kepanduan dengan nama jang berlainan. Ada jang dinamakan K.P.I., K.B.I., P.P.I., dan sebagainja. Sudah tentu rintangan-rintanganpun mereka djumpai pula. Tetapi berkat keuletan mereka, maka kepanduan-kepanduan itu dapat mempertahankan hidupnja sampai pada saat Belanda menjerahkan kedaulatan kepada Pemerintah kita.

Laporan-laporan jang diterima di Jogjakarta dari tjabang-tjabang, djuga dari luar Djawa, menjatakan, bahwa pandu-pandu banjak jang tewas dimedan bakti sewaktu mereka menunaikan kewadjibannja sebagai anggauta P.M.I., Penghubung, Penjelidik, Pengangkat makanan kegaris depan dan sebagainja.

Di Palembang, Bukit Tinggi, Medan, Bandjarmasin, Samarinda, Makasar, Singaradja dan lain-lain tempat, pandu-pandu kita tak mau ketinggalan dalam kegiatannja mendjalankan kewadjibannja terhadap tanah air dan bangsanja.

Pada tanggal 17 Agustus 1948 terdjadi suatu peristiwa jang sangat menjedihkan, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke III kemerdekaan Indonesia.

Waktu dihalaman gedung Pegangsaan Timur 56 Djakarta diadakan upatjara peringatan seperti dilain-lain tempat serta para pandu kita turut merajakan hari jang bersedjarah itu, sekonjong-konjong diserbu oleh Polisi Militer Belanda. Waktu itu pandu-pandu kita sedang sibuk mengatur tata tertib dibagian belakang gedung Pegangsaan itu, Polisi Militer Belanda jang menjerbu itu melepaskan tembakan dan djatuhlah anak pandu kita: S u p r a p t o — mati karena peluru sendjata sipendjadjah Belanda jang kedjam itu. Soeprapto gugur sebagai Pandu, sebagai Patriot jang memperlihatkan akan ketjintaannja kepada ibu pertiwi.

Didalam menghadapi kesulitan-kesulitan ini, berhasillah pula, Kwartir Besar memadjukan organisasinja dengan usaha :

1. Membentuk Kwartir Pusat Daerah Sumatera dibawah pimpinan Dr. Sahir, berkedudukan di Bukit Tinggi.
2. Mengadakan suatu Badan Penghubung dengan daerah-daerah diluar R. I. dipimpin oleh Dr. Moewardi.
3. Membentuk „voorposten" Pandu Rakjat Indonesia didalam daerah pendudukan di Djawa-Barat dan Timur guna memudahkan hubungan dengan daerah pendudukan diluar Djawa. Djuga diperbatasan garis demarkasi untuk mempertjepat djalannja perhubungan dengan Pusat Pimpinan di Jogjakarta.
4. Melandjutkan penjelenggaraan kursus pemimpin didaerah-daerah Djawa-Barat, Timur dan Tengah.

Perkembangan dan kesulitan Pandu Rakjat.

Belum lagi P. B. dan Kw. B. Pa + Pi mendapat kesempatan untuk melaksanakan segala putusan konperensi dan rapat-rapat lengkap, terdjadilah serbuan militer Belanda jang ke II di Ibu Kota Jogjakarta, jang mengakibatkan terhentinja segala aktivitet kepanduan, dalam arti hubungan pusat dengan tjabang-tjabang.

Delapan bulan pandu-pandu kita terpaksa menghentikan latihannja.

Kalau kita melihat dan mempeladjari perkembangan dan djalannja gerakan kepanduan selama lima tahun ini, dilihat dari sudut organisatoris dan tehnis, maka belumlah dapat dikatakan memuaskan. Tetapi sebaliknja, tidaklah dapat diungkiri, bahwa dipandang dari sudut moreel hasil pendidikan pandu bagi anak-anak memuaskan, Dapatlah kita lihat bahwa sekarang tidak sedikit „Old Scouts" kita jang madju kemuka sebagai pemimpin Negara dengan tidak meninggalkan sifat dan wataknja sebagai pandu. Pula bahwa mereka kini turut memikirkan lagi gerakan kepanduan kita sungguhpun tiada mempunjai kesempatan jang luas. Ini terbukti bila mereka berdjumpa dengan kawan jang masih aktip dalam kepanduan sekarang, selalu menanjakan serta menundjukkan „belangstellingnja"terhadap kepadunan.

Pandu Rakjat mulai berdirinja hingga sekarang terus berusaha untuk menjempurnakan organisasinja. Tetapi selalu terhambat oleh keadaan. Terutama oleh clash ke I, peristiwa Madiun dan clash ke II, jang menjebabkan segala usaha perbaikan selalu terhenti ditengah djalan.

Djuga soal masuk-keluarnja uang organisasi kita sangat buruk. Selama bulan Desember 1946 sampai dengan bulan Desember 1948 uang diterima dari tjabang-tjabang hanja berdjumlah (terbilang dan tertulis) Rp. 300,— (tigaratus rupiah O. R. I. !).

Sedang beaja jang dikeluarkan pada tahun 1947 lebih	Rp.	45.823,—
tahun 1948	„	59.736,—
Djumlah	„	105.559,—

Djadi perbandingan antara uang keluar dan masuk adalah seperti berikut : 105.559 : 300 = ± 351 : 1.

Perlu kiranja diterangkan bahwa, beaja sebesar itu sebagian besar ditutup dengan :

a. Uang sokongan Kementerian P.P. & K.

tahun 1947	Rp.	32.523,—
tahun 1948	„	55.495,—
	Rp.	88.018,—

b. Uang jang diterima d. p. para dermawan.

Dipandang dari sudut organisasi, maka keadaan ini sangat mengetjewakan. Sebab ini bertentangan dengan azas „selfsupporting" (dengan dasar kekuatan sendiri) didalam kepanduan. Seperti keadaan sekarang, maka nasib organisasi kita semata-mata bergantung kepada kebaikan dan kemurahan hati sesuatu pihak atau orang lain. Keadaan ini tak boleh lebih lama dibiarkan, harus ada perubahan.

Lain faktor jang menjebabkan terhambatnja usaha P. B. untuk melaksanakan tjita-tjitanja ialah, kekurangan sendi-sendi jang dapat memuaskan golongan-golongan jang mempunjai dasar lain (dasar agama umpamanja) disamping dasar-dasar kepanduan.

Dalam hal inipun P. B. berusaha menjelidiki kekurangan-kekurangan itu.

Pada tanggal 4 Desember 1949 diadakan pertemuan diantara P.B. dengan wakil bekas organisasi kepanduan, jang telah dilebur mendjadi Pandu Rakjat Indonesia. Mereka adalah orang-orang jang tentunja ikut bertanggung djawab akan baik buruknja organisasi Pandu Rakjat Indonesia. Tetapi pembitjaraan dalam pertemuan itu memberikan kesan bahwa, dalam kalangan kita sendiri timbul aliran-aliran baru, jang pada tahun 1945 tidak nampak. Timbul aliran-aliran itu disebabkan karena perasaan kurang puas dari beberapa golongan jang merasa bahwa kepentingannja tidak atau kurang mendapat perhatian atau tidak diberi kesempatan untuk berkembang.

Dalam Kongres Pandu Rakjat Indonesia Ke II di Jogjakarta, pada pertengahan bulan Djanuari (20, 21 dan 22 Djanuari 1950), jang dikundjungi oleh anggauta-anggauta dari berbagai aliran, telah diputuskan dengan suara bulat bahwa : Pandu Rakjat Indonesia berbentuk kesatuan jang memperhatikan dan memberi kesempatan seluas-luasnja kepada golongan-golongan chusus untuk menjelenggarakan kebutuhan masing-masing.

Didalam meriwajatkan gerakan kepanduan Indonesia tidak boleh kita lupakan adanja golongan pandu puteri jang tidak pernah terlepas sama sekali dari ikatan organisasi kepanduan kita pada umumnja.

Sedari golongan pandu puteri dibentuk, pada zaman K.B.I. hingga sekarang bahagian ini (puteri) diurus oleh puteri sendiri.

Begitulah pula Pandu Rakjat Indonesia. Untuk mengurus soal-soal jang mengenai pandu puteri, dibentuklah Kwartir Besar Puteri disamping, jang sedjadjar dan sederadjat, dengan Kwartir Besar Putera.

Dalam perdjalanannja selama 5 tahun ini, pekerdjaan Kw. B. Pi dapat dibagi dalam tiga tingkatan :

Tingkatan ke	I	:	th 1946 —	clash I
ke	II	:	clash I —	clash II
ke	III	:	clash II —	hingga sekarang.

Pekerdjaan dalam tahun 1946 sampai clash I jang pernah didjalankan ialah :

a. Menjelenggarakan kursus daerah bagi pemimpin puteri di Solo.

b. Menjampaikan instruksi kepada tjabang-tjabang bagian puteri tentang : uniform, tanda-tanda, penggantian nama-nama dengan istilah seperti : Ipuh, Ipri, Wapi, Tjutji dan sebagainja.

c. Mengirimkan sebagian petundjuk permainan kepada daerah-daerah.

d. Selama clash II Kw. B. Pi selalu berusaha mengadakan perhubungan dengan daerah-daerah.

Pada achir bulan Maret 1948 Nj. Soetarman berhenti sebagai Komisaris Besar Puteri dan pimpinan Kw. B. Pi untuk sementara dalam tangan Kajatun, dan Nj. Santo sebagai wakilnja.

Anggauta-anggauta Kw. B. Pa dan Kw. B. Pi bersama-sama mengadakan penindjauan kedaerah-daerah : Solo, Kedu, Pati, Kediri, Jogjakarta dan lain-lain tempat. Ternjata didaerah-daerah itu terdapat banjak pandu puteri jang ikut berdjuang. Diantaranja mereka membantu Palang Marah Indonesia dan mengurus dapur umum.

Melihat ada kekurangan pemimpin-pemimpin puteri didaerah-daerah, maka Kw. B. Pi dan Kw. B. Pa bersama-sama menjelenggarakan kursus pemimpin di Pati, Magelang dan Bandjarnegara. Pula telah disampaikan instruksi kepada tjabang-tjabang tentang : bendera, pakaian dan tanda-tanda.

Dengan adanja serbuan militer Belanda di Ibu Kota Jogjakarta, terputuslah segala hubungan dengan tjabang-tjabang dan organisasi tak bergerak, seolah-oleh mati. Sebagai akibatnja, maka beberapa orang anggauta Kw. B. Pi terpaksa terpentjar.

Guna menghidupkan kembali putjuk pimpinan pandu puteri, maka pada tanggal 22 Agustus 1949 dibentuk Kwartir Besar Puteri Darurat dengan susunan sebagai berikut :

Kom. Besar Umum : Nj. Dr. Santo (Solo).

Kom. Besar Umum : Golongan Penjuluh : Nj. B. Soepomo (dibantu oleh Nj. Soebeno dan Nj. Soepadyo).

Kom. Besar Umum : Golongan Perintis : Nj. E. Soedibjo (dibantu oleh : Nj. Soendhoro dan Nj. Dr. Sahir).

Kom. Besar Umum · Golongan Kurtjatji : Nj. Singgih (dibantu oleh Setiarti).

* *
*

BAHAN-BAHAN GUNA MENJUSUN BAB:

VI. Memelihara dan membangun kebudajaan, antaranja didapat dari:

1. Sdr. Ki Hadjar Dewantara, dari Perguruan Taman Siswa Jogjakarta.
2. Sdr. Prof. Dr. B. Kempers, mahaguru Universitit Gadjah Mada dan Acting Kepala Dinas Purbakala.
3. Sdr. H. Faried Ma'ruf, Kepala Kantor Urusan Agama Daerah Istimewa Jogjakarta.
4. G.P.H. Tedjokusumo, dari Krida Beksa Wirama.
5. Sdr. C. Hardjosubroto, dari Djawatan Kebudajaan Kementerian P.P. & K. Seksi Kesenian.
6. Sdr. J. Katamsi, Direktur A.S.R.I.
7. Sdr. Sri Murtono, dari A.S.R.I.
8. Sdr. Himodigdojo, dari Djawatan Kebudajaan Kementerian P.P. & K. Seksi Kesenian.
9. Sdr. Moh. Djumali, Kepala Seksi Pentjak Kementerian P.P. & K.
10. Sdr. K. R. T. Tirtodiningrat, Kepala Djawatan K.P.P.K. Daerah Istimewa Jogjakarta.
11. Sdr. Prof. Dr. M. Sardjito, Presiden Universitit Negeri Gadjah Mada.
12. Sdr. Prof. Kahar Muzakkir, dari U. I. I.
13. Sdr. Drs. Sumadi, Direktur S. M. A. bag. A.
14. Sdr. Mangkusuparto, Inspeksi S. R. Djawatan P. P. & K. Daerah Istimewa Jogjakarta.
15. Sdr. Sudarminto, dari Madjelis Luhur Taman Siswa.
16. Sdr. R. Sumiakno, dari Perguruan P. I. R. I.
17. Sdr. Patah, Kepala Perpustakaan Negara Jogjakarta.
18. Sdr. R. W. Supardi, Guru Pendidikan Djasmani Daerah.
19. Sdr. Hadisukanto, Kepala Studio R. R. I. Jogjakarta.
20. Sdr. Nn. S. Rogajah, Kepala S. G. K. P.
21. Sdr. Surachmat, Direktur S. G. P. D.
22. Sdr. Dien Wongsodjojo, Kepala Sekolah Guru Puteri.
23. Sdr. Sulardi, Direktur S. M. P. III Negeri.
24. Sdr. Subanu, Direktur B. O. P. K. R. I.
25. Sdr. Sumedi, Direktur S. M. P. V Negeri.

* * *
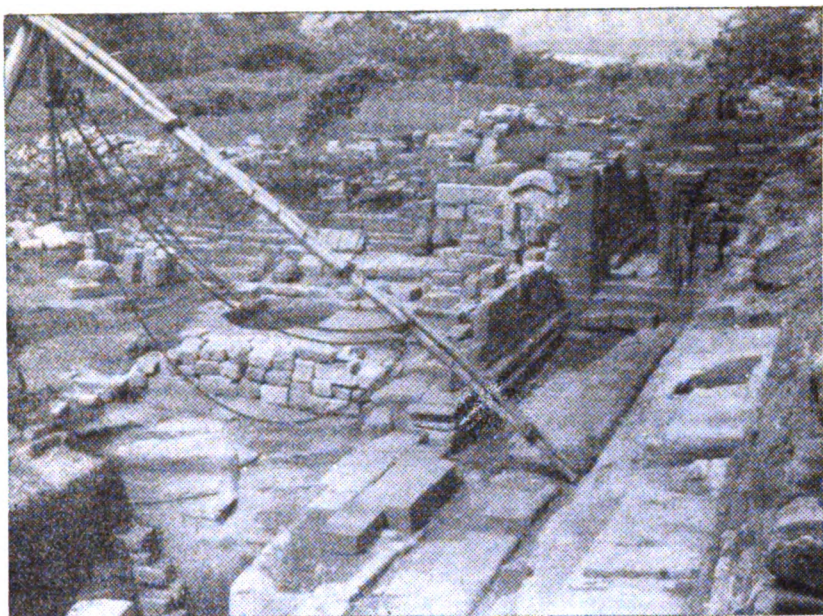
Ratu Boko. Lorong dan gapura jang ditemukan disebelah Timur pendopo.
(Gambar Prof Dr. B. Kempers).
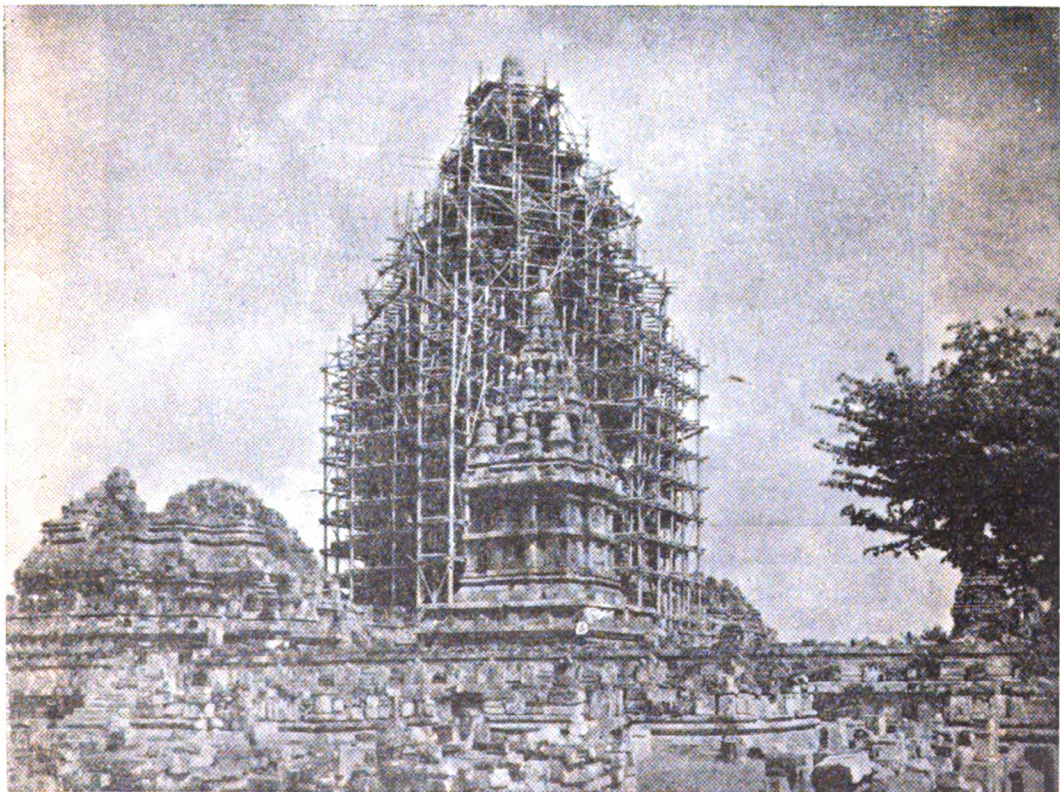
Tjandi Çiwa di Prambanan diselubungi perantjah selama pekerdjaan membina kembali.

Puntjak tjandi Çiwa di Prambanan, 47 m diatas tanah, telah dapat dipasangkan kembali.
(Gambar Prof. Dr. B. Kempers).
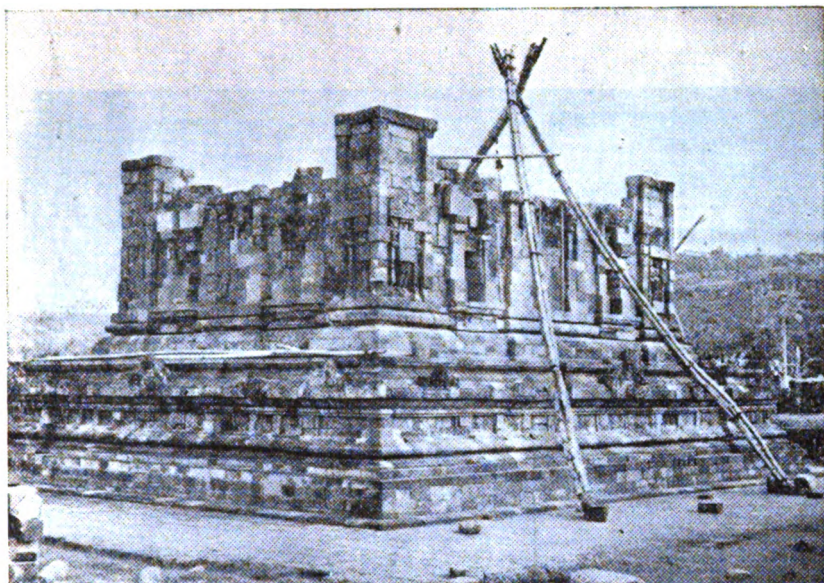
Tjandi Banjunibo (disebelah Selatan Ratu Boko) sedang diusahakan pembinaannja kembali.

(Gambar Prof. Dr. B. Kempers).

Usaha membina kembali salah satu tjandi - tjandi perwara dari kelompok Loro Djonggrang di Prambanan.

(Gambar Prof. Dr. B. Kempers).

Ratu Boko. Penggalian-penggalian penjelidikan disebelah Timur.
(Gambar dari Dinas Purbakala).

BAGAN TERKAÄN
PENATARAN:
'RATU - BAKA'
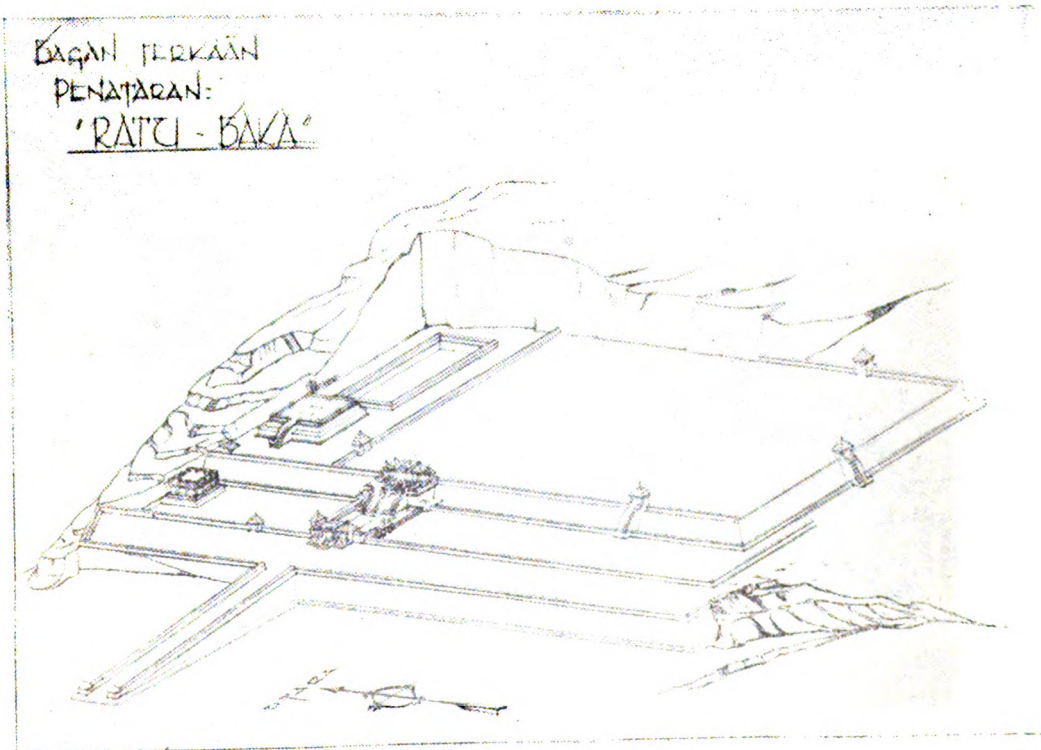
Bagan terkaan penataran „Ratu Boko".
(Gambar Dinas Purbakala).
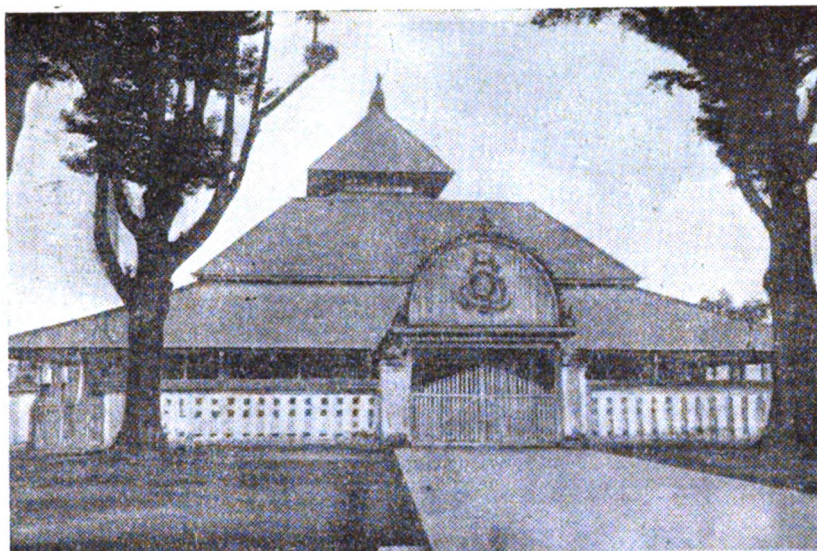
Mesdjid besar di Jogjakarta.

Klenteng di Kranggan Jogjakarta.

Geredja Katholik di Pugeran.

Geredja Protestan Gondokusuman.

G. P. H. Tedjokusumo.
Berpuluh-puluh tahun beliau membimbing seni tari Djawa ke kesempurnaan.

Sekolah tari Krida Beksa Wirama di Jogjakarta.
Miss Anola Ryan dan miss Hilderd Geersz dari Amerika sedang beladjar menari serimpi dibawah pimpinan seorang guru wanita.

Fragmen wajang orang dengan mengambil tjerita Bandjaransari dengan adegan perangnja Djim Manggolojudo melawan Ki Setomo.

Fragmen Srikandi — Larasati, waktu berlomba memanah dalam tjerita „Srikandi maguru manah".
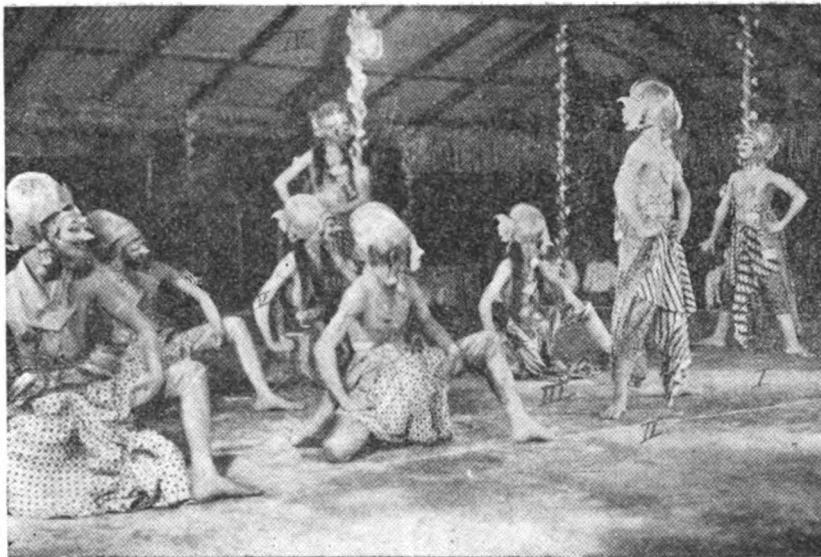
Wajang orang topeng dengan mengambil tjerita babad Singasari.
(Gambar dari Sono Budojo).
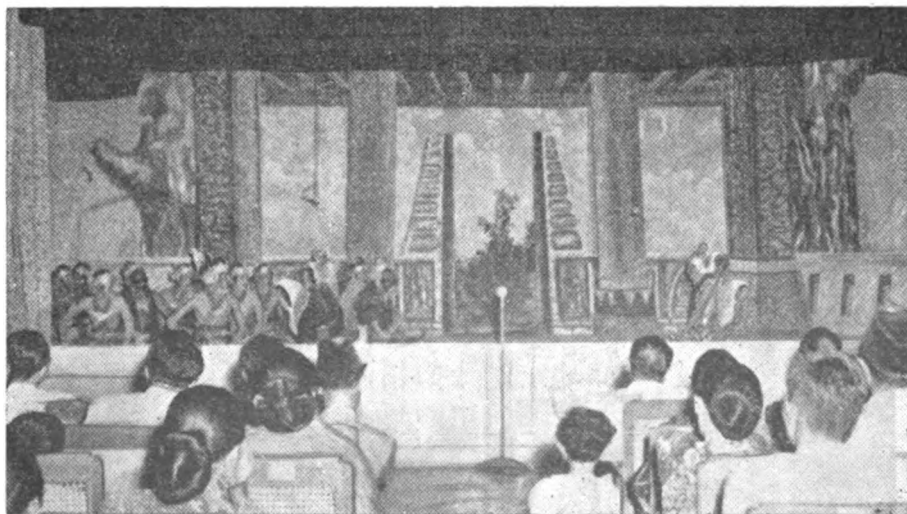
Wajang orang langen mandra wanara. Bedanja dengan wajang orang biasa, ialah bahwa seluruh tariannja dilakukan dengan berdjongkok dan pembitjaraannja dilakukan dengan tembang. Tjeritanja diambilkan dari Ramajana.
(Gambar R. R. I.).

Ujon-ujon Hadiluhung dari keraton Jogjakarta.

Siaran Panggung R. R. I. Jogjakarta dengan atjara : Orkes Radio Jogjakarta dibawah pimpinan Suwandi, sedang mengiringi njanjian biduwanita Mudjiwarti. (Gambar R. R. I.).

Wajang kulit adalah meliputi banjak tjabang kesenian : seni suara, seni lukis, kesusasteraan dan lain-lainnja. Oleh karenanja sangat digemari oleh segenap lapisan penduduk.

Beginilah wajang - kulit sebelum ditjat.
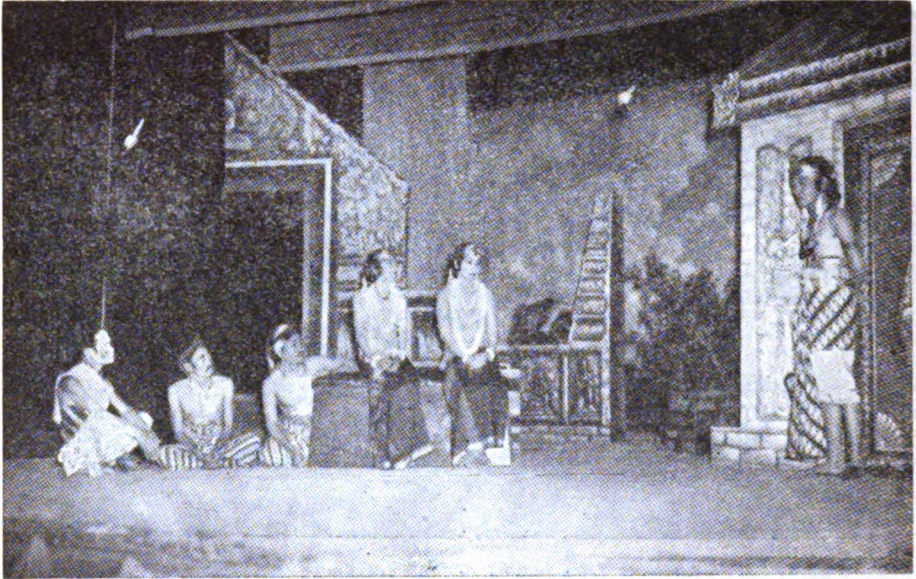
Ketoprak Mataram sedang mempertundjukkan tjerita Damarwulan.
(Gambar R. R. I.).
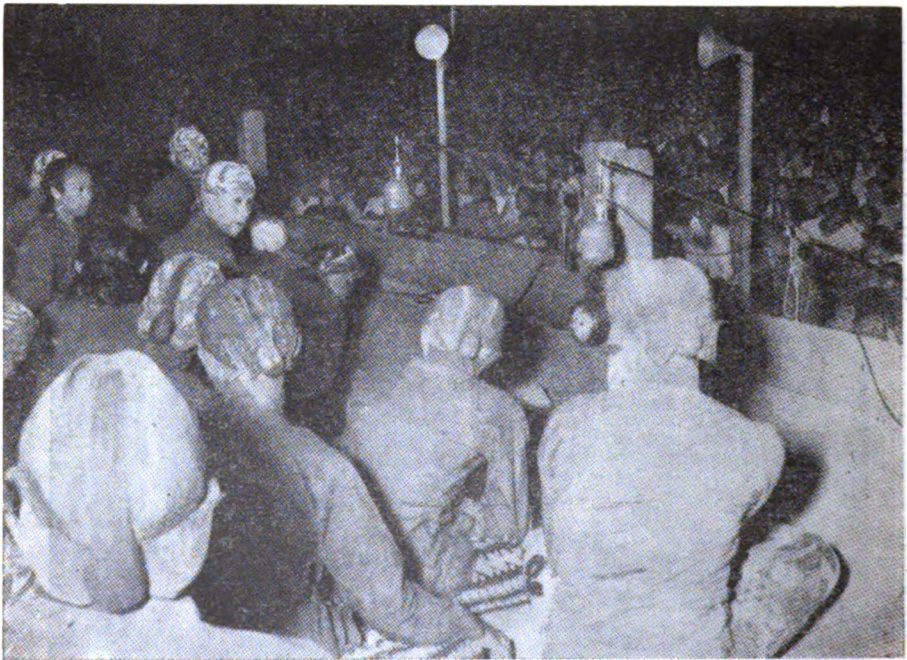
Siaran ketoprak dari Panggung dimuka Studio R. R. I. Jogjakarta, menarik perhatian masjarakat Jogjakarta.
(Gambar R. R. I.).

Dagelan Mataram sedang beraksi.

(Gambar R. R. I.).
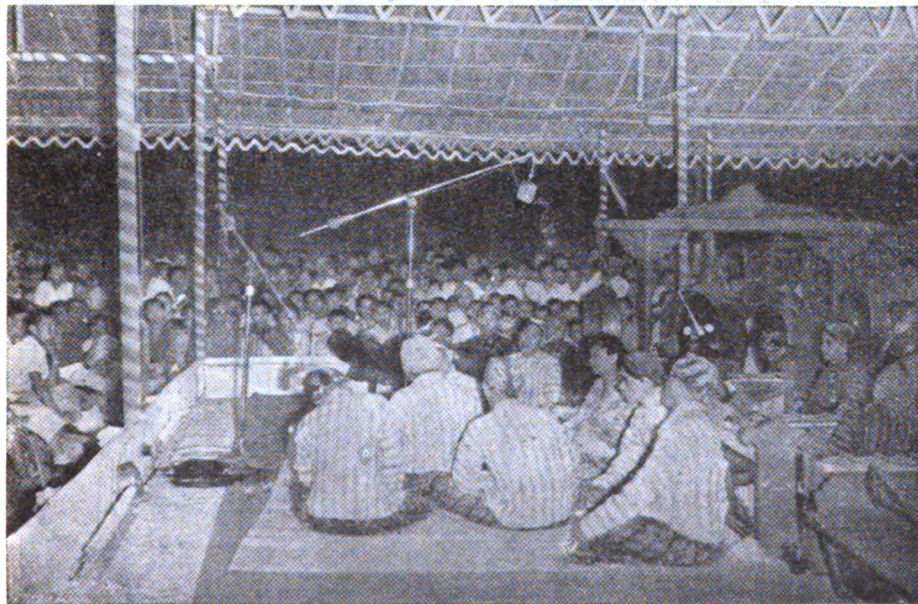
Siaran dagelan dari Panti Kesenian di Aloon - aloon Utara, waktu keramaian Sekaten, selalu dibandjiri oleh penggemar dagelan.

(Gambar R. R. I.).
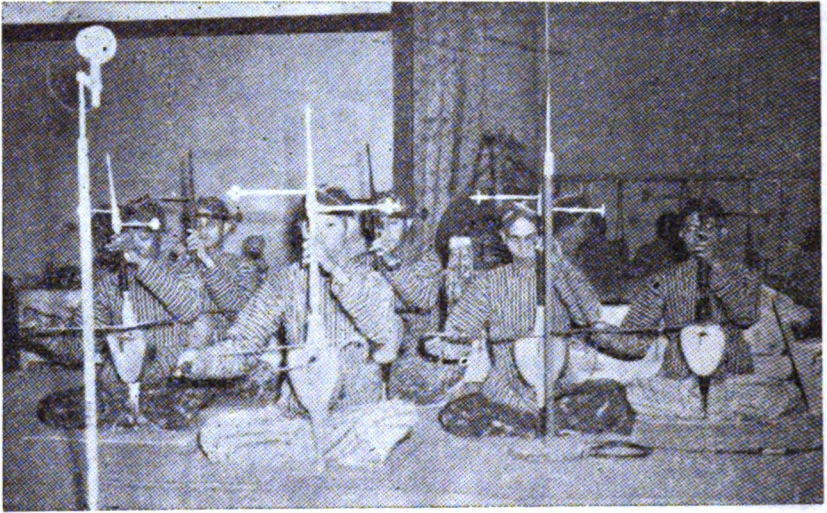
Siaran Panggung Radio R. R. I. Jogjakarta dengan atjara: Demonstrasi memainkan rebab, oleh Keluarga Kesenian Djawa Studio R. R. I. Jogjakarta. (Gambar R. R. I.).

Gamelan Studio R. R. I. Jogjakarta sedang menghidangkan ujon-ujon manasuka, lengkap dengan para „lebda suwara dan warangganania".
(Gambar R. R. I.).

„Poteret diri"
Oleh : Hendra.

„Ibuku"
Oleh : Affandi

„Ibu dan Anak"
Oleh : Rusli.

R. Katamsi Direktur A.S.R.I.
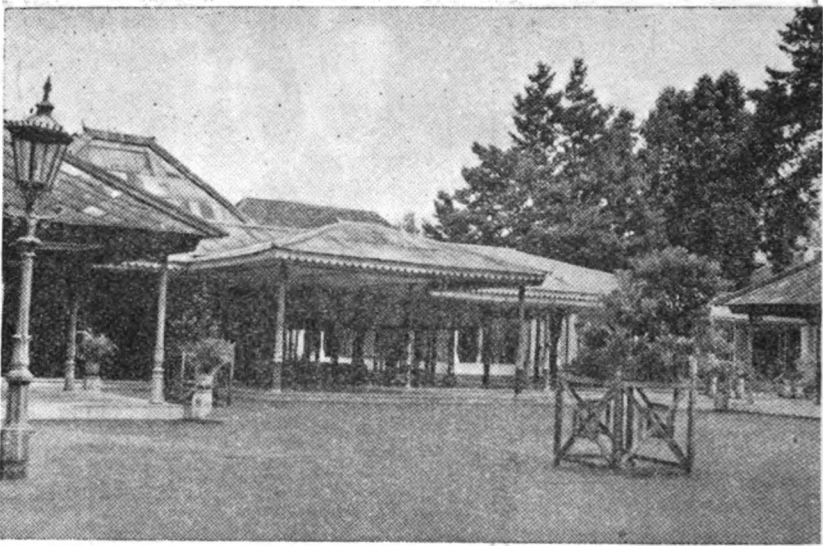
Bangsal Kentjana didalam keraton Jogjakarta.
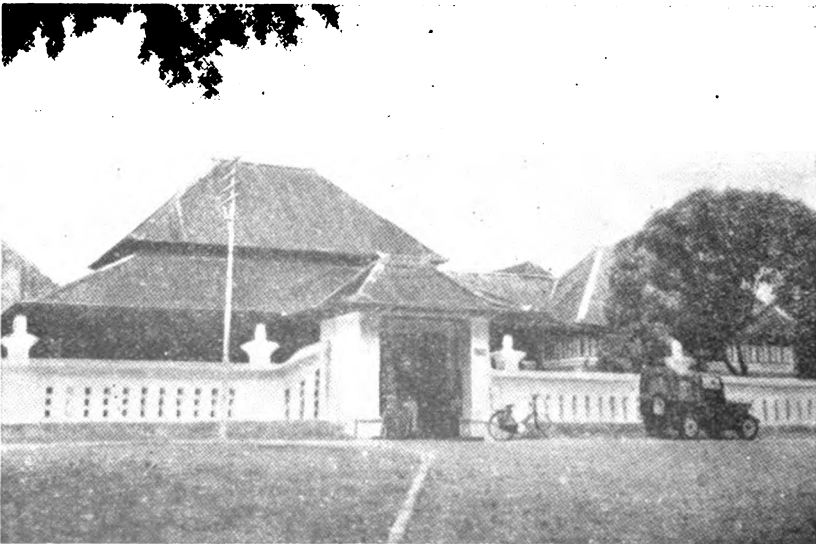
Gedung Sono Budojo di Aloon-aloon Utara.

Pintu gerbang istana Paku Alaman.

Latihan pentjak seorang melawan 3 orang jang bersendjata pisau.

Murid-murid Taman Siswa sedang asjik beladjar pentjak dibawah pimpinan Ki Djoemali.
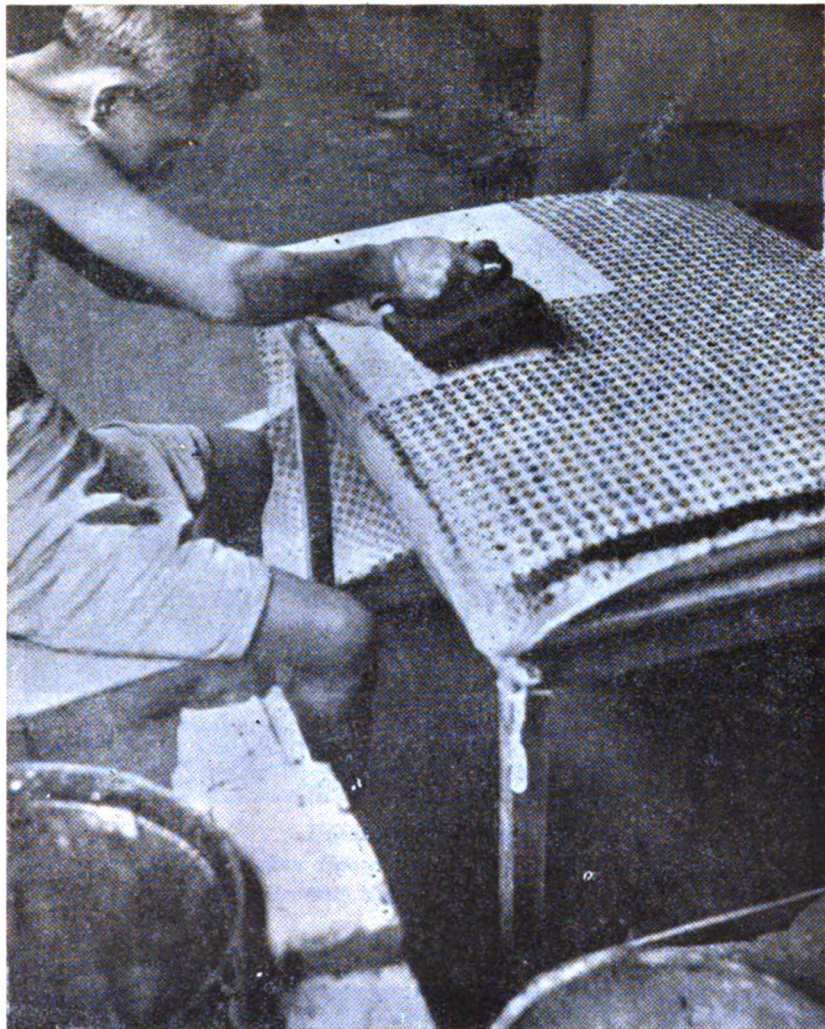
Membikin kain dengan tjap dari tembaga.
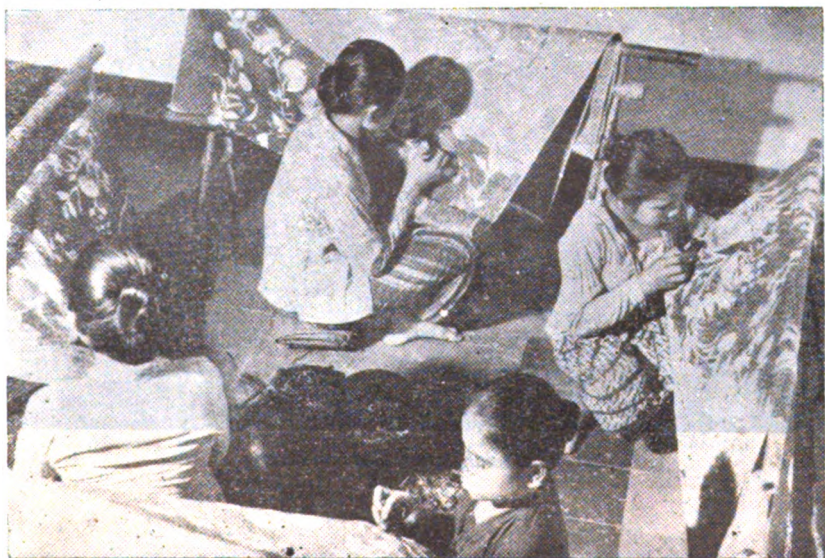
Membatik kain.
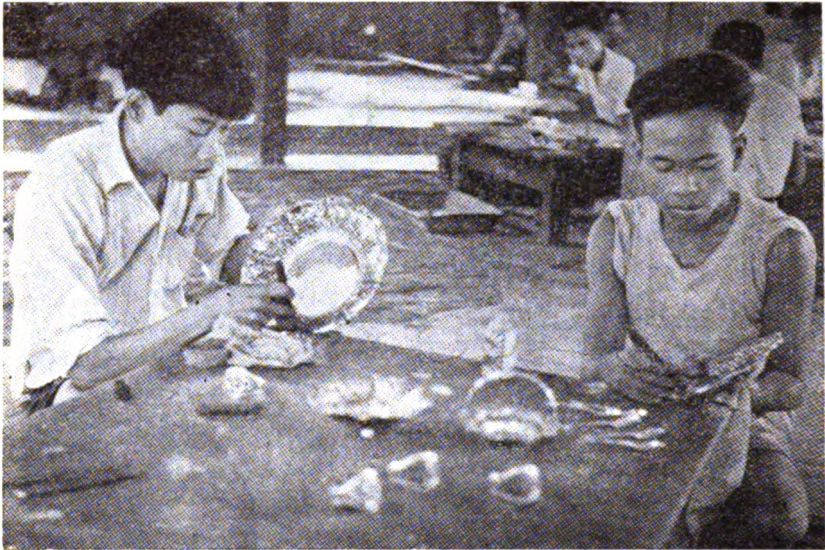
Usaha keradjinan perak di Kota Gede Jogjakarta.
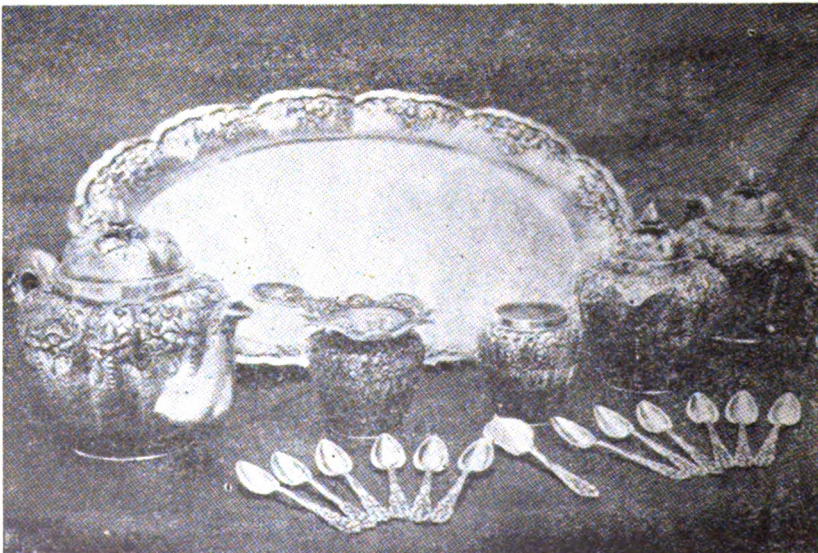
Perak Jogja telah tenar dimana - mana.

Pagelaran Jogjakarta.
Dengan perkenan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sekarang dipakai untuk Universitit Negeri Gadjah Mada.
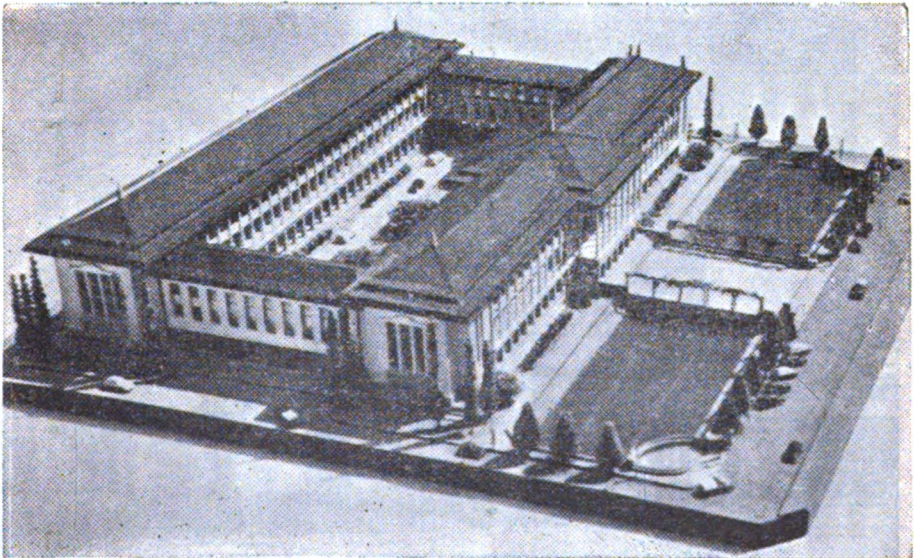
Maquet gedung Universitit Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta.
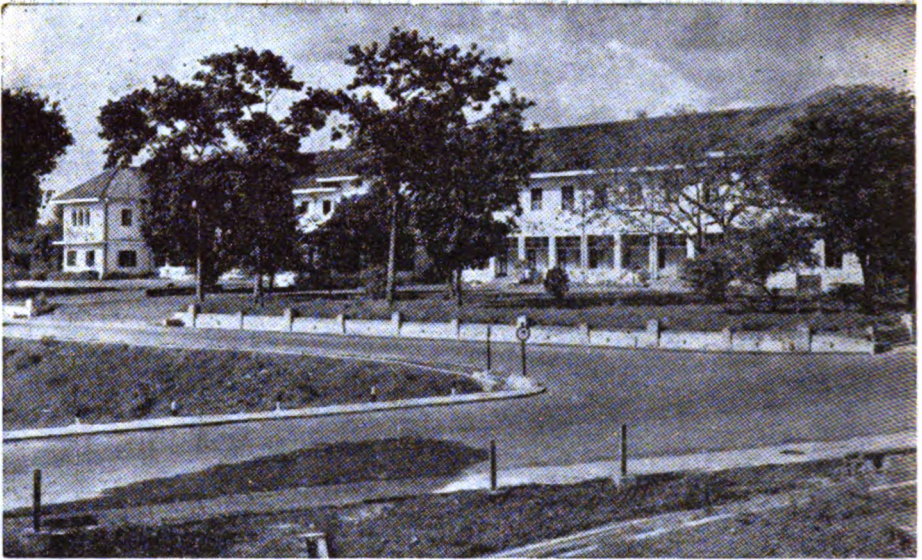
Gedung Seminari „Santo Paoloes" di Djalan Tjode I Jogjakarta.
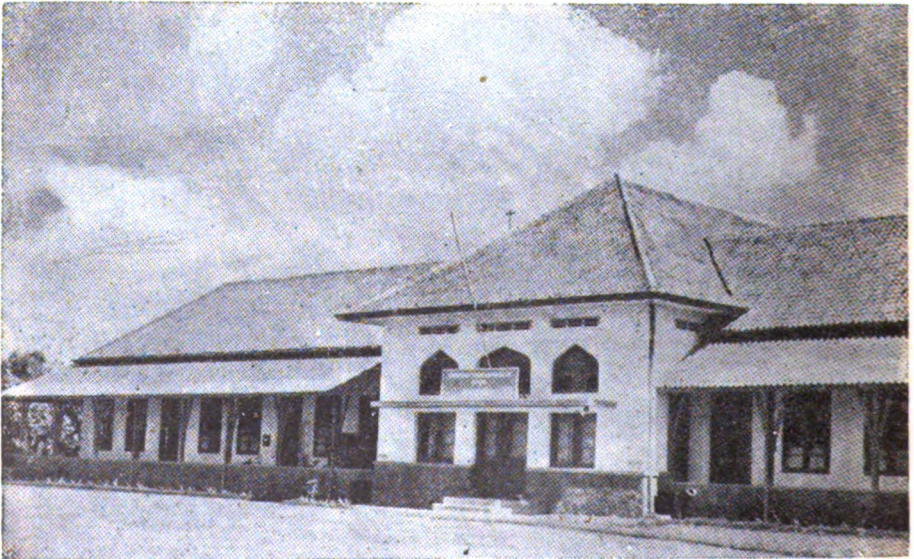
Gedung Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Jogjakarta.

Murid-murid S. G. P. D. sedang berlatih olah - raga. (Gambar Ipphos).

Olah - raga tjampuran dalam bentuk baru jang dapat diiringi dengan gamelan atau musik, djuga diadjarkan di S. G. P. D.

(Gambar Ipphos).
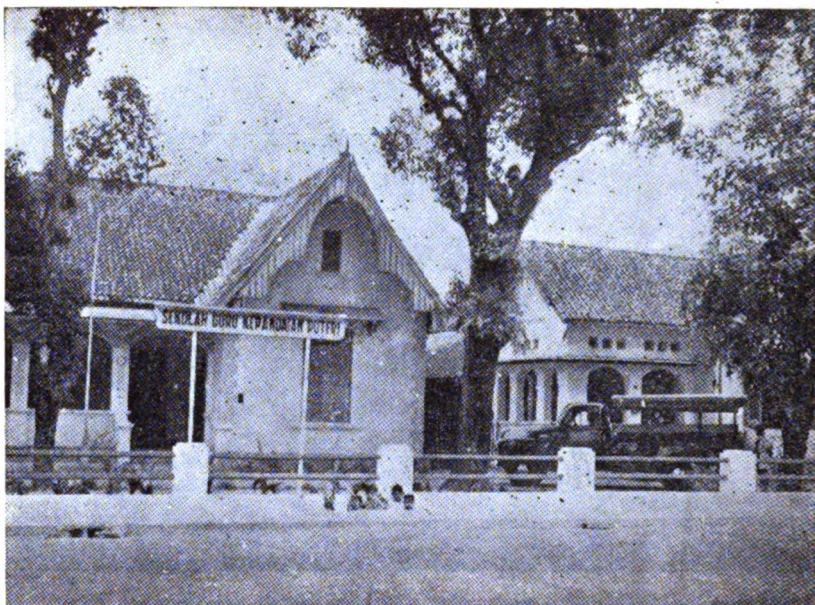
Gedung S. G. K. P. di Lempujang Wangi Jogjakarta.
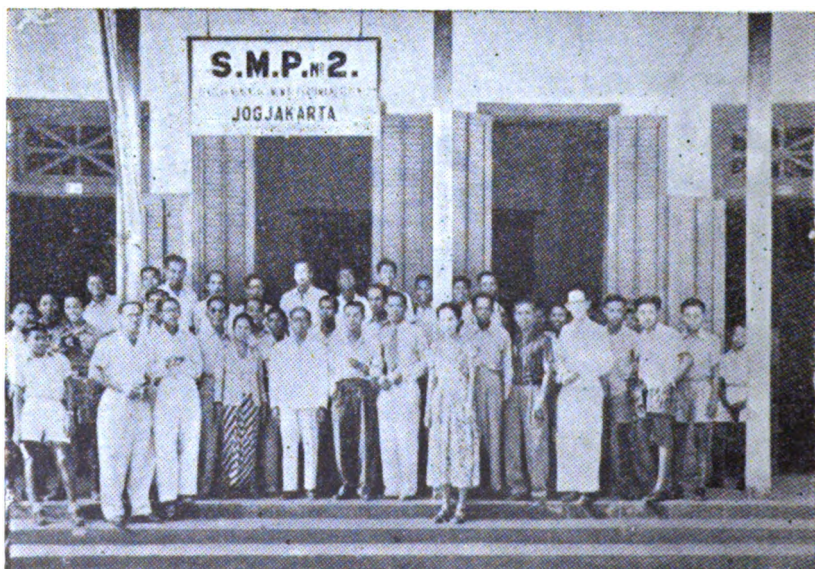
Para guru dan murid dari S. M. P. II di Jogjakarta.
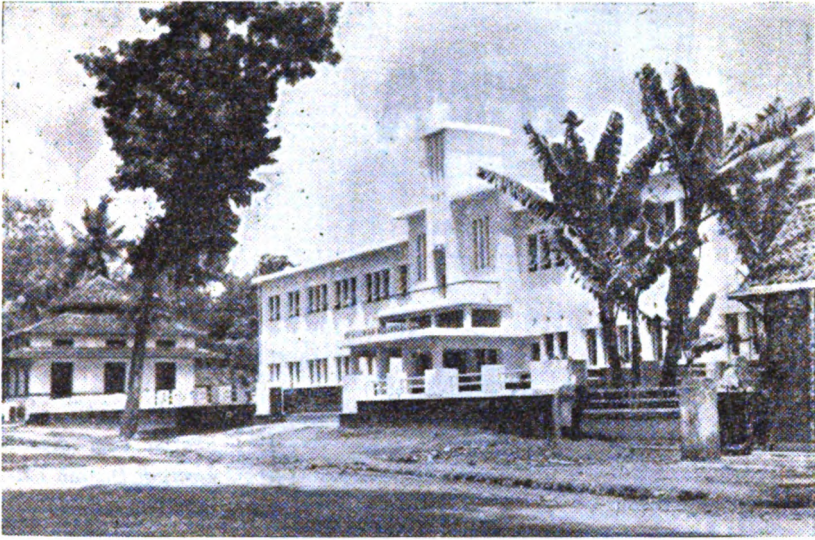
Gedung Mu'alimin telah dapat dibangun kembali.

Pembukaan gedung sekolah Tionghoa di Notojudan pada 10 - 10 - 1948 oleh Ong Tiong Tjoei, Ketua sekolah Tionghoa Jogjakarta. Gedung ini menelan beaja Rp. 2.000.000.

(Gambar Ong Tiong Tjoei).
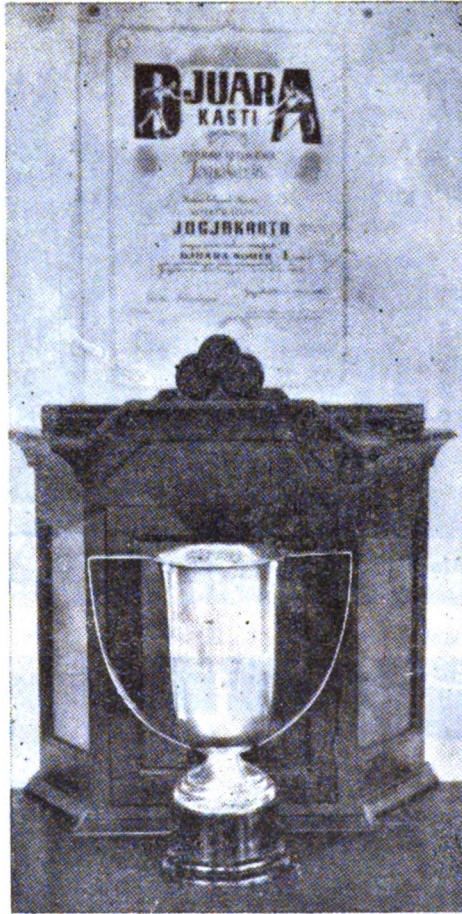
Piala beredar dan idjazah bagi djuara kasti, di Daerah Istimewa Jogjakarta.

Regu kasti Jogjakarta jang telah dapat menggondol djuara kasti ***Pon II.***

Gedung Perpustakaan Negara dan Perpustakaan Hatta Foundation di Malioboro 85, merupakan sumber ilmu pengetahuan bagi masjarakat Jogjakarta.

Kepala Perpustakaan Negara, Patah, dimedja pimpinan.
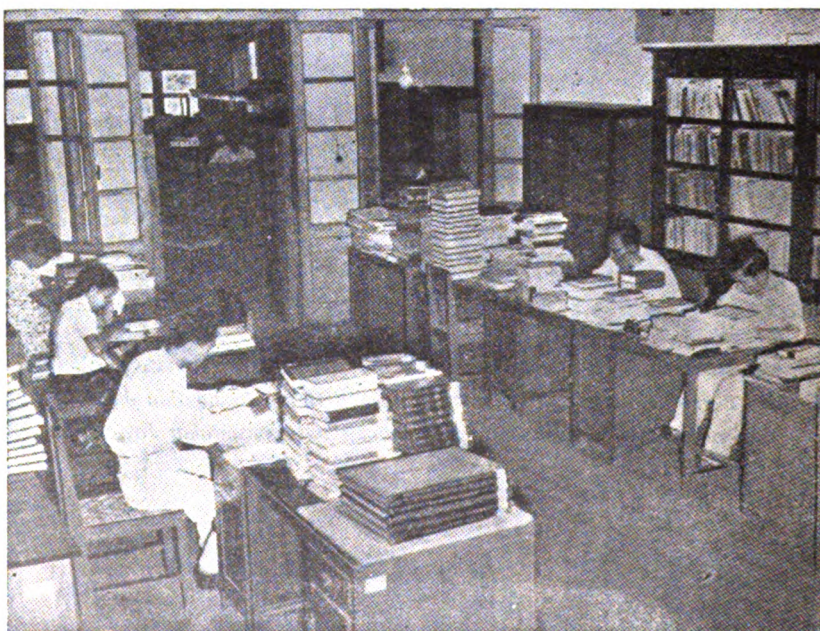
Para pegawai Perpustakaan Negara sedang sibuk bekerdja.

Ruang tempat buku-buku.

Para pegawai sedang melajani para pembatja, buku-buku mana jang dikehendaki.
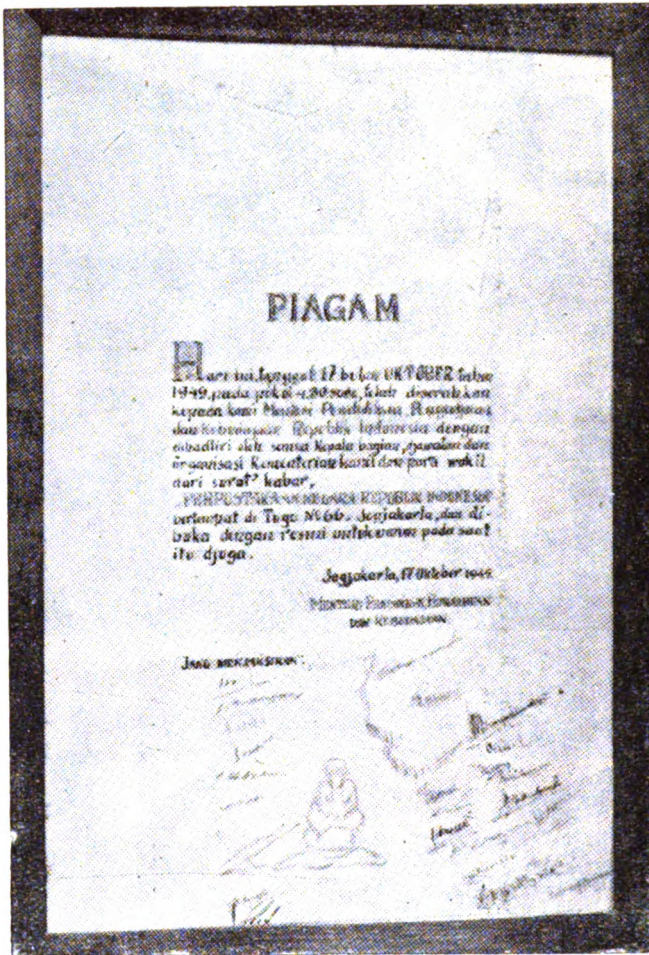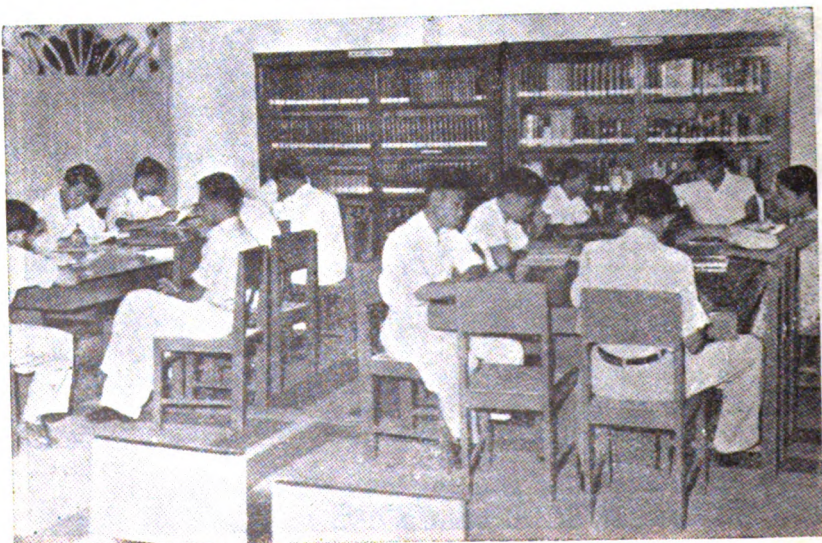
Pendapa Agung Taman Siswa di Wirogunan.
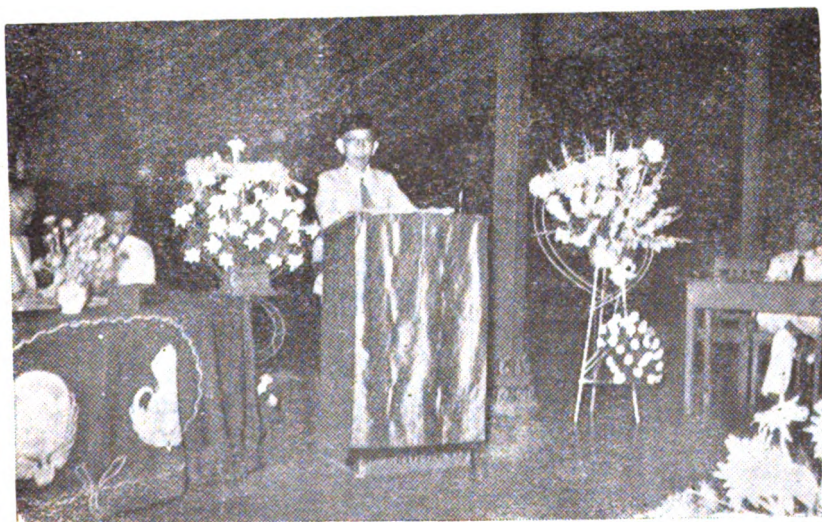
Ki Hadjar Dewantara sedang menguraikan azas-azas Taman Siswa dalam Resepsi Rapat Besar Umum Taman Siswa.

Gamelan Sekaten jang diletakkan di „Pagongan" dimuka mesdjid besar Jogjakarta, tiap tahun sekali dibunjikan.

„Gunungan" pada upatjara grebeg di Jogjakarta.
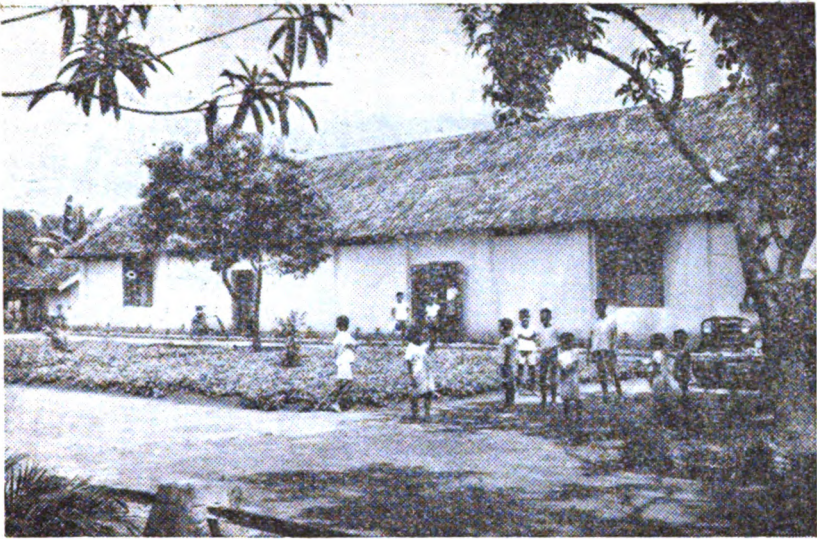
Gedung Wilasa Pradja di Gowongan.
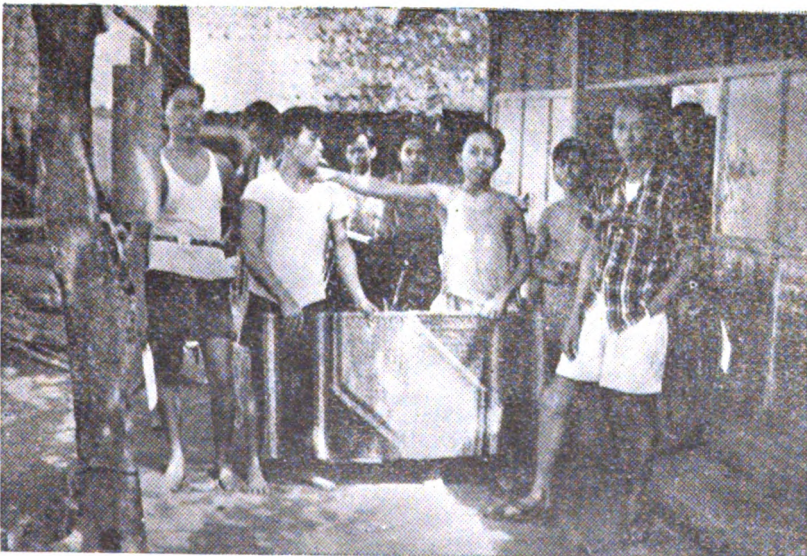
Para pemuda bekas pedjuang didalam usahanja dapat mendirikan perusahaan kesed.

(Gambar Wim.)

Pandu-pandu sedang berkemah.

Keluarga R. R. I. Jogjakarta sedang berziarah dimakam Dr. Abdulrachman Saleh (Pak Karbol), salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia.
(Gambar R. R. I.)

PENJELENGGARA BUKU PERINGATAN 17 AGUSTUS 1953

Buku ini diselenggarakan oleh sebuah Panitya, jang disusun sebagai berikut :

Ketua	:	Sdr. R.M. Darjono
Sekretaris I	:	Sdr. Rijadi
Sekretaris II	:	Sdr. Muchtadi

Anggauta-anggauta Redaksi :

Bab I, II, III	:	Sdr. Toekidjo Handojo
Bab IV	:	Sdr. Soedomo Bandjaransari
Bab V	:	Sdr. Soeleiman Widyoatmoko
Bab VI	:	Sdr. R.W. Dwidjosoegondo

Panitya Pemeriksa :

Ketua	:	Sdr. Soendoro
Sekretaris	:	Sdr. Trisno Djojosuwarno
Anggauta-anggauta	:	Sdr. Soekabat
		Sdr. Satmoko

Tjatatan :

Pimpinan sehari-hari oleh Ketua Panitya semula diserahkan kepada Sdr. Probosoeprodjo, tetapi berhubung dengan kepindahannja, maka Sdr. Moedjono Sosrodirdjo ditundjuk sebagai penggantinja.